



BIANGLALA BUDAYA

REKAM JEJAK 95 TAHUN
KONGRES KEBUDAYAAN
1918-2013

NUNUS SUPARDI

Pangantar
Prof. Dr. H.A.R. Tilaar

2013

BIANGLALA BUDAYA

REKAM JEJAK 95 TAHUN
KONGRES KEBUDAYAAN
1918-2013

NUNUS SUPARDI

Pangantar
Prof. Dr. H.A.R. Tilaar



DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2013

BIANGLALA BUDAYA
Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan
(1918-2013)

Copyright@Nunus Supardi, 2013

Sampul : Bayu Isworo
Tata letak : Bayu Isworo
Penyunting Bahasa : Dendy Sugono

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)
BIANGLALA BUDAYA
Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan
(1918-2013)
ISBN: 978-602-17669-1-0

**UNTUK MEMPERINGATI
95 TAHUN KONGRES KEBUDAYAAN
(1918--2013),
MENUJU KEMAJUAN BUDAYA BANGSA**

PRAKATA

Selama ini kalau berbicara tentang Kongres Kebudayaan (KK), perhatian orang lebih tertuju pada KK yang diselenggarakan sesudah Indonesia merdeka. Belum pernah terdengar pembicaraan bahwa sebelum Indonesia merdeka juga pernah diselenggarakan kongres yang sama. Termasuk di kalangan budayawan dan seniman, peristiwa budaya itu tidak banyak yang memperbincangkannya. Tahun 1994 dalam buku berjudul “Dr. KRT Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa 1879-1952” disebut tentang penyelenggaraan dan keterlibatan dr. Radjiman dalam Kongres Kebudayaan Jawa tahun 1918. Tahun 2001 ketika diselenggarakan pameran foto yang diberi judul “Java Instituut dalam Foto”, di dalam buku katalog yang disusun oleh Jaap Erkelens, ada tulisan singkat beserta beberapa foto mengenai kongres-kongres yang diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka. Tulisan singkat itu mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang isi dari kongres itu. Ternyata semua kegiatan itu terekam dengan baik dalam majalah “Djawa” dan bahkan untuk KK yang pertama telah diterbitkan dalam bentuk buku prosiding kongres secara lengkap. Data mengenai penyelenggaraan kongres itu sebagian tersimpan di perpustakaan Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

KK pertama diberi nama *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, atau *Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa*. Kongres pertama diselenggarakan tahun 1918 di Surakarta. Gagasan untuk menyelenggarakan KK itu muncul dari seorang bumiputra, Mangkunegoro VII. Setelah KK pertama disusul oleh kongres-kongres berikutnya. Sebelum Indonesia merdeka telah berlangsung 7 kali kongres. Dengan demikian, KK pertama itu telah menjadi motor penggerak diselenggarakannya kongres-kongres berikutnya hingga Indonesia merdeka. Kongres kebudayaan terakhir diselenggarakan tahun 2008 di Bogor. Dengan demikian, sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 2008 telah berlangsung sebanyak 8 kali KK. Mengapa peristiwa budaya dan termasuk peristiwa bersejarah itu justru tidak pernah diperbincangkan orang? Mungkin karena kongres sebelum Indonesia merdeka dianggap belum memiliki arti penting bagi perkembangan kebudayaan bangsa. Atau karena kongres itu diselenggarakan pada masa penjajahan dan yang diperbincangkan baru mencakup kebudayaan Sunda, Jawa, Madura, dan Bali saja?

Terlepas dari masalah penting atau tidak penting, berbobot ataupun kurang berbobot, atau materi yang dibahas sudah luas atau belum, sebagai peristiwa budaya sepatutnya tidak dibiarkan tersembunyi dan tidak diketahui apa yang sesungguhnya telah terjadi. Setidak-tidaknya dari peristiwa itu kita dapat memahami dinamika pemikiran para pendahulu kita dalam memajukan kebudayaan bangsa, seperti halnya upaya yang dilakukan di bidang lain seperti bidang-bidang politik, agama, pendidikan dan ekonomi. Lebih-lebih kongres itu sendiri digagas dan dilaksanakan oleh kaum terpelajar bumiputra. Ini berarti mereka tidak hanya telah memiliki kesadaran berbangsa dalam arti ingin menjadi “satu bangsa merdeka”, tetapi juga telah memiliki kesadaran berkebudayaan dalam arti telah memikirkan tentang konsep, kebijakan, dan strategi untuk menyongsong masa depan kebudayaannya. Mereka tidak hanya

memikirkan masalah kebudayaan suku bangsa Sunda, Jawa, Madura, dan Bali, tetapi sudah mengarah pada pemikiran kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia. Bila peristiwa itu dibandingkan dengan yang terjadi di bidang bahasa mungkin tidak terlalu berbeda jauh. Pada masa sebelum Indonesia merdeka masalah bahasa juga pernah diperbincangkan dalam kongres. Tahun 1938, 7 tahun sebelum Indonesia merdeka di Surakarta atas inisiatif kaum terpelajar telah dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres itu telah dicatat dan diakui sebagai Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Banyak orang mengetahui tentang hal itu, terutama kalangan seniman, budayawan dan ahli bahasa bahkan pelajar. Mengapa hal yang sama tidak berlaku pada Kongres Kebudayaan?

Setelah selesai mengumpulkan data penyelenggaraan Kongres Kebudayaan dan kemudian diterbitkan dengan judul "**Kongres Kebudayaan 1918-2003**" tahun 2007, timbul niat penulis untuk merevisi buku tersebut dengan memasukkan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008 di Bogor. Dalam perjalanan melakukan pengumpulan data, ditemukan banyak data penyelenggaraan kongres-kongres lainnya seperti kongres: Pancasila, kebudayaan daerah, bahasa, linguistik, sastra, kesenian, sejarah, arkeologi, antropologi, kebatinan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kesemuanya itu merupakan unsur dari kebudayaan sehingga juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah kebudayaan bangsa. Selain itu, setelah reformasi kecenderungan masing-masing suku bangsa untuk menyelenggarakan kongres sendiri meningkat, seperti kongres-kongres kebudayaan: Jawa, Sunda, Minangkabau, Madura, Bali, Banjar, Aceh, dsb. Di bidang bahasa telah berlangsung kongres bahasa Aceh, Lampung, Madura, Cirebon, Tegal, Makassar, Gorontalo dsb. Di bidang sastra telah berlangsung kongres Sastra Indonesia, Sastra Jawa, kongres Cerita Pendek Indonesia, dsb. Data itu terus berkembang dan sampai dengan tahun 2013 terkumpul sekitar 221 kali kongres dan konferensi kebudayaan selama 95 tahun mulai dari KK pertama 1918 sampai dengan 2013. Tujuan utama penulisan buku ini selain memperingati 95 tahun berlangsungnya KK pertama juga ingin mengangkat dan memperkenalkan berbagai kongres sebagai peristiwa budaya yang selama ini masih terabaikan. Kongres ataupun konferensi kebudayaan sebagai peristiwa budaya masih luput dari perhatian kita baik mengenai makna semua keputusan kongres maupun tindak lanjut sebagai bentuk realisasi keputusan kongres. Banyak sekali ide, gagasan, saran, pendapat yang pernah dilontarkan dalam kongres dari para pendahulu kita yang dapat dijadikan bahan renungan dalam menyusun konsep, kebijakan, dan strategi pemajuan kebudayaan di masa-masa selanjutnya. Melalui penghimpunan data semua kegiatan kongres dan konferensi yang pernah berlangsung diharapkan peristiwa-peristiwa budaya itu dapat diakui sebagai peristiwa budaya yang bersejarah. Sebagai contoh dalam buku "Sejarah Kebudayaan Indonesia" 8 jilid yang terbit tahun 2009, perihal KK tidak masuk sebagai bagian dari sejarah kebudayaan Indonesia. Satu-satunya kongres yang disebut dalam buku yang membahas tentang "Bahasa, Sastra dan Aksara" adalah Kongres Bahasa. Itupun hanya terbatas pada Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dan II (1954). Yang agak mengherankan, ada penjelasan di dalam buku itu bahwa Kongres Bahasa Indonesia III (1978) dan seterusnya tidak dimasukkan sebagai peristiwa budaya yang bersejarah, alias belum menjadi sejarah. Bunyi lengkap penjelasan itu sebagai berikut: "*Ihwal Kongres Bahasa III (maksudnya kongres 1978) dan seterusnya tidak dijabarkan di sini,*

karena pertemuan-pertemuan itu belum lagi menjadi sejarah, melainkan merupakan bagian dari pengalaman kita sekarang". (Akhadiati Ikram (Editor Tema), 2009: hal.16) Apa betul Kongres Bahasa Indonesia, 1978, 1983, 1988, 1991 dst. belum menjadi sejarah? Lalu sebatas waktu berapa tahun statu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam sejarah?

Memang, masuk ke dalam buku sejarah atau tidak, KK tetap sebagai peristiwa sejarah yang penting. Seperti dikatakan oleh Putu Wijaya, dalam bukunya yang berjudul *NgEH*, bahwa sebuah peristiwa bisa menjadi penting kalau dia mendapat ekspos. Akan tetapi sebuah peristiwa yang penting tidak dengan sendirinya jadi tidak penting kalau tidak diekspos. Peristiwa budaya meskipun tidak diekspos menurut Putu akan tetap saja penting. Meskipun peristiwa budaya itu telah berlangsung lama dan tidak diketahui banyak orang, tetapi akhirnya suatu saat akan diakui sebagai peristiwa budaya yang penting, karena peristiwa budaya itu lebih merupakan pengalaman spiritual. Meskipun tanpa publikasi dia bisa menunggu waktu. Dia akan merambat terus perlahan-lahan, membangun sesuatu di dalam diri manusia, kadangkala tanpa disadari oleh manusianya sendiri, sampai pada suatu saat sejarah itu akan "mendusin, terkejut dan buru-buru mencatatnya, kemudian diakui sebagai salah satu prasasti penting" (Putu Wijaya, 1997: hal. 47)

Sesuai dengan tujuan penulisan buku ini, maka judulnya menjadi "***Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013)***". Buku ini pada dasarnya merupakan himpunan yang menggambarkan secara singkat tentang tujuan, tema, kapan, dan di mana kongres berlangsung serta hasil-hasilnya. Selain itu, juga dipaparkan mengenai hubungan "benang merah" antara Kongres Kebudayaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka serta dengan kongres-kongres ikutan lainnya seperti disebut di atas. Keseluruhan kongres itu setelah dirangkai dapat diibaratkan telah membentuk "bianglala" atau pelangi yang indah menggambarkan pergulatan pemikiran budayawan, seniman, dan kaum terpelajar bumiputra sebelum Indonesia merdeka hingga kini tentang konsep, kebijakan, dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa dari tahun ke tahun selama 95 tahun. Di dalam buku ini sengaja dimasukkan pula rekam jejak Kongres Kebudayaan Melayu dan Kongres Bahasa Melayu yang diselenggarakan oleh Negara tetangga, Malaysia. Sebagai diketahui hubungan antara kebudayaan termasuk bahasa Melayu di Indonesia dan di Malaysia sangat dekat karena secara geografi budaya kedua bangsa itu merupakan satu rumpun. Seperti dikatakan oleh Dr. Rais Yatim sebagai pemakalah pada Kongres Diaspora Indonesia 2013 di Jakarta: "*Saya ke mari untuk bersama-sama menyatakan bahawa kita satu. Kita satu dalam arena sejarah, budaya dan cara hidup yang seharusnya tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain*" (Dr. Rais Yatim, 2013:4).

Dalam penyajiannya, isi buku ini dibagi menjadi 5 Bagian yang masing-masing bagian dilengkapi dengan daftar isi sebagai berikut.

1. **BAGIAN I** berjudul "**KONGRES KEBUDAYAAN**". Pada bagian ini paparan dimulai dari KK Masa Penjajahan (1918-1945) mengenai latar belakang penyelenggaraan KK pertama 1918 (penggagas, tema, pemakalah, dan kesimpulan) disambung dengan uraian kongres-kongres berikutnya: 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, dan 1937. Paparan berikutnya berisi gambaran singkat KK sesudah Indonesia merdeka, dimulai

dari Masa Awal Kemerdekaan (1945-1965), Masa Pembangunan (1969-1998) dan Masa Reformasi (1998 hingga sekarang). Secara berurutan paparan dimulai dari KK 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1991, 2003, dan 2008.

2. **BAGIAN II**, berjudul **“KONGRES PANCASILA, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DANDIASPORA INDONESIA”**. Dalam bagian ini dipaparkan hasil-hasil Kongres Pancasila 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. Isi paparan antara lain mengenai latar belakang penyelenggaraan kongres dan rekomendasi kongres. Pada bab ini juga dipaparkan hasil perbincangan mengenai masalah pendidikan dan kebudayaan, termasuk di kalangan generasi muda. Selain itu, juga dipaparkan mengenai penyelenggaraan Kongres Diaspora Indonesia yang telah berlangsung 2 kali, yakni tahun 2012 dan 2013. Selain membahas aspek-aspek sosial, ekonomi, diplomasi, teknologi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kongres ini juga membahas masalah pengenalan kebudayaan di mancanegara.
3. **BAGIAN III**, berjudul **“KONGRES KEBUDAYAANDAERAH DAN KONGRES LAINNYA”**. Bagian ini berisi gambaran tentang kongres-kongres yang berkaitan dengan kebudayaan seperti kongres: Kebudayaan Daerah (Jawa, Sunda, Bali, Madura, Banjar, Minangkabau, dsb), sejarah, arkeologi, antropologi, kesenian, perpustakaan, perbukuan, dll. Pada bagian ini juga dipaparkan mengenai Kongres Kebudayaan Melayu yang diselenggarakan oleh pemerintah Malaysia yang mempunyai hubungan sejarah dengan keberadaan budaya Melayu di wilayah Republik Indonesia.
4. **BAGIAN IV**, berjudul **“KONGRES BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH”**. Pada bagian ini dipaparkan seluruh kongres bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang pernah berlangsung. Juga dimasukkan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang diselenggarakan oleh pemerintah Malaysia yang sebagaimana kita ketahui bahasa Indonesia berakar pada bahasa Melayu-Riau.
5. **BAGIAN V**, berjudul **“CATATAN REKAM JEKAK”**. Setelah menjelajahi perjalanan selama 95 Kongres Kebudayaan beserta kongres-kongres lainnya, pada bagian ini dipaparkan mengenai “benang merah” yang menghubungkan antara kongres sebelum Indonesia merdeka dan sesudah merdeka. Juga secara sekilas dipaparkan mengenai realisasi dari keputusan dan rekomendasi kongres. Sebelum seluruh paparan ditutup dengan kesimpulan, dipaparkan secara singkat mengenai arti dan makna KK sebelum Indonesia merdeka dalam menumbuhkan kesadaran berbudaya bangsa dan sebagai tonggak sejarah bagi penyelenggaraan KK maupun sebagai peristiwa sejarah kebudayaan bangsa. Beberapa kesulitan dalam menghimpun data akhirnya sedikit dapat teratasi berkat bantuan berbagai pihak. Berkat bantuan rekan-rekan di Museum Sonobudoyo, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPNST) Bandung, BPNST Pontianak, BPNST Banda Aceh, Balai Bahasa Aceh, Balai Bahasa Jawa Timur, Balai Bahasa Lampung dan Aceh, Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda (LBSS), Dinas Kebudayaan Bali, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan, Lembaga Sensor Film, Badan Kerja sama Kesenian Indonesia (BKKI) Jakarta, Lingkar Budaya Indonesia (LBI) saya ucapkan terima kasih. Kepada Ketua Lembaga Sensor Film, Dr. Mukhlis PaEni dan Kepala Sekretariat LSF, Sdri. Pudji Rahayu, SH, MM beserta seluruh staf juga saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan untuk merealisasikan buku ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Prof. Dr. H.A.R.Tilaar atas kesedian beliau memberikan *Pengantar* pada buku ini. Juga kepada Dr. Dendy Sugono yang banyak memberikan saran mengenai isi dan judul. Secara khusus saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Adiwoyo, Sdr. Sudarmadji Damais, Sdr. Chandra Halim yang dengan sabar dan tulus membantu meluruskan dan menerjemahkan teks dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah membantu dalam penertiban buku ini. Terakhir, kepada isteriku beserta anak, cucu, dan menantu tercinta juga saya ucapkan terima kasih yang paling dalam karena selain terus memberikan semangat untuk menyelesaikan buku ini juga merelakan suami, ayah, dan kakek berbulan dan bertahun "menikahi" komputer dan buku.

Sekelumit himpunan rekam jejak Kongres Kebudayaan selama 95 tahun yang berlangsung dari sebelum dan sesudah Indonesia merdeka ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, terutama kelengkapan data dari beberapa kongres. Mudah-mudahan buku ini dapat membuat kita "mendusin" dan mengakui seluruh perjalanan KK dan berbagai kongres lainnya selama 95 tahun itu sebagai peristiwa budaya yang penting bagi sejarah kebudayaan Indonesia seperti yang dimaksud oleh Putu Wijaya dalam bukunya yang berjudul "NgEh".

Jakarta, 19 Agustus 2013.

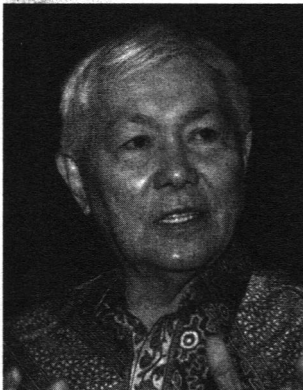
Penulis

Nunus Supardi
Pemerhati budaya/
Anggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan

PENGANTAR PROF. DR. HAR TILAAAR

Kebudayaan baru akan timbul jika kecerdasan budi dari rakyat kita sudah bertumbuh sempurna, masak dan tenteran sebab budaya itu anaknya budi. Adanya kultur baru tidak akan melenyapkan bagian-bagian dari kultur lama yang memang kuat dan berakar sangat dalam, lagipula dapat dikatakan sudah bersatu dengan jiwanya bangsa”.

Ki Hadjar Dewantara, Februari 1936.



Buku ***Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918—2013)*** hasil karya Sdr. Nunun Supardi bukan sekadar suatu buku sejarah melainkan merupakan bagian dari tonggak-tonggak budaya perjuangan kemerdekaan Indonesia yang patut dibaca dan dijiwai dalam upaya untuk membangkitkan kesadaran kolektif dari setiap warga negara Indonesia. Buku ini memaparkan buah pikiran para pemimpin sejak Kongres Kebudayaan I tahun 1918 sampai dengan kongres ke-15 pada tahun 2008. Di samping itu masih terdapat berbagai jenis kongres dan konferensi yang berkenaan dengan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang menunjukkan kebhinnekaam budaya dari bangsa Indonesia sebagai hasil budi dari seluruh rakyat Indonesia.

Daniel Patrick Moynihan mengemukakan dua postulat mengenai peranan kebudayaan dalam kemajuan (progress) suatu bangsa. Dia mengemukakan dua postulat yaitu: Postulat pertama, yang mengatakan: *“The central conservative truth is that it is culture, not politics, that determines the success of a society. The central liberal truth is that politics can change a culture and save it from itself”*. Baik pandangan konservatif maupun pandangan liberal mengenai peranan kebudayaan dalam kemajuan suatu bangsa adalah benar. Acemoglu dan Robinson dalam bukunya ***Why Nation Fail*** (2012) menunjukkan betapa kekuasaan (*power*) di dalam kehidupan umat manusia menentukan kemakmuran ataupun kemiskinan suatu bangsa. Yang jelas ialah kekuasaan politik demokratis yang memberikan kesempatan kepada anggota masyarakatnya

untuk berkembang akan menghasilkan kemajuan (*progress*). Masyarakat Indonesia pada Kongres Kebudayaan I tahun 1918 masih di bawah kungkungan kekuasaan kolonialisme. Kebudayaan bangsa Indonesia dipandang sebagai kebudayaan yang inferior dan apa yang datang dari Barat adalah yang terbaik. Kongres Kebudayaan 1918 mulai melahirkan kesadaran akan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Kesadaran akan kebudayaan sendiri melahirkan kebanggaan dan percaya diri dan dengan itulah bangsa dan rakyat telah melahirkan Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Revolusi Kemerdekaan tahun 1945.

Pada tanggal 23—25 April 1999 diorganisasikan oleh Harvard Academy for International and Area Studies, di American Academy of Arts and Sciences diadakan simposium terkenal bertemakan *Cultural Values and Human Progress* telah mengambil kesimpulan bahwa suatu bangsa atau masyarakat menjadi lebih maju terletak pada nilai-nilai kebudayaannya yang membentuk pandangan politik, ekonomi dan sosial. Hasil dari simposium yang terkenal itu dibukukan oleh Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, di dalam judul ***Culture Matters: How Values Shape Human Progress*** (2000).

Buku karya Sdr. Nunus Supardi menyajikan perjalanan kelahiran kesadaran bangsa yang multikultural yang pada akhirnya bertekad mewujudkan Sumpah Pemuda sebagai satu bangsa, satu tanah air Indonesia dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Secara terperinci buku ini sebagai salah satu tonggak budaya bangsa Indonesia dalam rangka mengembangkan kesadaran kolektif dari negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia, menyajikan:

1. Kebudayaan Indonesia merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan bangsa. Tidak mengherankan apabila banyak tokoh Boedi Oetomo menjadi penggagas Kongres Kebudayaan pertama
2. Kekayaan kebudayaan Nusantara dari budaya Jawa, Sunda, Madura dan Bali, dan budaya-budaya lain di Nusantara.
3. Kebudayaan bukan hanya mengenai seni dan tari atau bahasa tetapi meliputi berbagai aspek kehidupan manusia Indonesia yang tampak dalam berbagai kongres dan konferensi kebudayaan.
4. Hubungan yang erat antara pendidikan dan kebudayaan. Tokoh penggagas Kongres Kebudayaan antara lain Dr. Radjiman, Pangeran Prangwadono atau Mangkunegoro VII, Tjokroaminoto, Sutatmo dll.
5. Perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya di dalam bidang politik tetapi juga di dalam bidang ekonomi dan sosial serta kebudayaan. Kemerdekaan kebudayaan bukan berarti menolak segala sesuatu yang datang dari luar tetapi memilih apa yang baik dari luar untuk kemajuan kebudayaan sendiri (Ki Hadjar Dewantara).
6. Kebudayaan Indonesia sebagai salah satu tonggak budaya dalam membangkitkan kesadaran kolektif bangsa (Benny Hoed, 2013) adalah penting untuk membangun keindonesiaan, dalam membentuk identitas atau watak bangsa Indonesia dalam menghadapi gejolak “perubahan-global-tanpa jiwa” (George Ritzer).

Buku Bianglala Budaya merupakan mutiara bangsa yang perlu terus-menerus digosok sehingga semakin bersinar menuju kejayaan bangsa Indonesia masa depan. Nilai-nilai budaya yang telah melahirkan perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia perlu terus-menerus diperbaharui dan dikembangkan oleh para generasi muda maupun oleh pemimpin bangsa. Buku ini patut dibaca dan dipelajari oleh setiap warganegara Indonesia, para mahasiswa, para pakar ilmu politik, sejarah, kebudayaan, pendidikan dan para pemimpin politik bangsa.

Jakarta, 16 Juni 2013

H.A.R. Tilaar
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi para pembaca

Pertama-tama kami sampaikan segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku *Bianglala Kebudayaan, Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918 – 2013)*. Buku ini menyajikan dan memaparkan perjalanan sejarah Kongres Kebudayaan yang pernah berlangsung sebelum dan sesudah Indonesia merdeka.

Sejak 1918 ketika Kongres Kebudayaan pertama digelar, sudah 15 kali Kongres Kebudayaan diselenggarakan. Di luar itu terdapat 221 kegiatan kongres dan konferensi yang juga tak bisa dipisahkan dari kebudayaan seperti Kongres Bahasa, Kongres Sastra, dan sebagainya.

Buku ini pada dasarnya merupakan himpunan yang menggambarkan secara singkat tentang tujuan, tema, kapan, dan di mana kongres berlangsung serta hasil-hasilnya. Selain itu, dipaparkan juga mengenai 'benang merah' antara Kongres Kebudayaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka serta kongres-kongres yang berkaitan lainnya. Dengan membaca buku ini, masyarakat akan menjadi tahu pergulatan pemikiran budayawan, seniman, dan kaum terpelajar bumiputera sebelum Indonesia merdeka hingga kini tentang konsep, kebijakan, dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa dari tahun ke tahun.

Dapat diyakini, buku ini akan menjadi bacaan yang diperlukan masyarakat, utamanya para pemerhati dan praktisi serta peneliti kebudayaan, sekaligus menjadi *database* tentang aneka penyelenggaraan Kongres Kebudayaan yang pernah berlangsung di Indonesia selama kurun waktu 95 tahun. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat dan mereka yang berkepentingan untuk mengenal dan mencintai Kebudayaan Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, September 2013
Dirjen Kebudayaan.

Kacung Marijan
NIP. 196403251989011002

SAMBUTAN KETUA BADAN PEKERJA KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA (BPKKI)

Kebudayaan adalah wujud pergulatan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Romantika pergulatan kehidupan manusia ini, tak pernah habis diperbincangkan karena lingkungan dan tantangannya pun terus mengalami perubahan dan perkembangan. Salah satu forum yang secara berkala mengkaji dan memperbincangkan masalah kebudayaan adalah kongres Kebudayaan Indonesia yang telah berlangsung sejak kongres kebudayaan pertama tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 1918 hingga tahun 2013 ini.

Apa yang dilakukan oleh sekumpulan kaum cendekiawan bumiputra sejak sembilan puluh lima tahun yang lalu hingga sekarang ini, tidak lain dari sebuah tanggung jawab intelektual dalam upaya memuliakan kemanusiaan sebagai bangsa yang berbudaya. Forum kongres kebudayaan beserta unsur-unsurnya yang pernah berlangsung, tidak hanya puluhan kali tetapi bahkan telah ratusan kali.

Rekam jejak itu telah dihimpun dalam sebuah buku berjudul *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013)*. Buku yang ditulis oleh Sdr. Nunus Supardi ini menjadi sangat pentingnya artinya terutama untuk melihat secara deskriptif dinamika perjalanan bangsa dan kebudayaan Indonesia, melalui berbagai kongres kebudayaan, bersama sekian banyak kongres dan konferensi lainnya yang masih dalam kaitan dengan kebudayaan.

Walau demikian buku ini sesungguhnya tidak hanya memberi informasi kronologis tentang kongres kebudayaan sejak sebelum kemerdekaan hingga kini. Lebih dari itu, buku ini sesungguhnya adalah sebuah bunga rampai tentang konsep, kebijakan dan strategi yang sangat berguna sebagai bahan masukan dalam memajukan kebudayaan bangsa sesuai amanat Pasal 32 UUD 1945. Dengan mengkaji berbagai kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh setiap kongres dan konferensi yang terdapat dalam buku ini kita akan lebih arif untuk bertanya pada diri sendiri: Sejauh manakah amanat itu telah dilaksanakan?

Selamat membaca.

Jakarta, 15 September 2013

Dr. Mukhlis PaEni
Ketua BPKKI

DAFTAR ISI

Prakata	iv
Pengantar Prof. Dr. HAR Tilaar	ix
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	xii
Sambutan Ketua Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI)	xiv
Daftar Isi	xvi
Daftar Tabel	xxi
BAGIAN 1 KONGRES KEBUDAYAAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Pengertian Kongres	4
C. Sekilas Kebudayaan Masa Penjajahan	7
D. Ragam Penyelenggaraan Kongres	11
E. Peristiwa Sejarah yang Terpinggirkan	12
BAB II KONGRES KEBUDAYAAN PRAKEMERDEKAAN	15
A. Kongres Kebudayaan 1918	15
B. Kongres Kebudayaan 1919	39
C. Kongres Kebudayaan 1921	43
D. Kongres Kebudayaan 1924	50
E. Kongres Kebudayaan 1926	52
F. Kongres Kebudayaan 1929	56
G. Kongres Kebudayaan 1937	62
BAB III KONGRES MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945-1965).....	69
A. JUMLAH DAN URUTAN KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA.....	70
B. PENYELENGGARAAN KONGRES KEBUDAYAAN	74
B.1. Kongres Kebudayaan 1948	74
B.2. Kongres Kebudayaan 1951	89
B.3. Kongres Kebudayaan 1954	105
B.4. Kongres Kebudayaan 1957	113

B.5. Kongres Kebudayaan 1960	118
BAB IV KONGRES KEBUDAYAAN MASA PEMBANGUNAN.....	125
A. TUNTUTAN MASYARAKAT	126
B. KONGRES KEBUDAYAAN 1991	128
BAB V KONGRES KEBUDAYAAN MASA REFORMASI	141
A. Kongres Kebudayaan 2003.....	142
B. Kongres Kebudayaan Indonesia 2008	183
BAGIAN 2 KONGRES PANCASILA, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN DIASPORA INDONESIA	205
BAB I PENDAHULUAN	207
BAB II KONGRES PANCASILA	211
A. Kongres Pancasila 2009	213
B. Kongres Pancasila II 2010	214
C. Kongres Pancasila 2011	216
D. Kongres Pancasila 2012	219
E. Kongres Pancasila V.....	221
BAB III KONGRES PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN	227
BAB IV KONGRES KEBUDAYAAN PEMUDA INDONESIA (KKPI)	233
BAB V KONGRES DIASPORA INDONESIA	239
A. Kongres Diaporan Indonesia I (2012)	241
B. Kongres Diaspora Indonesia II (2013).....	246
BAGIAN 3 KONGRES KEBUDAYAAN DAERAH DAN LAIN-LAINNYA.....	255
BAB I PENDAHULUAN	257
BAB II KONGRES KEBUDAYAAN DAERAH	261
A. Kongres Lembaga Kebudayaan Rakyat	261
B. Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM).....	262
C. Kongres Kebudayaan Aceh 2005.....	266
D. Kongres Kebudayaan Madura	267
E. Kongres Kebudayaan Bali I (KKB I), 2008.....	272
F. Kongres Budaya Banjar (KBB)	278
G. Kongres Budaya Kalimantan Barat	282
H. Kongres Kebudayaan Betawi, 2007.....	296
I. Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN).....	297
J. Kongres Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah	305

K. Kongres Masyarakat Banda, Maluku 2010	310
L. Kongres Masyarakat Adat Osing, Banyuwangi, 2011	311
BAB III BIDANG SEJARAH, ARKEOLOGI DAN EPIGRAFI	313
A. Kongres Sejarah	313
B. Kongres Arkeologi	319
C. Kongres Prehistori	324
D. Kongres Epigrafi 2001	324
BAB IV KONGRES BIDANG PERBUKUAN DAN PERPUSTAKAAN	325
A. Bidang Perbukuan	325
B. Bidang Perpustakaan	327
C. Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDII)	328
BAB V KONGRES BIDANG KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHAESA ...	331
A. Kongres Kebatinan	333
B. Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi 2012	337
BAB VI KONGRES BIDANG ILMU PENGETAHUAN	345
A. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional I 1958	345
B. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional II 1962	346
C. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional III 1981	346
D. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV 1986	346
E. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional V 1991	346
F. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VI 1995	346
G. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VII 1999	346
H. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VIII 2003	347
I. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IX 2007	349
J. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional X 2011	349
BAB VII KONGRES BIDANG KESENIAN	351
A. Konferensi Seni Tari Yogyakarta 1955	352
B. Kongres Kesenian Indonesia (KKI)	354
C. Kongres Pewayangan	374
D. Kongres Reog Ponorogo	381
BAB VIII KONGRES KEBUDAYAAN MELAYU	383
A. Kongres Kebudayaan Melayu 1958	384
B. Kongres Kebudayaan Melayu 1971	385
C. Kongres Kebudayaan Melayu II 2009	392
BAB IX KONFERENSI KEBUDAYAAN	399
A. Konferensi Kebudayaan Indonesia	399
B. Konferensi Nasional Kebudayaan Rakyat	403

C. Konferensi Internasional Budaya Daerah (KIBD)	403
D. Konferensi Internasional Renaissance Budaya Nusantara 2010.....	406
E. Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS)	408
F. Konferensi Internasional Kebudayaan Jawa (KIKJ) 2008	417
G. Konferensi Internasional Budaya Sunda Kuna 2010	423

BAGIAN 4 KONGRES BIDANG BAHASA DAN SASTRA 427

BAB I PENDAHULUAN 429

BAB II KONGRES BAHASA INDONESIA 433

A. Kongres Bahasa Indonesia I 1938	434
B. Kongres Bahasa Indonesia II, 1954	440
C. Kongres Bahasa Indonesia III 1978	450
D. Kongres Bahasa Indonesia IV 1983	461
E. Kongres Bahasa Indonesia V 1988.....	468
F. Kongres Bahasa Indonesia VI 1993	475
G. Kongres Bahasa Indonesia VII 1998.....	487
H. Kongres Bahasa Indonesia VIII 2003.....	493
I. Kongres Bahasa Indonesia IX 2008.....	503

BAB III KONGRES BAHASA DAERAH 515

A. Kongres Bahasa Sunda (KBS).....	518
B. Kongres Bahasa Jawa (KBJ).....	522
C. Kongres Bahasa Madura (KBM).....	531
E. Kongres Bahasa Aceh	535
F. Kongres Bahasa Makassar	536
G. Kongres Bahasa-bahasa Daerah Wilayah Barat di Lampung.....	538
H. Kongres Bahasa Cirebon	540
I. Kongres Bahasa Tegal	542
J. Kongres Internasional Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara	542
K. Kongres Internasional Bahasa dan Adat Gorontalo	543
L. Kongres Bahasa Kaili, 2011	544

BAB IV KONGRES SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 545

A. Kongres Komunitas Sastra Indonesia (KKSII)	546
B. Kongres Sastra Jawa (KSJ).....	550
C. Kongres Cerita Pendek (Cerpen) Indonesia (KCI).....	552

BAB V KONFERENSI BAHASA DAN SASTRA..... 557

A. Konferensi Sastra, 1939.....	557
B. Konferensi Bahasa dan Kesusasteraan Sunda, 1952.....	557
C. Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) 1964.....	558
D. Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) 1964	560
E. Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI)	561

F. Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah	563
G. Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK)	564
H. Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA)	571
I. Konferensi Internasional Sastra Arab.	575
J. Konferensi Internasional Tradisi Lisan	575
BAB VI KONGRES BAHASA MELAYU	581
A. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I 1952.	581
B. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu II 1954.	582
C. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III 1956	584
D. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV 1984	584
E. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu V 1998	585
F. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VI 2002	586
G. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VII 2006	586
H. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VIII 2011.	588
BAGIAN 5 CATATAN REKAM JEJAK	593
BAB I HUBUNGAN ANTARKONGRES	595
A. Hubungan tema dan pokok bahasan	595
B. Hubungan kongres kebudayaan dengan kongres lainnya	615
BAB II REALISASI HASIL KONGRES	629
BAB III RELEVASI KONGRES KEBUDAYAAN DENGAN KESADARAN BERBANGSA. . .	645
A. Kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa.	645
B. Kongres kebudayaan tonggak sejarah budaya bangsa	649
BAB IV PENUTUP.	657
DAFTAR BACAAN	685
INDEX	691

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Panitia Pengarah Kongres Kebudayaan 2003	143
Tabel 2	Jadual Acara Kk 2003	163
Tabel 3	Jadual Kongres Kebudayaan 2008	188
Tabel 4	Rekomendasi Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat III 2012	291
Tabel 5	Pembagian Seksi Kongres Bahasa Indonesia 1954	441
Tabel 6	Cuplikan Pokok Bahasan Kongres Kebudayaan Tahun 1918- 2008.	598
Tabel 7	Daftar Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan dan Kongres-Kongres Lainnya 1918-2013	616
Tabel 8	Data Jumlah Kongres dan Konferensi Kebudayaan Masa Reformasi 2000-2012	626
Tabel 9	Daftar Rekomendasi Tentang Kelembagaan dari Kongres Kebudayaan 1918-2008 Dan Realisasinya (Tentang Kelembagaan Dan Kepanitiaan) ..	629
Tabel 10	Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Negeri Provinsi Seluruh Indonesia	663
Tabel 11	Daftar Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Penelitian Arkeologi (Keadaan Sampai Dengan Tahun 2001)	666
Tabel 12	Daftar Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Bidang Kepurbakalaan (Keadaan Sampai Dengan Tahun 2012).	667
Tabel 13	Daftar Upt Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional (Keadaan Sampai Dengan Tahun 2003).	670
Tabel 14	Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kesenian (Keadaan Sampai Dengan Tahun 2003)	673
Tabel 15	Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Bahasa (Keadaan Sampai Dengan Tahun 2004)	676
Tabel 16	Daftar Jumlah Seluruh Museum di Indonesia Sampai Dengan 2012	678

Tabel 17	Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Perpustakaan (Keadaan Sampai Dengan Tahun 1999)	679
Tabel 18	Daftar Lembaga Perwakilan di Luar Negeri Bidang Kebudayaan	683

BAGIAN 1

KONGRES KEBUDAYAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Prof. Dr. Daoed Joeseof, peristiwa berdirinya Boedi Oetomo (BO) yang kemudian dikenal sebagai Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908 mengutamakan budi luhur (budi utama) sebagai dasar perjuangannya. Dasar perjuangan itu lahir sebagai hasil perpaduan antara semangat nasional yang mulai hidup bernyala dalam membasmi sebab pokok kemiskinan, yaitu penjajahan, dengan kesadaran intelektual tentang kemajuan nasional demi peningkatan kecerdasan anak pribumi. Caranya melalui pencerahan akal budi yang dimungkinkan sekali oleh pengembangan pendidikan dan budaya kemajuan. Jelas sekali betapa sepak terjang para pemuda-pelajar pendiri dan penggerak BO secara esensial memotori satu gerakan budaya, yang dengan sadar dan sengaja mengarahkan gerakan mereka ke arah (pembentukan) masa depan. Sebuah masa depan yang bermuara pada pembentukan satu negara-bangsa yang ketika itu masih disebut "Hindia-Belanda", dengan tidak membedakan asal-usul, keturunan, agama, dan keadaan kaya atau pun miskin.

Ternyata diperlukan waktu 20 tahun untuk menggenapi dan menyempurnakan gerakan angkatan 1908 tersebut. Pada 28 Oktober 1928 tampil satu gerakan budaya pula di Batavia, lagi-lagi digerakkan oleh sekumpulan pemuda-pemudi pelajar yang menurut naturnya disebut "Soempah Pemoeda". Melalui ikrar bersama itu mereka menyatakan tekad berupa pilihan kesatuan wilayah (bertumpah darah satu), pilihan kesatuan politik (berbangsa satu), dan pilihan kesatuan budaya (menjunjung tinggi bahasa persatuan) yang semuanya disebut "Indonesia". Peristiwa itu sekarang telah diakui sebagai tonggak kedua, setelah tonggak pertama yang ditandai dengan berdirinya BO 1908 dalam sejarah pematangan wawasan budaya ke arah kemerdekaan nasional (KOMPAS, 19/5/12).

Di tengah-tengah kaum terpelajar melancarkan gerakan kebangkitan bangsa yang oleh Prof. Daoed Joeseof disebutnya sebagai „gerakan kebudayaan“ itu adalah satu peristiwa yang benar-benar merupakan suatu "gerakan budaya", dalam arti suatu peristiwa yang digerakkan oleh sekumpulan kaum muda-mudi terpelajar untuk memperjuangkan masa depan kemajuan kebudayaan bangsanya. Pada tahun 1918

mereka sepakat untuk menolak keinginan Batavia untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa dan menggantinya dengan menyelenggarakan Kongres Kebudayaan (KK), tepat sepuluh tahun setelah berdirinya BO dan sepuluh tahun sebelum Sumpah Pemuda.

KK pertama diberi nama **Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling**, atau *Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa*. Kongres pertama diselenggarakan tahun 1918 di Surakarta. Gagasan untuk menyelenggarakan KK itu muncul dari seorang bumiputra, Mangkunegoro VII. Setelah KK pertama disusul oleh kongres-kongres berikutnya. Kongres pertama itu telah menjadi motor penggerak diselenggarakannya kongres-kongres berikut. Sebelum Indonesia merdeka telah berlangsung 7 kali kongres (1919, 1921, 1924, 1926, 1929 dan 1937).

KK pertama sebelum Indonesia merdeka juga menjadi motor penggerak diselenggarakannya kongres-kongres berikutnya setelah Indonesia merdeka. Kongres kebudayaan terakhir diselenggarakan tahun 2008 di Bogor. Dengan demikian sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 2008 telah berlangsung sebanyak 8 kali KK (1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1991, 2003 dan 2008). Selain itu juga telah mendorong diselenggarakannya kongres-kongres kebudayaan daerah, bahasa Indonesia dan daerah, sastra Indonesia dan daerah, kesenian, sejarah, arkeologi, prehistori, ilmu pengetahuan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dll.

Selain KK tahun 1918 menjadi motor penggerak berlangsungnya KK berikutnya, juga telah mendorong berlangsung kongres yang membahas unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, sastra, kesenian, sejarah dsb. Semangat berkongres semakin berkembang setelah berlangsungnya sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik tahun 2001. Dinamika masyarakat suku bangsa untuk menyelenggarakan kongres cenderung merembet ke berbagai budaya dan unsur budaya. Masing-masing pemilik budaya daerah seperti berlomba untuk memperbincangkan kebudayaannya. Setelah reformasi telah berlangsung beberapa kali kongres kebudayaan daerah, seperti kongres kebudayaan daerah Madura, Bali, Jawa, Sunda, Banjar, Minangkabau dll. Di bidang bahasa daerah telah berlangsung Kongres Bahasa Aceh, Lampung, Cirebon, Tegal, Makassar, dsb.

Selain forum kongres, juga banyak berlangsung forum konferensi guna membahas masalah kebudayaan maupun unsur kebudayaan. Kesemuanya itu patut ditempatkan sebagai bagian dari perjalanan sejarah kebudayaan bangsa dan pada sejarah kongres kebudayaan khususnya. Dari balik semua kongres atau konferensi itu dapat dicatat mengenai latar belakang, siapa penggagasnya, materi yang diperdebatkan dan kesimpulan serta rekomendasi yang disepakati. Semua aktivitas beserta hasil-hasilnya itu patut dihimpun menjadi satu sehingga dapat ditarik benang merah hubungan pemikiran para budayawan, seniman, cendekiawan, dalam membincangkan mengenai konsep, kebijakan dan strategi untuk memajukan kebudayaan bangsa.

B. Pengertian Kongres

Sebelum menginjak pada paparan mengenai perjalanan 95 tahun Kongres Kebudayaan (KK) mulai tahun 1918-2013) beserta kongres dan konferensi lainnya yang terkait dengan kebudayaan, terlebih dahulu perlu diketahui apa makna kata “kongres”

dan “konferensi” itu. Kata “kongres” memiliki banyak makna, berasal dari kata bahasa Latin, “congressus”. Dalam bahasa Belanda ditulis “congres” dan dalam bahasa Inggris ditulis “congress”. Setelah berlaku Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kata itu diindonesiakan menjadi “kongres”. Dalam dokumen Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938, kata itu diindonesiakan menjadi “konggeres”. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS. Poewadarminta terbitan tahun 1965, seperti masih ragu-ragu kata itu ditulis dengan huruf “g” diletakkan dalam kurung menjadi “kong(g)eres”. (WJS. Poewadarminta, 1965: hal. 463).

Dalam *The Australian Concise Oxford Dictionary*, kata itu diartikan sebagai: “coming together, meeting; formal meeting of delegates for discussion, esp. of persons belonging to a particular body or engaged in special studies”. (George W. Turner/Ed., 1987: hal 214). Sementara itu, dalam *Webster’s New World College Dictionary* dijelaskan beberapa makna kata “kongres”, yaitu: *a meeting; a coming together; sexual intercourse; social interaction; an association or society; an assembly or conference; a formal assembly of representatives, as from various nations or churches, to discuss problems; any of various legislatures, especially the national legislature of a republic; the legislature of the US, consisting of the Senate and the House of Representatives (Perwakilan Rakyat di AS yang terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat: penulis); a session of the legislature; the body of the Senate and the House of Representatives during any of the two-year terms of Representatives* (Michael Agnes/Ed., 2000: hal. 307).

Secara khusus kata “congress” berarti *a meeting*, suatu pertemuan. Dalam kaitan dengan judul buku ini, makna kata “kongres” pada dasarnya adalah sebuah pertemuan (*a meeting*) atau pertemuan formal para wakil dari berbagai organisasi (*a formal assembly of representatives, as from various*). Tentu saja pertemuan atau pertemuan formal itu adalah pertemuan organisasi yang berkaitan dengan kebudayaan. Tujuan pertemuan adalah untuk membahas masalah-masalah (*to discuss problems*) yang dipandang penting, untuk mendapatkan kesepakatan mengenai cara untuk mengatasinya. Penjelasan yang hampir sama dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut kata “kongres” mengandung makna: “(rangkai)an pertemuan para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah.” (Anton M. Muliono/Penyunting, 1988: hal. 465).

Sementara itu, pengertian kata “konferensi” menurut *Webster’s New World College Dictionary* berarti: (1) *the act of conversing or consulting on a serious matter*; (2) *a formal meeting of a number of people for discussion or consultation*; (3) *a meeting of committees from both branches of a legislature to reconcile the differences between bills passed by branches* (hal. 305). Sementara itu menurut *An English-Indonesian Dictionary* karya Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, kata “conference” diterjemahkan menjadi konperensi dan kongres serta pertemuan. (hal. 137) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata itu ditulis “konferensi” mengandung arti rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai sesuatu masalah yang dihadapi bersama. Dapat pula berarti “permusyawaratan” dan “muktamar”. (KBBI, hal. 586) Bila disbanding-kan, antara kata “congress” dan “conference” secara umum memiliki arti yang sama, yaitu “*a meeting*”, suatu pertemuan untuk membahas (mendiskusikan) suatu masalah (*for discussion*).

Materi yang didiskusikan dapat menyangkut berbagai macam masalah, seperti

masalah organisasi pemuda, partai politik, agama, perempuan, sosial, organisasi profesi dan organisasi lainnya. Dapat pula mengenai “masalah tertentu” saja, seperti: masalah-masalah kesenian, kebudayaan, bahasa, sejarah, pendidikan, kehutanan, agama dan lain-lain. “Masalah tertentu” itu masih dapat dipersempit lagi, dengan cara membaginya berdasarkan tema, subtema dan topik yang dinilai penting dan mendesak untuk dibahas dalam forum kongres. Misalnya, kongres mengenai Pendidikan Kebudayaan, Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat; Seni dan Hak Cipta; Konsep, Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kebudayaan, dll. Peserta yang hadir dalam kongres (dalam bahasa Belanda disebut *congressist*) sangat bervariasi, tetapi biasanya adalah para ahli, wakil-wakil dari berbagai profesi dan organisasi atau perkumpulan.

Masih dalam kaitan dengan makna kata “kongres” dan “konferensi”, hasil kegiatan keduanya merupakan bagian yang terpenting. Hasil kongres dapat berbentuk keputusan, kesimpulan, rumusan, saran, usul, dan rekomendasi kongres. Peserta kongres memiliki kewenangan yang tinggi dalam memberikan pendapat dan memutuskan hasil-hasilnya. Hasil itu merupakan kesepakatan bersama para peserta, memiliki kekuatan moral dan politis sebagai penentu arah penyelesaian masalah. Hasil kongres menjadi acuan semua pihak, pemerintah maupun masyarakat. Biasanya, perkembangan hasil pelaksanaan keputusan kongres yang lalu, akan dilaporkan pada kongres berikutnya.

Kongres (Konferensi) Kebudayaan merupakan suatu peristiwa budaya yang amat penting maknanya bagi sebuah bangsa seperti Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa (*multietnik*), beranekaragam kebudayaan (*multikultur*), dan *multimental*¹ bagi kebudayaan itu sendiri dan di luar kebudayaan seperti bagai upaya memperkuat jati diri dan membangun persatuan bangsa Indonesia yang utuh, dll. Bangsa Indonesia yang lahir sebagai hasil kesepakatan dari seluruh suku bangsa memerlukan pula kesepakatan-kesepakatan dalam upaya mengembangkan kebudayaannya, baik untuk pengembangan kebudayaan bangsa (nasional) maupun kebudayaan suku bangsa (daerah). Forum kongres menjadi ajang yang sangat tepat karena di sana bertemu para budayawan, seniman, cendekiawan, wartawan, pemangku adat, tokoh masyarakat dari berbagai daerah untuk bersama-sama memperbincangkan kebudayaan.

Sesuai hasil Konferensi Kebudayaan Indonesia kedua yang diselenggarakan di Jakarta 12-14 April 1952 disepakati beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan KK. *Pertama*, pada tiap-tiap waktu yang tertentu diadakan KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL. *Kedua*, putusan-putusan KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL yang mengikat hanya diambil dengan suara bulat. *Ketiga*, KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL bersifat pengenalan, perbandingan dan pertukaran pendapat tentang bentuk-bentuk kebudayaan di Indonesia (Warta Kebudayaan/BMKN, 1954).

Penamaan kongres yang pernah berlangsung masih belum seragam. Pada kongres yang berlangsung tahun 1948, 1951, 1954 1957 dan 1960 disebut “Kongres Kebudayaan Indonesia”, sementara pada kongres tahun 1991 dan 2003 disebut “Kongres Kebudayaan” saja. Di kalangan masyarakat juga terjadi kerancuan, sehingga ada yang menyebutnya sebagai “Kongres Kebudayaan”, “Kongres Kebudayaan Nasional”, “Kongres Kebudayaan Indonesia” dan “Kongres Kebudayaan Nasional

1 Mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen, Kong Hu Tzu, kebudayaan Portugis, Belanda, Inggris, Jepang, India, China, dll.

Indonesia”.

Materi yang didiskusikan dalam KK dapat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pengertian, visi, konsep, strategi, kebijakan, program, dan kelembagaan, serta hal-hal lain yang ada kaitan dengan materi yang diperbincangkan. Di samping itu, ada masalah inti yang menurut Bung Hatta akan selalu muncul dalam setiap KK, yaitu mencari jawab pertanyaan “Ke mana arah kebudayaan kita?” (Majalah Indonesia, 1952: hal 23). Oleh karena itu amat tepat bila KK disebut sebagai “arena refleksi perjalanan bangsa”. Menurut *Kompas*, berbeda dengan kongres partai, bobot hasil KK bisa dilihat dari pengenalan dan pemetaan secara tegas dan rinci tentang historisitas bangsa. Ia merupakan catatan atas kegiatan kemanusiaan di segala bidang, terutama yang menyangkut bagaimana peradaban tidak berjalan mundur yang berarti sekaligus merosotnya mutu kemanusiaan kita sebagai bangsa. (*Kompas*, 23/10/2003)

Sesuai dengan judul buku, kongres dan konferensi yang dimasukkan ke dalam uraian hanyalah pertemuan-pertemuan yang membahas dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan atau unsur kebudayaan, yang disampaikan oleh pemrasaran atau pemakalah. Bukan kongres atau konferensi yang membahas tentang masalah organisasi kebudayaan atau unsur kebudayaan, membahas Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, pemilihan pengurus, atau rapat tahunan dsb.

C. Sekilas Kebudayaan Masa Penjajahan

Dalam perkembangannya kebudayaan di wilayah Nusantara telah mendapatkan pengaruh dari berbagai budaya asing. Selain mendapat pengaruh budaya Hindu, Budha dan Islam, kehadiran bangsa barat ke wilayah Nusantara, terjadilah pertemuan budaya dengan budaya barat. Dari pertemuan budaya itu secara perlahan-perlahan terjadi terjadi proses saling mempengaruhi. Dalam uraian ini perubahan itu difokuskan pada masa penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang.

Kehadiran bangsa Belanda dan Inggris ke negeri ini semula untuk berdagang tetapi akhirnya bergeser menjadi menjajah dengan membentuk pemerintahan tersendiri. Dengan pembentukan pemerintahan tersendiri itu posisi kerajaan atau kesultanan yang tumbuh di nusantara harus tunduk di bawah pemerintahan mereka. Dalam bidang kebudayaan para penjajah membentuk lembaga kebudayaan yang jejaknya masih ada hingga kini. Bahkan konsep tentang lembaga yang didirikan telah dijadikan model untuk membentuk lembaga dengan visi dan misi yang sama setelah Indonesia merdeka

Keberadaan wilayah Nusantara di persilangan antara negara-negara di belahan Barat dan Timur, Selatan dan Utara telah menjadi “titik temu” hubungan antarbangsa. Diawali dengan pertemuan bangsa-bangsa tetangga di benua Asia seperti India, Thailand, Arab, Persi, dan Cina. Disusul kemudian oleh kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dari Barat. Tahun 1942 bangsa Jepang datang menggantikan penjajah Belanda. Pertemuan antarbangsa itu telah meninggalkan jejak dalam berbagai aspek kehidupan yang masih dapat ditelusuri sejarahnya.

Kedatangan bangsa Barat di bumi Nusantara yang pada awalnya untuk berdagang akhirnya berubah jadi menjajah. Mata dagang yang terkenal saat itu adalah rempah-rempah terutama cengkeh dan buah pala, selain kapur barus dari Sumatera

yang diminati oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah. Komoditi cengkeh dan pala paling dicari bangsa Eropa sehingga di kalangan mereka disebutnya sebagai mata dagang “*gold and spices*”. Dua komoditi itu menjadi rebutan. Emas (*gold*) dibeli dari Afrika, rempah-rempah dari “*Indias*” dan dari suatu tempat yang mereka sebut “*as ilhas de cravo*” yang mengandung makna “rempah-rempah yang tempatnya menjadi sasaran penjelajahan lautan”.(Paraminta R. Abdurrachman, 2008, hal. 228). Ini berarti, mata dagang “rempah-rempah” dalam bentuk cengkeh dan pala yang terkenal itu belum diketahui tempat asal yang sebenarnya. Bangsa Barat menda-patkan barang-barang itu dari pedagang Cina yang selama berabad-abad memang merahasiakan, sebelum mereka datang dan mengetahui bahwa barang itu berasal dari kepulauan Maluku. Dengan cara demikian eksportir cengkeh dimonopoli oleh Cina dan Sri Langka” (Paraminta R. Abdurrachman, 2008, hal. 122).

Persaingan dagang antara Portugis, Spanyol dan Belanda di wilayah Nusantara berlangsung sejak tahun 1500-an. Armada dagang Portugis mendarat pertama di Maluku tahun 1511. Setelah dua tahun kedatangannya, Sultan Ternate memberikan hak monopoli kepada Portugis. Tetapi setelah mendarat kapal dagang Spanyol (1521) di Maluku, hak monopoli dipindahkan ke Spanyol karena negara ini berani membayar harga cengkeh dua kali lipat dari pedagang Portugis. (Adnan Amal M, 2009: hal.25) Selanjutnya, tahun 1601 Portugis dikalahkan Belanda dan tahun 1603 Spanyol meninggalkan Maluku. (Adnan Amal M, 2009, hal. 44). Kehadiran bangsa Portugis selama 57 tahun, Spanyol selama 142 tahun di Maluku, Inggris selama 5 tahun (1811-1816), bangsa Belanda selama 350 tahun, dan kemudian digantikan oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun, masing-masing memiliki kebijakan politik yang berbeda-beda. Meskipun kehadiran Portugis, Spanyol, Inggris dan Jepang relatif singkat dibandingkan dengan penjajah Belanda tetapi pengaruh sistem pemerintahan dan kebudayaannya sedikit banyak masih membekas hingga sekarang.

Dengan kepergian Portugis dan Spanyol, Belanda menjadi pemegang hak monopoli perdagangan, tidak hanya wilayah Maluku tetapi mencakup seluruh Nusantara. Sesuai dengan sifat dagang, Belanda dengan segala cara dan strategi berupaya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan untung besar itu ada dua pilihan, yaitu mampu bersaing dengan pedagang lain atau menjadi pedagang tunggal alias memonopoli. Dalam perkembangan selanjutnya Belanda tidak memusatkan perhatian pada mata dagang rempah-rempah saja yang dimonopoli, tetapi juga berbagai tambang, hutan, pertanian dan perkebunan.

Perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perdagangan semakin lama semakin bertambah jumlahnya, sehingga terjadi persaingan antraperusahaan yang tidak sehat. Untuk menyatukan beberapa perusahaan milik Belanda yang saling bersaing itu pemerintah Belanda mengambil kebijakan untuk menjadikan satu perusahaan saja dan untuk itu didirikanlah *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (V.O.C) atau “Persekutuan Dagang Hindia Timur” pada tanggal 20 Maret 1602 dengan akte pendirian dari *Staaten General* (Parlemen Belanda).

Perkumpulan dagang VOC ternyata memiliki hak berdagang yang amat luas, tidak hanya wilayah Nusantara tetapi mulai dari Tanjung Harapan sampai selat Magellan, termasuk pulau-pulau Selatan Pasifik, Kepulauan Jepang, Sri Langka dan Cina Selatan. VOC juga diberi banyak kewenangan, seperti membentuk angkatan

perang, mengawasi para raja dari wilayah kegiatannya, menyatakan perang, menerima perdamaian, membuat perjanjian, serta memaksa raja tunduk kepada VOC. Selain itu juga kewenangan untuk membuat Undang-Undang, peraturan serta membentuk Pengadilan dan Mahkamah Agung (M. Adnan Amal, 2010, hal. 262).

Kehadiran bangsa Belanda di wilayah Nusantara dengan seperangkat kewenangan itu telah meninggalkan pengaruh besar di bidang kebudayaan. Pengaruh itu ada yang masuk secara alami tetapi tidak sedikit yang dengan tekanan terhadap segala unsur budaya bangsa. Sisa-sisa pengaruh itu hingga kini masih ada, baik terhadap tinggalan berupa benda budaya (*tangible cultural aspect*) budaya yang bersifat non-fisik atau tak benda (*intangible cultural aspect*), hasil penelitian, perlindungan, pengembangan maupun tinggalan dalam bentuk kelembagaan kebudayaan.

Salah satu contoh pengaruh yang berlangsung dalam bentuk tekanan itu dapat dilihat dari pembuatan surat perjanjian (Perjanjian Gianti) yang mengatur wilayah kekuasaan antara pihak Belanda dengan raja Pakoe Boewono VII dari Surakarta. Perjanjian itu membawa pengaruh besar terhadap tata pemerintahan di Jawa dan selanjutnya berdampak terhadap tata budaya Jawa. Akibat dari penandatanganan perjanjian itu disimpulkan oleh sejarawan Darsiti Soeratman "telah menyebabkan terjadinya kemerosotan kekuasaan dan pemerintahan keraton Surakarta selama satu abad". Dengan penandatanganan perjanjian itu membuktikan posisi raja sebagai pemegang kekuasaan menjadi lemah ketika menghadapi Pemerintah Hindia Belanda.

Sebaliknya, posisi Pemerintah Hindia Belanda sangat menentukan dalam kehidupan pemerintahan kerajaan. Merosotnya kekuasaan di bidang politik ini membawa pengaruh terhadap kedudukan sosial raja. Intervensi terhadap bidang itu semakin mendalam dan terus berjalan selama pemerintahan pengganti-penggantinya, dan akhirnya pada pemerintahan PB X kekuasaan dalam bidang pengadilan sepenuhnya jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda (1903). Akibat dari kebijakan Belanda itu Sunan lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada kemegahan dengan menyelenggarakan upacara dan pesta di keraton secara besar-besaran yang cenderung meniru budaya Belanda. Di samping itu, tindakan PB X dengan sangat sering bepergian ke luar daerah, menampakkan diri di muka umum, mendatangi tokoh-tokoh daerah, hanyalah merupakan suatu usaha untuk menunjukkan wibawa dan kebesarannya. (Darsiti Soeratman, 2000: hal. 396).

Kenyataan seperti itu tidak hanya terjadi di Kraton Kasunanan Surakarta. Hampir di seluruh kerajaan atau kesultanan kekuasaannya dilemahkan dengan memberlakukan perjanjian dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan pengekalan penjajahan. Tidak aneh bila kehidupan rakyat menjadi sengsara dan sebaliknya kehidupan pihak penjajah penuh dengan kemewahan. Politik diskriminasi diterapkan dengan ketat sehingga kehidupan masyarakat pribumi ditindas dalam segala hal. Orang bumiputra mendapatkan berbagai macam sebutan, seperti: "pribumi", "nonpribumi", "bumi-putra", "inlander" dihadapkan dengan sebutan "indo", "asing", "Timur asing" yang memang dengan sengaja dikembangkan sebagai bagian dari politik pembagian kelas antara penduduk asli dan pendatang, dalam hal ini kaum penjajah atau bangsa asing lainnya.

Masyarakat dibagi menjadi tiga kelas. Masyarakat kulit putih (Eropa) menempati posisi paling terhormat. Yang menduduki posisi yang terhormat kedua adalah

masyarakat Timur Asing, yakni orang-orang yang berkebangsaan non-Eropa seperti Cina, India dll. Kelas ketiga justru ditempati oleh masyarakat pribumi yang secara turun temurun dan berabad-abad mendiami wilayah Nusantara. Dengan bentuk kebijakan seperti itu memberikan pengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat dan perkembangan kebudayaan bangsa. Bila ada kaum pribumi yang "terpilih" mendapat kesempatan boleh mengikuti pendidikan, kaum pribumi itu dididik menjadi kebarat-baratan, tercabut dari akar kebudayaannya. Bahasa Belanda ditetapkan sebagai bahasa pengantar, dan dengan demikian bahasa lokal terpinggirkan. Dalam bidang kesenian, penyajian seni tradisional digantikan oleh kesenian Barat: bidang seni rupa, seni musik, seni suara, dan seni pertunjukan. Di bidang seni bangunan (arsitektur) banyak berdiri bangunan dengan gaya "kolonial" atau menurut Djoko Sukiman disebut gaya "Indis". (Djoko Soekiman, 1996). Yang dimaksud dengan gaya 'indis' disini adalah gejala percampuran antara gaya hidup aristokrat Jawa dengan gaya hidup orang Belanda di Hindia Belanda, yang mulai timbul subur pada abad ke-18 di Jawa yang tercermin dalam gaya perumahannya.

Muncul pula istilah "mooi indie" di dunia seni lukis. Pada mulanya istilah Mooi Indie pernah dipakai untuk memberi judul reproduksi sebelas lukisan pemandangan cat air Du Chattel yang diterbitkan dalam bentuk portfolio di Amsterdam tahun 1930. Istilah itu menjadi populer semenjak S. Sudjojono memakainya untuk mengejek pelukis-pelukis pemandangan dalam tulisannya pada tahun 1939. Dia mengatakan bahwa lukisan-lukisan pemandangan yang serba bagus, serba enak, romantis bagai di surga, tenang dan damai, tidak lain hanya mengandung satu arti: *Mooi Indie atau Hindia Belanda yang Indah*. (Milone, Pauline D. (1966-67): hal.427-436).

Pada masa pemerintahan penjajah Inggris yang singkat (1811-1816) dapat dikatakan kebijakan di bidang kebudayaan tidak jauh berbeda dengan pemerintah Belanda. Tradisi keilmuan yang telah berkembang di bangsa-bangsa Eropa oleh Gubernur Jenderal TS. Raffles dilanjutkan dan dikembangkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengganti nomenklatur BGKW menjadi *Literary Society*. Posisi lembaga *Literary Society* di pemerintahan berada di bawah Letnan Gubernur Jawa (*Lieutenant Governor of Java*), yang dijabat oleh Raffles. Misi lembaga ini dititikberatkan pada upaya melakukan penelitian, pencatatan, dan pemeliharaan kebudayaan untuk penyusunan buku sejarah. Lahirlah buku sejarah yang terkenal, *History of Java*, yang oleh John Bastin dan Bea Brommer disebut sebagai "mahakarya" yang berisi topografi Jawa yang benar-benar penting. (Thomas Stamford Raffles *The History of Java* /Terjemahan, 2008: hal. xi). Pada masa Raffles beberapa ahli mendapat tugas melakukan penggambaran, pencatatan dan penelitian terhadap peninggalan sejarah dan purbakala.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Inggris adalah memindahkan kantor BGKW dari Jl. Pintu Besar Selatan ke Jln. Majapahit, dekat gedung *Societeit Harmonie* (1815). Selama memerintah, kolonial Inggris tidak membangun museum kecuali hanya memindahkan kantor BGKW. Dalam bekerja Raffles telah memanfaatkan bantuan orang bumiputra sebagai nara sumber. Setelah Inggris menyerahkan ex-Hindia Belanda kepada Belanda sesuai Konvensi London 1814, kebijakan pengurusan kebudayaan yang telah diletakkan oleh Raffles dilanjutkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Prof. C.G.C. Reinward yang datang ke Jawa tahun 1816 di samping disertai tugas di bidang

kesenian dan pengetahuan (*kunst en wetenschappen*), juga di bidang kepurbakalaan (*oudheiden*).

Berbeda dengan kedatangan bangsa Barat, Jepang sebagai bangsa dan negara di benua Asia datang dengan cita-cita membangun imperium di benua Asia menjadi Asia Timur Raya. Bangsa Barat yang menjajah di negara-negara Asia dipukul mundur oleh Jepang. Politik penjajahan yang diterapkan oleh Jepang memang sangat keras. Dalam tempo tiga setengah tahun rakyat Indonesia dibuat menjadi sangat menderita baik fisik maupun batin. Rakyat dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Pemuda-pemuda dipaksa menjadi tentara, dilatih dengan disiplin yang keras. Tidak sedikit rakyat yang meninggal karena dihukum, dipaksa perang dan kerja rodi, sakit dan kelaparan. Tetapi dari balik segala penderitaan itu terselip suatu nilai positif bagi bangsa Indonesia. Kehadiran Jepang *“secara tidak langsung lebih membantu mendorong perkembangan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam bidang bahasa, drama, musik, seni rupa”*. (Pokok-Pokok Kebijakan Kebudayaan, 1973: hal. 10).

Di mata Sanoesi Pane tentara Dai Nippon *“sanggup mengenyahkan imperialis Belanda dan kita sekarang dapat kesempatan memperbaiki taman kebudayaan kita kembali.”* (E. Ulrich Kratz, 2000: hal.117). Sikap pemerintah Jepang yang ganti kebudayaan Barat telah menjadi pelajaran berharga dalam mengubah pola pikir rakyat Indonesia dari bangsa kuli, jongsos, dan inlander menjadi bangsa yang memiliki rasa percaya diri dan berani. Bangsa yang memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan kebudayaannya, bangkit menegakkan harkat dan martabatnya.

D. Ragam Penyelenggaraan Kongres

Menurut data yang berhasil dihimpun menunjukkan KK pertama diselenggarakan tahun 1918 di Surakarta. Setelah itu diikuti dengan kongres-kongres berikutnya, yaitu: KK tahun 1919 di Surakarta, tahun 1921 di Bandung, tahun 1924 di Yogyakarta, tahun 1926 di Surabaya, tahun 1929 di Surakarta dan tahun 1937 di Bali. Setelah Indonesia merdeka, KK pertama diselenggarakan tahun 1948 di Magelang, kemudian disusul tahun-tahun: 1951 di Bandung, 1954 di Surakarta, 1957 di Bali, 1960 di Bandung, 1991 di Jakarta, tahun 2003 di Bukittinggi dan tahun 2008, di Bogor.

Selain KK juga telah berlangsung berbagai kongres dari unsur kebudayaan, seperti: kongres bahasa, kongres kesenian, kongres sejarah, kongres arkeologi, dll. Juga telah banyak berlangsung kongres yang membicarakan masalah unsur kebudayaan yang lebih menyempit seperti: kongres cerita pendek Indonesia, perpustakaan, perbukuan, bahasa lokal (Cirebon, Tegal), pewayangan dll. Kongres Bahasa Jawa dan Sunda pertama telah berlangsung sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, yaitu tahun 1924. Setelah Indonesia merdeka Bahasa Sunda yang tergolong aktif menyelenggarakan kongres. Sampai sekarang telah berlangsung 9 kali kongres dan kongres pertama diselenggarakan tahun 1952, yang membuahkan berdirinya sebuah lembaga bernama Yayasan Bahasa jeung Sastra Sunda (YBSS) yang masih aktif hingga sekarang.

Selain forum kongres, juga telah beberapa kali diselenggarakan forum konferensi. Forum ini selain membahas kebudayaan juga ada forum konferensi yang membahas unsur kebudayaan (bahasa, sastra) dan bahkan membahas masalah yang lebih spesifik,

seperti konferensi linguistik, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) dll. Data yang terkumpul dari seluruh penyelenggaraan kongres dan konferensi kebudayaan yang telah berlangsung selama selama 95 tahun dari tahun 1918 hingga tahun 2013 mencapai jumlah 221 kali. Gambaran singkat mengenai tahun penyelenggaraan, bidang yang dibahas, tempat dan penggagas atau penyelenggaraanya dapat dilihat pada tabel 7 di Bagian V Bab I B, Tabel 7.

E. Peristiwa Sejarah yang Terpinggirkan

Selama ini perhatian orang terhadap KK sebelum Indonesia merdeka (1918) sebagai tonggak sejarah Indonesia tidak sebesar perhatian orang terhadap KK sesudah Indonesia merdeka dan kongres-kongres lain yang sama-sama diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka seperti: Kongres Boedi Oetomo (BO) tahun 1908, Kongres Pemuda 1926 dan 1928, Kongres Perempuan tahun 1928 dan Kongres Bahasa tahun 1938. Kongres-kongres itu tercatat sebagai peristiwa sejarah dan menjadi monumental hingga sekarang. Sementara itu, untuk KK sebelum Indonesia merdeka yang hasil-hasilnya terbukti menjadi penentu arah pengembangan kebudayaan bangsa, dalam buku-buku sejarah hampir tidak tercatat sebagai bagian dari sejarah kebudayaan bangsa. Banyak orang termasuk kalangan seniman, budayawan, maupun ahli kebudayaan tidak mengetahui bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka kaum terpelajar bumiputra juga sudah berpikir tentang hari depan kebudayaan bangsanya. Banyak keputusan kongres yang memiliki makna strategis dan politis, sehingga jejak realisasinya masih membekas hingga sekarang. Keputusan Pangeran Prangwadono untuk lebih baik memilih menyelenggarakan KK dan menolak instruksi Batavia untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa merupakan langkah yang berani. Langkah bersejarah itu telah menjadi motor penggerak diselenggarakannya kongres-kongres kebudayaan berikutnya hingga sekarang.

Tulisan yang memuat tentang KK sebelum Indonesia merdeka masih terbatas. Beberapa tulisan yang membicarakan KK sebelum Indonesia merdeka hanya beberapa judul saja. Dalam buku yang berjudul *Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa 1879-1952*, di sana hanya disinggung sedikit saja mengenai KK tahun 1918, terutama hanya mengulas keterlibatan Dr. Radjiman sebagai seorang tokoh pergerakan nasional dalam kongres itu. Selanjutnya dalam buku itu diuraikan mengenai peran kaum terpelajar lainnya seperti: Pangeran Mangkoenegoro VII, PA. Hadiwidjojo (Ketua Bale Agung Kraton Surakarta), RMA. Woerjaningrat (Ketua Pengurus Besar BO masa bakti 1916-1921, 1922-1925, 1933-1935), Dr. Hoesein Djajadiningrat dan lain-lain. Mereka tidak hanya terlibat di dalam penyelenggaraan kongres tetapi juga menjadi pemrasaran (Soebaryo Mangoenwidodo, 1994: hal. 62).

Dalam bukunya yang berjudul *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*, Djoko Soekiman menguraikan panjang lebar tentang munculnya kebudayaan yang berkembang dalam lingkungan sekelompok masyarakat di Hindia Belanda yang disebutnya sebagai kebudayaan Indis. Kebudayaan ini merupakan “pencerminan perwujudan” pertemuan antara kebudayaan Belanda dengan kebudayaan pribumi. Tetapi dalam uraian buku itu tidak disinggung mengenai berlangsungnya beberapa kali kongres, kecuali hanya disinggung

sedikit mengenai KK tahun 1921 di Bandung yang membahas tentang pendidikan seni (musik dan tari) di sekolah (Djoko Soekiman, 2000: hal. 85). Padahal, tema dan topik-topik yang dibi-carakan dalam beberapa kali kongres itu banyak menyinggung masalah yang dihadapi oleh pertemuan kebudayaan kedua bangsa yang berbeda, termasuk lahirnya kebudayaan yang mencerminkan peleburan unsur budaya Barat dengan unsur kebudayaan masyarakat pribumi (Timur).

Demikian pula halnya dengan sebuah tulisan yang mengulas tentang KK 1948, 1951, dan 1954, Sapardi Djoko Damono juga tidak menyinggung adanya KK sebelum Indonesia merdeka. Dalam tulisan itu secara khusus Sapardi mengulas perbantahan mengenai kebudayaan, dan di sana dinyatakan bahwa perbantahan itu telah berlangsung “*sejak beberapa puluh tahun sebelum kemerdekaan*”. Tetapi dalam uraian tentang pengertian “beberapa puluhan tahun” itu ia sama sekali tidak menyinggung perbantahan yang berlangsung pada KK sebelum Indonesia merdeka seperti tersebut di atas. Yang dimaksud dengan perbantahan oleh Sapardi hanya yang dilakukan oleh kalangan pemuda terpelajar pada masa Sumpah Pemuda tahun 1928 dan masa Pujangga Baru. (Muhadjir/Ed., 1987: hal. 1) Padahal, perbantahan itu telah dimulai sejak KK pertama tahun 1918. Demikian pula halnya dengan tulisan Eka Budianta. Meskipun judul tulisan yang diturunkan berbunyi *Dari Kongres ke Kongres*, tetapi Eka Budianta juga sama sekali tidak menyinggung KK yang diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka. (Eka Budianta, 1993: hal. 156-162).

Dalam KK tahun 2003 di Bukittinggi, Panitia menyebar angket untuk mengetahui wawasan peserta terhadap kongres yang pernah diselenggarakan, pengetahuan tentang hasil kongres dan manfaat dari kongres. Pada pertanyaan mengenai “kapan kongres kebudayaan I diadakan”, pilihan jawaban sama sekali tidak menyebut tahun KK sebelum Indonesia merdeka. Jawaban yang dapat dipilih ada tiga, yaitu tahun 1945, tahun 1948, atau tahun 1950. Ini berarti Panitia juga belum mengetahui bahwa sebelum Indonesia merdeka pernah ada kongres.

Melalui KK di Bukittinggi penulis mencoba memperkenalkan sekilas tentang KK sebelum Indonesia merdeka kepada peserta. Dalam sidang kelompok yang menyajikan makalah berjudul “*Sekilas tentang KK sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka: konsep, strategi dan kebijakan*”, peserta sidang kelompok baru mengetahui peristiwa itu. Informasi baru itu telah menjadi berita baik (good news) bagi surat kabar dan majalah yang meliput kegiatan kongres. Majalah Tempo menurunkan artikel khusus tentang KK sebelum Indonesia merdeka itu. Dalam edisi bahasa Indonesia Tempo menurunkan judul *Misi Budaya di Kapal Op ten Noort* dan dalam edisi bahasa Inggris dengan judul *Remembering the Op ten Noort's Cultural Voyage*.

Pembahasan agak mendalam tentang penyelenggaraan KK sebelum Indonesia merdeka ditulis oleh Wasino dalam tesisnya yang berjudul *Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran: Studi tentang Strategi Pemerintahan Tradisional dalam Menanggapi Perubahan Sosial (Akhir Abad XIX – Pertengahan Abad XX)*. Di dalam tesis yang ditulis untuk memenuhi persyaratan Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada tahun 1994 itu diulas mengenai peran Mangkunegoro VII dalam pengembangan kebudayaan Jawa, termasuk perannya mulai dari KK pertama tahun 1918, dan dalam lembaga Java Instituut. Buku yang lebih lengkap menyebut adanya KK sebelum Indonesia merdeka adalah yang ditulis oleh Jaap Erkelens, berupa sebuah katalog

pameran foto berjudul *Java Instituut dalam Foto*, tahun 2001 yang lalu. Buku ini menjadi pembuka kunci “peti sejarah KK sebelum Indonesia merdeka” yang selama tersimpan rapat.

Setelah tonggak sejarah kebudayaan itu diperkenalkan pertama kali pada KK 2003 di Bukittinggi, kini peristiwa budaya itu mulai dikenal orang. Dalam berbagai artikel dan buku mulai dikutip dan diulas berbagai hal berkenaan dengan KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Beberapa buku yang mulai mengutip peristiwa budaya itu antara lain, dalam buku “Mengindonesia: Entitas dan Identitas Bangsa” (2007) karya Prof. Dr. H.A.R. Tilaar dari halaman 146-152 berisi kutipan tentang KK sebelum Indonesia merdeka. Demikian pula Yudi Latif dalam bukunya “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila” secara panjang lebar menyebut tentang Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka. Yudi Latief menyepakati kesimpulan yang menyatakan bahwa berlangsungnya KK pertama tahun 1918 menunjukkan tumbuhnya kesadaran budaya bangsa yang berjalan seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa. Kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia juga dipandang sebagai kemerdekaan kebudayaan. (Yudi Latif, 2011: 353).

Peran Kongres Kebudayaan dalam memberi warna tersendiri bagi sejarah perjalanan kebudayaan Indonesia juga dibahas dalam buku “Warisan Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1960” terbit tahun 2011 yang disunting oleh Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem. Demikian pula dalam buku yang berjudul “Indonesia dalam Arus Sejarah” yang terdiri atas 9 jilid, pada jilid ke-8 dari halaman 591-597 kegiatan KK telah diakui sebagai salah satu “arus” dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. (Susanto Zuhdi, Prof. Dr. (Ed), 2012).

Sayang, dalam buku “Sejarah Kebudayaan Indonesia” yang juga terdiri atas 8 jilid, terbit tahun 2010 sama sekali tidak memasukkan kegiatan itu sebagai bagian dari sejarah kebudayaan Indonesia. Satu-satunya kongres yang disebut dalam buku jilid VI yang membahas tentang “Bahasa, Sastra dan Aksara” adalah Kongres Bahasa Indonesia. Itupun hanya terbatas pada Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dan II (1978). Yang agak mengherankan, ada penjelasan di dalam buku tersebut yang menyatakan: “Ihwal Kongres Bahasa III dan seterusnya tidak dijabarkan di sini, karena pertemuan-pertemuan itu belum lagi menjadi sejarah, melainkan merupakan bagian dari pengalaman kita sekarang”. (Akhadiati Ikram (Editor Tema) Sejarah Kebudayaan Indonesia: Bahasa, Sastra, dan Aksara, 2009, hal.16) Apa betul Kongres Bahasa Indonesia 1983, 1988, 1991 dst. belum menjadi bagian dari sejarah? Lalu sebatas waktu berapa tahun suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam sejarah?

BAB II

KONGRES KEBUDAYAAN PRAKEMERDEKAAN

Sumber data penyelenggaraan Kongres Kebudayaan (KK) sebelum Indonesia merdeka dapat ditemukan antara lain di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Dalam majalah *DJAWA* yang terbit pertama tahun 1921 berisi rekaman kegiatan kongres kebudayaan dan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang biasa dipakai oleh kaum terpelajar saat itu, bahasa Belanda. Majalah itu terbit 4 kali dalam setahun, dan edisi terakhir terbit tahun 1941. Berdasarkan keterangan yang tercatat dalam majalah itu dan dari sumber lainnya dapat diketahui bahwa pada masa sebelum Indonesia merdeka telah diselenggarakan 7 kali Kongres Kebudayaan dan tiga kali Kongres Bahasa Jawa dan dua kali Kongres Bahasa Sunda.

KK pertama diselenggarakan tahun 1918 dan yang terakhir diselenggarakan tahun 1937. Enam dari 7 kali kongres itu disiapkan dan diselenggarakan oleh sebuah lembaga penelitian kebudayaan yang disebut *Java-Instituut* yang didirikan atas inisiatif kaum terpelajar bumiputra. Lembaga itu sendiri berdiri berdasarkan rekomendasi dari KK pertama tahun 1918. Hal itu mencerminkan bahwa perhatian kaum terpelajar terhadap kebudayaan dan kelembagaan kebudayaan pada saat itu sudah cukup tinggi.

Dampak dari kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian kebudayaan tetapi juga memiliki kontribusi pada bidang politik dan menumbuhkan kesadaran berbangsa. Topik bahasan tentang bagaimana arah konsep, kebijakan dan strategi pengembangan kebudayaan, pendidikan, hingga pada dampak, sosial, politik dan ekonomi telah dijadikan bahan diskusi yang cukup seru pada saat itu. Gambaran singkat dari ketujuh KK tersebut adalah sebagai berikut.

A. Kongres Kebudayaan 1918

Meskipun kongres ini berlangsung pada masa penjajahan Belanda, tetapi pemrakarsanya adalah penduduk bumiputra. Dalam hal ini peran Pangeran Prangwadono amat besar. Bersama dengan tokoh-tokoh dari perkumpulan BO dan perkumpulan lainnya, Prangwadono menyampaikan gagasan untuk memba-has



Pangeran Prangwadono (Mangkunegoro VII)
penggagas Kongres Kebudayaan (Jawa) pertama, 1918. Sumber: KITLV

masalah kebudayaan dalam bentuk kongres. Gagasan itu muncul dari dua pemikiran. Pemikiran pertama datang dari seorang teosof terkenal bernama D. Van Hinloopen Labberton yang mengusulkan agar diselenggarakan **Kongres Bahasa Jawa**. Usul tersebut telah disetujui oleh pihak pemerintah Pusat (Batavia), dan pihak pemerintah Hindia Belanda membentuk panitia penyelenggara. Panitia itu terdiri atas empat orang: Dr. Hoesein Djadiningrat, Dr. FDK. Bosch, Dr. B. Schrieke dan Dr. Hazeu. Untuk jabatan Ketua Panitia kongres disarankan pula oleh Pusat agar dijabat oleh Pangeran Prangwadono.

Pemikiran kedua datang dari kalangan kaum terpelajar bumi-putra anggota B.O. di Surakarta. Mereka berpendapat bahwa yang perlu diselenggarakan bukan **Kongres Bahasa Jawa** seperti yang dikehendaki pihak Batavia, tetapi **Kongres Kebudayaan** untuk memperbincangkan masalah kebudayaan Jawa. Pemikiran itu datang dari Pangeran Prangwadono, yang kemudian dinobatkan menjadi **Mangkunegoro VII**. (Jaap Erkelens, 2001:hal. 2). Menyikapi kehendak kaum terpelajar seperti itu, pihak Batavia memutuskan untuk membiarkan para anggota BO di Surakarta mengambil langkah sendiri dalam mengatur penyelenggaraan kongres. Akhirnya mereka menyelenggarakan **Kongres Kebudayaan Jawa**, dan bukan **Kongres Bahasa Jawa**. Perdebatan antarkaum terpelajar bumiputra ketika menentukan pilihan apakah kongres bahasa atau kongres kebudayaan serta penentuan tema, pemasaran, peserta, sampai perdebatan dalam kongres menjadi peristiwa penting, dan menarik perhatian pakar sejarah dan pemerintahan Asia Timur dari Jepang Prof. Dr. Takashi Siraishi. Menurut uraian Takashi telah terjadi perdebatan antara pemrasaran Soetatmo dan Tjipto Mangoen Koesoemo tentang paham nasionalisme menjadi perbincangan banyak ahli. (Takashi Siraishi, Journal Indonesia Volume 32, 1991, hal. 93).

Dari gambaran ini dapat dibayangkan betapa besarnya pengaruh kaum pergerakan (Dr. Radjiman, Pangeran Prangwadono dkk) dan kaum terpelajar bumiputra lainnya sehingga bagaimanapun kuatnya gagasan itu datang dari pihak Belanda dan telah disetujui oleh pemerintah Pusat (Batavia), akhirnya mereka harus mengalah pada keputusan BO cabang Surakarta. Kenyataan itu juga merupakan suatu hasil dari tahapan perjuangan yang dapat dijadikan pendorong semangat untuk terus maju ke depan dalam memperjuangkan kehadiran bangsa baru. Mengenai posisi Dr. Radjiman diuraikan lebih lanjut oleh Soebaryo sebagai berikut:

“...maka mau tidak mau kita akan berbicara tentang Radjiman yang tetap merupakan ‘think tank’ bagi Boedi Oetomo maupun bagi ‘elite power’ keraton Surakarta Hadiningrat. Bahkan, walaupun Koperberg seorang anggota ISDV² ditunjuk menjadi sekretaris panitia pengarah karena hubungannya yang akrab dengan Pangeran Mangkoenegoro VII dan yang lain-lain, nampaknya sudah jelas bahwa pimpinan kongres berada di tangan kelompok ‘Wederopbouw’”. (Soebaryo Mangoenwidodo, 1994: hal. 62).

Yang dimaksud dengan kelompok *Wederopbouw* adalah kelompok yang menghendaki pembangunan (kebangkitan) kembali ‘bangsa Jawa’ yang dalam hal ini

2 ISDV singkatan dari Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (Perhimpunan Sosial-Demokrasi di Hindia) sebagai Embrio dari Partai Komunis Indonesia.

dimotori oleh kaum terpelajar bumiputra. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran kaum terpelajar penggerak kebangkitan nasional dalam penyelenggaraan KK pada saat itu. Peserta kongres kebanyakan datang dari kaum terpelajar bumiputra, dan tidak hanya dari Jawa, meskipun namanya KK Jawa.

Selain kisah tentang latar belakang lahirnya kesepakatan untuk menyelenggarakan KK seperti di atas, masih ada beberapa kejadian lain yang juga tidak kalah menarik. Antara lain pada saat terjadi perdebatan tentang pemilihan tema dan peserta kongres pada saat rapat persiapan kongres, telah terjadi perdebatan antara mereka yang cukup seru. Semula kehadiran para intelektual bangsa Eropah dalam kongres dapat diterima untuk memberikan saran-sarannya. Tetapi pada rapat kedua sebagian peserta rapat menolak intelektual asing untuk ikut mencampuri urusan kebudayaan Jawa. Setelah menemui jalan buntu, Pangeran Prangwadono tampil memberikan penjelasan dan akhirnya disetujui. Para intelektual asing dapat ikut terlibat dalam kongres tetapi dibatasi hanya sebagai penasihat.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata mereka tidak hanya hadir sebagai penasihat tetapi malahan sebagai pemrasaran. Di samping itu, telah terjadi adu argumentasi di antara kaum terpelajar bumiputra mengenai tema kongres yang mana di antara tema tentang kebudayaan dengan pendidikan yang akan dijadikan topik perbincangan dalam kongres. Di satu pihak Dr. Radjiman bersikeras menghendaki materi yang dibahas adalah mengenai pendidikan yang menitik-beratkan pada pendidikan kebudayaan Jawa asli saja. Sementara itu, R. Sastrowidjono cenderung kepada pendidikan pro Barat, sedangkan Pangeran Prangwadono dan Wurjaningrat memilih jalan tengah, yakni memilih dua-duanya. Perdebatan itu akhirnya dicapai jalan kompromi setelah Pangeran Prangwadono menyimpulkan bahwa mengingat besarnya pengaruh dari luar, kongres sebaiknya membahas masalah bagaimana memajukan kebudayaan Jawa. (Wasino, 1994: hal. 252-253). Tentu saja termasuk peran pendidikan dalam memajukan kebudayaan tetap menjadi topik perbincangan.

Ada tokoh lain yang terlibat di dalam pembahasan persiapan kongres, yaitu Hoesein Djajadiningrat. Keikutsertaan Hoesein sebagai putra Bupati Banten bergelar doktor dari Universitas Leiden di Belanda (dengan judul disertasi *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten* atau Pandangan Kritis Tentang Sejarah Banten) mempunyai arti penting dalam mengarahkan kongres. Sebagai cendekiawan non Jawa, berada di tengah-tengah cendekiawan Jawa untuk membahas kebudayaan Jawa, Hoesein telah menggiring agar perbincangan kongres tidak hanya terpusat pada budaya Jawa. Keberadaannya membuat peserta kongres tidak hanya terbatas orang Jawa, tetapi juga mengundang peserta dari orang Sunda, Madura dan Bali.

Mengenai pandangan Hoesein tentang Kongres Kebudayaan Jawa 1918 antara lain disebut dalam buku "*Madelon Djajadiningrat: Vorst tussen twee werelden*", dengan kata pengantar Helle S. Hasse. Antara lain ditulis bahwa Hoesein Djajadiningrat mempunyai keinginan yang terdalam, dapat berlangsung sebuah kongres di mana para ilmuwan dapat mengutarakan inisiatif baru, bahwa budaya Jawa dalam bentuk modern bisa dihidupkan kembali. ("*Het was dan ook zijn diepste wens een congres te organiseren, waar deze wetenschappers bijeen zouden komen om nieuwe initiatieven te ontplooiën, opdat de Javaanse cultuur in moderne vorm zou kunnen gaan herleven*"). (Helle S. Hasse (Pengantar) 2006, hal. 193)

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses terselenggaranya KK bagi sebuah bangsa yang masih dalam keadaan terjajah tidaklah mulus, tetapi harus melalui berbagai macam pertimbangan. Kongres diselenggarakan di Surakarta, mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Juli tahun 1918, diberi nama **CONGRES VOOR JAVAANSCHЕ CULTUUR ONTWIKKELING** atau **Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa**. Kongres inilah yang dapat dicatat sebagai KK I yang diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka. Kongres berlangsung sukses, dihadiri delegasi lebih dari lima puluh asosiasi di Jawa dan dari Eropa, datang ke kota Solo. Jumlah seluruh peserta yang menghadiri kongres lebih dari seribu dua ratus orang (Hele S. Hallace, 2006, hal. 188).



R. Sastrowidjono, Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Jawa, pertama, 1918
(Sumber: wikipedia, diunduh tanggal 24 April 2013)

Yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penyelenggara KK tahun 1918 adalah R. Sastrowidjono. Sebelum acara dimulai para peserta berkumpul di Kepatihan Keraton Surakarta, lalu berkeliling melihat Keraton dan Taman Sriwedari. Setelah itu menuju *Societëit Harmonie* untuk beramah-tamah sambil mendengarkan musik dan menonton pertunjukan tari Wireng. Acara pembukaan diselenggarakan di Kepatihan Mangkunegaran. Dalam sambutannya Sastrowidjono menyatakan bahwa atas nama Komite Pengembangan Kebudayaan Jawa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran perwakilan pemerintah, Yang Terhormat Residen Surakarta. Di samping kepada pihak pemerintah (Hindia Belanda), ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Paduka Soesoehoenan Surakarta yang bersedia menjadi pelindung kongres, dan juga kepada para raja yang hadir.

Pada kesempatan itu diumumkan bahwa yang menjadi pemrakarsa terselenggaranya kongres adalah Ketua Kehormatan Panitia Penyelenggara, Pangeran Prang Wadono.

Disebutkan oleh Sastrowidjono bahwa rakyat Jawa yang prihatin karena tingkat intelektualitasnya begitu menurun, sekarang melihat kemunculan sekelompok kecil yang sudah mulai terpanggil untuk bekerjasama meningkatkan ekonomi dan politik negara. Kendati harus diakui bahwa kesadaran itu masih dalam tingkat yang teramat awal, tetapi saat ini rakyat Jawa sedang didorong oleh perkembangan zaman untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan Barat agar dapat berdiri sederajat dengan bangsa-bangsa maju lain. Sementara itu, mengenai masalah kebudayaan sebagian besar rakyat cenderung masih kurang memahami dan meminati kebudayaannya sendiri (Jawa). Oleh sebab itu, kongres ini perlu sekali mengusahakan terwujudnya keseimbangan antara kebudayaan Timur dengan pengaruh dari kebudayaan Barat di kalangan masyarakat. Antara lain Sastrowidjono menyatakan:

“Kami berkeyakinan bahwa kini sudah tiba saatnya untuk terlepas dari tujuan-tujuan politik, menyadarkan rakyat bahwa di samping peningkatan ekonomi dan politik, sebuah **bangsa baru** akan mampu memiliki jati dirinya (nasionalismenya) apabila bangsa itu bertumpu pada sejarah sendiri serta warisan budayanya sendiri. Memiliki kebudayaan sendiri merupakan salah satu unsur penting agar dapat mengungkapkan kesadaran nasional serta jati diri rakyat. Apabila sebuah bangsa mengesampingkan kebudayaannya sendiri serta tidak menghargai apa yang diwariskan nenek moyangnya, maka bangsa itu tidak layak untuk maju.

Oleh karena itulah maka Komite dengan mantap mengambil langkah pertama, yaitu mengimbuu seluruh rakyat Jawa, baik mereka dari Sunda, Madura atau Jawa Tengah, agar bersama-sama membahas ke arah mana bangsa kita akan ditumbuh-kembangkan dalam kurun waktu ini.

Dengan tetap menghormati kebudayaan Barat, yang sudah bermanfaat bagi kemajuan kita semua, komite berpendapat bahwa sudah tiba wktunya untuk meletakkan garis-garis besar bagi perkembangan kebudayaan kami sendiri. Kami berbesar hati bahwa dalam hal ini masyarakat Eropa juga menghargai dan berperan-serta aktif dengan memberikan prasaran mereka masing-masing”.

Selain itu R. Sastrowidjono menyinggung tentang pentingnya meletakkan landasan sejarah dan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Ia mengatakan: “... telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi”. (Jaap Erkelens, 2001: hal. 2). Menurut Sastrowidjono kebudayaan milik suatu bangsa merupakan cerminan paling sempurna dari kesadaran nasional dan jati diri bangsa yang bersangkutan.

Untuk itu ia menyerukan kepada seluruh bangsa di Jawa, tanpa membedakan antara orang Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura dan Bali untuk “membahas bersama jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut”. Acara dilanjutkan dengan pembacaan sambutan tertulis Gubernur Jenderal.

Kongres diselenggarakan di bangsal Kepatihan Keraton Surakarta. Dalam kongres tersebut yang ditunjuk sebagai Pemrasaran 9 orang, lima dari bumiputra dan 4 dari asing. Kesembilan pemakalah itu adalah: (1) Dr. Satiman Wirijosandjojo; (2) R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo; (3) Tjipto Mangoenkoesoemo; (4) R. Ng. Wediodipoero (Dr. Radjiman); (5) R.A. Notosoedirdjo geb. Karlinah; (6) D. van Hinloopen Labberton; (7) A. Muhlenfeld; (8) J. Rottier; dan (9) Z. Stokvis. Setelah melalui beberapa kali rapat, permasalahan yang dinilai penting untuk diangkat dalam kongres antara lain:

1. Ke arah mana perkembangan bangsa Jawa dibawa dan bagaimana bangsa Jawa dapat membangun kembali peradabannya yang tinggi di masa lampau?
2. Dalam usaha pembangunan kembali bangsa Jawa itu, apakah peranan peradaban Barat dan kebudayaan Jawa?
3. Dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar ke dalam masyarakat Jawa masa kini, kemana perkembangan kebudayaan Jawa harus diarahkan?
4. Sejauh mana mutlak diperlukan dasar pendidikan Barat untuk mengembangkan

masyarakat Jawa atas?

5. Pengetahuan-pengetahuan dan metode Barat mana yang perlu mendapat perhatian untuk diajarkan dalam rangka mengembangkan masyarakat Jawa masa kini?
6. Sejauh mana kebudayaan Jawa masa kini yang dengan sadar dan tidak sadar hidup dalam jiwa (*psyche*) penduduk, dapat digunakan pada pendidikan (*suku*) bangsa Jawa?
7. Mungkinkah dan diinginkankah menghidupkan kembali kebudayaan Jawa yang telah punah?
8. Berkenaan dengan perkembangan, apa yang perlu diubah dalam sistem pendidikan?

Laporan dari penyelenggaraan kongres itu dimuat dalam majalah *DJAWA* dalam bahasa Belanda. Majalah itu terbit antara tahun 1921 Kongres hingga 1941. Di samping itu ada juga data yang dimuat dalam majalah lain, yaitu majalah *SRI POESTAKA* terbitan Balai Pustaka. Prosiding kongres diterbitkan di Semarang dengan judul "Congres voor *Ja-vaansche Cultuur Ontwikkeling: Programma en Tekstboekje Prae-Adviezen, 1918*" Stoomdrukkrij CA. MISSET, Semarang. Di dalam buku prosiding kongres seperti tersebut di atas, dimuat agenda kongres, paparan *preadvisers*, dan perdebatan secara lengkap, melebihi buku-buku prosiding kongres masa-masa sekarang.

Dari sembilan nama pemrasaran itu, 5 orang berkebangsaan Jawa dan 4 orang Belanda. Menurut Soebaryo, pemakalah Soetatmo dan Satiman berasal dari Komite Nasionalisme Jawa. Keduanya menguraikan tentang perlunya dikembangkan nasionalisme Jawa, sementara Dr. Radjiman dan A. Muhlenfeld lebih menekankan pada dukungan dikembangkannya paham nasionalisme Jawa. Dua orang pemrasaran yang lain, menyampaikan pokok pikiran yang berbeda dengan Soetatmo, Radjiman dan Muhlenfeld. Pada saat itu dr. Tjipto Mangoenkoesoemo mengemukakan pandangan yang sangat kritis terhadap paham nasionalisme Jawa sehingga dinilai bertentangan dengan pendapat Dr. Radjiman, sedangkan pendapat Z. Stokvis lebih ke arah paham nasionalisme Hindia Belanda dan tentang pencerahan moral (Soebaryo Mangoenwidodo, 1994: hal. 63).

Selain dimuat dalam majalah dan di buat prosiding, berita kongres itu juga dimuat di koran *De Locomotief*. Secara panjang lebar memberitakan isi perdebatan yang berlangsung di dalam kongres. *De Locomotief* adalah salah satu surat kabar (*courant*) yang terbit di Semarang tahun 1863. Setelah koran ini sempat berhenti pada tahun 1947, terbit lagi hingga tahun 1956. Ini berarti *De Locomotief* hidup di dua zaman, yaitu zaman pemerintahan Hindia-Belanda dan zaman pemerintahan Republik Indonesia. Pada masa kemerdekaan koran ini telah meliputi berbagai kegiatan kebudayaan, antara lain Kongres Kebudayaan (1948, 1951, 1954) serta Konferensi Kebudayaan tahun 1951 dan 1952.

A.1. Isi Prasaran

Berbeda dengan penulisan dan penyajian makalah masa sekarang, yang biasanya diuraikan secara cara penulisan makalah oleh para pemrasaran (waktu itu disebutnya *prae-advieser*) ditulis dalam bentuk butir-butir yang saat itu disebut **stelling**. Kata 'stelling' digunakan pada sebelum Indonesia merdeka dan setelah merdeka

diterjemahkan menjadi 'dalil' seperti yang tertulis dalam Kongres Kebudayaan tahun 1948, 1951 dan 1954. Dari masing-masing butir dalil-dalil itu kemudian dielaborasi secara langsung oleh pemrasaran pada giliran penyampaian makalah.

Menurut pemrasaran **Satiman Wirijosandjojo**, bangsa-bangsa Timur memang berjuang untuk kemandiriannya masing-masing, dengan tujuan untuk membuat perhitungan akhir dengan Eropa yang sudah melakukan begitu banyak dosa. Tentang dosa itu dengan nada keras Satiman mengatakan: "*Memanglah Eropa perlu dihajar*", dan kata-kata ini membuat hadirin bergelak tawa. Pada awalnya bangsa Eropa hendak diusir dengan cara-cara yang primitif tetapi hasilnya selalu nihil. Oleh karena menurut Satiman Barat harus dilawan dengan menggunakan senjata Barat pula, yaitu dengan intelektual.

Oleh karena itu menurut Satiman kongres ini merupakan suatu usaha peremajaan diri kita (bangsa Jawa) untuk melawan mereka. Sistem pendidikan untuk mempertinggi intelektual bangsa Jawa perlu diperbaiki. Semua ilmu pengetahuan Barat harus dapat dikuasai, dan untuk itu dapat menguasai bahasa Belanda merupakan keharusan. Di masa depan, bahasa-bahasa setempat dapat dikembangkan melebihi bahasa Belanda, karena bahasa Belanda tidak akan dapat diserap oleh seluruh lapisan masyarakat. Orang Jawa tidak perlu takut akan kehilangan kebudayaannya sebab hal itu sudah ada dalam dirinya sejak lahir. Orang Jawa harus membuktikan bahwa tiga ratus tahun masa tertidur hanya sekedar waktu beristirahat. Pada bagian akhir makalahnya dr. Satiman menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Usaha pengembangan kebudayaan Jawa yang sungguh-sungguh untuk mengejar ketinggalan dilakukan dengan menyerap ilmu pengetahuan Barat dan melakukan upaya melalui cara-cara Barat, guna mencapai kedaulatan dan kemerdekaan dalam waktu dekat.*
2. *Cara-cara Timur yang digunakan di sini dan di seluruh Asia tidak dapat mengimbangi cara-cara Barat dan tidak memungkinkan tercapainya tujuan. Cara-cara Barat telah berkembang ke arah bentuk yang sempurna, sedangkan dari Timur dalam kondisi statis, bahkan cenderung mengalami kemunduran karena tidak dirawat.*
3. *Proses perkembangan ke arah Barat dapat terjadi karena adanya gerakan hati (inisiatief) dan desakan dari dalam, sehingga terjadi kesesuaian dengan perubahan yang terjadi di alam sekeliling kita.*
4. *Perjuangan untuk kebebasan tanpa pertumpahan darah hanya dapat dicapai melalui 'peperangan' antara kemampuan intelektual melawan intelektual, dan kemampuan intelektual kita harus dibuat sama dengan intelektual Eropa.*
5. *Pendidikan harus diatur sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan Barat dapat diserap oleh peserta didik. Di samping penguasaan bahasa asing (Belanda) bahasa Ibu wajib diajarkan di semua lembaga pendidikan.*
6. *Pertemuan peradaban Barat dan Timur harus saling mengisi bagi keduanya. (Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, 1918: hal. 12)*

Sementara itu pemrasaran **R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo** menekankan pada masalah perlunya upaya pembimbingan dalam mengembangkan kebudayaan (Jawa) menuju ke arah jalan yang pernah dilalui oleh para leluhur yang memang diakui

memiliki sikap budaya yang terbuka bagi kita masa kini. **Soetatmo** berpendapat bahwa kebudayaan bertumpu pada pemahaman diri sendiri, pada kemanusiaan. Kebudayaan Timur terutama didasarkan pada aturan dan kaidah kehidupan rohani, sementara kebudayaan Barat bertumpu pada kaidah alam. Oleh karena itu kebudayaan Jawa akan mengembangkan kehidupan rohani seseorang. Pemrasaran menghimbau agar hak rohani diakui, begitu pula humanisme dan altruisme yaitu faham yang mementingkan kepentingan orang lain.

Pada bagian lain Soetatmo juga menyinggung masalah faham nasionalisme, meskipun dinilai pemikirannya cenderung pada pemikiran nasionalisme Jawa. Selain itu, dalam hal mendidik bangsa bagian pertama yang harus dilakukan menurut Soetatmo adalah menyadarkan mereka tentang keberadaannya dengan memberikan pengetahuan sejarah dan pengetahuan kebudayaan sendiri. Sebagai orang Jawa sejati ia memandang wayang sebagai salah satu media pendidikan yang amat baik, karena di dalam cerita wayang penuh dengan ajaran moral, etika, estetika dan ilmu pengetahuan lahir dan batin. Bagian lain yang menarik adalah pandangan tentang pentingnya memajukan kebudayaan dengan cara memberikan jiwa baru atau nilai-nilai baru yang berarti menghendaki adanya perubahan dalam kebudayaan. Selanjutnya Soetatmo menyampaikan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

1. *Pendidikan yang didirikan menurut dasar Barat perlu dilakukan penye-suaian dengan kondisi bangsa dan negeri kita. Jangan dilupakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan intelek – daya pikir – akal budi manusia Jawa.*
2. *Perlu dikembangkan ilmu pengetahuan teknik guna memajukan industri dan pertanian sendiri, juga ilmu kedokteran yang paling utama untuk diajarkan.*
3. *Sebelum kebudayaan yang lain, kebudayaan sendiri harus menjadi dasar pendidikan bangsa kita. Mungkin cara yang mudah untuk mencapai tujuan itu adalah menggunakan media wayang.*
4. *Perlu mempertahankan keberadaan kebudayaan kita dan memberikan jiwa baru untuk memajukan kebudayaan kita. (Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, 1918: hal. 17-18)*

Pemrasaran berikutnya adalah **dr. Tjipto Mangoenkoesoemo**, lulusan STOVIA (Sekolah Dokter) di Jakarta yang menaruh perhatian terhadap kebudayaan. Ia tokoh pergerakan yang sering menulis dan dimuat harian *De Express*. Karena tulisannya sering berisi kritikan yang tajam maka oleh pemerintahan Belanda dianggap sebagai usaha untuk menanamkan rasa kebencian pembaca terhadap Belanda.

Menurut pandangan Tjipto, pengembangan kebudayaan tidak dapat dilakukan tanpa memerhatikan sifat kebudayaan bersangkutan. Pemrasaran menggarisbawahi keunggulan kebudayaan Jawa seperti wayang, gamelan, teknik persawahan, yang semuanya itu tidak berasal dari bangsa Hindu melainkan memang berasal dari kebudayaan Jawa sendiri. Namun pemrasaran dinilai tidak dapat memberikan jawaban tegas apakah kebudayaan Jawa di masa depan harus bertumpu pada kebudayaan di masa lampau, atau harus mengambil dari kebudayaan lain, atau mungkin sebuah jalan tengah yang perlu diambil.

Selain itu, menurut koran *De Locomotief* pemrasaran juga mengingatkan kelompok *Jong-Java* (para kaum muda Jawa) agar jangan sampai menumbuh-

kembangkan *chauvinisme* atau kebanggaan yang berlebihan pada budaya dan bangsa sendiri. Ia mengingatkan mereka pada apa yang dilakukan Jerman terhadap Belgia. Apabila nasionalisme Jawa tumbuh seperti itu, maka pemrasaran akan menolak kebudayaan Jawa. Pemrasaran juga berpendapat bahwa rakyat Jawa kurang memerhatikan ilmu pengetahuan eksakta dan teknik dan hanya memusatkan perhatian kepada ilmu pengetahuan humaniora. Itu sebabnya bangsa Jawa kehilangan kemandiriannya. Diingatkan pula agar jangan terlalu terpujau pada keindahan masa lampau tanpa memerhatikan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Dalam hal ini Tjipto Mangoenkoesoemo cenderung memilih paham nasionalisme yang tidak sempit (Jawa) tetapi nasionalisme yang meluas.

Bangsa Jawa harus menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup terpisah, menyendiri, melainkan merupakan bagian dari dunia yang lebih luas. Pemrasaran menolak pandangan yang mengatakan bahwa dari dahulu sudah ada pemisahan antara berbagai golongan masyarakat. Menurut Tjipto sistem keningratan telah didorong dan ditumbuh-kembangkan oleh para penguasa dan dipertahankan secara semu saja. Sangat disayangkan bahwa dalam kongres ini tidak ada pemrasaran dari kelompok Sunda.

Pemrasaran **dr. Radjiman** atau **Wediodiningrat** menyatakan bahwa kebudayaan Jawa memang telah surut, tetapi bekas-bekas dan sisa-sisanya masih ada hingga kini dan terdapat di dalam berbagai cabang kesenian. Kebudayaan Jawa bertumpu pada agama dan masyarakat, bertumpu pada keyakinan akan adanya hubungan antara dunia roh dan dunia manusia. Di masa lampau bangsa Jawa memiliki satu kebudayaan, dengan tujuan yang jelas. Akibat bersentuhan dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka kesatuan budaya itu terganggu, tetapi tidak sirna sama sekali. Kini masih ada kesempatan untuk mempersatukan usaha-usaha rakyat. Berbagai kekuatan baru yang berkembang harus diusahakan agar sejalan dengan perkembangan jati diri rakyat. Yang perlu dikembangkan bagi rakyat Jawa bukan hanya akal tetapi juga rasa. Bangsa Jawa harus dapat menemukan kembali jati dirinya dan setelah itu baru kemudian dapat berdiri sederajat dengan bangsa-bangsa maju lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Radjiman berpendapat bahwa hubungan antara keadaan saat itu dengan kebudayaan lama dan dengan kebudayaan yang datang dari Barat, perlu tetap dijalin dengan tidak melupakan hubungan dengan yang lama. Hal ini dapat dilihat pula pada pendapatnya yang dikutip oleh George D. Larson sebagai berikut:

“Pada waktu sekarang tidaklah hanya diinginkan, melainkan diperlukan bahwa bangsa Jawa bereaksi positif lagi terhadap rangsangan dari luar, kali ini datang dari Barat untuk menemukan kembali semangat dan kesadaran akan tujuan murni yang lebih menjiwai kebudayaan Jawa di masa lampau. Sekali masyarakat Jawa menjadi muda kembali maka ia akan memberi sumbangannya yang unik bagi peradaban dunia, sumbangan yang sesuai dengan bakat leluhur yang bertahan terus, tempat masing-masing orang merasakan harmoni dan kegunaan bagi dirinya, serta bagi kesenian dan kepercayaan yang terjalin dengan sangat eratnya dan yang berada di tengah-tengah kegiatan manusia”. (Soebaryo Mangoenwidodo, 1994: hal. 63-64).

Demikian pula halnya dengan yang dikutip oleh Denys Lombard, menunjukkan bahwa Radjiman yakin bahwa tidak mungkin Barat akan dapat membaratkan orang Jawa. Antara lain ia menyatakan: “*Jika pribumi dipisahkan sepenuhnya dan secara paksa dari masa lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia tanpa akar, tak berkelas, tersesat di antara dua peradaban*”. (Denys Lombard/Jilid 1, 2000: hal. 235).

Dalam kongres itu dr. Radjiman menggariskan 7 buah dalil yang intinya adalah sebagai berikut:

1. *Kebudayaan Jawa Kuno berdasarkan sosiologi keagamaan.*
2. *Dasar ini ditemukan kembali dalam jiwa bangsa masyarakat Jawa meskipun banyak yang tidak menyadarinya.*
3. *Kebudayaan Jawa Kuno diperlukan untuk menjadi penggugah kesadaran masyarakat pribumi (karaktervorming).*
4. *Pengaruh baru mutlak diperlukan untuk berhubungan secara internasional guna menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin.*
5. *Pendidikan harus berlangsung serasi dalam bentuk pena-naman nilai etika dan estetika dan yang bersifat mendidik, serta harus memperhatikan dasar adat istiadat bangsa.*
6. *Latihan dan penggunaan bahasa Jawa, seni budaya dan sejarah harus mendapat tempat yang besar dalam pendidikan.*
7. *Kesempatan mempelajari bahasa Belanda harus terbuka lebar untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang memungkinkan diterapkan dalam hubungan internasional.*

Sementara itu, sebagai pemrasaran berikutnya **R.A. Notosoedirdjo geb. Karlinah** mengawali prasarannya dengan menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir telah banyak menyimpan sejumlah pertanyaan untuk bidang kebudayaan dan pendidikan. Untuk bidang kebudayaan pertanyaannya ke mana arah dan kebijakan pembangunan bangsa Jawa yang akan dijalankan, pada hal rakyat sangat bersemangat untuk menata masa depannya? Untuk bidang pendidikan Karlinah menggambarkan “semua orang hari ini menangis untuk pendidikan”. Nyaris tidak ada sekolah yang baru dibuka dan yang ada telah penuh sesak oleh siswa. Bagaimana pendidikan mereka yang tidak sempat bersekolah? Bagi yang bersekolah pertanyaannya, apa gunanya kalau semuanya ingin belajar bahasa Belanda tanpa tujuan apapun? Apa yang akan anak-anak dapatkan? Apa yang bisa mereka capai dengan pendidikan seperti itu?

Menurut pemrasaran yang penting untuk manusia itu adalah pengembangan karakter. Oleh karena itu pendidikan tidak hanya menyiapkan anak-anak untuk ujian saja tetapi juga pengembangan etika dan moral. Selain itu juga diingatkan tentang peran seorang “ibu” dalam melakukan penanaman nilai-nilai budaya kepada anak. Tugasnya berat dan sulit tetapi selalu dilakukan penuh kesungguhan. Ibulah yang membangun fisik maupun rohani anak. Ibu yang memperkenalkan berbagai dongeng, cerita, permainan, nyanyian dan sejarah kepada anaknya.

Yang sangat digarisbawahi oleh pemrasaran berikutnya, yaitu **Hinloopen Labberton** adalah kenyataan bahwa tidak hanya Jawa yang memiliki kesatuan kebudayaan melainkan di seluruh Indonesia. Dikatakan bahwa kebudayaan Jawa merupakan yang paling kuat di Indonesia, dan oleh karena itu bangsa Jawa memiliki

kewajiban terhadap kemajuan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Bangsa Jawa perlu menguasai ilmu pengetahuan Barat. Bangsa Jawa perlu berpaling kepada Timur dan Barat, kebudayaan Jawa perlu dikembangkan secara horisontal maupun vertikal. Selain itu pemrasaran menilai perlunya dibangun sebuah pusat kebudayaan. Juga disarankan agar kebudayaan Jawa dikembangkan secara horisontal dengan melaksanakan pemberantasan buta huruf. Untuk itu sekolah-sekolah desa dinilai sudah memadai, dan selanjutnya setiap orang Jawa yang sudah maju akan menyebarkan pengetahuannya kepada sesama. Perlu ditiru apa yang terjadi di Jepang, di mana kebudayaan Barat dialihkan ke dalam kebudayaan Jepang. Dengan demikian maka bangsa Jawa akan tetap mempertahankan jati dirinya.

Pada bagian lain D. van Hinloopen Labberton setelah menyajikan 10 dalil dalam prasarannya, menyampaikan 3 kesimpulan sebagai berikut:

1. *Gegeven de tegenwoordige westersche beïnvloeding van Java is een op westerschen grondslag ingericht onderwijs voor de ontwikkeling van een zeker percentage van de Javanen noodzakelijk, waarbij al datgene in aanmerking komt om te worden onderwezen wat tot vermeerstering van de westersche techniek zoowel theoretisch als praktisch, noodig is.*
2. *Naast dit Westersche onderwijs dat aangevuld moet worden door bestudeering en vernieuwing van eigen taal en traditie, dient aan de eene kant onderwijs in het Javaansch (lezen en schrijven met Javansche karakters) aan alle Javanen te worden gebracht, en aan de andere zijde hooger onderwijs in Javanen en Kawi te worden verzorgd. Door de veralgemeening van de lees-en schrijfkunst onder Javanen, en daarnaast de critisch wetenschappelijke berstudering van de Javaansche taal en letteren in een daarvoor te scheppen centrum, zal het behoud van de Javaansche taal en het opbloeien tot nieuwe glorie verzekerd zijn.*
3. *De z.g. Volksschool dienst te worden vervangen door rondreizende Goeroe-djâwâ's die tot taak hebben de desakinderen het Adji Sâkâ-alfabet (tjatjarakan) te leeren, gevolgd door verspreiding van echt Javaansche lectuur. Op de Kweek-en Opleidingsscholen, de Rechtsschool en de Inl. Artsenschool dient litteratuur in Nieuwen Oud-Javaansch te worden onderwezen. In de komende Universiteit dienen aan de litteraire faculteit leerstoelen voor Javaansch letteren, Oud-Javaansch en Sanskrta te worden verbonden. (Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, 1918: hal. 7-8)*

Pemrasaran berikutnya adalah **A. Muhlenfeld**. Bagian penting yang diingatkan pemrasaran adalah orang Jawa harus menyambung kembali hubungannya dengan masa lampau mereka yang telah terputus. Bila hal ini tidak diperhatikan maka orang Jawa akan kehilangan jati dirinya. Diingatkan pula betapa Boedi Oetomo telah membangkitkan kembali intelektual orang yang telah tertinggal oleh kemajuan ekonomi dan politik. Selain itu pemrasaran menyatakan tidak benar bahwa bangsa Jawa selalu terjajah, oleh karena itu pemahaman tentang sejarah menjadi amat perlu. Bahasa ibu tidak boleh diabaikan, kendati bahasa Belanda tetap harus dipertahankan agar kita dapat memahami pengetahuan Barat. Di masa depan mungkin diperlukan sebuah *lingua franca baru*, mungkin bahasa Inggris atau bahasa Eropa lain. Bahasa ibu

harus dimasukkan ke dalam pelajaran di sekolah dan untuk itu perlu dibentuk sebuah lembaga di tingkat pusat, dan sebuah lembaga ilmu pengetahuan Timur (Oriental) di Solo yang bermanfaat tidak hanya untuk sekolah-sekolah menengah tetapi juga untuk rakyat.

Perlu pula dikembangkan bahan bacaan Jawa yang bermutu tetapi juga harus diperhatikan agar tidak tumbuh rasa kebangsaan yang berlebihan (*chauvinisme*). Pemrasaran kembali menghimbau perlunya toleransi terhadap kelompok-kelompok agama lain. Terlepas dari perbedaan-perbedaan, maka yang harus diutamakan adalah pemulihan kesatuan dan persatuan bangsa Jawa. Juga ditekankan agar tidak mengekor saja pada Barat, dan juga agar tidak bermimpi untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit. Walau demikian, kebangkitan budaya Jawa tua tetap dapat dilakukan.

Pemrasaran menggarisbawahi bahwa rakyat Bali, Sunda dan Madura serta rakyat Jawa merupakan kesatuan yang alami dan tradisi lama perlu dijunjung tinggi. Sementara dengan rakyat dari daerah-daerah lain, perlu dibina suatu hubungan yang bersifat federasi. Pada bagian akhir dari prasarannya Muhlenfeld menyampaikan 18 butir dalil yang amat jelas dan lugas tentang pembangunan rasa kebangsaan. Untuk menanamkan rasa kebangsaan itu harus ditempuh melalui pendidikan yang materinya disebutkan antara lain berupa pendidikan sejarah, pendidikan bahasa terutama untuk penguasaan bahasa asing, penguasaan ilmu pengetahuan Barat dan lain-lain. Terjemahan tentang dalil-dalil tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut:

1. *Dipandang dari sudut politik Hindia Belanda, di negeri ini sebagian pemimpin gerakan Jawa makin menyadari bahaya gerakan Hindia Belanda terhadap pertumbuhan yang sehat terhadap bangsa Jawa dan harus diadakan upaya pertahanan.*
2. *Pembangunan kembali bangsa Jawa hanya mungkin berhasil apabila dilandasi oleh dasar (fondamen) kebudayaan sendiri yang telah berabad-abad diabaikan.*
3. *Untuk membangkitkan kesadaran terhadap kebudayaan sendiri itu ke seluruh wilayah, maka pengajaran dan pengkajian sejarah bangsa merupakan sarana yang terbaik, terkuat dan terpenting. Untuk sebuah 'natie' atau bangsa, juga untuk perorangan atau individu, tuntutan pertama adalah mengenal dirinya sendiri sehingga mereka memiliki perangai, watak (karakter), dan mendapatkan kembali rasa percaya diri kembali setelah kehilangan selama berabad-abad.*
4. *Harus dijaga benar agar pengajaran dalam bahasa sendiri (Jawa) tidak terdesak oleh pengajaran bahasa Belanda dan Melayu.*
5. *Bahasa Belanda tidak boleh dijadikan satu-satunya pintu gerbang memasuki pengetahuan Barat. Usaha sadar dari orang Jawa yang nasionalis wajib diarahkan bahwa bahasa Jawa secepat mungkin dapat menjadi bahasa pengantar bagi jenis pengajaran apapun. Untuk itu perlu dibentuk lembaga yang diurus oleh orang Jawa yang berpendidikan Barat, menterjemahkan buku-buku pelajaran, kajian Eropa ke dalam bahasa Jawa.*
6. *Tentang posisi bahasa Belanda yang untuk sementara masih sangat berarti, bahasa Melayu sebagai bahasa negeri daerah Melayu dapat menjadi bahasa pengantar antarsuku bangsa. Lebih baik menguasai sebuah bahasa dunia seperti bahasa Inggris untuk masa kemudian dan untuk daerah-daerah yang memang telah menggunakan bahasa Melayu bahasa Belanda tidak diajarkan terlalu banyak.*
7. *Perlu memberikan perhatian besar pada pengajaran sejarah dan bahasa Jawa,*

namun pelajaran jangan terlalu menyimpang dari cara yang dianut oleh Negara-negara beradab lainnya.

8. Dalam mengajarkan sejarah Jawa, pelajaran sejarah kebudayaan harus berperan penting supaya para pelajar menyadari betapa besarnya arti peradaban kuno sendiri dan kemampuan nenek moyang.
9. Perlu juga diajarkan sejarah abad-abad yang baru berlalu agar keturunan kita yang sedang tumbuh menyadari betapa buruk akibat yang menyedihkan bagi bangsa yang berselisih dan bercerai-berai.
10. Bahwa pada zaman yang akan datang daerah Jawa dan juga pulau-pulau lain di Nusantara akan mendapatkan kedaulatan penuh. Hanya atas dasar kesatuan nasional bangsa Jawa akan mampu mempertahankan kedaulatan itu, dan untuk hal ini harus ditanamkan melalui pendidikan.
11. Pengajaran harus merupakan pendidikan yang mutlak diperlukan untuk menjadikan warga dunia (world citizenship). Untuk ini diperlukan metode yang sama dengan yang digunakan di Negara Barat yang demokratis, dengan pengertian bahwa perhatian pada perkembangan fisik tidak dikurangi seperti yang ada di koloni-koloni Inggris dan Amerika.
12. Pengajaran teknik (pertukangan) dan pertanian, sangat diperlukan oleh tanah Jawa yang masih banyak bagian yang harus diperbaiki, dan hal ini belum diberikan di sekolah rendah untuk memberikan pengetahuan dasar dengan catatan tanpa merugikan pada jumlah pelajaran yang demikian banyak. Sekolah-sekolah lanjutan, kursus-kursus malam dan sebagainya diselenggarakan untuk mengisi kekurangan.
13. Dengan pertimbangan masih banyaknya kekurangan pengetahuan teknis pada tiap-tiap bidang, maka perlu diperluas secepat mungkin pada sekolah-sekolah kejuruan tingkat menengah dan tingkat tinggi, termasuk masalah perdagangan.
14. Pada lembaga-lembaga pendidikan seperti tersebut di atas harus diperlakukan sama dengan pendidikan dasar, yaitu harus diberikan perhatian pada pelajaran lanjutan tentang sejarah dan bahasa negeri di samping tentang ekonomi, karena pengetahuan ekonomi orang Jawa masih terbatas.
15. Kebudayaan Jawa sekarang, kecuali yang bentuk pergelaran musik, merupakan perwujudan kebudayaan yang semakin melemah bila dibandingkan dengan abad-abad pertengahan. Tingkat peradaban sejak 1500-an mulai menurun dan bila dihubungkan dengan kondisi sekarang, dan hanya dengan menggunakan media wayang dapat diajarkan nilai-nilai peradaban yang dulu.
16. Agama, dalam bentuk apapun di sekolah-sekolah umum kurang tepat walaupun tidak dapat dihindari bahwa dengan mengenal karya-karya sastra Jawa Kuno dan juga penulis-penulis abad kini pada banyak orang menggugah kembali perhatian pada aturan-aturan lama.
17. Tidak menjadi keharusan untuk menghidupkan kembali kebudayaan Jawa Kuno yang mulai punah, dan dengan cara lain yaitu melalui pelajaran umum dalam sejarah dan memberikan lebih banyak perhatian pada pendidikan dalam bahasa sendiri.
18. Akhirnya harus dijaga tentang pengajaran dalam bahasa dan sejarah negeri, pada tingkatan yang lebih tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Bahwa untuk pendidikan tingkat tinggi perlu diadakan sekolah tinggi untuk studi pengetahuan sastra Timur di Solo dan Yogyakarta, di mana sehari-hari memang diajarkan

tentang bahasa dan sastra, sejarah dan seni budaya bangsa Jawa dan merupakan tempat jiwa bangsa Jawa menimba kekuatan hidup lebih banyak. (Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, 1918: hal. 32-35)

Pemrasaran yang lain adalah **J. Rottier**. Ia menyayangkan dalam makalahnya tidak membahas sama sekali tentang bangsa Sunda dan Madura, karena Panitia memang hanya minta pandangannya tentang pengembangan kebudayaan Jawa. Namun dikatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang bangsa Jawa juga berlaku bagi bangsa Sunda dan Madura. Pemrasaran tidak setuju apabila persatuan Insulinde (Nusantara) menghalangi setiap suku bangsa untuk berkembang dan menapaki kehidupannya sendiri. Sebanyak mungkin mereka perlu berjalan bersama, tetapi apabila perlu, boleh juga berjalan sendiri. Oleh karena itu bangsa Timur perlu belajar melihat dan memahami kenyataan hidup praktis. Kendati memang ada perbedaan hakiki antara orang Barat dan Timur, seperti dalam jiwa dan semangat, tetapi hendaknya yang menjadi perhatian utama adalah intelektualitas dan untuk itu diperlukan kebudayaan Barat, terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.

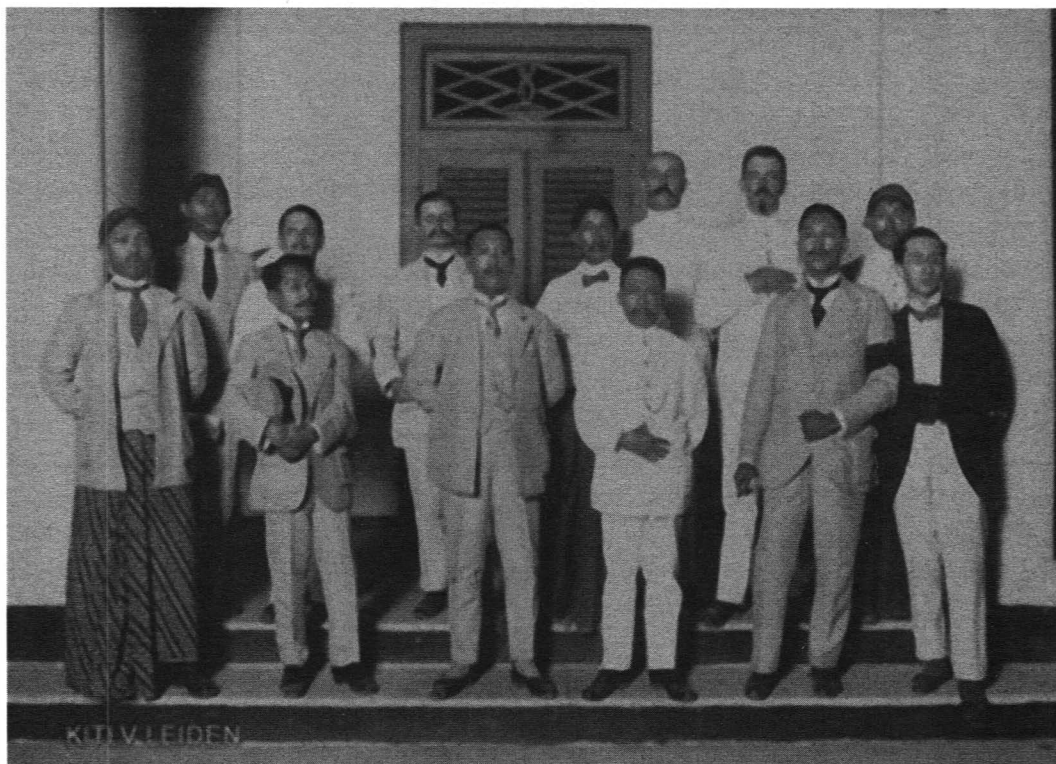
Bahasa Belanda diperlukan untuk memahami dan menye-barkan perkembangan Barat dan juga untuk berhubungan dengan bangsa-bangsa lain dan ini adalah tugas kaum cendekiawan yang pada gilirannya juga perlu menguasai bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Bahasa Belanda diperlukan agar mampu memperkaya bahasa ibu, dan bahasa Belanda akan menjadi satu-satunya bahasa pengantar. Dalam hal ini Rottier tidak memilih pembelajaran bahasa Melayu karena dianggap akan menghambat pendidikan dengan akibat orang Jawa akan ketinggalan. Di samping itu, ia berpendapat bahwa pendidikan agama dan budi pekerti merupakan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk perkembangan, tetapi tidak perlu diajarkan di sekolah. Yang perlu diajarkan adalah kesusasteraan dan musik. Melalui kesusasteraan dapat dipelajari kegagalan dan keberhasilan suatu bangsa.

Menurut pemrasaran **Z. Stokvis**, bangsa Jawa disarankan untuk mempertahankan apa yang baik dalam ilmu pengetahuan dan metoda Barat, agar bangsa Jawa tidak menjadi bangsa yang teringgal melainkan menjadi bangsa yang kuat. Banyak pemrasaran telah mengungkapkan keengganan bahkan ketakutan terhadap kebudayaan Barat, dan hanya ingin memanfaatkan teknik saja. Sebagai misal, ada keengganan untuk membandingkan wayang dengan bioskop. Wayang hanya boleh disamakan atau dibandingkan dengan seni drama Barat. Perlu dimaklumi bahwa dari kebudayaan Barat yang sering dicemoohkan itu ada juga hal-hal yang dapat diteladani. Bukankah ada juga peradaban rohani di kebudayaan Barat? Mengapa orang terlalu menakutkan kebudayaan Barat, bukankah berbagai kebudayaan di dunia selalu saling mempengaruhi secara positif? Oleh sebab itu, kesenian Barat juga perlu dihormati, dan bahkan sebagian orang Belanda juga perlu melakukan hal ini terhadap kebudayaan bangsa lain.

Menurut Stokvis apabila orang Jawa menutup mata atau menjauhi kesenian Barat, maka kesenian Jawa tidak akan dapat meremajakan diri. Sebab kemandegan kesenian tidak hanya terjadi oleh karena dikuasai bangsa atau budaya lain. Bukankah bangsa Polandia mengalami cengkeraman budaya dari bangsa lain, tetapi tetap mampu menumbuh-kembangkan kebudayaan mereka sendiri? Begitu pula dengan bangsa

Jawa. Masih banyak yang dapat disumbangkan pihak Barat kepada bangsa Jawa

Pemrasaran kemudian menguraikan tentang sekolah menengah Hindia Belanda. Dikatakan bahwa HBS tidak cocok untuk menjadi sarana pendidikan tinggi bagi orang Jawa, sebab HBS teramat khas Belanda kemudian dicangkok secara utuh dari Belanda dan diterapkan di Hindia Belanda. Itu sebabnya mengapa banyak orang Jawa yang tidak berhasil menuntaskan pendidikan HBS mereka. Sekolah menengah Hindia Belanda yang baru akan menjadi kenyataan di tahun 1919, dan menjadi kelanjutan sekolah MULO, dan kemudian dibagi dalam bagian sastra Timur, sastra Barat dan bagian ilmu pasti.



Para anggota Panitia dan pemakalah Kongres Kebudayaan Jawa 1918 (Comite voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling te Surakarta) Baris Pertama: R.M.A. Woerjaningrat, Pangeran Hadiwijoyo, R. Sastro Widjono (Ketua), Dr Radjiman Wediodipoero, Z.H. Pangeran Adipati Ario Praboe Prangwedono (kehormatan), S. Koperberg (Sekretaris). Baris Kedua: Dr. Satiman Wirjosandjojo, Z. Stokvis, D. van Hinloopen Labberton, Dr Tjipto Mangoenkoesoemo, J. Rottier, A. Mühlenfeld, R.M.S Soeriokoesoemo ((sumber: KITLV, foto dibuat tahun 1918)

Bagian sastra Timur akan berhasil apabila ada murid-murid dari kalangan Jawa yang kemudian menyebarkan pengetahuan mereka kepada sesama anak bangsa. Dampaknya, akan terjadi penyegaran bahasa dan kebudayaan Jawa sehingga berkembang menjadi unsur yang hidup dalam masyarakat. Bahasa dan kebudayaan Hindia Belanda akan diajarkan agar kebudayaan lama dapat diremajakan dan ini amat diperlukan oleh sebuah bangsa yang kukuh dan bebas.

Pada bagian akhir Z. Stokvis mengajukan 2 buah kesimpulan (*conclusies*): pertama, apabila orang Jawa mau membentuk suatu bangsa yang di bawah kekuasaan sendiri dan dihormati, maka harus melatih diri dalam hal pengetahuan dan teknologi

yang dapat diperoleh dari Barat, yang dapat memberikan pada pengembangan kepribadian nasional dan sosial. Kedua, untuk mencapai tujuan itu diperlukan antara lain sistem pengajaran yang sedekat mungkin berhubungan dengan dasar kebudayaan dan lingkungan yang dikenal sejak lahir.

Bagian lain yang menarik adalah pada saat para peserta menyampaikan komentar, pendapat, pertanyaan atau saran. Berdasarkan hasil liputan koran *de Locomotief* dapat diidentifikasi dinamika KK pertama itu baik dari segi pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh pemrasaran maupun tanggapan dari peserta kongres.

A.2. Perdebatan

Selain uraian tentang isi prasaran dari para pemrasaran seperti di atas, pada bagian ini sengaja dikutip pertanyaan dari peserta kongres dan jawaban dari pemrasaran (perdebatan) yang dimuat di koran *De Locomotief*. Dari berita koran ini dapat diketahui dinamika pemikiran para peserta KK 1918 yang merupakan KK pertama di Indonesia. Peserta yang terlibat dalam perdebatan cukup banyak dan permasalahan yang diperdebatkan amat mendasar. Perdebatan yang terjadi 90 tahun yang lalu itu ternyata masih aktual di masa sekarang. Dalam berbagai forum sarasehan, diskusi, seminar atau kongres pada masa kini masalah yang pernah diperdebatkan itu masih sering muncul lagi.

Dalam koran yang terbit tanggal 6 Juli 1918, hari kedua kongres, berita dimulai dengan pandangan **Steis Callenfels**. Menurut Steis dalam prasaran dapat dilihat betapa sebuah garis pemisah yang tegas diambil antara ilmu pengetahuan eksakta dan kebudayaan Jawa. Menurut pandangannya, penelitian tentang kebudayaan Jawa kuno diperlukan metoda Barat, dan untuk penilaian hasil penelitian diperlukan pula ilmu pengetahuan Barat. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya salah paham seputar kebudayaan Jawa kuno seperti yang masih terjadi sekarang.

Sementara itu, **Soetopo** yang berbicara atas nama pengurus pusat BO yang bercakap dalam bahasa Belanda dan bahasa Jawa, menyatakan BO gembira bahwa kendati ada aneka ragam cara dan pendapat para pemrasaran, ia sepakat bahwa kebudayaan Jawa perlu dipertahankan, yaitu apabila bangsa Jawa ingin berhasil memper-tahankan eksistensinya. Salah paham terjadi ketika BO yang menyebut dirinya demokratis, dinilai seolah bermain mata dengan kelompok aristokrat yang bantuannya memang dibutuhkan. Dalam kaitan dengan hal ini Soetopo menegaskan bahwa BO berdiri di belakang rakyat banyak dengan tujuan mengembangkan secara seimbang baik kelompok aristokrat sebagai kelompok menengah maupun kaum proletar. BO bertujuan agar tercapai kerjasama dari semua pihak, dengan setiap kelompok dengan mengakui hak-hak istimewa masing-masing, dan menghindari terjadinya perpecahan.

Di antara peserta kongres hadir **Pastoor van Lith**. Pastoor berpendapat bahwa sebagian besar makalah terlalu muluk, terlalu mendalam, terlalu luas dan terlalu samar-samar. Baginya, lebih baik dibicarakan hal-hal yang praktis. Dalam hal pengajaran bahasa, menurut Pastoor yang sangat berpengalaman dan berkenalan dengan pelbagai macam sekolah, sebagian murid memang mempunyai masa depan yang baik jika mahir berbahasa Belanda, sedangkan yang lain lebih cocok apabila pendidikan di sekolah normal diutamakan pelajaran bahasa daerah. Tetapi ada suatu tuntutan

agar bahasa yang digunakan untuk menangani kebudayaan Jawa memakai bahasa Belanda. Sementara itu, di antara orang Jawa mempunyai keinginan agar sekolah normal menjadi pendukung utama dalam menumbuhkan nasionalisme, sebab di sekolah itu dipersiapkan para guru bantu. Kendalanya adalah kekurangan dana. Sebab itu pembicara minta agar keberadaan sekolah normal diakui, demi pengembangan sekolah nasional nanti. Pastoor van Lith menggarisbawahi pendapat itu.

Selain itu, Pastoor juga mengatakan tentang para pribumi yang sekolah di sekolah pendidikan guru merasakan betapa indahnya bahasa ibu, tetapi mulai tergerus oleh pemakaian bahasa Jawa dalam buku-buku yang disusun dengan pengaruh bahasa Belanda. Dikatakan oleh Pastoor bahwa orang Jawa belum memiliki tata bahasanya sendiri dan sedang menyusunnya berdasarkan tata bahasa Belanda. Oleh karena itu, amatlah perlu untuk meningkatkan sekolah normal selain diberikan pelajaran bahasa daerah, juga diberikan pelajaran tambahan dalam bahasa Belanda, diikuti dengan pembagian lebih lanjut dalam jenjang pendidikannya. Perlu juga diusahakan adanya buku pelajaran yang ditulis dalam bahasa Jawa yang bebas untuk sekolah dasar.

Dalam bagian lain De Locomotief menulis pendapat **Darmakoesoema**, yang merasa kecewa karena tidak sempat mempelajari prasarana secara mendalam. Sebagai orang Sunda ia menggarisbawahi penyesalan Tjipto Mangoenkoesoemo, mengapa kongres tidak mengundang pemrasaran dari kalangan Sunda. Mengapa tidak mengundang Dr. Hoessein Djajadiningrat yang sudah menulis buku tentang Pasundan? Sejumlah pemakalah membahas tentang jiwa atau roh rakyat Jawa yang tidak seluruhnya sesuai dengan orang Sunda. Umpamanya, di tanah Sunda wayang kurang dipahami. Di sekitar Bandung juga tidak ada candi atau sisa-sisa bangunan Hindu. Menurut pembicara, di tanah Sunda kepercayaan animisme langsung berlanjut kepada Islam, tidak diselang oleh agama Hindu terlebih dahulu. Oleh sebab itu cerita-cerita wayang tidak cocok untuk diajarkan di sekolah Sunda karena wayang tidak dikenal orang Sunda. Pembicara juga harus mengakui bahwa kerjasama antara orang Jawa bagian Tengah dengan orang Sunda kurang lancar yang sebagian besar disebabkan adanya salah pengertian yang perlu segera diluruskan. Di Bandung ada masyarakat Sunda dan masyarakat yang berasal Jawa bagian Tengah. Dalam BO terdapat bagian khusus yang menangani orang Jawa, mengapa? Pembicara sedih sebab bukankah BO tidak membedakan antara Jawa dan Sunda. Pada kesempatan itu Darmakoesoema menyerahkan satu kopi tulisan dari kelompok “Kaoem Moeda” di Jawa bagian Barat yang diharapkan dapat dijadikan masukan untuk dibahas lebih dalam lagi. Terhadap komentar Darmakoesoema ini Ketua Sidang atas nama BO mengatakan bahwa masalah pergesekan itu sudah juga dimaklumi dan sebab itu pengurus BO Pusat akan mengadakan rapat khusus di Bandung untuk membahas hal ini.

Peserta dari Sunda yang lain, **Soeria Amidjaja** menyatakan bahwa sebagai warga Sunda dan atas nama Pasoendan, ia menyambut baik maksud tujuan kongres, namun ia mengingatkan adanya slogan besar yang sudah dicanangkan yaitu “Jawa untuk Bangsa Jawa”. Menurut Soeria Atmadja tujuan ini sangat sukar untuk dicapai sebab perlu ada kerja sama, tidak hanya tertulis, tetapi juga dalam kenyataan. Dalam kata “pembangunan kembali” – disayangkan oleh Soeria Atmadja, sepertinya tak ada tempat untuk bangsa Sunda sebab itu dapat dimengerti apabila ada perasaan kurang percaya di antara orang-orang Sunda dan curiga bahwa bangsa Jawa hendak mengikuti

apa yang dilakukan bangsa Prussia di Jerman sekarang. Terhadap pendapat ini Ketua Sidang memohon agar pembicara tidak menyimpang ke ranah politik melainkan tetap pada ranah kebudayaan. Terhadap jawaban itu Soeria Amidjaja menyatakan: “Kami, bangsa Sunda tidak terlampaui senang dengan kebudayaan Jawa. Kami lebih cenderung mengikuti Islam....” (dan pendapatnya tidak diteruskan)

Bagaimana pendapat **Dr. Von Romer** tentang isi makalah? Von Romer yang mengaku juga berdarah Jawa mengatakan bahwa sejumlah orang Jawa justru mencederai kebudayaan mereka sendiri dengan menganjurkan orang Jawa agar menutup diri dari kebudayaan Eropa. Menurut dia sebuah kebudayaan akan eksis apabila sebanyak mungkin berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Ia mengatakan amat menyukai mistik Yunani, tetapi tidak ingin hidup kembali dalam zaman itu. Orang Jawa mengagungkan masa lampau tetapi hendaknya mereka berpaling ke depan dan jangan ke belakang. Ia juga menyayangkan terhadap apa yang diungkapkan sebagai jiwa atau roh Eropa. Juga disayangkan persetujuan besar yang sedang berkecamuk di Eropa dan pelecehan terhadap bangsa Jerman, sebab bukankah ada banyak musik Jerman yang indah, falsafah Jerman yang tak kalah tangguh yang semuanya sudah berpengaruh positif pada bangsa-bangsa lain?

Dalam komentarnya, **Rijkee** menyayangkan bahwa terlalu sedikit pembahasan tentang pengembangan karakter dan terlalu banyak tumpuan pada kesejahteraan. Orang bermimpi tentang keberadaan sebuah bangsa yang mandiri tetapi lupa bahwa untuk mencapai itu diperlukan berabad-abad lamanya. Rakyat Jawa masih bagaikan seorang anak yang masih harus belajar berjalan. Orang Jawa perlu berorientasi dulu, pengaruh Barat mana yang baik, mana yang jelek. Sukar untuk menentukan arah. Dari sebuah biji mangga tidak akan tumbuh sebuah pohon jeruk. Sebab itu, lebih baik menggarap lahannya dulu, yaitu jiwa rakyat. Kebudayaan merupakan tenaga rohani atau batin yang berasal dari dalam. Sebab itu, harus bijaksana ketika berpaling pada Barat. Ada bahaya besar apabila mengekor pendidikan secara Barat, terlalu banyak tujuan terlampaui sedikit sarana. Kesejahteraan material tanpa pendidikan merupakan kehancuran sebuah bangsa.

Sebagai peserta kongres **Dr. Hoessein Djajadiningrat** (yang disayangkan oleh Darmakoe-soema karena tidak dipilih menjadi pemakalah) juga menyampaikan pendapatnya. Ketika ia berdiri, serentak para peserta memberikan tepuk tangan yang riuh. Hoessein menyatakan setuju dengan pendapat pastoor Van Lith. Ia juga mengatakan terdapat banyak hal yang samar dalam prasaran-prasaran itu. Juga terdapat kurang-pahaman pemrasaran mengenai kebudayaan Jawa kuno. Bahkan ada sejumlah kesalahan dalam makalah Muhlenfeld. Juga pemrasaran lain seperti dr. Tjipto dan Stokvis yang telah menyebutkan berbagai hal yang tidak benar dan yang paling membuat ia terperanjat adalah makalah Van Hinloopen Labberton yang menyebutkan banyak hal yang dapat dipertentangkan.

Hossein membantah pandangan yang menyiratkan seolah kebudayaan Jawa kuno sekarang tidak lagi hidup dalam kebudayaan dewasa ini. Orang terlalu terpukau pada tidak adanya bangunan monumental. Lagi pula, para pemrasaran hanya menonjolkan beberapa aspek saja dari kebudayaan Jawa, umpamanya Tjipto hanya menyoroti kesenian. Yang perlu diperhatikan bukan hanya mengikuti kebudayaan lama melainkan membangkitkan minat terhadap yang lama demi membangun masa

depan. Yang harus diperhatikan bagaimana agar tidak terlalu berpihak pada satu sisi saja seperti yang diingatkan oleh Stokvis.

Terhadap pendapat Hoesein, **J.E. Stokvis** menjelaskan tentang maksud penguasaan dari kebudayaan lain. Menurut Stokvis seolah-olah kebudayaan Jawa itu selalu mendapat hantaman: dari kebudayaan Hindu, dari orang Arab, dari orang Eropa. Yang dialami kebudayaan Jawa tidak hanya penguasaan dalam arti sempit tetapi penguasaan dalam arti yang lebih luas, dan hal ini memang merupakan suatu keniscayaan sejarah. Pihak yang menguasai tidak melakukannya dengan sengaja. Penguasaan Belanda hanyalah akibat ditemukannya jalur laut menuju ke Hindia Belanda. Apabila jalur itu ditemukan beberapa abad lebih dulu maka tidak akan ada penguasaan atau pengaruh Hindu atau Melayu. Harus disadari bahwa penguasaan diakibatkan oleh sebab-sebab ekonomi.

Stokvis tidak setuju kalau dikatakan bahwa peradaban Barat hanya mendatangkan kemudahan. Kemajuan teknologi juga berdampak pada kehidupan jiwa sebuah bangsa. Contohnya jasa perkereta-apian yang selain mengangkut barang dan orang juga memungkinkan terselenggaranya kongres seperti yang sekarang ini. Atau, dunia percetakan misalnya, memiliki kekuatan budaya amat besar. Tetapi pembicara tidak mengingkari bahwa masuknya kebudayaan Barat ke Hindia Belanda sering juga mendatangkan kerusakan berat. Selanjutnya diharapkan bahwa dari kongres ini akan lahir usaha agar kebudayaan membawa berkah bagi rakyat. Sebagai dampak langsung dari kongres ini Stokvis melihat akan tumbuh dan berkembangnya suatu pergerakan yang sebenarnya sudah lama hidup, kendati harus disadari adanya bahaya bahwa akan timbul pertikaian di antara suku bangsa Hindia Belanda. Seyogyanyalah semua pihak menghadapi dengan kepala dingin segala sesuatu yang membedakan serta memisahkan mereka, dengan tetap berpegang teguh pada segala yang mempersatukan mereka.

Dalam KK 1918 hadir tokoh yang kemudian dikenal berha-luan kiri, **Mas Marco Martodikromo**. Mas Masco tampil berbicara dalam bahasa Melayu. Ia menilai kongres ini merupakan sebuah perhelatan antarorang Eropa dengan kalangan ningrat Hindia Belanda dan pihak-pihak lain tidak dilibatkan. Menurut Mas Marco walaupun dibicarakan juga tentang pemerintahan mandiri, hal itu hanya dilakukan demi mendapatkan anggota saja.

Sebagai penanggap terakhir, **Van Bergen** menentang serangan terhadap VOC. Menurut dia VOC memang bukan lembaga kebajikan, kompeni memang hanya ingin berdagang dan hal ini didukung oleh para raja pribumi. Kompeni bertindak sebagai majikan yang lebih baik ketimbang raja-raja Jawa. Van Bergen kemudian memberikan sejumlah bukti sejarah. Bangsa Belanda datang ke sini atas bimbingan Tuhan untuk memainkan sebuah peran. Pembicara tidak sepakat dengan tuduhan bahwa Belanda merusak kebudayaan Jawa, sebab kerusakan itu terjadi justru akibat peperangan di antara para rakyat Jawa sendiri.

Sesudah istirahat sidang dilanjutkan dengan acara tanya jawab lagi. Suasana perdebatan itu yang semakin seru dapat disimak dari komentar dan pendapat para peserta. **Hasan Soemardi** sebagai seorang Sunda, ingin menyingkirkan sejumlah prasangka kurang enak antara orang Jawa dan Sunda yang sempat dikemukakan oleh pembicara sebelumnya. Diakui bahwa bangsa Jawa dan Sunda menempuh jalan kebudayaan masing-masing tetapi di antara kedua suku bangsa itu ada kerjasama yang

baik dan saling menghargai. Memang bagi orang Sunda, akan lebih baik apabila ada makalah dari orang Sunda. Selanjutnya atas nama perkumpulan para pegawai negeri Hindia Belanda yang diketuainya ia meng-himbau untuk memperhatikan nasib para wanita, dengan menghapus poligami dan memajukan pendidikan bagi puteri-puteri demi peran mereka di masa depan dalam masyarakat.

Sementara **Dr. Van Andel** menyatakan tidak setuju dengan pandangan bahwa bangsa Jawa tidak memerlukan ilmu pengetahuan kerohanian dari Barat. Menurutnya, bangsa Jawa juga memetik manfaat dari peradaban rohani Barat. Bahkan agama Nasrani juga merasakan dampak baik dari kebudayaan Jawa. Pertanyaannya adalah, apakah agama Nasrani tidak menyumbang kepada pembangunan kebudayaan Jawa (dalam hal ini sama sekali tidak diartikan: bagaimana membuat orang Jawa menjadi Kristen!). Pandangan Nasrani dapat juga memberikan berkah kepada bangsa Jawa. Ada peluang untuk membina persatuan bangsa kendati ada perbedaan dalam keyakinan beragama.

Tentang orang Jawa, **Abi Koesoemo** berpendapat bahwa setiap orang Jawa berkewajiban turut membantu pencapaian kemajuan bangsanya sendiri. Caranya adalah dengan menomorduakan kepentingannya sendiri dan tidak mengejar keuntungan bagi dirinya sendiri. Kepada orang Barat, pembicara menghimbau, agar: *“ajarkan kepada kami ilmu pengetahuan Barat, tetapi jangan sentuh jiwa nurani kami”*.

Pendapat pemrasaran van Hinloopen Labberton mendapat tanggapan dari **DR. Schriecke**. Ia amat tidak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh pemrasaran van Hinloopen Labberton, terutama pernyataan pemrasaran bahwa ilmu pengetahuan Barat hanya menghantar kemudahan. Menurut penanggap, ciri utama ilmu pengetahuan Barat adalah pemakaian metoda, dan penge-tahuan itu juga mengajarkan logika yang mencegah orang berkhayal. Ilmu pengetahuan juga menumbuh-kembangkan kecintaan terhadap kebenaran dan dengan memahami diri sendiri seseorang akan menjadi rendah hati dan menahan diri. Bangsa Jawa masih harus belajar banyak dari pemakaian metoda Barat, juga demi kepentingan organisasi masyarakat. Kita belajar mengkritik diri sendiri dan sadar bahwa kebudayaan lama harus diperbaharui dan kembali disegarkan, dan juga harus disadari bahwa semua peradaban harus saling membangun.

A.3. Butir-butir Penting

Berita tentang KK 1918, mulai dari persiapan, sambutan, prasaran, dan perdebatan yang antara lain dapat dikutip dari rekaman berita yang dibuat oleh koran *de Locomotief* dapat ditarik beberapa hal penting untuk dijadikan bagian dari sejarah perjalanan bangsa. KK pertama tahun 1918 tidak hanya penting sebagai titik awal dari perjalanan sejarah KK di Indonesia, tetapi inti permasalahan yang diperbincangkan banyak mengandung butir-butir penting bagi sejarah perjalanan kebudayaan bangsa.

Hadirnya **bangsa baru** telah menjadi perbincangan secara terbuka. Dalam kata sambutannya Sastrowidjono selaku Ketua Panitia Penyelenggara secara terbuka menyatakan yakin bahwa kini sudah tiba saatnya untuk terlepas dari tujuan-tujuan politik, menyadarkan rakyat bahwa di samping peningkatan ekonomi dan politik, sebuah **bangsa baru** akan mampu memiliki jati dirinya (nasionalismenya) apabila bangsa itu bertumpu pada sejarah sendiri serta warisan budayanya sendiri. Penyikapan

terhadap keberadaan kebudayaan kemarin (lama/kuno) dihubungkan dengan kondisi sekarang dan bagaimana merancang hari esok sudah diperdebatkan di KK 1918, dan ternyata masih aktual di masa sekarang. Selain itu, meskipun kongres ini membahas kebudayaan Jawa, namun dalam perdebatan meluas menjadi kebudayaan Nusantara atau Indonesia. Bagian penting yang lain adalah munculnya pandangan agar materi yang dibahas dalam kongres diperluas (diusulkan oleh peserta dari budaya Sunda) tidak hanya sebatas kebudayaan Jawa. Buah dari usul itu ranah yang dibahas pada kongres berikutnya diperluas mencakup Sunda, Jawa, Madura dan Bali.

Bagian penting dari KK 1918 yang lain adalah perdebatan tentang faham kesadaran bangsa. Forum kongres telah "dikemas" menjadi ajang kaum terpelajar untuk mematangkan konsep kesadaran berbangsa. Khusus mengenai munculnya berbagai pandangan dari para pemrasaran tentang pentingnya membangun kesadaran berbangsa, membuktikan bahwa KK 1918 memiliki hubungan dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa yang digerakkan oleh BO. Di samping tugas menumbuhkan kesadaran berbangsa perlu juga ditumbuhkan kesadaran tentang perkembangan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu kongres ini dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan kesadaran budaya bangsa yang amat bersejarah.

Hal ini dapat dilihat dari isi perdebatan antara Soetatmo dan Tjipto Mangoenkoesoemo tentang nasionalisme. Soetatmo mengemukakan konsep nasionalisme dengan menyebutnya sebagai "*Javanese nasionalism*", sementara Tjipto Mangoenkoe-soemo mengemukakan konsepnya tentang nasionalisme dengan menyebutnya sebagai "*Indies nasionalism*". Perdebatan itu telah menarik perhatian pakar sejarah dan pemerintahan Asia Timur dari Jepang Prof. Dr. Takashi Siraishi dengan mengibaratkan sebagai perdebatan antara Pandita dan Satria. Pandita adalah Soetatmo dan Satria adalah Tjipto Mangoenkoesoemo (Takashi Siraishi, *Journal Indonesia* Volume 32 1991, hal. 93). Buah dari perdebatan itu arah faham nasionalisme yang diperjuangkan oleh kaum cendekiawan bumiputra semakin mengerucut.

Pembahasan masalah pendidikan kaum bumiputra yang sangat serius pada KK 1918 menjadi titik awal tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Seperti dikatakan Stokvis, sebagai dampak langsung dari kongres ini akan tumbuh dan berkembang suatu pergerakan yang sebenarnya sudah lama hidup, kendati harus disadari adanya bahaya bahwa akan timbul pertikaian di antara suku bangsa Hindia Belanda. Disarankan oleh Stokvis agar semua pihak menghadapi dengan kepala dingin terhadap perbedaan dan tetap berpegang teguh pada segala yang mempersatukan bangsa ini. Materi pendidikan seperti penggunaan bahasa dan pelajaran lainnya seperti sejarah, filsafat, ilmu alam dan teknik diperdebatkan pada KK 1918 dan hal ini masih berlanjut hingga kongres sekarang. Diusulkan untuk memperhatikan nasib kaum wanita, dengan menghapus poligami dan memajukan pendidikan bagi putri-putri demi peran mereka di masa depan dalam masyarakat.

Selain kongres membahas masalah-masalah di atas, pada penutupan disampaikan sebuah rekomendasi tentang *perluanya didirikan sebuah lembaga penelitian kebudayaan*. Kehadiran lembaga penelitian ini dipandang sangat penting dalam rangka menyelamatkan kekayaan kebudayaan dan mengem-bangkan kebudayaan Jawa khususnya. Pada akhir sidang usulan tersebut mendapatkan persetujuan peserta secara bulat, dan menjadi sebuah rekomendasi kongres yang amat penting artinya bagi

perkembangan kebudayaan di Jawa, Sunda, Madura, dan Bali serta bagi kebudayaan di Indonesia.

Sebagai peristiwa budaya, meskipun pada awalnya kongres ini masih sangat sederhana bila dilihat dari segala sisi, dari sisi konsep, materi, tujuan, peserta dan penyelenggaraannya, tetapi pastilah dari kegiatan ini ada bagian-bagian menarik untuk disimak dan dipetik manfaatnya. Kongres ini seharusnya dapat dikategorikan sebagai langkah awal yang luar biasa, karena diselenggarakan pada saat dan suasana kehidupan masyarakat yang sedang mendapatkan tekanan baik secara lahir maupun batin oleh penjajah. Seperti telah diuraikan di depan KK pertama tahun 1918 juga pantas disebut sebagai peristiwa budaya yang bersejarah karena merupakan peristiwa “lahirnya kesadaran tentang nasib budaya bangsa”, di samping “lahirnya kesadaran berbangsa”. KK pertama yang diselenggarakan tahun 1918 - jauh sebelum Indonesia merdeka - tepat berada di tengah-tengah dua peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Dari gambaran tentang latar belakang diselenggarakannya KK 1918, tujuan, topik yang dibahas dan rekomendasi yang disepakati maka makin jelas pula betapa besar peran kongres itu bagi perkembangan kebudayaan bangsa hingga saat ini. KK 1918 telah menjadi mesin pendorong diselenggarakannya kongres-kongres berikutnya. Lebih membanggakan lagi KK 1918 digagas dan dimotori penyelenggaraannya oleh kaum terpelajar bumiputra. Dengan posisi KK 1918 berlangsung di antara dua peristiwa yang amat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya BO (1908) dan Sumpah Pemuda (1928) maka Kongres Kebudayaan pertama (1918) tidak hanya merupakan peristiwa sejarah politik bangsa, tetapi juga merupakan peristiwa sejarah budaya bangsa. Bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai “manifes kebudayaan” pada zaman kita sedang dijajah.

Dari kutipan berita tentang perdebatan dan kesimpulan KK 1918 yang dimuat di koran *De Locomotoef* ini dapat ditarik beberapa catatan penting. *Pertama*, bahwa ide menyelenggarakan KK yang semula hanya terbatas pada kebudayaan Jawa, telah mendorong tumbuhnya keinginan untuk menyelenggarakan KK yang cakupan materi yang dibahas lebih luas lagi, termasuk Sunda, Madura dan Bali dan bahkan masalah kebudayaan Indonesia. *Kedua*, berkembangnya pemikiran untuk memajukan kebudayaan Jawa yang dinilai telah mendapat dampak negatif dari pertemuannya dengan kebudayaan Barat. *Ketiga*, seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, tumbuh pula kesadaran untuk menyongsong masa depan kebudayaan bangsa.

A.4. Siapa D. van Hinloopen Labberton?

Untuk nama yang satu ini patut disinggung karena mempunyai peran dalam memajukan perkumpulan BO maupun bagi kebudayaan dan bahasa khususnya maupun dalam kaitan penyelenggaraan KK pertama tahun 1918. Sebagaimana disebut di bagian depan, D. van Hinloopen Labberton adalah orang yang berinisiatif mengusulkan kepada pemerintah Batavia agar diselenggarakan Kongres Bahasa Jawa, tetapi kemudian ditolak oleh kaum terpelajar bumiputra yang bernaung dalam BO. Selain itu, Labberton adalah seorang tokoh pimpinan Teosofi dan pernah menjabat sebagai Ketua Teosofi Dunia pada tahun 1912. Setelah Dr. Radjiman bertemu dengan tokoh ini,

diakui cakrawala dunia pemikiran tesofinya menjadi bertambah luas.

Dalam tulisannya yang dimuat di majalah Tempo 4 Juni 1988 dengan judul “Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa” **Akira Nagazumi** memaparkan pandangan Labberton tentang BO, kebudayaan dan bahasa. Sebagai penulis buku berjudul “*The Dawn of Indonesian Nationalism*” Prof. Akira Nagazumi dari Universitas Tokyo, telah menjelaskan panjang lebar soal pertumbuhan dan pengaruh BO sejak didirikan pada tahun 1908, sebagai organisasi nasionalis pertama di Indonesia. Menurut Nagazumi, organisasi ini lebih bersifat kebudayaan daripada politik. Selain itu ia juga menyinggung hubungan BO dengan Labberton.

Selain itu Nagazumi juga menyinggung tentang siapa dan peran apa yang dilakukan oleh D. van Hinloopen Labberton terhadap BO. Menurutnya, ada 2 kelompok agama yang berpengaruh terhadap BO. Pertama, pengaruh guru-guru muslim yang saleh, berasal dari sekolah yang dikenal dengan nama pesantren, yang hidup sangat bebas dari kekuasaan duniawi. Kedua, pengaruh dari Himpunan Teosofi, melalui tokoh wakil sekretarisnya di Hindia, yaitu D. Van Hinloopen Labberton, yang diberi julukan “kiai santri” oleh orang-orang Jawa. Ia dikenal luas di Hindia Belanda, dan sebagai guru bahasa Jawa pada Gymnasium Belanda Willem III. Ia sudah menjalin hubungan dengan siswa-siswa STOVIA, bahkan sejak sebelum berdirinya Budi Utomo. Sebagai tokoh pembaharu etis yang bersemangat Labberton menaruh minat cukup besar terhadap organisasi BO.

Pandangan Labberton yang dinilai penting oleh Nagazumi adalah isi dari separuh pertama ceramahnya pada 16 Januari 1909 yang dihadiri oleh 300 peserta. Di dalam ceramah itu ia menguraikan tujuan himpunan dan bagaimana hubungannya dengan hari depan bangsa Jawa. Ia mengemukakan gagasan tentang kebangkitan nasional, dengan mengatakan bahwa bangsa di dunia menjadi dua golongan, yaitu bangsa-bangsa besar yang sadar akan tugas yang harus ditunaikan di dunia, dan bangsa-bangsa kecil yang tidak sadar. Sebagai contoh dikemukaannya peristiwa ketika Belanda mendapatkan kemerdekaannya dari Spanyol. Pada peristiwa ini ia melihatnya sebagai sumber kebangkitan Belanda, yang kemudian dapat tampil pada kedudukan sebagai bangsa besar. Pada bagian kedua ceramahnya mengenai BO, ia mengartikannya sebagai “kesadaran moral”. Sebagai seorang teosof, ia mengutamakan kebutuhan akan keselarasan antara moral nasional dan pembangunan peradaban material, suatu pendirian yang sangat mirip dengan pidato Dr. Radjiman pada kongres pertama BO. Ia tidak berbicara tentang aspek-aspek mistik dalam teosofi, seperti masalah reinkarnasi atau okultisme, walaupun paham-paham ini sangat dikenal di kalangan alam pikiran priayi.

Masalah paling penting dalam ceramahnya adalah bahasa yang digunakan. Seluruh ceramahnya disampaikan dalam bahasa Melayu, yang kelak akan dikenal sebagai bahasa Indonesia. Sebagai guru bahasa Jawa tentu saja ia sangat mahir baik berbahasa Jawa maupun Melayu, tetapi ia memilih berbahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu itu tentu saja menimbulkan sesuatu yang kontradiktif, karena para pimpinan BO hampir selalu menggunakan bahasa Belanda seperti Soetomo dan Goenawan Mangoen Koesoemo yang dengan latar belakang pendidikan mereka menjadi mahir berbahasa asing, namun menjadi tak pandai dalam bahasa ibu mereka sendiri. Dengan penggunaan bahasa Melayu tersebut Labberton ingin menunjukkan

dan untuk menyadarkan penduduk pribumi dan membuka pikiran lebih lebar, orang memerlukan pengetahuan dasar tentang bahasa Belanda, yang bagi mereka sangat sukar. Dalam masalah pendidikan bahasa, BO tetap sangat berorientasi kebarat-baratan.

Masalah penting kedua dalam ceramahnya ialah penekannya pada masalah swawinaya (*selfdiscipline*) demi kepentingan bangsa. Ia mendorong agar penduduk pribumi meninggalkan tujuh kejahatan, yang semuanya berawal dengan aksara “ma”: yakni, **main** (bermain kartu berjudi), **madon** (bermain perempuan melacur), **minum** (minum minuman keras bermabuk-mabuk), **madat** (candu), **maling** (mencuri), **mada** (menyumpahi), dan **mangani** (rakus). Slogan ini berbeda dengan yang biasa dikenal di kalangan orang Jawa, yakni “ma lima”: **main**, **madat**, **maling**, **mabuk**, dan **madon**. Slogan-slogan yang berpurwakanti ini melengkapi cita-cita Budi Utomo yang abstrak itu dengan sasaran-sasaran praktis dan bisa dikerjakan. Juga slogan-slogan tersebut memukau daya angan-angan orang Jawa melalui permainannya yang lembut terhadap bahasa pribumi.

Dari uraian mengenai siapa Labberton, dapat disimpulkan bahwa BO mempunyai hubungan hubungan yang dekat dan banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Labberton. Bagian lain yang patut dicatat adalah mengenai pilihan untuk pemakaian bahasa Melayu bagi perkumpulan BO yang lebih mengutamakan pemakaian bahasa Belanda. Labberton lebih memilih pemakaian bahasa Melayu yang dinilai lebih memudahkan rakyat untuk membuka pikiran ketimbang bahasa Belanda. Juga bukan bahasa Jawa, meskipun ia dikenal mahir berbahasa Jawa dan sebagai guru bahasa Jawa pada Gymnasium Belanda Willem III dan tertarik untuk mengusulkan Kongres Bahasa Jawa kepada pemerintah pusat di Batavia.

B. Kongres Kebudayaan 1919

Kongres ini dapat disebut sebagai Kongres Kebudayaan II. Kongres diselenggarakan di Surakarta pada bulan Desember tahun 1919. Data tentang KK tahun 1919 secara lengkap belum ditemukan. Materi yang dibahas dalam kongres mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa, Madura dan Bali. Salah satu pandangan disampaikan oleh Dr. FDK. Bosch adalah tentang persoalan sampai di mana peninggalan-peninggalan purbakala itu dapat berfungsi kembali sebagai unsur yang hidup dalam alam pikiran bumiputra waktu itu. Peninggalan purbakala itu harus dicari nilainya bagi kebudayaan Indonesia yang akan datang. Dasar pemikiran ini menjadi sumber dari adanya dua macam usaha: (1) *penyelidikan yang mendalam terhadap peranan unsur-unsur Indonesia dalam pembangunan monumen-monumen yang begitu megah dan indah*; (2) *mengembalikan kemegahan serta keindahan bangunan-bangunan yang telah runtuh itu dengan jalan membina kembali setelah rekonstruksinya di atas kertas dapat dipertanggungjawabkan* (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1967: hal. 3).

Sebelum kongres tahun 1919 diselenggarakan, kaum terpelajar berkumpul di Yogyakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disepakati pada acara penutupan Kongres Kebudayaan I (1918), yaitu tentang pembentukan sebuah lembaga penelitian kebudayaan. Hasil dari pertemuan itu pada tanggal 4 Agustus 1919 didirikanlah lembaga penelitian yang diberi nama **JAVA-INSTITUUT**, berkantor di Surakarta. Lembaga ini

dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD-ART) yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan surat keputusan No. 75 pada tanggal 17 Desember 1919. Yang menarik dari status lembaga ini, sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar disebutkan bahwa masa hidup Java-Instituut dibatasi, hanya untuk waktu selama 29 tahun dihitung mulai tanggal 4 Agustus 1919. Tepat pada tanggal 4 Agustus 1948 Java-Instituut harus menyatakan diri bubar demi hukum.

Kongres ini merupakan langkah pertama dari Java-Instituut setelah tanggal 4 Agustus 1919, melakukan persiapan dan pelaksanaan kongres. Berkenaan dengan peran Java-Instituut yang dominan dalam menyiapkan dan melaksanakan kongres, maka sejak saat itu dan kongres-kongres selanjutnya, namanya berganti menjadi **CONGRES VAN HET JAVA-INSTITUUT** atau **Kongres dari Java Instituut**. Meskipun namanya berubah, tetapi tujuan dasar dari kongres masih tetap sama dengan ketika pertama diselenggarakan yakni mengembangkan kebudayaan (*cultuur onwikkeling*), dan sasarannya tidak hanya terbatas pada kebudayaan Jawa saja.

Gambaran tentang status, tugas, fungsi dan susunan organisasi lembaga penelitian kebudayaan itu, tercantum dalam Anggaran Dasar Java-Instituut yang mendapatkan persetujuan No. 75 tahun 1919. Bunyi Pasal demi pasal Anggaran Dasar tersebut adalah sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR JAVA INSTITUUT

Pasal 1

Perhimpunan itu bernama Java-Instituut, berkedudukan di Surakarta.

Pasal 2

Perhimpunan ini didirikan untuk masa waktu 29 tahun dimulai pada tanggal 4 Agustus 1919.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Perhimpunan ini ialah untuk mengembangkan kebudayaan pribumi dalam arti yang seluas-luasnya dari Jawa, Madura dan Bali.

Pasal 4

Perhimpunan ini berusaha mencapai tujuan:

- a. tujuan mengumpulkan data selengkap mungkin tentang bentuk dan karya kebudayaan Jawa, baik dari sekarang maupun yang telah berkembang dari waktu ke waktu.*
- b. memajukan pengetahuan dan pengertian kebudayaan Jawa dengan mengadakan kongres-kongres, pameran, ceramah, diskusi, kursus, pertanyaannya berhadiah (kuis) dan karang-mengarang.*
- c. membantu tiap usaha yang mengarah pada kegiatan seperti yang dilakukan oleh perkumpulan Java-Instituut.*
- d. mengupayakan ikhtiar lain yang sah yang bermanfaat bagi Java-Instituut dan dapat membantu dalam mencapai tujuan.*

Pasal 5

Perhimpunan terdiri atas anggota-anggota biasa, anggota kehormatan, anggota dengan surat-menyurat dan sebagai penyumbang. Perkumpulan-perkumpulan, Badan-badan bersifat apapun dapat masuk sebagai anggota atau penyumbang atau simpatisan.

Pasal 6

Keanggotaan biasa dan anggota penyumbang atau simpatisan dapat diminta dengan mendaftar pada pengurus. Anggota melalui surat-menyurat diangkat oleh Pengurus. Kepada orang-orang yang berjasa dalam hal menggerakkan Perhimpunan ini dapat dijadikan Anggota Kehormatan, diputuskan dalam rapat umum.

Pasal 7

Pengurus terdiri atas paling sedikit lima anggota, dipilih dalam Rapat Umum dari anggota-anggota biasa dan anggota-anggota kehormatan. Ketua dipilih secara itu. Ditambah lagi Perkumpulan-perkumpulan dan Badan sebagai anggota atau penyumbang diberi kuasa untuk menunjuk wakilnya paling banyak 2 orang untuk duduk dalam pengurus setelah dipilih melalui Rapat Umum. Keputusan dapat diambil apabila disetujui $\frac{3}{4}$ suara yang diambil. Mereka yang ditunjuk oleh Perkumpulan atau Badan sebagai wakil untuk duduk dalam pengurus Perhimpunan Java-Instituut akan menjadi anggota sejak mulai menjabat. Jumlah anggota yang dipilih Rapat Umum sebagai anggota pengurus selalu harus paling sedikit seorang dari sejumlah wakil yang duduk dalam pengurus. Kewajiban-kewajiban pengurus oleh Pengurus dibagi antara kepada seluruh anggota. Untuk pimpinan sehari-hari dipilih oleh Pengurus di antara mereka, terdiri paling sedikit tiga orang, di antaranya Ketuanya.

Pasal 8

Pengurus mewakili Perhimpunan di dalam dan di luar hukum dan berwenang bertindak atas namanya. Atas nama Pengurus, Ketua dan Penulis.

Pasal 9

Organisasi dan tata kerja Perhimpunan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Anggaran Dasar. Peraturan ditetapkan pada rapat umum dengan suara terbanyak. Suara berhenti, nasib ditentukan.

Pasal 10

Tidak dapat diadakan perubahan dalam Anggaran Dasar dan tidak dapat diadakan pembubaran Perhimpunan untuk sementara kecuali atas keputusan Rapat Umum, atas usul Pengurus dengan sedikit-dikitnya hadir $\frac{1}{4}$ dari anggota dan diambil sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ dari suara rapat. Keputusan pembubaran hanya berlaku apabila mayoritas mutlak anggota menyetujui.

Pasal 11

Dalam hal pembubaran Perhimpunan dikuatkan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan milik Perhimpunan dalam suatu Rapat Umum (Majalah Djawa, 1921: hal. 65-66).

Untuk operasionalisasi lembaga Java-Instituut, anggaran belanja didapatkan dari subsidi Pemerintah Batavia dan keempat kerajaan, yaitu: Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran di Surakarta, serta Kasultanan dan Puro Pakualaman di Yogyakarta. Di samping itu juga dari pendapatan lain, berupa: iuran anggota, uang langganan majalah dan tiket masuk museum Sonobudoyo. Sesekali mendapat pemasukan dari undian dan subsidi dari perusahaan besar dan beberapa pemerintah kota-praja.

Sebagai pendiri adalah Pangeran Prangwadono Dr. R. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, dan Dr. FDK. Bosch. Dewan Pengurus pertama terdiri atas R. Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua, S. Koperberg sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan beberapa anggota, antara lain Dr. FDK. Bosch, R. Ng. Poerbatjaraka, Ir. Th. Karsten, serta beberapa wakil dari perkumpulan lain, seperti Boedi Oetomo dan Sentral Sarekat Islam.

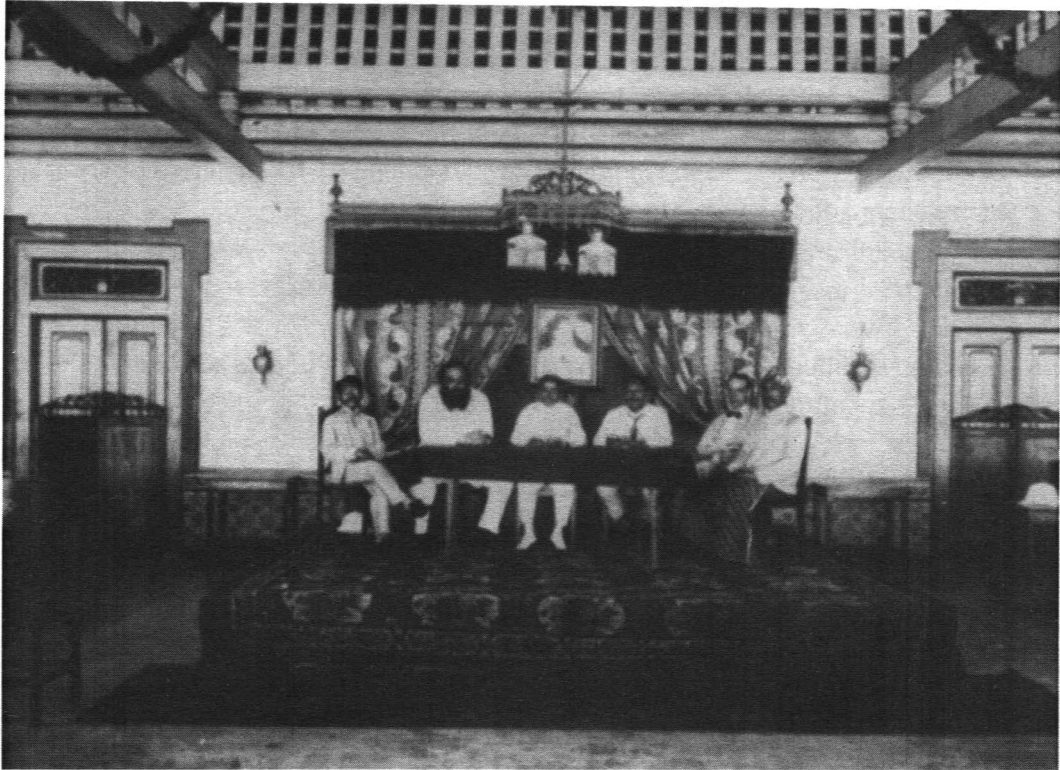
Dalam perjalanan hingga menyatakan diri bubar tanggal 4 Agustus 1948, Java-Instituut telah memberikan sumbangan yang amat besar bagi sejarah dan perkembangan kebudayaan di Indonesia. Di samping melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, pencatatan dan perekaman, Java-Instituut banyak melakukan kegiatan yang amat berguna bagi pengembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Kegiatan itu antara lain berupa penelitian, penyelenggaraan kongres, pameran, ceramah, sayembara, pergelaran tari, wayang (wayang wong dan wayang kulit), pendirian lembaga pendidikan kerajinan, penerbitan majalah dan buku. Di samping menyelenggarakan pameran bersamaan dengan penyelenggaraan kongres juga kegiatan khusus, seperti pameran kerajinan tangan di Cirebon (1937), kerajinan tangan dari Jawa, Madura, Bali dan Lombok bersamaan dengan sekaten (1939). Di samping itu juga menyelenggarakan berbagai macam sayembara: sistem pencatatan musik Jawa dan buku pegangan dan pelajaran sejarah (1921), tatakrama Jawa, Sunda, Madura (1928), terjemahan Serat Wedotomo (1935), penulisan roman Jawa, Sunda dan Madura (1937).

Java-Instituut merintis berdirinya museum Sonobudoyo yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, 6 November 1935, yang sekaligus menjadi Pelindung Museum. Beliau juga menghibahkan sebidang tanah di sebelah Alun-alun Lor (Utara) untuk Museum. Dewan pengurus harian terdiri atas: PH. Hadinegoro sebagai Ketua, JL. Moens sebagai Wakil Ketua, dan S. Koperberg sebagai Sekretaris merangkap Bendahara. Bentuk arsitektur bangunan museum dirancang menurut gaya bangunan Jawa oleh seorang arsitek terkenal bernama Ir. Thomas Karsten dari Semarang.

Pada tahun 1939-1940 bangunan diperluas lagi yaitu dibangun sebuah pendopo di bagian Timur, dan sebuah sekolah kerajinan di bagian belakang museum. Tujuan utama didirikannya museum ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perkembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Oleh karena itu museum ini sangat berjasa dalam menyelamatkan berbagai macam benda koleksi peninggalan sejarah dan budaya dari wilayah tersebut. Koleksi yang dikumpulkan antara lain berupa wayang, keris, alat musik, pakaian adat, topeng, berbagai macam ukiran, barang-barang seni kerajinan, patung, arca, dan berbagai macam buku yang dihimpun sebagai bukti sejarah perkembangan kebudayaan di pulau Jawa dan Bali.

Di samping itu Java-Instituut juga sangat memperhatikan masalah pendidikan kesenian. Pada tahun 1939 mendirikan Sekolah Kerajinan Tangan (*Kunst*

Ambachtsschool), dengan bantuan dana dari Batavia dan Den Haag. Peresmiannya dilaksanakan pada 1 Maret 1941. Bertindak sebagai Pelindung adalah KGPAA. Praboe Soeradilaga, yang juga menjabat sebagai Pengurus Java-Instituut. Gedung sekolah dan sebuah asrama berlokasi di belakang Museum Sonobudoyo.



Kongres Kebudayaan di Solo, tahun 1919 (Java-Instituut Dalam Foto: 2001)

Sekolah itu bertujuan memberikan pendidikan kepada anak berbakat di bidang pandai emas, perak dan ukiran kayu. Melalui pendidikan itu anak-anak dididik untuk menguasai secara teknik dan artistik dalam mengukir dan membuat perhiasan. Salah satu di antara pengajarnya, yakni M. J. Katamsi menjadi perintis berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, dan kini berubah menjadi Institut Seni Indonesia (ISI). Java-Instituut juga telah berjasa dalam mengembangkan majalah di Indonesia antara lain menerbitkan majalah Djawa, Poesaka Djawi, Poesaka Soenda dan Poesaka Madhoera.

C. Kongres Kebudayaan 1921

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1921 merupakan kongres III. Topik yang dibahas dalam kongres di Bandung adalah mengenai pendidikan musik dan sejarah, khususnya untuk pada siswa-siswa bumiputra. Sesuai keputusan rapat Panitia kongres topik dan pemrasaran dalam KK 1921 adalah sebagai berikut.

1. Topik tentang perlunya pelajaran sejarah

Yang ditunjuk sebagai pemrasaran adalah: (1) R. Darna Koesoema; (2) MW. Dwidjosewojo; (3) Nyonyah W. Mees-Mees; (4) R. Hassan Sumadipradja; (5) RM. Soetatmo Soeriokoesoemo; (6) Z. Stokvis. Pertanyaan-pertanyaan yang diangkat sebagai bahan perdebatan antara lain:

- a. *Andaikan mungkin dan diinginkan untuk melakukan penyebaran pengetahuan sejarah Jawa demi perkembangan suku Jawa, bagaimana maksud ini dapat diupayakan, baik secara umum maupun khusus dalam pendidikan?*
- b. *Dengan nama apa dalam pendidikan pengetahuan ini disam-paikan dan diatur menurut cara dan isinya?*
- c. *Tentang kategori-kategori mana lembaga pendidikan harus membentangkan pelajaran ini?*
- d. *Dengan cara apa penelitian sejarah Jawa dapat dimajukan dan peraturan mana yang diperlukan baik untuk tercapainya hasil-hasil pengetahuan maupun terhadap perluasan ilmu yang sudah didapat?*

2. Topik tentang kecenderungan perkembangan musik Jawa

Yang ditunjuk sebagai pemrasaran adalah: (1) IS. Brandes; (2) RT. Djodipoero; (3) Nyonyah S. Holland (Linde Bandara); (4) J. Kats; (5) RMA. Soerjo-Poetro; dan (6) RM. Wreksodiningrat. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain:

- a. *Apakah pendapat Anda tentang keadaan seni nada masa kini di Jawa, dibandingkan dengan yang dahulu. Oleh sebab-sebab yang mana keadaan sekarang ini berkembang dari yang terdahulu?*
- b. *Apa yang dapat diharapkan dari seni nada ini dalam waktu yang akan datang dan arah perkembangannya menurut pendapat Anda?*
- c. *Apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan menjamin perkembangan seni nada ini?*
- d. *Adakah peraturan khusus demi kepentingan seni nada di Jawa, dari pemerintah atau atasan Lembaga Jawa atau badan-badan umum lainnya, dan aturan manakah itu?*

Di samping pokok bahasan tersebut di atas, dalam kongres juga dibahas mengenai masuknya pengaruh kesenian asing. Dengan adanya pengaruh itu timbul sikap pesimis terhadap kelangsungan hidup seni yang akan datang, dengan pertanyaan: "bolehkah diharap kepandaian seni itu akan hidup kembali pada masa yang datang?" Kalau sekiranya kepandaian seni Hindia Belanda yang asli itu diubah sifatnya dengan meniru kepandaian seni Eropa, umpamanya seni wayang ditukar dengan toneel (komidi), gamelan ditukar dengan musik, lukisan Jawa diganti dengan gambar Eropa, maka perubahan itu bukannya menyegarkan hidup *cultuur* (kehalusan budi dan adat) Hindia Belanda, melainkan sesungguhnya berubah sifatnya dan lambat laun seni itu akan lenyap. Menurut mereka, memasukkan kepandaian seni asing semata tidak baik. Oleh karena itu kita harus dapat memilih di antara tiga jalan. Tiga jalan itu, pertama kultur (budaya) lama dibuang selekas-lekasnya dan dibangun kultur baru. Kedua,

kultur lama itu dipelihara seperti sediakala. Ketiga, kultur baru itu disesuaikan dengan kultur lama.

Jalan yang dipilih adalah yang ketiga. Jika diturut jalan pertama maka besar sekali kerugian yang akan diperoleh. Kalau jalan kedua yang dipilih kesenian akan mundur, sebab sesuatu yang hidup itu niscaya akan mengalami kelemahan jikalau terpaksa menurut yang lama. Jika jalan ketiga yang dipilih, ragam-ragam baru itu disesuaikan dengan ragam lama, dan kultur itu tidak akan berkurang nilainya, sebab ia dipimpin melalui jalan-jalan baru, dan dengan demikian akan bertambah teguhlah semangatnya disebabkan oleh yang baru itu. (Majalah Sri Poes-taka, No. 12/1921: hal. 320).

Dalam Majalah Sri Poestaka Tahun III, dimuat berita tentang KK 1921 di Bandung. Di dalamnya antara lain ditulis tentang perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap kongres yang pertama kali diselenggarakan di kota itu. Lebih-lebih perhatian terhadap kegiatan pameran dan pertunjukan seni. Dalam berita itu antara lain digambarkan sebagai berikut:

“Pada tanggal 17,18, dan 19 Juni 1921 telah diadakan kongres Java-Instituut yang pertama di kota Bandung, dikunjungi oleh beratus-ratus orang, ya beribu-ribu orang. Dalam kongres itu dibicarakan Sejarah dan Bunyi-bunyian Jawa. Tetapi lain dari pada membicarakan kedua perkara yang tersebut, kongres itu mempertunjukkan juga: Tari Banyuwangi, Ukir-ukiran, Tonil Sunda dan Wayang Wong. Maka inilah lebihnya kongres ini dari pada kongres yang telah diadakan di kota Solo. Dalam kongres ini orang tidak tinggal pada perkataan saja, melainkan cita-cita itu dibuktikan pula” (Majalah Sri Poestaka, Tahun III, 1921: hal.187)

Tanggapan tentang penyelenggaraan kongres di Bandung juga datang dari Ir. Karsten, antara lain ia berkata: *“...kongres ini patut disebut Cultuurcongres yang sebenarnya. Kongres ini lebih mendekati tempat yang ditujunya”*. (Majalah Sri Poestaka, Tahun III, 1921: hal.187). Hal lain yang menarik dari KK tahun 1921 adalah sambutan Walikota Bandung, SA. Reitsma sebagai tuan rumah, karena pada saat itu ia telah menyinggung tentang pengembangan kebudayaan nasional. Antara lain ia mengatakan demikian:

”Java-Instituut sebagai perkumpulan muda, tetapi telah mampu mengadakan kongres di Bandung yang pertama, yang tujuannya adalah mengembangkan kebudayaan nasional yang dalam keadaan tertindas, akan dihidupkan kembali berkembang di daerah-daerah, seperti yang dikatakan oleh Soeriokoesoemo yang telah menyampaikan prasaran tentang pembentukan dan pengembangan kebudayaan nasional. Untuk ke depan harus dipilih garis-garis yang tetap kukuh, karena masa kini adalah akibat-akibat dari masa lalu, yang sebabnya dapat ditemukan kembali” (Majalah ‘DJAWA’, tahun 1921: hal. 231).

Di samping itu ia berpendapat bahwa dalam mengembangkan kebudayaan tidak perlu cepat-cepat tetapi yang penting adalah harus kuat. Reitsma mengambil perumpamaan sebagai berikut: *“De regenboom wast snel, een storm en hij ligt geknakt. De djatiboom ontwikkelt zich langzaam, heel langzaam, maar hij trotseert het geweld van*

eeuwe.” ((Majalah ‘DJAWA’, tahun 1921:, hal. 232). Maksudnya, kalau perkembangan kebudayaan itu terlalu cepat dapat diibaratkan seperti tumbuhnya ‘*regenboom*’ atau pohon hujan (*regen* berarti hujan dan *boom* berarti pohon, atau dalam bahasa Jawa ‘*udan*’ dan ‘*wit*’). Di Jawa yang dimaksud dengan pohon hujan itu disebut *Trembesi* (Pigeaud, 1948: hal. 445) atau dalam bahasa Latin ‘*Pipturus Velutinus*’ (A. Teeuw, 2002: hal. 824) atau ‘*Pipturus Nicanus*’. (Anton M. Muliono/ Penyunting, 1988: hal. 960). Pohon itu akan cepat tumbuh tetapi mudah patah, sehingga ketika datang badai maka robohlah pohon itu. Sebaliknya, jika pohon Jati (*Djatiboom*), tumbuhnya sangat lambat tetapi kuat, sehingga dapat bertahan lama berabad-abad. Pohon Jati akan dapat bertahan kukuh di tempatnya meskipun badai datang menerjangnya.

Sementara itu wakil Direktur Pendidikan dan Agama, Hardeman dalam sambutannya menyatakan simpati bahwa bangsa Timur telah berupaya untuk mendapatkan kemajuan lebih tinggi dari Barat tanpa meninggalkan budaya sendiri. Yang baik dari budaya dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan evolusinya. Diharapkan akan terjadi asosiasi harmonis antara kebudayaan Jawa dan Belanda. Pemerintah (Hindia Belanda) tidak tinggal diam dan telah mendirikan *Algemene Middelbare School* (AMS). Sekarang giliran masyarakat Jawa untuk membawa pengembangan dan kejayaan organisasi muda ini. (Majalah ‘DJAWA’, tahun 1921:, hal. 233).



Di samping penyajian prasaran dalam kongres itu juga diselenggarakan acara pergelaran kesenian dengan pengantar J. Kunst. Acara seni musik yang ditampilkan antara lain: Calung, Karinding, Doger, Rengkong-Hatong, Gondang, Kecapi, orkes Tarawangsa, Celempung, Angklung, Renteng dan Degung. Adapun sajian tarian yang diiringi dengan acara musik adalah tarian: Gandrung Banyuwangi, Bali-balian, Salatun, Giru Bali, Ayah Samirah, Gunung Sari, Angleng, Lebak-lebak, Rembe, Dril, Tètèl- tètèl, Ugo-ugo, Cap Gomeh dan Lia-liu. Beberapa di antara tarian di atas dewasa ini sudah tidak pernah ditampilkan lagi.

Penari Gandrung Banyuwangi di Kongres Kebudayaan tahun 1921 di Bandung (Majalah Djawa)

Sementara itu untuk pameran ukiran kayu diselenggarakan secara “*besar-besaran*”, diikuti oleh berbagai daerah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dari luar Jawa, Bali dan Palembang. Pameran diselenggarakan di sebelah kanan gedung kabupaten Bandung. Barang-barang yang dipamerkan dikirim dari seluruh tanah Jawa dan Madura, Bali dan Palembang. Dalam pameran ini telah didatangkan berbagai karya seni ukir termasuk karya yang dibuat tahun 1400 berupa mimbar mesjid *Paro-mosono* yang berasal dari keraton Demak. Bagian lain yang menarik, dalam pameran itu juga penjualan barang-barang seni. Tentang kesungguhan penyelenggaraan pameran

ukiran digambarkan sebagai berikut:

“Orang-orang bangsawan Djawa, Madoera dan Bali dengan beberapa orang Eropah sebagai sehati mereka itoe roepanya akan memberi pertolongan boeat pertoenjoekan ini (maksudnya pameran). Kandjeng Soesoehoenan Solo dan Kandjeng Soeltan Djokdjapoen mengirimkan perkakas jang indah-indah perboeatannja.

Di antara segala kiriman itoe jang teroetama, ialah Mimbar Mesdjid Paromosono di Solo. Asal mimbar ini dari istana Demak. Kata orang diperboeat kira-kira pada tahoen 1400. Oekiran mimbar ini boekan sadja bagoes roepanya, melainkan sangat dalam poela artinya. Kabongan (Pelaminan) Tengkoeh Besar Istana Djokdja, dipertoenjoekkan djoega. Pelbagai benda kiriman dari Karangasem, menghiasi pertoenjoekan itoe. Sebuah bilik hanja diisi dengan kiriman KGP. Pakoe Alam saja. Kiriman dari Djepara sangat haloes oekirannya, lakoe sekali. Orang bereboet-reboet membelinja”. (Majalah Sri Poestaka, Tahun II, 1921: hal. 187).

3. Pentas Loetoeng Kasaroeng

Sementara itu, untuk pertunjukan kesenian yang disebut sebagai *Toneel* (Komidi) dipentaskan lakon *“Loetoeng Kasaroeng”* yang oleh kalangan masyarakat Sunda dianggap sebagai *“cerita rakyat Sunda yang jarang diketahui orang, karena dianggap sakral”*. Tentang kesakralan cerita itu digambarkan bahwa orang yang mengetahui tentang bunyi ceritanya, jarang yang berani mence-ritakan, sebab takut tertimpa *“daulat marhu”* (maksudnya kena bala). Jangankan orang biasa, tukang pantun sekali pun jarang yang berani menceritakan lakon itu. (Majalah Sri Poestaka, Tahun II, 1921: hal. 188).

Komidi ini dibagi atas 18 bagian, dan tiap-tiap bagian dimainkan dengan diiringi musik yang sesuai dengan suasana cerita. Musik yang mengiringi adalah degung, renteng, angklung, tarawangsa dan celempung. Dalam berita tersebut juga dijelaskan tentang pakain (kostum) yang digunakan, yang disebutnya sebagai model *“pakaian Sunda purba”*, menurut adat Badui. Tempat pertunjukan bukan di gedung atau di pendopo seperti halnya Wayang Wong, tetapi di sebuah pentas darurat dibangun di halaman kabupaten sehingga pertunjukan itu disebutnya sebagai *“komidi halaman”* (atau teater taman). Penataan panggung dan tempat duduk penonton agar dapat melihat pertunjukan dengan enak dan jelas dilukiskan sebagai berikut:

“...tempat itoe bertingkat tiga, tingkat jang kedoea lebih tinggi dari pada tingkat jang pertama, dan jang ketiga (jang tertinggi) sampai ke pagar batoe (kota) kaboeupaten. Lebar moeka tooneel itoe 25 M dan lebar tingkat (kebelakang) 2-3 M sadja. Tanah sekeliling tempat permainan itoe, selainnja jang sebelah belakang, digali, semangkin djaoeh semangkin naik, sehingga mendjadi lereng jang landai. Lereng ini oentoek tempat penonton jang lebih soeka bersila. Pada sekeliling lereng ini diletakkan koersi berderet-deret, djadi setengah boelat bangoennja, dan sekeliling tempat ini ada beberapa batang pohon-pohonan. Tingkat jang

ketiga, djadi jang tertinggi dan jang belakang sekali, pertengahannja dihiasi dengan kasang (tenoenan Soenda), dan disitoe didirikan seboeah singgasana. Sebelah depannja dikiri ada gambar hiasan hoetan, dikanan gambar hiasan goenoeng. Tempat permainan ini banjak lagi jang perloe diperbaiki, tetapi oentoek permoeaan boleh diseboet telah amat baik.”

Mengenai model panggung pertunjukan yang digunakan, menurut Djoko Soekiman merupakan panggung *proscenium*³ yang pertama, dengan gaya Eropa. Tidak seperti biasanya dalam pertunjukan teater tradisional, pertunjukan cerita itu dilengkapi dengan skrip, dibagi atas 18 bagian. (Djoko Soekiman, 2000: hal. 85). Sementara itu, mengenai tata lampu sudah diatur seperti tata panggung ‘modern’ dengan menggunakan lampu listrik, dan ada lampu yang dapat digerakkan arahnya untuk menyinari bagian penting sehingga penonton dapat melihatnya dengan jelas. Dengan demikian pada saat itu masalah pencahayaan yang diperlukan dalam menata pertunjukan telah mendapatkan perhatian seperti halnya pertunjukan pada seni pentas modern. Seperti yang ditulis dalam majalah Sri Poestaka, penerangan panggung diatur

“dengan lampoe listrik jang besar dan jang dapat dipoetar-poetar, disinari bagian tempat orang sedang bermain pada soeatoe waktoe, ja’ni singgasana, hoetan ataoe goenoeng; maka pada waktoe itoe tempat itoe sadjalah jang diterangi benar-benar dan tempat-tempat jang lain dibiarkan gelap.”

Lakon *Lutung Kasarung* itu baru pertama kali dipentaskan dan pemainnya pun bukan pemain yang profesional. Secara keseluruhan pertunjukan ini dinilai sangat berhasil. Bagaimana jalannya pertunjukan itu digambarkan sebagai berikut:

“Akan permainan boleh dikatakan oentoeng benarlah telah dapat dikoempoelkan orang-orang jang soeka dan berani bermain, lagi bagoes poela permainannja. Hal ini teroetama djasa R. Kartabrata, Kdj. Regent Bandoeng, toean D.K. Ardiwinata dan M. Joedadibrata.

Adapoen hal permainan Loetoeng Kasaroeng itoe, oemoemnja bagoes, bagoes sekali, meskipoen baharoe sekali ini dipertoendjoekkan, dan lakonnja amat soekar akan dilakoekan dan jang bermain boekan toekang main.

Akan kesoetjian riwayat itoe njata benar-benar pada bahagian 13, pada waktoe hendak memotong padi. Pada bahagian itoe, tatkala beberapa orang dewa toeroen dari kajangan, membawa segala keperluan oentoek memotong padi, seorang-seorang berloetoet dan menjembah dengan tertib dan saksama; kesoetjian lakon itoe terasa meresap kedalam toelang soemsoem, menghentikan napas dan debar djantoeng... (tak terbaca, karena sebagian dari halaman ini sobek) orang jang beriboe-riboe itoe diam tidak berkata, sehingga dikomidi halaman itoedan sepi sekali rasanja. Inilah bagian permainan Loetoeng Kasaroeng jang amat bagoes sekali.” (Majalah Sri Poestaka, Tahun III, 1921: hal. 189).

3 Model panggung pertunjukan pada zaman Yunani dan Romawi, dengan bidang yang membatasi antara panggung dengan penonton, dibuka dan ditutup dengan layar.

Kongres Kebudayaan tahun 1921 menjadi sangat istimewa karena pada acara pertunjukan seni itu dihadiri oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda lengkap dengan para pengawalnya. Pertunjukan ini amat menarik perhatian masyarakat Bandung yang sedang haus hiburan, dan dirasakan meresap ke dalam tulang sumsum, menghentikan napas dan debar jantung dan membuat terdiam ribuan orang, juga disimpulkan dalam kalimat:

"Barang siapa jang melihat permainan itoe, sekaliannja mendapat belaka perasaan kehaloesan, dan didalam hatinya terbit keinginan akan mengenal diri. Sebab itoelah permainan Loetoeng Kasaroeng itoe besar sekali artinja bagi orang Soenda. Bersama-sama dengan roeat (di Jawa disebut ruwat (ruwatan) yang dimaksudkan sebagai upaya menolak bala) gedung kaboepaten Bandoeng..."

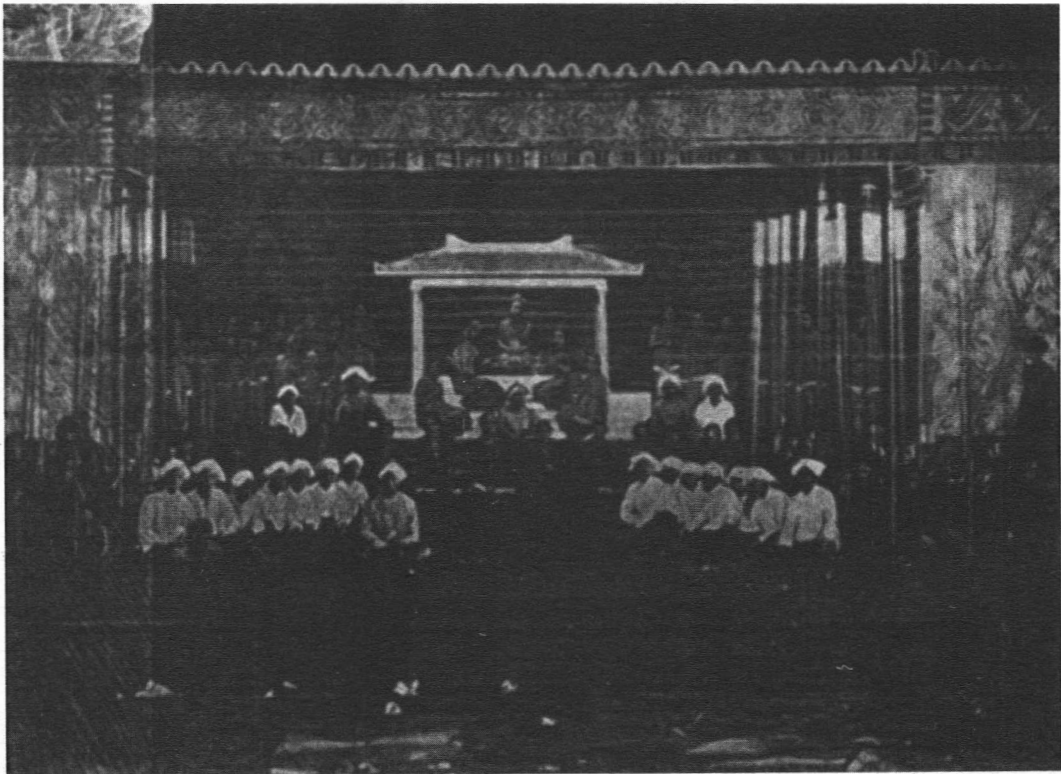


Foto panggung pertunjukan tonil Lutung Kasarung pada Kongres Kebudayaan tahun 1921, di Bandung.

Dari balik kesuksesan pertunjukan itu ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, karena didorong Bupati Bandung Wiranatakusumah yang terobsesi oleh pertunjukan wayang orang dan tari Srimpi yang dilihat pada kongres-kongres sebelumnya. Pertunjukan itu telah menumbuhkan tantangan untuk dapat menampilkan pertunjukan khas Sunda. Dari olahan Kiewit de Jonge bersama Mr. Pleyet memilih cerita rakyat Sunda Lutung Kasarung menjadi sebuah sandiwara. Kedua, ternyata menjelang pertunjukan dimulai terjadi ketegangan yang hampir-hampir menjadi fatal. Para gadis priangan yang diajak main tidak bersedia tampil dengan membuka bagian

atas badannya, termasuk para gadis priyayi Sunda yang justru memegang peran utama. Untuk mengatasi penolakan itu Bupati turun tangan memberikan penjelasan serta meminta persetujuan dari pihak keluarga. Ketiga, bahwa adanya „...*lampoe lestriek jang besar dan jang dapat dipoetar-poetar, disinari bagian tempat orang sedang bermain pada soeatoe waktoe*“ itu berkat bantuan dan pinjaman dari kesatuan Zeni. Hal lain yang patut dicatat setelah kongres yang diikuti dengan pertunjukan yang sukses itu, cerita Lutung Kasarung dan lagu-lagu tradisional diiringi musik Sunda semakin populer. Pergelaran sandiwara Lutung Kasarung dimainkan di seluruh kabupaten. Tiap kabupaten berdiri perkumpulan musik Sunda, paling tidak masing-masing daerah memiliki 5 perkumpulan. (Misbach Yusa Biran, Sejarah Film 1900-1950, tahun 2009, hal.64)

Di samping dipergelarkan tonil Lutung Kasarung juga dipertunjukkan Wayang Wong yang berupa “*pethilan*” yaitu hanya adegan-adegan pilihan (*episode*) dari keseluruhan lakon. Suatu pertunjukan lakon yang dinilai terlalu panjang maka diambil (*dipethil*) adegan-adegan tertentu saja. Jadi hanya “*dipilih loekisan jang mendjadi bidjinya sadja*”. Oleh karena itu pertunjukan dengan model “*pethilan*” itu dinilai sebagai “*atoeran baru*”. Sementara itu, untuk per-tunjukan tari disajikan tarian Jawa dari Yogyakarta dan Jawa Timur. Untuk tarian gaya Yogyakarta yang ditampilkan adalah tarian yang halus dan gemulai hasil dari “*pengadjaran istana Djokja*”, yaitu dari murid-murid Sekolah Menengah di Yogyakarta, dipimpin oleh Pangeran Soerjodiningrat. Tarian itu telah membuat para penonton terpesona, dan digambarkan sebagai berikut:

“*Gerak badan jang haloes dan gemalai, diiringi boenji gamelan jang merdoe dan menjenangkan hati, meloekiskan kebagoesan jang lama telah tertjapai, terdiri bertjaja-tjaja, indah berseri menjedapkan penglihatan*”.

D. Kongres Kebudayaan 1924

Tiga tahun setelah Kongres Kebudayaan 1921, pada bulan Desember tahun 1924 diselenggarakan Kongres Kebudayaan lagi (IV), di gedung Kepatihan Yogyakarta mulai tanggal 24 sampai dengan 27 Desember 1924. Topik yang dibahas mengenai sejarah bangunan kuno di Jawa dan manfaatnya bagi kehidupan dan pengembangan kebudayaan Jawa masa itu maupun masa yang akan datang. Di samping itu juga dibahas mengenai cara bagaimana agar kebudayaan daerah mendapat perhatian lebih banyak dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka telah menempatkan dalam posisi penting muatan sejarah dan nilai yang terkandung dalam bangunan-bangunan kuno tinggalan leluhur bagi pendidikan anak negeri.

Penyajian prasaran sesi I yang berjudul: *Dengan cara apa kebudayaan daerah dijadikan bahan ajar pendidikan anak negeri? (Op welke wijze kan bij de opvoeding van de Landkinderen de inheemsche cultuur meer tot haar recht komen)*, oleh: (1) WDP. Corporaal; (2) Pastoor van Lith; (3) M. Soeridiradja; dan (4) R. Sasrasoeganda. Penyajian prasaran sesi II dengan judul “*Nilai apa yang dimiliki monumen-monumen Jawa Kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan masa datang? (Welke waarde hebben de oud-Javaansh monumenten voor de huidige en toekomstige Javaansche cultuur?)*”, disajikan di Kepatihan oleh: (1) Ir. KJH. Van Leeuwen; (2) Dr. FDK. Bosch; (3) Dr. Radjiman; dan

(4) Ir. Maclaine Pont.

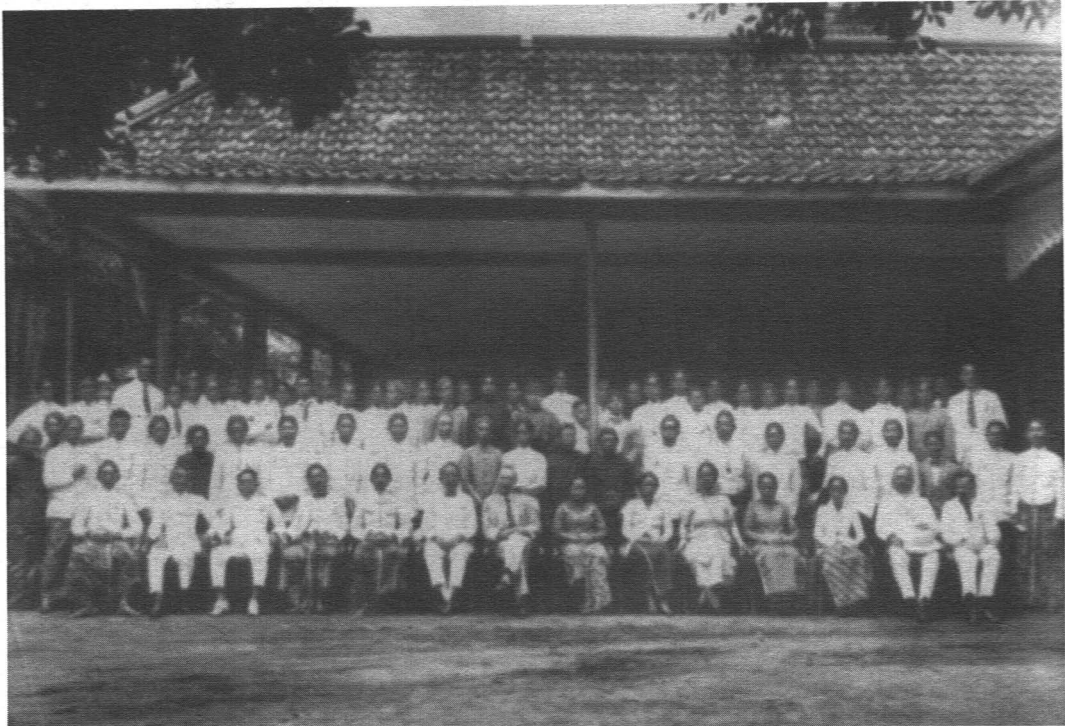
Selain penyajian makalah juga diselenggarakan acara “ceramah” tentang *Candi Prambanan (De Prambanan Temple)* di Kapatihan (dengan gambar), oleh F.D.K. Bosch. Ceramah kedua tentang *Bangunan Jawa (De waarde der letere Javaasche bouwkunt)*, disertai dengan gambar di Kapatihan, oleh Ir. Thomas Karsten. Selain itu juga diselenggarakan acara kunjungan (*excursie*) ke candi Prambanan dipandu oleh Lembaga Purbakala (*Oudheid-kundige Dienst*) dan ke Kota Gede dipimpin oleh Ir. Thomas Karsten dan Ir. H. Maclaine-Pont.

Dalam kongres ini Dr. FDK. Bosch secara khusus membahas, soal arti peninggalan sejarah dan purbakala bagi bangsa dan kebudayaan Indonesia saat itu maupun yang akan datang. Antara lain ia mengemukakan pendapatnya bahwa arti yang penting sekali dari bangunan-bangunan kuno itu terkandung dalam tenaga dorongnya yang luar biasa untuk meluhurkan dan memberi inspirasi kepada perkembangan kesadaran serta alam pikiran Indonesia. Ditegaskan oleh Bosch betapa kelirunya orang yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia sekarang sudah terputus hubungannya dari masa silamnya. Justru sebaliknya mempunyai hubungan yang sangat erat karena bangsa Indonesia sendirilah yang memegang peranan utama dalam pembangunan candi-candi di Jawa ini. Oleh karena itu tidak adalah jurang yang secara mutlak memisahkan masa sekarang dari masa silam. Oleh karena itu Bosch sangat menekankan betapa pentingnya pengetahuan tentang peninggalan-peninggalan purbakala itu diajarkan kepada anak-anak sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah-sekolah menengah. Pandangan yang disampaikan Bosch itu telah menjadi perintis ke arah perkembangan baru dari ilmu purbakala Indonesia (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1977: hal. 4).

Sementara itu Ir. A. van Leeuwen menyampaikan prasaran berjudul *Nilai apa yang dimiliki monumen-monumen Jawa Kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan masa datang?*. (*Welke beteekenis hebben de oud-Javaasche monumenten voor de huidige en toekomstige Javaasche Cultuur*). Sebagai jawaban dari pertanyaan itu diuraikan tentang peran peninggalan budaya Jawa sebagai kekuatan yang dapat membangkitkan kesadaran Nasional (*Nationale Bewustzijn*). Kutipan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. *Wanneer door jaarlijk nationaal (Indonesisch) onderricht en opvoeding, aan de hand van de oude Nationale Cultuur-monumenten, belanstelling, trots en vereering is opgewekt bij den cultuur-Indonesieër voor de geschiedenis van Indonesië, zal het Nationale Bewustzijn weer tot ontplooiing, tot zelf-bewuste kracht worden gebracht.*
- b. *Wanneer het Nationale Bewustzijn is ontwaakt, zullen de Oud-Indonesische monumenten, centra worden van het leven en in alle lagen van het volk inspireerend werken als een voorbeeld ter naleving.*
- c. *Wanneer de inspiratie is ontvlamd, zal de ziel van 't Volk zich ontplooiën in een drang tot schepping en nerwerkelijking van Idealen, welke drang door de Cultuurdragers van het Ras tot uiting zal worden gebracht aan de hand van hun kennis opgedaan aan de Oude Cultuurmonumenten.*
- d. *En op de hechte basis van het Oude, zal dan verrijzen, als een nieuw en schitterend monument, getuigende van ongebluschte kracht en de genialiteit van het Indonesische volk een nieuwe cultuur.*

- e. De beteekenis van het oude ligt (niet in zijn vorm, maar) in zijn wezen, als grondslag voor het nieuwe. (Majalah Djawa, 1924: hal. 197).



Para peserta Kongres Kebudayaan di Kepatihan Yogyakarta, tahun 1924
(Sumber:Java Instituut Dalam Foto)

Hallainyangmenarikdari kongres ini adalah masalah biaya untuk penyelenggaraan kongres, yang ternyata juga tidak tersedia banyak. Untuk meringankan beban Panitia Penyelenggara, antara lain telah disampaikan permohonan keringanan ongkos transportasi dengan kereta api bagi peserta kongres. Permohonan itu dikabulkan oleh pihak *Nederlandsch-Indie Staatspoorwegen* (N.I.S.), kepada para peserta diberikan potongan (*reductie*) harga karcis sebesar 50%. Potongan harga karcis kereta api itu berlaku sampai dengan 1 Januari 1925, dengan cara menunjukkan bukti pemberian potongan itu kepada kondektur yang bertugas. Dalam kata sambutannya Dr. Hoessein Djajadiningrat sebagai Ketua Java-Instituut antara lain menyampaikan ucapan terima kasih kepada S.S. dan N.I.S. atas bantuan yang diberikan. Antara lain ia mengatakan: "*Voorts brengt het bestuur van het Java-Instituut zijn openlijken dank aan de besturen van de S.S. en de N.I.S. voor de aan de conressisten verleende tegemoetkoming ten aanzien van de spoorkosten*" (Majalah Djawa, 1925: hal. 150). N.I.S. adalah salah satu dari perusahaan kereta api yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

E. Kongres Kebudayaan 1926

Kongres urutan ke-5 diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1926. Kongres diselenggarakan di Gedung Kesenian, Embong Malang No. 63-65 Surabaya. Temanya adalah: Bahasa, Bumi dan Suku Bangsa Jawa Timur dan Madura. Dalam kongres ini

antara lain disajikan makalah tentang musik Hindu-Jawa, sejarah, musik dan sastra Madura, dan makna sisa-sisa bangunan Majapahit. Laporan kongres dimuat dalam majalah 'DJAWA' tahun 1927.

Kongres diselenggarakan mulai tanggal 23 September 1926 sampai dengan 27 September 1926. Penyajian prasaran Sesi I tanggal 23 September 1926 disampaikan 2 prasaran yaitu: (1) Musik Hindu-Jawa khusus Jawa Timuran, oleh J. Kunst; dan (2) Musik Madura diikuti dengan demonstrasi menyanyi, menari dan bermain oleh JS. Brandes Buys. Penyajian prasaran tanggal 24 September 1926 adalah: (1) *Tari Gandrung Banyuwangi*, oleh John Scholte; (2) *Meninjau Madura Zaman Dulu*, oleh Abdul Azis; (3) *Kesusastraan dan Seni Budaya Madura* oleh R. Sosrodanoekoesoemo.

Selain acara berdebat juga diselenggarakan cermah dengan judul "Seni Budaya Jawa Timur" oleh Dr. W.F. Stutterheim. Hari-hari berikutnya diisi dengan acara kunjungan ke lapangan melihat bekas kerajaan Majapahit oleh Ir. H. Maclaine Pont dan ke pelabuhan melihat berbagai jenis Perahu Jawa Timur dan Madura, peninjauan *Pasar Tahunan* atau *Jaarmarkt* yang memamerkan hasil seni kerajinan Jawa Timur dan Madura dan melihat Karapan Sapi serta Lomba Layar dan Dayung di Bangkalan.

Dalam laporan kongres disebutkan, bahwa Walikota Surabaya dalam sambutannya menyatakan terima kasih atas diseleng-gara-kannya kongres di Surabaya dan mengharapkan akan dapat menghidupkan kembali perhatian dan pengembangan kerajinan di Jawa Timur. Di samping itu juga ucapan terima kasih atas kehadiran Mangkunegoro VII dan Ratu Timur, Residen Yogyakarta, Pekalongan, Pasuruan, Besuki, Madura, I Goesti Bagoes Djelantik, raja Karangasem, anggota Volksraad (Parlemen), Wakil Susuhunan Surakarta dan Sultan Yogya. Sementara itu, Prof. Dr. R. Hoesein Djajadiningrat selaku menyampaikan terima kasih dan mengharap-kan kongres ini sukses.

Dalam paparan tentang Musik Hindu-Jawa khusus Jawa Timuran, J. Kunst menyatakan bahwa musik Jawa Timur menunjukkan perbedaan dengan musik Pasundan yang dikategorikan masih sederhana, tetapi justru karena itu sangat menarik. Instrumen yang terbuat dari bambu sangat mendominasi musik Sunda seperti Celempung, Calung, Angklung, Rengkong dan Hatong. Sedangkan di Jawa Timur musik dengan instrumen perunggu lebih berseragam dan memiliki kesamaan dengan yang ada di lingkungan kerajaan di Jawa Tengah dan Jogjakarta.

Sementara itu mengenai musik Hindu-Jawa menurut J. Kunst tidak begitu banyak yang dapat disampaikan, tetapi dapat diidentifikasi terutama tentang instrumen yang dipakai dengan melihat pada relief candi, di samping patung perunggu dan terakota yang sedang membawa alat musik, pada dinding belanga perunggu, gong, serta pada naskah kuno dari tulisan Cina kuno, Jawa kuno, Bali, dan Sumatera. Sedangkan menurut Brandes Buys musik Madura memiliki ciri yang berbeda dengan musik Jawa. Sejak orang-orang Madura berdatangan ke Jawa, musik Madura memberikan pengaruh pada seni nada Jawa Timur khususnya. Permasalahan lain yang muncul dalam kongres adalah:

- a. Nilai apa yang dimiliki monumen-monumen Jawa Kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan masa datang?
- b. Dengan cara apa kebudayaan daerah dijadikan bahan ajar pendidikan anak negeri?

Kongres diawali dengan sambutan Walikota Surabaya Mr. Ir. G.J. Dijkerman, yang menaruh harapan kongres ini akan dapat menghidupkan kembali perhatian dan kegiatan kerajinan Jawa Timur. Pandangannya tentang kejayaan masa lalu seni kerajinan Jawa Timur dan Madura itu disampaikan oleh Mr. Ir. G.J. Dijkerman beberapa bulan sebelum kongres diselenggarakan. Kutipan agak panjang dari pidato Dijkerman antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Merupakan suatu kepuasan yang sangat istimewa bagi saya, karena oleh Java-Instituut dan majalah ‘DJAWA’ diberikan kesempatan menjadi penyelenggara pertama kongres ini. Suatu kepuasan karena dengan diadakannya kongres di Surabaya salah satu dari keinginan saya terwujud. Jawa Timur yang dikenal sebagai Java’s Oosthoek (Sudut Timur) dan khususnya kota Surabaya, sangat memerlukan kongres ini. Ketika pada zaman kebesaran kebudayaan Jawa bersinar di pusat-pusat kerajaan seperti Kediri, Singasari, Blambangan dan terutama Majapahit, telah memiliki tempat tersendiri di antara lainnya. Sedangkan Jawa Timur sendiri dalam banyak hal sekarang banyak mundur dibandingkan dengan Tanah Sunda dan Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.

Terus terang, Jawa Timur benar-benar bekerja keras dan terus melakukan kegiatan di bidang kebudayaan, tetapi dalam hal seni dan kerajinan tidak lagi memiliki tempat terhormat. Bagi para pengrajin kuningan yang dulu sangat terkenal, pengrajin seni batik bahkan di bidang seni tari Jawa, sekarang tinggal sedikit dari kebesaran zaman dulu. Dan yang paling parah ialah bahwa tidak hanya masyarakat Eropa, tidak hanya, bahkan penduduk asli sendiri sebagian besar tidak tahu betapa besar kejayaan masa lalu dan kini hilang atau terancam akan hilang.

Syukurlah ada tanda-tanda juga untuk Jawa Timur, akan terjadi perubahan yang baik. Dari banyak pihak diusahakan untuk menghidupkan kembali perhatian pada yang dulu, yang begitu tinggi tingkatannya. Berbagai karya seni penduduk asli seperti ukiran, kerajinan kuningan, anyaman, baik, dsb. dengan segala kelebihan atau kekurangannya akan diusahakan untuk menghidupkan kembali seni kerajinan, mengembangkan bakat seni penduduk asli yang besar dan sekarang sedang ‘tidur ayam’. Saya berpendapat bahwa seni dapat berkembang apabila didukung oleh semangat dan kegairahan hidup dari bangsa yang sedang berkembang. Seni berkembang kuat pada saat bangsa itu sedang dalam kondisi kuat. Dan sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menyadarkan suku bangsa Indonesia (Indonesische volkeren) dan khususnya orang Jawa (Java bevolken) memperhatikan masalah pengungkapan seni mereka sendiri. Apa yang masih tinggal dari kebesaran orang-orang Jawa Timur ialah kehebatan mereka sebagai pelaut yang gagah berani.

Benar juga bahwa pada zamannya orang-orang Jawa seperti sebelum abad ke-17 dengan kapal-kapal mereka berlayar sampai ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) dan Madagaskar. Juga pelaut besar dari Madura dan Bawean sangat

penting artinya karena mereka berlayar sampai Banjar-masin dan Makassar. Bagi mereka perahu sangat berarti dan sangat disayangi dan dibuat demikian baik dengan memberikan hiasan pada haluan dan buritannya. Barang siapa mengenal kegiatan pelaut di Jawa Timur dan terutama di Madura harus setuju dengan saya bahwa di dalamnya masih terdapat ungkapan atau simbol-simbol penting dari bumi kelahirannya yang menjadi dasar yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan seni dan kerajinan yang dimilikinya. Karena itu saya menganggap bahwa lebih khusus untuk Jawa Timur sekaranglah saatnya untuk mengembangkan bakat dan ekonomi masyarakat yang sedang tidur, dan juga saatnya untuk menghidupkan kembali kegiatan seni.

Berbagai bidang studi tentang Indonesia melakukan pengkajian seni kerajinan dalam kegiatan mereka. Tetapi kegiatan kajian yang terbaik dan tertinggimaknya hanya terdapat pada Java-Instituut. Dan sekarang di Surabaya baik oleh Paguyuban Studi Indonesia maupun Ikatan Lingkaran Seni Budaya Jawa, dilakukan kajian dan kegiatan musik, tari, dsb. dimulai lagi. Maka kongres yang akan datang ini harus menghasilkan stimulasi kuat yang dapat mendorong munculnya kegiatan yang baik dan lebih banyak mengkaji dan mengungkapkan budaya dari waktu yang lalu.

Di samping ceramah-ceramah dan diskusi harus diadakan juga penyelenggaraan pameran, karena merupakan hal sangat penting. Badan yang khusus menangani hal ini dengan tujuan menggelar sebanyak mungkin hasil karya masa lalu dan sekarang, memungkinkan diadakannya kajian tentang faktor-faktor yang mencerminkan kejayaan masa lalu dan harus diperhatikan dan dipertahankan dari pengaruh baru. Hal itu tidak dapat diselesaikan sekaligus dan satu pertanyaan, apakah tidak perlu sebagian dari pameran dibuat permanen dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmatinya di **museum** yang selalu terbuka untuk itu. Di samping itu timbul pertanyaan apakah tidak diinginkan untuk melakukan pendidikan kerajinan secara sistematis dan untuk itu dibuka sekolah kerajinan seni budaya?

Dan akhirnya mengadakan pameran-pameran model perahu, dan pameran itu lebih baik diselenggarakan di pelabuhan Surabaya, sehingga dapat menggugah perhatian tentang apa yang dihasilkan oleh penduduk pribumi dalam hal membangun kapal dan melayarkannya ke laut. Walau pelayaran di sungai-sungai sudah sangat berkurang diganti oleh transportasi darat, walau zaman kejayaan armada perahu di sungai sudah lewat, tetapi pelayaran di pantai, pantai penyeberangan dan penangkapan ikan masih tetap memiliki faktor penting untuk pengembangan ekonomi yang mandiri dari penduduk pribumi.

Dalam hal ini sebuah perjalanan melalui kampung-kampung nelayan di pantai utara Madura, lebih baik dibandingkan dengan yang terletak di pantai Sedayu dan Tuban. Di sana ada hidup dan kekuatan dan kegairahan hidup.

Bagian dari kinerja kongres di Surabaya sebagai kota pusat perdagangan dan lalu-lintas laut tanah Jawa, bahkan Indonesia. Surabaya dengan tanah pedalaman mata pencaharian bertani sangat memerlukan alat transportasi darat dan air. Bagaimanapun juga mengharapkan hasil dari kongres ini dapat mendorong diadakannya pengkajian dan latihan keahlian seni dan budaya sebagai bentuk pengungkapan kebahagiaan hidup” (Majalah Djawa, 1926: hal. 179-181).

Dari kutipan di atas jelas sekali pandangan Dijkerman terhadap kebudayaan yang berkembang di Jawa Timur dan Madura. Ia sangat memperhatikan perkembangan seni kerajinan Jawa Timur yang pernah jaya pada masa sebelumnya tetapi sekarang sedang mengalami kemunduran. Ia melontarkan pertanyaan ”apakah tidak diinginkan untuk melakukan pendidikan kerajinan secara sistematis dan untuk itu dibuka sekolah kerajinan seni budaya?” Pandangan itu menjadi bukti sejarah yang patut menjadi penggugah semangat masyarakat Jawa Timur masa kini dalam memajukan kebudayaannya.

F. Kongres Kebudayaan 1929

Di antara KK 1926 dan KK 1929 ditemukan data bahwa pada tahun 1927 pernah juga diselenggarakan KK, seperti yang tertulis dalam buku *Java-Instituut Dalam Foto* yang disusun oleh Jaap Erkelens. Pada halaman 4 disebutkan secara singkat bahwa pada bulan Desember 1927 diselenggarakan kongres di Yogyakarta dengan pokok bahasan tentang Arsitektur Jawa. Keterangan ini mengundang pertanyaan, karena dalam buku tersebut tidak ditemukan keterangan lebih rinci seperti halnya KK yang sebelumnya. Di dalam majalah *DJAWA* yang sejak terbit pertama telah aktif mencatat dan memberitakan semua kongres sebelumnya, juga tidak ditemukan data yang menjelaskan tentang penyelenggaraan KK tahun 1927. Data yang ditemukan adalah Kongres Bahasa Jawa pada tahun yang itu (1927). Berdasarkan data ini maka muncul pertanyaan apakah pada tahun 1927 pernah diselenggarakan KK sebagaimana ditulis dalam buku Jaap Erkelens?

Kesangsian itu makin kuat, karena dalam majalah *DJAWA* terbitan tahun 1930, yang memuat sambutan Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat selaku Ketua Java-Instituut pada acara memperingati Ulang Tahun ke-10 Java-Instituut yang diselenggarakan tahun 1929 juga sama sekali tidak menyebut tentang KK tahun 1927 itu. Sebagai Ketua Java Instituut, Prof. Hoesein Djajadiningrat dalam sambutan itu menyampaikan pula laporan tentang perjalanan Java-Institut selama 10 tahun, baik mengenai keberhasilan maupun ketidak-berhasilan Java-Instituut mulai berdiri tahun 1919 hingga tahun 1929. Di dalamnya termasuk laporan tentang penyelenggaraan KK tahun 1919 di Surakarta, tahun 1921 di Bandung, tahun 1924 di Yogyakarta dan tahun 1926 di Surabaya.

KK yang diselenggarakan pada tahun 1929 merupakan urutan kongres ke-5 dalam artikongres yang diselenggarakan oleh Java-Instituut dan KK ke-6 dihitung sejak kongres pertama tahun 1918. Kongres diselenggarakan di Kepatihan Puro Mangkunegaran, Surakarta. Sebagaimana diuraikan di atas, kongres ini diselenggarakan sekaligus sebagai acara peringatan ulang tahun ke-10 Java-Instituut (1919-1929). Kongres tahun 1929 bersifat khusus dan mendapat perhatian sangat besar dan sangat meriah, dihadiri banyak undangan baik dari kalangan pejabat, masyarakat dan pengusaha.

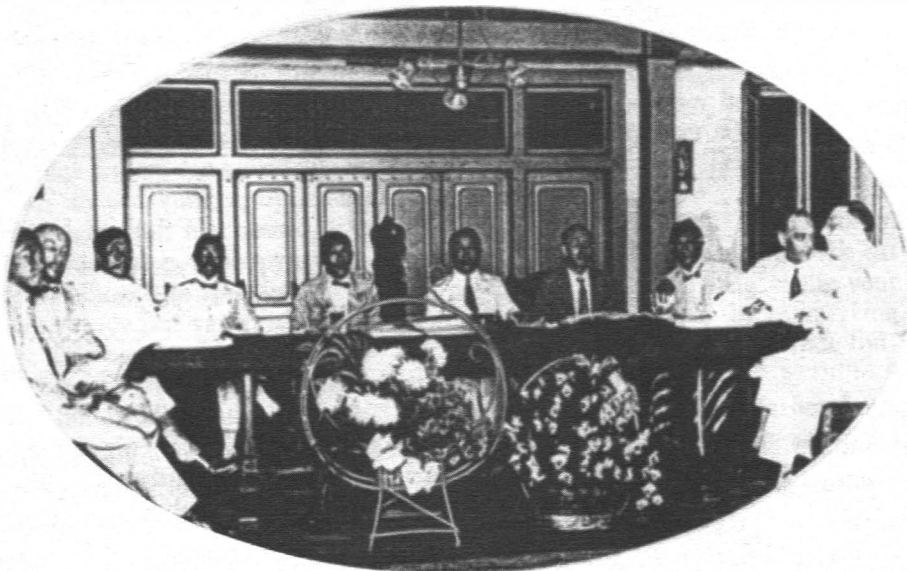
Kongres membahas topik tentang pendirian perguruan tinggi jurusan sastra, filsafat dan budaya Timur.

Dalam pidato sambutannya BKPA Koesoemojoedo (Kepala Paprentahan Kraton Surakarta) sebagai Panitia Penerimaan menyam-paikan ucapan selamat datang dan terima kasih, telah memilih Solo sebagai tempat kongres dan tentunya tidak asing lagi bagi para peserta. Selanjutnya ia mengatakan:

“... apabila diingat, 10 tahun yang lalu (1918) Kongres Kebudayaan Jawa diadakan di sini dan sebagai hasilnya berdiri Java-Instituut. Ingatan kita menerawang pada saat kelahiran lembaga ini. Betapa besar antusiasme pada pembicaraan topik dan betapa perhatian kita pada waktu itu.

Java-Instituut telah berdiri 10 tahun dan kita percaya bahwa selama ini telah diuji penampilannya. Maka harus dikatakan bahwa kongres ini dengan perhatian yang besar dari masyarakat merupakan tanda keberhasilan Java-Instituut dalam mengembangkan kebudayaan”. (Majalah Djawa, 1930: hal. 7).

Selanjutnya dilaporkan bahwa besarnya perhatian terhadap kongres tidak hanya diungkapkan dengan kehadiran tetapi juga berupa sumbangan dana dan keikutsertaan dalam kegiatan pa-meran kerajinan emas dan perak, sumbangan tarian dari perkumpulan Mardi Laras, pembuatan taman untuk minum teh dan pergelaran permainan anak-anak. Oleh Panitia Penerimaan sengaja ditampilkan pergelaran permainan anak-anak Jawa karena dulu permainan merupakan faktor penting dalam pendidikan tetapi pada saat itu mulai diabaikan, termasuk juga permainan rakyat.



Peserta Kongres Kebudayaan tahun 1929, di Solo. (Majalah 'DJAWA' tahun 1930)

Selanjutnya dilaporkan bahwa besarnya perhatian terhadap kongres tidak hanya diungkapkan dengan kehadiran tetapi juga berupa sumbangan dana dan keikutsertaan dalam kegiatan pa-meran kerajinan emas dan perak, sumbangan tarian dari perkumpulan Mardi Laras, pembuatan taman untuk minum teh dan pergelaran permainan

anak-anak. Oleh Panitia Penerimaan sengaja ditampilkan pertunjukan permainan anak-anak Jawa karena dulu permainan merupakan faktor penting dalam pendidikan tetapi pada saat itu mulai diabaikan, termasuk juga permainan rakyat.

Sementara itu Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua Java-Instituut menyampaikan terima kasih apabila beberapa kali kongres yang diselenggarakan Java-Instituut telah dinilai sebagai prestasi dan mendapatkan sambutan dan perhatian yang besar dari masyarakat. Selanjutnya ia mengajak hadirin untuk berdiskusi tentang masalah kebudayaan Timur sambil memperingati 10 tahun berdirinya Java-Instituut.

Di samping itu oleh Prof. Hoesein Djajadiningrat dilaporkan tentang hasil-hasil yang dicapai oleh Java-Institut selama 10 tahun sebagai berikut:

“Usia 10 tahun untuk sebuah perkumpulan belum termasuk lama, dan belum cukup lama untuk mengadakan peringatan secara besar-besaran. Ditambah lagi ada pertimbangan bahwa usaha Java-Instituut tidak selalu berhasil, setidaknya tidaknya hasil yang bersifat langgeng. Memang benar dalam Anggaran Dasar telah ditetapkan bahwa tujuan Java-Institut adalah meningkatkan pengembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali, dalam arti kata yang seluas-luasnya, namun pada umumnya sukar dan harus secara berangsur-angsur dan tidak langsung dapat memberikan pengaruh”. (Majalah Djawa, 1930: hal. 87).

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat itu upaya pengembangan kebudayaan di lingkungan masyarakat Jawa, Sunda, Madura dan Bali ada hambatan yang harus dihadapi. Contoh yang disampaikan oleh Prof. Hoesein adalah masalah penerbitan majalah. Majalah DJAWA terbit tahun 1921 lalu tiga bulan kemudian terbit majalah bahasa Jawa POESAKA DJAWI dan berbahasa Sunda majalah POESAKA SOENDA, kemudian disusul bahasa Madura tahun 1924 majalah POESAKA MADOERA. Setelah beberapa kali terbit majalah POESAKA MADOERA dihentikan, kemudian disusul oleh majalah POESAKA SOENDA. Hanya majalah bahasa Jawa POESAKA DJAWI yang masih dapat bertahan, sedangkan untuk majalah DJAWA yang berbahasa Belanda sudah mendapatkan tempat sebagai berkala Ilmu Pengetahuan dan Budaya, termasuk dikenal di luar negeri. Dengan demikian majalah ini hanya merupakan keberhasilan yang kecil dari Java-Instituut meskipun yang memimpin adalah orang memiliki budaya pribumi dan padanya pengembangan budaya itu bergantung.

Sementara itu, keberhasilan yang dicapai oleh Java-Instituut selama sepuluh tahun adalah penyelenggaraan Kongres Kebudayaan (1919, 1921, 1924, dan 1926) dan Kongres Bahasa Jawa dan Sunda (1924 dan 1927). Di samping itu juga penyelenggaraan berbagai pameran benda hasil kerajinan yang terbuat dari emas, perak, kayu, anyaman, dan seni ukir, serta berbagai pertunjukan kesenian. Program yang dianggap masih menjadi ‘hutang’ Java-Instituut adalah penelitian tentang kerajinan dan pertukangan serta tata cara pergaulan di lingkungan bumiputra, karena belum dapat diselesaikan. Susunan Panitia kongres adalah sebagai berikut:

Pelindung : Sri Paduka Susuhunan Surakarta
Ketua Kehormatan : - Prof. Dr. B.J.O. Schrieke
- Raden Adipati Djojonegoro

Ketua Kongres : - Prof. Dr. R.A. H oesein Djajadiningrat
- S. Koperberg

Panitia Bidang Umum terdiri atas: B.K.P.A. Koesoemojoedo sebagai Ketua, RMA. Woerjaningrat sebagai Sekretaris, dan Anggota adalah: K.P.A. Hadiwidjaja, R.T. Dr. Wediadinigrat, Dr. Soemeroe, R. Ng. Doetadilaga, M. Ng. Jasawidagda, J.E. Van Naersen. Untuk Panitia Bidang Penerimaan terdiri atas: M. Ng. Jasawidagda sebagai Ketua, Hr. Soehoed sebagai Sekretaris merangkap benda-hara, sedangkan Anggota adalah: A.W. Karjasa, Hr. Hadisepoetra, Hr. Sasrasoedigda, M. Ng. Hardjasoekasta, M. Ng. Tjitrahoebaja. Sementara itu untuk Panitia Bidang Logistik: Dr. Soemeroe sebagai Ketua, S. Sastrakarjana sebagai Sekretaris, dan Anggota adalah: RS. Koesoemadirdja, R. Ng. Sarasoedaka. Sedangkan untuk Panitia Bidang Pameran: K.P.A. Hadiwidjaja sebagai Ketua, J.E. Van Naersen sebagai Sekretaris, dan Anggota adalah: KPA. Soerjaamidjaja, M. Ng. Tjitrahirandja, Dr. L. Adam, dan Ir. J.L. Moens.

Dari susunan Panitia kongres tampak sekali semua bidang kegiatan telah dipegang sendiri oleh kaum terpelajar bumiputra. Demikian pula halnya pada penyajian makalah para cendekiawan dan budayawan pribumi telah banyak mengambil peran. Penyajian dan debat dimulai tanggal 28 Desember 1929. Dengan topik berjudul Pengajaran Kesusasteraan Timur di Perguruan Tinggi (*Oostersch Letterkundig Hooger Onderwijs*), dibahas oleh tiga orang pemra-saran, yaitu: Dr. G.W.J. Drewes, DR. SJ. Esser, R.A.A. Soejono, dan L. van Rijckevorsel (Ambarawa). Judul makalah pemrasaran Mr. R. Hadi agak berbeda, yaitu: *Eeige Desiderata in Verband Met de Oprichting van een Litteraire Faculteit in Indonesie*. Perdebatan tentang Pengajaran Kesusasteraan Timur di Perguruan Tinggi, dilanjutkan tanggal 29 Desember 1929, dan sebelum ditutup disampaikan ceramah tentang perlunya mengusai kepandaian membuat barang-barang-barang seni (*De noodzakelijkheid van ambachtsen kunstnijverheids onderzoek*). (Majalah 'DJAWA' tahun 1929).

Dalam kongres kali ini masalah Pengajaran Kesusasteraan Timur di Perguruan Tinggi (*Oostersch Letterkundig Hooger Onderwijs*), menjadi topik bahasan yang utama dari berbagai pandangan para pemakalah. Dalam makalahnya L. van Rijckevorsel menyampaikan beberapa pertanyaan, antara lain: (1) Haruskah dilakukan pengajaran kesusasteraan Timur dan filsafat di Perguruan Tinggi di Hindia Belanda?; (2) Haruskah dilakukan pengajaran sejarah?; dan (3) Apa tujuan praktis dari pengajaran itu?

Dalam prasarannya yang berjudul Pengajaran Kesusasteraan Timur di Perguruan Tinggi (*Oostersch Letterkundig Hooger Onderwijs*), R.A.A. Soejono, menyampaikan 7 buah dalil (*stellingen*) sebagai berikut:

- a. *De studie in een bepaalde taal zal daar het deugdelijkst zijn, waar die taal de landstaal is.*
- b. *Verijking van de Indonesische talen is noodig ten einde deze te doen beantwoorden aan de eischen des tijds. Daarnaast dient voor wat het Javaansch betreft, ernstig te worden overwogen, of vereenvoudiging – voornamelijk door beperking van het aantal taalsoorten tot één, liefst het Krãmã – niet wenschelijk is.*
- c. *Bij de verrijking en ontwikkeling dier talen zal, naast het Kantoor voor de*

Volklectuur en een eventueel te creëren Taalkundige Bureau, een in Indië gevestigd, overwegend inheemsch centrum van studie in de landstalen geode diensten kunnen bewijzen.

- d. Met het onderwijs in talen behooren zoo veel mogelijk personen te worden belast, die de natuurlijke kennis dier talen bezitten.
- e. Op een der examens van een in het eigen land – Indië – in te stellen Indonesisch-letterkundige faculteit kan, ja moet mede als eisch worden gesteld: vaardigheid in het schriftelijk en mondeling gebruik van den als hoofdvak gekozen taal.
- f. Voor de hoogere rangen bij het inlandsch B.B. word teen academische opleiding hoe langer hoe meer een eisch des tijds; een Indonesische studie in Indië, steunend op de vereeniging der rechts-en letterkundige faculteiten, is daarvoor als aangewezen.
- g. De instelling van een Indonesisch-letterkundige faculteit in Indië is niet alleen wenschelijk, maar – gelet o.m. op de beschikbaarheid van een vildoend aantal voor leerkrachten geschikte personen en op het in het Bataviaasch Genootschap in ruime mate aanwezige studiemateriaal, ook mogelijk (Majalah Djawa, 1938: hal. 286).

Sementara itu, pemakalah Dr. G.W.J. Drewes yang membahas tema pengajaran sastra Timur dan filsafat di Perguruan Tinggi dalam sebuah Fakultas Sastra, menyampaikan 6 dalil (stellingen) sebagai berikut:

- a. Het scheppen van de gelegenheid tot academisch onderwijs in Oostersche letteren en wijbegeerte – vroeger herhaaldelijk bepleit op grond van in hoffdzaal ideëele overwegingen, welke ten volle haar geldigheid hebben behouden – is meer en meer gebiedende eisch der praktijk geworden.
- b. Dit onderwijs zal het beste tot zijn recht komen aan een zelfstandige Faculteit der Letteren liefst, indien mogelijk, met de andere Bataviaasche hoogeschoolen in universitair verband vereenigd.
- c. Conform het doel van alle Hooger Onderwijs zal de nieuw te stichten Faculteit der Letteren moeten opleiden tot zelfstandige beoefening van de door haar bstreken vakken, i.c. de Indische cultuur-wetenschappen. Daarbij zal de blik niet uitsluitend gericht moeten worden op het verleden, doch evenzeer ook op het levende heden, waardoor het onderwijs tevens diensbaar zal zijn aan de vorming en voorbereiding tot het bekleeden van allerlie maatschappelijke bertekkingen.
- d. Met hot oog daarop dient het onderwijs aan de Bataviasche Faculteit der Letteren in hoofzaak wel dezelfde vakken te omvatten die in het Nederlandsch Academisch Statuut zijn voorgeschreven voor de studie in de Taal- en Letterkunde van de Oostindischen Archipel, doch met vermindering van al te groote differentiatie en van de gbreken, welke de moederlandsche opleiding aankleven.
- e. De combinatie van Letterkundige Faculteit en taal- en volkenkundig studiecetrum, als aangekondigd in de rede waarmee Z.E. de Gouverneur-Generaal de jongste Volksraadszitting opende, zal aan het te geven onderwijs

buittengemeen ten geode komen, en kan derhalve ten zeerste worden toegejuicht.

- f. Bij de inrichting van dit taalkundig bureau dient men in het belang van het onderwijs de moderne hulpmiddelen voor het experimenteel taalonderzoek niet achterwege te laten (Majalah Djawa, 1938: hal. 287).

Sementara itu Ki Hajar Dewantara yang hadir pada kongres tersebut menyampaikan sambutan, yang lebih menekankan pada tanggapan atas prasaran L. van Rijckevorsel dan R.A.A. Sujono. Dalam majalah 'DJAWA' tahun X, bulan Januari 1930 dimuat laporan dalam tulisan stenografi dalam bahasa Belanda tentang pandangan Ki Hajar Dewantara berkenaan dengan adat dan bahasa, terutama tentang Bahasa Indonesia. Cuplikan dari terjemahan tulisan steno tersebut adalah sebagai berikut:

"Pembicara memulai pidatonya dengan menyatakan kekagumannya terhadap pemrasaran yang dengan kata-kata berapi-api menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia oleh dunia cendekiawan dan merasa terharu akan adanya kenyataan, bahwa telah ada sementara orang Eropa yang mulai mengerti jiwa orang Jawa dan mulai mendekatinya. Misalnya Pastoor van Rijckevorsel. Pembicara berpendapat, bahwa dari prasaran dan keterangannya telah bisa dimengerti, bahwa ia (R) lebih mengerti orang Jawa dan jiwa orang Jawa daripada banyak orang lain. Ini terutama dinyatakan oleh parstoor van Rijckevorsel dengan menyatakan, bahwa kita terutama harus bekerja dengan bahasa hidup. Tetapi pembicara berpendapat, bahwa orang-orang Jawa telah mampu menetapkan sendiri materi hidup bagi bahasa mereka, sehingga dengan demikian dengan senang hati mereka ingin memikul sendiri tanggung jawabnya.

Dengan pembicaraannya tentang penyederhanaan bahasa Jawa – yang telah dikupas juga oleh tuan Sujono - sebetulnya Dr. Radjiman telah mendahului maksud pembicara. Berlawanan dengan gerakan Jawa Dwipa, pembicara berpendapat, bahwa usaha tuan Sujono untuk meniadakan Jawa Ngoko dan menyederhanakan bahasa Krama, yang disebut gerakan Krama Dewa itu kurang memperhatikan kenyataan, sebab bahasa Jawa telah berkembang sedemikian rupa, hingga orang Jawa menganggap bahwa adanya kedua macam bahasa itu merupakan suatu kekayaan, hingga orang tak akan mudah menyederhanakannya.

Selanjutnya pembicara sependapat dengan tuan Sujono ialah bahwa kesukaran dalam penggunaan bahasa merintang evolusi bangsa. Pergerakan Jawa Dwipa, kata pembicara selanjutnya, adalah suatu gerakan rakyat demokratis. Rakyat sekali bangun, merasa, bahwa dengan adanya kedua bahasa semangat demokrasi kurang dapat kesempatan untuk bergerak secara leluasa; oleh karenanya ia terpaksa mempergunakan Jawa Dwipa. Demikian pula halnya dengan gerakan Krama Dewa. Itu adalah suatu pernyataan kaum bangsawan.

Bila orang ingin mencapai hasil-hasil yang lebih baik mengenai evaluasi rakyat, hendaknya orang lebih memperhitungkannya dengan kenyataan. Mereka yang mengira bahwa pembicara adalah seorang idealis, hendaknya sekarang maklum, bahwa ia adalah seorang realis. Nah, bahasa itu adalah suatu bagian dari adat dan bila adat itu berubah, bahasa pun akan berubah juga. Kini telah tampak gejala-

gejala ke arah perubahan itu. Kini dengan sadar rakyat telah mulai meniadakan beberapa bentuk adat dan dengan demikian akan hilang pulalah bentuk-bentuk bahasa kuno sedikit demi sedikit. Sederhanakanlah bentuk-bentuk adat dan dengan begitu saudara dengan sendirinya menyederhanakan bahasa.

Pembicara memberikan pertimbangan, agar demi kepentingan penyederhanaan adat itu Java-Instituut suka menghubungi Pemerintah dan memohon agar Pemerintah melarang segala macam bentuk adat yang beku, yang merintang jalannya evolusi. Hal ini bukanlah melulu pendapat pembicara, melainkan juga pendapat seorang kolega tuan Soejono di Jawa Timur, sebab Pemerintah telah memberitahukan melalui Residen, bahwa sirkuler Bupati Probolinggo mendapat simpati Pemerintah. Oleh karena pembicara di sini menganjurkan lenyapnya segala macam bentuk adat yang merintang, maka sebetulnya ia adalah juru bicara Pemerintah. (Ketawa, tepuk tangan).

Selanjutnya diusulkan agar Pemerintah mewajibkan para pegawai, insinyur, guru-guru, terutama kepala-kepala sekolah HIS untuk mengenal satu bahasa, bahasa Indonesia. Mereka yang karena jabatannya, bergaul dengan rakyat, haruslah mengenal bahasanya, sebab tanpa itu mereka hanya akan dapat mengenal bagian luarnya saja dan tidak mungkin lebih mendalam lagi.

Bila orang ingin agar pelajaran bahasa itu hidup, hendaknya orang dapat melihat bahasa itu sebagai alat kebudayaan rakyat yang hidup, dan bila segala proses kematian, maka dengan begitu evolusi bisa dipupuk. Pembicara menekankan pentingnya usaha untuk membasmi kebiasaan-kebiasaan yang sudah usang, dan segala yang merintang jalannya evolusi". (Ki Hadjar Dewantara II, 1994: hal. 285-287)

G. Kongres Kebudayaan 1937

KK pada urutan VII diselenggarakan di pulau Bali. Jarak waktu penyelenggaraan KK VI (1929) ke KK VII (1937) cukup lama (8 tahun) bila dibandingkan dengan penyelenggaraan kongres-kongres sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena pada sekitar awal tahun 1930-an pemerintah Hindia-Belanda sedang mengalami krisis keuangan, dan masa itu lebih dikenal dengan sebutan "*zaman malaise*". Pemerintah terpaksa melakukan penghematan di berbagai bidang kegiatan. Di samping itu ada faktor lain yang menyebabkan tidak ada kegiatan kongres, yaitu faktor politik menjelang pecahnya Perang Dunia II dan penjajahan digantikan oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, praktis kegiatan Java-Instituut termasuk kegiatan menyelenggarakan KK menjadi terhenti, hingga bubar tahun 1948.

Para peserta dari Jawa datang ke Bali dengan menggunakan kapal laut bernama '*Op ten Noort*'. Karena pelabuhan Padangbai tidak terlalu dalam, sementara ukuran dan bobot kapal cukup besar, terpaksa kapal tidak dapat merapat ke tepi dermaga pelabuhan. Para peserta diangkut dengan sekoci menuju daratan. Yang menarik, untuk menampung akomodasi peserta selama mengikuti kongres tidak di tempatkan di hotel atau penginapan, tetapi menginap di atas kapal tersebut. Di atas kapal itulah sebagian dari kegiatan kongres dilaksanakan.

Berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya, acara KK tahun 1937 di Bali lebih

banyak diisi dengan pidato, ceramah dan kunjungan ke berbagai tempat penting dan pameran. Penyajian makalah dan debat hanya membahas dua judul, yaitu (1) makalah berjudul *Bangunan tua di Bali*, disampaikan oleh Dr. W.F. Stutterheim, dan *Bangunan Pura di Bali* oleh Dr. R. Goris. Sebelum kongres dimulai kepada para peserta diberikan penjelasan tentang keanekaragaman dan keunikan seni kerajinan Bali. Pidato penjelasan (*keynote address*) dengan judul *Kerajinan dan perkembangannya di Bali*, disampaikan oleh Ir. PHW. Sitsen. Dalam kongres kali ini pidato sambutan cukup banyak, yaitu dari (1) Pidato Pembukaan oleh Ketua Java-Instituut, Prof. Dr. R.A. Hoesein Djajadiningrat; (2) Pidato Residen Bali dan Lombok; (3) Pidato wakil Susuhunan Kraton Surakarta; (4) Pidato Wakil Sultan Jogjakarta. Setelah itu dilanjutkan dengan uraian tentang *Kehidupan sosial masyarakat Bali*, oleh Bupati Karangasem, dan tentang *Kehidupan Keluarga masyarakat Bali*, oleh Bupati Gianyar.

Sebelum kongres ditutup, para peserta mengunjungi tempat-tempat: (1) Kertagosa dan pameran barang-barang seni di Klungkung; (2) Pura Besakih, dan makan siang di Puri Karangasem dan meninjau pameran kerajinan, antara lain ukiran kayu, dan tenun dari Tenganan serta menikmati tarian Legong, Rejang, dan cerita Calon Arang; (3) meninjau Goa Gajah, Jeh Pulu, pura Pejeng dan Gunung Kawi, dipandu oleh Dr. WF. Stutterheim; (5) Pura Gelgel untuk melihat pameran seni kerajinan tenun dari Kamasan dan Nusa Penida, kerajinan perak dari Kamasan, kerajinan besi dan melihat tari Janger dan Barong; (6) Mengunjungi Museum Bali, dipandu oleh Ir. T. Resink, melihat fragmen tari Ramayana, dilanjutkan makan siang di Hotel Bali.

Acara makan malam perpisahan diselenggarakan di atas kapal *Op ten Noort*, dihibur dengan pertunjukan musik Bali, konser piano, oleh Colin McPhee dan Walter Spies. Colin McPhee adalah seorang komposer dan ethnographer kelahiran Kanada (1900) dan tinggal di New York. Setelah mendengarkan piringan hitam gamelan Bali yang dibuat oleh perusahaan rekaman "The Odeon" tahun 1920, Colin McPhee muda sangat tertarik dan ingin sekali mendengarkan langsung musik itu. Ia datang ke Bali tahun 1931 dan kemudian malahan tinggal di Bali untuk mempelajari gamelan, dan baru kembali tahun 1939. Bertiga dengan antropolog Margaret Mead dan pelukis Walter Spies ikut berjasa dalam mendorong pengembangan gamelan di Bali. Tahun 1936 ia mendapat Pulitzer Prize di bidang musik. Colin McPhee meninggal tahun 1964 beberapa minggu setelah menyelesaikan karya besarnya (*magnum opus*) yang diberi judul, *Music in Bali* (Michael Tenzer, 1991: hal. 16-17). Tanggal 24 Oktober 1937 dengan kapal *Op ten Noort*, peserta meninggalkan Padangbai menuju Surabaya (Majalah Djawa, 1938: hal. 1).

Dalam pidato penjelasannya dengan judul *Kerajinan dan perkembangannya di Bali*, Ir. PHW. Sitsen. menguraikan berbagai cabang perkembangan seni kerajinan di Bali. Bagian yang disorot adalah tentang perkembangan: seni kerajinan tenun (*weefnijverheid*), seni ukir kayu (*houtsnijkunst*), yang berkaitan dengan pekerjaan logam (*edelmetaal-bewerking*), seni kerajinan (*houtsnijnij-verheid*), seni kerajinan perak (*zilvermeden*), pekerjaan besi (*ijzerbewerking*), dan pekerjaan kulit (*leer-bewerking*).

Selanjutnya oleh Sitsen juga disinggung tentang pengaruh perkembangan kegiatan seni kerajinan tersebut dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat Bali. Dengan berkembangnya seni tersebut ekonomi masyarakat meningkat, terutama dikaitkan dengan turisme. Pada saat itu pulau Bali telah dikenal di mancanegara dan

banyak turis yang datang ke Bali. Disebut-sebut tentang jumlah turis yang datang ke Bali, pada tahun 1936 sebanyak 3000 orang, dan pada tahun 1937 meningkat menjadi 5000 orang. Mereka datang ke pulau Bali untuk menikmati keindahan alam dan keunikan budayanya. Mereka banyak yang berbelanja barang-barang seni Bali.

Di samping itu Sitsen antara lain menyarankan agar seni kerajinan di Bali terus didorong perkembangannya dan jangan sampai terhambat karena beban pajak. Sementara itu mengenai tata-teknis dan tata-ekonomi dalam seni kerajinan perlu diatur guna menjadi arahan dalam mengembangkan seni kerajinan Bali. Sitsen menyarankan perlunya didirikan sebuah **museum** yang merupakan bagian dari kegiatan Museum Bali guna memamerkan produksi kerajinan Bali.

Pada akhir paparannya Sitsen menegaskan tentang pendapatnya sebagai berikut:

- a. *Het is gewenscht, bepaalde taken van nijverheid op Bali te stimuleeren, teneinde den economischen druk, die het cultuur-eigene op Bali bedreigt, op te heffen.*
- b. *Het is gewenscht, de Balische nijveren in contact te brengen met goede producties, die elders in de op Bali te activeeren taken van nijverheid, worden vervaardigd.*
- c. *Oprichting van een museum, b.v. een afdeling van het Bali-museum, ter tentoonstelling van producties, waarvan voor eigen werkzaamheid kan worden geprofiteerd, is geboden.*
- d. *De bedrijfstechnische en bedrijfseconomische voorlichting zal voor de te ontwikkelen takken van nijverheid moeten worden verstrekt.*
- e. *Teneinde op de beste manier de stimulans te kunnen inzetten, moet over groote plaatselijke kennis worden beschikt. De wijze waarop de activeering moet geschieden, ware vast te stellen in overleg met een te vormen Balische nijverheidcommisie.*
- f. *Teneinde de bestaande taken van nijverheid tot verderen bloei te doen komen, zal de grondstofvoorziening moeten worden bestudeerd en geregeld.*
- g. *Teneinde de kwaliteit van de nijverheidproducties voor den export op peil te houden, wordt verkoop op certificaat aangeraden (Majalah Djawa, 1938: hal. 10).*

Salah satu hasil nyata dari diselenggarakannya KK tahun 1937 di Bali adalah berdirinya Bali Instituut. Di samping itu juga mendorong berdirinya Balai Kirtya di Singaraja yang berhasil menyelamatkan lebih dari 6000 lontar. Berkat adanya koleksi lontar inilah Zoetmulder dapat menghasilkan *magnum opus*-nya, yang berjudul *Kalangwan*. Sebab, lontar-lontar yang memuat karya Mpu Tantular, Mpu Sedah dan Mpu Tanakung diselamatkan di tempat itu. (Majalah Tempo, 2/11/2004).

Dari gambaran tentang penyelenggaraan seluruh KK sebelum Indonesia merdeka di atas tampak jelas betapa besarnya perhatian kaum terpelajar terhadap permasalahan kebudayaan bangsa. Seiring dengan bangkitnya kesadaran ber-bangsa tumbuh pula kesadaran untuk melindungi dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Melalui forum kongres itu mereka dapat berdebat menyampaikan pandangan-pandangannya tentang konsep, strategi dan kebijakan pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kebudayaan. Di samping kaum terpelajar, para raja dan bangsawan di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Madura dan Bali juga tidak mau ketinggalan. Besarnya perhatian itu ditunjukkan dengan kesediaan menjadi pelindung dan bahkan hadir dalam setiap penyelenggaraan kongres. Sementara itu berbagai

keputusan kongres terbukti dengan cepat dan cermat direalisasikan dan hasil itu masih dapat kita lihat dan rasakan hingga sekarang. Keberadaan lembaga-lembaga seperti: museum, fakultas sastra, jurusan-jurusan bahasa, sejarah, filsafat, sekolah kerajinan, pelajaran sejarah, bahasa asing dsb. adalah sebagian dari hasil KK sebelum Indonesia merdeka.

Hal lain yang patut dicatat dari perjalanan KK sebelum Indonesia merdeka adalah bagaimana pandangan kaum terpelajar terhadap Pemerintah Hindia Belanda dalam mengurus kebudayaan bangsa yang dijajahnya. Pemerintah Hindia Belanda telah banyak melakukan kegiatan dalam upaya memelihara, memajukan dan mengembangkan kebudayaan, namun oleh kaum pribumi upaya ini tetap dipandang sebagai upaya memecah belah bangsa secara sistematis melalui pendekatan budaya. Tampilnya kaum terpelajar bumiputra pada saat itu membuktikan bahwa mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nasib budaya mereka. Sikap yang ditunjukkan oleh Pangeran Prangwadono ketika ia menolak perintah Batavia kepada Pengurus BO cabang Surakarta untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa dengan mengganti menjadi Kongres Kebudayaan Jawa menunjukkan bahwa mereka tidak menerima begitu saja perintah Pusat (Batavia). Termasuk pendirian Java-Instituut dan lain-lain dipandang sebagai upaya memecah belah kesatuan budaya bangsa. Pandangan itu datang antara lain dari Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan:

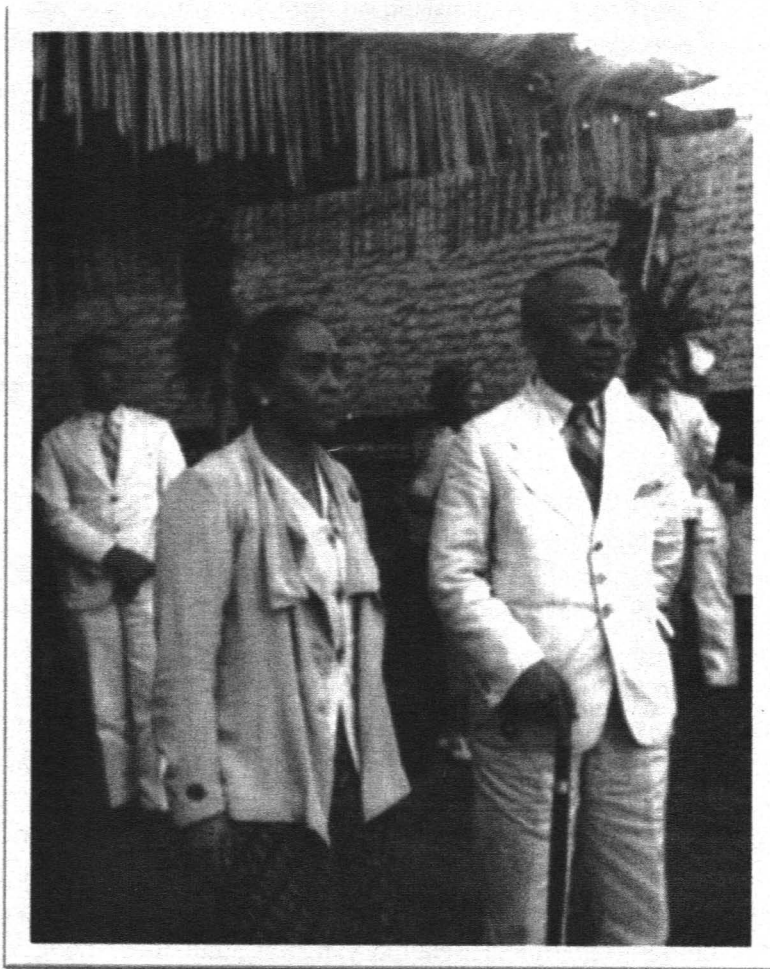
‘Di jaman Belanda kita dipecah-pecah secara sistematis, hingga daerah yang satu dijauhkan dari daerah yang lain. Usaha memajukan kebudayaan oleh Belanda itu sungguhpun sudah diadakan, namun nampak jelaslah maksudnya, yaitu untuk “memurnikan” kebudayaan-kebudayaan daerah-daerah masing-masing. Untuk itu didirikan Java-Instituut, di samping ada Batak Instituut, ada pula Bali Instituut dan lain-lain (Ki Hadjar Dewantara, 1994: hal. 98).

Setelah kongres di Bali berakhir, tidak ada lagi KK berikutnya yang dikoordinasikan oleh Java-Instituut hingga bubar demi hukum pada tanggal 4 Agustus 1948. Kondisi politik dan sistem pemerintahan di wilayah Nusantara mengalami perubahan total. Berkat perjuangan yang gigih melalui bidang budaya melalui kongres demi kongres (7 kali KK), berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah itu mulai tanggal 17 Agustus 1945, menjelma menjadi bangsa dan negara Indonesia yang bebas dan merdeka. Bebas karena terlepas dari belenggu penjajahan bangsa lain, dan rakyat merdeka untuk mengatur penanganan masalah kebudayaannya. Meskipun Java Instituut atau lembaga kebudayaan lain bentukan penjajah belum dibubarkan (antara lain Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Oudheidkundige Dients, Bataviaasch Kunst Kring, dll) tetapi aktivitasnya menjadi menurun. Penerbitan majalah Djawa sebagai corong aktivitas Java-Instituut hanya dapat bertahan hingga tahun 1941.

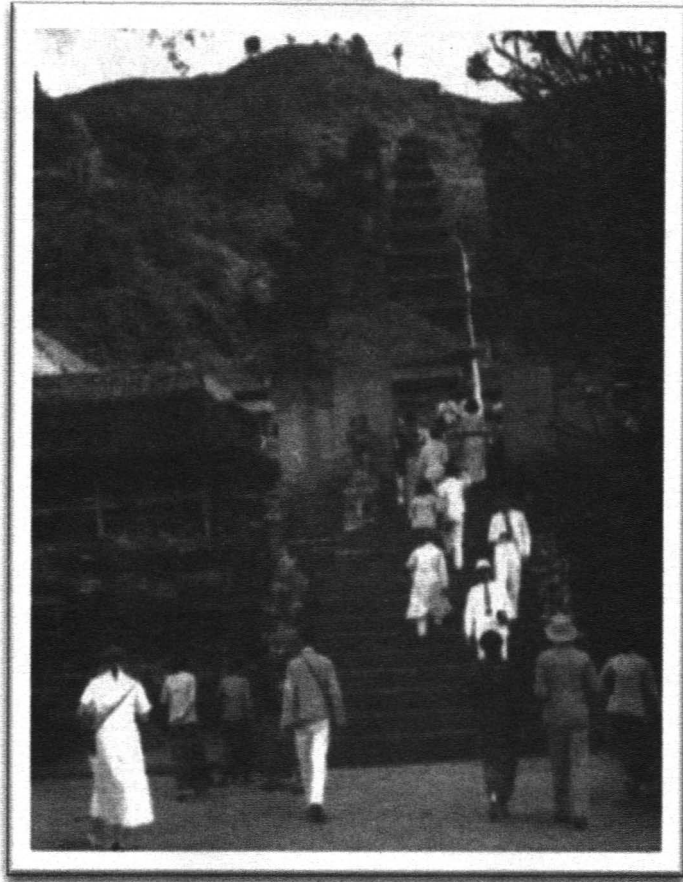
Dominasi pemerintah Hindia Belanda yang berabad-abad menguasai wilayah Nusantara, pada tanggal 7 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat harus menyerahkan wilayah itu kepada Jepang. Indonesia ganti dijajah oleh Jepang. Langkah yang dilakukan di bidang kebudayaan pada 1 April 1943 membentuk Keimin Bunka Sidosho atau Pusat Kebudayaan. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk membangunkan dan memimpin kebudayaan terutama berusaha memelihara kesenian klasik dan kesenian

asli Indonesia. (Jawa Baroe No. 8 tahun 2603 hal. 8)

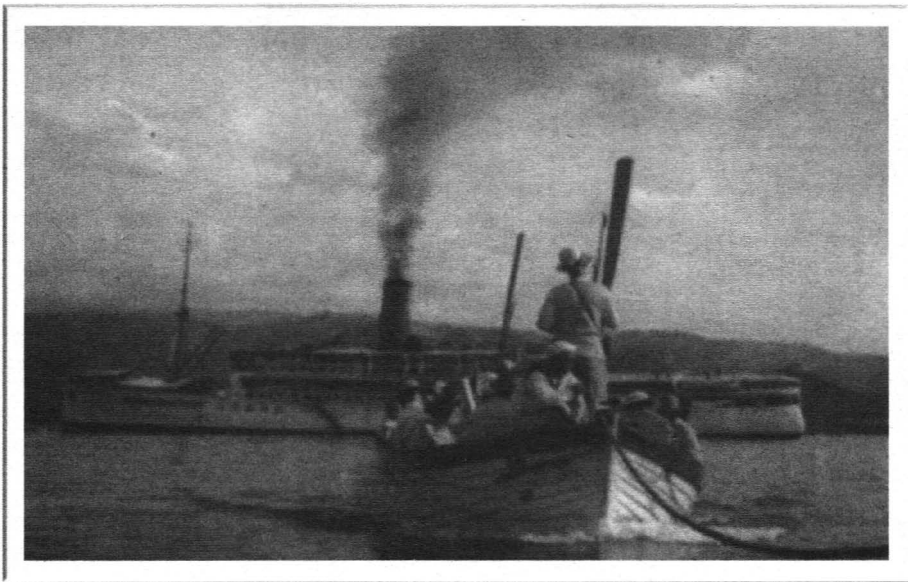
Meskipun Jepang mempunyai perhatian besar terhadap pelestarian kebudayaan bangsa, tetapi pada masa tidak sempat diselenggarakan KK, karena pada tahun 1945 Jepang dikalahkan oleh Sekutu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memasuki babak baru sebagai bangsa Indonesia merdeka. Dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia dengan secara bebas dapat menyusun konsep, kebijakan dan strategi untuk mengembangkan kebudayaannya dengan bermodalkan hasil dari 7 KK yang pernah diselenggarakan. Dengan modal itu diselenggarakan berbagai kegiatan kebudayaan lanjutan seperti konferensi, musyawarah, seminar termasuk kegiatan Kongres Kebudayaan Indonesia yang ditangani sepenuhnya oleh kaum terpelajar bumi putra Indonesia.



Prof. Dr. R. Hoesein Djajadiningrat bersama istri Partini Djajadiningrat di Kintamani (foto: Vistarini, Java-Instituut Dalam Foto)



Peserta kongres berwisata ke Pura Kehen



Peserta Kongres Kebudayaan di Bali tahun 1937 meninggalkan kapal 'Op ten Noort' dengan menggunakan sekoci menuju pelabuhan Padangbai. (Java-Instituut Dalam Foto)

BAB III

KONGRES MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945-1965)

Tiga setengah tahun lamanya (1942-1945) Jepang menduduki Indonesia setelah dapat mengalahkan penjajah Belanda yang bercokol di bumi Nusantara selama 300 tahun lebih. Dominasi yang singkat itu berakhir setelah Jepang ganti ditaklukkan oleh Amerika, dan Indonesia menjadi bangsa merdeka. Menjadi bangsa merdeka ternyata tidak bejalan mulus. Masa kemerdekaan awal mulai dari tahun 1945 hingga tahun 1965 merupakan masa-masa penuh berbagai gejolak: ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan.

Kekalahan atas Jepang dari Timur membuat Belanda ingin masuk lagi ke Indonesia setelah Jepang dikalahkan Sekutu. Kekalahan itu dirasakan sangat menyakitkan, terutama dari sisi ekonomi. Belanda kehilangan "tambang" yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Kehilangan besar itu membuat M.B. van der Jagt, mantan Gubernur (?) Surakarta, Solo dalam bukunya "Memoires" mengatakan:

"Dengan adanya penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia, Belanda dipaksa untuk meninggalkan karyanya yang sangat berharga, yang merupakan hasil kerja keras selama tiga setengah abad, kehilangan kerjaan Hindianya, kekayaan tropisnya...dst." (Frances Gouda, 2007: hal. 409).

Alasan inilah yang membuat pemerintah Belanda ingin membangun kembali "kerajaan" Hindia Belanda di Nusantara. Masuknya kembali tentara Belanda membuat pemerintah RI yang baru harus berjuang dengan senjata maupun diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Perang mempertahankan kemerdekaan membuat konsentrasi penyusunan pemerintahan baru menjadi terganggu. Bahkan pusat pemerintahan RI harus dipindahkan ke Yogyakarta. Setelah perlawanan dan perundingan yang panjang akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatannya dari pemerintah Belanda (1949), dan pusat pemerintahan selanjutnya kembali lagi Jakarta.

Selain harus menghadapi kembalinya pasukan penjajah Belanda ke wilayah

RI, muncul gejala disintegrasi bangsa dengan adanya pemberotakan yang datang dari dalam negeri. Pemberotakan PKI/Muso (1948), DI/TII di Jawa Barat (pimpinan S.Kartosuwirjo) Jawa Tengah (Pimpinan Amir Fatah, Aceh (pimpinan T. Daud Beureueh) dan Sulawesi Selatan (pimpinan Kahar Muzakar) yang berlangsung dari 1949-1962 dengan tertangkapnya Kartosuwirjo. Di Maluku timbul pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang pada tahun 1950 memproklamasikan diri menjadi Negara merdeka memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur yang saat itu Indonesia masih berstatus Republik Indonesia Serikat. Ditambah lagi dengan munculnya gejolak politik karena terjadinya pertikaian masalah ideologi politik antara kelompok kanan dan kiri, kesemuanya itu telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran para pemimpin saat itu. Ujian demi ujian datang silih berganti itu mencapai puncaknya setelah meletus pemberontakan G30S/PKI tahun 1965.

Meskipun dalam masa kemerdekaan awal itu penuh dengan gangguan dan masalah, tetapi bukan berarti keinginan membangun negara bangsa itu mengendur. Khusus untuk membangun kebudayaan bangsa di sela-sela situasi yang sulit itu para budayawan, seniman, cendekiawan, tokoh masyarakat dan agama sepakat untuk menyelenggarakan kongres atau konferensi kebudayaan. Tujuannya tidak lain untuk membahas dan mengambil kesepakatan tentang konsep, kebijakan dan strategi membangun bangsa dan memajukan kebudayaan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945.

Gambaran tentang dinamika pemikiran para pendahulu di bidang kebudayaan tentang pemajuan kebudayaan bangsa yang dihimpun melalui forum kongres dimulai dengan perdebatan tentang urutan kongres dilanjutkan dengan uraian sekitar tema, tujuan dan hasil dari masing-masing kongres sebagai berikut.

A. JUMLAH DAN URUTAN KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA

Sebelum menguraikan jalannya kongres demi kongres, ternyata masalah jumlah dan urutan kongres kebudayaan sesudah Indonesia merdeka telah menjadi perdebatan. Sebagaimana diuraikan di dalam Bab II, pada masa sebelum Indonesia merdeka telah diselenggarakan tujuh kali KK, yang secara berurutan dimulai tahun 1918 di Surakarta, 1919 di Surakarta, 1921 di Bandung, 1924 di Yogyakarta, 1926 di Surabaya, 1929 di Surakarta, dan tahun 1937 di Bali. Selain itu juga telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 dan Konferensi Sastra Indonesia tahun 1939. Inisiatif menyelenggarakan kongres dan konferensi itu datang dari kaum pribumi yang telah memiliki semangat kebangsaan dan berkebudayaan bangsayang tinggi.

Dari ketujuh kongres itu, yang disebut dengan jelas sebagai KK adalah yang diselenggarakan tahun 1918 dengan nama *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* atau Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa. Setelah itu kongres diberi nama *Congres van het Java Instituut* (Kongres dari Java Instituut), diambil dari nama penyelenggaranya yaitu Java-Instituut. Meskipun disebut demikian, tetapi pada hakikatnya acara itu juga merupakan KK juga, sama dengan kongres yang diselenggarakan tahun 1918. Dengan demikian mengenai jumlah dan urutan kongres sebelum Indonesia merdeka dapat dikatakan tidak ada masalah.

Tidak demikian halnya dengan KK yang diselenggarakan sesudah Indonesia

merdeka. Mengenai jumlah dan urutan KK yang pernah diselenggarakan sempat 2 kali menjadi perdebatan. *Pertama*, apakah yang dapat disebut sebagai KK pertama itu acara Musyawarah Kebudayaan yang diselenggarakan tahun 1945 di Sukabumi, atau Kongres Pendidikan tahun 1947 di Solo, ataukah kongres yang diselenggarakan tahun 1948 di Magelang? *Kedua*, apakah kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan tahun 1957 di Bali dan tahun 1960 di Bandung yang lebih dikenal sebagai Rapat Umum BMKN atau Kongres BMKN juga merupakan kegiatan KK atau bukan? Permasalahan masih dapat bertambah lagi karena muncul pendapat kegiatan Konferensi Kebudayaan yang diselenggarakan tahun 1950 di Jakarta juga telah disebut-sebut juga sebagai Kongres Kebudayaan.

Perbincangan masalah jumlah dan urutan penyelenggaraan KK sesudah Indonesia merdeka diawali pada saat berlangsung KK di Magelang tahun 1948. Ketika itu dipersoalkan, mana yang benar KK di Magelang 1948 itu sebagai KK pertama, atau kedua atau malahan ketiga, seperti pertanyaan pertama di atas? Sebagian peserta menyatakan bahwa KK di Magelang adalah Kongres Kebudayaan kedua, sebagian lagi dari peserta menyebutnya sebagai KK ketiga. Kerancuan tentang awal kongres terjadi karena sebuah pertemuan kebudayaan yang diselenggarakan di Sukabumi pada akhir Desember tahun 1945 yang disebut sebagai “Musyawarah Kebudayaan” (Pax Benedento/ penyunting, 1999: hal. 283) telah dianggap sebagai KK, sehingga kongres di Magelang merupakan lanjutannya. Yang menarik, acara Musyawarah Kebudayaan tahun 1945 di Sukabumi yang dijadikan titik tolak penentuan kapan KK pertama diselenggarakan masih mengandung silang pendapat.

Menurut Pax Benedento dkk. dalam bukunya *Kronik Revolusi I*, pertemuan itu diselenggarakan tanggal 31 Desember 1945 dan beritanya dimuat dalam majalah Pantja Raja tanggal 15 Januari 1946. Tetapi kalau menurut Mr. Wongsonegoro pertemuan itu diselenggarakan pada bulan November 1946 dan kegiatan itu disebutnya sebagai KK. Mana yang benar, pertemuan itu berlangsung pada akhir Desember 1945 atau bulan November tahun 1946? Pertemuan itu sendiri merupakan sebuah musyawarah atau kongres?

Pada bagian lain Mr. Wongsonegoro menjelaskan bahwa KK di Magelang itu sebenarnya merupakan KK ketiga. Menurut Mr. Wongsonegoro pertemuan di Sukabumi itu disebutnya sebagai KK pertama dan Kongres Pendidikan di Solo tahun 1947 disebutnya sebagai KK kedua, KK di Magelang ketiga. Kutipan pendapat yang disampaikan pada hari kedua KK di Magelang adalah sebagai berikut:

”Pertama kali disebut kongres di Sukabumi dalam tahun 1946 (bulan November) yang diliputi suasana pertempuran. Pada saat itu diterima sebuah resolusi mengenai perubahan (hervorming) Kementerian Pengajaran menuju ke Kementerian Kebudayaan. Kedua kalinya adalah di Solo bulan April 1947, yaitu dengan dilangsungkannya Kongres Pendidikan yang dapat pula disebut Kongres Kebudayaan”. (Majalah Indonesia I-II, 1950: hal. 20).

Tetapi majalah ini ikut menambah kerancuan tentang urutan KK itu karena di dalam Pengantar majalah ditulis laporan (*verslag*) yang secara jelas menyatakan KK di Magelang sebagai Kongres Kebudayaan ke-2, diadakan akhir Agustus tahun 1948.

(Majalah Indonesia I-II, 1950: hal. 1).

Sementara itu ada yang berpendapat bahwa kongres di Magelang adalah Kongres Kebudayaan Indonesia pertama, karena pertemuan kebudayaan di Sukabumi belum dipersiapkan secara baik sebagai layaknya sebuah kongres, sedangkan kongres yang diselenggarakan tahun 1947 di Solo adalah Kongres Pendidikan, bukan KK. Menanggapi kekisruhan mengenai urutan KK itu Wakil Presiden Moh. Hatta turun tangan menyampaikan pendapatnya. Menurut Hatta kongres tahun 1948 bukan yang pertama, tetapi beliau menyatakan setuju jika kongres di Magelang dinyatakan sebagai Kongres Kebudayaan pertama. Seperti yang dikatakan dalam sambutan di KK tahun 1948, antara lain Hatta memberikan alasan sebagai berikut:

“Sebenarnya bukan yang pertama, karena yang pertama telah diadakan sebelumnya ini, akan tetapi boleh juga disebut bahwa ini adalah kongres yang pertama karena persiapan-persiapan dan sebagainya lebih luas daripada yang dahulu, yang diadakan pada permulaan revolusi”. (Majalah Indonesia I-II, 1950: hal. 14).

Apa yang dimaksudkan dengan kata *“sebelumnya ini”* oleh Bung Hatta itu adalah pertemuan (musyawarah) kebudayaan yang diselenggarakan di Sukabumi tanggal 31 Desember 1945, dan Kongres Pendidikan 1947 di Surakarta.

Permasalahan jumlah dan urutan KK kembali terulang pada KK 2003 di Bukittinggi. Ketika dalam sidang ke-6 dibahas makalah (yakni makalah penulis: Nunus Supardi) tentang *Konsepsi, Strategi dan Kebijakan pada Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka*, Ajip Rosidi mengatakannya bahwa setelah KK 1954 telah berlangsung dua kali pertemuan budaya yang disebutnya sebagai Kongres Kebudayaan juga, yaitu yang diselenggarakan di Bali tahun 1957 dan di Bandung tahun 1960. Diakui, selama ini kedua peristiwa budaya itu memang sering dilupakan orang, padahal pada kedua peristiwa itu telah terjadi perdebatan yang cukup keras tentang kebudayaan dan paham politik antara kelompok budayawan dan seniman yang berhaluan paham humanisme sosialis atau sosialisme komunis dengan kelompok humanisme universal dan kelompok netral.

Menurut Ajip pada KK 1957 di Bali pertikaian antara kedua kelompok itu mulai serius. Salah satu penyebab yang membuat suasana mulai memanas ketika beredar isu bahwa Sitor Situmorang ingin menjadi Menteri Kebudayaan. Isu itu ditanggapi oleh Wiratmo Sukito dan hal itu membuat hubungan antara kedua kubu itu memanas (Majalah Tempo, 2/11/2004). Perseteruan itu makin seru pada waktu diselenggarakan KK 1960 di Bandung, ketika sampai pada perbincangan tentang Manifesto Politik (Manipol). Pada saat itu pihak humanisme sosialis menuduh humanisme universal dan kelompok netral tidak setuju dengan ajaran Manifesto Politik. Heboh masalah Manipol dalam kongres tersebut menjadi tambah menarik ketika pada sidang pleno terakhir beredar selebaran stensilan berbentuk puisi. Puisi itu berisi sindiran bagi mereka yang memperlakukan Manipol, dan puisi itu ditandatangani oleh Dodong Djiwaprada, Ajip Rosidi (tercatat sebagai peserta kongres No. urut: 4), Ramadhan KH, Toto Sudarto Bachtiar dan Saini KM. Oleh karena itu baik menurut Ajip Rosidi, Rosihan Anwar maupun Saini KM kegiatan kebudayaan tahun 1960 di Bandung yang diselenggarakan

oleh BMKN adalah Kongres Kebudayaan. Ini berarti telah terjadi kerancuan tentang jumlah dan urutan KK yang kedua kalinya.

Mengapa hal itu dapat terjadi? Tampaknya, yang menjadi penyebab terjadinya kerancuan mengenai jumlah dan urutan KK sesudah Indonesia merdeka adalah perbedaan pandangan mengenai penamaan beberapa pertemuan kebudayaan yang pernah diselenggarakan. Mereka belum sepakat apakah berbagai pertemuan itu sebagai “pertemuan budaya”, “konferensi budaya”, “musyawarah budaya”, ataukah sebagai kongres kebudayaan? Dengan adanya penegasan dari Moh. Hatta seperti di atas, maka para peserta sepakat kegiatan kebudayaan di Sukabumi (1945) maupun Kongres Pendidikan di Surakarta (1947) bukan termasuk kegiatan KK. Dengan demikian dasar hitungan untuk menentukan urutan KK dimulai dari kongres yang diselenggarakan di Magelang, tanggal 20 – 25 Agustus 1948 sebagai Kongres Kebudayaan pertama.

Seperti halnya pada masalah urutan KK 1948, dari beberapa data yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa sumber penyebab terjadinya kerancuan yang kedua ini, yaitu tentang posisi KK tahun 1957 dan 1960, sama dengan kasus yang terjadi pada KK 1948. Kerancuan itu timbul karena belum ada kesepakatan mengenai penamaan kegiatan, apakah kegiatan itu sebagai “pertemuan budaya”, “konferensi budaya”, “Rapat BMKN”, “Kongres BMKN” ataukah “Kongres Kebudayaan”? Dalam Warta Kebudayaan terbitan BMKN, penamaan kegiatan kebudayaan tahun 1957 dan 1960 memang membingungkan orang. Dalam laporan rapat persiapan disebutkan sebagai “Pertemuan BMKN”, disebut juga sebagai “Rapat Umum BMKN”, dan pada bagian lain disebut sebagai “Kongres BMKN”. Dengan penyebutan seperti itu mencerminkan bahwa pertemuan itu dimaknai sebagaimana layaknya pertemuan yang dilakukan oleh suatu organisasi masyarakat, dan bukan dimaknai sebagai pertemuan kebudayaan. Penyebutan selanjutnya menjadi tambah rancu karena bersamaan dengan dilangsungkannya kegiatan rapat organisasi itu dilangsungkan pula kegiatan yang memperbincangkan masalah kebudayaan, dan kegiatan itu disebutnya sebagai “pertemuan budaya”, “konferensi kebudayaan”, “simposium budaya” dan “kongres kebudayaan” (Warta Kebudayaan/BMKN 1957). Dengan pemakaian berbagai istilah itulah kerancuan urutan KK tak terelakkan. Tidak hanya disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam penyebutan nama kegiatan (sebagai simposium, konferensi atau kongres), tetapi juga karena kegiatan rapat kerja organisasi atau rapat umum organisasi masyarakat dilaksanakan secara bersama-sama dengan kegiatan kebudayaan. Pada Rapat Umum BMKN 1954 diselenggarakan pula kegiatan memperbincangkan kebudayaan, sehingga kegiatan itu disebut pula sebagai Kongres BMKN di samping sebagai Kongres Kebudayaan.

Sesungguhnya dalam rapat-rapat persiapan kongres sudah muncul usul agar antara rapat organisasi dengan kegiatan kebudayaan dipisahkan, sehingga sarasanya menjadi jelas. Tetapi usul itu tidak disetujui, dan tetap menyatukan dua kegiatan tersebut. Dalam buku *Prahara Budaya* karya DS Moeljanto dan Taufiq Ismail kedua kegiatan itu (1957 dan 1960) disebutnya sebagai “Kongres BMKN” bukan dengan sebutan Kongres Kebudayaan (DS Moeljanto dan Taufiq Ismail, 1995: hal. 214). Dalam majalah *Ekonomi* yang terbit tahun 1957, kegiatan kebudayaan tahun 1957 di Bali disebutnya sebagai “*Congres of National Cultural of Indonesia Association*”, yang berarti Kongres BMKN. Penyebutan seperti itu sangat mirip dengan penyebutan KK yang terjadi sebelum Indonesia merdeka yakni KK yang diselenggarakan oleh Java Instituut

dengan sebutan *Congres van het Java Instituut*.

Atas dasar ketidakkonsistenan dalam penyebutan nama dari kegiatan kebudayaan itu menjadi landasan bagi Panitia KK 1991, sehingga di dalam buku Pedoman KK tahun 1991 ditulis:

“... sejak Kongres Kebudayaan yang terakhir tahun 1954 tidak ada lagi usaha untuk menyelenggarakan kongres.” Pada bagian lain ditulis: “... setelah hampir 40 tahun setelah Kongres Kebudayaan 1954 baru diselenggarakan kongres lagi tahun 1991”.

Dengan adanya koreksi di atas, maka kerancuan yang selama puluhan tahun berjalan dengan aman (*tidak ada yang mengoreksi*) harus diluruskan. Sebagai bentuk aktivitas yang di dalamnya memperbincangkan masalah kebudayaan maka aktivitas yang berlangsung tahun 1957 dan 1960 pada hakikat juga merupakan Kongres Kebudayaan. Pertemuan itu merupakan rangkaian pertemuan para wakil organisasi di bidang kebudayaan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai masalah kebudayaan. Dengan adanya penegasan ini maka jumlah dan urutan KK sesudah Indonesia merdeka mengalami perubahan. Urutan penyelenggaraan menjadi: KK I tahun 1948 di Magelang, KK II tahun 1951 di Bandung, KK III tahun 1954 di Surakarta, KK IV tahun 1957 di Denpasar/Bali, KK V tahun 1960 di Bandung, KK VI tahun 1991 di Jakarta, dan yang baru saja diselenggarakan tahun 2003 yang lalu di Bukittinggi adalah KK VII dan KK VIII di Bogor.

B. PENYELENGGARAAN KONGRES KEBUDAYAAN

Tiga tahun setelah Indonesia merdeka, langkah awal yang dilakukan oleh para budayawan, seniman dan cendekiawan adalah menyelenggarakan suatu forum dalam bentuk kongres untuk meletakkan dasar pembangunan bangsa yang berwawasan budaya. Secara berturut-turut kongres kebudayaan yang pernah diselenggarakan adalah sebagai berikut.

B.1. Kongres Kebudayaan 1948

B.1.1. Persiapan dan pelaksanaan

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan 3 tahun sesudah Indonesia merdeka itu, berlangsung pada tanggal 20 - 24 Agustus 1948, di Pendopo Kabupaten Magelang. Kongres ini ditetapkan sebagai KK pertama, sebagai bentuk pelaksanaan dari keputusan konferensi persiapan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 1948. Gagasan untuk menyelenggarakan kongres mula-mula datang dari Pusat Kebudayaan Kedu, sebuah kota kecil di provinsi Jawa Tengah. Kongres itu berupaya mencari dan menyepakati konsep dan strategi dalam menata kehidupan berbangsa dan berbudaya arah ke depan. Dari pihak Panitia meminta kepada para pemrasaran dan pendebat agar memperhatikan dua hal: “(1) bagaimanakah caranya mendorong kebudayaan kita supaya dapat maju cepat; dan (2) bagaimana caranya agar kebudayaan kita jangan sampai

terus bersifat kebudayaan jajahan, akan tetapi supaya menjadi suatu kebudayaan yang menentang tiap-tiap anasir cultureel imperialisme". Gagasan untuk menyelenggarakan KK yang sangat strategis itu kemudian diambil alih oleh Kementerian Pengajaran, Pen-didikan dan Kebudayaan, tetapi campur tangan Kementerian itu menurut Mr. Ali Sastroamidjojo adalah sebagai "campur tangan passief" saja. (Majalah Indone-sia No. I-II, 1950: hal 13).

Tentang rencana penyelenggaraan kongres itu telah diberitakan oleh Berita Antara 2 bulan sebelumnya (8 Juni 1948). Dalam berita itu antara disebutkan:

"Kongres Kebudayaan Indonesia akan berlangsung di Magelang untuk lebih kurang 5 hari lamanya, mulai tgl. 20 Agustus yad. Sebagai acara akan diadakan praeadvise-praeadvise, seteling-seteling dan pertunjukan-pertunjukan yang bersifat nasional. Selain itu pun akan diminta kepada ahli-ahli kebudayaan luar negeri untuk mengadakan causeri-causerinya. Dicitakan pula, bahwa kongres dapat membentuk suatu lembaga kebudayaan yang bertugas memikirkan kemajuan-kemajuan di lapang kebudayaan dan memberi advise-advise kepada Pemerintah dalam soal-soal kebudayaan. Penyelenggaranya ialah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Juga akan diundang wakil-wakil kebudayaan dari luar daerah Republik maupun dari luar negeri". (Berita Antara, Juni 1948).

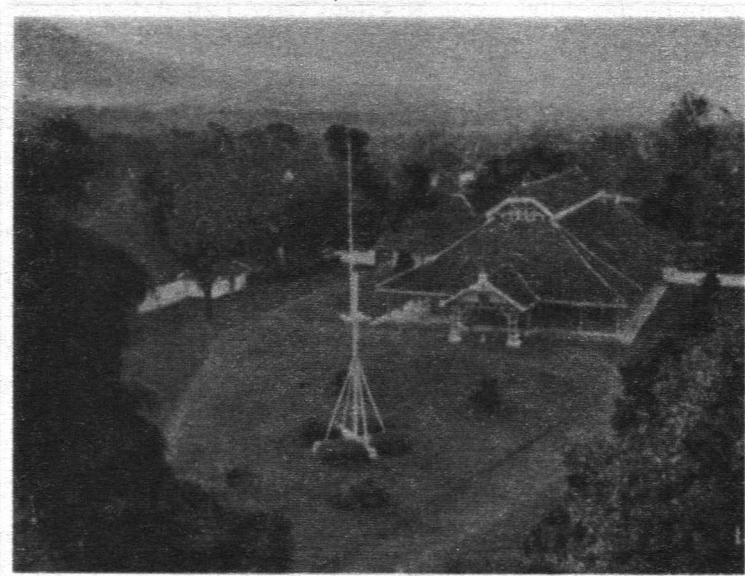
Kongres Kebudayaan 1948 diselenggarakan saat situasi pemerintahan dan keamanan Negara belum stabil. Tidak ada data yang menjelaskan tentang pemilihan kota kecil Magelang sebagai tempat kongres. Dapat diduga pemilihan kota itu tidak terlepas dari pertimbangan keamanan kongres. Dapat dibayangkan betapa sulitnya Panitia Penyelenggara mempersiapkan penyelenggaraan sebuah KK yang pertama dalam situasi pergolakan dan peralihan itu. Tentang "kenekadan" para budayawan, seniman dan cendekiawan untuk menyelenggarakan KK pada saat itu digambarkan oleh Dr. Bahder Djohan sebagai "keberanian dan ketulusan pendekar-pendekar kita yang sangat membanggakan". Di saat Belanda bersiap-siap untuk menghancurkan pusat pemerintahan Republik Indonesia, di saat bangsa Indonesia secara halus telah dapat meraba akan bahaya yang mengancam lambang perjuangannya, di saat itulah Kongres Kebudayaan di Magelang diadakan sebagai tantangan yang nyata terhadap bala yang akan datang. Kondisi yang serba sulit itu juga digambarkan oleh Sutarjo yang menjabat sebagai Ketua Penyelenggara kongres sebagai berikut:

Betul banyak kesukaran yang telah kami alami. Misalnya Bapak Mr. Wongsonegoro sendiri telah beberapa kali dalam malam gelap gulita mengadakan istirahat yang terpaksa di tengah-tengah sawah, karena mobilnya pun beristirahat, walaupun zonder izin beliau. Begitu pula Bapak Bupati Magelang telah mengerahkan beberapa Lurah membuat balai-balai sekedar untuk menghilangkan kesukaran-kesukaran disebabkan masalah penginapan dsb". (Majalah Indonesia No. I-II, 1950: hal 7).

Kesulitan transportasi juga dialami oleh Ki Mangoensarkoro, salah seorang pemrasaran. Ia terpaksa harus menunda penyampaian prasarannya satu hari, sebab

ia berangkat dari Yogya pagi hari dan tiba di Magelang baru pada sore harinya. Tetapi semua kesulitan itu dapat diatasi berkat bantuan dan gotong royong dari berbagai pihak. Bantuan itu tidak hanya datang dari penduduk Magelang tetapi juga dari Temanggung dan sekitarnya, mulai dari berupa peminjaman piring, cangkir, sendok, kursi, pemasangan lampu-lampu penerang, hingga tukang angkut air ke balai-balai tempat para peserta kongres. Bantuan juga datang dari masyarakat Solo dan Yogyakarta.

Di samping itu juga dilaporkan oleh Wongsonegoro selaku Ketua Kongres, bahwa kongres diselenggarakan dalam keadaan ekonomi, politik dan keamanan serba sulit. Antara lain diakui bahwa *"kini segala sesuatu dalam negara kita masih serba sulit, oleh sebab blokade politik dan terutama ekonomi Belanda, terlebih pula yang mengenai perhubungan"*. Kongres diselenggarakan setelah beberapa bulan pemberontakan PKI-Muso, dan Belanda bersiap-siap melancarkan serangan terhadap Republik Indonesia. Gambaran tentang betapa kritisnya saat itu sebelum menyampaikan pidatonya Mr. Wongsonegoro mengajak para peserta kongres untuk bersama-sama mengheningkan cipta selama 1 menit untuk mendo'akan beberapa korban ketika terjadi insiden yang menimpa pemuda-pemudi kita yang sedang merayakan peringatan 3 tahun kemerdekaan RI pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1948. Pada tanggal 16 Agustus sejumlah pemuda-pemudi usia antara 11-17 tahun mengadakan acara api unggun di halaman gedung RI di Pegangsaan 56 Jakarta.



Pendopo Kabupaten Magelang, tempat penyelenggaraan Kongres Kebudayaan pertama setelah Indonesia merdeka. (Sumber: <http://1.bp.blogspot.com>)

Acara hanya berlangsung sebentar saja karena tindakan polisionil pihak Belanda. Para pemuda yang sedang dalam suasana bersuka ria itu berubah menjadi kacau karena mereka dikepung, disiksa dan ditembaki oleh Belanda. Seorang pemuda bernama Soeprapto gugur, dan jenazahnya dimakamkan pada tanggal 17 Agustus 1948. Acara mengheningkan cipta itu merupakan bentuk pernyataan pemerintah RI turut berduka

cita dan menghargai pengorbanan patriot-patriot muda. (Ensiklopedi Jakarta, 2003: hal. 17).

Selanjutnya Mr. Wongsonegoro menambahkan penjelasan mengenai alasan diselenggarakannya kongres meskipun situasi masih dalam keadaan sulit dan pertempuran senjata terjadi di berbagai tempat. Pertama, karena didorong oleh keinginan untuk turut merayakan Hari Ulang Tahun ke-3 proklamasi kemerdekaan RI. Yang kedua karena dengan didasari oleh *"hasrat yang bernyala-nyala untuk menyelenggarakan dan memperkembangkan kebudayaan kita, sebagai sumbangan menyelesaikan perjuangan dan revolusi kita"*. Alasan yang ketiga karena didorong oleh adanya *"krisis kebudayaan"*.

Berdasarkan ketiga alasan itu maka Lembaga Kebudayaan Kedu bertekad untuk menyelenggarakan kongres. Tujuannya adalah untuk

"mengupas, meninjau, memecahkan segala soal, pula mengumpulkan segala anasir yang berguna sebagai pokok yang mengakibatkan lancarnya perjuangan kita. Titik berat, kita letakkan kepada hari kemudian, untuk itu perlu dipakai pangkalan keadaan sekarang yang sebagai di atas diterangkan tidak pula dapat dilepaskan dengan sekaligus dari keadaan yang telah lampau". (Majalah Indonesia No. I-II, 1950: hal. 12).

Sementara itu Mr. Ali Sastroamidjojo selaku Menteri PP dan K dalam pidato sambutannya lebih menekankan pengertian tentang latar belakang terjadinya krisis kebudayaan itu. Menurut Mr. Ali yang menjadi penyebab utama bukan saja karena kita sedang dalam situasi revolusi, melainkan karena krisis kebudayaan itu sudah berlangsung lama dimulai sejak jaman penjajahan. Mr. Ali Sastroamidjojo mengatakan bahwa:

"....tiap-tiap revolusi mempunyai krisis kebudayaan. Pada permulaan ialah rusaknya keseimbangan kebudayaan yang lahir dan kebudayaan yang batin, akan tetapi tetapi selain daripada itu saya kemukakan di sini bahwa krisis itupun disebabkan oleh karena angkatan muda yang berhadapan dengan angkatan tua, yang di dalam riwayat kebudayaan selalu berhadap-hadapan dan menimbulkan pertentangan yang hebat sekali". (Majalah Indonesia No. I-II, 1950: hal. 13).

Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden yang hadir dalam kongres itu dalam menyinggung tentang perlunya memajukan kebudayaan bangsa. Sebagai bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, kita memiliki riwayat kebudayaan yang hebat, harum dan tidak kalah dengan kebudayaan negeri-negeri lain. Selanjutnya beliau mengatakan:

"Pemerintahan sesuatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan Negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya, karena kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada sesuatu bangsa".

Dalam hal memajukan kebudayaan Moh. Hatta mengatakan: *"Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus berusaha merobah dan memajukan, oleh karena kebudayaan sebagai kultur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan bias maju"*. (Majalah Indonesia No. I-II, 1950: hal. 14-15).

Sementara itu menurut Presiden Soekarno KK 1948 di Magelang merupakan kongres pertama kita memperbincangkan masalah kebudayaan nasional. Mengapa demikian? Karena,

"... di dalam sejarah kita yang telah lampau ribuan tahun yang telah lalu, belum pernah mengalami kebudayaan nasional, tidak di jaman Belanda, tidak pula di jaman kebesaran kita sebelum jaman Belanda, tidak di jaman Sriwijaya atau di jaman Majapahit".

Setelah menjadi satu bangsa dan menjadi bangsa merdeka kita sekarang memperbincangkan kebudayaan nasional Indonesia.

Meskipun KK Magelang banyak hambatan yang dihadapi, tetapi tidak menyurutkan hasrat yang bernyala-nyala untuk menyelenggarakan dan memperkembangkan kebudayaan kita. Ketua kongres Wongsoegoro mengatakan bahwa justru pada masa pergolakan dan peralihan itu kebudayaan mengalami krisis yang sangat hebat, sehingga harus ditinjau kembali secara seksama. Krisis tersebut, katanya, merupakan keadaan yang harus segera diatasi, dan untuk itu kebudayaan kita membutuhkan rekonstruksi dan renaissans agar bisa menjadi motor dan energi segala alat perjuangan kita. Dengan demikian kebudayaan sebagai tenaga penggerak segenap usaha perjuangan tentu tidak terbatas pada kesenian saja, seperti yang biasanya ditafsirkan orang. Kongres yang menurutnya merupakan pengisi jiwa dan kekuatan baru bagi bangsa kita untuk meneruskan perjuangan dan penyelesaian revolusi itu, bertujuan meninjau mengupas, dan memecahkan masalah krisis yang ada agar kebudayaan bisa dikembangkan untuk melancarkan perjuangan bangsa. Kongres ini mendapatkan perhatian besar dari segala lapisan masyarakat.

Malam Resepsi yang diselenggarakan di Pendopo Gubernuran dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Ny. Fatmawati, Wakil Presiden Mohamad Hatta dan Ny. Rahmi Hatta, Konsul India, Moh. Junus, Panglima Besar Sudirman dan lain-lain Pembesar Tentara, Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Penerangan Moh. Natsir, Sekretaris Negara Mr. Iksan, Sekretaris Kementerian PP dan K, budayawan, seniman dan pemangku adat serta para pemrasaran. Perhatian terhadap KK pertama amat besar, sehingga persediaan tempat duduk 600 kursi kurang dan banyak peserta dan undangan resepsi terpaksa berdiri. Gedung itu dulunya digunakan sebagai kantor Residen Belanda, dan di tempat inilah Pangeran Diponegoro ketika perang melawan Belanda tertipu lalu ditangkap.

Judul prasaran (*prae-advies*) dan pemrasaran (*prae-adviseur*) yang dibahas dalam kongres antara lain sebagai berikut:

1. Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat, oleh Ki Mangoensarkoro.
2. Kebudayaan dan Hukum Masyarakat, oleh Prof. Mr. Djokosoetono.
3. Kebudayaan dan Pembangunan Ekonomi, oleh Prof. Mr. Soenarja Kolopaking.
4. Kebudayaan dan Pembangunan Kota-kota, oleh Prof. Ir. Poerbodiningrat.
5. Kebudayaan dan Pembangunan Negara, oleh Mr. Koentjoro Poerbopranoto.
6. Kebudayaan dan Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantoro.
7. Kebatinan sebagai Alat dalam Pembangunan Negara, oleh Ki Ageng Soerjomentaram, dr. Radjiman Wedjodiningrat dan Ki Mangoensoedarso.

Selanjutnya, pembicaraan mengenai lembaga kesenian disampaikan Armijn Pane, sedangkan pembicaraan mengenai cabang kesenian yakni seni suara, sastra, seni rupa, dan sandiwara yang masing-masing disampaikan oleh B. Sitompul, Anas Ma'ruf, B. Resobowo, dan Aboe Hanifah.

Acara Kongres secara lengkap disusun sebagai berikut:

Jum'at, tanggal 20 Agustus 1948

Resepsi jam 19.30 di Pendopo Kabupaten Magelang, dengan acara:

- Pembukaan oleh Ketua Umum, Mr. Wongsonegoro.
- Ucapan Selamat Datang oleh Ketua Penyelenggara Kongres, Sdr. Soetarjo.
- Lain-lain sambutan.
- Amanat PYM. Presiden.
- Keterangan: dalam resepsi akan diperdengarkan lagu-lagu Barat (musik) dan gamelan.

Saptu, 21 Agustus 1948

Pembukaan Stelling Kebudayaan di Gedung Sekolah Guru Negeri (Alun-alun Selatan) pada jam 09.00 pagi.

Rapat ke-1 (Panti Perri jam 11.00-12.00), dengan acara:

- Pembukaan oleh Ketua Umum.
- Menetapkan acara dan cara perundingan.
- Membicarakan prae-advies Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat, oleh Ki Mangoensarkoro.
- Debat.
- Kesimpulan.

Malam pertunjukan ke-1 di Panti Perri jam 19.30, dengan acara:

- Lagu Indonesia Raya.
- Pembukaan oleh Ketua Seksi Pertunjukan, Sdr. Soemanto.
- Koor (Himpunan Musik Indonesia Yogyakarta).
- Sandiwara: Bayangan di waktu Fajar, gubahan Sdr. Usmar Ismail (Sumbangan 'Persari' pimpinan 'Bapersi').

Minggu, 22 Agustus 1948

Rapat ke-2 (Panti Perri, jam 09.00-14.00), dengan acara:

- Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Hukum Negara, oleh Prof. Mr. Djokosoetono.
- Debat.
- Kesimpulan.
- Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Pembangunan Ekonomi, oleh Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking.
- Debat.
- Kesimpulan.

Rapat ke-3 (Panti Perri, jam 19.30-23.00), dengan acara:

- Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Pembangunan Kota-kota, oleh: Prof. Ir. Poerbaningrat.
- Debat.
- Kesimpulan.
- Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Pembangunan Negara, oleh Mr. Koentjoro Poerbopranoto.
- Debat.
- Kesimpulan.

Senin, 23 Agustus 1948

Rapat ke-4 (Panti Perri, jam 09.00-14.00), dengan acara:

- Membicarakan prae-advies: Kebudayaan dan Pendidikan, oleh Ki Hadjar Dewantoro.
- Debat.
- Kesimpulan.
- Membicarakan prae-advies: Kebatinan sebagai alat dalam pembangunan Negara, oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat, KKA. Soerjomentaram, dan Ki Mangoensoedarso.
- Debat.
- Kesimpulan.

Rapat ke-5 (Panti Perri, jam 19.30-23.00), dengan acara:

- Membicarakan Bentuk Organisasi penyelenggaraan Kebudayaan pada umumnya.
- Membicarakan soal Pendirian Akademi Kesenian.
- Membicarakan kesimpulan-kesimpulan dari pelbagai prae-advies di hari-hari yang telah lalu.

Selasa, 25 Agustus 1948

Rapat ke-6 (Panti Perri jam 09-14.00), dengan acara:

- Jika perlu meneruskan pembicaraan rapat ke-5.
- Membicarakan berdirinya Lembaga Kebudayaan (Prae-advieseur sdr. Armijn Pane).
- Lain-lain hal yang akan dikemukakan.
- Penutup

Malam Pertunjukan di Pendopo Gubernur mulai jam 19.30, dengan acara:

- Pembukaan oleh Ketua sub-panitia Pertunjukan, sdr. Madenan.
- Musik 'GENTONO' ciptaan Sastrowidatan oleh Ikatan Seni Musik Surakarta, di bawah pimpinan Dr. Padmonegoro.
- Konsert oleh Stafmusik Kepolisian Negara Mertoyudan di bawah pimpinan RAJ. Soedjasmin.
- Tari Minangkabau oleh 'Seniman Muda' Surakarta (pimpinan sdr. Abdulrachman).
- Tari Nusantara, sumbangan P. Surjohamidjojo, pimpinan P. Prabuwinoto.
- Tari Jawa (diperbaharui) sumbangan dari Institut Kebudayaan Indonesia Yogyakarta, pimpinan P. Pakuningrat.
- Pencak, sumbangan dari IPSI (Ikatan Pencak Seluruh Indonesia)
- Tari Bali, tari Legong, tari Baris, diselenggarakan oleh GRISK. Yogyakarta.
- Tari Wireng (Salyapati-Jayengsari) sumbangan P. Surjohamidjojo, Surakarta.

B.1.2 Kesimpulan Kongres

Sebelum acara Penutupan Kongres, dibacakan seluruh kesimpulan kongres. Kutipan kesimpulan adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Negara.

- I. Berhubung *prae-advies* Ki Mangoensarkoro, Prof. Mr. S. Kolopaking dan Mr. K. Purboparanoto, serta perdebatan mengenai itu.
 1. Kemerdekaan nasional adalah syarat mutlak, supaya dapat berkembang kebudayaan nasional Indonesia.
 2. Ditegaskan, bahwa kebudayaan meliputi segenap kehidupan manusia dalam masyarakat (baik lahir maupun batin).
 3. Tidak hanya mengenai kesenian saja. Bahwasanya di Indonesia ada kekacauan kebudayaan, terutama akibat penjajahan dan kapitalisme di zaman yang lalu, beserta peralihan sosial yang cepat sekali di waktu yang akhir-akhir ini.
 4. Bahwasanya perlu dalam pokoknya diperbaharui jiwa manusia Indonesia guna menciptakan manusia, masyarakat dan kebudayaan baru, dengan mewujudkan dan memperkembangkan nilai-nilai kebudayaan (*cultuur-waarden*) yang telah dapat kita 'sublimeer' (resapkan) dalam 'Pancasila' negara kita.
 5. Bahwasanya kemakmuran rakyat adalah satu syarat yang amat penting, supaya kebudayaan dapat berkembang secara merata dan demokratis.
 6. Bahwasanya kebudayaan itu pada pokok-sendinya bersifat 'universeel' dari kebudayaan tiap-tiap bangsa mempunyai coraknya sendiri (Nasional).
 7. Bahwasanya berhubung dengan adanya krisis kebudayaan barat di seluruh dunia, maka berkembangnya kebudayaan Indonesia baru itu akan memberikan bantuan yang berharga guna pembangunan dunia dalam lapangan batin dan kebudayaan.

Kebatinan dalam Hubungan dengan Kebudayaan

- II. Berhubung dengan *prae-advies* Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ki Mangoensoedarso dan Ki Hageng Soerjomentaram serta perdebatan mengenai itu.
 1. Kemajuan batin manusia adalah salah satu keharusan untuk memajukan kebudayaan.
 2. Kebebasan jiwa yang dijalankan dengan tidak mengganggu keselamatan masyarakat, adalah suatu keharusan bagi tiap-tiap orang dalam usahanya menciptakan kebudayaan.
 3. Kemajuan batin manusia hendaknya jangan semata-mata ditujukan kepada kesempurnaan diri, melainkan hendaknya diperuntukkan guna keselamatan masyarakat seluruhnya.
 4. Kemajuan batin tidak bertentangan dengan kemajuan lahir: kemajuan keduanya adalah syarat-syarat mutlak dalam kemajuan kebudayaan dan masyarakat.
 5. Batin manusia yang teguh adalah syarat mutlak dalam perjuangan kemerdekaan negara.

Kebudayaan dan Pendidikan

- III. Kesimpulan mengenai prae-advies Ki Hadjar Dewantoro, serta perdebatan hal itu.
1. Sesuai dengan keputusan Kongres tentang pengertian kebudayaan (Panitia Satu), maka dapat ditentukan bahwa pendidikan termasuk usaha yang terpenting dalam memelihara, memajukan dan menyempurnakan kebudayaan.
 2. Kebudayaan Indonesia adalah nilai-nilai kebudayaan sebagai pancaran jiwa bangsa yang tumbuh antara segenap golongan di seluruh kepulauan Indonesia.
 3. Dalam masa peralihan ini maka kewajiban pendidikan ditujukan kepada masyarakat baru adalah menghilangkan segala bekas-bekas dan sisa-sisa kebudayaan penjajahan dan feodal agar supaya benih kebudayaan baru yang telah tumbuh dapat berkembang dengan suburnya.
 4. Pendidikan kita tujukan langsung kepada kebudayaan dan masyarakat baru dan kita dasarkan pada imbalanced pendidikan lahir dan batin, hingga tercapailah kebudayaan nasional yang harmonis.
 5. Dalam usaha pendidikan nasional paedagogis maupun metodis kita pergunakan pula segala syarat dan pendapat-pendapat yang ada di seluruh dunia dan yang berfaedah bagi kemajuan hidup dan penghidupan manusia.

Kesenian

- IV. Kesimpulan mengenai prae-advies Sdr. Anas Ma'ruf, Sdr. B. Sitompul, Sdr. B. Resobowo, dan Sdr. Abu Hanifah, serta perdebatan hal itu.
5. Kesenian ialah penjelmaan getaran jiwa yang asli.
 1. Kesenian Indonesia baru sewajarnya memancarkan kesenian yang representatief universeel, selaras dengan tujuan pembentukan kebudayaan Nasional.
 2. Memelihara segala hasil seni serta mengembangkan dengan memakai segala anasir yang bernilai dari semua zaman dan tempat.

Pembangunan Kota

- V. Kesimpulan mengenai Prae-advies Purbodiningrat, serta perdebatan mengenai hal itu, belum dapat disimpulkan hingga kongres ditutup dan hanya dijelaskan: 'Soal ini akan disusun dan ditinjau kembali.

Lembaga Kebudayaan

- VI. Ditetujui berdirinya Lembaga Kebudayaan Indonesia. Sebagai Ketua sementara dipilih Mr. Wongsonegoro, Ketua Muda (sementara) Dr. Aboe Hanifah. Rancangan Anggaran Dasar diserahkan kepada Redaksi (Mr. K. Poerbopranoto, Armijn Pane cs.) untuk diselesaikan dalam waktu dua bulan.
- VI. Mengusulkan kepada Pemerintah segera berdirinya suatu Akademi Kesenian (Prae-advies Sdr. Sindoe Soewarno)
- VI. Memajukan kepada Pemerintah untuk mengadakan Kementerian sendiri untuk Kebudayaan. (Majalah Indonesia Nio. I-II, 1950: hal. 14).

Tentang lahirnya rekomendasi No. VIII ini, yakni tentang pembentukan Kementerian Kebudayaan tersendiri di KK tahun 1948, sesungguhnya merupakan

bentuk pengesahan dari hasil perdebatan dari para budayawan, seniman dan cendekiawan, 4,5 bulan setelah Indonesia merdeka. Dalam suatu *Permusyawaratan Kebudayaan*⁴ yang diselenggarakan di Sukabumi pada tanggal 31 Desember 1945, bentuk *Kementerian Kebudayaan* telah menjadi salah satu resolusi. Berita tentang hasil permusyawaratan itu dimuat dalam *Majalah Pantja Raja*, tanggal 15 Januari 1946. Keputusan permusyawaratan itu antara lain menyampaikan usul sebagai berikut:

- a. *Mendesak kepada Pemerintah Pusat supaya secepat mungkin menyelenggarakan pertemuan besar antara wakil-wakil Pemerintah, terutama yang bersangkutan, dengan wakil-wakil perkumpulan kebudayaan, serta ahli-ahli dan peminat lapangan tersebut untuk meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk pemeliharaan dan pembangunan Kebudayaan Nasional;*
- b. *Mengambil tindakan-tindakan yang tepat supaya secepat mungkin cita-cita Nasional dalam lapangan Kebudayaan berwujud, misalnya dengan:*
 - 1) *Mengadakan Kementerian Kebudayaan lepas dari Pendidikan dan Pengajaran;*
 - 2) *Menyokong dan menganjurkan pendidikan kebudayaan dengan dasar kemerdekaan (Pax Benedicto/Penyunting, 1999: hal. 283).*

Usulan tentang pembentukan Kementerian Kebudayaan, lepas dari Pendidikan dan Pengajaran mencerminkan konsep pemikiran para pendiri bangsa tentang pentingnya kebudayaan di dalam sistem pemerintahan. Kebudayaan sebagai salah satu unsur perekat persatuan kebangsaan dapat menjalankan misinya apabila diwadahi dalam lembaga yang mandiri. Oleh karena itu sebelum perdebatan tentang Organisasi Kebudayaan dimulai, kepada Dr. Abu Hanifah diminta untuk membentangkan isi resolusi Sukabumi yang telah disepakati itu.

Agak berbeda dengan yang dimuat dalam majalah *Pantja Raja*, menurut Abu Hanifah, Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi melorkan 2 resolusi. Resolusi *pertama*, mengusulkan agar Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dibagi menjadi dua, yaitu: (1) *Kementerian Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan*; dan (2) *Kementerian Pendidikan dan Pengajaran*. Resolusi *kedua*, apabila usul pertama tidak dikabulkan maka diusulkan agar “*Kementerian PP dan K diubah nama dan susunannya, mengenai tugas masing-masing bagian, dengan diberi nama: **Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Pengajaran**, dengan mengadakan satu Bagian sendiri untuk Bagian Kebudayaan*”.

Sehubungan dengan penjelasan itu pimpinan sidang lalu mempersilakan para peserta untuk memberikan tanggapan. Mr. Soenarjo menguatkan, agar jangan hanya namanya saja yang diubah, tetapi juga dalam bagian-bagian kementerian tersebut. Setelah diadakan perdebatan, kemudian diputuskan oleh rapat untuk mengambil alternatif kedua yakni seperti yang telah diputuskan dalam musyawarah di Sukabumi, dan kepada Dr. Abu Hanifah diminta untuk menyusun resolusi kepada Presiden mengenai perubahan sifat Kementerian PP dan K. Setelah hasil sidang Organisasi dibahas dalam sidang Perumusan hasil kongres disepakati seperti yang tercantum dalam kesimpulan No. VIII. Resolusi ini rumusnya mirip dengan yang tercantum dalam buku *Kronik Revolusi I*, yakni: “*Memajukan kepada Pemerintah untuk mengadakan Kementerian sendiri untuk Kebudayaan*”.

4 Ada yang menyebutnya kegiatan ini sebagai Konferensi Kebudayaan.

Penyelenggaraan KK pertama (1948) sesudah lahir bangsa dan negara Indonesia tidak hanya dinilai sebagai upaya menemukan konsep, kebijakan dan strategi membangun kebudayaannya tetapi juga kebangsaannya. Kongres itu mencerminkan keperdulian para pemimpin bangsa dalam memajukan kebudayaan bangsa tetapi sekaligus juga menunjukkan pandangan mereka tentang bagaimana membangun bangsa berdasarkan kebudayaan. Seperti ditulis oleh Jennifer Lindsay, sebagai bangsa baru, para pemimpin turun tangan memikirkan, berpartisipasi dan bereksperimen serta berdebat mengenai apa yang meng-hubungkan dan memisahkan mereka serta apa yang membuat mereka "orang Indonesia". KK 1948 menunjukkan

"Republik menempatkan kebudayaan di dalam membangun bangsa. Pada masa kacau 1948, ketika Republik dalam keadaan kisruh – di mana wilayah kekuasaannya dikebiri hanya sebatas Aceh, sebagian Sumatra dan Jawa Tengah, dengan ketegangan-ketegangan internal memanas dan tak lama kemudian meletus pemberontakan komunis bulan September di Madiun – pemerintah menggelar Kongres Kebudayaan". (Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem, Ahli Waris Budaya Indonesia: Menjadi Indonesia 1950-1960, Jakarta, 2011, hal. 7)

Tentang besarnya perhatian para pemimpin, seperti disebut di bagian depan, pada KK 1948 telah dihadiri para pucuk pimpinan negara: Presiden Soekarno (menyampaikan amanat) dan Ny. Fatmawati, Wakil Presiden Mohamad Hatta (menyampaikan pendapat) dan Ny. Rahmi Hatta, Konsul India, Moh. Junus, Panglima Besar Sudirman dan lain-lain Pembesar Tentara, Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Penerangan Moh. Natsir, Sekretaris Negara Mr. Iksan. Sebagai pemakalah tampil para tokoh bangsa seperti: Ki Hadjar Dewantara, Ki Mangoensarkoro, Prof. Mr. S. Kolopaking, Mr. K. Purboparanoto, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ki Mangoensoedarso, Ki Hageng Soerjomentaram, Mr. Wongsonegoro, dll.

Empat bulan setelah kongres berlangsung, pada 19 Desember 1948, pasukan Belanda melakukan penyerangan ke Jogjakarta dan malam menjelang tanggal 20 Desember 1948 para gerilyawan melaksanakan siasat "bumi hangus" membakar semua gedung Kantor Pemerintah, markas-markas, tangsi Militer, sekolah-sekolah, dan gedung-gedung yang penting lainnya kecuali tempat-tempat ibadah. Ketika tentara Belanda benar-benar masuk ke Magelang, keadaan kota sepi sementara pasukan pejuang mundur ke luar kota.

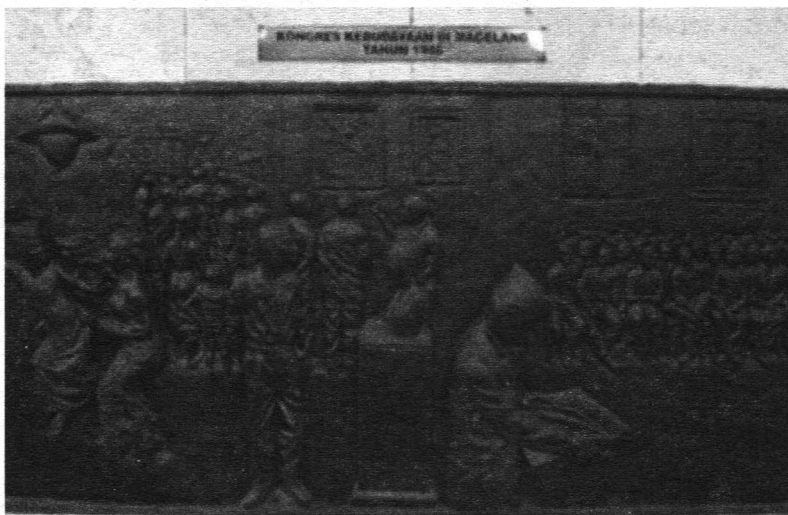
Meskipun peristiwa kongres kebudayaan termasuk KK 1948 jarang disebut di dalam buku sejarah, tetapi tidak demikian dengan sikap yang diambil oleh para pendiri Museum Perjuangan di Yogyakarta. Museum yang didirikan di sebagian halaman Ndalem Brontokusuman milik Kraton Yogyakarta itu atas izin Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu menjadi Ketua Panitia. Museum ini diresmikan pada 17 November 1961 memamerkan patung para pahlawan nasi-onal, berbagai artefak bersejarah milik para tokoh, miniatur, perlengkapan perang, dll.

Selain disajikan berbagai koleksi tersebut, pada dinding Museum yang berbentuk silinder itu dipahat relief yang menceritakan peristiwa sejarah sejak dari masa lahirnya Budi Oetomo sampai dengan masa bersatunya lagi pemerintahan RI yaitu dengan

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat tahun 1950. Seluruhnya ada 37 peristiwa yang dinilai memiliki nilai sejarah yang penting. Salah satu dari 37 peristiwa itu adalah peristiwa budaya, yaitu acara KK 1948 (No. urut 29). Peristiwa bersejarah itu diabadikan dalam bentuk satu panel yang terdiri atas dua adegan (bingkai) relief. Bingkai pertama menggambarkan acara pameran seni lukis dan patung serta pertunjukan tari (tari Bali) sebagai bagian dari KK 1948. Bingkai kedua menggambarkan pre-adviser (pemakalah) sedang menyajikan makalah.



Tampak dinding Museum Perjuangan Yogyakarta yang berbentuk silinder dan di bagian luar dipahat relief sebanyak 37 peristiwa bersejarah. (Foto: Siswanto, 2013)



Salah satu relief yang menggambarkan peristiwa Kongres Kebudayaan 1948. Terdiri atas 2 adegan, sebelah kiri menggambarkan acara kesenian dan pengunjung sedang menikmati acara pementasan tari Bali, pameran lukisan dan patung. Sebelah kanan menggambarkan penyajian makalah di depan peserta. (Foto: Siswanto, 2013)

B.1.3 Pembentukan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)

Untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang KK pertama di Magelang ada baiknya juga disampaikan uraian langkah-langkah yang dilakukan oleh para budayawan dan seniman setelah kongres itu selesai. Langkah itu merupakan bagian dari kesepa-katankongres dalam arti sebagai bentuk tindak lanjut yang nyata dari keputusan kongres. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah pembentukan kelembagaan kebudayaan yang menjadi wadah kegiatan kebudayaan dan penyelenggaraan Konferensi Kebudayaan.

Sebagaimana telah disinggung di bagian depan, dalam kongres dibahas tentang perlunya sebuah lembaga kebudayaan, yang secara independen mengelola upaya memajukan kebudayaan bangsa. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya peserta menyepakati untuk dibentuk Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Sebagai Ketua sementara ditunjuk Mr. Wongsonegoro dan sebagai Wakil Ketua dari angkatan muda ditunjuk Dr. Abu Hanifah. Tugas ketua sementara adalah menyelenggarakan rapat khusus untuk menyelesaikan naskah Anggaran Dasar yang belum tuntas dibahas di dalam kongres dan menjaring tanggapan dan masukan dari peserta serta melengkapi nama-nama pengurus LKI.

Dari hasil pertemuan itu dicapai hasil susunan pengurus definitif LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA yaitu sebagai Ketua: Dr. Bahder Djohan, dan Penulis Umum: Suratno Sastroamidjojo. Dalam penjelasannya Bahder Djohan selaku ketua LKI definitif menyatakan bahwa peresmian berdirinya organisasi LKI itu pada tanggal 1 Januari 1949 di Yogyakarta. Tetapi karena situasi keamanan kota Yogyakarta sebagai Ibukota Republik pada saat itu sedang dalam pendudukan Belanda, maka rencana itu gagal. Akhirnya LKI baru dapat berdiri secara resmi setahun kemudian, yakni pada tanggal 9 Maret 1950 di Jakarta.

Adapun mengenai hasil penyempurnaan Anggaran Dasar Lembaga Kebudayaan Indonesia adalah sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA

Bab I. NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1.

Badan ini bernama "LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA" dan berkedudukan di Jakarta.

Bab II. SIFAT

Pasal 3.

Tujuan Lembaga ialah:

- a. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan yang sudah meresap dalam Pancasila, sehingga terbentuk jiwa budaya Indonesia.*
- b. Menyatakan dan menggerakkan jiwa tersebut sehingga dapat berwujud, tumbuh dan*

berkembang kebudayaan Indonesia, sebagai pancaran jiwa bangsa Indonesia yang hidup dan tumbuh antara segenap golongan di seluruh kepulauan Indonesia.

Bab IV. USAHA

Pasal 4.

Lembaga berusaha mencapai tujuan itu di antaranya dengan jalan:

- Menyelenggarakan museum-museum yang menyimpan hasil-hasil kebudayaan daerah-daerah Indonesia, dan kebudayaan-kebudayaan luar negeri, sehingga menjadi bahan menghidupkan jiwa budaya Indonesia.
- Menyelenggarakan steling-steling (maksudnya pameran) dan pertunjukan-pertunjukan baik yang tetap maupun untuk seketika – tentang buah hasil kebudayaan Indonesia.
- Memelihara perpustakaan untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia, dengan orientasi seluas-luasnya.
- Mengadakan penyelidikan dan menggiatkan (membantu) usaha penyelidikan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kesenian.
- Membantu usaha Pemerintah (badan-badan resmi) dan usaha partikelir dalam mewujudkan, menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan Indo-nesia.
- Mengadakan sayembara dan menyediakan hadiah-hadiah tahunan atau pun hadiah kehormatan untuk menggiatkan dan menghargai usaha yang terbaik dalam salah satu lapangan kebudayaan.
- Mencari kerja sama dengan usaha semacam itu di luar negeri, teristimewa di negeri-negeri yang bersamaan dasar kebudayaannya.
- Menyelenggarakan fonds kebudayaan dan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi tumbuhnya kebudayaan Indonesia.
- Mengadakan kongres kebudayaan (Majalah Indonesia No. I-II, 1950: hal. 124).

Dengan lahirnya Lembaga Kebudayaan Indonesia, maka tugas Pengurus yang segera dilakukan adalah menyelenggarakan **Konferensi Kebudayaan Indonesia** dan melakukan persiapan penyelenggaraan kongres kebudayaan berikutnya. Kegiatan Konferensi Kebudayaan Indonesia yang merupakan lanjutan Kongres Magelang diselenggarakan pada tanggal 5-7 Agustus 1950, di Gedung Pertemuan Umum Kotapraja Jakarta Raya. Konferensi ini memilih tema: *Kebudayaan Nasional dan Hubungannya dengan Kebudayaan Bangsa-bangsa lain*. Bagi sebuah bangsa yang baru merdeka tema itu dipandang penting untuk mencari kesepakatan tentang konsep, kebijakan dan strategi dalam rangka menghadapi hubungan Pemerintah RI dengan Negara-negara sahabat yang pada hakikatnya merupakan hubungan antarbudaya bangsa. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penyelenggaraan konferensi tersebut adalah sebagai berikut.

**Kesimpulan-kesimpulan
KONFERENSI KEBUDAYAAN INDONESIA**

Atas usaha dan pimpinan LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA

Dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 5, 6 dan 7 Agustus 1950;

- Merundingkan acara Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan luar negeri bersifat simposium;
- Mendengarkan preadvis sdr.-sdr.: Ki Hadjar Dewantara, Mr. St. Takdir Alisjahbana, Trisno Sumardjo dan Prof. Soenaria Sanyatavijaya;
- Memperhatikan kesimpulan-kesimpulan pada Kongres Kebudayaan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 20-25 Agustus 1948 di Magelang;
- Mendengar pembicaraan-pembicaraan 19 orang pendebat, di antaranya 5 orang ditunjuk lebih dahulu.

MELAHIRKAN PENDAPAT:

- bahwa pada umumnya tiap-tiap kebudayaan sesuatu bangsa itu merupakan suatu kesatuan yang organis;
- bahwa teristimewa semenjak bangsa Indonesia telah bernegara yang merdeka dan berdaulat, maka masyarakat Indonesia mencari isi dan bentuk kebudayaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan zaman baru;
- bahwa terhadap perhubungan dengan kebudayaan luar negeri dalam hal menyempurnakan perkembangan kebudayaan Indonesia, bangsa Indonesia membuka diri secara aktif dan kritis terhadap pengaruh kebudayaan asing itu;
- bahwa persetujuan KMB mengenai kebudayaan masih dapat dipergunakan asal dalam pelaksanaannya pihak Indonesia bersikap kuat dan sesuai dengan kedaulatannya.

MENGANJURKAN:

Kepada Masyarakat dan Pemerintah

Ke luar:

1. mengadakan persetujuan-persetujuan kebudayaan dengan Negara- negara lain;
2. menempatkan atase-atase kebudayaan di Negara-negara lain;
3. mengirimkan ke luar negeri dan melakukan dengan luar negeri pertukaran mahaguru, mahasiswa, seniman, sarjana dan calon ahli;

Ke dalam:

1. mengadakan perubahan susunan komisi-bersama kebudayaan;
2. membantu dengan nyata tenaga-tenaga kreatif untuk berkembang;
3. menyempurnakan perlengkapan-perengkapan kebudayaan berupa konservatoria, laboratoria, musea, akademi-akademi kesenian, perpustakaan-perpustakaan dan lembaga-lembaga ilmu;

Kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia, supaya mengusahakan terlaksananya apa yang disebut dalam Pasal A.

Jakarta, 7 Agustus 1950.

Kesimpulan-kesimpulan di atas diambil oleh Panitia Kesimpulan Konferensi Kebudayaan Indonesia yang terdiri atas: Ny. Dr. Sutarman, Anas Ma'ruf, Mr. K. Probopranoto, R. Katamsi, Mr. M. Yamin, Prof. Sunaria Sanyatavijaya, G. Siagian, T. Sumardjo, Mr. St. Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, D. Suradji dan Dr. Bahder Djohan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan konferensi itu, tiga buah surat kabar yang terbit pada saat itu masing-masing memberikan komentarnya. Tiga surat kabar itu adalah surat kabar *De Locomotief*, Semarang tanggal 12 Agustus 1950, *Sin Po*, Jakarta tanggal 19 Agustus 1950 dan *Pemandangan*, Jakarta, 12 Agustus 1950. Harian *De Locomotief* Semarang menyebut konferensi tersebut sebagai *Kongres Kebudayaan*, dan menyoroti kesimpulan konferensi yang dipandang tidak tepat, yakni kesimpulan yang menyatakan bahwa pada umumnya tiap-tiap kebudayaan sesuatu bangsa itu merupakan suatu kesatuan yang organis. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa kini bangsa Indonesia telah bebas merdeka dan masyarakat mencari bentuk yang sesuai dengan keinginan dan syarat-syarat bagi masyarakat modern. Sementara itu *Sin Po* di samping menyoroti masalah perlunya kerja sama kebudayaan di samping mengemukakan dampak negative yang ditimbulkan. Di samping itu *Sin Po* menyinggung masalah Atase Kebudayaan, bahwa ternyata bersama-sama Duta Besar RRT (Republik Rakyat Tjina) Mr. Wang Yen Shu, ikut pula Atase Kebudayaan RRT untuk Indonesia Mr. Liang Sang Yuan. Sedangkan surat kabar *Pemandangan* menyoroti tentang kehadiran Mahaguru Asing di Indonesia agar mendapatkan perhatian secara serius. Harian ini mengkhawatirkan akan masuknya Mahaguru yang berjiwa kolonial, terutama untuk ilmu bidang hukum, sosiologi, ekonomi dan politik, dan oleh sebab itu menyarankan agar masuk melalui seleksi pemilihan yang ketat.

B.2 Kongres Kebudayaan 1951

B.2.1 Persiapan dan Pelaksanaan

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di kota Bandung pada tanggal 6 sampai dengan 11 Oktober 1951, ditetapkan sebagai Kongres Kebudayaan II. Kongres ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Dibandingkan dengan kongres Magelang, kongres ini lebih mengkhususkan diri pada usaha pemecahan berbagai bidang kesenian, tidak pada kebudayaan secara umum. Ada 4 masalah yang dijadikan bahan pembicaraan mengenai: (1) hak pengarang atau hak cipta; (2) perkembangan kesusastraan; (3) kritik seni, dan; (4) mengenai sensor film. Di samping itu juga secara khusus dibahas tentang organisasi kebudayaan.

Acara KK Indonesia II adalah sebagai berikut:

Saptu, 6 Oktober 1951

- Jam 12.00 siang sampai sore PENERIMAAN TAMU-TAMU oleh Panitia Kongres Kebudayaan.
- Jam 19.30 (malam) Resepsi di gedung Concordia, Jl. Pos Raya Timur Bandung, dengan acara:
 - Lagu Indonesia Raya.
 - Ucapan selamat datang oleh Ketua Panitia, Dr. Djundjunan.
 - Pembukaan oleh Ketua Lembaga Kebudayaan Indonesia, Dr. Bahder Djohan
 - Sambutan Menteri PP & K.
 - Amanat PYM. Presiden.
 - Istirahat.
 - Hidangan kesenian: Angklung Modern dan Musik Gentono.

Minggu, 7 Oktober 1951.

- Jam 09.00 pagi RAPAT PLENO I, di Jl. Naripan No. 3 Bandung, dengan acara:
 - Pembukaan oleh Ketua LKI.
 - Usul Agenda Kongres oleh Pengurus LKI.
 - Usul prosedur Kongres oleh Ketua Panitia, Dr. Djundjunan.
 - Istirahat.
 - Pembagian Seksi-seksi.
- Jam 17.00 (sore) PEMBUKAAN SETELING (maksudnya: pameran) SASTRA di Jl. Naripan No. 1 Bandung.
- Jam 20.00-23.00 (malam) RAPAT SEKSI-SEKSI di Jl. Naripan No. 3 Bandung.

Senin, 8 Oktober 1951

- Jam 09.00-12.00 (siang) RAPAT SEKSI-SEKSI di Jl. Naripan No. 3 Bandung.
- Istirahat.
- Jam 15.00-17.00 (sore) RAPAT SEKSI-SEKSI di Jl. Naripan No. 3 Bandung.
- Jam 20.00-23.00 (malam) MALAM SENI SUARA DAN DEKLAMASI di Jl. Naripan No. 3 Bandung. Musik Angklung, Gentono dengan irama musik Barat.

Selasa, 9 Oktober 1951

- Jam 09.00-12.00 (siang) PENINJAUAN di:
 - Perguruan Tinggi Teknik.
 - Museum Geologi.
 - Dll.
- Jam 15.00-17.00 (sore) RAPAT SEKSI-SEKSI di Jl. Naripan No. 3 Bandung.
- Jam 20.00-23.00 (malam) RAPAT PENGURUS LKI DENGAN KETUA-KETUA DAN RAPORTEUR SEKSI-SEKSI (untuk menerima, mengkoordinasikan dan memilih usul-usul Seksi yang akan diajukan dalam Rapat Pleno) di Jl. Naripan No. 3 Bandung.

Rabu, 10 Oktober 1951

- Jam 09.00-12.00 (siang) RAPAT PLENO II, di Jl. Naripan No. 3 Bandung, membicarakan usul-usul dari seksi-seksi.
- Istirahat.
- Jam 15.00-17.00 (sore) Melanjutkan Rapat Pleno II di Jl. Naripan No. 3 Bandung.

- Jam 20.00-22.00 (malam) Malam pertunjukan Seni Drama oleh Sandiwara Ratu Asia di gedung Concordia, Jl. Pos Raya Timur, Bandung.

Kamis, 11 Oktober 1951

- Jam 09.00 (pagi) RAPAT PLENO II di Jl. Naripan No. 3 Bandung, membacakan resolusi, kesimpulan dan keputusan.
- Jam 20.00 (malam) MALAM PERPISAHAN di gedung Jl. Naripan No. 3 Bandung.

Meskipun dalam acara disebutkan akan hadir Paduka Yang Mulia Presiden, tetapi ternyata tidak hadir. Dalam acara pembukaan kongres, telah memberikan sambutan Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K dan Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Presiden RI. Dalam sambutannya Dr. Bahder Djohan melaporkan tentang proses pendirian Lembaga Kebudayaan Indonesia dan program-program untuk mendorong dan menggiatkan segala usaha kebudayaan. Di samping LKI telah menyelenggarakan Konferensi Kebudayaan dengan tema Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Asing, juga telah mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan di Bandung. Sementara itu Mr. Wongsonegoro selaku Menteri PP dan K mengharapkan agar kongres ini dapat lebih meningkat dibandingkan dengan KK 1948 yang seolah-olah lebih memandang kebudayaan dari segi teori semata. Kongres ini jangan hanya menitikberatkan pada kebudayaan kongkrit tetapi juga jangan melupakan inti hakikatnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Moh. Hatta menekankan bahwa kewajiban kita di samping melaksanakan perjuangan memertahankan kemerdekaan juga membangun kebudayaan dengan jiwa baru. Di samping itu juga menjelaskan tentang hubungan antara ekonomi dan kebudayaan. Bung Hatta tidak setuju dengan pandangan bahwa kebudayaan tidak akan bangun tidak akan maju, apabila ekonomi rakyat tidak maju. (Majalah Indonesia No. 1-2-3, 1952: hal. 21). Ekonomi dan kebudayaan selalu berjalan bersama. Ekonomi dan kebudayaan dapat berkembang dan subur, apabila memupuk timbal-balik, ganti-berganti mempengaruhi. Ada kalanya ekonomi meletakkan coraknya pada kebudayaan. Tetapi sebaliknya sering pula terjadi bahwa ciptaan manusia, yang dihidupkan oleh perkembangan kebudayaan, membuka pikiran ke jalan baru untuk memperbaiki dasar produksi. Di samping itu Bung Hatta pun menegaskan bahwa dalam *"melaksanakan pembangunan, minat kita tidak boleh hanya ditujukan pada satu arah saja. Kita harus berkembang ke segala arah"*. (Majalah Indonesia No. 1-2-3, 1952: hal. 22).

Khusus mengenai kebudayaan Indonesia, Hatta menjelaskan bahwa dalam kenyataan kita sebagai bangsa memiliki berbagai corak kebudayaan. Usaha memajukan kebudayaan agar tidak diarahkan untuk memaksakan menjadi satu, tetapi membangun keselarasan di antara bermacam-macam corak kebudayaan itu. Dengan demikian tercapailah *'bhinneka tunggal ika'* yang diistilahkan sebagai *'persatuan dalam puspa ragam'*. Selanjutnya menurut Hatta, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat universal akan semakin besar pengaruhnya terhadap kebudayaan kita, yakni akan memperbesar persamaan dan menciutnya perbedaan di antara corak-corak kebudayaan yang ada. Namun, ia tetap yakin bahwa persatuan sama sekali tidak akan tercapai, berbagai berbagai perbedaan akan tetap tinggal sebagai tanda hidup

dalam masyarakat Indonesia yang begitu luas. Konsep inilah yang seharusnya menjadi acuan dan dijadikan bahan kampanye kepada masyarakat dalam rangka membangun kebudayaan sekaligus mem-bangun persatuan bangsa.

B.2.2 Rumusan Hasil Kongres

Keputusan Kongres Kebudayaan Indonesia 1951 secara lengkap adalah sebagai berikut:

**PUTUSAN-PUTUSAN KONGRES KEBUDAYAAN
INDONESIA II DI BANDUNG**
(dilangsunngkan dari 6 s/d 11 Oktober '51)

KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA memutuskan:

I. Mengenai HAK PENGARANG

1. Istilah Hak Pengarang harus diganti menjadi Hak Cipta.
2. Perlu diadakan dengan segera:
 - a. Perundang-undangan Hak Cipta Nasional yang sempurna.
 - b. Peninjauan kembali sikap Indonesia terhadap Konvensi Bern.
3. Perlu didirikan suatu organisasi antara para pencipta yang berupa badan hukum yang diakui sah, untuk menyelenggarakan segala hubungan dan kepentingan pencipta mengenai ciptaannya.

II. Mengenai PERKEMBANGAN KESUSASTERAAN

Menganjurkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia supaya:

1. bekerja sama dengan badan-badan yang telah ada (seumpama: Balai Pustaka) untuk mengadakan Balai Penterjemah yang mengusahakan:
 - terjemahan dari bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah, di antaranya yang mengenai filsafat dan keaga-maan.
 - pendidikan menterjemah.
 - mengadakan hadiah yang tertentu setiap tahun bagi ciptaannya yang terbaik dari sastrawan dan pengarang Indo-nesia.
 - mengumpulkan dan menerbitkan cerita-cerita lama dan lagu-lagu yang hidup di desa-desa, di antaranya juga lagu-lagu yang tumbuh semasa revolusi.
 - berusaha menyuburkan kesusasteraan dan bahasa daerah di samping kesusasteraan dan bahasa Indonesia.
 - bekerja sama dengan badan-badan kebudayaan di luar negeri, di antaranya dengan P.E.N. Club International, untuk mengadakan pertukaran visitorship para sasterawan.
 - mengadakan dana untuk membantu perkembangan karang-mengarang sandiwara dan film.
- a. membentuk suatu badan penerbit yang khusus menerbitkan buku-buku kebudayaan,

sehingga buku-buku yang tidak akan menghasilkan keuntungan *commercieel* tetapi mempunyai nilai kebudayaan dapat juga diterbitkan.

- b. mengusulkan kepada yang berwajib supaya Balai Pustaka dijadikan badan yang otonom, langsung di bawah pimpinan Menteri P.P. dan K. dan dapat bekerja sama dengan L.K.I.
 - mengusahakan berdirinya BALAI SASTERA, baik di Pusat maupun di Daerah-daerah.
 - mengusulkan kepada yang berwajib supaya Balai Bahasa dan Pemerintah dengan segera berangsur-angsur menyiarkan hasil-hasil pekerjaannya dan menganjurkan pemakaian bahasa Indonesia seluas-luasnya.

III. Mengenai KRITIK SENI

Seni adalah hasil dari getaran jiwa dan keselarasan perasaan serta pikiran yang mewujudkan sesuatu ciptaan yang indah dan luhur.

1. Kritik seni harus didasarkan atas:
 - a. pengetahuan dalam arti seni.
 - a. pengertian dari tiap-tiap seni yang akan dikritik.
2. Tujuan kritik seni ialah:
 - a. guna membangkitkan minat para seniman untuk memperbaiki dan mempertinggi mutu dari seni yang diciptakan.
 - b. guna memperkembang dan mempertinggi nilai membanding dari masyarakat terhadap hasil seni.

Untuk melaksanakan tercapainya tujuan ini perlu diadakan perluasan kesempatan untuk mempertinggi nilai membanding dari masyarakat terhadap seni, misalnya dengan mengadakan:

- a. akademi seni.
- b. mata pelajaran seni dan estetika pada universitas.
- c. museum hasil kesenian.

Soal-soal yang muncul dalam pertikaian antara lain ialah:

- (1) Tentang Pancasila sebagai dasar atau pedoman seni tidak terdapat persesuaian faham.
- (2) Pada dasar seni ada perbedaan faham antara:
 - a. seni berdasar hukum yang ada.
 - b. seni untuk masyarakat, dan
 - c. seni bebas.
- (3) Sudah atau belum adanya seni Indonesia pada masa ini.

IV. Mengenai SENSOR FILM

- A.
 - I. Menyetujui dengan suara bulat adanya Sensor Film.
 - II. Mengajukan agar Pemerintah segera memperbaharui film-ordonansi, film-

verordening, film-besluit 1940 Pedoman Panitia Pengawasan Film dengan memperhatikan anjuran-anjuran sebagai berikut:

Yang bersifat preventif dan negatif:

1. Supaya memperkeras dan memperluas sensor film.
2. Supaya dalam melakukan sensor masalah itu dipandang dari berbagai sudut.
3. Supaya jumlah anggota panitia sensor diperluas.
4. Supaya juga atas poster-poster film dan gambar-gambar reklame untuk film yang akan dipertunjukkan diadakan sensor.
5. Supaya sensor terutama terhadap film-film yang menggambarkan kehidupan masyarakat Timur lebih diperluas.
6. Supaya menolak film-film yang mengandung propaganda perang dan juga yang bersifat merendahkan bangsa atau golongan.
7. Mengajukan kepada Jawatan Kepolisian supaya pengawasan atas kombinasi film pokok (hoofdfilm) film pendahuluan (voorfilm) dan film reklame trailers, lebih diperkeras.
8. Supaya pembatasan umur yang telah ditentukan ditinjau kembali.
9. Mengadakan pemeriksaan kembali film-film yang kini beredar dan belum diperiksa oleh sensor sekarang.

B.

1. Supaya Pemerintah memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada usaha film nasional untuk berkembang dengan bantuan moril dan materiil.
2. Supaya mengadakan rencana pemasukan pilem-pilem dari luar negeri (invoerquota).
3. Supaya Pemerintah mengadakan gedung-gedung bioskop sendiri untuk mempertunjukkan film-film yang tinggi mutunya, yang oleh Pemerintah partikelir tidak dipertunjukkan karena tidak menguntungkan baginya.
4. Supaya Pemerintah mengadakan usaha-usaha untuk mendidik kader dengan mempergunakan perusahaan film negara.
5. Supaya Pemerintah berusaha membikin film-film yang tinggi mutunya, demikian juga film-film untuk anak-anak dan untuk sekolah-sekolah, dengan catatan jangan sampai usaha Pemerintah ini merupakan saingan bagi usaha partikelir.
6. Supaya kepada guru-guru dan pendidikan-pendidikan diberikan tugas memberikan penerangan film.
7. Supaya teks dan dialog-dialog bahasan Indonesia dalam film diawasi dan diperbaiki.
8. Mengatur supaya bioskop-bioskop di daerah-daerah selalu ada pilemnya.
9. Supaya Badan Penasihat yang diadakan oleh Kepala Daerah tentang pilem dipertinggi mutunya.
10. Mengajukan kepada pemerintah supaya segera mengadakan hubungan yang nyata dengan UNESCO bagian Commission on Technical Needs of the Press, Film, and Radio untuk memperoleh perbaikan-perbaikan seperti tersebut dalam sub B.

C. Mengusulkan kepada Pemerintah untuk mendirikan suatu Kantor Urusan Film dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, terdiri dari dua bagian, yaitu:

Badan Sensor.

Badan yang terdiri dari Wakil-wakil Kementerian-kementerian yang ada hubungannya dengan film dan wakil-wakil organisasi kebudayaan, serta orang-orang yang dipandang ahli, dengan tugas memikirkan dan membantu pelaksanaan yang disebut dalam Pasal B.

- D. Mengajukan kepada khalayak ramai supaya menginsyafi bahaya yang dapat diakibatkan oleh film dan karena itu diserukan supaya turut membantu segala usaha Pemerintah untuk menghindarkan bahaya-bahaya tersebut.

V. Mengenai ORGANISASI KEBUDAYAAN

KONGRES memberikan tugas kepada PANITIA KESIMPULAN*) supaya dengan melalui Pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Kongres selesai, memajukan kesimpulan-kesimpulan kepada semua organisasi Kebudayaan/Kesenian, baik yang turut serta dalam Kongres di Bandung, maupun yang tidak sempat datang untuk dipertimbangkan.

Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima kesimpulan-kesimpulan itu, organisasi tersebut diminta supaya menyatakan pendapatnya terhadap kesimpulan-kesimpulan itu. Kemudian 6 (enam) bulan setelah Kongres selesai, yakni pada tanggal 11 Oktober 1951, Pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia diminta mengusahakan KONFERENSI guna membicarakan dan mengambil putusan tentang kesimpulan-kesimpulan itu, dan kemudian membentuk pengurus baru, (dalam konferensi itu hendaknya diundang semua organisasi Kebudayaan/ Kesenian ini di seluruh Indonesia, baik yang menyetujuinya).

Jakarta, Oktober 1951

Pengurus LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA,

KETUA, PENULIS UMUM

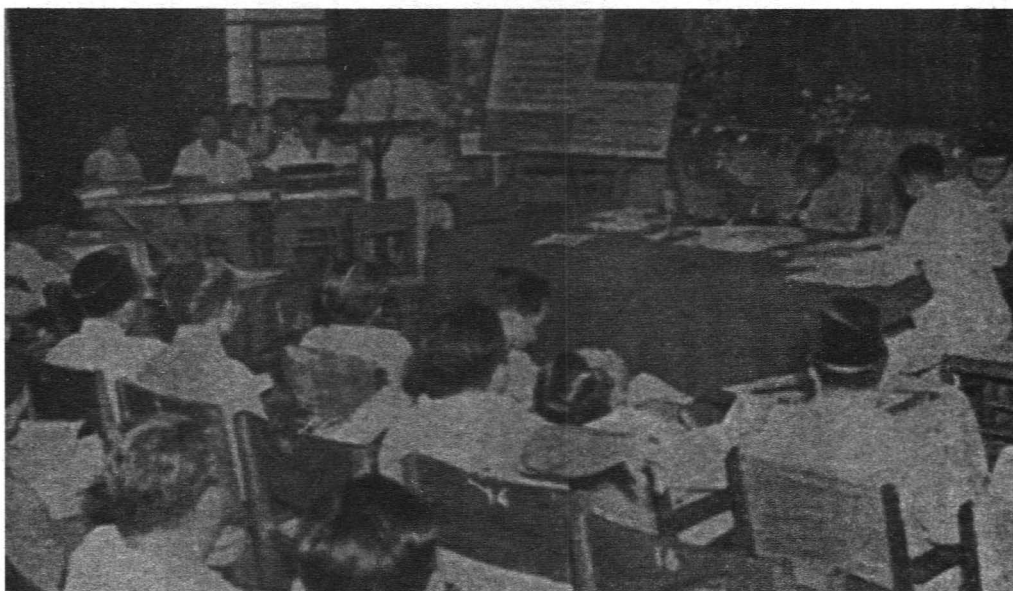
(Dr. Bahder Djohan) (Soeratno Sastroamidjojo)

*) Panitia ini terdiri dari:

1. Dr. Moerdowo (Solo)
2. Moh. Said (Jakarta)
3. M. Nasution (Jakarta)
4. Mr. Moh. Sjah (Jakarta)
5. Ki Mangoensarkoro (Jogyakarta)
6. Mr. Koentjoro Poerbopranoto (Jakarta)
7. Hamka (Jakarta)
8. Dr. Bahder Djohan (Jakarta)
9. Suratno Sastroamidjojo (Jakarta)



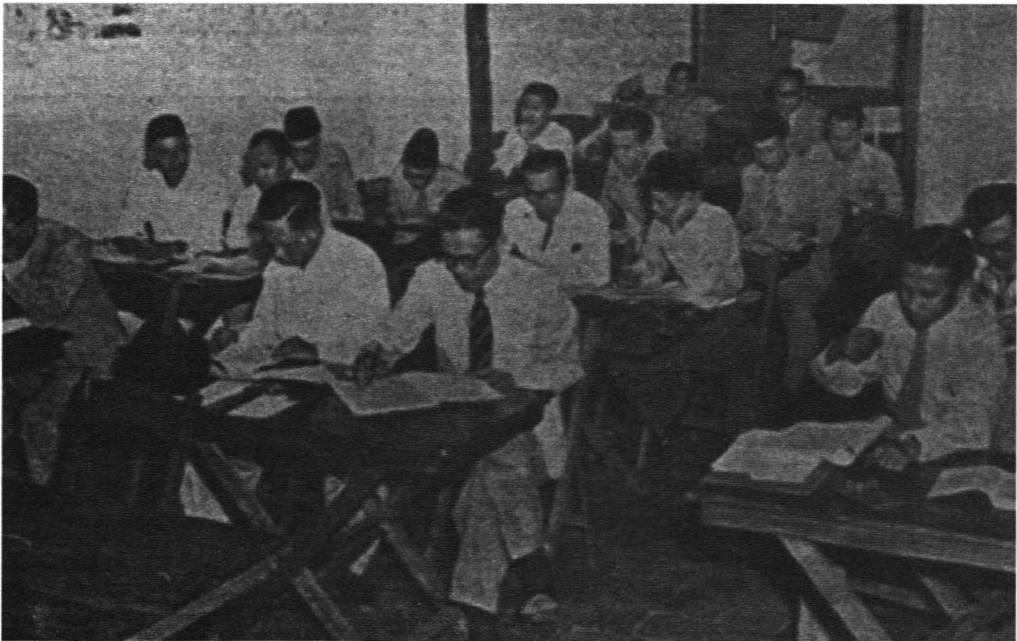
Wakil Presiden RI. Bung Hatta sedang menyampaikan sambutan pada pembukaan Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung (Foto: Majalah Indonesia tahun 1951)



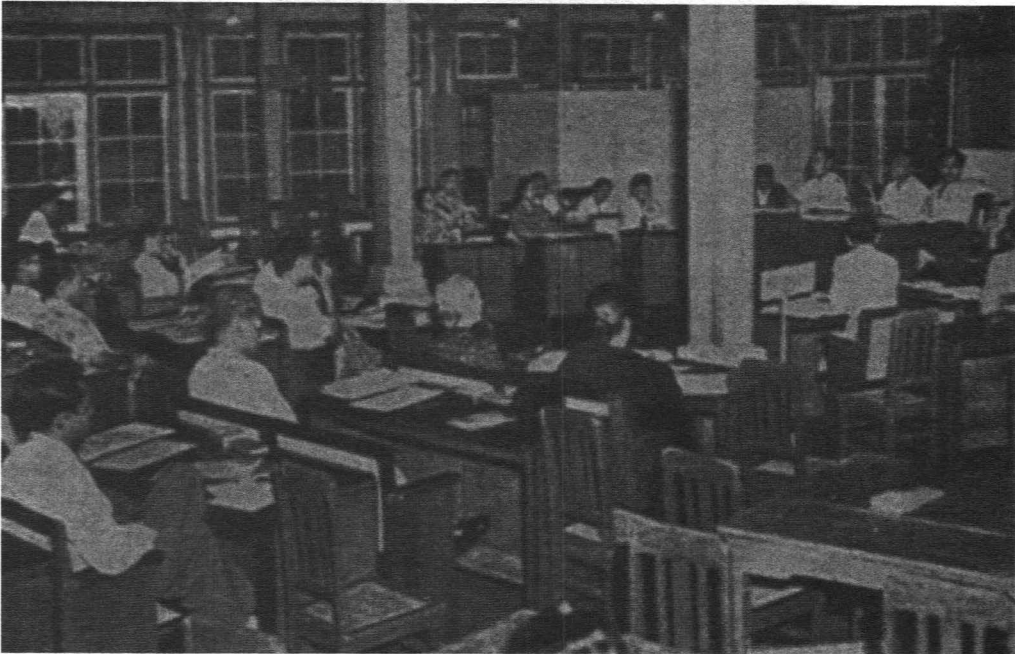
Sidang Pembahasan Organisasi Kebudayaan (Foto: Majalah Indonesia tahun 1951)



Sidang Seksi Sastra (Foto: Majalah Indonesia tahun 1951)



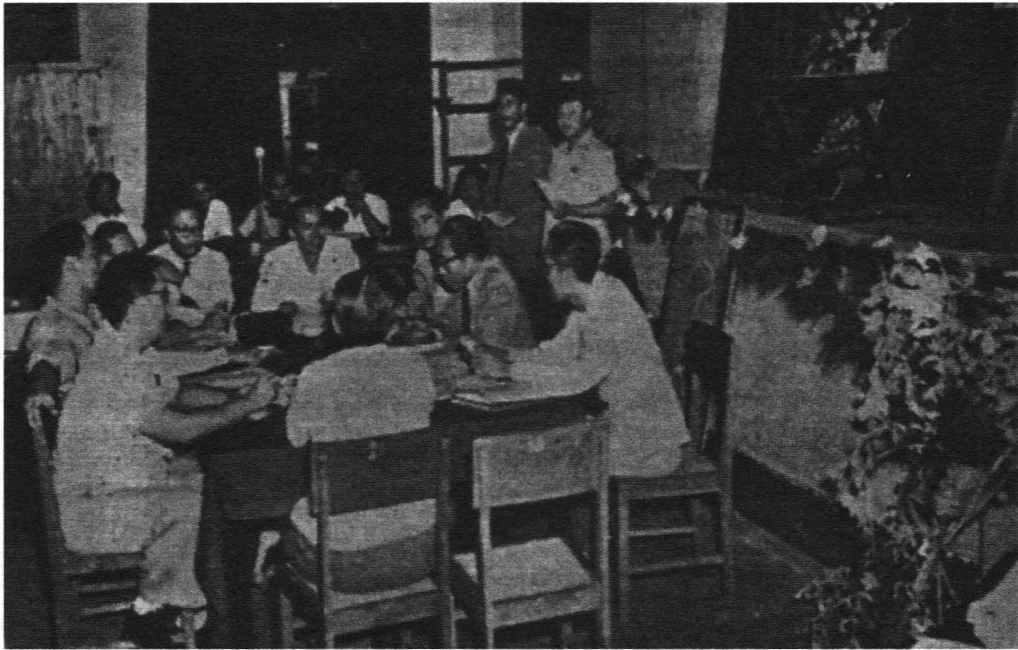
Sidang Seksi Film (Foto: Majalah Indonesia tahun 1951)



Sidang Seksi Hak Cipta (Foto: Majalah Indonesia tahun 1951)



Rapat Pemilihan Tim Perumus (Foto: Majalah Indonesia tahun 1951)



Sidang Tim Penyusun Kesimpulan (Foto: Majalah Indonesia tahun 1951)

B.2.3 Pembentukan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN)

Sebagai tindak lanjut dari keputusan kongres, pada tanggal 9 Desember 1951, di Jakarta, Panitia Kesimpulan mengadakan sidang lanjutan. Hadir dalam sidang 6 orang, yakni: Ki Mangunsarkoro, Dr. Murdowo, Moh. Said, M. Nasution, Dr. Bahder Djohan, (Ketua LKI), Mr. Moh. Sjah, dan Gaos Hardjosoemantri. Anggota Panitia Kesimpulan yang tidak hadir adalah Hamka (berhalangan), Suratno Sastroamidjojo (sakit) dan Mr. Kuntjoro Probopranoto (berada di Luar Negeri). Dari Sekretariat LKI sebagai pencatat (notulis) sdr. Sarwedi Sosrosudigdo dan Murasad. Setelah membaca laporan-laporan steno-grafis Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung mengenai acara Organisasi Kebudayaan dan mendengar perdebatan-perdebatan mengenai soal tersebut dalam rapat Pleno Kongres tanggal 10 dan 11 Oktober 1951, maka Panitia Kesimpulan menyusun rancangan kesimpulan sementara yang akan dibawa dalam Konferensi Kebudayaan yang akan diselenggarakan pada bulan April 1952.

Di samping menyusun kesimpulan sementara, Panitia juga menyusun skema tentang organisasi Gerakan Kebudayaan Indonesia sesuai dengan kesimpulan kongres. Kesimpulan sementara dan skema itu disampaikan kepada organisasi-organisasi Kebudayaan/Kesenian baik yang ikut dalam kongres maupun yang tidak dapat hadir untuk dipelajari dan dalam waktu 2 bulan masing-masing organisasi yang telah menerima kesimpulan sementara itu untuk menyampaikan tanggapannya. Semua tanggapan itu dijadikan bahan perbincangan dalam konferensi.

Acara KONFERENSI KEBUDAYAAN INDONESIA kedua diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 12-14 April 1952. Peserta Konferensi adalah organisasi

kebudayaan dan perorangan. Dari organisasi antara lain: Lembaga Kebudayaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat, PEN Club, Taman Siswa, Himpunan Budaya Surakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Makassar, ASRI Jogjakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung, Yayasan Budaya Wongken-Werun Minahasa, Yayasan Kebudayaan Batak, Organisasi Kebudayaan dan Kesenian Rakyat Suara Timur Padang dan lebih dari 120 organisasi kesenian dan sebagainya dari berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Timur, dan Kalimantan.

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kongres di Bandung, pada tanggal 14 April 1952 peserta Konferensi dengan suara bulat memutuskan berdirinya **BADAN MUSYAWARAT KEBUDAYAAN NASIONAL (BMKN)**. Dengan berdirinya badan baru itu, pada tanggal 12 Mei 1952, keberadaan **Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)** yang dibentuk berdasarkan Kongres Kebudayaan 1948 mengambil keputusan untuk meleburkan diri ke dalam BMKN. Badan baru itu dapat memulai aktivitasnya dengan menggunakan pegawai, kantor sekretariat, perlengkapan dan keuangan yang dimiliki LKI setelah mendapat persetujuan Menteri PP dan K. Sebagai bentuk badan hukum, BMKN memilih bentuk perkumpulan, dengan berazaskan 'kerakyatan dan kebebasan'. Sebagai sebuah perkumpulan, BMKN bersifat sebagai penghubung dan mengoordinasikan usaha-usaha organisasi-organisasi dan orang-seorang di bidang kebudayaan. Tujuannya ialah untuk membangun dan mengembangkan kebudayaan nasional yang merupakan getaran dan pancaran jiwa rakyat Indonesia, yang hidup, tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya dan organis dalam masyarakat dan sejarah rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu langkah dan program yang dilakukan oleh BMKN adalah:

1. Mengadakan Kongres Kebudayaan Nasional;
2. Membantu usaha dan mendorong Pemerintah dan Partikelir membangun dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, antara lain dalam:
 - Memelihara perpustakaan;
 - Mengadakan sayembara dan menyediakan hadiah tahunan dan hadiah kehormatan di salah satu lapangan;
 - Menyelenggarakan pameran dan pertunjukan serta museum mengenai hasil kebudayaan Indonesia, daerah dan Luar Negeri;
 - Mengadakan penyelidikan dan menggiatkan usaha penyelidikan di lapangan kebudayaan;
 - Usaha-usaha mencipta;
 - Usaha-usaha pendidikan kebudayaan;
 - Usaha-usaha mendidik semangat kritis di lapangan kebudayaan.
3. Menyelenggarakan hubungan kebudayaan dengan luar negeri; dan lain-lain" (Warta Kebudayaan/BMKN, hal.4).

Bunyi kesimpulan **Konferensi Kebudayaan** tentang organisasi Kebudayaan itu adalah sebagai berikut:

KONFERENSI KEBUDAYAAN

BAB I: TENTANG GERAKAN KEBUDAYAAN

Gerakan Kebudayaan tumbuh dari Rakyat secara bebas.

Gerakan itu bisa bersifat Organisasi atau usaha orang-seorang.

Untuk melancarkan kerja sama antara Organisasi-oraganisasi Kebudayaan dan orang-seorang, dan juga untuk memberi dorongan kepada gerakan kebudayaan umumnya, perlu diadakan suatu BADAN MUSYAWARAT KEBUDAYAAN NASIONAL.

Badan itu berbentuk Badan Hukum.

Pengurus Badan itu dibentuk menurut prosedur pemilihan yang telah disahkan oleh Kongres Kebudayaan.

Tugas dan kewajiban Badan itu ialah:

- Merapatkan perhubungan dan mengadakan koordinasi antara organisasi-organisasi dan orang-seorang dalam kalangan kebudayaan untuk pembangunan dan perkembangan Kebudayaan Nasional.
- Menyelenggarakan putusan-putusan Kongres.
- Untuk pekerjaan sehari-hari Badan itu membentuk BADAN PEKERJA. Badan Pekerja itu mempunyai Sekretariat.

BAB II: LAPANGAN GERAKAN KEBUDAYAAN

Gerakan Kebudayaan meliputi usaha-usaha di lapangan:

1. Kesenian.
2. Ilmu Pengetahuan.
3. Filsafat.

BAB III: USAHA KEBUDAYAAN DAN PEMERINTAH

1. Pemerintah mengadakan kesempatan sebaik-baiknya untuk perkembangan kebudayaan rakyat.
2. Pemerintah menjaga terjaminnya kebebasan dan kedemokrasian perkembangan usaha-usaha kebudayaan.

BAB IV HAL KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL

Pada tiap-tiap waktu yang tertentu diadakan KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL.

Putusan-putusan KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL yang mengikat hanya diambil dengan suara bulat.

KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL bersifat perkenalan, perbandingan dan pertukaran bentuk-bentuk kebudayaan di Indonesia (Warta Kebudayaan/BMKN, 1954).

Setelah dengan suara bulat semua organisasi Kebudayaan/ Kesenian menyepakati berdirinya BMKN, langkah selanjutnya adalah memohon penetapan sebagai badan hukum. Dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Agustus 1952, No. J.A.5/109/10, usul pembentukan BMKN berserta Anggaran Dasar (AD), Anggaran

Rumah Tangga (ART) BMKN disahkan dan BMKN diakui sebagai Badan Hukum. Bunyi secara lengkap piagam pendirian BMKN adalah sebagai berikut.

PIAGAM PENDIRIAN

Konperensi Kebudayaan di Jakarta, dilangsungkan pada tanggal 12-14 April 1952, sebagai lanjutan Kongres Kebudayaan Indonesia di Bandung pada tanggal 5-11 Oktober 1951 dan telah mendapat kekuasaan penuh dari Kongres Kebudayaan Indonesia tsb. Dalam sidang pada hari Senin tanggal 14 April 1952, dengan suara bulat memutuskan berdirinya suatu:

Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional

Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional itu dibentuk menurut dasar-dasar seperti tercantum dalam Kesimpulan-kesimpulan Konperensi tersebut di atas, tentang Organisasi Kebudayaan.

Dengan suara bulat telah diputuskan pula, bahwa yang menjadi anggota-anggota Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional pada hari berdirinya, adalah organisasi-organisasi dan orang-orang yang tersebut dalam daftar terlampir.

Jakarta, 14 April 1952

PIMPINAN KONPERENSI TSB.

Ketua, Sekretaris Umum,

Gaos Hardjasumantri Suratno Sastroamidjojo

Penetapan Menteri Kehakiman tersebut dimuat dalam Tambahan Berita-Negara RI, tanggal 23 Agustus 1952 Nr.77. Kutipan secara lengkap surat penetapan tersebut adalah sebagai berikut.

Tambahan Berita-Negara RI, tanggal 23 Agustus 1952 Nr.77.

Nr 73 1952

ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Agustus 1952
No. JA.5/109/10

MENTERI KEHAKIMAN:

Membaca surat permohonan tertanggal 7 Agustus 1952 dari:

1. R.Gaos Hardjasoemantri,
2. Trisno Soemardjo,

Ketua dan Penulis dan bersama-sama menjadi pengurus dan selaku itu dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut di bawah ini:

Mengingat pasal 1, dan 3 dari firman Kerajaan tertanggal 28 Maret 1870 No. 2 (Staatsblad Indonesia No. 64), sebagaimana terakhir diubah menurut Ordonansi tertanggal 4 Juli 1938 (Staatsblad No. 267) dan Penetapan Peme-rintah tertanggal 18 Oktober 1937 No. 18 (Staatsblad No. 537);

Memutuskan :

Mengesahkan anggaran dasar perkumpulan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional berkedudukan di Jakarta, sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum.

Kutipan dsb.;

*Sesuai dengan daftar tersebut:
Kepala Bahagian Badan-badan Hukum,
Pegawai yang diperbantukan,
A.J.A. THEIJS*

Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa nama lembaga itu adalah Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional Indonesia, dan bukan "Musyawarah" seperti yang sering disebut dan ditulis orang. BMKN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan jarak hidupnya. Hingga saat ini belum pernah terdengar pernyataan resmi bahwa lembaga ini dinyatakan bubar. Asasnya adalah kerakyatan dan kebebasan (pasal 2), sifatnya menghubungkan dan mengkoordinasikan usaha-usaha organisasi-organisasi dan orang-seorang di lapangan kebudayaan (pasal 3). Adapun maksud dan tujuan didirikannya BMKN adalah untuk membangun dan mengembangkan kebudayaan nasional (pasal 4), yaitu di lapangan kesenian, ilmu pengetahuan dan filsafat (pasal 5).

Mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam memajukan kebudayaan bangsa, penyelenggaraan Kongres Kebudayaan merupakan salah satu tugas pokok BMKN, bukan oleh pemerintah. Dalam pasal 6 usaha-usaha dirinci sebagai berikut:

1. Mengadakan kongres kebudayaan nasional.
2. Membantu usaha dan mendorong pemerintah dan partikelir membangun dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, antaranya dalam:
 - a. memelihara perpustakaan;
 - b. mengadakan sayembara dan menyediakan hadiah tahunan dan hadiah kehormatan di salah satu lapangan kebudayaan;
 - c. menyelenggarakan pameran dan pertunjukan serta museum-museum mengenai hasil kebudayaan Indonesia dan daerah di lapangan kebudayaan;
 - d. mengadakan penyelidikan dan menggiatkan usaha penyelidikan di lapangan

- kebudayaan;
 - e. usaha-usaha mencipta;
 - f. usaha-usaha pendidikan kebudayaan;
 - g. usaha-usaha mendidik semangat kritis di lapangan kebudayaan.
3. Menyelenggarakan hubungan kebudayaan dengan luar negeri;
 4. dan lain-lain.

Sementara itu mengenai keanggotaan BMKN dibagi dua macam, yaitu anggota organisasi kebudayaan dan orang perorang. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 7, yang dapat diterima sebagai anggota BMKN ialah: a. tiap-tiap organisasi baik yang bersifat badan hukum maupun yang bukan, yang seluruh pengurusnya dan anggotanya sebagai terbanyak warga Indonesia, perkumpulan mana menurut anggaran dasarnya berusaha menyelenggarakan kebudayaan Indonesia atau sebagainya; dan b. orang-orang warga Indonesia. Hak suara bagi anggota organisasi mempunyai dua suara sedangkan untuk anggota perorangan mempunyai satu suara.

Mengenai pengurus BMKN, dalam pasal 10 Anggaran Dasar diatur bahwa pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat umum. Karena dalam rapat pembentukan BMKN pada tanggal 14 April 1952, telah terpilih 20 orang pengurus dan memilih 7 orang Badan Pekerja, di antaranya 2 orang dari luar Jakarta, maka nama-nama pengurus pertama BMKN dimasukkan dalam Anggaran Dasar. Nama-nama itu adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 1. | S. Mangunsarkoro | - Ketua Pengurus |
| 2. | Gaos Hardjosoemantri | - Anggota Pengurus dan Ketua Badan Pekerja |
| 3. | Trisno Sumardjo | - Penulis I, Pengurus dan Badan Pekerja |
| 4. | Anas Ma'ruf | - Penulis II, Pengurus dan Badan Pekerja |
| 5. | Mohamad Said | Anggota Badan Pekerja |
| 6. | Intojo, | idem, |
| 7. | Armijn Pane, | idem, |
| 8. | JE. Tatengkeng, | idem, |
| 9. | Dr. Suharso, | idem, |
| 10. | Mr. Moh. Syah | Anggota Pengurus |
| 11. | Achdiat Kartamihardja | idem, |
| 12. | Mr. Wongsonegoro | idem, |
| 13. | Suratno Sastroamidjojo | idem, |
| 14. | S. Sumardjo | idem, |
| 15. | Boejoeng Saleh | idem, |
| 16. | Joebaar Ajoeb | idem, |
| 17. | Sugito | idem, |
| 18. | MA. Salmun | idem, |
| 19. | Prof. Mr. Sunarjo Kolopaking | idem, |
| 20. | D. Marpaung | idem. |

Pengurus dapat membentuk badan-badan istimewa⁵. Di samping itu Pengurus juga membuat ketetapan bahwa Ketua Pengurus akan berganti-ganti, dipilih untuk masa 3 bulan, tetapi apabila habis masanya, boleh dipilih lagi. Setelah S. Mangoensarkoro menjadi Ketua Pengurus pertama, dalam giliran kedua terpilih Mr. Wongsonegoro, dan yang ketiga Dr. Bahder Djohan. Sebagai Badan Pekerja dipilih sebagai berikut:

1. Gaos Hardjasoemantri, sebagai Ketua
2. Anas Ma'ruf, sebagai Penulis (hingga Trisno Soemardjo kembali dari perjalanannya ke luar negeri. Kemudian diangkat sebagai penulis Joebaar Ajoeb).
3. Moh. Said, kemudian diganti oleh Mr. St. Moh. Sjah
4. Intojo
5. Armijn Pane
6. Dr. Soeharso, dari Surakarta; kemudian digantikan oleh S. Sumardjo dari Bandung.
7. J.E. Tatengkeng, dari Makassar (Laporan BMKN, 1954: hal. 5).

Di samping BMKN Pusat, sesuai dengan bunyi pasal 12, dapat dibentuk Badan Musyawarat Daerah dan Badan Musyawarat setempat. Yang dimaksud dengan Badan Musyawarat Setempat adalah badan untuk melaksanakan usaha-usaha seperti tercantum dalam pasal 6. Adapun yang dimaksud dengan Badan Musyawarat Daerah adalah badan yang dibentuk di tiap-tiap lingkungan kebudayaan yang luasnya hampir sama dengan provinsi. Di dalam lingkungan kebudayaan itu dapat pula dibentuk Badan Musyawarat Setempat. Batas-batas geografis Badan Musyawarat Daerah ditentukan oleh rapat umum, sedangkan untuk Badan Musyawarat Setempat oleh rapat Badan Musyawarat Daerah.

Dengan status organisasi berbadan hukum, dilengkapi dengan struktur organisasi dan pengurus serta program kerja yang jelas, keberadaan organisasi BMKN telah memberikan sumbangan yang besar terhadap upaya pemajuan kebudayaan bangsa. BMKN merupakan satu-satunya organisasi kebudayaan yang mengko-ordinasikan berbagai organisasi kebudayaan/kesenian dan anggota perorangan. Organisasi ini terus berkembang, dan berdasarkan catatan BMKN sampai dengan tahun 1956 jumlah anggota BMKN orang-seorang 181 orang, dan organisasi sebanyak 257 buah yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara.⁶

B.3 Kongres Kebudayaan 1954

B.3.1 Persiapan dan Pelaksanaan

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun 1954, tiga tahun setelah Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, yaitu pada tanggal 18 sampai dengan 23 September 1954 di Surakarta. Berbeda dengan kongres sebelumnya, Kongres Kebudayaan kali ini ada 2 keistimewaan:

1. Kongres disiapkan oleh lembaga kebudayaan baru, yaitu Badan Musyawarah

5 Piagam Pendirian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional, Jakarta 1952-1954

6 Berdasarkan data/daftar yang dihimpun oleh BMKN tahun 1956.

Kebudayaan Nasional (BMKN).

2. Kongres diselenggarakan bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan Rapat Umum BMKN.

Kalau dalam kongres yang pertama di Magelang tahun 1948 baru sampai pada meletakkan dasar-dasar kebudayaan nasional, dan pada kongres yang kedua di Bandung tahun 1951 memper-soalkan sekitar kesusasteraan, hak cipta dan film, dalam kongres ketiga tahun 1954 menyoroti masalah pendidikan kebudayaan bagi kaum pelajar, masyarakat kota, buruh dan tani. Pilihan tema kongres diputuskan dalam sidang Pengurus BMKN keduabelas tanggal 18, 19 dan 20 Oktober 1953. Dalam sidang tersebut diputuskan dua hal:

1. Bahwa BMKN akan mengadakan *Rapat Umum* pada bulan April 1954 di Surakarta;
2. Bersamaan dengan Rapat Umum tersebut akan dilanjutkan dengan *simposium* dengan acara: “*Pendidikan Kebudayaan*”.

Dalam rapat tersebut juga disepakati kriteria penunjukan prae-advies (disebutnya sebagai referensi) yaitu:

1. seorang dari kalangan perguruan;
2. seorang dari kalangan seniman yang banyak mengetahui soal-soal pendidikan kebudayaan untuk masyarakat;
3. seorang kalangan masyarakat seniman yang mengetahui soal-soal pendidikan kebudayaan untuk massa buruh dan tani.

Ketika sidang keempat belas tanggal 1 dan 6 Februari 1954 terjadi perkembangan baru, yaitu rencana penyelenggaraan simposium diganti menjadi Kongres Kebudayaan III. Di samping itu mengenai waktu penyelenggaraan Rapat Umum BMKN dan Kongres Kebudayaan yang semula direncanakan bulan April 1954, akan diundur karena dikhawatirkan para peserta masih diliputi rasa cemas karena ancaman bahaya gunung Merapi yang sedang meletus. Akhirnya, pada sidang kelima belas tanggal 3 Maret 1954 diputuskan bahwa kegiatan Rapat Umum BMKN dan Kongres Kebudayaan ditunda dan akan diselenggarakan pada tanggal 18 – 23 September 1954. Kongres diselenggarakan di Hotel Dana, Jln. Slamet Rijadi, Surakarta. Syarat untuk dapat menjadi peserta kongres adalah sbb.:

- a. Datang ke kongres atau mendaftarkan dengan disertai keterangan kegiatan Kebudayaan/Kesenian atau mandat dari organisasi dengan menerangkan apakah saudara wakil organisasi atau peninjau dari instansi-instansi pemerintah.
- b. Menyokong sebanyak Rp. 50,- bagi saudara-saudara yang datang dari luar kota Surakarta, guna menyokong biaya kongres. Sesudah itu saudara penuhi BMKN dan Panitia Penerima Kongres akan menyediakan penginapan dan makan saudara selama berkongres.
- c. Untuk saudara-saudara yang datang dari luar Jawa, maka ongkos kapal lautnya akan diganti separo BMKN dan penggantianannya akan dilakukan di Sekretariat BMKN.

Mengenai tema pokok yang dibahas dalam kongres tetap seperti semula, yaitu masalah Pendidikan Kebudayaan, yang ditinjau dari 3 sudut kepentingan masyarakat bangsa Indonesia:

- (1) Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Sekolah-sekolah di Indonesia, pre-adviseur S. Mangunsarkoro dan pendebat utama Bakri Siregar;
- (2) Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Kota-kota di Indonesia, pre-adviseur Rivai Apin dan pendebat utama MA. Salmun dan Boejoeng Saleh;
- (3) Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Kaum Buruh dan Tani, pre-adviseur AS. Dharta dan pendebat utama Mr. Kusna Puradiredja dan Sugardo.

Adapun susunan acara Rapat Umum dan acara kongres diatur sebagai berikut:

a. Acara Rapat Umum BMKN:

- (1) Laporan Pengurus;
- (2) Usul-usul dari BMKN Daerah, organisasi anggota BMKN dan anggota BMKN lainnya;
- (3) Usul keuangan, oleh Dr. Suharso.
- (4) Pemilihan Pengurus baru.

b. Acara Kongres:

- (1) Hari pertama (Pleno): Penjelasan prae-advies dan stelling-stelling (dalil) pendebat;
- (2) Hari Kedua (Pleno):
 - Pembukaan oleh Ketua, untuk membentangkan azas dan tujuan;
 - Pembacaan prae-adviezen;
 - Pembacaan stellingen debaters;
 - Pembagaian seksi-seksi:
Siang : Rapat-rapat seksi
Malam: Rapat-rapat seksi
- (3) Hari ketiga: - Pagi: Rapat-rapat seksi;
 - Siang: Rapat pleno menyampaikan kesimpulan dari rapat seksi dan pengambilan keputusan.
 - Malam: penyampaian kesimpulan kongres, ditutup dengan pementasan sandiwara.

Dalam pidato laporannya pimpinan BMKN yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan terima kasih atas bantuan semua pihak, sehingga kongres dapat terlaksana. Di samping itu juga mengatakan tentang banyaknya orang yang lebih mendewakan segala sesuatu yang datang dari negeri asing. Sikap seperti ini akan melemahkan penghargaan dan semangat untuk mengembangkan kebudayaan sendiri. Sementara itu Menteri PP dan K, Mr. Muhamad Yamin mengingatkan lagi tentang kondisi bangsa yang telah mengalami penjajahan dan sebagai akibat dari tekanan jiwa itu telah pernah melumpuhkan budi dan daya Bangsa kita, dan telah mengakibatkan pula mero-sotnya daya cipta dan gaya cipta bangsa Indonesia yang dijamin yang lampau telah dapat mewujudkan ketatanegaraan, seni bangunan dan pahat, kesenian sastera dan kebudayaan pikiran (Majalah Budaya, September/Oktober 1954: hal. 2). Tekanan jiwa itu telah mengakibatkan pula hilangnya dalam beberapa

hal kepercayaan atas diri sendiri dan timbulnya perasaan kecemasan yang sangat merintang perkembangan jiwa dan kemajuan bangsa.

Bertolak dari kenyataan itu M. Yamin memprihatinkan bahwa

”dalam jiwa rakyat Indonesia berkembang perasaan kagum pada hasil-hasil kebudayaan barat yang memuncak...”. Oleh karena itu kita harus kembali pada *”jiwa bangsa Indonesia yang di zaman dulu terang pendiriannya dan nyata tujuannya, yang memberi gaya kepada kesenian sebagai yang melahirkan fikiran dan tinjauan hidup”*. (Majalah Budaya, September/Oktober 1954: hal. 3).

Jiwa bangsa Indonesia yang tertekan berabad-abad itu ternyata masih mempunyai kemampuan yang terbuka untuk pandangan baru dan menampakkan semangat dan kekuatan dalam menghadapi perjuangan, yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan. Dalam rangka membangun bangsa berbasis budaya, M Yamin merumuskan cita-citanya bagi bangsa untuk menjadi *”Bangsa Besar”, “Bangsa Budaya”, dan Negara (Kesatuan) Budaya”*.

Untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia, menurut Yamin kita harus tetap berpegangan pada sifat-sifat kebangsaan, walaupun jiwa kita akan terbuka bagi unsur-unsur kebudayaan Barat. Oleh karena itu

”Setiap warga Negara Indonesia harus menjadi tenaga kebudayaan, sehingga titik tujuan ialah terwujudnya: Bangsa Budaya; Bangsa yang memiliki pikiran budaya, yang mempunyai daya budaya, yang meliputi segenap kehidupan lahir dan batin”.

Mengenai bangsa besar antara lain Yamin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *”Kebesaran Bangsa”* dan *”Negara Kesatuan Budaya: “adalah kesatu-paduan semangat budi dan daya tidak mengenal kepentingan golongan atau daerah, akan tetapi mengarahkan segenap usahanya kepada kebesaran Nusantara sebagai keseluruhan”*. (Majalah Budaya, September/Oktober 1954: hal. 5). Dari rumusan ini jelas, bahwa yang dimaksud dengan *”kesatuan budaya”* bukan mewujudkan satunya kebudayaan Indonesia, melainkan kesatupaduan semangat memajukan kebudayaan masing-masing suku bangsa. Dasar bagi kesatupaduan untuk mewujudkan Negara Budaya dan Bangsa Budaya sudah ada dan sudah mulai tertanam (setelah 10 tahun merdeka: penulis) dalam sanudbari setiap warga negara.

Salah satu pengikat kesatupaduan itu adalah Pancasila, yang enurut Yamin sebagai *”suatu pikiran budaya dan pendirian hidup nasional yang sesuai dengan sifat-sifat kebangsaan, yang dapat menjadi pedoman hidup berbangsa”*. Tugas kita adalah menyiapkan suatu generasi baru yang melaksanakan cita-cita di atas. Untuk mewujudkan cita-cita itu diperlukan pendidikan yang meluas dan mendalam. Mutu sekolah dan mutu pengetahuan pendidik harus ditingkatkan. Melalui pendidikan yang didukung oleh mutu pendidikan yang baik akan *”melancarkan dan memperkuat suatu Bangsa Negara Indonesia yang disinari suatu kebudayaan nasional sebagai bangsa yang memiliki peradaban”*. (Majalah Budaya, September/Oktober 1954: hal. 5).

B.3.2 Rumusan Hasil Kongres

Kesimpulan dan Usul-usul yang dihasilkan oleh KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA tahun 1954 adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN KONGRES KEBUDAYAAN 1954

KESIMPULAN SEKSI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNTUK MASYA-RAKAT SEKOLAH

1. Agar pendidikan kebudayaan untuk masyarakat sekolah dapat berjalan sebaik-baiknya, maka haruslah jumlah maupun macam sekolah itu sampai cukup meskipun seluruh sektor kebudayaan itu harus mendapat perhatian yang seksama hingga dapatlah terjamin mutu-mutunya.
2. Yang terutama diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan kebudayaan itu ialah potensi kebudayaan yang memberi kemungkinan perkembangan daya kreasi.
3. Jalan pelaksanaan pendidikan kebudayaan ini berdasarkan azas-azas pendidikan nasional yang demokratis.
4. Dengan berkembangnya demokrasi di lapangan sosial ekonomi politik, kebudayaan Indonesia akan merupakan kebudayaan rakyat sebagai mani-festasi daripada hidup kerakyatan.
5. Untuk menjamin pertumbuhan kebudayaan yang harmonis sesuai dengan maksud dan tujuan pendidikan kebudayaan tersebut di atas, haruslah diadakan sistem pendidikan sehingga pendidikan kesenian dan pandangan hidup mendapat tempat yang semestinya di samping ilmu pengetahuan dan kecakapan.
6. Tiap-tiap kebudayaan daerah mengandung kemungkinan berkembang menjadi kebudayaan persatuan, jika jiwa penggerak hidupnya tidak lagi bersifat kedaerahan melainkan perastuan dan daerahnya dapat meluas meliputi seluruh Indonesia. Lain daripada itu tiap-tiap kebudayaan daerah itu mengandung unsur-unsur yang dapat disumbangkan kepada pertumbuhan kebudayaan persatuan yang merupakan kebudayaan rakyat.
7. Pendidikan pandangan hidup diberikan secara praktis bersifat tuntutan dalam menghadapi alam dan masyarakat sekitarnya hingga akhirnya dapat menentukan tujuan dan keyakinan hidup dengan teratur dan seksama.
8. Pendidikan agama diberikan dan diterima dalam suasana yang tidak ada paksaan supaya dapat berpengaruh baik dalam pembentukan keyakinan hidup.
9. Untuk menolong tumbuhnya kesadaran hidup batin dan pembentukan keyakinan hidup, diberikan pengajaran ilmu jiwa yang ditujukan pada hidup sosial dan pembentukan watak.
10. Agar pendidikan kesenian buat tiap anak dapat memberi hasil maksimum maka haruslah diberikan dengan mengingat bakat perseorangan. Bagi yang berbakat baik dapatlah diadakan usaha tambahan pendidikan kesenian di luar hubungan kelas.
11. Lembaga pendidikan tinggi kesenian perlu lekas ada berdasarkan kemungkinan dan keadaan yang nyata.
12. Pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai bahasan budaya, haruslah mendapat tempat yang sewajarnya dalam rangka pendidikan kebudayaan.

13. Badan-badan kependuan dan organisasi-organisasi pelajar merupakan tempat perkembangan kebudayaan yang penting.

USUL-USUL SEKSI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNTUK MASYARAKAT SEKOLAH

1. Mengajukan kepada organisasi-organisasi kebudayaan untuk mengusahakan adanya Balai Budaya/Gedung Kesenian dengan kerja sama dengan pemerintah daerah dan perwakilan-perwakilan Jawatan Kebudayaan.
2. Mengusulkan pada Pemerintah menyatakan sistem Karundeng sebagai sistem Nasional tulis cepat Bahasa Indonesia.
3. a) Mengusulkan kepada pemerintah untuk menyempurnakan susunan dan usaha Panitia Sejarah Nasional.
b) Mengusulkan pada pemerintah agar supaya secepat mungkin mengusahakan buku-buku pelajaran sejarah yang seragam dan berdasarkan garis Nasional.
4. Mengusulkan kepada pemerintah supaya meletakkan dasar nasional dan demokratis dalam pendidikan dan menyesuaikan buku-buku pelajaran dengan dasar-dasar ini.
5. Dalam menghadapi masa pembangunan kebudayaan dewasa ini, sudahlah sewajarnya anggaran belanja PPK sedikit-dikitnya harus 25 persen dari anggaran negara.
6. Benda-benda kebudayaan milik negara yang ada di luar negeri harus diminta kembali.
7. Supaya diadakan pendidikan kebudayaan di kalangan tentara dan polisi.
8. Membentuk Dewan Pertimbangan Lektur dan Filem.
9. Supaya diadakan pengawasan peredaran filem, dan reklame-reklame.
10. Mengadakan konservatori kesenian daerah.
11. Mengadakan Biro Penterjemah Negara.
12. Mengadakan Panitia Penyelidikan Buku-buku Lama tentang filsafat.
13. Mengadakan Pekan Raya Kebudayaan.
14. Memperluas Jawatan Kebudayaan sampai ke Kabupaten.
15. Membentuk Lembaga Filem dan Perpustakaan Lektur Filem yang baik di setiap kota.
16. Menggunakan filem sebagai alat pendidikan masyarakat.
17. Supaya soal kebudayaan daerah menjadi acara dalam kongres kebudayaan yang akan datang yaitu tentang hubungan kebudayaan daerah dengan kebudayaan nasional.
18. Menetapkan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran pokok di semua sekolah (termasuk sekolah vak).
19. Bahasa dan huruf Jawa supaya diajarkan di daerah-daerah yang berkepentingan.
20. Membuat kode pendidikan bagi guru-guru.
21. Mengadakan rencana pelaksanaan pendidikan intergral yang berbentuk Undang-undang.

KESIMPULAN-KESIMPULAN SEKSI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNTUK MASYARAKAT KOTA

Bab I.

Keadaan ekonomi dan sosial di kota-kota Indonesia dewasa ini yang bermacam-macam sifat dan coraknya, tidak dapat mengembangkan dengan sempurna potensi, dan hubungan kebudayaan yang ada, serta tidak dapat memperkuat gaya hidup yang

memupuk daya cipta ke arah manusia bermartabat.

Bab II.

1. Tujuan pendidikan kebudayaan adalah membangun manusia budaya, yang cinta kepada tanah air, bangsa, kemanusiaan, serta memelihara keseimbangan kehidupan rohani dan jasmani.
2. Kebudayaan itu merupakan pernyataan pikiran, kehendak dan perasaan rakyat pada keseluruhannya (buruh, pelajar, pedagang, seniman-seniman dan lain-lain) yang sama kepentingan hidupnya.
3. Kebudayaan itu merupakan gaya hidup yang dinamis kreatif dan nasional demokratis.
4. Kebudayaan itu hendaknya bersifat nasional yang menerima unsur-unsur kebudayaan daerah, kesempatan dan tradisi masa lampau maupun umum kebudayaan luar Indonesia secara kritis.

Bab III.

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas hendaknya kita memperbaiki gejala-gejala kebudayaan yang telah ada, serta meluaskan dan menyediakan kesempatan yang mungkin untuk pembentukan watak dan penyaluran tenaga dan bakat kreatif di lapangannya masing-masing dengan:

- a. Lingkungan hidup (asrama-asrama sosial, rukun tetangga, rukun kampung dan rumah sakit dan sebagainya).
- b. Lingkungan persekutuan: (perhimpunan kesenian, kebudayaan, sosial, poli-tik dan sebagainya).
- c. Lembaga (museum, perpustakaan rakyat, laboratorium, taman-taman hiburan).
- d. Sekolah-sekolah dari segala tingkat.

Penjelasan:

- I. Untuk memperbaiki mutu gejala-gejala kebudayaan yang telah ada dalam lapangan:
 - a. Film:
 - 1) mengadakan perbaikan komposisi Panitia Sensor dengan sebagian besar terdiri dari pendukung-pendukung kebudayaan;
 - 2) meminta perlindungan Pemerintah bagi pengusaha-pengusaha film nasional untuk mempertinggi mutu dan memungkinkan perkembangan seni film.
 - b. Lektur:
 - 1) mengadakan pengawasan terhadap perhatian dan jenis bacaan.
 - 2) penambahan jumlah dan tempat-tempat bacaan.
 - c. Radio:

Mengadakan pengawasan terhadap mutu siaran dan tersebarnya siaran itu secara luas.
- II. Supaya Pemerintah membentuk dewan pembangunan kota dan berkewajiban membimbing dan memberi corak pada kota serta membangkitkan keadaan kolektif dalam alam kehidupan kota.
- III. Mengingat research mengenai latar belakang pertumbuhan kota dalam sejarahnya dan urbanisasinya untuk pembentukan pribadi kota.

- IV. Memikirkan kegiatan-kegiatan kebudayaan dalam pergaulan hidup masyarakat kota dengan di dalam pelaksanaannya menarik sebanyak mungkin tenaga kreatif antaranya dengan jalan:
 - a. Menjadikan tempat-tempat penciptaan dan tempat-tempat yang menyalurkan hasil-hasilnya secara luas dan merata dengan mengadakan sanggar-sanggar bekerja, museum-museum, gedung pertunjukan, balai-balai budaya, taman-taman kebudayaan (taman untuk anak-anak dan rekreasi).
 - b. Memberikan motif-motif baru dan tanggapan-tanggapan yang sesuai terhadap tema-tema yang lama terdapat pada kumpulan-kumpulan kesenian rakyat (drama dan musik).
- V. Untuk mempertinggi kecerdasan berfikir dan pengertian kebudayaan haruslah diadakan bentuk-bentuk pendidikan dalam tempatnya yang leluasa, seperti ceramah-ceramah, kursus, sekolah, akademi, sekolah-sekolah tinggi.
- VI. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan bagi perkembangan bakat dan tenaga kreatif haruslah diberikan perhatian terhadap: tempat penampungan, pajak, subsidi, dana budaya dan sebagainya.
- VII. Dalam hubungan ini diserukan pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan negara memperbesar jumlah anggaran belanja, terutama yang mengenai usaha-usaha kebudayaan.

KESIMPULAN SEKSI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNTUK BURUH DAN TANI

- I. Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 1954 yang berlangsung di Solo dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 September 1954, setelah melakukan perbincangan mengenai masalah pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani, dapat menarik kesimpulan betapa pentingnya pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani sebagai unsur yang pertama dan utama guna pertumbuhan kebudayaan nasional dan bagi kehidupan kaum buruh dan tani itu sendiri. Kongres dapat menarik kesimpulan, bahwa sesuatu garis pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani yang dapat dilanjutkan kepada masyarakat, para budayawan, organisasi-organisasi kebudayaan dan pemerintah adalah suatu cara pendidikan yang mengubah kejiwaan pikiran, perasaan, kemauan yang meliputi pendidikan kesenian, kecerdasan, pandangan hidup, kesusilaan, kemasyarakatan dan kepribadian.
- II. 1. Yang berhubungan dengan Pemerintah:
 - a. Anggaran Belanja Kementerian PP dan K diperbesar terutama mengenai kebudayaan.
 - b. Menggiatkan pekerjaan-pekerjaan research di lapangan kebudayaan, dengan di dalam pelaksanaannya menarik sebanyak mungkin para budayawan.
 - c. Memikirkan bantuan bagi kegiatan kebudayaan di kalangan kaum buruh dan tani dengan menggunakan saluran-saluran organisasi-organisasi buruh dan tani.
 - d. Memperhebat pekerjaan kebudayaan PBH (Pemberantasan Buta Huruf) dengan memberikan juga peranan kepada para budayawan.
 - e. Untuk mencapai seluas mungkin kaum buruh dan tani, Jawatan Kebudayaan

hendaknya diluaskan sampai ke kecamatan-kecamatan seperti halnya dengan *Jawatan-Jawatan: Penerangan, Pendidikan Masyarakat dan Pertanian*.

2. Yang berhubungan dengan BMKN:

- a. Supaya mulai melangkahakan usaha-usaha untuk menggiatkan pendidikan kebudayaan di kalangan kaum buruh dan tani.
- b. Sebagai faktor stimulasi menyelenggarakan Pekan Kesenian untuk kaum buruh dan tani.
- c. Menerbitkan sendiri lektur-lektur kebudayaan secara populer dan murah bagi kaum buruh dan tani.
- d. Mendorong berdirinya Balai-balai Budaya secara meluas.
- e. Supaya BMKN lebih menjelaskan usaha-usahanya di lapangan kebudayaan kepada masyarakat dan memperjuangkan subsidi yang mencukupi.

USUL-USUL:

1. BMKN supaya menuntut kepada pemerintah keringanan terhadap pajak yang dibebankan kepada seniman dan hasil-hasil seni ciptaannya.
2. Masalah perkawinan dan segala konsekuensinya supaya dimasukkan sebagai masalah kehidupan kebudayaan bagi BMKN.
3. Menyambut terbentuknya Dewan Pertimbangan Siaran Radio sebagai langkah baik bagi Pemerintah, maka kongres supaya mengusulkan dibentuknya Dewan Pengawas Pemasukan Lektur dan Film dengan komposisinya yang terdiri dari sebagian besar kaum budayawan.

B.4 Kongres Kebudayaan 1957

B.4.1 Persiapan

Sebagaimana diuraikan di atas, penyebutan acara pertemuan budayawan dan seniman di Bali tahun 1957 menyimpan tanda tanya, apakah kegiatan itu sebagai Rapat Umum BMKN, Pertemuan Kebudayaan, Kongres BMKN, atau Kongres Kebudayaan? Dalam beberapa terbitan penyebutan itu tidak konsisten, kadang-kadang disebut 'Rapat Umum BMKN', 'Pertemuan Kebudayaan' serta ada pula yang menyebut sebagai 'Konferensi Kebudayaan', 'Simposium Kebudayaan' dan 'Kongres BMKN'.

Dalam *Warta Kebudayaan* No. 2, terbit bulan November 1956 pertemuan itu disebut RAPAT UMUM BMKN. Disebut demikian karena pertemuan ini dipandang sebagai sebuah Rapat Umum BMKN sebagaimana terjadi di tahun 1954, ketika KK itu diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Rapat Umum BMKN. Di samping itu, menurut pendapat para pengurus BMKN akan lebih baik tidak mengadakan kongres dan cukup dengan pertemuan yang bersifat biasa saja. Alasannya, karena pada kongres-kongres di Magelang (1948), Bandung (1951) Solo (1954) dan Konferensi Kebudayaan (1952) telah banyak diletakkan dasar-dasar untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia. Mereka beranggapan yang diperlukan adalah usaha yang lebih mengarah pada soal-soal praktis dan bukan yang bersifat teoritis. Di samping Rapat Umum Anggota BMKN, juga akan diadakan acara lain yang disebutnya 'Simposium Kebudayaan', dan oleh Pengurus akan dibahas dua prasaran, yaitu: (1) Kebudayaan

dalam Konstitusi oleh Boejoeng Saleh, dan (2) Organisasi Koordinan untuk Negara dan Masyarakat oleh Trisno Sumardjo (Warta Kebudayaan, No. 2/BMKN, 1956).

Rencana penyelenggaraan Rapat Umum itu terus diperbincangkan, dan sesuai penjelasan yang dimuat dalam Warta Kebudayaan No.5/Januari 1957, akhirnya dapat dicapai beberapa kesepakatan. Bertolak dari Anggaran Dasar BMKN, yang menyebutkan bahwa sekali dua tahun BMKN mengadakan Rapat Anggota Pleno (“Rapat Umum”), maka ditetapkanlah rapat itu akan diadakan di Makassar tanggal 14 s.d. 20 April 1957. Rapat akan dihadiri oleh 170 organisasi dan 201 perseorangan. Acara pokok adalah menyampaikan Laporan Pengurus dan Pemilihan Pengurus BMKN tahun 1957/1958. Pada kesempatan itu juga akan diisi dengan acara penyerahan Hadiah Kesusasteraan BMKN tahun 1955/1956 kepada 6 orang pemenang di bidang Prosa, Puisi, dan Esai. Sementara itu BMKN setempat di Makassar akan meluncurkan kumpulan hasil sastra dan esai yang dihasilkan oleh para pengarang Sulawesi. Di samping itu, juga ditetapkan 3 topik dan pemrasaran untuk acara Simposium Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Hubungan Arsitektur dengan Seni Rupa (prasaran Sdr. Sjafei Sumardja)
- b. Penyelenggaraan Kesenian Semasyarakat (prasaran, Trisno Sumardjo)
- c. Kebudayaan dan Konstitusi (prasaran, Sdr. Bojoeng Saleh dan atau Sdr. JE Tatengkeng)

Adapun pendebat utama ditetapkan untuk topik 1 dan 2 masing-masing 2 orang, sedangkan topik 3 oleh 4 orang. Pendebat dipilih dari tokoh budayawan dan seniman dari luar Jawa, yaitu dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Acara itu diselenggarakan bersamaan dengan Pekan Kesenian yang diselenggarakan oleh Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan acara itu dibentuk Panitia Pertemuan Kebudayaan oleh BMKN setempat, dan direncanakan peserta dari diangkut dengan kapal “DJAJADAT” milik Jawatan Pelayaran, Kementerian Perhubungan. Setiap peserta dikenakan ongkos sebesar Rp. 400,- bagi peserta yang naik dari Jakarta, Rp. 300,- yang naik dari Surabaya dan Rp.200,- bagi peserta yang naik dari Buleleng (Warta Kebudayaan No. 5/Januari 1957).

Pertemuan Kebudayaan di Makassar yang telah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh itu ternyata kemudian dipindahkan tempatnya ke Bali, tanpa dijelaskan alasannya. Pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 20-24 Juli 1957 itu disebutnya sebagai *Kongres Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional*. (majalah Indonesia, Volume 4 No. 2 1958). Dalam surat Undangan yang ditandatangani oleh Anas Ma’ruf, Sekretaris I BMKN tanggal 1 Juli 1957 diberitahukan bahwa di samping rapat pleno anggota BMKN, akan diselenggarakan *Simposium Kebudayaan* dan *Pertunjukan Kesenian*.

Acara rapat anggota BMKN akan membahas berbagai hal tentang organisasi BMKN, termasuk pemilihan pengurus. Sementara itu, untuk acara Simposium Kebudayaan, topik perbincangan dan pemrasaran yang disepakati adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Arsitektur dengan Seni Rupa oleh Sjafei Sumardja (ASRI Bandung)
2. Penyelenggaraan Kesenian Semasyarakat (prasaran, oleh Trisno Sumardjo (BMKN Jakarta)
3. Kebudayaan dan Konstitusi, oleh M. Isa (PGRI Jakarta)

Di samping itu juga diselenggarakan acara Pertunjukan Kesenian yang ditampilkan oleh seniman-seniman Bali, diisi dengan kegiatan tari-tarian, serta pameran Seni Rupa dan Kerajinan Bali.

Adapun susunan acara pertemuan itu adalah sebagai berikut:

Sabtu, 20 Juli 1957

- Pk. 08.00 - 20.00 – Pendaftaran peserta
 - Pk. 08.00 - 10.00 – Rapat Pengurus BMKN dengan Panitia
 - Pk. 10.00 - 13.00 – Rapat Pengurus BMKN
 - Pk. 20.00 - 23.30 – Pembukaan oleh Ketua Kehormatan Panitia
 - Pidato Ketua BMKN
 - Sambutan Ketua DPRD
 - Sambutan Gubernur Nusa Tenggara
 - Sambutan Gubernur Militer
 - Sambutan Menteri PP dan K
 - Penyerahan Hadiah Sastra 1955/1956*)
 - Istirahat (Pertunjukan)
- *) a. Keterangan pihak BMKN
b. Pidato Ketua Juri
c. Penyerahan Hadiah

Minggu, 21 Juli 1957

- Pk. 09.00 - 12.00 – Rapat Pleno Simposium (I), Pembagian Seksi-seksi dan Pemilihan Ketua Seksi
- Pk. 14.00 - 17.00 – Rapat Pleno Anggota BMKN (I)
- Pk. 18.00 – Pembukaan Pameran seni Rupa dan Kerajinan Bali
- Pk. 20.00 - 23.00 – Rapat Seksi-seksi Simposium ke-1

Senin, 22 Juli 1957

- Pk. 09.00 - 12.00 – Rapat Seksi-seksi Simposium ke-2
- Pk. 14.00 - 17.00 – Rapat Pleno Anggota BMKN (II)
- Pk. 20.00 - 23.00 – Rapat Seksi-seksi Simposium ke-3

Selasa, 23 Juli 1957

- Pk. 09.00 - 12.00 – Rapat Seksi-seksi Simposium ke-4
- Pk. 14.00 - 17.00 – Rapat Pleno Anggota BMKN (III)
- Pk. 20.00 - 23.00 – Rapat Seksi-seksi Simposium ke-5

Rabu, 24 Juli 1957

- Pk. 09.00 – 12.00 – Rapat Pleno Anggota BMKN (IV)
- Pk. 14.00 – 17.00 – Rapat Pleno Simposium (II)
- Pk. 20.00 – 23.00 – Malam Perpisahan
 - Pengumuman kesimpulan-kesimpulan
 - Pertunjukan

Bagian yang amat menarik dari dua prasaran itu adalah tinjauan mengenai posisi kebudayaan dan pendidikan dalam UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 31 dan 32 UUD 1945, kedua bidang itu dinaungi oleh Bab XIII yang berjudul PENDI-DIKAN. Menurut pemrasaran, baik mengenai pemberian judul Bab maupun penempatan bidang kebudayaan dalam Bab itu tidak tepat. Oleh karena itu disarankan agar kebudayaan dibuatkan bab tersendiri, atau judul Bab XIII diganti menjadi BAB XIII KEBUDAYAAN. Kutipan secara lengkap pendapat itu adalah sebagai berikut:

“Sebaiknya kebudayaan diberi Bab tersendiri yang mendahului Bab tentang Pendidikan. Atau Pendidikan yang dimasukkan ke dalam Bab Kebudayaan, sebab dalam nisbahnya, pendidikan itu bersifat alat, yakni alat untuk menuju ke suatu tujuan, yakni kebudayaan yang tinggi” (Dewan Pendidikan PGRI, 1957: hal. 15)

B.4.2 Kesimpulan

Tentang kesimpulan KK 1957 secara lengkap belum ditemukan. Adapun kesimpulan dari prasaran yang berjudul Kebudayaan dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Antara kebudayaan dan pendidikan terdapat suatu interaksi yang erat. Artinya, kebudayaan dan pendidikan saling memberi akibat, dalam arti yang baik maupun yang buruk.
2. Pendidikan ialah pewarisan kebudayaan. Tetapi ia bersifat selektip terhadap unsur-unsur kebudayaan.
3. Usaha pewarisan kebudayaan itu melalui lembaga-lembaga yang sengaja diadakan oleh masyarakat (Kewajiban Belajar).
4. Usaha pembentukan Konstitusi harus berdasarkan pengertian dan paham tentang kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah pokok bangsa kita, juga dalam soal-soal kebudayaan dan pendidikan.
5. Dalam Konstitusi, istilah “kebudayaan” harus digunakan dengan arti yang jelas. Sebaiknya diadakan pembedaan antara Kebudayaan, Peradaban dan Kesenian.
6. Dewasa ini terdapat desintegrasi dalam kebudayaan. Usaha pembentukan Konstitusi dapat dianggap sebagai salah satu usaha yang utama untuk mewujudkan integrasi dalam kebudayaan.
7. Antara kebudayaan dan pendidikan terdapat pula suatu desintegrasi. Kebudayaan dan pendidikan saling hancur-menghancurkan, kebalikannya dari saling membangun.
8. Salah satu daripada sebab-sebabnya ialah masih berlakunya konsep “pendidikan yang harmonis” a la Belanda (hollands denken). Pendidikan yang harmonis bagi kita berarti perpaduan dan keselarasan antara watak, keterampilan dan pengetahuan.
9. Dalam Konstitusi hendaknya diterakan dasar-dasar pokok politik kebudayaan dan politik pendidikan, yang memperjuangkan dan menjamin keadaan-keadaan, syarat-syarat dan lingkungan yang sehat bagi suburnya pertumbuhan kebudayaan dan pendidikan nasional.
10. Kesenian harus dimeratakan ke dalam cara hidup bangsa kita, terutama melalui pendidikan di sekolah.
11. Masyarakat yang beradab dewasa ini, lebih-lebih masyarakat-masyarakat yang

membanggakan dirinya sebagai demokratis, menuntut dari setiap ang-gotanya agar memiliki suatu kejuruan. Oleh karena itu setiap sekolah di atas Sekolah Dasar (=SR) haruslah sekolah kejuruan (vak).

12. Pendidikan Nasional tidak hanya berarti pendidikan di sekolah oleh si Dewasa kepada si tak Dewasa. Pendidikan Nasional berarti suatu usaha, agar seluruh bangsa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ditrans-formasikan dan menjelma menjadi suatu totalitet manusia-manusia yang bekerja ke arah satu cita-cita. Dalam usaha itu teknik-teknik sosial memegang peranan yang vital.
13. Dewasa ini pendidikan di Indonesia dikuasai oleh pedagogik Belanda. Kenyataan ini menyebabkan a.l. terhambatnya proses pendemokratisan, suatu usaha yang memperkosakan watak gotong-royong bangsa kita yang memberi corak kepada kebudayaan kita.
14. Sebaiknya dalam Konstitusi disediakan Bab tersendiri bagi Kebudayaan dan Pendidikan.
15. Kebudayaan dan Pendidikan dalam Konstitusi tidak boleh dipisah-pisahkan, melainkan merupakan keseluruhan yang logis dan wajar.
16. Di dalam Konstitusi harus ditegaskan, bahwa kebudayaan hendaknya merata menjadi milik seluruh rakyat.
17. Di dalam Konstitusi, kebudayaan dan pendidikan harus diuraikan berdasarkan fungsinya bagi bangsa. Dasar-dasar dan tujuan-tujuannya harus diterangkan demikian jelasnya dan tegasnya, sehingga menjamin penurunan undang-undang organik yang konsekuen, yang dapat menjamin perubahan sistem pendidikan kolonial dewasa ini menjadi sistem pendidikan nasional dan menjamin suatu pelaksanaan politik kebudayaan yang tegas dan sehat. (Dewan Pendidikan PGRI, 1957: hal. 19)

Kongres ini mendapatkan perhatian cukup besar dari para budayawan, seniman dan cendekiawan meskipun harus menghadapi permasalahan transportasi menuju ke tempat kongres. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 150 orang peserta. Dalam lembaran 'Petunjuk' disampaikan catatan bagi para peserta yang mencerminkan betapa besarnya semangat mereka dalam membangun kebudayaan bangsanya. Meskipun mereka harus menempuh perjalanan jauh dengan alat transportasi yang masih sederhana, membayar sendiri biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi tetapi mereka tetap bersemangat untuk hadir. Hal seperti itu sangat berbeda dengan penyelenggaraan kongres, konferensi, seminar masa sekarang, yang biasanya segala biaya telah ditanggung oleh penyelenggara, dalam hal ini oleh pemerintah.

Dalam lembaran 'Petunjuk'itu terdapat catatan antara lain sebagai berikut:

1. Para peserta masing-masing membayar sendiri ongkos perjalanan dan penginapan dalam perjalanan.
2. Untuk para peserta dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin berangkat dalam rombongan akan diusahakan wagon tersendiri, ataupun dapat berangkat sendiri.
3. Yang datang dari luar Jawa dapat pergi sendiri-sendiri ke Denpasar ataupun berhubungan dengan Panitia Jakarta (alamat Sekretariat BMKN, Jalan Nusantara 28, Jakarta) atau dengan Panitia Surabaya (alamat: Kebudayaan Nasional Pancasila, Jl. Jenderal Sudirman 23, Surabaya)
4. Yang berangkat dari Jakarta supaya menyerahkan uang karcis kereta-api, ongkos

penyeberangan (*overvaart*) dan uang penginapan di Surabaya kepada Panitia Jakarta yang akan mengurus di tempat yang dituju.

5. Dianjurkan kepada segenap para peserta Pertemuan Kebudayaan membawa surat-surat keterangan seperti surat penduduk dll., yang diperlukan dalam perjalanan. Para anggota BMKN membawa kartu anggota dan surat mandat dari organisasi.

Untuk melengkapi gambaran tentang penggunaan biaya yang dipungut dari para peserta, dalam lembaran 'Petunjuk' itu juga disampaikan perincian ongkos perjalanan untuk peserta dari Jakarta:

- Jakarta-Surabaya (Gubeng) via Jogja kelas III - Rp. 91,-
- Penginapan di Surabaya (losmen dan makan) - Rp. 25,-
- Surabaya-Banyuwangi kelas III - Rp. 32,-
- Banyuwangi-Gilimanuk (penyeberangan) - Rp. 25,-
- Gilimanuk-Denpasar (auto-bus) - Rp. 20,-
- Jumlah - Rp. 193,-

Ongkos pulang-pergi menjadi : Rp. 400,-

Satu hal yang patut dicatat, dalam KK 1957 masalah perbedaan antara kelompok yang menganut faham humanisme realis (kiri) dengan kelompok humanisme universal (kanan) baru mulai memanas. Kelompok kiri dimotori oleh Lekra dan LKN sementara kelompok kanan dimotori oleh seniman dan budayawan Lesbumi dan kelompok netral. Menurut Ajip Rosidi yang ikut kongres bersama dengan Ramadhan KH menyatakan ada desas-desus Sitor Situmorang ingin menjadi Menteri Kebudayaan. Ketika itu Wiratmo Soekito menentang keras, menganggap Sitor tak layak padahal itu hanya isu (Majalah Tempo, 27 Oktober 2003).

B.5 Kongres Kebudayaan 1960

Setelah KK tahun 1957, BMKN kembali menyelenggarakan pertemuan kebudayaan yang diberi sebutan Kongres Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN), di Bandung pada bulan Juli 1960. Sama seperti halnya KK 1957, data lengkap tentang penyelenggaraan dan kesimpulan yang dihasilkan oleh KK 1960 belum dapat ditemukan.⁷ Sebagian data yang ditemukan di Pusat Dokumentasi HB Jassin antara lain menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan KK pada saat itu beban biaya kongres ditanggung oleh para peserta kongres. Sebagai bukti betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan KK di lampirkan kuitansi tanda pembayaran biaya kongres. Dari daftar nama-nama yang mengikuti kongres tercatat nama-nama dari etnis China, Arab maupun dari Barat. Dalam kongres ini diberikan Hadiah Sastra BMKN antara lain puisi Ramadhan KH mendapatkan hadiah sastra nasional Badan

7 Data yang ada di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin amat terbatas, sementara di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional belum ditemukan. Menurut salah seorang pengurus Balai Budaya Jakarta tempat BMKN berkantor, berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan BMKN hingga meletusnya peristiwa G30S/PKI tahun 1965 tidak ditemukan lagi (hilang/kebanjiran?).

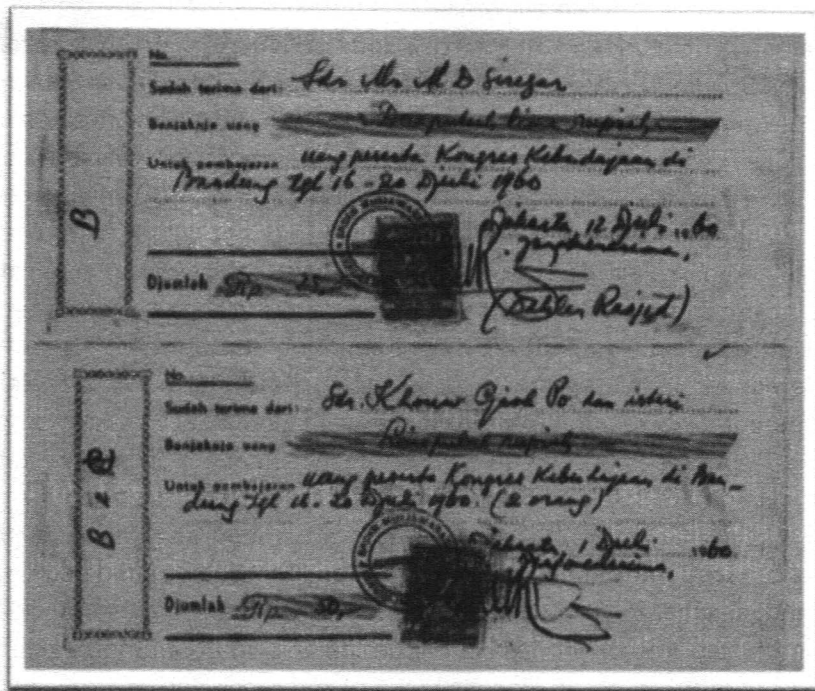
Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) 1956/1957.

Terbatasnya data hasil KK 1957 dan 1960 dibandingkan dengan kongres-kongres sebelumnya patut menjadi pertanyaan. Bahkan kedua kongres itu sempat luput dari daftar urutan dan jumlah KK yang pernah diselenggarakan sesudah Indonesia merdeka. Seperti dikatakan Ajip Rosidi kepada majalah Tempo: "*Masih ada dua kongres lagi setelah kemerdekaan yang menurut Ajip sering dilupakan orang yaitu tahun 1957 di Bali dan 1960 di Bandung*". Pernyataan Ajip yang diperkuat oleh Ramadhan KH dan Saini KM yang ikut hadir sebagai peserta (Ajip Rosidi dalam daftar peserta No. urut 4) menjadi jawaban perbincangan dalam KK 2003 di Bukittinggi yang mempersoalkan pertemuan kebudayaan di Bali 1957 dan Bandung 1960 apakah sebagai KK atau bukan. Kedua pertemuan kebudayaan itu pada hakikatnya merupakan Kongres Kebudayaan juga, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai KK.

Dari beberapa sumber menunjukkan bahwa kedua pertemuan kebudayaan itu memiliki nilai sejarah yang berbeda dengan kongres sebelumnya. Dalam KK 1960 ini pokok masalah yang diangkat adalah "*Fungsi Kebudayaan dalam Pembangunan Ekonomi*", yang meliputi peranan ilmu dan sarjana, peranan seni dan seniman, dan peranan pendidikan dan pendidik. Yang ditunjuk sebagai pemrasaran adalah Prof. Soediman Kartohadiprodjo, Drs. Sudjoko, dan Sarino Mangunpranoto. Jika dalam KK 1957 masalah perbedaan antara paham huma-nisme realis dan humanisme universal baru mulai memanas di antara dua kelompok peserta, dalam KK di Bandung meledak menjadi peristiwa yang cukup menghebohkan. Ketika itu para utusan Lekra dalam sidang mengajukan sebuah resolusi, yang intinya mendesak agar BMKN dalam kongresnya di Bandung itu menerima Manipol dan Usdek sebagai landasan kegiatan kerjanya di masa depan.

Sitor Situmorang yang ditunjuk sebagai salah seorang penyanggah utama prasaran Sudjoko di samping pelukis Baharudin MS menyatakan bahwa ia tidak melihat persoalan dalam prasarannya. Oleh karena itu ia minta ijin untuk membacakan nasakah yang telah disiapkan, dan juga minta agar diakui sebagai prasaran. Akhirnya, dengan didasari rasa toleran oleh ketua sidang Dr. Mudijono permintaan Sitor Situmorang diizinkan. Pelukis Baharudin MS dalam pan-dangannya selaku penyanggah prasaran Sitor Situmorang menyatakan bahwa "*prasaran yang tidak diminta, melainkan ditawarkan*" itu ia tidak melihat sebagai persoalan karena menurut pendapatnya sangat bersifat teori dan bermuka politik, sehingga sepantasnya di bahas di Jalan Asia-Afrika (gedung Depernas⁸ tempat Sitor Situmorang sebagai salah seorang anggota mewakili seniman) dan tidak di Jalan Surapati (Gedung Pertemuan Ilmu Alam Indonesia) tempat kongres berlangsung.

8 Singkatan dari Dewan Perancang Nasional.



Kuitansi pembayaran bagi peserta Kongres Kebudayaan 1960 di Bandung, disimpan rapi oleh HB Jassin. (Sumber: Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin)

Masalah yang membuat suasana kongres menjadi panas ketika sampai pada pembicaraan masalah Manifesto Politik yang bersumber pada Pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul *Penemuan Kembali Revolusi Kita*. Sesuai dengan TAP MPRS No. I/MPRS/1960, pidato tersebut dikukuhkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara. Manipol mengandung 5 unsur, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin; (5) Kepribadian Indonesia. Kelima prinsip itu disingkat menjadi USDEK.

Menurut penilaian Lekra, selama ini belum pernah BMKN secara jelas menyatakan setuju atau tidak setujunya terhadap Manipol/Usdek. Dalam sidang itu wakil-wakil dari Lekra (antara lain: Joebaar Ajoeb, Basuki Resobowo, Boejoeng Saleh, dan Rivai Apin) menyampaikan resolusi yang intinya minta agar BMKN dalam kongres ini menyatakan Manipol/Usdek sebagai landasan kegiatan kerjanya di masa depan. Sebagai buntut dari heboh itu terjadi peristiwa yang mengejutkan banyak peserta tatkala pada sidang pleno terakhir beredar “selebaran” stensilan berbentuk puisi. Isi selebaran itu merupakan usul resolusi lain mengenai Manipol/Usdek yang telah diajukan dalam sidang pleno. Puisi itu ditandatangani oleh lima orang penyair. Kelima penyair itu ialah Dodong Djwapradja, Ajip Rosidi, Ramadhan KH., Toto Sudarto Bachtiar, dan Saini KM. Ada satu kejadian yang patut dicatat mengenai sikap Gaos Hardjosoemantri (Ketua BMKN) terhadap kelompok Lekra di KK 1960 di Bandung yang dinilai oleh Ajip, Gaos memiliki sikap toleran. Dalam rapat untuk menentukan Tim Pengaruh (SC) kongres, Gaos bukannya mencegah masuknya orang Lekra, malahan memasukkan dua orang wakilnya, yaitu Rivai Apin dan Gajus Siagian ke dalam tim bersama Oesman Effendi, Asrul Sani, dan Ilen Soerjanegara.

Kongres ini dipandang sebagai sebuah kongres yang sarat dengan aroma politik sehingga DS Moeljanto dan Taufiq Ismail menyebutnya sebagai "*sekelumit peristiwa 'politik' yang mulai merembesi sektor kebudayaan, yang taktik dan strategi ofensifnya dilancarkan di tengah-tengah berlangsungnya Kongres BMKN*". (DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, 1995: hal. 34-35). Mungkin karena karena pertemuan itu lebih bernuansa politik maka tidak pernah disebut sebagai Kongres Kebudayaan. Tetapi sebagai sebuah "*peristiwa budaya*" kegiatan ini seharusnya patut dicatat sebagai bagian dari serangkaian Kongres Kebudayaan yang pernah terjadi di Republik ini.

Mendapatkan tuduhan semacam itu maka kelompok yang tidak sefaham dengan Lekra dan kawan-kawan memberikan perlawanan. Berkenaan dengan tuduhan miring itu, Badan Pekerja BMKN mengeluarkan "PERNYATAAN TENTANG BMKN DAN KONGRES KEBUDAYAAN 1960 DI BANDUNG," tanggal 13 Oktober 1960, No. 977/III/60. Pernyataan itu dikirim kemudian dikirim kepada PYM. Presiden RI, dan kopinya dikirim kepada Y.M. Menteri PP dan K (Arsip BMKN). Pernyataan sebanyak 4 halaman spasi rangkap itu pada hakikatnya merupakan bantahan atas tuduhan yang disampaikan oleh wakil Lekra dkk. Dalam bantahan ditekankan pada pada masalah fungsi BMKN, yaitu: (1) soal usaha-usaha yang dilakukan; dan (2) soal fungsi dalam kaitan dengan kepentingan ideologi pemerintah. Inti dari pernyataan itu adalah sebagai berikut:

1. bahwa BMKN sepanjang usianya telah menjalankan fungsinya sesuai dengan AD-ART, yaitu fungsi menggalang potensi nasional serta menyelesaikan revolusi; fungsi "*samenbundeling van krachten*" secara musyawarah atas dasar kemerdekaan bangsa yang diisi dengan nilai-nilai serta usaha-usaha kulturil; mencapai dukungan spontan yang bersemangat dan berdaya dari semua tenaga yang bergerak yang dilatarbelakangi oleh aliran-lairan tertentu atau tidak; dapat mempertahankan hidupnya sejak tahun 1948 hingga sekarang, dengan masih saja mendapat dukungan dari berbagai golongan dan perseorangan, yang jumlahnya makin meningkat.
2. bahwa LKI/BMKN tidak pernah menyimpang dari kepentingan nasional, dari soal memberi isi kemerdekaan, soal menyelesaikan revolusi dan soal menuruti Haluan Negara. Singkatnya, BMKN tidak menyimpang dari Pancasila, dan mendukung Usdek dan Manipol.
3. bahwa sesuai Pasal 2 AD BMKN, kegiatan-kegiatan BMKN berdasarkan pada azas kebebasan dan kerakyatan. Artinya, kebudayaan sewajarnya tumbuh dan berkembang dari bawah. Kegiatan kebudayaan terpimpin seperti yang dirumuskan oleh Presiden Sukarno pada hakikatnya tidak bertentangan dengan azas BMKN itu. Oleh karena jika ada anggapan seakan-akan kegiatan kebudayaan terpimpin akan mengandung implikasi bahwa kegiatan kebudayaan nasional harus didikte dari atas, maka salah anggapan itu sengaja dipergunakan untuk menunggangi BMKN, guna melaksanakan ideologi segolongan dan menenyapkan eksistensi golongan-golongan lain.
4. bahwa BMKN adalah organisasi dari Badan-badan dan perseorangan yang mempunyai kedaulatan. Dan meskipun dapat dimengerti bahwa tiap-tiap aliran ingin menyeret BMKN ke dalam orbit masing-masing, namun BMKN dalam sejarahnya telah menunjukkan bahwa satu-satunya jalan yang ditempuh ialah jalan permufakatan yang terdapat dalam sifat dan nama BMKN, yakni musyawarat.

Buntut dari tuduhan bahwa BMKN tidak secara jelas menyatakan setuju atau tidak setujunya terhadap Manipol/Usdek pada KK 1960 di Bandung, membuat kelompok ini berusaha meyakinkan bahwa tuduhan tidak benar. Tetapi penjelasan itu selalu mendapat penolakan dari pihak lawan. Tidak cukup dengan menge-luarkan "Pernyataan" pada bulan Mei 1961 kelompok ini menerbitkan Majalah Sastra, diketuai oleh HB. Jassin dan sebagai Redaktur penyelenggara DS. Moeljanto. Majalah sastra mengutamakan memuat cerpen, juga sajak, kritik dan esai. Melalui majalah ini dimuat tulisan tangkisan balik terhadap penolakan mereka.

Beberapa pengarang esai yang banyak menulis pada masa itu adalah Goenawan Mohamad, Arief Budiman (Soe Hok Djin) D.A Peransi, dan lain-lain. Juga dimuat beberapa esai yang ditulis Iwan Simatupang dan Wiratmo Soekito, Trisno Sumardjo, dll. Juga banyak menulis Boen S. Oemarjati, M.S Hutagalung, Virga Belan, Salim Said menulis kritik-kritiknya dalam majalah tersebut. Selain itu juga dimuat berbagai cerpen antara lain karya B. Soelarto, Bur Rasuanto, A. Bastari Asnin, Satyagraha Hoerip Soepraba, Kamal Hamzah, Ras Siregar, Sori Siregar, Gerson Poyk, B. Jass, dan lain-lain. Sedang para penyair antara lain: Isma Sawitri, Goenawan Mohamad, M. Saribi Afn, Poppy Hutagalung, Budiman S. Hartojo, Arifin C.Noer, Sapardi Djoko Danomo, dan lain-lain.

Tidak cukup dengan dikeluarkannya "Pernyataan" sebagai bantahan dan menulis esai dan kritik melalui majalah, kelompok ini pada tanggal 17 Agustus 1963 mengeluarkan "Manifesto Kebudayaan" sebagai pernyataan sikap seniman dan budayawan Indonesia tentang cita-cita kebudayaan dan politik nasional. Para penandatangan Manifes Kebudayaan (MK) menyuarakan bahwa kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia, tanpa mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain; dan bahwa Pancasila merupakan falsafah budaya mereka. MK disusun dan ditan-datangani sejumlah budayawan, pengarang dan pelukis Jakarta, antara lain H.B Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Goenawan Mohamad, Bokor Hutasuhut, Soe Hok Djin, dan lain-lain. Bunyi lengkap MK itu adalah sebagai berikut.

Manifes Kebudayaan

Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan mengumumkan sebuah manifes kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebuda-yaan nasional kami.

Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektoral kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan kebudayaan nasional kami berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengahnya masyarakat bangsa-bangsa.

*PANCASILA adalah falsafah kebudayaan kami.
Jakarta, 17 Agustus 1963*

Usaha kelompok humanis sosialis untuk mengalahkan lawannya tidak berhenti, dan bahkan dengan lahirnya MK itu tuduhan dan serangan semakin gencar. Polemik pun semakin melebar. Tanggal 8 Mei 1964, Bung Karno melarang Manifesto Kebudayaan dengan alasan:

"Karena manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pancaran Pancasila telah menjadi garis besar haluan Negara dan tidak mungkin didampingi dengan manifesto lain apalagi kalau manifesto lain itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap Revolusi dan memberi kesan berdiri di sampingnya".

Dengan adanya keputusan itu akhirnya pada tanggal 10 Mei 1964, atas nama para pendukung Manifes Kebudayaan (disingkat MK) Wiratmo Sukito, H.B. Jassin, dan Trisno Sumardjo, mengirim surat kawat ke Presiden Soekarno yang menyatakan "mematuhi larangan tersebut".

Selain akan mamatuhi larangan tersebut, atas nama para pendukung MK di seluruh Indonesia, tanggal 19 mei 1964 Wiratmo Soekito, H.B. Jassin, dan Trisno Sumardjo mengirim surat ke Presiden Soekarno yang isinya "memohon maaf PYM". Berkenaan dengan "permohonan maaf" itu, Wiratmo Soekito memberi penjelasan demikian,

"... kami minta maaf, karena telah terlambat memenuhi keinginan Pemimpin Besar Revolusi untuk mengubah Manifes, untuk membuat manifesto yang baru. Jadi, jelaslah, bahwa tujuan permintaan maaf itu bukannya untuk mengakhiri larangan Manifes". (Sumber: <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/1792>)

Setelah keluar keputusan larangan terhadap Manifes Kebudayaan majalah Sastra mengalami kemunduran. Demikian pula dengan keberadaan BMKN yang telah berhasil menyelenggarakan 3 kali KK, setelah KK 1960 aktivitasnya semakin berkurang. Menurut Ajip Rosidi pada tahun 1963, BMKN merencanakan akan menyelenggarakan KK lagi, tapi batal karena "ketegangan yang memuncak gara-gara Lekra ingin memaksakan Manipol". Kemelut yang dibalut kepentingan politik itu mungkin yang menyebabkan data hasil KK 1957 dan 1960 tidak maksimal dan sulit dilacak.

Keberadaan BMKN semakin surut meskipun setelah peristiwa pemberontakan G30S/PKI bulan September 1965 Lekra dan LKN ganti yang dilarang dan bubar. Peluang yang terbuka itu tidak membuat kelompok humanisme universal dan kelompok kanan serta BMKN bangkit. Sebaliknya BMKN semakin tenggelam, apalagi setelah ditambah lagi dengan meninggalnya Gaos Hardjasoemantri selaku ketua BMKN mengalami kecelakaan mobil pada awal 1965. BMKN sebagai lembaga sosial masyarakat dengan mendapat subsidi pemerintah telah menjadi sebuah model dalam pengurusan kebudayaan bangsa itu kini tinggal nama. Tampilnya Lembaga Kebudayaan Indonesia yang kemudian berganti menjadi BMKN tetap dicatat dan diingat dalam sejarah kebudayaan Indonesia karena hasil KK yang diselenggarakan telah menjadi landasan bagi penyusunan konsep, kebijakan dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 32 UUD 1945.

BAB IV

KONGRES KEBUDAYAAN MASA PEMBANGUNAN

Setelah meletus peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI), Indonesia memasuki babak sejarah baru. Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah mengembalikan keamanan dan membangun pemerintahan yang bersih dari paham komunis dan jargon-jargon politik seperti “*Politik adalah Panglima*,” dan “*Tujuan Menghalalkan Cara*”. Dominasi ideologi politik yang merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan termasuk ke dalam kehidupan berkebudayaan dan berkesenian mulai dikikis habis.

Dalam menghadapi perubahan seperti itu, kelompok budayawan, seniman dan cendekiawan yang tidak sependapat dengan paham tersebut berupaya mengembalikan kebudayaan dalam posisi netral, bebas dari pengaruh ideologi politik mana pun. Jika sebelum peristiwa G30S/PKI kelompok humanisme sosialis atau sosialisme komunis terus mengganyang kelompok humanisme universal, setelah itu keadaan menjadi berbalik arah. Kelompok humanisme universal didukung penuh oleh kelompok netral dan seluruh komponen bangsa, bersatu untuk mengubah pola-pikir (*mindset*) masyarakat untuk memerangi dan menolak kehadiran paham itu. Diusulkan Harimurti Kridalaksana pada saat itu agar, “*pemerintah melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan*” secara terencana dan secara nasional. (Sinar Harapan, 3/4/1968)

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan konsep, kebijakan dan strategi rehabilitasi kebudayaan itu secara optimal? Tampaknya tidak ada pertemuan melalui kongres atau konferensi kebudayaan untuk memperbincangkan masalah itu, padahal saat itu kita sedang mempersiapkan pelaksanaan program pembangunan nasional di segala bidang, termasuk kebudayaan. Dari pihak budayawan dan seniman menurut Ajip Rosidi, tahun 1963 sebenarnya sudah muncul usul agar diselenggarakan KK. Tetapi dalam situasi tegang dan panas dengan dibubarkannya Manifes Kebudayaan, BMKN tidak mampu merealisasikan usul tersebut. Pada tanggal 15 September 1968 bersamaan dengan peresmian pemugaran Balai Budaya Arief Budiman kembali mengingatkan dan mengusulkan agar BMKN segera menyelenggarakan Kongres

Kebudayaan. Tahun 1986 sejumlah budayawan dan seniman yang hadir dalam acara Temu Budaya di TIM (antara lain: Mochtar Kusumaatmaja, Sayidiman Suryohadiprojo, Sutan Takdir Alisyahbana, Rosihan Anwar, Prof. Sunario, Arief Budiman, EKM Masinambow, dll) menyimpulkan dan mendesak agar pemerintah mengambil inisiatif menyelenggarakan KK. Akhirnya, pada tahun 1991 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta kongres itu dapat terwujud. Ini berarti pembangunan bidang kebudayaan sudah berjalan selama 12 tahun. Yang menarik, dari perjalanan sejarah KK selama 95 tahun, pada periode “Masa Pembangunan” selama 30 tahun lebih hanya berlangsung kongres kebudayaan satu kali saja, yaitu tahun 1991.

A. TUNTUTAN MASYARAKAT

Kalau mengikuti AD-ART BMKN, Kongres Kebudayaan seharusnya diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Ini berarti setelah KK tahun 1960 di Bandung seharusnya tahun tahun 1963 kembali diselenggarakan kongres. Tetapi ternyata KK 1960 merupakan kongres terakhir yang diselenggarakan oleh BMKN. Kondisi BMKN setelah dilarangnya Manifes Kebudayaan oleh Presiden Soekarno menjadi mbuat Kevakuman itu dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak menyukai BMKN. Dalam sebuah “Catatan Kebudayaan” di harian Bintang Timur, Februari 1964 diturunkan tulisan yang bernada sinis dengan judul, *BMNK itu Apa?* Dalam catatan itu antara lain ditulis:

“Kongres terakhir BMKN adalah dalam bulan Juli 1960. Jadi sudah empat tahun, BMKN tidak berkongres. Tetapi siapa tahu, pada suatu hari yang baik, ada terniat bikin kongres, bisa saja bukan? Dan kita tunggulah siapa yang “merestui” kongres tersebut” (Harian Bintang Timur, Februari 1964).

Menurut keterangan Ajip Rosidi yang dikutip oleh Tempo, pada tahun 1963 BMKN sebenarnya telah merencanakan akan menyelenggarakan kongres lagi. Tetapi rencana itu batal karena “ketegangan yang memuncak gara-gara Lekra ingin memaksakan Manipol” (Tempo, 27 Oktober 2003). Keinginan kalangan budayawan dan seniman itu muncul lagi beberapa tahun kemudian. Pada acara peresmian purna pugar Balai Budaya atas bantuan Gubernur Ali Sadikin sebesar Rp. 1,3 juta, tanggal 15 September 1968, Arief Budiman mendesak agar BMKN menyelenggarakan suatu sidang pleno atau kongres untuk membahas aktivitas BMKN dan perkembangan kebudayaan bangsa (Harian Angkatan Bersenjata, 27/10/1968). Desakan itu juga belum mendapatkan tindak lanjut. Sepuluh tahun kemudian dalam sebuah artikel di harian Kompas Alfons Taryadi menulis bahwa ketika diselenggarakan acara *Debat tentang Seni dan Masyarakat* di TIM bulan April 1978 peserta menyatakan bahwa “kini sudah waktunya diselenggarakan suatu kongres untuk merumuskan suatu kebijaksanaan kebudayaan”. (Harian Kompas, 23/5/1978).

Sementara itu pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan mengambil inisiatif mengajak berbagai pihak untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan lagi. Ide itu mendapatkan sambutan dari kalangan budayawan, seniman dan cendekiawan. Dalam acara memperingati “50 tahun Polemik Kebudayaan tahun 1936”, yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di TIM tanggal 18-20

Maret 1986 Rosihan Anwar, Muchtar Lubis dan HB Jassin sependapat dan menyambut baik niat pemerintah mengadakan Kongres Kebudayaan. Bahkan menurut Muchtar niat itu sudah terlambat, karena kongres yang terakhir berkisar 20 tahun lalu. Sementara itu HB Jassin memuji kepekaan pemerintah pusat terhadap kegelisahan yang tengah terjadi di kalangan masyarakat dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengadakan kongres (Harian Pelita, 5/4/1986).

Masih dalam tahun 1986, pada saat diselenggarakan acara *Temu Budaya* di Teater Tertutup Taman Ismail Mazuki, dukungan terhadap rencana diselenggarakannya KK datang dari banyak seniman dan budayawan. Acara yang berlangsung selama 3 hari yakni mulai tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 1986 itu disebutkan sengaja digelar dalam rangka menyongsong Kongres Kebudayaan Nasional, di samping untuk menyongsong datangnya Abad 21 (Majalah Pandji Masyarakat, No. 520,1/11/1986: hal. 76). Hadir dalam *Temu Budaya* di TIM saat itu antara lain: Mochtar Kusumaatmaja, Sayidiman Suryohadiprojo, Sutan Takdir Alisyahbana, Rosihan Anwar, Prof. Sunario, Arief Budiman, EKM Masinambow, Emha Ainun Nadjib, Hotma Siahaan, Nurcholis Madjid, Satjipto Rahardjo, T. Mulia Lubis, Asrul Sani, Sudjoko, Umar Kayam, Dorodjatun Kuncoro Yakti, Emil Salim, Fachry Ali, dan Kartini Syahrir.

Dengan banyaknya dukungan itu dapat disimpulkan bahwa masalah penyelenggaraan KK dapat saja dilakukan oleh pemerintah. Tidak harus oleh lembaga kebudayaan di masyarakat seperti halnya kongres-kongres sebelumnya. Dalam kenyataan ketika inisiatif penyelenggaraan KK datang dari lembaga kebudayaan di masyarakat, pemerintah juga ikut terlibat di dalamnya. Sebaliknya, ketika inisiatif penyelenggaraan KK itu dari pihak pemerintah, segala persiapan dan pelaksanaannya tidak meninggalkan budayawan dan seniman serta keberadaan lembaga kebudayaan di masyarakat.



Kain rentang acara *Temu Budayaan 86* di TIM Jakarta. Di kain rentang itu tampak tulisan "Menjelang Kongres Kebudayaan Nasional". Kata-kata itu menunjukkan bahwa para budayawan, seniman dan cendekiawan menghendaki adanya kongres kebudayaan.

B. KONGRES KEBUDAYAAN 1991

B.1 Persiapan

Kongres Kebudayaan tahun 1991 sebagai Kongres Kebudayaan VI (urutan versi baru) diselenggarakan setelah hampir 31 tahun lamanya setelah Kongres Kebudayaan V tahun 1960. Suatu jarak waktu yang cukup panjang bila dibandingkan dengan penyelenggaraan kongres-kongres kebudayaan sebelumnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya yang perlu dicari jawabannya, sementara di dalam jarak waktu 31 tahun itu banyak permasalahan kebudayaan yang seharusnya dibahas dalam forum kongres. Kongres diselenggarakan pada 29 Oktober hingga 3 November 1991 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, dengan menggunakan berbagai anjungan untuk sidang kelompok. Sidang pleno diselenggarakan di Sasono Langenbudhoyo.

Suasana sistem politik pemerintahan pada saat itu dinilai sangat represif dan sentralistik, sehingga meskipun pada awalnya (1986) ide itu mendapatkan dukungan dari kalangan budayawan, seniman dan cendekiawan, tetapi ketika KK itu dilaksanakan (lima tahun kemudian) keadaan menjadi berbalik. Meskipun pemerintah telah berupaya agar kongres itu tidak memberikan kesan didominasi oleh birokrat saja dengan cara banyak melibatkan budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat yang bukan birokrat, tetapi tetap saja muncul berbagai komentar bernada sumbang dari kalangan sebagian masyarakat. Muncul istilah-istilah yang bernada sinis seperti: *kongresnya baju Korpri, kongresnya baju safari, kongresnya pejabat pemerintah, kongres birokrasi, keputusan kongres sudah siap sebelum kongres dibuka*, dan lain-lain. Suara-suara itu menjadi masukan yang amat berguna bagi Panitia Pengarah. Oleh karena itu Panitia berupaya agar materi yang diperdebatkan sesuai dengan aspirasi mereka secara total dan bebas serta perdebatan dalam persidangan dapat berlangsung secara bebas. Materi kongres dijangar dari seluruh daerah sebagai pemilik kebudayaan.

Penjaringan masukan dari daerah dilakukan melalui berbagai acara "Temu Budaya Daerah" dan "Dialog Budaya" di beberapa wilayah (region). Sementara itu di tingkat Pusat diselenggarakan "Forum Kebudayaan" yang dihadiri oleh para tokoh budayawan, seniman, cendekiawan dan pemangku adat yang memiliki pengaruh luas terhadap perkembangan kebudayaan bangsa. Hasil dari penjaringan masukan itu dibahas bersama dalam acara "Pra-kongres Kebudayaan 1991", pada bulan April 1991, 6 bulan sebelum kongres dilaksanakan. Prakongres diselenggarakan di Perpustakaan Nasional Jakarta, dihadiri oleh semua Panitia Pengarah, beberapa budayawan, seniman dan pemangku adat dari Pusat maupun daerah. Dalam acara inilah dibahas dan disepakati topik-topik makalah, pemakalah dan peserta kongres serta hal-hal lain yang bersifat teknis penyelenggaraan kongres.

Gambaran tentang persiapan, pelaksanaan dan hasil kongres adalah sebagai berikut.

- 1) Tema Kongres Kebudayaan 1991 ada-lah: KEBUDAYAAN KITA, KEMARIN, KINI DAN ESOK.
- 2) Logo: berbentuk lima lembar daun yang bergerak menyatu di ujungnya yang menggam-barkan dinamika lima dasar falsafah bangsa untuk membangun



persatuan bangsa. Di bagian tepi tertulis kata-kata 'KEBUDAYAAN KITA, KEMARIN, KINI DAN ESOK' yang mengand-ung arti bahwa dalam sepanjang sejarah hidup bangsa tidak terlepas dari permasalahan kebudayaan kita kemarin, kini dan yang akan datang.

3) Waktu dan tempat Kongres.

Waktu penyelenggaraan Kongres Kebudayaan adalah tanggal 29 Oktober sampai dengan 3 November 1991. Pemilihan tanggal dan bulan tersebut dimak-sudkan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1991. Mengenai tempat penyelenggaraan kongres diusulkan beberapa tempat, yaitu:

- Alternatif Lokasi: diusulkan beberapa tempat, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Ujung Pandang, Medan. Akhirnya disepakati kongres diselenggarakan di Jakarta.
- Alternatif Tempat: Hotel Horison, Hotel Indonesia dan Wisata, serta TMII. Akhirnya diputuskan tempat penyeleng-garaan Kongres Kebudayaan IV di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

4) Pokok Bahasan

Pokok Bahasan dikelompokkan menjadi 5 dan masing-masing ditentukan topiknya, yaitu:

- a) Warisan Budaya: Penyaringan dan Pengembangan, 5 Topik:
 - (1) Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Budaya.
 - (2) Kebudayaan Daerah dalam Kehidupan Masyarakat Pendukungnya.
 - (3) Pelestarian dan Pengembangan Kesenian serta Kerajinan Tradisional.
 - (4) Aturan-aturan Adat Berkenaan dengan Kekuasaan dan Pemilikan.
 - (5) Warisan Budaya Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan.
 - (1) Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional.
 - (2) Arah Perkembangan Kebudayaan Nasional.
 - (3) Kesusastraan Indonesia dalam Kebudayaan Nasional.
 - (4) Media Massa dan Kebudayaan Nasional.
 - (5) Kebudayaan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional.
 - (6) Keterkaitan Antara Kebudayaan dan Pembangunan Nasional.
- c) Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional.
 - (1) Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional.
 - (2) Peranan Seniman dalam Masyarakat.
 - (3) Daya Cipta Ilmu dan Teknologi dalam pertumbuhan Kebudayaan di Indonesia.
 - (4) Daya Cipta Budaya dan Media Massa.
 - (5) Generasi Muda dan daya Cipta Budaya.
 - (6) Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesusasteraan Daerah dan Nasional.
- d) Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat.

- (1) Kebudayaan dan Ekonomi.
 - (2) Kebudayaan dan Ilmu dan Teknologi.
 - (3) Kebudayaan dan Sosial, Politik dan Hukum.
 - (4) Kebudayaan dan Pertahanan dan Keamanan.
 - (5) Kebudayaan dan Wanita.
 - (6) Kebudayaan dan Olah Raga.
 - (7) Kebudayaan dan Lingkungan Alam.
- e) Kebudayaan Nasional dan Dunia (Umat Manusia).
- (1) Kebudayaan Asing dan Kebudayaan di Indonesia.
 - (2) Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri.
 - (3) Pariwisata dan Kebudayaan di Indonesia.
 - (4) Kerja sama Kebudayaan Antarneegara.
 - (5) Penerjemahan Karya-karya Asing di Indonesia.
- 5) Persidangan
- a) Persidangan dipimpin oleh Pemandu (Moderator) didampingi oleh seorang atau 2 orang notulis. Pemandu harus memperhatikan waktu dan tidak terlalu banyak memberikan komentar. Sidang dibagi atas: (1) Sidang Pleno; (2) Sidang Kelompok; dan (3) Sidang Tim Perumus
 - b) Sidang Pleno I, pembukaan kongres
 - c) Sidang Pleno II

Setelah pembukaan disampaikan Sambutan/Laporan tentang penyelenggaraan program Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan 1987-1997 (*The World Decade for Cultural Development 1987-1997*), yakni oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Supardjo Rustam, selaku Ketua Panitia Nasional Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan (DASABUD). Program ini dicanangkan oleh UNESCO berlaku mulai tahun 1987-1997 dan sebagai anggota PBB Indonesia telah ikut menyelenggarakan program ini.
 - d) Sidang Pleno III

Setelah Sambutan/Laporan Ketua Panitia Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan, dilanjutkan dengan sidang Pleno III, menampilkan Makalah Utama dari Prof. Dr. Sutan Takdir Alisjahbana, Prof. Dr. Umar Kayam, Nirwan Dewanto, dan Barnabas Suebu.
 - e) Sidang kelompok

Pembagian peserta pada sidang kelompok dilakukan secara kompromi antara masing-masing peserta dengan Panitia guna menghindari terjadinya 'penumpukan' jumlah peserta sidang pada kelompok tertentu dan kekurangan pada sidang kelompok yang lain. Sidang Kelompok dibagi menjadi 5 Kelompok:

 - (1) Kelompok I: Warisan Budaya: Penyaringan dan Peme-liharaan, diketuai oleh AA Navis, Wakil Ketua Dr. Nico L Kana, sekretaris Ny. Koen Mulyono. Tempat sidang di Anjungan Maluku TMII, membahas 19 makalah. Kelompok I dipecah menjadi 2 sub yaitu: (1) Subkelompok I; (2) Subkelompok II.
 - (2) Kelompok II: Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan, diketuai oleh H.

- Sutanto Wiryoprasanto, Wakil Ketua Dr. Muchtar Naim, sekretaris Dr. Riris K. Sarumpaet. Tempat sidang di Istana Anak-anak TMII, membahas 25 makalah.
- (3) Kelompok III: Daya Cipta dan Perkembangan Kebudayaan diketuai oleh Dra. Titi Said, Wakil Ketua Shofwan Karim MA, sekretaris Drs. Rusdi Saleh. Tempat sidang di Anjungan Sumatera Barat, membahas 17 makalah.
 - (4) Kelompok IV: Kebudayaan dan sektor-sektor Masyarakat, diketuai oleh Dr. Harry Chan Silalahi, Wakil Ketua Dr. Fachrurrozie Syarkawi, sekretaris Dra. Mince D. Rumbiak. Tempat sidang di Anjungan Lampung, membahas 14 makalah.
 - (5) Kelompok V: Kebudayaan Indonesia dan Dunia (Umat Manusia), diketuai oleh Prof. Dr. Daulat P. Tampubolon, Wakil Ketua Dr. Sal Murgianto, sekretaris Irid Rachman Agus SS, MA. Tempat sidang di Istana Anak-anak TMII, membahas 12 makalah.
- f) Sidang Tim Perumus, terdiri dari beberapa anggota Panitia Pengarah, para Ketua Kelompok dan Sekretaris dan beberapa tokoh dan pemakalah.
- g) Sidang Pleno IV, dipimpin oleh H. Budihardjo, didampingi para Ketua Kelompok, dengan acara pembacaan rumusan hasil Kongres Kebudayaan 1991. Untuk membacakan hasil kongres ditunjuk aktris terkenal Christine Hakim.
- 6) Pembukaan dan Penutupan

Kongres dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden, Soedharmono, SH, serta dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat dan agama. Dalam pidato Pembukaan kongres, Presiden menyinggung masalah peranan kebudayaan, pembangunan yang bermatra kebudayaan. Antara lain Presiden mengatakan: *"Kita menyadari benar, pentingnya makna kebudayaan, terutama untuk memperkuat jatidiri kita sebagai bangsa"*. Sementara itu mengenai hubungan kebudayaan dan pembangunan mengatakan sebagai berikut:

"MPR yang merupakan pengejawantahan rakyat Indonesia juga telah menggariskan dalam GBHN 1988, bahwa: 'Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cita, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya".

Selanjutnya pada bagian lain Presiden menyatakan: *"Pembangunan jelas memerlukan matra kebudayaan. Menyertakan matra kebudayaan dalam segenap upaya pembangunan itu harus kita serasikan dengan kemajuan yang kita capai dalam bidang-bidang pembangunan lainnya"*. Sementara itu, dalam pidato Penutupan Wakil Presiden, Sudharmono, SH juga menekankan lagi tentang hal itu dengan menyatakan:

"Sebagai satuan budaya kita harus siap menghadapi perubahan zaman dengan segala konsekuensinya, dan kesiapan itu hendaknya dibangun melalui

ikhtiar sadar dalam pembangunan nasional yang bertahap dan berkelanjutan. Setiap tahap pembangunan adalah landasan bagi aktualisasi tahap berikutnya, dan pada setiap tahap harus kita hindarkan terjadinya kesenjangan – apalagi keterasingan – terhadap budaya kita sebagai pengukuh identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Maka apa yang kini menjadi perumusan dalam GBHN 1988, yaitu bahwa ‘pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya’ sesungguhnya merupakan pesan yang semestinya berlaku bukan sementara ini saja, melainkan kelanjutan upaya pembangunan nasional di masa depan. Terlebih lagi mengingat bahwa kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia merupakan amanat konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkannya”.

Sungguh sangat disayangkan, pendapat Wakil Presiden RI bahwa rumusan dalam GBHN 1988 tentang “pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya seharusnya berlaku sepanjang masa”, itu justru tidak mendapatkan perhatian dari pihak MPR dan DPR-RI yang menyusun GBHN untuk tahapan pembangunan selanjutnya. Rumusan isi kalimat yang amat penting dan mendasar itu justru hilang sama sekali dari GBHN 1993, 1998 dan 1999-2004. Oleh karena itu forum seperti Kongres Kebudayaan perlu digunakan seoptimal mungkin untuk mengangkat kembali konsep “pembangunan berwawasan budaya” itu, sebagai keputusan penting yang harus diperhatikan oleh para pengambil keputusan di tingkat tinggi, dan dapat ditetapkan sebagai garis kebijakan dan acuan utama dalam melaksanakan pembangunan nasional selanjutnya. Tidak hanya sekedar dijadikan “slogan” tetapi benar-benar diterapkan dalam praktek pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

7) Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) dan Penyelenggara (Organizing Committee/OC)

a) Panitia Pengarah (SC):

- (1) Prof. Dr. Fuad Hassan, Ketua
- (2) Drs. GBPH Poeger, Wakil Ketua
- (3) Prof. Dr. S. Budi Santoso, Sekretaris
- (4) Prof. Dr. Umar Kayam, Anggota
- (5) Barnabas Suebu, SH, Anggota
- (6) Dr. Nurcholih Majid, Anggota
- (7) H. Budiardjo, Anggota
- (8) AA. Navis, Anggota
- (9) Jakob Utama, Anggota
- (10) Prof. Dr. Mattulada, Anggota
- (11) Prof. Dr. Harsja Bachtiar, Anggota
- (12) Goenawan Mohamad, Anggota
- (13) Ki Suratman, Anggota
- (14) Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, Anggota
- (15) Prof. Ali Hasjmy, Anggota
- (16) Ny. RA Tahir, Anggota
- (17) Abdurrachman Wahid, Anggota

- b) Panitia Penyelenggara (OC):
- (1) Ketua Panitia : Prof. Dr. S. Budhisantoso
 - (2) Ketua I : Drs. Bastomi Ervan
 - (3) Ketua II : Drs. F.X. Soetopo Cokrohamijoyo
 - (4) Sekretaris I : Drs. Nunus Supardi
 - (5) Sekretaris II : Drs. Ahmad Yunus

Dalam susunan Panitia Penyelenggara dilengkapi dengan Bidang: Sekretariat, Keuangan, Logistik, Informasi, Teknis, serta Pergelaran Kesenian, dan Pameran Kebudayaan.

B.1.2 Rumusan Hasil Kongres

Kutipan Rumusan Hasil Kongres Kebudayaan 1991 secara lengkap adalah sebagai berikut:

Rumusan Hasil Kongres Kebudayaan 1991

Kongres Kebudayaan 1991, menurut penilaian semua pihak, diselenggarakan pada waktu yang tepat. Dikatakan demikian karena dewasa ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai perubahan, baik yang terjadi sebagai akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar. Ini menuntut penyegaran jati diri.

Jati diri bangsa Indonesia dibangun dari pengalaman sejarah dan kerangka acuan nasional yang tercermin dalam dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu secara historis dan ideologis terbuka dan berketuhanan Yang Maha Esa.

Jati diri yang terbuka itu sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang pada gilirannya dapat diubah menjadi kesempatan untuk membangun bangsa yang maju, modern, demokratis, dan tangguh keбудayaannya.

Keterbukaan sangat diperlukan untuk membangkitkan kreativitas, prakarsa, swakarsa, dan partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian hal itu juga akan memperbesar tanggung jawab sosial. Melalui keterbukaan itu pula Kedaulatan Rakyat, yang menjadi prinsip utama Undang-Undang Dasar 1945, harus semakin dapat diwujudkan.

Kebudayaan Indonesia harus sanggup membangun bangsa Indonesia yang tangguh, tegar, disiplin, dan ulet agar ilmu pengetahuan dan teknologi modern dapat direbut dan dikuasai. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan sanggup bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.

Dalam kebudayaan Indonesia nilai dan rasa keadilan sangat mempengaruhi semangat hidup bersama. Oleh karena itu, nilai dan rasa keadilan itu harus diwujudkan dalam segala kehidupan dengan jalan menegakkan azas negara hukum serta mendayagunakan perangkat-perangkat pelaksanaan dan pengawasannya.

Tantangan pembangunan dan perubahan yang kita hadapi itu menuntut agar kita memiliki kebudayaan yang berorientasi ke hari esok. Sehubungan dengan hal itu, bahasa Indonesia sebagai wahana salah satu pokok kebudayaan harus digunakan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia dalam segala perwujudannya seperti yang terungkap dalam Kongres Kebudayaan 1991, menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab itu hendaknya dapat terwujud dalam peningkatan peran serta masyarakat guna memajukan kebudayaan bangsa melalui berbagai cara dan wahana yang tersedia, sebagai-mana tercantum di dalam hasil kongres sebagai berikut.

Pembicaraan kongres melalui lima kelompok yang diselenggarakan secara bersama-sama menghasilkan pemikiran-pemikiran pokok sebagai berikut:

1. Tentang Warisan Budaya: Penyaringan dan Pemeliharaan

1.1. Pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya nasional dan budaya daerah, yang harus ditanggapi lebih sebagai daya kemampuan yang dapat dimanfaatkan dari pada ancaman yang merugikan harus dilakukan tanpa harus bertahan pada nilai-nilai dan aturan-aturan tradisional yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan negara kita.

1.2. Peranan kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat pendukungnya harus tetap dihargai dan dilestarikan tetapi dengan cara pengembangan kebiasaan para pendukungnya demi persatuan bangsa, mewujudkan peri-laku yang berpedoman pada kebudayaan nasional dalam hubungan antar-golongan yang berbeda kebudayaan.

1.3. Pelestarian kegiatan-kegiatan, barang-barang kesenian dan kerajinan serta peninggalan sejarah harus diusahakan melalui pembangunan prasarana, sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berkenaan dengan cagar budaya; serta pengembangan kebiasaan untuk bekerja dengan teliti sesuai dengan tuntutan tradisi budaya yang bersangkutan. Pengembangan kegiatan-kegiatan, dan barang-barang kesenian dan kerajinan harus diusahakan melalui penciptaan keadaan yang memungkinkan terwujudnya bentuk baru yang baik dan dapat diterima sebagai bentuk-bentuk kebudayaan yang wajar.

1.4. Aturan-aturan adat berkenaan dengan kekuasaan dan pemilihan perlu disesuaikan dengan tuntutan modern tetapi dengan tetap memperhatikan manfaat yang terkait pada aturan-aturan adat yang berkenaan dengan rasa keadilan anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.

1.5. Warisan budaya agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu ditafsirkan secara rasional dengan tetap berdasarkan ajaran yang diamanatkan dalam kitab suci agama yang bersangkutan agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang berusaha menjadi masyarakat yang lebih modern dengan tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa.

2. Tentang Kebudayaan Nasional: Kini dan Masa Depan

2.1. Kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional harus ditanggapi sebagai dua jenis kebudayaan dengan ciri-ciri khas masing-masing tetapi diharapkan saling mendukung sehingga manusia Indonesia di masa depan memperoleh kepribadian terutama dari kebudayaan daerah asal masing-masing dan juga memperoleh kepribadian sebagai manusia modern terutama dari kebudayaan nasional.

2.2. Perkembangan kebudayaan nasional harus diarahkan pada tujuan nasional, yaitu masyarakat yang dalam kenyataan sepenuhnya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia yang berbudaya, bebas

dari kebodohan dan kemiskinan dan semua jenis tindakan yang menurunkan martabat seseorang sebagai manusia, seperti penghinaan dan penindasan.

2.3. Kesusastraan Indonesia yang seharusnya merupakan bagian yang amat penting dari kebudayaan nasional, harus dikaji dan diperjelas demi memudahkan usaha mengatasi kelemahan yang kini mewujudkan kemiskinan kritik sastra, serta kandasnya majalah sastra dan ruang sastra di surat kabar.

2.4. Media massa harus dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk menyebarluaskan kebudayaan nasional, yang harus dibedakan dari kebudayaan daerah, di kalangan penduduk di wilayah negara kita. Unsur-unsur kebudayaan daerah tertentu dapat juga diperkenalkan di daerah-daerah lain dengan penggunaan media massa asal saja penduduk di daerah-daerah lain ini tidak menanggapi penyiaran yang bersangkutan sebagai paksaan terhadap mereka.

2.5. Karena kebudayaan suatu bangsa sangat menentukan sifat-sifat kepribadian anggota-anggota bangsa yang bersangkutan, maka pendidikan merupakan suatu jenis upaya yang ampuh dalam membentuk kepribadian. Untuk itu perlu diusahakan saling keterikatan yang lebih erat antara kebudayaan nasional, termasuk nilai-nilai yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta penjabaran sistem pendidikan nasional.

3. Tentang Daya Cipta dan Perkembangan Kebudayaan

3.1. Daya cipta para seniman, baik yang menghasilkan karya-karya seni yang bernilai budaya tinggi maupun yang menghasilkan barang-barang yang digunakan sehari-hari yang dapat memenuhi kebutuhan akan rasa indah, perlu senantiasa dirangsang dan dibantu perkembangannya agar menghasilkan pertumbuhan kesenian daerah dan nasional yang berlangsung terus-menerus dan semakin tinggi nilai keindahannya.

3.2. Para seniman harus memiliki keleluasaan untuk menghasilkan karya kebudayaan yang bernilai atas dasar keindahan yang diwujudkan dan bukan hanya atas dasar komersial.

3.3. Dalam masyarakat modern ilmu pengetahuan dan teknologi menempati bagian yang semakin besar dan penting dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, oleh sebab itu daya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu senantiasa dipupuk dalam pertumbuhan kebudayaan di Indonesia.

3.4. Daya cipta budaya perlu sebanyak mungkin memanfaatkan media massa, yang diharapkan dikelola dengan penuh kesadaran sosial dan tanggung jawab moral untuk menyebarluaskan unsur-unsur baru kebudayaan nasional dan untuk mengurangi kesenjangan antara kebudayaan elite dan kebudayaan rakyat.

3.4. Kemampuan generasi muda untuk menghasilkan bentuk-bentuk karya yang baru sebagai sumbangan generasi yang bersangkutan pada perkembangan kebudayaan harus dipupuk dan dibina, yang dimulai sedini mungkin.

3.5. Daya cipta dan pertumbuhan kesusastraan daerah dan nasional harus dikembangkan dengan membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukungnya, seperti penyunting, penerbit, percetakan, toko buku dan perpustakaan, serta minat dan kemampuan para anggota masyarakat untuk menjadi pembaca.

4. Tentang Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat

4.1. Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan

kegiatan ekonomi harus dapat menghasilkan suatu keadaan yang memungkinkan semua golongan dalam masyarakat kita dapat mencari nafkah dengan penghasilan yang layak serta dapat merangsang anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka sebesar-besarnya tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial masing-masing.

4.2. Kebudayaan yang kita kembangkan harus merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan tetap memperhatikan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, masyarakat setempat, bangsa dan negara.

4.3. Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan politik harus senantiasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya tidak semata-mata dise-lenggarakan dengan menggunakan bahasa perundang-undangan melainkan juga menggunakan pendekatan kebudayaan.

4.4. Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang tumbuh dari pengalaman dalam masa revolusi nasional dan upaya menegakkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Republik kita, harus dikembangkan lebih lanjut agar sesuai dengan tuntutan masalah-masalah yang akan dihadapi di masa depan dan yang akan jauh lebih sulit diatasi daripada tuntutan masalah-masalah yang dihadapi di masa lampau.

4.5. Kebudayaan yang dijadikan acuan oleh penduduk di kepulauan kita yang amat luas dalam menentukan hak dan kewajiban antara pria dan wanita harus mengandung azas persamaan derajat yang terutama terwujud sebagai kemitraan antara suami dan istri, dua manusia yang sama-sama bermartabat.

4.6. Kebudayaan penduduk di tanah air kita harus kembali mendorong para pendukungnya untuk menanggapi lingkungan alam, tidak hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan melainkan juga sebagai ciptaan Tuhan yang harus dikelola secara bijaksana ke arah pelestarian dan pemantapan kearifan serta ketangguhan kebudayaan bangsa.

5. *Tentang Kebudayaan Indonesia dan Dunia (Umat Manusia)*

5.1. Kontak-kontak budaya antarbangsa telah meningkat di masa kini dan akan semakin meningkat lagi di masa depan sebagai proses globalisasi. Sikap saling menghargai antarbudaya dan kerjasama kebudayaan perlu ditingkatkan.

5.2. Pengembangan kebudayaan di luar negeri perlu ditingkatkan dengan berbagai cara dengan memperhatikan tiga taraf perolehan budaya: pengenalan, pemahaman, serta penghayatan dan pengamalan. Pengadaan pusat informasi budaya, misi kebudayaan, program pertukaran, pengajaran bahasa Indonesia dan pemanfaatan media massa adalah di antara cara-cara yang dapat digunakan.

5.3. Pariwisata diharapkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, namun dalam usaha pariwisata, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional harus selalu diperhatikan. Dalam menghindari dampak negatif pariwisata, masyarakat perlu diikutsertakan, di samping diadakannya peraturan-peraturan pemerintah yang mantap. Demikian pula masyarakat berpendapatan rendah dan kelestarian lingkungan perlu selalu mendapat perhatian.

5.4. Usaha-usaha penerjemahan berbagai karya tulis bermutu perlu sungguh-sungguh ditingkatkan, baik dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Usaha-usaha penerjemahan dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta (Laporan Kongres Kebudayaan 1991: hal. 20-26).

B.1.3 Beberapa Catatan Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 1991

Sebagai langkah evaluasi dari keseluruhan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 1991 telah ditugasi Dr. Andre Hardjana untuk merangkum berbagai tanggapan masyarakat dan media massa yang disampaikan sebelum, sedang dan sesudah kongres. Beberapa hal penting yang dapat dicatat dari catatan Andre Hardjana (16 halaman) adalah sbb.:

- 1) Kongres Kebudayaan 1991 merupakan "peristiwa kebudayaan terbesar se-panjang tahun" yaitu tahun 1991;
- 2) Kongres telah memperoleh tanggapan pers yang luar biasa dari semua jenis penerbitan pers, semua jenis surat kabar harian, dan semua penerbitan pers ibu-kota maupun daerah secara luas, merata dan teratur;
- 3) Pencetusan gagasan dan inisiatif penyelenggaraan KK 1991 itu sendiri disambut sebagai "ide dan langkah yang tepat", meskipun "agak terlambat".
- 4) Ide penyelenggaraan KK 1991 telah berhasil memikat perhatian pers, melibatkan berbagai tokoh dan ahli kebudayaan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Depdikbud dan berhasil menggerakkan partisipasi dan pemikiran masyarakat luas;
- 5) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinilai telah menunjukkan kembali kesungguhan minatnya pada masalah kebudayaan, meskipun semula dikawatirkan akan menjadi sebuah "forum kedinasan", "rapat dinas", "pertemuan rekayasa birokrasi Depdikbud", "materi sudah disiapkan sebelum kongres ditutup", "didominasi oleh para birokrat" dsb. tetapi kesemuanya itu tidak terjadi;
- 6) Ada sementara pihak yang merasa tidak puas (Rendra dan Mochtar Lubis) dengan hasil kongres karena "rumusan hasilnya yang kurang menggigit", dan "pembicaraan kebudayaan yang kehilangan konteks dominasi politik", rumusan yang kurang efektif sebagai suatu "public policy".
- 7) Beberapa tokoh seniman dan budayawan Jawa Timur menyatakan "Kongres Kebudayaan Terkesan Pincang", dan menghendaki suatu kongres yang elitis terbatas pada mereka yang betul-betul kompeten, dan kurang setuju kongres menjadi forum tukar pendapat dari berbagai tingkatan sosial dan aneka macam latar belakang.
- 8) Yang masih menjadi pergunjangan di kalangan para seniman dan budayawan adalah masalah belum tampaknya sebuah "cultural policy", yang sudah lama ditunggu-tunggu.
- 9) Di balik rumusannya yang "datar", KK 1991 sesungguhnya telah menyuarakan kepentingan-kepentingan yang terabaikan, yaitu: demokratisasi, debirokratisasi dan desentralisasi, keterbukaan dan keadilan.
- 10) Oleh beberapa surat kabar diingatkan agar "operasionalisasi" keputusan kongres tidak semata-mata menjadi tanggung jawab budayawan, seniman atau pejabat, melainkan tanggung jawab semua pihak dan segenap anggota masyarakat.

- 11) Di samping berbagai catatan penting tentang KK 1991 di atas, menjelang dan selama kongres berlangsung ternyata muncul kelompok-kelompok lain yang memberikan reaksi yang berbeda:
- 12) 'Simposium Islam', 'Kelompok Bandung', 'Kelompok Surabaya', bahkan organisasi politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), menyelenggarakan diskusi sendiri dan mengeluarkan pernyataan budaya.
- 13) Berlangsungnya 'Kongres Tandingan' di Ujung Pandang (sekarang Ma-kassar). Yang menarik dari 'Kongres Tandingan' ini adalah berupa desakan yang kuat agar segera dibentuk **Kementerian Negara Urusan Kebudayaan**, dan merubah nama Departemen Pendidikan menjadi **Departemen Pendidikan dan Pengajaran**.
- 14) Senat Mahasiswa Universitas Gajah Mada mengeluarkan pernyataan tentang "Sikap Budaya Kaum Muda", yang berisi 7 butir dan salah satu di antaranya adalah "partisipasi masyarakat dalam membangun kebudayaan Indonesia menuntut secara aktif setiap pribadi untuk memikirkan dan merencanakan arah kebudayaan yang mampu memberikan alternatif baru pada pola-pola kebudayaan yang sudah ada". Ketujuh butir pernyataan tersebut disam-paikan oleh dua orang wakil sebagai peserta kongres.
- 15) Komentar lain yang menarik setelah kongres berlangsung adalah permintaan dari beberapa tokoh yang pernah terlibat dalam Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) yang menginginkan dibentuknya sebuah badan independen semacam BMKN.

Ada beberapa bagian penting lain yang tidak tertuang dalam rumusan hasil kongres tetapi menjadi bahan diskusi dan di antaranya dirumuskan sebagai hasil sidang kelompok, yang patut menjadi perhatian kita bersama, karena memiliki bobot yang penting bagi usaha pengembangan kebudayaan. Bahkan di antaranya sudah berkali-kali dibicarakan orang tetapi belum ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata. Beberapa isu yang penting itu antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam sidang-sidang kelompok disuarakan kembali tentang usul agar dibentuk Departemen Kebudayaan terpisah dengan Departemen Pendidikan (Kelompok II:7, 8), Menteri Muda Kebudayaan (Kelompok II:8), Departemen Kebudayaan dan Pendidikan (Kelompok II:8), dan diusulkan pula agar tidak perlu dilakukan pemecahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kelompok II:10).
- b. Diusulkan agar anggaran Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan dinaikkan menjadi 25% dari APBN (Kelompok II:8).
- c. Kebudayaan tidak perlu Undang-undang karena kebudayaan adalah suatu proses (Kelompok II:7)
- d. Perlu segera didirikan atau diprakarsai oleh Pemerintah adanya Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan lokal di setiap provinsi (Kelompok I)
- e. Perlu dibentuknya Lembaga Budaya Nasional sebuah lembaga kebudayaan independen yang akan menjadi penampung aspirasi kebudayaan nasional (Kelompok II)
- f. Untuk itu perlu dibentuk semacam Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau sejenisnya (Kelompok III)
- g. Perlu dibentuk Pusat Informasi Budaya di dalam dan di luar negeri (Kelompok V)

- h. Pembuatan film dengan latar belakang etnis agar diperbanyak (Kelompok II:13)
- i. Pariwisata pada tahun 1995 diharapkan dapat menduduki peringkat No. 1 dalam mengumpulkan devisa (Kelompok V:3)
- j. Peserta dalam sidang kelompok mengusulkan agar KK dapat diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan paling lambat sepuluh tahun sekali, jangan terlalu lama jaraknya seperti KK tahun 1954 ke 1991 (Kelompok II:10).
- k. Disampaikan oleh peserta dalam sidang kelompok agar setelah kongres selesai dapat diselenggarakan kongres-kongres lain dari aspek kebudayaan seperti kesenian, kesejarahan, kebudayaan daerah, dan bahasa daerah, kecuali untuk bahasa dan sastra Indonesia yang selama ini secara rutin telah berlangsung kongres lima tahun sekali.

Setelah hampir 31 tahun (setelah KK tahun 1960) tidak diselenggarakan kongres, perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 1991, tergolong luar biasa. Minat untuk menjadi peserta, pemakalah, maupun sebagai undangan, amat besar. Pemberitaan melalui media cetak dan elektronik sebelum kongres dilaksanakan telah berperan besar dalam mensosialisasikan kongres. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, dapat diketahui jumlah pemakalah dan peserta serta daerah asalnya.

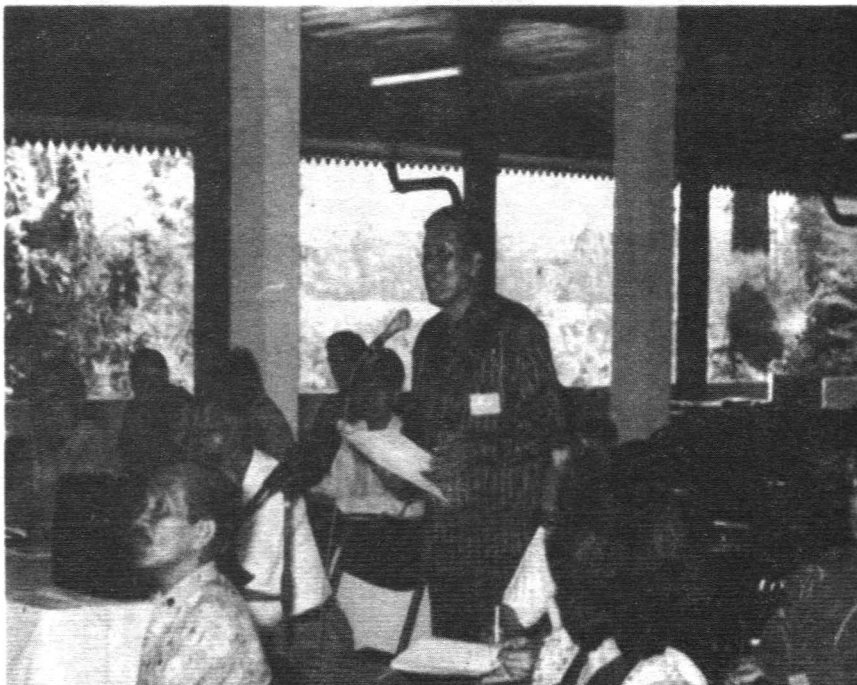
Dari paparan di atas menunjukkan bahwa selama Masa Pembangunan mulai tahun 1969 sampai dengan berakhirnya tahun 1998 sebagai akhir pemerintahan Orde Baru hanya berlangsung satu kali KK saja. Hal ini menjadi pertanyaan banyak orang, karena pada masa itu bidang bahasa sejak Kongres Bahasa Indonesia tahun 1978 dapat menyelenggarakan kongres setiap lima tahun sekali, yaitu disambung dengan kongres tahun 1983, 1988, 1993, 1998, dst.



Prof. Dr. S. Boedisantoso (Ketua Panitia Penyelenggara) sedang memandu sidang Kongres Kebudayaan tanggal 28 Oktober s.d.3 November 1991 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.



Salah seorang peserta Kongres Kebudayaan 1991 (Sagimun MD, almarhun) menyampaikan pendapatnya, antara lain mengusulkan agar dibentuk Departemen Kebudayaan.



Suasana sidang Kelompok pada Kongres Kebudayaan tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1991 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

BAB V

KONGRES KEBUDAYAAN MASA REFORMASI

Memasuki tahun 1998 (10 Maret) Presiden Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan didampingi Wakil Presiden BJ. Habibie. Kembali tampilnya Soeharto yang ketujuh kalinya itu dibarengi dengan terjadinya krisis ekonomi. Krisis itu yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto semakin besar. Pengumuman susunan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII pada tanggal 14 Maret 1998 membuat suasana politik semakin memanas. Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai kota berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik.

Setelah tekanan itu memuncak dengan terjadinya tragedi Trisakti dan penjarahan dan pembakaran toko terjadi di beberapa kota, pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden RI. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 itu dapat dikatakan sebagai tanda berakhirnya masa Orde Baru, untuk kemudian digantikan oleh "Era Reformasi". Sebagai konsekuensi dari penerapan "era bentuk baru" itu telah terjadi berbagai perubahan kebijakan di segala bidang: ekonomi, politik, sosial, budaya, sistem pertahanan dan keamanan.

Setelah Soeharto mundur digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Beberapa langkah perubahan bentuk (reform) diambil oleh Habibie, seperti pemberian kebebasan dalam berpendapat, berkreasi, menulis, keterbukaan informasi, liberalisasi partai politik (demokrasi), desentralisasi pemerintahan dan pencabutan UU yang bertentangan dengan kebijakan baru tersebut seperti UU tentang Kebebasan Berpendapat dan UU tentang Subversi. Dengan diberlakukannya kebijakan baru tersebut tentu saja mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan bangsa. Berbagai perubahan itu datang ibarat air bah yang datang dengan tiba-tiba sehingga tidak sempat dipikirkan secara konseptual bagaimana agar air itu mengalir dan menuju arah yang telah ditentukan dan membuat perubahan itu membawa kesejahteraan masyarakat. Perubahan yang multifaset itu menyebabkan terjadinya "keterkejutan budaya" di masyarakat. Berbagai perubahan yang sangat mendasar dan berpengaruh besar terhadap perkembangan bangsa dan kebudayaan bangsa itu tidak diawali atau dibarengi dengan pembahasan

tentang konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan yang serius.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan KK di Era Reformasi mulai tahun 1998 hingga 2013 baru diselenggarakan 2 kali KK, yaitu tahun 2003 dan 2008. Keinginan untuk menyelenggarakan KK tahun 1996 (5 tahun sekali) sesuai dengan usul yang berkembang dalam perbincangan sidang pada KK 1991 kurang mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Pada tahun 2000, penulis yang saat itu menjadi salah satu Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan usul berikut dengan Kerangka Acuan (*Term of Reference*) kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Drs. I Gde Ardika agar segera diselenggarakan KK lagi. Dasar pertimbangannya di samping telah melampaui batas waktu yang disepakati dalam kongres 1991, juga didorong oleh adanya berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan bangsa yang dapat dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan bangsa. Berbagai perubahan dan perkembangan itu antara lain:

- Katup kehidupan politik pemerintahan yang tertutup menjadi terbuka (demokratis) dan dari keterbukaan itu telah terjadi berbagai perubahan budaya dengan cepat dan menyebar ke seluruh wilayah.
- Perubahan sistem pemerintahan dari bersifat sentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik (otonomi daerah).
- Tata pergaulan antarbangsa dan antarbudaya yang makin bebas dan terbuka (globalisasi) yang tidak dapat dielakkan lagi.
- Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia belum dapat diatasi berujung pada krisis budaya.

Usul tersebut ditanggapi dengan serius dan selanjutnya dilakukan rapat-rapat persiapan. KK berikutnya diselenggarakan tahun 2008 di Bogor. Ini berarti KK 2008 diselenggarakan setelah 5 tahun setelah KK 2003. Gambaran secara singkat dari penyelenggaraan kedua kongres berikut dengan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut.

A. KONGRES KEBUDAYAAN 2003

KK 2003 berlangsung setelah 12 tahun KK tahun 1991. Pada KK 1991 banyak peserta yang mengusulkan agar KK berikutnya dapat diselenggarakan setiap lima tahun sekali, seperti halnya Kongres Bahasa Indonesia. Tahun 2001 penulis menyampaikan usul kepada Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata agar segera diselenggarakan KK karena beberapa alasan. *Pertama*, waktu vakum penyelenggaraan KK sudah cukup lama, sepuluh tahun lebih. *Kedua*, telah terjadi perubahan sosial politik pemerintahan yang sangat mendasar, sehingga melalui KK dapat disusun konsep, kebijakan dan strategi baru dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke sistem desentralistik, berlakunya sistem demokrasi dan keterbukaan, membawa pengaruh besar terhadap sistem nilai budaya bangsa. *Ketiga*, perubahan tata hubungan antarbangsa dan antarbudaya yang semakin mengglobal membawa pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan bangsa.

Tidak berapa lama Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Drs. I Gde Ardika menginstruksikan agar dilakukan persiapan penyelenggaraan kongres, dan kongres dilaksanakan tahun 2003 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Lima tahun kemudian, tahun

2008 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir. Jero Wacik SE, menyelenggarakan kongres berikutnya, tahun 2008 di Bogor. Kongres ini sekaligus memerongati 100 tahun Gerakan Kebangkitan Nasional dan 90 tahun Kongres Kebudayaan. Gambaran tentang persiapan dan pelaksanaan kongres adalah sebagai berikut.

A.1 Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan oleh Menteri dalam menyiapkan kongres adalah mengundang sejumlah budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Setelah pertemuan tersebut dilakukan persiapan dengan melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Membentuk Panitia Pengarah (*Steering Committee*) setelah mendengar pendapat dan saran dari berbagai seniman, budayawan, cendekiawan, pemangku adat dan tokoh masyarakat; (2) Menyelenggarakan Temu Budaya Daerah; (3) Menyelenggarakan Temu Budaya Regional; dan (4) Menyelenggarakan Prakongres Kebudayaan 2003. Tujuan dari dilaksanakannya Temu Budaya Daerah dan Regional adalah untuk menjaring permasalahan kebudayaan yang berkembang di masing-masing lingkungan suku bangsa (*prinsip bottom up*), sementara Prakongres bertujuan mematangkan tema, judul makalah dan pemakalah.

Panitia Pengarah

Pembentukan Panitia Pengarah ditetapkan dengan Surat Keputusan No. KM.12b/OT.001/MKP/2002 tanggal 21 Juli 2002 tentang Pembentukan Panitia Pengarah Kongres Kebudayaan. Tugas dari Panitia Pengarah adalah: “*menga-rahkan hal-hal yang berhubungan dengan substansi kongres, meliputi: (1) arah dan tujuan; (2) topik dan pemakalah; (3) merumuskan hasil kongres; (4) menyampaikan laporan hasil kongres*”. Nama-nama Panitia Pengarah kongres adalah sebagai berikut.

Tabel 1
PANITIA PENGARAH KONGRES KEBUDAYAAN 2003

No.	Nama	Jabatan dlm Kepanitiaan	Jabatan/Instansi
1	2	3	4
	Jusuf Kalla	Pelindung	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
	I Gde Ardika	Pelindung	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
	Setyanto P Santosa	Pelindung	Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
	Prof. Dr. Fuad Hassan	Penasihat	Guru Besar UI

	Prof. Dr. Edi Sedyawati	Penasihat	Guru Besar UI
	Prof. Dr. AD. Pirous	Penasihat	Galeri Serambi Pirous Bandung
	Rahman Arge	Penasihat	Budayawan
	Prof. Dr. Toeti Heraty Roosseno	Ketua	Guru Besar UI
	Dr. Ignas Kleden	Ketua	Pusat Indonesia Timur
	Ridwan Saidi	Ketua	Dewan Pakar Kebudayaan Betawi
	Putu Wijaya	Ketua	Seniman
	Drs. Junus Satrio Atmodjo, M.Hum	Sekretaris	Kepala Dit. Purbakala dan Permus.
	Prof. Dr. Taufik Abdullah	Anggota	Ketua MSI
	Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA	Anggota	Rektor IAIN Jakarta
	Dr. Taufiq Ismail	Anggota	Budayawan
	Prof. K.M.A.M. Usop, MA	Anggota	Dosen Univ. Palangkaraya
	Dr. JR. Mansoben, MA	Anggota	Ketua Lembaga Penelitian Papua Univ. Cendrawasih
	Dr. Thom Therik	Anggota	Dosen Univ. Artha Wacana
	Fachri Ali, MA	Anggota	Direktur Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI)
	Dr. Mudji Sutrisno	Anggota	Tokoh Agama
	Taufik Rahzen	Anggota	Generasi Muda
	Garin Nugroho	Anggota	Tokoh Film
	Drs. Nunun Supardi	Anggota	Sekretaris Utama Badan Pengemb. Kebudayaan dan Pariwisata

	Dr. IGN. Anom	Anggota	Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya
	Dr. Sri Hastanto	Anggota	Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film
	Dr. Anhar Gonggong	Anggota	Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengarah telah menghasilkan rumusan bagian-bagian penting dari kongres, yaitu mengenai tujuan, tema, logo, tempat dan waktu pelaksanaan kongres. Selanjutnya dalam rangka menjangkau masukan dari bawah (*bottom up*) untuk menjadi bahan penyusunan topik makalah dan pemakalah, Panitia Pengarah memutuskan agar didahului dengan Temu Budaya Daerah, Temu Budaya Regional dan sebuah pertemuan finalisasi bahan dalam bentuk Prakongres.

Tujuan dan Sasaran Kongres

Tujuan dari KK 2003 adalah:

1. menampung persepsi, aspirasi, partisipasi, minat dan perhatian masyarakat luas terhadap penentuan kebijakan public;
2. memberikan kesempatan kepada budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adapt, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah untuk berdialog, tukar menukar pengalaman, menggali dan merumuskan pemikiran dan upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa;
3. menghimpun bahan masukan untuk dipakai sebagai bahan penyempurnaan konsep, kebijakan dan strategi dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sbb.:

1. terselenggarakan Kongres Kebudayaan secara lancar dan mencapai hasil optimal;
2. tersusunnya hasil rumusan Kongres Kebudayaan 2003;
3. terkomunikasikannya kongres dan bahan konsep, kebijakan dan strategi tentang arah dan tujuan pembangunan kebudayaan nasional Indonesia kepada seluruh pelaku kebudayaan.

Tema

Tema yang disepakati oleh Tim Pengarah Kongres Kebudayaan 2003 adalah: **“KONSEP, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI KEBUDAYAAN INDONESIA”**.

Konsep Kebudayaan Indonesia, adalah gagasan tentang pemahaman dasar kebudayaan Indonesia yang bersifat majemuk (*pluralisme*). Pemahaman dasar tentang kebudayaan Indonesia menampilkan gagasan tentang keragaman nilai dan tradisi lokal yang telah terlibat dalam dinamika daerah yang panjang. Sumber nasionalisme dan berdirinya negara nasional menimbulkan hasrat dan aspirasi akan terwujudnya

kebudayaan yang menjadi milik bersama dan kebudayaan bersama yang mungkin bisa dibuat sebagai “kebudayaan nasional Indonesia” ini terlibat dalam proses dialog tanpa henti dengan keragaman kebudayaan lokal dan gejala globalisasi yang semakin deras. Dalam proses dialog ini pengertian tentang konsep kebudayaan Indonesia tidak bersifat statis, tetapi dinamis.

Kebijakan Kebudayaan Indonesia, adalah rangka konsep dan asas yang menjadi garis besar suatu negara untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Dalam UUD 1945 secara eksplisit dikatakan bahwa negara berkewajiban untuk memajukan “kebudayaan nasional”. Karena kebudayaan tidak lepas dari masalah nilai dan masyarakat, kebijakan kebudayaan harus berhadapan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan negara dan masyarakat. Masalah ini bertambah bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai macam masalah etika kehidupan berbangsa, konflik sosial, penetrasi nilai budaya asing, dan harapan yang semakin meningkat. Selanjutnya kebijakan kebudayaan akan menentukan langkah kongkrit yang harus diambil (*action plan*).

Strategi Kebudayaan Indonesia, adalah perencanaan dasar untuk mencapai tujuan normatif yang telah ditetapkan. Strategi kebudayaan adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik, seperti gejala disintegrasi sosial yang mengancam disintegrasi bangsa, masalah KKN (yang telah melenyapkan nilai-nilai “malu” dan “salah”) dan sebagainya. Di samping itu adanya kesadaran baru yang merupakan keharusan yang mendesak, seperti pemberdayaan gender, pemupukan *civil society* (masyarakat madani) dan lain sebagainya.

Waktu dan Tempat Kongres

Waktu penyelenggaraan kongres disepakati tanggal 20-23 Oktober 2003 di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Logo

Bentuk logo KK 2003 yang disepakati adalah melambangkan seekor burung yang sedang terbang dengan tulisan ‘Kongres Kebudayaan.2003’. Tampak dalam logo sebagai latar belakang angka Romawi V yang dimaksudkan kongres urutan ke-5. Di sini terjadi kerancuan urutan KK. Kalau pada masa kemerdekaan awal telah diselenggarakan KK 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, kemudian disambung KK masa pembangunan tahun 1991, maka KK tahun 2003 seharusnya KK yang ke-7 dan bukan ke-5.



A.2 Temu Budaya Daerah

Persiapan pemilihan pokok masalah

1. Temu Budaya Daerah

Acara ini diselenggarakan dalam bentuk diskusi tentang permasalahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di lingkungan budaya daerah masing-masing. Temu Budaya diikuti oleh para budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat, tokoh masyarakat dan pejabat. Temu Budaya Daerah yang diselenggarakan selama bulan Juni – September 2002 berlangsung di 25 kota, yaitu: Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Mataram, Kendari, Kupang, Bengkulu, Manado, Bukittinggi, Pontianak, Denpasar, Ambon, Ternate, Medan, Batam, Jambi, Semarang, Palembang, Makassar, Palu, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, dan Jayapura.

2) Temu Budaya Regional

Pengertian regional lebih dititikberatkan pada wilayah berkembangnya kebudayaan suku bangsa yang memiliki ikatan yang dekat. Misalnya wilayah kebudayaan Melayu di wilayah Sumatera, kebudayaan Jawa di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Temu Budaya Regional hanya dapat diselenggarakan di 3 tempat, yaitu di Padang, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Manado pada bulan Oktober 2002.

Hasil lengkap Temu Budaya Regional adalah sebagai berikut.

a) Di Padang, Sumatera Barat, tanggal 22-23 Oktober 2002

Judul makalah-makalah yang dibahas dan pemakalah adalah:

- Peran Laki-laki Dan Wanita Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Budaya Lokal/Setempat - Drs. Junaidi T. Noor, MM (Jambi)
- Selintas Tentang Pengelolaan Aset-aset Kebudayaan Sejak Otonomi Daerah - Drs. H. Yuzamri Yakub, M.Pd (Riau)
- Strategi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah Dalam Dialog Budaya I Sumatera - Drs. H. Asrien Noerdin (Sumbar)
- Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya Sebagai Aset Pariwisata - Drs. Alcala Zamora (Bengkulu)
- Dinamika Sosial Dalam Kemajemukan Budaya (Kasus Persaingan Budaya Etnis Batak Toba dengan Budaya Etnis-etnis Lainnya di Sumatera Utara) – Dr. Ichwan Azhari, MA (Sumut)
- Fungsi Pranata Sosial Dalam Pengendalian Konflik dan Kekerasan di Nanggroe Aceh Darussalam – Drs. Aslam Nur, MA (Aceh)
- Identitas Budaya: Aku dalam Budaya Lokal, Nasional, dan Global - Drs. Yudhi Syarafah (Sumsel).
- Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi Menghadapi Globalisasi - S.M. Taufik Thaib, SH (Sumbar).

Setelah diperbincangkan rumusan hasilnya adalah sebagai berikut:

- Kebudayaan selamanya merupakan langkah strategis pembangunan bangsa. Alasannya, belum ada suatu usaha yang teruji untuk mengakomodasi budaya lokal di tingkat nasional, sehingga ternyata perjalanan bangsa sampai kini masih menuju pada kondisi yang memprihatinkan secara budaya. Contohnya, konflik yang menggunakan atau memanipulasi simbol-simbol budaya. Padahal tujuan akhir dari pengembangan kebudayaan pada hakikatnya adalah peradaban. Sebagai bangsa yang beradab (*civilized society*) Indonesia sangat perlu menempatkan kebudayaan sebagai konsepsi dan sekaligus strategi. Kelembagaan formal dan informal dalam masyarakat bertanggungjawab kepada keutuhan masyarakat. Pendukung kebudayaan menjadi titik sentral bagaimana proses pengembangan kebudayaan berlangsung secara kelembagaan (*instituted process*).
- Problem kebudayaan dewasa ini antara lain adalah terjadinya penafsiran budaya yang keliru. Ini artinya terjadi miskomunikasi budaya antargenerasi. Padahal, sebagai sistem gagasan yang terdiri dari nilai-nilai, norma dan aturan, kebudayaan harus dilihat dalam tiga aspek, masing-masing proses pembelajaran, konteks dan pelaku pendukung kebudayaan. Ketiga aspek ini dapat menentukan seberapa besar dan kuat peran kebudayaan dalam membangun kehidupan lebih baik. Revitalisasi kebudayaan merupakan proses logis dari bagaimana kebudayaan berperan dalam pembangunan.
- Selanjutnya, globalisasi merupakan konteks bagi kebudayaan untuk beraktualisasi. Problemmnya adalah, globalisasi sering mengubah eksistensi kebudayaan dari berbagai etnik, sementara pada tingkat global terjadi desakralisasi kebudayaan akibat faktor materialisme, teknologi, dan ekonomi.
- Hal itu memberikan petunjuk (*clues*) bagi penting atau tidaknya kebudayaan direinterpretasi atau direposisi. Substansi masalahnya adalah eksistensi kebudayaan harus menjadi strategi, tujuan dan sekaligus idealisme.
- Soalnya adalah konflik sosial sering terjadi karena semakin longgarnya fungsi nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Ini berarti eksistensi masyarakat merupakan konsekuensi logis dari eksistensi kebudayaan, sebaliknya.
- Isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya menjadi sentral, karena proses superior dan inferior, dominasi dan subordinasi kelompok etnik yang berbeda di perkotaan. Konsekuensi logis dari permasalahan ini adalah konflik sosial, horizontal baik laten maupun manifes. Kondisi ini akan menjadi potensi negatif bagi eksistensi kebudayaan di tingkat nasional.
- Isu lain yang penting adalah multikulturalisme. Dalam konteks multikultural, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antarkelompok etnis yang berbeda. Dengan ini, pengembangan hubungan sosial yang dinamik merupakan strategi dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri dari nilai-nilai lokal kelompok etnis. Dalam hal ini, fungsi pranata sosial, pranata agama, dan politik menjadi krusial dan proses multikulturalisme tidak perlu menjadi medium bagi terciptanya kembali konflik horizontal.
- Isu pelestarian nilai-nilai budaya sangat bergantung kepada potensi individual sebagai pendukung/pelaku kebudayaan. Semakin kondusif potensi individual maka semakin berkelanjutan eksistensi kebudayaan (*cultural sustainability*).

Kebudayaan bukan suatu entitas abstrak tanpa pijakan, tetapi sangat berpijak pada kondisi pendukungnya. Oleh karena itu, strategi untuk menganalisis kebudayaan dari paradigma pelaku kebudayaan menjadi sangat penting diaplikasikan.

- Isu pengembangan budaya termasuk penting dalam proses revitalisasi budaya. Strateginya adalah lembaga formal dan nonformal harus berperan dan menjadi tonggak dalam proses tersebut. Problemnya adalah bagaimana dan siapa yang mendudukkan pertanggungjawaban tentang keberhasilan atau kegagalan pengembangan budaya dengan strategi tersebut? Karenanya, kita masih memerlukan kajian budaya yang komprehensif dari berbagai aspek dan/oleh berbagai kalangan.
- Berdasarkan poin-poin di atas terlihat bahwa problem kebudayaan menyangkut berbagai aspek, pelaku, dimensi dan wilayah budaya yang sangat beragam. Hal ini merefleksikan bahwa proses perkembangan budaya semakin kompleks. Solusinya adalah kita perlu melakukan refleksi diri tentang di mana posisi kebudayaan dalam kehidupan dan bagaimana kebudayaan diinternalisasikan dalam setiap segi kehidupan. Secara empirik peran pendukung budaya sangat penting diberi kesadaran tentang problem-problem kebudayaan yang kompleks tersebut. Secara kelembagaan, oleh karena itu hal mendasar ini perlu ditindaklanjuti dengan kongres kebudayaan nasional.

b) Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 23-24 Oktober 2002

Judul makalah-makalah yang dibahas dan pemakalah adalah:

- Fungsi Pranata Sosial dalam Pengendalian Konflik dan Kekerasan - Prof. Dr. Sulaeman Mamar, MA (Sulawesi Tengah)
- Pelestarian, Perubahan dan Pemberdayaan Budaya Sebagai Perekat dan Memperkokoh Jati Diri Bangsa - Drs. H. Amir Hamzah Idar (Kalimantan Timur).
- Pengelolaan Aset-aset Kebudayaan Sejak Otonomi Daerah - H. Syarif Saleh Assegaf (Kalimantan Barat)
- Peranan Laki-laki dan Perempuan dalam Mengambil Keputusan/Kebijakan - Muhammad Asy'ari (Kalimantan Selatan)
- Dinamika Sosial dalam Kemajemukan Budaya - Drs. Adi Suryadi Sofyan, MA (Kalimantan Barat)
- Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi dalam Menghadapi Globalisasi - Drs. Suhardin, M.Si (Sulawesi Tenggara)
- Identitas Budaya: Aku dalam Budaya Lokal, Nasional, dan Global - Prof. KMA Usof, MA (Kalimantan Tengah)
- Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya - Dr. Mahmud Tang (Sulawesi Selatan)
- Hukum dan Produktivitas: Upaya Perlindungan terhadap Pelaku dan Hasil Karyanya - (Kalimantan Timur)
- Strategi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah - Drs. H. Kasim Abdurrahman, MA (Kalimantan Selatan)

Setelah diperbincangkan rumusan hasilnya dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut:

Bagian Umum

- Masalah-masalah kebudayaan di regional III (Kalimantan dan Sulawesi) dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) kebudayaan dan identitas etnik, (2) pelestarian dan pengembangan, (3) pengembangan kebudayaan nasional, dan (4) integritas nasional. Keempat masalah tersebut terjalin sedemikian rupa menjadi suatu permasalahan budaya yang kompleks.
- Kebijakan pengembangan kebudayaan nasional, baik sebaik khazanah budaya nusantara maupun sebagai aset pariwisata perlu mencakup batasan dan ketentuan mengenai: (1) kedudukan dan fungsi kebudayaan nasional maupun sebagai identitas etnik, (2) kedudukan dan fungsi kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional sesuai dengan penjelasan pasal 32 UUD 1945, serta konsep, politik, dan strategi pengembangan dan pelestariannya, dan (3) kedudukan dan fungsi kebudayaan daerah sebagai khazanah keragaman budaya nasional.
- Konsep pengembangan kebudayaan perlu dilengkapi dengan rencana dan kebijakan strategis dengan sasaran yang jelas, realistis, dan benar-benar dapat dicapai.
- Untuk mereposisi persoalan-persoalan kebudayaan dalam menangkul disintegarsi bangsa, maka perlu pelaksanaan kebijakan pengembangan kebudayaan nasional yang betul-betul memperhatikan khazanah kebudayaan yang ada.
- Kebudayaan adalah sistem nilai yang mengusung peradaban etnik. Nilai-nilai ini masih relevan dengan konsep Pancasila. Karena itu, Pancasila dipandang masih relevan dengan sebagai konsep dan pola umum kebudayaan Indonesia.
- Kebudayaan etnik adalah bagian dari identitas budaya. Karena itu, keberadaannya identik dengan hak asasi yang harus dihormati dan dihayati.
- Kebudayaan daerah adalah bagian konsep dan peradaban lokal yang dapat diposisikan dalam memerankan dirinya secara nasional maupun global.
- Agar kebijakan pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah dapat tersosialisasikan secara nasional maka perlu ditunjang lembaga khusus yang menangani masalah-masalah kebudayaan di setiap daerah.
- Kebudayaan sebagai aset pariwisata perlu dikembangkan secara kreatif dengan tidak menghilangkan nilai-nilai luhurnya tidak terlindas oleh perkembangan zaman.
- Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal mengembangkan perbuatan-perbuatan baik.

Bagian Khusus

Konsep

- Konsep kebudayaan masih relevan dengan persoalan-persoalan nilai atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pendukungnya dalam menjalin dan menyikapi kehidupan. Dalam persoalan pembangunan nasional, pemerintah hendaknya

memposisikan masalah-masalah kebudayaan setara dengan persoalan-persoalan lain di luar kebudayaan. Konsep ini pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional.

- Pemahaman dan kajian terhadap kebudayaan etnik hendaknya selalu dilakukan agar masyarakat lebih mengenal budaya bangsa sehingga menimbulkan kecintaan, pemahaman, dan toleransi yang tinggi.
- Budaya hendaknya tidak diartikan pemasang kreativitas tetapi justru merebut esensinya dalam pengembangan kreativitas.
- Perlu pengembangan image wujud-wujud kebudayaan ke dalam upaya kreatif sebagai aset wisata.
- Potensi konflik di daerah disebabkan oleh unsur kebudayaan. Karena itu diperlukan pemerintahan yang lebih demokratis sehingga mampu menangkal ketidakpuasan tetapi menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga dapat memperkecil potensi konflik.
- Konflik-konflik yang terjadi selama ini perlu dipahami akar permasalahannya. Dengan demikian dapat diketemukan dan diterapkan model-model pengelolaannya sehingga dapat lebih efektif penyelesaiannya dengan mengaktualisasikan fungsi pranata-pranata sosial yang ada.
- Perlu persepsi dan pemahaman yang jelas tentang konsep putra daerah dan otonomi daerah agar tidak menjadi mengganggu pelaksanaan pembangunan di setiap daerah.
- Konsep-konsep budaya yang mengandung nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, solidaritas, yang hidup di setiap daerah perlu direvitalisasikan agar konsep ini menjadi nilai sosial dalam berperilaku.
- Penanganan konflik-konflik etnik hendaknya dilandasi pada adat, tradisi dan kebiasaan yang berlaku di setiap daerah, agar dapat segera diselesaikan.
- Pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama dalam pengambilan keputusan, bersamaan dengan itu wanita hendaknya diberi kesempatan yang sama dengan pria untuk mengembangkan karirnya.

Strategi dan Kebijakan

- Kaum elite perlu memberi teladan dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, hidup sederhana, dan memiliki jiwa serta rasa malu yang tinggi
- Pemerintah hendaknya menjadi agen perubahan sosial masyarakat agar loyalitas dapat semakin tinggi. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kemampuan aparat dan tokoh masyarakat untuk memberi kesempatan seluas-luasnya, menampung, dan mengelola serta mengembangkan budaya demokrasi.
- Pemerintah hendaknya memanfaatkan warisan-warisan budaya sebagai acuan pemecahan masalah sosial yang dihadapi, untuk perlu dilakukan eksplorasi ungkapan-ungkapan, pepatah-petitih yang mengandung nilai saling menghargai sesama, etos kerja, dari latar belakang budaya yang berbeda.
- Pemerintah perlu melibatkan para praktisi (senian dan budayawan) dalam penyusunan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan kebudayaan.
- Secara individu, warga negara haruslah memahami secara kritis budaya lokal agar dapat berperan secara baik dalam tatanan sosial nasional dan global, melalui

- pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat.
- Warisan budaya hendaknya dapat dijaga, dipelihara secara serius, bahkan perlu adanya upaya-upaya sosialisasi akan nilai-nilai sosial yang ada kepada masyarakat luas.
- Perlu dibangun persamaan persepsi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengayoman dalam kebijakan pengembangan kebudayaan.
- Perlu pemahaman komprehensif tentang kebudayaan melalui revitalisasi aset budaya sebagai khazanah budaya dan budaya aset wisata, sesuai dengan semangat zaman agar citra budaya dapat lebih terangkat.
- Peran wanita dalam pengungkapan karya seni budaya (film, cerita rekaan, dan dongeng) hendaknya tidak lagi diposisikan sebagai orang yang lemah.
- Kaum pria hendaknya jangan melupakan peran wanita dalam setiap pengembangan hak-hak pribadinya

c) Di Yogyakarta, 28-29 Oktober 2002

Judul makalah dan pemakalah adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan Aset-aset Kebudayaan Sejak Otonomi Daerah - Manulak Ralin Manik, MM (DKI Jakarta)
- Strategi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah - Pingky S, S. Sos, M. Si (Jatim)
- Hukum dan Produktivitas: Upaya Perlindungan Pelaku dan Hasil Karyanya - Ir. Taufik Rahzen (Jabar)
- Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya - Ir. Boyke Pribadi (Banten)
- Dinamika Sosial dalam Kemajemukan Budaya - Dr. Irwan Abdullah (DIY)
- Identitas Budaya: Aku dalam Budaya Lokal, Nasional dan Global - Drs. Triyanto Triwikromo (Jateng)
- Fungsi Pranata Sosial dalam Pengendalian Konflik dan Kekerasan - Dr. Heddy Shri Ahimsa (DIY)
- Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi dalam Menghadapi Globalisasi - Prof. Dr. Ida Bagus Gede Yudha Triguna (Bali)
- Peranan Laki-laki dan Wanita dalam Pengambilan Keputusan - Ir. Ashori Djausal (Lampung).

Setelah diperbincangkan rumusan hasilnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu konseptualisasi, politik kebudayaan, dan strategi kebudayaan, sebagai berikut:

Konseptualisasi

- Definisi Kebudayaan perlu mendapatkan perhatian karena definisi itu akan menentukan ruang lingkup dan cakupan pengkajian dan pengembangan. Sejalan dengan ini, pemahaman tentang kebudayaan lokal, kebudayaan nasional dan kebudayaan global perlu dipahami, khususnya menyangkut bentuk, fungsi, dan kaitannya satu dengan yang lain.
- Keanekaragaman budaya telah melahirkan konsep pluralisme budaya yang

kemudian diperkaya dengan konsep multikulturalisme yang membutuhkan kejelasan orientasi dari konsep dan hubungan-hubungan diantaranya untuk menunjukkan bagaimana keragaman budaya akan dikaji.

- Kerancuan pemahaman sukubangsa dan kesukubangsaan seperti halnya etnik grup dan etnisitas perlu dikaji secara jelas agar proses penataan dapat dilakukan dengan baik.
- Pemahaman kebudayaan harus mencakup interpretasi yang laus dan mendalam dengan memperhatikan dimensi ruang dan waktu, yang terkait dengan berbagai wujud kebudayaan, yaitu ide/ gagasan, nilai/norma/hukum, pranata sosial, perilaku, artefak, dan simbol-simbol, yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa.
- Kebudayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai kesenian dan benda-benda peninggalan, tetapi harus juga dipahami sebagai nilai dan mentalitas yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Politik Kebudayaan

- Kebudayaan telah dilihat dari berbagai perspektif untuk kepentingan penataan sosial. Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi suatu alat politik untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang dianggap lebih baik. Dengan melihat gejala konflik dan disintegrasi masyarakat yang terjadi dewasa ini mengharuskan adanya reorientasi dari konsep Bhinneka Tunggal Ika, khususnya dengan mengevaluasi pendekatan “penyeragaman” keragaman budaya.
- Politik kebudayaan perlu juga untuk berorientasi pemangku kebudayaan sukubangsa dengan sikap keberpihakan yang tegas karena kebudayaan hidup dan berkembang dalam sukubangsa yang menjadi pemilik kebudayaan itu.
- Globalisasi yang sedang terjadi telah memunculkan multikulturalisme yang manifestasinya tampak dalam kemunculan budaya hibrid dalam berbagai bentuk. Sejalan dengan itu lahirnya kebudayaan populer dalam masyarakat telah menjadi tantang kebudayaan yang perlu disiasati dengan cara yang tepat.
- Pada saat yang sama, wawasan kebangsaan perlu ditemukan untuk menjamin suatu komunikasi kultural yang memungkinkan terjadinya penyatuan bagian-bagian dari masyarakat baik suku bangsa, agama, gender, dan golongan.
- Perlu adanya suatu komitmen yang jelas dari berbagai pihak untuk pengembangan kebudayaan dan pemanfaatannya sebagai sumber penataan kehidupan bernegara dan berbangsa dalam bentuk yang formal dan akuntabel yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam berbagai proses penataan dan pengembangan kebudayaan.

Strategi Kebudayaan

- Proses enkulturasi harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih strategis, khususnya menyangkut penggunaan media yang berperan dengan baik dalam menanamkan nilai-nilai budaya. Fungsi keluarga dan sekolah perlu mendapatkan perhatian dengan cara optimalisasi peran.
- Pembelajaran kebudayaan perlu dilakukan melalui berbagai institusi, dengan

meningkatkan peran lembaga pendidikan. Sosialisasi dan aktualisasi pemahaman kebudayaan yang tepat dan mendalam (perlu) dilakukan melalui berbagai cara dengan memberikan pengalaman kebudayaan secara langsung.

- Penciptaan minat terhadap kebudayaan merupakan proses yang penting untuk mendidik masyarakat tentang perlunya kebudayaan dalam kehidupan praktik individu maupun kehidupan sosial. Minat ini diharapkan akan mendorong perhatian dan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai sumber kebudayaan yang kaya, baik filsafat, pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan budaya.
- Pemberdayaan kebudayaan sukubangsa di berbagai tempat merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan, khususnya dengan mendukung berbagai kegiatan budaya dan penguatan kelembagaan, dengan memperhatikan aspek gender dan generasi. Proses ini ditujukan untuk optimalisasi peran kebudayaan dalam penataan sosial dalam komunitas.
- Pengembangan pemahaman kebudayaan secara lintas budaya, baik dalam bentuk pengalaman interaksi maupun komunikasi, yang memungkinkan pengenalan budaya yang berbeda dan difusi unsur-unsur kebudayaan dalam berbagai dimensinya ke dalam kehidupan berbagai kelompok masyarakat. Dengan cara ini basis-basis integrasi dan kohesi sosial diharapkan dapat terbentuk.
- Konflik yang ada di berbagai tempat dalam berbagai bentuknya dapat dipicu oleh berbagai proses sejalan dengan globalisasi. Peran lembaga mediasi pada tingkat lokal yang memiliki strategi-strategi yang kontekstual perlu diberdayakan agar berfungsi dengan baik.
- Nilai dan norma-norma yang berfungsi sebagai aturan-aturan dalam melindungi kekayaan budaya harus difungsikan dan dikuatkan kembali dalam melestarikan kebudayaan dalam berbagai bentuk.
- Penguatan kelembagaan perlu dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, lembaga adat, maupun berbagai lembaga formal lainnya. Berbagai lembaga tersebut tidak hanya berfungsi dalam enkulturasi dan internalisasi berbagai aspek kebudayaan, tetapi juga dalam pengembangan kebudayaan bagi kehidupan terwujudnya yang lebih baik.
- Proses pengembangan kebudayaan selain berorientasi pada pengembangan rasionalitas, seyogyanya juga menekankan pada pendidikan “moral” karena itu akan melahirkan kepribadian bangsa dan budi pekerti dalam setiap jiwa individu, yang dengan cara ini etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat berkembang dalam menciptakan masyarakat yang damai.
- Peranan negara sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan pola kebudayaan yang sesuai untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

d) Di Manado, Sulawesi Utara, tanggal 28-29 Oktober 2002

Makalah dan pemakalah adalah sebagai berikut:

- Identitas budaya : Aku dalam Budaya Lokal, Nasional dan Global - Prof. Dr. J.W. Ajawaila (Maluku)
- Fungsi Pranata Sosial dalam Pengendalian Konflik dan Kekerasan - Dr. Tom Therik (NTT)

- Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi dalam Menghadapi Globalisasi - Dr. Karel Phil Erari (Papua)
- Dinamika Sosial dalam Kemajemukan Budaya - Drs. Gufran A. Ibrahim, MS (Maluku Utara)
- Hukum dan Produktifitas : Upaya Perlindungan Terhadap Pelaku dan Hasil Karya - (Umar Siradz, NTB)
- Peran Laki-laki dan Wanita dalam Pengambilan Keputusan - (Prof. Dr. Hj. Alitu Pakaya, Gorontalo)
- Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya - (Prof. Dr. Nani Tuloli, Gorontalo)
- Pengelolaan Aset-aset Kebudayaan Sejak Otonomi Daerah – (Drs. Kamadjaja Alkatuuk, MS, Sulut)
- Strategi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah - (Prof. Dr. Hi. H.T. Usup, Sulut).

Setelah diperbincangkan rumusan hasilnya sebagai berikut:

Ranah Konsep

- Untuk menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya ketidak serasian hubungan antar etnis dan komunitas, maka perlu digalang kerjasama multikultural, yang berorientasi pada budaya kompetisi yang sehat serta moderat.
- Nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa yang mengandung nilai-nilai keunggulan hendaknya dipelihara dengan baik melalui upaya-upaya pembudayaan dan sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat pendukung secara fungsional di dalam interaksi sosial bangsa.
- Intensifikasi penggunaan dan peranan Bahasa Indonesia senantiasa harus digalakkan, tanpa menimbulkan akibat termarginalisasinya Bahasa Etnis.
- Kebudayaan nasional sudah selayaknya didominasi oleh suatu daerah atau etnik tertentu melainkan merupakan himpunan dari berbagai budaya yang terdapat di seluruh Indonesia.
- Unsur-unsur negatif dari pengaruh kebudayaan global hendaknya dapat diwaspadai sambil pada saat yang sama diupayakan menyerap berbagi unsur positifnya.
- Dalam sejumlah kasus, khususnya di daerah-daerah konflik, “budaya toleransi” terlihat sudah kehilangan makna strategisnya sebagai pencegah konflik terbuka sehingga perlu difikirkan alternatif membangun “budaya ekseptansi”, sebagai langkah maju dari budaya toleransi tetap memposisikan pihak lain sebagai ‘orang luar’ sementara budaya akseptansi menempatkan ‘orang luar’ menyatu dengan kesadaran.
- Perlu dipacu budaya kreatif bangsa yang dimulai sejak usia dini, seraya ditumbuhkan budaya apresiatif terhadap kreatifitas pada saat yang sama, dengan memberikan peluang setiap etnis dan komunitas di daerah merancang konsep budaya yang sesuai dengan kekayaan dan kearifan masing-masing.

Ranah Politik

- Perlu diberdayakannya kembali lembaga adat yang dilatarbelakangi oleh ‘*Political will*’ pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memadai yang ternyata belum sepenuhnya eksplisit di dalam UU No. 22 dan PP 25 tahun 1999.
- Semboyan Bhinneka Tunggal Ika perlu diejawantahkan sesuai makna yang sebenarnya yang lebih mengedepankan pengakuan adanya warisan historis kultural masyarakat Indonesia yang multikulturalisme.
- Demi mengantisipasi kemungkinan adanya keterpecahan (fragmentasi) budaya yang diakibatkan oleh adanya pemberlakuan otonomi daerah, yang diantaranya melahirkan daerah-daerah baru, maka perlu untuk menghilangkan istilah kebudayaan daerah yang substansinya bersifat administrasi, seraya menggantinya dengan istilah kebudayaan etnis atau kebudayaan komunitas (khususnya bagi daerah urban, yang penduduknya berlatar belakang primordial majemuk dan baru).
- Masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat belum mencerminkan keberhasilan otonomi daerah yang sesuai dengan isi dan jiwa peraturan perundang-undangan yang ada, karena otonomi daerah merupakan sebagai bagian dari semangat reformasi harus mereposisi kedaulatan rakyat.
- Perlu memaknai kembali nilai-nilai adat istiadat yang ada dibalik tanah karena tanah tidak semata-mata bernilai ekonomis dan memberikan sumber penghidupan tetapi lebih bersifat religius magis.
- Perlu mempertimbangkan kebijakan masyarakat adat perbatasan, baik antar kabupaten/kota/provinsi, maupun antar negara agar tidak menghancurkan sistem adat dan hukum adat yang sudah melembaga dan fungsional selama berabad-abad, tidak semata-mata menyelesaikan berbagai masalahnya sesuai hukum positif sebagaimana dilakukan sejak jaman kolonial.
- Kebijakan di dalam pengelolaan aset-aset kebudayaan seyogyanya mengandalkan mekanisme partisipatif, dengan cara melibatkan masyarakat, sejak perencanaan, pengelolaan, sampai kepada monitoringnya.
- Perlu mendorong setiap daerah, etnis atau komunitas untuk mendapatkan perlindungan hak cipta bagi segenap karya kebudayaan mereka secara legal, sesuai perundangan yang berlaku.

Ranah Strategis

- Konflik sosial dan kekerasan kolektif yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini perlu dicermati dan didekati dengan pendekatan budaya disamping berbagai upaya lainnya.
- Strategi peningkatan kualitas hidup bangsa yang unggul perlu didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan yang tidak sekedar berorientasi pada kecanggihan teknologi, melainkan juga membaiknya kualitas budi pekerti
- Untuk mengukuhkan kebudayaan bangsa yang semakin baik dan terhormat dimata dunia, maka perlu segera dihidupkan upaya strategis pemanfaatan budaya

etnis dan komunitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman yang dinamis, taat hukum, berdisiplin tinggi dan demokratis.

- Demi meningkatkan kecerdasan emosional bangsa, yang berorientasi kepada penghindaran tindakan kekerasan dan memupuk rasa kemanusiaan, maka dianggap perlu diajarkan pendidikan budi pekerti di sekolah, yang diberikan minimal sampai jenjang SMU/SMK.
- Walaupun secara statistik komponen perempuan dalam jumlah kependudukan secara signifikan lebih besar daripada laki-laki, namun peranan yang tersedia atau disediakan bagi mereka belum memadai. Oleh karena itu perlu dipikirkan dan diterapkan pola-pola yang memungkinkan terjadinya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Di samping itu juga dirumuskan Pokok-pokok Pikiran, sebagai berikut.

Konsep Kebudayaan

- Perlu dirumuskan kembali rumus kebudayaan nasional dalam korelasinya dengan entitas budaya lokal demi membangun kehidupan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia Baru yang berwawasan budaya lokal (etnis dan komunitas), regional dan global.
- Kesadaran kebudayaan bahwa perwujudan bangsa Indonesia dan kemudian sebagai negara merdeka telah dilahirkan dan dibentuk melalui serangkaian perjuangan budaya, harus dikedepankan dalam upaya membangun keutuhan bangsa dan negara tanpa interferensi budaya sub etnis lain secara dominan atas budaya sub etnis lainnya.
- Kebudayaan lokal merupakan dinamika sosial yang perwujudannya mencerminkan karakteristik khas lokalitas dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan adat dan tradisi pada hakekatnya juga berfungsi sosial sehingga ada tempat bagi budaya dari luar lokalitas. Karena itu sangat penting untuk difungsikan kembali pranata sosial pada setiap lokal dan regional dalam penataan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kebhinnekaan bangsa Indonesia.
- Kearifan budaya lokal hendaknya dapat menjadikan bangsa Indonesia pada setiap lokal dan regional menyadari lebih mendalam peran identitas budaya lokal, regional, nasional dan global dalam kehidupan kemajemukan, yang menghayati persatuan dan kemanusiaan.
- Pemahaman kebudayaan nasional hendaknya dilandasi nuansa dialog budaya yang mengindahkan hasil sejarah bangsa dimasa lampau yang sangat kaya, sambil memacu semangat bagi kepentingan sejarah masa depan yang semakin gemilang.

Politik Kebudayaan

- Pembangunan kebudayaan selayaknya diarahkan bagi menjamin kehidupan bangsa yang adil dengan disarkan pada tegaknya pelaksanaan hukum serta hidupnya moral sosial yang menghasilkan stabilitas yang sejati, yang menghasilkan rasa aman dan nyaman warga bangsa.

- Pembangunan kebudayaan merupakan upaya sadar untuk merangsang keterlibatan aktif dari masyarakat untuk membangun diri dan lingkungannya berdasarkan nilai-nilai budaya yang khas pada setiap lokal. Untuk itu pemerintah harus memosisikan diri sebagai pengayom aktifitas budaya setiap kelompok masyarakat diberbagai lokal dan regional, dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk perekrayaan budaya dan masyarakat.
- Pemerintah seyogyanya membentuk “Departemen Kebudayaan” dalam kabinet-kabinet mendatang dengan personil yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam bidang kebudayaan untuk membantu melayani kebutuhan pembangunan secara keseluruhan.
- Otonomi daerah sejatinya harus mendorong jiwa kemandirian otonomis, baik secara individual maupun komunal, sambil pada saat yang sama mengeratkan ikatan dan persaudaraan dan nasionalisme dan kebangsaan.

Strategi Kebudayaan

- Pembangunan kebudayaan sebagai landasan kekuatan bangsa Indonesia hendaknya menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, yang menonjolkan kemajemukan dan kekhasan setiap entitas lokal, dan bukan penyamarataan pola fikir dan tindakan budaya untuk seluruh Indonesia.
- Pemeliharaan aset-aset budaya diharapkan tidak sekedar mengedepankan kegunaannya bagi industri pariwisata untuk kepentingan konservasi dan sebagai sumber nilai rujukan kehidupan bangsa.
- Pengembangan kebudayaan seyogyanya dikelola secara dinamis, dengan cara mengandalkan penghayatan terhadap karya kebudayaan nasional dimasa lampau, sambil menyerap secara selektif berbagai keunggulan budaya universal yang aktual dengan sasaran memajukan bangsa yang terhormat dan demokratis.
- Jiwa kompetitif yang sportif taat hukum seyogyanya dijadikan arah strategis guna memacu kemajuan bangsa.

Kesimpulan

- Pembangunan kebudayaan seharusnya diarahkan guna kepentingan untuk menempatkan peran kebudayaan sebagai sumber acuan pembentuk jatidiri bangsa yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip keadilan yang merata yang dijamin oleh hukum yang berwibawa.
- Otonomi daerah seyogyanya dijadikan kesempatan untuk membentuk jiwa kreatif dan kompetitif yang mandiri sambil mengembangkan harmoni berbangsa dengan melahirkan ikatan-ikatan antar komponen bangsa yang baru secara partisipatif.
- Pengembangan kebudayaan selayaknya diarahkan bagi kepentingan keseluruhan kualitas bangsa yang anti kekerasan dan berkesadaran lingkungan serta berkesetaraan gender.

Hasil Temu Budaya Daerah dan Temu Regional menjadi bahan masukan dan selanjutnya dibahas secara mendalam pada Prakongres tanggal 28 s.d 30 April

2003 di Bali. Untuk menyarikan hasil pertemuan itu dibentuk Tim Kecil untuk menyiapkan bahan Prakongres dan Panitia Penyelenggara untuk menyiapkan pelaksanaannya.

A.3 Prakongres Kebudayaan di Denpasar, Bali

Dalam rangka memantapkan persiapan penyelenggaraan KK di Bukititinggi, disepakati untuk diselenggarakan Pra Kongres, dilaksanakan di Denpasar, Bali pada tanggal 28 s.d. 30 April 2003. Pra Kongres diselenggarakan di Ruang Rapat Wisma Sabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jalan Basuki Rahmat, Komplek Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali, sedangkan kegiatan penunjang prakongres diselenggarakan di Taman Budaya (Art Center), Jalan Nusa Indah, Denpasar. Rumusan hasil Prakongres Kebudayaan di Bali adalah sebagai berikut:

RUMUSAN HASIL PRAKONGRES KEBUDAYAAN V

Denpasar, Bali; TANGGAL 28 – 30 APRIL 2003

Prakongres Kebudayaan V dengan tema “Konsep, Kebijakan, dan Strategi Kebudayaan” dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 April 2003 di Ruang Wiswa Sabha, Komplek Kantor Gubernur Bali, diikuti 148 orang peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas: pemakalah sebanyak 45 orang, wakil-wakil dari propinsi, kabupaten/kota dan peserta umum lainnya dari berbagai kalangan Perguruan Tinggi, Asosiasi Keilmuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemuka, tokoh/pemangku adat. Setelah mendengarkan sambutan Gubernur Provinsi Bali, Bapak Dewa Beratha dan sambutan pembukaan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata R.I., Bapak I Gede Ardika, dan setelah mendengarkan presentasi dan diskusi sidang-sidang pleno dan sidang-sidang kelompok, dirumuskan sebagai berikut:

Hasil diskusi sidang pleno dan sidang kelompok menghasilkan rumusan 3 (tiga) sub tema sebagai berikut:

Sub tema:

Lokalitas Nasionalitas dan Globalitas

Integrasi dan Disintegrasi

- 1. Pengalaman dalam proses mengindonesia diwarnai dinamika integrasi dan disintegrasi bangsa. Dominasi pada strategi politik dan ekonomi menghasilkan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik telah menimbulkan konflik yang disintegratif.*
- 2. Perlu pengindonesiaan secara terus menerus dengan sebuah “strategi baru” yang menekankan nasion (bukan nasionalisme) dan berwawasan kebu-dayaan yang tercerahkan.*
- 3. Solidaritas sosiologis yang muncul pada budaya populer adalah wacana potensi multikultural dalam ruang-ruang keluarga Indonesia. Padasisi lain, potensi multikultur itu berada pada berbagai konflik etnik, yang menuntut adanya transformasi. Baik*

melalui pengelolaan konflik dan institusionalisasi konflik secara demokratis. Upaya ini dapat mengurangi

B. IDENTITAS DAN KRISIS BUDAYA

B.1. Transisi Identitas

1. Kearifan lokal hendaknya menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi landasan moral berbangsa. Untuk membangun kembali karakter bangsa perlu dilakukan tindakan bersama, menyeluruh dan berkesinambungan. (Kasus-kasus perlakuan deskriminatif terhadap suku Dayak, Papua, dan Aceh misalnya dalam penguasaan penggarapan hutan dan pengelolaan sumber daya hendaknya memperhatikan hak-hak dasar masyarakat tempatan).
2. Masyarakat majemuk akan berhadapan dengan feodalisme dan konformisme kebudayaan dominan, pelanggaran moral, merosotnya kewibawaan hukum, hancurnya otoritas dan legitimasi kepemimpinan.
3. Transisi perubahan kebudayaan melahirkan krisis identitas dan situasi heteronomi. Aspek konservatif dan progresif dalam kebudayaan akan mencari keseimbangannya, untuk menjadi acuan bersama. Pengelolaan krisis pada masa transisi dapat dilakukan melalui pendekatan integratif.
4. Agama dan nilai gotong royong, pada pengalaman bermasyarakat, tidak terbukti digunakan sebagai dasar pembentukan masyarakat budaya plural. Perpecahan dalam agama sering terjadi dan gotong royong hanya efektif dalam budaya agraris, namun tidak tahan berhadapan dengan kebutuhan ekonomi.

B.2. Konflik dan Kekerasan

Suku-suku bangsa tertentu memiliki keterikatan yang sangat kuat kepada tanah dan hutan, religi dan adat serta kebersamaan, namun tersingkir dan terpinggirkan.

Potensi konflik budaya dapat dicairkan lewat pendekatan interaktif dan transformatif dengan menggunakan kreativitas humor, seperti halnya bentuk-bentuk bahasa, dan berbagai bentuk protes sosial. Manipulasi simbol juga ditemukan dalam kesusastraan khususnya untuk kepentingan sistem kolonial di masa lalu serta untuk mendiskreditkan etnik tertentu.

C. PERUBAHAN DAN PEMBERDAYAAN

C.1. Hukum dan Produktivitas

1. Pengakuan atas hak intelektual menghindari eksploitasi ekonomi dan moral bagi pemegang hak.
2. Mengkaji dan mempertahankan perangkat hukum yang terkait dengan kepentingan umum dalam bidang kebudayaan dan pengetahuan lokal (indi-genous knowledge). Undang-undang yang terkait dengan HaKI, tanah, adat dan lingkungan hendaknya mengakomodasi perkembangan dan kepentingan kolektif.

3. Kebijakan dalam pelestarian dan perlindungan bentang-pandang budaya (*cultural landscape*) dikembangkan dalam prinsip: masyarakat sebagai pusat pengelolaan, terciptanya mekanisme kelembagaan yang mampu menyerap apresiasi dan aksi bersama, adanya dukungan legal, serta bersifat berkelanjutan.
4. Diperlukan dukungan hukum terhadap politik pengembangan kesenian dan industri budaya.

C.2 Pendidikan

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti membuat bangsa siap hidup dalam budaya modern dan wahana yang perlu disiapkan adalah satu sistem pendidikan nasional yang berwawasan budaya
2. Pendidikan di sekolah perlu, karena tidak semua dapat diajarkan di rumah, maka sekolah pun perlu diperbaiki sehingga benar-benar membuat siswa dapat mengalami 'the joy of discovery' dan tidak lagi menjadi tempat korupsi (tawar-menawar) rundingan tentang nilai
3. Terbaikannya kewajiban membaca buku dan bimbingan pengarang di dunia pendidikan kita selama 60 tahun berakibat lulusan kita 'rabun membaca' dan 'pincang mengarang.'
4. Kongres Kebudayaan hendaknya menghasilkan suatu rencana aksi yang antara lain berkenaan dengan sistem persekolahan dan pembelajaran sosial.

Butir-butir tersebut di atas yang menyangkut sub tema: A. konsep, lokalitas, nasionalitas dan globalitas, B. Identitas dan krisis budaya, C. Perubahan dan Pemberdayaan telah terangkum dan disimpulkan sebagai berikut:

Perihal Konsep Kebudayaan:

Konsep kebudayaan Indonesia sebagai budaya nasional masih dipertanyakan, bahkan puncak-puncak kebudayaan daerah dalam kaitan dengan budaya nasional perlu diberi relevansi baru. Reformasi memberi harapan terjadinya demokratisasi budaya tetapi yang lebih sering terjadi adalah konflik antara kelompok budaya bukan dalam identitas budaya utuh masing-masing, tetapi dalam variasi unsur-unsur yang terbuka, baik secara lintas budaya maupun lintas generasi.

Perihal Kebijakan Kebudayaan:

Membangun masyarakat multikultur merupakan keniscayaan – namun tak bisa begitu saja diterima dan tidak dilaksanakan secara otoriter. Kebijakan tersebut diupayakan secara sistematis, programatis, terpadu dan berkesinambungan. Tindakan ini dapat melalui pendidikan multikultur, lewat lembaga-lembaga mediasi interkultural dan kebijakan-kebijakan progresif yang berpihak (*affirmative action*).

Perihal Strategi Kebudayaan:

Demokratisasi budaya diupayakan terwujud melalui dekonstruksi budaya dominan, seperti feodalisme, otoritarianisme dan konformisme. Adalah suatu ironi bahwa di satu pihak dirasakan kerinduan terhadap integritas budaya etik, tetapi di lain pihak dirasakan pula keterpasungan lewat adat dan tradisi, sehingga diperlukan reinterpretasi dan reposisi.

Rekomendasi:

Dalam penyelenggaraan Pra-Kongres Kebudayaan V di Denpasar belum tercakup beberapa wilayah dan tema-tema yang cukup penting dan perlu diikutsertakan mengingat relevansinya dalam kebudayaan. Rangkaian tema tersebut adalah: ekonomi rakyat, industri budaya (perbukuan, seni populer dll.), religi dan spiritualitas, kesetaraan gender, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa dan simbol serta lingkungan hidup.

Denpasar, 30 April 2003

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Toeti Heraty
2. Dr. Ignas Kleden
3. Putu Wijaya
4. Ridwan Saidi
5. Prof. Dr. Edi Sedyawati
6. Garin Nugroho
7. Taufik Rahzen
8. Dr. Mochtar Pabottingi
9. Dr. Anhar Gonggong
10. Prof. H. KMA. Usop, MA
11. Dr. Tom Therik

A.4. Pelaksanaan KK 2003

Dalam pelaksanaan KK 2003 susunan Acara Kongres seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Jadual acara KK 2003

WAKTU	ACARA	TEMPAT	KETERANGAN
Minggu 19-10- 2003			
08.00- 17.00	Registrasi peserta	Istana Bung Hatta	
16.00- 18.00	Pawai budaya	Balai Kota- Istana Bung Hatta	
19.00- 20.00	Makan malam	Balai Sidang Bung Hatta	
20.00- 22.00	Pergelaran Busana Nasional karya Edward Hutabarat	Hotel Novotel	
Senin, 20-10- 2003			
06.00- 07.30	Makan pagi	Di Hotel masing- masing	
07.30- 08.00	Menuju Balai Sidang Bung Hatta		
08.00- 09.00	Silaturahmi antarpeserta	Balai sidang Bung Hatta	
09.00- 10.00	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan Kongres Kebudayaan 2003: • Laporan Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Sri Hastanto • Sambutan Gubernur Sumatera Barat • Sambutan dan Pembukaan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata • Penyerahan Penghargaan Hadiah Seni oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 	Balai sidang Bung Hatta	Moderator: Toety Heraty Nurhadi R Notulis: Erian Djoni Junaidi
10.00- 10.15	Istirahat		
10.15- 10.30	Pembacaan Puisi "Rindu pada Jas dan Pantalon Hatta" oleh Taufiq Ismail	Balai sidang Bung Hatta	

10.30-11.00	Sidang Pleno I: Penjelasan tentang Prakongres Kebudayaan di Bali dan Kongres Kebudayaan 2003 oleh Toety Heraty Nurhadi dan Panitia Pengarah	Balai sidang Bung Hatta	
11.00-12.30	Sidang Pleno II: "Menjadi Indonesia" Goenawan Mohammad: "Apakah Gerakan "Indonesia" Ignas Kleden: "Intergrasi dan Disintegrasi"	Balai sidang Bung Hatta	Moderator: Toety Heraty Nurhadi Notulus: Erian, Djoni Junaidi
12.30-13.30	Istirahat		
13.30-15.00	Sidang ke-1: "Keragaman Budaya dan Perkembangan Penduduk: Mencari Keseimbangan" 1. Sumatera Utara: "Pluralitas Kepenedudukan Dalam Perspektif Budaya" 2. Kalimantan Barat 3. Lampung	Ruang I	Moderator: Wakil Prov. Jawa Tengah Notulis: Budi Istiawan, Nur Matias Penanggap: Wakil-wakil dari Prov. Banten, Jambi, Kep. Bangka-Belitung, Maluku Utara, Sulsel, Jatim, Kaliteng dan Gorontalo
	Sidang ke-2: "Warisan Budaya dan Kebijakan Pelestarian" 1. Sumatera Selatan 2. Jawa Timur 3. Kalimantan Tengah	Ruang II	Moderator: Wakil Kalsel (Sjamsuri Darham) Notulis: Ariyanti, Armansyah Penanggap, wakil-wakil Prov.: Kalsel, Bali, Kalbar, Sulut, Banten, Jambi, dan Kep. Bangka-Belitung
	Sidang ke-3: "Tradisi Kelautan" 1. Kalimantan Selatan 2. Sulawesi Selatan 3. Maluku	Ruang III	Moderator: Wakil DKI Jakarta Notulis: Norra Susilowati lim Imaduddin Penanggap, wakil-wakil Prov.: Sulteng, Riau, Jabar, DIY, NTB, Bengkulu, Bali, Kalbar, dan Sulut.

	<p>Sidang ke-4: "Memandang Kembali Melayu: Integrasi dan Kontak Budaya"</p> <p>1.Kep. Riau 2.NTB 3.Maluku</p>	Ruang IV	<p>Moderator: Wakil DIY Notulis: Siti Rohana, Noveri Penanggap, wakil-wakil Prov.: DIY, NTB, Bengkulu, Bali, Kalbar, Sulut, Banten, Jambi dan Kep. Bangka-Belitung</p>
	<p>Sidang ke-5: "Global-Lokal dalam Pendidikan: Beberapa Kasus"</p> <p>1.DIY 2.Jambi 3.Sultra</p>	Ruang V	<p>Moderator: Wakil Bengkulu Notulis: Almaizon, Nedik Trichahyo Penanggap, wakil-wakil Prov.: Bali, Kalbar, Sulut, Banten, Kep. Bangka-Belitung, Maluku Utara, Sulsel dan Jatim.</p>
	<p>Sidang ke-6: "Kongres dari Masa ke Masa:Lembaga, Kebijakan dan Dampak"</p> <p>1.Nunus Supardi: Sekilas Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka: Kontribusinya bagi pengembangan kebudayaan. 2.Ayip Rosidi: Sastra Nasional dan Sastra Daerah</p>	Ruang VI	<p>Moderator: Taufik Rahzen Notulis: Budi Istiawan Nurmatias</p>
15.00-15.20	Istirahat		
15.20-17.20	<p>Sidang ke-7:"Dimensi Budaya Dalam Situasi Konflik"</p> <p>1.Nangro Aceh Darussalam 2.Papua 3.Sulawesi Tengah</p>	Ruang I	<p>Moderator: Wakil Jawa Barat Notulis: Eni Kristiawati, Darutullia Penanggap, wakil-wakil Prov.: Sumsel, DKI, Maluku, Kalsel, Sumbar, Riau, Jabar.</p>
15.20-17.20	<p>Sidang ke-8: "Seni Sebagai Kekuatan Budaya"</p> <p>1. Bali 2. Jawa Tengah 3. Bangka Belitung</p>	Ruang II	<p>Moderator: Wakil NDA (Nurdin AR) Notulis: Erian Joni, Junaidi Penanggap, wakil-wakil Prov.: Maluku Utra, Sulsel, Jatim, Sumut, Kalteng, Gorontalo, Lampung, DKI Jakarta.</p>

15.20-17.20	Sidang ke-9: "Industri Budaya: Pariwisata dan Revitalisasi Tradisi" 1.DKI Jakarta 2.Sulawesi Utara 3.Jawa Barat	Ruang III	Moderator: Wakil Sumut (Ben Pasaribu) Notulis: Eni Kristiawati, Darutullia Penanggung, wakil-wakil Prov.: Sumut, Kalteng, Gorontalo, Lampung, Kaltim, Jateng, NAD, Sultra, NTT.
15.20-17.20	Sidang ke-10: "Pendidikan Swasta dan Pengembangan Kebudayaan" 1.Nusa Tenggara Timur 2.Gorontalo 3.Bengkulu	Ruang IV	Moderator: Wakil Papua (Yakomia Rombiak) Notulis: Ariyanti, Armansyah Penanggung, wakil-wakil Prov.: Lampung, Kaltim, Jateng, NAD, Sultra, Sumsel, Papua, DKI Jakarta, Sulut.
15.20-17.20	Sidang ke-11: "Pengetahuan Lokal, Bahasa dan Ungkapan Tradisi" 1.Sumatera Barat 2.Kalimantan Timur 3.Banten	Ruang V	Moderator: Wakil Sulut (Ishak Ngeljaratan) Notulis: Zul Asri, Hendranaldi Penanggung, wakil-wakil Prov.: NAD, Sultra, NTT, Papua, Kalsel, Sumbar
15.20-17.20	Sidang ke-12: "Taman Budaya, Museum dan Dewan Kesenian"	Ruang VI	Moderator: Surya Yoga Notulis: Nedik Trinurcahyo, Almaizon
17.20-19.00	Makan malam		
Selasa 21-10-2003			
06.00-07.00	Makan pagi		
07.00-08.00	Menuju Kompleks Novotel		

08.00-10.00	<p>Pleno III: "Negara, Masyarakat, dan Otonomi"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mubyarto: "Menggugat Budaya Neoliberal" 2. Emmy Hafid: "Transparansi dan Good-Governance" 3. Sri Edi Swasono: "Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi" 	Balai Sidang Bung Hatta	<p>Moderator: Mudji Sutrisno</p> <p>Notulis: Herwandi lim Imaduddin</p>
10.00-10.20	Istirahat		
10.20-12.20	<p>Sidang ke-13: "Kebudayaan Massa dan Perebutan Identitas"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arswendo Atmowiloto: "Budaya Niaga, dan Budaya Siaga" 2. Gustaff H. Iskandar: "I'm From Bandung" 3. Edi Utama: "Malin Kundang dan Perantauan Budaya Kita" 	Ruang I	<p>Moderator: Garin Nugroho</p> <p>Notulis: Erianjoni Junaidi</p>
10.20-12.20	<p>Sidang ke-14: "Bahasa, Seni, dan Multikulturalisme"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus R. Sardjono: "Sastra Indonesia dan Integrasi" 2. I Made Bandem: "Seni dan Perspektif Kebudayaan" 3. Pudientia: "Kelisanan dan Identitas" 	Ruang II	<p>Moderator: Rahman Arge</p> <p>Notulis: Aryanti Armansyah</p>
10.20-12.20	<p>Sidang ke-15: Merajut Masa Depan"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Murti Bunanta: "Pendidikan, Anak dan Masa Depan" 2. Zamawi Imron: "Sastra Kepulauan, Narasi kecil?" 3. Taufiq Ismail: "Bilakah Berdaun Rimba Jati, Yang Bibitnya Kita Ulang Tanam Kini?" 	Ruang III	<p>Moderator: Nina Lubis</p> <p>Notulis: Almaizon Nedik Trinurcahyo</p>

10.20-12.20	<p>Sidang ke-16: "Kekerasan, Citra Diri dan Cara Pandang"</p> <p>1. Yasraf Amir Piliang: "Horro-Culture: Kekerasan Fisik dan Kekerasan Simbolik dalam Konteks Budaya Indonesia"</p> <p>2. I Nyoman Darmaputra: "Bali Pasca BOM: Konflik, Kekerasan dan Redefinisi Identitas Menuju "Ajeg Bali"</p> <p>3. Acep Zamzam Noor: "Bahasa, Identitas dan Citra Diri"</p>	Ruang IV	<p>Moderator: Jos Mansobben</p> <p>Notulis: Eni Christiawati Daratullaila</p>
10.20-12.20	<p>Sidang ke-17: "Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Madani"</p> <p>1. Dawam Rahardjo: "Pemahaman dan Pemberdayaan Masyarakat Madani."</p> <p>2. Harimurti Kridalaksana: "Bahasa Indonesia: Pengembangan Cara Pandang dan Pemanfaatan Perubahan Budaya"</p> <p>3. Abu Hamid: "Budaya Inovasi dan Kompetisi"</p>	Ruang V	<p>Moderator: Habib Mustopo</p> <p>Notulis: Nur Matias Budi Istiawan</p>
10.20-12.20	<p>Sidang ke-18: "Seni Sebagai Kekuatan Integratif"</p> <p>1. Edward Hutabarat: "Keindahan Sebagai Tempat Perjumpaan"</p> <p>2. Ngurah Paramartha: "Multikultur, Politik Kebudayaan yang Memberi Ruang kepada Potensi Budaya Lokal"</p> <p>3. Subhanuddin Alwi:</p>	Ruang VI	<p>Moderator: Restu Kusumaningrum</p> <p>Notulis: Norra Susilowaty Iim Imanuddin</p>
12.20-13.30	Istirahat/Makan siang		

13.30-15.30	<p>Sidang ke-19: "Warisan Budaya dan Strategi Pelestarian"</p> <p>1.Laretna T. Adhisakti: "Keanekaragaman, Keunikan dan Kerangka Dasar Gerakan Pelestarian"</p> <p>2.Naniek Widayati: "Strategi Pengembanagan Warisan Budaya"</p> <p>3.Daud Tanudirdjo: "Warisan Budaya untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia di Masa Depan"</p>	Ruang I	<p>Moderator: Tony Jubiantono Notulis: Noveri Siti Rohana</p>
13.30-15.30	<p>Sidang ke-20: "Hak Cipta, Pengetahuan Lokal dan Berbagai Nilai"</p> <p>1.Rahman Arge:"Pengetahuan Lokal dan Etos Sosial"</p> <p>2.Heddy Shri Ahimasa:"Etnosains dan Etnoteknologi:Warisan Budaya untuk Pemberdayaan Pengetahuan dan Teknologi Etnik/Lokal"</p> <p>3.Miranda Risangayu:"Hak Cipta Milik Umum"</p>	Ruang II	<p>Moderator: Eka Budianta Notulis: Norra Susilowaty Iim Imanuddin</p>
13.30-15.30	<p>Sidang ke-21: "Membangun Kembali Indonesia"</p> <p>1.Meutia Hatta:"Perjalanan Bangsa yang Menyimpang"</p> <p>2.HS. Dillon:"Kebudayaan Dalam Otonomi Daerah"</p> <p>3.Susanto Zuhdi:"Lawatan Sejarah dan Integrasi Bangsa"</p> <p>4.Solahudin Wahid:"Kebudayaan dan Agama"</p>	Ruang III	<p>Moderator: Nunus Supardi Notulis: Erian Joni Junaidi</p>

13.30-15.30	<p>Sidang ke-22: "Bahasa, Simbol dan Citra Diri"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajjp Rosidi: "Sastra Nasional dan Sastra Daerah" 2. Nurhayati Rahman: "Simbol Kesetaraan Gender Dalam Naskah Lontaraq Tanate karya Retna Kencana Arung Pancana Toa Colliq Puji" 3. Tuanku Lukman Sinar Baharsyah: "Reintepretasi dan Reposisi terhadap Adat dan Tradisi: Kasus Melayu Islam Beraja Serdang" 	Ruang IV	<p>Moderator: Edi Sedyawati Notulis: Armansyah Daratullaila</p>
13.30-15.30	<p>Sidang ke-23: "Rekonsiliasi, Seni dan Pemberdayaan"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KMA. Usop: "Ruang Tengah Integrasi Nasional ialah Pembinaan Ideologi Kebangsaan berdasarkan BTI/ Pancasila/UUD 1945 melalui Reinterpretasi, Redesain, dan Integrasi Nilai-nilai Lokal dan Global" 2. Halilintar Latif: "Bissu yang Membisu" 3. Imanul Fakhri: "Tradisi Pesantern, Seni dan Rekonsiliasi" 	Ruang V	<p>Moderator: Saini KM Notulis: Hendranaldi Zul Asri</p>
13.30-15.30	<p>Sidang ke-24: "Cagar Budaya, Wacana dan Tradisi Keilmuan"</p>	Ruang VI	<p>Moderator: IGN Anom Notulis: Aryanti Armansyah</p>
15.30-15.40			
15.40-17.40	<p>Sidang ke-25: "Trauma, Rekonsiliasi dan Kesadaran Sejarah"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anhar Gonggong: "Sebuah Strategi Demokratisasi Bangsa-Negara Merdeka" 2. Mestika Zed: "Negara dan Perlawanan Rakyat" 3. Roch Basoeki: "Perjalanan Bangsa yang Menyimpang" 	Ruang I	<p>Moderator: Parakitri T. Simbolon Notulis: Almaizon Nedik Tricahyo</p>

15.40-17.40	<p>Sidang ke-26: "Integrasi dan Disintegrasi: Refleksi Sejarah dan Kecenderungan"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taufik Abdullah: "Kebudayaan Sebagai Subyek dan Pendekatan: Negara, Bangsa dan Masyarakat" 2. Alex Ulaen: "Pemekaran Wilayah: Haruskah ke Akar Etnis? Amatan atas Pengalaman Sulawesi Utara" 3. Andi Malarangeng: "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kecenderungan ke depan" 	Ruang II	<p>Moderator: T. Ibrahim Alfian Notulis: Eni Chritiawaty Darratulaila</p>
15.40-17.40	<p>Sidang ke-27: "Industri Budaya, Filantropisme dan Kemandirian"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edi Sedyawati: "Industri Budaya, Arah untuk Riset dan Pembelaan" 2. Eka Budiarta: "Filantropi Seni, Sosialisasi dan Pendidikan Kesenian" 3. N. Riantiarno: "Industri Budaya dan Sistem Kelembagaan" 	Ruang III	<p>Moderator: Sri Warso Wahono Notulis: Siti Rohana Noveri</p>
15.40-17.40	<p>Sidang ke-28: "Otonomi Budaya, Simbol dan Pluralitas"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyoman Nuarta: "Identitas, Konflik dan Penguatan Budaya" 2. Nirwan Arsuka: "Nalar Diri dan Nalar Bangsa" 3. Ishak Ngeljaratan: "Pengembangan Bahasa dan sastra Kita" 	Ruang IV	<p>Moderator: Parsudi Suparlan Notulis: Nur Matias Budi Setiawan</p>
15.40-17.40	<p>Sidang ke-29: "Krisis Identitas dalam Masyarakat Plural"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mukhlis Paeni: "Kebudayaan Maritim: Harta yang kehilangan Ahli Waris" 2. Usman Pelly: "Multikultural dan Rekonsiliasi: Menghindari Konflik Generasi Ketiga" 3. Garin Nugroho: "Budaya Massa, Pembentukan Identitas dan Keragaman" 	Ruang V	<p>Moderator: IGN Anom Notulis: Norra Susilowati lim Imaduddin</p>

15.40-17.40	Sidang ke-30: "Mempertimbangkan Pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia (Indonesia Cultural Centre) 1. Taufik Rahzen	Ruang VI	Moderator: Edy Utama Notulis: Erian Joni Junaidi
17.40-19.00	Istirahat dan Makan malam	Balai Sidang Bung Hatta	
19.00-21.00	SC rapat dan laporan masing- masing komisi		
Rabu 22-10- 2003			
06.00-07.00	Makan pagi	Di Hotel masing- masing	
07.00-08.00	Menuju Balai Sidang Bung Hatta		
08.00-10.00	Pleno IV SC rapat dan laporan masing- masing komisi		
10.00-10.20	Istirahat		
10.20-12.20	Pleno V Perumusan hasil kongres dan rekomendasi oleh Panitia Pengarah		
12.20-13.00	Makan siang		
13.00-19.00	Acara bebas		
19.00-21.00	Penutupan Acara Kesenian		
Kamis 23-10- 2003			
06.00-07.00	Makan pagi		
07.00-	Peserta pulang ke daerah masing-masing		

Dalam rangka menyemarakkan penyelenggaraan KK 2003 diselenggarakan beberapa acara kebudayaan di beberapa tempat, antara lain:

- (a) Festival Nasional Seni Pertunjukan yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun dari Deputi Bidang Seni dan Film yang pelaksanaannya diselenggarakan bertepatan dengan penyelenggaraan KK 2003.
- (b) Festival Pedati sekaligus pencanangan “Bulan Budaya” Sumatra Barat, Festival Makanan Tradisional.
- (c) Berbagai lomba seni: Pantun, Tari Poco-poco, pakaian Bell Boy, membordir dan dilanjutkan dengan Parade Pakaian Anak-anak, Cerdas Cermat Budaya, Rias/Busana Pengantin.
- (d) Peragaan Busana oleh Edward Hutabarat, Parade Tari Randai, Pawai Budaya Nusantara.
- (f) Kemah Budaya V yang diikuti oleh 9 provinsi di Sumatra (Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatra Utara, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan, Bangka-Belitung selama 4 hari di Bumi Perkemahan Minangkabau Village Slaing Bawah, Padang Panjang.

Rumusan Hasil Kongres

RUMUSAN HASIL KONGRES KEBUDAYAAN V BUKITTINGGI, SUMATERA BARAT: 20 – 22 OKTOBER 2003

I. Pendahuluan

Kongres Kebudayaan V dengan tema “Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan”, mencakup tiga sub tema “Lokalitas, Nasionalitas dan Globalitas; Identitas dan Krisis Budaya; Perubahan dan Pemberdayaan” telah diselenggarakan pada tanggal 20 – 22 Oktober 2003 di Bukittinggi dan diikuti oleh 570 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 96 pemakalah, wakil-wakil propinsi/kabupaten/kota dan peserta umum, yang berasal dari berbagai komponen masyarakat seperti seniman, budayawan, cendekiawan, pemangku adat, tokoh masyarakat, profesional, pejabat pemerintah, mahasiswa dan pemerhati budaya lainnya.

Kongres ini telah difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika, yang sedianya akan dibuka oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Kongres ini melewati persiapan yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: Temu Budaya Daerah di 25 kota, Temu Regional di empat kota, dan Pra Kongres pada 28-30 April 2003 di Denpasar.

Tema kongres dengan tiga sub tema menemukan konkretisasi dan artikulasi melalui tiga persidangan pleno maupun 30 sidang komisi, melalui 16 pokok bahasan konkret yang memperoleh minat dan partisipasi lewat penyajian makalah dan diskusi. Persepsi, aspirasi, partisipasi, minat dan perhatian peserta kongres telah dihimpun untuk dituangkan dalam pokok bahasan selanjutnya.

II. Pokok-pokok Bahasan Kongres:

Pokok Bahasan berikut diusulkan pada Pra kongres di Denpasar:

1. Integrasi dan Disintegrasi
2. Krisis Otoritas
3. Desentralisasi Politik (Otonomi Daerah)
4. Identitas dan Transisi
5. Konflik dan Kekerasan
6. Warisan Budaya (Cagar, Ilmu, Seni dan Budaya)
7. Kesetaraan Gender
8. Hukum, Produktivitas dan Korupsi
9. Reinterpretasi & Reposisi Adat dan Tradisi
10. Pendidikan
11. Ekonomi Kerakyatan
12. Bahasa dan Simbol
13. Budaya Pop dan Seni Hiburan
14. Religi dan Spiritualitas
15. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
16. Lingkungan Hidup

Bertolak dari 16 bahasan konkret di atas, diperoleh uraian perihal tema kongres: Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan.

Konsep Kebudayaan adalah kerangka acuan teoritis dalam usaha pengembangan kebudayaan. Dengan landasan ini maka kebudayaan dipahami sebagai suatu tatanan system nilai dan perwujudannya dalam kenyataan material dan perilaku sosial. Identitas kebudayaan bukanlah suatu sosok utuh dan padat tetapi terdiri dari unsur-unsur dengan variasi dan tumpang tindih yang memungkinkan adanya persamaan di antara perbedaan-perbedaan. Pengertian kebudayaan demikian mereduksi konflik antar dan intra etnik yang bersifat terbuka untuk perkembangan. Identitas pun difahami dengan kelenturannya untuk memperoleh kemampuan integrative yang lebih luas, dengan memahami dialektika perkembangan antara identitas dan integrasi yang berlangsung terus menerus.

Kebijakan Kebudayaan bertolak dari pemikiran bahwa situasi multikultural adalah warisan budaya bangsa yang otentik, suatu keniscayaan dari bangsa yang pluralistic, dan merupakan sumber dinamika yang kreatif. Pendidikan multikultural melibatkan apresiasi dan peran bahasa dan simbol-simbol budaya yang integratif dan berlangsung lewat demokratisasi di berbagai bidang, sehingga demokrasi politik pun berimbang dengan demokrasi sosial-ekonomi, kesetaraan gender dan pengembangan masyarakat madani.

Strategi Kebudayaan terus-menerus perlu mendekonstruksi budaya dominan lewat dekonstruksi feodalisme, otoritarianisme dan konformisme. Di satu pihak ada kerinduan terhadap integrasi identitas etnik tetapi dilain pihak disertai keinginan bebas dari keterpasungan tradisi/adat yang memerlukan reinterpretasi dan reposisi dalam konteks pemberdayaan di segala bidang. Pemberdayaan yang berorientasi kerakyatan dan keadilan harus mengatasi, baik korupsi maupun kekerasan yang dikhawatirkan menjadi sistem-sistem membudaya dalam masyarakat kita.

Setelah menghimpun materi/pokok bahasan menjadi inventarisasi masalah yang dihadapi bangsa dan negara, diupayakan menghasilkan rekomendasi untuk diteruskan pada pihak yang berkepentingan.

III. Butir-butir Rekomendasi

1. Kongres mendesak agar digali kearifan maupun nilai-nilai yang terdapat di dalam warisan budaya untuk dikembangkan terus dalam masyarakat yang multikultural dengan memperhatikan peraturan dan undang-undang hak cipta, serta mendukung upaya perlindungan hak yang dimiliki secara tradisional.
2. Pengolahan seni tradisi membutuhkan kepakaran, kemampuan kuratorial dan manajerial. Kongres mengusulkan agar kemampuan tersebut menjadi bagian pelatihan dalam rangka membekali pelaksana kesenian memasuki industri budaya.
3. Kongres menyarankan reposisi dan reinterpretasi kritis terhadap adat dan tradisi yang mengandung potensi integrasi dan disintegrasi.
4. Kongres mendesak agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya ditingkatkan dengan sungguh-sungguh serta memperhatikan peranan laut sebagai perekat budaya, sumber kekayaan alam dan budaya.
5. Kongres menyarankan agar pemahaman multikultural dilakukan melalui pendidikan dalam arti luas, baik melalui pendidikan formal, keluarga, media massa, dan pranata sosial lain.
6. Kongres menyarankan agar pendidikan nasional membentuk kesadaran budaya, mendorong penciptaan kebudayaan lebih lanjut, serta mencegah disintegrasi sosial dan kekerasan.
7. Kongres mendesak adanya perhatian yang lebih kritis terhadap tayangan dan publikasi yang merusak budi pekerti yang terbentuk dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
8. Kongres mengharapkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengatasi penyakit sosial akibat ketagihan alkohol, nikotin, dan narkoba, serta pornografi dalam bentuk cetakan dan tayangan di seluruh media massa.
9. Fenomena ekonomisme, korupsi dan kekerasan dalam masyarakat kita berlandaskan pemahaman kekeluargaan yang kontroversial. Paham kekeluargaan ini dapat menjadi landasan ekonomi mutualistis maupun menjadi sumber korupsi yang menimbulkan ketidakadilan, konflik dan kekerasan.
10. Kongres menyarankan agar perekonomian nasional tidak lagi berorientasi pada ekonomisme yang hanya mengejar pertumbuhan dan mengakibatkan ketimpangan sosial, tetapi pada pembangunan kemampuan ekonomi rakyat berdasarkan mutualisme.
11. Menyadari bahwa ekonomi rakyat merupakan prasyarat demokrasi, kongres mendesak agar realisasinya segera dilaksanakan, antara lain dengan mengubah pola pikir berhutang dengan pola berpikir mandiri, pemberdayaan desa dan reorientasi pasar.
12. Kongres menyarankan agar nilai sakral tempat-tempat keagamaan yang masih digunakan untuk peribadatan tidak dicemari oleh kegiatan apa pun yang bercorak desakralisasi.
13. Kongres mendesak agar pemuka agama berperan aktif mencegah mani-pulasi agama sebagai alat pertentangan.
14. Menyadari pentingnya kemampuan membangun lembaga (institution building)

untuk keluar dari krisis dewasa ini, kongres menyarankan agar didorong tumbuhnya berbagai percobaan lokal (*local experiment*), dan mengharapkan berkembangnya semangat kedermawanan (*philanthropy*) untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tanpa mengurangi aspirasi kemandirian.

15. Kongres menganjurkan kemandirian pengembangan kebudayaan dengan membentuk Departemen Kebudayaan, agar terjamin pemeliharaan warisan bangsa dan pengembangannya ke depan.
16. Kongres menganjurkan agar ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap baik **pengembangan** maupun **pembakuan** Bahasa Indonesia sebagai perwujudan daya cipta dan disiplin dalam berbahasa.
17. Menyadari bahwa pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat pemerintahan yang kuat, kongres mendesak agar pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat luas.
18. Kongres mendesak agar Kongres Kebudayaan diselenggarakan lima tahun sekali dan dibentuk lembaga antarkongres yang independen untuk menelusuri perkembangan realisasi berbagai rekomendasi yang memperoleh prioritas perhatian.

Bukittinggi, 22 Oktober 2003

Tim Perumus:

Anhar Gonggong

Edi Sedyawati

Eka Budianta

Garin Nugroho

I G.N. Anom

Ignas Kleden

Jos Mansobben

KMA. Usop

M. Habib Mustopo

Mudji Sutrisno

Nina Lubis

Parakitri T. Simbolon

Putu Wijaya

Rahman Arge

Saini KM

Sri Hastanto

Susanto Zuhdi

Taufik Abdullah

Taufik Rahzen

Taufiq Ismail

Toeti Heraty N. Roosseno

Tony Djubiantono

IV. Catatan Penutup

Suasana kongres berlangsung hangat dengan diskusi dan komunikasi terbuka,

baik dalam sidang-sidang pleno maupun sidang-sidang komisi; yang memungkinkan terjadinya kritik diri yang mendalam dan upaya mencari titik-titik terang pemecahan.

Butir-butir rekomendasi kongres ditanggapi dengan bersemangat serta dengan kehendak untuk melaksanakannya. Butir rekomendasi nomor 17 yaitu “Kongres mendesak agar Kongres Kebudayaan diselenggarakan lima tahun sekali dan dibentuk lembaga antarkongres yang independent untuk menelusuri perkembangan realisasi berbagai rekomendasi yang memperoleh prioritas perhatian” merupakan satu prioritas yang diutamakan pelaksanaannya.

Selain itu dua pokok bahasan dan rekomendasi penting yang ditambahkan yaitu:

Pertama, perlunya satu pusat nasional kebudayaan, yang merupakan pusat informasi, penelitian, dan pengembangan; berlokasi di ibu kota berbagai Negara; sebagai sumber informasi kebudayaan Indonesia di seluruh dunia; semisal Pusat Kebudayaan Perancis (CCF), Pusat Kebudayaan Jepang (The Japan Foundation), Goethe Institut bagi Jerman, Erasmus Huis bagi Belanda, dan seterusnya.

Kedua, perlunya penyikapan yang jelas terhadap perkembangan globalitas dalam kaitannya dengan eksistensi nasionalitas dan lokalitas dalam konteks kebudayaan.

Butir-butir rekomendasi ini ditujukan dan disosialisasikan kepada berbagai pihak mulai dari masyarakat luas sampai kepada para pengambil keputusan, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif.

Secara khusus, para peserta mengharapkan agar hasil-hasil Kongres Kebudayaan V ini segera disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Beberapa Catatan Pelaksanaan KK 2003

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan KK 1991 yang banyak mendapatkan kritikan dan perdicat seperti: kongresnya baju Korpri, kongresnya baju safari, kongresnya pejabat pemerintah, kongres birokrat, plat merah dan lain-lain, maka dalam penyelenggaraan KK 2003 pihak Panitia telah berupaya keras agar kongres dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti diketahui, KK 2003 merupakan kongres pertama yang diselenggarakan pada masa Reformasi. Bila KK 1991 diselenggarakan dalam suasana pemerintahan yang bersifat represif, KK 2003 berlangsung dalam pemerintahan yang demokratis, penuh keterbukaan dan kebebasan, sehingga siapa pun boleh dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan lain untuk menyampaikan pendapatnya.

Selama kongres berlangsung tidak ada peserta yang merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun pendapat itu amat keras menyerang penguasa. Suasana persidangan berlangsung dalam suasana hangat dengan diskusi dan komunikasi terbuka, baik dalam sidang-sidang pleno maupun sidang-sidang komisi yang memungkinkan terjadinya kritik diri yang mendalam dan upaya mencari titik-titik terang pemecahan. Tetapi di balik itu terdapat beberapa catatan yang diangkat ke permukaan sebagai sebuah koreksi terhadap penyelenggaraan kongres.

Berdasarkan data yang dapat dihimpun, pemberitaan tentang KK 2003 baik melalui media cetak maupun elektronik cukup banyak. Berbagai stasiun televisi seperti: TVRI, LaTV, ANTEVE, RCTI, SCTV, Metro TV, Indosiar, TV-7, Bali TV dan BI TV (Bukittinggi) dalam bentuk sajian berita (news), dialog (talk show), maupun features

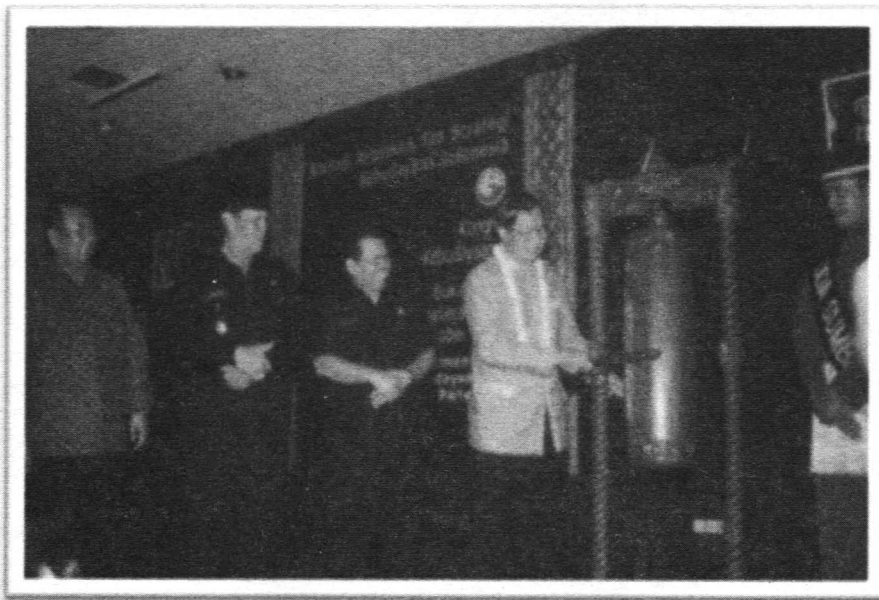
menyiarkan peristiwa budaya itu. Demikian pula halnya dengan pemberitaan melalui radio seperti: RRI, Radio Trijaya, Radio El Shinta, Radio Sonora dan juga radio swasta daerah yang ada di Padang dan Bukittinggi. Melalui media cetak telah disiarkan melalui berbagai harian dan majalah seperti: Kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Republika, Koran Tempo, Suara Medeka, Bali Post, Terbit, Singgalang, Padang Ekspres dan harian Haluan. Adapun berita yang dimuat di majalah, antara lain: Gatra, Femina, Tempo, Forum dan Wisata.

Dilihat dari sisi waktu penyelenggaraan, KK 2003 dianggap tepat saat, karena setelah 12 tahun KK 1991, banyak terjadi perubahan besar dalam atmosfir kebudayaan Indonesia. KK 2003 diharapkan dapat menjadi *“momentum bagi semua elemen bangsa melakukan otokritik, reposisi nilai, dan kemudian berjabat nurani untuk bersama-sama membangun Indonesia baru yang kita impikan”*. (Media Indonesia 19/10/2003). Sekaranglah saat yang tepat untuk melakukan penilaian atas kekurangan masa lalu dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pergeseran nilai budaya yang menyebabkan berlarut-larutnya krisis budaya, dikoreksi dan diposisikan pada jalur yang benar, termasuk posisi kebudayaan yang dinilai hanya menjadi *“pelengkap penderita”*.

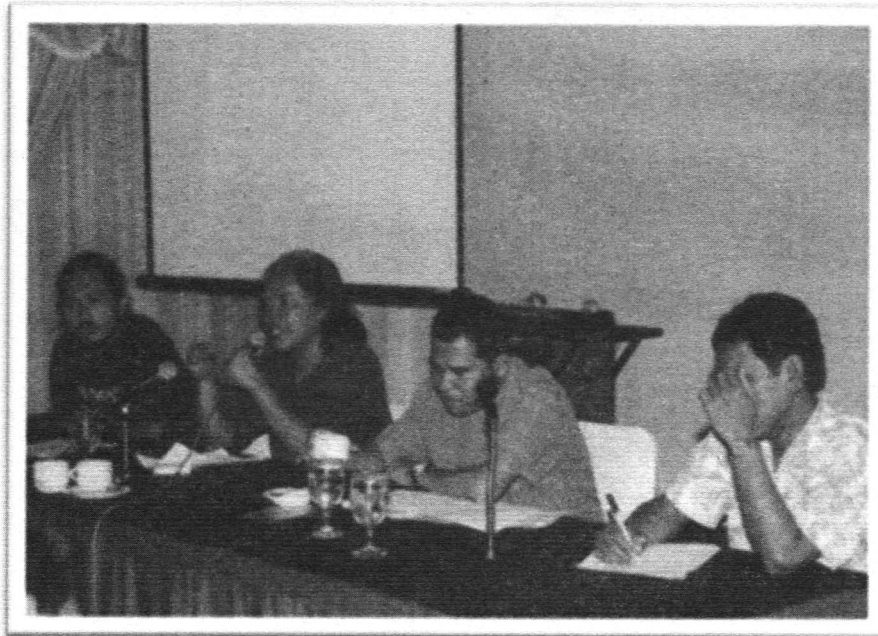
Sementara itu bila ditilik dari segi tema ada yang berpendapat dengan tema kongres *“Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Nasional”* dianggap masih terlalu abstrak. Ia hanya membangun kebesaran peristiwa tanpa membongkar akar permasalahan yang tumbuh dan berkembang di jantung publik. Disebut juga KK itu hidup dan mati. Hidup, karena KK selalu saja menawarkan peristiwa baru, meski tanpa tema baru. Mati, karena KK selalu saja membangun stigma tidak mampu melibatkan komunitas seniman secara aktif. Ia hanya jadi peristiwa regular, peristiwa kaum pelat merah, yang notabene menghabiskan anggaran belanja Negara. Ia sekedar seremonial birokrat, seperti yang ditulis dalam Media Indonesia, tanggal 19-10-2003. Berkenaan dengan masalah tema sejumlah seniman Sumatra Barat menilai KK 2003 kurang memberikan kebebasan dan independensi terhadap wilayah kerja kebudayaan secara global, dan hanya merupakan bagian dari penggelembungan isu kekuasaan. Mereka menganggap isu yang dihimpun melalui Temu Budaya di 25 kota tidak masuk dalam tema, dan tema yang sekarang bukan rekonstruksi dari hasil pengembaraan ke daerah-daerah, tetapi isu yang digulirkan dari pusat. Mereka berniat akan menyelenggarakan kongres tersendiri sebagai *“KK Tandingan”* (Media Indonesia, 19/10/2003). Bila hal ini terjadi berarti sejarah KK Tandingan seperti halnya tahun 1991 terulang kembali.

Masalah rumusan atau rekomendari KK 2003, koran Suara Merdeka dengan judul berita *“Coreng-moreng Rumusan Rekomendasi Kongres Kebudayaan V”* menilai rumusan kongres itu oleh para wartawan sebagai rendah diri, tak memiliki kekuatan, dan berkesan mengiba-iba pada pemerintah. Dipertanyakan: *“Mengapa menggunakan kata-kata memohon, menyarankan, atau kata-kata lain yang berkesan pesimistis?”* (Suara Merdeka 23/10/2003) Seperti tertulis di atas, dalam rumusan atau rekomendasi KK 2003 tidak ada kata-kata *“memohon”* kepada pemerintah. Kata *“memohon”* tidak ada, kalau kata *“mengharapkan”* hanya ada pada Catatan Penutup yang berbunyi *“Secara khusus, para peserta **mengharapkan** agar hasil-hasil Kongres Kebudayaan V ini segera disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia”*. Selebihnya, kata-kata yang digunakan adalah *“mendesak...”, “menyarankan...”, “menganjurkan...”* dan *“perlu...”*.

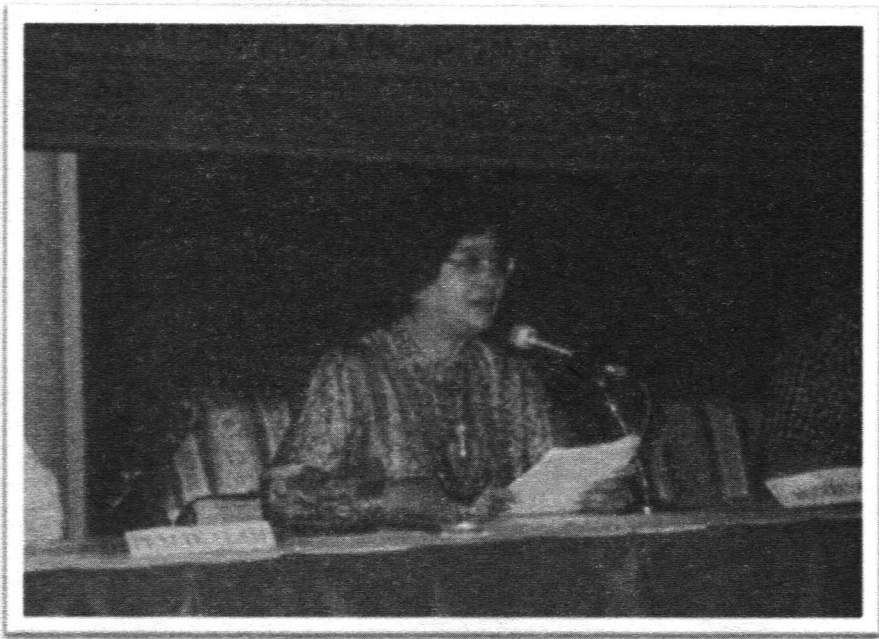
Bagian lain yang mendapatkan sorotan dari para peserta adalah menyangkut penyelenggaraan, terutama masalah pelayanan yang dinilai kurang memuaskan para peserta seperti masalah akomodasi dan transportasi yang sejak awal memang sudah diprediksi oleh Panitia bakal banyak menghadapi masalah. Tetapi unsur pelayanan yang paling dikeluhkan dan disayangkan oleh peserta adalah tidak dibagikannya makalah kepada peserta. Wisran Hadi sebagai peserta yang berasal dari provinsi Sumatra Barat dan dengan demikian menjadi 'tuan rumah' dari hajatan itu, mengaku malu terhadap 2 orang tamunya dari Malaysia yang telah datang dari tempat yang jauh tetapi tidak mendapatkan makalah (Harian Sing-galang, 20/10/2003).



Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gde Ardika meresmikan pembukaan Kongres Kebudayaan



Arswendo Atmowiloto sedang menyampaikan makalahnya



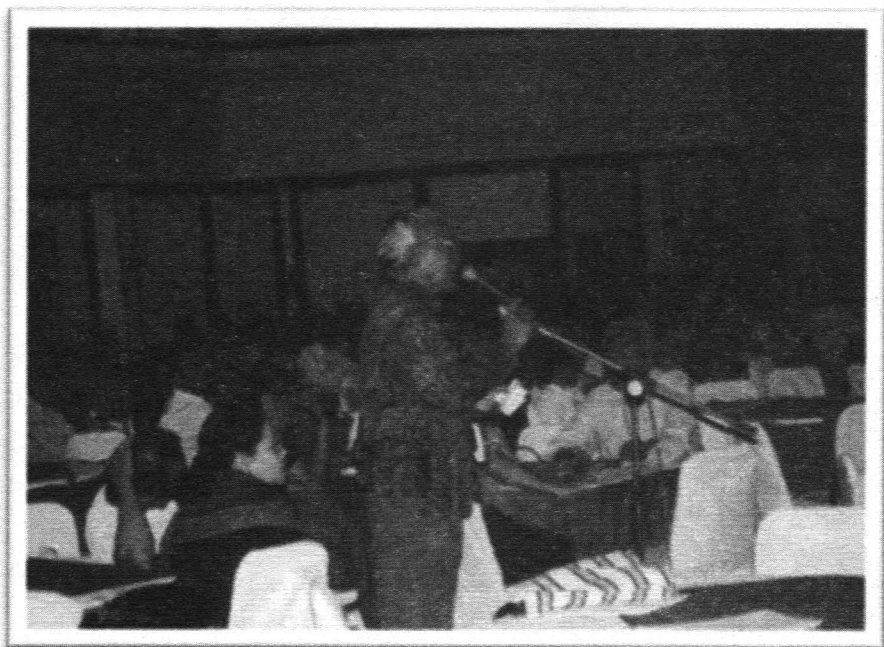
Meutia Hatta sedang meyajikan makalah



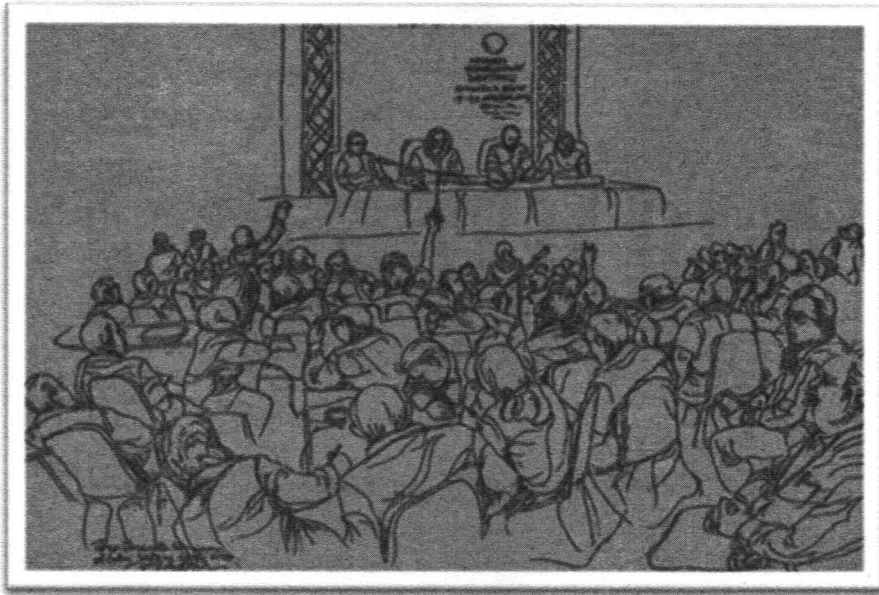
Penyajian makalah Utusan Daerah, dipandu oleh Restu Kusumaningrum



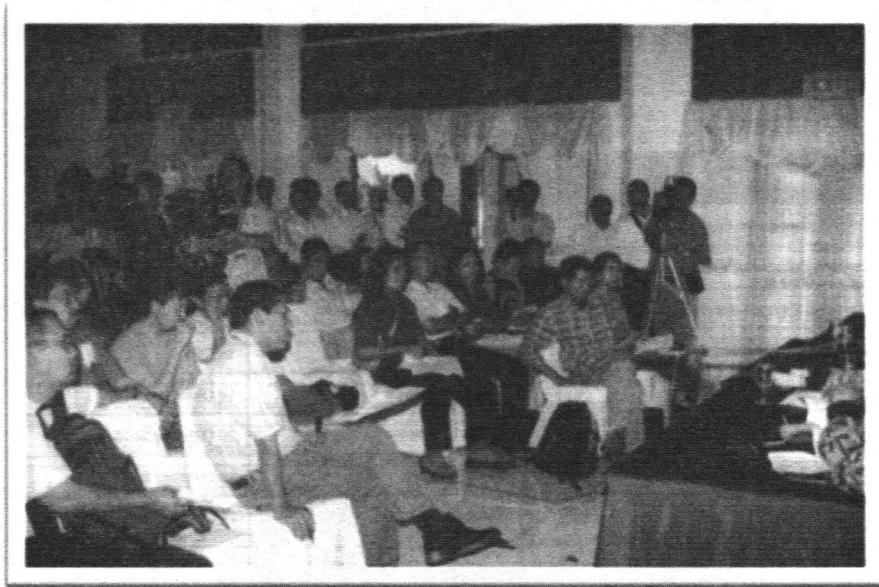
*Penyajian makalah oleh Nunus Supardi dipandu oleh Taufiq Rahzen.
Di sebelahnya Ajip Rosidi sebagai pemakalah*



Salah seorang peserta, I Nyoman Gunarsa, sedang menyampaikan tanggapan



Ilustrasi suasana sidang karya Bodi Darma dari Sumatera Barat



Jumpa Pers setelah dibacakan hasil Kongres Kebudayaan 2003

B. Kongres Kebudayaan Indonesia 2008

Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2008 adalah sesuai dengan rekomendasi KK 2003 di Bukittinggi yang menyatakan bahwa kongres berikutnya diselenggarakan 5 tahun kemudian. Berbeda dengan KK sebelumnya, nama kongres kali ini adalah “KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA (KKI) 2008”. Kongres sebelumnya adalah “KONGRES KEBUDAYAAN” saja lalu diikuti dengan tahun penyelenggaraan. Sesuai Pasal 32 UUD 1945 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi berlangsungnya forum kongres. Kongres melibatkan para budayawan, seniman, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah untuk bersama-sama membahas gagasan, aspirasi, minat dan partisipasi seluruh elemen bangsa dalam memajukan kebudayaan nasional yang berbasis pluralisme dan multikulturalisme.

Kongres Kebudayaan Indonesia 2008 memiliki arti yang penting bagi perjalanan sejarah kebudayaan Indonesia karena diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Secara garis besar persiapan dan pelaksanaan KKI 2008 adalah sebagai berikut.

B.1 Persiapan

Saat ini, kemajuan peradaban manusia di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menyebabkan perubahan yang cepat dalam hampir semua aspek kehidupan. Batas antarbangsa dan negara menjadi lebih terbuka. Di era global, interaksi lintas budaya menjadi kian meningkat dan sangat mempengaruhi eksistensi dan identitas budaya suatu bangsa. Era peradaban umat manusia yang disebut sebagai Era gelombang ke empat ini, menempatkan mata budaya sebagai deposit tambang yang harus dikelola dan di *create* dengan menjadikannya sebagai “mata uang” baru untuk kesejahteraan umat manusia.

Dalam upaya menanggapi arus deras gelombang ekonomi keempat ini Pemerintah RI telah meluncurkan cetak biru Ekonomi Kreatif Indonesia, yakni konsep ekonomi baru yang berorientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Cetak biru tersebut akan memberi acuan bagi tercapainya visi dan misi industri kreatif Indonesia sampai tahun 2030. Landasan utama industri kreatif adalah sumber daya manusia Indonesia, yang akan dikembangkan sehingga mempunyai peran sentral dibanding faktor-faktor produksi lainnya. Penggerak industri kreatif dikenal sebagai sistem *triple helix*, yakni cendekiawan (*intellectual*), dunia usaha (*business*), dan pemerintah (*government*). Dalam cetak biru Ekonomi Kreatif Indonesia tersebut dicatat 14 cakupan bidang ekonomi kreatif yakni 1) jasa periklanan, 2) arsitektur, 3) seni rupa, 4) kerajinan, 5) desain, 6) mode (*fashion*), 7) film, 8) musik, 9) seni pertunjukan, 10) penerbitan, 11) riset dan pengembangan 12) software, 13) TV dan radio, dan 14) video game.

Pengembangan kesadaran bangsa akan kekayaan warisan budaya Indonesia, harus segera dilakukan secara simultan sehingga dapat menyelamatkan, melestarikan, dan memanfaatkan warisan budaya tersebut melalui inovasi dan kreativitas demi mencapai kesejahteraan. Bangsa Indonesia sangat beruntung karena memiliki khazanah “deposit budaya”, yang sangat kaya dan apabila diolah dan dikemas dengan

baik dapat menjadi aset yang mendatangkan devisa dan meningkatkan perekonomian rakyat. Hal penting lain yang juga sangat perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat adalah perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi karya budaya anak bangsa.

Era globalisasi memaksa kita untuk terus menerus menerima gempuran budaya luar. Sebagai bangsa, kita harus memiliki “pertahanan” dan kemampuan untuk mengolah dan menyaring pengaruh-pengaruh budaya luar, agar dapat diterima dan berpengaruh positif. Demi memperkuat pertahanan tersebut, pengembangan kebudayaan dengan orientasi penguatan jati diri perlu terus dilakukan. Dalam konteks ini, Pendidikan menjadi salah satu jalur yang penting sebagai sarana transformasi konsep dan kebijakan memupuk identitas dan kesadaran nasional, di samping tentunya lingkungan keluarga dan peran media massa.

Pendidikan yang berorientasi kepada pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme akan mengarah pada kesadaran budaya. Sebuah riset yang disponsori oleh Harvard Academy for International and Area Studies pada akhir 1990-an, yang melibatkan ilmuwan-ilmuwan sosial paling senior diantaranya Michael E. Porter, Seymour Martin Lipsett dan Francis Fukuyama, menghasilkan temuan yang kuat bahwa “Budaya menentukan kemajuan dari setiap masyarakat, negara, dan bangsa di seluruh dunia, baik ditinjau dari sisi politik, sosial, maupun ekonomi. Tanpa kecuali”. Jika budaya dimaknai sebagai strategi untuk bertahan (*surviving*) dan menang (*winning*), maka untuk bersaing, bertahan dan menang dalam gempuran era globalisasi, suatu bangsa harus memiliki budaya yang bermartabat dan memiliki nilai-nilai budaya tinggi.

Kebijakan Otonomi daerah, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi wilayah geobudaya yang dinaungi oleh provinsi-provinsi. Peluang untuk mengelola secara mandiri warisan budaya etnik menjadi lebih terbuka luas dengan mengambil sudut pandang pemerintah daerah. Kondisi budaya yang berbeda-beda, tentu memiliki permasalahan dan peluang yang berbeda pula. Di sinilah peran pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyesuaikan pengelolaan kebijakan pemanfaatan dan perlindungan warisan budayanya, dengan tetap mengacu pada semangat kesatuan kebangsaan, identitas dan kesadaran nasional. Tantangan bagi pemerintah daerah di era otonomi adalah tuntutan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola kekayaan budaya setempat, dengan segenap sumberdaya manusia dan infrastruktur yang tersedia.

Seringkali, modal yang demikian ini kurang memadai, disebabkan karena keterbatasan sumberdaya manusia yang handal dan pendapatan ekonomi daerah yang rendah. Namun situasi inipun sering kali dipergunakan oleh segelintir kepentingan politik untuk giat mencari ekspresi dan simbol-simbol kebudayaan lokal sebagai ikon bagi otonomi politiknya dengan dalil bahwa politik nasional haruslah berdasarkan nilai-nilai budaya, sementara kebudayaan tersebut sebenarnya masih dipertanyakan apakah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia atau bukan. Karena itu, penolakan Sutan Takdir Alisyahbana secara kategoris terhadap semua kebudayaan tradisional sebagai dasar masyarakat baru yang akan merdeka penting dicermati. Karena kembali ke kebudayaan tradisional adalah identik dengan kembali ke masa pra-Indonesia, yang akan membawa etnis yang tak habis-habisnya di antara berbagai kelompok budaya.

Tema Kongres

Tema yang disepakati oleh Tim pengarah KKI 2008 adalah “**Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan**”. Pemilihan tema ini didasarkan pada kenyataan masyarakat Indonesia tengah menghadapi masalah budaya sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah terjadi perubahan sistem nilai budaya yang cenderung mengarah pada penurunan masalah etika, moral, kejujuran, kedisiplinan serta telah terjadi keretakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam hal ini kebudayaan sebagai acuan dalam menata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mempunyai peran besar dalam membangun bangsa menuju masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Melalui tema ini kongres para budayawan, seniman, cendekiawan, tokoh adar akan bersama membicarakan masalah peran tersebut untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijakan.

Tujuan

Sesuai dengan tema, tujuan KKI 2008 adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pemetaan dan pembahasan gagasan, aspirasi, minat dan partisipasi bangsa Indonesia khususnya tokoh masyarakat, budayawan, pakar budaya, ilmuwan, dan pemerintah, akan orientasi budayanya demi membangun kebudayaan nasional yang berbasis pluralisme dan multikulturalisme.
2. Menggali berbagai metode pendekatan budaya yang kompeten untuk menjawab tantangan zaman khususnya dalam arus globalisasi serta era gelombang ekonomi keempat.
3. Mencari titik temu dan saling pengertian dari kebersamaan Bangsa Indonesia, dengan menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat memperkuat jatidiri, hingga mampu cepat bangkit dari keterpurukan ekonomi dan mampu bersaing serta berkiprah di dunia internasional.
4. Membangun keyakinan dan komitmen, bahwa warisan budaya bangsa Indonesia yang luhur dapat menjadi modal utama untuk mengelola kekayaan budaya bangsa demi kesejahteraan rakyat.
5. Merumuskan rekomendasi langkah konkrit serta rencana aksi yang terukur bagi para pemangku kepentingan dalam bidang kebudayaan, demi memajukan negeri dan menyejahterakan rakyat.

Pokok-pokok Bahasan

Bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai suku, ras, agama, bahasa dan budaya, mendiami ribuan pulau besar dan kecil, yang tersebar dari *Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote* yang dahulu termasyur dengan sebutan Nusantara. Secara geografis, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dalam lintasan dunia ditunjang iklim tropis yang hangat dan menyuburkan. Kekayaan Indonesia meliputi, aneka budaya etnis, aneka jenis flora dan fauna, serta sumber alam perut bumi yang

melimpah. Dengan kondisi demikian, Indonesia sudah memiliki modal besar untuk bersaing di kancah internasional.

Kenyataannya, modal besar tersebut belum maksimal dimanfaatkan karena kurangnya modal lain yang tak kalah penting, yakni karakter dan jatidiri bangsa yang kuat. Karenanya, perlu terus dicari formula pengembangan kebudayaan yang berujung pada penguatan identitas dan kesadaran nasional yang berbasis pluralisme agar terbentuk semangat dan percaya diri yang kuat untuk menye-jajarkan diri dengan bangsa-bangsa maju di dunia, dan turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Tujuan manusia menciptakan budaya adalah demi kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi material dan moral, dapat mengandung makna luas meliputi rasa aman, harga diri, keadilan, martabat manusia, kebebasan (aktualisasi diri, beragama, berkarya dan lain-lain). Di era globalisasi ini, pengembangan kebudayaan Indonesia diarahkan untuk memperkuat karakter bangsa sehingga memiliki kualitas yang memadai dalam bersaing menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Untuk skala Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan multietnik, kesejahteraan rakyat adalah sebuah beban yang cukup berat. Perlu dicari syarat dan ukuran yang objektif, sehingga dapat diterima oleh seluruh rakyat. Kesejahteraan moral, kadang punya arti dan ukuran yang berbeda, dari sudut pemerintah dan rakyat. Untuk menuju kesejahteraan itu, perlu digali potensi, kreativitas dan keahlian yang bersumber dari kearifan atau falsafah budaya bangsa yang beragam. Sedangkan kesejahteraan material, dapat mengarah meningkatnya perekonomian rakyat yang berbasis sumberdaya manusia yang kreatif, kekayaan budaya dan lingkungan. Pokok-pokok bahasan dalam KKI 2008 yang dijadikan bahan perbincangan mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

1. Film/Seni Media
2. Sastra
3. Bahasa dan Aksara
4. Seni Rupa
5. Media Massa
6. Seni Pertunjukan
7. Ekonomi Kreatif/Industri Budaya
8. HaKI
9. Diplomasi Kebudayaan
10. Warisan Budaya
11. Kebijakan dan Strategi Kebudayaan
12. Pendidikan
13. Filantropi Kebudayaan
14. Identitas Budaya
15. Etika

Dari 15 pokok bahasan dituangkan ke dalam 102 makalah dari unsur budayawan, seniman, cendekiawan, akademisi dari berbagai disiplin ilmu.

Tempat dan Tanggal Penyelenggaraan Kongres

KKI 2008 diselenggarakan di Bogor, mulai pada tanggal 9-12 Desember 2008, bersamaan dengan 100 tahun berdirinya Boedi Oetomo 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan 90 tahun Kongres Kebudayaan I, tahun 1918.

Panitia Pengarah

Tugas dari Panitia Pengarah adalah: “mengarahkan hal-hal yang berhubungan dengan substansi kongres, meliputi: (1) arah dan tujuan; (2) topik dan pemakalah; (3) merumuskan hasil kongres; (4) menyampaikan laporan hasil kongres”. Susunan Panitia Pengarah adalah sebagai berikut:

Pelindung: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Penasihat: 1. Prof. Dr. Edi Sedyawati
2. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono
3. Prof. Dr. Taufik Abdullah
4. Prof. Dr. Toeti Heraty Nurhadi

Ketua: Dr. Mukhlis Paeni
Wakil Ketua: Drs. Ccep Suparman
Sekretaris I: Eka Budianta
Sekretaris II: Drs. Yunus Satrio Atmojo M.Hum

Anggota:

1. Prof. Dr. Azyumardi Azra
2. Drs. Buntje Harbunangin
3. Garin Nugroho, S.H.
4. Prof. Dr. Komarudin Hidayat
5. Prof. Dr. Mudji Sutrisno
6. Nano Riantiarno
7. Dr. Ninuk Kleden
8. Drs. Nunus Supardi
9. Dr. Pudentia
10. Putu Wijaya, S.H.
11. Prof. Dr. Sardono W. Kusumo
12. Dr. Serano Sianturi
13. Prof. Dr. Sri Hasto
14. St. Sularto

Pemakalah

Pamakalah terdiri atas budayawan, seniman, cenedekiawan, tokoh masyarakat berjumlah 102 orang seperti tercantum dalam agenda kongres.

Peserta

Peserta KKI 2008 terdiri atas para pemangku kepentingan dalam pengembangan kebudayaan, baik perorangan maupun lembaga/institusi dari seluruh Indonesia, akademisi, media massa dan masyarakat umum. Kongres dihadiri oleh 500 orang peserta.

Logo Kongres

Bentuk dan warna Logo KKI 2008.



B.2 Pelaksanaan Kongres

Pelaksanaan kongres diatur sesuai jadwal kongres yang disusun sebagai berikut.

Tabel 3
Jadwal Kongres Kebudayaan 2008

Hari Selasa, 9 Desember 2008: Kedatangan Peserta

WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
KEDATANGAN & REGISTRASI		
09:00 – 18.00	Kedatangan: Peserta, Pembicara, Exhibitor/ Peserta Pameran, dan Media	
09.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none">• Registrasi untuk Peserta, Pembicara, media & Exhibitor/Peserta Pameran▪ <i>Set up booth</i> untuk pameran kebudayaan	<i>Hotel Salak</i>
19.00 – 21.00	Makan Malam	

Hari Rabu, 10 Desember 2008: Pembukaan Kongres dan Sidang Pleno

WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
09.00 – 10.00	Registrasi Peserta	Lobby Hotel Salak
	PEMBUKAAN KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA 2008	
10.00 – 10.05	<i>Pembukaan oleh MC</i>	
10.00 – 10.05	<i>Pembukaan oleh MC</i>	
10.05 – 10.10	Laporan Ketua Pelaksana Kongres Kebudayaan Indonesia 2008, oleh Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF), Drs. Tjetjep Suparman, M.Si	

10.10 -10.20	Sambutan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Ir. Jero Wacik, SE	
10.20 -10.35	Sambutan dan Arahan sekaligus Pembukaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008 oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ir. H. Aburizal Bakrie	
10.35 – 11.00	Pemberian Anugerah Kebudayaan Penandatanganan MOU antara Menbudpar dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi Negeri Pemberian Bantuan kepada Seniman Berprestasi	
11.00 – 11.30	Rehat Kopi	
	Press Conference (11.00 – 12.00) Nara Sumber: Menko Kesra, Menbupar, Dr. Mukhlis PaEni, Prof. Dr. Edi Sedyawati, Putu Wijaya	Kinanti Room (Lt.2)
	SIDANG PLENO I	Istana Ballroom
11.30 – 12.00	Penjelasan pelaksanaan Kongres Kebudayaan oleh Ketua Panitia Pengarah, Dr. Mukhlis PaEni	
12.00 – 13.00	Istirahat, Sholat & Makan Siang	Fatmawati (Lt.1) Canari Café (Lt.1) Binen hoff Restaurant (Lt. 1) Poolside (Lt.1)

Hari Kamis, 10 Desember 2008 : Sidang Kelompok Hari ke-2

WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
06.30 – 07.30	Sarapan pagi di Hotel masing-masing	
07.30 – 08.30	Menuju Hotel Salak Bogor untuk Sidang Kelompok	
08.30 – 12.00	SIDANG KELOMPOK 5	ISTANA BALLROOM (Lt. 2)
	"WARISAN BUDAYA" Moderator: Drs. Junus Satrio Atmodjo, M.Hum Pembicara :	
08:30 – 08:50	Dr. Pudentia	
08:50 – 09:10	Dr. Halililntar Latif	
09:10 - 09:30	Drs. Hari Untoro Dradjat, M.Hum	
09:30 – 09:50	Prof. Dr. I Wayan Ardika	
09:50 – 10:20	Diskusi /tanya jawab	

10:20 - 10:35	Istirahat / Rehat kopi	
10:35 - 10:55	Nina Akbar Tanjung	
10:55 - 11:15	Juven Blakai	
11:15 - 11:35	Dr. Stanislaus Sandarupa	
11:35 - 12:05	Diskusi /tanya jawab	
08.30-11.55	SIDANG KELOMPOK 6	PAKUAN ROOM (Lt.1)
	"SASTRA" Moderator: Putu Wijaya Pembicara	
08:30 - 08:50	Prof. Dr. Suminto A. Sayuti	
08:50 - 09:10	Prof. Dr. Budi Darma	
09:10 - 09:30	Djenar Maesa Ayu	
09:30 - 10:00	Diskusi /tanya jawab	
10:00 -10:15	Istirahat / Rehat kopi	
10:15 - 10:35	4. Habiburrahman El Shirazy	
10:35 - 10:55	Dr. Seno Gumira Adjidarma	
10:55 - 11:05	Taufik Ismail	
11:05 - 11:25	Zawawi Imron	
11:25 - 11:55	Diskusi /tanya jawab	
08.30-11.35	SIDANG KELOMPOK 7	GALUH ROOM (Lt.1)
	"HaKI" Moderator: Ir. James F. Sundah Pembicara:	
08:30 - 08:50	Prof. Dr. Agus Sardjono	
08:50 - 09:10	Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc	
09:10 - 09:30	Dr. Achmad Zen Umar Purba, SH., LLM	
09:30 - 10:00	Diskusi /tanya jawab	
10:00 -10:15	Istirahat / Rehat kopi	
	Moderator: Prof. Dr. Agus Sardjono	
10:15 - 10:35	Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP	
10:35 - 10:55	Drs. Dharma Oratmangun, M.Si	
10:55 - 11:05	Ir. James F. Sundah	
11:05 - 11:35	Diskusi /tanya jawab	

08.30-11.25	SIDANG KELOMPOK 8	PADJADJARAN 1 (Lt.4)
	"FILANTROPI KEBUDAYAAN" Moderator: Felencia Oktaria Hutabarat Pembicara:	
08:30 – 08:50	Eka Budiarta	
08:50 – 09:10	Ir. Budi Karya Soemadi	
09:10 – 09:30	Hamid Abidin	
09:30 – 10:00	Diskusi /tanya jawab	
10:00 – 10:15	Istirahat / Rehat kopi	
10:15 – 10:35	Timotheus Lesmana	
10:35 – 10:55	Sapto Handoyo Sakti	
10:55 – 11:25	Diskusi /tanya jawab	
12.30 – 13.30	Istirahat, Sholat dan Makan Siang	Fatmawati Restaurant (Lt.1) Canari Café (Lt.1) Binenhoff Restaurant (Lt.1) Poolside (Lt.1)
13:30-16.25	SIDANG KELOMPOK 9	ISTANA BALLROOM (Lt. 2)
	PENDIDIKAN" Moderator: Prof. Dr. Susanto Zuhdi Pembicara:	
13:30 – 13:50	1. Prof. Dr. Komarudin Hidayat	
13:50 – 14:10	2. Prof. Dr. H.A.R. Tilaar	
14.10 – 14:30	3. Prof. Dr. Soedijarto, MA	
14.30 – 15:00	Diskusi /tanya jawab	
15:00 – 15:15	Istirahat / Rehat kopi	
15:15 – 15:35	4. Ibu Guru Kembar	
15:35 – 15:55	5. Butet Manurung	
15:55 – 16:25	Diskusi /tanya jawab	
13:30 – 18.25	SIDANG KELOMPOK 10	PAKUAN ROOM (Lt.1)
	"SENI PERTUNJUKAN" Moderator: Nano Riantiarno Pembicara:	

13:30 – 13.50	Prof. Dr. Rahayu Supanggah	
13:50 – 14:10	Prof. Sardono W. Kusumo	
14.10 – 14:30	Putu Wijaya	
14:30 – 14:50	Arthur S. Nalan, M.Hum	
14:50 – 15:10	Ben M. Pasaribu	
15:10 – 15:40	Diskusi /tanya jawab	
15:40 – 15:55	Istirahat / Rehat kopi	
15:55 – 16:15	Edy Luthan	
16:15 – 16:35	Endo Suanda	
16:35 – 16:55	Prof. Dr. I Wayan Rai	
16:55 – 17:15	Sapto Rahardjo	
17:15 – 17:35	Dr. Yulianti L. Parani	
17:35 -17:55	Drs. Tjetjep Suparman, M.Si	
17:55 -18:25	Diskusi /tanya jawab	
13:30 – 16:35	SIDANG KELOMPOK 11	GALUH ROOM (Lt. 1)
	"BAHASA DAN AKSARA" Moderator: Tito W Wojowasito, MA Pembicara :	
13:30 – 13.50	Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo	
13:50 – 14:10	Dr. Dendy Sugono	
14:10 – 14:30	Prof. Dr. I Made Suastika, S.U.	
14:30 – 15:00	Diskusi /tanya jawab	
14:30 – 14:45	Istirahat / Rehat kopi	
14:45 – 15:05	Dr. Ninie Susanti	
15:05 – 15:25	Prof. Dr. Robert Sibarani	
15:25 – 15:45	Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.	
15:45 – 16:05	Yusring Sanusi Baso, MA	
16:05 – 16:35	Diskusi /tanya jawab	
13:30 –15.00	SIDANG KELOMPOK 12	PADJADJARAN 1 (Lt.4)
	"MEDIA MASSA" Moderator: Kennedy Nurhan Pembicara	

13:30 – 13.50	1. Dr. Ishadi S.K, M.sc	
13:50 – 14:10	2. Dr. Fransesco Budi Hardiman	
14:10 – 14:30	3. Dr. Ade Armando	
14:30 – 15:00	Diskusi /tanya jawab	
14:30 – 14:45	Istirahat / Rehat kopi	
14:45 – 15:05	4. Djajat Sudrajat	
15:05 – 15:25	5. Satria Narada	
15:25 – 15:45	6. Dra. Sirikit Syah, MA	
15:45 – 16:05	7. KRMT Roy Suryo	
16:05 – 16:35	Diskusi /tanya jawab	
16.30 – 19.00	Istirahat & Makan Malam	
19.00 – 22.00	SIDANG KELOMPOK 13	ISTANA BALLROOM (Lt. 2)
	"EKONOMI KREATIF/INDUSTRI BUDAYA Moderator: Dr. Pudentia Pembicara	
19:00 – 19:20	Prof. Dr. Ing- Wardiman Djojonegoro	
19:20 – 19:40	Staf Ahli Menteri Bidang Promosi Ekspor, Departemen Perdagangan	
19:40 – 20:00	Prof. Dr. Edi Sedyawati	
20:00 - 20:30	Diskusi /tanya jawab	
20:30 -20:45	Istirahat / Rehat kopi	
20:45 – 21:05	Bambang Tri Rahardian	
21:05 – 21:25	Benhard Subiyakto	
21:25 - 21:45	Ipang Wahid	
21:45 – 22:15	Diskusi /tanya jawab	
19:00 –20.30	SIDANG KELOMPOK 14	PAKUAN ROOM (Lt.1)
	"DIPLOMASI KEBUDAYAAN" Moderator: Drs. Yunus Satrio Atmojo, M.Hum Pembicara	
19:00 – 19:20	Prof. Dr. Ida Sundari Husen	
19:20 – 19:40	Susanto Pudjomartono	
19:40 – 20:00	Prof. Dr. Zulhasril Nasir, M.Si	

20:00 - 20:30	Diskusi /tanya jawab	
20:30 -20:45	Istirahat / Rehat kopi	
	SIDANG KELOMPOK 15	GALUH ROOM (Lt.1)
	"ETIKA" Moderator: Prof. Dr. IBG Yudha Triguna, MS Pembicara:	
19:00 – 19:20	Prof. Dr. Franz Magnis Suseno	
19:20 – 19:40	Prof. Dr. Din Syamsuddin	
19:40 – 20:00	Prof. Dr. Alois Agus Nugroho	
20:00 – 20:30	Diskusi /tanya jawab	
20:30 -21:00	Istirahat / Rehat kopi	

Hari Jum'at, 12 Desember 2008: Pleno Penutupan

WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
06:30 – 07:30	Sarapan pagi di Hotel masing-masing	
07:30 – 08:30	Menuju Hotel Salak Bogor untuk Sidang Pleno	
	PLENO II	ISTANA BALLROOM (Lt. 2)
08:30 – 09:30	SC Rapat dan laporan masing-masing sidang kelompok	
09:30 – 10:30	Perumusan Hasil Kongres dan Rekomendasi oleh Tim Pengarah	
10:30 – 11:00	Penutupan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE	
11:00 – 12:00	Makan Siang	
12:00	Check-out dari Hotels	

Catatan: Pada saat berlangsungnya Kongres Kebudayaan Indonesia 2008, diselenggarakan Pentas Budaya untuk masyarakat di Plaza Balaikota Bogor.

B.2 Rumusan Hasil Kongres dan Rekomendasi

Setelah semua persidangan diselesaikan Tim Perumus berdasarkan pada sambutan, penyajian makalah dan diskusi dengan para peserta disepakati rumusan hasil kongres dikelompokkan menjadi 4 bidang terdiri atas 14 butir rumusan. Selain itu, kongres menyampaikan sembilan rekomendasi yaitu masalah pendidikan, peran pemerintah, kelembagaan, regulasi, otonomi daerah, kebijakan, dan filantropi. Bunyi lengkap hasil kongres adalah sebagai berikut.

Rumusan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008 di Bogor, Jawa Barat, 10-12 Desember 2008

I. PENDAHULUAN

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2008 memilih tema "Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan". Pemilihan ini didorong oleh kenyataan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya, flora dan fauna, serta kekayaan sumberdaya alam. Namun segala modal besar tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia belum dapat mengatasi berbagai krisis yang dihadapi, terutama krisis yang berkenaan dengan sistem nilai budaya, seperti etika, moral, kejujuran, dan etos kerja. Oleh karena itu perlu dicari formula untuk memanfaatkan modal budaya itu untuk kemajuan, perdamaian dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kongres diikuti oleh 500 peserta yang mewakili berbagai kepentingan baik perorangan maupun lembaga/institusi, akademisi, media massa, dan masyarakat umum. Kongres membahas 102 makalah yang berasal dari unsur budayawan, seniman, cendekiawan, akademisi dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kebudayaan serta pejabat pemerintah.

II. POKOK-POKOK BAHASAN KONGRES

1. *Kebijakan dan Strategi Kebudayaan*
2. *Film/Seni Media*
3. *Sastra*
4. *Bahasa dan Aksara*
5. *Seni Rupa*
6. *Media Massa*
7. *Seni Pertunjukan*
8. *Ekonomi Kreatif/Industri Budaya*
9. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*
10. *Diplomasi Kebudayaan*
11. *Warisan Budaya*
12. *Pendidikan*

13. *Filantropi Kebudayaan*
14. *Identitas Budaya*
15. *Etika*

III. RUMUSAN

A. MELANJUTKAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

1. *Membangun kebudayaan berbasis kemajemukan.*
2. *Membangun masyarakat multikultural.*
3. *Merumuskan kembali strategi kebudayaan.*

B. MENJAWAB TANTANGAN INDUSTRI BUDAYA DAN GLOBALISASI

1. *Menumbuhkan apresiasi dan mengembangkan industri budaya berkelanjutan.*
2. *Meningkatkan kualitas pendidikan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif*
3. *Menciptakan sistem keuangan yang mendorong industri budaya yang berkualitas.*
4. *Mengembangkan jaringan kerja yang mendukung produksi dan pemasaran industri budaya.*

C. MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA UNTUK BERSAING DI DUNIA INTERNASIONAL

1. *Menumbuhkan apresiasi terhadap identitas budaya bangsa yang multikultural.*
2. *Mendokumentasikan khasanah budaya Indonesia.*
3. *Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan produk budaya secara mandiri dan bermutu.*
4. *Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya yang berakar pada etika universal (demokrasi, hak azasi manusia dan pelestarian lingkungan).*

D. MENGELOLA WARISAN BUDAYA SEBAGAI MODAL UTAMA PENGUATAN PERADABAN DEMI KESEJAHTERAN BANGSA

1. *Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.*
2. *Mengembangkan sistem kemitraan berbasis masyarakat tempatan.*
3. *Mendorong pelaksanaan otonomi daerah untuk penguatan dan penciptaan budaya khas daerah.*

IV. REKOMENDASI

1. *Merevitalisasi lembaga, sarana dan aktivitas kebudayaan.*
2. *Pendidikan:*
 - a. *Memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menghargai keragaman budaya dan menjangkau masyarakat luas dari berbagai lapisan.*
 - b. *Menanamkan nilai-nilai budaya melalui arena publik dengan menekankan pada*

- penegakan hukum dan peraturan.
- c. Mengembangkan pemahaman geobudaya.
3. Kemitraan:
- Meningkatkan peran masyarakat dalam program Pembangunan Kebudayaan.
4. Peran Pemerintah:
a. Memfasilitasi upaya pengembangan kebudayaan di tingkat daerah dan nasional.
b. Mewujudkan pembentukan pusat-pusat kebudayaan di ranah internasional.
5. Kelembagaan:
Mewujudkan terbentuknya Departemen Kebudayaan.
6. Regulasi:
a. Melaksanakan Undang-Undang Penyiaran yang mewajibkan televisi berjarangan yang berwawasan budaya.
b. Melindungi karya-karya kreatif.
c. Memberikan insentif pajak untuk kegiatan kebudayaan.
d. Menyelesaikan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan dan menyelesaikan revisi UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
e. Menciptakan sistem penghargaan pada pelaku budaya.
7. Otonomi Daerah
Memberi peluang yang sebesar-besarnya pada daerah untuk melaksanakan pembangunan kebudayaan lokal.
8. Kebijakan
a. Merumuskan kembali strategi dan diplomasi kebudayaan.
b. Menyelenggarakan pendidikan berwawasan kebudayaan.
9. Filantropi
a. Meningkatkan kedermawanan di bidang kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Memberdayakan kemandirian masyarakat.

Bogor, 12 Desember 2008

Tim Perumus:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Al Azhar | 9. Kenedi Nurhan |
| 2. Ayu Sutarto | 10. Laretna T. Adhisakti |
| 3. Bambang Kiswanti | 11. Mukhlis PaEni |
| 4. Buntje Harbunangin | 12. Nunus Supardi |
| 5. Edi Sedyawati | 13. Pudentia MPSS |
| 6. Eka Budianta | 14. Restu Gunawan |
| 7. H. Hardi | 15. Sjafri Sairin |
| 8. Junus Satrio Atmodjo | 16. Susanto Zuhdi |

B.3 Catatan penyelenggaraan KK 2008

Harian Kompas menurun berita dengan judul Kongres Kebudayaan Usulkan Pembentukan Departemen Kebudayaan sbb: "Desakan pembentukan Departemen Kebudayaan kembali muncul dalam rekomendasi Kongres Kebudayaan Indonesia 2008. Kongres yang bertempat di Hotel Salak, Bogor, tersebut ditutup Menteri Kebudayaan

dan Pariwisata Jero Wacik, Jumat (12/12). Rekomendasi Kongres Kebudayaan Indonesia 2008 dirumuskan oleh 16 orang, yakni Al Azhar, Ayu Sutarto, Bambang Kaswanti, Buntje Harbunangin, Edi Sedyawati, Eka Budianta, H Hardi, Junus Satrio Atmodjo, Kenedi Nurhan, Laretna T Adhisakti, Mukhlis PaEni, Nunus Supardi, Pudentia MPPS, Restu Gunawan, Sjafrli Sairin, dan Susanto Zuhdi.

Ketika ditanya mengenai pembentukan Departemen Kebudayaan tersendiri Jero Wacik mengatakan, pembentukan departemen merupakan hak prerogratif presiden. Perubahan dari kementerian negara menjadi departemen, menurut dia, setidaknya telah menunjukkan komitmen untuk lebih memperhatikan kebudayaan. Hasil rekomendasi itu sendiri akan dibawa ke Presiden. Salah satu anggota tim perumus, Mukhlis PaEni, menyatakan, dengan adanya departemen kebudayaan, diharapkan kebudayaan lebih fokus diperhatikan. Selama ini, “kebudayaan masih terpinggirkan”.

Dari seluruh paparan mengenai perjalanan KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka sampai dengan KK tahun 2013 berarti sudah 15 kali kongres. Banyak keputusan yang dihasilkan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan bangsa. Sesuai dengan kodrat kebudayaan yang memiliki sifat dinamis, selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, forum kongres dan konferensi menjadi media untuk bersama-sama mengevaluasi dan menata ulang konsep, kebijakan dan strategi dari satu masa ke masa berikutnya.



Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ir. Aburizal Bakrie dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir. Jero Wacik SE, meresmikan pembukaan KKI 2008 dengan memukul gendang.

B.4 Pembentukan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI)

Menindaklanjuti rekomendasi KK 2003 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membentuk lembaga khusus yang bersifat independen. Anggotanya dari kalangan budayawan dan cendekiawan dan untuk mendukung aktivitas lembaga itu difasilitasi oleh Pemerintah. Dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.27/UM.001/MKP/04, tanggal 19 Mei 2004, dibentuk *Badan Pekerja Antarkongres Kebudayaan*, dengan tugas seperti tersebut di atas. Tetapi dalam kenyataan badan ini hingga berlangsung KK tahun 2008 tidak dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setelah KK tahun 2008 di Bogor, dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, No. KM.02/OT.001/MKP/2009, tanggal 6 Februari 2009 dibentuk *Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI)*, dan *Badan Pekerja Antarkongres Kebudayaan* dibubarkan.

Menurut Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbud-par) Drs. Tjetjep Suparman M.Si dalam sambutan peresmian menyatakan bahwa Depbudpar membentuk dan memfasilitasi lembaga khusus yang independen dengan anggota dari kalangan budayawan dan cendekiawan untuk mengawal perjalanan keputusan kongres serta mempersiapkan dan turut melaksanakan kongres berikutnya. Beberapa kali KK yang telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka (1918) hingga sekarang telah melembaga dan memberi manfaat multidimensi.

Berkenaan dengan itu maka peserta kongres sepakat untuk membentuk lembaga yang dapat menjadi motor penggerak semangat berkebudayaan dari masa ke masa. Berdasarkan rekomendasi Kongres Kebudayaan tahun 2003 di Bukittinggi dan tahun 2008 di Bogor perlu dilakukan upaya merevitalisasi lembaga, sarana, dan aktivitas kebudayaan. Setelah melalui proses dialog multi-pihak dengan melibatkan unsur budayawan, akademisi, seniman, swasta, lembaga masyarakat dan media masa maka disepakati untuk membentuk forum (organisasi) yang diberi nama **BADAN PEKERJA KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA, disingkat BPKKI**. Badan ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.02/OT.001/MKP/2009, tanggal 6 Februari 2009. Badan ini telah dilengkapi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR (AD) BADAN PEKERJA KONGRES KEBUDAYAAN

PEMBUKAAN

Kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, memiliki peran amat penting dalam pembentukan jati diri bangsa. Kebudayaan juga menjadi acuan dalam menata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, agama, dan budaya (*pluralis*), keanekaragaman itu merupakan kekayaan. Keanekaragaman yang dibingkai dalam semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" ternyata

masih memungkinkan terjadinya berbagai macam konflik. Dinamika interaktif antara kebudayaan nasional dan kebudayaan suku bangsa, antara kebudayaan daerah yang satu dengan yang lain, serta antara kebudayaan nasional dan daerah dengan kebudayaan internasional belum sepenuhnya mendukung hubungan dalam keberagaman itu.

Ke depan, tantangan itu akan semakin kompleks. Berbagai perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang yang berlangsung amat cepat dan mendasar, berimplikasi pada kebudayaan. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dan penerapan demokrasi secara lebih luas, mempunyai pengaruh besar terhadap konsep, kebijakan dan strategi pengembangan kebudayaan bangsa. Demikian pula halnya dengan derasnya arus informasi, perdagangan bebas dan globalisme, dapat dipastikan akan berpengaruh besar pula terhadap proses menjadi bangsa.

Menyadari bahwa kebudayaan bangsa tidak hanya dilestarikan oleh masyarakat pemilikinya tetapi juga dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, sejumlah budayawan, seniman, pakar budaya, pemerhati budaya, dan tokoh masyarakat bersepakat secara periodik menyelenggarakan Kongres Kebudayaan (KK). Berbagai KK yang telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka (KK pertama tahun 1918) hingga sekarang telah melembaga dan memberi manfaat multidimensi. Berkenaan dengan itu maka peserta kongres sepakat untuk membentuk lembaga yang dapat menjadi motor penggerak semangat berkebudayaan dari masa ke masa. Berdasarkan rekomendasi Kongres Kebudayaan tahun 2003 di Bukittinggi dan tahun 2008 di Bogor perlu dilakukan upaya merevitalisasi lembaga, sarana, dan aktivitas kebudayaan.

Setelah melalui proses dialog multipihak dengan melibatkan unsur budayawan, akademisi, seniman, swasta, lembaga masyarakat dan media masa maka disepakati untuk membentuk forum (organisasi) yang diberi nama BADAN PEKERJA KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA. Untuk mencapai tujuan dari pendirian lembaga itu maka perlu menetapkan Anggaran Dasar (AD) sebagai berikut.

BAB I

U M U M

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1)
- (2) Organisasi ini bernama Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia, disingkat BPKKI.
- (3) BPKKI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Waktu

Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.02/OT.001/ MKP/2009, tanggal 6 Februari 2009.

Pasal 3 Asas dan Dasar

BPKKI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 Tujuan

BPKKI bertujuan untuk:

- (1) Membahas, merumuskan dan menyampaikan usul dan/atau saran mengenai masalah-masalah strategis di bidang kebudayaan.
- (2) Mengawal, mensosialisasikan dan mengadvokasikan rumusan usulan dan saran mengenai masalah-masalah strategis di bidang kebud. bersama lembaga-lembaga pendidikan, media massa, pemerintah, swadaya masyarakat, swasta, perorangan dan masyarakat umum, sehingga terjadi gerakan bersama dalam memecahkan masalah-masalah strategis dan meningkatkan kualitas hidup berbudaya.
- (3) Menghimpun berbagai aktivitas kongres yang bermuatan budaya.
- (4) Hal-hal yang berkenaan dengan tujuan diatur dalam ART.

Pasal 5 Fungsi

- (1) BPKKI berfungsi sebagai perangkat pendukung bagi Konges Kebudayaan yang dibentuk, dibubarkan, atau akan diteruskan berdasarkan amanat kongres.
- (2) Merencanakan dan turut melaksanakan kongres berikutnya.
- (3) BPKKI berfungsi memantau dan bermitra dengan berbagai kegiatan kongres yang bermuatan budaya.

BAB II KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Pengurus BPKKI ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri yang mengurus kebudayaan.
- (2) Hal-hal mengenai anggota diatur dalam ART.

Pasal 7 Hak dan Kewajiban

- (1) Masing-masing anggota pengurus BPKKI mempunyai hak untuk bicara.
- (2) Masing-masing anggota pengurus BPKKI mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (3) Hal-hal mengenai hak dan kewajiban pengurus dan anggota BPKKI diatur dalam ART.

BAB III ORGANISASI

Pasal 8 Bentuk dan Sifat

- (1) BPKKI adalah sebuah forum kebudayaan yang berhubungan dengan aktivitas kongres tentang kebudayaan Indonesia.
- (2) BPKKI bersifat bebas, tidak terikat pada kepentingan pribadi, golongan sosial, politik, suku bangsa, dan ras tertentu, serta bersifat nirlaba.
- (3) Hal-hal mengenai bentuk dan sifat diatur dalam ART.

Pasal 9 Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab

- (1) Tugas Pengurus BPKKI adalah:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas selama masa jabatan, sejak ditetapkan sam-pai dengan terselenggaranya kongres berikutnya.
 - b. Menyusun dan mengevaluasi serta melaksanakan program kerja.
 - c. Mengadakan dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan instansi Pemerintah dan organisasi lainnya.
- (2) Kewenangan Pengurus BPKKI adalah:
 - a. Menjalankan dan mengendalikan jalannya organisasi.
 - b. Bertindak untuk dan atas nama organisasi.
- (3) Tanggung jawab Pengurus BPKKI adalah:
 - a. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - b. Menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - c. Pengurus melaksanakan tugas organisasi sehari-hari, dipimpin oleh Ketua.
- (4) Hal-hal mengenai Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab diatur dalam ART.

Pasal 10 Pelindung dan Pengarah

- (1) Pelindung adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.
- (2) Pengarah adalah pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

BAB IV RAPAT-RAPAT

Pasal 11

- (1) Rapat Pengurus BPKKI terdiri atas:

- a. Rapat Pleno, oleh seluruh anggota.
 - b. Rapat Terbatas sesuai kebutuhan.
 - c. Rapat Pengarah.
- (2) Hal-hal mengenai Rapat-rapat diatur dalam ART.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 12 Kekayaan

- (1) Kekayaan BPKKI berasal:
- a. Hasil dan pendapatan dari usaha sendiri.
 - b. Bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang tidak mengikat.
 - c. Subsidi pemerintah.
 - d. Pendapatan lain yang sah.
- (2) Hal-hal mengenai kekayaan diatur dalam ART.

BAB VI LAMBANG

Pasal 13

- (1) Lambang BPKKI terdiri atas sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat gambar perahu, laut berwarna biru dan ombak, melambangkan kebudayaan yang penuh dinamika dan kreativitas. Gambar tersebut dilingkari bendera merah putih dan tulisan BADAN PEKERJA KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA disingkat BPKKI.
- (2) Hal-hal mengenai lambang diatur dalam ART.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Perubahan AD dapat dilakukan setelah menelaah dan mencermati pendapat atau masukan yang dikemukakan dalam Rapat Umum Anggota.

BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

Anggaran Rumah Tangga BPKKI dan peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan AD ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam AD diatur dalam ART dan atau Keputusan Pengurus yang tidak bertentangan dengan AD dan ART.

Pasal 17

Anggaran dasar ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2009.

Ditetapkan di Jakarta, 9 Juli 2009

Lampiran:

1. Susunan Pengurus BPKKI

- Pelindung: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
 - Pengarah: 1. Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film; 2. Dirjen Sejarah dan Purbakala; 3. Sekretaris Jenderal Depbudpar; 4. Inspektur Jenderal.
 - Badan Pekerja: Mukhlis PaEni (Ketua); Junus Satrio Atmojo (Sekretaris); Anggota: Bunce Harbunangin, Pudentia, H. Hardi, Susanto Zuhdi, Nunus Supardi, Kenedi Nurhan.
1. Sekretariat: staf dari Sekretariat Direktorat Jenderal NBSF; 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Sejarah Purbakal.

2. Lambang BPKKI dan maknanya:

Bentuk lingkaran melambangkan kebudayaan selalu berputar, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Laut dan perahu relief Borobudur melambangkan kebudayaan dinamis, menggelora siap menghadapi tantangan. Ornamen melambangkan kreativitas.



BAGIAN 2

KONGRES PANCASILA, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN DIASPORAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian II dari buku "BIANGLALA BUDAYA" yang merupakan rekam jejak perjalanan **Kongres Kebudayaan** yang kini menginjak usia ke-95 tahun, memaparkan berbagai kongres yang membahas tentang Pancasila serta pendidikan, pengajaran dan kebudayaan pemuda. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Bahwa sesungguhnya negara Republik Indonesia berdiri dengan harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Harapan tersebut berpijak pada falsafah dan visi kebangsaan yang dibangun atas dasar pengalaman kesejarahan dan kerohanian, kemajemukan Indonesia dengan posisi strategisnya dalam pergaulan antarbangsa, dan dinamika perkembangan bangsa. Maka, disusunlah suatu konsensus dasar kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Dengan didorong oleh keinsyafan bahwa jalan kemajuan suatu bangsa hanya akan terwujud apabila senantiasa berpegang teguh pada jatidirinya, maka Universitas Gadjah Mada (Pusat Studi Pancasila) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merasa perlu menjaga komitmen terhadap Pancasila dengan menyelenggarakan Kongres Pancasila (KP). Kongres yang diselenggarakan di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tanggal 31 Mei 2009

"Menjadi satu bangsa baru" yang merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan, telah menjadi tekad yang bulat dari seluruh penduduk yang mendiami wilayah Nusantara. Berdasarkan pengalaman, hidup bersuku-suku dalam satu wilayah tanpa diikat oleh konsep "*menjadi satu bangsa*" merupakan titik terlemah untuk dijadikan peluang pihak lain memecah-belah hubungan antarsuku bangsa. Terpecah belah berarti tidak bisa menegakkan kerukunan dan memperoleh rasa aman untuk dapat membangun masa depan dengan tenang.

Masyarakat yang terdiri atas ratusan suku bangsa (multietnik) serta anekaragam budaya (multikultur) itu masing-masing memiliki ikatan adat-istiadat yang amat kuat. Masing-masing ingin mempertahankan budaya dan bahasanya sebagai warisan dari nenek moyangnya. Budaya itu telah menjadi kebanggaan dan identitas, menjadi penanda jati diri yang melekat erat dalam dirinya. Oleh karena itu tidak mudah untuk dapat melepaskan identitas itu lalu beralih menjadi "*satu bangsa*" yang benar-benar

satu meskipun mungkin hal itu hanya dalam bentuk konsep pemikiran saja. Keyakinan yang menyatakan bahwa "*bahasa menunjukkan bangsa*", termasuk juga "*budaya*" telah melekat demikian kuat sehingga tidak mudah untuk mengubahnya.

Dilihat dari sisi kebudayaan, untuk mewujudkan keinginan "*satu bangsa*" itu diperlukan pengorbanan dari berbagai pihak, terutama dari para pendukung kebudayaan suku bangsa. Dapat dibayangkan, betapa peliknya bagi para pendiri bangsa ketika masalah "*satu bangsa*" itu dibahas untuk mendapatkan titik temu kesepakatan, mengingat beranekaragamnya kebudayaan suku bangsa. Menjadi satu bangsa berarti harus memiliki "*kebudayaan nasional Indonesia*", sementara sejak berabad-abad di masing-masing suku bangsa telah memiliki budaya sendiri sebagai "*budaya suku bangsa*".

Dari hasil perbincangan untuk mewujudkan keinginan '*menjadi satu bangsa*' itu seperti apa, akhirnya dapat disepakati, dan kesepakatan itu dituangkan ke dalam landasan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dalam UUD tersebut di dalamnya antara lain memuat Pasal 32 tentang kebudayaan nasional Indonesia. Dalam Pasal 32 dinyatakan: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Dengan rumusan yang singkat ini pertanyaan yang muncul adalah; "*Budaya yang mana yang disebut sebagai kebudayaan nasional Indonesia itu? Bagaimana posisi kebudayaan daerah dengan lahirnya kebudayaan nasional Indonesia itu?*" Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul setiap saat.

Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu diberikanlah penjelasan sebagai berikut: "*Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya*". Dari kalimat penjelasan ini dapat diartikan bahwa kebudayaan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah seluruh kebudayaan daerah yang telah berkembang di seluruh wilayah nusantara. Dalam hal ini tidak ada pemikiran untuk memilih dan menetapkan salah satu di antara ratusan budaya daerah untuk dijadikan budaya nasional.

Konsep pemikiran seperti ini merupakan pilihan yang tepat dan sungguh bijaksana. Memilih satu di antara ratusan pilihan, hanya akan menumbuhkan prasangka negatif dari pihak budaya daerah yang tidak dipilih, karena merasa dalam posisi lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang dipilih. Dengan tidak dilakukannya pemilihan berarti posisi seluruh kebudayaan daerah pada dasarnya setara, tidak ada kebudayaan daerah lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya. Semua kebudayaan daerah diberikan keleluasaan untuk tetap hidup serta "*saling bersanding*" dalam kesetaraan dan "*saling menghormati*" satu sama lain dalam perbedaan. Dan bukan sebaliknya untuk '*saling bertanding*' untuk memposisikan diri lebih unggul dari yang lain, karena hal ini hanya akan memperuncing perbedaan. Meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, diikat dalam bingkai "*budaya nasional Indonesia*", seperti yang dikehendaki oleh semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*".

Konsep pemikiran yang telah diletakkan para pendiri bangsa sangat tepat dan bijaksana, karena fokusnya adalah pada pemahaman hidup bersama dalam perbedaan, baik secara individual maupun kelompok dalam masyarakat. Meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, *Bhinneka Tunggal Ika*. Konsep inilah yang seharusnya menjadi acuan kita sebagai bangsa, **dalam bentuk multibudaya (*multiculturalism*)**, dan bukan sebaliknya dalam bentuk peleburan (*melting pot*) menjadi "**dari yang berbeda-**

beda disatukan”. Justru dengan banyaknya perbedaan itulah akan lahir sebuah **“mozaik”** yang indah, unik dan menarik.

Dengan UUD 1945 beserta penjelasannya itu bukan berarti masalah kebudayaan daerah dalam kaitan dengan kebudayaan nasional sudah selesai. Masih terdapat beberapa masalah kebudayaan daerah yang belum disepakati secara final, baik di lingkungan intern masing-masing kebudayaan suku bangsa maupun dengan kebudayaan nasional dan internasional. Hubungan antara kebudayaan daerah dan nasional yang digariskan dalam semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ masih harus disepakati langkah operasionalnya. Demikian pula halnya tentang ‘Kebijakan Kebudayaan Nasional’ (*National Cultural Policy*), dan di mana peranan masing-masing pihak masih dipersoalkan. Masih diperlukan berbagai *“dialog buday”* antarsuku dalam skala kecil yang bersifat lokal dan regional, dan skala besar dalam bentuk nasional dalam Kongres Kebudayaan. Kongres kebudayaan suku bangsa pertama tahun 1918, yaitu Kongres Kebudayaan Jawa.

Sementara itu keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang seharusnya sudah harus menyatu dalam diri setiap generasi bangsa, ternyata belakangan ini dirasakan mulai diabaikan. Menurut **Ahmad Syafii Maarif** saat ini Pancasila *”tak lagi bertaji”*. Artinya, Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan selama 40 tahun dengan menguras energi bangsa agar dapat diterima oleh mayoritas mutlak rakyat Indonesia untuk menjadi dasar negara yang permanen telah disingkirkan begitu saja dalam praktik oleh parewa politik, baik di Senayan, di daerah, maupun di lingkungan eksekutif dan yudikatif, dari pucuk sampai tingkat paling bawah. (Kompas, 10/4/2012). Sementara menurut Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari

”karut-marut reformasi ini, hanya bisa diselesaikan jika bangsa Indonesia sungguh-sungguh mau melakukan reformasi kebudayaan. Kemosotan karakter sebagai bangsa yang ditunjukkan justru setelah masa reformasi menandakan ada kesalahan serius dari budaya bangsa ini”. (Kompas, 23/5/2015).

Menghadapai kondisi bangsa seperti ini dicanangkan 4 program pilar bangsa yang harus terus ditanamkan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menghimpun pandangan masyarakat tentang penanaman nilai-nilai Pancasila, Pusat Studi Pancasila menyelenggarakan Kongres Pancasila.

Selain itu, dalam Bagian juga akan dipaparkan kongres lainnya yang mempunyai hubungan dekat dengan masalah Pancasila. Kongres tersebut adalah: (1) Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; (2) Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia; (3) Kongres Diaspora Indonesia. Gambaran masing-masing kongres adalah sebagai berikut.

BAB II

KONGRES PANCASILA

Bagian paling penting yang harus disiapkan oleh para pendiri bangsa selain menyusun UUD 1945 adalah menyiapkan dasar Negara. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bekerja keras untuk menyiapkan segala perangkat yang diperlukan bagi sebuah Negara dan pemerintahan yang baru bernama Indonesia.

Setelah para anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, hari berikutnya (29 Mei 1945) langsung mengadakan sidang pertama. Dalam sidang pertama itu khusus dibicarakan mengenai dasar negara. Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Muhammad Yamin yang menyampaikan usul secara lisan menyebut lima dasar, yaitu: (1) Peri Kebangsaan; (2) Peri Kemanusiaan; (3) Peri Ketuhanan; (4) Peri Kerakyatan; (5) Kesejahteraan Rakyat. Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima dasar, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Persatuan Indonesia; (3) Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Selain usul dari Yamin, pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara dengan jumlah dasar negara yang sama (5 butir) dengan Yamin tetapi dengan rumusan yang berbeda. Kelima dasar yang oleh Bung Karno disebutnya Pancasila itu terdiri atas: (1) Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia); (2) Internasionalisme (Perikemanusiaan); (3) Mufakat atau Demokrasi; (4) Kesejahteraan Sosial; dan (5) Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Untuk merumuskan lebih lanjut dari dua pandangan itu para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah Panitia Kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Agar mendapatkan rumusan dasar negara yang dapat diterima semua pihak Panitia Kecil harus melakukan beberapa kali sidang.

Dalam sidang BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah rumusan rancangan Hukum Dasar. Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tibalah saat yang “menegangkan”, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang yang menguasai wilayah Indonesia menyerah kepada Sekutu. Dengan demikian peluang bangsa Indonesia menjadi merdeka menjadi terbuka, dan klimaksnya pada tanggal 17 Agustus 1945 para pendiri bangsa sepakat untuk memproklamasikan diri menjadi bangsa merdeka.

Mengenai penyusunan dasar negara setelah melalui perdebatan yang panjang akhirnya para anggota PPKI berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Pancasila, berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh Bung Karno. Rumusan itu dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 maka resmi Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia dengan rumusan sebagai berikut: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945 ketika Bung Karno menyampaikan pidato tentang dasar Negara, oleh Dr. Radjiman sebagai Ketua BPUPKI pidato itu diberi judul “**Lahirnya Pancasila**”.

Dalam perjalanannya hingga memasuki masa reformasi, Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara, dan berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (way of life), sebagai acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dinilai belum difahami, dihayati dan diamalkan secara nyata. Ada kecenderungan, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi sesuai dengan kepentingan penguasa. Pancasila tidak lagi digunakan sebagai pedoman hidup bangsa. Sedikit demi sedikit mulai muncul adanya indikasi degradasi nilai-nilai luhur Pancasila. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila mulai marak terjadi di masyarakat dan di pemerintahan. Hal itu apabila dibiarkan dapat berakibat sangat fatal terhadap kehidupan bangsa, dan bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina dan dikembangkan.

Didasari oleh problematika kebangsaan yang serius itu, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada (PSP-UGM) melakukan berbagai kajian untuk mendapatkan suatu formula dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila ke depan. Salah satu dari program itu adalah menyelenggarakan Kongres Pancasila. Kongres ke-1 dengan tema “Meneguhkan, mereaktualisasikan, dan merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila menuju terwujudnya Indonesia yang modern, demokratis, adil dan sejahtera” dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Mei - 1 Juni 2009, hasil kerja sama antara Universitas Gajah Mada dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Ketua MK Mahfud M, yang paling membahayakan negara dan bangsa saat ini bukan hanya korupsi uang atau kekayaan negara, melainkan juga korupsi dalam pembuatan peraturan dan kebijakan. Apabila korupsi seperti ini terjadi, maka akan timbul kasus korupsi yang berkesinambungan. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa “sekarang ini tidak ada lagi lembaga yang menangani aplikasi Pancasila. Bahkan, di dalam pendidikan pun Pancasila bukan lagi menjadi pelajaran wajib. Jika Pancasila tidak lagi menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat, berarti secara sengaja atau tidak sengaja telah meminggirkan Pancasila sebagai ideologi negara,

Kongres tahun 2009 disusul oleh kongres-kongres berikutnya, dan terakhir diselenggarakan tahun 2013 di UGM. Gambaran rekam jejak Kongres Pancasila adalah sebagai berikut.

A. Kongres Pancasila 2009

Kongres Pancasila (KP) pertama diselenggarakan di Universitas Gajah Mada tanggal 31 Mei - 1 Juni 2009. Kongres ini memilih tema **“Meneguhkan, mereaktualisasikan, dan merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila menuju terwujudnya Indonesia yang modern, demokratis, adil dan sejahtera”**. Kongres ini menghasilkan deklarasi yang diberi nama sesuai dengan nama kampus UGM “Bulaksumur” yaitu dengan judul Deklarasi Bulaksumur. Isi secara lengkap dari deklarasi itu adalah sebagai berikut.

DEKLARASI BULAKSUMUR

Bahwa sesungguhnya negara Republik Indonesia berdiri dengan harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Harapan tersebut berpijak pada falsafah dan visi kebangsaan yang dibangun atas dasar pengalaman kesejarahan dan kerohanian, kemajemukan Indonesia dengan posisi strategisnya dalam pergaulan antarbangsa, dan dinamika perkembangan bangsa. Maka, disusunlah suatu konsensus dasar kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Bahwa dengan karunia kemerdekaan dan segala anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada Bangsa Indonesia, pelbagai usaha pembangunan dan reformasi masih menyisakan kesenjangan yang lebar antara harapan-harapan ideal dan kenyataan. Keberagamaan tidak mendorong keinsyafan beretika, globalisasi tidak mengasah kepekaan kemanusiaan, kemajemukan tidak memperkuat daya toleransi dan sinergi, demokrasi tidak membawa pemberdayaan dan kedaulatan rakyat, kekayaan alam tidak menghasilkan kemakmuran yang berkeadilan.

Dengan didorong oleh keinsyafan bahwa jalan kemajuan suatu bangsa hanya akan terwujud apabila senantiasa berpegang teguh pada jatidirinya, maka Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merasa perlu menjaga komitmen terhadap Pancasila dengan menyelenggarakan Kongres Pancasila di kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kongres yang diikuti oleh berbagai komponen bangsa akhirnya sepakat menyatakan pendirian dan aspirasi sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pancasila merupakan sistem nilai filsafati terbaik yang dimiliki Bangsa Indonesia sebagai dasar dan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan oleh karenanya, segenap komponen Bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi, menjaga, mengaktualisasikan dan membela Pancasila.*
- 2. Pancasila adalah sistem nilai fundamental yang harus dijadikan dasar dan acuan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kersejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan*

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedilan sosial, dalam rangka mewujudkan visi bangsa yakni Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

3. Pancasila adalah dasar negara, oleh karenanya Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolok ukur moral bagi penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.
5. Negara harus bertanggung jawab untuk senantiasa membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga.

Yogyakarta, 1 Juni 2009

Peserta Kongres Pancasila

B. Kongres Pancasila II 2010

KP II masih dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, yang dinilai masih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Belum ada konsistensi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pancasila telah menjadi Dasar Negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia, dan menjadi platform nasional untuk membangun masa depan. Komitmen pimpinan nasional dengan mencanangkan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, menunjukkan awal yang baik bagi bangsa Indonesia untuk membangun identitas nasional sebagai bangsa yang bermartabat dan maju. Kongres kedua memilih tema "**Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya**".

Hadir juga sejumlah pejabat Negara, tokoh-tokoh nasional seperti Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Wakil Ketua I MPR RI, Wakil Ketua II MPR RI, Sekjen MPR RI, Direktur Pusat Depdagri, sejumlah pejabat dari Lemhanas, MK, para gubernur dan bupati sejah yang hadir. Hadir juga sejumlah pejabat Negara, tokoh-tokoh nasional seperti Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Wakil Ketua I MPR RI, Wakil Ketua II MPR RI, Sekjen MPR RI, Direktur Pusat Depdagri, sejumlah pejabat dari Lemhanas, MK, para gubernur dan bupati.

Sidang kongres kedua di bagi menjadi 4 kali sidang pleno. Sidang Pleno 1 membahas "Tinjauan historis atas konsistensi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara" dengan narasumber: (1) Dr. A.B. Kusuma; dan (2) Prof. Dr. Suhartono W. Pranoto. Sidang Pleno 2 mengenai "Tinjauan filosofis atas prinsip-prinsip penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan implementasinya" dengan narasumber: (1) Prof. Dr. Ketut Rinjin; (2) Prof. Dr. Kaelan, M.S.; (3) Prof. Dr. Sastrapratedja, S.J. Selanjutnya, sidang Pleno 3 dengan subtema "Tinjauan Yuridis-

Konstitusional atas konsistensi nilai-nilai Pancasila dalam amandemen UUD 1945 dan proses legislasi” dengan Narasumber:(1) Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Hum; (2) Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D; (3) Prof. Dr. Lukman Saifuddin. Sidang pleno terakhir, yaitu siding Pleno 4 membahas subtema “Tinjauan Sosio-Kultural atas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Yang ditunjuk sebagai narasumber adalah: (1) Dr. AAGN Ari Dwipayana; (2) Prof. Dr. Katjung Maridjan; (3) Prof. Dr. Tjipta Lesmana; (4) Prof. Dr. Gde Parimarta.

Seperti halnya pada Kongres Pancasila I, pada kongres yang kedua juga dikeluarkan suatu deklarasi. Isi deklarasi itu adalah sebagai berikut:

DEKLARASI KONGRES PANCASILA II DI KAMPUS UNIVERSITAS UDAYANA, BALI 1 JUNI 2010

Kongres Pancasila II di kampus Universitas Udayana sepakat mengeluarkan **deklarasi** sebagai berikut:

1. Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan urutan. Kerancuan tentang sejarah Pancasila, mengharuskan perlu adanya pelurusan sejarah dan selanjutnya dilakukan sosialisasi yang benar.
2. Sejarah menunjukkan bahwa implementasi dan konsistensi Pancasila mengalami pasang-surut yang disebabkan oleh faktor internal, eksternal, dan komitmen pimpinan nasional. Oleh karenanya, pimpinan nasional sudah seharusnya memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara.
3. Paska reformasi nilai-nilai Pancasila terpinggirkan dalam sistem hukum nasional. Perlu membangun Rumah Hukum Pancasila dengan upaya yang lebih progresif, yakni dengan merestorasi paradigma ilmu hukum di Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila.
4. Diperlukan institusi yang mempunyai legitimasi di tingkat nasional yang memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang terbuka bagi pemikiran kritis terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan semangat dan tantangan jaman akan sangat penting bagi pembangunan karakter bangsa, dan mencegah adanya generasi Pancasila yang hilang.
5. Pertarungan kepentingan yang berbasis fundamentalisme pasardan fundamentalisme agama yang merasuk dalam produk legislasi dan regulasi, menjadikan prinsip kehidupan berbangsa tidak lagi mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Untuk itu perlu gerakan penguatan dan pengawalan ideologi Pancasila, khususnya dalam politik legislasi pada saat ini.

Denpasar, 1 Juni 2010

Peserta Kongres Pancasila II

C. Kongres Pancasila 2011

KP III diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 31 Mei – 1 Juni 2011. Kongres mengambil tema: “**Harapan, Peluang, dan Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila**”. Adapun sub-tema yang akan dibahas adalah: (1) Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-nilai Pancasila; (2) Aktualisasi, Sosialisasi, dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila; (3) Pelembagaan dan Penge-lolaan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila.

Penyelenggaraan Kongres Pancasila III merupakan hasil kerjasama antara Pusat Studi Pancasila UGM, MPR RI dan Universitas Airlangga serta didukung beberapa Perguruan Tinggi di Surabaya mengundang para Guru, Dosen, Peneliti, Mahasiswa, Birokrat, Legislator, Politisi, Tokoh Masyarakat dan siapa pun yang memiliki minat dan kepedulian terhadap Pancasila.

Persidangan diatur sebagai berikut.

PLENO I: membahas subtema “Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Pancasila” dengan narasumber: (1) Prof. Dr. Aloys A Nugroho; (2) Dr. Soekarwo; (3) Prof. Dr. Ayu Sutarto; (4) Prof. Dr. Puruhito.

Pleno II: pada sidang Pleno II dengan subtema “Aktualisasi, Sosialisasi, dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila’ yang menjadi nasumber adalah: (1) Prof. Dr. Nursyam, M.Si.; (2) Prof. Dr. Muchlan Samani.

Pleno III: sidang Pleno III dengan subtema “Pelembagaan dan Pengelolaan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila” yang ditunjuk menjadi narasumber adalah: (1) Prof. dr. Sam Suharto; (2) Prof. Dr. Sofian Effendi; (3) Prof. Dr. Jimly Assidiqy.

Pleno IV: adapun sidang Pleno IV membahas subtema “Dinamika Praktik Kehidupan Berpancasila di Masyarakat” dengan pembicara: (1) Prof. Dr. Syafii Ma’arif; (2) pdt. Simon Filantropa Budi Santoso.

Setelah sidang pleno diadakan sidang-sidang komisi terdiri atas: (1) Komisi 1: Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Pancasila; (2) Komisi 2 : Aktualisasi, Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila; (3) Komisi 3: Pelembagaan dan Pengelolaan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila; dan (4) Komisi 4: Dinamika Praktik Kehidupan Berpancasila di Masyarakat. Selain itu setelah sidang pleno II hari pertama diselenggarakan acara “Presentasi” dalam bentuk panel, terdiri atas: (1) Panel I-A, Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Pancasila; (2) Panel I-B, Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Pancasila; (3) Panel II-A, Aktualisasi, Sosialisasi, dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila; (3) Panel II-B, Aktualisasi, Sosialisasi, dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila; (4) Panel III-A, Pelembagaan dan Pengelolaan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila; dan (5) Panel III-B, Pelembagaan dan Pengeolaan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila. Hasil Kongres Pancasila III adalah sebagai berikut.

RUMUSAN HASIL KONGRES PANCASILA III
SURABAYA, 31 Mei - 1 Juni 2011

Setelah mencermati pidato kunci wakil ketua MPR RI, pemaparan dan diskusi para panelis dan aspirasi yang berkembang pada sidang pleno dan komisi pada Kongres Pancasila III dihasilkan perumusan sebagai berikut:

1. Pancasila digali dari nilai empiris-ideal bangsa yang berbhinneka tunggal ika, dengan pengakuan dan penerimaan akan perbedaan aspek berbudaya dan beragama. Dimensi ideologis, politis, ekonomi, sosial dan kultural, perbedaan itu terstruktur dalam nilai kesetaraan yang mewujudkan semangat gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal.
2. Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan komitmen seluruh penyelenggara dan warga negara.
3. Negara pada saat ini sedang gawat karena kita membiarkan Pancasila. Kegawatan tersebut dipicu oleh perubahan sistem norma setelah terjadi amandemen UUD 1945 yang di dalamnya tinggal 25 pasal yang asli dan 174 pasal yang baru. Hal itu, menimbulkan kekacauan sistem kelembagaan, tidak berfungsi secara optimal, mal fungsi, disfungsi sehingga dalam menjalankan tugasnya terjadi tumpah tindih dan ada tugas yang terlantar. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang bisa melakukan pembudayaan ideologi. Lembaga tersebut juga mempunyai fungsi pendidikan, pengkajian Pancasila, dan kontrol kebijakan atas peraturan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam situasi krisis sekarang ini, dasar hukum bagi pendirian lembaga tersebut tidak harus dengan UU baru, melainkan cukup dengan INPRES yang disertai petunjuk teknis pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945.
4. Pancasila harus memimpin dan mengarahkan bangsa dalam situasi yang gawat sekalipun, artinya sebagai dasar statis dan bintang petunjuk arah negara dan bangsa.
5. Nilai-nilai Pancasila selain diajarkan sebagai mata pelajaran Pancasila yang mandiri juga harus diintegrasikan pada semua pelajaran yang disesuaikan dengan materi masing-masing.
6. Keteladanan nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari organisasi terkecil (keluarga) dengan cara pembiasaan kehidupan sehari-hari, sekolah, masyarakat, dan bangsa.
7. Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila perlu dirumuskan dengan cara yang sederhana pada pelbagai level pendidikan mulai dari PAUD sampai Pendidikan Tinggi.
8. Pembudayaan Pancasila bersifat wajib bagi penyelenggara Negara, Partai politik, masyarakat pers dan dunia usaha, dan seluruh warga.
9. Selain melalui pendidikan, pembudayaan Pancasila melalui pendekatan budaya dan keteladanan para penyelenggara negara.
10. Dalam era globalisasi ini, ada penajajahan pola pikir yang tidak disadari dan lebih gawat penajajahan itu merambah pada akademisi yang turut serta memberi masukan dalam pengam-bilan kebijakan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan hankam.
11. Lima prinsip Pancasila cocok dimasukkan dalam piagam ASEAN menuju Komunitas ASEAN 2015, sehingga komunitas yang menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Rekomendasi

1. Dengan melihat situasi gawat seperti sekarang ini, pembudayaan Pancasila harus segera dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara dan warga negara.
2. Mengusulkan kepada Presiden RI untuk segera membentuk lembaga Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945.

Agenda Aksi:

1. Mendorong tumbuh kembangnya komunitas, paguyuban, atau organisasi yang terajut dalam jaringan pembudayaan Pancasila secara nasional yang sistematis, sinergis, dan berkelanjutan.
2. Membangun jaringan komunikasi pembudayaan Pancasila melalui pertemuan-pertemuan, mailinglist, website, facebook, twitter, dan jejaring sosial lainnya. Hal ini dikembangkan dalam rangka memberikan berbagai informasi tentang kegiatan penelitian, model, metode, dan strategi pembudayaan Pancasila di seluruh Indonesia yang sesuai komunitas masing-masing.

Tim Perumus Kongres Pancasila III: (1) Prof. Dr. Sutaryo, Sp.A(K) (UGM); (2) Prof. Dr. Suhartono Taat Putra (UA); (3) Dr. Bambang Kusbandrijo (Untag); (4) Sindung Tjahyadi, M.Hum (UGM); (5) Dr. Soedarso (ITS); (6) Dr. Lukas Sugiarto (Unesa); (7) Dr. Agus Subiyanto (UHT); (8) Dr. Bambang Supriyadi (UWK)

Selain hasil kongres seperti tercantum di atas dari KP di Surabaya juga dihasilkan Deklarasi Surabaya sebagai berikut.

"DEKLARASI SURABAYA" KONGRES PANCASILA III

31 Mei – 1 Juni 2011

Peserta Kongres Pancasila III menengarai bahwa negara pada saat ini dalam situasi krisis yang sudah tahap kritis. Situasi krisis tersebut sebagai akibat kegagalan kita dalam membudayakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, falsafah hidup bangsa, dan pemersatu bangsa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas, maka seluruh peserta Kongres Pancasila III yang berlangsung 31 Mei dan 1 Juni 2011, di kampus Universitas Airlangga Surabaya mendeklarasikan:

1. Nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bangsa sangat tergantung pada pembudayaan Pancasila dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Peserta Kongres berkomitmen untuk mengupayakan dan mendukung usaha berbagai pihak dalam merintis dan mengembangkan substansi, metode, strategi dan pembudayaan Pancasila. Pendidikan Pancasila wajib melaksanakan pembelajaran sejarah nasional terutama komparatif historis ideologis filosofis Pancasila di tengah pertarungan fundamentalisme agama dan pasar.
2. Pembudayaan Pancasila bersifat wajib bagi: (1) para penyelenggara Negara agar mereka menjadi tauladan dalam pengamalan dan pengamanan nilai Pancasila; (2)

Semua partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, dan organisasi masyarakat wajib melaksanakan pembudayaan Pancasila bagi pengurus dan anggotanya; (3) Masyarakat pers dan dunia usaha sebagai pilar penting dalam pembangunan kemandirian bangsa wajib melaksanakan pembudayaan Pancasila bagi pengurus dan anggotanya; (4) seluruh warga negara yang dilakukan metode edukasi dalam arti luas, kontekstual, ino-vatif, partisipasi aktif, yang berakar pada kearifan lokal dan budaya nasional, sejak dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai perguruan tinggi, di lingkungan keluarga, dan masyarakat.

3. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi dasar kehidupan bernegara dan harus tercermin dalam UUD'45 dan produk hukum di bawahnya. Pembudayaan Pancasila diselenggarakan di tingkat nasional, regional (ASEAN), dan internasional, karena Pancasila mengandung nilai universal.
4. Negara harus jelas dan tegas dalam menjalankan Politik Pendidikan Nasional berdasar Pancasila, untuk itu mata pelajaran Pancasila secara mandiri harus dimasukkan dalam kurikulum di seluruh jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Pendidikan Pancasila juga wajib dikembangkan dalam pro-gram yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kuri-kuler. Oleh karena itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Th 2003 perlu segera dilakukan judicial review (hak uji materi) karena tidak mencantumkan subtransi Pendidikan Pancasila secara mandiri.
5. Pembudayaan Pancasila harus terstruktur, terencana, dan berkelanjutan. Oleh karena itu mendesak untuk segera dibentuk lembaga nasional yang diberi tanggung jawab khusus. Lembaga tersebut adalah: Komite Nasional Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945, dibentuk dengan Instruksi Presiden, dan kemudian ditingkatkan dalam bentuk "Undang-Undang" tentang Dewan Nasional Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945".

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Surabaya 1 Juni 2011,

Peserta Kongres Pancasila III

D. Kongres Pancasila 2012

Kongres ini dapat berlangsung atas kerja sama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan UGM melalui Pusat Studi Pancasila (PSP) beserta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Kongres digelar di Balai Senat UGM merupakan Kongres Pancasila, **31 Mei-1 Juni 2012**. Kongres Pancasila II pada 2010 dilaksanakan di Denpasar Bali, dan Kongres Pancasila III pada 2011 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Kongres Pancasila IV mengambil tema: "Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia". Dari kongres kali ini diharapkan bisa terwujud strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan secara lebih konkrit, implementatif, dan operasional. Kongres diikuti sekitar 400 peserta dari berbagai kalangan, dan sebagai pembicara utama adalah Ketua MK Prof.

Dr. Moh. Mahfud MD. SH, sebagai pembicara utama dan beberapa narasumber lain: Sultan HB X, Prof. Dr. Syafii Ma'arif, Drs. H. Lukman Hakim Syaifuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, dan Dr (HC) Siswono Yudohusodo.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kongres Pancasila IV adalah sebagai berikut:

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KONGRES-PANCASILA IV
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA, 31 MEI -1 JUNI 2012**

TEMA

**STRATEGI PELEMBAGAAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENEGAKKAN
KONSTITUSIONALITAS INDONESIA**

Setelah mempertimbangkan secara terpadu isi pidato ketua panitia, sambutan rektor, pidato kunci ketua MK RI, materi dari para narasumber, aspirasi yang berkembang dalam sidang pleno dan komisi, makalah call for papers dan sumbangan pemikiran tim perumus maka diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara (*Filosofische Grondslag*), Ideologi Negara dan Pandangan Hidup (*way of life*) yang merupakan sumber nilai, inspirasi dan dasar interpretasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib diaktualisasikan ke dalam proses dan seluruh produk perundang-undangan dan berbagai kebijakan penyelenggaraan Negara.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan dan dasar negara yang merupakan kerangka acuan negara Indonesia. Strategi pelembagaannya menuntut pembedaan antara pelembagaan melalui negara dan pada masyarakat.

Pancasila merupakan perpaduan unsur cipta, rasa, dan karsa budaya bangsa Indonesia, sehingga tidak ada satupun yang bertentangan dengan kebhinnekaan subbudaya dan agama di Indonesia.

Dalam rangka strategi pelembagaan, Pancasila perlu ditransformasikan secara kritis, rasional, dan kontekstual menjadi norma-norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai semuanya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Langkah strategi umum dalam skala nasional diperlukan adanya lembaga khusus dan independen yang berwenang sebagai pembina, pengembang dan pembudaya nilai-nilai Pancasila.
2. Langkah strategis khusus:
 - o Dalam bidang sosial, budaya, dan agama, pemerintah wajib mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya pusat-pusat pendidikan dan pembudayaan Pancasila secara mandiri, kreatif dan dinamis.
 - o Dalam bidang hukum, politik dan pertahanan keamanan, Pancasila wajib dijadikan sumber materiil dan sumber nilai untuk penyusunan dan peninjauan

peraturan perundang-undangan, kebijakan politik dan strategi pertahanan keamanan.

- o Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan, Pancasila wajib dijadikan asas bagi sistem perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia melalui peninjauan kembali berbagai kebijakan dan produk perundangan agar terwujud kembali Sistem Ekonomi Pancasila.

B. REKOMENDASI

1. MPR RI dan MK RI sebagai representasi dari lembaga negara yang ada didorong untuk segera merealisasikan:
 - o Terwujudnya lembaga khusus dan independen yang berwenang sebagai pembina, pengembang dan pembudaya nilai-nilai Pancasila.
 - o Terwujudnya payung hukum sebagai dasar strategi pelembagaan dan pembudayaan Pancasila.
2. Pemerintah dan masyarakat wajib segera mewujudkan tumbuhnya pusat-pusat pendidikan dan pembudayaan Pancasila secara mandiri, kreatif dan dinamis.

Pelaksanaan Kongres Pancasila V direncanakan di Palembang dan pelaksanaannya dipercayakan kepada Universitas Sriwijaya dalam koordinasi Pusat Studi Pancasila UGM.

E. Kongres Pancasila V

Jika tema-tema kongres sebelumnya diurutkan maka akan tergambar tahapan-tahapan langkah yang ditempuh oleh Panitia Kongres dalam memperbincangkan masalah Pancasila. Pada Kongres Pancasila I tahun 2009, tema yang dipilih adalah "Meneguhkan, mereaktualisasikan, dan merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila menuju terwujudnya Indonesia yang modern, demokratis, adil dan sejahtera". Pada kongres kedua, tahun 2010, temanya "Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya". Pada Kongres Pancasila berikut tahun 2011, mengambil tema "Harapan, Peluang, dan Tantangan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila". Adapun tema pada Kongres Pancasila 2012, adalah "Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia".

Sebagai lanjutan dari kongres-kongres sebelumnya, tahun 2013 diselenggarakan Kongres Pancasila V di Kampus UGM Yogyakarta. Kongres kali ini mengambil tema "Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Memperkuat Semangat Ke-Indonesia-an". Dengan tema ini maka Kongres Pancasila 2013 menitik beratkan pada amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan dan dasar negara melalui elaborasi atas strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang memperkuat semangat ke-bhinneka tunggal ika-an di Indonesia.

Tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, tanggungjawab, dan peran aktif seluruh komponen bangsa dalam rangka pelebagaan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia "baru" yang penuh kemandirian;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Ke-Indonesia-an.
3. Mewujudkan strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Ke-Indonesia-an secara lebih kongkrit, implementatif, dan operasional.

Outcome

1. Peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dan peran aktif seluruh komponen bangsa dalam rangka pembudayaan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia "baru" yang penuh kemandirian;
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Ke-Indonesia-an.
3. Terwujudnya strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Ke-Indonesia-an secara lebih kongkrit, implementatif, dan operasional.

Output

Terwujudnya strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Ke-Indonesia-an secara lebih kongkrit, implementatif, dan operasional.

Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu Kamis, 31 Mei dan Jumat, 1 Juni 2013 di Universitas Sriwijaya, Palembang.

Peserta

Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 500 (lima ratus) orang yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, guru Pendidikan Kewarganegaraan, perwakilan instansi-instansi pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dari seluruh Indonesia.

RUMUSAN HASIL KONGRES PANCASILA V

Tema

“Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menkuatkan Semangat Ke-Indonesia-an”

Diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Pancasila UGM dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Bulaksumur Yogyakarta, 31 Mei – 1 Juni 2013

Setelah mendengarkan pidato pembukaan Ketua Panitia, Rektor Universitas Gadjah Mada dan keynote speaker dari MPR RI, serta makalah-makalah yang diutarakan oleh para narasumber dan penyaji makalah, rapat komisi beserta diskusinya. Maka disusunlah rumusan sebagai berikut:

Berbagai kerancuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi pada bangsa Indonesia, dewasa ini sungguh memprihatinkan dan menyadarkan banyak pihak bahwa apa yang terjadi sesungguhnya sudah sangat jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.

Penyebab paling mendasar adalah ketidakhadiran nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Strategi pembudayaan Pancasila diarahkan untuk melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu

- (i) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,
- (ii) memajukan kesejahteraan umum,
- (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- (iv) ikut serta memelihara perdamaian dunia yang adil dan beradab.

Keempat aspek tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh.

Pembudayaan Pancasila oleh penyelenggara negara melalui empat pilar kebangsaan yang dikonsepsikan oleh MPR disadari masih menimbulkan kontroversi, sehingga perlu untuk dikoreksi. Berbagai strategi pembudayaan Pancasila dapat ditempuh melalui jalur pendidikan, kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, hukum, dan berbagai bidang lainnya. Strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dianggap paling strategis. Namun hal ini hanya dapat dilakukan jika terdapat pemahaman yang benar dan utuh terhadap Pancasila.

Strategi pembudayaan nilai Pancasila dalam bidang sosial politik dirasakan sangat berat, dikarenakan kondisi Indonesia saat ini melebihi dugaan semula para ahli karena telah memasuki krisis multidimensional, yang bukan sembarang krisis, yang bisa dihadapi secara tambal sulam, tetapi krisis ini telah begitu luas cakupannya dan dalam penetrasinya, menyerupai situasi jaman peralihan. Untuk memulihkannya, kita memerlukan lebih dari sekedar pendekatan politik seperti biasa, saat ini kita memerlukan satu visi politik baru berdasar nilai Pancasila. Krisis nasional ini berakar jauh pada penyakit spirit dan moral bangsa. Suatu usaha penyembuhan nasional perlu dilakukan dengan membawa nilai-nilai spiritual dan moral Pancasila ke dalam semua kehidupan publik.

Khusus untuk menciptakan negara yang baik, penyelenggara negara dan warga negara perlu memahami dan menjalankan spirit dan moral politik Pancasila sesuai dengan nilai-nilai dasar yang disepakati sebagai titik temu dan pandangan yang bersangkutan. Pembudayaan Pancasila dalam situasi kehidupan politik kita seperti sekarang ini berhadapan dengan liberalisme, anti gotong royong, politik dinasti, dan demokrasi biaya tinggi. Untuk itu, diperlukan revitalisasi Pancasila dalam pembudayaan nilai Pancasila pada subyek negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Strategi pembudayaan nilai Pancasila dalam bidang hukum dirasa sangat sulit apabila tidak ada revolusi hukum. Revolusi hukum ini akan dapat direalisasikan dengan memahami konsep hukum revolusi. Hukum revolusi bila diaktualisasikan dapat dipilih sebagai salah satu strategi pembudayaan Pancasila dalam meningkatkan semangat

keindonesiaan. Caranya, (i) menempatkan faktor manusia lebih penting dan dominan daripada teks-teks perundang-undangan, (ii) mengkonsepkan hukum sebagai perilaku, (iii) mobilisasi hukum meliputi pembuatan hukum baru (rule making), pembatalan hukum yang cacat ideologis (rule breaking), ataupun pendayagunaan hukum adat, hukum alam, hukum agama, kearifan lokal secara kontekstual sehingga strategi pembudayaan Pancasila menjadi bervariasi dan progresif. Hukum revolusi, kecuali garis besar romantika, dinamika, dan dialektika, pada pokok-pokoknya ialah (i) Revolusi hukum harus dimulai dengan identifikasi terhadap hukum-hukum yang cacat ideologis, (ii) Revolusi hukum memihak kepada rakyat dengan menekankan kepada keadilan sosial, (iii) Revolusi hukum merupakan simponi dekonstruksi dan rekonstruksi yang berjalan dalam keteraturan dan kedamaian sebagai gerakan nasional, (iv) Revolusi hukum mempunyai pentahapan, (v) Revolusi hukum harus mempunyai program yang jelas dan tepat, (vi) Revolusi hukum harus mempunyai soko guru dan pimpinan yang tepat, yang punya pandangan jauh kedepan, yang konsekuen, yang sanggup melaksanakan tugas-tugas revolusi sampai pada akhirnya, dan revolusi juga harus punya kader-kadernya yang tepat pengertiannya dan tinggi semangatnya.

Strategi pembudayaan Pancasila dalam bidang ekonomi harus dikembalikan pada jiwa UUD 1945 Pasal 33 sebelum amandemen yang lebih mencerminkan jiwa kegotongroyongan dalam bidang ekonomi. Ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh sebagai daulat rakyat bukan daulat pasar.

Strategi pembudayaan nilai Pancasila dalam kehidupan keagamaan diperlukan semangat gotong royong intra dan antarpemeluk agama sebagai penguatan atas berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi persatuan, mufakat, dan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi:

1. Perlu segera dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar operasional pelaksanaan pendidikan Pancasila pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
2. Khusus untuk pendidikan tinggi, sesudah dikeluarkan UU PT No. 12 Tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu segera menerbitkan peraturan perundangan yang berisi rambu-rambu perkuliahan Pancasila.
3. Perlu disusun program aksi melaksanakan revolusi hukum Indonesia.
4. Pemimpin negara wajib sebagai advokator Pancasila.
5. Untuk memasyarakatkan nilai Pancasila, peserta kongres setuju membentuk Masyarakat Studi Pancasila.

Yogyakarta, 01 Juni 2013

Ketua Tim Perumus
Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp.A(K)



Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U., Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai pembicara utama pada Kongres Pancasila IV 2012 di Universitas Gajah Mada.

BAB III

KONGRES PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN

Dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir dirasakan mulai mengalami kegamangan, pasalnya pendidikan nasional masih mencari-cari model pendidikan kebangsaan yang membangun karakter bangsa. Kegamangan inilah yang menyebabkan cita-cita Indonesia untuk membangun manusia yang merdeka seutuhnya mulai kabur, sehingga pendidikan hanya dimaknai sebagai teknik manajerial pesekolahan dan menitikberatkan salah satu aspek yaitu nilai-nilai kuantitatif akademik—kecerdasan.

Ki Hadjar Dewantara jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), yakni proses pengangkatan manusia ke taraf insani, tataran tertinggi. Di dalam-nya terdapat proses pembelajaran, yakni komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Pendeknya, pendidikan adalah usaha bangsa untuk membawa manusia Indonesia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humanis). Lebih jauh lagi beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah “penguasaan diri”. Penguasaan diri untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa.

Jika mencermati pemikiran Ki Hadjar Dewantara, maka para ahli bersepakat bahwa pendidikan harus memiliki 3 (tiga) landasan filosofis, yaitu nasionalistik, universalistik, dan spiritualistik. Nasionalistik adalah berdasarkan pada budaya nasional, univer-salistik bahwa pendidikan harus berdasarkan pada hukum alam (*natural law*), dan segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan (spiritualistik). Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri (hati) manusia. Jika konsep pendidikan tersebut diterapkan secara tepat di bumi Indonesia maka akan diperoleh sebuah hasil pendidikan yang benar-benar mampu mencerdaskan manusia Indonesia secara

holistik, bukan lagi secara sepotong-sepotong. Dan tidak mustahil kecerdasan akal, keluhuran budi, serta karakter kebangsaan akan selalu masuk dalam setiap relung jiwa dan perilaku manusia Indonesia.

Sayangnya, konsep-konsep pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara tersebut pada saat ini mengalami semacam kebekuan. Pasalnya, ada indikasi para pelaku di dunia pendidikan Indonesia kurang memahami dan mengoperasionalkan konsep pendidikan tersebut. Wujud dari ketidakpercayaan diri ini adalah saat kita justru lebih mengagung-agungkan konsep pendidikan negara-negara maju padahal lingkup sosial negara barat cenderung eksploitatif dan mendidik menjadikan manusia individualis-serakah yang *notabene* menjauhkan diri dari cipta, rasa, dan karsa. Salah satu contohnya, sebagian pelaku pendidikan kita merasa berhasil jika anak didiknya cepat terserap di dunia kerja “pasar”, mampu memenangkan berbagai kompetisi, meskipun tidak memiliki rasa kepekaan sosial. Padahal lebih jauh dari itu, pendidikan sebagai upaya pembangunan peradaban bangsa.

Kita semua menyadari, bahwa kebekuan-kebekuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari Era globalisasi yang melanda dunia dewasa ini. Era keterbukaan dan persaingan antar negara ditambah lagi dengan semakin derasnya arus informasi yang menyebabkan persaingan antar negara semakin ketat, terutama pada bidang ekonomi. Pendidikan kita di Indonesia justru ikut arus dalam pusaran globalisasi sehingga kita hanya disibukkan mengikutinya dan menempatkan kita sebagai penonton yang pasif. Akibatnya, bangsa Indonesia perlahan tetapi pasti mengalami krisis karakter yang justru menghasilkan mental-mental pragmatis, materialis, konsumtif, dan individualis. Kita seolah terlena dalam buaian mimpi globalisasi dan baru tersadarkan saat pentingnya upaya membangun karakter bangsa sebagai tameng dalam menghadapi globalisasi tanpa harus larut di dalamnya.

Globalisasi bukanlah hal yang perlu ditakuti dan dihindari. Dalam kehidupan pergaulan antar bangsa dan negara, kita tidak bisa menutup diri. Meskipun demikian, kita harus bisa bergaul tanpa harus menjadi bangsa lain, mengikuti dan meniru bangsa lain, dan menganggap bangsa lain lebih daripada bangsa sendiri. Mental inferior kompleks ini harus dibongkar dengan adanya pendidikan kebangsaan yang tersusun secara sadar dan terencana dalam jangka panjang.

Untuk itulah pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pengajaran dan kebudayaan. Pendidikan adalah produk dari kebudayaan, dan dengan pendidikan akan membentuk peradaban. Maka saat ini dibutuhkan sebuah gerakan kembali meluruskan visi pendidikan untuk masa depan agar kebijakan pendidikan nasional kembali ke hakekatnya, yaitu menjadikan manusia yang merdeka. Pada satu sisi mampu berjalan beriringan dengan dunia global sisi lain tetap mencirikan karakter kebangsaan yang kuat. Mereka yang lupa harus diingatkan, mereka yang belum tahu harus difahami, agar nantinya semua gerbong pendidikan nasional mengarah pada satu tujuan, memanusiakan manusia.

Atas dasar pikiran-pikiran di atas, maka Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tahun 2012 ini bermaksud hendak mengintegrasikan kembali pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dalam sebuah perspektif strategi kebudayaan yang komprehensif, dengan ini diharapkan dapat dirumuskan prinsip-prinsip pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang saling melingkupi yang memadai bagi pengembangan

peradaban Indo-nesia di tengah dinamika budaya internal dan tekanan budaya global.

Berangkat dari semangat lokal, yakni gotong royong, maka Kepanitiaan Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tahun 2012 disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan di Yogyakarta dan Indo-nesia.

Penyelenggara

Sebagai penyelenggara kongres adalah Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM berlangsung pada 7-8 Mei 2012 di Grha Sabha Pramana. Dalam kongres ini disajikan sebagai keynote speech pembicara kunci Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhammad Nuh (tidak hadir). Beberapa pembicara yang diundang hadir, Prof. Dr. Malik Fadjar (mengirimkan makalah) dan Prof. Dr. Sri Edi Swasono. Peserta kongres adalah dari perwakilan PTN/PTS, guru, dosen, peneliti, mahasiswa, birokrat, legislator, politisi, dan tokoh masyarakat

Hasil kongres

Setelah melalui diskusi dalam sidang pleno dan komisi di Balai Senat UGM, Bulaksumur Yogyakarta, 8 Mei 2012, peserta Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tahun 2012 menyepakati hasil rumusan dan rekomendasi sebagai berikut.

Hasil Rumusan dan Rekomendasi Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tahun 2012

Peserta Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersyukur karena bidang kebudayaan telah kembali ke "rumah besar" pendidikan setelah terpisah lebih dari sepuluh tahun. Kementerian ini, terhitung sejak 20 Oktober 2011 lalu telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Peserta kongres menyadari periode tahun 2010 sampai 2035, bangsa kita dikarunai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa, bonus demografi (demographic dividend), yang harus menjadi manusia susila yang mempunyai kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia khususnya dan dunia umumnya, dalam arti berjiwa Indonesia dan merupakan manusia budaya Indonesia yang mempunyai keinsafan hidup berdasarkan Pancasila.

Disadari sepenuhnya bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu membentuk karakter bangsa. Pendidikan telah menjadi barang mewah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan telah beralih dari public goods (kebutuhan publik yang menjadi tanggung jawab negara) ke private goods (kebutuhan pribadi), sehingga pendidikan telah berubah menjadi lahan bisnis. Pendidikan menjadi pencetak manusia yang dibutuhkan pasar dan ini pun gagal karena pasar ternyata tidak mampu menyerap mereka sehingga angka pengangguran selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Setelah mencermati pidato pembukaan Sri Sultan Hamengkubuwono X, pidato

Wamendikbud bidang Kebudayaan, pidato pembukaan ketua panitia, makalah pada sidang pleno dan sidang komisi, diskusi dan saran-saran selama berlangsungnya Kongres Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan, tanggal 7-8 Mei 2012, di Universitas Gadjah Mada, maka dapat dirumuskan hasil sebagai berikut :

Rumusan

Panel ke-1:

Pendidikan pada hakikatnya harus dibangun dengan basis kebudayaan. Pendidikan yang tidak bersatu dengan kebudayaan, atau setidaknya tidak dibangun dengan basis kebudayaan demikian itu, hanya akan menghasilkan luaran-luaran pendidikan yang tidak mengenal kebudayaan, tidak memiliki budi pekerti yang luhur, tidak berakhlak mulia, tidak humanistik. Kebudayaan pada esen-sinya adalah buah-buah keadaban. Maka jika pendidikan diperbarui dengan basis kebudayaan itu, hasilnya adalah luaran-luaran pendidikan yang berkeadaban. Maka seharusnya pendidikan dibangun di atas konvergensi pilar-pilar kebudayaan itu supaya terjadi proses memanusiakan manusia (humanisasi). Dalam konteks pendidikan Yogyakarta, terdapat lima pilar yang harus diperhitungkan, yakni (1) Pendidikan Kraton, (2) Pendidikan Muhammadiyah, (3) Pendidikan Tamansiswa, (4) Pendidikan Pesantren, (5) Pendidikan Barat.

Renaissans dalam bidang pendidikan nasional hendaknya dibangun dengan model yang memperhatikan konvergensi pilar lokal, nasional, dan global. Sesungguhnya itulah hakikat pendidikan yang disintesakan dengan kebudayaan.

Dalam kaitan dengan hakikat kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan dan pengajaran itu, terdapat urgensi untuk membangun kerangka kebudayaan yang menempatkan nilai-nilai, sarana-prasarana kebudayaan, kelembagaan kebudayaan, SDM kebudayaan, diplomasi kebudayaan, hak-hak berbudaya, dll, dalam suatu sistem.

Panel ke-2:

Driyarkara mengajukan empat prinsip: Humanisme (membangun manusia bermartabat dan luhur dan pendidikan sebagai proses pemberadaban), Hominisasi (manusia tidak cukup berhenti sebagai makhluk namun harus menjadi human), humaniora (pemanusiawian pengajaran disesuaikan dengan skema antropologis manusia dalam rangka mengembangkan rasionalitas manusia secara utuh), dan humanitas (terbangunnya kemanusiaan yang utuh yang memiliki kepekaan budaya, tanggungjawab sejarah, kreatif, dan keunggulan akademis).

Menghadapi dua krisis besar, yakni krisis kepemimpinan dan krisis ideologi sebagai akibat deformasi dan tidak ada platform bersama, kita mesti kembali ke Pancasila yang menopang kebinekaan dan pengutamaan kepentingan nasional. Pancasila bagi negara adalah asas tunggal dan bagi bangsa Indonesia Pancasila adalah asas bersama. Dengan mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai asas negara dan asas bangsa, maka bangsa Indonesia dapat menghadapi dan mengelola globalisasi secara tepat.

Panel ke-3:

Internalisasi integritas terjadi dan bertahan dalam diri apabila sosialisasi dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan konsisten dengan memberikan pengalaman hidup dan pembiasaan dengan kejujuran kepada individu-individu, pengalaman hidup dan pembiasaan bahwa kejujuran akan dihargai dan sebaliknya ketidakjujuran akan

dihakimi. Untuk menjadi agen sosialisasi yang dapat mengubah kebudayaan, institusi pendidikan formal semestinya dapat memberikan pengalaman dan pembiasaan kejujuran pada peserta didik. Dengan demikian pendidikan karakter adalah pendidikan yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakter pada anak didik. Ada empat ciri pendidikan karakter, yaitu (i) setiap tindakan berpedoman pada nilai normatif (ii) terdapat koherensi antara rasa percaya diri dan keberanian (iii) adanya otonomi, mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi pihak luar (iv) keteguhan dan kesetiaan. Dengan menempatkan nilai-nilai kemasyarakatan tersebut sebagai orientasi pengembangan pendidikan formal, jurang antara praktik dalam pendidikan dan praktik sosial dapat didekatkan, dan terbangun proses sinergis antara agen di masyarakat dan di pendidikan dalam membangun integritas masyarakat. Tiga macam kejahatan masyarakat yang mengancam karakter bangsa adalah korupsi, kekerasan, dan kejahatan moral dan seksual. Sekolah (pendidikan formal) dan agama tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Harus dilakukan *social engineering* untuk membongkar dasar semua kejahatan sosial tersebut dengan merancang ulang pendidikan untuk mengatasi globalisasi dengan menguatkan pula kekuatan lokal.

Rekomendasi:

1. Pendidikan dan Pengajaran Nasional harus dilandasi jiwa Pancasila dan kebudayaan Indonesia karena tanpa kedua landasan itu pendidikan akan kehilangan arah. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus ditinjau kembali.
2. Untuk mengawal ideologi pendidikan nasional harus dibentuk Dewan Pendidikan Nasional, melengkapi Dewan Pendidikan yang sudah ada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
3. Sekolah-sekolah wajib mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Kecintaan kepada bahasa Indonesia dan daerah harus dimunculkan sejak usia dini melalui peningkatan minat baca yang didukung oleh tersedianya pustaka-pustaka dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang memuat kearifan lokal.
4. Peningkatan kualitas guru, dosen, dan tenaga kependidikan harus menjadi prioritas utama, sejak perekrutan, penempatan dan pengembangan.
5. Nilai-nilai budaya lokal harus diletakkan sebagai landasan kebijakan dan strategi pengembangan karakter bangsa. Perjumpaan antara budaya lokal dan budaya nasional dengan budaya global seharusnya dijadikan momentum untuk memicu munculnya sintesa baru budaya Indonesia.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berfungsi sebagai badan perjuangan kebudayaan pembentuk manusia berbudaya Indonesia dengan melibatkan semua institusi pendidikan dan lembaga-lembaga budaya sebagai tempat per-samaian kebudayaan nasional.
7. Perlu rembug nasional tentang Strategi Kebudayaan Nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan nasional berwawasan budaya.

Yogyakarta, 8 Mei 2012

Dari balik rumusan hasil dan rekomendasi kongres ini ada dua catatan penting. *Pertama*, ada kesan penyelenggaraan pendidikan belum dilandasi oleh jiwa Pancasila dan kebudayaan Indonesia. *Kedua*, ada kesan selama bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata (tahun 2000-2011), proses penyelenggaraan pendidikan tidak berfungsi sebagai badan perjuangan kebudayaan pembentuk manusia berbudaya Indonesia dengan melibatkan semua institusi pendidikan dan lembaga-lembaga budaya sebagai tempat persemaian kebudayaan nasional. Menurut hemat penulis, bidang kebudayaan bersatu dengan pendidikan atau berada di luar pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikan seharusnya tetap berakar pada kebudayaan bangsa. Sebagaimana disebut dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 2, bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian bidang kebudayaan berada dalam lingkungan pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) maupun berada di luar bidang pendidikan (dalam hal ini di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) atau bahkan bidang kebudayaan berdiri sendiri menjadi Kementerian Kebudayaan, seharusnya penyelenggaraan pendidikan tetap berakar pada kebudayaan bangsa.

BAB IV

KONGRES KEBUDAYAAN PEMUDA INDONESIA (KKPI)

Meskipun sudah ada Kongres Kebudayaan yang sudah beberapa kali diselenggarakan, dalam tahun 2012 diselenggarakan sebuah Kongres Kebudayaan juga tetapi khusus untuk pemuda dengan nama KONGRES KEBUDAYAAN PEMUDA INDONESIA (KKPI). Sebenarnya selama 8 kali KK setelah Indonesia merdeka masalah kebudayaan di kalangan pemuda bukan dilupakan atau tidak dilibatkan baik sebagai Panitia Pengarah, peserta maupun pemakalah. Sejak awal KK tahun 1918 hingga tahun 2008 topik kebudayaan pemuda dan pemuda sebagai penerus kebudayaan selalu diperbincangkan. Selain itu, unsur pemuda selalu dilibatkan sebagai pembicara maupun panitia. Pada KK 1991 di Jakarta, Nirwan Dewanta yang saat itu masih sangat muda telah tampil dalam sebagai pembicara kunci di sidang pleno.

Mengenai alasan, latar belakang dan tujuan diselenggarakan KK khusus untuk pemuda diuraikan secara panjang lebar dalam buku panduan kongres. Meskipun pada rapat persiapan pertama telah disampaikan saran untuk mengganti forum kongres itu dengan forum semacam “jambore kebudayaan pemuda”, akhirnya forum Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia tetap dilangsungkan.

1. Latar Belakang

Pemuda dipercaya sebagai sebuah kekuatan besar dilihat dari energi, stamina, solidaritas yang dapat berperan menjadi *agent of change*, kekuatan pembaruan. Untuk itu hingga Soekarno pun mengatakan:, bahwa ia hanya membutuhkan “10 pemuda” yang membara cintanya kepada tanah air untuk mengubah dunia.

Potensi atau modal alamiah pemuda dan budaya yang bila dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Beberapa di antaranya: pertama, jumlah yang relatif lebih besar dari golongan lain, untuk memperoleh dukungan politik dan bukan sekadar sebagai crowd dalam aksi massa, Kedua, kekuatan utama kaum muda sebagai intelektual. Dengan rata-rata pendidikan yang lebih tinggi, analisis lebih tajam, atau gagasan yang lebih segar dan progresif. Ketiga, power dalam arti tenaga dan

stamina yang tentu memiliki endurance, speed dan agresivitas lebih kuat. Keempat, daya adaptasi dan daya serap yang lebih tinggi pada perubahan dan dinamika zaman, via ilmu atau teknologi.

Hanya dengan beberapa potensi yang belum tereksplorasi itu, kaum muda dapat berkompetisi ketat, menyingkirkan kelemahan yang tidak cukup dalam soal modal (finansial), kekuasaan, maupun birokrasi dan kekuatan (militer). Dengan potensi itu pula, kaum muda dapat mengisi peran pembangunan khususnya di bidang kebudayaan.

Peran Pemuda dalam Sejarah Pergerakan Kebangsaan di Indonesia

Boedi Oetomo sebagai organisasi yang lahir pada tahun 1908 mengawali kebangkitan Bangsa Indonesia (Kebangkitan Nasional). Mereka hadir sebagai pemuda-pemudi yang siap berada digarda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemudi Indonesia, putra-putri terbaik bangsa saat itu mengikrarkan diri dengan sumpah (janji) penting yang sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia yakni Sumpah Pemuda. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Sumpah Pemuda tidak lahir begitu saja. Banyak hal yang melandasi para pemuda bertekad untuk bersatu. Mereka berpikir tidak akan bisa membuat Indonesia merdeka jika berjuang di kelompok sendiri.

Kegagalan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia membuat mereka sadar bahwa rasa nasionalisme harus dipadukan. Karena itu, diadakanlah Kongres Pemuda I dan II. Mereka menjadi satu, menjadi "Pemuda Indonesia". Semangat persatuan para pemuda dulu harus diikuti pemuda masa kini. Yaitu, dengan mengisi kemerdekaan.

Sejarah kemerdekaan Indonesia telah membuktikannya, perjuangan pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan adalah berkat perjuangan kaum muda pada saat itu. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1966 memang berhasil digagalkan angkatan bersenjata, namun tanpa peran pemuda dan ormas lainnya keberhasilan ini tentu tidak akan berjalan lancar. Tahun inilah awal berdirinya pemerintahan orde baru dibawah kekuasaan Soeharto. Pemerintahan Soeharto memang menunjukkan perkembangan bagi bangsa Indonesia. Kemakmuran rakyat meningkat, kesejahteraan mulai tampak. Namun kekuasaan Soeharto ternyata lebih mengedepankan asas kekeluargaan, pemerintahan orde baru pun disebut-sebut sebagai pemerintahan rapuh dan keropos akhirnya jatuh disaat krisis moneter melanda Indonesia.

Pergerakan Pemuda kembali menorehkan sejarah dengan gerakan Reformasi. Bersatunya pemuda dan mahasiswa meminta Soeharto mundur dan masa otoriter berakhir kemudian beralih ke masa reformasi. Tahun 1998, awal mula berjalannya era reformasi. Era ini dianggap sebagai zaman kebebasan bagi rakyat.

Dominasi Gerakan Politik dalam Gerakan Pemuda

Gambaran diatas menunjukkan dominasi pergerakan pemuda Indonesia

didominasi oleh gerakan-gerakan politik/non budaya. Hingga periode kemerdekaan, 1945, dalam catatan sejarah digambarkan bagaimana anak-anak manusia berusia 20 tahunan, berjuang untuk dapat tegak berdiri di hadapan kekuatan kolonial, dan pada akhirnya tegak berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Begitupun dalam aksi sosial, yang antara lain dilakukan pelbagai bond kepemudaan saat itu, dan dalam waktu yang membutuhkan mereka dapat mengikat diri menjadi sebuah kekuatan bertenaga untuk melawan kekuasaan pemerintah kolonial. Tapi sebagai kekuatan politik, pemuda-pemuda itu terhimpun dalam wadah-wadah yang sangat profesional di bidang/keahliannya masing-masing. Tidak menggunakan atau membentengi diri dengan peyorasi kepemudaan.

Di wilayah ini, yang bermain dan berperan pun tidak lagi seluruhnya pemuda. Di perjalanan berikutnya, catatan-catatan utama sejarah, juga dengan cermat memberi kita pembongkaran terhadap kesucian dan keagungan pemuda dalam gerakannya. Saya kira bacaan posisional dari sejarah pemuda di atas cukup memadai, untuk menjadi tolakan melihat berbagai bentuk gerakan pemuda setelahnya tahun 74, 78, 82, 89, dan seterusnya. Semua itu merupakan pengukuhan penting terhadap peran kaum muda dalam memperjuangkan idealism bangsa.

Tapi sayang, setelah era reformasi pemuda terkesan ideologis, pragmatis bahkan materialistis. Aksi dan gerakannya kurang fokus, tidak memiliki visi bersama, dan bahkan terkotak-kotak. Disebabkan tidak adanya arah yang jelas ataupun kepedulian terhadap nasib bangsa. Oleh sebab itu diperlukan pengenalan kembali fungsi dan peran pemuda dalam membangun bangsa, yang sebelumnya tidak pernah absen menorehkan tinta emas. Perjuangan pemuda pun harus bergulir sesuai konteks dan zamannya.

Era Kebangkitan Gerakan Pemuda Untuk Mengambil Peran Dalam Gerakan Kebudayaan.

Betapa pentingnya peran pemuda dalam pergerakan kebangsaan tidaklah diragukan. Sebab itulah, pemuda pada dasarnya harus ada dan mutlak adanya. Sebab pemuda sebenarnya merupakan sosok yang paling memiliki power untuk mengarungi sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara ke depan. Setidaknya ada tiga pilar penting dalam bangsa ini yang menjadikan pemuda harus bergerak dan berkarya. Walaupun tidak mengesampingkan elemen-elemen bangsa lainnya. Ketiga pilar tersebut adalah Pendidikan,

Ekonomi dan Kebudayaan Bangsa.

Pendidikan adalah pilar yang menjadi bersifat primer bagi pemuda abad 21 ini. Kebutuhan pendidikan bagi pemuda tidak dapat ditolak lagi, karena bangsa ini membutuhkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan handal dalam mengelola bangsa, sehingga tidak berlebihan jika menjadikan pendidikan adalah hal yang wajib dan mendasar yang harus di penuhi oleh pemuda. Selanjutnya adalah pemuda harus menjadi salah satu aktor dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian bangsa. Peran pemuda dalam bagian ini adalah bisa berkontribusi dalam bidang pengembangan entrepreneurship disegala bidang, karena bangsa Indonesia adalah

bangsa yang kaya sumber daya alam maka sudah selayaknya pemuda berinovasi terhadap kekayaan tersebut, jangan sampai menjadi pemuda yang konsumtif belaka.

Pilar terakhir adalah kebudayaan, kebudayaan harus menjadi bagian dalam misi pemuda berkarya, yang menjadi penting adalah pemuda harus menunjukkan identitas bangsa melalui kebudayaan bangsa Indonesia. Budaya bangsa adalah karakter bangsa, maka pemuda yang berbudaya suatu bangsa, maka dapat memiliki karakter suatu bangsa tersebut. Tanpa adanya bingkai nilai sosial-budaya yang sehat dan kuat, keinginan menjadikan bangsa memiliki keberlanjutan adalah impian seorang paranonia. Bahkan Socrates mengatakan Gejala kematian bangsa, identik dengan memudarnya atau tereliminasinya budaya bangsa itu sendiri. Diharapkan pemuda sebagai *Agent of Change*, yaitu sebagai agen perubahan ke arah yang lebih baik, dan perubahan yang memberikan solusi bagi bangsa.

Melalui penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia 2012, akan memperkuat posisi dan peran pemuda untuk menjadi pilar dan agen pembangunan yang kreatif, handal dan memiliki integritas dalam memajukan peradaban bangsa Indonesia dan dunia, terbangun visi dan langkah bersama dan terpadu dalam membangun dan memperkuat posisi Kebudayaan sebagai panglima dalam pembangunan Indonesia baru serta membangun jaringan kerja Pemuda Indonesia antar daerah dan di berbagai negara dalam mendukung dan memperkukuh pembangunan karakter bangsa, ketahanan budaya dan penguatan Diplomasi Budaya dalam turut membangun posisi penting Indonesia dalam pem-bangunan peradaban dunia.

Tujuan

Tujuan dari KKPI adalah sebagai berikut:

1. Membangun tonggak kebangkitan Pemuda dalam pembangunan kebu-dayaan dan pembangunan bangsa pada umumnya.
2. Memperkuat posisi dan peran pemuda untuk menjadi pilar dan agen pembangunan bidang kebudayaan yang kreatif, handal dan memiliki integritas dalam memajukan peradaban bangsa Indonesia dan dunia.
3. Membangun visi dan langkah bersama dan terpadu dalam membangun dan memperkuat posisi Kebudayaan sebagai panglima dalam pembangunan Indonesia baru.
4. Membangun jaringan kerja Pemuda Indonesia antardaerah dan di berbagai negara dalam mendukung dan memperkukuh pembangunan karakter bangsa, ketahanan Budaya dan penguatan Diplomasi Budaya dalam turut membangun posisi penting Indonesia dalam pembangunan peradaban dunia.

Tema

KKPI yang digelar untuk pertama kalinya oleh Kemendikbud ini mengusung tema **“Indonesia Aku Bangsa: Membangun Karakter, Kreativitas dan Solidaritas”**.

Penyelenggara

KKPI diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia KKPI adalah seorang aktris, yakni Marcella Zalianty.

Tanggal dan tempat penyelenggaraan

KKPI diselenggarakan pada tanggal 6-9 November 2012, di Hotel Borobudur, Jakarta.

2. Hasil kongres

Rumusan Hasil Kongres Kebudayaan Pemuda (KKPI) Tahun 2012

Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia 2012 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Hotel Borobudur, DKI Jakarta, 6 s.d. 9 November 2012 dengan mengusung tema: “Indonesia Aku Bangga, Membangun Karakter, Kreativitas, dan Solidaritas Bangsa”, Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia ini sendiri dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh, dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti.

Setelah mengikuti 4 Sarasehan dengan berbagai diskusi yang berkembang, maka kongres ini dapat menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Pemuda dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan besar dilihat dari energi, stamina, solidaritas yang dapat berperan menjadi agent of change dalam beberapa segi yang salah satu utamanya adalah budaya.
2. Pendidikan karakter bagi pemuda adalah pilar yang bersifat primer bagi pemuda di abad ke-21 ini. Hal ini tidak dapat ditolak karena bangsa ini membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, handal serta mempunyai identitas kebangsaan dalam mengelola masyarakat di masa depan nanti.
3. Kebudayaan merupakan bagian dari misi pemuda untuk berkarya. Oleh karena budaya bangsa juga merupakan karakter bangsa, maka pemuda yang mempunyai berbudaya sebagai suatu bangsa, dapat memiliki karakter daripada bangsa tersebut.
4. Tanpa adanya bingkai nilai sosial budaya yang sehat dan kuat, keinginan menjadikan bangsa yang memiliki keberlanjutan dalam membuat suatu perdaban adalah kemustahilan.
5. Industri film dengan nilai-nilai lokal budaya Indonesia masih jarang ditemukan. Jadi, merupakan sebuah peluang bagi para pemuda untuk bisa mengembangkan industri perfilman. Karena masih banyak sekali budaya Indonesia yang masih belum tersentuh dengan industri ini.
6. Kongres Kebudayaan Pemuda ini merupakan momentum bagi kebangkitan pemuda untuk mengambil peran dalam gerakan kebudayaan serta menjadi tonggak

kebangkitan pemuda dalam pembangunan kebudayaan dan pembangunan bangsa pada umumnya.

7. Indonesia kaya akan budaya dan tersebar di berbagai pelosok daerah. Namun, belakngan kebudayaan asing masih terus merasuk ke kalangan generasi muda. Kebudayaan haruslah dilihat sebagai “Panglima” dalam pembangunan Indonesia yang sedang berkembang pada saat ini.
8. Masih kurang terjalannya komunikasi antara pemerintahan pusat dan daerah mengenai sinerdisasi pemuda dalam bidang kebudayaan.

Rekomendasi:

1. Sebagai sarana ekspresi yang positif sekaligus pembentuk jati diri bangsa ke depan, perlu dibentuknya suatu wadah kreativitas dalam berbagai aras kebudayaan bagi para pemuda, baik di pusat maupun di daerah.
2. Perlu dibentuk suatu wadah untuk aktivitas yang lekat dengan pemahaman kebudayaan di kalangan para pemuda.
3. Perlunya nilai-nilai budaya lokal menjadi dasar landasan bagi pengembangan karakter pemuda, karena perjumpaan antara budaya lokal dan budaya nasional dengan budaya global seharusnya dapat dijadikan momentum untuk memicu munculnya sintesa baru budaya bagi para pemuda di Indonesia.
4. Mendorong sinergisasi pemerintah daerah dan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan pemuda dalam bidang kebudayaan di daerah.
5. Dalam rangka membangun keharmonisan dan soliditas pemuda dalam bidang kebudayaan perlu dilakukan dialog secara berkesinambungan.
6. Perlunya meningkatkan peran serta perempuan dalam laju kemandirian serta kemajuan bangsa.

Demikian hasil rumusan serta rekomendasi dari kegiatan Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia tahun 2012.

Jakarta, 9 November 2012

Tim Perumus

BAB V

KONGRES DIASPORA INDONESIA

Menurut Dino Pati Jalal Dubes RI Washington DC Dubes RI, sebagai penggagas Kongres Diasporan Indonesia (KDI) kata “Diaspora Indonesia” diartikan luas, yaitu mencakup setiap orang Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berdarah maupun yang berjiwa Indonesia, apa pun status hukum, bidang pekerjaan, latar belakang etnis dan kesukuannya dan tidak membedakan antara pribumi maupun non-pribumi. Definisi Diaspora Indonesia juga secara luas dijabarkan sebagai setiap orang yang berada di luar negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan Warga Negara Indonesia, orang Indonesia yang menikah dengan bangsa asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali— baik ikatan darah maupun kewarganegaraan— namun memiliki kepedulian dan ikatan batin dengan Indonesia.

Menurut penggagasnya, untuk proyeksi masa depan Indonesia pada abad XXI, ada satu faktor yang sering luput dalam kalkulasi bangsa, yaitu diaspora Indonesia. Semua orang di luar negeri yang berdarah, berjiwa, dan berbudaya Indonesia yang masih WNI ataupun yang sudah WNA mempunyai potensi besar bagi kemajuan bangsa. Termasuk mereka yang tidak memiliki paspor Indonesia atau warga negara Indonesia yang telah berganti kewarganegaraan.

Berapa jumlah diaspora Indonesia, tak ada yang tahu persis. Diperkiraan terdapat sekitar 8 juta Diaspora Indonesia di seluruh dunia. Yang pasti, jumlah diaspora Indonesia jauh lebih banyak dari yang diperkirakan dan jauh lebih besar dari jumlah WNI di luar negeri, yang tahun 2010 tercatat sekitar 3 juta orang. Di Madagaskar tercatat hanya 57 orang pemegang paspor Indonesia, tetapi 60% penduduknya keturunan Indonesia. Di Afrika Selatan, tercatat 334 WNI, tetapi diketahui ada 1,2 juta keturunan Indonesia, bahkan ada kota bernama Makassar. Di Kaledonia Baru, tercatat 334 WNI, tetapi keturunan Indonesia berjumlah sekitar 7.000 orang. Di Belanda, meski WNI hanya 15.000, konon ada 1 juta warga berdarah Indonesia. Di Malaysia tercatat 1,5 juta WNI. Hal ini menunjukkan suatu kekuatan ekonomi dan intelektual yang signifikan.

Selama ini belum ada pendekatan dan perhatian sistematis dari Indonesia

terhadap kelompok ini. Untuk itu Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan sejumlah kebijakan dalam rangka mendayagunakan kekuatan Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.

Yang menarik, diaspora Indonesia apakah itu WNI atau pun WNA mempunyai brain power yang luar biasa. Selama di AS, menurut pengalaman Dino tidak kunjung habis bertemu dengan inovator, pelopor, pengusaha, pendidik dari diaspora Indonesia. Oleh karena itu, diaspora Indonesia lebih dari sekadar perantau, tetapi suatu komunitas besar yang padat ilmu, ide, modal, dan jaringan. Saya percaya, secara hitungan kasar, jumlah diaspora Indonesia paling tidak dua kali jumlah penduduk Singapura dengan pendapatan per kapita 10 kali lipat per kapita di Indonesia.

Diaspora juga punya idealisme yang tinggi. Masih menurut Dino, mungkin idealismenya itu lebih tinggi di Indonesia yang sedang dilanda sinisme. Di mana-mana bertemu dengan diaspora WNI ingin kembali berkarya di Tanah Air, sementara diaspora WNA ingin berbuat sesuatu bagi Indonesia. Dicontohnya seorang WNI bernama Sehat Sutarja, sebagai seorang industrialis teknologi informasi, di Lembah Silikon asal Indonesia, menyatakan, *"I have now reached a point in my life where I have begun to think more about my past and my heritage"*, dan sekarang merencanakan membuat cabang Marvell di Indonesia yang akan merekrut inovator-inovator Indonesia. Masalahnya, diaspora Indonesia di sejumlah kota dan negara punya ciri mencolok: tercerai-berai dan tak saling kenal. Diaspora Indonesia ibarat ribuan titik tak terhubung. Sering kali hubungan mereka dengan Tanah Air minim. Itu membuat diaspora menjadi komunitas yang penuh potensi, tetapi lemah koneksi.

Melalui forum kongres, Dino Pati Jalal ingin mempertemukan titik-titik itu untuk saling kenal dan saling menyamakan pokok-pokok pikiran untuk kemajuan bangsa. Kongres ini menjadi kongres pertama diselenggarakan di luar negeri. Tujuannya antara lain untuk membahas hal-hal yang antara lain mengenai pandangan orang-orang Indonesia di luar negeri tentang kebudayaan Indonesia.

Kebijakan nasional

Menurut penggagas, sudah waktunya pendekatan diaspora menjadi kebijakan nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, konsep diaspora adalah strategi baru Indonesia. Dalam upaya Indonesia jadi kekuatan dunia, lingkaran pertama yang otomatis perlu dibina adalah komunitas diaspora yang alami berkaitan batin dan tali sejarah dengan Indonesia. Pendekatan diaspora tak legalistik kaku (hanya WNI), tetapi kultural lembut dan lentur. Dalam pendekatan ini, semua orang Indonesia di luar negeri, selama masih cinta Indonesia, dianggap sebagai saudara kita, sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia dan, lebih penting lagi, sebagai aset.

Di era global diaspora berkapasitas besar sebagai pelopor kesejahteraan. Pada dasawarsa 1980-an Tiongkok berhasil meman-faatkan jasa jutaan diaspora China yang tersebar di Asia untuk jadi jembatan modal yang kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi spektakuler. India dewasa ini aktif membina hubungan kemitraan dengan 24 juta diaspora India di seluruh dunia. Jumlah diaspora Azerbaijan melebihi populasi Azerbaijan sendiri, diaspora Filipina saban tahun mengirim uang ke keluarganya yang jumlahnya 10 persen dari PDB Filipina.

Contoh terbaik tentu Yahudi. Konon hanya ada 14 juta orang Yahudi di seluruh dunia, termasuk di Israel, tetapi karena koneksitas diaspora Yahudi sangat tinggi, mereka menjadi kelom-pok ekonomi paling kuat di dunia. Tahun lalu Bank Dunia mencatat jumlah pengiriman uang dari diaspora berbagai bangsa di seluruh dunia ke kampung halaman mereka: 483 miliar dollar AS.

Lebih dari sekadar keuntungan ekonomi, pendekatan diaspora ini juga bermanfaat untuk re- profiling citra insan Indonesia di luar negeri. Selama ini kesan yang ditimbulkan warga di luar negeri adalah mereka penuh dengan masalah dan insiden, bahkan kadang tersandung rendah diri. Nyatanya, diaspora Indonesia penuh dengan profil-profil sukses, sigap bersaing di dunia internasional dan jadi teladan di komunitasnya. Kesuksesan mereka sebenarnya adalah kesuksesan Indonesia juga. Kebijakan diaspora, karena itu, merupakan bagian dari nasionalisme Indonesia yang sehat dan terbuka.

Diaspora Indonesia sebenarnya sudah cukup lama memainkan peran sejarah. Pada awal abad XX diaspora Indonesia lulusan Belanda membantu menyulut gerakan nasionalisme yang kemudian melahirkan Indonesia modern. Tahun 1970-an diaspora Indonesia yang disebut sebagai "Mafia Berkeley" tampil menjadi arsitek pembangunan ekonomi yang membuat Indonesia, terlepas dari masalah KKN, mengalami salah satu pertumbuhan tertinggi di Asia dan mencetak pemberantasan kaum miskin yang signifikan. Diaspora Indonesia dari Jerman, BJ Habibie, jadi presiden ketiga Indonesia.

Hal-hal di atas yang menjadi latar belakang penyelenggaraan Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles, 6-8 Juli 2012. Kongres itu berpotensi menjadi pertemuan historis karena untuk pertama kali ribuan diaspora Indonesia berkumpul atas motivasi yang sama: menjalin koneksitas atas dasar kecintaan pada Indonesia. Melalui kongres itu diharapkan akan timbul suatu identitas dan kebanggaan kolektif sebagai diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia bukan hanya menjadi seribu suara yang lantang, tetapi suatu kekuatan besar bagi Indonesia: kekuatan kreatif, kekuatan ekonomi, kekuatan intelektual, dan kekuatan moral. (*Kompas*, 2 Juli 2012).

Kongres membahas beberapa topik penting yang berkaitan dengan diaspora Indonesia yaitu: (1) *"Entrepreneurship and Making Career Choices"*; (2) *"Education and Innovation"*; (3) *Doing Business in Indonesia, and in the US*; (4) *Creative and Knowledge Economy: Ideas from Diaspora*; (5) *Youth Forum, "Pluralisms, Democracy and Good Governance in Indonesia"*; (6) *Indonesianists Forum*; (7) *Citizenship and Immigration Issues*; (8) *Promoting Indonesian Soft Powe*; (9) *Connecting with Local Politics and Governments*; (10) *Indonesian Migrant Workers Forum*; (11) *Permias USA forum, etc.*

A. Kongres Diaporan Indonesia I (2012)

1. Pelaksanaan

Kongres diselenggarakan di Los Angeles Convention Center dari tanggal 6 –8 Juli 2012. Kongres ini dapat dikatakan menjadi kongres terakbar, karena selama tiga hari kongres itu berlangsung telah dihadiri oleh 5000 diaspora yang terdiri atas peserta kongres dan diaspora lain di luar negeri. Kongres bersejarah ini menghabiskan biaya sekitar 820 ribu dolar. Menurut pengagasnya, Dino Patti Djalal, dana besar itu

diperoleh dari sponsor seperti Marvell Technology dan Pertamina.

Setelah melalui sidang-sidang yang ketat, Kongres Diaspora Indonesia seluruh dunia di Los Angeles itu berakhir dengan sejumlah poin penting, termasuk rekomendasi untuk memberikan landasan hukum bagi kewarganegaraan ganda. Para diaspora Indonesia yang tersebar di lima benua, terdiri dari warganegara Indonesia dan warga bangsa-bangsa dunia yang berketurunan Indonesia, menyatakan mereka bertekad untuk membangun sebuah komunitas global diaspora Indonesia yang dinamai Jaringan Diaspora Indonesia. Para diaspora yang datang dari berbagai negara itu akan menjadi penghubung untuk gagasan, solusi, sumber-daya dan jaringan guna membangun kesejahteraan bersama, dan kami akan menjadi suatu kekuatan untuk perdamaian dan kemajuan. Deklarasi itu diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang membawa sekitar 10 anggota dewan ke Kongres tersebut. Selanjutnya, hasil kongres itu disampaikan kepada DPR-RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Laporan dari hasil kongres tersebut telah mendapat tanggapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyatakan akan membentuk unit khusus diaspora di bawah Kementrian Luar Negeri. Salah satu bentuk dukungan yang akan diberikan adalah kemudahan dalam memperoleh visa Indonesia jangka panjang bagi diaspora yang sudah tidak lagi berpaspor hijau. Kebijakan baru tersebut terlahir dalam Kongres Diaspora Indonesia yang baru diadakan pertama kalinya. Kongres Diaspora Indonesia berikutnya akan diadakan di Jakarta tanggal 23-25 Agustus tahun depan dengan mengusung tema “Diaspora Indonesia Pulang Kampung.”

(Sumber: <http://www.voaindonesia.com/articleprintview/1381737.html>)

2. Hasil kongres

KESIMPULAN AKHIR DARI KONGRES DIASPORA INDONESIA Los Angeles, 6—8 Juli 2012

Hasil yang dicapai dari kongres tersebut adalah sebagai berikut.

SYNTHESIS OF RESULTS – CONGRESS OF INDONESIAN DIASPORA

Salam Diaspora!

Responding to the call made by President Susilo Bambang Yudhoyono to the Congress on Indonesian Diaspora in his video message, we the diaspora are committed to develop a strong partnership and collaboration for shared prosperity with our homeland, Indonesia.

We have seen throughout this Congress, a convention center full of positive energy. These past few days have been filled with gleaming hope, shared dreams, and common cause to bring the best in our collective spirit and to contribute to the Republic that we all love.

A wide range of issues have been discussed at this historic Congress. For the sake of brevity, these are the key highlights, outcomes and planned follow-ups from the session and committee discussions:

1. Recommendations on Institutional Structure

- We are committed to put in place a mechanism within the diaspora to empower itself going forward. Members of the diaspora have agreed to establish the Indonesian Diaspora Network (IDN) –an independent and autonomous hub that functions as an enabler and amplifier of the diaspora and grassroots community organizations within the diaspora.
- The Indonesian Diaspora Network will have national and local chapters which consist of members of the diaspora.
- The Network will work with its interlocutor within the Government, specifically with the newly established unit in charge of diaspora affairs, and form strategic alliances with other institutions –public and private—in carrying out its programs in various themes, including philanthropy.
- Finally, the Network will also identify champions among the diaspora to take this agenda forward and encourage members to function as Special Envoys to spread the messages that transpired from the Congress to various diaspora clusters around the world.

2. Recommendations on Programs

To ensure continued momentum after the Congress of Indonesian Diaspora, the diaspora will initiate a series of initiatives and programs, namely:

- Collaboration with Indonesia media to facilitate information sharing.
- Establishment of a foundation to implement various programs, namely the Computer for Schools Program, Foster Family One-on-One, Indonesia Diaspora Brain Bank, and the Quarter a Day Social Fundraising Movement.
- Establishment of a foundation to implement various programs, namely the Computer for Schools Program, Foster Family One-on-One, Indonesia Diaspora Brain Bank, and the Quarter a Day Social Fundraising Movement.

3. Recommendations on the Next Congress

- It has been agreed that the next Congress will be held in Jakarta in August 2013. A joint committee, which consists of the National Organizing Committee in Indonesia and a Steering Committee within the diaspora, will be established to plan, prepare and organize the Congress. Ambassador Dino Djalal will announce the details further.
- The National Organizing Committee is expected to receive full support from the Minister of Tourism and Creative Industry (Ibu Mari Pangestu), Minister of National Education (Bapak Muhammad Nuh), Minister of Foreign Affairs (Bapak Marty Natalegawa), Chair of the Investment Coordinating Board (Muhammad Chatib Basri), Chair of the National Economic Council (Bapak Chairul Tanjung), and Indonesian Ambassador to the United States (Dino Patti Djalal).

4. **Specific Recommendations on Public Policy**

The Diaspora welcomes the Government's decision to establish a dedicated unit to oversee diaspora affairs and provide longer-term visa facility for people of Indonesian origin. The diaspora urges policy makers to take this a step further, among other by:

- Starting the discourse about amending the Immigration Law to allow for dual citizenship.
- Ensuring a process which allows the voice of the diaspora to be taken into consideration by legislative members who represents the Indonesian electorate overseas.

5. **Thematic Recommendations**

There were 17 separate thematic discussions which resulted in specific recommendations on:

- How to promote Indonesia's culinary heritage by focusing on key iconic Indonesian food.
- How to move in a more in coordinated fashion in promoting Indonesia's soft power, namely through culture.
- How to streamline the process of sending migrant workers overseas.
- How to establish incubators in major Indonesian universities to expedite the development of ICT.
- How to enhance governance to further strengthen Indonesia's democracy and promote harmony in diversity.
- How to engage the young generation in defining Indonesia's profile for the 21st century.
- How to establish a business coaching and mentoring mechanism by successful members of the diaspora to promote entrepreneurship.
- How to actively involve the diaspora in training teachers to promote innovation through education.
- How to empower members of the diaspora who wishes to establish businesses outside of Indonesia.
- How to provide a communications and ideas sharing platform among Diaspora Women, namely through the set up of a dedicated Facebook account.
- How to spur the knowledge and creative economy within the diaspora.
- How to encourage diaspora members to be active in local politics.
- How to promote and encourage policy makers to emphasize on technologies for clean and renewable energy.
- How to increase business, trade, and investment links between the diaspora and Indonesia.
- How the diaspora could engage and partner with their host communities to become exemplary residents.

Selain kesimpulan akhir, CID atau KDI juga mengeluarkan deklarasi yang intinya seluruh warga keturunan Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia

mendeklarasikan Indonesian Diaspora Network (IDN). Mereka siap menjadi duta budaya yang akan menjaga dan mewariskan nilai-nilai luhur Indonesia di dunia. Deklarasi ini dibacakan pada hari terakhir Kongres Diaspora Indonesia yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (8/7/2012) seperti dalam rilis KBRI AS Washington DC, Senin (9/7/2012).

Deklarasi itu berisi 18 butir pernyataan yang bunyinya sebagai berikut ini:

**DEKLARASI DIASPORA INDONESIA
LOS ANGELES CONVENTION CENTER, 8 JULI 2012**

Kami Diaspora Indonesia,

Kami tersebar di lima benua, terdiri dari warga negara Indonesia dan warga bangsa-bangsa dunia yang berketurunan Indonesia.

Kami merupakan komunitas-komunitas yang besar dan beragam dan terikat oleh tali hubungan dan rasa kecintaan terhadap Indonesia.

Kami terdiri dari para profesional, buruh, perawat, awak kapal, insinyur, arsitek, guru, mahasiswa, politikus dan aktivis, artis, wiraswasta, inovator, atlit, pemuka agama, pemuda, ibu rumah tangga dan banyak lagi.

Kami berkumpul di Los Angeles untuk menumbuhkan dan mengembangkan persaudaraan dengan diaspora Indonesia di seluruh dunia, dan untuk menghubungkan sesama diaspora guna memperbaharui dan memperkuat keterikatan dengan Indonesia.

Dengan ini kami menyatakan:

Kami bertekad untuk membangun sebuah komunitas global diaspora Indonesia. Untuk tujuan ini, kami membentuk Network Diaspora Indonesia.

Kami bertekad untuk bersinergi dengan Indonesia. Menjawab himbuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kongres, dan diperkuat oleh kehadiran anggota parlemen, pemimpin masyarakat madani dan wiraswasta Indonesia, kami siap dan berkomitmen untuk mengembangkan kemitraan dan kerjasama yang dinamis untuk kesejahteraan bersama dengan Indonesia.

Kami berbesar hati dengan kemajuan demokrasi, ekonomi, posisi internasional Indonesia dan budaya Indonesia yang semakin mendunia, dan kami percaya bahwa Indonesia akan mengatasi tantangan yang masih ada, seperti memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan good governance, dan menegakkan hukum.

Kami menaruh harapan tinggi pada masa depan cerah Indonesia yang penuh potensi, dan kami terus percaya pada nilai-nilai Indonesia terbaik: toleransi dan harmoni, bhineka tunggal ika, pluralisme, dan tradisi yang menghormati lingkungan.

Kami berpandangan bahwa warisan nilai-nilai yang penuh kearifan ini perlu selalu dilestarikan karena tanpa ini Indonesia akan kehilangan makna. Kami akan berupaya keras untuk bersama-sama melestarikan nilai-nilai tersebut.

Kami meyakini bahwa abad ke-21 akan menjadi abad terbaik untuk Indonesia.

Untuk memenuhi harapan ini, Indonesia harus percaya diri, adaptif, terbuka pada ide-ide baru, meritokratis, dan secara cerdas mengelola kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan warisan budayanya.

Diaspora Indonesia akan menjadi penghubung (HUB) untuk gagasan, solusi, sumber daya dan jaringan guna membangun kesejahteraan bersama, dan kami akan menjadi suatu kekuatan untuk perdamaian dan kemajuan.

Kami akan mempromosikan budaya Indonesia.

Kami akan menyebarkan visi ini dan bekerjasama dengan komunitas diaspora Indonesia lainnya, dan akan berupaya untuk terus tumbuh bersama dan membantu satu sama lain.

Ini merupakan babak baru bagi Indonesia, dan diaspora Indonesia.

Kami mengundang semua diaspora Indonesia untuk maju bersama kami.

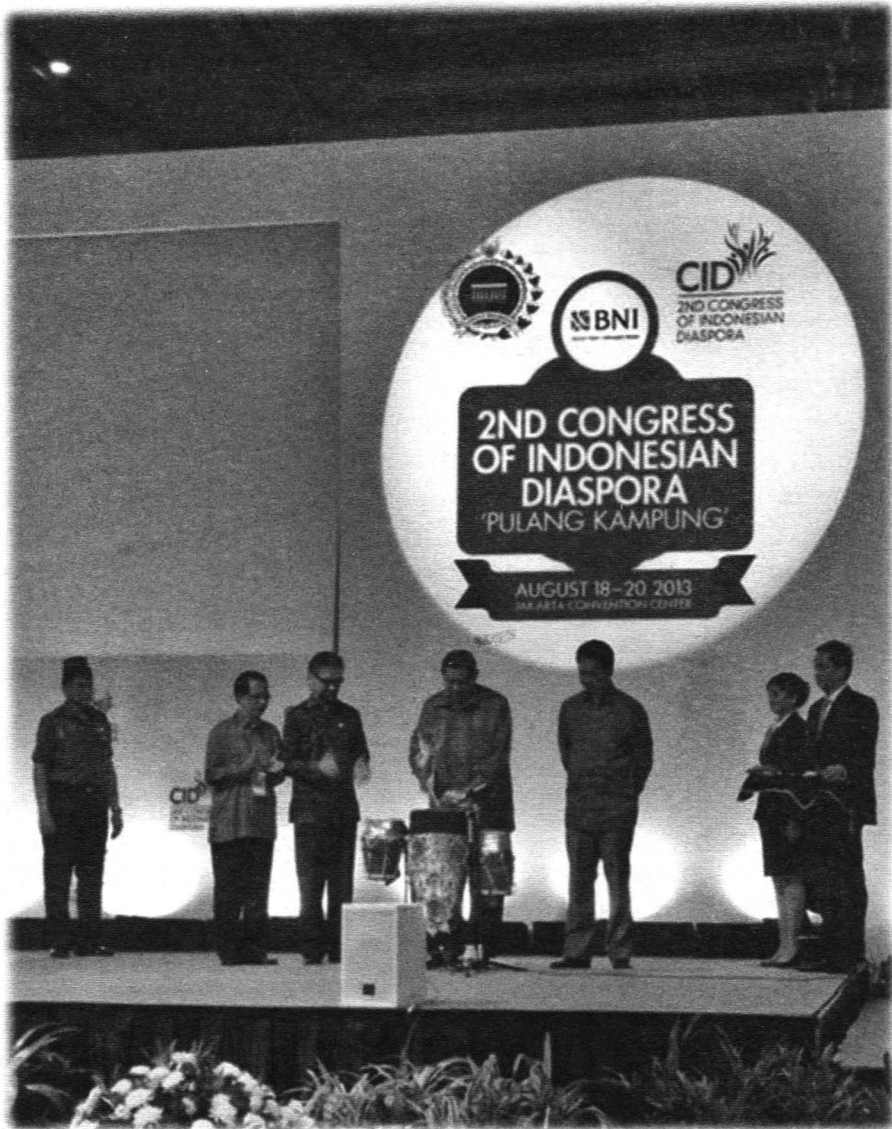
Los Angeles, 8 Juli 2012.

B. Kongres Diaspora Indonesia II (2013)

Sesuai dengan hasil Kongres Diaspora Indonesia (KDI) I di Los Angeles Juli 2012, kongres kedua diselenggarakan di Jakarta, mulai tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 2013. Tempat penyelenggaraan kongres di Jakarta Convention Centre (JCC) dengan tema “Pulang Kampung”. Kongres diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini oleh sebuah satuan kerja Desk Diaspora Indonesia (DDI) Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Indonesian Diaspora Network (IDN) sedunia.

Banyak sekali diaspora Indonesia yang ingin berbuat sesuatu bagi komprehensif dari Pemerintah Indonesia. Pendekatan yang mengemuka lebih kepada TKI yang merupakan sebagian saja dari beragam diaspora Indonesia di luar negeri. Kedua, belum adanya suatu ikatan atau wadah yang dapat merangkul tanah airnya namun belum terakomodasi dengan baik. Pertama, belum ada suatu pendekatan dan perhatian secara sistematis dan mempersatukan Diaspora Indonesia. Padahal, sebagai komunitas besar yang padat ilmu, ide, modal, dan jaringan Diaspora Indonesia berpotensi besar sebagai salah satu kunci sukses Indonesia di abad ke-21. Ketiga, Diaspora Indonesia ibarat ‘*thousands of unconnected dots*’ yang seringkali diwarnai dengan minimnya hubungan dengan tanah air yang pada gilirannya menjadi suatu komunitas penuh potensi namun lemah koneksi. Keempat, masih kurang diperhitungkannya Diaspora Indonesia di sejumlah negara, padahal sejumlah diaspora lainnya seperti India, Cina, dan bahkan Thailand telah menunjukkan eksistensi global.

Beberapa permasalahan itulah yang mendorong diselenggarakannya Kongres Diaspora Indonesia (KDI) Pertama, Juli 2012 di Los Angeles, sebagai sebuah Momentum Sejarah Diaspora Indonesia. Kongres pertama itu telah berhasil menyulut suatu identitas dan kebanggaan baru sebagai “Diaspora Indonesia”. Juga untuk pertama kalinya sebuah kongres dihadiri lebih dari 2.000 Diaspora Indonesia dari 21 negara bertemu dalam satu forum kongres berembuk selama 3 hari untuk membahas berbagai topik. Kongres itu telah melahirkan “*Declaration of Indonesian Diaspora*” yang merupakan visi segar mengenai diaspora dan mengenai masa depan Indonesia.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Dubes Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal (kiri) dan Menlu Marty Natalegawa (tengah) bersiap meresmikan Kongres Diaspora Indonesia II di Jakarta Convention Center, Senin (19/8). Kongres Diaspora Indonesia II yang mengambil tema “Pulang Kampung” tersebut diikuti sekitar 6000 WNI yang tinggal di luar negeri. (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

Tujuan dari diselenggarakannya KDI II adalah sebagai berikut.

- Mempersatukan kekuatan dan mendayagunakan potensi diaspora dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama.
- Membangun kekuatan nyata dan mempererat jejaring antardiaspora.
- Forum untuk membangun hubungan, mempersatukan berbagai komunitas, dan mempertautkan titik-titik antara diaspora dan bahkan pada cakupan yang lebih luas lagi.

- Mempercepat upaya bersama dalam menggalakkan semangat, inovasi, dan menjaga dinamika di Indonesia.
- Memperkuat komitmen untuk berkontribusi secara nyata bagi tanah air.

Mengenai topik dan pelaksanaan diskusi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu (1) *Public Forum* dan (2) *Task Force Meetings*, masing-masing terdiri atas bidang permasalahan sebagai berikut.

1. Public Forum

Pada sesi ini dibahas 6 bidang sebagai berikut.

- a. Pencak Silat for the World.
- b. Youth Forum: Unleashing the Power of the Youth of the 21st Century.
- c. Indonesia Sebagai Emerging Power Dunia: Peluang dan Tantangan.
- d. Bersaing di Pentas Global: Peran Diaspora Dalam Menduniakan Seni Budaya Indonesia.
- e. Indonesia 2010: The View of Young Indonesian Diasporas.
- f. Mau Bekerja, Berbisnis atau Belajar di Luar Negeri? Nasihat dan Pelajaran dari Diaspora.

2. Task Force Meeting

Bidang yang dibahas dalam pertemuan Task Force yang dibentuk dibagi ke dalam 11 kelompok, yaitu Task Force untuk:

- a. Pertumbuhan Hijau (Green Economy), membahas bagaimana menciptakan suatu sistem ekonomi yang kuat dalam rangka memastikan bahwa semua orang mempunyai akses untuk memperoleh standar pembangunan yang layak dan kesempatan penuh.
- b. Bisnis dan Investasi (Business and Investment), membahas bagaimana membawa Indonesia menjadi suatu pusat manufaktur yang kuat (manufacturing power house) dan juga memikirkan bagaimana mengakomodasi kesempatan sejalan dengan bertumbuhnya konsumen kelas menengah (middle class) dan kelas atas (affluent).
- c. Kuliner (Culinary), membahas bagaimana perencanaan dan pengimplementasian secara sistematis yang dapat mengangkat berbagai makanan khas Indonesia ke tingkat dunia.
- d. Kedirgantaraan (Aerospace), membahas bagaimana dapat merintis suatu kemitraan dengan Diaspora Indonesia dalam rangka upaya untuk membangun kembali industri dirgantaraan Indonesia dan juga memetakan berbagai potensi pendukung, baik dari sisi finansial maupun sumberdaya manusia.
- e. Kesehatan Masyarakat (Public Healthcare), membahas bagaimana mendorong ketersediaan suatu program kesehatan bagi masyarakat luas yang berkualitas dan terjangkau.
- f. Sains, Teknologi, & Inovasi (Science, Technology, & Innovation), membahas kesiapan untuk implementasi pilot study tele-healthcare programs di sejumlah

lokasi di Indonesia, termasuk program sosialisasi, kesiapan untuk implementasi, berbagai pembahasan proposal dan perijinan pengadaan bahan baku.

- g. Kota Layak-Huni (Livable Cities), membahas penyusunan program, sosialisasi, dan implementasi program penghijauan kota dengan berbagai upaya penanaman pohon di sejumlah tempat.
- h. Kepemudaan (Youth), membahas bagaimana meningkatkan peran pemuda dalam menentukan masa depan bangsa dan negara serta dalam pembentukan keunggulan kompetitif negara di masa mendatang.
- i. Pendidikan (Education), membahas bagaimana mempercepat ketersediaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian penting dari pembentukan sumberdaya manusia Indonesia yang kompetitif.
- j. Pekerja Migran (Migrant Worker), membahas langkah-langkah konkrit untuk memastikan segera diimplementasikannya perubahan UU No. 39/2004 terkait proteksi dan dukungan terhadap pekerja migran.
- k. Keimigrasian dan Kependudukan (Immigration and Citizenship), membahas penerapan status kependudukan ganda di Indonesia yang selama ini telah diharapkan oleh banyak pihak yang melihat adanya sejumlah manfaat dari kependudukan ganda tersebut.

Kongres kali mencatat rekor jumlah peserta, yang menurut panitia melibatkan sekitar 6000 orang dengan peserta 2500 orang dari berbagai organisasi dan entitas bisnis yang terkait dengan Indonesia, para pembuat kebijakan tingkat tinggi, pejabat pemerintah, pelaku bisnis, pembentuk opini publik, akademisi terkemuka, pembicara inspirasional, ikon budaya, dan sejumlah sosok berprestasi.

Hadir dan tampil sebagai pembicara antara lain: Dr. Sri Mulyani Indrawati (World Bank), Dr. Mari Elka Pangestu (Menparekraf), Retno Marsudi (Duta Besar Indonesia di Belanda) Peter F. Gonta (First Media/Java Jazz), Tan Sri Dr. Rais Yatim (Mantan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia), Wona Sumantri (Silat Al-Azhar AS) Prof. Iwan Jaya Azis (Cornell University) Prof. Takeshi Siraishi (National Graduate Institute for Policy Studies, Japan), Karim Ruslan (CEO KRA Group, Malaysia), Jhon Riady (Alumni Columbia University) dll.

Kongres dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 19 Agustus 2013. Dalam sambutannya antara Presiden menegaskan bahwa komunitas diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia merupakan aset nasional tidak hanya sekadar sahabat namun juga bagian dari Bangsa Indonesia. Tidak boleh ada diaspora yang diperlakukan seperti orang asing jika pulang ke kampung halamannya. Menurut SBY pada prinsipnya sepanjang di hati dan darah ada Indonesia, sepanjang itu saudara menjadi bagian dari keluarga besar Bangsa Indonesia.

Selain itu, Presiden Yudhoyono mengarahkan agar momentum penyelenggaraan kongres diaspora harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong sinergi antara diaspora Indonesia, pemerintah, dan masyarakat. Hubungan antardiaspora dengan entitas lainnya di dalam negeri harus terus dijalin. Dengan telah dihasilkannya 56 chapter IDN di 26 negara, merupakan pertanda betapa gesitnya gerakan diaspora yang baru lahir. Tantangannya adalah bagaimana bisa dirumuskan mekanisme komunikasi

antarkomunitas diaspora.

Mengenai sinergi yang kedua, yaitu antara diaspora dengan pemerintah, harus terus dikembangkan baik dengan pemerintah pusat maupun daerah. Melalui pengesahan PP No. 31 tahun 2013 sinergi antara diaspora baik pemerintah pusat maupun daerah perlu terus dikembangkan. Dan yang ketiga adalah sinergi antara diaspora dengan masyarakat melalui interaksi yang semakin meluas. Akhirnya, kongres melahirkan keputusan sebagai berikut.

DIASPORA INDONESIA “SEREMPAK UNTUK BERAKSI” (IDN TOGETHER FOR ACTIONS)

Salam Diaspora!

Kami, segenap Diaspora Indonesia yang berasal dari 56 chapters Indonesia Diaspora Network (IDN) dari 26 negara, telah melaksanakan Kongres Diaspora Indonesia ke-2 pada tanggal 18-20 Agustus 2013 di Jakarta.

Selama tiga hari terakhir kami berkongres di Jakarta Convention Center ini, penuh dengan energi positif, akan “Serempak Untuk Beraksi”. Komitmen bersama kami adalah untuk bersumbangsih konkrit kepada Bangsa dan Negara, berkontribusi kepada tanah yang kami cintai ini. Menuju masa keemasan Indonesia!

Setelah mengikuti Kongres yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, baik dari pemerintah, anggota parlemen, swasta, LSM dan Masyarakat umum, sepakat untuk:

1. Membentuk **Indonesian Diaspora Global Network** yang mewakili seluruh national chapters;
2. Mendirikan kantor kepentingan diaspora yang berbadan hukum Indonesia di Jakarta;
3. Melaksanakan Kongres Diaspora Indonesia setiap 2 (dua) tahun sekali serta mendorong chapters diaspora di kawasan untuk melakukan pertemuan di antaranya.

Selanjutnya, kami juga akan melaksanakan aksi di berbagai bidang antara lain:

Di Bidang Energi

- Membentuk **Indonesian Diaspora Energy Professional Network** sebagai platform kolaborasi bersama seluruh stakeholder untuk saling berbagi informasi, solusi dan best practice bagi para diaspora yang memiliki kepakaran di bidang energi: minyak, gas, batubara, panas bumi serta energi baru dan terbarukan.
- Membantu mendorong peningkatan investasi dalam sektor energi di Indonesia.
- Mendorong pengembangan bisnis, pendidikan dan ketrampilan dalam hal energi rendah karbon seperti melalui Clean Development Mechanism.

Di Bidang Ketenagakerjaan

- Membentuk **Indonesian Migrant Workers Network** untuk membantu perlindungan TKI di luar negeri dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Di Bidang Imigrasi dan Kewarganegaraan

- Mendorong pembentukan Focus Group, yang terdiri dari pemerintah, parlemen, Diaspora, dan akademisi, untuk membahas mengenai beberapa aspek dari dwi-kewarganegaraan.
- Menyusun naskah akademik mengenai dwi-kewarganegaraan yang hasilnya akan disampaikan kepada pemangku kebijakan.

Di Bidang Pendidikan

- Membentuk portal bagi pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.
- Mendorong program Diaspora Mengajar baik secara langsung maupun melalui media lain bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Indonesia.
- Mendorong kebijakan yang lebih memudahkan kolaborasi di bidang pendidikan terutama riset.
- Membangun data base dan memperkuat jejaring terkait bidang profesi pendidikan.

Di Bidang Inovasi Iptek

- Mengembangkan kerjasama antara Diaspora dengan Sektor Swasta dan Pemerintah di bidang-bidang yang memiliki potensi tinggi bagi pembangunan nasional seperti Pusat Industri Kimia, Biokimia dan Bio-Teknologi, serta Tenaga Listrik Relatif Murah dari Konverter Energi Penahan Gelombang Laut (Breakwater Energy).

Di Bidang Liveable Cities

- Mendorong kerjasama para diaspora dengan arsitek, urban planners, ahli tata air, pakar teknik lingkungan dan landscape architecture Indonesia bagi terciptanya sebuah konsep kota layak huni berkelanjutan yang dapat diterapkan di Indonesia.
- Membantu terselenggaranya program nasional yang melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa, khususnya bangunan dan arsitektur tradisional di daerah dan wilayah pedalaman.
- Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam membangun kota – kota kecil atau desa-desa yang juga menghadapi tantangan dampak pembangunan melalui berbagai pilot projects, mulai dari pemberdayaan masyarakat terpencil melalui perikanan dan perbaikan desa untuk meningkatkan kualitas hidup.

Di Bidang Green Economy

- Meningkatkan gerakan penghijauan di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia, serta investasi Diaspora Indonesia di sektor Panas Bumi (Geo-thermal).
- Meningkatkan investasi di berbagai bidang terkait ekonomi hijau di Indonesia.

Di Bidang Kesehatan

- Memperluas kerja sama antar kelompok Diaspora untuk mencari solusi komprehensif dalam upaya peningkatan perawatan kanker, pelayanan pasien lanjut usia, dan pertukaran pengetahuan bagi dokter muda Indonesia dan petugas kesehatan lainnya.
- Mendorong terbentuknya suatu Knowledge Center for Health bagi penanganan kesehatan yang komprehensif.

- Memanfaatkan kapasitas diaspora bagi pengembangan teknologi pelayanan kesehatan jarak jauh di Indonesia.

Di Bidang Bisnis dan Investasi

- Bekerjasama dengan Perbankan Nasional dan Internasional untuk menurunkan Biaya Remitansi terutama di negara yang padat Diaspora Indonesia.
- Mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah dan Perbankan nasional guna meningkatkan bisnis dan investasi Diaspora Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan adanya obligasi bagi diaspora dalam satuan harga yang menarik.
- Terus meningkatkan minat diaspora untuk berinvestasi di sektor pertanian.

Di Bidang Kuliner

- Membantu memperkenalkan dan mengembangkan kuliner khas Indonesia di Negara kediaman masing-masing, khususnya 30 ikon kuliner Indonesia, melalui berbagai cara, baik penyebarluasan informasi standar makanan dan minuman khas Indonesia maupun kegiatan bersama diaspora lainnya.
- Mendorong pembentukan Konsorsium Kuliner Indonesia bersama-sama Pemerintah dan Swasta guna mewujudkan potensi keberadaan Rumah Makan Indonesia di berbagai belahan dunia.

Di Bidang Kedirgantaraan

- Melalui Task Force Dirgantara, kami bertekad untuk memberikan pikiran, pengetahuan, dana, dan berbagi jaringan bisnis untuk membantu industri Dirgantara Indonesia dan secara khusus mendukung pembiayaan preliminary design program Regional Turboprop R80 dan menjadi interlocutor kepada investor potensial pada fase berikutnya.
- Mendorong DPR dan Pemerintah untuk antara lain: membuat Undang-Undang khusus untuk industri dirgantara yang menjadi payung hukum bagi kemudahan dan insentif semua pihak secara maksimal ; menggerakkan perbankan nasional untuk membantu Kredit Penjualan bagi produk industri pesawat nasional dan memberi insentif bagi maskapai penerbangan nasional yang menggunakan produk industri pesawat nasional; serta meningkatkan edukasi industri dirgantara di semua strata pendidikan.

Di Bidang Kepemudaan

- Mendorong terciptanya sinergi antara pendidikan dan kebutuhan industri, untuk menunjang Indonesia maju.
- Pembentukan Jaringan Bisnis Pemuda Indonesia di bidang Teknologi Informasi, Bisnis dan Edukasi.
- Mendorong pembentukan badan khusus untuk mengembangkan sistem pengajaran dan promosi pencak silat secara internasional yang lebih komprehensif.

Jakarta, 20 Agustus 2013

Bila disimak dari hasil KDI II, terutama mengenai rencana aksi yang bersentuhan dengan kebudayaan ada pada bidang *Liveable Cities* dengan rencana aksi “Membantu terselenggaranya program nasional yang melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa, khususnya bangunan dan arsitektur tradisional di daerah dan wilayah pedalaman. Bila ditinjau dari segi peran diaspora dalam bersaing di pentas global sebagai topik dari acara kongres ada hal penting yang luput dari sorotan dan pembahasan.

Hal penting itu antara lain mengenai penggantian nomenklatur “Atase Pendidikan dan Kebudayaan”, yang kini menjadi “Atase Pendidikan”. Dalam sejarahnya, sebelum lahir “Atase Pendidikan dan Kebudayaan”, yang lebih lahir adalah “Atase Kebudayaan” baru kemudian kata “pendidikan” menyusul. Pembentukan “Atase Kebudayaan”, berdasarkan rekomendasi Konferensi Kebudayaan tahun 1952. Untuk membantu Kedutaan Besar Indonesia maupun para diaspora dalam pentas global peran “Atase Kebudayaan” sangat strategis.

Hal penting kedua, adalah peningkatan kebijakan nasional untuk secara ofensif memperkenalkan kebudayaan Indonesia dalam pentas global. Selama ini kebijakan yang selalu didengungkan adalah “menyaring atau menangkal pengaruh negatif kebudayaan asing”. Kebijakan yang bersifat defensif ini seharusnya dikembangkan menjadi kebijakan yang bersifat ofensif. Kita gencarkan pengenalan kebudayaan bangsa yang dikenal sangat beraneka ragam.

Hal penting ketiga adalah bagaimana agar rencana aksi itu diperluas tidak hanya “*bangunan dan arsitektur tradisional di daerah dan wilayah pedalaman*”, tetapi juga berupa pendataan aset budaya yang berada di luar negeri hingga kini belum ada data yang lengkap dan akurat. Hal ini penting untuk dapat dijadikan sumber dan rujukan dalam penelitian kebudayaan bangsa dan penulisan sejarah kebudayaan bangsa.



*Presiden Soeharto menyalami Sam Bimbo se usai memberikan pengarahan dan menerima para peserta Kongres Kesenian Indonesia I, 1995 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Desember 1995.
(Foto:Ant)*

BAGIAN 3

KONGRES KEBUDAYAAN DAERAH DAN LAIN-LAINNYA

BAB I

PENDAHULUAN

Seperti diuraikan pada pendahuluan, gagasan untuk menyelenggarakan KK pertama tahun 1918 datang atas inisiatif sejumlah cendekiawan bumi putra terutama yang tergabung dalam organisasi BO. KK pertama tentu saja membahas kebudayaan lokal (daerah) karena negara-bangsa Indonesia belum lahir. Kebudayaan bangsa, kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia secara *de facto* dan *de jure* lahir setelah negara-bangsa diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kongres pertama itu membahas kebudayaan lokal Jawa, diberi nama “Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa” atau “*Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*”.

Dengan nama kongres seperti itu banyak yang menyangka yang diper-bincangkan hanya mengenai pengembangan kebudayaan Jawa saja. Ternyata, meskipun menggunakan label “kebudayaan Jawa” karena pemakaian kata “Indonesia” masih harus dihindari untuk tidak menghadapi masalah dengan pemerintah kolonial, tetapi perbincangan di dalam arena kongres banyak mengarah pada masa depan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali, serta Indonesia. Yang berbicara tentang masa depan kebudayaan bangsa itu tidak hanya pemakalah bumiputra saja tetapi juga termasuk para pemakalah yang berasal dari kalangan Hindia Belanda.

Setelah berdiri lembaga Java Instituut nama kongres selanjutnya berubah menjadi “*Congres van het Java Instituut*”. Artinya, kongres yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga kebudayaan yang bernama “Java Instituut”. Kongres Kebudayaan tahun 1918, kemudian disusul tahun 1919, 1921, 1924, 1926, 1929 dan 1937. Memasuki masa kemerdekaan kongres kebudayaan lokal baru dimulai pada awal tahun 1960-an. Berbeda dengan bidang bahasa yang telah mulai berkongres tahun 1952, yakni Kongres Bahasa Sunda. Memasuki masa reformasi dan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik (otonomi) para pemangku budaya lokal di beberapa daerah juga terdorong menyelenggarakan kongres untuk memperbincangkan masalah kebudayaannya.

Kongres yang dipaparkan pada Bagian III ini dapat dikelompokkan menjadi enam macam. *Pertama*, Kongres Kebudayaan Daerah yaitu kongres memperbincangkan kebudayaan suku bangsa secara umum seperti yang disebut dalam Penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yaitu “*kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat*

Indonesia seluruhnya". Di dalam frasa „*rakyat Indonesia seluruhnya*“ itu dapat diartikan mencakup seluruh suku bangsa yang berdiam dalam wilayah RI, seperti Sunda, Jawa, Minang, dll. Termasuk juga paparan mengenai Kongres Kebudayaan Melayu yang diselenggarakan oleh negeri jiran, Malaysia. Dasar pertimbangannya, selain karena kita belum pernah menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Melayu oleh negeri jiran, juga karena kebudayaan Melayu tidak hanya berkembang di Malaysia, tetapi juga di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

Kedua, kebudayaan yang berkembang di wilayah administrasi suatu daerah provinsi, misalnya Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat yang berlangsung tahun 2008. *Ketiga*, kongres yang diselenggarakan oleh para pendukung budaya suatu suku bangsa, yang tidak dibatasi oleh wilayah provinsi, seperti Kongres Kebudayaan Jawa, Bali, Minangkabau, Sunda, Madura, Banjar, Betawi, dll. *Keempat*, kongres yang membahas kebudayaan atau bahasa atau adat istiadat suatu subsuku bangsa (subetnik) seperti Kongres Masyarakat Adat Osing di Banyuwangi, Kongres Bahasa Tegal dll. Gejala ini menunjukkan semakin berkembangnya perhatian masyarakat pendukung kebudayaan untuk melestarikan (melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan) kebudayaannya, setelah diterapkannya sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik

Kelima, di dalam Bagian III ini dipaparkan mengenai kongres beberapa unsur kebudayaan, seperti kongres: sejarah, arkeologi, ilmu pengetahuan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dll. *Keenam*, di dalam Bagian III ini juga dipaparkan berlangsungnya Kongres Diaspora Indonesia di Amerika Serikat patut menjadi catatan sejarah kebudayaan Indonesia. Kongres itu berperan penting dalam memperkenalkan kebudayaan Indonesia di luar negeri dan sebagai bagian dari diplomasi politik luar negeri yang bermatra budaya.

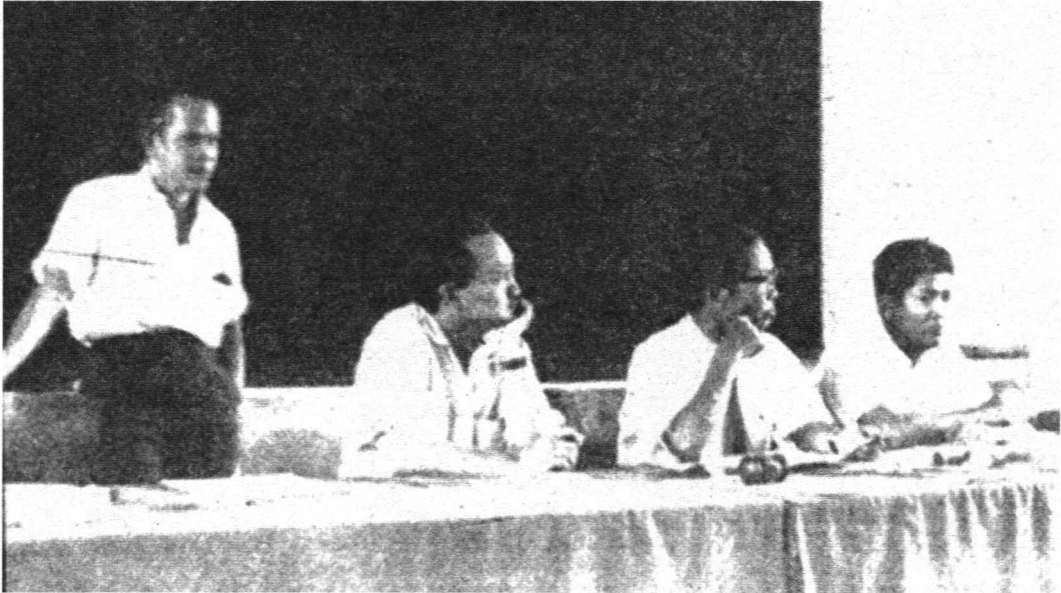
Mengenai penyelenggara kongres juga terdiri atas beberapa lembaga atau organisasi. *Pertama*, kongres yang diselenggarakan oleh organisasi swasta atau organisasi masyarakat, seperti Java Instituut, BMKN, Lekra dll. *Kedua*, kongres yang diselenggarakan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), Asosiasi Prehistorisi Indonesia (API), Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) dll. *Ketiga*, kongres yang diselenggarakan oleh lembaga kebudayaan pemerintahan seperti Direktorat Jenderal kebudayaan, Pusat Bahasa, Perpustakaan Nasional, pemerintah Daerah dll.

Selain dapat dikelompokkan menjadi enam macam kongres seperti disebutkan di atas, isi yang dipaparkan dalam Bagian ini dibedakan antara Kongres Kebudayaan Daerah dengan Kongres-kongres lainnya. Yang dimaksud dengan kongres-kongres lainnya itu adalah kongres dan konferensi yang membahas unsur kebudayaan seperti kongres bidang-bidang: sejarah, arkeologi, epigrafi, kesenian, perbukuan, perpustakaan, kebatinan/kepercayaan, dan ilmu pengetahuan. Dalam Bagian ini juga dimasukkan paparan mengenai Kongres Diaspora Indonesia, karena kongres ini membahas dan merumuskan kesimpulan tentang pengenalan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Para diaspora yang terdiri atas orang-orang Indonesia atau keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Gambaran secara singkat mengenai kongres dan konferensi kebudayaan daerah dan unsur-unsur kebudayaan secara kronologis adalah sebagai berikut.



Suasana Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia, 1 Maret 1964 di Aula Bank Indonesia, Jakarta. Atas: dari kiri: Nugroho Notokusanto, Trsinojuwono, Idrus Isamil, Toto Sudarto Bachtiar.



Bawah dari kri: Trisno Soemardjo, pimpinan sidang, Usmar Ismail, Gajus Siagian, Bokor Hutasuhut. (Sumber: Prahara Budaya, DS Muljanto-Taufiq Ismail)

BAB II

KONGRES KEBUDAYAAN DAERAH

Bebagai kegiatan kongres kebudayaan suku bangsa, kebudayaan daerah (lokal), kebudayaan rakyat dan kongres unsur-unsur kebudayaan ternyata sudah cukup banyak diselenggarakan. Kongres kebudayaan dan unsur budaya daerah semakin marak setelah memasuki masa reformasi. Gambaran tentang kongres dan konferensi yang pernah berlangsung sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut.

A. Kongres Lembaga Kebudayaan Rakyat

Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) adalah organisasi kebudayaan yang didirikan oleh sejumlah seniman dan budayawan yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Lembaga itu didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950. Lingkup aktivitasnya selain masalah kebudayaan dalam hal konsep, kebijakan dan strategi, Lekra banyak mengurus bidang seni seperti sastra, rupa, pertunjukan (drama tradisional ketoprak, ludrug, wayang wong) tari, film, musik, dan lain-lain yang kesemuanya diabdikan untuk tujuan politik Partai Komunis Indonesia (PKI).

Lekra mengadakan 2 kali kongres, yakni tahun 1959 dan tahun 1960. Gambaran singkat mengenai kedua kongres tersebut adalah sebagai berikut.

A.1 Kongres Lembaga Kebudayaan Rakyat I 1959

Kongres Lekra pertama diselenggarakan pada tanggal **27 Desember 1959** di Solo. Pada kongres itu Lekra membahas semacam politik kebudayaan dalam arti merumuskan konsep, kebijakan, visi, misi dan strategi Lekra dalam berkebudayaan. Dalam hal kesenian Lekra mengambil konsep "seni untuk rakyat" dan "politik adalah panglima" di seluruh bidang kehidupan bangsa, termasuk kegiatan kebudayaan. Pada kongres itu juga dibahas dan disempurnakan Mukadimah LEKRA, yang antara lain ditulis "kesenian, ilmu, dan industri baru dapat menjadikan hidup rakyat indah, gembira dan bangga, apabila semuanya itu sudah menjadi kepunyaan rakyat". (Sumber: <http://m>.

A.2 Kongres Lembaga Kebudayaan Rakyat II 1960

Kongres diselenggarakan di Jakarta mulai **30-31 Agustus 1960**. Dalam kongres itu LEKRA kembali menegaskan garis kebijakannya sesuai dengan Mukadimah dan Laporan Umum. Penegasan itu antara lain dalam hal sikap Lekra sebagai anggota BMKN yang Konkritnya menghentikan dukungan terhadap BMKN.

Lekra menyimpulkan bahwa garis haluan BMKN sudah tidak sesuai dengan garis perjuangan Lekra. Garis kebijakan yang oleh Lekra harus segera dilaksanakan adalah pekerjaan kebudayaan dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah rakyat yang dinilai tidak diperhatikan oleh BMKN. Selain itu, kegiatan seni di lingkungan sekolah dan kampung-kampung harus terus digalakkan. (Sumber: <http://m.kompasiana.com> - diunduh tanggal 12/8/2011)

B. Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM)

Setelah memasuki era otonomi daerah, masyarakat Minangkabau bersepakat untuk menyelenggarakan forum kongres untuk membahas konsep, kebijakan dan strategi untuk memajukan kebudayaan Minang. Kongres Kebudayaan Minang-kabau yang pertama ini diselenggarakan tanggal **28 - 30 November 2006** di Padang. Nama kongres itu adalah “Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Minangkabau”.

Dari hasil diskusi dalam sidang pleno dan komisi, kongres menyepakati beberapa kesimpulan kongres. Bunyi lengkap rumusan hasil Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Minangkabau 2006 adalah sebagai berikut.

RUMUSAN KONGRES KEBUDAYAAN DAN APRESIASI SENI BUDAYA MINANGKABAU 2006

PANDANGAN UMUM

Pembicaraan dalam kongres bertitik tolak pada 12 persoalan yang mengemuka dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini yang telah dirumuskan dalam topik-topik bahasan dalam tiga kelompok persidangan kongres. Selama berlangsungnya persidangan, persoalan yang dikemukakan 25 pemakalah direspon peserta dengan pemikiran-pemikiran yang sangat analitis. Meskipun begitu, terdapat topik yang tidak ditanggapi secara optimal oleh peserta sehingga substansi topik yang dibahas belum muncul, karena terbatasnya waktu yang tersedia.

Persidangan berjalan dengan baik, tertib dan tepat waktu. Peserta mengikuti dengan antusias seluruh persidangan sesuai jadwal. Para peserta secara umum berpendapat bahwa kongres ini merupakan momen penting dalam membangkitkan kejayaan kebudayaan Minangkabau, melalui kesadaran untuk menanggapi persoalan empiris masyarakat Minangkabau dewasa ini.

Kesadaran akan kompleksnya persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat

Minangkabau terlihat dari kerisauan mendalam tentang terjadinya perubahan gaya hidup orang Minangkabau. Pembicaraan tentang kebudayaan dan apresiasi seni budaya Minangkabau diharapkan tidak berhenti pada rumusan hasil persidangan kongres dalam bentuk rumusan dan rekomendasi, tetapi akan dilanjutkan dalam langkah kongkrit yang menjadi agenda pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan budaya Minangkabau.

ISU-ISU PENTING

- Pembaharuan struktur dan mekanisme adat dan syarak.
- Ulama, cendekiawan dan pemangku adat tidak harus dipertentangkan.
- Sikap kurang saling mengharagai anantara ulama dengan ulama, antara pemuka adat dengan pemuka adat, antara cendekiawan dengan cendekiawan, dan antara ketiganya.
- Iklim sosial dan budaya Minangkabau cocok dengan perubahan zaman.
- Krisis manajemen dan SDM di bidang adat, agama dan cerdik pandai.
- Masyarakat Minangkabau tergođa dengan kebudayaan lain.
- Penempatan kembali fungsionaris adat dan agama sebagaimana mestinya.
- Kerjasama pemerintah dan fungsionaris adat dan agama dalam melestarikan kebudayaan Minangkabau.
- Fungsionaris adat yang bermukim di rantau.
- Krisis identitas Minangkabau.
- Program uni-uda dan kepatutannya menurut adat budaya Minangkabau.
- Jarak anantara nilai ideal adat dan kenyataan semakin besar.
- Masyarakat Minangkabau termasuk ulama, cenderung menyekolahkan anak-nya ke sekolah umum daripada ke sekolah agama.
- Metode pendidikan Islam diinginkan dakwah bil hikmah mau'izhah (dengan hikmah dan pengajaran yang indah).
- Pendidikan dan apresiasi seni budaya merupakan pendekatan yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai adat dan Islam.
- Pengakuan masyarakat penting dalam proses lahirnya seorang ulama.
- Ulama di nagari-nagari yang tidak mendapat ruang berperan dan dimarjinalkan dalam berfatwa.
- Program kaderisasi ulama oleh pemerintah secara formal dan informal.
- Kaitan erat antara proses lahirnya seorang ulama dengan masyarakat adatnya.
- Penguatan identitas/jati diri, integritas, sikap kritis dan sikap kreatif masyarakat Minangkabau dalam menghadapi budaya populer sebagai akibat logis dari globalisasi.

CATATAN KHUSUS SETIAP SIDANG KELOMPOK

Sidang Komisi Adat

- Eksistensi fungsionaris adat masih ada di dalam masyarakat Minang-kabau, namun perannya tidak optimal dan cenderung melemah.
- Fungsionaris adat tidak harus diintervensi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya.
- Struktur fungsionaris adat merupakan warisan dari nenek moyang yang perlu

dipertahankan.

- Naik turunnya peran fungsionaris adat telah berlangsung semenjak zaman kolonial Belanda.
- Perubahan struktur politik dan ekonomi telah menyebabkan menurunnya kepercayaan, kedudukan dan kekuatan fungsionaris adat dalam masyarakat.
- Oleh karena peranan para penghulu telah bergeser, maka perlu ada pemikiran kembali dan mendefinisikan peran penghulu di tengah masyarakat.
- Moralitas dalam berpakaian dan bersikap menjadi cerminan jati diri perempuan Minangkabau.
- Hak-hak perempuan memerlukan bahasa ungkap yang bisa dikenali oleh generasi hari ini.
- Ninik mamak punya tanggung jawab dalam peningkatan eksistensi perempuan Minangkabau.
- Salah satu tugas bundo kanduang adalah mensosialisasikan undang-undang adat tentang perilaku perempuan Minangkabau.
- Penegasan ciri pakaian perempuan Minangkabau merupakan langkah untuk meredam arus globalisasi.
- Perempuan Minangkabau perlu dipahami dengan perspektif ideal dan praktek.
- Persoalan kebahasaan, adat dan budaya adalah persoalan yang rumit. Namun selalu menjadi pembicaraan yang tidak tuntas karena pemerintah kurang memperhatikannya.
- Perlu memetakan persoalan yang berkaitan dengan adat dan budaya Minangkabau, karena stiap pembicaraan selalu terjadi pengulangan persoalan.
- Standar kurikulum mata pelajaran Bahan Ajar Muatan Lokal (BAM) perlu dicermati karena akan membimbing generasi muda menuju pema-haman yang baik.
- Mata pelajaran bahasa Minangkabau akan bisa menciptakan rasa cinta terhadap budaya Minangkabau.

Sidang Fungsionaris Agama

- Fenomena kelangkaan ulama melahirkan pemikiran mencari potret ulama masa kini yang dimungkinkan tidak hanya ditujukan kepada sosok individu yang aktif membina umat dan mempunyai kharisma semata tetapi diperkuat jaringan tokoh yang ahli di bidangnya. Tegasnya, uлам ke depan adalah kelompok tokoh yang mempunyai disiplin ilmu yang saling memperkuat dalam mengeluarkan fatwa. Karenanya, perlu ada upaya pemerintah dan masyarakat melahirkan jaringan ulama baru.
- Ulama baik di basis pendidikan maupun di kelembagaan ulama tidak hanya mampu membaca kitab kuning dan kitab putih, tetapi juga mampu mem-berikan perspektif lokal terhadap ajaran keagamaan.
- Ulama sebagai pewaris Nabi dalam pembinaan umat harus mampu mengayomi umat dan membina kelompok umat yang mengklaim kelompoknya sebagai penganut paham yang paling benar, membina kelompok umat yang cenderung melakukan pendangkalan terhadap ajaran agama dan adat budaya Minangkabau.
- Perlu dikembangkan nagari sebagai laboratorium keagamaan dan adat.
- Masjid dan majemennya harus dikembangkan sebagai pusat kebudayaan di samping sebagai pusat ibadah. Sebagai pusat kebudayaan masjid dikembangkan fungsinya

menjadi labora-torium adat, pengembangan sistem ekonomi Islam, sistem sosial, ilmu pengetahuan dsb.

- Globalisasi dan budaya populer harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi kehidupan masyarakat dan menjaganya jangan sampai merusak akhlak mulia masyarakat.

Sidang Pengamat Budaya dan Agama

- Perlu langkah kongkrit yang dapat diaplikasikan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan kongres. Kongres dan seminar tentang Minangkabau yang banyak diselenggarakan terkesan mengulang tema pembicaraan.
- Kesepahaman dan kesepakatan yang sama tentang Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) mutlak diperlukan, sehingga implementasinya bisa dijabarkan dalam tingkat operasional.
- Pendidikan dan institusinya bisa berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai ABS-SBK pada generasi baru. Perlu disiapkan suatu silabus yang jelas untuk mata pelajaran BAM, buku-buku pendukung yang kredibel, serta tenaga pengajar yang memadai.
- Adanya upaya serius yang sedang berlangsung di beberapa daerah, terkait usaha-usaha pendidikan/pewarisan nilai adat dan agama, sebagai dua hal yang tidak terpisah, sesuai ABS-SBK, antara lain adanya Tempat Pendidikan Adat dan Agama (TPAA) pilot proyek pelajaran BAM di 15 sekolah dalam kabupaten Agam dengan pendekatan pada perubahan perilaku, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan/ wawasan.

Sidang Pleno Manjampukan Tatingga

- Mengemuka pemikiran untuk mempertegas komitmen dan peran utama Minangkabau mewujudkan dan mempertahankan NKRI.
- Memperkuat dan merevitalisasi pelaksanaan nilai-nilai kesepakatan Marapalam.
- Merevitalisasi nilai-nilai adat dan syarak diarahkan kepada peningkatan pendidikan dalam pembentukan watak, kepemimpinan dan kepeloporan Minangkabau.
- Perlu Kompilasi Hukum ABS-SBK yang secara historis-yuridis telah memiliki landasan yaitu Kompilasi Hukum Islam.

REKOMENDASI

1. Perlu mencari model strategis untuk memperkuat fungsi dan peran para fungsionaris adat dalam masyarakat dewasa ini.
2. Dalam merespon fenomena kelangkaan ulama diperlukan agenda kerja kongkrit dan operasional dalam melahirkan ulama-ulama baru. Direkomendasikan agar pemerintah mengambil prakarsa melaksanakan program kaderisasi ulama, baik secara formal maupun informal didukung dengan finansial yang dituangkan dalam APBD. Kaderisasi ulama secara formal dalam bentuk menyekolahkan sejumlah sarjana gama yang berprestasi dan berakhlak mulia serta mempunyai potensi menjadi ulama secara sustainable (berkelanjutan) setiap tahun. Secara informal, menurunkan sejumlah mubaligh ke nagari-nagari untuk berproses menjadi ulama yang keulamaannya diakui masyarakat.
3. Budaya populer tidak selalu menjadi ancaman, tetapi memberi peluang untuk melakukan inovasi dalam kehidupan masyarakat adat. Direkomendasikan kepada

- pemerintah untuk menangkal segala bentuk ancaman negatif budaya populer dengan meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Anti-maksiat diperkuat dengan pedoman pelaksanaan akhlak mulia bagi siswa pendidikan dasar dan menengah.
4. Perlunya kesepahaman dalam memaknai ABS-BSK dan agar kongres dapat mendorong lahirnya semacam "Sumpah Sati" Tigo Tungku Sajarangan dalam konteks masa kini untuk masa depan.
 5. Perlunya menyusun langkah dan program kongkrit untuk social capital recovery.
 6. Perlunya restrukturisasi struktur dan mekanisme dalam pelaksanaan adat dan syarak di nagari-nagari.
 7. Dibentuknya lembaga/dewan yang bertugas meneliti dan memastu layak tidaknya sebuah buku tentang Minangkabau yang terbit, termasuk/terutama buku-buku ajar untuk materi BAM.

Padang, 30 November 2006

Tim Perumus: (1) Wisran Hadi; (2) Nusyirwan Effendi; (3) Yulizal Yunus; (4) Darman Moenir; (5) Ivan Adilla; (6) Muhammad Ibrahim Ilyas; (7) Syahrul N. Nelson Alwi; (8) Zuriati; (9) Muhammad Ilham; (10) Yusrizal K.W.; (11) Armeynd Sufhasril.

Setelah KKM 2006, tahun 2010 juga telah dipersiapkan penyelenggaraan KKM, tetapi disebutnya sebagai Kongres Kebu-dayaan Minangkabau Pertama juga. Kongres ini diselenggarakan sebagai bagian dari acara Musyawarah Besar (Mubes) Gebu Minang V. Semula kata "Gebu Minang" merupakan akronim dari Gerakan Seribu Rupiah Minang yang bertujuan mengumpulkan seribu rupiah dari setiap warga Minang yang ada di perantauan untuk pembangunan di kampung halaman. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini merupakan akronim dari Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Meskipun terjadi perubahan mengenai kepanjangan dari akronim "Gebu Minang", tetapi mengenai tujuannya tetap ada kesamaan, yaitu menciptakan suasana gairah yang diperlukan untuk kebangkitan kembali semangat juang bagi kesatuan dan kejayaan bangsa Minang, baik di Kampung maupun di Rantau.

Tempat Kongres Kebudayaan Maingkabau direncanakan akan diadakan pada bulan Juli tahun 2010, bertempat di Balai Sidang Bung Hatta, Bukit Tinggi. Tetapi rencana kongres ini tidak mendapatkan dukungan dari kalangan budayawan, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, pers Sumatera Barat, dll. Pada 3 September 2010 di kantor Gubernur Sumatera Barat akhirnya disepakati KKM yang akan diselenggarakan oleh Gebu Minang dibatalkan. (Padang Media, Sabtu 4/9/2010)

C. Kongres Kebudayaan Aceh 2005

Kongres ini diselenggarakan dalam rangka peringatan setahun peristiwa bencana alam tsunami. Seperti dijelaskan oleh Hasballah M Saad, seorang tokoh Aceh di Yogyakarta (24/10/2005) kongres itu menghadirkan Raja Kraton Nga-yogyakarta Hadiningrat yang dinilai sebagai tokoh nasional dan budayawan paling tepat untuk memberi pengarah lewat pidato kunci.

Kongres Kebudayaan Aceh semula akan dilangsungkan pada 27-28 Desember 2005 dengan tujuan mencari strategi kebudayaan Aceh ke depan sehingga bisa ditata kembali, supaya di satu sisi Aceh tak akan kehilangan identitas dan di sisi lain Aceh tetap sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, kalau Jepang membantu membangun satu kota di Aceh, nanti kota itu jadi seperti kota Jepang di Aceh. Atau, kalau Singapura membangun satu kota di sana, nanti ada kota seperti Singapura di Aceh. Kalau sudah begitu, dipastikan orang-orang Aceh tak akan bisa hidup di kota-kota seperti itu.

Semula kongres dijadualkan akan dilangsungkan pada 27-28 Desember 2005, tetapi akhirnya dilangsungkan pada tanggal 8-10 April 2006 di Anjong Mata Banda Aceh. Kongres ini dilaksanakan bersama antara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-NIAS) dengan Aceh Culture Institute (ACI). Kongres ini antara lain memutuskan agar pelaksanaan KKA masa yang akan datang diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-5 tiga tahun mendatang.

Tempat penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut pada masa yang akan datang diatur bergilir di setiap kabupaten/kota dalam wilayah provinsi NAD. Pada bagian lain, kongres juga merekomendasikan agar setiap pelaksanaan pembangunan di Aceh pemerintah selalu memperhatikan nilai-nilai budaya Aceh dan memberi dukungan pada setiap aktivitas kebudayaan di NAD. Pemda NAD diharapkan dapat mendirikan sebuah Institut Kesenian dengan membuka Fakultas Ilmu Budaya Aceh.

Selain itu, Pemda NAD juga disarankan melakukan pengumpulan, membukukan serta menyebarkan folkore (sastra tutur) Aceh untuk didistribusikan kepada lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal di provinsi NAD. Pemda juga diharapkan mendirikan museum budaya di setiap kabupaten dan kota di Aceh. Adapun tentang bahasa, kesenian, adat istiadat dan sejarah Aceh direkomendasikan untuk dijadikan muatan local di sekolah/madrasah. Untuk itu diperlukan upaya memperbanyak buku pelajaran, bahkan bacaan, dan mempersiapkan guru-guru untuk mengajarkannya di sekolah. Untuk melestarikan karya-karya ulama, kongres merekomendasikan untuk dikaukan inventarisasi dan membukukan karya-karya para ulama Aceh yang telah punah.

Adapun mengenai meunasah dan masjid yang merupakan simbol identitas keacehan yang telah berkontribusi dalam kehidupan social dan keagamaan dalam membangun pola dasar SDM, hendaknya menjadi suatu kekuatan yang sangat monumental, historis, herois dan agamis. Oleh karena itu, fungsi meunasah dan masjid perlu direvitalisasi sebagai symbol budaya Aceh. Sementara itu, mengenai keberadaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) dan situs budaya Aceh segera dapat dibangun dan dipugar kembali. Begitu pula dengan naskah-naskah sejarah dan kebudayaan Aceh yang hilang dalam gelombang tsunami dapat dikumpulkan kembali.

D. Kongres Kebudayaan Madura

Kongres Kebudayaan Madura telah berlangsung 2 kali, yaitu tahun 2007 dan 2012. Gambaran singkat mengenai kedua kongres tersebut adalah sebagai berikut.

D.1 Kongres Kebudayaan Madura I, 2007

Kongres Kebudayaan Madura (KKM) digagas oleh MH Said Abdullah, anggota DPR-RI dari daerah pemilihan X Jawa Timur. Menurut penggagas negara kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas keserbaragaman budaya. Sebagai suatu negara bangsa, kita sepakat membangun suatu identitas sosial bersama, yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa yaitu Pancasila. Pancasila memang tidak menegaskan tentang eksistensi kebudayaan-kebudayaan lokal, namun justru telah menjadi pilar-pilar utama untuk menopang Pancasila. Sebab, Pancasila yang digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan daerah. Pancasila menjadi tidak lengkap tanpa kebudayaan suku Madura, Jawa, Sunda, Dayak, Irian, Flores, Ambon, dan sebagainya. Sebaliknya, tanpa Pancasila keberadaan kebudayaan-kebudayaan lokal tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi, keduanya saling mendukung dan menyempurnakan.

Semangat yang dibangun lewat KKM adalah Madura untuk Indonesia. Sebab, tidak mungkin ada Madura tanpa Indonesia. Tanpa kebudayaan Madura kebudayaan Indonesia tidak lengkap. Madura adalah salah satu taman sarinya Indonesia. Dalam melaksanakan perannya itu tantangan kultural yang me-ngemuka untuk dibahas dalam KKM adalah merevitalisasikan nilai-nilai kebudayaan Madura untuk membangun masyarakat Madura dan menghadapi tekanan kekuatan kebudayaan global. Tata kehidupan masyarakat yang terlalu dikuasai oleh ekonomi, yang lebih pragmatis dan mementingkan keuntungan, perlu diimbangi dengan upaya membangun semangat dan rasa solidaritas antarwarga masyarakat sebangsa dan setanah air maupun sedunia. Dengan cara itu kebudayaan Madura akan memberikan sumbangan berarti pada kebudayaan nasional, bahkan kebudayaan global.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana agar arus modernisasi yang terus menggempur masuk Madura tidak mengubah tradisi dan kultur masyarakat Madura secara besar-besaran. Dengan pembangunan jembatan Suramadu, industri semakin berkembang, akan semakin membuka Madura bagi dunia luar yang dipastikan akan membawa peradaban baru masuk Madura. Apalagi jika kemudian muncul industrialisasi Madura. Masyarakat Madura harus berusaha agar kul-turnya tidak terkikis. Jika bukan masyarakat Madura sendiri yang melakukan, siapa lagi kalau bukan orang Madura sendiri yang bertanggung jawab terhadap kebudayaannya. Dalam hal ini pondok pesantren mempunyai peranan penting bagi masyarakat dan kebudayaan Madura, terutama dalam pendidikan moral dan agama. Dengan adanya berbagai tantangan yang kompleks itu KKM membahas secara komprehensif 3 pokok pikiran, yakni: (1) Orang Madura; (2) Pendidikan dan Pesantren; dan (3) Seni, Budaya, dan Bahasa Madura.

KKM pertama diselenggarakan di hotel Utami Sumenep mulai tanggal 9-11 **Maret 2007**. Penyelenggaraan kongres disponsori oleh Said Abdullah Institut (SAI). Pembukaan kongres diawali dengan tarian Ul Daul yang diiringi musik seronen dari grup musik Kabut Hitam asal Pamekasan.

Beberapa pendapat

Meski sulit dibantah bahwa kekerasan telah menjadi bagian dari kehidupan orang Madura masa lalu, **Edhi Setiawan** – salah seorang pemakalah dalam KKM - menampilkan

jika masyarakat Madura diidentikkan dengan kekerasan. Menurut Edhi sepanjang sejarah perjalanan suku Madura, amat sulit ditemui data mengenai tindakan-tindakan kekerasan seperti perkelahian antardesa/kampung, kekerasan berbau SARA dan sebagainya terjadi di Madura. Sejak dulu orang-orang Madura bisa hidup berdampingan secara damai dengan bermacam-macam suku dan etnis (Jawa, Bugis, Melayu, Cina, Arab dan sebagainya).

Kebudayaan Madura, sebagaimana kebudayaan masyarakat lainnya di Indonesia, unik. Kongres ini menampilkan beragam kekayaan kultural masyarakat Madura dari empat kabupaten, yaitu Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. **Mien A. Rifai** mencatat beragam kekhasan kultural maupun karak-teristik manusia Madura. Etnis Madura, kata ilmuwan LIPI ini, termasuk suku bangsa yang tahan banting. Mereka mampu beradaptasi dan memiliki toleransi tinggi terhadap perubahan. Orang-orang Madura dikenal ulet. Dari hasil riset majalah Tempo pada tahun 1980-an pernah menempatkan Suku Madura dalam lima besar suku yang paling sukses di Indonesia. Orang-orang Madura di tanah rantau adalah saksi hidup dari semangat itu. Mereka berani melakukan pekerjaan apa saja demi hidup. Di balik kegigihannya itu, masyarakat dari pulau garam ini memiliki rasa humor yang khas.

Kebudayaan Madura adalah bagian dari kebudayaan nasional. Tanpa kebudayaan Madura, kebudayaan Indonesia menjadi tidak lengkap. Kondisi saat ini membutuhkan anak-anak Madura yang mencintai Madura. Mereka harus merevitalisasi kebudayaan baru dari diberi substansi baru. Dibutuhkan kreasi baru yang tidak melupakan nilai adiluhung warisan nenek moyang. Masyarakat Madura saat ini, menurut **Zawawi Imron**, membutuhkan kehadiran senirupawan-senirupawan baru kontemporer yang punya akar dalam kultur Madura.

Perkembangan zaman menuntut masyarakat Indonesia umumnya dan orang-orang Madura khususnya untuk terbuka terhadap semua. Sebab itu, kepada orang-orang Madura di perantauan, Zawawi Imron berpesan supaya membangun semangat multikulturalisme. "Sesuaikan diri dengan kebudayaan lokal dan sambutlah mereka dengan ramah. Kalau kita sudah berteman dengan seseorang dan meneguk kopinya, dia saudara kita," katanya mengutip sebuah ungkapan klasik. Semangat inilah yang dinamakannya sebagai sukma Madura (Madura soul), atau dalam bahasa Said Abdullah, kembalikan Maduraku sebagai taman sarinya Indonesia.

D.2 Kongres Kebudayaan Madura II, 2012

Kongres Kebudayaan Madura II diselenggarakan tanggal 21-23 Desember 2012 di Sumenep (Songennep).. Kongres itu merupakan kelanjutan dari KKM I tahun 2007. Sebagai pemrakarsa kongres juga sama yaitu MH Said Abdullah, anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pemilik Said Abdullah Institut (SAI). Kongres yang direncanakan akan dibuka oleh Megawati Soekarnoputri itu semakin menumbuhkan prasangka bahwa di balik kongres itu ada tujuan politik tertentu sehingga sempat mengundang hadirnya demonstrasi. Menurut aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) Suryadi Syah, budaya tidak boleh dicampuradukkan dengan politik karena cenderung akan membuat distorsi.

Dalam pelaksanaannya, kongres itu dibagi menjadi empat komisi: (1) Komisi

Kebudayaan dan Pariwisata; (2) Komisi Bahasa Madura; (3) Komisi Perempuan Madura; dan (4) Komisi Kebijakan Publik Suramadu. Setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidang komisi, dihasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang ditujukan kepada empat kepala daerah di pulau Madura (Sumenep, Sampang, Pamekasan dan Bangkalan).

Dari kongres itu dihasilkan beberapa rekomendasi. Untuk Komisi Kebudayaan dan Pariwisata menilai penting untuk segera disusun Ensiklopedia Madura secara lengkap mengenai budaya, seni dan sejarahnya bahkan rumah adat yang dimiliki Madura "tanean lanjhang" serta obyek wisata di Madura. Komisi itu menyepakati 14 butir rekomendasi, sbb:

- a. Menerbitkan Ensiklopedi Kabudayaan Madura (Supervisor Prof. Mien A. Rifai).
- b. Organisasi Mitra Pariwisata.
- c. Pusat Kajian Kebudayaan dan Pariwisata Madura.
- d. Kurikulum Kebudayaan Madura dari jenjang pendidikan TK sampai SMA.
- e. Masing-masing Pemkab mempunyai Balai Budaya Madura dan Gedung Pertunjukan.
- f. Event gelar budaya Madura yang terjadual secara sistemik (kalender budaya/wisata).
- g. Wajib berbahasa Madura di setiap instansi dan lembaga pendidikan pada hari Kamis dan Jumat.
- h. Semua Perguruan Tinggi di Madura untuk membuka Prodi Bahasa Madura dan harus memasukkan mata kuliah Budaya dan Bahasa Madura.
- i. Pendokumentasian dan penerbitan animasi cerita rakyat Madura (dongeng dengan pendekatan gambar).
- j. Pembentukan kampung/desa budaya; seperti desa tanean lanjeng.
- k. Setiap instansi harus berarsitektur Madura.
- l. Melindungi pulau-pulau yang mempunyai kelebihan/ciri khas yang unik dan eskotik.
- m. Mengamankan situs-situs sejarah dengan cara didaftarkan ke BP3, dan
- n. Mengidentifikasi budaya ataupun keterampilan untuk didaftarkan ke HAKI, seperti kreativitas membatik dan sebagainya.

Untuk Komisi Bahasa Madura, menghasilkan 3 butir rekomendasi, yakni:

1. **Upaya Pengkajian dan Penyelamatan Bahasa Madura**, *antara lain* : Perlunya dilakukan pengkajian dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Madura : kosakata, fonologi; morfologi, sintaksis; wacana, ejaan latin dan carakan, serta sastra Madura, Perlunya dilakukan pendokumentasian pustaka, penerjemahan, pentranskripsian, penerbitan dan digitalisasi buku kuno berbahasa Madura dan karya sastra klasik dan moderen (dengan tulisan pèghu /carakan Madhurâ dari sastra atau pustaka asing ke bahasa Madura, begitu juga dari bahasa Madura ke bahasa lain) ke tulisan latin EYD Bahasa Madura yang disepakati dan Perlunya Penerbitan kamus bahasa Madura, ensiklopedi, dan buku pelajaran bahasa dan budaya Madura.
2. **Upaya Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Madura**, *antara lain*: (1) Pembakuan Ejaan dan Paramasastra BM sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Madura, dengan tetap menghargai keberagaman dialek dan karakteristik lainnya, (2) Kongres mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten

untuk mengembalikan kepada nama aslinya istilah, penamaan tempat-tempat umum, nama desa dan topografi dalam bahasa Madura agar tidak kehilangan identitas kemaduraan dan sejarah kejadiannya, (3) Pemkab perlu terus melakukan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembinaan BM di lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan formal dan pesantren, (4) Mengusulkan kepada Pemkab dalam hal ini perguruan tinggi yang ada di Madura untuk membuka jurusan bahasa dan sastra Madura, (5) Pemberian penghargaan kepada pakar, pemerhati dan pembina bahasa dan sastra Madura yang berprestasi, (6) Pemkab di Madura dan daerah-daerah pengguna BM perlu memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk penggunaan bahasa Madura dalam pertemuan-pertemuan informal dan resmi adat, (7) Penguatan BM sebagai media pendidikan karakter/pendidikan seni budaya (muatan lokal wajib) di lembaga pendidikan, (8) Kongres Kebudayaan Madura II mengamanatkan agar Kongres Bahasa Madura II melibatkan semua utusan dari daerah-daerah pengguna BM, (9) Panitia pengarah KKM II perlu membentuk Badan Pekerja untuk mengawal dan mengkomunikasikan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Madura II kepada *stakeholders* dan kepada panitia KKM berikutnya, serta mempertanggungjawabkan keberhasilan kongres kepada Said Abdullah Institute (SAI), dan (10) Said Abdullah Institute (SAI) dan Panitia pengarah KKM II perlu membentuk Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Madura.

3. **Upaya Kebijakan Pemerintah Pada Bahasa Madura**, *antara lain* : (1) Perlu dilakukan deklarasi bahasa Madura oleh masyarakat Madura dalam rangka menumbuhkan kebanggaan, meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan dan pemersatu etnis, (2) Komitmen Pimpinan Daerah untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 Bagian penjelasan serta UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menjadi program-program, keputusan, dan tindakan yang berpihak pada pembinaan dan pengembangan bahasa dan kebudayaan Madura., (3) Pemerintah Kabupaten perlu memiliki Peraturan (Perda, Perbup, Keputusan Bupati) yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan bahasa dan budaya Madura di lembaga pendidikan (formal, informal, dan nonformal), dan (4) Legislatif hendaknya memberikan dukungan terhadap program-program, keputusan, dan tindakan yang berpihak pada pembinaan dan pengembangan bahasa dan kebudayaan Madura yang dirancang/diajukan oleh pihak eksekutif.

Komisi Perempuan Madura menyepakati rekomendasi untuk **Membentuk Pusat Kajian Perempuan Madura**, dengan agenda kegiatan sebagai berikut; (1) Kurikulum Pendidikan Kesehatan Reproduksi Perempuan, (2) Pendidikan Kader Sensitif Gender di Madura, (3) Pengembangan Kemampuan Ekonomi kreatif Perempuan, (4) Sosialisasi tentang problem perempuan melalui organisasi sosial perempuan (Komunitas), (5) Sosialisasi pencegahan pernikahan dini Madura, (6) Advokasi masalah sosial perempuan (KDRT dan lain sebagainya), (7) Mendorong Anggaran Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender di Madura, (8) Peraturan tentang penyelesaian penanganan masalah/kasus perempuan yang gratis di Madura, (9) Membangun kemitraan antara pemerintah, akademisi, swasta dan lembaga sosial lainnya, dan (10) Perlu pendampingan mulai tingkat dusun mengenai ketahanan keluarga dan ketahanan pangan.

Selanjutnya, **Komisi Kebijakan Publik Suramadu** menyepakati 3 butir rekomendasi, yakni:

1. Penelitian budaya, sosial, ekonomi dan lainnya.
2. Konsultasi Kajian ke-Madura-an, dan
3. Publikasi baik cetak maupun elektronik.

E. Kongres Kebudayaan Bali I (KKB I), 2008

Ide menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Bali (KKB) muncul pada saat diselenggarakan Sarasehan Pesta Kesenian Bali (PKB) XXVIII, tahun 2005. Ide itu datang dari antropolog dan budayawan Bali, Drs. I Wayan Geriya. KK Bali dinilai memiliki posisi yang sangat strategis bagi pengembangan semangat berkebudayaan di Bali, merevitalisasi kegiatan pariwisata dan penguatan perekonomian Bali. Di samping itu, KKB juga menjadi media penguatan solidaritas keindonesiaan dan pemantapan komunikasi antarbangsa. Melalui kongres diharapkan akan berkembang dialog tentang kebudayaan dari sudut lokal, nasional dan internasional untuk membangkitkan kembali kesadaran, empati dan apresiasi para budayawan, seniman, cendekiawan, peneliti, birokrat, praktisi dan para pemangku adat terhadap eksistensi kebudayaan. Kongres telah membahas secara kritis masalah pelestarian kebudayaan Bali dalam arti pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatannya, yang *tangible* maupun yang *intangible* dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan.

Sebelum pelaksanaan kongres diawali dengan penyelenggaraan Pra KK Bali untuk menetapkan tanggal penyelenggaraan, pokok-pokok masalah kebudayaan yang dibahas, pemakalah dan moderator serta teknis penyelenggaraannya. Disepakati kongres diselenggarakan tahun 2008, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Pemerintah Daerah Bali, 100 tahun Kebangkitan Nasional dan berlangsungnya Pesta Kesenian Bali (PKB) yang ke-30. Panitia Penyelenggara diteapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali, Dewa Beratha, No. 326/03-C/HK/2008, tanggal 11 April 2008 dengan Ketua Penyelenggara Prof. Dr. I Wayan Rai S, MA. Diputuskan pula KK Bali pertama diselenggarakan tanggal **14 - 16 Juni 2008**, di Agung Room Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur.

Kongres memilih tema "**Budhijna Pratyapatti: Pendalaman Budaya Memupuk Semangat Kebangkitan Baru**". Kongres yang semula akan dibuka oleh Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi karena ada tugas lain, dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, SE. Adapun mengenai topik-topik yang dibahas terdiri atas menjadi 5 kelompok (Panel), yaitu: (1) Panel I dengan topik: Budaya Bali, Identitas dan Etos Budaya; (2) Panel II dengan topik: Budaya, Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata; (3) Panel III dengan topik: Budaya dan penguatan Peradaban; (4) Panel IV dengan topik: Budaya, Seni, Heritage dan HKI; (5) Panel V dengan topik: Budaya, Hubungan Antar-bangsa dan Diplomasi.

Dari masing-masing topik dijabarkan ke dalam 20 judul makalah. Pemakalah terdiri atas budayawan, seniman, cendekiawan dan pemangku adat Bali dan luar Bali serta dari luar negeri. KKB menghadirkan pemakalah dari luar negeri, yakni Prof. Mark Hobart, seorang profesor di bidang "Critical Media and Cultural Studies" dari Centre for Media and Film Studies SOAS, University of London, dengan makalah "*Bali is a Brand: Critical Analysis*". Yang kedua adalah Prof. Adrian Vickers, seorang profesor

dari Southeast Asian Studies School of Languages and Cultures, Faculty of Arts, The University of Sydney dengan judul makalah "The Survival of Balinese Culture". Ketiga, Prof. Dr. Ron Jenkins, seorang profesor di bidang Theater, dari Wesleyan University dengan judul makalah "Forgery and The 'Moral Rights' of an Artist". Dari Jepang diundang Dr. Mari Nabeshima untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang "Kontribusi Kesenian Terhadap Komunikasi Lintas Bangsa".

Selain itu UNESCO sebagai lembaga internasional yang mengurus kebudayaan juga memberikan perhatian besar dengan menyampaikan sambutan Asisten Direktur Jenderal bidang Kebudayaan Unesco Paris, Ms. Françoise Rivière, yang dibacakan oleh Himalchuli Gurung, Kepala Bidang Program Kebudayaan, Unesco Office di Jakarta. Peserta kongres sebagai 400 orang, terdiri atas budayawan, seniman, akademisi, guru, tokoh agama, pemangku adat, pemuda, LSM, birokrat dan dari kalangan pers.

Hasil kongres

Hasil KK Bali pertama dituangkan ke dalam naskah yang terdiri atas: pengantar, rumusan kongres dan rekomendasi. Isi lengkap dari hasil KK Bali pertama adalah sebagai berikut:

RUMUSAN KONGRES KEBUDAYAAN BALI I DENPASAR, 14-16 JUNI 2008

Kebudayaan Bali, sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang berdasarkan pada semangat "Bhinneka Tunggal Ika", telah menjadi bagian dari kebudayaan global. Dalam posisinya seperti ini, kebudayaan Bali sangat potensial dalam ikut mewarnai perkembangan budaya dunia dan juga dipengaruhi oleh arus budaya dunia. Kongres Kebudayaan Bali I tahun 2008 adalah sebuah strategi untuk me-mahami keberadaan kebudayaan Bali (perta-hanan, perkuatan, dan pengem-bangan) di era globalisasi.

Kongres Kebudayaan Bali I diselenggarakan berkaitan de-ngan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali XXX, tahun 2008 dengan mengambil tema Budhijna Prtyapatti yang berarti: Pendalaman Budaya Memupuk Semangat Kebangkitan Baru, berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 16 Juni 2008. Pembukaan kongres dilakukan di Hotel Inna Grand Bali Beach sementara sidang-sidang pleno dilakukan di kampus "Budaya Mandala" Institut Seni Indonesia Denpasar. Kongres dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir, Jero Wacik SE, mewakili Presiden Republik Indonesia.

Setelah menyimak dan memperhatikan dengan seksama:

- a. Batir-butir pidato pembukaan sekaligus pembicara kunci (Menbudpar dan Perwakilan UNESCO di Indonesia).
- b. Batir-butir makalah payung.
- c. Makalah-makalah yang disajikan dan dibahas dalam sidang-sidang pleno dan kelompok.
- d. Pandangan, tanggapan, usul, dan saran-saran para pembicara yang disam-paikan melalui makalah-makalah yang disajikan.

- e. Pandangan, tanggapan, usul, dan saran-saran dari para peserta yang disampaikan dalam diskusi dan tanya jawab.

maka Kongres Kebudayaan Bali I tahun 2008 menghasilkan rumusan, strategi dan deklarasi kebudayaan sebagai berikut:

Panel 1

- a. Dewasa ini manusia Bali sedang mengalami kegamangan identitas diri sebagai akibat dari penetrasi budaya global yang cenderung menggeser poros spiritual dan sosial budaya Bali sehingga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Bali. Penguatan identitas sebagai upaya memper-tahankan jati diri manusia Bali dari penetrasi budaya global merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.
- b. Manusia Bali baik secara individu maupun kelompok adalah kelompok etnis religius dan spriritualistik yang bersumber kepada nilai-nilai agama Hindu-Bali, mengutamakan kehidupan komunal (*sekaa, banjar, desa dan pakraman*) dalam persaudaraan (*pényama-brayaan*) serta kebersamaan dalam perbedaan (*sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paraspa-ropasarpanaya*) yang selalu terbuka terhadap manusia lain atas prinsip keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan (*satyam, shiwam, sundharam*).
- c. Manusia Bali, sebagai bagian bangsa Indonesia yang multietnik, adalah kelompok etnik dan sosial yang memiliki identitas budaya (tanda-tanda pengenal kultural) khas yang terbangun melalui proses "pembudayaan" (enkulturasi) yang cukup panjang. Identitas manusia Bali, salah satunya ditandai dengan bahasa (Bahasa Bali) yang dijadikan alat komunikasi dan ekspresi oleh masyarakat pendukungnya. Untuk mempertahankan identitas budaya bagi manusia Bali dibutuhkan upaya penguatan bahasa Bali melalui perencanaan matang (formal dan informal), perluasan ranah penggunaan bahasa dan peningkatan kesadaran sikap positif terhadap bahasa Bali. Tidak kalah pentingnya adalah unsur-unsur budaya Bali yang bernafaskan agama Hindu Bali seperti keyakinan masyarakat kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), kesenian, teknologi dan ekonomi tradisi (*dresta*), keunggulan-keunggulan kearifan lokal lainnya yang perlu dibina dan dipertahankan untuk kesejahteraan keharmonisan dan kedamaian masyarakat Bali, Indonesia dan global (*sarwa prani hitangkara*).

Panel 2

- a. Bali brand (Bali merek dagang) merupakan pemikiran yang paradok karena pandangan masyarakat luar terhadap merek dagang adalah semuanya bisa dijual. Namun di sisi pelestarian budaya tidak semua bisa dijual. Agama Hindu sebagai nafas atau jiwa budaya Bali, kesenian (seni rupa dan seni pertunjukan) merupakan jati diri orang Bali tidak bisa "dijual" secara sem-barangan.
- b. Kiat-kiat timbulnya budaya kreatif harus bersinergi dengan kearifan lokal agar tumbuh kreativitas manusia Bali modern yang unggul karena industri budaya sebagai modal budaya perlu dilestarikan sebagai daya tarik wisatawan.
- c. Sosialisasi pertanian perlu diadakan sejak dini untuk menanamkan penge-tahuan

dan kesadaran bahwa pertanian merupakan keunggulan dan modal dasar yang dapat menyejahterakan masyarakat Bali dan Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah perlu sungguh-sungguh menyusun strategi pemberdayaan dan revitalisasi pertanian dalam arti luas yang dapat meringankan petani, mengutamakan produksi lokal untuk konsumsi lokal sekaligus sebagai pelestarian alam lingkungan.

Panel 3

- a. Kebudayaan Bali dengan segala keragamannya, berdasarkan konsep Tri Hita Karana dan Bhinneka Tunggal Ika, mencakup segala potensi budaya yang hidup di Bali. Budaya Bali telah berdiaspora sejalan dengan tersebarnya orang-orang Bali ke luar wilayah Bali sehingga memperkaya sub-sub kebudayaan nasional.
- b. Perkembangan pariwisata membawa nilai-nilai budaya baru, nilai dinamis, tetapi lebih menawarkan kepentingan pariwisata daripada kepentingan kebudayaan Bali. Hal ini menimbulkan krisis lingkungan, identitas, dan krisis nilai-nilai budaya Bali.
- c. Arsitektur Bali pada dasarnya adalah wujud fisik yang di dalamnya terkandung kompleksitas nilai-nilai budaya Bali sebagai wujud dari ketinggian/ kemuliaan peradaban Bali.
- d. Dari segi peradaban, Pancasila dapat dimengerti sebagai peradaban bangsa Indonesia, sekaligus menjadi landasan ideologi bangsa yang menjadi payung dari eksistensi kebudayaan Bali.
- e. Dalam hal gender, kebudayaan Bali secara normatif menunjukkan adanya kesetaraan, atas dasar keharmonisan konsep *purusa pradharna*, *lingga yoni*, dan *ardha nareswari*. Dalam praktiknya, termasuk dalam bidang pendidikan, konsep gender perlu ditingkatkan penyetaraannya.

Panel 4

- a. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk Hak Cipta, sangat dibutuhkan bagi pertahanan serta perlindungan legalitas terhadap warisan seni dan budaya Bali. Namun mengingat kesadaran serta pemahaman masyarakat Bali tentang HaKI dan Hak Cipta yang selama ini masih relatif rendah maka diperlukan sosialisasi HaKI dan Hak Cipta secara berencana, berkesinambungan, dan sistematis ke masyarakat.
- b. Dibutuhkan penanaman/pembenahan sikap mental dan hak moral (*moral right*) bagi masyarakat Bali agar dalam melakukan aktivitas seni dan budaya senantiasa bersikap jujur, terbuka, dan saling menghargai sehingga terbangun kehidupan seni dan budaya Bali yang lebih sehat, bebas dari upaya-upaya pemalsuan serta penyalahgunaan terhadap nilai-nilai seni dan budaya yang ada, dengan tetap memperhatikan hak-hak individu dan kolektif, nasional, dan global.
- c. Pembudayaan HaKI dan Hak Cipta di kalangan masyarakat Bali hendaknya dapat dilakukan tanpa harus merusak tradisi berkesenian yang selama ini telah mengakar kuat di dalam tradisi budaya Hindu-Bali.

Panel 5

- a. Prinsip keterbukaan interaksi budaya dengan kebudayaan lainnya haruslah dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat, memperkaya kebudayaan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

- b. Diplomasi kebudayaan Bali (bilateral, trilateral, multilateral) baik secara formal maupun informal adalah suatu upaya untuk memperjuangkan kepentingan pengembangan kebudayaan Bali di forum internasional baik demi pelestarian kebudayaan Bali itu sendiri maupun untuk memperjuangkan nilai-nilai kebudayaan Bali agar dapat diterima masyarakat internasional.
- c. Diplomasi kebudayaan Bali harus dapat dilakukan secara holistik dan integral untuk memperjuangkan pembangunan kebudayaan Bali pada khususnya dan memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Untuk melaksanakan diplomasi kebudayaan seperti di atas diperlukan "diplomat-diplomat" kebudayaan yang memiliki penguasaan/pengetahuan terhadap substansi dan strategi politik kebudayaan, serta sensitivitas hubungan manusia (*human relation*) untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian dunia.

Rekomendasi KKB

1. Pancasila dan UUD 1945 perlu menjadi komitmen sebagai peradaban bangsa Indonesia. Seluruh elemen bangsa perlu memahami, menghormati konsep, dan perilaku keberagaman, bhinneka tunggal ika.
2. Pemerintah dan rakyat Indonesia perlu komitmen kuat untuk memberantas korupsi yang kontraproduktif dalam membangun peradaban dan budaya bangsa, serta menghindari aksi-aksi anarkis dan eksklusifisme yang menghancurkan komitmen dan identitas bangsa. Kerapuhan terhadap masa depan bangsa perlu senantiasa diwaspadai.
3. Pembangunan Bali yang berbudaya menempatkan posisi kebudayaan Bali (yang dilandasi filosofi Tri Hita Karana, dan sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia) sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan menuju masyarakat yang maju, sejahtera, kukuh dalam jati diri, harmoni, bermartabat dan *shanta jagaditha*.
4. Pembangunan Bali berbudaya merupakan suatu proses dinamik yang terbuka secara lokal, nasional, global, berkarakter bhinneka tunggal ika, berkearifan lokal, berwawasan keindonesiaan dan berjiwa multikultural.
5. Pembangunan Bali berbudaya menegaskan dan melanjutkan komitmen pemerintah dan masyarakat Bali untuk:
6. Memperkuat identitas budaya lokal, menjunjung tinggi ideologi nasional Pancasila dan kebudayaan Indonesia, mengapresiasi keberagaman budaya dan peradaban universal.
7. Memperkuat jiwa kebudayaan Bali yang bernafaskan agama Hindu guna memantapkan spiritualitas dan nilai-nilai dasar Tri Hita Karana, serta nilai logika, etika, spiritualita, estetika dan solidarita.
8. Merevitalisasi dan memberdayakan secara kreatif dan progresif unsur-unsur utaka kebudayaan Bali, yaitu: bahasa, kesenian, dan arsitektur, warisan budaya, lembaga tradisional banjar, desa pakraman, subak, sekaa, dalam sinergis Sumber Daya Manusia, lingkungan, ekonomi, pariwisata, keamanan dalam dinamika peradaban agraris, industri, jasa, menyongsong perkembangan peradaban baru berbasis budaya kreatif.
9. Mengapresiasi hak-hak asasi komunitas lokal, yaitu masyarakat Bali sebagai pemilik

sekaligus pendukung kebudayaan Bali, sebagai bagian dari NKRI, untuk eksistensi, kesejahteraan, keharkatan, dalam tujuan pembangunan Bali berbudaya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

10. Pembangunan Bali berbudaya dan berorientasi pada pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali wajib menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah dan swasta dalam sinergi yang terbuka secara lokal, nasional dan internasional. Untuk itu perlu legalitas kepemilikan unsur-unsur kebudayaan Bali harus dilindungi dengan sistem hukum seperti HKI yang berlaku secara global.

Sejalan dengan rekomendasi di atas diperlukan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan penelitian secara holistik terhadap aspek kebudayaan dengan dukungan dana yang memadai. Penelitian itu antara lain:
 - Sikap manusia Bali dan generasi muda terhadap kebudayaan.
 - Identifikasi budaya unggul dan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya.
 - Perumusan dan pengembangan jati diri manusia Bali di era komunikasi lokal, nasional dan global.
 - Keberadaan pilar-pilar utama kebudayaan Bali yang mencakup bahasa, kesenian, kearifan lokal, arsitektur dan lembaga tradisional.
 - Kontribusi kebudayaan Bali bagi pengembangan kebudayaan Indonesia dan dunia.
2. Perlu dilakukan sosialisasi HKI secara kolektif dan individual, nasional dan daerah untuk melindungi unsur-unsur budaya daerah mencakup:
 - Pelatihan TOT dan DOT tentang HKI dan kebudayaan.
 - Pelatihan TOT dan DOT tentang identitas manusia Bali di tengah-tengah komunikasi lokal, nasional dan global.
 - Pelatihan TOT dan DOT ekonomi kreatif berbasis budaya.
3. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pelestarian budaya Bali untuk mewujudkan perlindungan yang memadai terhadap nilai-nilai serta mempercepat realisasi *world cultural heritage* terhadap budaya Bali.
4. Perlu diselenggarakan KK Bali setiap lima tahun dalam rangka menyusun strategi pembangunan dan keberlanjutan budaya daerah Bali.
5. Perlu upaya mewujudkan “diplomasi-diplomasi” budaya Bali baik yang bertaraf nasional maupun internasional.
6. Isu strategis untuk seminar dan sarasehan-sarasehan kebudayaan kurun waktu 2008-2013 menyongsong KK Bali II:
 - Isu tanah dikaitkan dengan kebudayaan dan spiritual.
 - Isu kegamangan jati diri manusia Bali.
 - Isu *paradoks branding* Bali yang komersial dan budaya Bali yang luhur.
 - Isu kegoyahan pondasi kebudayaan Bali dan kerapuhan masa depan.
 - Isu marginalisasi manusia dan masyarakat Bali di tengah-tengah himpitan globalisasi.
 - Isu pluralisme dan wawasan multikultural.
 - Isu konflik budaya dan konflik peradaban.

- Isu paradoks budaya agraris dan budaya industri.

Deklarasi Kebudayaan

Deklarasi kebudayaan yang dihasilkan KK Bali I Bali Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya kebudayaan daerah, nasional, dan global adalah satu eksistensi yang dijiwai oleh bhinneka tunggal ika, satu identitas, dan satu pondasi kemanusiaan yang sarat nilai-nilai historis, logika, etika, spiritualita, estetika, solidarita dan makna kehidupan.
2. Bahwa pengembangan kebudayaan Bali hendaklah mampu menghormati identitas budaya dengan berbagai keragamannya, menghargai kearifan lokal, serta mengapresiasi kreativitas menuju kemajuan budaya, adab, sains, seni, harmoni dan kesejahteraan.
3. Bahwa marginalisasi, hegemoni dan kepunahan kebudayaan harus dicegah dan sebaliknya potensi kekhususan, keunggulan, dan keadaban harus dilestarikan dan diberdayakan untuk memuliakan kemartaban dan kemanusiaan melalui kerja sama sinergis, serta tanggung jawab bersama, secara lintas daerah, lintas kelompok etnis dan lintas bangsa.
4. Bahwa pendalaman kebudayaan agar mampu menggetarkan roh serta tekad baru untuk bangkit secara lokal, nasional, global, dalam kearifan, toleransi, dan kedamaian, dari Bali untuk Bali, dari Bali untuk Indonesia, dan dari Bali untuk dunia.

F. Kongres Budaya Banjar (KBB)

Masyarakat budaya Banjar tinggal di bagian selatan pulau Kalimantan. Menurut *"Indonesia: Population and Administrative Divisions"* suku bangsa yang mendiami provinsi Kalimantan selain suku Banjar adalah Dayak, Bugis dan Jawa. Masyarakat Banjar baik yang tinggal di wilayah Kalimantan Selatan maupun di luar provinsi Kalimantan Selatan sepakat untuk membuat forum kongres untuk melakukan perbincangan budaya mereka. Masyarakat Banjar telah melaksanakan kongres dua kali.

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari diselenggarakannya Kongres Budaya Banjar yang disingkat (KBB) dan bukan Kongres Kebudayaan Banjar. Pertama, komunitas Banjar merasa kebudayaan Banjar kurang dikenali oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia seperti halnya kebudayaan Bali, Jawa, Sunda, Batak, Dayak dan lain-lain. Kedua, upaya pelestarian kebudayaan Banjar dalam arti pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatannya tidak memiliki konsep, kebijakan dan strategi yang jelas. Ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan masyarakat dunia yang meng-global dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kelestarian kebudayaan Banjar.

Berdasarkan pertimbangan di atas, disepakati oleh para budayawan, seniman, cendekiawan, tokoh adat, agama dan pejabat pemerintah untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Banjar. Melalui kongres akan dicapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat dijadikan bahan kebijakan dalam memajukan kebudayaan Banjar. Empat puluh satu tahun sebelumnya, di Banjarmasin pernah diselenggarakannya Konferensi Kebudayaan pada tahun 1957. Sepuluh tahun kemudian (1967) diresmikan berdirinya

kembali museum yang diberi nama Museum Banjar. Museum Banjar berakhir dan koleksinya dipindahkan ke Museum Lambung Mangkurat bertempat di Banjarbaru tepatnya di jalan Jenderal Achmad Yani KM 35,5 Kelurahan Banjarbaru Utara. Museum Lambung Mangkurat mulai dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Joesoef pada tanggal 10 Januari 1979.

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/museum_lambung_mangkurat)

F.1 Kongres Budaya Banjar I (KBB I) 2008

KBB I diselenggarakan dari tanggal **30 Oktober - 1 November 2008** di gedung Mahligai Pancasila, Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Taman Budaya Kalimantan Selatan di Banjarmasin. KBB pertama diselenggarakan dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2008 di gedung Mahligai Pancasila, Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Taman Budaya Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Untuk menyelenggarakan acara kongres dibentuk Panitia Penyelenggara, ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin, No. 188.44/0388/KUM/2007, tanggal 24 Oktober 2007 dan yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia adalah Drs. H. Bihman Muliensyah dan Sekretaris Drs. H. Syarifuddin R. Adapun yang ditunjuk sebagai Panitia Pengarah adalah: Drs. HM. Muchlis Gafuri, M. Suriansyah Ideham, Drs. Gusti Rusdi Effendi, Prof. H. Kustam Basri, SE, Drs. HM. Asy'ari, MA, H. Anang Ardiansyah, Drs. H. Kasim Abdurrahman, MA, Prof. Dr. H. Djantera Kawie, Drs. H. Syafuddin, Drs. H. Symasiar Seman, H. Adjim Arijadi, Hj. Joerliani Djohansjah, dan Drs. H. Bachtiar Sanderta.

Untuk KBB pertama, tema yang dipilih adalah “Mewujudkan masyarakat Banua yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Banjar”. Berdasarkan tema ini ditentukan topik-topik pembicaraan mencakup seluruh aspek kebudayaan, baik yang berupa benda (*tangible*) maupun yang tak benda (*intangible*) yang berkembang di kalangan masyarakat Banjar. Topik-topik itu adalah: (1) Budaya Banjar dan Generasi Muda; (2) Sastra Banjar untuk Peningkatan Apresiasi Generasi Muda; (3) Kesenian Rakyat Banjar; (4) Tata Kelakuan Masyarakat dan Pesan Luhur Datu Nini; (5) Budaya Sungai dan Kebersihan; (6) Simbol-simbol Kekayaan Masa Lalu; (7) Banjar dan Masalah Pluralisme; (8) Inspirasi dan Apresiasi Dalam Permainan Rakyat Banjar; (9) Reaktualisasi Masakan Banjar; (10) Arsitektur Tradisional Banjar; (11) Pemertahanan Budaya Banjar; (12) Budaya Madam pada Masyarakat Banjar.

Pemakalah terdiri atas pakar kebudayaan baik dari kalangan masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan maupun yang merantau ke luar Kalimantan Selatan. Antara lain hadir sebagai pemakalah TNB. H. Indra Muchlis Adnan, SH, MH, MM, MSc yang menjabat Bupati Indragiri Hilir sebagai pemakalah dengan judul Tradisi (Adat Istiadat) Madam Urang Banjar (Urang Banjar Nang Badiam di Rantau). Kongres diikuti oleh sekitar 250 orang, berasal dari orang Banjar yang ada di Kalimantan Selatan maupun yang berada di perantauan di dalam dan di luar negeri, seperti dari NTB, Balikpapan, Samarinda, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Kuala Tungkal, Lampung, Tembilahan, Langkat, Medan, Inderagiri Hilir, Batam, Malaysia, Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.

Hasil kongres

Setelah melalui diskusi (*bacangkurah*: bahasa Banjar) peserta kongres menyepakati sejumlah rekomendasi dan deklarasi untuk memajukan kebudayaan Banjar sebagai berikut.

Rekomendasi:

1. Perlu adanya komitmen politik dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan terutama untuk memasukkan kurikulum budaya daerah ke dalam mata pelajaran muatan lokal untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Perlu adanya pengembangan Bahasa Banjar baku yang diwujudkan melalui penerbitan media cetak dalam bahasa Banjar.
3. Setelah kongres dipandang perlu bagi orang Banjar yang ada di perantauan untuk menulis buku tentang sejarah orang Banjar yang ada di perantauan masing-masing.
4. Diperlukan adanya sistem kelembagaan bersama untuk mempertahankan Budaya Banjar, baik oleh Orang Banjar yang ada di Kalimantan Selatan maupun yang ada di perantauan.
5. Harus ada pengawalan dan pengawasan atas berbagai bentuk fisik bangunan Banjar yang telah tua dengan menetapkannya menjadi Benda Cagar Budaya.
6. Pemerintah bersama masyarakat, terutama industri-industri rumah makan perlu mengembangkan seni kuliner atau masakan khas Banjar.
7. Pembinaan sistem berkesenian perlu dilakukan dengan tujuan agar kesenian Banjar dapat mengarah pada industri, dan oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah, swasta dan masyarakat seni.
8. Merekomendasikan untuk Kongres Budaya Banjar berikutnya dapat diselenggarakan 3 tahun sekali.
9. Perlu Peraturan Daerah (PERDA) yang dapat melindungi dan memajukan kebudayaan Banjar dengan segala unsurnya.
10. Untuk melindungi kebudayaan daerah perlu penetapan hak cipta terhadap budaya Banjar yang sudah lama ada.
11. Dalam setiap Kongres Budaya Banjar perlu dilakukan pergelaran seni dan budaya Banjar secara bersama-sama dengan peserta kongres yang berasal dari daerah perantauan.
12. Untuk kelangsungan kongres berikutnya, maka mengharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota (Pemkot)/Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se Kalimantan Selatan memasukkan dana untuk kegiatan Kongres Budaya Banjar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
13. Wanita Banjar dalam kehidupan sehari-hari banyak berperan dalam berbagai bidang, sehingga perlu dilibatkan pada setiap penetapan posisi strategis, baik di pemerintahan maupun dalam organisasi sosial.
14. Untuk kepentingan kelestarian arsitektur Banjar, setiap ada pembangunan baru atau merenovasi bangunan pemerintah maupun bangunan untuk umum disyaratkan menggunakan motif arsitektur Banjar. Sebagai alat pemaksa, ketentuannya dikaitkan dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

15. Untuk jangka panjang di Kalimantan Selatan perlu ada Taman Mini Arsi-tektur Banjar dalam sebuah areal yang berisi 11 tipe rumah adat Banjar dengan dilengkapi permainan tradisional.
16. mengingat keterbatasan waktu, maka diberikan mandat kepada Tim Perumus untuk menyempurnakan Kesimpulan dan Rekomendasi Kongres Kebudayaan Banjar I sebagaimana mestinya.

Deklarasi:

Deklarasi Kongres Budaya Banjar I

Dengan Rahmat tuhan Yang Maha Esa

Kami para peserta Kongres Budaya Banjar I menyadari sepenuhnya bahwa:

1. Seni dan budaya merupakan jati diri bangsa yang dapat menuntun masyarakat ke arah kehidupan yang bermartabat, santun dan yang menjunjung tinggi kehormatan, kebersamaan penuh solidaritas dengan segala bentuknya.
2. Belum maksimalnya perhatian dan pengayoman Pemerintah Daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam mendukung kebijakan pembinaan kebudayaan.

Atas dasar kenyataan yang ada, maka kami sepakat menyatakan perlunya:

- Badan Kontak Komunitas Orang Banjar di daerah Kalimantan Selatan dengan Orang Banjar di perantauan (nama lembaga/ organisasinya ditetapkan kemudian) untuk menjalin komunikasi dan kerja sama, baik dalam bidang kebudayaan maupun kehidupan sosial lainnya.
- Kebijakan pembinaan kebudayaan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan setara dengan sektor/program pembangunan lainnya, terutama dalam hal pendanaannya.

Banjarmasin, 1 November 2008

F.2 Kongres Budaya Banjar II (KBB II), 2010

KBB II diselenggarakan pada tanggal **4 – 7 April 2010** di Banjarmasin dengan tema "Manahapi Kebudayaan Banjar Gasan Sasangga Banua" yang bermakna bertekad kuat untuk memperkuat budaya sendiri untuk menopang fondasi bagi daerah (banua) dalam segala aspek kehidupan.

Peserta kongres, berasal dari berbagai daerah di wilayah provinsi Kalimantan Selatan (banua) maupun masyarakat Banjar yang merantau (madam) ke berbagai daerah di Indonesia (Langkat, Serdang Bedagai, Kuala Tungkal, Batam, Tanjung Pinang, Tembilahan, Indragiri Hilir, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa, Jakarta, Manado, maupun yang ada di luar negeri (Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Serawak, Brunei). Jumlah peserta kongres sekitar 400 orang.

Pemakalah, terdiri atas wakil-wakil tokoh budaya Banjar dari dalam dan luar negeri. Dari tema tersebut dijabarkan ke dalam 9 sub tema yang dijabarkan ke dalam beberapa topik makalah. Sembilan sub tema tsb adalah sbb:

1. Upaya memperkuat posisi, peran dan fungsi tokoh kebudayaan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Budaya Banjar.
2. Revitalisasi nilai luhur budaya Banjar dalam menghadapi derasnya arus budaya global.
3. Kontak budaya antara Benua dan Perantauan
4. Aktualisasi dan realisasi Badan Kontak Madam
5. Pengembangan sastra dan bahasa daerah (Banjar) dalam konteks kesusastraan/kebudayaan.
6. Sejarah orang Banjar dan Pola pemertahanan kebudayaan di perantauan.
7. Upaya meningkatkan apresiasi seni dan budaya daerah.
8. Peranan pemuda Banjar dalam mendukung kebudayaan Banjar.
9. Peranan wanita Banjar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan benua.

KK Banjar I dan II mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat Banjar terhadap kebudayaannya. Tumbuhnya kesadaran itu tidak terlepas dari adanya perubahan sistem pemerintahan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Kesadaran tentang kebudayaan daerah (Banjar) menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan dalam arti membina, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan kebudayaan Banjar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Banjar. Semangat masyarakat Banjar untuk melestarikan kebudayaan Banjar cukup tinggi, antara lain diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 6/2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah, Perda No. 7/2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah, dan Perda No. 8/2009 tentang Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Realisasi Kesadaran tentang kebudayaan daerah (Banjar) juga menumbuhkan kebanggaan masyarakat Banjar terhadap kebudayaannya, sehingga masyarakat Banjar yang berada di luar wilayah provinsi Kalimantan Selatan termotivasi untuk meningkatkan posisi mereka di tengah-tengah masyarakat budaya tempat mereka tinggal. KK Banjar menjadi “ajang silaturahmi” etnik Banjar yang berada di Kalsel (banua) dengan tersebar di seluruh Tanah Air bahkan hingga ke luar negeri untuk di luar (madam) untuk bersatu padu membangun Kalimantan Selatan. Terbersit secara tersamar pemimpin yang dinilai akan memajukan Kalimantan Selatan adalah “putra daerah” yang menurut hemat saya bila gejala ini berkembang di masing-masing etnik akan melemahkan terwujudnya “manusia Indonesia” yang memiliki daya saing regional maupun internasional.

G. Kongres Budaya Kalimantan Barat

Masyarakat Kalimantan Barat terdiri atas beberapa suku bangsa: Dayak (35%), Melayu (13%), Sambas (12%), Tionghoa (9%), Jawa (9%), Kedayan (8%). Dengan demikian berbeda dengan kongres yang diselenggarakan dengan Kongres Budaya Banjar yang memang khusus membahas budaya salah satu suku bangsa. Sementara kongres di Kalimantan Barat membahas seluruh budaya yang berkembang di wilayah provinsi Kalimantan Barat.

Inisiatif untuk menyelenggarakan Kongres Budaya Kalimantan Barat (KK Kalbar) datang dari Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPNST) Kalimantan

Barat, setelah menyimak kondisi masyarakat yang majemuk dan beranekaragam budaya di Kalimantan Barat. Ada dua hal yang perlu dicermati dan dibahas tentang permasalahan kebudayaan di provinsi Kalimantan Barat. *Pertama*, proses pengakuan, pengenalan, hingga pada pemahaman terhadap kondisi masyarakat majemuk dan multikultur cenderung belum terinternalisasi secara utuh dalam kehidupan masyarakat. Kondisi seperti ini akan menumbuhkan rasa curiga kultural antara satu etnik dengan etnik yang lain. Konflik antarkelompok sosial yang pernah terjadi menjadi catatan kelam sejarah kebudayaan di Kalimantan Barat meskipun tidak semua konflik itu dominan dipengaruhi oleh persoalan budaya. *Kedua*, kondisi seperti ini tentu akan berpengaruh terhadap hubungan sosial masyarakat dalam arti kerukunan, persatuan dan kesatuan sesama warga Kalimantan Barat. Bila kondisi tidak mendapatkan perhatian dan pola pengasuhan yang baik, maka pada gilirannya akan berpengaruh terhadap eksistensi dan perkembangan budaya masyarakat Kalimantan Barat.

G.1 Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat I, 2008

Untuk menemukan formula yang dapat menumbuhkan iklim kehidupan masyarakat majemuk yang bersatu, damai dan sejahtera diperlukan forum kongres kebudayaan. Melalui kongres para tokoh masyarakat, budayawan, pakar budaya, seniman, ilmuwan, pemangku adat, dan pejabat pemerintah dapat berdialog dan berdiskusi serta merumuskan pemikiran melestarikan (dalam arti dinamis) kebudayaan daerah di Kalimantan Barat. Setelah melalui proses sosialisasi dan pendekatan dengan berbagai budayawan, seniman, pemangku adat dan pejabat akhirnya disepakati untuk diselenggarakan Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat (KKKB) pertama. Berangkat dari landasan kepedulian dan kesadaran kolektif terhadap kemajemukan dan keberagaman budaya itulah pada tanggal **25 – 27 Agustus 2008 diselenggarakan Kongres Budaya Kalimantan Barat untuk yang pertama.**

Tujuan kongres adalah dapat membangun satu konstruksi identitas budaya Kalimantan Barat yang pada gilirannya dapat menjadi media dalam mengembangkan komunikasi dan interaksi antara yang satu dengan yang lain budaya. Pada kongres ini pesertanya terdiri atas budayawan, akademisi, agamawan, cendekiawan, pemangku adat, dan sejumlah anggota masyarakat.

Hasil Kongres

Dari hasil persidangan itulah akan dirumuskan beberapa hal – layaknya sebuah piagam madinah – yang bermanfaat untuk semua kalangan. Baik itu masyarakat, akademisi, profesional, budayawan, dan yang lainnya. Hasil kongres kebudayaan ini nanti dapat ditawarkan dalam kongres kebudayaan nasional guna membangun kembali nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang sempat tenggelam. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita sendiri tidak tahu seperti kebudayaan kita dan ketika kita tahu ternyata kebudayaan tersebut telah menjadi hak milik negara lain. Hasil Kongres Budaya Kalimantan Barat 2008 adalah sebagai berikut.

**Rumusan dan Rekomendasi
Kongres Budaya Kalimantan Barat 2008
Pontanak, 25 – 27 Agustus 2008**

A. PENDAHULUAN

Dalam Kongres Budaya Kalimantan Barat pertama tahun 2008 ini, ditelaah 4 (empat) topik utama yang menjadi pokok dasar dalam upaya membangun konstruksi identitas budaya Kalimantan Barat, meliputi; (1) Kearifan dan Pengetahuan Lokal; (2) Bahasa dan Sastra Lokal; (3) Posisi Hukum Adat di dalam Hukum Positif dan di tengah Masyarakat Kalimantan Barat yang Multikultur; (4) Warisan Benda-Benda Budaya dan Sejarah.

Keempat topik utama ini dibahas dalam sidang-sidang komisi dan sidang pleno yang kemudian memunculkan suatu rumusan gagasan-gagasan pokok dan rekomendasi terkait dengan upaya menumbuh kembangkan tingkat kepedulian masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah terhadap keragaman dan perkembangan budaya-budaya yang ada. Upaya untuk menumbuh-kembangkan kepedulian terhadap kondisi keragaman budaya ini diarahkan pada satu konstruksi identitas budaya Kalimantan Barat yang multikultur.

B. RUMUSAN KESIMPULAN

Kearifan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat di Kalimantan Barat bersumber pada nilai-nilai yang sama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi bentuk keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, atau antara manusia dengan lingkungan alamnya. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang multikultur “Kearifan dan Pengetahuan Lokal” berada dalam posisi yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung dan berinteraksi satu sama lain. Seperti contoh pada falsafah masyarakat Dayak yaitu, **Adil ka’ Talino, bacuramin ka’ Saruga, basengat ka’ Jubata** (adil terhadap sesama manusia, bercermin pada kehidupan surgawi dan memasrahkan diri hanya kepada Sang Pencipta), falsafah masyarakat Melayu **Adat bersendikan sara’, sara’ bersendikan agama, dan agama bersendikan Kitabullah** (adat berasaskan norma aturan, norma aturan berasaskan agama, dan agama berasaskan Kitab Allah atau Kitab Suci), atau falsafah-falsafah masyarakat Tiong-hoa yang selama ini lebih berpegang teguh pada bentuk-bentuk ajaran kebajikan **konfusiusme (Kong Fu Tse)**, serta lain sebagainya. Falsafah-falsafah ini dalam pengejawatahannya merupakan manifestasi tertinggi nilai-nilai bentuk keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, atau antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

Bahasa daerah Kalimantan Barat adalah bahasa-bahasa yang tetap eksis dan digunakan oleh setiap kelompok masyarakat di Kalimantan Barat. Bahasa-bahasa yang eksis di Kalimantan Barat dapat dijadikan sebagai media untuk mengeks-presikan diri, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai seni, serta lain sebagainya. Untuk itu upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah harus menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kalimantan Barat.

Sastra lokal yang masih tumbuh dan berkembang di Kalimantan Barat dalam

kenyataannya terdiri dari (1) ungkapan tradisional yaitu peribahasa dan perumpamaan yang diungkapkan dalam upacara-upacara adat dan ritus relegius; (2) sajak rakyat yakni pantun, mantera dan teks-teks nyangahatan dan syair; (3) cerita atau prosa, yakni mitos, legenda, dan dongeng, seni pertunjukan seperti seni teater tradisional. Keberadaan dan sebaran-sebaran sastra lokal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memberikan ruang apresiasi kepada berbagai kalangan untuk melakukan upaya penelitian, penginventarisasian, pemetaan sebaran, dan pengembangan yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai *katarsis* dan *phatos*.

Pada dasarnya setiap masyarakat atau etnisitas yang tinggal dan hidup di Kalimantan Barat memiliki adat istiadat dan hukum adat. Masyarakat yang memiliki adat istiadat disebut masyarakat adat. Apabila kebiasaan itu disebut adat, maka hukum yang bersumber dari adat itu dapat disebut sebagai Hukum Adat. Tidak semua adat istiadat bersifat hukum, hanya adat istiadat dengan kriteria tertentu yang bersifat hukum dapat disebut Hukum Adat. Dalam posisinya di dalam hukum positif atau hukum negara, hukum adat tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal yang belum atau tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan atau tidak mereduksi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Posisi Hukum Adat di dalam Hukum Positif (Hukum Negara) dan di tengah-tengah masyarakat yang multikultur dipengaruhi beberapa faktor yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Salah satu kendala adalah kurang tersosialisasinya materi-materi hukum adat satu sama lain di masyarakat dan masih rentannya intervensi bentuk-bentuk kepentingan individu atau kelompok yang bersangkutan dalam proses pelaksanaannya. Kondisi seperti ini memunculkan bentuk anasir-anasir kelompok tertentu dalam penafsiran dan persepsi yang salah, baik oleh para pemangku kepentingan Hukum Adat dan Hukum Positif (Hukum Negara) itu sendiri maupun oleh masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sejatinya masyarakat adat tidak harus diidentifikasi dengan satu kelompok etnis tertentu saja di Kalimantan Barat.

Warisan benda-benda sejarah dan budaya yang masih banyak belum teridentifikasi sesuai syarat dan ketentuan yang dapat ditegorikan sebagai benda sejarah, benda cagar budaya, dan atau situs, sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya/Situs, perlu diidentifikasi, diinventarisasi dan dilindungi. Baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak lainnya (*stake holders*) dapat melindungi dan tidak mengorbankan benda-benda sejarah dan budaya tersebut akibat adanya proses pelaksanaan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

C. REKOMENDASI

1. Kearifan dan pengetahuan lokal yang ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat terkait dengan nilai-nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, atau antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, perlu dijaga, dilestarikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan masyarakat Kalimantan Barat, karena bentuk-bentuk kearifan dan pengetahuan lokal itu merupakan modal sosial utama bagi dasar pelaksanaan pembangunan masyarakat.
2. Untuk menjaga, melestarikan dan membangun kecintaan terhadap nilai-nilai

budaya, kearifan dan pengetahuan lokal sebagai landasan kehidupan masyarakat yang multikultur di Kalimantan Barat, maka diperlukan ajang promosi pariwisata atau publikasi melalui kerja sama dengan media masa atau media-media promosi lainnya. Upaya ini merupakan bagian dalam usaha memperkenalkan keberadaan nilai-nilai budaya, kearifan dan pengetahuan lokal kepada masyarakat Kalimantan Barat satu sama lain, dan atau masyarakat di luar Kalimantan Barat.

3. Sejalan dengan itu, dalam kondisi masyarakat Kalimantan Barat yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa dan budaya, maka perlu adanya upaya penanaman dan pemahaman nilai-nilai multikultur sejak dini melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, yaitu mulai dari taman kanak-kanak atau bahkan mulai *play group* hingga pada sekolah lanjutan atas.
4. Bahasa daerah yang eksis dan sebagai penanda identitas budaya daerah perlu mendapat perhatian dari pemerintah dengan cara memfasilitasi penyusunan kodifikasi kebahasa-daerahan dalam wujud penyusunan Tata Bahasa Daerah, Pedoman Ejaan Bahasa Daerah, dan Kamus Bahasa Daerah sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 tahun 2007. Pemerintah juga diharapkan dapat mempublikasikan hasil penyusunan kebahasa-daerahan itu seluas-luasnya kepada masyarakat.
5. Dalam hal mendudukan keberadaan bahasa dan sastra lokal di Kalimantan Barat diperlukan proses inventarisasi, pemetaan sebaran dan pengembangan sastra lokal yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan bahan muatan lokal dan terintegrasi dalam mata pelajaran pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan demikian bahasa dan sastra lokal dapat diapresiasi oleh berbagai kalangan agar tumbuh pemahaman, penghargaan, internalisasi dan aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa dan sastra lokal tersebut, yang pada gilirannya dapat dijadikan kartasis dan pathos.
6. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi para pemangku kepentingan (*stake holders*) untuk dapat duduk bersama dalam mendiskusikan berbagai persoalan terkait dengan hukum adat dan pelaksanaannya, serta menso-sialisasikan bentuk dan meteri hukum adat pada masyarakat luas, baik kepada masyarakat yang bersangkutan atau antarsatu sama lain kelompok masyarakat. Dengan demikian hukum adat tidak saja hanya dipahami oleh pemangku adatnya semata melainkan juga dipahami oleh masyarakat luas, yang pada gilirannya akan mengurangi kesalahan penafsiran dalam penerapannya.
7. Kedudukan masyarakat adat dan hukum adat di Kalimantan Barat yang selama ini selalu mengalami diskriminasi akibat adanya proses pembangunan, diharapkan pemerintah daerah Kalimantan Barat dapat mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang dan atau mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak memihak kepada masyarakat adat dan keberadaan hukum adat. Dengan demikian dalam proses pembangunan yang berlangsung di Kalimantan Barat masyarakat akan lebih partisipatif, sementara hukum adat dapat dijadikan elemen dasar dalam mengeluarkan produk-produk kebijakan nasional.
8. Mendesak pemerintah dan pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, melindungi dan melestarikan peninggalan benda-benda sejarah, benda cagar budaya dan atau situs-situs sejarah dan

budaya yang ada dalam wilayah Kalimantan Barat. Upaya-upaya lain sebagai bentuk perlindungan, pelestarian dan pengembangan benda-benda budaya dan sejarah antara lain dapat diwujudkan melalui: (a) upaya pemugaran atau pengembangan kawasan cagar budaya atau situs; (b) membangun dan mengembangkan museum pada tiap-tiap kabupaten kota di Kalimantan Barat; dan (c) menggunakan arsitektur dan ornamen-ornamen yang mencirikan karakter budaya masyarakat Kalimantan Barat dalam setiap pembangunan gedung.

9. Identitas budaya Kalimantan Barat tercermin dari: (a) eksistensi kearifan dan pengetahuan lokal yang dimiliki; (b) bahasa dan sastra lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat; (c) eksistensi hukum adat di antara hukum positif dan masyarakat yang plural; serta (d) peninggalan benda-benda sejarah dan budaya. Melihat masih banyak masalah-masalah yang muncul dan berkembang seperti apa yang tercermin dalam butir-butir rekomendasi sebelumnya di atas, maka diperlukan dukungan kebijakan berupa “Peraturan Pemerintah” dan atau “Peraturan Daerah” dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi permasalahan-permasalahan di atas sehingga upaya untuk membangun identitas budaya Kalimantan Barat sebagai simbol pemersatu dan sebagai media komunikasi dan interaksi budaya satu sama lain dalam kondisi masyarakat yang multikultur dapat tercapai.

Kongres Budaya Kalimantan Barat 2008 di Pontianak merupakan Kongres Budaya pertama kali yang diselenggarakan semata karena dilandasi oleh semangat kepedulian dan kesadaran kolektif pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kemajemukan dan keragaman kultural di Kalimantan Barat, beserta persoalan-persoalan yang melingkupinya. Oleh karena itu, demi menjaga keberlanjutan dari semangat kepedulian dan kesadaran kolektif yang ada, maka segenap jajaran pemerintahan daerah di Kalimantan Barat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Kongres Budaya Kalimantan Barat II, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ketapang pada tahun 2010.

Sebagai wujud upaya mensinkronkan harapan, keinginan, dan kebutuhan bersama atas perluasan jaringan kebudayaan secara nasional, maka diharapkan agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi rekomendasi hasil-hasil kerja Kongres Budaya Kalimantan Barat pertama tahun 2008 kepada forum **Kongres Kebudayaan Nasional 2008** yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Desember tahun 2008.

Pontianak, 28 Agustus 2008

Tim Perumus

G.2 Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat II, 2010

Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat (KKKB) II diselenggarakan di Kabupaten Ketapang tanggal 2 – 4 Desember 2010, sesuai dengan keputusan Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat I. Kongres ini diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Kalimantan Barat, yaitu

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Pontianak Wilayah Kalimantan, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ketapang.

Kongres dengan tema “Menggali Potensi Modal Kultural Kearifan dan Pengetahuan Lokal Bagi Masa Depan Kalimantan Barat yang Lebih Baik”, bertujuan untuk mengeksplorasi wujud, makna dan fungsi kearifan dan pengetahuan lokal dalam kehidupan masyarakat, merumuskan strategi dalam upaya pelestarian kearifan dan pengetahuan lokal yang ada di Kalimantan Barat, serta merumuskan identitas kebudayaan yang dapat menjadi pengikat kemajemukan budaya bersumber dari kearifan dan pengetahuan lokal yang telah berkembang di wilayah Kalimantan Barat.

Dalam hal persidangan agak berbeda dengan kongres-kongres yang lain. Acara kongres yang biasanya dimulai dengan sidang pleno, pada kongres ini kongres dimulai dengan acara Dialog Budaya, dengan menampilkan tiga narasumber, yaitu; Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra (seorang antropolog dan dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Dr. Bambang Rudito (antropolog, dosen ITB Bandung) dan Dr. M. Iqbal Djajadi. Sidang dilanjutkan dengan Sidang Komisi, yang dibagi menjadi 3 komisi: (1) Peranan Kearifan dan Pengetahuan Lokal dalam Upaya Pelestarian Lingkungan; (2) Peranan Kearifan dan Pengetahuan Lokal dalam Upaya Menjaga Integrasi dan Harmonisasi Masyarakat; (3) peranan Kearifan dan Pengetahuan Lokal dalam Upaya Meningkatkan Etos Kerja dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Dari hasil sidang-sidang komisi selanjutnya dibahas lagi dalam Sidang Pleno untuk mempresentasikan hasil-hasil yang dicapai oleh sidang komisi, mendiskusikan dan menyepakati rekomendasi akhir kongres, serta menyusun rencana tindak lanjut pasca Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat II.

G.3 Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat III, 2012

KKKB III diselenggarakan di kota Singkawang , mulai tanggal 15 - 18 Oktober 2012. Tema KKKB III “Membangun karakter dan memperkuat ketahanan budaya masyarakat multikultur”. Tujuan kongres ini adalah merumuskan strategi kebudayaan dalam menggali potensi modal kultural kearifan dan pengetahuan lokal bagi masa depan Kalimantan Barat, sesuai dengan hasil kesepakatan dari rekomendasi KKKB sebelumnya. Selain itu juga bertujuan untuk mencari formula penerapan wujud dan makna, dan fungsi kearifan lokal, pengetahuan lokal dalam membangun masyarakat multikultur di Kalimantan Barat.

Kegiatan Kongres Kebudayaan itu diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Singkawang. Peserta kongres adalah perwakilan dari berbagai elemen yang ada di Kalimantan Barat, di antaranya utusan dari instansi pemerintah di tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang berhubungan dengan kebudayaan, dari perguruan tinggi, sekolah, dewan adat/ paguyuban etnis, sanggar kesenian, lembaga swadaya/organisasi massa pendamping komunitas masyarakat adat, para budayawan, peneliti budaya serta media massa.

Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat III menampilkan 9 narasumber yang berasal dari pusat dan daerah yaitu Dr. Mukhlis PaEni (Budaya Daerah Sebagai Deposit

Ekonomi Kreatif); Dr. Romo Beni Susetio (Membumikan Wawasan Multikultural di Indonesia: Agama, Pluralisme dan Pancasila Sebagai Habitus Baru); I Gede Ardika (Multikultur Membangun Karakter dan Memperkokoh Ketahanan Budaya Masyarakat. Pembangunan Ber-wawasan Budaya Sebagai Alat Memperkokoh Ketahanan Budaya Kalimantan Barat); Dr. Robini (Membangun Masyarakat dan Budaya Keberagaman); Dr. Pabali Musa (Karakter dan Ketahanan Budaya); Jhon Bamba (Bahasa dan Multikulturalisme); Drs. Gusti Suryansyah, M.Si (Membangun Multikulturalisme Dalam Memperkokoh Ketahanan Budaya Masyarakat); Dr. Kristianus Atok, M.Si (Konstruksi Budaya Dayak Dalam Perspektif Multikulturalisme); Sulistyorini (Membangun Karakter Melalui Pendidikan Multikultural).

Tiga komisi yang dibentuk mempunyai tema yang berbeda. Komisi 1 membahas tentang Promosi Kearifan Lokal dalam Membangun Karakter Masyarakat Multikultur, Komisi 2 membahas tentang Pendidikan Karakter Melalui Penanaman Nilai dan Komisi 3 membahas tentang Harmonisasi Masyarakat Multikultur untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya. Hasil yang dicapai dari Kongres Kebudayaan III di Singkawang antara lain: Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membuat dan mengesahkan perda/perbup yang mengatur tentang pengakuan hak-hak adat dan hak ulayat masyarakat adat di wilayah kabupaten/kota; Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pendidikan karakter berbasis kebudayaan lokal; Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk membangun mekanisme pencegahan dini konflik.

(Sumber: <http://www.bpsnt-pontianak.org/index.php?pages=publikasi>).

Hasil sidang-sidang Komisi adalah sebagai berikut:

I. Hasil Komisi I "Promosi kearifan local dalam membangun karakter masyarakat multikultur"

A. Pendahuluan

Setelah melakukan diskusi dan mendengarkan paparan-paparan dari para ahli/pakar dan pemerhati kebudayaan dalam Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat Tahun 2012, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Kami peserta Kongres Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat III, yang berasal dari berbagai komunitas masyarakat se- Kalimantan Barat, telah bersepakat untuk menyatukan hati, aspirasi dan pandangan Kami, tentang Keberadaan, Hak Dasar, Cita-Cita, dan Harapan Kami Masyarakat Kalimantan Barat tentang hidup berbangsa dan bernegara.

Keberadaan, eksistensi dan peran Masyarakat Adat merupakan fakta yang tidak dapat ditiadakan oleh pihak manapun, karena itu Masyarakat Adat serta hak-hak tradisionalnya sudah ada Jauh sebefum lahirnya Negara ini. Meskipun di sisi lain Deklarasi PBB dan konvensi-konvensi Internasional lainnya, UUD 1945, TAP MPR RI serta berbagai perundang-Undang RI sesungguhnya telah mengakut keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat, namun dalam implementasinya masih jauh dari harapan.

Masyarakat Adat masih terus menghadapi beragam bentuk pemaksaan,

penaklukan dan eksploitasi. Penguasaan negara atas sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat ATAS NAMA Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, masih terus berlangsung. Berbagai kelompok Masyarakat Adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan. Pemerintah masih terus memberi Hak Guna Usaha (HGU) bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan Kuasa Pertambangan yang baru di wilayah-wilayah adat kepada para pemiiac modal (Kaum Kapitalis)! tanpa pemberitahuan dan perundingan yang layak sesuai dengan kearifan local dan tatanan adat istiadat yang berlaku di masyarakat adat Kalimantan Barat.

Di tengah menguatnya tuntutan akan perlindungan hutan, ijin hak pengusahaan hutan dan perkebunan serta pertambangan dalam skala besar makin banyak bermunculan di berbagai daerah dengan isi yang sama namun dengan judul yang berbeda. Di satu sisi keberadaan Hak-Hak masyarakat adat secara formal diakui dalam UUD 1945, TAP MPR, UU, Peraturan Pemerintah, namun disisi lain banyak juga perundang-undangan yang memberikan peluang besar bagi konsesi pertambangan, perkebunan skala besar, telah meneruskan penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat.

Ini semua menunjukkan bahwa apa yang dikhawatirkan Masyarakat Adat tentang jurang antara pengakuan formal dan realitas pelaksanaan telah kembali menjadi kenyataan. Keadaan seperti ini masih jauh dari cita-dita dan kedautatan MASYARAKAT ADAT dalam ikim yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu kami dari Peserta Kongres Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat perlu menyuarakan suara-suara Masyarakat Adat Kalimantan Barat yang nyaris tidak terdengar.

Keberadaan perkebunan dan pertambangan dalam skala besar telah ikut memberikan dampak dan pengaruh hilangnya kearifan lokal dalam tatanan kehidupan masyarakat adat. Kearifan tokat yang berisf ajaran tuhur nenek moyang yang mengandung nilai-nilai universal ditengah-tengah masyarakat adat seperti; kebersamaan, kegotong-royongan, solidaritas, sistim perladangan (berhuma), saat ini sudah sulit di temukan.

B. Kearifan lokal dalam Masyarakat Adat

Pertama, Kami masyarakat Adat se-Kalimantan Barat, sejak zaman dulu telah mewarisi hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sesuai dengan trad?si, budaya, nflai-nitai luhur dan pengetahuan asli yang hidup dan berkembang dalam system adat masing-masing

Kedua, Kami Masyarakat Adat Se-Kalimantan Barat, memiliki tradisi untuk melestarikan, menjaga keamanan, ketertiban dan keseimbangan hidup bersama, baik di antara sesama masyarakat adat serta dengan alam sekitarnya, sesuai dengan adat istiadat hukum kami masing-masing

Ketiga, Kami Masyarakat Adat Se-Kalimantan Barat, mewarisi hak untuk mengendalikan, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam wilayah adat sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

C. Rekomendasi

Tabel 4
Rekomendasi Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat III 2012

No.	MASALAH	STRATEGI (REKOMENDASI)	PEMRAKARSA
1.	Belum ada Peraturan-peraturan Daerah (Perbup/Perwako) yang mengatur tentang pengakuan hak-hak adat dan hak ulayat masyarakat adat di wilayah kabupaten/kota.	Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membuat dan mengesahkan perda/ perbup yang mengatur tentang pengakuan hak-hak adat dan hak ulayat masyarakat adat di wilayah kabupaten/kota.	lembaga-lembaga komunitas adat dan budaya di setiap wilayah Kab/Kota, sekberkesda Kalbar
2.	(Perbup/Perwako) sektoral yang tidak mengakui dan bahkan melecehkan hak-hak masyarakat adat (misalnya: UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 11/1967 tentang Pertambangan).	Mencabut dan membuat perda/ perbup baru tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menyeluruh, lintas sektoral dan melindungi hak-hak masyarakat adat.	
3.	terbitnya ijin-ijin Kuasa Pertambangan, HPH, HGU, HPHTI, IHPHH, IPK, Perkebunan skala besar yang tidak memperhatikan kearifan lokal.	Segera dilakukan moratorium terhadap seluruh ijin di bidang HPH, HPHTI, HGU, IHPHH, perkebunan skala besar.	
4.	Akibat masalah nomor 3, kesejahteraan masyarakat dan nilai adat-istiadat dan kearifan local semakin mengalami keterpinggiran.	Segera dilakukan moratorium terhadap seluruh ijin di bidang HPH, HPHTI, HGU, IHPHH, perkebunan skala besar.	
5.	Akibat masalah nomor 3 dan 4, Keberadaan masyarakat adat dan hak-hak wilayah hukumnya semakin termarginalkan.	Pemerintah Daerah dan DPRD segera membuat dan mengesahkan peraturan daerah tentang keberadaan masyarakat adat	

6.	Belum adanya kurikulum daerah yang memuat mata-ajar MULOK dan Seni Budaya daerah yang sesuai dengan kearifan lokal	Membuat media promosi bagi kearifan lokal kalimantan barat, dengan membuat bulet'm, film dokumenter, social network, blog atau website maupun memanfaatkan event-event tertentu dan menjadi kalender tetap bagi setiap daerah.	lembaga-lembaga komunitas adat dan budaya di setiap wilayah Kab/Kota, sekberkesda Kalbar, para guru mulok dan seni budaya daerah
----	--	--	--

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan pemerintah - baik pemerintah kabupaten/kota, Provinsi Kalimantan Barat, maupun pemerintah pusat.

Komisi 1: “Promosi Kearifan Lokal dalam Membangun Karakter Masyarakat Multikultur”

Ketua

Sekretaris

Didi A.MA.Pd

Siti Rahmawati, S.Sos

II. Hasil Diskusi Kelompok 2: “Pendidikan Karakter melalui Penanaman Nilai”.

A. Realita Pendidikan

1. Keluarga

- a. Kurangnya perhatian dan komunikasi antara orang tua dengan anak karena kesibukan masing-masing.
- b. Kebebasan yang seluas-luasnya diberikan kepada anak.
- c. Hilangnya kebiasaan mendongengkan kisah-kisah dengan muatan karakter oleh orang tua kepada anak. (cth. Dongeng sebelum tidur, dll)
- d. Tidak adanya penerapan reward (penghargaan) dan punishment (sanksi/hukuman) kepada anak dalam keluarga.
- e. Kurangnya keteladanan orang tua dan anggota keluarga (tentang kesopanan, kejujuran, dll)
- f. Pola asah, asih, asuh, di keluarga mulai memudar hingga berdampak negative dalam proses pembelajaran di keluarga.
- g. Memudarnya penerapan kebiasaan budaya (kearifan local) dalam keseharian di keluarga. (cth. Salam, cium tangan, sopan santun dalam bicara, makan tak boleh bicara, dtl...)
- h. Hilangnya rasa kepedulian antar anggota ketuarga.
- i. Masih terjadinya KDRT.
- j. Kepercayaan yang terlalu besar diberikan kepada anak dan sering disalahgunakan oleh anak.

2. Sekolah

- a. Pendidikan lebih berorientasi pada materi pembelajaran dan hasil, bukan proses,
- b. Kurikulum sekarang ini difokuskan pada aspek kognitif dan melupakan sisi afektif.
- c. Perubahan perilaku siswa kurang menjadi perhatian dalam evaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- d. Hilangnya mata pelajaran budi pekerti dalam perubahan kurikulum.
- e. Mata pelajaran pendidikan agama hanya diberikan waktu 2x40 menit/minggu.
- f. Rendahnya kreatifitas guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang mengembangkan konsep pendidikan karakter.
- g. Adanya kecenderungan guru hanya berperan sebagai pengajar atau transfer ilmu saja, bukan pendidik (membimbing, membina, dan melatih).
- h. Masih adanya guru yang belum memberikan keteladanan kepada siswa.
- i. Masih terjadinya kasus kekerasan di sekolah.
- j. Minimnya eksplorasi budaya local di sekolah sehingga siswa lebih mengenal dan bangga pada budaya asing daripada budaya local.
- k. Memudarnya kedisiplinan terhadap peraturan yang telah ada di sekolah
- l. Rendahnya etika dan penghargaan siswa kepada guru.
- m. Intervensi orang tua murid terhadap kebijakan sekolah.

3. Lingkungan/masyarakat

- a. Orientasi nilai kebahagiaan bergeser kepada kebendaan. "Bahagia = Banyaknya harta benda".
- b. Pengaruh Iptek, teknologi tinggi membuat anak-anak meninggalkan kebudayaan lokal.
- c. Rendahnya rasa nasionalisme.
- d. Kurangnya tempat penyaluran bakat dan minat untuk pembinaan remaja.
- e. Belum diterapkannya pendidikan bina keluarga di lingkungan masyarakat.
- f. Hilangnya nilai-nilai budaya tradisional dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
- g. Menurunnya rasa kepedulian antar sesama di masyarakat.
- h. Pengaruh perilaku negatif di masyarakat lebih mudah diterima oleh anak-anak dari pada sisi positif (cth. tawuran)
- i. Berkembangnya gaya hidup instan dan konsumtif.

B. Dampak

- a. Rendahnya pengetahuan siswa/anak tentang kebudayaan dan produk kebudayaan yang merupakan kearifan tocat
- b. Rendahnya pengetahuan siswa/anak tentang nilai atau pesan dari sebuah produk kebudayaan dalam rangka pembentukan karakter.
- c. Berkembangnya karakter anti disiplin, egois, hedonis, pesimis, panik, stress, galau, putus asa, jalan pintas, dll.
- d. Rendahnya rasa bangga pada bangsa dan cinta tanah air di kalangan anak-anak dan remaja.

C. Solusi/Rekomendasi

1. Keluarga
 - a. Orang tua memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari di keluarga.
 - b. Orang tua mengarahkan, memotivasi dan memberikan apresiasi terhadap anak-anak untuk peduli atau memiliki ketertarikan pada kebudayaan lokal.
2. Sekolah
 - a. a. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya local dan multikultur melalui seluruh mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler (pengembangan diri).
Cth. Seni, karya ilmiah.
 - b. b. Menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, toleransi, jujur, sopan, dan lain-lain melalui kebijakan sekolah, baik berupa peraturan, kode etik, maupun program-program sekolah.
(cth. Kantin kejujuran, kebersihan kelas, upacara, dll...)
3. Masyarakat.
 - a. Konsisten dan komitmen untuk menjaga dan melestarikan kearifan budaya sebagai sebuah identitas.
 - b. Adanya mekanisme control social yang dibangun dan disepakati di masyarakat.
4. Pemerintah
 - a. Melakukan evaluasi dan revitalisasi terhadap program pendidikan karakter berbasis kebudayaan focal
 - b. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru tentang pengembangan materi pendidikan karakter berbasis kebudayaan local.
 - c. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru tentang pengembangan media pembelajaran berbasis kebudayaan local.
(cth. Permainan tradisional, cerita-cerita rakyat)
 - e. Memfasilitasi penggalian, pengumpulan, penerbitan dan penyebarluasan sumber belajar dengan materi kebudayaan local
(cth. Komik cerita rakyat, manual permainan tradisional, kumpulan syair, pantun, dll)
 - f. Memperbanyak event sebagai bentuk apresiasi terhadap kreatifitas kebudayaan lokal.
 - g. Menyelenggarakan promosi pendidikan karakter berbasis kebudayaan lokal
 - h. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pendidikan karakter berbasis kebudayaan lokal.

III. Rekomendasi Komisi III

Rumusan bentuk-bentuk harmonisasi dalam rangka membangun karakter dan ketahanan budaya meliputi:

- A. Aspek Regulasi
 1. Mendesak/mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan

Barat untuk melaksanakan Permendagri No. 39 Th. 2007 tentang pedoman fasilitasi organisasi masyarakat bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

2. Mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk menyusun peraturan pelaksanaan Permendagri No.39 Th. 2007 tentang pedoman fasilitasi organisasi masyarakat bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

B. Aspek Kelembagaan

1. Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan forum-forum lintas etnik, adat, dan budaya yang telah dibentuk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
2. Mendorong pemerintah provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk penguatan dan pemberdayaan forum-forum lintas etnik, adat, dan budaya dalam APBD provinsi, kabupaten/ kota masing-masing.

C. Aspek Aktivitas

1. Mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi dan kabupaten/ kota untuk merancang kurikulum muatan lokal tentang pendidikan multikultur/ pembangunan karakter dari tingkat PAUD hingga SLTA.
2. Mendorong tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk merajut silatu-rahim dan kebersamaan multikultur melalui interaksi sosial dalam kegiatan bersama (misalnya pada event budaya dan hari besar nasional).
3. Mendorong dan memfungsikan “kampung budaya” (galeri/ miniatur budaya) Kalimantan Barat guna penggalan, pelestarian, dan pengembangan multikultur yang ada di Kalimantan Barat.
4. Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk mendirikan kampung budaya sesuai dengan karakter daerah dan semangat multikultur.
5. Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk melakukan upaya identifikasi dan pelestarian situs-situs budaya (Benda Cagar Budaya).
6. Mendorong partai dan tokoh politik untuk tidak melakukan politisasi SARA.
7. Mendorong pembentukan simbol multikultur di Kalimantan Barat pada kegiatan Kongres Kebudayaan Kalbar selanjutnya.

Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota se-Kalimantan Barat untuk membangun mekanisme pencegahan dini konflik.*

* Pembahasan dalam pleno.

Atas Nama Anggota Komisi III

Fasilitator: Dr. Kristianus Atok

Ketua: H. Jipridin

Sekretaris: Ruth Eveline

Anggota:

1. A.Halim,R
2. Suriansyah
3. Yeremias, A.Md
4. F.Y.Marutis
5. A. Muio Ikram
6. Abang Chairuddin
7. V. Syaidina L, A.Ma.Pd

H. Kongres Kebudayaan Betawi, 2007

Masyarakat dan budaya Betawi berada dan berkembang di Ibukota Negara. Posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara RI semakin kukuh setelah ditetapkan Undang-undang **No. 29 Tahun 2007** Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesartuan RI. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota NKRI itulah (Pasal 1 angka 6) maka provinsi DKI Jakarta mendapatkan **kekhususan** dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan “kekhususan” itu ditegaskan dalam Pasal 5, yakni

“...memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional”.

Mengenai kebudayaan diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (6) yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengem-bangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta”.

Amanat ini mengandung dua pokok sasaran: (1) melestarikan dan mengembangkan kebu-dayaan Betawi yang diakui sebagai kebudayaan asli yang berkembang di wilayah yang kini bernama Jakakrta; dan (2) melindungi keberadaan berbagai kebudayaan daerah lain yang berkembang di Jakarta. Berkumpulnya berbagai etnik dan bangsa berikut dengan kebudayaannya di kota Jakarta merupakan konsekuensi dari ditetapkannya wilayah ini menjadi Ibukota Negara.

Untuk membahas lebih rinci amanat itu ke dalam konsep, kebijakan dan strategi pelestarian kebudayaan Betawi dalam forum kongres. Dalam pembukaan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam pembukaan kongres menegaskan bahwa “kudu” ada cetak biru tentang strategi pelestarian dan pengembangan kebudayaan Betawi agar dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang panjang. Kongres dijadwalkan membahas tentang kebudayaan masyarakat Betawi yang terdiri dari unsur kehidupan beragama, kesenian, bahasa, film, sejarah, permuseuman, kepurbakalaan dan kenaskahan.

Kongres menghadirkan pembicara untuk orasi budaya masing masing oleh Ridwan Saidi, Syamsudin Ch. Haesy selaku budayawan Betawi dan Prof Dr. Yusmar Yusuf pembicara tamu dari lembaga kebudayaan Melayu. Kongres diikuti kurang

lebih 250 peserta terdiri dari unsur Badan Musyawarah (BAMUS) Betawi, Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Ormas Ormas Betawi, Akademisi, LSM, pemerintah daerah penyanggah Tangerang, Bekasi dan Depok. Betindak sebagai Ketua Penyelenggara adalah H. Tatang Hidayat Ketua Umum LKB dan Ketua Pengarah adalah Dr. H. Margani Mustar.

I. Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN)

Bagi masyarakat adat di seluruh nusantara, tanggal 17 Maret 1999 merupakan tonggak paling bersejarah. Bagi mereka tanggal itu telah ditempatkan sebagai titik awal perjuangan melawan diskriminasi, pembodohan dan peming-giran secara sistematis. Mulai tanggal itu mereka mulai memperjuangkan hak-hak adatnya dan memosisikan diri sebagai komponen utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu kesimpulan dari kongres pertama adalah “Jauh sebelum Negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri”. Kesadaran tentang posisi itu sudah mulai muncul sejak pertemuan tahun 1993 di Toraja.

Setelah memasuki masa reformasi muncul suatu “gerakan” yang mencerminkan suatu kesadaran yang lebih meningkat tentang eksistensi masyarakat adat. Forum yang berangsur berkembang itu membangun konsolidasi dan berjejaring hingga akhirnya sepakat untuk menyelenggarakan bersama sebuah forum kongres dengan nama Kongres Masyarakat Adat Nusantara disingkat KMAN. Hingga saat ini telah berlangsung 3 kali kongres. Urutan kongres yang pernah diselenggarakan oleh AMAN menyelenggarakan adalah sebagai berikutnya:

1. Kongres MAN I tahun 1999 di Jakarta
2. Kongres MAN II tahun 2003 di Lombok
3. Kongres MAN III Tahun 2008 di Pontianak
4. Kongres MAN IV Tahun 2012 di Maluku Utara (Ternate)

I.1 Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN) 1999

Kongres pertama diselenggarakan pada bulan **17 - 22 Maret 1999**. Kongres itu berhasil melahirkan beberapa pernyataan sebagai berikut.

1. Adat adalah sesuatu yang luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama;
2. Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan Negara yang berlaku seragam sifatnya;
3. Jauh sebelum Negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan system kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu Negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat adat ini;
4. Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari mahluk manusia yang tidak berbeda dengan mahluk manusia yang lain. Oleh sebab itu, warga Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu, seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan manusia

universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri;

5. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenaggungan, masyarakat Adat se nusantara wajib untuk saling bahu-membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang layak dan berdaulat. Selain itu dari kongres ini lahir sebuah organisasi dengan nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat AMAN.

1.2 Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) II 2003

Kongres MAN II diselenggarakan dari tanggal **19 - 25 September 2003** di sebuah desa bernama desa Tanjung, Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil dari kongres ini berupa pernyataan sebagai berikut.

HASIL KONGRES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Kami, seluruh peserta Kongres Kedua Masyarakat Adat Nusantara yang diselenggarakan tanggal 19-25 September 2003 di Desa Tanjung - Lombok Utara, menyadari bahwa selama lebih dari 4 tahun sejak berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah terjadi perubahan-perubahan berbagai kebijakan Negara yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak dasarnya.

Kami mengingatkan kembali semakin kuatnya pengakuan Negara terhadap hak-hak masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Amandemen Kedua UUD 1945 sebagai konstitusi Negara dan beberapa Ketetapan MPR RI sebagai kesepakatan politik nasional maupun dalam berbagai UU seperti UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia dan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Kami juga menyadari adanya harapan baru di dalam UU baru tentang Pemilihan Umum untuk perluasan partisipasi politik masyarakat adat di masa yang akan datang dan dukungan dari UU Sistem Pendidikan Nasional yang membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari Negara.

Tanpa mengurangi rasa syukur dan penghargaan atas berbagai perubahan tersebut, Masyarakat Adat di Nusantara masih terus menghadapi beragam bentuk pemaksaan, penaklukan dan eksploitasi. Penguasaan negara atas sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih terus berlangsung. Berbagai kelompok masyarakat adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan. Pemerintah masih terus memberi Hak Guna Usaha (HGU) dan Kuasa Pertambangan yang baru di wilayah-wilayah adat kepada para pemilik modal tanpa pemberitahuan dan perundingan yang layak sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat setempat.

Kami menggarisbawahi keberadaan perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang masih bebas melakukan operasi penebangan di kawasan-kawasan hutan adat tanpa ada tindakan hukum dari pemerintah.

Kami juga mencatat kegagalan Otonomi Daerah untuk mengembalikan otonomi asli di desa sesuai adat setempat. Otonomi Daerah dihentikan hanya sampai di tingkat Kabupaten/ Kota demi kepentingan politik ekonomi segelintir elit daerah. Keberadaan

institusi Bina Teritorial TNI seperti BABINSA dan KORAMIL, yang selama ini menjadi sumber intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat, masih bercokol di wilayah-wilayah adat. Bahkan akhir-akhir ini aparat kepolisian, khususnya BRIMOB, telah menjadi sumber kekerasan baru bagi masyarakat adat di berbagai pelosok Nusantara. Pelanggaran hak-hak azasi manusia dan hak-hak dasar masyarakat adat oleh berbagai kekuatan dari pihak masih marak di Nusantara.

Keadaan seperti ini masih jauh dari cita-cita perjuangan kami untuk memulihkan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana telah diwariskan oleh leluhur kami sebagai hak-hak asal-asul dan hak-hak tradisional.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara, mewarisi hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri serta menyelenggarakan upacara-upacara adat sesuai dengan identitas budaya, nilai-nilai luhur dan pengetahuan asli yang terkandung di dalam sistem adat kami masing-masing.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara, mewarisi hak untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keseimbangan hidup bersama, baik di antara sesama masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan alam sekitarnya maupun antara masyarakat adat dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan sistem hukum dan dan kelem-bagaan adat kami masing-masing.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara, mewarisi hak untuk mengendalikan, mengelola dan memanfaatkan tanah dan segala kekayaan alam lainnya di dalam wilayah adat sesuai dengan kearifan tradisional kami masing-masing.

Untuk menegakkan hak-hak dasar ini, kami Masyarakat Adat Nusantara, yang merasa senasib dan sepenanggungan, telah bersepakat untuk meneguhkan kembali keputusan-keputusan Kongres Pertama Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta tahun 1999 untuk tetap berjuang bersama dalam satu wadah, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Mengacu pada sikap tersebut, kami yang tergabung di dalam AMAN menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melaksanakan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk mengkaji dan mencabut seluruh UU sektoral yang tidak mengakui dan bahkan melecehkan hak-hak masyarakat adat, diantaranya UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 11/1967 tentang Pertambangan, dan meng-gantinya dengan UU baru tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam yang menyeluruh, lintas sektoral dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
2. Menuntut kepada Pemerintah untuk mencabut seluruh ijin Kuasa Pertambangan, HPH, HGU, HPHTI, IHPHH, IPK dan ijin-ijin eksploitasi sumberdaya alam lainnya yang diberikan oleh pemerintah di dalam wilayah-wilayah adat tanpa persetujuan dari masyarakat adat setempat.
3. Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera membuat UU khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) Amandemen Kedua UUD 1945.
4. Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera melakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat adat dan segera menerapkan otonomi asli desa secara menyeluruh dan tuntas sesuai dengan sistem-sistem adat yang berlaku di masing-masing kelompok masyarakat adat.

5. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka.
6. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Nusantara.
7. Mendesak Pemerintah untuk menghapus keberadaan institusi militer yang bersifat tetap dari wilayah kehidupan masyarakat adat, dan mengembalikan wewenang lembaga-lembaga adat untuk menjaga ketertiban, keseimbangan dan keamanan masyarakat adat sesuai dengan hukum dan peradilan adat yang berlaku setempat.
8. Mendesak Pemerintah RI untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan melaksanakan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua Barat secara konsekuen dan melakukan dialog nasional yang melibatkan masyarakat adat di Papua.
9. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji dan meninjau ulang sistem hukum dan peradilan nasional sehingga menjamin keberadaan hukum dan peradilan adat yang beragam di Nusantara.
10. Mendesak Pemerintah untuk segera mencantumkan muatan lokal tentang adat istiadat, bahasa, kearifan lokal dan hukum adat dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dengan keterlibatan penuh masyarakat adat, baik dalam pembuatan kurikulumnya maupun pengajarannya.
11. Mendesak Pemerintah untuk segera menyediakan sarana pendidikan yang memadai di daerah terpencil, melakukan pemerataan penempatan guru dan meningkatkan anggaran pendidikan di dalam APBN dan APBD.
12. Menuntut Pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat adat dalam semua proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program yang menyangkut kehidupan masyarakat adat.

Sejalan dengan butir-butir pernyataan di atas, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat adat, khususnya yang bersekutu di dalam AMAN untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghapuskan secara tuntas sistem pemerintahan desa yang seragam (versi UU No. 5/1979) dan mengembalikannya ke sistem-sistem adat yang beragam berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat.
2. Menghentikan semua bentuk-bentuk pengrusakan alam secara legal maupun illegal di wilayah adat masing-masing yang telah nyata-nyata mengancam kehidupan masyarakat adat dan melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan hutan yang sudah rusak, dengan melibatkan masyarakat adat setempat.
3. Menjaga ketertiban dan kemandirian di wilayah adat masing-masing dan mencegah terjadinya konflik sosial, baik di antara sesama masyarakat adat maupun dengan masyarakat lainnya.
4. Memperkuat kelembagaan organisasi AMAN di tingkat komunitas, persekutuan dan regional.
5. Menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani dan mempertahankan

keberadaan AMAN sebagai organisasi tidak berafiliasi kepada Partai Politik manapun dalam menghadapi PEMILU 2004.

6. Mengkonsolidasikan diri di wilayah masing-masing untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat adat di masing-masing wilayah sesuai dengan arahan dan panduan yang akan dikeluarkan kemudian oleh Dewan AMAN.
7. Mengkonsolidasikan diri di wilayah masing-masing untuk mengembalikan fungsi hukum dan peradilan adat.

I.3 Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III 2007

Kongres II diselenggarakan mulai tanggal **17 - 21 Maret 2007** di Pontianak. Kongres ini ditutup oleh Mantan Presiden RI V Megawati Soekarnoputri. Bertolak dari kondisi politik dan sesuai dengan ketentuan dalam Statuta dan Anggaran Dasar organisasi, AMAN bekerjasama dengan para pendukungnya, AMAN menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Kedua (KMAN III) pada bulan Maret 2006 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Kongres masih konsisten dalam upaya memperjuangkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan bagi masyarakat adat dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam di era otonomi daerah yang sedang berlangsung, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bekerjasama dengan jaringan kerja ORNOP pendukungnya dari seluruh Indonesia sepakat untuk bekerja bersama-sama memfasilitasi serangkaian kegiatan di tingkat daerah, regional dan nasional yang dimaksudkan memperkuat otonomi masyarakat adat dalam tatanan penyelenggaraan negara Indonesia dan juga untuk menghadapi globalisasi yang bergulir dengan pesat.

Tujuan KMAN III secara umum adalah:

- a. Adanya petikan-petikan pelajaran (*lesson learned*) dari seluruh rangkaian pelaksanaan keputusan-keputusan KMAN III selama lebih dari 3 tahun terakhir.
- b. Adanya konsolidasi organisasi masyarakat adat dan terciptanya sinergi dari berbagai upaya perjuangan masyarakat adat di seluruh pelosok Indonesia.
- c. Adanya dukungan yang luas terhadap gerakan masyarakat adat melalui penguatan dan perluasan aliansi dengan berbagai kelompok pro demokrasi.

Tujuan Khusus KMAN III adalah:

- a. Penataan organisasi yang berpusat pada kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang baik (kaderisasi - jangka panjang)
- b. Dirumuskannya garis-garis perjuangan (*platform*) yang jelas dan tajam sebagai arahan strategis bagi organisasi dan kerangka program kerja yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat nusantara.
- c. Merespon situasi politik, sosial dan budaya yang sedang berkembang dan sekaligus menunjukkan kapasitas politik masyarakat adat.

III. Hasil

Kongres antara lain menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN terkonsolidasikan dengan baik dalam organisasi-organisasi masyarakat adat di daerah masing-masing.
- b. Masyarakat adat memiliki posisi tawar politik yang lebih besar dalam proses politik yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berlangsung.
- c. AMAN memiliki struktur organisasi yang efektif mewedahi aspirasi dan melayani komunitas-komunitas adat yang menjadi anggotanya.
- d. AMAN memiliki garis-garis perjuangan sebagai arahan strategis organisasi dan kerangka program kerja yang lebih realistis.
- e. Isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat adat di Indonesia diketahui dan dipahami oleh publik, baik pada tingkat daerah, regional dan nasional maupun pada tingkat internasional.
- f. Terakomodasikannya isu-isu masyarakat adat dalam agenda politik nasional.

Dalam KMAN III di Pontianak ini diusulkan oleh peserta agar organisasi AMAN dibedakan ke dalam tiga jenjang seperti tingkat pemerintahan yang ada, yakni tingkat kota atau kabupaten, provinsi, dan nasional. Dengan diusulkannya konsep ini justru membuat Jaringan Komunitas Adat Aceh (JKMA) keluar dari AMAN. Konsep penguatan struktur organisasi masyarakat adat masih belum dapat diterima oleh JKMA karena dinilai dianggap berorientasi sentralistik. JKMA mengusulkan agar masyarakat adat tidak dibedakan ke dalam jenjang-jenjang organisasi di berbagai tingkat wilayah. (sumber: <http://www.cabiklunik.blogspot.com>). Sementara itu menurut Deputi JKMA Aceh Eeng Darmi JKMA tidak pernah memandang masyarakat adat berjenjang karena misi JKMA salah satunya adalah hendak memberikan kesetaraan kepada masyarakat adat. (Harian Aceh, 21 Maret 2007).

1.4 Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV 2012

Kongres Masyarakat Adat Nusantara IV (KMAN IV) merupakan puncak dari sebuah proses lima tahunan dalam gerakan masyarakat adat di Indonesia. Sejak penyelenggaraannya yang pertama (KMAN I), Maret 1999, KKMA telah menjadi penanda kebangkitan gerakan masyarakat adat di Indonesia. Sejak reformasi gerakan masyarakat adat yang sebelumnya merupakan upaya-upaya sporadis mulai menemukan ruang untuk berkonsolidasi dan berjejaring sejak terlak-sananya kongres pertama hingga terbentuk wadah AMAN.

Dalam organisasi ini, masyarakat adat bersama-sama berjuang menegakkan hak-haknya, memperkuat dirinya sebagai wujud kelompok masyarakat dengan sejarah dan hak asal-usul yang jelas, untuk mampu mengatur dan mengurus diri sendiri secara demokratis dan berkeadilan, termasuk mengelola sumberdaya alam di wilayah adat masing-masing secara berkelanjutan. Dalam perjuangannya itu masyarakat adat nusantara, telah mendorong dan mengembangkan AMAN sebagai wadah perjuangan yang makin mendapat ruang di lingkup masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia untuk bersama-sama elemen lainnya mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. AMAN telah berkembang sebagai salah satu elemen masyarakat sipil dan menjadi pendorong percepatan gerakan sosial yang lebih luas untuk mewujudkan tatanan politik demokrasi partisipatif dan memajukan penghargaan atas

hak-hak azasi manusia dan kelestarian ekologis, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-empat bermaksud untuk melihat dan menilai kembali seluruh kinerja serta capaian-capaian maupun hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam lima tahun perjalanan AMAN. Kongres diselenggarakan di kota Tobelo, Halmahera Utara, 19-25 April 2011. Tema yang dipilih dalam kongres itu adalah: “Memperkokuh Kebersamaan, Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat”.

Hasil Kongres

Sebagai salah satu bagian terpenting dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV di Tobelo, Halmahera Utara, komunitas-komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) membagi anggota-anggotanya ke dalam tiga komisi untuk membahas masalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) AMAN, kerangka program AMAN ke depannya, serta serangkaian rekomendasi.

Komisi I: melakukan beberapa perombakan terhadap AD AMAN, yang memiliki isi-isi pokok berupa nama, bentuk, waktu dan kedudukan, kedaulatan, sifat dan fungsi, azas, visi, misi, tujuan dan prinsip, doktrin, atribut, keanggotaan dan kader, kongres, musyawarah dan rapat-rapat, pengambilan keputusan, pendapatan dan kekayaan, sanksi, hingga pembubaran dan aturan peralihan.

Dari perombakan-perombakan yang dilakukan pada lebih dari 40 pasal, terdapat empat perubahan penting. Dalam hal struktur kepemimpinan, Dewan Nasional AMAN (DAMAN) yang tadinya terdiri dari 42 orang kini hanya berjumlah 14 orang, terdiri dari dua orang dari masing-masing region yang berjumlah tujuh: Sumatra, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dalam hal pemilihan anggota DAMAN, terdapat penegasan dalam hal perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, masing-masing region mencalonkan satu laki-laki dan satu perempuan untuk duduk di DAMAN. Perubahan lain adalah bahwa anggota baru AMAN dapat didaftarkan pada kongres.

Komisi II: untuk menjawab berbagai problematika yang terjadi di komunitas-komunitas adat di seantero nusantara, maka kongres menetapkan beberapa kerangka Program Kerja AMAN untuk lima tahun ke depan. Di bidang sosial budaya, AMAN perlu mengembangkan dan mendokumentasikan seluruh budaya adat baik secara digital maupun non-digital kepada generasi muda penerus adat demi pelestarian yang berkelanjutan. Selain itu dibuat strategi promosi budaya adat guna memperkenalkannya kepada dunia. Sedangkan di bidang ekonomi, potensi-potensi ekonomi komunitas berdasarkan eko-region dan pengembangan basis-basis ekonomi masyarakat adat yang berprinsip pada dasar nilai-nilai budaya adat dinilai perlu diangkat.

Di bidang penguatan organisasi, perlu ada pengembangan sistem pembelaan masyarakat adat, sistem informasi dan komunikasi, meningkatkan kapasitas kader, perlindungan hak-hak, pembentukan unit usaha, membangun jaringan, serta penguatan *knowledge sharing* antarmasyarakat adat. Terakhir, namun tak kalah pentingnya, program-program bidang politik harus menyelenggarakan pendidikan politik untuk

masyarakat adat serta mendorong pemerintah dan penegak hukum untuk mengakui peraditan adat secara total. Dalam jangka pendek, program yang wajib dijalankan antara lain advokasi AMAN untuk RUU Desa dengan beranjak dari substansi yang ada dianggap penting oleh AMAN. Selain itu, AMAN harus tetap mengawal pembentukan RUU PPMA di DPR, serta memperluas hubungan antara organisasi masyarakat adat dengan masyarakat sipil lainnya.

Komisi 3: Dalam rapatnya di Aula Gonzalo, Komisi 3 menjabarkan bagai-mana masyarakat adat menyambut baik berbagai perkembangan dalam dinamika legislasi nasional yang memihak kepada masyarakat adat. Akan tetapi, AMAN melihat bahwa masih banyak tantangan besar dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun wilayah dan sumber daya alam. Eksistensi, identitas, dan ketahanan tatanan kehidupan tradisional komunitas-komunitas adat masih terancam oleh perkembangan pembangunan yang eksploitatif dan ekspansif, praktik-praktik penghilangan wilayah adat, serta berbagai kekerasan yang melang-gar hak-hak azasi manusia. Atas kurangnya keberpihakan — dan atas besarnya penindasan — Negara pada masyarakat adat, maka Komisi 3 menyatakan dengan tegas: *“Jika negara tidak bersama beta, beta tetap berdaulat atas tanah air beta!”*

Sebagai pewaris sah tanah dan segala sumber daya alam di Nusantara, serta pewaris bentuk-bentuk kebudayaan asli, maka Aliansi Masyarakat Adat Nusan-tara melalui sidang Komisi 3 di KMAN IV telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk berbagai pihak terkait demi penguatan komunitas-komunitas masyarakat adat.

Terkait kebijakan negara, Komisi 3 memberi rekomendasi agar komunitas-komunitas adat yang tergabung dalam AMAN agar mendesak pemerintah untuk, antara lain: mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, mencabut berbagai undang-undang yang menjadi sumber konflik dan pelanggaran HAM di komunitas-komunitas adat dan menggantinya dengan produk-produk legal yang memberi pengakuan formal atas wilayah-wilayah adat berikut pengelolaannya oleh komunitas-komunitas adat.

Terkait hak dan prinsip atas *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), AMAN didesak untuk mengusahakan agar setiap FPIC disosialisasikan kepada seluruh tingkat pemerintahan agar menjadi landasan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta program. Sedangkan terkait perubahan iklim, krisis pangan dan energi, serta terkait REDD, Komisi 3 menekankan kembali pentingnya perlindungan atas lahan-lahan produktif, sumber-sumber pangan dan kelautan, serta sumber-sumber air. Komisi ini juga menyatakan bahwa kedaulatan pangan yang bertumpu pada kekuatan lokal tidak sama dengan ketahanan pangan yang dapat menggunakan impor sebagai solusi. Komisi ini juga mendorong identifikasi dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan, serta menyatakan perlunya jaminan pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam semua inisiatif REDD.

Terkait dengan pertanahan, dimunculkan rekomendasi-rekomendasi agar kebijakan-kebijakan — juga MoU antara BPN dan AMAN — dibuat serta ditata berlandaskan pengakuan atas wilayah-wilayah adat. Maka dari itu, hak-hak guna usaha dan bangunan yang bermasalah di wilayah-wilayah masyarakat adat harus dicabut. Sementara itu, terkait dengan Departemen Sosial (terutama terkait program Komunitas Adat Terpencil) dan Kementerian Dalam Negeri, diusulkan agar program-

program pember-dayaan komunitas adat dan pemekaran-pemekaran wilayah memperhatikan kebutuhan serta sistem budaya masyarakat-masyarakat adat dan dilandaskan atas prinsip FPIC demi menghindari konflik. Jika konflik telah muncul, pemerintah harus mengakomodir penyelesaiannya. Selain itu, diperlukan pengakuan formal atas berbagai kepercayaan atau agama asli di komunitas-komunitas adat. Dinilai pula bahwa keterlibatan perempuan-perempuan adat — terutama demi penegakan kesetaraan gender — serta para pemuda dan pemudi adat harus terus ditingkatkan.

J. Kongres Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah

Kongres Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah telah berlangsung 2 kali, yakni: (1) tanggal **26 - 27 Juni 2003** di Palangkaraya, dan (2) tanggal **6 - 8 November 2006** juga di Palangkaraya. Hasil kongres masing-masing masyarakat adat adalah sebagai berikut.

J.1. Kongres Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah I, 2003 (data belum ditemukan).

J.2. Kongres Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah II, 2006

Masyarakat adat Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan kongres sebanyak dua kali. Kongres pertama diselenggarakan pada tahun 2003. Kongres kedua diselenggarakan pada tanggal **6 - 8 November 2006** di Palangkaraya. Kongres II menghasilkan resolusi sebagai berikut.

RESOLUSI KONGRES ALIANSI MASYARAKAT ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH (AMAD-KT) II, 2006

Kami seluruh peserta kongres aliansi Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah II yang diselenggarakan tanggal 6 - 8 November 2006 di Palangkaraya, menyadari bahwa selama lebih dari 7 tahun sejak berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah terjadi perubahan-perubahan berbagai kebijakan Negara yang terkait dengan keberadaan Masyarakat Adat dan hak-hak dasarnya.

Kami mengingatkan kembali semakin sulitnya pengakuan Negara terhadap hak-hak Masyarakat Adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam amandemen ke II UUD 1945 sebagai konstitusi Negara dan beberapa ketetapan MPR RI sebagai kesepakatan politik nasional maupun dalam berbagai undang-undang seperti No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah, UU No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia dan mungkin UU/PP lainnya yang pernah ramah terhadap Masyarakat Adat.

Kami juga menyadari adanya harapan baru di dalam UU baru tentang pemilihan umum untuk perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat dimasa yang akan datang dan dukungan dari UU system pendidikan nasional yang membuka akses yang lebih luas bagi Masyarakat Adat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan bagi Negara.

Tanpa mengurangi rasa syukur dan penghargaan atas berbagai perubahan tersebut, kami Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah masih menghadapi beragam bentuk pemaksaan, penaklukan dan eksploitasi. Penguasaan besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih berlangsung. Melalui pencurian pengambilan peta konsesi, peta kerja dan peta kontrak karya, diberbagai wilayah Masyarakat Adat Kalimantan Tengah masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan pemerintah masih terus memberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan modal tanpa pemberitahuan dan perundingan yang layak dan setara sesuai dengan Hukum adat yang berlaku di Masyarakat Adat.

Kami menggaris bawahi keberadaan perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang masih bebas melakukan operasi penebangan dan mencuri dikawasan-kawasan adat tanpa ada tindakan hukum dari pemerintahan (baik yang legal aksi maupun yang illegal aksi) mencuri itupun tidak mendapat sentuhan hukum oleh aparat hukum Negara maupun dari departemen/instansi terkait.

Kami juga mencatat kegagalan otonomi daerah untuk mengembalikan otonomi asli desa sesuai adat setempat. Otonomi Daerah dihentikan hanya sampai ditingkat Kabupaten/kota demi kepentingan politik ekonomi segelintir elit daerah (eksekutif, legislatif dan partai politik). Keberadaan bina teritorial TNI seperti BABINSA, KORAMIL, POLSEK dan BRIMOB, telah menjadi sumber intimidasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat, masih bercokol diwilayah Masyarakat Adat. Bahkan akhir-akhir ini aparat kepolisian, khususnya BRIMOB telah menjadi alat kekerasan baru bagi Masyarakat Adat Dayak diberbagai pelosok Kalimantan Tengah. Pelanggaran Hak Azasi manusia dan hak-hak dasar Masyarakat Adat oleh berbagai kekuatan dari berbagai pihak masih marak di Kalimantan Tengah (di pertambangan, perkebunan, HPH, *illegal logging* dan lain-lain).

Keadaan seperti ini masih jauh dari cita-cita dan perjuangan kami untuk memulihkan kedaulatan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana telah diwariskan oleh leluhur kami sebagai hak-hak asal usul dan hak-hak tradisional kami masih terganggu/dihambat oleh kebijakan Negara yang belum sepenuhnya berpihak kepada Masyarakat Adat.

Kami Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah mewarisi hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri serta menyelenggarakan upacara-upacara adat sesuai dengan identitas budaya, nilai-nilai luhur dan pengetahuan asli yang terkandung di dalam sistem adat kami masing-masing, untuk itu kami hadir dan aktif dalam kongres Aliansi Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah ini menyampaikan isi hati dan harapan kami kepada pemerintahan dan lembaga tinggi Negara lainnya, seperti :

1. Meminta kepada presiden RI dan menteri terkait bersama dengan DPR RI dan DPD untuk membatalkan segala produk hukum yang bertentangan dengan hak-hak masyarakat adapt, bersifat discriminative, dan melanggar HAM yang sekarang sedang dibahas di DPR RI untuk tidak dilanjutkan. Hal ini demi menjaga keberagaman budaya dan agama Masyarakat Adat Nusantara agar tetap aman, tentram, damai dan rukun saling menghormati, saling menjaga serta memelihara kehidupan NKRI dalam satu nuansa Bhineka Tunggal Ika yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mendesak pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersa-

DPR RI sebagai legislator untuk segera melaksanakan TAP MPR No. IX/2001 tentang pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya pasal 5 huruf j. dan mengkaji serta mencabut seluruh Undang-Undang sektoral yang tidak mengakui keberadaan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah, bahkan UU tersebut melecehkan hak-hak dasar Masyarakat Adat Dayak dan Masyarakat Adat diseluruh penjuru Nusantara. Diantara UU dimaksud adalah UU No. 11 tahun 1967 tentang pertambangan, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang pertambangan di Hutan Lindung maupun UU lainnya yang tidak akomodatif terhadap keberadaan Masyarakat Adat nusantara (khususnya Kalimantan Tengah). Salah satu dari isinya adalah kalimat yang menyatakan “sepanjang masih ada masyarakat hukum adat“. Karena memang masih ada upaya pemerintah dan kalangan tertentu untuk menghilangkan keberadaan Masyarakat dan hukum adat dari wilayah adat, khususnya di Kalimantan Tengah.

3. Meminta pemerintah NKRI untuk mencabut seluruh izin sekurangnya melakukakan audit Kuasa Pertambangan dan HPH, (nama-nama perusahaan terlampir).
4. Mendesak Pemerintah NKRI dan DPR RI untuk segera merumuskan dan menetapkan RUU Pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar Masyarakat Adat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 18 B ayat 2 amandemen kedua UUD 1945 menjadi UU NKRI.
5. Mendesak Pemerintah dan DPRD provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota se Kalimantan Tengah untuk mengatur dalam peraturan daerah tentang hak-hak, kewajiban dan kewenangan masyarakat adat Kalimantan Tengah.
6. Mendesak Pemerintah NKRI dan DPR RI untuk merevisi/ merubah substansi UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah agar lebih menjamin aspirasi Masyarakat Adat dan menghilangkan arogansi para kepala daerah Kabupaten dalam kelola aset dan ekonomi daerah. Kemudian UU Otonomi Daerah harus menguatkan Otonomi Masyarakat Adat yang sudah berjalan sejak lama dengan adat istiadat dan hukum adat yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan sosialnya.
7. Mendesak Pemerintah NKRI dan DPR RI konsisten menumbuh-kembangkan demokrasi ekonomi melalui gerakan ekonomi rakyat sesuai dengan amanat dari pasal 33 UUD '45.
8. Mendesak Pemerintah NKRI dan DPR RI untuk secepatnya meratifikasi Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) No. 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat Nusantara di negara-negara mereka, khususnya untuk Masyarakat Adat Nusantara yang berada di Kalimantan Tengah.
9. Mendesak Pemerintah NKRI untuk menghentikan dan menghapus semua bentuk dan cara kekerasan politik dan fisik yang dilakukan aparat Negara kepada Masyarakat Adat ditanah adat Dayak Tambun Bungai Kalimantan Tengah.
10. Mendesak Pemerintah NKRI untuk menarik dan meniadakan keberadaan militer dan polisi yang bermaksud menguasai wilayah tanah Adat Dayak Kalimantan Tengah. Hal ini agar dapat memberikan peran dan wewenang peran institusi-institusi adat, khususnya Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah untuk dapat berperan sesuai dengan fungsinya berdasarkan hukum dan sistem peradilan

- adat di masing-masing suku daerah-daerah aliran sungai di Kalimantan Tengah.
11. Mendesak Pemerintah NKRI untuk secara cerdas dan bertanggungjawab mengkaji serta meninjau ulang sistem hukum Nasional dan Peradilan Nasional yang benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga Negara. Serta dapat menjamin terjaganya keberadaan hukum adat dan peradilan adat Dayak yang beragam pada daerah Aliran Sungai maupun masing-masing suku Dayak Kalimantan Tengah.
 12. Mendesak Pemerintah NKRI untuk segera dan secara cerdas merumuskan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan adanya kurikulum pendidikan muatan lokal tentang adat istiadat suku/bahasa serta kearifan lokal. Karena keberadaan suku, bahasa maupun Hukum Adat di Kalimantan Tengah menyimpan banyak potensi untuk materi dan bahan pendidikan yang adaptif.
 13. Mendesak Pemerintah NKRI untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah atau undang-undang yang menjamin keselamatan dan melindungi keberlanjutan hutan tropis disemua wilayah adat yang didalamnya berisi hak-hak dasar kehidupan sosial dan budaya Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan hampir hilang keberadaannya oleh HPH, HTI, PIR. Pertambangan, Perkebunan Sawit, Transmigrasi, serta kawasan hutan konservasi dan Taman Nasional yang mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.
 14. Mendesak Pemerintah NKRI untuk mengusut tuntas para pelaku kejahatan keuangan Negara (APBN), keuangan daerah (APBD-PAD) melalui proyek Pembangunan Daerah yang mengatas namakan kepentingan Masyarakat Adat. Mengusut tuntas para pelaku pencurian dan penyelundupan hasil hutan kayu oleh seluruh HPH, HTI, IPK perkebunan dan IPK Pertambangan fiktif yang merugikan Negara. Menghentikan semua keinginan siapapun investornya yang mau menebang, mengganti dan mengalihfungsikan hutan Kalimantan. Saat ini yang harus dilakukan adalah menanam kembali bibit lokal Kalimantan melalui pola kerjasama dengan Masyarakat Adat pada wilayah adat (komunitas kampung) agar dapat menjadi jaminan keberlangsungan hutan tropis.
 15. Menuntut Pemerintah NKRI untuk segera mencukupi, melengkapi, mengganti serta membangun sarana pendidikan formal yang memadai di wilayah terpencil Kalimantan Tengah. Serta melakukan pemerataan penempatan guru Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama yang diiringi dengan peningkatan anggaran pendidikan dan kesejahteraan para guru.
 16. Menuntut Pemerintah NKRI untuk menjamin keterlibatan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah dalam semua proses pembuatan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan Negara dalam program-program pemberdayaan rakyat yang akan bersentuhan atau berlangsung dalam kehidupan Masyarakat Adat, khususnya di Kalimantan Tengah.
 17. Menuntut Pemerintah NKRI untuk tidak membiarkan berbagai pelanggaran HAM, pelecehan terhadap keberlangsungan hidup sosial, ekonomi adat istiadat, diwilayah adat dan lingkungan hidup Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah.

Dengan resolusi hasil kongres Aliansi Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah tersebut diatas yang terdiri dari 17 butir, maka kami peserta kongres Aliansi Masyarakat

Adat Dayak Kalimantan Tengah II tanggal 6-8 November 2006, menyerukan kepada seluruh warga Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah untuk :

1. Menghapuskan atau meninggalkan system pemerintahan desa yang beragam seperti yang diatur dalam UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian mengembalikan Pemerintahan Desa kepada sistem-sistem pemerintahan adat kampung yang beragam berdasarkan asal usul adat istiadat masing-masing komunitas suku.
2. Wajib menghentikan semua praktek-praktek pengrusakan terhadap sumber daya alam seperti kayu hutan, tanah adat, sungai, gunung dan bukit maupun flora dan fauna di dalamnya, yang dilakukan oleh para perusak yang legal ataupun perusak illegal diwilayah hukum adat Kalimantan tengah. Kemudian mulailah melakukan gerakan penyelamatan Sumber Daya Alam melalui pelarangan masuk, pengaturan yang ketat, penanaman bibit-bibit baru, dan rehabilitasi hutan alam di lahan yang kritis pada wilayah adat (kampung). Masyarakat adat harus berjuang dalam penyelamatan alam dan lingkungan sendiri.
3. Wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam wilayah masing-masing Masyarakat Adat serta mencegah terjadinya konflik sosial yang ber-sifat anarkis, baik dengan sesama warga masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah maupun dengan warga masyarakat lainnya (pendatang baru) di bumi tambun bungai ini.
4. Wajib menjunjung tinggi dan memperkuat keberadaan lembaga/organisasi AMAN dan AMAD Kalimantan Tengah, mulai dari tingkat Komunitas suku/ kampung, DAS sampai ketinggian daerah Kabupaten, Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh wilayah nusantara. Karena organisasi ini adalah satu-satunya organisasi Masyarakat Adat yang umum dan nasional.
5. Wajib menggunakan hak pilih dengan kehendak hati nurani masing-masing individu/pribadi dan mempertahankan keberadaan Organisasi AMAN dan AMAD sebagai organisasi yang tidak berafiliasi/tidak menjadi anggota terbuka/tertutup kepada partai-partai politik maupun para calon peserta pemilihan kepala daerah kabupaten maupun provinsi di tahun-tahun yang akan datang.
6. Wajib merapatkan kekuatan dan kekompakan anggota-anggota/warga masyarakat adat dayak di wilayah masing-masing. Di DAS besar dan kecil guna memfungsikan partisipasi politik Masyarakat Adat di masing-masing tempat sesuai dengan arahan dan panduan yang akan ditentukan kemudian oleh Dewan Aliansi Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah.
7. Wajib berjuang dimasing-masing komunitas suku/bahasa dan DAS-DAS dalam upaya pengembalian fungsi-fungsi dan peran hukum dan peradilan adat kita.
8. Wajib menghargai keadilan dan kesetaraan gender (persamaan hak antara perempuan dan laki-laki), mendukung terpenuhinya hak-hak, partisipasi dan peran perempuan diruang publik.
9. Semua warga Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah wajib berjuang membela diri, mempertahankan hak-hak wilayah adat, hutan adat, hukum adat masing-masing suku, kampung-kampung dan DAS di Kalimantan Tengah.
10. Menolak konservasi kawasan hutan dan Taman Nasional yang mengancam

keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

11. Semua Damang kepala adat dan calon Damang wajib berjuang untuk mempertahankan hukum adat dan memperjuangkan peradilan adat di masing-masing suku/wilayah dan DAS-DAS.
12. Semua warga Masyarakat Adat harus mempertahankan wibawa Damang dan Kepala Adat sebagai *public figure* yang harus berasal dari tokoh-tokoh yang tahu dan menghormati keaslian adat yang bersumber dari suku asli setempat dan kepercayaan asli masyarakat setempat. Karena Damang adalah jabatan profesional bukan jabatan politis kekuasaan birokrat.

HIDUP MASYARAKAT ADAT !!!

Palangkaraya, 8 November 2006

Peserta kongres Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah II: *“Yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan adalah dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan...”*.

K. Kongres Masyarakat Banda, Maluku 2010

Meskipun namanya Kongres Masyarakat Adat Banda, namun dalam kongres ini dibahas pula hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Banda. Kongres Masyarakat Banda se-Indonesia yang digelar **25 - 26 Juli 2010** di Istana Mini, Banda, Kabupaten Maluku Tengah bersamaan dengan Sail Banda. Yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penyelenggara adalah Prof. Dr. HM. Burhan Bungin M.Si.

Ada tiga agenda besar dibahas, yakni: (1) mengangkat kembali seni dan budaya Banda baik di tingkat domestik maupun internasional; (2) memperjuangkan Pulau Banda menjadi kawasan ekonomi khusus; (3) membentuk organisasi dan identitas orang Banda, karena selama ini organisasi Banda belum ada di tingkat nasional. Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kongres itu, antara lain: (1) Prof. Dr. Sam Abede Pareno, MM, Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Universitas Dr. Soetomo, yang juga sebagai anggota panitia kongres Masyarakat Banda se Indonesia; (2) Prof. Dr. Samuel Hatane, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Petra Surabaya; (3) Dr. Slamet Riyadi, dosen Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya; (4) Dr. Nurhadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta; (5) Dr. Masudi, dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; (6) Prof. Dr. Burhan Bungin, Msi, dosen Untag Surabaya; (7) Prof. Dr. Hamadi B Hussein MA, Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya; (8) Laksamana Muda Endy S M.Mpd; dan (9) Des Alwi selaku tokoh masyarakat Banda. Kongres tingkat nasional pertama ini dihadiri 300 peserta dari seluruh Indonesia. Kongres dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff dan ditutup oleh Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal. Salah satu rekomendasi kongres adalah tentang perlunya pembentukan Ikatan Keluarga Masyarakat Banda (IKMB) di seluruh Indonesia. (Sumber: Ambon Ekspres 27 Juli 2010).

L. Kongres Masyarakat Adat Osing, Banyuwangi, 2011

Gagasan untuk menyelenggarakan kongres ini datang dari para budayawan Banyuwangi. Kongres yang memilih tema “Peningkatan Peran Dan Kemandirian Masyarakat Adat Dalam Membentuk Karakter Bangsa serta Memperkokoh NKRI” diselenggarakan mulai tanggal **14 - 15 Desember 2011**. Tujuannya selain untuk mengenalkan adat istiadat suku Osing, tujuan lebih besar adalah mempersatukan dan memelihara budaya suku Osing di kabupaten setempat. dapat mempersatukan masyarakat adat Osing dan para budayawan di Banyuwangi. Melalui kongres ini dapat dipertemukan masyarakat adat dengan pemerintah karena selama ini masyarakat adat dianggap sebagai kelompok tertinggal dan terbelakang, padahal mereka ingin melestarikan kebudayaan tradisional secara utuh.

Masyarakat Osing Banyuwangi telah bergabung dengan AMAN selama 13 tahun bersama sekitar 1.696 orang masyarakat adat lainnya di Indonesia. Sekretaris AMAN, Abdon Nababan menyatakan bahwa pelaksanaan “Kongres Masyarakat Adat Banyuwangi” dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah, sehingga dapat bersatu untuk mem-bangun bangsa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat.

Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam sambutan pembukaan mengatakan, kongres adat diharapkan bisa menjembatani industri pariwisata dengan kebudayaan adat dan memberikan masukan positif bagi pemerintah. Melalui kongres seluruh warga Osing bisa menyamakan persepsi untuk memajukan Kabupaten Banyuwangi melalui kebudayaan. (Sumber: Kompas.com).

BAB III

BIDANG SEJARAH, ARKEOLOGI DAN EPIGRAFI

Selain menyelenggarakan Kongres Sejarah, Indonesia juga telah 3 kali menjadi tuan rumah konferensi internasional Asosiasi Peneliti Sejarah Asia atau *International Associations of Historian of Asia* (IAHA). Konferensi pertama tahun 1974 di Yogyakarta, tahun 1998 di Jakarta, ketiga di Solo, Jawa Tengah, pada 2-6 Juli 2012. Konferensi IAHA yang ke-22 itu bertujuan mengkaji dan mempromosikan penelitian sejarah Asia. Tema yang diusung dalam konferensi tahun ini adalah “*Remembering the Past, Experience the Present, Exploring the Future*”.

A. Kongres Sejarah

Sebagai salah satu aspek kebudayaan, sejarah juga menghadapi berbagai masalah yang perlu diperbincangkan dalam forum kongres. Masalah isi, akurasi data sejarah, metode penulisan, tujuan, periodisasi, hingga pada masalah peran penguasa (pemerintah) dalam mempengaruhi penulisan sejarah, memerlukan pembahasan yang serius dan mendalam. Perdebatan tentang masalah yang terakhir, yaitu masalah campur tangan penguasa atau pemerintah mengenai kerangka maupun isi penulisan sejarah hampir selalu muncul dalam kongres.

Dalam kaitan dengan penulisan sejarah, setelah Indonesia merdeka para ahli sejarah menilai berbagai buku sejarah yang disusun oleh orang Belanda merupakan buah pemikiran dari hasil penglihatan dari balik kaca mata penjajah. Penulisan sejarah yang disebutnya sebagai “*neerlandosentris*” itu menurut pandangan pada penulis sejarah Indonesia tidak tepat. Penulisan sejarah bangsa Indonesia harus ditulis dari balik kaca mata Indonesia, dan cara penulisan seperti itu kemudian dikenal dengan sebutan penulisan sejarah yang indonesiasentris. Untuk menuju ke arah penulisan sejarah yang indonesiasentris itu dikeluarkanlah Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 28201/5 tanggal 13 Maret 1957 untuk menyelenggarakan Seminar Sejarah Nasional I pada tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 1957 di Yogyakarta.

Setelah Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957 disusul oleh penyelenggaraan

seminar, konferensi dan kongres berikutnya, dengan urutan sbb.:

1. Seminar Sejarah Nasional Indonesia I di Yogyakarta, 1957.
2. Seminar Sejarah Nasional Indonesia II di Yogyakarta, 1970.
3. Seminar Sejarah Nasional Indonesia III di Jakarta, 1981.
4. Seminar Sejarah Nasional Indonesia IV di Yogyakarta, 1985.
5. Seminar Sejarah Nasional Indonesia V di Semarang, 1991.
6. Kongres Sejarah Nasional Indonesia VI di Jakarta, 1996.
7. Konferensi Sejarah Nasional Indonesia VII di Jakarta, 2001.
8. Konferensi Sejarah Nasional Indonesia VIII di Jakarta, 2006.
9. Konferensi Sejarah Nasional Indonesia IX di Jakarta, 2011.

Data mengenai penyelenggaraan masing-masing seminar, kongres atau konferensi sejarah belum ditemukan. Gambaran secara singkat adalah sebagai berikut.

A.1 Seminar Sejarah Nasional I 1957

Seminar ini menjadi sangat penting yang menjadi peletak dasar penulisan sejarah Indonesia. Para ahli sejarah berdiskusi membahas topik-topik makalah sebagai berikut:

1. Konsep filosofis sejarah nasional;
2. Periodisasi sejarah Indonesia;
3. Syarat penulisan buku pelajaran sejarah nasional Indonesia;
4. Pengajaran Sejarah Indonesia di sekolah-sekolah;
5. Pendidikan Sejarawan;
6. Pendidikan dan pengajaran bahan-bahan sejarah.

Dalam hal penyelenggaraan seminar ini pemerintah memiliki kepentingan. Sebagai bangsa yang saat itu belum lama merdeka, sangat memerlukan bahan ajar sejarah bangsa dalam rangka membangun karakter pada diri masyarakat Indonesia, melalui pengajaran sejarah. Bahan ajar sejarah yang indonesiasentris, meskipun dalam pembicaraan yang berkembang pada seminar ini menurut Moh. Ali, forum itu belum mengarah pada penulisan dan pengajaran sejarah Indonesia sebagai Sejarah Nasional. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada saat itu di Indonesia belum banyak ahli sejarah yang benar-benar berlatar belakang pendidikan sejarah atau sejarawan. Dalam forum tersebut, pembicaraan yang lebih menonjol yaitu pemikiran mengenai mungkin tidaknya penyusunan suatu filsafat Sejarah Nasional. Pembicaraan tentang filsafat sejarah nasional banyak dibicarakan oleh Moh. Yamin dan Sujatmoko. (Sumber: **Error! Hyperlink reference not valid.**[sejarah-kelas-x/perkembangan-penulisan-sejarah-di-indonesia/](#)).

Pentingnya penulisan sejarah yang Indonesia sentris tidak selesai setelah seminar sejarah yang pertama di Yogya. Pembicaraan hal tersebut terus bergulir. Untuk mewujudkan penulisan sejarah yang indonesiasentris, pemerintah kemudian membuat suatu team yang bertugas melaksanakan penulisan kembali Sejarah Indonesia. Team ini dibentuk pada tahun 1963, akan tetapi team ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan terjadinya ketegangan sosial dan krisis politik negeri kita pada saat itu.

A.2 Seminar Sejarah Nasional Indonesia II 1970

Semangat penulisan sejarah yang Indonesia sentris muncul kembali dalam Seminar Sejarah Nasional Kedua di Yogyakarta pada tahun 1970. Seminar ini relatif lebih berkualitas dibandingkan dengan seminar yang pertama. Hal ini dikarenakan mulai adanya generasi baru sejarawan yang mempresentasikan kertas kerjanya. Pokok pembicaraan sudah mulai mengarah kepada periodisasi Sejarah Indonesia, yaitu mulai dari periode prasejarah sampai dengan periode yang paling modern.

Dalam seminar yang kedua ini juga muncul perkembangan pemikiran, yaitu perlunya penulisan buku sejarah untuk digunakan di sekolah. Keperluan ini sangat mendesak. Untuk melaksanakan aspirasi yang berkembang dalam seminar sejarah yang kedua itu, akhirnya pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK. No. 0173/1970 mengangkat Panitia Penyusunan Buku Standard Sejarah Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila yang dapat digunakan di Perguruan Tinggi dan sekaligus akan dijadikan bahan dari buku teks sejarah untuk sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Panitia ini berhasil menyusun buku teks Sejarah Nasional sebanyak enam jilid. Buku tersebut disusun dengan periodisasi sebagai berikut.

1. Jilid I, zaman prasejarah di Indonesia.
2. Jilid II, zaman kuno (awal masehi sampai 1600 M).
3. Jilid III, zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (1600 M-1800 M).
4. Jilid IV, abad kesembilan belas (1800 M-1900 M).
5. Jilid V, zaman kebangkitan nasional dan masa akhir Hindia Belanda (1800-1900 M)
6. Jilid VI zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia (1942-sekarang).

Kegiatan seminar tidak berhenti sampai seminar sejarah yang kedua. Dalam beberapa waktu kemudian, diadakan kembali Seminar Sejarah Nasional.

A.3 Seminar Sejarah Nasional Indonesia III 1981

Seminar Sejarah Nasional yang ketiga di Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 1981.

A.4 Seminar Sejarah Nasional Indonesia IV 1985.

Seminar keempat di Yogyakarta pada tanggal 16 sampai dengan 19 Desember 1985.

A.5 Seminar Sejarah Nasional Indonesia V 1991

Seminar SNI V diselenggarakan di Semarang tahun 1991

A.6 Kongres Sejarah Nasional Indonesia VI 1996.

Dalam forum ini istilah yang digunakan bukan “seminar” tetapi diganti dengan

“kongres”, yakni Kongres Nasional Sejarah diselenggarakan di Jakarta tahun 1996. Alasannya, dalam kegiatan Seminar Sejarah ini selalu diikuti oleh Kongres Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Dalam acara kongres itu digunakan untuk membahas masalah organisasi, dalam hal ini organisasi baik mengenai Angaran Dasar, Angaran Rumah Tangga maupun mengenai pengurus organisasi MSI.

A.7 Konferensi Sejarah Nasional Indonesia VII 2001

Pada tahun 2001 diselenggarakan Konferensi Sejarah Nasional Indonesia VII. Di sini terjadi lagi perubahan dari “kongres” menjadi “konferensi”. Alasan perubahan untuk membedakan dua kegiatan tersebut (seminar dan kongres) diganti namanya menjadi Konferensi Nasional Sejarah.

A.8 Konferensi Sejarah Nasional Indonesia VIII 2006

Konferensi Sejarah Nasional Indonesia VIII diselenggarakan di Jakarta, dari tanggal 14-17 November 2006. Konferensi ini dibuka di Istana Wapres oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla.

A.9 Konferensi Nasional Sejarah IX 2011

Konferensi Nasional Sejarah IX dengan tema “Mencari Kearifan dan Keragaman Pengalaman yang Telah Dilalui: Pencarian Akademis bagi Usaha Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” dilaksanakan oleh Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas kita dapat melihat dinamika sejarawan Indonesia melalui forum seminar, kongres dan konferensi mencari kesepakatan untuk menemukan model penulisan sejarah Indonesia, baik dari aspek sumber maupun metodologi. Mengganti penulisan sejarah yang “neerlandosentris” ke yang “indonesia-sentris”. Mengembangkan penulisan sejarah mulai dari yang magis-religius sampai pada saintifik. Magis religius merupakan ciri perkembangan historiografi tradisional, sedangkan saintifik perkembangan penulisan sejarah lebih bersifat kritis. Selain itu, perkembangan penulisan sejarah di Indonesia juga sangat ditentukan oleh alam pikiran bangsa Indonesia dalam memahami perubahan dirinya dan lingkungan di sekitarnya.

RUMUSAN KONFERENSI NASIONAL SEJARAH KE-9 Di Hotel Bidakara, Jakarta, tanggal 5 – 7 Juli 2011

Konferensi Nasional Sejarah ke-9 dengan tema: “*Menggali Kearifan Sejarah Sebagai Upaya Peneguhan Karakter Bangsa*”, yang diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta tanggal 5—7 Juli 2011, diikuti lebih 200 orang sejarawan dari berbagai daerah di tanah air dari Sabang sampai Merauke, termasuk perwakilan delegasi Persatuan Sejarah Malaysia (PSM) dan sejumlah pengamat dari kalangan non-sejarawan. Konferensi telah membahas 98 makalah mengenai berbagai aspek kajian tentang masa silam bangsa

Indonesia.

Setelah mengikuti secara cermat dan seksama sambutan pembukaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pidato Ketua MSI 2006-2011 serta wacana yang berkembang dalam diskusi selama tiga hari belakangan, maka Konferensi Nasional Sejarah IX 2011, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Sejarah adalah usaha yang jujur dan obyektif untuk berkisah tentang berbagai kejadian dan peristiwa yang terjadi dimasa lalu. Karena itulah sejarah bisa menjadi sumber kearifan dalam usaha memahami hari kini dan merintis masa depan yang diidamkan.
2. Visi masa depan bangsa dengan sangat jelas dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang membayangkan terwujudnya Negara yang merdeka, adil dan bersatu yang dapat melindungi bangsa dan tanah air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjamin perdamaian dunia. Keempat tugas ini bersandarkan pada pandangan hidup bangsa yang dirumuskan Pancasila.
3. Dari pemahaman sejarah yang telah dilalui sejak terbentuknya Negara bangsa yang berdaulat tampaklah bahwa ketika landasan pandangan hidup itu sempat terabaikan, maka krisis dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan tidak terhindarkan. Dari pemahaman terhadap dinamika sejarah yang telah dilalui bangsa, jelaslah bahwa berbagai permasalahan sosial politik yang kini terasa masih melanda kehidupan bangsa tidaklah akan terselesaikan tanpa didampingi oleh usaha peneguhan karakter bangsa.
4. Sejarah kontemporer kita memperlihatkan bahwa pendekatan indoktrinasi untuk usaha yang mulia ini ternyata telah gagal, karena itulah pengetahuan dan pemahaman akan dinamika kehidupan dan sejarah bangsa, bahkan juga sejarah bangsa-bangsa lain harus menjadi strategi akademis yang terus dipupuk dan dimajukan.
5. Wacana yang berkembang di bidang kesejarahan di tanah air dewasa ini adalah mencintai, menyadari, memperkuat identitas nasional, penggalian kearifan lokal, dan tantangan globalisasi, serta bangkitnya kembali identitas lokal dalam berhadapan dengan keharusan nasional.
6. Perbandingan peristiwa kesejarahan tidak menghasilkan suatu ketetapan yang pasti tentang perilaku manusia dan masyarakat dalam menghadapi nasib dan tantangan yang telah dirumuskannya, tetapi perbandingan itu bisa menghasilkan pemahaman mendalam tentang kemanusiaan dan kemasyarakatan. Karena dalam merintis masa depan yang dicita-citakan peninjauan yang kritis terhadap pengalaman kesejarahan yang telah dialami adalah suatu kemestian.
7. Mempelajari sejarah dengan dan pikiran terbuka, tidak hanya mengetahui peristiwa yang pernah terjadi pada suatu waktu dan disuatu tempat, tetapi juga sesuatu yang biasa disebut sebagai kearifan sejarah. Dengan kearifan sejarah, pemikiran kebangsaan Indonesia dengan melihat secara jernih kekinian dan masa depan dapat dihasilkan. Sejarah mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Menyadari dan menyikapi gejala luntarnya jiwa semangat dan nilai-nilai patriotisme,

nasionalisme dan Pancasila di lingkungan generasi muda khususnya penguatan karakter bangsa bangsa yang nilai-nilainya bersumber pada sejarah bangsa Indonesia dapat dilakukan melalui mata pelajaran sejarah, adalah suatu kemestian.

Rekomendasi:

1. Dalam usaha memperkokoh karakter bangsa yang diidam-idamkan diperlukan pemahaman yang mendalam atas nilai-nilai kearifan dan keadilan yang digali dari hasil rekonstruksi sejarah bangsa, sebagaimana yang terekam dalam berbagai corak dan jenis sumber sejarah.
2. Usaha membentuk dan memperkuat karakter bangsa secara terencana terprogram dan teruji semestinyalah dilakukan melalui pelajaran berbagai aspek dari dimensi kesejarahan di berbagai jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
3. Dalam proses pembelajaran, guru mata pelajaran sejarah harus mampu mengembangkan berbagai kompetensi peserta didik dengan menerapkan strategi pembelajaran, pendekatan, metode, media dan evaluasi secara profesional.
4. Dalam usaha membentuk dan memperkuat karakter bangsa, kearifan lokal seperti tercermin dalam cerita rakyat, mitos, legenda, pantun dan relief dapat didokumentasikan, ditelaah, ditafsirkan, dan divisualisasikan melalui gerakan cinta sejarah yang meliputi kegiatan wisata sejarah, festival, penayangan fragmen-fragmen sejarah baik sejarah lokal maupun sejarah nasional melalui karya-karya kreatif inspiratif perlu digiatkan.
5. Pembelajaran sejarah dapat dilakukan dengan melibatkan siswa secara aktif dan partisipatif dengan melakukan kunjungan, muhibah maupun lawatan sejarah ke tempat-tempat bersejarah sebagai manifestasi dari refleksi budaya, peradaban dan perjuangan bangsa.

Penutup

1. Konferensi ilmiah adalah kesempatan ketika para ilmuwan meninjau dan membahas *state of the arts*, begitu pulalah halnya dengan Konferensi Nasional Sejarah IX ini. Makalah-makalah yang dipresentasikan oleh para sejarawan, yang berdatangan dari berbagai daerah di tanah air, ternyata bukan saja merupakan usaha untuk menyelami aspek dan dimensi sejarah yang telah masuk dalam perbendaharaan pengetahuan sejarah, tetapi juga menyelusuri wilayah kesejarahan yang belum begitu terjamah.
2. Konferensi Nasional Sejarah IX adalah pula kesempatan yang langka bagi sejarawan untuk menyampaikan pemi-kiran dan gagasan tentang berbagai masalah teori kesejarahan dan tujuan serta perspektif sejarah sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan dan rekonstruksi pengalaman masa lalu. Dengan begini maka bukan saja wilayah kesejarahan yang masih harus ditelusuri semakin terkuak, kearifan teori pun dapat diperdalam juga.
3. Dalam kaitan inilah Konferensi Nasional Sejarah IX sampai pada kesimpulan betapa pentingnya pengetahuan sejarah bangsa dalam usaha peneguhan karakter bangsa.

4. Kongres Masyarakat Sejarawan bukan saja merupakan kesempatan untuk memilih kepengurusan baru, tetapi adalah pula saat ketika langkah yang diayunkan ditinjau dan ditelaah, rencana masa depan pun dibuat pula.

Jakarta, 7 Juli 2011

Perumus:

Taufik Abdullah - Ketua

Restu Gunawan - Sekretaris

Aminuddin Kasdi - Anggota

Bambang Purwanto - Anggota

Endjat Djaenuderadjat - Anggota

Magdalia Alfian - Anggota

Mestika Zed - Anggota

Singgih Trisulistyo - Anggota

Susanto Zuhdi - Anggota

B. Kongres Arkeologi

Para ahli arkeologi sepakat membentuk lembaga dengan nama “Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia”, disingkat IAAI. Gagasan itu sebetulnya sudah mengemuka pertama kali pada 1964, ketika para ahli arkeologi mengadakan ekskavasi gabungan di situs Gili-manuk, Bali. Selanjutnya, pada Maret 1965 gagasan tersebut diangkat lagi. Saat itu para ahli arkeologi tengah mengadakan pertemuan di Yogyakarta.

Akhirnya, lembaga ini secara resmi dibentuk pada 4 Februari 1976 di Wisma Anggraini, Cibulan, Bogor. Pembentukan organisasi ini bertepatan dengan penyelenggaraan Seminar Arkeologi yang dihadiri oleh para ahli arkeologi Indonesia. Dalam seminar tersebut, Ketua Panitia, R.P. Soejono mengemukakan perlunya pembentukan sebuah organisasi sebagai wadah untuk menghimpun para ahli arkeologi Indonesia. Disepakati untuk membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas 11 orang ahli arkeologi dari berbagai lembaga. Mereka adalah: (1) R.P. Soejono (Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional); (2) (Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional); (3) Teguh Asmar (Direktorat Sejarah dan Purbakala); (4) Sukatno Tw. (Direktorat Sejarah dan Purbakala); (5) Hadimulyono (Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Cabang IV); (6) Ismanu Adisumarto (Kanwil Dep P dan K, Provinsi Jawa Tengah); (7) Bambang Soemadio (Museum Pusat); (8) Moendardjito (Universitas Indonesia); (9) Harun Kadir (Universitas Hasa-nuddin); (10) Rumbi Mulia (Dep Perhubungan, Sektor Pariwisata); dan (11) Machfudi Mangkudilaga (Arsip Nasional). Kelompok kerja ini bertugas untuk membahas prosedur pembentukan organisasi, nama, tujuan, tempat kedudukan, keanggotaan, dan kepengurusan yang kemudian dilaporkan dalam rapat pleno.

Kelompok Kerja menghasilkan konsep pembentukan organisasi Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) yang berkedudukan di Jakarta. Tujuan organisasi Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia adalah menghimpun tenaga ahli arkeologi dan mereka yang aktif dalam profesi arkeologi, serta anggota luar biasa, yaitu mereka yang telah

berjasa dalam usaha pengembangan arkeologi Indo-nesia. Dalam kesempatan itu dibentuk pula susunan pengurus pusat dan komisariat daerah. Sebagai ketua ditunjuk R.P. Soejono. Dalam sidang pada 4 Februari 1976, R.P. Soejono sebagai Ketua Umum IAAI mengusulkan susunan pengurus sementara yang kemudian disetujui. Pada kepengurusan pertama itu dibentuk empat Komisariat Daerah (Komda), yaitu Komda Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi.

Organisasi IAAI secara periodik (3 kali tahun sekali) menyelenggarakan kongres untuk memilih pengurus baru. Bersamaan dengan kongres itu diselenggarakan Pertemuan Ilmiah Arkeologi, disingkat PIA. Sebagai pertemuan ilmiah, forum ini menjadi pertemuan yang sangat penting untuk membahas segala permasalahan ilmu arkeologi yang dapat disamakan dengan konferensi atau kongres. Seorang peneliti dari Prancis, Henri Chambert-Loir dalam menerjemahkan kata "Pertemuan Ilmiah" ke dalam bahasa Prancis menjadi "Congrès", yaitu dalam bukunya yang diberi judul "*Le 3e Congrès Archéologique Indonésien*" untuk menyebut Pertemuan Ilmiah Arkeologi III, Ciloto, 23-28 Mei 1983. Demikian pula Dr. Machi Suhadi dalam sebuah tulisannya menyebut pertemuan itu sebagai "**kongres ilmiah**", sebagai berikut: "*Para ahli arkeologi telah membentuk organisasi bernama Ikatan Ahli Arkeologi (IAAI) sejak tahun 1976 dan menyelenggarakan kongres ilmiahnya yang pertama tahun 1977*".

PIA sudah 12 kali diselenggarakan, mulai tahun 1977 hingga yang terakhir tahun 2011 yang lalu. Secara berturut-turut penyelenggaraan PIA itu adalah sebagai berikut.

B. 1 Pertemuan Ilmiah Arkeologi I 1977

Pada awalnya forum itu disebutnya sebagai forum pertemuan. Ilmiah membahas permasalahan bidang kepurbakalaan. Pertemuan pertama diselenggarakan tanggal 21-25 Februari 1977, Cibulan, Bogor.

B. 2 Pertemuan Ilmiah Arkeologi II 1980

Pertemuan ilmiah II diselenggarakan pada tanggal 25-29 Februari 1980 di hotel Horizon Jakarta.

B.3 Pertemuan Ilmiah Arkeologi III 1983

Pertemuan ilmiah III diselenggarakan di Ciloto, Jawa Barat, tanggal 23-28 Mei 1983.

B.4 Kongres/Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV 1986

Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV diselenggarakan di hotel Indo Alam, Cipanas.

B. 5 Kongres/Pertemuan Ilmiah Arkeologi V 1989

Pertemuan diselenggarakan tanggal 4-7 Juli 1989 di Yogyakarta.

B.6 Kongres/Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI 1994

Data penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI belum ditemukan.

B.7 Kongres/Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII 1996

Pertemuan VII diselenggarakan tanggal 12-16 Maret 1996 di Indo Alam, Cipanas.

B.8 Kongres/Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII 1999

Diselenggarakan di Malang.

B.9 Kongres/Pertemuan Ilmiah Arkeologi IX 2002

Diselenggarakan tanggal 23-29 Juli 2002 di Kediri

B.10 Kongres/Pertemuan Ilmiah Arkeologi X 2005

Diselenggarakan tanggal 26-30 September 2005 di Yogyakarta. Kongres/PIA X di Yogyakarta tahun 2005 ada tiga tema yang diangkat, yaitu: (1) Penelitian dan restorasi Arkeologi Indonesia menjelang satu abad; (2) Kebijakan dan Pembangunan Arkeologi; dan (3) Kalkulasi investasi di bidang Arkeologi. Pada akhir kongres, peserta menyetujui kesimpulan sebagai berikut.

“Setelah mencermati semua makalah yang terdiri atas tiga tema yaitu: (1) Penelitian dan restorasi Arkeologi Indonesia menjelang satu abad; (2) Kebijakan dan Pembangunan Arkeologi; dan (3) Kalkulasi investasi di bidang Arkeologi, dan memperhatikan proses jalannya persidangan, baik dalam sidang pleno maupun komisi serta mempertimbangkan masukan dari peserta, dihasilkan rumusan sebagai berikut:

- 1. Pemerintah perlu mendorong penelitian di bidang keilmuan dan terapan beserta pengembangannya secara multidisipliner dan interdisipliner yang dilakukan secara terpadu.*
- 2. Kerja sama penelitian, pelestarian dan pengembangan benda cagar budaya (BCB), baik antarinstansi maupun antarnegara, harus berlandaskan asas kemitraan berkelanjutan, dan memberi manfaat luas, terutama bagi masyarakat.*
- 3. Adanya pemisahan kewenangan pelestarian dengan pengelolaan pemanfaatan untuk pariwisata telah berdampak pada kerusakan BCB, seperti kasus Kepres No. 1/1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, serta pengendalian kawasan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan yang bersifat profesional, terintegrasi, komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan yang berlaku bagi seluruh BCB dan situs di Indonesia.*
- 4. Ancaman pemindahan BCB secara ilegal antardaerah dan antarnegara memerlukan kepastian dan penegakan hukum untuk mencegah degradasi sumberdaya arkeologi dengan menyusun regulasi tentang sertifikasi.*

5. *Perserta serta masyarakat dalam melestarikan BCB dan situs perlu didukung oleh para ahli arkeologi dengan menyusun regulasi tentang sertifikasi.*
6. *Terkait dengan otonomi daerah, pemerintah dan DPR perlu mendorong setiap kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang penelitian, perlindungan, dan pengelolaan Benda Cagar Budaya serta budaya lokal.*
7. *Dalam menghadapi tantangan pembangunan, lembaga-lembaga arkeologi harus melakukan pengembangan SDM dari berbagai bidang keahlian. Sehubungan dengan munculnya berbagai konflik pemanfaatan BCB, perlu segera mengubah paradigma arkeologi dari legislator menjadi fasilitator."*

B.11 Kongres/Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI 2008

Diselenggarakan tanggal 13-16 Juni 2008 di Solo

B.12 Kongres/Pertemuan Ilmiah Arkeologi XII 2011

Diselenggarakan tanggal 1-3 November 2011 di Surabaya. Untuk Kongres/ PIA XII tahun 2011 di Surabaya, tema yang dipilih adalah "**Arkeologi untuk Publik**". Guna mengedepankan peranan Arkeologi dalam pembangunan kebudayaan Indonesia di masa mendatang, disiplin ilmu tersebut harus mampu menampung berbagai kepentingan masyarakat Indonesia yang multietnis dan multikultur. Arkeologi yang dahulu hanya berorientasi pada kajian untuk mengungkap kehidupan manusia dan proses kebudayaan masa lalu, saat ini harus mengembangkan orientasi untuk pemanfaatan bagi publik masa kini, khususnya dalam upaya peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping berorientasi untuk pemanfaatan bagi masyarakat, arkeologi tetap harus mengembangkan kajian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Arkeologi yang berorientasi pada kajian terapan akan kokoh hanya bila didukung oleh penelitian-penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Keduanya merupakan sisi-sisi dari satu mata uang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka para pemangku kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan perlindungan terhadap cagar budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Visi pelestarian cagar budaya saat ini harus berdaya guna pada aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penguatan jatidiri dan karakter bangsa.

Masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kajian-kajian arkeologis yang telah dilakukan hingga saat ini. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, di samping penelitian arkeologi dasar, penelitian arkeologi pun harus mulai mengubah paradigmanya menuju kajian yang bersifat terapan, sehingga dapat mendorong terciptanya aspek ekonomi kreatif yang berbasis peninggalan arkeologi, serta bermanfaat langsung bagi kehidupan masyarakat luas.



Kongres/Seminar Arkeologi Indonesia 2012 di Surabara. Dari kiri ke kanan: Drs. Hari Untoro Dradjat, MA (Ketua IAAI), Dra. Nies Angraeni MA (Ketua Harian IAAI), Dr. Sukarwo (Gubernur Jawa Timur, Agusng Laksono (Menko Bidang Kesra) Prof. Dr. Edi Sedyawati (Penasihat IAAI)

Dengan diselenggarakannya PIA XII ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rumusan kebijakan (rekomendasi) tentang konsep dan rencana aksi pemanfaatan arkeologi bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pada PIA XII ini disepakati tema utama, yaitu **Arkeologi untuk Publik**, dengan sub-sub tema sebagai berikut:

- a. Peranan Arkeologi dalam Pembangunan Karakter Bangsa;
- b. Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi:
 - Manajemen Siaga Bencana;
 - Strategi Komunikasi;
 - Manajemen Kawasan Arkeologi (Kawasan Pabrik Gula, Kawasan Kota Tua/Lama);
 - Ekonomi Kreatif Berbasis Peninggalan Arkeologi;
 - Pariwisata Minat Khusus Berbasis Arkeologi.
- c. Penelitian Arkeologi Terapan (perubahan paradigma dalam penelitian arkeologi);
- d. Implementasi/penerapan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

C. Kongres Prehistori

C.1 Kongres Prehistori I 1996

Kongres prasejarah pertama diselenggarakan Yogyakarta tanggal 1-3 Agustus 1996. Kongres itu menghasilkan berdirinya Asosiasi Prehistorisi Indonesia atau API. Hasil kongres telah diterbitkan dengan judul Prasejarah Indonesia Dalam Lintasan Asia Tenggara-Pasifik.

C.2 Kongres Prehistori II 2000

Kongres prasejarah kedua juga diselenggarakan di Yogyakarta. Data belum ditemukan.

C.3 Kongres Prehistori 2009 (batal)

Pada tahun 2008 Asosiasi Prehistorisi Indonesia (API) sudah merencanakan kongres ketiga diadakan di Jakarta tanggal 1 – 4 Juli 2009. Pertimbangannya, banyak temuan dari hasil penelitian prasejarah Indonesia dan kaitannya dengan luar Indonesia. Oleh karena itu perlu diselenggarakan suatu forum untuk membahas temuan baru itu dengan mengundang pakar dari luar seperti . Prof. Dr. P.S. Bellwood (Australia), Prof. Dr. G.J. Bastra (Belanda), Prof. Dr. Harry Allen (New Zealand), Dr. Hubert Frostier (Perancis), Prof. Dr. Huang Wie Huen (Cina), Dr. Stephen Tjia (Malaysia), Dr. Willy Ronquilo (Philipina), Prof. Dr. PH. Tobias (Afrika) dan Dr. Hisao Baba (Jepang).

Gagasan yang dirintis oleh Prof. RP Soejono itu belum sempat terlaksana, karena kesulitan anggaran, dan pada 16 Mei 2011 beliau dipanggil menghadap Sang Khalik, karena sakit. Dengan tema yang cukup menarik, “Manusia, Budaya, dan Lingkungan” seharusnya kongres itu dapat direalisasikan oleh para penerus Prof. Soejono.

D. Kongres Epigrafi 2001

Atas inisiatif Prof. Dr. RP Soejono berkumpul sejumlah ahli epigrafi dan sepakat untuk mendirikan sebuah asosiasi. Pada tanggal 29 Maret 2000 berdirilah organisasi kebudayaan bernama Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (AAEI) dan yang ditunjuk sebagai ketua adalah Dr. Machi Suhadi. Lembaga ini pada tahun 2001 bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang menyelenggarakan kongres di Malang Jawa Timur. Hasil kongres telah diterbitkan dengan judul “Aksara dan Makna” tahun 2012.

BAB IV

KONGRES BIDANG PERBUKUAN DAN PERPUSTAKAAN

A. Bidang Perbukuan

Buku dan perpustakaan mempunyai kaitan yang erat. Buku dilestarikan dalam arti dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan melalui lembaga perpustakaan, sementara bagi lembaga perpustakaan tidak akan lengkap keberadaannya apabila tidak didukung oleh keberadaan buku. Kongres untuk bidang perbukuan yang pernah berlangsung dibagi 2, yaitu: (1) kongres yang membahas tentang penerbitan dan perbukuan; dan (2) kongres tentang perpustakaan. Kongres penerbitan dimotori oleh organisasi Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan oleh Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi (APPT). Kongres Perpustakaan diprakarsai Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Gambaran secara singkat mengenai masalah yang dibahas dan hasilnya adalah sebagai berikut.

A.1 Kongres penerbitan

A.1.1 Kongres Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Organisasi ini didirikan tanggal 17 Mei 1950 di Jakarta. Pemrakarsanya adalah beberapa penerbit nasional ketika itu. Pendirian organisasi didorong oleh semangat kaum bumiputra untuk menggantikan posisi penerbit asing, khususnya Belanda yang masih memonopoli kegiatan penerbitan buku di Tanah Air. IKAPI yang lahir dari kalangan swasta ini mencerminkan jiwa nasionalisme yang kuat untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia melalui buku.

Kongres para penerbit ini berkaitan erat dengan masalah perbukuan. Sampai sekarang telah diselenggarakan 17 kali kongres, sebagai berikut:

1. Kongres IKAPI I

2. Kongres IKAPI II 1960
3. Kongres IKAPI III 1959
4. Kongres IKAPI IV 1963
5. Kongres IKAPI V 1966
6. Kongres IKAPI VI 1968
7. Kongres IKAPI VII 1970
8. Kongres IKAPI VIII 1972
9. Kongres IKAPI IX 1974
10. Kongres IKAPI X 1976
11. Kongres IKAPI XI 1978
12. Kongres IKAPI XII 1980
13. Kongres IKAPI XIII, 1982
14. Kongres IKAPI XIV, 1984
15. Kongres IKAPI XV 2002
16. Kongres IKAPI XVI 2006
17. Kongres IKAPI XVII

A.1.2 Kongres Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi (APPT)

Kongres ini diselenggarakan tanggal 28 - 29 September 2001 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Kongres yang diikuti lebih dari 100 Universitas Press atau Penerbit Universitas di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan penerbit yang berkualitas dan profesional.

A.2 Kongres Perbukuan

Kongres perbukuan pertama diselenggarakan tanggal **29 - 31 Mei 1995** di Jakarta diprakarsai oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Dalam kongres ini dikemukakan antara lain bahwa kurangnya jumlah penulis/pengarang, penerjemah, dan penyadur di Indonesia ialah:

1. Hak cipta penulis/pengarang, penerjemah dan penyadur kurang terlindungi sehingga menimbulkan maraknya pembajakan karya tulisan yang sangat merugikan profesi ini.
2. Imbalan atau royalti penulis/pengarang, penerjemah dan penyadur masih tergolong rendah dan tidak menarik disebabkan oleh pasaran buku masih belum baik dan manajemen kebanyakan penerbit belum terbuka/transparan.
3. Terbatasnya jumlah penulis/pengarang, penerjemah dan penyadur yang memiliki kemampuan dan waktu yang cukup untuk menulis naskah-naskah ilmiah.
4. Belum semua perguruan tinggi membekali mahasiswanya dengan kemampuan menulis naskah buku.
5. Kurangnya pelatihan untuk penulis buku.

Hasil dari kongres ini antara lain dibentuknya Dewan Buku Nasional (DBN) yang diketuai oleh Presiden RI dengan sejumlah menteri dan wakil masyarakat perbukuan sebagai anggotanya. Akan tetapi BDN tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan

karena anggota-anggotanya memiliki tugas utama lain. Menurut BP. Sitepu, dalam makalahnya yang berjudul Urgensi Undang-Undang Perbukuan dan disampaikan pada Seminar Masa Depan Buku Digital di Indonesia, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, 19/7/2001, sejak dibentuknya lembaga tsb tidak pernah terlihat hasil nyata dari BDN dan pembinaan dan pengembangan perbukuan Nasional semakin tidak jelas. Oleh karena itu belakangan ini ada rencana untuk membubarkan BDN. (<http://www.ikapi.org>). Kongres Perbukuan Nasional baru diselenggarakan 1 kali, tahun 1995. Setelah itu tidak lagi kongres hingga sekarang.

B. Bidang Perpustakaan

Bidang ini telah menyelenggarakan 2 macam kongres, yaitu Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) dan Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI). Kongres IPI pertama sudah cukup lama dilaksanakan (1973), sementara KPDI pertama diselenggarakan baru tahun 2008, sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang digital. Gambaran tentang kedua macam kegiatan itu adalah sebagai berikut.

B.1 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) I 1973

Ikatan Pustakawan Indonesia berdiri pada tanggal 6 Juli 1973 dalam kongres di Ciawai, Bogor mulai tanggal 5-7 Juli 1973. Acara utama kongres adalah mem-bahas berbagai aspek perpustakaan, arsip, dokumentasi, informasi, pendidikan. Acara kedua adalah pembentukan organisasi atau wadah tunggal pustakawan Indonesia.

B.2 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) II 1977

Diselenggarakan di Jakarta, 18-20 Januari 1977 dengan tema Peningkatan Peran IPI dalam Mencerdaskan dan Mensukseskan Pembangunan Indonesia.

B.3 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) III 1980

Kongres diselenggarakan di Denpasar Bali, tanggal 21-24 Juni 1980 dengan tema "Memasyarakatkan Jasa Perpustakaan dan Meningkatkan Partisipasi Pustakawan dalam Pembangunan".

B.4 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) IV 1983

Diselenggarakan di Yogyakarta, tanggal 22-24 September 1983 dengan tema "Dengan Perpustakaan Kita Tingkatkan Kecerdasan Bangsa dan Pembangunan".

B.5 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) V 1986

Diselenggarakan di Ujung Pandang Sulawesi Selatan tanggal 22-24 September 1986 dengan tema "Kita Tingkatkan Pustakawan Dalam menyongsong Era Tinggi

Landas Pembangunan”.

B.6 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) VI 1989

Kongres diselenggarakan di Banjarmasin tanggal 26-29 September 1989 dengan tema ”Meningkatkan Peran Perpustakaan Dalam Menyongsong Era Tinggal Landas Pembangunan”.

B.7 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) VII 1992

Diselenggarakan di Padang tanggal 18-21 November 1992 dengan tema ”Peran Perpustakaan Dalam era Globalisasi”.

B.8 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) VIII 1995

Diselenggarakan di Jakarta tanggal 20-23 November 1995 dengan tema ”Peran Strategis Pustakawan Dalam pembangunan Nasional: Peningkatan Kualitas dalam PJP II”.

B.9 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) IX 1998

Kongres diselenggarakan di Lembang Bandung, tanggal 11-14 November 1998 dengan tema ”Memantapkan Profesionalisme Pustakawan Guna Menyongsong, Melaksanakan dalam Repelita VII yang Akan Datang”.

B.10 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) X 2002

Diselenggarakan di Batu Malang, tanggal 17 - 19 September 2002 dengan tema ”Perpustakaan untuk Masyarakat”.

B.11 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (Kongres IPI) XI 2006

Kongres diselenggarakan di Denpasar Bali, tanggal 14-16 November 2006, dengan tema ”Meningkatkan Kreativitas Pustakawan untuk mewujudkan Masyarakat Memiliki Literasi Informasi”.

B.12 Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia XII 2009

Diselenggarakan di Batam tanggal 19-23 Oktober 2009 dengan tema ”Pelestarian Budaya Bangsa”.

C. Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDII)

Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDII) merupakan forum berskala nasional yang merupakan wadah bagi para pustakawan dan penyelenggara perpustakaan

Indonesia untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman tentang berbagai aspek perpustakaan digital. Melalui forum ini para peneliti, pengajar dan praktisi di bidang perpustakaan mengambil kesimpulan dan kesepakatan Perpustakaan digital bukan topik baru di dunia perpustakaan baik di Indonesia apalagi di lingkup internasional. Inisiatif pembangunan *World Digital Library* (WDL) yang dibahas dalam *UNESCO Experts Meeting on the World Digital Library* mengisyaratkan agar Indonesia memulai pembangunan perpustakaan digital yang nantinya diharapkan akan menjadi bagian dari WDL. Di Indonesia sendiri, gagasan dan upaya untuk membangun perpustakaan digital sudah muncul dan mulai dilaksanakan. Saat ini di Indonesia telah terbentuk beberapa jaringan perpustakaan digital sudah muncul dan mulai dilaksanakan, baik yang dibangun berdasarkan kesamaan jenis perpustakaan, layanan, maupun koleksinya.

C.1 Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPID) I 2008

KPDI ke-1 diselenggarakan tanggal 2-5 Desember 2008 di Bali. Konferensi mengambil tema "Kerja Sama Dalam Membangun Perpustakaan Digital Nasional Indonesia".

C.2 Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPID) II 2009

Konferensi memilih tema "Perpustakaan dan Pelestarian Khasanah Budaya Bangsa dalam Format Digital". Dengan tema ini diharapkan para peserta dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai apa yang dimaksud dengan dan pentingnya melestarikan khasanah budaya dalam format digital (*cultural digital heritage*) serta peran perpustakaan dalam pelestarian khasanah budaya tersebut. Melalui konferensi ini akan dibentuk Komisi Perpustakaan Digital Nasional yang menentukan arah pembangunan Perpustakaan Digital Nasional dan bertanggung jawab atas keberlangsungan KPDI secara berkala setiap tahun.

C.3 Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPID) III 2010

Konferensi diselenggarakan tanggal 2-4 November 2010 di Bandung. Konferensi mengambil tema "Isu-isu Teknis, Strategis dan Masa Depan".

C.4 Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPID) IV 2011

Konferensi diselenggarakan di Samarinda dengan tema "Interoperabilitas Sistem Perpustakaan Digital Nasional Indonesia".

BAB V

KONGRES BIDANG KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHAESA

Sebelum keluar TAP MPR No. II/1978 dan TAP MPR No. IV/1978 tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang ini sering disebut kebatinan. Bidang ini mulai diperbincangkan dalam kongres sejak Kongres Kebudayaan Jawa pertama tahun 1918 di Solo (*Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*) dan juga pada Kongres Kebudayaan 1948. Sangat mungkin sebelumnya sudah banyak forum yang memperbincangkan masalah aliran kebatinan atau kepercayaan itu.

Dalam kongres ini Dr. Radjiman Wedyodiningrat bersama D. Van Hinloopen Labberton membahas tentang wayang yang penuh dengan filsafat (Jawa), etika, moral dan kebatinan. Labberton adalah seorang tokoh teosofi yang pada tahun 1912 menjabat sebagai ketua Teosofi Dunia. Sesudah Indonesia merdeka pada Kongres Kebudayaan I tahun 1948, Ki Ageng Soerjomentaram, dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Ki Mangoensoedarso juga memaparkan masalah kepercayaan (kebatinan) sebagai pokok bahasan.

Kepercayaan mencari formula

Sebagaimana halnya unsur kebudayaan yang lain, masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau aliran kebatinan juga giat mencari format untuk menentukan garis konsep, kebijakan dan strategi pelestariannya. Bidang ini giat menghimpun pendapat melalui forum-forum sarasehan, dialog, seminar, musyawarah hingga dalam forum kongres untuk menemukan formula yang tepat dalam menata kehidupannya di tengah-tengah kehidupan bangsa yang pluralistik dan multikulturalistik.

Upaya itu ada yang sifatnya ekstern yakni yang datang dari pihak peme-rintah (eksekutif), lembaga legislatif dan pihak yudikatif sebagai pelindung, serta dari istitusi yang lain sebagai mitra. Ada pula upaya-upaya yang bersifat dari dalam diri kepercayaan sendiri (intern) untuk menata konsep kehidupan dalam berkepercayaan

dan menyamakan persepsi karena adanya perbedaan dan aliran. Dari perjuangan yang panjang itu telah melahirkan sejumlah kebijakan baik yang bertujuan melindungi dan mengembangkan keberadaan kepercayaan, adat dan tradisi maupun dalam mendudukkan posisinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pluralis.

Dalam mencari konsep penataan keberadaan aliran kepercayaan itu dalam forum kongres paling tidak sudah dimulai sejak Kongres Kebudayaan Jawa pertama tahun 1918 di Solo (*Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*). Dalam kongres ini dr. Radjiman Wedyodiningrat bersama D. Van Hinloopen Labberton membahas tentang wayang yang penuh dengan filsafat (Jawa), etika, moral dan kebatinan. Labberton adalah seorang tokoh teosofi yang pada tahun 1912 menjabat sebagai ketua Teosofi Dunia.

Dengan judul prasaran "Kebatinan sebagai Alat dalam Pembangunan Ne-gara", disampaikan oleh Ki Ageng Soerjomentaram, dr. Radjiman Wedyodi-ningrat dan Ki Mangoensoedarso. Di dalam prasarannya antara disebutkan bahwa:

"Kemajuan batin manusia adalah salah suatu keharusan untuk memajukan kebudayaan. Kemajuan batin tidak bertentangan dengan kemajuan lahir: kemajuan kedua-duanya adalah syarat-syarat mutlak dalam kemajuan kebudayaan dan masyarakat".

Setelah melalui perdebatan, akhirnya kongres antara lain menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemajuan batin manusia adalah salah suatu keharusan untuk memajukan kebudayaan.
2. Kebebasan jiwa yang dijalankan dengan tidak mengganggu keselamatan masyarakat, adalah suatu keharusan bagi tiap-tiap orang dalam usahanya menciptakan kebudayaan.
3. Kemajuan batin manusia hendaknya jangan semata-mata ditujukan kepada kesempurnaan diri, melainkan hendaknya diperuntukkan guna keselamatan masyarakat seluruhnya.
4. Kemajuan batin tidak bertentangan dengan kemajuan lahir: kemajuan kedua-duanya adalah syarat-syarat mutlak dalam kemajuan kebudayaan dan masyarakat.
5. Batin manusia yang teguh adalah syarat mutlak dalam perjuangan kemerdekaan negara. (Supardi: Kongres Kebudayaan 1918-2003:2007).

Karena dari hasil KK 1948 itu dirasakan belum cukup memuaskan bagi komunitas kebatinan yang jumlahnya cukup banyak, maka komunitas ini menyepakati untuk menyelenggarakan kongres tersendiri dengan nama Kongres Kebatinan. Adapun mengenai urutan penyelenggaraan Kongres Kebatinan atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pernah diselenggarakan adalah sebagai berikut.

A. Kongres Kebatinan

A.1 Kongres Kebatinan I 1955

Tujuh tahun setelah masalah kebatinan dibahas dalam KK di Magelang, tahun 1955 sejumlah tokoh kebatinan (disebutkan sekitar 2000 orang peserta dan 100 organisasi kebatinan) berkumpul di Semarang untuk melaksanakan Kongres Kebatinan tersendiri, dan merupakan Kongres Kebatinan I. Melalui kongres ini tahun 1955 resmi berdiri sebuah wadah para warga kebatinan yang diberi nama Badan Kongres Kebatinan Indonesia disingkat BKKI. Lembaga ini memilih semboyan "Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe, Memayu Hayuning Bawono", yang berarti "Bekerja keras dilandasi hati suci dan bersih demi keselamatan umat manusia dan dunia, dengan menyingkirkan imbalan, mengutamakan kerja". Yang ditunjuk sebagai ketua BKKI pertama adalah Mr. Wongsonegoro.

A.2 Kongres Kebatinan II 1956

Setelah kongres pertama dilanjutkan dengan Kongres Kebatinan II diselenggarakan di Surakarta tahun 1956. Dalam kongres ini ditegaskan tentang arti kebatinan yang merupakan sumber asas dan Sila Ketuhanan Yang maha Esa untuk mencapai budi pekerti luhur. Semua itu demi kesempurnaan hidup manusia. Dalam kongres ini Wongsonegoro menegaskan bahwa *"gerakan kebathinan bukanlah merupakan agama baru yang akan mendesak agama-agama yang sudah ada, akan tetapi kebathinan bahkan memperdalam atau sublimeren agama-agama yang sudah ada"*.

A.3 Kongres Kebatinan III 1958

Kongres Kebatinan III yang diselenggarakan di Jakarta tahun 1958 menjadi sangat istimewa karena dihadiri oleh Presiden Soekarno dan memberikan kata sambutan. Selama 40 menit Presiden berpidato membentangkan perihal eksistensi kebathinan. Antara lain Bung Karno menyatakan menyambut positif Kongres Kebatinan karena *"kebathinan menggunakan sumber azas Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup dan 'kebathinan' bukan klenik"*.

A.4 Kongres Kebatinan IV 1960

Kongres Kebatinan IV diselenggarakan di Malang tahun 1960, antara lain menelorkan pernyataan tentang tidak adanya perbedaan prinsip antara agama dan kebatinan. Keberadaan kebatinan justru memiliki kesamaan.

A.5 Kongres Kebatinan V 1963

Tahun 1963 diselenggarakan Kongres Kebatinan V di Surakarta. Dua tahun kemudian (1965) direncanakan diselenggarakan Kongres Kebatinan VI tetapi batal karena terjadi peristiwa G30S/PKI. Setelah kongres tahun 1963 tidak terdengar

ada kongres lagi. Tetapi ada sumber yang menyatakan tahun 1968 di Ponorogo diselenggarakan Kongres BKKI ke V. Pertanyaannya, apakah kongres ini membahas tentang masalah kebatinan ataukah kongres Badan Kongres Kebatinan Indonesia sebagai organisasi massa. Kalau kongres tentang organisasi BKKI tentu tidak masuk ke dalam pengertian kongres dalam buku ini.

Seperti disebutkan di dalam buku berjudul “Kebatinan dan Injil” karya Dr. Harun Hadiwijono, cetakan ke-9 tahun 2006 halaman 1, pada tahun 1968 di Ponorogo diselenggarakan Kongres BKKI ke V. Keterangan ini dikutip Dr. Harun dari buku karya Tjahaja Widjajakusuma berjudul “Buku Windu BKKI” hal 3,5, dan 96. Tetapi yang aneh, buku ini terbit tahun 1963, yang berarti ditulis 5 tahun sebelum Kongres BKKI tahun 1968. Apakah mungkin kegiatan yang belum terlaksana dimuat dalam buku yang terbit 5 tahun sebelumnya?

Dari sejarah pencarian formula untuk mendudukan posisi kepercayaan dan upaya pelestariannya seperti diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah Indonesia merdeka telah melaksanakan 5 kali kongres tersendiri. Dari balik serangkaian kongres itu dapat dipetik pandangan-pandangan yang dapat dijadikan acuan dalam mendudukan keberadaan aliran kepercayaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Republik ini. Beberapa butir pandangan itu adalah sbb: (1) kepercayaan adalah bagian dari kebudayaan yang kemudian dikenal dengan sebutan budaya spiritual; (2) kepercayaan adalah bukan agama baru dan tidak adanya perbedaan prinsip antara agama dan kepercayaan; (3) kepercayaan bukan klenik; (4) kepercayaan menggunakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (5) kepercayaan mempunyai peran dalam membangun bangsa.

Kelima rumusan inilah yang hingga kini dijadikan kata kunci (*key word*) dalam menyikapi dan membangun keberadaan aliran kepercayaan. Meskipun kelima pandangan itu telah dijadikan kata kunci tetapi para penghayat kepercayaan, komunitas adat dan tradisi secara terus menerus melakukan upaya untuk menemukan formula baru, karena kebudayaan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemunduran dan Kebangkitan

meletusnya peristiwa G30S/PKI telah membuat keberadaan kepercayaan mengalami saat kritis hingga dapat disebut sebagai masa kemunduran. Penumpasan terhadap peristiwa G30S/PKI harus berhadapan dengan anggota dan simpatisan PKI yang masih hidup dan berusaha untuk bangkit kembali. Salah satu upaya untuk bangkit, PKI membangun “Gerakan PKI Malam” dipimpin oleh Mbah Suro alias Mulyono, alias Surodihardjo. Pusat gerakan ini di desa Nginggil kecamatan Menden yang terletak di antara dua kabupaten, yaitu kabupaten Blora dan Ngawi. Lokasi cukup terpencil di tepi bengawan Solo. Gerakan yang “dibungkus” dalam bentuk perdukunan atau perguruan yang berbau mistik dan klenik ini menjadi sebuah “bentuk organisasi” tempat berkumpulnya sisa-sisa PKI yang berusaha untuk dapat menanamkan pengaruhnya kepada masyarakat.

Keberhasilan Mbah Suro membangun padepokan ini berkat menggunakan kendaraan perdukunan, klenik, dengan menyebarkan kepercayaan atau kebatinan “Djawa Dwipa” dan dengan menyatakan dirinya sebagai “Pandito Gunung Kendeng”.

Melalui cantrik-cantriknya yang tidak lain adalah sisa-sisa anggota atau simpatisan PKI melakukan agitasi dan propaganda mempengaruhi masyarakat sehingga tempat itu dianggap keramat dan menjadikan semua perintah Mbah Suro wajib diturut. Padepokan Mbah Suro dijadikan tempat penyusunan kekuatan bersenjata dari sisa-sisa PKI. (Komunis di Indonesia Jilid IV: Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya (1965-1981), Pusjarah TNI, 2009, hal. 75-77). Pada tanggal 5 Maret 1967 padepokan ini berhasil dihancurkan oleh ABRI karena jalan perundingan tidak membuahkan kesepakatan. Berakhirnya drama Mbah Suro berdampak negatif terhadap para penghayat kepercayaan atau kebatinan. Nama aliran kepercayaan ikut tercoreng membuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aliran kepercayaan surut. Dengan kondisi seperti itu aliran kepercayaan “menahan diri” untuk tidak banyak muncul ke permukaan, sambil berupaya mengembalikan nama baiknya.

Sepuluh tahun kemudian, setelah melalui perjalanan yang panjang, berkelok dan berliku oleh para pembela keberadaan kepercayaan membuahkan hasil. Lahir TAP MPR No. II/1978 dan TAP MPR No. IV/1978 yang mendorong dibentuknya lembaga di lingkungan pemerintahan dengan nama Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa, di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar penempatan lembaga ini di lingkungan Direktorat Jenderal kebudayaan karena aliran kepercayaan merupakan salah satu unsur kebudayaan dengan sebutan “budaya spiritual”. Dengan lahirnya lembaga di pemerintahan untuk mengurus masalah kepercayaan, maka keberadaannya menjadi stabil hingga kini.

Nomenklatur direktorat itu semula adalah Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa tugas dan fungsi unit ini lebih dititikberatkan pada segi “pembinaan” yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas manusia pendukung Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya disebut “Penghayat”. Jadi, tugas pokok dari unit ini sesuai dengan arahan GBHN adalah: (a) agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru; dan (b) untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kini (2012) nomenklatur lembaga itu berubah menjadi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Dengan nomenklatur baru tanpa kata “penghayat” berarti ruang lingkup kegiatan direktorat ini tidak hanya semata-mata membina para penghayat melainkan lebih luas lagi mencakup keberadaan lembaga kepercayaan di masyarakat beserta ajaran dan aktivitasnya. Dengan adanya perubahan ini menunjukkan eksistensi kepercayaan yang didukung oleh Pasal 28, 29 dan 32 UUD 45 semakin diakui.

Adapun mengenai tambahan kata “dan tradisi” sesungguhnya berasal dari nama direktorat yang lain yaitu Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Karena diberlakukannya perampingan organisasi, kedua direktorat itu digabung menjadi. Sementara itu, di dalam rincian tugas dan fungsinya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa dan Tradisi juga mengurus keberadaan masyarakat atau komunitas adat. Mengenai hal ini UNESCO mulai memperhatikan keberadaan komunitas adat sekitar tahun 50-an dengan sebutan “*indigenous peoples*”. Setelah memasuki masa

reformasi muncul suatu “gerakan” yang mencerminkan suatu kesadaran yang lebih meningkat tentang eksistensi masyarakat adat dengan membentuk forum dengan nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Forum itu berangsur-angsur berkembang membangun konsolidasi dan berjejaring hingga akhirnya sepakat untuk menyelenggarakan bersama sebuah forum kongres dengan nama Kongres Masyarakat Adat Nusantara disingkat KMAN. Hingga kini telah berlangsung 4 kali kongres. Urutan kongres yang pernah diselenggarakan oleh AMAN menyelenggarakan adalah sebagai berikut: (1) Kongres MAN I tahun 1999 di Jakarta; (2) Kongres MAN II tahun 2003 di Lombok; (3) Kongres MAN III Tahun 2008 di Pontianak; (4) Kongres MAN IV Tahun 2012 di Maluku Utara (Ternate).

Selain kongres MAN yang berskala nasional telah pula berlangsung kongres yang diselenggarakan oleh masyarakat adat tertentu. Paling tidak telah berlangsung 3 kongres, yaitu: (1) Kongres Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah telah 2 kali kongres berlangsung, yaitu tahun 2003 dan 2006 di Palangkaraya; (2) Kongres Masyarakat Adat Banda, digelar tahun 2010 di Istana Mini, Banda, Kabupaten Maluku Tengah; dan (3) Kongres Masyarakat Adat Osing, Banyuwangi, pada tahun 2011 di Paseban Desa Wisata Osing Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.

Dari kongres MAN telah dihasilkan sejumlah kebijakan, strategi, rekomendasi dan pernyataan serta tuntutan. Antara lain kongres menyatakan bahwa adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan Negara yang berlaku seragam sifatnya. Selain itu juga disimpulkan bahwa jauh sebelum negara Indonesia berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri, dan oleh sebab itu Negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat adat ini.

Selain itu juga telah dicapai sejumlah kesepakatan yang berisi “kewajiban” bagi seluruh MAN yang memiliki implikasi besar terhadap keutuhan dan ketenangan MAN. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, masyarakat Adat nusantara wajib untuk saling bahu-membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang layak dan berdaulat. Juga telah dirumuskan kebijakan untuk pelestarian MAN. Misalnya melalui tuntutan bahwa warga Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Di dalam setiap masyarakat adat (*indigenous people*) memiliki budaya (*indigenous culture*) mencakup berbagai aspek budaya seperti seni, bahasa, sejarah, adat istiadat, sistem nilai, sistem mata pencaharian, sistem kepercayaan dll. Di dalam kehidupan berkebudayaan, masyarakat memiliki aneka ragam kearifan yang sering disebut sebagai “kearifan lokal” atau “*local wisdom*” atau *local genius*”.

Dalam tahun 2012, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Kongres membahas kepercayaan sekaligus juga mengenai masyarakat adat dan tradisi. Judulnya adalah “Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa, Komunitas Adat dan Tradisi”.

B. Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi 2012

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara yuridis formal telah diakui oleh Negara sejak ditetapkannya UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa menyadari bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada dan berkembang di wilayah Nusantara dan untuk perlu diatur keberadaannya dalam UUD Negara RI. Hingga kini jumlah para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sekitar 12 juta orang, dan memiliki 239 organisasi tingkat pusat dan 1.031 organisasi tingkat cabang, tersebar di berbagai daerah.

Meskipun secara yuridis keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah jelas dan cukup kuat, namun tantangan ke depan bagi KKAT bukan semakin ringan tetapi semakin kompleks. Seperti yang dicatat di dalam Buku Panduan, Panitia Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Adat dan Tradisi (KKAT), keberadaannya di era reformasi dan era yang akan datang seharusnya dapat menunjukkan kiprah dan kontribusinya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun peluang dan kesempatan untuk berekspresi itu belum terbuka karena: (1) pemahaman keliru dari sebagian besar masyarakat bangsa maupun penyelenggara negara tentang KKAT; (2) Kurangnya percaya diri masyarakat KKAT atau eksistensinya, akibat perlakuan diskriminasi dan pencitraan buruk yang diterima selama ini; (3) masih lemahnya perlindungan hukum dan pengayoman dari negara; (4) Lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah yang tampak setengah hati dalam melestarikan dan memajukan kehidupan mereka, sehingga masyarakat KKAT semakin tergerus dan tidak berdaya.

Dari empat masalah tersebut dapat dipilah, dua masalah berkenaan dengan masalah intern KKAT dan dua masalah lagi berkenaan dengan pihak luar, dalam hal ini adalah negara dan perangkatnya. Sesuai dengan berbagai paradigma yang berkembang dewasa ini maka kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan perlu memperhatikan perubahan-perubahan itu. Isu paling banyak dikhawatirkan oleh budaya tradisi adalah masalah globalisme yang sekarang sedang marak. Selain itu masalah sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke desentralistik juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan. Demikian juga dengan isu demokrasi, keterbukaan dan kebebasan sangat berpengaruh terhadap kelestarian kebudayaan bangsa termasuk KKAT.

Lembaga baru yang dibentuk setelah lahirnya TAP MPR No. II/1978 dan TAP MPR No. IV/1978 hanya sebatas menyelenggarakan berbagai pertemuan dalam bentuk sarasehan, dilalog dan seminar saja. Antara lain diselenggarakan Sarasehan Nasional Kepercayaan (1981), Dialog Budaya Spritual (2000), dan kemudian Seminar Kepercayaan Masyarakat (2005) di Yogyakarta dengan tema yang provokatif: *Masa Depan Kepercayaan: "Dilestarikan atau Ditinggalkan"*. Dari serangkaian perbincangan tentang aliran kepercayaan, perbincangan dalam forum penentuan UUD 1945 pastilah yang paling penting. Perdebatan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ketika membahas rancangan tentang agama dan kepercayaan sangat serius seperti dapat dibaca pada Risalah UUD 1945. Demikian pula ketika dilaksanakan

pembahasan amandemen UUD 1945 pada masa reformasi.

Setelah Kongres Kebatinan V 1963 hingga tahun 2012 yang berarti hampir lima puluh tahun lamanya bidang kepercayaan tidak pernah diperbincangkan dalam forum kongres. Uraian secara singkat mengenai penyelenggaraan *Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa, Komunitas Adat dan Tradisi (Kongres KKAT)* adalah sebagai berikut.

Maksud dan Tujuan

Kongres ini dimaksudkan untuk menampung pemikiran-pemikiran dan gagasan yang berharga dari para pelaku, pakar dan pemerhati kepercayaan, komunitas adat dan tradisi. Tujuannya adalah mendapatkan bahan masukan untuk menyusun konsep dasar (*grand strategy*) pengembangan kepercayaan, komunitas adat dan tradisi. membangun pemahaman

Tema

Tema kongres adalah “Revitalisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi bagi Pembangunan Karakter dan Jatidir Bangsa”. Dari tema tersebut dibagi ke dalam 4 subtema, yaitu: (1) Konsep Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi, dibahas di Komisi I; (2) Advokasi dan Pemberdayaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi, dibahas di Komisi II; (3) Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi, dibahas di Komisi III; dan (4) Kebijakan dan Strategi Pelestarian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi, dibahas di Komisi IV.

Tempat dan tanggal penyelenggaraan

KKAT dilangsungkan mulai tanggal 25-28 November 2012. Acara pembukaan kongres diselenggarakan di The Square Ballroom, ICBC Centre Building, Jl. Basuki Rakhmat No. 16-18, Surabaya. Penutupan kongres diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya. Sidang Komisi diselenggarakan di tiga tempat: (1) di hotel Bumi Surabaya; (2) di hotel Mercure; dan (3) di hotel Garden Palace Surabaya.

Narasumber dan Peserta

Narasumber ditentukan berdasar hasil rapat Panitia Pengarah (*Steering Committee*) terdiri atas unsur-unsur: (1) penghayat/organisasi KKAT; (2) akademisi; (3) pemerhati kebudayaan; (4) penggiat kebudayaan, demokrasi dan HAM; (5) unsur pemerintah.

Peserta kongres disepakati sebanyak 750 orang, berasal dari seluruh provinsi terdiri atas: (1) unsur organisasi KKAT; (2) unsur akademisi; (3) unsur budaya-yawan; (4) penggiat kebudayaan, demokrasi dan HAM; (5) unsur pemerintah.

Pelaksanaan

Acara pembukaan diawali dengan sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gubernur Jawa Timur Dr. Sukarwo, SH sedang berada di Banyuwangi) yang antara lain menyatakan bahwa komunitas-komunitas kepercayaan, adat dan tradisi berkumpul untuk menyatukan pikiran, merumuskan gagasan-gagasan yang muaranya satu, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kepercayaan terhadap Tuhan YME memiliki konsekuensi untuk berbuat amal kebajikan yang direpresentasikan dalam konsep “Urip sing Nguripi”. Artinya, hidup itu harus dapat menghidupi. Menghidupi sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan saling menghargai dan mencintai sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti (mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh yang sedang bertugas ke luar negeri) meminta agar stigma negatif yang disematkan oleh sebagian masyarakat kepada para penganut kepercayaan, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adat dan tradisi dapat dihilangkan. Sudah saatnya semua prasangka buruk terhadap komunitas ini dihilangkan, dan semua memastikan tidak ada lagi praktik diskriminasi terhadap mereka.

Setelah acara pembukaan kongres oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, acara dilanjutkan dengan penyampaian pidato kunci (key note speech) oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mahfud MD yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua MK, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H dan oleh Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Hasil kongres

Hasil dari Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat dan Tradisi tahun 2012 adalah sebagai berikut.

RUMUSAN KONGRES NASIONAL KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, KOMUNITAS ADAT DAN TRADISI TAHUN 2012

Pada tanggal 25-28 November 2012 telah dilaksanakan Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kongres dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Metode kegiatan dilakukan dengan penyajian materi oleh narasumber, tanya jawab interaktif, dan peserta dibagi ke dalam 4 (empat) Komisi secara representatif, yaitu Komisi satu tentang Redefinisi Konsep Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa; Komisi Dua tentang Advokasi dan Pemberdayaan; Komisi Tiga Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, dan Komisi Empat Kebijakan dan Strategi Implementasi. Selanjutnya, hasil sidang komisi itu didiskusikan di Tim Perumus yang merupakan perwakilan dari organisasi penghayat, komunitas adat dan tradisi, pada sidang pleno kongres untuk menyempurnakan rumusan hasil kongres

Peserta kongres sebanyak 750 orang terdiri atas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat dan tradisi dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.

Berdasarkan laporan Ketua Panitia, sambutan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pidato Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, paparan nara sumber, diskusi interaktif, sidang Tim Perumus dan sidang pleno, maka dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

Komisi I

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sistem penghayatan hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa yang didasarkan pada sistem kesadaran yang bersumber pada nilai spiritual warisan leluhur.
2. Pendidikan budi pekerti merupakan suatu keharusan untuk membentuk karakter budi luhur dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai budaya spiritual yang bersumber pada kearifan lokal.

Rekomendasi

1. Negara menjamin kesetaraan dalam sistem pengelolaan dan pelayanan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat dan tradisi.
2. Mengusulkan pembentukan Kementerian Kebudayaan.
3. Pentingnya pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan tradisi dalam konstitusi.
4. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban membangkitkan kembali Pancasila menjadi jiwa dan karakter bangsa.
5. Pemerintah berkewajiban untuk menghidupkan, melestarikan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai spiritual Ketuhanan Yang Maha Esa, warisan aktifitas budaya dan warisan budaya hidup (masyarakat adat) yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar generasi penerus mengenal dan mencintai budaya bangsanya.
6. Pemerintah berkewajiban menggali nilai-nilai kearifan lokal/budaya bangsa dalam menjaga dan melestarikan hidup.

Komisi II

1. Pentingnya membentuk Lembaga Advokasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME/Agama Leluher, Komunitas Adat dan Tradisi untuk konsultasi, penyuluhan dan bantuan hukum sesuai Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Pentingnya mengawal proses pembahasan dan pengesahan RUU (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat) dengan memperhatikan usulan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang sudah diserahkan ke DPR RI melalui Badan Legislasi (BALEG).
3. Pentingnya Menginventarisir ulang terhadap Penghayat Kepercayaan/Agama Leluher, Komunitas Adat dan Tradisi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama leluher.

4. Pentingnya penghayat menyiapkan Kurikulum Pendidikan Budi Pekerti yang memuat ajaran spiritual yang berbasis pada keraifan lokal dan kepercayaan leluhur untuk diajarkan di lembaga pendidikan.
5. Meminta kepada Pemerintah untuk segera mengimplementasi pemenuhan hak-hak konstitusional bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi dalam sistem hukum NKRI.
6. Merekomendasikan kepada HPK, BKOK, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas/masyarakat adat dan tradisi sebagai penyalur aspirasi ke tingkat pemerintah pusat.
7. Meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memuat dalam kurikulum pendidikan bidang studi agama leluhur, kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi bagi anak didik masyarakat adat, penghayat kepercayaan dan tradisi.
8. Agar seluruh sumber daya Kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas adat dan tradisi dijadikan sebagai bagian yang strategis dalam rangka pembangunan kebudayaan, pembangunan karakter dan jatidiri bangsa.
9. Merekomendasikan agar Urusan Kebudayaan dan Kepercayaan dipisahkan dari Kementerian Pendidikan.
10. Perlu dilakukan penguatan kapasitas, revitalisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat dan tradisi
11. Mengusulkan hari libur nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.
12. Dalam pembuatan peraturan dan kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi/ Daerah harus melibatkan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat dan tradisi.
13. Pemerintah menganggarkan dana melalui APBN dan APBD untuk seluruh kegiatan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat dan Tradisi.
14. Perlu mengembangkan jejaring sosial antar para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kepercayaan/Agama Leluher yang menyeluruh mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan.

Rekomendasi

1. Mendorong agar terus-menerus dilakukan ruang dialog antar penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, Tradisi dan agama dalam masyarakat, baik yang difasilitasi Negara maupun kelompok-kelompok dan atau organisasi agar mencari masukan dan formula melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan norma, nilai-nilai, prinsip dan kearifan para Penghayat, Komunitas Adat dan Tradisi. Dalam hal ini mengenai Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat dan Tradisi sebagai bagian dari perwujudan kehidupan berbangsa Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Komunikasi vertikal dan horisontal dilakukan secara damai dan saling menghormati, untuk menemukan hakikat dan prinsip yang sama, dalam rangka menempatkan Para Penghayat Kepercayaan/Agama Leluher bukan dalam posisi yang berhadapan, bertentangan atau berlawanan serta menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Mendorong terciptanya pemahaman umum untuk menempatkan Kepercayaan/Agama Leluher dalam posisi yang sejajar dan setara, mendesak agar Negara memperlakukan Kepercayaan/Agama Leluher setara dengan enam Agama lainnya,

sehingga kami dapat menjalankan Kepercayaan/Agama Leluhur kami dengan kepastian. Bahwa masing-masing memiliki hak ruang dan kesempatan yang sama untuk memberi peran bagi pembangunan kebudayaan Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

3. Mendorong kehidupan Warga Negara yang aman dan sejahtera dalam identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka dan Berketuhanan Yang Maha Esa. Melalui Kongres Nasional ini menegaskan tentang pentingnya menghormati dan melestarikan keragaman budaya nusantara, sehingga setiap bentuk pembangunan harus dilakukan dengan tetap menghargai dan berorientasi pada norma, nilai-nilai, prinsip dan kearifan para Penghayat, Komunitas Adat, budaya dan tradisi.
4. Mendesak pemerintah agar membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang mengakui eksistensi kami sebagai Penghayat, Kepercayaan-an/Agama Leluhur, sehingga tradisi kami dapat terpelihara dan tersosialisasikan dengan baik.
5. Mendorong agar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,, Komunitas Adat dan Tradisi melakukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan di bawahnya agar mengakui, menghormati dan memelihara Kepercayaan/Agama Leluhur yang kami jalankan.
6. Mendorong agar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat dan Tradisi untuk melakukan pengawalan dan memasukkan jaminan praktek Kepercayaan/Agama Leluhur dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, termasuk menambahkan pasal-pasal yang berpihak kepada perempuan.
7. Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Para Penghayat, Kepercayaan/Agama Leluhur.

Komisi III

1. Pembentukan wadah tunggal Dewan Kepercayaan yang diberi nama DE-WANTARA.
2. Penghayat dan Pemerintah bekerja sama dalam menyusun materi bahan ajar untuk pendidikan budi pekerti untuk anak didik para penghayat.
3. Kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk dihilangkan.
4. Pentingnya pembentukan lembaga advokasi untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, komunitas adat, dan tradisi.
5. Mengusulkan Mr. Wongsonegoro sebagai Bapak Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Pahlawan Nasional.
6. Perlunya dibentuk lembaga pendidikan anak usia dini untuk putra-putri penghayat untuk mewariskan nilai-nilai spiritual sejak dini.
7. Pentingnya mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Perijinan tempat ibadah/sanggar dan tempat pemakaman.

Komisi IV

Pendidikan Budi Pekerti dimasukkan/diajarkan dalam kurikulum pendidikan di semua

jenjang bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya peraturan Menteri yang mengatur tentang pendidikan Kepercayaan di sekolah bagi peserta didik dari Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi sesuai dengan keyakinan peserta didik.
2. Diperlukan revisi/amandemen Undang-undang sistim pendidikan nasional dan atau PERPPU sesuai dengan tuntutan kaum Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi.
3. Pendidikan Pancasila diberikan kembali secara mendetail sesuai jenjangnya.

A. Hak-Hak Sipil

1. Sosialisasi Undang-undang dan atau peraturan pemerintah tentang eksistensi dan keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi.
2. Pemerintah memberi pembekalan dan pembinaan kepada pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi secara kontinyu dan berkesinambungan.
3. Jaminan pemenuhan hak-hak sipil bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi.

B. Pencitraan

- 2 Mengusulkan kepada pemerintah agar ada standarisasi isu di bidang kebu-dayaan supaya tidak ada tanggapan negatif/stigmatisasi kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi.
- 3 Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan atas tayangan yang menyudutkan atau melecehkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi.
- 4 Mengajukan somasi kepada pelaku media yang membuat tayangan yang melecehkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi.
- 5 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers Indonesia (DPI) harus dan wajib menegur media yang memuat hal-hal yang menyudutkan atau melecehkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi.
- 6 Mengusulkan kepada DPR RI agar dibuat undang undang perlindungan terhadap komunitas Adat dan tradisi.
- 7 Mengusulkan kepada pemerintah agar menegaskan kembali ketetapan tahun baru nasional Indonesia pada tanggal 1 Suro Tahun Saka.
- 8 Meningkatkan kerjasama antar-Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi dalam memperingati hari-hari besar Nasional.
- 9 Mengusulkan kepada pemerintah agar memfasilitasi Sosialisasi nilai-nilai luhur Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi melalui media cetak maupun elektronik.

C. Kebijakan dan Strategi

1. Terbentuknya Kementerian Kebudayaan.
2. Disetarakannya kedudukan antara Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi dengan Agama yang ada sekarang dalam konteks pendidikan.
3. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
4. Pelaksanaan Kongres Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi secara berkala.
5. Menghilangkan diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi.

Surabaya, 28 November 2012

Tim Perumus



Penyerahan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi perdana pertama, kepada Presiden Soeharto oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan, yang diluncurkan bersamaan dengan Kongres Bahasa

BAB VI

KONGRES BIDANG ILMU PENGETAHUAN

Kongress Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) merupakan ajang pertemuan ilmiah empat-tahunan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 1958. Dalam perkembangan selanjutnya penyelenggaraan kongres tidak hanya ditangani oleh LIPI tetapi mulai tahun 1986 penyelenggaraan KIPNAS IV dilaksanakan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertimbangannya, karena KIPNAS merupakan ajang pertemuan ilmiah lintas keilmuan dari para ilmuwan dan akademisi Indonesia, yang dalam hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Berbeda dengan pertemuan ilmiah pada umumnya, penyelenggaraan KIPNAS dititikberatkan sebagai ajang bagi para ilmuwan Indonesia untuk menyampaikan pemikiran dan pengalaman dalam upaya menjawab secara mendasar tantangan dan permasalahan terkini yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertemuan para ilmuwan Indonesia lintas disiplin ini diharapkan melahirkan aneka rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah bagi para pemangku kepentingan terkait. Gambaran tentang tema dan hasil KIPNAS dari tahun 1958 adalah sebagai berikut.

A. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional I 1958

Kongres pertama diselenggarakan di kota Malang, pada tanggal 3-9 Agustus 1958. Kongres ini diprakarsai oleh Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam kongres ini belum ditentukan tema kongres secara khusus. Kongres pertama diselenggarakan pada tahun 1958 di Malang yang dibuka secara resmi oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Setelah beberapa tahun tidak diadakan, akhirnya pada tahun 1983, KIPNAS ketiga diadakan kembali dan selanjutnya kongres diadakan secara konsisten setiap 4 (empat) tahun sekali. KIPNAS merupakan kerjasama antara LIPI dan Depdiknas. Dalam kongres ini Drs. Moh. Amir Sutaarga yang tahun 2010 yang lalu mendapat gelar “Bapak Permuseuman Indonesia” telah menjadikan pintu masuk untuk memperkenalkan museologi sebagai suatu ilmu tersendiri. Dengan makalah berjudul

“Museum Ethnografi, Perkembangan dan Fungsinya”, menjadikan Amir Sutaarga sebagai pioner dalam memperkenalkan ilmu museum pada Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dan usahanya itu kini telah menjadi kenyataan.

B. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional II 1962

Kongres berikut (II) diselenggarakan di Yogyakarta 22-29 Oktober 1962. Kongres ini juga masih tanpa tema khusus, diselenggarakan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia.

C. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional III 1981

Kongres III diselenggarakan pada tanggal 15-19 September 1981 di Jakarta. Tema yang diambil adalah “Pengembangan Iptek dalam Menjangkau Tujuan Nasional”. Penyelenggara kongres adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

D Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV 1986

Kongres diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 8-12 September 1986 dengan tema “Sumbangan Iptek dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Nilai Tambah Sumberdaya Alam untuk Mempersiapkan Tinggal Landas Pembangunan”. Kongres kali ini diselenggarakan bersama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional V 1991

Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) V diselenggarakan pada tanggal 3-7 September 1991 di Jakarta. Tema yang dipilih adalah “Membangun Masyarakat Industri Modern berdasarkan Pancasila”. Kongres diselenggarakan oleh 3 lembaga, yaitu (1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan (3) Organisasi Profesi Ilmiah.

F. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VI 1995

Kongres memilih tema “Peranan Ilmuwan Indonesia dalam Proses Pembangunan menghadapi Abad XXI”. Kongres diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12-16 September 1995. Pelaksanaan kongres oleh tiga lembaga, yaitu: (1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; (2) Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan (3) Forum Organisasi Profesi Ilmiah.

G. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VII 1999

Kongres diselenggarakan di 9-11 September 1999 di Kompleks Puspiptek Serpong, Tangerang. Penyelenggaranya: (1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional; dan (3)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tema kongres adalah "Kemandirian dan Profesionalisme Ilmuwan Menuju Masyarakat Madani Indonesia".

H. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VIII 2003

Kongres KIPNAS pertama setelah reformasi diselenggarakan pada tanggal 9-11 September 2003 di sebuah hotel besar, yaitu Hotel Bumikarsa, Menara Bidakara, Jakarta. Kongres mengambil tema "Peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Membangun Kehidupan Bangsa yang Cerdas dan Berbudaya". Penyelenggara kongres adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional.

Di akhir kongres disepakati suatu deklarasi yang bunyinya sebagai berikut:

DEKLARASI ILMUWAN KONGRES ILMU PENGETAHUAN NASIONAL VIII (2003)

MEMPERKOKOH PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN MENUJU KEBANGKITAN KEMBALI BANGSA INDONESIA

Krisis yang berkepanjangan dan rusaknya sendi-sendi ekonomi Indonesia adalah bukti nyata bahwa pembangunan nasional yang hanya mengandalkan pada ekonomi yang berbasiskan sumberdaya alam dan tenaga kerja tanpa didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak mampu membangun landasan pembangunan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Kegagalan dalam transfer teknologi yang berarti, berakar dan berkelanjutan, yang diharapkan dari industri dengan teknologi import memperlihatkan bukti lemahnya landasan keilmuan di Indonesia. Sangat rendahnya kontribusi Indonesia terhadap khasanah ilmu pengetahuan dunia, adalah bukti tambahan dari kelemahan ini.

Kunci perkembangan Negara dan Bangsa di masa yang akan datang, terutama dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terletak pada strategi yang ditujukan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan efektifitas dari penerapan dan peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan. Dalam proses globalisasi yang semakin timpang yang kita alami sekarang, hal ini juga menuntut terwujudnya landasan perkembangan Teknologi yang bersaing. Realitas kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini menunjukkan betapa masih rendahnya komitmen dan penghargaan masyarakat, negara dan bangsa ini terhadap pentingnya kemampuan ilmu pengetahuan yang inovatif. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya alokasi anggaran bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan minimnya kontribusi anak Bangsa dalam khasanah ilmu pengetahuan, dan adopsi teknologi dalam negeri ke dalam produk-produk industri nasional. Jika hal ini terus berlanjut maka masyarakat ilmiah negara bangsa ini seakan semakin teralienasi dalam perkembangan global.

Tingginya laju arus tenaga ahli Indonesia ke negara-negara tetangga (brain drain), belum berkembangnya budaya ilmiah, terisolasinya masyarakat ilmuwan Indonesia di dalam kancah masyarakat ilmiah internasional dan timpangnya perhatian antara ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjukkan lemah dan kurang tepatnya strategi kebijakan

dan pandangan dalam menumbuhkan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi secara adil dan memadai.

Indonesia saat ini telah mempunyai landasan konstitusional bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Namun demikian, legislasi tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk tataran yang lebih operasional, berjangkauan waktu yang panjang dan dalam tahap pencapaian yang lebih tajam.

Kemampuan teknologi anak bangsa masa lampau yang cukup dapat dibanggakan seperti pembuatan Candi Borobudur dan Kapal Phinisi hendaknya menjadi inspirasi para ilmuwan Indonesia dalam membangun keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di masa mendatang. Mengantisipasi arah perkembangan dunia di masa mendatang yang mengarah pada terbangunnya masyarakat berdasarkan pengetahuan (knowledge base society), maka dengan ini Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional mendeklarasikan:

- Pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan nasional sudah seharusnya tidak lagi hanya berpijak pada ekonomi yang berbasis sumberdaya alam dan tenaga kerja semata/belaka. Secara bertahap negara harus berani mengambil keputusan kebijakan dengan memper-timbangkan masukan unsur-unsur berdasarkan budaya ilmiah dalam langkah perencanaan operasional jangka panjang pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan;
- Perkembangan teknologi di suatu negara akan berkembang secara kokoh dan pesat apabila didukung oleh penguasaan dan penghayatan khasanah Ilmu pengetahuan mendasar yang kuat. Negara harus lebih menekankan pada upaya pengembangan khasanah ilmu pengetahuan secara memadai dan konsisten agar pertumbuhan teknologi yang berbasiskan prinsip pembangunan berkelanjutan selalu bisa digalakkan. Oleh karenanya, Ilmuwan Indonesia mendorong Pemerintah untuk memunculkan pengarusutamaan (main streaming) ilmu pengetahuan sebagai gerakan nasional untuk memperkuat landasan pembangunan bangsa, dan penancangan tahun 2005 sebagai Tahun Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- Pemerintah perlu mengupayakan secara berimbang, cepat dan tanggap dalam mencermati dan menengarai peningkatan laju arus-keluar tenaga-tenaga ahli Indonesia (brain drain) ke luar negeri dengan meningkatkan suasana yang kondusif bagi pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya peningkatan penghargaan yang memadai bagi para pegiat ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu langkah yang berharga;
- Negara perlu mempercepat dihasilkannya strategi jangka panjang kebijakan pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan amanah konstitusi secara terencana, sistematis dan bertahap. Perwujudan peta-jalan (land mark) ilmu pengetahuan dan teknologi 2004-2020 dalam ketahanan pangan dan ketersediaan energi, dapat dijadikan titik mula grand strategy pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun harus dilandasi pada riset ilmu pengetahuan yang mendasar;
- Ilmuwan Indonesia, sebagai komponen anak bangsa, dalam upaya mem-berikan kontribusi di dalam pembangunan nasional dan menyikapi berbagai problematika bangsa harus tetap menjaga dan berpijak pada dasar-dasar ilmiah yang netral dan tidak berpihal. Di samping ketentuan tempat tujuan dari pengerjaan keilmuan mereka senantiasa harus dibimbing oleh kesadaran etik yang humanistik. Ilmuwan

Indonesia harus selalu meningkatkan kualitas penelitiannya dalam menguasai ilmu pengetahuan serta penjabarannya untuk dapat diterapkan di masyarakat.

I. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IX 2007

KIPNAS ke IX diselenggarakan di Hotel Mercure Convention Center, Jakarta (dulu hotel Horizon, di Ancol), Jakarta pada tanggal 20-22 November 2007. Temanya adalah *"Harmonisasi IPTEK dengan Alam dan Budaya Indonesia untuk Menuju Masyarakat Sejahtera"*, diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia masih bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional.

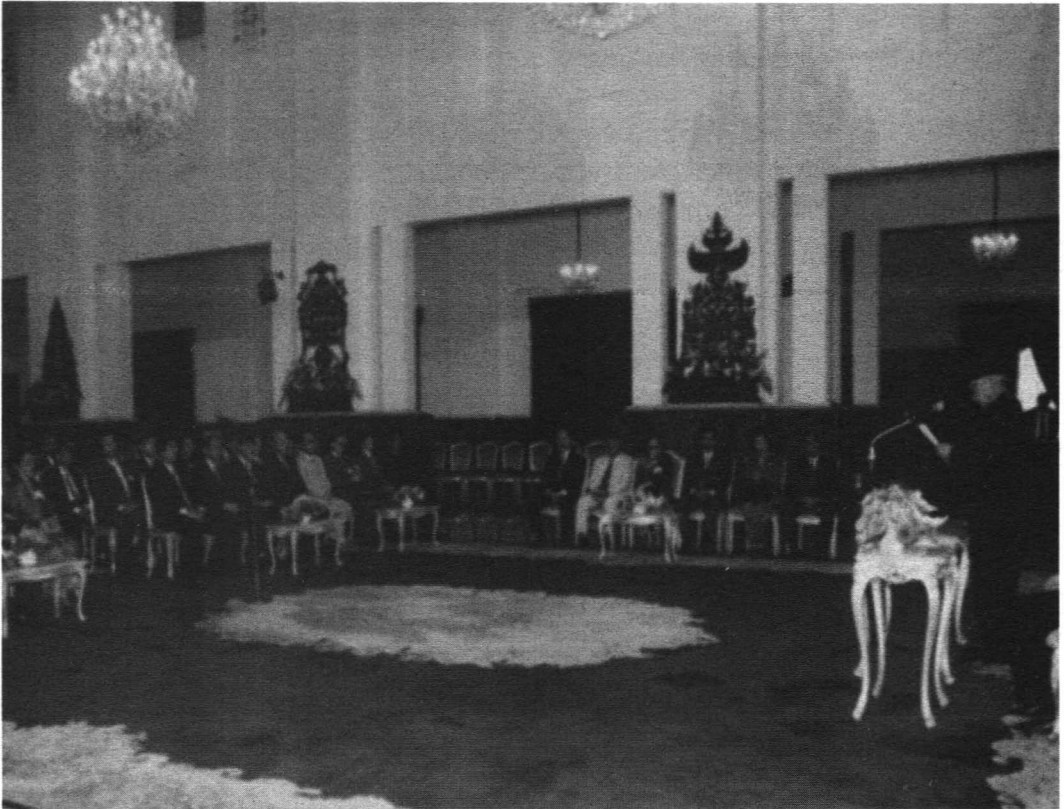
J. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional X 2011

Kongres diselenggarakan pada tanggal 8-10 November 2011 di Hotel Bumikarsa, Menara Bidakara, Jakarta. Tema kongres *"Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Memabngun Kemandirian serta Kedaulatan Bangsa dan Negara di tengah Perubahan Global"*. Kongres diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Kementerian Pendidikan Nasional.

KIPNAS IX ini akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 November 2007 di Mercure Convention Center, Jakarta dengan tema *"Harmonisasi Iptek, Alam, dan Budaya Indonesia Menuju Masyarakat Sejahtera"*. Pengambilan tema ini berkaitan dengan perubahan iklim baik global maupun lokal yang mempengaruhi budaya dan kehidupan bangsa Indonesia belakangan ini. Misalnya dampak dari global warming yang ditunjukkan dengan seringnya terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia telah sepakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Namun apabila masalah perubahan iklim dan pemanasan global tidak segera ditangani, tentunya tujuan tersebut tidak akan tercapai sehingga diharapkan dengan diselenggarakannya KIPNAS IX ini mampu memberikan alternatif solusi permasalahan dampak pemanasan global dan perubahan iklim pada lima bidang, yaitu air, energi, pertanian, kesehatan dan keanekaragaman hayati.

KIPNAS IX selain dihadiri oleh para pakar dalam negeri, juga akan menghadirkan pakar dari luar negeri yakni dari Turki dengan Global Warming-nya dan Korea Selatan dengan pembangunan nuklirnya.



Presiden Soeharto menyampaikan amanatnya pada acara penerimaan peserta Kongres Kesenian Indonesia I, di Istana Negara, 6 Desember 1995.

BAB VII

KONGRES BIDANG KESENIAN

Kesenian Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Berbagai tinggalan masa lalu menunjukkan bahwa bangsa yang mendiami wilayah Nusantara telah memiliki berbagai aspek seni yang tinggi. Jenis kesenian itu antara lain: musik, tari, teater, seni rupa, seni sastra (lisan dan tertulis), pedalangan, kerajinan dll. Dalam pemerintahan kerajaan bahkan sudah tumbuh pengaturan mengenai kegiatan kesenian. Seperti ditulis oleh Drs. Dwi Cahyono M. Hum, berdasarkan hasil penelitiannya pada sumber berbagai prasasti dan sumber susastra (a.l. Arjunawiwaha, Suma-nasantaka, Samaradahana, Kidung Sudamala, Sotasoma, dll.) masa abad X hingga XVI ditemukan berbagai data yang menunjukkan bahwa pada masa itu lembaga kebudayaan telah masuk dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Lembaga itu dibentuk berfungsi sebagai 'wadah' untuk mengurus kegiatan berkebudayaan khususnya seni pertunjukkan pada saat itu (Dwi Cahyono, M.Hum, 1995: hal 1). Dari sumber prasasti ditemukan sebanyak 12 buah jabatan. Beberapa jabatan itu antara lain: hulu warak (luwarak, aluwarak), adalah kepala (pemimpin) dari seni 'teater' atau pemimpin para pemain wayang atau tontonan lainnya di lingkungan kraton; mapadahi atau apadahi yaitu penjabat yang bertugas mengurus pemain genderang; juru kala, yaitu penjabat yang bertugas mengurus pemain (peniup?) kala. Di samping itu ada jabatan yang disebut manimpiki, yaitu penjabat yang bertugas mengurus para pemain wayang; juru ning mangrakat, yaitu pejabat yang bertugas mengurus para pemain topeng; dan juru bañol, yaitu pejabat yang bertugas mengurus dan menarik pajak bagi para pelawak. Sementara itu dari sumber susastra ditemukan jabatan-jabatan yang berkaitan dengan seni pertunjukan seperti: (1) luwarak, yaitu pejabat yang bertugas mengurus resitasi cerita; (2) juru bañangah, pejabat yang bertugas mengurus cerita, legenda, sejarah; (3) rakyan demung, pejabat yang bertugas mengurus membina 7 musisi (sapta swara, atau dapat pula berarti "instrumen yang punya 7 nada") nyanyian (gita), tarian (nreta) dan hal-hal yang berkenaan dengan keindahan (panjong-panjong). Beberapa jabatan (dan kelembagaannya) itu berkembang terus hingga masa pemerintahan kerajaan berikutnya, dan bahkan hingga masa pemerintahan Indonesia merdeka.

Kesenian diperbincangkan secara khusus dalam forum kongres memang baru

mulai tahun 1995. Bila dibandingkan dengan unsur kebudayaan yang lain seperti bidang bahasa, sastra (daerah dan Indonesia), sejarah, arkeologi, perpustakaan serta perbukuan, kesenian adalah yang paling akhir dan paling sedikit dalam melaksanakan kegiatan kongres. Tetapi kesenian masuk dalam perbincangan KK sudah sejak kongres pertama tahun 1918. Selain kongres, perbincangan masalah kesenian pernah dilaksanakan di Yogyakarta tahun 1955 dalam bentuk konferensi, khusus membahas masalah seni tari gaya Yogyakarta.

Kongres Kesenian Indonesia (KKI) pertama diselenggarakan dalam rangka menyambut 50 Tahun Indonesia merdeka. KKI ke-1 berlangsung atas inisiatif Prof. Dr. Edi Sedyawati, yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Kongres berikutnya diselenggarakan tahun 2005. Bila dibandingkan dengan bidang bahasa yang telah menyelenggarakan 9 kali kongres, maka penyelenggaraan forum kongres untuk bidang kesenian tergolong lambat. Selain kongres kesenian juga telah berlangsung konferensi seni dan kongres unsur seni, seperti Kongres Pewayangan.

Gambaran tentang permasalahan, pembahasan dan rumusan hasil dari masing-masing kongres dan konferensi bidang kesenian adalah sebagai berikut.

A. Konferensi Seni Tari Yogyakarta 1955

Konferensi ini memang terbatas membahas seni tari Yogyakarta. Tetapi dalam kenyataan perbincangan meluas mencakup seni tari seluruh Indonesia. Seperti tercermin dari kesimpulan I, II dan III, mencakup permasalahan kesenian secara umum, tidak hanya seni tari dan tidak hanya tari gaya Yogya. Demikian pula mengenai tingkatannya, tidak hanya kesenian daerah saja tetapi juga kesenian nasional.

Konferensi diselenggarakan di Yogyakarta mulai tanggal 10 sampai dengan 12 November 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 9 (sembilan) buah organisasi seni tari dari Bandung, Semarang, Magelang dan Yogyakarta, dengan peserta sebanyak 106 orang. Konferensi diselenggarakan di "Wijoto Prodjo", Yogyakarta. Dalam konferensi ini diperdebatkan 3 topik makalah, yaitu: (1) Hubungan Seni Tari dengan Masyarakat, pemakalah Kusumobroto; (2) Pengajaran dan Gerakan Seni Tari Jogja, pemakalah Sudharso Pringgobroto, BPH. Surjobronto dan KRT. Wironegoro; (3) Keadaan dan Nasib Seniman Tari, pemakalah Sujadi Hadisuwanto, Sindusiswara, dan Kusnadi. Sebagai narasumber adalah: (1) Ki Hadjar Dewantara; (2) Mr. Wongsonegoro; (3) B.P.H. Soerjodiningrat; dan (4) G.P.H. Tejakoesoema.

Kesimpulan dari konferensi antara lain:

Kesimpulan Seksi I: Hubungan Seni Tari dengan Masyarakat.

1. Seni tari ialah pengucapan pribadi manusia sebagai individu dalam masyarakat dalam bentuk gerak yang berirama.
2. Pengucapan pribadi sebagai individu ini seharusnya mengandung kebebasan dalam melaksanakannya. Paksaan-paksaan dalam pengucapan akan mengakibatkan adanya pengucapan yang tidak sewajarnya.
3. Individu sebagai anggota masyarakat sudah barang tentu mempunyai tanggung

- jawab atas perkembangan masyarakat yang menuju kesempurnaan.
4. Perkembangan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat saling mempengaruhi. Jadi di dalam kehidupan kesenian dengan kehidupan masyarakat terdapat saling berpengaruh secara timbal balik.
 5. Seni tari mempunyai daya pengaruh yang baik kepada kehidupan kelahiran.
 6. Masyarakat bertanggungjawab terhadap perkembangan Seni Tari secara semajarnya.
 7. Sejarah seni tari Jogja menunjukkan betapa eratnya hubungan seni tari dengan masyarakat.
 8. Maka dari itu tugas seni tari ialah menciptakan keselarasan antara kehidupan seni dengan kehidupan masyarakat.

Kesimpulan Seksi II: Pengajaran dan Gerakan Seni Tari Jogja

1. Pengajaran/pendidikan dan Gerakan Kesenian Daerah hendaknya berazas "Kebudayaan Nasional" dan bertujuan "Mengembangkan rasa cinta dan daya cipta seni, membentuk suasana kesenian di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi baik kepada jiwa hidup manusia".
2. Usaha-usaha dari Badan-badan Kesenian/Seni Tari hendaknya mengingat kepentingan masyarakat pada umumnya. Usaha-usaha yang ditujukan untuk kepentingan golongan atau perseorangan semata-mata yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya wajib dihalang-halangi.
3. Tiap-tiap Badan-badan Kesenian/Seni Tari hendaknya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya di dalam menentukan jalan usaha-usahanya menurut faham dan pikirannya sejalan dengan keadaan dan jiwa alam sekitarnya. Paksaan dari salah satu golongan merupakan penghalang bagi kebebasan jiwa pertumbuhan keseniannya.
4. Bentuk-bentuk seni tari Jogja yang telah ada dipelajari oleh organisasi-organisasi yang sekarang ini turut berkonferensi, merupakan warisan dari para leluhur kita, perlu dipelihara dan dapat dipakai sebagai dasar usaha mendapatkan bentuk-bentuk seni tari yang baru yang lebih sesuai dengan jiwa dan kehendak zaman. Di dalam usaha mendapatkan bentuk-bentuk yang baru perlu ada kontinuitet dengan bentuk-bentuk yang lama.
5. Badan-badan Usaha Kesenian/perseorangan yang bersifat "Beroep" merupakan tempat penampungan bagi tenaga-tenaga kesenian untuk mendapatkan bekal hidupnya, dan usaha-usaha kesenian (organisasi maupun perseorangan) yang bersifat "Amateurisme" yang berpribadi dan bertanggung jawab merupakan tindakan yang luhur dan utama.
6. Penilaian hasil-hasil kesenian dari usaha-usaha yang bersifat "Beroep" dan "Amateurisme" adalah sama, asalkan nilai ketinggian keseniannya adalah sama pula.

Kesimpulan Seksi III: Keadaan dan Nasib Seniman Tari

1. a. Segera melaksanakan pemberian subsidi kepada organisasi-organisasi kesenian.
b. Memasukkan anggaran pemberian subsidi kepada Badan-badan Kesenian dalam Anggaran Belanja Negara.
2. Segera mendirikan Akademi Seni Tari.

Selain menghasilkan kesimpulan, konferensi menyampaikan RESOLUSI yang antara lain berbunyi: "...memutuskan:

Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya:

1. a. Segera melaksanakan pemberian subsidi kepada organisasi-organisasi kesenian.
b. Memasukkan anggaran pemberian subsidi kepada Badan-badan Kesenian dalam Anggaran Belanja Negara.
2. Segera mendirikan Akademi Seni Tari.
3. Membantu mendirikan gedung-gedung kesenian".

Resolusi tersebut disampaikan kepada: (1) Yth. PYM. Perdana Menteri RI; (3) YM. Menteri PP dan K RI; (5) Ketua DPR RI.

B. Kongres Kesenian Indonesia (KKI)

B.1 Kongres Kesenian Indonesia I 1995

Kongres kesenian pertama diselenggarakan pada tanggal **3 - 7 Desember 1995**, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, sebagai salah satu kegiatan memperingati 50 tahun Indonesia merdeka. Kegiatan ini mempunyai arti yang penting bagi sejarah perkembangan seni di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka belum pernah diselenggarakan kongres, seperti yang tertulis di dalam buku Panduan, yang menyatakan bahwa:

"...selama 50 tahun Indonesia merdeka, dunia kesenian belum pernah mendapatkan perenungan yang menyeluruh, meluas dan mendalam. Selama itu, telah terjadi riak dan gejolak, yang sebab-sebab dan dampaknya seyogyanya dikenali. Mengenali daya-daya yang ada di belakang dinamika kesenian sangat penting bagi perencanaan ke depan".

Kenyataan ini amat berbeda jauh dengan yang telah dilakukan oleh unsur budaya yang lain. Unsur bahasa (bahasa daerah dan bahasa Indonesia), serta unsur sejarah telah lama memulai dan berkali-kali menyelenggarakan kongres.

Lahirnya kesenian Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya secara 'de facto' dan 'de jure' bangsa dan Negara Indonesia. Dengan lahirnya bangsa dan negara Indonesia lahir pula kebudayaan dan kesenian Indonesia. Kesenian tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dengan kehidupan di masyarakat. Kesenian tidak dapat dipisahkan antara unsur yang satu dengan yang lain. Bahkan sampai pada unsur yang terkecil sekalipun. 'Seorang petugas pemotong karcis masuk adalah bagian dari

'art community,' kata Saini KM, Ketua Panitia Penyelenggara. (Pelita, 1/12/1995). Oleh karena itu KKI I mencoba mengakomodasikan semua potensi yang ada di masyarakat.

Dalam kehidupan kesenian yang berkembang di lingkungan masyarakat mana pun dikenal adanya kelompok-kelompok yang berperan penting, yaitu: (1) Seniman; (2) Pengelola, pengusaha, atau sponsor seni (dengan ancangan komersial); (3) Pelindung seni (dengan ancangan pelestarian / pencarian nilai); (4) Penikmat / konsumen karya-karya seni; (5) Pemikir seni dan kritikus; dan (6) Penentu kebijakan (pemerintah). Masalah pokok kesenian terjadi di sekitar hubungan antara unsur-unsur itu. Yang selalu timbul adalah bagaimana dapat dilakukan koordinasi dan kerja sama yang terpadu sehingga mampu menciptakan kondisi masyarakat memanfaatkan kebebasan yang dapat menumbuhkan gairah untuk melakukan aktivitas penciptaan seni. Di samping itu, masalah lain yang perlu diperbincangkan adalah adanya tuntutan agar karya seni para seniman Indonesia dapat berfungsi memperkuat jatidiri. Seni tidak hanya ekspresi jiwa seniman, tetapi juga merefleksikan ekspresi bangsa Indonesia yang sanggup meningkatkan harkat dan derajat bangsa Indonesia.

Dalam kenyataan konsep berkesenian seperti itu, seniman harus menghadapi tantangan keras yang sulit untuk dihadapi. Kecenderungan untuk memosisikan peranan tolok ukur ekonomik di dalam masyarakat semakin kuat menerpa kalangan seniman kita. Bahkan tak dapat dielakkan keniscayaan bahwa kesenian untuk sebagian besar harus bergantung kepada usaha yang bersifat industri. Oleh karena itu masalah yang dihadapi dan dari waktu ke waktu harus diatasi adalah kerja sama antarsektor kegiatan dalam masyarakat. Dengan demikian sistem kesenian berkait dengan berbagai sistem lain, seperti: sistem perdagangan, sistem produksi, sistem informasi, sistem perundangan dan seterusnya.

Tujuan diselenggarakannya KKI pertama adalah untuk mengadakan tinjauan dan mencari jalan menumbuhkan kesenian, baik secara intuitif maupun melalui jalan penelitian, mengenai masalah-masalah apa yang pernah ataupun sedang dihadapi dalam kehidupan kesenian di Indonesia, serta mengenai pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh selama 50 tahun perjalanan negara Indonesia merdeka. Bertolak dari permasalahan tersebut, kongres memilih tema "**RETROSPEKSI DAN ANCANGAN KE DEPAN**". KKI I diselenggarakan pada tanggal **3 Desember sampai dengan 7 Desember 1995** di Jakarta.

Hasil Kongres

Berdasarkan hasil sidang Tim Perumus, Kongres Kesenian Indonesia I menghasilkan sejumlah rumusan dan rekomendasi. Kutipan secara lengkap hasil Kongres Kesenian Indonesia I sebagai berikut:

RUMUSAN KONGRES KESENIAN INDONESIA I TAHUN 1995 Jakarta, 3 – 7 Desember 1995

Kesenian Indonesia I Tahun 1995 bertujuan untuk mengadakan tinjauan dan mencari jalan Kongres menumbuhkan kesenian, baik secara intuitif maupun melalui jalan penelitian, mengenai masalah-masalah yang pernah ataupun sedang dihadapi,

serta mengenai pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh selama 50 tahun perjalanan negara Indonesia merdeka. Bertitik tolak dari tujuan tersebut, kongres diharapkan dapat mengajukan saran-saran untuk pembinaan kehidupan kesenian di Indonesia selanjutnya.

Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 ini diadakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dari tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 1995 dan diikuti oleh 475 peserta dari seluruh propinsi di Indonesia, yang terdiri atas seniman, pemikir dan kritikus seni, pengelola, pengusaha atau sponsor seni, pelindung seni, wartawan kesenian, serta penentu kebijakan (pemerintah).

Dalam kongres ini dibahas pokok-pokok permasalahan yang mengambil tema Retrospeksi dan Ancangan ke depan,, dengan pemilahan sudut pandang untuk tinjauan Kajian, Penilaian, dan Strategi.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-undang Dasar 1945, Bab XIII pasal 32, yang menyatakan bahwa Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, beserta penjelasannya;
2. Garis-garis Besar Haluan Negara yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Nomor II/MPR/1993;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1995 di Istana Negara;
4. Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pembukaan Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 pada tanggal 4 Desember 1995;
5. Makalah-makalah yang disajikan dan dibahas di dalam sidang pleno dan sidang kelompok;
6. Pandangan, tanggapan, usul, dan saran para pembicara dalam panggung debat;
7. Pandangan, tanggapan, usul, dan saran para peserta kongres.

maka Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 menghasilkan rumusan sebagai berikut:

I. Fungsi Kesenian dalam Masyarakat

1. Kesenian tumbuh dari dialektika antar unsur dalam sosok budaya masyarakat. Oleh karena itu, fungsi kesenian ada-lah membantu manusia untuk lebih memahami kehidupan. Untuk itu dibutuhkan keadaan yang kondusif agar penciptaan seni dan penikmatan seni dapat terjadi dengan optimal.
2. Salah satu persoalan yang mendesak adalah masalah perizinan untuk pertunjukan kesenian. Persoalan itu harus dipecahkan bersama oleh seniman, masyarakat, dan aparat penentu perizinan. Dalam hal ini diperlukan pengertian yang lebih baik dari semua pihak mengenai fungsi dan kedudukan seni dalam masyarakat. Pelarangan buku, sensor, pencekalan, dan pembajakan tercakup dalam persoalan.
3. Kesenian pada hakekatnya adalah tanggapan dan penilaian terhadap kehidupan. Hal ini memberikan isyarat pentingnya didorong kajian sosiologi terhadap seni untuk mendudukan sifat hakikat persoalan kesenian dan kemasyarakatan secara lebih tepat.

II. Kesenian Nasional dan Kesenian Daerah

1. Istilah kesenian nasional dan kesenian daerah timbul ketika kita sepakat untuk membentuk negara kesatuan. Pertemuan antara kesenian-kesenian daerah, nasional,

dan asing telah menumbuhkan jenis-jenis kesenian yang merupakan wujud baru dalam kebudayaan kita. Dalam kaitannya dengan itu kita harus segera menyusun peta kesenian Indonesia yang baru yang tidak sekedar didasarkan pada dikotomi nasional-nasional daerah atau klasik moderen.

2. Dalam kaitannya dengan pengembangan wisata budaya, kita harus menumbuhkan sikap yang hati-hati terhadap berbagai jenis kesenian yang sudah sejak lama tumbuh di daerah-daerah. Karena fungsi dan perannya yang khas, beberapa jenis kesenian tertentu tidak dapat diubah untuk kepentingan pariwisata.
3. Perkembangan kesenian tidak bisa dilepaskan dari usaha mencari khalayak yang lebih luas. Usaha itu wajar dan sah, serta harus dilaksanakan atas dasar kerja sama antara seniman, pemerintah, dan masyarakat. Namun kita juga harus sepenuhnya menyadari bahwa kecenderungan tersebut berakibat pergeseran fungsi dan kedudukan kesenian dalam masyarakat.
4. Pergelaran kesenian dari berbagai daerah dalam festival nasional hendaknya tidak diselenggarakan sebagai lomba, tetapi digunakan sebagai bahan kajian untuk pengembangan kesenian selanjutnya.
5. Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jatidiri budaya masyarakatnya hendaknya tidak dikorbankan untuk kepentingan upaya mewujudkan kesenian nasional.

III. Seni dan Media

1. Agar media massa dapat memenuhi fungsinya dengan baik, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan:
2. Pendokumentasian kesenian oleh badan-badan pemerintah yang berwenang dalam masalah kesenian, lembaga-lembaga swasta, dan media massa perlu dimulai atau ditingkatkan.
3. Penyebarluasan informasi mengenai kesenian, termasuk peta kesenian, perlu dilakukan secara intensif, dan media massa perlu mengambil peran yang penting dalam penyebarluasan informasi ini.
4. Tenaga kerja di media massa perlu menguasai ilmu dan data-data kesenian, agar penyebarluasan informasi kesenian melalui media massa dapat dipertanggungjawabkan dari segi estetika, serta dapat memacu perkembangan kesenian. Di samping itu, penguasaan teknologi untuk meningkatkan mutu kesenian dan mutu informasi perlu terus ditingkatkan.
5. Agar media massa dapat menyebarkan informasi dengan baik dan agar masyarakat dapat menyerap informasi itu dengan baik, maka kebiasaan menulis dan kebiasaan membaca perlu ditingkatkan.
6. Memberikan perhatian yang lebih besar kepada karya seni yang tidak sekedar memenuhi selera pasar, agar media massa ikut memacu apresiasi masyarakat terhadap seni dan memacu kreativitas seni.
7. Meningkatkan fungsi media sebagai sarana internalisasi nilai-nilai seni yang bermutu tinggi.

IV. Kajian Seni

1. Kajian sejarah kesenian yang dilakukan oleh orang Indonesia masih sangat langka sementara yang sudah adapun sangat terbatas penyebarluasannya. Karena pentingnya jenis kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan kesenian, pemerintah perlu menyediakan kemudahan dan dana yang lebih besar agar penelitian di bidang itu di kalangan peminat seni maupun perguruan tinggi bisa ditingkatkan.
2. Banyaknya istilah yang beredar dalam kesenian kita sekarang ini di satu pihak menunjukkan kekayaan-kekayaan, namun di lain pihak juga bisa menyiratkan kekaburan konsep-konsepnya. Pengembangan kajian kesenian kita menuntut usaha yang terus menerus untuk lebih memahami konsep-konsep itu agar hasil-hasil yang dicapainya lebih bermanfaat untuk semua kalangan.

V. Seni dan Pendidikan

1. Dalam mengupayakan terciptanya manusia seutuhnya, pendidikan umum seyogyanya memantapkan kedudukan mata ajaran kesenian sebagai bagian integral dalam kurikulum.
2. Perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan kesenian yang terarah, bertingkat, dan berkala, untuk terbinanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat.
3. Hendaknya ada hubungan saling menunjang antara pendidikan kesenian di lembaga-lembaga formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi seni, dengan pendidikan non-formal kesenian.
4. Disamping seniman kreatif, perlu mulai dipikirkan pengadaan dan pembinaan sumber daya manusia lain, seperti kurator, dramaturg, kritikus, peneliti, seni dan impresario.
5. Pembinaan perguruan tinggi seni hendaknya juga diarahkan kepada upaya menjadikan perguruan tinggi seni sebagai pusat kebudayaan, dimana kreativitas, pengkajian, penelitian dan eksperimentasi seni dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
6. Perguruan tinggi seni hendaknya dianggap dan dijadikan modal utama di dalam melestarikan dan mengembangkan jatidiri kebudayaan di tempat perguruan tinggi seni itu berada.
7. Pendidikan kesenian hendaknya dimulai sejak usia dini.

VI. Seni dan Pariwisata

1. Dalam era kebudayaan global yang ditandai oleh teknologi informasi yang sangat canggih, keterkaitan unsur seni dalam industri pariwisata tidak dapat dielakan. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah tiga hal penting, yaitu wawasan dan kobaran semangatnya, teknologi yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, dan penceraian visi.
2. Untuk menghadapi hal tersebut perlu peningkatan kualitas seni dan senimannya.
3. Hanya dengan kualitas pribadi tinggi sebuah penciptaan karya seni yang bermutu dapat dihasilkan. Sehubungan dengan itu diperlukan segera adanya dokumentasi terhadap karya yang berupa ciptaan-ciptaan baru.
4. Namun demikian secara ideal pengembangan seni dan pembinaan seni tidak seluruhnya diperuntukan bagi kepentingan pariwisata, karena seni adalah bagian dari jatidiri bangsa yang perlu dijaga sebagai cerlang budaya kita.

VII. Seni dan Hukum

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai undang-undang Hak Cipta yang menyangkut kesenian perlu segera di susun.
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak cipta, perlu diupayakan penyebarluasan pemahaman hak cipta kepada segenap pihak yang terkait. Dalam kaitannya dengan itu, perlu dibuat kajian tentang konsep penciptaan pada masyarakat tradisi.

VIII. Seni dan Pengayoman

1. Seniman hendaknya memiliki sikap yang tegas terhadap campur tangan pengayom dalam menciptakan karyanya.
2. Keprofesionalan seniman perlu ditingkatkan agar kesenian dapat lebih disebarluaskan.
3. Di setiap daerah perlu dibentuk yayasan yang bertugas untuk mencari dan menghimpun dana yang berupa subsidi, donasi, sponsor, dan bantuan lainnya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi pengembangan kesenian di daerahnya.
4. Mengingat kesenian merupakan faktor yang sangat penting dalam lingkungan sosial budaya, maka dalam penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) kesenian sebagai unsur seni budaya perlu ikut diper-hitungkan. Mekanisme perlindungan hak cipta karya seni perlu ditingkatkan sehingga perlindungan tersebut dapat terlaksana secara efektif.
5. Lembaga-lembaga kesenian yang ada sebagai mitra Pemerintah dalam pelayanan masyarakat di bidang kesenian di daerah perlu meningkatkan mekanisme kerjanya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
6. Anggota DPR dan DPRD dari komisi yang menyangkut bidang kebudayaan perlu memperjuangkan anggaran yang memadai untuk pembiayaan pengembangan kesenian.
7. Mengingat kesenian sebagai komoditi merupakan aset pembangunan yang produktif maka KADIN perlu memberikan dukungan dan bantuan dalam pemasaran hasil kesenian.

IX. Seni dalam Tata Lingkungan

1. Tata lingkungan yang menyangkut arsitektur lansekap, perumahan, dan perkotaan hendaknya menampilkan ke-khasan dan jatidiri yang bertumpu pada iklim dan budaya setempat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia yang selalu berkembang.
2. Pembangunan kota perlu mempertimbangkan aspek fungsi, ekonomi, harmoni, dan estetika, dengan memperhitungkan persepsi dan aspirasi segenap lapisan masyarakat.
3. Perencanaan ruang luar dengan kelengkapan berupa perabot lansekap dan papan iklan berikut tata lampunya perlu ditata agar kota tidak sekedar fungsional tetapi juga estetis.
4. Upaya pelestarian warisan arsitektur dan konservasi kawasan kota kuno bersejarah perlu lebih digalakkan agar setiap kota dapat tampil sebagai karya seni sosial yang mencerminkan sejarah perkembangan masyarakatnya dari waktu ke waktu.
5. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mencari akar arsitektur tradisional dari khazanah budaya di segenap pelosok tanah air, untuk dijadikan

landasan dalam pengembangan tata lingkungan di masa mendatang.

6. Sangat dirasakan pentingnya panduan perencanaan dan perancangan berwawasan lingkungan dengan mekanisme pengawasan pembangunan yang dilengkapi sistem insentif dan disinsentif.

X. Refleksi atas Perkembangan Seni

1. Agar kekuasaan birokrasi dalam bidang kesenian di daerah dapat dikurangi karena sering menghalangi perkembangan kreativitas.
2. Agar penilaian dalam festival tari di tingkat nasional ditiadakan untuk mengurangi kecurigaan antar daerah.
3. Lebih memacu festival kesenian daerah daripada kesenian nasional untuk memberi peluang kreativitas lebih banyak kepada daerah.
4. Sistem pemberian anugerah seni perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Semua pihak dihimbau untuk mengerahkan opini dan lobi ke arah peningkatan masukan mengenai kesenian dalam persiapan naskah GBHN 1998.
5. Dalam hubungannya dengan perkembangan sastra, diusulkan agar pengajaran bahasa dan sastra ditunjang oleh kegiatan ekstra kurikuler.
6. Pemerintah dihimbau untuk meningkatkan fungsi Balai Pustaka sebagai penerbit buku-buku sastra, dan budaya di samping buku-buku teks dan umum.
7. Kemajuan seni perlu didukung oleh manajemen yang baik sesuai dengan bidang seninya masing-masing.
8. Dalam kaitannya dengan industri kebudayaan perlu diupayakan untuk mencari penyantun dana untuk jangka panjang.
9. Apresiasi masyarakat terhadap seni merupakan salah satu faktor penting. Oleh karena itu, perlu didukung oleh pendidikan kesenian yang memadai.
10. Kendala yang dihadapi dalam teater terutama adalah masalah pendanaan dan penonton atau konsumen teater.
11. Kehidupan teater yang normal tidak lepas dari hubungan antar seni dan masyarakat. Namun teater tidak boleh datang dengan intensitas kampanye politik atau sebagai alat propaganda.
12. Untuk menyiasati keberadaan teater di Indonesia, hendaknya dibentuk sebuah jaringan kerja teater.

Rekomendasi

1. Kongres Kesenian agar dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan menindaklanjuti keputusan kongres.
3. Agar Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan porsi yang lebih besar kepada kesenian dan kurikulum nasional.
4. Pemerintah perlu membuat kebijakan baru dalam pendidikan guru kesenian dengan mengaitkan lembaga pendidikan guru dan lembaga pendidikan kesenian.
5. Agar para seniman yang sudah mapan mendirikan sanggar kesenian untuk dapat meningkatkan apresiasi seni masyarakat.
6. Agar aparat pemerintah yang menangani kesenian dengan meningkatkan pengetahuannya mengenai kesenian sehingga dapat membantu perkembangan kesenian dan tidak memper-sulit pertumbuhan kesenian.

7. *Agar dipikirkan keberadaan lembaga bantuan hukum bagi seniman.*
8. *Agar dibentuk sebuah lembaga kesenian yang bersifat nasional yang menangani berbagai masalah kesenian yang muncul.*

Jakarta, 7 Desember 1995

Tim Perumus: (1) Sapardi Djoko Damono (Ketua); (2) Bakdi Sumanto (Sekretaris); (3) Yulianti L. Parani (Anggota); (4) Budi Darma (Anggota); (5) Saini KM. (Anggota); (6) Eko Budi-ardjo (Anggota); (7) Singgih Wibisono (Anggota); (8) Mukhlis PaEni (Anggota); (9) Samsudin Hardjakusumah (Anggota)

B.2 Kongres Kesenian Indonesia (KKI) II 2005

Sesuai rekomendasi hasil KKI ke-1 tahun 1995 di Jakarta, Kongres Kesenian agar dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Tetapi karena berbagai alasan KKI ke-2 baru dapat diselenggarakan 10 tahun setelah KKI ke-1. KKI ke-2 diselenggarakan pada tanggal 26-30 September 2005 bertempat di Padepokan Pencak Silat kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia selama sepuluh tahun (1995-2005) telah terjadi berbagai perkembangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesenian Indonesia. Glo-balisme yang melanda dunia yang sulit untuk dapat dihindari merupakan faktor eksternal telah mendorong tumbuhnya pandangan-pandangan baru dalam berkesenian. Selain itu, semangat reformasi dalam segala bidang yang digulirkan memasuki tahun 2000 merupakan faktor internal yang telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat demokrasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat tidak hanya menghasilkan keputusan-keputusan politis, namun juga telah menjadi "pupuk" dalam menumbuhkan kebebasan berekspresi dan berkreasi. Demikian pula halnya dengan perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik ke desentralistik berpengaruh pada perkembangan kesenian daerah. di Tanah Air. Sementara itu pemanfaatan kesenian sebagai salah satu aktivitas yang memiliki potensi ekonomi telah mendorong tumbuhnya industri budaya dan informasi. Telah lahir berbagai industri rekaman suara dan gambar, media cetak, stasiun radio dan televisi, pameran, pertunjukan seni dan lain-lain. Kesenian tidak dapat lepas dari pengaruh dinamika politik, ekonomi, sosial dan keamanan masyarakat bangsa Indonesia.

Berbagai perubahan itu memerlukan penyimakan, pengkajian dan pembahasan bersama dengan melibatkan berbagai elemen: seniman, budayawan, cendekiawan, wartawan, pemangku adapt, tokoh masyarakat dan pejabat. Tujuannya adalah untuk mencari titik pandang yang sama dalam menghadapi berbagai tantangan itu. Melalui forum Kongres Kesenian diharapkan dapat menghasilkan konsep, strategi dan kebijakan untuk memajukan kesenian Indonesia.

Tema, Subtema, Topik dan Pemakalah

Tema KKI ke-2 yang disepakati adalah **“Realitas, Dinamisasi dan Kesadaran Nasional dalam Kesenian”**. Adapun yang dimaksud dengan **Realitas** adalah yang berkenaan dengan seluruh kondisi, fakta dan wujud kehidupan kesenian di seluruh ranah budaya Indonesia, dalam seluruh konteks dan strategi yang dapat diperjuangkan dunia kesenian untuk menumbuhkan kiprahnya, khususnya dalam konteks Seni dan Industri.

Sementara itu, yang dimaksud dengan **Dinamisasi**, adalah yang berkenaan dengan perkembangan dan pencapaian atas berbagai kreasi seni dan studi terhadapnya, yang dinilai telah memberikan pertumbuhan yang menonjol dalam pemikiran, penggalian media seni dan pembaharuan fungsi cultural seni, dalam rentang waktu 60 tahun perjalanan bangsa.

Adapun yang dimaksud dengan **Kesadaran Nasional dalam Kesenian**, adalah yang berkenaan dengan pergeseran ide dan fungsi nasionalisme Indonesia, yang diakibatkan oleh proses dinamisasi seni yang terjadi, serta kompetisi timbal-balik antara Lokalisme, Nasionalisme dan Globalisme.

Dari tema pokok seperti di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) Subtema sebagai berikut:

1. Seni dan Industri dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Interna-sional.
2. Kajian dan Pendidikan Seni.
3. Fungsi Kesenian di Masyarakat.
4. Hukum, Profesionalisme Seni dan Pengelolaan.

Selanjutnya dari 4 (empat) Subtema tersebut dijabarkan ke dalam topik-topik dan sebagai pemakalah sebagai berikut:

1. Seni dan Industri dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Interna-sional, dengan topik:
 - a. Kebijakan Kemitraan Perusahaan/Yayasan Dalam Mendukung Kehidupan Seni, pemakalah Linda Hoemar.
 - b. Produk Hukum yang Memihak kepada Sistem Keringanan Pajak Perusahaan untuk Mendukung Kesenian, pemakalah Bidang Pajak.⁹
 - c. Eksplorasi Hubungan Mutualistik Seni dan Industri, pemakalah Arswendo Atmowiloto.
 - d. Proses Pewacanaan Seni Pada Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional, pemakalah Benny Johannes dan Sapto Rahardjo.
 - e. Kolaborasi Seni, Peluang dan Jebakan, pemakalah Hali-lintar Latief dan Boy G. Sakti.
 - f. Mengembangkan Gerak Kesenian Lokal yang Mandiri dan Sinambung, pemakalah Ben Pasaribu dan Sutanto Mendut.
2. Kajian dan Pendidikan Seni.
 - a. Optimalisasi Pendidikan Kesenian, pemakalah Cut Kamaril dan Sofyan Salam.
 - b. Perubahan Paradigma Pendidikan Kesenian, pemakalah Sutarno dan Setiawan

⁹ Pembicara dari DPR-RI dan Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) tidak hadir, membuat peserta kongres kecewa.

- Sabana.
- c. Menggali Pola Alternatif Pendidikan Seni Berbasis Tradisi, pemakalah Adi Rosa dan Endo Suanda.
 - d. Apresiasi Terhadap Sejarah Seni di Tanah Air, pemakalah Agus Burhan dan Yacob Sumarjo.
 - e. Tradisi Kritik dan Riset Seni, pemakalah Dwi Marianto dan Radar Panca Dahana.
 - f. Perluasan Pendidikan Formal Seni untuk Kawasan Timur Indonesia, pemakalah Hardiman dan Johannes Gluba Gebze.
3. Fungsi Kesenian di Masyarakat
 - a. Seni, Media Massa dan Ekses, pemakalah Sirikit Syah dan Ade Armando.
 - b. Komoditi dan Substansi Seni, pemakalah Arthur S. Nalan dan Krisna Murti.
 - c. Seni dan Perkotaan, pemakalah Eko Prawoto dan Adi Mursid.
 - d. Fungsi Terapeutik dan Katalisasi Seni di Wilayah Konflik, pemakalah Fikar AW Eda dan Indra B Wumbu.
 - e. Dinamika Kantung-kantung Budaya sebagai Budaya Tanding, pemakalah Firman Fenayaksa dan Gustaf Hariman.
 - f. Proteksi dan Advokasi Terhadap Seni Tradisi, pemakalah Putu Wirata dan Nungky Kusumastuti.
 4. Hukum, Profesionalisme Seni dan Pengelolaan Kesenian:
 - a. Perumusan UU Kebudayaan/Kesenian dan Pembentukan Departemen Kebudayaan untuk Mendukung Konsistensi dan Profesionalisme Seni, pemakalah Yesmil Anwar dan Eka Budianta.
 - b. Kompetisi Sebagai Penunjang Kreativitas dan Profesionalisme Kerja Seni, pemakalah Wiwik Sapala dan Asikin Hasan.
 - c. Perlukan Asosiasi Seniman di Indonesia, pemakalah Saini KM. dan Iriantine Karnaya.
 - d. Optimalisasi Peran Lembaga Kesenian, pemakalah Taufik Ikram Jamil dan Jafar Rasuh.

Sementara itu untuk sesi yang diberi judul “Forum Pekerja Seni,” menam-pilkan topik-topik:

- a. Dinamika dan Kreativitas Media Seni, oleh Purwatjaraka dan Nindyo A. Purnomo.
- b. Fenomena Kreasi Lintas Media dalam Situasi Kesenian Masa Kini, oleh Rizaldi Siagian dan Yudi Ahmad Tajudin.
- c. Peran dan Pengaruh Media Informasi Bagi Proses Kesenian Masa Kini, oleh Enthus Susmono, Devi Ferdianto, Ag. Kus “Jompet” Widananto.
- d. Seni dan Penciptaan Ruang Publik, oleh Restu Kusuma-ningrum dan Ade Darmawan.

Laporan Hasil Sidang kelompok

Setelah sidang Pleno yang menampilkan makalah yang berjudul: (1) Kebijakan Kemitraan Perusahaan/Yayasan Dalam Mendukung Kehidupan Seni dengan pemakalah Linda Hoemar; (2) Produk Hukum yang Memihak kepada Sistem Keringanan Pajak Perusahaan untuk Mendukung Kesenian dengan pemakalah Bidang Pajak; (3) Eksplorasi Hubungan Mutualistik Seni dan Industri dengan pemakalah Arswendo Atmowiloto, dilanjutkan dengan sidang kelompok, dibagi menjadi 4 (empat) kelompok.

Dari hasil masing-masing sidang kelompok dapat dipetik beberapa pemikiran yang menarik untuk dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan. Hasil sidang masing-masing kelompok adalah sebagai berikut.

(1) Kelompok A, Seni dan Industri dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Internasional

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan September tahun dua ribu lima, pukul lima belas empat puluh detik sampai dengan pukul tujuh belas lebih tiga puluh delapan detik, telah dilaksanakan sidang kelompok A pada Kongres Kesenian Indonesia ke-2, bertempat di Pondok Pustaka Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dengan topik utama “Seni dan Industri dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Internasional” dihadiri oleh dua puluh sembilan peserta.

Berdasarkan pandangan dari para pemakalah, yang terdiri atas: Benny Yohanes, Sapto Rahardjo, Halilintar Latief, Boy G. Sakti, Ben Pasaribu dan Sutanto Mendut. Setelah melalui perdebatan dan diskusi dengan para anggota kongres kelompok A, maka Tim Perumus berhasil merumuskan butir-butir penting sebagai rekomendasi yang akan dibawa ke sidang pleno ke-3. Adapun rumusan pokok yang telah dihasilkan meliputi tiga hal pokok sebagai berikut:

Rumusan Usul I tentang Pemberdayaan:

- Studi potensi seni
- Studi komunitas seni
- Interaksi seniman dan publik
- Wirausaha
- Seniman bermutu
- Melahirkan produksi seni yang bermutu
- Pemunculan industri seni
- Manajemen industri seni
- Sistematisasi kerja yang cepat
- Dinamisasi gerakan kesenian daerah
- Membangun sistem informasi kesenian lintas daerah

Rumusan Usulan II tentang Penguatan:

- Membina dan mengembangkan kesenian lokal sejak dini dan menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.
- Alokasi dana kesenian melalui APBN dan APBD
- Community Services dari perusahaan-perusahaan asing dan BUMN terhadap daerah setempat

- Membangun fasilitas kesenian di daerah masing-masing oleh pemerintah daerah
- Kalender tetap aktivitas kesenian di daerah
- Promosi, publikasi dan pendokumentasian kesenian daerah
- Menumbuhkembangkan produser kesenian dan impresario

Rumusan Usulan III tentang Pengamanan:

- Perlu secepatnya dibuat Undang-undang perlindungan terhadap kesenian
- Perlu adanya Kode Etik Kesenian

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 28 September 2005

Tim Perumus: (1) Syarifudin Arifin; (2) Frangky Sahilatua; (3) Octovianus Rambaba; (4) Budi Darma; (5) C.J. Benny.¹⁰

(2) Hasil Perumusan Sidang Kelompok B, tentang Kajian dan Pendidikan Seni.

Sidang Kelompok B tentang Kajian dan Pendidikan Seni, yang diadakan pada tanggal 28 September 2005, dari pukul 08.30 sampai dengan 16.00, dihadiri oleh tujuh puluh dua orang dan mensahkan Hapri Ika Poigi dan Hamsad Rangkuti sebagai Pimpinan Sidang, dan Tisna Sanjaya sebagai Moderator. Sidang Tim Perumus yang diadakan dari pukul 20.30 - 24.00, telah meng-hasilkan rumusan sebagai berikut:

(a) Paradigma Baru Pendidikan Seni

Upaya mengoptimalkan dunia pendidikan seni hanya bisa dilakukan jika disertai semangat untuk mengubah pola pikir (mind-set), yang tidak terus menerus bersandar pada paradigma lama, di mana guru mengajarkan sesuai dengan bahan dan metodologi yang dipelajarinya. Sasaaran dan persepsi pendidikan seni - yang berrisifat unik, ditandai oleh pemberian pengalaman ekspresif, kreatif, estetik dan cultural – harus mengarah pada terciptanya situasi kehidupan multikultural, yang menjadi bagian penting dari tuntutan kehidupan kemanusiaan masa kini, baik dalam lingkup local, nasional, maupun global. Karena itu para-digma baru pendidikan seni harus mengarah pada pembangunan dialog antarsubkultur yang beragam, peningkatan pemahaman serta penghargaan lintas etnik dalam hubungannya dengan perspektif kultur lain (inklusif) dan orientasi akademik yang berkonsekuensi terhadap sistem dan piranti pendidikan. Bahan ajar yang berdasar pada keberagaman kesenian dari berbagai budaya lokal sebagai bahan ajar, dengan memperhatikan relevansinya terhadap dunia pendidikan dan kehidupan kekinian, harus disampaikan pada anak didik, untuk meningkatkan daya apresiasi, ketertlibatan, dan kepedulian peserta didik pada kebudayaan bangsa. Dengan persepsi plural, maka pendidikan seni berbasis tradisi akan menyumbang pada penumbuhan rasa kebangsaan, peningkatan daya toleransi sosial perilaku saling menghormati – dan bukan sebaliknya menumbuhkan fanatisme masyarakat terhadap kebu-dayaannya sendiri – karena itu bahan-bahan ajar seyogyanya tidak hanya mengacu kepada kesenian dari suatu local saja, melainkan dapat mencakup seluas mungkin secara proporsional, baik dari khazanah budaya dominan maupun marginal (“dialek”-

10 Semua anggota Tim Perumus membubuhkan tanda tangan.

“idiolet”), baik dari cakupan wilayah lokal, nasional maupun global.

Dengan itu pula pendidikan seni menjadi instrument pendidikan keterbukaan, yang sesuai dengan sifat mendasar dari pendidikan (akademis) itu sendiri, yang akan meningkatkan kepekaan rasa (estetis) dan daya talar (*critical thinking*), yang akan membangun tanggung jawab moral sebagai makhluk sosial dan makhluk beragama. Karena itu, bahan ajar yang berdasar pada realitas kehidupan kesenian itu harus disusun bukan sekedar penyampaian fenomena kesenian yang dangkal, melainkan harus mengarah pada pembangunan kecerdasan rasa (EQ), intelektual (IQ), dan spiritual (SQ). Dengan menunjukkan makna penting dari pendidikan seni, maka pandangan masyarakat umum terhadap kesenian hanya sebagai hiburan, sektor sampingan, dan bukan konotasi yang negatif akan terpisahkan. Untuk mampu berangkat dari pluralitas kebudayaan, maka pandangan universalisme-nilai keindahan dan kemajuan, yang sampai mendasar pada kaidah estetika Barat dan sikap evolusionis-developmental, harus dihindari. Lomba-lomba kesenian antartradisi dan/atau doktrin-doktrin kesenian yang bersifat hirarkis-hegemonis yang dilakukan oleh instrumen pemerintahan (daerah) ataupun akademisi terhadap masyarakat lokal harus dihindarkan.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa dalam seni tradisi selalu terjadi pergeseran, perubahan sehingga tradisi tidak dianggap sesuatu yang “diam” (statis), melainkan yang “bergerak” (dina-mis), tumbuh dari proses negosiasi terus menerus antara semangat melestarikan dan kebutuhan penyesuaian dengan keadaan.

Pendidikan seni harus juga bersifat demokratis, pada anak didik berusaha untuk mengakomodasi minat siswa, sehingga ada demokratisasi pendidikan juga, tidak berupa paksaan. Tujuan pendidikan seni di sekolah umum harus lebih mengarah pada apresiasi yang mencakup multiple intelligent tersebut di atas, daripada kepada kesenangan.

(b) Optimalisasi Pendidikan Seni

Kurikulum pendidikan seni di sekolah umum seyogyanya mempertimbangkan keunikan seni sebagai idiom ekspresi estetis, serta filsafatnya di setiap wilayah yang akan membuka peluang terhadap keberagaman kurikulum, metoda, dan tujuannya. Untuk memaksimalkan pendidikan seni, selain melalui kurikulum baku, harus pula memanfaatkan pendidikan seni, selain melalui kurikulum baku, harus pula memanfaatkan potensi kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) melalui kegiatan pembiasaan (seperti *background music*, hiasan ruang kelas, majalah dinding, dll.) dan/ atau melalui mata pelajaran lain.

Pendidikan seni di Sekolah Dasar harus diperhatikan agar para siswa mendapat akses pendidikan seni yang lebih baik, seperti halnya pendidikan agama dan olah raga.

Pendidikan kesenian di sekolah tinggi harus diupayakan untuk dapat memenuhi kualitas standar, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan ekonomi. Rancangan pendidikan harus berubah dari basis isi ke basis kompetensi, dengan pendekatan sinergis antara pengalaman seni (empiris) dan pengayaan abstraksi (filosofis) dan berdasar pada multikultural, sehingga mengarah kepada potensi pelestari budaya yang juga sebagai *agent of change*.

Kebijakan kurikulum pendidikan seni harus disusun dalam rancangan strategi

jangka panjang, agar program-program pengem-bangannya tidak dilaksanakan secara temporer (*ad hoc*) dan arena itu harus menyertakan orang-orang yang kompeten.

Guru adalah ujung tombak pendidikan, karena itu kualitas guru harus mendapatkan perhatian besar dalam program makro pendidikan. Selain diperlukan adanya perbaikan kurikulum di perguruan tinggi pendidikan, bisa juga diadakan program-program pelatihan yang relatif singkat, sehingga distribusi guru yang kompeten bisa terlaksana secara lebih merata. Pendirian sekolah-sekolah kesenian di kawasan yang belum memilikinya, seperti kawasan Timur, perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kelayakannya yang komprehensif.

(c) Sosialisasi dan Advokasi

Kesenian bukanlah sektor yang berdiri sendiri, melainkan terjalin dengan sektor-sektor lain (seperti adat, ekonomi, kepercayaan, sosial politik, dll.), karena itu pemaknaannya tidak bisa disikapi secara sederhana hanya dari satu kaca-pandang saja. Para pendidik perlu membangun komunitasnya yang memiliki kapasitas untuk lebih mampu meningkatkan kualitas dan perannya, baik yang mengenai bidang profesinya maupun kemampuan advokasi sosialnya. Untuk tujuan itu, forum-forum/organisasi pendidik seni perlu didirikan dan diberdayakan. Jika badan sertifikasi didirikan, agar pendidikan seni diajarkan oleh orang-orang yang kompeten, pendirian badan tersebut harus melibatkan komunitas pendidik seni.

(d) Kajian

Kegiatan penelitian dipentingkan dalam semua bidang: pendidikan, budaya, sejarah maupun kritik. Sejarah seni Indonesia sampai sekarang masih berdasar pada sudut pandang tunggal, yakni dari perspektif sejarah seni Barat, sehingga perlu adanya pengkajian dan penulisan ulang. Sejarah seyogyanya tidak menjadi cerita linear, melainkan merujuk pada akumulasi peristiwa. Sejarah merupakan suatu konstruk pemikiran, agar tidak menjadi rumusan romantisme atau nostalgia, sejarah harus dapat mengartikulasikan paradigma estetika dalam konteks ruang dan waktu.

Kritik seni hendaknya berpijak pada riset, yakni melalui pencarian data actual dan factual tentang seni, seniman, dan kesenian, karena dengan itu akan menghasilkan 4 hal: (1) akan secara lebih menempatkan gejala kebudayaan yang ada; (2) mendorong kritik lebih dekat dengan realitas public yang memang hendak dijembatannya; (3) hasil riset memungkinkan munculnya cara pandang analisis atau metodologi alternatif dalam memahami produk Kultural yang unik; dan (4) kritik berbasis riset akan lebih kredibel, sehingga ia bisa dikedepankan dalam for a kritik yang lebih luas.

Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta,
28 September 2005

Tim Perumus Kelompok B: (1) Endo Suanda; (2) Sofyan Salam; (3) Hamsad Rangkuti; (4) Hapri Ika Poigi; (4) Nunus Supardi; (5) Tisna Sanjaya"

(3) Hasil Perumusan Sidang Kelompok C, tentang Fungsi Kesenian di Masyarakat

Sidang Kelompok C diselenggarakan pada 28 September 2005 tentang **Fungsi Kesenian di Masyarakat**. Sidang kelompok C menyajikan pemakalah: Sirikit Syah, Putu Wirata, Nungky K., Eko Prawoto, Danang Priatmodjo, Arthur S. Nalan, Krisna Murti, Fikar AW. Eda, Indra B. Wumbu, Firman Venayaksa, dan Gustaf Hariman. Berdasarkan tanggapan serta pemikiran yang disam-paikan oleh 120 peserta sidang kelompok **“Fungsi Kesenian di Masyarakat”** menyepakati ada 5 (lima) fungsi kesenian dalam masyarakat:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan terhadap *content programming* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.
2. Pemberdayaan seni tradisional dengan menciptakan ruang apre-siasi seluas-luasnya melalui sekolah, tayangan televisi, festival, pertunjukan dan pameran.
3. Dalam perencanaan dan pembangunan daerah tentang pengaturan tata kota, para pemimpin daerah (gubernur, bupati, walikota) agar melibatkan para seniman dan budayawan setempat secara aktif, mengingat bahwa kota adalah hasil karya seni sosial (*a city as a social work of art*).

Padepokan Pencak Silat TMII,
28 September 2005

Tim Perumus Kelompok C: (1) Ashar Yotomaruangi; (2) Didin Sirojudin; (3) Muh. Kamal Naser; (4) Jamal D. Rahman; (5) Tubagus Andre¹²

(4) Hasil Perumusan Sidang Kelompok D, tentang Hukum, Profesionalisme Seni dan Pengelolaan

Hasil sidang Kelompok D adalah sebagai berikut.

Mukadimah

Peranan kebudayaan telah menjadi perdebatan dan bagian yang sangat penting jauh sebelum Indonesia merdeka. Kesadaran terhadap pluralisme, peran, dan fungsi kesenian di dalam kebu-dayaan telah menjadi dasar pemikiran kaum pergerakan nasional menuju berdirinya Negara Republik Indonesia.

Mempertimbangkan perubahan masyarakat yang terjadi di tengah perkembangan yang asa, maka fungsi pembangunan kese-nian di dalam kebudayaan merupakan salah satu cara untuk dapat menghadapi tantangan masa depan bangsa di tengah fenomena globalisasi dan masa depan.

Untuk mencapai amanah yang dicita-citakan sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan guna melindungi segenap tumpah darah dan wilayah Indonesia termasuk melindungi hak-hak, harkat, martabat pelaku dan produk kesenian serta mengembangkan kesenian

¹² Semua anggota Tim Perumus membubuhkan tanda tangan.

Indonesia sebagai bagian yang integral dengan pembangunan nasional, maka Kongres Kesenian Indonesia II 2005 mengusulkan agar dilakukan langkah-langkah untuk menuju terciptanya Undang-Undang Kesenian yang akan menjadi dasar hukum bagi kemajuan kesenian dan kebudayaan Indonesia serta sarana dan prasarananya.

Rumusan Usulan I

Usulan pembentukan Departemen Kebudayaan Republik Indonesia.

Rumusan Usulan II

Segera dirancang Undang-undang Kesenian mencakup:

1. Mukadimah
2. Batang tubuh dari Undang-undang
3. Isi bab-bab dan pasal-pasal yang mencerminkan pluralisme kesenian di dalam kebudayaan Indonesia.
4. Bersifat ramping, edukatif dan menyeluruh
5. Perlindungan kepada karya-karya kesenian dan pelakunya.
6. Mengatur hak dan kewajiban seniman.
7. Mengatur kelembagaannya yang terkait.
8. Tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah ada.
9. Memiliki semangat kebangsaan dan persatuan nasional.
10. Memberikan ruang kepada pendanaan dari sector pemerintahan dan swasta, baik melalui APBN, APBD maupun sumber pen-danaan lain yang sah.
11. Selaras dengan perkembangan otonomi daerah.
12. Mencakup pemecahan masalah kesejahteraan umum.
13. Adanya sanksi dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum.
14. Pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator dan motivator termasuk untuk terbentuknya institusi "social security system" bagi kemajuan kesenian.
15. Menampung aspirasi bagi seluruh cabang kesenian.

Rumusan Usulan III

Sambil menunggu lahirnya Undang-undang di atas Kongres Kesenian Indonesia II mengusulkan segera dibentuk PP (Peraturan Pemerintah) yang memotivasi dan memfasilitasi pembentukan asosiasi-asosiasi profesi seni di pelbagai bidang seni yang membutuhkannya.

Rumusan Usulan IV

Dalam rangka mewujudkan usulan ke langkah-langkah yang nyata maka diperlukan:

1. Tim Konsultasi hukum (dari ahli hukum dan masyarakat seniman) untuk menyiapkan Rancangan Undang-undang Kesenian.
2. Wadah masukan dan saran dari berbagai pihak baik masyarakat seniman maupun dari luar.
3. Tim Advokasi untuk sosialisasi perlunya Undang-undang Kesenian dan keputusan-keputusan kongres lainnya.

Demikian rumusan dari Kelompok D yang mencakup soal Hukum, Profesionalisme Seni dan Pengelolaan Kesenian dari hasil Kongres Kesenian Indonesia II tahun 2005.

Jakarta, 28 September 2005

Tim Perumus: (1) Soeparwan G. Parikesit (Ketua); (2) Boediman Moenadjid (Anggota); (3) Rizakdi Siagian (Anggota); (4) Norrizal (Anggota); (5) Saini KM (Anggota); (6) Viddi AD Daery (Pimpinan Sidang); (7) Totok Sudarwoto (Moderator)¹³

f. Rumusan Akhir Hasil Kongres Kesenian Indonesia II

Hasil sidang masing-masing kelompok dilaporkan dalam siding pleno, dan selanjutnya dirumuskan menjadi hasil KKI ke-2 oleh Tim Perumus. Rumusan hasil KKI ke-2 tahun 2005 adalah sebagai berikut.

KEPUTUSAN KONGRES KESENIAN INDONESIA KE-2 TAHUN 2005

MUKADIMAH

Bahwa kehidupan sosial di Indonesia telah mengalami penurunan kualitas yang memprihatinkan, yang berdampak pada munculnya berbagai kekerasan, menguatnya perangai massa, dan menurunnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa praktik pembangunan nasional yang mengandalkan sumber daya alam, telah mengalami bentuk eksploitasi yang berlebihan, dan berdampak pada kemerosotan kemanusiaan dan ketidakadilan ekonomi. Dalam tahap ini, kesenian dan kebudayaan haruslah dikembalikan perannya menjadi perekat keanekaragaman dan pemulih kesadaran berbangsa.

Saat ini, kehidupan kesenian di Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan industrialisasi, yang berdampak kepada penyeragaman dan komersialisasi produk budaya. Fungsi kesenian bukan hanya untuk komersialisasi, namun tujuan luhurnya adalah menjaga daya hidup, mempertajam pengalaman kemanusiaan, dan memperkuat nilai-nilai kebudayaan.

Oleh sebab itu, Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 berpendapat, bahwa kehidupan kesenian sudah semestinya mendapat tempat dalam system hokum nasional.

RUMUSAN/REKOMENDASI:

Dalam menghadapi tantangan industrialisasi, sangat diperlukan pemberdayaan seniman dan kesenian melalui:

1. Dinamisasi gerakan kesenian daerah dan menyiapkan infrastruktur kesenian untuk memunculkan manajemen industri kesenian yang fungsional.
2. Penguasaan pengembangan kesenian local dengan dukungan pendanaan APBN dan APBD, dan dukungan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta melalui penggalangan dana pelayanan dan biaya operasional public (community services).
3. Menerapkan paradigma baru pendidikan seni yang berbasis kompetensi untuk

¹³ Semua anggota Tim Perumus membubuhkan tanda tangan.

memberikan pengalaman ekspresif, kreatif, estetik, dan cultural, yang mengarah pada terciptanya situasi kehidupan multicultural.

4. Optimalisasi pendidikan seni dan penguatan pendidikan seni di wilayah Timur Indonesia.
5. Sosialisasi dan advokasi terhadap hasil professional seni dan fungsi sosial seni.
6. Kajian seni yang berorientasi pada akar sejarah seni Indonesia.
7. Membentuk balai-balai penelitian seni untuk melakukan riset-riset yang berkaitan dengan keunikan-keunikan potensi lokal dan dampak negative dari produk-produk komersialisasi seni.
8. Menyokong peran kantung-kantung budaya untuk menumbuhkan benih-benih kesenian akar rumput (grass root) dan pengembangan jejaring antarpelaku seni sebagai wadah penyeimbang dominasi seni populer.
9. Melibatkan peran aktif seniman dalam turut menentukan perencanaan dan pelaksanaan perubahan tata kota dan ruang public.
10. Untuk memperkuat posisi dan fungsi kesenian dalam kebudayaan, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat keputusan Bersama (SKB) untuk mengatur kejelasan fungsi pengelolaan kesenian.
11. Perlu dibentuk tim konsultasi dan advokasi Hukum RUU Kesenian, yang difasilitasi oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh masyarakat kesenian dan tenaga professional hukum.

TUNTUTAN:

1. Memperhatikan seluruh rekomendasi yang sudah dirumuskan di atas, maka Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 menuntut kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk merealisasikan Undang-Undang Kesenian.
2. Untuk mendukung implementasi Undang-Undang Kesenian dan merealisasikan seluruh rekomendasi hasil kongres, maka Kongres Kesenian Indonesia ke-2 menuntut dibentuknya Departemen Kebudayaan yang sudah diusulkan sejak 31 Desember 1945 pada Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi, Kongres Kebudayaan tahun 1948 di Magelang, tahun 1951 di Bandung, tahun 1954 di Surakarta, tahun 1957 di Denpasar, tahun 1960 di Bandung, tahun 1991 di Jakarta, dan tahun 2003 di Bukittingg, yang hingga kini belum pernah diperhatikan oleh pemerintah.

RENCANA AKSI:

1. Menyerahkan seluruh dokumen ketetapan Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 kepada Presiden, Ketua DPR RI, Ketua DPD, untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti.
2. Menyerahkan dokumen . Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 kepada MENKO KESRA, MENKOMINFO, MENBUDPAR, MENDIKNAS, MENDAGRI, MENKEU, BAPPENAS, MEN-BUMN, MENHANKAM, dan KAPOLRI, untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti.
3. Menyerahkan seluruh dokumen Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti.
4. Meminta kepada Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film, untuk memfasilitasi terlaksananya rencana aksi di atas.

5. Mengajak seluruh peserta Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 untuk turut mensosialisasikan seluruh hasil ketetapan kongres.
6. Mengajak seluruh pihak media massa untuk turut mendukung Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 untuk mempublikasikan hasil-hasil kongres.
7. Untuk merealisasikan rencana aksi di atas, akan dibentuk tim delegasi yang terdiri dari unsure Panitia Pengarah (SC), Panitia Pelaksana (OC), dan perwakilan peserta yang mencerminkan kepentingan wilayah Barat, Tengah, dan kawasan Timur Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 29 Serptember 2005

Tim Perumus: (1) Franky Sahilatua (Kelompok A); (2) Hapri Ika Poidi (Kelompok B); (3) Ashari Yotomaruangi (Kelompok C; (4) Soeparwan G. Parikesit (Kelompok D).

Tim Pengarah: (1) Benny Johanes; (2) Nunus Supardi

Saksi-Saksi: (1) Budi Darman; (2) Singgih Wibisono; (3) Saini KM; (4) Ratna Riantiarno; (5) Tubagus Sukmana¹⁴

Catatan Penyelenggaraan KKI ke-2 Tahun 2005

Seperti halnya pada Kongres Kebudayaan 1991 dan 2003 serta KKI ke-1 tahun 1995, pemerintah selalu menjadi sasaran kecurigaan dan dinilai salah melulu. Tudingan bahwa kongres itu sebagai “Kongres Baju Safari”, “Kongres Plat Merah”, “Kongres Birokrat”, dan “Kongres Dinas Kebudayaan” masih saja muncul pada KKI ke-2 tahun 2005. Bahkan masih ada yang curiga rumusan hasilnya telah jadi meskipun kongres belum dimulai.

Salah satu hal yang menarik pada KKI ke-2 adalah tampilnya “suguhan baru” (demikian salah seorang peserta menyebutnya) ketika dengan tiba-tiba muncul puluhan orang menempelkan poster dan menggelar kain rentang (spanduk) hitam dengan bermacam-macam tulisan ketika Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sedang menyampaikan pidato pembukaan. Kejadian seperti ini merupakan yang pertama dalam sejarah kongres kebudayaan/ kesenian. Isinya, penolakan terhadap penyelenggaraan kongres karena beberapa alasan. Antara lain mereka menganggap pemi-lihan peserta kongres tidak demokratis dan tidak sepenuhnya mewakili masyarakat seniman, dikhawatirkan kongres akan dijadi-kan sebagai kendaraan kepentingan Dewan Kesenian Indonesia¹⁵, dan kongres menjadi tempat praktek KKN dan hanya menghabiskan uang rakyat yang tengah dilanda krisis. Mereka juga menengarai kongres itu menyembunyikan nuansa politik tertentu. Ketegangan makin keras ketika tiba pada acara pembacaan Tata Tertib KKI ke-2 2005 pada sidang pleno pertama. Mereka

14 Semua anggota Tim Perumus, Tim Pengarah dan Saksi-saksi membubuhkan tanda tangan.

15 Perlu dibentuknya Dewam Kesenian Indonesia adalah salah satu rekomendasi hasil Kongres Dewan Kesenian di Papua tanggal 27 Agustus 2005 yang menimbulkan pro dan kontra di antara para seniman.

beberapa kali menginterupsi berebut bicara dengan suara yang keras berapi-api bahkan ada yang naik ke atas kursi.

Setelah acara “*happening art*” itu berakhir - demikian salah seorang pendemo menyebutnya - pembacaan Tata Tertib KKI ke-2 yang sempat terhenti beberapa menit dapat dilanjutkan lagi. Keadaan sidang menjadi mereda karena para peserta dari daerah menyampaikan tanggapan yang tidak kalah kerasnya dengan suara para pendemo. Mereka protes ketika peserta dari daerah dianggap bukan seniman atau mewakili masyarakat seni dari daerahnya masing-masing.

Pada sidang pleno kedua suasana sidang diwarnai kekecewaan peserta, dipicu oleh ketidakhadiran narasumber dari legislatif dan eksekutif. Narasumber dari Komisi IX DPR-RI dan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dijadualkan membahas topik “Produk Hukum yang Memihak kepada Sistem Keringanan Pajak Perusahaan untuk Mendukung Kesenian.” Sesi ini dianggap sangat penting untuk mendengarkan pandangan legislatif dan eksekutif terkait dengan insentif pajak yang mungkin diberikan kepada perusahaan yang mendukung kesenian.

Hari-hari berikutnya kongres berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal. Setelah aksi rebut-ribut hari pertama, hari-hari seterusnya yang protes dan yang diprotes sudah duduk bersama merumuskan hasil-hasil sidang dalam kongres suasana yang akrab. Perubahan dari suasana tegang tetapi kemudian menjadi akrab itu tidak salah kalau disebut oleh Harian Surya, lucu. (Harian Surya). Komentar dan tanggapan pun bermunculan datang dari kalangan seniman yang lain. Menurut Budi Darma “... *seniman berulah begitu sudah biasa. Beda pendapat, tak cocok dengan hatinya, berulah. Itu biasa*”. Sementara itu menurut Nungky Kusumastuti lain lagi: “*Kita ini harus membuktikan dengan kerja dan karya. Kalau cuma tarung wacana, lalu mengajukan tuntutan, nggak laku. Buktikan dulu kesenimanannya*”. (Harian Kompas)

Sementara itu ketidakhadiran seniman profesional, cerpenis Hamsad Rangkuti dengan tegas mengatakan ketidakhadiran mereka tidak penting. Kalau mereka tidak menyumbangkan pikiran atau tidak proaktif tak ada gunanya. Yang penting, dalam KKI-II ini ada semangat generasi baru dengan pemikiran baru, sedangkan orang-orang (seniman) top itu menurut Hamsad “adalah makhluk masa lalu”. Sementara Ratna Riantiarno mengenai hadir dan tidak hadirnya para seniman senior menyatakan: “*Kalau tidak diundang mereka tidak datang. Kalau disuruh mendaftar mereka tidak melihat bahwa itu suatu kebutuhan. Padahal kita harusnya ikhlas, rendah hati bahwa ini untuk kepentingan bersama*”.

Menurut pendapat Rudi P. Waromi (40) dari Papua, adanya dualisme seniman bagi tidak masalah. Ia menyatakan “*Kami sangat menghargai tetapi tolong dilihat kepentingan yang lebih luas, terutama dari daerah*”. Ia merasakan bahwa moment kongres ini sangat baik untuk masukkan kepada pemerintah. Di sisi lain ada pertukaran informasi antarseniman. Ada yang sudah profesional dan ada yang baru berkembang untuk saling mengisi, dapat menerima masukan dan menimba pengalaman dari para nara sumber. Sementara itu menurut sastrawan Isbedy Stiawan dari Lampung kongres sekarang ini masih mengikuti gaya lama di mana terlalu banyak materi yang disampaikan.

Menanggapi santernya kritikan dan kecurigaan terhadap pemerintah, dalam rapat-rapat persiapan kongres pihak pemerintah telah melakukan berbagai upaya

pengecehan. Seperti dikatakan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Kongres Kesenian II dengan niat yang tulus, karena kesenian merupakan aset bangsa yang harus dipelihara dan dikembangkan bersama.

Menampung keinginan banyak orang memang tidak mudah. Kekurangan pada setiap kegiatan apa pun kalau dicari pasti ada. Barangkali kata-kata penyair Diah Hadaning patut dijadikan bahan renungan bersama. Ia mengatakan: *“Sekecil apapun peristiwa yang muncul dalam KKI - II ini bisa dipetik hikmahnya dan harus direspon dengan pikiran jernih, tetapi dengan penuh harapan. Dan apa yang direkomendasi dalam KKI - II ini bisa terwujud yang tentunya menjadi obsesi para seniman.”* (Suara Karya, 9 Oktober 2005).

C. Kongres Pewayangan

Dalam harian Kompas (1/9/2013) diberitakan bahwa Kongres Kedua Pewayangan di Yogyakarta telah berakhir. Kongres itu dibuka oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX. Kongres Pewayangan II dan Konferensi Internasional Wayang Tahun 2013 itu diselenggarakan di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kamis (22/08/2013).

Berita itu menimbulkan pertanyaan, apakah acara itu benar merupakan kongres kedua atau keempat?. Jika disimak isi buku yang dieditori oleh G. Dwipayana dan Nazarudin Sjamsuddin, diterbitkan oleh PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 2003 dengan judul *“Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978 , menunjukkan data yang berbeda. Di dalam halaman 276 di tulis tentang kedatangan 30 orang peserta Kongres Pewayangan pada tanggal 13 Agustus 1975 untuk bertemu dengan Presiden Soeharto di Bina Graha. Rombongan itu yang dipimpin oleh H. Boediardjo untuk melaporkan hasil-hasil kongres nasional, yang antara lain telah menyepakati pembentukan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Pada kesempatan itu, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan membantu kegiatan organisasi pewayangan itu. Di dalam tulisan yang lain ditemukan data tahun 1978 pernah diselenggarakan Kongres Pewayangan Indonesia ke-2.*

Dengan demikian dapat dicatat bahwa sampai sekarang telah dilaksanakan 4 kali Kongres Pewayangan, yaitu tahun 1975, 1978, 2005 dan 2013. Dalam bab ini paparan mengenai tema, makalah, pemakalah dan hasil dari kongres tahun 1975 dan 1978 belum ditemukan, dan yang dipaparkan adalah tentang kongres 2005 dan 2013 adalah sebagai berikut.

1. Kongres Pewayangan 1975, belum ditemukan data yang lengkap.
2. Kongres Pewayangan 1978, belum ditemukan data yang lengkap.
3. Kongres Pewayangan 2005
4. Kongres Pewayangan 2013

Gambaran mengenai penyelenggaraan Kongres Pewayangan 2005 dan 2013 adalah sebagai berikut.

C.1 Kongres Pewayangan 2005

Kongres Pewayangan Internasional 2005 diselenggarakan di kota Yogyakarta, mulai dari tanggal 14-16 September 2005. Pembukaan dilaksanakan di Pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam sambutannya Sri Sultan HB X mengatakan bahwa seni wayang merupakan salah satu seni yang paling luas persebarannya di Indonesia. Tidak hanya berkembang di pulau Jawa tetapi juga di Bali, NTB, Kalimantan, dan Sumatera.

Sebagai karya budaya, wayang tidak sekedar seni pertunjukan, namun wayang adalah ekspresi nilai-nilai masyarakat khususnya di Jawa. Pertanyaannya, di manakah wayang bisa hadir dan memberi dapat memberikan makna dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia? Melalui kongres ini akan dicari jawab atas pertanyaan itu, yaitu wayang perlu hadir memberi makna dalam kehidupan sebagai salah satu bentuk jawab atau kemungkinan jawaban yang berguna bagi kehidupan umat manusia.

Tujuan kongres

Tujuan dari kongres adalah bertujuan untuk melakukan upaya aktualisasi dan pengembangan seni wayang klasik agar bisa dite-rima masyarakat modern. Selain itu, bertujuan pula mengem-balikan konsep pertunjukan wayang sebagai bagian dari seni syiar akan nilai-nilai ajaran budi pekerti yang merupakan bagian integrasi dari pelajaran moral, etika, dan estetika yang diharapkan menciptakan nuansa pergaulan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang, ujarnya.

Materi yang dibahas dalam kongres adalah mengenai strategi pengenalan kembali seni pewayangan kepada anak-anak usia dini, dan strategi pewayangan menjadi acuan pengajaran budi pekerti di sekolah. Masalah lain yang juga dijadikan bahan pembahasan adalah mengenai upaya pelestarian seni pewayangan melalui berbagai bentuk kemasan pergelaran, atraksi wisata dan sarana multimedia modern serta media lainnya. Peserta kongres datang dari berbagai daerah, termasuk dari mancanegara (Jepang, Malay-sia, Suriname, Belanda, Kamboja dll) berjumlah sekitar 1.000 peserta, meliputi budayawan, seniman, pelaku seni pewayangan, pengamat seni wayang dan organisasi wayang.

Setelah dilaksanakan penyajian makalah dan diskusi, Kongres Pewayangan 2005 menyepakati keputusan dan rekomendasi kongres sebagai berikut.

KEPUTUSAN KONGRES PEWAYANGAN 2005

I. Pengantar

Bangsa Indonesia telah memasuki era kesejagatan yang berakibat pada adanya perubahan cara pandang dan cara pikir masyarakatnya. Sementara itu pada kalangan masyarakat tertentu pemahaman terhadap nilai budayanya cenderung semakin tipis. Wayang merupakan harta kuitural yang tidak hanya bersifat konkrit tetapi lebih bersifat simbolik. Pengembangan wayang menjadi sesuatu yang naturalis-realis-konkrit justru

akan meng-hilangkan ciri khas wayang itu sendiri. Akibatnya wayang akan kalah bersaing dengan media audio visual seperti film dan TV. Oleh karena itu, ciri khas simbolik wayang harus dipertahankan sebagai media tontonan, tuntunan, dan tatanan ketika disadari adanya proses pengikisan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap wayang.

Tujuan Kongres Pewayangan ini adalah memunculkan formula-formula kesepakatan yang pada gilirannya ditindaklanjuti dengan berbagai upaya untuk mendekatkan kembali wayang dengan masyarakatnya. Dengan cara demikian salah satu fungsi wayang sebagai media syiar, karena di dalamnya bermuatan tuntunan, akan semakin diminati oleh masyarakat modern sehingga dapat membawa masyarakat menuju suatu tatanan sosial budaya yang berkepribadian luhur.

Setelah mencermati, menyoroti, dan mengolah latar belakang, masalah, dan tujuan Kongres Pewayangan, makalah-makalah yang dipresentasikan, makalah yang lolos seleksi namun tidak dipresentasikan, dan usulan pendapat, komentar para peserta pada sidang-sidang baik pleno maupun panel, maka dirumuskan hasil keputusan Kongres Pewayangan 2005 berikut ini.

II. Rumusan Keputusan Hasil Kongres Pewayangan 2005

1. Wayang telah diangkat sebagai karya agung budaya dunia oleh UNESCO tanggal 7 Nopember 2003 atau *masterpiece of oral and Intangible Heritage of Humanity*, oleh karena itu Kongres Pewayangan 2005 mendukung dan akan menindaklanjuti keputusan tersebut
2. Wayang sebagai artefak maupun pertunjukan merupakan harta kultural yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan oleh masyarakatnya.
3. Di kalangan generasi muda dan anak-anak terjadi proses pengikisan apresiasi dan tanggapan terhadap kehidupan wayang, oleh karena itu, perlu dicari upaya yang tepat agar minat dan bakat anak terhadap wayang dapat ditumbuhkan, baik dalam perspektif materi maupun metode.
4. Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan perlu dilakukan pada wayang yang bercorak konvensional maupun modern
5. Tanggung jawab pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan wayang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait, baik negeri maupun swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat yang pada gilirannya akan membuka wadah bagi pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan wayang berupa sanggar, kelompok seni, dll
6. Penumbuhan minat dan bakat terhadap wayang pada anak dilakukan melalui jalur pendidikan keluarga dengan cara mendekatkan kembali pada lingkungan budayanya, pembiasaan berbahasa lokal pada anak sesuai bahasa ibunya, jalur formal melalui kurikulum muatan lokal bahasa Jawa dari tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas maupun perguruan tinggi yang mempunyai pembelajaran budaya maupun bahasa lokal dengan pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan perubahan budaya. Jalur non formal dilakukan melalui sanggar, kelompok seni, dst.
7. Tanggung jawab pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan wayang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait, baik negeri maupun swasta, lembaga

swadaya masyarakat, maupun masyarakat yang pada gilirannya akan membuka wadah bagi pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan berupa sanggar, kelompok seni, dst.

8. Sesuai dengan perubahan sosial budaya yang telah, tengah dan akan terus terjadi, maka dalam rangka pelestarian dan pengembangan perlu dirancang dan dilaksanakan program-program kreatif melalui media audio visual, multimedia, internet, dll.
9. Pesan-pesan moral dalam masyarakat Jawa disampaikan lewat media seni wayang, dongeng, tembang, pitutur, piwe-ling para orang tua secara turun-temurun menunjukkan bahwa eksistensi dan esensi moralitas dijunjung tinggi dalam budaya Jawa,
10. Wayang mengandung nilai-nilai ajaran moral yang bersifat universal. Demikian pula wayang memberikan sejumlah alternatif pilihan tentang watak atau karakter yang dapat dijadikan figur dalam hidup untuk pendidikan budi pekerti. Untuk itu diperlukan upaya menggali makna kembali dan menyosialisasikan nilai-nilai ajaran moral tersebut kepada generasi muda.
11. Upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan pertunjukan wayang dapat dilakukan secara holistik. Untuk itu, Diperlukan manajemen baru yang mampu menata agar pertunjukan wayang dapat menjadi sumber penghidupan bagi para pelakunya.
12. Pemberdayaan dan pengembangan wayang meliputi pengembangan dan penciptaan cerita, kreativitas seni bentuk wayang, media dan properti pertunjukan pendidikan calon dalang, kesadaran masyarakat penanggap dan penonton, perluasan arena pusat pertunjukan beserta perlengkapannya.

Hasil keputusan kongres tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman dan referensi instansi pemerintahan terkait dalam menentukan kebijaksanaan kebudayaan dan strategi kebudayaan khususnya dalam bidang pewayangan dan pedalangan. Untuk itu, Kongres Pewayangan 2005 merumuskan pula rekomendasi yang dapat dijadikan titik tolak rancangan dan pelaksanaan program pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan wayang.

III. Rekomendasi

1. Pernyataan sikap untuk menindaklanjuti keputusan UNESCO bahwa wayang ditetapkan sebagai karya agung budaya dunia pada kongres pewayangan di Yogyakarta, tanggal 14-18 September 2005, maka pemerintah Indonesia, dalam hal ini instansi yang terkait, perlu menetapkan melalui surat keputusan yang berkekuatan hukum agar wayang dapat tetap dilestarikan dan diberdayakan.
2. Sebagai produk budaya bangsa yang sudah berkekuatan hukum, pemerintah wajib melindungi dan melestarikan hasil budaya tersebut agar terhindar dari kepunahan.
3. Tanggung jawab pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan wayang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan perlu merancang program dan mengalokasikan sumber dana bagi kepentingan tersebut.
4. Untuk kepentingan butir nomor 3, pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga-

- lembaga pewayangan yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga terjadi upaya kolaboratif yang sinergis antara pemerintah dan swasta, ataupun sebaliknya.
5. Perlu segera disusun materi pembelajaran wayang yang dapat dijadikan alternatif dalam kurikulum muatan lokal bahasa Jawa untuk semua jenjang persekolahan.
 6. Wayang harta kultural harus dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan oleh masyarakatnya dalam posisinya sebagai artefak maupun sebagai pertunjukan.
 7. Tanggung jawab pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan wayang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait, baik negeri maupun swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat yang pada gilirannya akan membuka wadah bagi pelestarian, pengembangan dan
 8. Pemerintah perlu meninjau ulang keputusan membatasi jam tayang televisi pada malam hari, karena menghambat pengembangan pagelaran wayang. pemberdayaan berupa sanggar, kelompok seni, dst.
 9. TVRI sebagai salah satu lembaga pemerintah perlu merealisasikan kembali penayangan pagelaran wayang secara rutin, sebagai salah satu perhatian pemerintah terhadap upaya pelestarian dan pengembangan wayang.

Berdasarkan usulan dari sebagian besar peserta, maka diperlukan tindak-lanjut Kongres Pewayangan 2005. Tindak lanjut tersebut berupa usulan program lanjutan.

1. Konsolidasi dengan lembaga pewayangan maupun pedalangan di tingkat pusat maupun daerah serta Instansi terkait untuk mengadakan : Kongres Pewayangan secara periodik tiga tahun sekali
2. Konsolidasi dengan penulis, guru, dan dinas pendidikan untuk menyusun buku ajar wayang tingkat dasar dan menengah sebagai salah satu alternatif muatan lokal.
3. Konsolidasi dengan lembaga pewayangan maupun pedalangan di tingkat Pusat dan Daerah, merangkum kesepakatan untuk mengadakan program pelestarian dan pengembangan dalam bentuk penyelenggaraan pementasan wayang yang dikemas menjadi ragam pakeliran yang diselenggarakan secara intensif serta menindaklanjuti rekomendasi hasil keputusan kongres pewayangan 2005.
4. Merapatkan kerjasama dengan Instansi terkait/lembaga pewayangan dan pedaiangan baik tingkat pusat maupun daerah untuk menggalang kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat melaksanakan program penyelenggaraan pementasan.

Hotel Inna Garuda
Yogyakarta, 18 September 2005

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Suminto A. Sayuti
2. Prof. Dr. Timbul Haryono
3. Drs. Sulebar Sukarman
4. Sri Harti Widyastuti, M.Hum
5. Dr. Purwadi

(Sumber: <http://pepadijateng.com/achive/2012/7>, diunduh, tanggal 7/3/2013)

C.2 Kongres Pewayangan 2013

Kongres Pewayangan 2013 mengambil tema “*Wayang for Humanity*”, berlangsung pada 21 – 25 Agustus di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri Universitas Gadjah Mada (PKKH UGM), Hotel Innna Garuda Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, berbagai museum dan sanggar budaya.

Kongres ini diselenggarakan juga dalam rangka memperingati satu dasawarsa Proklamasi UNESCO tentang wayang sebagai “*Masterpiece of the Intangible Heritage of Humanity*”. Selain kongres juga diselenggarakan berbagai kegiatan ilmiah dan pertunjukkan, antara lain pameran wayang internasional, workshop *tatah – sungging* wayang, *workshop* wayang digital, konferensi wayang internasional, pergelaran wayang, pameran dan publikasi karya tulis ilmiah, buku – buku wayang, dan pameran wayang dalam media batik.

Dalam kongres tersebut Drs. Suparmin Sunjoyo, selaku Ketua Umum SENA WANGI menyajikan makalah dengan judul Pengaruh Wayang dalam Kehidupan Sosial Masyarakat, Masa Lalu, Masa Kini dan yang Akan Datang. Menurut Suparmin, pada masa kini meskipun wayang tetap populer namun ancaman terus membuntuti eksistensi wayang. Hal ini merupakan akibat derasnya arus globalisasi informasi dan jenis-jenis entertainment baru yang muncul baik dari dalam negeri dan terutama dari manca negara. Adapun mengenai kiat-kiat dan strategi khusus yang perlu terus diupayakan dan diperbaharui guna memelihara, mengembangkan serta melestarikan wayang, baik eksistensinya di bumi Indonesia maupun pengaruhnya di manca Negara adalah partisipasi semua pihak baik Pemerintah maupun Swasta. Partisipasi itu perlu dimobilisasi dan disinergikan untuk tercapainya tujuan dimaksud. Sementara itu mengenai pengaruh wayang dalam kehidupan sosial masyarakat pada masa lalu, masa kini dan mendatang menurut Suparmin tetap signifikan.

Sementara itu, menurut Indra Tranggono (Kompas 1/9/2013) ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan terkait pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan wayang. Antara lain mendesak negara untuk memproteksi wayang. Proteksi itu bisa dilakukan negara melalui regulasi dan politik anggaran. Melalui keputusan legislatif dan eksekutif, diharapkan lahir undang-undang dan peraturan yang menjadi payung hukum bagi jagat pewayangan untuk memiliki hak hidup sehingga ia tidak terpinggirkan dalam kehidupan pragmatik yang dihegemoni liberalisme dan kapitalisme. Dalam kesetaraan kultural, diharapkan pewayangan mampu bersaing dan bersanding dengan produk-produk budaya asing yang adidaya dalam modal, jaringan, dan media. Setidaknya wayang mampu mengasah publik melalui narasi-narasi yang kaya nilai dan simbol untuk mengimbangi dominasi dan hegemoni narasi-narasi budaya massa-kapitalistik yang serba dangkal atau vulgar.

Adapun politik anggaran melahirkan kepastian pendanaan bagi pewayangan baik melalui APBN maupun APBD atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Dengan anggaran yang sehat, pewayangan dapat mengembangkan diri, baik sebagai sumber inspirasi kolektif, pendidikan karakter, kreativitas estetik, pusaka budaya, ataupun wahana kultural untuk memperkuat identitas bangsa. Wayang dalam konteks ini bukan hanya dipahami sebagai realitas budaya tampak (*tangible*), tetapi juga realitas budaya tak tampak (*intangible*) alias jagat nilai yang selalu aktual dan operatif.

Selain merekomendasikan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap seni wayang, menurut Indra kebudayaan yang kuat selalu didukung dan dilindungi sistem kekuasaan negara. Begitu juga pewayangan sehingga ia mampu membangun martabatnya dalam kehidupan kebangsaan. Tingginya martabat pewayangan bisa diukur dari keberadaannya sebagai sumber nilai yang diinternalisasi seluruh pemangku kepentingannya dan diwujudkan dalam praksis kehidupan. Nilai-nilai bermakna yang diserap dari pewayangan mendorong pemangku kepentingan memiliki kebanggaan dan sikap dan tindakan untuk membela pewayangan. Problem serius hingga hari ini adalah belum optimalnya internalisasi nilai atas pewayangan akibat hadangan banyak hambatan.

Kesadaran itu mendorong Kongres Pewayangan untuk melahirkan rekomendasi tentang sangat pentingnya aktualisasi pewayangan melalui sistem pendidikan nasional. Di sini, pewayangan dihadirkan menjadi muatan lokal yang wajib dikenali, dipelajari, dipahami, dicintai, dan dijalani peserta didik berbagai jenjang di sekolah. Hasil yang diharapkan antara lain terasahnya kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. Ini merupakan investasi kultural yang sangat penting untuk melahirkan generasi bangsa yang memiliki kapabilitas, komitmen, dan integritas. Ke depan, idealnya ketika menjalani peran sosialnya, mereka tidak tumbuh menjadi koruptor-koruptor dan penjahat konstitusi. Minimal, dengan menyerap dan memahami ajaran wayang, para peserta didik menjadi orang baik (tidak melabrak nilai, etika, moralitas, dan hukum).

Penerapan ajaran wayang dalam sistem pendidikan nasional memiliki potensi sangat besar untuk membangun karakter bangsa. Dengan jalan strategis itu, generasi muda bangsa dapat diselamatkan dari terkaman kebiasaan korupsi dan kejahatan konstitusi serta dekadensi lainnya. Pertanyaannya, apakah rekomendasi kongres yang sangat strategis itu bisa melahirkan tindakan konkret di level kebijakan penyelenggara negara dan pemerintahan? Inilah pertanyaan klasik yang muncul pada setiap kongres berakhir. Biasanya, seluruh rekomendasi ideal yang dihasilkan hanya tersimpan di almari beku dan kelak dalam kongres selanjutnya dibuka dan dibicarakan kembali. Terjadilah involusi. Jagat pewayangan hanya jalan di tempat!

Penyakit kronis kongres harus disembuhkan dengan tindakan pemangku kepentingan wayang, baik pemerintah maupun organisasi pewayang, untuk mengawal amanat kongres. Misalnya, membentuk badan pekerja untuk mendesakkan agenda kepentingan yang berisi isu-isu strategis itu ke lembaga negara legislatif dan eksekutif. Hasil yang diharapkan adalah lahirnya regulasi dan politik anggaran yang berpihak kepada dunia pewayangan. Di tingkat praksis, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan PKKH UGM sebagai bebotoh kongres ini dapat bersinergi dengan organisasi pewayangan seperti Pepadi dan Senawangi.

Alarm kepunahan wayang sudah melengking-lengking di telinga bangsa. Saatnya ada upaya menyadarkan penyelenggara negara untuk menyelamatkan wayang. Ini bukan hanya berurusan dengan seni dan budaya, melainkan juga dengan tata kelola bernegara dan berkonstitusi. Dari jagat wayang yang sehat dan kuat, sebuah bangsa bisa tercerahkan menjadi bangsa yang bermartabat. Isu martabat bangsa inilah yang sekarang hilang sehingga bangsa ini terancam menjadi bangsa kuli, bangsa makelar, dan bangsa konsumen.

D. Kongres Reog Ponorogo

Seperti dimuat di Harian Rakjat pada 7 Maret 1965, pada tanggal 25-28 Februari 1965 telah diselenggarakan Kongres Reog Ponorogo se-Indonesia di kota Ponorogo, Jawa Timur. Kongres tersebut diikuti oleh perwakilan dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dalam kongres itu diperbincangkan mengenai upaya pelestarian dalam arti perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan reog.

Dalam rangka pemanfaatan itu, kongres yang digagas oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) itu arahnya jelas, yaitu reog tak hanya dilihat semata-mata sebagai kesenian untuk menghibur, tetapi juga untuk kepentingan politik Lekra. Hal itu tercermin lewat beberapa resolusi kongres yang berisi dorongan agar ideologi reog dapat terus dikembangkan sesuai dengan ideologi Lekra.

Sumber: <http://akubuku.blogspot.com/2011/09/5-ponorogo-bag-1-kongres-reog-lekra.html>



Prof. Dr. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sekaligus sebagai Ketua Pengarah (SC) Kongres Kebudayaan 1991 yang serius mendorong untuk diselenggarakan Kongres Kebudayaan setelah mengalami kevakuman selama 30 tahun. Kongres diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

BAB VIII

KONGRES KEBUDAYAAN MELAYU

Latar belakang

Seperti diuraikan di bagian depan, kebudayaan Melayu tidak hanya berkembang di wilayah negara Malaysia tetapi juga di wilayah Republik Indonesia. Dalam tulisan berjudul Sejarah Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Pusat Bahasa ditulis:

“Bahasa Indonesia yang sekarang itu ialah bahasa Melayu Kuno, yang dahulu digunakan orang Melayu di Riau, Johor, dan Lingga, yang telah mengalami perkembangan berabad-abad lamanya. Dalam keputusan Seksi A No. 8. hasil Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 1954, dikatakan bahwa dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia sekarang”.

Selama ini kebudayaan Melayu di Indonesia belum pernah diperbincangkan secara khusus dalam forum kongres atau konferensi. Oleh karena itu ada baiknya dalam buku ini dimasukkan kegiatan Kongres Kebudayaan Melayu (KKM) ke dalam perbincangan mengenai KK di Indonesia sebagai bahan bandingan bagi masyarakat Melayu di Indonesia tentang bagaimana konsep, kebijakan dan strategi negeri jiran dalam mengembangkan kebudayaan Melayu.

Sejak Federasi Malaya merdeka pada 1957 dan setelah pembentukan negara dan bangsa Malaysia pada tahun 1963, budaya Melayu yang berkembang di wilayah Nusantara secara administrasi kenegaraan terbelah menjadi dua, Melayu di Malaysia dan Melayu Indonesia. Diakui bahwa saat itu pertimbangan budaya di Malaysia

“tidak mencari cara apapun yang serius dalam kehidupan negara. Kebudayaan ada di sana, di semua keanekaragaman tersebut; tidak ada perubahan nyata, bahkan dalam bahasa - sarana utama budaya - untuk sementara Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi, Inggris mempertahankan statusnya sebagai bahasa pendidikan dan untuk sebagian besar terus digunakan dalam administrasi”.

Adanya pertautan kedua bangsa yang bersumber pada bersemainya budaya Melayu di bumi Nusantara, diakui oleh kedua bangsa seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri II Tun Abdul Razak dengan mengatakan:

*“...nenek moyang bangsa kita yang mendiami rantau **Nusantara** (bold penulis) ini meninggalkan pusaka kebudayaan yang kaya raya dan tinggi mutunya. ...sewajarnya kita menerima Kebudayaan Kebangsaan yang sedang dibentuk dan dicorakkan hendaklah berlandaskan kebudayaan rakyat asal serantau ini. ...patutlah juga mengambil unsur-unsur kebudayaan yang datang ke rantau ini... yang dapat menyegarkan dan mencorakkan kebudayaan Malaysia masa hadapan. Namun harus diingat dalam mencari bentuk dan menentukan corak tersebut, kita tidak lah melupakan masyarakat kita yang berbilang bangsa “the reality of our multiracial society...” (Aziz Deraman:2005; Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hal. 8-8).<http://kemahiransangpurba.blogspot.com>)*

Masih dalam hal pertautan tampaknya keberadaan budaya Melayu-Indonesia yang lahir karena adanya pertautan kedua bangsa yang bersumber pada bersemainya budaya Melayu di bumi Nusantara pada saat itu, menurut pandangan Al-Azhar, seorang budayawan Melayu Riau telah mengalami perubahan yang mendasar. Menurut Azhar “orang Melayu kini jati dirinya terkikis oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selain itu Azhar juga menyinggung tentang “runtuhnya ketuanan Melayu dan budayanya” dan untuk itu masyarakat Riau pun sedang berdepan dengan cabaran untuk mengembalikan semula nilai dan ketuanan itu melalui apa yang disebut Azhar “Destinasi Riau 2020”. (<http://afuassin-fuad.hashim>)

Patut pula dipetik lagi pendapat Dr. Rais Yatim, mantan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, waktu menyajikan makalah pada pada Kongres Diaspora Indonesia 2013 di Jakarta tentang kedekatan hubungan budaya dan bahasa kedua bangsa, Indonesia dan Malaysia. Rais Yatim mengatakan: “*Saya ke mari untuk bersama-sama menyatakan bahawa kita satu. Kita satu dalam arena sejarah, budaya dan cara hidup yang seharusnya tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain*”. Dr. Rais Yatim, 2013:4)

Gambaran tentang perjalanan sejarah Kongres Kebudayaan Melayu dalam rangka menghimpun pendapat untuk mencari kon-sep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan Melayu masyarakat Melayu di Malaysia telah beberapa kali menyeleng-garakan kongres. Kongres yang pernah diselenggarakan dan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut.

A. Kongres Kebudayaan Malayu 1958

Dalam catatan sejarah negeri Malaysia, disebutkan bahwa sebagai negeri merdeka dimulai sejak berdiri Federasi Malaya merdeka pada 1957 dan selanjutnya baru pada tahun 1963 lahir negara merdeka penuh, bernama Malaysia. Tahun berikutnya, tanggal 30 Desember 1957 Federasi Malaya menyelenggarakan kongres kebudayaan di Tanah Melayu berlangsung sampai dengan 2 Januari 1958. Kongres itu diberi nama **Kongres Kebudayaan Rumpun Melayu (Cultural Congress Rumpun Melayu)**. Hasil

penyelenggaraan KKM tahun 1958 telah diterbitkan oleh Panitia bernama Muhammad Yusuf Harun dengan judul “Kongres Kebudayaan Rumpun Melayu I, tahun 1958”, setebal 73 halaman, diterbitkan oleh “Panitia Kongres Kebudayaan Melayu, 1958”. Hasil secara lengkap belum ditemukan datanya.

Tetapi yang menjadi tanda tanya mengapa Malaysia menya-takan diri baru 2 kali menyelenggarakan KKM, yaitu KKM pertama tahun 1971 dan KKM kedua tahun 2009? Mengapa **Kongres Kebudayaan Rumpun Melayu** tahun 1958 tidak masuk dalam hitungan? Kongres yang diselenggarakan beberapa bulan setelah negeri itu merdeka tentu merupakan peristiwa budaya yang bersejarah. Kongres itu tentu sangat berarti karena dari rumusan-rumusan hasil kongres dijadikan acuan dalam mengawali pembangunan kebudayaan dan kebangsaan Melayu merdeka. Seperti yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Harun tujuan kongres adalah “*untuk menyasat kebudayaan Melayu dahulu dan kebudayaan yang ada sekarang serta mencari teras Kebudayaan Kebangsaan di negeri ini*”.

Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 pertubuhan Melayu dari Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura termasuk pemerhati bangsa lain. Dari aspek bahasa, KKM telah menge-luarkan satu usulan yang berbunyi:

“Bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa Pengantar dalam semua jenis peringkat persekolahan Kerajaan dan Bantuan Kerajaan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan juga menjadi perkara yang wajib di dalam peperiksaan dari peringkat Sekolah Rendah ke sekolah Menengah, Sijil Pelajaran Rendah dan Sijil Pelajaran Kebangsaan”.

Berdasarkan pada putusan KKM itu mulai tahun 1958 sekolah rendah kerajaan memulakan bahasa pengantarnya dengan bahasa Melalyu dengan dimulakan melalui darjah satu. Sama dengan yang dilakukan oleh Inggris dahulu menginggriskan sekolah Melayu dengan dimulai dari darjah satu. Maka dalam tempoh Sembilan tahun, tentulah semua pelajar-pelajar sekolah Inggris akan dapat menerima bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar. Maka pada tahun 1968, pelajar-pelajar yang lulus sekolah Inggris ialah pelajar-pelajar yang betul-betul menerima bahasa Melayu sepe-nuhnya. Tidak hanya sebatas untuk sekolah rendah, Menteri Plajaran ketika itu juga membuka rancangan pemakaian bahasa Melayu untuk sekolah menengah pertama untuk menggunakan bahasa Melayu.

B. Kongres Kebudayaan Melayu 1971

Pemerintah Malaysia mulai menaruh perhatian serius terhadap peran kebudayaan dalam kehidupan berbangsa, setelah tahun 1969 terjadi kerusuhan ras antara ras Melayu dengan non-Melayu. Akibat dari peristiwa itu “ketenangan” kehidupan berbangsa di Malaysia tiba-tiba hancur menjadi jelas bahwa budaya-budaya besar dan kecil memang bisa menjadi sumber perpecahan bukan persatuan. Semua menaruh perhatian untuk melakukan tinjauan kembali terhadap konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan. Dan peristiwa peninjauan kembali itu menjadi titik awal dari perubahan drastis dalam situasi politik, dalam lanskap budaya, serta dalam hampir setiap bidang kehidupan

bangsa. Untuk mencapai semua maksud dan tujuan itu, disimpulkan bahwa antara keadaan sebelumnya dengan urusan sekarang terbukti tidak dapat dipertahankan. Telah terbukti bahwa kebijakan untuk mentolerir keberadaan budaya lain tidak cukup, tetapi budaya yang kini ada harus dipahami, dan dianggap serius, satu harus datang ke bersama mereka. Dengan peristiwa itu membuktikan tidak akan cukup dengan memulihkan harmoni.

Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri menjelaskan: "...benar atau salah, bahwa tidak adanya identitas tunggal nasional di antara banyak kelompok etnis di negara ini, serta kesalahpahaman atau miskomunikasi antara mereka, adalah apa yang ada di balik kekerasan itu. Saat muncul tepat untuk lembaga kebijakan budaya nasional". Dari balik peristiwa itulah diselenggarakan sebuah forum nasional untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Melayu. Kongres diselenggarakan di University of Malaya 16 - 20 Agustus 1971. Forum ini menjadi ajang perdebatan lima puluh dua makalah, dari berbagai tingkat kualitas, tentang berbagai aspek budaya. Berdasarkan rekomendasi dari Kongres Kebudayaan Nasional, kebijakan baru mulai dirumuskan, yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan Malaysia. Berdasarkan rekomendasi dari Kongres Kebudayaan Nasional, kebijakan baru mulai dirumuskan, yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan Malaysia.

Menurut Dato' Dr Ghulam Sarwar Yousof dalam tulisannya berjudul Masalah Budaya - Kemanakah Arah Kebudayaan Nasional?, "sejak Federasi Malaya merdeka pada 1957 dan bahkan setelah pembentukan Malaysia pada tahun 1963, pertimbangan budaya tidak mencari cara apapun yang serius dalam kehidupan negara". Baru pada tahun 1971, Malaysia mulai serius memperbincangkan soal kebudayaan Melayu/Malaysia. Pada tanggal 16-20 Agustus 1971 di University of Malaya diselenggarakan Nasional Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang pertama. Tujuannya antara lain meninjau kemungkinan memperkembangkan bentuk-bentuk kesenian tradisional benar-benar menjadi budaya yang bersifat nasional, sesuai dengan cita-cita memupuk kepribadian kebangsaan Malaysia yang berteraskan kebudayaan Melayu. (Amin Sweeney, Puncak Gunung Es/Wayang Kulit dan Cabarannya Masa Kini hal. 81) Ada 52 dua makalah yang diperdebatkan berbagai tingkat kualitas, tentang berbagai aspek budaya.

Dalam kongres digariskan dasar-dasar Kebudayaan Kebangsaan dengan menetapkan 3 prinsip asas untuk menjadi dasar dalam membina kebudayaan kebangsaan Malaysia yaitu:

1. Kebudayaan kebangsaan haruslah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal di rantau ini.
2. Unsur2 kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan.
3. Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.

Penerimaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) itu telah ditempatkan sebagai jatidiri rakyat Malaysia karena dasar itu menjadi asas kebudayaan nasional yang berkait rapat dengan budaya, sejarah, politik dan perlembagaan negara ini. Salah hasil yang dibanggakan oleh Malaysia adalah telah dibangunnya Istana Budaya atau *The Palece of Culture*, diresmikan dan dibuka pada bulan September 1999 oleh Perrdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahatir Muhammad. Istana ini terletak di Jln. Tun Abdul Razak di

tengan bandaraya Kuala Lumpur, bersebelahan dengan Balai Seni Lukis Negara. Tujuan Penubuhan Istana Budaya adalah untuk menaikkan taraf seni pentas, membangun kecermelangan artistik dalam seni teater, menghasilkan persembahan-persembahan teater berkualitas tinggi dan juga menaikkan minat dan penghargaan orang ramai terhadap seni artistik. Gedung seperti ini telah dirancang oleh Indonesia sejak tahun 1960-an dengan nama "Wisma Seni Nasional" di Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta. Sampai saat keinginan itu tidak kunjung terwujud karena dinilai oleh para pengambil keputusan belum menjadi prioritas. Yang sudah terwujud baru Galeri Nasional saja, dan itu pun juga belum sesuai dengan rencana yang dibuat.

Hasil kongres

Kongres menghasilkan putusan yang disebutnya "Resolusi" yang terdiri atas 10 bidang, yaitu: (1) Resolusi 1: Kebudayaan Nasional; (2) Resolusi 2: Kenegaraan dan Perlembagaan; (3) Resolusi 3: Sistem Politik; (4) Resolusi 4: Sistem Ekonomi; (5) Resolusi 5: Sistem Pendidikan; (6) Resolusi 6: Bahasa, Kesusasteraan; (7) Resolusi 7: Media; (8) Resolusi 8: Islam; (9) Resolusi 9: Perpaduan Bangsa; (10) Resolusi 10: Globalisasi.

Resolusi 1: Kebudayaan Nasional

1. Kami menjunjung setinggi-tingginya pelbagai resolusi yang telah dimaktubkan dalam sidang-sidang KKM I dan KKK dan menegaskan kembali pelbagai resolusi itu sebagai wajar dan relevan bagi Malaysia kini.
Kami juga, khususnya, menegakkan kembali gagasan "kebudayaan Melayu/Bumiputera ialah teras kebudayaan kebangsaan" dengan erti gagasan ini menjadi landasan serta kerangka bagi semua perkembangan dan pembangunan kebudayaan kebangsaan Malaysia.
Maka kami mendesak agar Kementerian dan pelbagai agensi kerajaan sentiasa memastikan pemantauan dan pelaksanaan gagasan ini di sepanjang masa.
2. Kami menegaskan kembali prinsip **Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK)** seperti yang berikut:
 - (a) **kebudayaan kebangsaan mesti berasaskan kebudayaan peribumi di rantau Alam Melayu;**
 - (b) **unsur-unsur kebudayaan lain boleh disesuaikan dengan kebudayaan kebangsaan; dan**
 - (c) **Islam adalah unsur utama dalam kebudayaan kebangsaan.**
3. Kebudayaan Melayu/Bumiputera adalah visi dan kerangka budaya yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menjadi landasan pembangunan dan kemajuan kebudayaan Malaysia, maka dengan itu, kami menolak segala gagasan dan tafsiran yang berkaitan dengan multiculturalism sebagai kerangka pemikiran dan pembangunan kebudayaan kebangsaan Malaysia yang akan mengancam dan meruntuhkan seluruh sistem kebudayaan bangsa.
4. Kami menganjurkan dan mendesak Kerajaan melaksanakan pembangunan kebudayaan berasaskan nilai-nilai luhur dan mulia kebudayaan Alam Melayu khususnya nilai "budi", "adat" dan "adab" rumpun Melayu dan menubuhkan secara

- rasmi **badan kajian adat** bagi melaksanakannya sebaik-baiknya.
5. Kerajaan hendaklah menubuhkan sebuah **yayasan untuk memantau pelaksanaan kebudayaan kebangsaan** dan pembangunan segala bentuk dan ciri kebudayaan Melayu/ Bumiputera untuk menjadi landasan tamadun bangsa.

Resolusi 2: Kenegaraan dan Perlembagaan

1. Kami menegaskan bahawa Malaysia ialah negara persekutuan terdiri daripada Negeri-Negeri Melayu/Bumiputera sebagai kelangsungan utuh daripada sejarah Negeri-Negeri Melayu/Bumiputera dan pada zaman tadbiran kolonial yang telah diserahkan kembali kepada Raja-Raja dan wakil-wakil rakyat Malaysia pada tarikh kemerdekaan dengan segala persetujuannya termaktub dalam semua undang-undang per-lembagaan negara.
2. Kami menegaskan bahawa pelbagai Perkara dalam Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada keutuhan kenegaraan Melayu sebagai teras mulia dan sakral bagi perundangan itu. Maka dengan itu, kami mendesak dan menuntut semua rakyat menghormati semua peruntukan dalam semua undang-undang perlembagaan itu tanpa tafsiran terpilih-pilih dan serong terhadap setiap peruntukannya.
3. Kami menghormati prinsip “pemisahan kuasa” dalam Perlembagaan negara dan yakin terhadap fungsi pemerintahan adil yang tersirat dalam prinsip itu, maka dengan itu kami juga menuntut agar Perlembagaan tidak dipinda sewenang-wenangnya sehingga menyebabkan kemuliaan raja, kepentingan rakyat dan hak istimewa Melayu/Bumiputera dan serta hak asasi semua rakyat menjadi lemah dan remeh.
4. Keseimbangan kuasa antara kedaulatan serta kemuliaan raja dan rakyat mestilah sentiasa terpelihara melalui adat-istiadat atau konvensi kenegaraan dan pemerintahan demokrasi yang adil dan penuh tanggung-jawab dan beradab; kedua-dua pihak ini ialah pengimbang wajar terhadap kemutlakan kuasa masing-masing demi kewujudan seluruh bangsa.

Resolusi 3: Sistem Politik

1. Kami mendukung sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi, dan kedua bahagian itu menjadi bahagian sempurna dan utuh bagi kerajaan Malaysia. Demikian juga, institusi Raja dan Majlis Raja-Raja menjadi bahagian utuh sistem pemerintahan Malaysia, maka segala kemuliaan dan kuasa yang termaktub sebagai “pemerintah tertinggi” mestilah dipelihara dan dijunjung tinggi oleh semua pihak.
2. Sistem demokrasi menuntut semua rakyat melaksanakan kuasa mereka dengan penuh tatasusila, obligasi dan tanggung-jawab terhadap seluruh peruntukan perundangan demi keamanan, kesejahteraan dan kebajikan bersama, maka kami menuntut segala bentuk peruntukan perundangan yang meremehkan dan menjatuhkan kemuliaan raja sebagai puncak pemerintah negara dan negeri-negeri mestilah dipinda dan ditarik balik.
3. Keluhuran Perlembagaan dan dasar-dasar utama Negara yakni dasar pendidikan, dasar kebudayaan, Rukun Negara dan dasar bahasa kebangsaan dikembalikan

sebagai asas tindakan semasa terutama DEB untuk mencapai keseimbangan ekonomi antara kaum.

4. Kepimpinan negara sejak Dato' Onn Jaafar sehingga ke zaman kini sentiasa meneguhkan tiga prinsip teras Negara: agama, bangsa dan negara. Maka kami mendesak supaya prinsip ini kekal menjadi teras perjuangan dan kepemimpinan Negara selamanya.

Resolusi 4: Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi mestilah memancarkan pengagihan saksama terhadap kekayaan negara tanpa sebarang kaum atau kelompok mendominasi pemilikan kekayaan dan peluang guna tenaga dengan menyusun semula struktur dan asasi ekonomi kolonial yang berterusan di Malaysia demi kedaulatan Negara, maka kami menuntut peruntukan hak-hak istimewa Melayu/ Bumiputera terutama berkaitan Perkara 153 dan tanah rizab Melayu sentiasa dilaksanakan sepenuhnya sambil menghargai hak sah semua kaum, maka kami mendesak supaya kajian hasil dan natijah DEB dilakukan untuk memenuhi keperluan keseimbangan ekonomi Bumiputera

Resolusi 5: Sistem Pendidikan

1. Sistem pendidikan mestilah berfungsi sebagai wahana membi-na keutuhan negara, perpaduan bangsa, jati diri bangsa, keilmuan dalam semua lapisan masyarakat, minda dinamis serta progresif, sikap dan nilai patriotik serta nasionalistik dan kemajuan negara di mata dunia.
2. Kerajaan mesti melaksanakan dan mencapai kesaksamaan pendidikan berkualiti melalui perantaraan bahasa kebangsaan tunggal, kemudahan menyeluruh di semua wilayah, merito-krasi yang terpilih dari semua golongan dan penyampaian khidmat yang penuh azam serta dedikasi oleh semua pihak.
3. Kami mendesak hanya satu bahasa kebangsaan tunggal dilaksanakan dalam seluruh sistem pendidikan dari tahap rendah hingga universiti demi perpaduan bangsa, keutuhan negara dan kemajuan seluruh lapisan masyarakat; pelaksanaan dasar pengajaran selain bahasa kebangsaan akan melemahkan maruah bangsa, menjatuhkan martabat negara dan menanam perpecahan antara kaum dan lapisan masyarakat; segala tindakan berkaitan bahasa kebangsaan mestilah selaras peruntukan semua perundangan negara.
4. Pendidikan bahasa kebangsaan mesti diwajibkan kepada semua warganegara sehingga ke tahap fasih, sambil meng-galakkan mereka memperoleh kemahiran bahasa kedua dan pelbagai bidang ilmu; semua anggota tadbiran kerajaan dan masyarakat awam terutama anggota dalam perkhidmatan dan pembuatan undang-undang mesti diwajibkan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan fasih demi pencapaian keadilan dalam masyarakat.
5. Kerajaan mesti melaksanakan pendidikanseni serta nilai-nilai kebudayaan kebangsaan dan sejarah serta peradaban bangsa sebagai landasan untuk mencapai kekuatan peribadi, keutuhan jati diri serta ketaatsetiaan terhadap negara dan bangsa.
6. Kerajaan mesti meneliti kembali kurikulum pelajaran kebangsaan untuk meneguhkan

pendidikan semasa dan antar-bangsa serta jati diri melalui peneguhan pendidikan sastera, budaya dan bahasa.

Resolusi 6: Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian

1. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang mesti diperoleh dengan sebaiknya oleh semua lapisan masyarakat demi keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara.
2. Bahasa Kebangsaan telah membuktikan keupayaannya untuk menjadi perantaraan pendidikan dan pencapaian segala bidang keilmuan serta kemahiran setingginya, bagi semua lapis-an masyarakat.
3. Pemerolehan bahasa-bahasa lain adalah kemahiran tambahan yang wajar bagi meningkatkan keupayaan bangsa, mendalami sumber keilmuan dan meluaskan hubungan di serata dunia antarabangsa.
4. Dasar bahasa dalam pendidikan mestilah dikembalikan kepada dasar yang berkuatkuasa sebelum 2003 sebagai bahasa pengantar di seluruh sistem pendidikan dari tahap rendah kepada tahap universiti.
5. Kesusasteraan adalah wahana kemanusiaan yang berbudi tinggi demi pembinaan bangsa yang beradab dan berhemah tinggi serta berjiwa besar oleh itu **mata pelajaran Ke-susasteraan Melayu mestilah dijadikan mata pelajaran teras dan wajib** dalam semua lapisan pendidikan Negara.
6. Kesenian adalah pengucapan dan daya cipta mulia dan tinggi bagi setiap individu dan seluruh bangsa demi pemartabatan maruah dan hemah pada tahap antarabangsa, maka pembinaan dan kemajuan seni mestilah selaras dengan landasan kebu-dayaan kebangsaan serta dari kekayaan sumbernya di seluruh Alam Melayu dan warisan kemanusiaan global

Resolusi 7: Media

1. Semua bentuk dan pemilikan media mesti memainkan peranan utama sebagai wahana peneguhan teras nasional, kesedaran nasional, keutuhan bangsa dan negara serta kepentingan dan perpaduan nasional dan juga pemikiran bangsa.
2. Media mesti berperanan sebagai saluran dan wahana mak-lumat, pendidikan serta **hiburan yang terkawal** tanpa terlalu terlibat dengan budaya hedonisme, kekerasan dan tidak berakhlak. Media juga menjadi saluran paling berkesan antara kelompok masyarakat, seluruh negara, serantau dan antara-bangsa maka ia menjadi wahana penggembleng perpaduan serta kesatuan bangsa. Maka kami mendesak penyelarasan media mesti dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan perpaduan bangsa.
3. Filem adalah media amat berkesan dalam menyampaikan pelbagai gagasan dan tindakan terutama berkaitan kebudayaan, maka kami mendesak supaya filem digunakan sepenuh untuk meneguhkan jati diri bangsa dan menyaring keselamatan bangsa dan Negara.

Resolusi 8: Islam

1. Kami berpegang teguh pada peruntukan Perlembagaan Persekutuan sebagai piagam yang telah termaktub tentang peranan dan kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan dan segala implikasinya mengatasi semua sistem agama dan kepercayaan yang lain dalam negara; maka peruntukan itu menuntut semua rakyat Malaysia menghormati kedudukannya, peranannya dan kemuliaannya, di samping menegaskan hak mengamalkan agama dan kepercayaan lain secara aman dan damai.
2. **Islam adalah kekuatan kebudayaan Melayu** yang menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar Negara. Maka kami mendesak supaya kerajaan mengawal segala bentuk pemikiran dan tindakan dengan lebih berkesan untuk me-melihara keutuhan Islam dan bangsa Melayu/Bumiputera sebagai bangsa definitif dalam Negara.

Resolusi 9: Perpaduan Bangsa

Kami mendesak agar perpaduan dan keutuhan bangsa serta kesejahteraan masyarakat menjadi matlamat dan sasaran utama dalam segala bentuk penggubalan dasar, perancangan program dan pelaksanaan projek pembangunan berlandaskan perundangan negara dan Perlembagaan persekutuan sebagai landasan sah bagi segala penggunaan peruntukan kewangan negara secara penuh integriti dan telus.

Resolusi 10: Globalisasi

Kami mendesak agar kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia memandang dan menangani proses globalisasi dengan penuh telah diadakan pada tahun 1971 yang menetapkan 3 prinsip asas untuk membina kebudayaan kebangsaan iaitu:

1. Kebudayaan kebangsaan haruslah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal di rantau ini.
2. Unsur2 kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan.
3. Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.

Penerimaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) sebagai jatidiri rakyat Malaysia kerana ia menjadi asas kebudayaan nasional yang berkait rapat dengan budaya, sejarah, politik dan perlembagaan negara ini.

Ada yang menulis perbezaan antara KKM 1958 dan 1971. KKM 1958 diselenggarakan semasa kemerdekaan Tanah Melayu, sedangkan KKM 1971 di Johor Bahru boleh dipandang sebagai kongres di benteng terakhir budaya Melayu. Keterlibatan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan rumpun Melayu itu menjadi suatu pertemuan para pewaris kebudayaan rakyat asal rantau ini dan menjadi prinsip asas Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) dalam KKM 1971, iaitu meliputi dasar kerajaan sendiri.

Dalam KKM 1971 dibahas 10 bidang iaitu meliputi: (1) soal dasar (unsur kebudayaan tradisional, penerangan dan sebaran adat Melayu, peranan institusi pengajian tinggi, bahasa, nilai sosiobudaya dan sejarah); (2) kesusasteraan, seni muzik, seni tari, seni

lukis, seni hias, seni drama, seni dalam perusahaan, seni bina dan seni pertukangan dan perusahaan.

C. Kongres Kebudayaan Melayu II 2009

Jarak waktu antara KKM I tahun 1971 dengan KKM II tahun 2009 cukup lama, hampir 40 tahun. Dalam dokumen kongres disebutkan secara jelas dinyatakan bahwa KKM 2009 sebagai Kongres Kebudayaan Melayu kali kedua. Kongres ini dihadiri oleh pelbagai pertubuhan kebudayaan Melayu yang diadakan pada 16 - 17 Maret 2009 di Wisma Sejarah, Kuala Lumpur. Kongres ini merupakan kesinambungan dari KKM I yang bersidang di Melaka pada tahun 1957 dan juga Kongres Kebudayaan Kebangsaan (KKK) yang bersidang di Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada tahun 1970.

Kongres ini dianjurkan oleh Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena), Persatuan Sejarah Malaysia, Jabatan Kebudayaan dan Keseniaan Negara dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). KKM II menghasilkan sejumlah resolusi sebagai berikut:

Hasil

Kongres menghasilkan putusan yang disebutnya "Resolusi" yang terdiri atas 10 bidang, yaitu: (1) Resolusi 1: Kebudayaan Nasional; (2) Resolusi 2: Kenegaraan dan Perlembagaan; (3) Resolusi 3: Sistem Politik; (4) Resolusi 4: Sistem Ekonomi; (5) Resolusi 5: Sistem Pendidikan; (6) Resolusi 6: Bahasa, Kesusasteraan; (7) Resolusi 7: Media; (8) Resolusi 8: Islam; (9) Resolusi 9: Perpaduan Bangsa; (10) Resolusi 10: Globalisasi.

Resolusi Kongres Kebudayaan Melayu II

Kami, para peserta Kongres Kebudayaan Melayu II yang bersidang di Wisma Sejarah dengan segala rela hati menerima semua peruntukan utama dan semua perincian terhadap peruntukan utama resolusi-resolusi ini. Kami menyerahkannya kepada kerajaan sebagai piagam dan pegangan kami demi keutuhan negara dan kesejahteraan bangsa Malaysia kini dan masa hadapan.

Kami turunkan tanda tangan sebagai pengesahan terhadap cita dan harapan kami seperti termaktub dalam resolusi ini.

- Resolusi 1: Kebudayaan Nasional;
- Resolusi 2: Kenegaraan dan Perlembagaan;
- Resolusi 3: Sistem Politik;
- Resolusi 4: Sistem Ekonomi;
- Resolusi 5: Sistem Pendidikan;
- Resolusi 6: Bahasa, Kesusasteraan;
- Resolusi 7: Media;
- Resolusi 8: Islam;
- Resolusi 9: Perpaduan Bangsa;
- Resolusi 10: Globalisasi.

Y. Bhg. Dato' Narliza Rafli, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara

1. Y. Bhg. Dato' Termuzi Haji Abdul Aziz, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka
2. Y. Bhg. Dato' Haji Omar Mohd Hashim, Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia
3. Y. Bhg. Tan Sri Profesor Emeritus Dato' Dr Ismail Hussein, Ketua Satu Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA).

Termaktub di Wisma Sejarah

Jalan Tun Abdul Razak,

Kuala Lumpur

Pada 17 Mac 2009

Bersamaan 20 Rabiulawal 1430H

Lampiran: Berita Kongres Kebudayaan Melayu II

Rabu, 18 Mac 2009

Lampiran: **Berita Kongres Kebudayaan Melayu II**

Rabu, 18 Mac 2009

Resolusi 1 KKM II: Kebudayaan Nasional

1. Kami menjunjung seting-tingginya pelbagai resolusi yang telah dimaktubkan dalam sidang-sidang KKM I dan KKK dan menegaskan kembali pelbagai resolusi itu sebagai wajar dan relevan bagi Malaysia kini.

Kami juga, khususnya, menegaskan kembali gagasan “kebudayaan Melayu/Bumiputera ialah teras kebudayaan kebangsaan” dengan erti gagasan ini menjadi landasan serta kerangka bagi semua perkembangan dan pembangunan kebudayaan kebangsaan Malaysia.

Maka kami mendesak agar Kementerian dan pelbagai agensi kerajaan sentiasa memastikan pemantauan dan pelaksanaan gagasan ini di sepanjang masa.

2. Kami menegaskan kembali prinsip **Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK)** seperti yang berikut:
 - (a) kebudayaan kebangsaan mesti berasaskan kebudayaan peribumi di rantau Alam Melayu,
 - (b) unsur-unsur kebudayaan lain boleh disesuaikan dengan kebudayaan kebangsaan, dan
 - (c) Islam adalah unsur utama dalam kebudayaan kebangsaan.
3. Kebudayaan Melayu/Bumiputera adalah visi dan kerangka budaya yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menjadi landasan pembangunan dan kemajuan kebudayaan Malaysia, maka dengan itu, kami menolak segala gagasan dan tafsiran yang berkait dengan multiculturalism sebagai kerangka pemikiran dan pembangunan kebudayaan kebangsaan Malaysia yang akan mengancam dan meruntuhkan seluruh sistem kebudayaan bangsa.
4. Kami menganjurkan dan mendesak Kerajaan melaksanakan pembangunan kebudayaan berasaskan nilai-nilai luhur dan mulia kebudayaan Alam Melayu khususnya nilai “budi”, “adat” dan “adab” rumpun Melayu dan menubuhkan secara rasmi **badan kajian adat** bagi melaksanakannya sebaik-baiknya.

5. Kerajaan hendaklah menubuhkan sebuah **yayasan untuk memantau pelaksanaan kebudayaan kebangsaan** dan pem-bangunan segala bentuk dan ciri kebudayaan Melayu/Bumi-putera untuk menjadi landasan tamadun bangsa.

Resolusi 2 KKM II: Kenegaraan dan Perlembagaan

1. Kami menegaskan bahawa Malaysia ialah negara persekutuan terdiri daripada Negeri-Negeri Melayu/ Bumiputera sebagai kelangsungan utuh daripada sejarah Negeri-Negeri Melayu/Bumiputera dan pada zaman tadbiran kolonial yang telah diserahkan kembali kepada Raja-Raja dan wakil-wakil rakyat Malaysia pada tarikh kemerdekaan dengan segala persetujuannya termaktub dalam semua undang-undang perlembagaan negara.
2. Kami menegaskan bahawa pelbagai Perkara dalam Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada keutuhan kenegaraan Melayu sebagai teras mulia dan sakral bagi perundangan itu. Maka dengan itu, kami mendesak dan menuntut semua rakyat menghormati semua peruntukan dalam semua undang-undang perlembagaan itu tanpa tafsiran terpilih-pilih dan serong terhadap setiap peruntukannya.
3. Kami menghormati prinsip “pemisahan kuasa” dalam Perlembagaan negara dan yakin terhadap fungsi pemerintahan adil yang tersirat dalam prinsip itu, maka dengan itu kami juga menuntut agar Perlembagaan tidak dipinda sewenang-wenangnya sehingga menyebabkan kemuliaan raja, kepentingan rakyat dan hak istimewa Melayu/Bumiputera dan serta hak asasi semua rakyat menjadi lemah dan remeh
4. Keseimbangan kuasa antara kedaulatan serta kemuliaan raja dan rakyat mestilah sentiasa terpelihara melalui adat-istiadat atau konvensi kenegaraan dan pemerintahan demokrasi yang adil dan penuh tanggung-jawab dan beradab; kedua-dua pihak ini ialah pengimbang wajar terhadap kemutlakan kuasa masing-masing demi kewujudan seluruh bangsa.

Resolusi 3 KKM II: Sistem Politik

1. Kami mendukung sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi, dan kedua bahagian itu menjadi bahagian sempurna dan utuh bagi kerajaan Malaysia. Demikian juga, institusi Raja dan Majlis Raja-Raja menjadi bahagian utuh sistem pemerintahan Malaysia, maka segala kemuliaan dan kuasa yang termaktub sebagai “pemerintah tertinggi” mestilah dipelihara dan dijunjung tinggi oleh semua pihak.
2. Sistem demokrasi menuntut semua rakyat melaksanakan kuasa mereka dengan penuh tatasusila, obligasi dan tanggungjawab terhadap seluruh peruntukan perundangan demi keamanan, kesejahteraan dan kebajikan bersama, maka kami menuntut segala bentuk peruntukan perundangan yang me-remehkan dan menjatuhkan kemuliaan raja sebagai puncak pemerintah negara dan negeri-negeri mestilah dipinda dan ditarik balik.
3. Keluhuran Perlembagaan dan dasar-dasar utama Negara yakni dasar pendidikan, dasar kebudayaan, Rukun Negara dan dasar bahasa kebangsaan dikembalikan sebagai asas tindakan semasa terutama DEB untuk mencapai keseimbangan ekonomi antara kaum.
4. Kepimpinan negara sejak Dato’ Onn Jaafar sehingga ke zaman kini sentiasa

meneguhkan tiga prinsip teras Negara: agama, bangsa dan negara. Maka kami mendesak supaya prinsip ini kekal menjadi teras perjuangan dan kepemimpinan Negara selamanya.

Resolusi 4 KKM II: Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi mestilah memancarkan pengagihan saksama terhadap kekayaan negara tanpa sebarang kaum atau kelompok mendominasi pemilikan kekayaan dan peluang guna tenaga dengan menyusun semula struktur dan asasi ekonomi kolonial yang berterusan di Malaysia demi kedaulatan Negara, maka kami menuntut peruntukan hak-hak istimewa Melayu/Bumiputera terutama berkaitan Perkara 153 dan tanah rizab Melayu sentiasa dilaksanakan sepenuhnya sambil menghargai hak sah semua kaum, maka kami mendesak supaya kajian hasil dan natijah DEB dilakukan untuk memenuhi keperluan keseimbangan ekonomi Bumiputera.

Resolusi 5 KKM II: Sistem Pendidikan

1. Sistem pendidikan mestilah berfungsi sebagai wahana membina keutuhan negara, perpaduan bangsa, jati diri bangsa, keilmuan dalam semua lapisan masyarakat, minda dinamis serta progresif, sikap dan nilai patriotik serta nasionalistik dan kemajuan negara di mata dunia.
2. Kerajaan mesti melaksanakan dan mencapai kesaksamaan pendidikan berkualiti melalui perantaraan bahasa kebangsaan tunggal, kemudahan menyeluruh di semua wilayah, merito-krasi yang terpilih dari semua golongan dan penyampaian khidmat yang penuh azam serta dedikasi oleh semua pihak.
3. Kami mendesak hanya satu bahasa kebangsaan tunggal dilak-sanakan dalam seluruh sistem pendidikan dari tahap rendah hingga universiti demi perpaduan bangsa, keutuhan negara dan kemajuan seluruh lapisan masyarakat; pelaksanaan dasar pengajaran selain bahasa kebangsaan akan melemahkan maruah bangsa, menjatuhkan martabat negara dan menanam perpecahan antara kaum dan lapisan masyarakat; segala tindakan berkaitan bahasa kebangsaan mestilah selaras peruntukan semua perundangan negara.
4. Pendidikan bahasa kebangsaan mesti diwajibkan kepada semua warganegara sehingga ke tahap fasih, sambil menggalakkan mereka memperoleh kemahiran bahasa kedua dan pelbagai bidang ilmu; semua anggota tadbiran kerajaan dan masyarakat awam terutama anggota dalam perkhidmatan dan pembuatan undang-undang mesti diwajibkan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan fasih demi pencapaian keadilan dalam masyarakat.
5. Kerajaan mesti melaksanakan pendidikan seni serta nilai-nilai kebudayaan kebangsaan dan sejarah serta peradaban bangsa sebagai landasan untuk mencapai kekuatan peribadi, keutuhan jati diri serta ketaatsetiaan terhadap negara dan bangsa.
6. Kerajaan mesti meneliti kembali kurikulum pelajaran kebangsaan untuk meneguhkan pendidikan semasa dan antarabangsa serta jati diri melalui peneguhan pendidikan sastera, budaya dan bahasa.

Resolusi 6 KKM II: Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian

1. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang mesti diperoleh dengan sebaiknya oleh semua lapisan masyarakat demi keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara.
2. Bahasa Kebangsaan telah membuktikan keupayaannya untuk menjadi perantaraan pendidikan dan pencapaian segala bidang keilmuan serta kemahiran setingginya, bagi semua lapisan masyarakat.
3. Pemerolehan bahasa-bahasa lain adalah kemahiran tambahan yang wajar bagi meningkatkan keupayaan bangsa, mendalami sumber keilmuan dan meluaskan hubungan di serata dunia antarabangsa.
4. **Dasar bahasa dalam pendidikan mestilah dikembalikan kepada dasar yang berkuat-kuasa sebelum 2003** sebagai bahasa pengantar di seluruh sistem pendidikan dari tahap rendah kepada tahap universiti.
5. Kesusasteraan adalah wahana kemanusiaan yang berbudi tinggi demi pembinaan bangsa yang beradab dan berhemah tinggi serta berjiwa besar oleh itu **mata pelajaran Kesusasteraan Melayu mestilah dijadikan mata pelajaran teras dan wajib** dalam semua lapisan pendidikan Negara.
6. Kesenian adalah pengucapan dan daya cipta mulia dan tinggi bagi setiap individu dan seluruh bangsa demi pemartabatan maruah dan hemah pada tahap antarabangsa, maka pembinaan dan kemajuan seni mestilah selaras dengan landasan kebudayaan kebangsaan serta dari kekayaan sumbernya di seluruh Alam Melayu dan warisan kemanusiaan global.

Resolusi 7 KKM II: Media

1. Semua bentuk dan pemilikan media mesti memainkan peranan utama sebagai wahana peneguhan teras nasional, kesedaran nasional, keutuhan bangsa dan negara serta kepentingan dan perpaduan nasional dan juga pemikiran bangsa.
2. Media mesti berperanan sebagai saluran dan wahana mak-lumat, pendidikan serta **hiburan yang terkawal** tanpa terlalu terlibat dengan budaya hedonisme, kekerasan dan tidak berakhlak. Media juga menjadi saluran paling berkesan antara kelompok masyarakat, seluruh negara, serantau dan antara-bangsa maka ia menjadi wahana penggembleng perpaduan serta kesatuan bangsa. Maka kami mendesak penyelarasan media mesti dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan perpaduan bangsa.
3. Filem adalah media amat berkesan dalam menyampaikan pelbagai gagasan dan tindakan terutama berkaitan kebudayaan, maka kami mendesak supaya filem digunakan sepenuh untuk meneguhkan jati diri bangsa dan menyaring keselamatan bangsa dan Negara.

Resolusi 8 KKM II: Islam

1. Kami berpegang teguh pada peruntukan Perlembagaan Persekutuan sebagai piagam yang telah termaktub tentang peranan dan kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan dan segala implikasinya mengatasi semua sistem agama dan kepercayaan yang lain dalam negara; maka peruntukan itu menuntut semua rakyat Malaysia menghormati kedudukannya, peranannya dan kemuliaannya, di samping menegaskan hak mengamalkan agama dan kepercayaan lain secara aman dan

damai.

2. **Islam adalah kekuatan kebudayaan Melayu** yang menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar Negara. Maka kami mendesak supaya kerajaan mengawal segala bentuk pemikiran dan tindakan dengan lebih berkesan untuk memelihara keutuhan Islam dan bangsa Melayu/ Bumiputera sebagai bangsa definitif dalam Negara.

Resolusi 9 KKM II: Perpaduan Bangsa

Kami mendesak agar perpaduan dan keutuhan bangsa serta kesejahteraan masyarakat menjadi matlamat dan sasaran utama dalam segala bentuk penggubalan dasar, perancangan program dan pelaksanaan projek pembangunan berlandaskan perundangan negara dan Perlembagaan persekutuan sebagai landasan sah bagi segala penggunaan peruntukan kewangan negara secara penuh integriti dan telus.

Resolusi 10 KKM II: Globalisasi

Kami mendesak agar kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia memandang dan menangani proses globalisasi dengan penuh waspada dan pengertian demi keutuhan bangsa dan negara serta kelangsungan corak hidup bangsa yang wajar, berakhlak dan beradab.

Kami mendesak agar kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia memandang dan menangani proses globalisasi dengan penuh waspada dan pengertian demi keutuhan bangsa dan negara serta kelangsungan corak hidup bangsa yang wajar, berakhlak dan beradab.

Catatan KKM

Dari 2 kali KKM di atas dapat dicatat bahwa meskipun jarak waktu antara KKM pertama (1971) dan kedua (2009) cukup lama, yaitu selama 38 tahun, namun inti resolusi yang ditetapkan dalam KKM I dengan KKM II tidak banyak berbeda. Bidang masalah yang diperdebatkan yang dituangkan ke dalam 10 butir judul "Resolusi" antara kedua kongres sama sekali tidak ada perbedaan. Sepertinya perdebatan dibatasi oleh 10 bidang itu saja.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr.Daoed Joesoef sedang menyampaikan sambutan pada pembukaan Kongres II Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ketika upacara pembukaannya Sabtu 21 Juni diwanti Werdhi Budaya Abiankapas Denpasar. (Foto : Pring.)

Sumber: <http://djinar.wordpress.com/2011/06/22/kesempatan-terbuka-bagi-pustakawan-untuk-memegang-jabatan-fungsional/>

BAB IX

KONFERENSI KEBUDAYAAN

Selain forum kongres, perbincangan masalah kebudayaan daerah juga dilaksanakan dalam forum konferensi. Forum konferensi pertama diselenggarakan tahun 1950. Gambaran secara lengkap mengenai penyelenggaraan Konferensi Kebudayaan Indonesia dan Daerah adalah sebagai berikut.

A. Konferensi Kebudayaan Indonesia

Dalam rangka mematangkan pembentukan BMKN sesuai dengan keputusan KK 1948 dan 1951, diselenggarakan 2 kali Konferensi Kebudayaan Indonesia, yakni tahun 1950 dan 1952. Paparan lengkap mengenai acara ini ada pada Bagian I Bab III Kongres Kebudayaan Masa Kemerdekaan Awal.

A.1 Konferensi Kebudayaan Indonesia 1950

Dengan lahirnya Lembaga Kebudayaan Indonesia tahun 1950, maka tugas Pengurus lembaga itu adalah segera melakukan persiapan penyelenggaraan **Konferensi Kebudayaan Indonesia** dan melakukan persiapan penyelenggaraan kongres kebudayaan berikutnya. Kegiatan Konferensi Kebudayaan Indonesia yang merupakan lanjutan Kongres Magelang diselenggarakan pada tanggal 5-7 Agustus 1950, di Gedung Pertemuan Umum Kota-praja Jakarta Raya.

Konferensi itu memilih tema: *Kebudayaan Nasional dan Hubungannya dengan Kebudayaan Bangsa-bangsa lain*. Bagi sebuah bangsa yang baru merdeka tema itu dipandang penting untuk mencari kesepakatan tentang konsep, kebijakan dan strategi dalam rangka menghadapi hubungan Pemerintah RI dengan Negara-negara sahabat yang pada hakikatnya merupakan hubungan antarbudaya bangsa. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penyelenggaraan konferensi tersebut adalah sebagai berikut.

Kesimpulan-kesimpulan
KONFERENSI KEBUDAYAAN INDONESIA
Atas usaha dan pimpinan LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA

Dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 5, 6 dan 7 Agustus 1950;

- Merundingkan acara Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan luar negeri bersifat simposium;
- Mendengarkan preadvise sdr.-sdr.: Ki Hadjar Dewantara, Mr. St. Takdir Alisjahbana, Trisno Sumardjo dan Prof. Soenaria Sanyatavijaya;
- Memperhatikan kesimpulan-kesimpulan pada Kongres Kebudayaan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 20-25 Agustus 1948 di Magelang;
- Mendengar pembicaraan-pembicaraan 19 orang pendebat, di antaranya 5 orang ditunjuk lebih dahulu.

MELAHIRKAN PENDAPAT:

- bahwa pada umumnya tiap-tiap kebudayaan sesuatu bangsa itu merupakan suatu kesatuan yang organis;
- bahwa teristimewa semenjak bangsa Indonesia telah bernegara yang merdeka dan berdaulat, maka masyarakat Indonesia mencari isi dan bentuk kebudayaan yang sesuai dengan ke-inginan masyarakat dan zaman baru;
- bahwa terhadap perhubungan dengan kebudayaan luar negeri dalam hal menyempurnakan perkembangan kebudayaan Indonesia, bangsa Indonesia membuka diri secara aktif dan kritis terhadap pengaruh kebudayaan asing itu;
- bahwa persetujuan KMB mengenai kebudayaan masih dapat dipergunakan asal dalam pelaksanaannya pihak Indonesia bersikap kuat dan sesuai dengan kedaulatannya.

MENGANJURKAN:

Kepada Masyarakat dan Pemerintah

Ke luar:

1. mengadakan persetujuan-persetujuan kebudayaan dengan Negara-negara lain;
2. menempatkan atase-atase kebudayaan di Negara-negara lain;
3. mengirimkan ke luar negeri dan melakukan dengan luar negeri pertukaran mahaguru, mahasiswa, seniman, sarjana dan calon ahli;

Ke dalam:

1. mengadakan perubahan susunan komisi-bersama kebudayaan;
2. membantu dengan nyata tenaga-tenaga kreatif untuk berkembang;
3. menyempurnakan perlengkapan-perengkapan kebudayaan berupa konservatoria, laboratoria, musea, akademi-akademi kesenian, perpustakaan-perpustakaan dan lembaga-lembaga ilmu;

Kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia, supaya mengusahakan terlaksananya apa yang disebut dalam Pasal A.

Jakarta, 7 Agustus 1950.

Kesimpulan-kesimpulan di atas diambil oleh Panitia Kesimpulan Konferensi Kebudayaan Indonesia yang terdiri dari: Ny. Dr. Sutarman, Anas Ma'ruf, Mr. K. Probopranoto, R. Katamsi, Mr. M. Yamin, Prof. Sunaria Sanyatavijaya, G. Siagian, T. Sumardjo, Mr. St. Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, D. Suradji dan Dr. Bahder Djohan. (Majalah Indonesia No. I-II, 1950: hal. 132).

Berkenaan dengan penyelenggaraan konferensi itu, tiga buah surat kabar yang terbit pada saat itu masing-masing memberikan komentarnya. Tiga surat kabar itu adalah surat kabar *De Loco-motief*, Semarang tanggal 12 Agustus 1950, *Sin Po*, Jakarta tanggal 19 Agustus 1950 dan *Pemandangan*, Jakarta, 12 Agustus 1950. Harian *De Locomotief* Semarang menyebut konferensi tersebut sebagai *Kongres Kebudayaan*, dan menyoroti kesimpulan konferensi yang dipandang tidak tepat, yakni kesimpulan yang menyatakan bahwa pada umumnya tiap-tiap kebudayaan sesuatu bangsa itu merupakan suatu kesatuan yang organis.

Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa kini bangsa Indonesia telah bebas merdeka dan masyarakat mencari bentuk yang sesuai dengan keinginan dan syarat-syarat bagi masyarakat modern. Sementara itu *Sin Po* di samping menyoroti masalah perlunya kerja sama kebudayaan di samping mengemukakan dampak negative yang ditimbulkan. Di samping itu *Sin Po* menyinggung masalah Atase Kebudayaan, bahwa ternyata bersama-sama Duta Besar RRT (Republik Rakyat Tjina) Mr. Wang Yen Shu, ikut pula Atase Kebudayaan RRT untuk Indonesia Mr. Liang Sang Yuan. Sedangkan surat kabar *Pemandangan* menyoroti tentang kehadiran Mahaguru Asing di Indonesia agar mendapatkan perhatian secara serius. Harian ini mengkhawatirkan akan masuknya Mahaguru yang berjiwa kolonial, terutama untuk ilmu bidang hukum, sosiologi, ekonomi dan politik, dan oleh sebab itu menyarankan agar masuk melalui seleksi pemilihan yang ketat.

B.2 Konferensi Kebudayaan Indonesia 1952

Sama seperti Konferensi Kebudayaan 1950, paparan acara Konferensi Kebudayaan Indonesia 1951 dapat dilihat pada Bagian I, Bab III, Kongres Kebudayaan Masa Kemerdekaan Awal. Konferensi diselenggarakan di Jakarta tanggal 12-14 April 1952. Peserta Konferensi adalah organisasi kebudayaan dan perorangan. Dari organisasi antara lain: Lembaga Kebudayaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat, PEN Club, Taman Siswa, Him-punan Budaya Surakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Makassar, ASRI Jogyakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung, Yayasan Budaya Wongken-Werun Minahasa, Yayasan Kebudayaan Batak, Organisasi Kebudayaan dan Kesenian Rakyat Suara Timur Padang dan lebih dari 120 organisasi kesenian dan sebagainya dari berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Suma-tera Selatan dan Timur, dan Kalimantan.

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kongres di Bandung tahun 1951, pada

tanggal 14 April 1951 peserta Konferensi dengan suara bulat memutuskan berdirinya **BADAN MUSYAWARAT KEBUDAYAAN NASIONAL (BMKN)**. Dengan berdirinya badan baru itu, pada tanggal 12 Mei 1952, keberadaan **Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)** mengambil keputusan untuk meleburkan diri ke dalam BMKN. Badan baru itu dapat memulai aktivitasnya dengan menggunakan pegawai, kantor sekretariat, perlengkapan dan keuangan yang dimiliki LKI setelah mendapat persetujuan Menteri PP dan K. Sebagai bentuk badan hukum, BMKN memilih bentuk perkumpulan, dengan berazaskan 'kerakyatan dan kebebasan'. Sebagai sebuah perkumpulan, BMKN bersifat sebagai penghubung dan mengkoordinasikan usaha-usaha organisasi-organisasi dan orang-seorang di bidang kebudayaan. Tujuannya ialah untuk membangun dan mengembangkan kebudayaan nasional yang merupakan getaran dan pancaran jiwa rakyat Indonesia, yang hidup, tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya dan organis dalam masyarakat dan sejarah rakyat Indonesia.

Bunyi kesimpulan **Konferensi Kebudayaan** tentang organisasi Kebudayaan itu adalah sebagai berikut:

KONFERENSI KEBUDAYAAN

BAB I: TENTANG GERAKAN KEBUDAYAAN

Gerakan Kebudayaan tumbuh dari Rakyat secara bebas.

Gerakan itu bisa bersifat Organisasi atau usaha orang-seorang.

Untuk melancarkan kerja sama antara Organisasi-organisasi Kebudayaan dan orang-seorang, dan juga untuk memberi dorongan kepada gerakan kebudayaan umumnya, perlu diadakan suatu BADAN MUSYAWARAT KEBUDAYAAN NASIONAL.

Badan itu berbentuk Badan Hukum.

Pengurus Badan itu dibentuk menurut prosedur pemilihan yang telah disahkan oleh Kongres Kebudayaan.

Tugas dan kewajiban Badan itu ialah:

- *Merapatkan perhubungan dan mengadakan koordinasi antara organisasi-organisasi dan orang-seorang dalam kalangan kebudayaan untuk pembangunan dan perkembangan Kebudayaan Nasional.*
- *Menyelenggarakan putusan-putusan Kongres.*
- *Untuk pekerjaan sehari-hari Badan itu membentuk BADAN PEKERJA. Badan Pekerja itu mempunyai Sekretariat.*

BAB II: LAPANGAN GERAKAN KEBUDAYAAN

Gerakan Kebudayaan meliputi usaha-usaha di lapangan:

1. *Kesenian.*
2. *Ilmu Pengetahuan.*
3. *Filsafat.*

BAB III: USAHA KEBUDAYAAN DAN PEMERINTAH

1. *Pemerintah mengadakan kesempatan sebaik-baiknya untuk perkembangan kebudayaan rakyat.*

2. Pemerintah menjaga terjaminnya kebebasan dan kedemo-krasian perkembangan usaha-usaha kebudayaan.

BAB IV HAL KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL

Pada tiap-tiap waktu yang tertentu diadakan KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL.

Putusan-putusan KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL yang mengikat hanya diambil dengan suara bulat.

KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL bersifat pengenalan, perbandingan dan pertukaran bentuk-bentuk kebudayaan di Indonesia. (Warta Kebudayaan/BMKN, 1954).

B. Konferensi Nasional Kebudayaan Rakyat

Selain menyelenggarakan kongres, Lekra juga menyelenggarakan konferensi nasional. Kongres Lekra hanya berlangsung 1 kali, yaitu tahun 1959, sementara konferensi berlangsung sebanyak 2 kali.

B.1 Konferensi Nasional Kebudayaan Rakyat I 1962

Konferensi ini diselenggarakan diselenggarakan di Bali tanggal **25 - 27 Februari 1962**. Pada saat konferensi ini berlangsung, situasi dunia sedang memanas karena sedang terjadi perang dingin antara ideologi Komunis (Rusia dkk) dengan ideologi Kapitalis (Amerika dkk). Di lingkungan organisasi kebudayaan di Indonesia muncul pula dua kubu yang saling berseteru, yakni antara kelompok kiri (Lekra dkk) dan kelompok kanan yang dalam hal ini para budayawan, seniman yang bernaung dalam organisasi BMKN yang didukung beberapa organisasi kebudayaan lainnya ditambah satu kelompok yang menyebut diri sebagai kelompok netral. Dari konferensi ini dihasilkan rekomendasi untuk melakukan pemboikotan terhadap masuknya pengaruh kebudayaan Amerika, terutama melalui film, musik dll.

B.2 Konferensi Nasional Kebudayaan Rakyat II, 1964

Konferensi Nasional Kebudayaan Rakyat II, diselenggarakan tanggal **24 - 25 Agustus 1964**, salah satu rekomendasinya berupa dukungan pada gerakan politik yang berlawanan dan menyepak imperialisme, baik AS, Inggris maupun India di kawasan Asia. Langkah kongrit dari rekomendasi itu adalah dibentuknya Panitia Aksi Pemboikotan Film-film Amerika Serikat yang disingkat PABFIAS. (<http://media.kompasiana.com>)

C. Konferensi Internasional Budaya Daerah (KIBD)

Sejumlah dosen bahasa, sastra, dan budaya daerah seluruh Indonesia membuat kesepakatan untuk menyelenggarakan konferensi berskala nasional untuk membahas masalah kebudayaan daerah. Hasil kepepatakan itu membuahakan 2 kali konferensi dan sejumlah keputusan dan rekomendasi.

C.1 Konferensi Internasional Budaya Daerah (KIBD) 2009

Konferensi Nasional Dosen Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah se-Indonesia pertama diselenggarakan pada tanggal **8 – 9 Agustus 2009** di Kaliurang Yogyakarta. Dalam konferensi pertama itu, selain diperbincangkan tentang hasil penelitian bidang bahasa, sastra, dan budaya daerah, juga disepakati untuk mendirikan organisasi profesi dengan nama **Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia** disingkat **IKADBUDI**.

C.2 Konferensi Internasional Budaya Daerah (KIBD) 2012

Organisasi itu selanjutnya mengadakan kerjasama dengan IKIP PGRI Bali untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional Budaya Daerah kedua (KIBD-II). Tujuan konferensi ini adalah: (1) mempertemukan para pemerhati bahasa, sastra, seni, dan budaya daerah seluruh dunia agar ada komunikasi hasil-hasil pengkajian *local wisdom* dan *character education* sehingga terjadi sentuhan akademik; (2) memberi ruang-ruang baru bagi pembentukan wadah penggalan nilai-nilai *local wisdom* dan *character education* dalam karya bahasa, sastra, seni, dan budaya adiluhung; (3) menyebarkan hasil-hasil kajian bahasa, sastra, seni, dan budaya sehingga tidak ditemukan duplikasi-duplikasi kajian *local wisdom* dan *character education*, melainkan justru ke arah pengembangan. Tema Konferensi adalah *“Membaca kembali, menafsirkan, dan mengkreasikan makna dan pemanfaatan local wisdom dalam budaya daerah untuk membangun peradaban character education”*. Konferensi diselenggarakan di Denpasar, **22 - 23 Februari 2012**, dihadiri peserta dari dalam dan luar negeri.

Rumusan hasil konferensi KIBD II

Mengacu pada isi masing-masing makalah serta hasil diskusi yang berkembang selama persidangan baik dalam sidang pleno maupun sidang komisi yang dirangkum oleh para pemandu (moderator) dan juga dengan memperhatikan materi sambutan Gubernur Bali pada saat membuka Konferensi maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan seperti berikut.

3.1 Umum

- a. Budaya daerah (bahasa, aksara, dan sastra tradisional) sebagai warisan leluhur nenek moyang masing-masing suku di Indonesia yang merupakan kebanggaan bagi daerah-daerah se-Nusantara penting untuk dipelihara oleh suku daerah bersangkutan dan dijamin kelangsungannya oleh negara.
- b. Dalam penjaminan itu, penting dibuatkan legalitas berupa Perda (dalam skala lokal) selain telah dimuat dalam UUD 1945 sebagai penguat jati diri bangsa
- c. Penguatan jati diri bangsa yang bermuara pada karakter bangsa disarikan dari kearifan lokal untuk mengisi struktur kurikulum Nasional dari mulai TK sampai Perguruan Tinggi.

3.2 Khusus

3.2.1 Bidang Pendidikan

- a. Pendidikan di Indonesia harus dibangun secara holistik, mulai dari perangkat keras sampai perangkat lunak
- b. Dalam menjalankan roda pendidikan secara holistik itu hendaknya peran bahasa daerah sebagai pencatat nilai-nilai daerah yang adiluhung itu dijamin kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan sari pati karakter kelokalan di Indonesia.
- c. Nilai-nilai kelokalan yang berlaku secara universal agar dirumuskan secara bersama-sama antar daerah oleh Tim yang dibentuk oleh Ikadbudi yang diprakarsai oleh Dinas atau Instansi yang terkait.
- d. Strategi pembelajaran di Indonesia demi terwujudnya sikap mental anak didik yang memiliki karakter se-Nusantara penting dirumuskan dengan membentuk tim khusus yang dianggotai oleh Ikadbudi.
- e. Materi ajar yang termuat dalam Muatan Lokal (Mulok) hendaknya dipadukan antara nilai-nilai yang sama antar daerah di Indonesia sehingga anak didik paham akan kesamaan daerah di Indonesia sehingga menumbuhkan sikap berbangsa yang solid antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia.
- f. Nilai-nilai kelokalan dimaksud dapat disarikan dari teks lisan seperti folklor, tradisi lisan dan dari teks tulis seperti *guguritan*, *macapat*, atau *geguritan*.

3.2.2 Bidang Bahasa

- a. Bahasa daerah perlu diajarkan dalam pendidikan formal sejak pendidikan dasar sampai pendidikan menengah (umum/ keju-ruan)
- b. Jumlah jam pelajaran bahasa daerah sekolah perlu ditambah
- c. Berbagai bentuk kesenian daerah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar perlu digali dan diterjemahkan ke dalam bahasa Nasional agar dapat dikenal oleh publik yang lebih luas.

3.2.3 Bidang Sastra

- a. Nilai-nilai khas kelokalan di Indonesia secara tersirat maupun tersurat banyak termuat di dalam karya sastra.
- b. Nilai-nilai dimaksud juga penting untuk dirumuskan di masing-masing daerah untuk selanjutnya dihimpun oleh satu Tim dari Ikadbudi.
- c. Dalam pembelajaran di sekolah-sekolah, kesamaan nilai-nilai se-Nusantara itu agar diajarkan sesuai jenjang pendidikan.

3.2.4 Bidang Budaya

- a. Budaya lokal di Indonesia diberikan hak tumbuh dan dipelihara oleh negara dengan memberikan 'energi' yang cukup untuk melestarikannya.
- b. Nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia memiliki kesamaan dengan nilai-nilai lain di asia, seperti Korea misalnya. Nilai-nilai ini penting untuk diajarkan di sekolah-

- sekolah untuk memahami budaya orang lain di asia bahkan di dunia.
- c. Tradisi setempat penting untuk dipelihara untuk menjaga kelangsungan peradaban daerah demi keragaman budaya di Indonesia.

4. Rekomendasi

Konferensi Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia II (KIBD II) merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

4.1 Organisasi

1. Pendaftaran sebagai peserta Ikadbudi dilaksanakan secara on line, dan untuk sementara waktu, anggota dibebaskan dari iuran.
2. Berita dan Informasi pengurus telah dimasukkan dalam web Ikadbudi.
3. Bahan konferensi 22-23 Februari 2012 ini akan diseleksi dan dimuat dalam jurnal Ikadbudi volume 2.
4. Bagi anggota yang telah mendaftar sebagai anggota via web, lupa *password* dimohon menginformasikan ke Bapak Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. (08156805293)
5. Konferensi Internasional Budaya Daerah dilaksanakan per tahun, setiap pertengahan tahun.
6. Konferensi Internasional Budaya Daerah III akan dilaksanakan di Universitas Veteran Sukoharjo (Jawa Tengah) sekitar bulan Oktober 2013.

4.2 Persidangan

1. Perlu meredefinisikan kembali tentang hakikat suatu pelajaran muatan lokal di seluruh wilayah Indonesia
2. Mata pelajaran bahasa daerah harus menjadi mata pelajaran wajib di seluruh Indonesia pada tiap jenjang pendidikan untuk mematangkan karakter bangsa.
3. Pemerintah pusat sampai tingkat daerah harus memfasilitasi pengembangan mitra (LPTKI, Guru, sarana) yang mendukung terwujudnya pendidikan berkarakter.
4. Perlu dilakukan penelitian nilai-nilai budaya lokal yang dapat dijadikan sumber-sumber pendidikan berkarakter Nusantara.
5. Perlu mengembangkan dan menyusun model-model pembelajaran pada setiap bidang studi yang bersumber pada kearifan budaya lokal.

Denpasar, 23 Februari 2012

Tim Perumus: (1) Dr. I Wayan Suardiana M.Hum; (2) Drs. Nyoman Astawan, M.Hum; (3) Dr. Suwardi Endraswara M.Hum.

D. Konferensi Internasional Renaissance Budaya Nusantara 2010

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan

Universitas Sebelas Maret. Konferensi Inter-nasional Renaissance Budaya Nusantara I diselenggarakan tanggal 9 - 10 Juni 2010 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Tujuannya adalah menggali kebudayaan dan pelestariannya sebagai-mana diatur dalam Undang Undang no. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Konferensi ini menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri seperti; Supriyanto (Perpustakaan Nasional RI), Abdul Rachman Abudul Aziz (Universitas Utara Malaysia), Pudensia (Universitas Indonesia), Nindya Nugraha (Perpustakaan Nasional RI), Mohd. Fo'ad Sakdan (Brunei), Bani Sudardi (Universitas Sebelas Maret), Oesman Arif (Universitas Sebelas Maret) dan Iheanacho George Chidiebere (Mahasiswa Universitas Sebelas Maret).

Hasil konferensi

Hasil dari konferensi ini dituangkan dalam bentuk deklarasi, yang berisi 6 butir pernyataan.

Deklarasi Konferensi Renaissance Budaya Nusantara I

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya RENAISSANCE BUDAYA NUSANTARA I (RBN I) yang mengambil tema "Menggali dan mencari nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya Nusantara untuk pembangunan jati diri bangsa" telah selesai dilaksanakan dengan baik. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. RBN I dilaksanakan di kampus UNS pada tanggal 8-10 Juni 2010.

Serangkaian acara RENAISSANCE BUDAYA NUSANTARA I diselenggarakan sebagai wahana menangkan gagasan, pemikiran, dan menumbuhkan semangat gerakan renaissance serta revitalisasi nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya Nusantara sebagai upaya resitensi terhadap budaya global. Disadari benar pada zaman sekarang ini bangsa kita telah dilanda arus deras globalisasi dengan derajat kecepatan perubahan sosial yang tinggi akibat kemajuan teknologi media komunikasi dan kapitalisme industri, amatlah relevan kita sebagai bangsa melakukan refleksi budaya, menggali nilai-nilai luhur kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai basis ketahanan terhadap budaya global.

Menyadari akan hal itu, maka pelacakan akar-akar nilai budaya luhur Nusantara perlu dan mendesak untuk dilakukan, sejalan dengan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia di daerah-daerah yang sumbangannya sangat diperlukan untuk memperkaya dan mewarnai jati diri Kebudayaan Nasional. Dalam rangka penggalan sumber daya kultural tersebut di atas, Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Daerah memiliki rekaman data tulis yang amat berlimpah. Data yang berlimpah itu tidak ada artinya tanpa adanya upaya dari para budayawan, kaum intelektual, dan para pustakawan serta para sarjana untuk melakukan pengkajian. Sesungguhnya para budayawan dan akademisi merupakan agen perubahan yang senantiasa mengobarkan semangat gerakan budaya renaissance yang berbasis kearifan budaya lokal Nusantara.

Dengan mengingat dan mempertimbangkan pemikiran dan pendapat para peserta selama berlangsungnya Renaissance Budaya Nusantara I, dengan ini kami mendeklarasikan

pentingnya:

1. Meningkatkan kajian terhadap hasil karya cipta budaya intelektual Nusantara yang berbhinneka dan memperluas penyebarluasan informasi hasil-hasil kajian budaya kepada masyarakat.
2. Mengadakan pertemuan budaya Nusantara secara berkala yang mencakup wilayah NKRI untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa di bawah naungan NKRI.
3. Mewujudkan suatu wadah pemikiran budaya Nusantara dengan pendukung utama perguruan tinggi negeri dan swasta dengan fokus utama studi budaya lokal.
4. Merevitalisasi semangat gotong-royong sebagai etos sosial masyarakat Indonesia yang berbasis ideologi Pancasila.
5. Meningkatkan pengelolaan tradisi budaya yang mencakup tindakan perlindungan, pemeliharaan, penelitian, pengembangan, pendayagunaan, dan revitalisasi nilai-nilai luhur kearifan lokal Budaya Nusantara.
6. Pemanfaatkan perpustakaan nasional maupun daerah sebagai sumber referensi dalam menggali khasanah budaya Nusantara.

Surakarta, 10 Juni 2010

E. Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS)

Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) pertama digagas dan diselenggarakan oleh Yayasan Kebudayaan Rancage yang didirikan oleh Ajip Rosidi. KIBS dimaksudkan untuk membuka peluang bagi terbukanya interaksi antara para praktisi, birokrat, pemuda, guru, pemerhati budaya Sunda, maupun para pemuka masyarakat Sunda untuk berbagi dan bertukar pikiran dan pengalaman dengan para pakar dari dalam dan luar negeri yang mempelajari dan meneliti berbagai aspek budaya Sunda.

Sampai saat ini telah dilaksanakan 2 kali konferensi dan gambaran sekilas hasil yang dicapai adalah sebagai berikut.

E.1 Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) I 2001

Konferensi ini bertujuan untuk membuka diskusi dan interaksi antara pakar-pakar, praktisi, pembuat keputusan, pendidik dan semua pihak yang terkait dengan kebudayaan Sunda, memaparkan inovasi, temuan riset, teori-teori baru maupun tantangan dalam kebudayaan Sunda, turut berkontribusi dan berpartisipasi bagi pewarisan, pelestarian, dan pengembangan budaya Sunda. Tema konferensi adalah: "Pewarisan Budaya Sunda di Tengah Arus Globalisasi".

Peserta konferensi datang dari berbagai kalangan masyarakat: para seniman, pakar, guru, pemuda, birokrat, ulama dan mereka yang menaruh perhatian serta minat dalam budaya Sunda. Para pemakalah berasal dari dalam dan luar negeri akan membahas beragam bidang dan keahlian, para praktisi dan pakar pun akan mendapat kesempatan yang sama untuk berbagi pengalaman dan pandangannya.

Hasil Konferensi
Rumusan Konferensi Internasional Budaya Sunda I
(Gedung Merdeka, Bandung 22-25 Agustus 2001)

Konferensi Internasional Budaya Sunda I yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebudayaan Rancagé dan mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Jawa Barat, Toyota Foundation, dan pihak-pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga dan perusahaan, diikuti oleh 634 peserta. Setelah mendengar 7 pen-ceramah dan 68 pemakalah serta pendapat-pendapat yang dilontarkan para peserta dalam sidang-sidang paripurna dan paralel mengenai aspek dan masalah kebudayaan Sunda yang tercakup dalam 6 (enam) bidang kajian, menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, konferensi Internasional Budaya Sunda I telah memperoleh perhatian yang sangat besar dari berbagai pihak. Jumlah peserta yang mengikuti konferensi jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, bahkan masih banyak peserta yang mendaftar setelah konferensi dibuka.

Kedua, dari ceramah-ceramah dan makalah-makalah yang dibahas, didiskusikan, dan dibicarakan dalam sidang-sidang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kesimpulan umum

Sistem Pendidikan Nasional mewarisi Sistem pendidikan yang berlaku pada zaman kolonial. Oleh karena itu, perlu ada perombakan total sistem pendidikan Nasional ke depan harus diorientasikan kepada pembentukan watak anak yang mandiri dan kreatif serta dapat menjadi lembaga pewarisan kebudayaan.

II. Kesimpulan Tiap-tiap Bidang

A. Bidang Sastra dan Bahasa

Meskipun sastra dan bahasa Sunda masih hidup dan dipergunakan oleh masyarakat, namun intensitas dan minat masyarakat terhadapnya cenderung mengecil. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan psikologis sedangkan dan merasa enggan menggunakan bahasa Sunda, sedangkan kesempatan untuk membaca karya sastra Sunda terhalang karena jumlah perpustakaan sedikit sekali.

Pengajaran bahasa Sunda di sekolah kurang efektif karena kurikulum cenderung menitik beratkan pada teori dan bukan pada kemahiran menggunakan bahasa. Guru bahasa Sunda masih sangat kurang, naik kualitas maupun kuantitasnya serta komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pengajaran bahasa Sunda belum optimal. Adanya kenyataan bahwa minat baca masyarakat Sunda tergolong rendah.

B. Bidang Sejarah, Arkeologi dan Filologi

Pemeliharaan dan perlindungan terhadap benda budaya masih rawan, sehingga tidak sedikit peninggalan budaya Sunda yang rusak dan sudah hilang. Dalam pada itu, banyak masyarakat yang belum memperoleh informasi ihwal hasil-hasil penelitian dan kajian tentang kekayaan budaya tersebut.

Penelitian dan penulisan sejarah Sunda masih sangat kurang. Banyak naskah Sunda baik yang tersimpan di dalam negeri maupun di luar negeri belum terungkap isinya karena kurangnya tenaga dan dana.

C. Bidang Agama, Kepercayaan dan Pandangan Hidup

Khasanah konsep dan pengalaman, keagamaan komunitas Sunda masa lalu berdimensi cukup majemuk dan kaya akan nuansa-nuansa esoteris dan eksoterisnya. Hal demikian terjadi mengingat tatar Sunda merupakan tempat pertemuan agama-agama besar, khususnya Islam, di samping tatar Sunda merupakan tanah subur bagi pembentukan kreativitas dan persepsi khas keagamaan. Namun, derap pembangunan yang bertolak hanya pada pencapaian kebendaan, konsep, dan pengalaman keagamaan itu mengalami pemiskinan (*impoverishment*). Akibatnya, konsep keagamaan menjadi dangkal dan praktek keagamaan menjadi lebih vertikal, dan lemah dalam dimensi horisontal.

D. Bidang Ekonomi, Kemasyarakatan dan Politik

Sumber-sumber ekonomi komunitas Sunda semakin sempit sejalan dengan masuknya diversifikasi usaha modern yang ditopang pemodal kuat, global, dan nasional dalam bingkai kapitalisme, sehingga orang Sunda terpinggirkan. Demikian pula solidaritas dan etos kerja orang Sunda tidak berkembang kondusif akibat kondisi struktural yang timpang serta kebijakan pembangunan pemerintah setempat yang tidak konsisten. Akibat lanjutannya, akses serta partisipasi politik di Sunda pun lemah. Ini terbukti dengan representasi orang Sunda yang tidak memadai dalam parlemen baik di tingkat lokal maupun nasional.

Peserta konferensi sangat peduli terhadap makin bertambahnya jumlah masyarakat Sunda yang kekurangan dan miskin, termasuk anak-anak yang tidak bisa sekolah dan menganggap persoalan ini harus segera ditanggulangi. Sebab jika mereka dibiarkan tetap miskin akan menajdi ancaman terhadap masa depan manusia Sunda.

E. Bidang Kesenian

Eksistensi berbagai jenis kesenian Sunda mengalami kemunduran kreativitas dan apresiasi terhadapnya baik kualitas maupun kuantitas akibat gempuran kebudayaan yang lain yang didukung oleh sarana dan prasarana yang canggih serta modal yang kuat. Di samping itu, kebijakan pemerintah pun cenderung melihat kebudayaan hanya sebagai komoditas, bukan sebagai kreativitas. Arah perkembangan kesenian Sunda cenderung mengikuti arus global yang menganggap kesenian sebagai komoditi. Kurangnya pendidikan terhadap apresiasi kesenian tradisi menyebabkan kian terasingnya anak-anak dan orang Sunda dari kekayaan budaya mereka.

F. Bidang Lingkungan Hidup, Arsitektur, Makanan, dan Pakaian

Lingkungan hidup di tatar Sunda semakin rusak karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup pun makin kecil. Di samping itu, tradisi masyarakat, terutama masyarakat adat dalam memelihara lingkungan hidup tidak dilindungi oleh pemerintah. Tidak sedikit peninggalan arsitektur lama baik berupa bangunan maupun lingkungannya, termasuk makanan dan pakaian yang sudah tidak dikenal lagi oleh masyarakatnya. Padahal semuanya itu dalam masyarakat lama merupakan satu kesatuan yang harmonis dan menjaga lingkungan, budaya, dan kesehatan.

Orang Sunda ternyata mempunyai makanan tradisional yang merupakan makanan sehat dan tidak merusak alam.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, konferensi merekomendasikan sebagai berikut.

A. Bidang Sastra dan Bahasa

1. Perlu adanya perpustakaan di sekolah maupun di kota dan kabupaten, syukur kalau sampai di kecamatan dan desa-desa yang koleksinya mencakup juga buku-buku bacaan Sunda, baik asli maupun terjemahan, sehingga dengan demikian industri buku bahasa Sunda akan berkembang dengan sehat.
2. Pemerintah perlu lebih memperhatikan nasib dan status guru bahasa Sunda.
3. Perlu diupayakan adanya penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada guru bahasa Sunda yang memperlihatkan dedikasi dan pengabdian yang daria.
4. Penggunaan undak-usuk bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari perlu disederhanakan sehingga pemakain undak-usuk tidak menjadi penghamabt komunikasi. Undak-usuk bahasa Sunda dalam buku-buku pelajaran seyo-gyanya disederhanakn menjadi dua ragam, yaitu ragam hormat dan ragam loma.

B. Bidang Sejarah, Arkeologi dan Filologi

1. Perlu segera dilakukan penyelamatan dan penelitian terhadap naskah-naskah Sunda serta peninggalan-peninggalan budaya lainnya. Penggalan arkeologis harus lebih diintensifkan karena banyak peninggalan purbakala yang masih diterlantarkan.
2. Perlu segera disusun sejarah Sunda yang komprehensif.

C. Bidang Agama, kepercayaan, dan pandangan hidup

Perlu dikembangkan berbagai kajian lanjutan atas konsep dan pengalaman-pengalaman keagamaan orang Sunda masa lalu guna memelihara khasanah tradisi keagamaan klasik dan mengembangkannya sesuai dengan tantangan kehidupan global sekarang. Tuntutan yang mendesak adanya bagaimana agama mampu menjadi inspirasi dan motivasi untuk hidup merdeka dari belenggu materi, serta adaptif dan proaktif dengan kemajuan zaman. Aktualisasi keagamaan dalam kehidupan konkret bagi urang Sunda sekarang harus lebih dikedepankan, setidaknya-tidaknya sama pentingya dengan kekayaan persepsi dan sikap keagamaan yang berdimensi vertikal.

D. Bidang Ekonomi, Kemasyarakatan dan Politik

1. Perlu dikembangkan etos kerja orang Sunda yang tinggi disertai kebijakan yang tepat untuk membuka akses mereka terhadap peluang-peluang usaha agar sumber-sumber ekonomi dimiliki kembali oleh orang Sunda. Adanya kebijakan otonomi daerah (otda) merupakan momentum untuk menerjemahkan kehendak otonomi proporsional dalam kehidupan ekonomi yang berwatak lokal. Dengan demikian, akses dan antisipasi politik akan lebih terbuka bagi orang Sunda penting dipikirkan ke depan dengan memper-timbangkan bukan saja pertimbangan keturunan melainkan juga kabilitas sosialnya.
2. Untuk memelihara dan mengembangkan budaya Sunda dengan segala aspeknya, peran agen-agen sosialisasi seperti tokoh publik dan keagamaan, keluarga, sekolah, dan media massa, dan institusi-institusi informal lainnya perlu makin dioptimalkan.

Salain itu, kebijakan pemerintah daerah dan Perda yang menatur pentingnya memelihara kebudayaan daerah perlu dioperasionalkan dan ditindaklanjuti secara konsisten dan konsekuen.

3. Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan struktural dalam masyarakat Sunda. Begitu juga, orang Sunda harus menggali sumber-sumber ekonominya secara mandiri.

E. Bidang Kesenian

1. Perlu dibangun di ibukota provinsi serta ibukota Kabupaten dan Kota Gedung Kesenian yang representatif dan dikelola secara profesional untuk memperkenalkan kesenian tradisional Sunda kepada masyarakat secara umum.
2. Iklim berkesenian yang sangat perlu dikembangkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sehingga merangsang kreativitas para seniman Sunda dalam menciptakan karya-karya seni yang memperlihatkan eksistensi manusia Sunda yang mandiri.

F. Bidang Lingkungan Hidup, Arsitektur, Makanan dan Pakaian

1. Perlu dikembangkan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memuliakan khasanah arsitektur tradisional dan mengembangkannya sesuai dengan corak pembangunan kota yang khas. Makanan dan pakaian tradisi Sunda yang sudah lama tenggelam oleh bentuk-bentuk makanan dan pakaian global, perlu dihidupkan dan dikembangkan kembali.
2. Masyarakat adat yang ada di Tatar Sunda perlu dilindungi dengan perlindungan hukum yang lebih jelas berupa undang-undang tentang masyarakat adat.
3. Makanan tradisional Sunda yang ternyata sesuai dengan tuntunan hidup sehat perlu mendapat kemasan dan promosi agar menarik minat dan digemari oleh masyarakat modern.

Penutup

1. Konferensi Internasional Budaya Sunda I memandang perlu membentuk Lembaga Pusat Studi Sunda.
2. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan Konferensi internasional Budaya Sunda I akan ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Kecil guna merumuskan langkah-langkah konkret dalam usaha memelihara dan serta memasyarakatkan kebudayaan Sunda dalam segala aspeknya. Tim ini diambil dari sebagian Panitia Pengarah (OC), Panitia Pelaksaana (SC), dan sebagian peserta konferensi. Tim ini akan segera bekerja secepatnya setelah konferensi ini selesai.

Bandung, 25 Agustus 2001

Tim Perumus

E.2 Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) II 2011

Setelah KIBS I tahun 2001, sepuluh tahun kemudian disusul dengan penyelenggaraan Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) II. KIBS II diselenggarakan tahun 2011 di Bandung. Ada beberapa kajian yang akan dibahas dalam Konferensi Internasional Budaya Sunda II, yang kemudian dibagi menjadi tujuh kajian: (1) Kajian Bahasa dan Sastra; (2) Kajian Kesenian; (3) Kajian Sejarah, Filologi, dan Arkeologi; (4) Kajian Agama, Kepercayaan, dan Filsafat; (5) Kajian Pendidikan dan Kebudayaan; (6) Kajian Ekonomi, Kemasyarakatan, dan Politik; dan (7) Kajian Arsitektur dan Lingkungan Hidup. Untuk lebih lengkapnya, inilah daftar pemakalah beserta judul makalah yang akan dibahas dalam KONFERENSI INTERNASIONAL BUDAYA SUNDA II, berlangsung pada **19-22 Desember 2011**, di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan, Prof. Dr. Wiendu Nuryanti.

Hasil Konferensi Internasional Budaya Sunda II dituangkan dalam kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut.

Kesimpulan dan Rekomendasi Konferensi Internasional Budaya Sunda II di Gedung Merdeka, Bandung (22-25 Desember 2011)

Konferensi Internasional Budaya Sunda ke-2 yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebudayaan Rancage dan mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bank Jabar Banten, dan pihak-pihak lain, baik perorangan maupun lembaga dan perusahaan, diikuti oleh 311 peserta. Setelah mendengar 82 pemakalah serta pendapat yang disampaikan oleh peserta dalam sidang-sidang paripurna dan paralel mengenai berbagai aspek dan masalah kebudayaan Sunda yang tercakup dalam tujuh kelompok kajian, menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Kesimpulan Umum

Kebijakan Pendidikan Nasional selama ini tidak mencerminkan kebhinekaan Indonesia sehingga berbagai potensi lokal tidak terberdayakan untuk membangun potensi kolektif sebagai kekuatan bangsa. Sistem pendidikan yang ada harus diorientasikan untuk membangun anak bangsa yang berkarakter dengan berbasis pada kebudayaan. Secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Sunda masih rendah sehingga sulit bagi mereka untuk berperan secara optimal dalam memanfaatkan segala potensi yang ada di lingkungannya.

Kesimpulan Tiap-tiap Bidang:

A. Bidang Sastra dan Bahasa

Sastra dan bahasa Sunda masih bertahan hidup dalam masyarakat Sunda, bahkan penerbitan dalam bahasa Sunda mengalami peningkatan. Walau demikian, ini belum proporsional dibandingkan dengan jumlah penutur bahasa Sunda. Masih terdapat hambatan sosiologis dan psikologis sehingga penggunaan bahasa dan perkembangan sastra Sunda belum menggembirakan.

Pengajaran bahasa Sunda di sekolah kurang efektif karena kurikulum cenderung menitikberatkan teori dan bukan pada penggunaan bahasa dan apresiasi sastra. Guru bahasa Sunda masih sangat kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya, sementara itu komitmen Pemerintah daerah dalam mendukung pengajaran bahasa dan budaya Sunda belum optimal.

Hasil pendidikan melalui sekolah-sekolah belum optimal karena penggunaan bahasa Indonesia sejak TK, padahal mereka belum menguasai bahasa Indonesia.

B. Bidang Kesenian dan Arsitektur

Eksistensi sejumlah kesenian terancam punah, kreativitas berkesenian dan apresiasi terhadapnya mengalami kemunduran karena gempuran budaya lain yang didukung oleh sarana dan prasarana yang canggih serta modal yang kuat. Dalam bidang perfilman banyak peluang bagi para penulis Sunda untuk menekuni bidang ini, namun peluang ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

C. Bidang Sejarah, Filologi, dan Arkeologi

Pemeliharaan dan perlindungan terhadap benda budaya masih belum maksimal, sehingga tidak sedikit peninggalan budaya itu hilang sebelum terdokumentasikan dengan baik. Penelitian dan penulisan sejarah Sunda termasuk penelusuran naskah Sunda dan lambang-lambang kesundaan belum maksimal karena kekurangan dana dan SDM yang memadai.

D. Bidang Agama, Filsafat, dan Hukum

Tatar Sunda kaya dengan kahazanah pengalaman keagamaan yang beragam dan telah mewarnai kehidupan spiritual manusia Sunda. Dalam perkembangannya, karena interaksi dengan budaya global, telah terjadi penurunan intensitas dan pemiskinan kreativitas keagamaan. Akibatnya nilai-nilai keagamaan menjadi kurang inspiratif bagi para pemeluknya, seolah-olah agama hanya mengurus urusan vertikal dengan Tuhan, dan mengabaikan urusan horisontal sesama manusia.

E. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan di Jawa Barat selama belum berhasil menjadikan generasi muda Sunda terdidik dan sadar akan potensi alam serta kebudayaannya. Orientasi pendidikan intelektual dengan mengabaikan orientasi kultural telah menghasilkan birokrat-birokrat yang tuna budaya sehingga tidak mengherankan banyak kebijakan pembangunan di Jawa Barat yang tidak sejalan dengan ruh kebudayaan Jawa Barat.

F. Bidang Ekonomi dan Politik

Pembangunan ekonomi dengan orientasi pasar bebas telah meminggirkan mayoritas, khususnya para petani, orang Sunda. Nilai-nilai luhur yang diwariskan generasi terdahulu dalam membangun perekonomian, khususnya pertanian, mendapat tantangan besar dari budaya kapitalis yang bermodal besar sehingga sejumlah potensi ekonomi orang Sunda tidak dapat berkembang. Banyak orang Sunda termiskinkan, terdesak oleh para mukimin. Dalam bidang politik orang Sunda belum bisa berkompetisi secara maksimal karena secara keseluruhan tingkat pendidikan orang Sunda masih rendah,

sehingga di DPRD dan DPR mereka tidak terwakili secara memadai. Perilaku politik orang Sunda belum mencerminkan kedewasaan dalam berdemo-krasi.

G. Bidang Lingkungan Hidup dan Kemasyarakatan

Lingkungan hidup di tatar Sunda semakin rusak karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Perencanaan kota dan wilayah di Jawa Barat seringkali tidak didasarkan pada analisis yang komprehensif dan sektoral sehingga mengganggu tatanan hidup dan kemasyarakatan orang sunda. Eksistensi sejumlah masyarakat adat kini terancam punah, padahal semestinya dilindungi oleh pemerintah sebagai model pelestarian alam pada khususnya dan kearifan lokal pada umumnya. Mitos adanya nu ngageugeuh pada sebuah tempat merupakan kearifan lokal untuk menjaga lingkungan pada masa lalu dan tetap relevan untuk masa sekarang.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, Konferensi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

- **Bidang Bahasa dan Sastra**
 - o Perlu penyediaan guru-guru bahasa Sunda yang kompeten secara memadai serta meningkatkan kemampuannya secara terus menerus.
 - o Perlu pengadaan buku-buku sastra Sunda dan bacaan kanak-kanak bahasa Sunda di perpustakaan sekolah-sekolah di Jawa Barat termasuk karya terjemahan.
 - o Pemerintah perlu mendukung upaya pemasyarakatan bahasa dan sastra Sunda antara lain melalui penyediaan perpustakaan sebanyak mungkin di seluruh daerah.
 - o Perlunya dipergunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar sejak TK sampai SD.
 - o Perlu diciptakan lagu-lagu Sunda yang secara kebahasaan sederhana namun bersifat mendidik, khususnya bagi anak-anak dan remaja.
- **Bidang Kesenian dan Arsitektur**
 - o Perlu penerjemahan karya sastra dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia untuk memungkinkan difilmkan.
 - o Perlu dibuat kembali film-film yang menyajikan fakta tentang manusia Sunda yang menjadi kebanggaan orang Sunda.
 - o Perlunya dibuat film indie dalam bahasa Sunda dan dipasarkan sendiri.
 - o Perlu penelaahan yang lebih dalam terhadap musik karawitan dibandingkan dengan musik lain serta imply-kasinya bagi pendidikan karawitan bagi orang Sunda.
 - o Perlu dibuat kembali gamelan “Ki Pembayun” sebagai bagian dari pelestarian karya seni putera Sunda.
 - o Perlu diselenggarakan secara berkala gempungan budaya untuk mempertemukan para pencipta karya seni dengan konsumennya.
- **Bidang Sejarah, Filologi, dan Arkeologi**
 - o Perlunya mendorong lahirnya ahli-ahli yang menguasai huruf Sunda kuna agar dapat membaca naskah-naskah dan prasasti yang belum digarap.

- o Perlu dilestarikannya kearifan lokal yang telah dilakukan sejak masa prasejarah dalam menjaga lingkungan yang masih relevan dengan keadaan masa kini.
- o Perlu membuka akses terhadap koleksi naskah, melakukan inventarisasi dan penggarapan terhadap naskah baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
- o Perlu mempertahankan nama-nama jalan, bangunan, sungai, situs, dan sebagainya yang mencerminkan kesundaan.
- **Bidang Agama, Filsafat, dan Hukum**
 - o Perlu dilakukan kajian secara terus menerus tentang agama, filsafat, dan hukum dalam perspektif budaya Sunda.
 - o Perlu adanya kebijakan pemerintah terhadap lingkungan adat Sunda yang ada.
- **Bidang Pendidikan, Media dan Kebudayaan**
 - o Perlu disusun strategi program pendidikan karakter yang berbasis budaya Sunda.
 - o Perlu dibentuknya instansi khusus yang menangani kebudayaan.
 - o Perlu disusun buku tentang budi pekerti dan kebudayaan Sunda yang diperuntukkan bagi sekolah untuk membangun literasi kesundaan secara menyeluruh.
 - o Perlu mengintegrasikan media dengan kegiatan-kegiatan budaya secara luas.
 - o Perlu dibentuk kegiatan diskusi focus group dengan media secara berkala.
 - o Hasil pemikiran para ilmuwan tentang kebudayaan Sunda perlu dikomunikasikan kepada publik melalui media massa.
- **Bidang Ekonomi dan Politik**
 - o Meskipun di Jawa Barat kontribusi Product Domestic Regional Brutto sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan hanya 11,97%, optimalisasi sektor pertanian tetap penting, karena potensi kontribusinya terhadap pemerataan pertumbuhan.
 - o Pengembangan Jawa Barat bagian Selatan hendaknya tidak meniru pola pengembangan kawasan lain yang hanya menjadikan masyarakat setempat sebagai sumber tenaga kasar dan murah.
 - o Dengan hampir selesainya pembangunan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Jawa Barat bagian Selatan hendaknya Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Pemda Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik-malaya, Ciamis, Banjar tidak menawar-nawarkan peman-faan lahan di kawasan tersebut kepada perusahaan asing (PMA) atau perusahaan-perusahaan domestik (PMDN) yang hanya berorientasi keuntungan semata. Pemerintah-pemerintah daerah tersebut hendaknya mendorong berdi-rinya klaster-klaster agroindustri berbasis usaha kecil dan menengah.
 - o Perlu adanya pendidikan politik berbasis budaya lokal untuk membangun literasi politik khususnya di kalangan generasi muda agar mereka memiliki kesadaran politik untuk membangun Tatar Sunda.
- **Bidang Lingkungan Hidup dan Kemasyarakatan**
 - o Perlu dikembangkan kebijakan pembangunan yang berwa-wasan lingkungan dengan memuliakan khasanah arsitektur tradisional dengan coraak pembangunan yang khas.
 - o Makanan dan pakaian tradisi Sunda yang terdesak oleh bentuk makanan dan pakaian global perlu dihidupkan dan dikembangkan kembali.

- o Kampung adat perlu didukung dan dilindungi karena merupakan lembaga nonformal yang sangat kuat dalam menjaga lingkungan.

Penutup

Berbagai rekomendasi yang dihasilkan oleh KIBS ke-2 ini akan ditindaklanjuti oleh Pusat Studi Sunda dengan membentuk TimKecil guna merumuskan langkah-langkah konkret dalam usaha memelihara dan mengembangkan serta memasyarakatkan kebu-dayaan Sunda dalam segala aspeknya. Konferensi ini mencatat bahwa sejumlah rekomendasi KIBS ke-1 belum terlaksana, dan KIBS ke-2 terus mendukung rekomendasi itu. Hasil KIBS ke-1 dan KIBS ke-2 akan disosialisasikan ke berbagai pihak yang relevan dengan substansinya masing-masing.

Bandung, 22 Desember 2011

Tim Perumus

F. Konferensi Internasional Kebudayaan Jawa (KIKJ) 2008

Dengan mengambil model pertemuan ilmiah dalam bentuk konferensi internasional seperti yang dilakukan masyarakat Sunda, masyarakat Jawa juga mengadakan konferensi bertaraf interna-sional dengan nama Konferensi Internasional Kebudayaan Jawa, disingkat KIKJ. Konferensi pertama diselenggarakan tahun 2008 dengan tema “**Aktualisasi Nilai-nilai Kebudayaan Jawa untuk kemaslahatan Manusia**” atau “**Hanapakaké Mutioro Budhoyo Jowo Kanggo Memayu Hayuning Bawono**”. Hasil yang ingin dicapai dari KIKJ 2008 ini adalah: (1) Terdokumentasi, terhimpun, tersajinya nilai-nilai Budaya Jawa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) Lahirnya lembaga sebagai wahana kesatuan potensi Budaya Jawa untuk kejayaan bangsa dan negara.

Dalam konferensi ini pemakalah dan peserta adalah para sesepuh, generasi muda, pecinta Budaya Jawa, seniman, budayawan, pemerhati Budaya Jawa, dsb serta perwakilan dari pusat-pusat studi dan warga Jawa di luar negeri. KIKJ 2008 berlangsung tanggal **20 - 25 Oktober 2008** di Purwokerto-Banyumas. Dalam konferensi ini materi yang dibahas mencakup 7 bidang yaitu: (1) Bahasa; (2) Sistem Religi dan Kepercayaan; (3) Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan; (4) Sistem Pengetahuan; (5) Kesenian; (6) Sistem Mata Pencaharian; (7) Sistem Teknologi dan Peralatan.

Hasil konferensi dtuangkan ke dalam Deklarasi sebagai berikut.

DEKLARASI

KONFERENSI INTERNASIONAL KEBUDAYAAN JAWA 2008

A. Pengantar

Konferensi Internasional Kebudayaan Jawa (KIKJ) dilangsungkan di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas dari Hari Senin, 20 Oktober 2008 hingga Jumat, 25

Oktober 2008. Pembukaan yang berlangsung di Pendapa Si Panji, dibuka oleh Ir. Jero Wacik, S.E., Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Pembukaan dihadiri oleh: Dr. BR Ay. Mooryati Soedibyo, Wakil Ketua MPR-RI, Prof. Dr. S. Budi Santoso dan Prof. Dr. Ir. Radiat Gani, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, H. Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah, Ir. Mardjoko, M.M., Bupati Banyumas, Pejabat Pemerintah Daerah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, peserta dalam dan luar negeri, baik dari kalangan akademisi, pakar kebudayaan, pemerhati kebudayaan Jawa, pendidik maupun umum, pemakalah dan pemerhati kebudayaan Jawa.

Tampil sebagai pembicara kunci yaitu: H. Mardiyanto, Menteri Dalam Negeri; Dr. RAy. Mooryati Soedibyo, Wakil Ketua MPR-RI; H. Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah, yang diwakili oleh Dra. H. Rustriningsih, M.Si., Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah; Prof. Ir. S. Budi Santoso, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia; Trisna Sri Hutomo, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah; GPH Dipo Kusumo, selaku Wakil Pangageng Pamarentah Kasunanan Surakarta Hadiningrat; M.T. Arifin, tokoh masyarakat spiritual; Prof. Dr. Singgih Wibisono, tokoh budayawan. Selain keynote speaker yang berbicara di sidang-sidang pleno, para pemakalah mempresentasikan gagasannya dalam klaster-klaster yang diklasifikasikan berdasarkan bidang-bidang, yang terdiri atas: bahasa dan sastra, sistem religi dan kepercayaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sistem organisasi kepemimpinan dan kemasyarakatan dari para pemakalah. Sementara itu forum yang berbentuk bawa rasa diselenggarakan dengan para pembicara yang meliputi para budayawan, tokoh agama, dan para cendekiawan.

B. Dasar Pemikiran

1. Kebudayaan Jawa merupakan budaya yang adiluhung serta bagian integral dari kebudayaan bangsa dan negara, didukung oleh populasi yang besar.
2. Kepercayaan diri, jati diri, dan harga diri bangsa adalah pertarungan utama sebab kami sadar bahwa bangsa yang sudah kehilangan hal-hal tersebut di atas berarti kehilangan segala-galanya.
3. Oleh karena itu, KIKJ ini diselenggarakan sebagai forum curah gagasan, omong waton, bukan waton omong dengan se-santi: "Seiya sekata bergandengan tangan menggali mutiara budaya Jawa (spirit of Java) untuk kejayaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan prinsip Bhinneka Tunggal ika tan hana Dharma Mangrwa."
4. Penyelenggaraan KIKJ 2008 selain dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai dan keadaban bangsa juga dalam rangka memperingati Kebangkitan Nasional, 100 tahun Sumpah Pemuda, 63 tahun kemerdekaan RI, dan 10 tahun reformasi Indonesia. Diharapkan pada gilirannya akan menggugah dan memotivasi bangsa agar mampu membuat sejarah baru dalam menghadapi tantangan di era global.
5. Sudah saatnya di alam reformasi yang kebablasan dan carut marut ini, kebudayaan Jawa diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa kesadaran sejarah agar bangsa dan negara bangkit dan bebas dari kesengsaraan, ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakberadaban demi kejayaan bangsa dan negara.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebudayaan Jawa yang didukung populasi yang besar dan terkenal sebagai budaya yang adiluhung belum dimanfaatkan bangsa secara sadar, terencana dan terprogram.
2. Kebudayaan Jawa yang memiliki kearifan lokal, ajaran budi luhur, falsafah yang tinggi, belum secara intensif, sistematis, dinamis, dan inovatif dijadikan bahan ajar pendidikan budi pekerti bangsa.
3. Kebudayaan Jawa yang merupakan bagian integral dari kebudayaan Indonesia belum maksimal menjawab dan memberikan andil bagi perbaikan kondisi bangsa.
4. Kebudayaan Jawa yang ternyata banyak dikaji oleh bangsa asing, justru kurang dipahami generasi penerus.
5. Kebudayaan bangsa sebagai roh dan toh jalinung budaya yang bersifat universal, belum dimanfaatkan dengan optimal bagi pendidikan bangsa untuk menata masa depan.

D. Pembahasan

1. Kebudayaan yang memiliki kearifan lokal, ajaran budi pekerti, dan tata krama pergaulan yang baik perlu dijadikan wahana pembelajaran bangsa untuk menatap masa depan.
2. Kebudayaan Jawa yang lentur dan penuh toleransi merupakan modal dasar yang dapat dijadikan wahana penanaman jati diri, harga diri, dan kepercayaan diri dalam rangka menghadapi budaya global yang melanda pranata kehidupan, dengan cara memisahkan dan memilah untuk dijadikan sarana penanaman jiwa nasionalisme dan religiusitas.
3. Kebudayaan Jawa dan Nusantara pada saat ini banyak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Sebagai bangsa yang bermartabat, kita harus memiliki keteguhan dalam mempertahankan kepemilikan warisan leluhur tersebut. Untuk itu, kiranya diperlukan payung hukum yang melindungi kebudayaan bangsa ini sebagai hak cipta dan hak milik bangsa Indonesia.
4. Kebudayaan Jawa sebagai aset bangsa adalah khasanah ke-kayaan bangsa. Oleh karena itu, perlu didokumentasikan, dibina, dilestarikan, dikembangkan, dan dilindungi. Semua itu demi kejayaan budaya Jawa, yang pada gilirannya ditujukan bagi kejayaan bangsa dan negara ini.
5. Kebudayaan Jawa yang terkenal adiluhung dan didukung populasi yang besar perlu dijadikan wahana pendidikan bangsa. Oleh karena itu, orang Jawa harus triwikrama ngrungkebi budaya Jawa guna membawa perubahan demi kebangkitan dan kejayaan bangsa dan negara.

Solusi yang Diharapkan

Setelah mencermati pidato pengarahan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Gubernur Jawa Tengah, serta memperhatikan pidato para pembicara kunci, yaitu Menteri

Dalam Negeri, Wakil Ketua MPR-RI, Dewan Pertimbangan Presiden, dan masukan atau gagasan yang berkembang selama diskusi, forum KIKJ 2008 yang terhormat dan bernilai strategis ini, merekomendasikan beberapa hal sebagai sumbangsih budaya Jawa pada bangsa dan negara.

Rekomendasi tersebut dirumuskan berdasarkan klaster atau bidang:

Klaster 1: Bahasa, Sastra dan Laku Budaya

1. Adanya payung hukum yang berupa instruksi dari pemerintah pusat dan peraturan daerah dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta tentang pengajaran bahasa dan sastra Jawa di sekolah, masyarakat dan keluarga demi terciptanya kembali kecintaan bangsa pada bahasa dan sastra Jawa. Kiranya dipandang perlu memaksimalkan pelajaran Bahasa Jawa yang dirasa masih kurang.
2. Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu terbesar ke-11 di dunia perlu dilestarikan, dipelihara, dan dikembangkan dalam pranata kehidupan sehingga ke depan akan terus terpelihara tata krama, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab di kalangan generasi muda demi kejayaan bangsa dan negara.
3. Memopulerkan penggunaan bahasa dan tulisan Jawa yang sudah dikodekan UNESCO sebagai pendamping tulisan dalam huruf Latin untuk penyebutan istilah, penamaan jalan, dan fasilitas-fasilitas umum demi kelestariannya.
4. Mengajarkan secara intensif baca-tulis huruf Jawa di sekolah, masyarakat dan keluarga.
5. Memopulerkan penggunaan sesanti, sengkalan serta bentuk-bentuk idiom Jawa yang lain pada kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta, fasilitas-fasilitas umum.
6. Perlunya kembali mengajarkan budi pekerti di sekolah, masyarakat, keluarga yang aplikasinya pada jangka panjang untuk menumbuh-kembangkan kembali jiwa toleransi, jiwa kebersamaan, jiwa tata karma yang baik, jiwa suba sita, sehingga mengantar jiwa keadaban yang dapat diterima oleh bangsa dan negara.
7. Bahasa Jawa adalah salah satu wahana bahan ajar untuk mengenal sastra dan huruf Jawa. Oleh sebab itu, sastra dan tulisan Jawa perlu dibangkitkan kembali dengan cara melakukan penerbitan ulang bahan-bahan sastra lama guna mendorong generasi muda untuk menghargai dan menjaga kelestarian budaya Jawa.
8. Adat dan tradisi, upacara ritual, serta laku budaya adalah bahan ajar budi luhur yang perlu kembali ditanamkan pada generasi muda karena di dalamnya mengandung kearifan lokal yang bisa dijadikan wahana menciptakan sejarah baru di era global.
9. Bahasa sastra dan laku budaya sebenarnya benteng budaya yang mampu memantapkan bangsa untuk mengenal kembali jati diri, harga diri, dan kepercayaan diri generasi muda. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan penerbitan ulang sastra lama untuk dijadikan wahana yang memotivasi dan merevitalisasi peran bahasa, sastra, dan laku budaya.
10. Perlunya mengajarkan tembang dolanan, tembang macapat, tembang tengahan, tembang gedhe, sebagai bagian dari bahasa, sastra, dan laku budaya.
11. Menghimbau dengan sungguh-sungguh kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan teladan penggunaan bahasa Jawa pada hari-hari tertentu.

Klaster 2: Sistem Religi dan Kepercayaan

1. Sistem religi dan kepercayaan di dalamnya mengandung ajaran laku budaya. Oleh sebab itu sistem religi dan kepercayaan bukan ajaran mistik atau takhayul, melainkan merupakan wujud keyakinan Jawa yang menganggap Tuhan adalah Sang Maha Tunggal.
2. Sudah sejak zaman kuna (Abad ke-4 dan ke-8), orang Jawa telah membuktikan sikap toleransi yang tinggi. Hal ini tercermin pada tata letak tempat peribadatan, seperti Candi Pawon sebagai representasi agama Buddha di antara candi perwaranya (candi kecil di sekitarnya) sebagai representasi agama Hindu. Keadaan seperti ini menunjukkan tetunggalan yang saling menghargai dan menghormati. Oleh sebab itu, jiwa toleransi dan jiwa kemajemukan perlu terus dipupuk. Tugas pemerintah adalah menghargai asas tetunggalan seperti tergambar pada Pancasila, yaitu ke-Tuhanan yang Maha Esa.
3. Sistem religi dan kepercayaan Jawa, ternyata penuh ajaran budi luhur dengan asas ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah sesuai dengan ajaran Pancasila. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah menjadikan sistem religi dan kepercayaan budaya Jawa sebagai salah satu bahan ajar untuk menanamkan kembali jati diri bangsa dalam menciptakan sejarah baru.
4. Secara faktual sistem religi dan kepercayaan Jawa banyak dianut dan diyakini oleh sebagian besar orang Jawa. Oleh sebab itu, kewajiban pemerintah untuk melindungi, mem-bina, dan mengembangkan sebagai aset kekayaan budaya spiritual Jawa.

Klaster 3: Kesenian

1. Kesenian Jawa yang beraneka ragam dan beraneka tingkat, ternyata banyak yang terdesak oleh kesenian asing. Bukan itu saja, bahkan sudah ada yang punah akibat desakan budaya yang dianggap modern. Atas dasar kenyataan ini, forum KIKJ memohon kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pelestarian secara fundamental.
2. Banyak kesenian atau budaya bangsa yang bangsa asing. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah membentuk lembaga yang bertugas menjaga dan menyelamatkan budaya bangsa guna mengupayakan hak paten, atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai upaya pelestarian, pendokumentasian, serta pewarisan untuk masa depan generasi muda.
3. Kita tahu, bahwa akar kemiskinan yang ada selama ini, bukan saja disebabkan oleh pejabat yang kurang amanah dan kurang baiknya tata pengelolaan ekonomi saja, akan tetapi hal itu terjadi karena paradigma pemberdayaan sendiri. Selama ini yang diletakkan dalam paradigma pembangunan adalah pertumbuhan, bukan keadilan sebagai jiwa paradigma. Sudah saatnya pembangunan nasional mengubah paradigma per-tumbuhan ke paradigma keadilan, yang ternyata bersumber dari ajaran budi luhur yang ada pada budaya Jawa (budaya bangsa). Oleh sebab itu, pembangunan nasional harus bersumber pada wawasan budaya.
4. Paradigma kepemimpinan yang berwawasan budaya harus berani memperhatikan prinsip:

- a. Kehilangan harta berarti tak kehilangan apapun.
- b. Kehilangan nyawa berarti kehilangan sebagian.
- c. Kehilangan kepercayaan berarti kehilangan segalanya.

Kekurangperhatian pada kesenian Jawa adalah wujud ketidakpedulian kita kepada kesenian bangsa. Hal itu berarti kita kehilangan kepercayaan akan keindahan dan keluhuran bangsa. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah memperhatikan kesenian Jawa (Indonesia) sebagai wahana mena-namkan dan menumbuhkan rasa percaya diri bangsa sehingga tidak kehilangan jati dirinya.

5. Kesenian tradisional seperti ketoprak, wayang orang, kara-witan, serta kesenian rakyat lainnya sudah tidak digandrungi oleh generasi muda. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus bertindak bijak agar generasi muda kembali mencintai kesenian tradisional sebagai bagian dari budaya bangsanya sendiri.
6. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia tidak menghalangi keinginan bangsa lain untuk mempelajari kesenian atau budaya bangsa, tetapi tentunya kita tidak akan merelakan apabila bangsa asing kemudian mengaku kesenian atau budaya kita sebagai milik mereka, sebagaimana bangsa kita tidak menolak masuknya pengaruh kesenian dan budaya asing.

Klaster 4: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Orang Jawa terkenal memiliki pengetahuan dan teknologi yang relatif sudah canggih menurut zamannya. Sebagai contoh keberadaan candi, arsitektur rumah (ilmu kala), ilmu perbintangan, pranata mangsa, katuranggan, penanggalan, dan sebagainya. Ilmu dan teknologi tersebut banyak ditulis dalam bahasa dan huruf Jawa, sehingga tidak dapat dipelajari generasi muda yang sudah tidak memahami tulisan dan bahasa Jawa dengan baik. Sudah saatnya pemerintah melakukan upaya dengan mendorong dan memberikan stimulasi demi terwujudnya transkripsi dan transliterasi lptek Jawa ke dalam huruf Latin dan bahasa yang mudah dipahami oleh generasi muda. Upaya ini perlu dilakukan untuk mendorong generasi muda kembali mempelajari karya-karya bangsanya.
2. Banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang didesain dalam bentuk simbol, sanepa, bebasan, dan sebagainya. Tidak sembarang orang mampu menangkap maknanya. Sudah saatnya pemerintah melakukan upaya penerjemahan agar bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran generasi muda.
3. Banyak karya arsitektur yang dibeli dan diangkut ke mancanegara secara tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita kurang melindungi karyakarya nenek moyangnya. Sebagai langkah antisipasi forum KIKJ mengu-sulkan kepada pemerintah agar UU No. 592 disempurnakan.
4. Sampai sekarang banyak karya bangsa, baik fisik maupun non fisik yang hilang, dihilangkan, dirusak, dijual. Sudah saatnya pemerintah menugasi aparat yang ada untuk proaktif melindungi, memelihara, dan melestarikan peninggalan budaya bangsa.

Klaster 5: Sistem Sosial, Pemerintahan dan Kemasyarakatan

1. Selama ini, pranata sosial banyak dipengaruhi oleh budaya asing (sebagai akibat penjajahan) padahal kita telah memiliki sistem sosial yang baik yang dijiwai nilai-nilai gotong royong, tenggang rasa, tepa selira, dan hierarkhis. Sudah saatnya, pemerintah berani menolak atau melakukan adaptasi terhadap budaya asing, seperti ajaran Ki Hajar Dewantara agar kita mengambil budaya asing yang baik untuk kesempurnaan budaya bangsa. Pemerintah terutama pemerintah dalam negeri untuk kembali mengacu pokok-pokok pikiran Jawa yang bersifat hierarkhis. Oleh karena itu perlu dipikirkan kembali model pemilihan lurah, bupati, walikota, gubernur yang sesuai dengan tahapan yang hirarkhis.
2. Sudah saatnya pemerintah dengan berani melakukan penataan terhadap sistem kepemimpinan yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa, dan tidak menutup kemungkinan melakukan adaptasi terhadap unsur-unsur asing yang dinilai baik untuk dijadikan rujukan dalam rangka menata sistem pemerintahan.
3. Pemimpin kita banyak yang tidak memahami hakikat kepemimpinan. Untuk menata pemerintahan yang baik diperlukan kepemimpinan yang baik sehingga kepercayaan rakyat pulih kembali. Karena itu, pemerintah harus berani mengambil paradigma kepemimpinan yang mengacu pada *hastha brata* dan *panca pratama* demi kemajuan bangsa dan negara.

Purwokerto, 25 Oktober 2008

Panitia Pengarah KIKJ 2008

Ketua

ttd

Prof. Dr. Soetarno, DEA.

G. Konferensi Internasional Budaya Sunda Kuna 2010

Selain KIBS, masyarakat Sunda juga menyelenggarakan Konferensi Internasional Kebudayaan Sunda kuna, dilaksanakan di Hotel Salak Bogor, tanggal **25 - 27 Oktober 2010**. Konferensi internasional bertema "*Nyukcruk Galur Kasundaan*" ini membahas peradaban Sunda dan kaitannya dengan kebudayaan internasional lain di dunia. Konferensi ini dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai kalangan, di antaranya anggota DPR-RI dan DPRD Kota Bogor, instansi pemerintah, akademisi, budayawan, LSM, generasi muda, perwakilan siswa seluruh Indonesia dan media massa.

Konferensi ini menghadirkan pembicara dalam dan luar negeri. Seorang penulis buku fenomenal berjudul *Eden in the East* (Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara), doktor dari Oxford University bernama Stephen Oppenheimer hadir dalam konferensi ini. Pembicara lainnya adalah **Director of Atlantis Publication** Frank Joseph Hoff, yang menerbitkan buku berjudul *Atlantis, The Lost Contiennt Finally Found*, karya Prof Arysio Santos. Keduanya diundang karena Oppenheimer dalam buku menyatakan bahwa bersumber dari pernyataan filsuf Plato ribuan tahun yang lalu dan berdasarkan bukti-

bukti yang dikumpulkan disimpulkan bahwa nenek moyang dari induk peradaban manusia modern (Mesir, Mediterania dan Mesopotamia) berasal dari tanah Melayu yang sering disebut dengan Sunda Land. Sementara Prof. Santos yang lebih dari 15 tahun terakhir menyusuri Semenanjung Melayu (Indonesia, Malaysia dan Singapura), menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pusat peradaban dunia terkubur di bawah puluhan meter permukaan tanah Semenanjung Melayu.

Adapun pembicara dari dalam negeri antara lain adalah Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia Prof Edi Sedyawati, Ketua Komisi Nasional untuk UNESCO (KNIU) Prof Dr. Arief Rachman, Direktur Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. Junus Satrio Atmodjo, M.Hum, Radar Panca Dahana (budayawan).

Menanggapi pendapat itu Prof. Edi menyatakan bahwa kondisi kebudayaan Indonesia menunjukkan di satu sisi ada budaya nasional yang menjadi milik bersama, dan di sisi lain ada budaya daerah yang menjadi unsur utama keberadaan kebudayaan nasional. Keberadaan keduanya tentu bukan dimaksudkan untuk unggul-mengguli dan saling merendahkan. Pemikiran bahwa wilayah Indonesia adalah Sunda, bahkan seluruh dunia pun Sunda, Edi Sedyawati tak sependapat.

Dari paparan mengenai penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Daerah dan lain-lainnya, dalam hal kongres berbagai unsur kebudayaan dapat dicatat hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Kebudayaan suku bangsa atau kebudayaan daerah sangat diperlukan dalam pembentukan kebudayaan nasional sebagai penanda identitas nasional. Kebudayaan dan bahasa daerah harus mampu berjalan seiring dengan perkembangan budaya dan bahasa Indonesia serta harus mampu menampilkan sosok dirinya sebagai budaya yang tidak ketinggalan perkembangan zaman. Oleh karena itu kebudayaan daerah harus berani melakukan upaya revitalisasi, reposisi dan reaktualisasi potensi yang dimilikinya.

Kedua, dialog atau interaksi budaya antarsuku bangsa dan dengan bangsa lain semakin meningkat. Diharapkan hal ini tidak akan membuat larutnya budaya dan bahasa daerah oleh pengaruh budaya lain. Bahkan sebaliknya, justru akan menjadi pendorong untuk menumbuhkan kesadaran tentang betapa pentingnya mempertahankan identitas itu. Dengan terjadinya pertemuan itu akan semakin berkembang dan 'maju' tanpa kehilangan identitas dirinya, sehingga budaya dan bahasa daerah dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi upaya pembentukan identitas nasional dan merekatkan hubungan antarsuku bangsa.

Ketiga, sebagai bangsa yang terdiri atas banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda, makin lama makin kita sadari betapa pentingnya menyikapi keanekaragaman budaya itu **secara benar**. **Proses peng-'indonesia'-an budaya maupun bahasa daerah tidak perlu diartikan** sebagai upaya membangun budaya yang sentralistik. Juga janganlah diartikan sebagai upaya 'peleburan' menjadi satu (*melting pot*), karena memaksa terjadinya peleburan berbagai unsur budaya daerah menjadi satuan baru, berarti telah memperkosakan hak hidup budaya daerah. Sebaliknya, dalam kaitan dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999/ UU No. 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, pengembangan budaya dan bahasa daerah tidak

perlu pula diartikan sebagai upaya membangun budaya yang lokalistik, yang dapat menggoyahkan sendi-sendi persatuan bangsa. Isi Pasal 22 huruf m yang berbunyi: "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya", harus dapat diterjemahkan secara tepat sehingga dapat memperteguh keindonesiaan budaya kita.

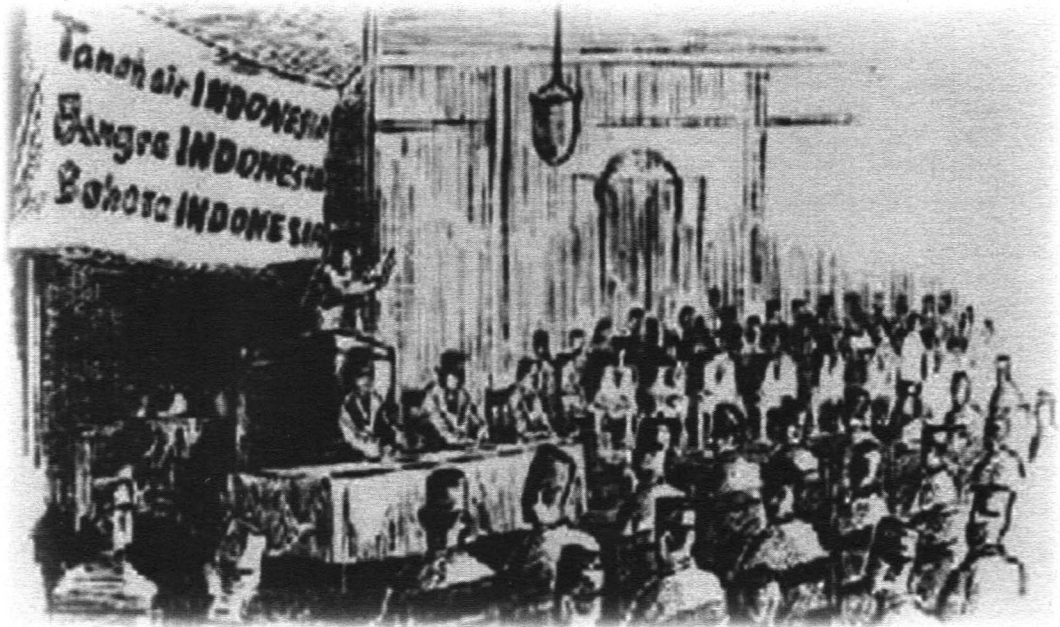
Keempat, konsep pemikiran yang telah diletakkan para pendiri bangsa sangat tepat dan bijaksana, karena 'fokusnya adalah pada pemahaman hidup bersama dalam perbedaan', baik secara individual maupun kelompok dalam masyarakat. Meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, '**Bhinneka Tunggal Ika**'. Konsep inilah yang seharusnya menjadi acuan kita sebagai bangsa, dalam bentuk multibudaya (multiculturalism), dan bukan sebaliknya dalam bentuk peleburan (*melting pot*) menjadi 'dari yang berbeda-beda disatukan'. Justru dengan banyaknya perbedaan itulah akan lahir sebuah '**mozaik**' yang indah, unik dan menarik.



Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. Dr. Edi Sedyawati (1993-1998) didampingi Direktur Kesenian, Drs. Saini KM ketika mengadakan jumpa pers sebelum Kongres Kesenian Indonesia I dilaksanakan

BAGIAN 4

**KONGRES BIDANG BAHASA
DAN SASTRA**



Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938, di Surakarta
(Sumber: <http://bali.loveindonesia.com/news/en/news/detail/217903/hari-ini-di-1938-kongres-bahasa-indonesia-pertama-di-solo>)

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam **BAGIAN IV** ini dipaparkan perjalanan berbagai kongres dan konferensi (bianglala) bidang bahasa dan sastra, Indonesia dan daerah. Bidang bahasa menjadi bahan perbincangan dalam forum kongres sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Yang diperbincangkan adalah bahasa-bahasa yang digunakan di lingkungan masing-masing suku bangsa. Tahun 1832 telah lahir *Javaansch Taal Instituut te Soerakarta* yang melakukan kajian terhadap keberadaan bahasa Jawa. Lembaga ini merupakan lembaga bahasa Jawa yang pertama didirikan di Hindia Belanda.

Selain mengumpulkan anekaragam karya sastra Jawa juga melakukan inventarisasi dan penelitian bahasa dan sastra Jawa. Nama Johan Friderich Carl (J.F.C) Gericke seorang pakar sastra dan bahasa Jawa sebagai pendiri tentu saja nama itu tidak dapat dipisahkan dari lembaga ini. Gerickelah yang menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Jawa. Ia juga seorang peneliti sastra Jawa. Demikian pula nama Wilkens dan Mounier yang banyak melakukan kajian bahasa dan sastra Jawa. (H. Kraemer, "Het Instituut voor de Javaansche Taal te Soerakarta", Djawa, Desember 1932, hal. 272)

Perbincangan itu diperluas, tidak hanya bahasa Jawa tetapi juga bahasa-bahasa daerah yang lain. Ada dua bahasa daerah yang telah memperbincang-kannya dalam forum kongres, yaitu bahasa Jawa dan Sunda. Kongres Bahasa Jawa pertama diselenggarakan pada tanggal 11 – 17 Oktober 1924 di Yogyakarta. Kongres Bahasa Jawa berikutnya (II) diselenggarakan pada tanggal 25 – 27 Maret 1927 di Yogyakarta dan ketiga di Surakarta tahun 1929. Dalam kongres itu disampaikan pemikiran tentang penyederhanaan bahasa Jawa. Sementara itu, Kongres Bahasa Sunda I diselenggarakan pada tanggal 7 – 9 Oktober 1924 di Bandung dan kedua diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 Oktober 1927 juga di Bandung.

Masih dalam masa penjajahan, tahun 1928 para pemuda pergerakan menyelenggarakan Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928. Meskipun kongres itu bukan membicarakan masalah bahasa tetapi peristiwa itu telah menjadi peristiwa sejarah yang penting sekali bagi bidang bahasa. Para peserta kongres sepakat menyatakan ikrar yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Di dalam ikrar atau sumpah itu kaum pemuda menyatakan "bertanah air satu, Indonesia", "berbangsa satu, Indonesia" juga menyatakan "menjunjung bahasa Indonesia" sebagai bahasa

persatuan Indonesia.

Ikrar atau sumpah tentang bahasa itu menjadi dasar para anggota BPUPKI ketika menyusun UUD 1945. Melalui rapat yang tidak berkepanjangan, soal bahasa disepakati tempatnya dalam pasal dan bunyi rumusannya. Soal bahasa ditempatkan di pasal 36 UUD 1945. Dalam pasal 36 dinyatakan bahwa: *“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”*. Dengan penobatan bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Negara, timbul pertanyaan mengenai posisi bahasa-bahasa daerah yang lain. Dalam Penjelasan pasal itu dinyatakan dengan jelas bahwa bahasa-bahasa itu dipelihara dan dihormati oleh Negara. Bunyi lengkap penjelasan itu adalah:

“Ayat (1) Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa daerah itu akan dihormati dan dipelihara juga Negara.” Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa: *“Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup”*.

Berdasarkan pada penjelasan pasal itu masing-masing pemilik bahasa daerah berupaya melakukan kegiatan pemeliharaan. Upaya itu antara lain dimanifestasikan dalam bentuk kongres dan konferensi, meskipun masih ada daerah yang belum melakukannya. Tidak banyak seminar, konferensi dan kongres bahasa daerah yang dilakukan meskipun kedudukannya dalam UUD 1945 sudah sangat jelas dan kuat. Dari sekitar 250 bahasa daerah, hanya beberapa bahasa daerah saja yang aktif menyelenggarakan kongres, antara lain adalah bahasa Sunda, Jawa, dan Bali.

Di samping diselenggarakan kegiatan kongres bahasa, beberapa kegiatan yang pernah diselenggarakan dalam bentuk lain adalah konferensi, diskusi dan seminar kebahasaan dan kesastraan. Pusat Bahasa telah menyelenggarakan seminar Pengembangan Sastra Daerah di Jakarta tahun 1975, seminar Bahasa Daerah tahun 1976 di Yogyakarta, dan seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra daerah di Jakarta tahun 1982. Selanjutnya pertemuan Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan 2 kali, yaitu tahun 1985 untuk wilayah Timur di Ujung Pandang (Makassar) dan tahun 1986 di wilayah Barat di Pekanbaru, Riau. Khusus untuk kegiatan kongres dan konferensi bahasa dan sastra penyajian dalam bab ini urut-urutannya adalah sebagai berikut.

1. Kongres Bahasa Indonesia (KBI)
2. Kongres Bahasa Sunda (KBS)
3. Kongres Bahasa Jawa (KBJ)
4. Kongres Bahasa Madura (KBM)
5. Kongres Bahasa Bali (KKB)
6. Kongres Bahasa Aceh (KBA)
7. Kongres Bahasa Lampung (KBL)
8. Kongres Bahasa Cirebon (KBC)
9. Kongres Bahasa Tegal (KBT)
10. Kongres Sastra Jawa (KSJ)
11. Kongres Cerpen Indonesia (KCI)
12. Kongres Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI)
13. Kongres Nasional Komunitas Sastra Indonesia (KNKSI)

14. Konfererensi Bahasa dan Sastra
15. Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK)
16. Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI)
17. Konferensi Internasional Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (KIPBIPA)
18. Konferensi Internasional Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara
19. Konferensi Internasional “Sastra Arab”
20. Konferensi Internasional Bahasa dan Sastra Austronesia
21. Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner
22. Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah
23. Konferensi Internasional Tradisi Lisan

Untuk memperkaya perbendaharaan kita tentang konsep, kebijakan dan strategi para pendahulu untuk memajukan kebudayaan bangsa yang dihimpun melalui forum kongres, dalam Bab ini dimasukkan uraian tentang penyelenggaraan Kongres Bahasa dan Persuratan yang diselenggarakan oleh negara jiran, Malaysia. Selain kongres itu dihadiri oleh wakil dari Indonesia, permasalahan kebudayaan Melayu di Malaysia pada hakikatnya juga bersentuhan dengan permasalahan kebudayaan Melayu di Indonesia. Dalam bukunya berjudul “Dari Melayu ke Indonesia”, Prof. H. Suwardi MS menguarakan panjang lebar tentang peranan kebudayaan Melayu dalam memperkukuh jati diri, membangun intergrasi bangsa dan peran dalam membangun masyarakat multikultur, kesadaran berbangsa, dll. (Suwardi MS, Prof. H. 2008: hal. xv-xviii).

Untuk lebih mendekatkan hubungan budaya kedua negara pernah dirancang untuk menyamakan ejaan bahasa yang dikenal dengan konsep Ejaan Melindo (Melayu Indonesia) pada akhir akhir tahun 1959. Tetapi karena kemudian terjadi perkembangan politik baru yang berpengaruh terhadap hubungan antara kedua negara, konsep ejaan Melindo itu urung diresmikan.

Setelah terjadi perubahan hubungan politik antara kedua negara pada tanggal 29 Desember 1972 dibentuklah wadah bersama di bidang bahasa dengan nama Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MABIM), sebuah badan kebahasaan dengan tujuan untuk merancang dan memantau perkembangan bahasa Melayu/ Indonesia. Majelis ini dibentuk berdasarkan Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mashuri SH, Menteri Pendidikan Malaysia Tun Hussein Onn, pada tanggal 23 Mei 1972. Pada saat itu Brunei Darussalam belum masuk menjadi anggota, dan baru tanggal 4 November 1985 Brunei masuk menjadi anggota. Dengan demikian singkatannya berubah menjadi MABBIM, yaitu Majelis Bahasa Brunei – Indonesia – Malaysia.

Selain di bidang bahasa, kerja sama juga terjadi bidang sastra. Wadah kerja sama itu bernama MASTERA, singkatan dari Masyarakat Sastrawan Nusantara. Wadah ini dibentuk tahun 1994 didirikan oleh Dr. Hasan Alwi (Indonesia), Tn. A.A. Aziz Derawan (Malaysia) dan Tn Haji Ali bin Haji Othman (Brunei Darussalam). Negara Singapura sebagai pemerhati. Pernah diselenggarakan Kongres Bahasa Melayu se-Dunia pada tanggal 25 Agustus 1995.

BAB II

KONGRES BAHASA INDONESIA

Dalam Pasal 36 UUD 1945 dinyatakan “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia”. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara mempunyai sejarah tersendiri. Sebagaimana diketahui setiap suku bangsa memiliki bahasa sendiri-sendiri. Penerimaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia didasarkan pada pertimbangan bahwa bahasa ini telah menjadi alat komunikasi yang mencakup wilayah pemakaian yang merata dan luas. Bahasa Melayu-Riau sejak tahun 1865 dari status sebagai ‘lingua franca’ menjadi bahasa resmi mendampingi bahasa Belanda.

Pada awal timbulnya kesadaran nasional Indonesia tahun 1908, bahasa Melayu-Riau telah menjadi bahasa pergerakan kebangsaan Indonesia. Puncak dari perasaan “satu nusa”, “satu bangsa” dan “satu bahasa” terjadi ketika putra-putri Indonesia berikrar, menyatakan “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak saat itu bahasa Indonesia telah digunakan sebagai bahasa komunikasi resmi di banyak kalangan, di berbagai kesempatan dan mulai merata ke seluruh pelosok nusantara. Pemilihan bahasa yang memiliki penutur asli jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan suku bangsa lain seperti bahasa Jawa dan Sunda, menurut hemat penulis merupakan hasil “dialog budaya” di antara suku-suku bangsa yang amat bersejarah dan monumental. Sejak saat itu bahasa nasional Indonesia secara ‘*de facto*’ telah ada, dan inilah yang sering disebut salah satu wujud kebudayaan nasional Indonesia

Bila dibandingkan pertimbangan yang digunakan oleh para pendiri bangsa ketika menetapkan adanya Pasal 32 tentang kebu-dayaan nasional dengan ketika memberikan pertimbangan dalam menetapkan “bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara”, ada perbedaan pemikiran yang cukup mendasar. Untuk “bahasa nasional” dilakukan suatu “pemilihan” dari seluruh bahasa daerah yang berkembang. Semenetera untuk penetapan “kebudayaan nasional” dilakukan dengan “pengakuan” terhadap seluruh kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional atau kebudayaan bangsa.

Setelah secara *de facto* lahir Negara-bangsa Indonesia (17 Agustus 1945), giliran selanjutnya adalah menentukan apa yang disebut “kebudayaan Indonesia”.

Para pendiri bangsa sepakat untuk menetapkan bahwa “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya”, seperti tercantum dalam kalimat pertama dari tiga kalimat Penjelasan Pasal 32 UUD 1945. Dari balik kalimat ini dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan apa yang disebut kebudayaan Indonesia tidak dilakukan pemilihan tetapi berupa “pengakuan”. Pengakuan bahwa “seluruh kebudayaan yang berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa”, seperti yang tercantum dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 32. Tidak ada dari seluruh kebudayaan daerah yang berkembang diseluruh wilayah Indonesia yang “dipilih” untuk ditetapkan sebagai kebudayaan nasional Indonesia.

Tidak demikian halnya dengan ketika para pendiri bangsa menetapkan bahasa nasional Indonesia. Penetapan dilakukan dengan cara “memilih” di antara bahasa-bahasa daerah yang ada dan akhirnya disepakati bahasa Melayu sebagai bahasa daerah yang telah mengakar di lingkungan suku bangsa sebagai bahasa Negara atau bahasa nasional, dengan nama bahasa Indonesia. Menurut catatan Badan Bahasa, jumlah bahasa daerah yang berkembang di seluruh Nusantara mencapai angka 700 bahasa daerah. Anggota BPUPKI dari masing-masing bahasa daerah tentu menginginkan bahasa daerahnya dapat dipilih menjadi bahasa persatuan. Dapat dibayangkan betapa susahnyanya untuk mendapatkan kesepakatan dalam penentuan bahasa persatuan seandainya belum diselenggarakan Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan ikrar “menjunjung bahasa perstauan, bahasa Indonesia” disusul dengan Kongres Bahasa Indonesia I, tahun 1938.

Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kali kongres Bahasa Indonesia (9 kali), kongres Bahasa Daerah, kongres Sastra Indonesia, Kongres Sastra Daerah serta konferensi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah baik skala nasional maupun internasional.

A. Kongres Bahasa Indonesia I 1938

Kongres pertama diselenggarakan di Solo, mulai tanggal 25 – 27 Juni 1938. Ini berarti 10 tahun setelah bahasa Melayu-Riau dinobatkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Kongres itu juga berarti diselenggarakan 7 tahun sebelum Indonesia memproklamasikan diri menjadi bangsa merdeka. Dengan demikian KBI tahun 1938 memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah bahasa, karena menjadi forum pertama untuk mendiskusikan konsep, strategi dan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Bahkan lebih dari itu kongres ini memiliki nilai politik karena para penggagas kongres menempatkan bahasa sebagai pemersatu berbagai suku bangsa. Dalam koran *Kebangoenan Sanusi Pane* menulis tentang hubungan antara penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia pertama dengan kebangsaan dengan mengatakan:

”Bangsa Indonesia soedah sadar akan persatoeannja, boekan sadja dalam artian politik, akan tetapi dalam artian keboedajaan jang seloeas-loeasnja”.

(Surat kabar Kebangoenan, 22/6/1938).

Di samping adanya tanggapan positif terhadap penyelenggaraan kongres itu ada pula pihak yang tidak menyambut baik kongres ini. Surat kabar Belanda misalnya, sangat skeptis tentang masa depan bahasa Indonesia. Ada pula yang menuduh bahwa kongres ini tidak ilmiah, padahal para pendukung kongres yang antara lain adalah Prof. Hoesein Djajadiningrat (Ketua Java Instituut) dan Dr. Poerbatjaraka adalah sarjana Indonesia yang keahliannya diakui di dunia internasional.

Mengenai latar belakang diselenggarakan KBI I tidak lain karena didorong oleh kenyataan bahwa setelah bahasa Melayu-Riau diikrarkan menjadi bahasa Indonesia, posisi bahasa itu menjadi semakin dominan di mata masyarakat bumiputra. Bahasa Indonesia telah berperan besar dalam mengobarkan semangat membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bahasa pergaulan semua orang berusaha untuk dapat menggunakan Bahasa Indonesia dalam segala bidang kehidupan misalnya dalam administrasi pemerintahan, pers, agama, surat menyurat, dalam pendidikan dan lain-lain. Orang dari luar kalangan suku Melayu merasa bangga dan menjadi terpelajar apabila dapat berbahasa Indonesia (Melayu).

Disatusisi peningkatan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan sangat menggembirakan. Tetapi di lain sisi pembinaan dan pengembangan bahasa masih dirasakan kurang, sehingga menimbulkan kesan umum pada waktu itu, Bahasa Indonesia tidak memiliki aturan yang baku dalam pemakaian terutama menyangkut tata bahasa, tata kalimat, tata istilah, dan tata penulisan.¹⁶ Oleh sebab itulah kemudian para ahli bahasa sepakat untuk berkumpul menyelenggarakan kongres dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan di bidang kebahasaan, terutama pada masalah pengaturan bahasa dan pemasyarakatan agar menjadi bahasa yang baku dan mudah digunakan banyak orang. Dengan cara itu Bahasa Indonesia akan dapat segera tersebar luas.

Menurut Mr. Sumanang dalam suratnya kepada Redaksi Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1933, pencetus Kongres Bahasa Indonesia ialah Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, wartawan harian Soeara Oemoem Surabaya yang pada waktu rajin sekali menciptakan istilah-istilah baru, dan sangat tidak puas dengan pemakaian bahasa dalam surat kabar Cina. Dalam suatu obrolan Soedardjo menanyakan kepada Soemanang bagaimana kalau diadakan KBI. Soedardjo sanggup menggerakkan pengusaha-pengusaha dan tokoh-tokoh di Solo, dan Soemanang kemudian menyanggupi untuk menghubungi tokoh-tokoh dan kaum terpelajar di Jakarta.

Mereka berdua berhasil meyakinkan para penulis yang tergabung dalam Pujangga Baru serta para jurnalis, guru, dan peminat yang lain. Dapat disimpulkan bahwa pemrakarsa kongres ini bukannya ahli bahasa profesional, melainkan wartawan pencinta Bahasa Indonesia. Kedua orang itu kemudian menyusun suatu 'Pengoeroes Komite' di Jakarta sebagai berikut: (1) Ketua Kehormatan: Prof. RA. Hoesein Djajadiningrat; (2) Ketua: Dr. RM. Ng. Poerbatjaraka; (3) Wakil Ketua: Mr. Amir Sjarifoeddin; (4) Sekretaris: Soemanang, Armijn Pane, Katja Soengkana; (5) Bendahari:

16 Dalam penyusunan Tata Bahasa Indonesia, Sutan Takdir Alisjahbana mempunyai jasa yang amat besar, dan untuk itu Universitas Indonesia memberikan gelar Doktor Honoris Causa.

Maria Ulfah Santosa dan Soegiarti. Armijn Pane adalah Sekretaris Panitia Kongres.

Patut dicatat bahwa prasaran dengan topik “Bahasa Indo-nesia Di Dalam Persuratkabaran” seperti yang tercantum dalam Sejarah Kongres Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Harimurti Kridalaksana disampaikan oleh H.B. Perdi. Dalam kenyataan prasaran itu disampaikan oleh seorang tokoh jurnalis Adi Negoro, mewakili H.B. Perdi. H.B. Perdi sendiri merupakan singkatan dari nama perhimpunan para jurnalis, yakni Hoofbestuur Perhimpunan Djurnalis Indonesia (*De Inheemsche Journalisten-vereeninging*)

Pada waktu kongres dibuka, hadir sekitar 500 orang, terma-suk di antaranya wakil-wakil dari Sultan Yogyakarta, Sunan Solo, Paku Alam, Mangkunegoro, Pers Indonesia maupun Tionghoa, dan wakil dari Java-Instituut. Peserta kongres kebanyakan adalah kaum terpelajar bumiputra, pengurus Java-Instituut dan peserta Kongres Kebudayaan di Bali tahun 1937. Berkenaan Kongres Bahasa Indonesia Pertama tahun 1938, Harimurti Kridalaksana menulis catatan sebagai berikut:

“Sambutan tentang kongres ini tampaknya sangat besar, bukan hanya berupa pemberitaan-pemberitaan di surat kabar, melainkan juga membanjirnya surat dan telegram dari segala penjuru tanah air. Orang-orang yang sekarang kita kenal sebagai tokoh pergerakan hadir dalam kongres ini, karena kelihatan bahwa masalah bahasa sejak awal bukan hanya dianggap dianggap sebagai masalah pengajaran bahasa di sekolah saja, melainkan juga masalah nasional. Komentar mengenai kongres ini sungguh menarik untuk dibaca. Ada yang menganggap bahwa pembahasan dalam kongres ini sangat orisinal, misalnya prasaran Takdir Alisjahbana untuk mengatur bahasa secara lebih baik dengan menyusun tata bahasa Indonesia yang baru. Uraian Muh. Yamin dan Moh. Tabrani mendapat sambutan yang hangat karena kedua orang itu sangat pandai berpidato”. (Harimurti Kridalaksana, 1988: hal. 20-21).

Salah satu hasil nyata setelah selesai kongres ini fraksi nasional dalam Volksraad yang dipimpin oleh M. Hoesni Thamrin memutuskan untuk memakai Bahasa Indonesia dalam pandangan umum dewan tersebut. Suatu sikap yang menimbulkan reaksi negatif dari pihak penjajah. Tetapi berkat keberanian M Hoesi Thamrin, bahasa Indonesia terus berkembang menjadi media pemersatu bangsa.

Putusan Kongres

Kongres menghasilkan ‘Poetoesan Konggeres Bahasa Indone-sia’ yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut.

“POETOESAN KONGGERES BAHASA INDONESIA”

1. Sesoedah mendengarkan dan memperkatakan *prae-advies* toean Mr. Amir Sjarifoedin tentang “Menjesoeaikan kata dan faham asing kedalam bahasa Indonesia”, maka Konggeres ternjata pada oemoemnja setoedjoe mengambil kata-kata asing oentoek ilmoe pengetahoean. Oentoek ilmoe pengeta-hoean jang

- sekarang, Konggres setoedjoe kalau kata-kata itoe diambil dari perbendaharaan oemoem. Pekerdjaan itoe hendaklah didjalankan dengan hati-hati, karena itoe perkara itoe patoetlah diserahkan kepada satoe badan.
- II. Sesoedah mendengarkan dan bertoekar pikiran tentang prae-advies toean St. Takdir Alisjahbana hal “Pembaharoean bahasa dan oesaha mengatoernja”, maka sependjang pendapatatan Konggres, soedah ada pembaharoean bahasa jang timboel karena ada tjara jang baroe, sebab itoe merasa perloe pembaharoean itoe.
 - III. Sesoedah mendengarkan prae-advies toean-toean St. Alisjah-bana dalil ke-4 dan Muh. Yamin, maka Konggres berpen-dapatan bahwa gramatika jang sekarang tidak memuaskan lagi dan tidak menoeroet woedjoed bahasa Indonesia, karena itoe perloe menjoesoen gramatika baroe, jang menoeroet woedjoed bahasa Indonesia.
 - IV. Orang dari berbagai-bagai golongan, dari berbagai-bagai daerah, berkong-geres di Solo pada tanggal 25-27 Juni 1938, setelah mendengarkan prae-advies toean K. St. Pamoentjak tentang “Hal edjaan bahasa Indonesia”, dan setelah bertoekar pikiran tentang hal itoe, maka jang hadir berpendapat:
 - bahwa edjaan baroe tidak perloe diadakan, sampai Konggres mengadakan sendiri,
 - bahwa edjaan jang soedah berlakoe, jaitoe edjaan van Ophuysen entoek sementara boleh diterima, tetapi kare-na mengingat kehematan dan kesederhanaan, perloe dipikirkan peroebahan seperti jang diseboetkan oleh praeadviseur, karena itoe berpengharapan:
 1. soepaja orang Indonesia selaloe memakai edjaan jang terseboet;
 2. soepaja fractie Nasional Volksraad mendesak Pemerintah oentoek memakai edjaan seperti jang dimaksoedkan oleh Konggres;
 3. soepaja perhimpunan kaoem goeroe soeka membantu poetoesan Konggres.
 - V. Sesoedah mendengar prae-advies toean Adinegoro, tentang “Bahasa Indonesia di dalam persoeratkabaran”, maka sependjang pendapatatan Konggres, soedah waktoenya kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa di dalam persoeratkabaran, karena itu itoe berharap soepaja Perdi bermoeepakat tentang hal itoe dengan angoota-anggotanja dan komisi jang akan dibentoek oleh Bestuur Konggres jang baroe bersma-sama dengan Hoofdbestuur Perdi.
 - VI. Sesoedah mendengarkan prae-advies Ki Hadjar Dewantara dalil jang ke-10 jang disokong oleh toean R.M. Ng. Dr. Poerbatjaroko, maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoeskan: bahwa Konggres berpendapatan dan mengandjoerkan, soepaja didalam pergoeroean menengah diadjarkan djoega edjaan internasional.
 - VII. Sesoedah mendengarkan prae-advies toean Soekardjo Wirjopranoto tentang “Bahasa Indonesia dalam badan perwakilan”, jang dioetjapkan dan dipertahankan oleh toean R.P. Soeroso, maka Konggres berpendapatan dan mengeloearkan pengharapan:

pertama: soepaja moelai saat ini bahasa Indonesia dipakai dalam segala badan perwakilan sebagai bahasa perantaraan (voertaal),

kedua: mengeloearkan pengharapan soepaja menoenjang oesaha oentoek mendjadikan bahasa Indonesia bahasa jang sjah dan bahasa oentoek oendang-

oendang negeri.

- VIII. Sesoedah mendengar praeadvies toean Sanoesi Pane tentang "Instituut Bahasa Indonesia" dan mendengar pendirian Komite tentang hal itoe; maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoeskan: soepaja diangkat soeatoe komisi oentoeik Instituut Bahasa Indonesia dan Konggres mengharap soepaja mengoemoemkan pendapat komisi tentang soal terseboet.
- IX. Sesoedah mendengarkan prae-advies toean-toean St. Takdir Alisjahbana, Mr. Muh. Yamin dan Sanoesi Pane, maka Konggres berpendapatan, bahwa oentoeik kemadjoean masjarakat Indonesia, penjelidikan bahasa dan kesoestas-teraan dan kemadjoean keboedajaan bangsa Indonesia, perloe didirikan Pergoeroean Tinggi Kesoestasteraan dengan selekas-lekasnya". (Harimurti Kridalaksana, 1988:hal. 22-24)

Berita tentang kongres itu antara lain dimuat dalam majalah 'DJAWA' tahun 1938 halaman 336-337, yang diterbitkan oleh Java-Instituut dengan judul "Besluiten van het eerste Congres Bahasa Indonesia." Berita tentang kongres itu antara lain dimuat dalam majalah 'DJAWA' tahun 1938 halaman 336-337, yang diterbitkan oleh Java-Instituut dengan judul "Besluiten van het eerste Congres Bahasa Indonesia".

- I. Gehoordenbesprokenhebbende het prae-advies van Mr. Amir Syarifoeidin omtrent vreemde woorden en begrippen in de bahasa Indonesia ("Menjoesoeaikan kata dan faham asing ke dalam bahasa Indonesia"), bleek het congres het in algemeen eens te zijn met het overnemen van vreemde woorden voor de wetenschap. Voor de huidige wetenschap kon het congres zich ermee vereenigen, dat die woorden aan de algemeene woordenschat worden ontleend. Die moet zeer voorzichtig gebeuren, en daarom behoort dit aan een comite toevertrouwd te worden.
- II. Gehoord en besproken hebbende het prae-advies van den heer St. Takdir Alisjahbana omtrent taalnieuwing en de regeling hiervan ("Pembaharoean bahasa dan oesaha mengantoernja"), is er volgens het congres reeds een taalvernieuwing, ontstaan doordat ere en nieuwe denkwijze is; hierdoor wordt de behoefte gevoeld aan een regeling van de taalvernieuwing.
- III. Gehoord hebbende de prae-adviezen van de heeren St. Takdir Alisjahbana stelling VI en van Mr. Muh. Yamin, is het congres van meening, dat de tegenwoordige grammatica's niet meer bevredigend zijn met het wezen der bahasa Indonesia; daarom moet een nieuwe grammatical samengesteld worden overeenkomstig het wezen der bahasa Indonesia.
- IV. Motie. Na gehoord en besproken te hebben het prae-advies van den heer K. St. Pamoentjak omtrent de spelling der bahasa Indonesia ("Hal ejaan bahasa Indonesia"), zijn de aanwezigen, afkomstig uit verschillende groepen van verschillende streken, samengekomen op het congres te Solo gehouden van 25-28 Juni 1938, van meening, dat het niet noodig is een nieuwe spelling te maken, totdat het congres zelf een spelling maakt, dat de gebruikelijke spelling van van Ophuysen voorloping aanvaardbaar is, gedachtig aan de bezuiniging en de versoering moeten de veranderingen door prae-adviseur voornoemd in gedachte worden gehouden, en daarom hoopt het congres, dat:

1. de Indonesiers steeds bovengenoemde spelling zullen volgen,
 2. de Nationale fractie in de Volksraad er bij de Regeering op zal aandringen die spelling te volgen, als door het congres bedoeld wordt,
 3. de onderwijzers-vereeningen de besluiten van het congres zullen wilen steunen.
- V. Gehoord hebbende het prae-advies vanden heer Adi Negoro omtrent de bahasa Indonesia in journalistiek (“Bahasa Indonesia didalam persoerat kabaran”), is het congres van meening, dat het nu de tijd is waarin de journalisten zich met de borst moeten toeleegen op het zoeken van wegen ter verbetering der taan in de journalistiek. Daarom hoopt het congres, dat Perdi (De Inheemsche Journalisten-vereening) hierover zal beraadslagen met haar leden en de commissie te vormen door het nieuwe Congres-Bestuur en het Hoofdbestuur van de Perdi.
- VI. Gehoord hebbende het prae-advies van Ki Hadjar Dewantara stelling X, gesteund door R.M. Ng. Dr. Poerbatjaraka, heft het congres besloten, dat het congres voorstaat en voorstelt op de middelbare scholen ook de internationale spelling te onderwijzen.
- VII. Gehoord hebbende het prae-advies van den heer Soekadjo Wirjopranoto omtrent de bahasa Indonesia in de vertegenwoordigende lichamen (“Bahasa Indonesia dalam badan perwakilan”), uitgesproken en verdedigd door R.P. Soeroso, is het congres van meening en spreekt de hoop uit, dat vanaf heden de bahasa Indonesia in alle vertegenwoordigende lichamen als vertaal zal worden gebezigd.
steun verleend zal worden aan de pogingen om de bahasa Indonesia te erkennen als wettige taal en taal voor regeering-sverordeningen.
- VIII. Gehoord hebbende het prae-advies van den heer Sanoesi Pane omtrent een Instituut Bahasa Indonesia en vernomen hebbende de oprichting van een commissie in te stellen om te onderzoeken de kwestie van de oprichting van een Instituut Bahasa Indonesia, en het congres verwacht, dat de commissie haar besluiten over bovengenoemde kwestie zal publiceeren.
- IX. Gehoord hebbende de prae-advies van de heeren St. Takdir Alisjahbana, Mr. Muh. Yamin en Sanoesi Pane, is het congres van meening, dat in het belang van de vooruitgang der Indonesische maatschappij, van de taalen letterkundige studie en van de vooruitgang van het Indonesische volk zoo gauw mogelijk een letterkundige faculteit opgericht moet worden”. (Majalah Djawa, 1938: hal. 116-117.)

Di samping sembilan POTOESAN tersebut juga diputuskan untuk menetapkan alternatif tempat Kongres Bahasa Indonesia II, yaitu: “Semarang, Djokjakarta, Batavia, Medan, Benteng Fort de Kock Makassar, Bandoeng, Soerakarta”. Akhirnya yang dipilih adalah kota Medan sebagai tempat penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia II, tahun 1954. Atas dasar pada keputusan kongres itulah pada tahun 1947 lahir *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ICTO)* di Fakultas Sastra dan Filsafat yang pada saat itu berada di bawah naungan Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Tujuannya adalah untuk menampung kegiatan ilmiah di bidang bahasa dan kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1952, ICTO digabung dengan Bagian Penyelidikan

Bahasa dari Balai Bahasa Yogyakarta, menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya, dan tahun 1959 berganti nama menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusatraan. Pada tahun 1966 nama lembaga ini berganti menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, kemudian tahun 1969 berubah nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional (LBN). Sejak tahun 1975 hingga kini nama lembaga tersebut berganti menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang sekarang diganti menjadi Pusat Bahasa. (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998: hal. 6)

B. Kongres Bahasa Indonesia II, 1954

Jarak antara KBI pertama dengan kedua cukup panjang yaitu 16 tahun. Kongres diselenggarakan di kota Medan, Sumatera Utara bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober – 2 November 1954. Putusan yang disepakati oleh para peserta kongres adalah sebagai berikut.

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA KEDUA Medan, 28 Oktober – 2 November 1954

Dalam Kongres Bahasa Indonesia Pertama sudah diputuskan bahwa diadakan Kongres Bahasa Indonesia Kedua, tetapi baru setelah kemerdekaan gagasan itu dilaksanakan, yaitu di Medan bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Kota Medan dipilih sebagai tempat kongres karena menurut Mr. Muh Yamin, Menteri PPK pada waktu itu, di kota itulah bahasa Indonesia dipakai dan terpelihara, baik dalam kalangan rumah tangga ataupun dalam masyarakat. Berlainan dengan Kongres Bahasa Indonesia Pertama yang diselenggarakan atas prakarsa pribadi-pribadi, Kongres Bahasa Indonesia Kedua ini diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan Kongres Bahasa Indonesia Kedua ini disusun Panitia Penyelenggara sebagai berikut:

Ketua : Sudarsana
Wakil Ketua : Dr. Slametmuljana
Panitera I : Mangatas Nasution
Panitera II : Drs. W.J.B.F. Tooy
Panitera III : Nur St. Iskandar
Anggota : Pudjowijatno
Anggota : Amir Hamzah Nasution

Ditambah dengan Penasehat Panitia yang terdiri atas beberapa cendekiawan. Di Medan disusun Panitia Penerima Kongres yang diketuai oleh W. Simanjuntak, dengan pelindung Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Kehormatan Walikota Medan serta para penasehat yang terdiri atas tokoh-tokoh Medan.

Seperti halnya kongres pertama, Kongres Bahasa Indonesia Kedua itu merupakan peristiwa yang menyangkut bukan hanya para ahli bahasa melainkan juga masyarakat luas. Bahkan, Presiden Soekarno, yang pada waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia, membuka secara resmi Kongres Bahasa Indonesia di Gedung Kesenian

Medan pada pukul 8 pagi. Istri Presiden pulalah yang membuka pameran buku (dalam laporan ia disebut P.J.M Ibu Karno Ny. Fatmawati).

Dalam Kongres itu kemudian dipilih pimpinan Kongres yang terdiri atas Mr. Mahadi, Dr. A. Sofyan, dan Prof. Prijana. Kongres itu merupakan peristiwa besar bagi masyarakat Medan. Kegiatannya bukan hanya rapat-rapat, melainkan juga pameran buku-buku, malam kesenian dari daerah Aceh dan Sumatera Utara. Yang resmi tercatat sebagai peserta Kongres berjumlah 302 orang yang datang dari berbagai daerah Indonesia, juga dari tanah Semenanjung, dari Negeri Belanda, dari Prancis, dan dari India.

Kongres dibagi atas beberapa seksi yang masing-masing membicarakan topik tertentu sebagai berikut:

Tabel 5
Pembagian Seksi Kongres Bahasa Indonesia 1954

Seksi	Judul	Preadvis
1	2	3
Seksi A	1.Tata Bahasa Indonesia 2.Dasar-dasar Ejaan Bahasa Indonesia dengan Huruf Latin	1. Prof. Dr. Prijojo 2. Prof. Dr. Prijono
Seksi B	1.Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan & Perundang-undangan Administrasi 2.Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan & administrasi	1. Mr. A.G. Pringgodigdo 2. Mr. Kuntjoro Purbopranoto
Seksi C	1.Bahasa Indonesia dalam Kuliah & Pengetahuan 2.Kamus Etimologis Indonesia	1. Dr. Prijohutomo 2. Dr. Prijohutomo
Seksi D	3.Bahasa Indonesia dalam Film 4.Bahasa Indonesia dalam Pergaulan sehari-hari 5.Bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi	1. Inu Perbantasari (almarhum) diwakili H.B. Angin 2. Madong Lubis 3. Bahrum Rangkuti
Seksi E	1.Fungsi Bahasa Indonesia dalam Pers 2.Bahasa Indonesia dalam Pers 3.Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio	1.Sjahri (Ketua PWI) 2.Adinegoro 3.Kamarsjah

Beberapa keputusan yang menarik dapat disebutkan di sini, keputusan yang dianggap sangat penting ialah saran agar dibentuk badan yang kompeten yang bertugas untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Hal yang bersangkutan dengan ejaan, Kongres mengusulkan supaya diadakan pembuatan ejaan. Kongres juga

memberikan perhatian pada pemakai bahasa dalam undang-undang dan administrasi. Kongres berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan tidak mengalami kesulitan, Kongres juga menyarankan supaya digiatkan pemakaian istilah ilmiah internasional dan penggalan istilah dari bahasa daerah yang serumpun. Hal yang bersangkutan film memakai bahasa Indonesia yang baik, tetapi tidak boleh mengadakan paksaan untuk mengadakan bahasa Indonesia yang sejenis (*uniform*) karena dalam menciptakan sebuah film haruslah disesuaikan bahasanya dengan cerita, yang berbeda-beda menurut suasana dan daerah. Hal yang juga menarik adalah resolusi tentang bahasa Indonesia dalam pers dan radio, yang menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak karena merupakan bahasa umum yang langsung mengikuti pertumbuhan berbagai fungsi masyarakat”. Di samping kertas kerja, juga didengarkan prasaran dari parasarjana luar negeri tentang bahasa Indonesia di luar negeri, antara lain dari Prof. Berg dan Dr. Teeuw

Sebagai tindak lanjut keputusan Kongres tersebut, Pemerintah Republik Indonesia benar-benar menyusun panitia pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Memang ada keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang lain, tetapi yang paling meninggalkan bekas tentulah soal ejaan tersebut. Pendek kata, Kongres Bahasa Indonesia Kedua itu secara lengkap dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini.

1. Keputusan Seksi A: Dasar-Dasar Ejaan Bahasa Indonesia dengan Huruf Latin

Kongres Bahasa Indonesia yang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d tanggal 2 November 1954 di Medan, setelah membaca, menelaah dan membahas *praeadvies* yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Prijono, memutuskan hal-hal berikut:

- (1) Mengusulkan kepada pemerintah mengadakan suatu Badan Kompeten yang diakui oleh pemerintah untuk: (a) dalam jangka pendek menyusun Tata Bahasa Indonesia yang normatif bagi SR, SLP, SLA, dll; (b) dalam jangka panjang menyusun suatu tata bahasa deskriptif yang lengkap.
- (2) Mengusulkan kepada pemerintah agar anggota-anggota Badan tersebut terdiri dari:
 - (a) Seorang sarjana bahasa, sebagai anggota.
 - (b) Seorang dari pers sebagai anggota.
 - (c) Seorang dari radio sebagai anggota.
 - (d) Beberapa orang ahli bahasa, sebagai anggota.
 - (e) Beberapa orang sarjana bahasa, sebagai penasehat.
 - (f) Dll. yang dianggap perlu.
- (3) Memberi tugas kepada badan tersebut untuk menyiapkan rencana dalam jangka waktu yang ditentukan.
- (4) Mengusulkan agar badan tersebut dipimpin oleh seorang yang cakap memimpin dan memang menunjukkan kegi-atannya dalam perkembangan bahasa Indonesia.
- (5) Mengusulkan supaya badan tersebut selalu mengadakan koordinasi dengan badan-badan yang ada sangkut pautnya dengan bahasa.
- (6) Mengusulkan agar badan tersebut bekerja dengan sistim diachronis dengan menentukan tanggal tertentu sebagai waktu titik permulaan penyelidikannya.

- (7) Mengusulkan agar pemerintah berusaha supaya hasil pekerjaan badan tersebut dijadikan suatu tata bahasa yang dilindungi dengan undang-undang.
- (8) Bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu, dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia sekarang.

Kongres Bahasa Indonesia yang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d tanggal 2 November 1954 di Medan, setelah membaca, menelaah, dan membahas *praeadvies* yang dikemukakan oleh sdr. Prijono, memutuskan hal-hal berikut:

- a. Menyetujui sedapat-dapatnya menggambarkan 1 fonem dengan 1 tanda (huruf).
- b. Menyetujui menyerahkan penyidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan selanjutnya kepada suatu badan kompeten yang diakui oleh pemerintah.
- c. Mengusulkan agar badan tersebut berusaha menyusun:
 - 1) Suatu aturan ejaan yang praktis untuk keperluan sehari-hari dengan sedapat mungkin mengingat pertimbangan ilmu;
 - 2) Suatu "logat bahasa Indonesia" yang halus, berdasarkan penyelidikan yang sesama dengan mempergunakan alat-alat modern.
- d. Menyetujui agar ejaan untuk kata-kata asing yang terpakai dalam bahasa Indonesia ditetapkan sesungguhnya penyusunan ejaan bahasa Indonesia asli terlaksanakan, dengan pengertian bahwa untuk kata-kata Arab diadakan kerja sama dengan Kementerian agama.
- e. Mengusulkan ejaan itu ditetapkan dengan undang-undang

2. Keputusan Seksi B: Bahasa di dalam perundang-undangan dan administrasi

Seksi B dalam Kongres Bahasa Indonesia yang dilangsungkan di Medan sejak tanggal 28 Oktober 1954 s/d tanggal 2 November 1954, setelah membaca *praeadvies* Saudara Prof. Mr. AG. Pringgodigdo dan setelah membaca serta mempertimbangkan *praeadvies* Saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto, mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti teriring di bawah ini:

- (1) Supaya pemerintah segera membentuk Panitia Negara, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 145 UUDS, dengan ketentuan bahwa disamping tugas yang dimaksud dalam pasal tersebut, supaya kepada panitia dibebankan juga kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Mengadakan pembetulan/penyempurnaan, yang dipandang perlu dalam bahasa Indonesia di dalam undang-undang.

Undang-undang Darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan Negara yang lain, misalnya:

 - i) Kata "kebutuhan", sebab kata ini adalah kata cabul dalam bahasa daerah umumnya, kata-kata cabul dan bahasa daerah janganlah dipergunakan.
 - ii) Kata retributie (lihat pasal 2 LN 1953 No.4); demikian juga seperti kata-kata rel, ondernemeng dalam TLN No.353, diimpooteer, paberikasi rokok, di dalam TLN No.350, legaliseer, aparatur, TLN 351, inrichting van het onderwijs TLN 351; umumnya kata-kata asing yang mudah mendapat penggantiannya jangan dipergunakan.

- (b) Memeriksa bahasa rancangan Undang-undang Darurat, dan Peraturan-peraturan Negara yang lain, sebelum ditetapkan.
 - (c) Menjaga supaya istilah-istilah hukum bersifat tetap, terang, dan jangan berubah sebelum mendapat persetujuan panitia tersebut.
- (2) Di dalam panitia tersebut di sub I didudukkan sebagai anggota selain dari pada ahli-ahli hukum dan bahasa, juga ahli-ahli adat, ahli-ahli agama dan ahli-ahli hukum agama.
 - (3) Di dalam Saksi Hukum dari komisi istilah hendaklah juga didudukkan ahli-ahli hukum agama sebagai anggota.
 - (4) Untuk mencapai keseragaman istilah hukum yang dipakai dalam dunia ilmu hukum pada perguruan tinggi dan para sarjana hukum pada waktu-waktu yang tertentu mengadakan pertemuan.
 - (5) Supaya pihak pemerintah tetap memakai istilah yang sama untuk "satu pengertian hukum, misalnya: "atas kuasa undang-undang", (Undang-undang Dasar pasal 101 ayat 1) kontra "berdasarkan" dalam LN 1953 No.4.
 - (6) Supaya sesuatu istilah senantiasa ditulis dalam bentuk yang sama, misalnya: "diubah", "dirubah", "dirobah", (LN 1954 No.39). LN 1953 No.4 Pasal 1). "Dewan Pemerintah Harian", (TLN 353) kontra "Dewan Pemerintah daerah", (UURI 1948 No.22).
 - (7) Menyetujui seluruhnya kesimpulan-kesimpulan dari No. 1 s/d 6, yang diperbuat oleh Saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto pada akhir praeadvisnya, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (a) Bahasa hukum Indonesia adalah bahagian dari bahasa umum Indonesia yang meliputi lapangan hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan oleh instansi-instansi yang diakui oleh undang-undang. Instansi-instansi itu adalah instansi-instansi resmi pengadilan, pun pula badan-badan atau petugas-petugas yang menurut adat dan agama disertai penyelenggaraan hukum adat, dan hukum agama, termasuk Pengadilan Swapradja (dimana masih ada).
 - (b) Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi adalah bahagian bahasa hukum Indonesia tertulis, yang dipergunakan dalam perundang-undangan dan administrasi, yaitu oleh instansi-instansi resmi yang disertai dengan penyelenggaraan administrasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk pengitaban hukum (conficatie) dan pencatatan hukum (rechtsregistratie).
 - (c) Persoalan-persoalan mengenai bahasa Indonesia pada umumnya pula terhadap dan pengaruh pada bahasa hukum (termasuk pula bahasa perundang-undangan dan bahasa administrasi) kita.
 - (d) Dalam mencari, menggali, menghimpun, dan membentuk istilah hukum Indonesia seyogyanya dipakai dasar.
 - (1) Bahan-bahan dari bahasa daerah yang meliputi seluruh daerah hukum Indonesia.
 - (2) Kata-kata istilah dari bahasa asing yang menurut sejarah dan pemakaiannya sudah memperoleh kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia.
 - (3) Kata-kata istilah bentukan baru yang menurut perhitungan baik berdasarkan isinya maupun pengucapannya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat umum.

- (e) Dalam lapangan administrasi sangat besar gunanya kesamaan bentuk atau keseragaman guna melancarkan penyelesaian surat-suratan dan memudahkan pemecahan soal yang dihadapi. Berhubung dengan itu lazimlah dipakai dalam administrasi cara penyelesaian soal yang disebut “afdoening volgens antecedent/precedent”.
- (f) Adalah satu keuntungan besar dalam sejarah kebudayaan bangsa kita bahwa sebagai salah satu hasil revolusi bangsa Indonesia telah dapat ditetapkan satu bahasa kesatuan dan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia.

3. Keputusan Saksi C: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa ilmiah dan Kamus Etimologi Indonesia

Seksi C Kongres Bahasa Indonesia 1954, setelah dalam sidang-sidangnya memperbincangkan praeadvies Prof. Dr. Prijohutomo tentang Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan kamus etimologi Indonesia, mengambil keputusan/kesimpulan untuk disarankan kepada sidang Pleno Kongres yang dapat dirumuskan demikian ini.

- (1) Mengenai Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah kongres berpendapat:
 - (a) Bahasa Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannya ke arah kesempurnaan pada dewasa ini, tidaklah mengalami banyak kesukaran dalam pemakaiannya sebagai bahasa ilmiah.
 - (b) Maka untuk lebih menyempurnakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah dan kebudayaan di dalam arti seluas-luasnya dansedalam-dalamnya perlu diciptakan iklim dan suasana sedemikian rupa sehingga bahasa tersebut dapat berkembang secara mulkus sempurna.
 - (c) Iklim dan suasana tersebut hanya mungkin ada jika ditetapkan tegas politik bahasa sebagai tindakan organik terhadap Pasal 4 UUDS yang berbunyi, “Bahasa Resmi Negara Republik Indonesia ialah bahasa Indonesia”. Di dalam politik itu sekurang-kurangnya haruslah ditetapkan usaha-usaha yang nyata di dalam rangka pembangunan nasional antara lain sebagai berikut:
 - (i) Pendirian Djawatan Penterjemah Negara yang kompeten, dengan diberi perlengkapan persoalan, peralatan, dan keuangan yang cukup.
 - (ii) Sikap terhadap kedudukan bahasa daerah, sebagai sumber kebudayaan dan kekayaan bahasa nasional.
 - (iii) Sikap tegas terhadap bahasa asing, misalnya peninjauan kembali pengajaran bahasa Inggris di sekolah lanjutan yang sekarang dilakkan dengan secara meluas dan merata, dengan kemungkinan menggantinya dengan sekolah-sekolah bahasa asing (*Foreign Linguistic School*) untuk kepentingan negara dalam hubungan Internasional.
 - (iv) Adanya mimbar kuliah bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, antara lain Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Minangkabau, bahasa-bahasa daerah Tapanuli, Aceh, dll.
 - (v) Adanya mimbar kuliah bahasa asing terutama bahasa-bahasa tetangga, misalnya bahasa Arab, Sanskerta, Urdu, Tionghoa, dll.
 - (vi) Huruf Arab yang biasa disebut huruf Melayu supaya tetap diajarkan di sekolah-sekolah di daerah yang memakainya.

- (2) Mengenai ikhtiar untuk memperlengkap kata-kata yang diperlukan di dalam dunia ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka Kongres Bahasa Indonesia menganjurkan hal-hal berikut:
 - (a) Istilah-istilah yang telah biasa dipakai saat ini diakui.
 - (b) Istilah yang telah disiarkan oleh Komisi Istilah supaya disaring dengan jalan berpegang kepada pengertian keseluruhannya, dan tidak hanya merupakan penerjemahan kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa yang serumpun.
- (3) Anjuran-anjuran:
 - (a) Menganjurkan supaya para sarjana Indonesia mengadakan pertemuan-pertemuan keahlian untuk membahas ilmu pengetahuan dalam lingkungannya dengan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
 - (b) Menganjurkan kepada para sarjana untuk mengarang buku tentang keahliannya dalam bahasa Indonesia.
 - (c) Menganjurkan kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan dan honorarium yang cukup menarik untuk setiap keterangan dan hasil keahlian dan kesusastraan yang diterima.
- (4) Mengadakan perpustakaan untuk semua sekolah dan masyarakat yang cukup lengkap.

Mengenai *praeadvies* tentang Kamus Etimologi Indonesia, kongres berpendapat supaya pemerintah segera mendirikan sebuah lembaga untuk menyusun Kamus Etimologis Indonesia. Selanjutnya panitia perumus mengambil keputusan untuk mengusulkan supaya mengumumkan kepada masyarakat:

- a. Pidato pembangkang utama Sdr. Hamka.
- b. Pidato Herman Busser.
- c. Pidato Prof. Dr. A.A. Fokker.

4. Keputusan Saksi D1: Bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari

- (1) Di dalam pergaulan sehari-hari, yaitu di dalam perhubungan antara manusia yang bersifat bebas di lapangan hidup yang bebas hendaklah senantiasa diusahakan dan diutamakan pemakaian bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya di dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
- (2) Untuk mencapai tujuan ini, haruslah ada usaha pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan dengan insyaf dan menurut rencana yang teratur, berdasarkan kesadaran dan keyakinan berbahasa satu, disertai usaha penyempurnaan bahasa Indonesia yang harus dicantumkan sebagai acara penting dalam rangka pembangunan nasional.
- (3) Politik bahasa yang tegas yang mampu menyuburkan rasa cinta kepada bahasa Indonesia dan yang sanggup melenyapkan rasa kurang harga diri, terhadap bahasa asing, hendaklah mengatur kedudukan bahasa Indonesia dan hubungan bahasa ini dengan bahasa-bahasa daerah, baik di sekolah, sejak dari sekolah rendah sampai ke perguruan tinggi ataupun di dalam masyarakat.
- (4) Sebagai dasar politik bahasa itu hendaklah ditetapkan:
 - (a) Sesuai dengan UUDS RI bahasa resmi Negara Indo-nesia ialah bahasa

Indonesia.

- (b) Pengembangan bahasa Indonesia tidak boleh ber-maksud menahan perkembangan bahasa-bahasa daerah dan pengembangan bahasa-bahasa daerah tidak boleh pula bermaksud menolak bahasa Indonesia.
- (5) Guna memudahkan dan melancarkan perkembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan sehari-hari bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai bahasa ibunya, haruslah ada bimbingan yang nyata pada pertumbuhan dan pembinaan bahasa Indonesia itu.
- (6) Oleh karena itu, seksi menganjurkan supaya dibentuk suatu Lembaga Bahasa Indonesia yang antara lain dapat diberi tugas sebagai berikut:
 - (a) Mengadakan usaha-usaha pemakaian bahasa Indonesia yang meluas dan mendalam di segala lapangan hidup dan untuk segala lapisan masyarakat.
 - (b) Mengadakan usaha mempertinggi nilai dan mutu bahasa Indonesia dengan memberikan bimbingan yang tegas dalam penggunaan bahasa Indonesia.
 - (c) Dalam waktu sesingkat-singkatnya menyusun suatu tata bahasa Indonesia yang bersahaja dan romantis, terutama untuk dipakai di sekolah-sekolah.
 - (d) Mengusahakan kesempurnaan ejaan bahasa Indonesia.
 - (e) Mengusahakan adanya penghargaan yang sewajarnya dari dunia luar.
- (7) Sekolah-sekolah rakyat yang merupakan persemaian benih-benih bahasa pergaulan sehari-hari dalam bentuk yang sempurna di samping usaha pemberantasan buta huruf yang dijalankan dengan mempergunakan semacam basik Indonesia, dan radio, film serta persurat-kabaran haruslah dengan insyaf membantu sekuat-kuatnya perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia itu.

Untuk menjamin pemakaian bahasa Indonesia yang baik di lapangan tersebut di atas, mestilah ada penelitian dan pengawasan yang seksama oleh Lembaga Bahasa Indonesia dan pemerintah

5. Keputusan Seksi D2: Bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi

Seksi D Kongres Bahasa Indonesia 1954, dengan menyesalkan tidak diundangannya para sastrawan Indonesia, setelah dalam sidangnya memperbincangkan praeadvies Bahrum Rangkuti tentang "Bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi", mengambil keputusan-keputusan yang dapat dirumuskan sbb:

- (1) Beda bahasa Indonesia dari bahasa Melayu nyata sekali dalam prosa dan puisinya, jadi dalam kesusastraannya. Dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia dalam kesusastraannya lebih banyak variasinya dari bahasa Melayu dalam seni prosa dan puisinya. Meskipun begitu masih banyak jenis kesusastraan Melayu klasik yang patut menjadi perhatian, bahkan mungkin menjadi perangsang bagi perkembangan kesusastraan bahasa Indonesia.
- (2) Perlu diadakan terjemahan hasil-hasil sastra dunia dan sastra daerah Indonesia.
- (3) Perlu dilakukan penyidikan yang luas dan mendalam tentang kesusastraan bahasa-bahasa Indonesia dan hasil kesusastraan bahasa-bahasa tetangga (India, Farsi, Arab, dsb) yang zat-zatnya ada mengesahkan pengaruh pada sastra Melayu klasik ataupun Indonesia modern.

- (4) Perlu diterbitkan naskah kepustakaan Melayu klasik di samping hasil-hasil kesusastraan Indonesia modern. Demi-kian juga berbagai pendapat para sarjana dan sastrawan mengenai hasil kesusastraan Melayu klasik dan bahasa Indonesia yang tersebar di berbagai majalah, naskah dan buku.
- (5) Perlu diusahakan buku-buku yang menguraikan stalistik bahasa Indonesia dengan memperhatikan sifat dan luasan kesusastraan Indonesia dan penyelidikan yang luas tentang logat bahasa Melayu di berbagai daerah Nusantara (termasuk tanah Melayu) untuk mengetahui inti hakikat proporsi bahasa Indonesia.
- (6) Perlu diwujudkan perpustakaan kesusastraan yang lengkap di sekolah, baik rendah, lanjutan maupun seterusnya.
- (7) Perlu ada usaha menggiatkan tunas muda kesusastraan Indonesia, antaranya sekolah sandiwara, deklamasi, dsb.

6. Keputusan Seksi D3: Bahasa Indonesia dalam Film

- (1) Yang dimaksud dengan bahasa film ialah salah satu alat pengaturan pikiran, perasaan, kehendak dll. Yang dimaksud dengan bahasa dalam film ialah salah satu unsur bahasa film di samping gambaran dan bunyi-bunyian lain. Bahasa dalam film dapat terdiri dari percakapan, komentar, penceritaan, dll.
- (2) Film diakui sebagai salah satu alat penting untuk menyebarkan dan mengembangkan bahasa Indonesia serta membuat bahasa Indonesia populer di kalangan segala lapisan masyarakat di seluruh tanah air.
- (3) Film dapat membantu proses pertumbuhan bahasa Indonesia umum a.l. dengan menerjemahkan bahasa-bahasa daerah, baik dalam idiomnya, istilahnya, cara pengucapannya dll. ke dalam bahasa Indonesia.
- (4) Tidaklah sewajarnya diadakan suatu paksaan untuk mendapatkan bahasa Indonesia yang sejenis (uniform) untuk film karena dalam menciptakan sebuah film haruslah disesuaikan bahasanya dengan ragam cerita, yang berbeda-beda menurut suasana dan daerah juga karena paksaan semacam itu bertentangan dengan dasar penciptaan seni secara bebas.
- (5) Mengajukan kepada pembuat-pembuat film untuk mema-kai bahasa Indonesia yang baik, yang dapat dipertang-gungjawab-kan sebagai suatu hasil penciptaan seni yang sempurna.
- (6) Karena fungsinya yang penting itu, sewajarnya persoalan film lebih banyak mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dari Kementerian PP dan K dengan cara menjalankan politik film yang lebih aktif.
- (7) Supaya teks terjemahan film luar negeri diperhatikan oleh Panitia Sensor Film.
- (8) Untuk menjaga pemakaian bahasa Indonesia yang baik dalam film supaya bahasa dalam film itu melalui Panitia Sensor Film Indonesia.

7. Keputusan Seksi E: Fungsi di dalm Pers, Bahasa Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio

Seksi E dari Kongres Bahasa Indonesia yang bersidang pada tanggal 30 dan 31 Oktober 1954 bertempat di Balai Wartawan dan Balai Polisi di Medan, setelah menerima

baik praeadvies 2 tentang Fungsi Bahasa di dalam Pers, Bahasa Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio, dengan suara bulat telah memutuskan untuk menganjurkan kepada sidang kongres supaya mengambil resolusi tentang bahasa Indonesia dalam pers dan radio, sebagai berikut:

Resolusi tentang Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio

Memperhatikan:

Tujuan kongres yang dimaksudkan meninjau kedudukan dan kegunaan bahasa Indonesia dalam segenap lapangan hidup, baik sebagai bahasa pergaulan maupun sebagai ilmu pengetahuan, agar menjadi pegangan bagi penyelidikan selanjutnya di negeri kita dan akan berharga pula bagi penyidikan bahasa di negara-negara tetangga.

Mengingat:

- (1) Pers dan radio bertugas melaksanakan alat hubungan semesta (*mass-communication*).
- (2) Bahasa itu merupakan alat dari pada pers dan radio.
- (3) Alat dari pers dan radio Indonesia adalah bahasa Indonesia.
- (4) Tata Bahasa pada hakikatnya melukiskan pertumbuhan bahasa di dalam masyarakat (deskriptif) dengan teliti.

Menimbang:

- (1) Pers dan radio wajib dan berhak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- (2) Bahasa sebagai alat pers dan radio harus dibuat seefektif-efektifnya atau dijadikan sebaik-baiknya.
- (3) Kebaikan bahasa sebagai alat pers dan radio terletak pada sifat mudah dan jelas.
- (4) Sifat mudah dan jelas itu terjadi jika mengikuti pertumbuhan bahasa dengan timbulnya kata-kata, langgam-langgam, gaya dan ungkapan-ungkapan baru di dalam masyarakat.

Menyatakan pendapat sebagai berikut:

- (1) Bahasa Indonesia di dalam pers radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak.
- (2) Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio adalah bahasa masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masyarakat.
- (3) Pers dan radio hendaknya sedapat mungkin berusaha memperhatikan tatabahasa yang resmi.
- (4) Menganggap perlu supaya dianjurkan adanya kerja sama yang lebih erat antara pers dan radio dengan Balai-balai Bahasa.

Medan, 1 November 1954

1. Mr. Mahadi
2. Dr. A. Sofjan
3. Prof. Prijana

Catatan:

Latar belakang Kongres Bahasa Indonesia Pertama di Solo itu termuat dalam buku Sumanang, sebuah biografi oleh Soebagio I.N. Prasaran tokoh-tokoh bahasa dalam Kongres Bahasa Indonesia Pertama dimuat dalam Hasil Kongres Bahasa Indonesia Pertama dan Kongres Bahasa Indonesia Kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Linguistik Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1978).

Segala sesuatu tentang Kongres Bahasa Indonesia Kedua di Medan dapat diketahui dengan membaca majalah Medan Bahasa jilid IV (1954), majalah Pembina Bahasa Indonesia jilid VII (1955), buku Kongres Bahasa Indonesia di Medan peristiwa yang tiada bandingannya terbitan Djembatan (1955), dan buku Kongres Bahasa di Kota Medan 28 Oktober – 2 November 1954 terbitan Panitia Penyelenggara Kongres, Djawatan Kebudayaan Kemen-terian PPK (1955)

C. Kongres Bahasa Indonesia III 1978

Jarak waktu KBI II dan III juga cukup panjang, 24 tahun. Dalam perjalanan waktu selama itu bahasa telah mengalami perkembangan yang luar biasa pesatnya. Perubahan politik dan sosial masyarakat masa-masa menjelang peristiwa G30S/PKI dan kemudian memasuki masa pembangunan tahun 1969 telah lahir berbagai kebijakan baru yang berdampak pada perkembangan bahasa. Diperlukan forum untuk membahas hal itu dalam bentuk kongres. Ahli bahasa sepakat untuk menyelenggarakan KBI III, dengan memilih tanggal 28 Oktober 1978, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kongres ini dikoordinasikan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menghasilkan rumusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA KETIGA Jakarta, 28 Oktober – 3 November 1978

Kongres Bahasa Indonesia Ketiga, yang berlangsung dari Sabtu tanggal 28 Oktober sampai dengan hari Jumat tanggal 3 November 1978 di Hotel Indonesia Sheraton, Jakarta, dengan memperhatikan Pidato Peresmian Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia Ketiga oleh Presiden Republik Indonesia, Suharto, pada tanggal 28 Oktober 1978 dan pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoef, pada tanggal 30 Oktober 1978, serta setelah mendengarkan kertas-kertas kerja yang disajikan dan dibahas secara mendalam, baik dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, mengambil keputusan berupa kesimpulan dan usul tidak lanjut dalam hubungan dengan masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan:

- a. Kebijakan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional.
- b. Bidang pendidikan.
- c. Bidang komunikasi.
- d. Bidang kesenian.
- e. Bidang linguistik.
- f. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kebijaksanaan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional

1.1. Kesimpulan Umum

Bahasa adalah unsur yang terpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama bahasa merupakan sarana pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebahasaan harus merupakan bagian yang integral dari kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebudayaan

Perkembangan kebudayaan Indonesia ke arah peradaban modern sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya perkembangan cara berpikir yang ditandai oleh kecermatan, ketepatan, dan kesanggupan menyatakan isi pikiran secara eksplisit. Ciri-ciri cara berpikir dan mengungkapkan isi pikiran ini harus dipenuhi oleh bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan sebagai sarana berpikir ilmiah dalam hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi masyarakat Indonesia. Selain itu, mutu dan kemampuan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi keagamaan perlu pula ditingkatkan. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memiliki kesanggupan menyatakan dengan tegas, jelas, dan eksplisit konsep-konsep yang rumit dan abstrak serta hubungan antara konsep-konsep itu satu sama lain. Untuk mencapai tujuan ini harus dijaga agar senantiasa terdapat keseimbangan antara kesanggupan bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah dan identitasnya sebagai bahasa nasional Indonesia.

Identitas kebangsaan Indonesia dimanifestasikan bukan saja oleh bahasa Indonesia, melainkan juga oleh bahasa-bahasa daerah. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus diimbangi pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sesuai dengan Penjelasan Bab XV Pasal 36 Undang-undang Dasar 1945. Di dalam hubungan ini diperlukan adanya keseimbangan antara sikap bahasa yang positif, baik terhadap bahasa Indonesia maupun terhadap bahasa daerah dan perilaku berbahasa, dan antara sikap bahasa perseorangan dan sikap bahasa bangsa yang dinyatakan di dalam kebijaksanaan bahasa nasional.

Sejarah kebangsaan Indonesia memperlihatkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia memiliki hubungan isi-mengisi dengan perkembangan kehidupan pedesaan, serta kehidupan politik di Indonesia. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik telah mewarnai perkembangan bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sarana komunikasi antardaerah, antarsuku, dan antarbudaya telah memungkinkan terjadinya perkembangan kehidupan kebudayaan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik seperti yang kita miliki hingga saat ini. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia yang semula merupakan sarana pembahasan dari kekangan stratifikasi sosial, dewasa ini menunjukkan kecenderungan ke arah pembedaan kedudukan sosial dalam masyarakat. Kecenderungan ini perlu diatasi demi keutuhan identitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang demokratis.

Di dalam hubungan dengan peningkatan isi dan makna kemerdekaan Indonesia bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan peningkatan kewibawaan serta identitas bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat antarbangsa, terutama dalam lingkungan Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bahasa Indonesia merupakan sarana yang diandalkan untuk meningkatkan ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamik yang ditandai oleh adanya keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Hanya dengan wibawa besar dan identitas yang tegas dan nyata, bangsa Indonesia dapat memainkan peranan yang berpengaruh di dalam pergaulan masyarakat dunia.

Bahasa Indonesia dikembangkan dan diperkaya dengan unsur-unsur bahasa daerah dan, apabila perlu, dengan unsur-unsur bahasa asing. Unsur-unsur serapan itu haruslah terbatas pada unsur-unsur yang sangat diperlukan dan yang padanannya yang tepat tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia.

1.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut:

- a. Karena kebijaksanaan bahasa nasional merupakan bagian integral kebijaksanaan kebudayaan nasional, dan disusun dalam konteks kebijaksanaan kebudayaan nasional itu, perlu segera diadakan Kongres Kebudayaan Nasional dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh nasional yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional memerlukan partisipasi segenap lapisan masyarakat. Dalam hubungan ini perlu dibentuk Dewan Nasional Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berfungsi mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan
- c. Sikap bahasa yang positif, perilaku berbahasa, dan kebiasaan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar perlu ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mencapai tujuan ini perlu dikembangkan lingkungan yang positif pula. Dalam hubungan ini, iklan serta papan nama toko, perusahaan, dan lain-lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu diindonesiakan
- d. Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan cara berpikir ilmiah, buku-buku dan bahan kepustakaan ilmiah lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu disebarluaskan dengan jalan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini perlu segera dibentuk Badan Penerjemahan Nasional dengan wewenang, dana, dan tenaga profesional yang cukup
- e. Keseimbangan antara sikap bahasa yang positif dan perilaku berbahasa dapat dicapai dengan menjadikan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian dalam sektor pemerintah, baik dalam lingkungan sipil maupun dalam lingkungan militer serta dalam sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan sarana perundang-undangan untuk mengatur penggunaan kemahiran bahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian

2. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang pendidikan

2.1 Kesimpulan Umum

Perkembangan bahasa Indonesia seperti yang kita miliki dewasa ini telah dimungkinkan oleh usaha para pendidik. Sebaliknya, perkembangan pendidikan kebangsaan kita telah dimungkinkan berkat adanya bahasa Indonesia.

Bidang pendidikan merupakan wadah dan lingkungan formal yang harus menerima anak didik dari semua suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, dan sesuai pula dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional adalah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, dan (2) bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang sekolah.

Bahasa daerah masih dapat dipakai untuk membantu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas satu sampai dengan kelas tiga sekolah dasar di daerah-daerah yang masih memerlukannya. Di samping itu, bahasa daerah dapat pula diajarkan sebagai mata pelajaran. Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah untuk sarana komunikasi antarbangsa dan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari buku-buku berbahasa asing.

Sehubungan dengan pemakaian tiga kelompok bahasa yang dikemukakan di atas, hal yang tidak menggembirakan ialah kenyataan bahwa pada bagian anggota masyarakat terjadi percampuran pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dan bahasa asing mungkin dapat diatasi dengan pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh semua guru.

Perolehan bahasa daerah sebagai bahasa ibu yang berjalan secara alamiah menjalin dengan perkembangan persepsi, daya abstraksi, perasaan, dan pengetahuan seorang anak. Oleh karena itu, proses belajar-mengajar bahasa Indonesia dengan pendekatan makro yang mencakup pembinaan melalui semua mata pelajaran dan lingkungan sosial yang lebih luas akan lebih menguntungkan.

Masukan (*input*) instrumental pendidikan bahasa mencakup kurikulum, guru, dan sarana pendidikan. Kurikulum pendidikan bahasa Indonesia pada semua jenjang sekolah harus berkesinambungan. Guru yang memegang peranan kunci dalam proses mengajar tidak selalu menggembirakan kualifikasi dan jumlahnya. Demikian pula halnya dengan sarana pendidikan seperti buku-buku pelajaran dan buku bacaan.

Khusus mengenai buku-buku terdapat beberapa masalah. Pertama, jumlah dan jenis buku yang diperlukan oleh guru dan murid belum memadai. Kedua, perpustakaan sekolah yang bertanggung jawab untuk pembinaan buku-buku dan media bacaan lainnya belum berkembang sebagaimana mestinya; petugas perpustakaan sangat kurang. Ketiga, buku-buku pelajaran masih banyak yang belum memenuhi syarat, baik dari segi ejaan dan tanda baca maupun dari segi bahasa dan isinya.

Minat baca dikalangan murid pada umumnya cukup memadai, kecuali minat baca untuk buku ilmu pengetahuan. Dukungan yang diperlukan untuk pengembangan minat baca ternyata masih kurang dalam pengajaran bahasa Indonesia. Pelajaran sastra belum merupakan mata pelajaran yang mandiri. Sastra diajarkan sebagai sambilan

dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tenaga pengajar dan buku yang diperlukan masih kurang.

Keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan ternyata belum memenuhi syarat minimum bagi penggunaan bahasa Indonesia, baik untuk kepentingan pendidikan tinggi maupun untuk kepentingan komunikasi umum di dalam masyarakat. Keadaan ini perlu segera diatasi.

Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan masyarakat umum, termasuk para pejabat, di luar lembaga pendidikan formal perlu ditingkatkan.

2.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan mutu keterampilan berbahasa di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan mutu pelajaran harus segera diperbaiki dengan jalan menyediakan bahan pengajaran yang bermutu, mengembangkan metode dan sarana pengajaran yang lebih baik, dan meningkatkan mutu pendidikan guru sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan lanjutan. Selain itu, guru-guru terutama guru-guru bahasa Indonesia harus segera diberi penataran dalam keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, penggunaan metode dan sarana pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan pengembangan inovasi pendidikan kebahasaan.
- b. Kebiasaan dan keterampilan menulis, termasuk menulis laporan ilmiah, harus dikembangkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Sejalan dengan itu, perlu pula dikembangkan keterampilan membaca cepat.
- c. Perlu segera diadakan penelitian mengenai masalah-masalah kongkret tentang keserasian kurikulum bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang sekolah dan kemampuan sarana penunjang seperti buku-buku murid, penuntun guru, perpustakaan, dan alat peraga.
- d. Peranan perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan dan buku-buku dilengkapi. Guru perlu ditatar untuk menjadi guru pustakawan.
- e. Buku-buku pelajaran perlu diteliti dan dievaluasi ketepatan isinya terjangkau oleh daya beli orang tua murid.
- f. Keragaman buku pelajaran untuk murid-murid yang berbeda latar belakang bahasa ibunya atau tingkat kemampuan bahasa Indonesia perlu dikembangkan.
- g. Untuk mempercepat proses evaluasi buku, maka wewenang pelaksanaannya perlu diserahkan kepada tim daerah. Tim ini dapat dibentuk pada kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keanggotaan tim harus mewakili ahli bahasa, ahli pendidikan, dan ahli bidang studi yang bersangkutan.
- h. Untuk menghilangkan keraguan di lapangan, perlu dikeluarkan petunjuk yang jelas tentang masalah bahasa pengantar di sekolah, termasuk kedudukan bahasa daerah sebagai pembantu bahasa pengantar ke kelas-kelas awal sekolah dasar.
- i. Dalam rangka peningkatan pengajaran sastra, perlu disusun kurikulum yang serasi.

- j. Dalam rangka penerapan pendekatan makro, perlu disusun pedoman untuk kepala sekolah dan para guru. Tugas guru yang mengajarkan bidang studi nonbahasa adalah mengembangkan kemampuan murid dalam memahami uraian lisan dan bahan bacaan dalam bidang studi masing-masing dengan tepat. Juga perlukan latihan melakukan sintesis, analisis, dan evaluasi konsep-konsep dalam bidang studi dengan bahasa yang tepat.
- k. Perlu ada kebijaksanaan yang menyeluruh tentang pembinaan guru bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan guru dengan baik, perlu dipikirkan masalah calon guru di SPG dan IKIP, masalah pengangkatan dan pembinaan karier melalui penataran, dan pendidikan lanjutan.
- l. Sehubungan dengan pendidikan luar sekolah, perlu ditingkatkan pemberantasan buta huruf latin dan buta bahasa Indonesia.
- m. Dalam rangka pembinaan bahasa daerah, perlu diberikan tempat dan waktu yang wajar padanya dalam kurikulum sekolah.
- n. Mutu pengajar wajar padanya dalam kurikulum sekolah segera ditingkatkan dengan tujuan memungkinkan penggunaannya sebagai sarana penggali kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta sarana komunikasi antarangsa.

3. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang komunikasi

3.1. Kesimpulan Umum

Media massa merupakan salah satu yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena massa memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat. Dalam hubungan itu media telah memberikan sumbangan yang berharga dengan pertumbuhan bahasa Indonesia. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya, ada kata yang cenderung kehilangan maknanya yang sesungguhnya dalam ragam lisan belum ada lafal buku. Disamping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih dipakai bahasa daerah atau bahasa asing.

3.2. Tidak Lanjut

Tidak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah erosi bahasa perlu diadakan penelitian mendalam tentang sebab-sebabnya.
- b. Kerja sama antara wartawan dan ahli bahasa dalam penumbuhan bahasa Indonesia perlu digalakkan.
- c. Perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk wartawan surat kabar, televisi, dan radio, baik pemerintah maupun swasta.
- d. Pejabat negara, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam segala jenjang hendaknya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang lebih cermat,

- baik dalam komunikasi resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- e. Perlu dipikirkan kemungkinan penempatan ahli-ahli bahasa di kantor-kantor pemerintah dan swasta untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan masing-masing.
 - f. Sebaiknya, surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia menyediakan “Pojok aasa” yang memuat petunjuk praktis penggunaan bahasa Indonesia.
 - g. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama dengan Dewan Pers dan lembaga lain hendaknya segera menyusun pedoman lafal buku bahasa Indonesia yang didasarkan atas penelitian, antara lain, untuk penyiar televisi dan radio.
 - h. Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers televisi serta radio dapat melakukan kerja sama yang lebih efektif dalam usaha keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan baku.

4. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang kesenian

4.1. Kesimpulan Umum

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam banyak karya sastra, cerita anak-anak, lagu, teater, dan film menunjukkan adanya ketimpangan. Dalam hal sastra dan buku anak-anak, hal itu disebabkan oleh penggunaan bahasa yang kurang sempurna dari kebanyakan pengarang kita, di samping masih tidak pastinya peranan redaktur dalam penerbitan.

Dalam hal penerbitan cerita anak-anak, pengarang perlu memberi keleluasan kepada penerbit untuk mengubah bahasa karangannya agar sesuai dengan usia dan lingkungan anak-anak. Bacaan anak-anak memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan imajinasi dan kecerdasan anak; dengan demikian, kecermatan pemakaian bahasa merupakan faktor yang sangat penting. Dalam syair lagu ketimpangan itu, antara lain, diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang pasti tentang aksentuasi bahasa Indonesia sehingga para komponis tidak mempunyai pegangan untuk menyesuaikan dengan melodi.

Pemakaian bahasa Indonesia dalam film belum dilakukan sebaik-baiknya sebab film lebih banyak merupakan barang dengan pemburu keuntungan bagi pengusaha; penulis skenario yang dipilihnya kebanyakan tidak menguasai teknik penulisan yang baik.

Bahasa Indonesia semakin banyak juga dipergunakan untuk menerjemahkan karya sastra tradisional dan teater tradisional. Usaha untuk menyebarluaskan jangkauan teater-teater tradisional, yaitu dengan cara mengindonesiakan cakupannya kadangkadangkang justru menurunkan mutu teater yang bersangkutan karena terjadinya ketidakseimbangan dalam struktur teater itu sendiri. Oleh karena itu, pengindonesiaan teater tradisional harus dilakukan secara teliti dengan melibatkan lembaga kebahasaan, lembaga pendidikan dan pengembangan kesenian, dan seniman.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungannya dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mengefektifkan pengajaran sastra di sekolah-sekolah.
- b. Menyediakan perpustakaan yang lengkap dan memadai.
- c. Menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah.
- d. Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
- e. Merangsang penelitian dan pendalaman karya-karya sastra daerah yang bersangkutan.
- f. Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia atau daerah.
- g. Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra Indonesia dan daerah ke dalam bahasa-bahasa asing.
- h. Menyusun suatu kebijaksanaan perbukuan secara nasional sehingga setiap warga negara dapat memperoleh kesempatan membaca buku dengan mudah dan murah.
- i. Mengingat dan merangsang kreativitas para sastrawan kita dengan menyediakan sarana untuk itu, misalnya, berupa majalah sastra dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah.
- j. Mengadakan kegiatan pertemuan antara sastrawan, ahli sastra, dan calon penggemar sastra (dalam rangka me-masyarakatkan apresiasi sastra).
- k. Mewajibkan para penerbit memiliki editor.
- l. Mengadakan penataran untuk tenaga sensor.
- m. Menggunakan tenaga editor yang diakui oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- n. Melakukan perekaman teater tradisional untuk kemudian diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- o. Mengadakan penelitian mengenai penggunaan syair untuk lagu-lagu Indonesia, yang hasilnya dapat digunakan sebagai pengarah penciptaan lagu.
- p. Melakukan penelitian kembali terhadap kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang sudah ada, dan apabila ada kaidah yang sudah tidak sesuai lagi, maka kaidah itu sebaiknya diperbaiki.
- q. Memberi rangsangan kepada pengarang-pengarang yang menyumbangkan tulisan-tulisan berharga kepada media massa.
- r. Meningkatkan kecermatan pemakaian bahasa dalam bacaan anak-anak, termasuk penyesuaian dengan usia anak-anak.
- s. Menumbuhkan kerja sama antara penerbit bacaan anak-anak dengan lembaga-lembaga pendidikan dan psikologi yang ada.
- t. Perpustakaan sekolah hendaknya benar-benar terbuka bagi anak didik.

5. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan Bidang Linguistik

5.1. Kesimpulan Umum

Bahasa Indonesia yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat menunjukkan perkembangan berbagai ragam bahasa yang kaidah-kaidahnya lebih rumit dari pada yang disangka orang. Kaidah bahasa yang tercantum dalam buku tata bahasa dan yang diajarkan di sekolah, tidak sepenuhnya lagi mencerminkan kenyataan orang berbahasa dewasa ini. Ketidakterampilan antara kaidah dan pemakaian bahasa yang beragam-ragam itu kadang-kadang melahirkan kesangsian orang dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar.

Usaha agar Ejaan Bahasa Indonesia yang tidak dilandasi oleh wawasan bahasa yang baik kadang-kadang menjerus ke pertumbuhan yang kurang teratur

5.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum adalah sebagai berikut:

- a. Penguasaan kaidah ejaan resmi dan lafal yang baku perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat luas, termasuk instansi pemerintah dan swasta lembaga pendidikan, dan sarana komunikasi massa
- b. Tata bahasa yang menggambarkan norma-norma bahasa adab dengan cara yang memadai perlu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pengembangan bahasa Indonesia. Tata bahasa deskriptif itu kemudian diajarkan untuk pelbagai tujuan pedagogis atau tujuan praktis
- c. Kamus buku bahasa Indonesia perlu segera diterbitkan dan disebarluaskan. Untuk tujuan itu penelitian di bidang leksikologi perlu dilaksanakan dan para ahli berbagai bidang ilmu pengetahuan diikutsertakan
- d. Kerja sama penelitian antara pusat pembinaan dan pengembangan bahasa dengan lembaga pendidikan tinggi perlu ditingkatkan
- e. Akronim yang dipakai di luar lingkungan khusus hendaknya disertai bentuk lengkapnya jika mungkin terjadi gangguan komunikasi
- f. Pembakuan dan modernisasi segala segi bahasa Indonesia perlu digalakan dengan tujuan peningkatan penggunaannya
- g. Perlu diadakan penelitian mengenai berbagai segi bahasa Indonesia, seperti penggunaan kata ganti dan sapaan dalam hubungan dengan demokratisasi masyarakat
- h. Perlu diatur transliterasi tulisan Arab untuk kepentingan keagamaan, ilmiah, dan umum

6. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan Bidang Ilmu dan Teknologi

6.1. Kesimpulan Umum

Oleh karena antara bahasa dan alam pemikiran manusia terdapat jalinan yang erat, maka keberhasilan dari pemodernan itu sangat bergantung kepada corak alam pemikiran manusia Indonesia yang merupakan hasil sintesis antara nilai-nilai yang berakar pada kebudayaan etnis yang tradisional dan nilai-nilai kebudayaan yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Proses sintesis itu dipikirkan sebagai suatu proses yang mempertinggi potensi kreatif yang dapat menjelaskan suatu kebudayaan yang khas Indonesia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern merupakan faktor penting dalam modernisasi, serta pengenalan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dimasyarakatkan secara luas. Masyarakat ini hanya dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien apabila bahasa berfungsi sebagai penyebar konsep-konsep ilmu pengetahuan dan teknologi itu.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemakai bahasa keilmuan di Indonesia adalah ketidakseragaman istilah dan penamaan dalam satu bidang disiplin sekalipun. Di dalam masing-masing ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat kecenderungan untuk membuat istilah-istilah dan tata nama yang berbeda.

Disamping ini perlu pula diperhitungkan adanya sistem tata nama internasional. Jadi, banyak istilah yang mudah dibuat di dalam suatu kalangan tidak diketahui oleh kalangan itu. Pengadaan buku pelajaran ilmiah dalam bentuk karya asli perlu digalakkan. Potensi ke arah ini sudah kelihatan mulai berkembang. Faktor-faktor penghambat tampaknya terletak, antara lain, di luar bidang ilmiah, misalnya:

- a. Kreativitas di bidang lain adalah produktif secara material; dan
- b. Uluran tangan dari pihak pemerintah hingga saat ini belum mencapai hasil yang diinginkan

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ilmu seperti ilmu hukum banyak yang menyimpang dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus diperbaiki dan dibakukan.

Penggunaan akronim hendaklah terbatas pada lingkungan kedinasan yang bersangkutan saja. Penggunaan akronim di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, misalnya, di dalam media massa hendaklah dihindari. Apabila akronim digunakan di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, akronim itu hendaklah dilengkapi dengan bentuk penuhnya. Dasar dan penamaan pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam bidang peristilahan, bahasa asing yang diutamakan sebagai bahasa sumber adalah bahasa Inggris

6.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Usaha pemodernan bahasa Indonesia hendaknya mem-perhatikan tercapainya keselarasan dengan:
 - a) Nilai-nilai yang telah memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
 - b) Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan etnis.
- (2) Pemerintah dan masyarakat ilmunan perlu berusaha untuk segera menyeragamkan peristilahan, baik dalam satu disiplin maupun antardisiplin yang peristilahan yang berdekatan dan agar istilah-istilah internasional digunakan di samping istilah-istilah bahasa Indonesia.
- (3) Dalam semua jenjang pendidikan, khususnya sejak sekolah lanjutan, perlu diusahakan, dan logika supaya pemikiran bangsa Indonesia dapat mengimbangi kemajuan zaman.
- (4) Supaya pemerintah menumbuhkan satu badan khusus yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penerjemah.
- (5) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya mendukung usaha swasta di bidang penerjemahan yang telah nyata-nyata menunjukkan kemampuan.
- (6) Untuk penulisan karya asli dan saduran tidak perlu ditentukan "target". Cukuplah kalau disusun daftar bidang-bidang yang perlu digarap dan penulisannya ditawarkan kepada orang-orang yang dianggap ahli. Penulis hendaklah dibebaskan dari tugas rutinnnya (*sabbatical leave*). Sehubungan dengan penulisan karya asli ini perlu diadakan latihan penulisan buku (*textbook writing*).
- (7) Pengadaan pedoman khusus untuk pembentukan istilah-istilah dan tata nama dalam masing-masing bidang ilmu hendaknya dijabarkan dari pedoman umum pembentukan istilah yang telah disepakati.
- (8) Desimal hendaknya dinyatakan dengan titik (.) bukan koma (,) sehingga 0,9 menjadi 0.9.
- (9) Sebagai pengejawatan Kongres Bahasa Indonesia Ketiga agar pada awal Pelita III digalakkan penerjemahan besar-besaran.
- (10) Agar dibentuk badan pertimbangan yang anggotanya terdiri dari para ahli pelbagai bidang ilmu yang bekerja dalam 2 tahap, yaitu: (a) Memilih dan menyebarkan istilah dan (b) Menampung pendapat (tanggapan) masyarakat serta menetapkan istilah yang akan dipakai.
- (11) Penamaan bilangan besar Amerika yang sama dengan penamaan bilangan besar dalam bahasa Prancis dan Rusia hendaklah dijadikan dasar penamaan bilangan dalam bahasa Indonesia (contoh: miliun, biliun, triliun, dan seterusnya).
- (12) Bahasa Indonesia dianjurkan menggunakan sistem penamaan bilangan antar sepuluh dan dua puluh yang digunakan di Indonesia bagian timur, yang lebih mudah diterima oleh anak-anak, di samping menggunakan sistem yang berlaku sekarang.
- (13) Pengejaan mana bilangan hendaknya dilakukan dengan mengingat fungsi aditif dan multiplikatif angka-angka yang terdapat dalam tubuh lambang bilangan itu. Yang bersifat aditif ditulis terpisah, sedangkan yang bersifat multiplikatif dirangkaikan (contoh: 23 = dua puluh tiga).

- (14) Penggunaan angka 2 untuk menyatakan kata ulang dan penggunaan huruf x di dalam ejaan bahasa Indonesia (Ejaan yang Disempurnakan) sebaiknya ditinjau kembali.

D. Kongres Bahasa Indonesia IV 1983

Sesuai keputusan KBI 1978, kongres berikutnya diselenggarakan setiap 5 tahun. Kongres dikoordinasikan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil kongres adalah sebagai berikut.

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA KEEMPAT Jakarta, 21-26 November 1983

Kongres Bahasa Indonesia Keempat berlangsung dari hari Senin tanggal 21 November 1983 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 November 1983 di hotel Kartika Chandra, Jakarta, dan diikuti oleh tokoh-tokoh lembaga pemerintah, dan nondepartemen, organisasi profesi, guru, mahasiswa, para ilmuwan yang mewakili berbagai bidang ilmu dan teknologi, serta peminat lain dari dalam dan luar negeri. Dalam memperhatikan pidato pengarah dalam peresmian pembuka Kongres Bahasa Indonesia Keempat oleh Menteri Nongroho Notosusanto, pada tanggal 21 November 1983, serta setelah mendengarkan makalah-makalah yang disajikan dan dibahas secara seksama baik di dalam sidang-sidang lengkap maupun dalam sidang-sidang kelompok, Kongres Bahasa Indonesia Keempat mengambil keputusan yang berupakesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah-masalah dalam bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Sarana komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. Sarana pengembangan kebudayaan;
- c. Sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk wajib belajar; serta
- d. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Bidang Bahasa

1.1 Kesimpulan umum

Apalagi dilihat dari saat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional pada 1983 sampai dengan saat perkembangannya dewasa ini, bahasa telah mengalami perubahan dan kemajuan yang pesat. Fungsi bahasa Indonesia telah makin mantap, tidak hanya sebagai alat komunikasi social dan administrative tetapi juga sebagai alat komunikasi ilmu dan keagamaan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia telah memiliki poros inti yang cukup besar dan cukup terpadu, yang memungkinkan manusia dari salah satu latar belakang bahasa tanah air. Berkomunikasi dengan manusia dari latar belakang bahasa yang lain. Sebagai alat penyebar ilmu, bahasa yang telah dapat pula menjelaskan punsinya dengan baik, yang terbukti dengan makin banyaknya buku pengetahuan tingkat tinggi yang tertulis dalam bahasa Indonesia atau terjemahan ke

dalam bahasa Indonesia.

Sebagai alat pengungkap rasa dan ilmu yang tumbuh dan terus berkembang, bahasa Indonesia tentu saja tidak terhindar dari sentuhan dan pengaruh masyarakat yang memahaminya, baik berupa perubahan nilai dan struktur maupun berupa tingkah laku sosial lainnya. Pada satu pihak, hubungan timbal balik antara bahasa sebagai alat pengungkap dengan alat sekitar dan fenomena sosial sebagai isinya menambah kekayaan linguistik bahasa Indonesia yang merupakan milik kita bersama. Pada pihak lain, persentuhan ini menimbulkan pula keanekaragaman. Tanpa pembinaan yang hati-hati dan seksama, tidak mustahil sebagian ragam-ragam itu menyimpang terlalu jauh dari polos inti bahasa kita.

Selaras dengan ragam yang menyimpang itu, terdapatlah cukup banyak pemakaian bahasa Indonesia yang belum dapat mempergunakan bahasa itu dengan baik dan benar. Termasuk di antara mereka adalah para mahasiswa dan pengajar di perguruan tinggi, para cendekiawan dan para pemimpin yang menduduki jabatan yang berpengaruh. Hal ini tampak, antara lain, pada :

- 1) Pemakaian kalimat, tanda baca, dan pengelompokan wacana yang tidak mengungkapkan jalan pikiran yang jernih, logis, dan sistematis;
- 2) Pemakaian istilah asing untuk menggantikan kosa kata yang telah ada, yang memiliki ciri-ciri semantik yang sama, dan yang telah umum dipakai;
- 3) Pemakaian istilah teknis yang tidak seragam dalam ilmu pengetahuan;
- 4) Pengucapan kata yang menyimpang dari kaidah yang dianggap baku;
- 5) Pengejaan kata atau frase yang tidak taat asas.

1.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu segera disusun tata bahasa baku bahasa Indonesia sebagai tata bahasa acuan yang lengkap dengan memperhatikan berbagai ragam bahasa Indonesia, baik ragam tulis maupun ragam lisan.
- 2) Perlu segera disusun kamus besar bahasa Indonesia yang memuat tidak hanya bentuk-bentuk leksikon tetapi juga hafal yang dianggap baku, kategori sintaksis setiap kata, dan batasan serta contoh pemakaian yang lebih lengkap, jika mungkin, kamus ini perlu dilengkapi dengan gambar dan keterangan mengenai asal kata..
- 3) Perlu dipergiat penulisan kamus bahasa daerah yang merupakan sumber untuk memperkaya bahasa nasional.
- 4) Perlu digiatkan penulisan dan penerjemahan buku-buku yang bermanfaat bagi berbagai bidang.
- 5) Lembaga-lembaga pemerintahan (departemen dan non departemen) dan instansi-intansi swasta yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan dihimbau agar mengadakan kerja sama untuk menyeragamkan istilah-istilah ilmu pengetahuan. Pembentukan dan penyeragaman istilah serta tata nama hendaknya dibuat dengan kerangka pemberian bahwa istilah-istilah itu perlu memenuhi selera naluri pada pemakainya sehingga dapat benar-benar diterima dan dipakai. Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa ditugaskan mengkoordinasikan kerja sama itu dan menyebarluaskan hasilnya.

- 6) Sikap hati-hati dalam memilih unsur-unsur dari bahasa lain, terutama bahasa asing, perlu ditingkatkan.
- 7) Semua mahasiswa harus mendapat latihan keterampilan menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia.
- 8) Perlu ditetapkan pedoman transliterasi kata-kata arab ke dalam huruf latin bahasa Indonesia.

2. Pengajaran Bahasa

2.1 kesimpulan umum

Tujuan umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, jika ditinjau dari sudut penutur bahasa Indonesia, tujuan umum pengajaran bahasa Indonesia:

- 1) Tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam berkomunikasi, yaitu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- 2) Tercapainya pemilihan keterampilan yang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pengetahuan yang sah;
- 3) Tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat berkaitan dengan rasa tanggung jawab, yang tampak dari perilaku sehari-hari.

Sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia serta sesuai dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional ialah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, (2) sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan, (3) sebagai bahasa penalar, dan (4) sebagai bahasa pengungkap pengembangan diri hasil pendidikan.

Sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, bahasa Indonesia yang diajarkan adalah:

- 1) Bahasa dengan ciri serta syarat ragam bahasa baku, baik ragam lisan maupun ragam tulisan;
- 2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa kebudayaan, yang berfungsi sebagai bahasa modern.

Sebagai bahasa pengantar, penalaran, dan pengungkapan pengembangan diri, bahasa Indonesia yang dipakai lembaga pendidikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien, yaitu mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara tepat dengan berbagai konotasi;
- 2) Mempunyai bentuk estetis;
- 3) Mempunyai keluwesan sehingga dapat dipergunakan untuk mengekspresikan makna-makna baru;
- 4) Mempunyai ragam yang sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan.

Keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat majemuk dengan adanya bahasa-bahasa daerah yang banyak, yang tersebar di seluruh tanah air, belum dimanfaatkan dalam pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam pengajaran bahasa Indonesia belum diperhatikan sifat komunikatif bahasa dengan memanfaatkan berbagai komponen komunikasi, baik sebagai bahasa yang dipakai dalam proses pengajaran maupun sebagai hasil pengajaran itu sendiri.

Pengajaran sastra di sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran bahasa belum mencapai tujuan yang sesuai dengan fungsinya sebagai pengembangan wawasan nilai kehidupan dan kebudayaan.

Pola kebijakan nasional mengenai pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran pada dasarnya adalah sebuah strategi yang mampu mendidik bahasa Indonesia di dalam mengembangkan tindakan yang mendasar dalam memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran.

2.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

- 1) Dengan memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia ketiga, diusulkan agar mutu pengajaran bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang pendidikan ditingkatkan dengan berbagai macam upaya, seperti (a) meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia, (b) pengembangan bahan bahasa yang sesuai dengan fungsi komunikatif dan interaktif bahasa, kebudayaan, dan serta penalaran dan (c) pemberian pengalaman belajar kepada siswa untuk memperoleh keterampilan dan proses belajar bahasa Indonesia.
- 2) Dengan tujuan memantapkan kedudukan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, pola kebijaksanaan nasional kebahasaan harus disusun. Dengan pola ini perlu dilakukan berbagai tindakan taktis yang terdiri dari (a) penentuan strategi pengajaran guna membentuk keterampilan berbahasa yang berangsur-angsur diikuti dengan sajian pengetahuan kebahasaan pada tingkat-tingkat lanjut pada pendidikan dasar dan menengah, (b) pengembangan tata bahasa panutan, (c) penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar, (d) pemantapan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai persyaratan untuk berbagai macam kenaikan tingkat/pangkat, dan (e) pemanfaatan media massa sebagai model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 3) Pengajaran sastra Indonesia harus lebih ditekankan agar dapat membantu terlaksananya unsur humaniora dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan.
- 4) Bahan pelajaran bahasa Indonesia perlu mencakup latihan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam rangka mengimbangi laju perkembangan karya ilmiah, pengajaran bahasa cepat perlu dikembangkan secara khusus.
- 5) Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia hendaknya memanfaatkan organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat pedesaan dengan tujuan agar (a) pembangunan nasional dibidang kebudayaan, khususnya sector kebahasaan, berlangsung secara efektif dan efisien dan (b) kemampuan warga

- masyarakat dalam bidang kebahasaan dapat meningkat.
- 6) Pembinaan apresiasi sastra perlu dilaksanakan sedini mungkin mulai dari tingkat prasekolah sampai ke perguruan tinggi dan di lingkungan keluarga.
 - 7) Di samping pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan kepada kemampuan secara umum di sekolah dasar dan menengah, perlu pengembangan bahan pengajaran bahasa yang diperlukan bagi bidang-bidang khusus.
 - 8) Pendidikan dalam suasana kedwibahasaan yang strategisnya yang bertujuan menjamin hak hidup bahasa dan kebudayaan daerah hendaknya mempunyai nilai positif.
 - 9) Di dalam kurikulum lembaga pendidikan tinggi hendaknya dimasukkan program pendidikan bahasa Indonesia.
 - 10) Hasil penelitian kebahasaan dan pengajaran bahasa hendaklah disebarluaskan dan dimanfaatkan.
 - 11) Pelaksanaan wajib belajar perlu dimanfaatkan untuk menyukseskan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

3. Pembinaan Bahasa

3.1 Kesimpulan Umum

Pembangunan nasional kita pada hakikatnya adalah usaha mengadakan perubahan dalam segala segi kehidupan bangsa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan nasional itu akan banyak tergantung pada kemampuan bahasa Indonesia memenuhi fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara di samping kemampuan bangsa kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kenyataan yang di hadapi oleh para Pembina bahasa ialah pemakaian bahasa Indonesia di dalam masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga, badan-badan, dan organisasi-organisasi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan Negara, belum menggembirakan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam ilmu, seperti ilmu hukum dan ilmu administrasi, banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Karena bahasa ilmiah itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus terus di perbaiki dan usaha pembakuannya ditingkatkan. Media massa adalah suatu sarana yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa mempunyai pengaruh yang luar di dalam masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun secara lisan, masih memiliki kelemahan. Kecendrungan menghilangkan kata-kata dalam media cetak, misalkannya, sering mengakibatkan makna kalimat menyimpang atau hilang sama sekali. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih ada pemakaian unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak perlu. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sehari-hari oleh masyarakat menunjukkan peningkatan yang pesat dan jumlah orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama semakin meningkat. Namun, tingkat kemampuan bahasa Indonesia secara baik dan benar masih perlu mendapat perhatian para pendidik dan pemakaian bahasa Indonesia.

3.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia dalam semua bidang, terutama bidang hukum dan perundang-undangan, perlu segera digarap secara sungguh-sungguh, terhadap, dan terpadu karena hukum yang dimengerti oleh setiap anggota masyarakat akan lebih menjamin terlaksananya pembangunan nasional secara mantap, lancer, dan tertib.
- 2) Semua aparatur pemerintah, terutama yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan dan pelaksanaan hukum, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang memadai sehingga hukum/undang-undang yang dihasilkan dan yang harus dilaksanakan itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.
- 3) Semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti luraj, guru, juru penerang, penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak, harus memiliki kemampuan dan keterampilan bahasa Indonesia yang baik dan benar, salah satu cara segera di tempuh ialah bahwa setia departemen, lembaga nondepartemen, dan organisasi swasta merencanakan kegiatan kebahasaan sedemikian rupa sehingga setia petugas anggota atau bidang atau badan itu sekurang-kurangnya memiliki keterampilan bahasa Indonesia yang sesiaiu dengan kebutuhannya dalam melaksanakan tugas pembangunan.
- 4) Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah yang memungkinkan terciptanya suasana atau iklim kebahasaan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi utama di Negara Republik Indonesia. Kata atau istilah asing yang tidak perlu, terutama dalam bidang dunia usaha (nama badan usaha, iklan, dan papan pengumuman untuk masyarakat luas), harus segera diusahakan penggan-tiannya dengan kata/atau istilah bahasa Indonesia. Dalam kaitan itu, kerja sama yang terpadu antaa berbagai instansi (Departemen Kehakiman, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan departemen lain, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga masyarakat) sangat diperlukan.
- 5) Generasi muda perlu dibekali dengan sikap dan disiplin berbahasa yang dapat dibanggakan.
- 6) Guna menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, perlu direncanakan penugasan para ahli bahasa atau pemanfaatan ahli bahasa secara maksimal pada berbagai sektor pembangunan.
- 7) Usaha pembinaan bahasa Indonesia secara lebih intensif perlu dilakukan dan diberi prioritas pertama di daerah-daerah yang tingkat kephamannya berbahasa Indonesia masih rendah.
- 8) Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa perlu dimantapkan. Salah satu cara yang mudah ialah menghindari, sekurang-kurangnya mengurangi, pemakaian kata-kata asing dan bahasa daerah dalam hal atau peristiwa yang bersifat nasional.

- 9) Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu ditingkatkan terus, terutama dalam Bulan Bahasa (bulan Oktober setiap tahun).
- 10) Kemampuan dan keterangan bahasa Indonesia para guru, terutama guru bahasa Indonesia, perlu ditingkatkan terus, disamping usaha meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia..
- 11) Buku-buku yang diterbitkan baik yang asli maupun yang terjemahan, surat kabar dan majalah yang diedarkan, serta bahan koleksi perpustakaan hendaklah diusahakan agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 12) Usaha pembinaan bahasa Indonesia perlu direncanakan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga sikap dinamika dan disiplin berbahasa yang baik serta keterampilan berbahasa Indonesia para pemakai bahasa dari seluruh lapisan masyarakat dapat ditingkatkan secara mantap. Guna memungkinkan tercapainya tujuan itu, jalur-jalur formal, nonformal, dan informasi perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, usaha memasyarakatkan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, dan kamus bahasa Indonesia baku perlu dilakukan dengan cara yang lebih baik agar buku-buku pedoman dan buku-buku acuan itu dapat mencapai dan dijangkau masyarakat luas.
- 13) Unsur-unsur bahasa daerah merupakan potensi yang penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, pemanfaatan unsur-unsur bahasa daerah yang dimaksudkan untuk memperkaya bahasa Indonesia itu hendaknya dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri maupun terhadap perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemampuan bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu bangsa harus tetap terjamin dan ketahanan nasional tidak boleh terganggu karena banyaknya unsur bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia.
- 14) Hasi-hasil pembakuan bahasa Indonesia yang telah dicapai oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditunjang dengan instruksi pelaksanaan pada setiap departemen, lembaga, dan organisasi.
- 15) Kongres Bahasa Indonesia Keempat memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia Ketiga agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga nondepartemen supaya wibawa dan ruang geraknya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih berdayaguna.
- 16) Kongres mengusulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam konsep wawasan nusantara karena bahasa Indonesia merupakan unsur utama kebudayaan nasional dan sekaligus berfungsi sebagai sarana komunikasi utama dan pemersatu dalam kehidupan bangsa dan negara.
- 17) Dalam sensus penduduk Indonesia yang akan datang perlu diperoleh data kebahasaan yang sah dan lengkap. Data yang demikian diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
- 18) Kongres penugasan Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa untuk memonitor pelaksanaan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia Keempat dan melaporkan hasilnya kepada Kongres Bahasa Indonesia Kelima yang akan datang.

- 19) Ketentuan mengenai lalu lintas buku dan barang cetakan lain yang tertulis dalam bahasa Indonesia, terutama di kawasan ASEAN, perlu ditinjau kembali

E. Kongres Bahasa Indonesia V 1988

Pada pembukaan kongres ini diluncurkan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil selengkapannya KBI V adalah sebagai berikut.

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA KELIMA Jakarta, 28 Oktober – 3 November 1988

Kongres Bahasa Indonesia Kelima yang pembukaannya diadakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 1988 dan sidang-sidangnya yang berlangsung hingga hari Kamis tanggal 3 November 1988 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dengan memperhatikan pidato peresmian pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto, pada tanggal 28 Oktober 1988. Pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan, pada tanggal 29 Oktober 1988, dan setelah memperhatikan laporan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Anton M. Moeliono, serta mendengarkan dan membahas secara saksama makalah yang disajikan, baik dalam sidang lengkap maupun dalam sidang kelompok, yang berkaitan dengan:

- a. Garis Haluan:
 - (1) Perencanaan bahasa (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing)
 - (2) Pengajaran
 - (3) Bahasa Indonesia di luar jalur formal
 - (4) Sarana penunjang
 - (5) Kerja sama kebahasaan dalam dan luar negeri
 - (6) Pembinaan sumber daya manusia dalam pengembangan bahasa Indonesia
 - (7) Penerjemahan

- b. Ranah pemakaian bahasa:
 - (1) Bahasa dan penalaran
 - (2) Bahasa dan ungkapan rasa
 - (3) Bahasa dan kreativitas
 - (4) Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan ilmu
 - (5) Peran bahasa daerah dalam pembangunan ilmu
 - (6) Sumbangan dan hambatan bahasa asing dalam pengembangan bahasa Indonesia
 - (7) Perkembangan bahasa Indonesia
 - (8) Perkembangan penelitian bahasa Indonesia
 - (9) Laporan penelitian

- c. Pembangunan dan pengembangan sastra:
 - (1) Pemasyarakatan sastra
 - (2) Sastra dalam pendidikan di sekolah dasar
 - (3) Sastra dalam pendidikan di sekolah lanjutan
 - (4) Pengembangan sastra
 - (5) Penelitian sastra
 - (6) Bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra
 - (7) Hubungan sastra Indonesia dan sastra daerah
 - (8) Bahasa Indonesia dalam teater dan film

- d. Bahasa Indonesia di luar negeri
 - (1) Tinjauan dari luar negeri
 - (2) Tinjauan dari dalam negeri

Telah mengambil putusan sebagaimana diperinci di bawah ini:

1. Bahasa

1.1 Simpulan Umum

Kedudukan bahasa Indonesia kini semakin mantap sebagai wahana komunikasi, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan formal. Pemakaian bahasa Indonesia sejak tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi menunjukkan kemantapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, masih cukup banyak pemakai bahasa nasional kita yang belum mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan konteks pemakaian karena itu, pendidikan dan pengajaran bahasa Indo-nesia perlu terus ditingkatkan dan di perluas. Demikian pula penelitian bahasa nasional akan terus berlandaskan temuan penelitian yang terarah dan terpadu.

1.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam konteks budaya yang member penekanan pada prinsip anutan, Kongres menghimbau agar para pejabat lebih berhati-hati dalam memakai bahasa Indonesia sehingga masyarakat mendapat masukan bahasa yang baik dan benar.
- (2) Karena media massa merupakan komunikator pembangunan yang bermanfaat bahasa Indonesia, maka media massa seperti surat kabar dan majalah, hendaknya memiliki tenaga kebahasaan yang khusus membina bahasa siaran sehingga bahasa media massa dapat dijadikan contoh bagi masyarakat.
- (3) Dalam mengembangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ilmiah dan modern, janganlah penutur bahasa terjerumus membentuk sikap nasionalisme sempit yang berlebihan (chauvinisme). Bahasa Indonesia perlu dikembangkan dan dalam perkembangan itu penuturnya tidak usah takut untuk memungut kata baru, baik yang digali dari bumi sendiri maupun yang dari luar sesuai dengan

- keadaan dan keperluan.
- (4) Bahasa Indonesia hendaknya dimasukkan ke dalam delapan jalur pemerataan atau menjadi jalur kesembilan dalam Garis-Garis besar Haluan Negara. Pemberantasan buta bahasa Indonesia perlu digalakkan supaya tidak ada lagi dalam masyarakat Indonesia kelompok yang belum menikmati pemerataan pembangunan
 - (5) Untuk mengikuti perkembangan ilmu, kegiatan penerjemahan buku asing ke bahasa Indonesia perlu di galakkan. Para ahli bahasa dianjurkan mengadakan kerjasama dengan ahli informatika untuk menjajaki dan penyediaan kamus istilah bidang ilmu menjadi prasyarat yang penting.
 - (6) Badan pemerintahan yang mengeluarkan dokumen resmi, seperti undang-undang, hendaknya memperhatikan kaidah bahasa Indonesia sehinggalah bahasa baku dapat dicontoh masyarakat.
 - (7) Politik perbukuan nasional perlu segera disusun karena penerbitan dan perbukuan di Indonesia Yng tidak berkembang akan menghambat pembinaan dan pengembangan bahasa.
 - (8) Sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang mempunyai unsur (1) kebanggaan pada bahasa, (2) kesetiaan pada bahasa, (3) kesadaran akan norma bahasa, masih perlu dipupuk.
 - (9) Putusan Kongres Bahasa Indonesia Keempat mengenai penghapusan pemakaian bahasa asing pada papan nama gedung umum, seperti toko, dikukuhkan lagi, dengan mengajurkan kepada semua pemerintah daerah supaya lebih tegas dalam menaerakan peraturan mengenai hal tersebut.
 - (10) Pengerahan ,pembinaan, dan pendidikan tenaga kebahasaan termasuk pengaderan perlu dilakukan dengan berencana.
 - (11) Pesan yang disampaikan kepada masyarakat tentang konsep-konsep pembangunan harus menggunakan bahasa yang akrab, dan isi pesan pembangunan harus relevan dengan keperluan khalayak serta sesuai dengan daya tangkap masyarakat.
 - (12) Untuk keperluan pengujian kemampuan berbahasa Indonesia, hendaknya disusun bahasa ujian bahasa Indonesia yang bersifat nasional (yang sejenis dengan ujian TOFEL)
 - (13) Penggunaan bahasa ilmiah yang tepat, lugas, dan logis di kalangan peneliti perlu dibiasakan.
 - (14) Mengigigit pembinaan umat beragama merupakan bagian yang penting dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan bahasa Indonesia merupakan sarana dalam kehidupan beragama, maka pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan agama harus terus di tingkatkan dan harus dikoordinasikan dengan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah umum.
 - (15) Penelitian kebahasaan di Indonesia menghadapi banyak kendala, seperti perpustakaan yang belum memadai, tenaga peneliti yang perlu meningkatkan ilmunya, dan rendahnya kemampuan berbahasa asing peneliti. Instansi pendidikan tinggi diharapkan memperhatikan sarana fisik yang diperlukan dan mengusahakan peningkatan mutu peneliti sehingga penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan segala persyaratannya.
 - (16) Dengan telah diterbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku

Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diharapkan dapat mengembangkannya dan, jika perlu, menyempurnakannya.

- (17) Untuk buku pelajaran sekolah diperlukan penulisan tata bahasa yang sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memakai Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia sebagai acuannya.

2. Sastra

2.1. Simpulan Umum

Sastra, jika ditinjau dari fungsinya, dapat memberikan kepuasan dan pendidikan bagi pembacanya. Jika diapresiasi dengan baik, karya sastra dapat menambah pengetahuan pembaca tentang kehidupan, pengenalan manusia, kebudayaan, kesenian, dan bahasa. Sastra dapat memberikan pelajaran yang praktis tentang berbagai cara menggunakan bahasa. Sastra juga mengembangkan imajinasi dan fantasi sesuatu hal yang kerap dilupakan dalam peningkatan kualitas intelektual peserta didik dan pembaca pada umumnya. Karena itu, prosa, puisi, drama, dan karya sastra pada umumnya, selain dapat dijadikan wahana pengembangan dan penyebaran bahasa Indonesia yang kreatif dan dinamis, dapat pula meningkatkan kecerdasan dan memenuhkan manusia.

Bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastra menunjukkan adanya tumpang tindih kode ucapan sastra yang kadang-kadang menyalahi kaidah bahasa yang baku. Hal itu disebabkan oleh keperluan penyampaian pikiran dalam karya sastra. Pada umumnya, bahasa yang diperlukan dalam karya sastra berbeda dari bahasa dalam karya yang bukan sastra. Karena itu, para pembaca patutlah menyadari hal itu agar tidak selalu ada kesalahpahaman dalam penerimaan maksud dan tujuannya.

Sastra dapat dimanfaatkan dalam pendidikan bangsa. Jadi, mutu karya sastra Indonesia dan daerah, perlu juga ditingkatkan. Penelitian dalam bidang sastra perlu digalakkan agar perkembangan, mutu, bahkan variasi sastra dapat tetap dipantau demi pembinaan dan pengembangan sastra pada umumnya.

2.2. Tindak Lanjut

- (1) Cara konkret untuk menaikkan mutu dan jumlah karya sastra perlu diupayakan.
- (2) Pendidikan intelektual secara terencana dan terarah perlu dikembangkan agar dapat menumbuhkan selera intelektual dan sekaligus melahirkan minat baca sastra.
- (3) Tradisi pasyarakat sastra melalui forum pertemuan ilmiah, pementasan drama, serta pembacaan sajak dan novel perlu dirintis.
- (4) Keberanian mengajak semua lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengenal karya sastra perlu dikukuhkan kembali.
- (5) Untuk menarik minat pembaca terhadap sastra perlu diciptakan terbitan yang memperlihatkan "Wajah Indonesia dalam Sastra" yang merupakan hasil penelitian sastra Indonesia, dan "Sastra Budaya Bangsa", yang merupakan hasil penelitian sastra daerah. Kedua terbitan itu diharapkan dapat ditampilkan pada

- Kongres Bahasa Indonesia Keenam.
- (6) Perencanaan pembinaan dan pengembangan sastra dalam menentukan arah perkembangan sastra di Indonesia perlu disusun.
 - (7) Buku teori dan kritik sastra yang relevan dengan karya sastra Indonesia, yang dapat dipakai sebagai acuan bagi para guru sastra dan peneliti sastra perlu disusun.
 - (8) Penelitian puisi, prosa, drama perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan pola penelitian sastra yang menyeluruh, terpadu, dan bertahap, dengan program yang terperinci yang dapat memberikan gambaran kesastraan
 - (9) Tenaga peneliti sastra perlu dididik dan kembangkan wawasannya. Mata kuliah metode penelitian sastra sebaiknya diwajibkan di setiap perguruan tinggi yang mempunyai jurusan sastra dan bahasa agar tumbuh barisan peneliti yang berkualitas
 - (10) Kritikus sastra perlu disertakan dalam penyusunan kurikulum sekolah lanjutan untuk ikut menentukan karya-karya yang cocok bagi pengajaran

3. Pengajaran Bahasa

3.1. Simpulan Umum

Tujuan pendidikan bahasa Indonesia adalah membina keterampilan peserta didik bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan mutu manusia Indonesia sebagai bekal menghadapi kehidupan masa kini dan mendatang. Tujuan pendidikan bahasa Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam mencapai tujuan pendidikan bahasa Indonesia, kurikulum bahasa, buku pelajaran bahasa, metode belajar-mengajar bahasa, guru, lingkungan keluarga serta masyarakat, dan perpustakaan sekolah memegang peranan penting. Kurikulum bahasa harus luwes dan dapat mengembangkan kreativitas guru dalam kegiatan belajar-mengajar; isi dan cara penyajian buku pelajaran bahasa harus menarik dan menunjang pembinaan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar; metode belajar-mengajar harus dapat menumbuhkan interaksi guru peserta didik sedemikian rupa sehingga mengembangkan didikan kekritisannya, kekreatifannya, serta keresponsifannya peserta didik dalam menghadapi pelajaran dan kehidupan; guru bahasa dan guru nonbahasa di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, serta lingkungan keluarga dan masyarakat, harus dapat memberikan teladan berbahasa dengan baik dan benar, dan jumlah serta jenis buku perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan.

Bahasa daerah di wilayah tertentu dapat dijadikan mata pelajaran tanpa mengganggu pendidikan bahasa Indonesia. Karena itu, kurikulum, buku pelajaran, metode pengajaran, dan sarana pendidikan bahasa daerah perlu dikembangkan.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah terutama dengan tujuan membina kemampuan memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diungkapkan dalam buku atau terbit yang berbahasa asing.

3.2. Tindak Lanjut

- (1) Kurikulum bahasa yang berlaku di sekolah dasar menengah perlu segera disempurnakan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosio-linguistik bahasa serta keluwesan dan kesinambungan isi
- (2) Pendidikan dan pengajaran bahasa hendaknya lebih menekankan keterampilan berbahasa dan aspek apresiasi sastra dari pada aspek teori kebebasan
- (3) Buku pelajaran bahasa yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah dasar dan menengah perlu segera ditingkatkan isi, mutu, serta cara penyajian
- (4) Untuk meningkatkan serta memperluas wawasan guru bahasa di sekolah dasar dan menengah perlu segera disusun dan dikembangkan berbagai buku acuan seperti buku panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata bahasa pedagogis, dan panduan pengajaran bahasa komunikatif. Di samping itu, penataran guru bahasa perlu ditingkatkan dalam hal pengelolaan, kurikulum, metode, penyusunan bahan pelajaran
- (5) Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi di luar jurusan sastra Indonesia hendaknya merupakan kebijakan nasional dan dipandukan dalam mata kuliah dasar umum
- (6) Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman dan informasi
- (7) Pemerintah Indonesia perlu membantu pengembangan lembaga pendidikan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja sama, antara lain dengan ikut menyediakan tenaga pengajar Indonesia untuk mengajar di luar negeri menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan kepada para sastra yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia
- (8) Pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan

4. Pengajaran Sastra

4.1. Simpulan Umum

Simpulan umum yang ditetapkan dalam pengajaran sastra adalah sebagai berikut:

- (1) Diperlukan kesempatan yang lebih luas untuk mendorong kreativitas guru dan peserta didik di dalam pelaksanaan pengajaran sastra fungsi kurikulum pengajaran bahasa Indonesia sebagai pedoman pengajaran tidak menjelma menjadi kendali yang terlalu ketat yang menghilangkan ruang gerak bagi inisiatif guru dan peserta didik.
- (2) Pengajaran sastra Indonesia sebagai pengajar yang struktural fungsional dibangun di atas landasan ilmu sastra yang relevan, hasil sastra, dan ilmu pendidikan.

- (3) Tujuan pengajaran sastra adalah menumbuhkan dan mengembangkan akal budi peserta didikan melalui kegiatan pengalaman sastra, yaitu berapresiasi dan berekspresi sastra, dan melalui kegiatan penelaahan masalah sastra sehingga timbul kegemaran membaca dan menghargai sastra sebagai sesuatu yang bermakna bagi kehidupan.
- (4) Bahan pengajaran sastra selayaknya mencakupi:
 - a. Karya sastra, berupa cerita rekaman, puisi, dan drama, yang telah terpilih dari segi kualitas dengan mempertimbangkan keragaman dalam hal jenis bentuk, tema, serta zaman, dan tingkat kesulitan serta kesesuaiannya dengan keadaan peserta didik.
 - b. Pengetahuan tentang sastra (teori dan sejarah sastra) sebagai perlengkapan berfikir peserta didik yang berguna untuk memperoleh pengalaman dan penikmatan sastra yang lebih mendalam. Bahan tersebut dapat menghindari pengetahuan yang semata-mata teoritis yang menjadi beban hafalan.
- (5) Dalam pengajaran sastra diperlukan proses belajar-mengajar yang sekaligus melibatkan pengalaman, penge-tahuan, dan penilaian peserta didikan terhadap sastra secara langsung sehingga terjadi interaksi dinamis antara peserta didikan, karya sastra, dan guru. Kegiatan belajar menjadi media untuk melahirkan dan menguji gagasan serta melakukan penerokaan dan pemikiran lebih lanjut tentang sastra dan hubungannya dengan kehidupannya.
- (6) Guru sastra memerlukan keleluasaan mempersiapkan diri berupa membaca dan memilih karya sastra, menyusun bahan, dan menciptakan model pengajaran, serta melak-sanakan dan mengevaluasi hasilnya. Tugasnya menga-jarkan sastra yang dirangkap dalam mengerjakan bahasa tidak dapat dijalankan dengan leluasa. Karena itu, hendaknya diadakan pembagian tugas di antara para guru, yaitu guru yang bertugas sebagai pengajar sastra dan guru yang bertugas sebagai pengajar bahasa.
- (7) Para peserta didikan diwajibkan membaca karya sastra yang sudah terpilih sebagai bahan pengajaran sastra. Di dalam kelas peserta didikan diberi keleluasaan melahirkan pendapatnya sendiri. Dengan bimbingan guru peserta didikan menemukan butir persamaan dari pendapat itu dalam rangka membangun makna sastra bagi dirinya sendiri.
- (8) Tersedianya buku dan majalah yang berisi karya sastra. Khususnya yang telah terpilih sebagai bahan pengajaran sastra, merupakan syarat untuk menyelenggarakan pengajaran sastra. Hendaknya disetiap sekolah tersedia bahan berupa karya sastra dengan jumlah yang mencukupi keperluan belajar peserta didikan.
- (9) Hubungan antara sastra Indonesia dan berbagai ragam sastra Nusantara sangat erat. Pengajaran sastra yang memerlukan karya sastra Indonesia dan daerah dalam satu Wawasan Sastra Nusantara, akan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didikan akan Wawasan Nusantara.

4.2. Tindak Lanjut

- (1) Bahan pengajaran sastra selayaknya dikurangi sehingga guru dan peserta didikan untuk melakukan pembinaan dan kreativitas

- (2) Para guru perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan kegiatan membaca karya sastra dan meningkatkan kreativitasnya dalam mengajarkan sastra
- (3) Di lingkungan sekolah perlu diambil inisiatif intern untuk mengadakan pembagian tugas di antara para guru sehingga pengajaran bahasa dan pengajaran sastra tidak dirangkap oleh seorang guru
- (4) Hendaknya disusun senarai buku sastra (cerita rekaan, puisi, dan drama) yang wajib dibaca oleh peserta didik pada setiap jenis dan jenjang sekolah. Buku karya sastra yang diwajibkan itu harus tersedia di setiap sekolah
- (5) Perlu dilakukan penelitian dan penyusunan bahan pengajaran sastra untuk setiap jenis dan jenjang persekolahan
- (6) Mengingat pengajaran drama di sekolah harus ditangani oleh orang yang mengerti dan mampu bermain drama, diusulkan agar dibuka jurusan drama di lembaga pendidikan tinggi yang memberikan kewenangan kepada lulusnya untuk menjadi guru drama di sekolah.

F. Kongres Bahasa Indonesia VI 1993

Semakin lama jumlah peserta dan makalah yang dibahas dalam KBI semakin bertambah. Hasil KBI VI adalah sebagai berikut.

PUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA KEENAM Jakar, 28 Oktober – 2 November 1993

Kongres Bahasa Indonesia Keenam, yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta, dari tanggal 28 Oktober s/d tanggal 2 November 1993 dan diikuti oleh 770 peserta dari seluruh Indonesia dan 52 peserta dari luar negeri (Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Hongkong, India, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Singapura), membahas pokok-pokok masalah sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Peran bahasa dan sastra dalam pembangunan bangsa
 - (1) Bahasa Indonesia dan Pembangunan Nasional
 - (2) Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara
 - (3) Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
 - (4) Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Keagamaan
 - (5) Bahasa Indonesia dan Generasi Muda
 - (6) Bahasa Indonesia dan Peran Wanita
 - (7) Bahasa Indonesia dan Kesehaan Nasional
 - (8) Sastra dalam Kehidupan Masyarakat
 - (9) Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000
 - (10) Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - (11) Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- b. Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - (1) Pengembangan Laras Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
 - (2) Pengembangan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia melalui Penerjemahan
 - (3) Kehidupan Bahasa dan Sastra di Indonesia
 - (4) Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - (5) Karya Kebahasaan dan Kesastraan sebagai Sarana Pengembangan Bahasa
 - (6) Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan bahasa daerah
 - (7) Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bahasa Asing
 - (8) Penerjemahan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern

- c. Pembinaan Bahasa dan Sastra
 - (1) Penyuluhan Bahasa dan Sastra
 - (2) Peran Organisasi/Masyarakat profesi dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - (3) Sumbangan/Peranan Media Massa dalam Pembinaan dan Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - (4) Strategi Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui Organisasi Profesi
 - (5) Strategi Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa
 - (6) Penyuntingan dan Peningkatan Bahasa Sastra Indonesia
 - (7) Penerbitan dan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
 - (8) Penerbitan sebagai Sarana Utama Pemasyarakatan Hasil Pengembangan

- d. Pengajaran Bahasa dan Sastra
 - (1) Pengajaran bahasa dan sastra Indonesia
 - (2) Pendidikan sekolah sebagai jalur pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa

- e. Perkembangan Bahasa Indonesia di luar negeri
 - (1) Perkembangan pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri
 - (2) Perkembangan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing
 - (3) Peningkatan peran pengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing
 - (4) Unsur budaya Indonesia dalam materi pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing
 - (5) Perkembangan bahasa serumpun
 - Dengan memperhatikan:
 - a. Sumpah Pemuda 1928
 - b. Undang-undang Dasar 1945 (khusus Pasal 36 beserta penjelasan)
 - c. Putusan Kongres Bahasa Indonesia Pertama s/d Kelima
 - d. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993
 - e. Pidato Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda ke-65, pembukaan Kongres Pemuda/Komite Nasional Pemuda Indonesia VII, dan pembukaan Kongres Bahasa Indonesia Keenam pada tanggal 28 Oktober 1993 di Balai Sidang Hilton Jakarta

f. Makalah-makalah yang disajikan dan dibahas

Makalah-makalah yang disajikan dan dibahas di dalam sidang paripurna, yaitu:

- (1) Laporan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- (2) Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa oleh Ir. Azwar Anas, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (3) Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, Menteri Negara Riset dan Teknologi
- (4) Bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan oleh Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- (5) Bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan negara: Akar dan dampak ideologis istilah-istilah politik oleh Drs. Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara
- (6) Peranan psikologi dalam pembinaan bahasa dan sastra oleh Prof. Dr. Fuad Hassan, Anggota Dewan Pertimbangan Agung
- (7) Peranan bahasa Indonesia dalam persatuan dan kesatuan bangsa oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) M. Yogie SM, Menteri Dalam Negeri
- (8) Bahasa Indonesia dalam perencanaan pembangunan nasional oleh Ir. Drs. Ginanjar Kartasmita, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas
- (9) Bahasa Indonesia dan Generasi Muda oleh Hayono Isman, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
- (10) Bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Machmud Subarkah, Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional
- (11) Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati, Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan kebudayaan
- (12) Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000 oleh Dr. Hasan Alwi, Kepala Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- (13) Kesenambungan dan Kebijakan Bahasa Nasional oleh Prof. Dr. Amran Halim, Rektor Universitas Sriwidjaya
- (14) Bahasa Indonesia dalam kegiatan keagamaan oleh Dr. H. Hasbullah Mursyid, Kepala Badan Penelitian dan pengembangan, Departemen Agama
- (15) Pengembangan Laras Bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern oleh Dr. Anton M. Moeliono, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia
- (16) Sastra Indonesia dan pembinaan generasi muda oleh Emha Ainun Nadjib, Sastrawan
- (17) Sastra dalam kehidupan masyarakat Indonesia oleh Goenawan Mohammad, Sastrawan
- (18) Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Dr. Boediono, Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Makalah-makalah yang disajikan dibahas di dalam sidang kelompok dan diskusi panel; dan
 - b. Pandangan, tanggapan, usul, dan saran para peserta:

Kongres Bahasa Indonesia Keenam, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kesepakatan dan mengambil putusan tersebut di bawah ini:

1. Bagian Umum

- 1.1 Masalah kebahasaan di Indonesia merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pemanfaatan bahasa asing. Ketiga kelompok masalah bahasa itu merupakan masalah yang memiliki hubungan timbal balik dan, karena itu, tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, ketiga kelompok masalah bahasa itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena masalah bahasa itu menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat, semua instansi pemerintah, semua badan usaha, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan sektor swasta dan semua organisasi atau badan lain, pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional itu memerlukan dukungan kelembagaan yang memiliki wewenang, ruang gerak, dan daya jangkauan secara nasional pula. Dengan demikian, untuk mengelola keseluruhan masalah bahasa di Indonesia itu diperlukan satu kebijaksanaan Bahasa Nasional, yaitu kebijaksanaan nasional dalam bidang kebahasaan.
- 1.2 Kebijakan bahasa nasional itu perlu mencakup batasan dan ketentuan mengenai:
 - (1) Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 maupun sebagai bahasa negara sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang dasar 1945, serta pembinaan, pengembangan, pengajaran, dan pemujiannya.
 - (2) Kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai unsur kebudayaan Indonesia yang hidup, sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Undang-undang Dasar 1945, serta pembinaan, pengembangan, pengajaran, dan pelestarian; dan
 - (3) Kedudukan dan fungsi bahasa asing di Indonesia serta pengajaran dan/atau pemanfaatannya.
- 1.3 Kebijakan bahasa nasional itu perlu dilengkapi dengan rencana strategi jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan tahunan dengan sasaran-sasaran yang jelas, yang disusun secara realistis sehingga tujuan yang hendak dicapai benar-benar dapat diraih.
- 1.4 Supaya benar-benar dapat berfungsi sebagai garis haluan dan patokan dalam pengelolaan masalah di Indonesia, kebijaksanaan bahasa nasional itu perlu dirumuskan secara berencana, terarah, terinci, terpadu, dan menyeluruh dalam bentuk undang-undang kebahasaan Indonesia.
- 1.5 Untuk mengelola semua persoalan kebahasaan dan melaksanakan undang-undang kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 4, Kongres Bahasa Indonesia Keenam berpendapat bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu segera ditingkatkan menjadi lembaga nondepartemen dengan nama Lembaga Kebahasaan Indonesia, yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
- 1.6 Oleh karena masalah kebahasaan di Indonesia itu merupakan masalah nasional dan menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat, Lembaga Kebahasaan

Indonesia yang dimaksud pada butir 5 di atas perlu dilengkapi dengan dewan atau badan pertimbangan kebahasaan yang bertugas pokok memberikan pertimbangan kebahasaan, diminta atau tidak diminta, kepada Ketua Lembaga Kebahasaan itu terdiri dari para ahli bahasa, ilmuwan, dan tokoh-tokoh masyarakat baik dari lingkungan pemerintah maupun dari lingkungan masyarakat umum.

- 1.7 Supaya benar-benar memiliki daya jangkauan nasional dan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, Lembaga Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 5 di atas perlu ditunjang dengan lembaga sejenis dengan nama Balai Kebahasaan Indonesia sebagai penunjang Lembaga Kebahasaan Indonesia bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tetapi berfungsi di bawah koordinasi Lembaga Kebahasaan Indonesia.
- 1.8 Untuk memasyarakatkan putusan kongres dan mengambil langkah-langkah persiapan yang diperlukan bagi penyusunan Undang-undang Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 4 di atas dan pembentukan Lembaga Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 5 di atas, Kongres Bahasa Indonesia Keenam membentuk Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia Keenam yang tersusun sebagai berikut:
 1. Prof. Dr. Amran Halim (Ketua merangkap Anggota)
 2. Ilem Surianegara (Wakil Ketua merangkap Anggota)
 3. Dr. Hasan Alwi (Sekretaris merangkap Anggota)
 4. Prof. Dr. Anton M. Moeliono (Anggota)
 5. Basyuni Suriamiharja (Anggota)
 6. Hans E. Kawuluan (Anggota)
 7. Imam Sukarsono, SH (Anggota)
 8. Dr. Mien A, Rifai (Anggota)
 9. Prof. Dr. Saparinah Sadli (Anggota)
 10. Dr. Sapardi Djoko Damono (Anggota)
 11. Prahastoeti Adhitama, MA (Anggota)

2. Bagian Khusus

2.1 Peran bahasa dan sastra dalam pembangunan bangsa

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memantapkan perannya sebagai sarana pembangunan nasional, penyelenggaraan negara, pendidikan, kegiatan keagamaan, dan peningkatan partisipasi generasi muda serta sebagai sarana pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional.

Dalam perjuangan bangsa Indonesia menghadapi era lepas landas, peran bahasa dan sastra Indonesia perlu dimantapkan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tindak Lanjut

- (1) Sebagai anutan masyarakat, hendaknya para penyelenggara negara dan pemerintah memberikan teladan dalam teldan dalam berbahasa Indonesia yang

baik dan benar

- (2) Karena Bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi bahasa Negara Republik Indonesia, administrasi kenegaraan, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus dilaksanakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar
- (3) Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik hendaknya dijadikan syarat dalam penerimaan pegawai dan kenaikan pangkat/jabatan
- (4) Penanaman sikap positif terhadap bahasa Indonesia bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia, melainkan juga tugas guru semua bidang studi. Oleh karena itu, guru bidang studi harus membantu membina sikap positif peserta didik
- (5) Organisasi kepemudaan sebaiknya memasukkan upaya pembinaan bahasa Indonesia dalam program organisasinya dan melatih disiplin berbahasa Indonesia, antara lain melalui perlombaan, penulisan karya tulis, dan pertemuan
- (6) Perlu dipikirkan pola pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda, seperti yang telah digunakan dalam pemasyarakatan P-4
- (7) Organisasi kebahasaan, seperti Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Masyarakat linguistik Indonesia (MLI), dan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI), serta organisasi kepemudaan diharapkan ikut membantu upaya membina anggota masyarakat yang masih buta bahasa Indonesia yang diperkirakan berjumlah 17 persen
- (8) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan
- (9) Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa perlu menyusun rencana untuk menemukan ciri khas ragam lisan yang baku. Hal ini perlu dilakukan agar kesenjangan antara ragam bahasa tulis dengan ragam bahasa lisan dapat diperkecil
- (10) Kegiatan apresiasi sastra di kalangan masyarakat perlu diusahakan antara lain melalui pertemuan ilmiah, pementasan drama, dan perlombaan
- (11) Dalam kaitannya dengan sastra Indonesia sebagai penapis pengaruh kebudayaan asing, upaya penelitian dan pemasyarakatan sastra Nusantara harus terus digalakkan. Selain itu, mutu dan jumlah hasil karya sastra Indonesia, mutu dan jumlah ahli sastra dan pengajaran sastra, serta minat menikmati karya sastra harus terus ditingkatkan
- (12) Putusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1976 perlu dipertimbangkan dalam merumuskan Kebijakan Bahasa Nasional
- (13) Putusan Kongres Bahasa Indonesia terdahulu yang belum terlaksana perlu ditindaklanjuti
- (14) Pemakaian bahasa asing untuk nama dan kegiatan badan usaha yang makin lama makin meluas menunjukkan sikap yang kurang menghargai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, instansi pemerintah yang berwenang perlu melaksanakan Pasal 36 Undang-undang Dasar 1945 dengan taat asas dalam pemberian izin usahanya.

2.2 Pengembangan bahasa dan sastra

Kebudayaan nasional sebagian besar telah terwujud dalam berbagai pranata kemasyarakatan seperti sistem politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan berbagai

ungkapan seni. Semuanya itu diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Disamping itu, terdapat beratus-ratus bahasa daerah yang menjadi bagian kebudayaan kita dan digunakan untuk mengungkapkan berbagai prana kemasyarakatan tersebut. Beberapa bahasa asing juga digunakan dalam berbagai fungsi tertentu.

Pelambangan dunia gagasan dan nilai menuntut berbagai laras bahasa yang diperlukan oleh peradaban modern yang dicoraki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pemanfaatan kekayaan bahasa sebagai sarana ekspresi seni tercipta dalam sastra.

Putusan hubungan pengarang dengan sumber sastra daerahnya akan mengakibatkan pemiskinan batin. Oleh karena itu berbagai bentuk sastra klasik dan sastra lisan, misalnya wayang dan drama tradisional, yang merupakan bagian sejarah sastra kita, perlu dipelihara dan dikembangkan sebagai milik budaya bersama.

Penelitian berbagai aspek bahasa Indonesia mempunyai peranan penting bukan hanya untuk menambah wawasan dan pemahaman kita tentang hakikat dan cara kerja bahasa Indonesia, melainkan juga untuk memberikan landasan yang lebih kokoh pada pengajaran dan penyuluhan bahasa. Hanya pemahaman yang tepat tentang seluk-beluk bahasa Indonesia dapat mendukung pengajaran dan penyuluhan yang efektif, yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap dan wawasan yang positif dan apresiatif serta penggunaan bahasa yang mantap dan cendikia.

Penerjemahan buku secara terencana perlu segera dilancarkan karena, untuk jangka waktu yang lama, keterbatasan penguasaan bahasa asing masih akan merupakan hambatan untuk menyerap pengetahuan yang disajikan dalam buku-buku berbahasa asing.

Tindak Lanjut

- (1) Kegiatan penelitian bahasa dan sastra perlu ditingkatkan dalam jumlah dan mutu untuk memantapkan upaya pengembangan bahasa dan sastra.
- (2) Karena ada kesejajaran dalam hubungan timbal balik antara pencendekiaan laras bahasa keilmuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ilmuwan hendaknya mengembangkan laras bahasa keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Demi pemantapan laras bahasa keilmuan yang memerlukan kosakata dan peristilahan khusus, usaha penyusunan daftar istilah ilmiah dan kamus bidang ilmu perlu ditingkatkan.
- (4) Penjelasan Pasal 36 Undang-undang Dasar 1945 tentang "pemeliharaan bahasa daerah" perlu dirumuskan tindakan operasinya.
- (5) Usaha penerjemahan, baik yang menyangkut karya ilmiah maupun yang menyangkut karya sastra, memerlukan prasarana kamus dwibahasa dan daftar peristilahan. Karena itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu merencanakan penyusunan kamus dan daftar istilah bagi kemudahan para penerjemah.
- (6) Untuk memberi kesempatan mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan karya tulis, pengarang perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya.
- (7) Untuk meluaskan kesempatan menambah ilmu pengetahuan serta meluaskan cakrawala, perlu disusun panitia khusus yang bertugas melaksanakan seleksi

- penerjemahan, penerbit, dan pemasaran karya sastra dan pustaka dunia yang terkenal.
- (8) Sebagai upaya pengadaan bahan sastra klasik nusantara, perlu disusun buku ajar sastra nusantara untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan:
 - a) Mengadakan seleksi bahan bacaan sastra dan budaya, sesuai dengan penilaian kelompok pendukung budaya yang bersangkutan.
 - b) Menyusun, menyadur, menerjemahkan, menjelaskan, dan memberi catatan pada bahan, sesuai dengan jenis, jenjang, dan tingkat pendidikan peserta didik.
 - (9) Perlu diwujudkan kebijaksanaan yang mewajibkan bahan-bahan sastra dan kebudayaan klasik nusantara sebagai bagian dan kurikulum nasional.
 - (10) Perlu diusahakan agar setiap daerah memiliki majalah budaya dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang diusahakan oleh pemerintah dengan imbalan yang memadai jangkauan luas.
 - (11) Sastra klasik nusantara perlu diterjemahkan, disadur, dan diterbitkan secara teratur dengan memanfaatkan berbagai media elektronik dan cetak yang memiliki jangkauan luas.
 - (12) Perpustakaan pusat/daerah perlu dijadikan sarana aktif untuk promosi bacaan, khususnya bagi generasi muda. Fungsinya sebagai pusat penyimpanan hasil penerbitan harus dengan fungsi sebagai pusat penyebaran.

2.3 Pembinaan bahasa dan sastra

Pembinaan bahasa dan sastra adalah usaha untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi sastra. Secara konkrit usaha ini mencakup, antara lain, penyuluhan dan penerbitan oleh pelbagai pihak, termasuk oleh media massa dan organisasi profesi. Usaha tersebut telah dilaksanakan selama beberapa tahun ini, namun hasilnya belum memuaskan. Oleh sebab itu, melalui strategi yang dapat diharapkan akan kemajuan dan hasil yang lebih memuaskan.

Kehidupan dan perkembangan sastra hingga saat ini belum begitu mengembirakan. Oleh karena itu, iklim yang memungkinkan sastra itu hidup dan berkembang perlu segera diciptakan sehingga masyarakat luas sekurang-kurangnya dapat mengapresiasi karya sastra.

Sehubungan dengan itu, pembinaan sastra Indonesia hendaknya diarahkan agar masyarakat bahasa memiliki minat baca dan kegemaran menulis yang tinggi.

Pembinaan bahasa Indonesia melalui kegiatan penyuluhan, walaupun belum memberikan hasil yang diharapkan, tetap merupakan cara yang ampuh untuk mengubah sikap berbahasa para pemakai bahasa Indonesia yang belum atau kurang positif.

Sebagai media komunikasi yang mempergunakan bahasa, media massa telah membuktikan diri sebagai sarana yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Disamping itu, dunia pers dapat memainkan yang lebih besar dalam meningkatkan sikap positif dan apresiatif serta menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih cendikia dengan mengungkapkan bahasa secara lebih rasional dan berpegang pada konvensi bahasa yang sudah baku. Oleh sebab itu, peranan media

massa sebagai penyebar sekaligus sebagai tolak ukur penggunaan bahasa yang baik dan benar harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sejak kebangkitan nasional pada awal abad ini, tenaga profesi seperti dokter, insinyur, dan pedagang sudah memainkan peranan yang sangat menentukan dalam mengobarkan semangat kebangsaan, antara lain dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan

Kini dalam alam kemerdekaan, lebih-lebih dalam menghadapi era lepas landas, tenaga profesi dan organisasi profesi, seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, akan tetap berperan dalam meningkatkan sikap bahasa yang positif dan apresiatif serta dalam menggalakkan penggunaan bahasa yang kreatif dan bermutu. Di samping itu, organisasi-organisasi itu juga akan berperan sebagai pendorong peluasan penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu dan teknologi, baik yang menyangkut wacana ilmiah maupun yang berhubungan dengan tata istilah.

Organisasi profesi kebahasaan, seperti HPBI, HISKI, dan MLI, harus berusaha mengembangkan potensinya sebagai sarana pembina dan pengembang bahasa dan sastra, khususnya yang menyangkut kepakaran dan sumber manusia.

Tindak Lanjut

- (1) Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa perlu membina kerja sama yang luas dengan berbagai lembaga, terutama dengan perguruan tinggi dan media massa.
- (2) Hasil-hasil pengembangan bahasa, seperti pedoman pembentukan istilah, daftar istilah, dan kamus-kamus istilah, perlu diterbitkan dan disebarluaskan melalui toko-toko buku.
- (3) Untuk dapat menghasilkan terbitan yang mutunya baik dan segi isi dan bahasanya, perlu diupayakan buku-buku acuan kebahasaan seperti pedoman pemakaian bahasa yang baik dan benar, pedoman penulisan laporan ilmiah, pedoman penyuntingan, dan berbagai jenis kamus
- (4) Untuk memacu kegiatan penerbitan karya-karya ilmiah, baik artikel maupun buku, perlu diupayakan pelatihan pendidikan secara berencana bagi peneliti dan penyunting.
- (5) Agar penyuluhan lebih efektif dan efisien, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu diupayakan pelatihan dan pendidikan secara berencana bagi peneliti dan penyunting.
- (6) Bahan penyuluhan perlu disiapkan dalam kemasan yang menarik bagi sikap berbahasa yang positif, keterampilan berbahasa yang baik, minat baca yang tinggi, dan apresiasi sastra yang baik.
- (7) Ketersediaan tenaga penyuluh yang handal sangat diperlukan, terutama bagi para peserta didik di semua jenis dan jenjang pendidikan sekolah.
- (8) Strategi pemasyarakatan yang lebih tepat perlu disusun agar penyuluhan dapat dilaksanakan lebih efektif.
- (9) Pertemuan berkala perlu diadakan antar guru sastra dan ahli sastra/sastrawan guna meningkatkan kemampuan apresiasi dalam rangka tugas guru.

- (10) Untuk meningkatkan sikap positif dan menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih cendikia, media cetak dianjurkan menyediakan rubrik bahasa sebagai sarana pembaca untuk berdialog mengenai bahasa.
- (11) Dalam memperkaya bahasa Indonesia dunia telah menunjukkan kepeloporannya dalam menerima unsur sarapan. Bagi perkembangan bahasa, hal itu sama sekali tidak merugikan. Namun, pengguna bahasa dalam pers dianjurkan juga menggali kekayaan bahasa dari bahasa serumpun dan bahasa daerah.
- (12) Selain penguasaan bahasa, minat terhadap sastra hendaknya menjadi bahan pertimbangan khusus dalam menerima calon wartawan.
- (13) Setiap media massa dianjurkan untuk mengangkat redaktur khusus bahasa agar pemantau dan evaluasi atas bahasa yang dipergunakan dapat dilakukan secara lebih efektif.
- (14) Agar peran serta organisasi profesi dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dapat tetap dipertahankan, kepakaran para anggotanya perlu ditingkatkan, antara lain melalui kegiatan pertemuan ilmiah dan karya tulis ilmiah.
- (15) Kegiatan rutin organisasi profesi kebahasaan harus didukung dana dan kepakaran manajemen. Organisasi profesi itu perlu kerja sama membentuk pusat karier untuk menyalurkan tenaga-tenaga kebahasaan sehingga pengangguran dan kemubaziran tenaga kebahasaan dapat dicegah.

2.4 Pengajaran bahasa dan sastra

Tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah membina kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta kemampuan apresiasi karya sastra Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu manusia Indonesia sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan masa kini dan mendatang. Tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tujuan pendidikan nasional

Dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, kurikulum, buku pelajaran, metode pengajaran, evaluasi pengajaran, guru, perpustakaan sekolah, dan lingkungan keluarga serta masyarakat memegang peranan penting. Kurikulum bahasa dan sastra harus luwes dan memungkinkan guru dan peserta didik mengembangkan kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar. Isi dan cara penyajian buku pelajaran harus menarik dan menunjang pembinaan kemampuan dan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar serta meningkatkan kemampuan apresiasi sastra. Metode belajar mengajar harus dapat mengembangkan interaksi guru peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik mempunyai sikap kritis, kreatif, dan responsif dalam menghadapi pelajaran dan kehidupan. Hasil evaluasi pengajaran bahasa harus dapat menjadi dasar penentuan kemajuan dan pengaturan program belajar mengajar. Guru bahasa dan nonbahasa di berbagai jenjang pendidikan serta lingkungan keluarga dan masyarakat harus memberikan teladan berbahasa dengan baik dan benar kepada peserta didik dan merangsang mereka gemar membaca dan menulis, jumlah, jenis, serta mutu koleksi perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan

Bahasa daerah di wilayah tertentu dapat diajarkan kepada peserta didik penuturnya tanpa menghambat pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra

Indonesia. Karena itu kurikulum, buku pelajaran, metode, dan sarana lain untuk pendidikan dan pengajaran bahasa daerah perlu dikembangkan

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah terutama untuk membina kemampuan memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditulis dalam bahasa asing tersebut. Pengajaran bahasa asing, khususnya di sekolah dasar, tidak boleh menghambat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia

Tindak Lanjut

- (1) Kurikulum pengajaran bahasa dan sastra untuk sekolah dasar dan menengah yang akan diberlakukan mulai tahun 1994 perlu dipahami benar oleh guru serta dilengkapi dengan buku-buku pelajaran yang baik dan buku-buku pedoman pelaksanaan yang jelas
- (2) Pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, sebagaimana diputuskan dalam Kongres Bahasa Indonesia Kelima, hendaklah lebih menekankan aspek keterampilan berbahasa yang baik dan benar serta aspek apresiasi sastra dari pada aspek pengetahuan tentang bahasa dan sastra Indonesia
- (3) Buku pelajaran yang digunakan di sekolah dasar dan menengah hendaklah baik, dilihat dan segi isi, mutu, dan penyajiannya. Dalam penyusunan buku pelajaran bahasa perlu diperlihatkan agar semua aspek formal bahasa (bunyi, kosakata, dan tata bahasa) dikembangkan dengan baik
- (4) Sistem pengujian sebagai salah satu cara evaluasi pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia perlu diperbaiki sekurang-kurangnya dan segi bentuk dan isi agar hasilnya memberikan gambaran yang obyektif mengenai kemajuan belajar serta kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia peserta didik
- (5) Untuk meningkatkan serta memperluas wawasan guru bahasa di sekolah dasar dan menengah, sebagaimana disankan pada Kongres Bahasa Indonesia kelima, perlu segera disusun dan dikembangkan berbagai buku acuan seperti buku panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata bahasa pedagogis, dan panduan pengajaran bahasa komunikatif
- (6) Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum perlu diupayakan agar diperoleh keterampilan penggunaan bahasa Indonesia untuk keperluan akademis
- (7) Sebelum gagasan tentang pengajaran bahasa asing di sekolah dasar dilaksanakan, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan segala sudut.

2.5. Perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri

Tujuan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri pada umumnya bersifat instrumental, terutama bagi para sarjana yang ingin melaksanakan penelitian di Indonesia dan para calon diplomat dan usahawan yang akan bertugas di Indonesia. Setelah belajar di negara masing-masing, tidak sedikit diantara mereka yang kemudian mengikuti pengajaran lanjutan di Indonesia.

Setelah saatnya kini bahasa Indonesia untuk Pembelajaran Asing (BIPA) ditangani dengan lebih serius, antara lain dengan menyusun kurikulum yang luwes yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran, menyusun

materi pengajaran dengan format yang menarik dan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lisan maupun tulisan, yang hidup di masyarakat, baik untuk interaksi formal maupun interaksi informal, dan menggunakan metode pengajaran yang berdasarkan pendekatan komunikatif. Oleh karena itu, guru dan dosen BIPA seyogyanya memahami kaidah-kaidah sosio-linguistik yang mendasari pendekatan komunikatif.

Perlu dikembangkan pula materi bahasa Indonesia bidang tertentu, seperti bidang hukum, bidang perdagangan, bidang perbankan, yang mungkin sekali diminati para pelajar asing.

Perpustakaan dan laboratorium bahasa perlu disediakan untuk melengkapi BIPA yang dapat dipergunakan di luar jam pelajaran oleh para pembelajar.

Dengan mempertimbangkan perkembangan dan pengajaran bahasa Melayu di negara-negara Malaysia, Singapura, dan Berunai Darussalam, upaya penyempurnaan bahasa Indonesia pada umumnya dan pengajaran BIPA khususnya perlu ditingkatkan

Tindak Lanjut

- (1) Perlu adanya pengkajian pengajaran BIPA di luar negeri tentang tujuan dan macam serta tingkat kemampuan bahasa yang diinginkan para pembelajar agar perangkat BIPA yang diperlukan dapat pula di kembangkan di Indonesia. Disarankan agar lembaga pemerintah dan swasta mengadakan program pertukaran pengajaran dan materi pengajaran BIPA dengan lembaga pemerintah dan swasta di luar negeri
- (2) Perlu dikembangkan materi BIPA yang berbeda dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, terutama tentang topik dan informasi kultural yang diperlukan untuk memahami ajaran di dalam konteks yang tidak dipahami oleh para pembelajar asing. Selain itu, bahasa formal dan informal perlu disajikan secara profesional dan sesuai dengan konteks
- (3) Mutu dan peranan pengajaran BIPA perlu di tingkatkan antara lain dengan memantapkan kurikulum, mengembangkan materi pengajaran, dan meningkatkan mutu guru dan dosen BIPA dalam hal pengetahuan linguistik, metode pengajaran serta kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik
- (4) Unsur budaya dalam materi BIPA perlu mendapat tempat yang penting, terutama yang berhubungan dengan unsur budaya yang direfleksikan di dalam bahasa, seperti basa-basi, implikatur, sapaan, dan paraanggapan. Disamping itu perlu diperhatikan jug unsur budaya yang berhubungan dengan sopan santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dan sebagainya
- (5) Dalam pengembangan dan pembinaan bahasa, kita perlu memetik pengalaman dari keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami negara-negara tetangga, terutama dalam persaingan dengan bahasa-bahasa lain
- (6) Perlu diupayakan pemberian beasiswa kepada pembelajar asing calon guru samapi lulus S-1 agar pengajaran BIPA dapat berkembang dengan baik di negara asal pembelajar

Jakarta, 2 November 1993

TIM PERUMUS

Harimurti Kridalaksana (ketua merangkap anggota)

S.R.H. Sitanggang (sekretaris merangkap anggota)

Achadiati Ikram (anggota)

Amran Halim (anggota)

Anton M. Moeliono (anggota)

Hasan Alwi (anggota)

Lien Surianegara (anggota)

Mansoer Pateda (anggota)

Soeseno Kartomihardjo (anggota)

Yohanes Kalamper (anggota)

G. Kongres Bahasa Indonesia VII 1998

PUTUSAN

KONGRES BAHASA INDONESIA KETUJUH

Jakarta, 26-30 Oktober 1998

1. Bagian Umum

Bahasa Indonesia sudah berkedudukan sebagai bahasa persatuan selama 70 tahun, sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selama kurun waktu itu (1928-1998), bahasa Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Disamping sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berkedudukan juga sebagai bahasa negara sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi, sarana pendukung kebudayaan nasional, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menghadapi tuntutan dan tantangan perkembangan kehidupan sosial dan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan berbangsa dalam era globalisasi, dan teknologi informasi masa kini serta masa yang akan datang dalam melenium ketiga, mutu bahasa Indonesia perlu ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya perlu dikembangkan. Untuk itu, buku tata bahasa, kamus, serta berbagai pedoman penggunaan bahasa perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan pemberdayaan manusia Indonesia. Disamping itu, sesuai dengan tuntutan dan tokoh masyarakat harus memiliki kemampuan dan perilaku berbahasa yang baik sehingga bahasa Indonesia yang digunakan dapat dijadikan anutan oleh masyarakat umum.

Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri dan pendukung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara, perlu dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan bahasa asing, terutama

bahasa Inggris, yang penggunaannya makin meluas di Indonesia. Sementara itu, kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, sesuai dengan kebutuhan, perlu pula ditingkatkan.

Sastra merupakan salah satu unsur kebudayaan dan sarana ekspresi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan budaya serta menggambarkan kekayaan batiniah bangsa. Sesuai dengan penjelasan Pasal 32 UUD 1945, pengembangan sastra sebagai unsur kebudayaan ditujukan kepada kemajuan adab dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, apresiasi dan sikap positif masyarakat terhadap sastra Indonesia perlu ditingkatkan melalui berbagai cara, terutama pengajaran, pemasyarakatan, dan penelitian karya sastra.

Peran Indonesia di dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting sehingga sekarang diajarkan di banyak negara. Dengan demikian, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing perlu segera dilaksanakan adalag pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bahasa daerah di Indonesia dijamin hak hidupnya sesuai dengan penjelasan Pasal 36 UUD 1945. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, yang merupakan aset budaya nasional, harus dilaksanakan agar bahasa dan sastra daerah dapat berkembang dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan, baik sebagai sarana penunjang komunikasi maupun sebagai salah satu sumber pemerayaan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk itu, rencana terpadu mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah perlu segera disusun secara terarah

2. Bagian Khusus

2.1. Memperkokuh kedudukan bahasa dalam era globalisasi

Era globalisasi ditandai, antara lain, oleh meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antarbangsa, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam hubungan itu, kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia perlu dilakukan.

Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat pemersatu pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa, serta wahana komunikasi ke arah kehidupan yang lebih modern dan beradab. Bahasa daerah merupakan sarana pembinaan dan pengembangan budaya, seni, dan tradisi daerah yang dapat memperkuat jati diri bangsa. Bahasa asing merupakan sarana komunikasi antarbangsa dan sarana alih iptek mmodern.

Untuk memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam era globalisasi, tindak lanjut yang terpadu dan terarah perlu dipersiapkan dan dilakukan

Tindak Lanjut

2.1.1. Bahasa Indonesia

(1) Bahasa Indonesia perlu dibina tidak hanyaoleh Departemen pendidikan dan

Kebudayaan, tetapi juga oleh departemen/ instansi lain, organisasi profesi, dan dunia usaha.

- (2) Pengindonesiaan nama dan kata asing di tempat umum perlu di perluas dan dilaksanakan di seluruh Indonesia.
- (3) Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang diper-siapkan dan/atau diterbitkan, antara lain, oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- (4) Kemampuan berbahasa Indonesia para guru semua bidang studi di semua jenis dan jenjang pendidikan perlu ditingkatkan secara terarah dan terpadu.
- (5) Kemampuan bahasa Indonesia para pejabat dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat memberikan teladan berbahasa yang baik.
- (6) Pemasarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu makin ditinggkatkan sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat yang masih buta bahasa Indonesia.
- (7) Pemerintah perlu member penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

2.1.2. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

- (1) Pengajaran dan pemsarakatan BIPA perlu ditingkatkan baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pengajaran BIPA perlu mengembangkan program dan bahan BIPA, termasuk metodologi pengajarannya, sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.
- (3) Kantor perwakilan RI di luar negeri perlu lebih berperan dalam mendukung program pemsarakatan BIPA di luar negeri.

2.1.3. Bahasa Daerah

- (1) Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian kebudayaan Indonesia yang tidak perlu dilaksanakan secara lebih terencana.
- (2) Penerbitan buku, surat kabar, dan majalah dalam bahasa daerah perlu digiatkan dan didorong.
- (3) Pengembangan bahan ajar bahasa daerah perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang telah diterbitkan oleh Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa dan/atau lembaga lain di daerah yang bersangkutan.
- (4) Pemerintahan perlu memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

2.1.4. Bahasa Asing

- (1) Kemampuan peserta didik dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris, perlu ditingkatkan melalui pengembangan program, bahan ajar, dan metodologi pengajaran sesuai dengan pengembangan pengajaran bahasa asing.
- (2) Pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, melalui jalur luar sekolah perlu

ditingkatkan mutunya dengan menyediakan berbagai kemudahan.

- (3) Sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di perguruan tinggi perlu dikembangkan.
- (4) Penerjemahan bahasa pustaka sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia perlu di galakan.

2.1.5. Organisasi Profesi

- (1) Organisasi profesi, termasuk organisasi profesi kebahasaan, dan dunia usaha perlu melibatkan diri secara lebih aktif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di bidangnya masing-masing.
- (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu terus meningkatkan kerja sama dengan organisasi profesi.
- (3) Organisasi profesi dalam bidang pengajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, perlu dikembangkan.
- (4) Kerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan organisasi profesi kewartawanan perlu ditingkatkan untuk menyebarkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk pemasyarakatan kata dan istilah baru.

2.1.6. Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah daerah perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, antara lain, dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.
- (2) Para ahli bahasa daerah perlu dilibatkan dalam meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah daerah, terutama dalam dokumen resmi.
- (3) Pemerintah daerah perlu membuka peluang kerja yang lebih luas bagi sarjana bahasa, terutama jurusan bahasa daerah.

2.2. Meningkatkan mutu bahasa sebagai sarana komunikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi informasi, dan tantangan kehidupan dalam globalisasi menuntut agar kualitas bahasa Indonesia ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya dikembangkan. Untuk itu, unsur-unsur bahasa seperti sintaksis dan kosakata, termasuk peristilahan, perlu diperkaya. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi di segala bidang perlu lebih dimantapkan untuk menghadapi kenyataan makin meluasnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di Indonesia.

Tindak Lanjut

- (1) Pengembangan peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diprioritaskan dan pengembangan kosakata perlu ditingkatkan,

antara lain, dengan penyerapan kata dari bahasa lain melalui kaidah penyerapan yang lebih mantap.

- (2) Penggunaan eufemisme secara berlebihan dengan maksud menutup-nutupi kenyataan yang negatif harus dihindarkan, sedangkan eufemisme yang berkaitan dengan kesopanan santunan berbahasa serta adat istiadat perlu dilestarikan.
- (3) Mutu pengajaran bahasa dan sastra perlu ditingkatkan dengan menentukan keterampilan berbahasa serta kemampuan mengapresiasi sastra.
- (4) Penyusunan buku ajar dan instrumen evaluasi berbagai bidang ilmu perlu lebih memperhatikan kaidah-kaidah bahasa baku.
- (5) Penguasaan bahasa Indonesia baku perlu dijadikan salah satu syarat utama dalam ihwal kepegawaian, seperti penerimaan, penempatan, dan kenaikan pangkat.
- (6) Di samping buku tata bahasa baku dan kamus yang sudah ada, perlu pula disusun dan diterbitkan buku tata bahasa dan kamus sekolah yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- (7) Penelitian berbagai laras bahasa Indonesia perlu ditingkatkan untuk keperluan penyusunan buku panduan penggunaan laras bahasa Indonesia.
- (8) Bahasa Indonesia dalam iklan, selain harus mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga perlu berpedoman pada norma-norma sosial budaya bangsa sehingga kata-kata yang berkonotasi vulgar tidak digunakan.
- (9) Buku-buku terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang merupakan pedoman pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dikaji ulang agar dapat lebih memenuhi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi.

2.3. Meningkatkan apresiasi dan daya cipta sastra

Karya Sastra Indonesia dan daerah pada umumnya bersumber pada budaya Indonesia dan nilai-nilai budaya asing yang sudah diramu ke dalam budaya Indonesia dan daerah. Kemampuan memadukan nilai-nilai budaya sendiri dengan nilai-nilai budaya asing ke dalam karya sastra itu merupakan modal dasar daya cipta untuk meningkatkan kualitas kehidupan sastra, yang selanjutnya merangsang perkembangan apresiasi sastra.

Apresiasi sastra dan kreativitas dalam sastra Indonesia dan daerah memperkaya kehidupan batiniah masyarakat Indonesia. Selain memperkukuh jati diri masyarakat Indonesia, kekayaan batiniah juga memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi warga dunia yang terhormat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan apresiasi dan kreativitas dalam sastra Indonesia dan daerah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu.

Tindak Lanjut

2.3.1. Meningkatkan apresiasi sastra

Untuk meningkatkan apresiasi sastra ditempuh usaha-usaha berikut:

- (1) Mutu pengajaran sastra perlu ditingkatkan dengan
 - a) Menjadikan mata pelajaran sastra sebagai mata pelajaran yang otonom.
 - b) Memperbanyak kegiatan membaca dan membahas karya-karya sastra serta memperbanyak latihan menulis karya sastra di sekolah menengah umum.
 - c) Menyediakan sarana belajar yang lebih lengkap baik berupa buku asli, terjemahan, maupun saduran.
- (2) Penerbitan buku-buku sastra Indonesia dan daerah perlu didukung dan digiatkan.
- (3) Perpustakaan yang memiliki buku-buku sastra Indonesia dan daerah perlu diperbanyak sampai ke pelosok tanah air.
- (4) Komunikasi sastra Indonesia dan daerah perlu dibina dan dikembangkan dengan melibatkan para sastrawan dalam berbagai kegiatan.
- (5) Penulisan kritik sastra Indonesia dan daerah perlu didorong untuk menjembatani karya sastra dengan pembacanya.

2.3.2. Meningkatkan daya cipta sastra

Daya cipta sastra perlu ditingkatkan melalui usaha-usaha berikut:

- (1) Kemudahan untuk memperluas wawasan sastrawan perlu disediakan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam forum internasional.
- (2) Hambatan-hambatan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan menyebarluaskan karya sastra perlu diupayakan untuk dihilangkan.
- (3) Hak cipta karya sastra perlu dilindungi secara penuh.
- (4) Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh sastra yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia.
- (5) Karya-karya sastra terpilih dari komunikasi sastra di berbagai daerah perlu diterbitkan.
- (6) Karya-karya sastra yang terbit dalam media massa cetak, terutama surat kabar, perlu dikembangkan lebih lanjut, misalnya, melalui penilaian dan penerbitan (dalam bentuk antologi).
- (7) Karya sastra Indonesia dan daerah perlu lebih diperkenalkan di forum internasional, antara lain, melalui penerjemahan.
- (8) Karya sastra daerah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan, kalau perlu, ke dalam bahasa asing.

Rekomendasi

Putusan Kongres Bahasa Indonesia Keenam sebagian sudah dilaksanakan, sebagian sedang dalam pelaksanaan, dan sebagian lagi belum terlaksana. Untuk melaksanakan putusan Kongres Bahasa Indonesia Keenam yang belum terselesaikan dan putusan Kongres Bahasa Indonesia Ketujuh, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan putusan Kongres Bahasa Indonesia Keenam yang belum terlaksana atau belum tuntas.
- (2) Menyelenggarakan pertemuan nasional untuk mengembangkan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dalam rangka menyusun kebijaksanaan bahasa

nasional yang lebih mutahir dan menyeluruh.

- (3) Menyelenggarakan pertemuan nasional untuk menyusun strategi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
- (4) Mengembangkan lebih lanjut terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seperti *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- (5) Mengupayakan penyebarluaskan terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Bahasa terdiri atas pakar bahasa dan sastra, tokoh masyarakat, dan pakar bidang lain yang mempunyai minat dan perhatian terhadap bahasa dan sastra.
 - (2) Tugas Badan Pertimbangan Bahasa ialah:
 - a) Mengupayakan peningkatan status Kelembagaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
 - b) Memberikan nasihat, diminta atau tidak diminta, kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pelaksanaan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, termasuk pelaksanaan putusan Kongres Bahasa Indonesia Ketujuh.
 - c) Melanjutkan pelaksanaan tugas Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia Keenam.

Jakarta, 30 Oktober 1998

Tim Perumus

1. Hasan Alwi (Ketua merangkap anggota)
2. Dendy Sugono (Sekretaris merangkap anggota)
3. A. Latief (anggota)
4. Amran Halim (anggota)
5. Soejono Dardjowidjojo (anggota)
6. Yus Rusyana (anggota)
7. Budi Darma (anggota)
8. Fuad Abdul Hamied (anggota)
9. T.A. Ridwan (anggota)
10. Zainuddin Taha (anggota)

H. Kongres Bahasa Indonesia VIII 2003

Kongres ini merupakan kongres pertama setelah Indonesia memasuki masa reformasi. Perubahan sistem politik dan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Demikian pula dengan diterapkannya sistem sosial kemasyarakatan yang tertutup menjadi terbuka sesuai dengan arti sistem demokrasi dan pengaruh dari kehidupan kesejagadan (globalisme) telah terjadi perubahan sikap masyarakat dalam berbahasa.

Posisi KBI 2003 menjadi penting dalam menyiapkan konsep, kebijakan dan strategi di bidang pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Melalui forum kongres yang dikoordinasikan oleh Pusat Bahasa pada tanggal 14-17 Oktober 2003 diselenggarakan KBI ke-8, dan hasil putusannya adalah sebagai berikut.

**PUTUSAN
KONGRES BAHASA INDONESIA KEDELAPAN
Jakarta, 14-17 Oktober 2003**

Kongres Bahasa Indonesia (KBI) Kedelapan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14-17 Oktober 2003 dan dihadiri oleh lebih dari 1.200 peserta yang mewakili para peneliti bahasa dan sastra, guru bahasa dan sastra, dosen, pakar bidang ilmu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, politisi, ahli hukum, pekerja pers, dan mahasiswa baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yakni Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cina, Italia, Jepang, Malaysia, Prancis, Rusia, dan Suriname. Setelah mendengar dan memperhatikan:

- (1) Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia
- (2) Sambutan Menteri Pendidikan Nasional
- (3) Laporan Kepala Pusat Bahasa

Serta membahas 12 makalah sidang pleno, 49 makalah sidang kelompok, dan 5 topik diskusi panel, KBI VIII menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Pada masa perjuangan kemerdekaan, disadari betul fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan alat pemersatu berbagai kelompok etnik. Sumpah Pemuda 1928 mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang telah terbukti menjadi salah satu modal yang ampuh dalam meraih kedaulatan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan, kedudukan bahasa Indonesia itu bahkan makin dimantapkan, yaitu sebagai bahasa negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab XV, Pasal 36.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia kini telah terjadi berbagai perubahan, terutama yang berkaitan dengan tatanan baru kehidupan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya teknologi informasi. Yang semakin sarat dengan globalisasi. Kondisi itu telah menempatkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu makin jauh memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, mau tidak mau, dihadapkan secara frontal pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa asing tersebut makin meluas. Akan tetapi, dibalik kondisi kebahasaan di Indonesia seperti itu, harus diakui bahwa bahasa Indonesia ternyata juga mendapat tempat yang makin baik di luar negeri untuk dipelajari.

Gerakan reformasi yang bergulir sejak 1998 telah memberikan corak dan warna tersendiri pada dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di

Indonesia. Tatahan kehidupan yang serba sentralistik, termasuk pengelolaan masalah bahasa dan sastra, berubah menjadi desentralistik. Akibatnya, kewenangan pemerintah pusat hanya terbatas pada pengelolaan masalah bahasa dan sastra Indonesia. Adapun pengelolaan masalah bahasa dan sastra daerah menjadi kewenangan pemerintah di daerah. Dalam menghadapi perubahan seperti itu, pengelolaan masalah bahasa dan sastra perlu membangun pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dapat dilakukan secara berdampingan dengan upaya pelestarian (dalam pengertian dinamik) bahasa dan sastra daerah termasuk pengajarannya.

Pencerdasan bangsa melalui pendidikan, termasuk pembrantasan buta bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaannya oleh setiap warga negara Indonesia. Pendidikan bahasa bahkan dapat dikatakan menjadi tulang punggung pendidikan lebih-lebih karena daya akses bahasa Indonesia terhadap ilmu makin tinggi dari waktu ke waktu. Akan tetapi, dalam kenyataan, masih ada sebagian warga masyarakat Indonesia yang buta bahasa Indonesia.

Upaya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia serta pelestarian bahasa dan sastra daerah mempunyai landasan konstitusional. Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamendemen disebutkan, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional” (Pasal 32 ayat (2)); “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia” (Pasal 36); dan “Ketentuan lebih lanjut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam undang-undang” (Pasal 36c). Hal itu berarti bahwa masalah kebahasaan di Indonesia perlu secara cermat dan komprehensif diatur dalam sebuah undang-undang sebagaimana yang sudah beberapa kali diungkapkan dalam kongres terdahulu.

Di sisi lain, bahasa dipakai dalam karya sastra untuk menciptakan pengalaman baru yang disebut dunia imajinasi, yang tidak merepresentasikan kenyataan, tetapi melahirkan transformasi dari pengalaman sehari-hari. Dalam konteks komunikasi makna, seni sastra sangat berpengaruh karena sastra menggunakan medium bahasa yang sudah diterima dan dimengerti umum. Dengan demikian, kedudukan bahasa menjadi sangat penting dan strategis dalam hubungannya dengan sastra sebagai salah satu unsur kebudayaan dan sarana estetis yang menggambarkan kekayaan batiniah bangsa. Dengan bahasa, segala perasaan, pemikiran, cita-cita, sejarah, dan perjuangan masa lalu, bahkan masa depan bangsa, dapat terungkap dalam karya sastra. Oleh karena itu, di dalam sastra, bahasa diejawantahkan secara imajinatif dan kreatif serta menemukan eksistensinya yang tertinggi. Karya sastra, dengan perkataan lain, adalah cerminan sebuah komunitas sebagai ciri peradaban sebuah bangsa. Oleh karena itu, karya sastra sangat diperlukan setiap orang, dengan sastra orang terhibur sambil mengenali diri, lingkungan, dan kehidupannya sebagai hamba Tuhan. Karena sastra dilandasi tipe logika yang khas di dalamnya bahasa sengaja dieksploitasi untuk membangkitkan efek ekspresif bukan untuk menjelaskan hal-hal demi tujuan praktis, karya sastra kerap kali kurang dipahami, bahkan peranannya pun dalam kehidupan kurang disadari. Itulah sebabnya sastra harus ditumbuhkembangkan agar masyarakat sadar akan pentingnya sastra dalam kehidupan bermasyarakat yang beradab. Untuk itu, penelitian, pengajaran, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra serta apresiasi sastra perlu ditingkatkan.

Upaya pencerdasan bangsa, termasuk kemampuan berbahasa, juga dapat dilakukan melalui media massa. Media massa telah lama menjadi sarana efektif untuk membantu upaya dan pencapaian tugas pencerdasan bangsa, termasuk pembinaan (pemasyarakatan) bahasa. Bahkan, jauh sebelum bangsa ini merdeka media massa telah berperan dalam menjalankan tugas perluasan/penyebaran penggunaan bahasa Indonesia, dan tugas itu terus dilakukan sampai sekarang. Dengan kata lain, media massa memiliki peran, posisi, dan pengaruh yang kuat dalam perluasan penggunaan bahasa Indonesia. Namun, karena berbagai sebab, media massa tidak jarang lupa akan peran, posisi, dan pengaruhnya tersebut. Tidak jarang ditemukan bahasa media massa yang bukan saja tidak baik dan tidak benar, tetapi juga sekaligus tidak mencerdaskan bangsa.

Hasrat untuk mengembangkan dan membina bahasa dan sastra Indonesia serta melestarikan dan sastra daerah itulah yang menjadi faktor pendorong penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia Kedelapan dengan tema “Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi”. Kongres telah menghasilkan berbagai simpulan yang tersusun dalam tiga kelompok putusan, yaitu putusan tentang bahasa, putusan tentang sastra, dan putusan yang berkenaan dengan media massa

2. Bagian Khusus

2.1. Bahasa

Era globalisasi dan era otonomi daerah telah mempengaruhi peran bahasa-bahasa di Indonesia pada saat ini. Era globalisasi menuntut pentingnya peran bahasa asing dan perlunya pemantapan peran bahasa Indonesia, sedangkan di pihak lain era otonomi daerah memberi tempat dan perhatian yang khusus terhadap bahasa daerah. Dalam kaitan itu, peran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing perlu dikaji ulang. Strategi untuk memantapkan peran bahasa, meningkatkan mutu bahasa, dan meningkatkan mutu penggunaan bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah, perlu dirumuskan kembali. Dalam hubungan itu, pengajaran bahasa, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan nonformal, perlu mendapat perhatian khusus.

2.1.1. Pemantapan peran bahasa

Arus globalisasi di Indonesia telah menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang dan telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan bahasa-bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah, seakan-akan menjadi subordinasi dari bahasa asing, yang perannya begitu penting dalam komunikasi di bidang iptek dan ekonomi.

Kebijakan bahasa nasional yang ada dirasakan belum berhasil diimplementasikan secara baik sehingga situasi yang kondusif bagi pelestarian bahasa daerah belum tercipta. Walaupun demikian, otonomi daerah dan demokratisasi menyadarkan masyarakat penutur bahasa daerah akan keberadaan, potensi, dan posisi bahasa

mereka. Oleh karena itu, arus globalisasi, dan terutama otonomi daerah, harus dikelola sedemikian rupa sehingga tetap menjamin terpeliharanya semboyan bhinneka tunggal ika di samping harus dapat menciptakan kesadaran dan sikap berbahasa yang positif dalam suasana hidup berdampingan yang harmonis di antara para penutur bahasa di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut:

- (1) Bahasa Indonesia harus tetap mempertahankan perannya sebagai alat pemersatu, pembentuk jati diri, pemandirian bangsa, dan sarana fikir, ekspresi, dan sarana komunikasi yang dapat membawa bangsa Indonesia ke dalam kehidupan yang lebih modern dan beradab. Peran tersebut perlu dimantapkan dengan meningkatkan jumlah sasaran dan intensitas pembinaan melalui kerja sama dengan berbagai kalangan, di samping memantapkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah
- (2) Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta seni perlu terus dikembangkan melalui usaha-usaha pemekaran kosakata (termasuk istilah) dan pemantapan struktur bahasa. Pemerayaan bahasa Indonesia perlu juga memanfaatkan berbagai sumber dari bahasa daerah secara proporsional
- (3) Pemasarakatan kebijakan bahasa, khusus mengenai hubungan antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, perlu digiatkan agar masyarakat Indonesia lebih sadar akan kedudukan dan fungsi bahasa tersebut dan mampu memanfaatkannya secara tepat
- (4) Peran bahasa daerah (termasuk aksaranya) sebagai sarana pengembangan dan pembinaan kebudayaan, pendidikan, seni dan tradisi daerah untuk memperkuat jati diri dan ketahanan budaya bangsa perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemantapan peran bahasa daerah, khususnya sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan, perlu dikaji secara lebih mendalam. Di samping itu, peningkatan peran tersebut juga dapat dilakukan melalui ranah kebudayaan, ranah adat, dan ranah agama

2.1.2 Peningkatan mutu bahasa

Penelitian merupakan salah satu untuk mengangkat mutu bahasa. Kenyataan pada saat ini, penelitian terhadap bahasa-bahasa di Indonesia lebih banyak dilakukan pada bahasa tulis (secara tekstual), itu pun dengan cakupan aspek-aspek penelitian yang tidak merata. Penelitian terhadap bahasa lisan belum banyak dilakukan (misalnya secara kontekstual), terutama terhadap bahasa-bahasa. Bahkan, penelitian terhadap bahasa daerah belum dilakukan porsi yang memadai.

Penelitian terhadap bahasa-bahasa di Indonesia hendaknya memberikan prioritas pada bahasa yang terancam punah. Penelitian itu tidak dimaksudkan untuk mencapai keseragaman bahasa, tetapi untuk keperluan pencatatan dan kondifikasi. Penelitian dan kondifikasi tersebut pada akhirnya harus pula disertai dengan usaha pemeliharaan.

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut:

- (1) Penelitian berbagai aspek termasuk laras bahasa Indonesia dan laras bahasa daerah perlu dilanjutkan. Penelitian bahasa daerah, selain untuk pelestarian, perlu

- diteruskan untuk kepentingan pencatatan dan konfikasi
- (2) Mutu dan daya ungkap bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan kembangkan sehingga dapat menjadi sarana yang lebih ampuh dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta seni.
 - (3) Penyebarluasan hasil penelitian dan konfikasi bahasa Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan untuk memantapkan peran bahasa tersebut. Hasil penelitian, konfikasi, dan pengembangan bahasa untuk berbagai kebutuhan perlu ditindaklanjuti dengan pengusulan hak paten.

2.1.3. Peningkatan mutu penggunaan bahasa

Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sampai saat ini masih memprihatinkan. Dalam hal bahasa Indonesia, ada sebagian warga masyarakat yang belum dapat berbahasa Indonesia dan sebagian yang lain kurang mempunyai sikap positif terhadap bahasa tersebut serta penguasaan mereka terhadap bahasa Indonesia (terutama ragam tulis) masih rendah. Di pihak lain, dalam hal bahasa daerahnya dan beralih menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu berarti bahwa upaya pemasyarakatan dan pengajaran bahasa daerah serta program penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarpada awal pendidikan belum berhasil dengan baik. Oleh karena itu, banyak warga masyarakat dari generasi muda di Indonesia yang sudah tidak dapat menguasai bahasa ibunya dengan baik. Padahal, hasil penelitian UNESCO menunjukkan bahwa penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar mata pelajaran dapat mempertinggi keberhasilan anak dalam menguasai pelajar. Namun, perlu diingat bahwa bahasa ibu di Indonesia sebageian besar adalah bahasa daerah, sangat beragam, ada bahasa daerah yang berpenutur besar, berpenutur sedang, dan bahasa daerah berpenutur kecil sehingga belum memiliki kemampuan daya ungkap bidang ilmu dan teknologi secara memadai. Selain itu, bahasa daerah di Indonesia belum seluruhnya memiliki tradisi tulis sehingga belum dapat menjadi bahasa pengantar pendidik kecuali pada tahap awal pendidik.

Satu-satunya “kemajuan” yang mengkhawatirkan adalah kecendrungan warga masyarakat untuk menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang pemakaiannya belum tentu benar untuk berbagai keperluan alih-alih bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kemajuan tersebut mungkin disebabkan oleh arus globalisasi yang menghendaki perlunya penguasaan bahasa asing dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan penggunaan bahasa untuk generasi ke depan dilakukan melalui pengajaran bahasa. Selama ini pengajaran bahasa pada hampir semua jenis jenjang pendidikan selalu dianggap membosankan karena pengajaran itu lebih diarahkan pada penguasaan aspek teoritis saja dari pada aspek praktis. Padahal, tujuan pengajaran bahasa secara umum adalah agar peserta didik trampil menggunakan bahasa. Kurikulum pengajaran bahasa Indonesia mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sementara itu, pengajaran bahasa daerah yang merupakan mata pelajaran muatan lokal, juga belum mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menggunakan bahasa itu. Pengajaran bahasa asing pun belum membuat peserta didik dapat menggunakan bahasa tersebut, baik secara lisan maupun secara tulis. Semua kegagalan pengajaran

bahasa selama ini merupakan bagian dari dan kegagalan pendidikan dalam arti yang luas karena bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan nasional dan sarana pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Sementara itu, pengajaran bahasa daerah belum mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah di daerah. Adapun pengajaran bahasa asing belum seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip belajar efektif.

Peningkatan mutu penggunaan bahasa berhubungan dengan pemasyarakatan bahasa. Dalam kaitan itu, pemasyarakatan bahasa Indonesia sebagai usaha meningkatkan mutu penggunaan bahasa tidak saja perlu dilakukan di Indonesia karena bahasa tersebut merupakan bahasa nasional dan bahasa negara, tetapi juga di luar negeri mengingat bahasa Indonesia banyak dipelajari di banyak negara.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut:

- (1) Mutu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah perlu terus ditingkatkan dengan memperbaiki sistem dan metode pengajaran dan pemasyarakatannya.
- (2) Pusat Bahasa perlu memberi perhatian yang lebih besar terhadap upaya meningkatkan mutu pelajaran bahasa, terutama dalam penyiapan materi ajar bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, berdasarkan kurikulum yang berlaku. Pengembangan kurikulum dan materi ajar itu hendaknya dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dipersiapkan dan/atau diterbitkan, antara lain, oleh Pusat Bahasa, balai/kantor bahasa, dan perguruan tinggi.
- (3) Kemampuan berbahasa Indonesia para guru semua bidang studi pada semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dosen, pejabat, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama perlu ditingkatkan secara terarah dan terpadu agar dapat memberikan suri tauladan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada peserta didik dan masyarakat.
- (4) Pusat Bahasa bersama perguruan tinggi, lembaga-lembaga penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA), Asosiasi Pengajar BIPA, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, perlu mengembangkan program, metodologi, dan materi ajar BIPA untuk berbagai keperluan.
- (5) Perguruan tinggi perlu membuka jurusan BIPA dan dalam bentuk program gelar untuk mencetak guru BIPA.
- (6) Kemampuan peserta didik dalam berbahasa asing perlu ditingkatkan melalui pengembangan program, materi ajar, dan metodologi pengajaran sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.
- (7) Sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk pengajaran bahasa asing di sekolah dan di perguruan tinggi perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan.
- (8) Pemanfaatan teknologi mutakhir untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah harus lebih ditingkatkan.
- (9) Penyebaran informasi tentang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di dalam dan di luar negeri perlu lebih diintensifkan melalui pelbagai media.
- (10) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) perlu terus dikembangkan dan dimasyarakatkan sehingga dapat menjadi salah satu alat evaluasi kemahiran berbahasa Indonesia untuk berbagai keperluan. Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri perlu lebih berperan dalam mendukung program pemasyarakatan BIPA dan UKBI.

- (11) Mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan-kegiatan kenegaraan perlu terus ditingkatkan.
- (12) Penguasaan bahasa Indonesia harus dipertimbangkan sebagai salah satu syarat penerimaan pegawai, kenaikan pangkat pegawai, pengangkatan pejabat/eselon, pengangkatan anggota dewan, dan penerimaan pekerja asing di Indonesia.
- (13) Pembinaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang merupakan terjemahan dari hukum warisan kolonial, harus mendapat perhatian serius agar produk hukum yang bersangkutan tidak disalah tafsirkan atau diselewengkan. Untuk itu, di dalam proses penyusunan peraturan/perundang-undangan perlu ditingkatkan keterlibatan secara aktif pakar bahasa sebagai narasumber.
- (14) Penerjemahan dan penerbitan bahan pustaka sebagai sumber informasi ilmu dan teknologi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia perlu ditingkatkan.
- (15) Penerbitan buku, surat kabar, dan majalah dalam bahasa daerah perlu digalakkan secara terencana dan terarah.
- (16) Pemasarkatan bahasa daerah perlu terus ditingkatkan melalui berbagai media terutama ranah adat, ranah budaya, dan ranah agama.

2.2. Sastra

Sastra adalah sebuah karya cipta khas yang dapat memperkaya dan memperluas cakrawala pembacanya. Karya sastra mengandung nilai-nilai yang dapat memperbaiki pandangan hidup, mempertajam akal, dan memperhalus budi sehingga, pada gilirannya, karya sastra dapat membuat kehidupan menjadi lebih beradab dan dapat membuat pembacanya lebih peka di dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, upaya yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Kehidupan yang sangat kompleks dan sarat dengan tujuan dan kadar kepentingan yang beragam tidak memungkinkan siapa pun mampu menghadapinya tanpa bantuan dan upaya memanfaatkan pengalaman orang lain. Karya sastra yang tercipta dari pengalaman hidup manusia dapat berperan sebagai alat bantu utama kehidupan. Karena perkembangan zaman yang cepat (dalam era globalisasi) sekaligus memberikan dampak positif dan negatif, yaitu tidak saja memfasilitasi perilaku kehidupan tetapi juga memperkeruh masalah manusia dan kemanusiaan, karya sastra dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyikapi dampak tersebut. Oleh karena itu, setiap orang seyogianya merasa terpanggil untuk membaca karya sastra, bukan sekedar untuk memperkaya dan memperluas cakrawala pemikiran, melainkan juga untuk lebih mengenali diri sendiri.

Kenyataan menunjukkan bahwa hingga saat ini pemanfaatan sastra bagi upaya peningkatan kualitas hidup masih belum menggembirakan. Hal itu disebabkan oleh sejumlah kendala, baik yang berhubungan dengan kemauan politis, kesadaran masyarakat terhadap sastra maupun sarana penunjang.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindakan lanjut berikut:

- (1) Kemampuan politis yang menyangkut sastra, terutama upaya menempatkan sastra Indonesia dan sastra daerah sebagai sarana peningkatan kualitas dan

- perekat kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, perlu dijabarkan dalam bentuk program yang terencana dan terarah
- (2) Kesadaran masyarakat luas akan manfaat sastra sebagai salah satu sarana untuk memahami dan menghargai kekompleksan masyarakat melalui interaksi dan pendekatan lintas budaya yang kritis, mendalam, dan manusiawi tanpa menggoyahkan keutuhan bangsa perlu diupayakan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Sehubungan itu, pemanfaatan nilai-nilai mulia yang terkandung dalam karya sastra Indonesia dan karya sastra daerah perlu memperoleh perhatian yang serius dari semua pihak agar masyarakat dapat menangkal dampak negatif perubahan akibat globalisasi
 - (3) Sastra daerah perlu dikembangkan dan dimasyarakatkan secara terencana dalam keluarga dan dalam sistem pendidikan
 - (4) Pemerintah, dalam hal ini lembaga terkait, hendaknya memfasilitasi peningkatan penyebaran hasil-hasil penelitian sastra Indonesia dan sastra daerah sambil mendorong penerbit buku pemandu apresiasi dan buku kritik sastra dalam jumlah dan mutu yang memadai
 - (5) Departemen Pendidikan Nasional perlu memberi definisi baru mengenai pengajaran sastra yang mencakup fungsi sastra dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam kaitan itu, perlu dipertimbangkan keberadaan khazanah sastra yang sangat beragam di Indonesia sebagai sumber materi pendidikan
 - (6) Pengajaran sastra yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai perlu ditangani dengan perencanaan yang mantap

2.3. Media Massa

Masyarakat media massa di Indonesia menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan sarana, bahkan salah satu modal utama pekerjaan media massa dalam menjalankan tugas profesionalnya. Masyarakat media massa juga menyadari bahwa media massa cetak dan elektronik melalui produknya yang dikemas dalam bahasa Indonesia mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat media massa, sebagaimana masyarakat pengguna bahasa lainnya, menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang masih muda dibandingkan dengan sejumlah bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Sementara itu, disadari juga bahwa bahasa dan para penggunanya terus bergulat untuk menghasilkan bahasa modern yang mampu menampung berbagai konsep dan produk kebudayaan dan/atau peradaban modern sekaligus sebagai sarana untuk mengekspresikan sebagai hal, konsep kebudayaan, dan/atau peradaban modern itu. Masyarakat media massa juga menyadari bahwa masih banyak media yang belum menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Kongres Bahasa Indonesia Kedelapan mengingatkan kembali masyarakat media massa akan peran dan tanggung jawabnya untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tanggung jawab tersebut haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi kreativitas penggunaan bahasa sesuai dengan keperluan media massa masing-masing. Selain itu, KBI VIII juga mengingatkan masyarakat media massa akan peran dan fungsinya sebagai sarana pendidikan bagi

masyarakat, termasuk pembinaan bahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut:

- (1) Kemampuan insan media massa dalam menggunakan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan secara teratur dan tersistem melalui kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait untuk meningkatkan profesionalisme. Usaha peningkatan itu akan lebih efektif jika insan media massa tersebut telah dibekali dengan kemahiran berbahasa Indonesia yang memadai dari jenjang pendidikan terakhirnya
- (2) Seleksi penerimaan pekerja pers, khususnya jurnalis, misalnya dalam hal standar kompetensi berbahasa Indonesia, perlu diperketat agar pekerja pers yang terpilih memenuhi standar yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik
- (3) Media massa perlu meningkatkan upaya melakukan autokritik dalam penggunaan bahasa agar misi pendidikan terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan lebih baik
- (4) Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, perguruan tinggi, dan organisasi profesi perlu membentuk forum komunikasi yang secara tersistem membantu, mengevaluasi, dan memberikan masukan kepada media massa tentang Indonesia yang mereka gunakan

Rekomendasi

Mengenai Putusan KBI VII tahun 1998, masih ada putusan yang belum dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Oleh karena itu, untuk melaksanakan putusan KBI VII yang belum terselesaikan dan untuk menindaklanjuti putusan KBI VIII tahun 2003, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Badan Pertimbangan Bahasa di dalam melaksanakan tugas hendaknya terus mengupayakan tersusunnya undang-undang kebahasaan dan ditingkatkannya status kelembagaan Pusat Bahasa.
- (2) Pusat Bahasa diharapkan membuat perencanaan untuk menindaklanjuti putusan KBI VIII, termasuk putusan KBI VII yang belum secara tuntas dilaksanakan (jika perlu dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pihak atau instansi lain).
- (3) Pusat Bahasa perlu membina jaringan keprofesionalan yang luas, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang berdampak luas pada masyarakat.
- (4) Kerja sama antara Pusat Bahasa dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota perlu lebih ditingkatkan agar penanganan masalah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dapat dilakukan secara harmonis dan proposional

Jakarta, 17 Oktober 2003

Tim Perumus Kongres Bahasa Indonesia Kedelapan
Perumus

1. Abdul Wahab (Ketua)
2. Sugiyono (Sekretaris)
3. Abdul Djunaidi (Anggota)

4. Ayu Sutarto (Anggota)
5. H. Hunggu Tadjuddin Usup (Anggota)
6. Riris K. Toha Sarumpaet (Anggota)
7. Suminto A. Sayuti (Anggota)
8. T.D. Asmadi (Anggota)
9. Threes Y. Kumanireng (Anggota)
10. Willy Pramudya (Anggota)

Narasumber

1. Dendy Sugono
2. Hasan Alwi
3. Latief
4. Soejono Dardjowidjojo

I. Kongres Bahasa Indonesia IX 2008.

Berbeda dengan KBI sebelumnya, pada KBI IX statu kongres tidak lagi berskala nasional tetapi telah berkembang menjadi kongres bertaraf internasional. Kongres yang diadakan Pusat Bahasa, 28 Oktober – 1 November 2008 ini merupakan puncak seluruh kegiatan kebahasaan dan kesastraan serta peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda. Dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju era global, bahasa asing mulai memasuki ranah-ranah penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa daerah tertentu telah meluas di seluruh Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Di sisi lain, seperti yang dilansir oleh beberapa kongres bahasa daerah, beberapa bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh kalangan muda.

KBI IX diikuti oleh 1.276 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia dan beberapa negara seperti Australia, Belanda, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Kongres membahas lima hal utama, yakni (1) bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan penggunaan bahasa asing, (2) sastra Indonesia dan sastra daerah, (3) pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing, (4) pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing, dan (5) penggunaan bahasa Indonesia di media massa. Kongres bahasa ini menghadirkan para pakar bahasa yang selama ini telah melakukan penelitian dan mengembangkan bahasa Indonesia dan pembicara dari luar negeri. Tema Kongres IX Bahasa Indonesia, “Bahasa Indonesia Membentuk Insan Indonesia Cerdas Kompetitif di Atas Fondasi Peradaban Bangsa”.

**KEPUTUSAN
KONGRES INTERNASIONAL IX BAHASA INDONESIA
Jakarta, 28 Oktober—1 November 2008**

Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober—1 November 2008 dan dihadiri oleh lebih dari 1.300 peserta yang mewakili peneliti bahasa dan sastra, guru bahasa dan sastra, dosen, pakar bidang ilmu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, politisi, ahli hukum, pers, dan mahasiswa,

baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri, yakni Amerika Serikat, Australia, Azarbaijan, Belanda, Brunei Darussalam, China, Filipina, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea, Malaysia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Singapura, Suriname, dan Timor Leste.

Setelah mendengar dan memperhatikan

- 1) Sambutan Menteri Pendidikan Nasional
- 2) Laporan Kepala Pusat Bahasa

serta membahas 8 makalah sidang pleno, 11 makalah sidang panel, dan 94 makalah sidang kelompok, serta hasil-hasil sidang tersebut, Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia menetapkan putusan sebagai berikut.

1. BAGIAN UMUM

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi ini setiap bangsa berupaya keras untuk mempertahankan identitasnya. Identitas itu terancam oleh proses homogenisasi budaya yang dipicu oleh keberhasilan industri budaya dari negara-negara lain. Dunia kini menjadi tanpa batas dan tidak bisa lagi bertahan dari lima gelombang besar yang memengaruhi gaya hidup dan cara berpikir. Kelima gelombang itu adalah gelombang manusia, teknologi, media massa, ideologi, dan gelombang modal yang mengalir dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, apabila tidak memiliki ketahanan budaya yang kuat, setiap bangsa akan kehilangan identitasnya. Untuk itu, diperlukan insan Indonesia yang cerdas dan berdaya saing (kompetitif).

Insan Indonesia yang memiliki kecerdasan kompetitif adalah insan yang tidak tercerabut dari akar budayanya. Oleh karena itu, kecerdasan kompetitif insan Indonesia didukung oleh kekayaan budaya etnik yang dikembangkan dalam interaksi budaya antaretnik yang membentuknya menjadi insan Indonesia yang toleran yang menerima kebhinekaan sebagai kenyataan dalam budaya nasional yang menjadi jati diri bangsa. Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif itu sadar akan kekayaan budaya nasional dan toleran menerima keberagaman budaya, serta dapat mengembangkan kepribadiannya dalam interaksi antarbangsa. Kecerdasan kompetitif insan Indonesia tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai jalur kegiatan, seperti kegiatan pendidikan, politik, sosial, ekonomi, kultural, pertahanan, dan media massa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam segala kegiatan itu dan apresiasi sastra hendaknya dapat terus ditingkatkan untuk mencapai mutu yang tinggi.

2. BAGIAN KHUSUS

2.1 KEBIJAKAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah serta dan asing untuk kemajuan bangsa Indonesia perlu dirumuskan dalam Undang-Undang Kebahasaan. Untuk melaksanakan Undang-Undang itu diperlukan juga berbagai strategi pengembangan dan pembinaan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat.

2.2 KEBAHASAAN

2.2.1 Bahasa Indonesia

- 1) Selain melanjutkan kajian-kajian linguistik terapan, kajian linguistik deskriptif terhadap bahasa Indonesia perlu ditingkatkan untuk kepentingan kodifikasi bahasa.
- 2) Dalam meningkatkan kualitas bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan ahli bahasa yang memahami hukum dan ahli hukum yang mempunyai kemahiran berbahasa Indonesia.
- 3) Selain dikembangkan menjadi bahasa modern yang mampu menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia juga harus dikembangkan untuk menjadi sarana pembentukan insan yang cerdas dan kompetitif.
- 4) Untuk memartabatkan bahasa Indonesia, terutama di luar negeri, penyebaran hasil penelitian dan pengembangan bahasa melalui kongres/seminar/konferensi internasional dan publikasi ilmiah perlu ditingkatkan.
- 5) Untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa, penggunaan bahasa Indonesia dalam segala bidang kehidupan, termasuk di ruang publik, perlu diperluas jangkauannya dan dipertinggi mutunya.

2.2.2 Bahasa Daerah

- 1) Penelitian tentang jumlah bahasa dan kekerabatan antarbahasa yang ada di Indonesia perlu dilakukan secara berkelanjutan karena masih banyak bahasa daerah yang belum terinventarisasi dan terkodifikasi. Bidang penelitian mencakup bidang struktur bahasa, sosiolinguistik, etnolinguistik, pemetaan bahasa, perbandingan bahasa, perkembangan bahasa, dan sebagainya.
- 2) Pendokumentasian bahasa daerah sebagai perwujudan peta wilayah dan budaya perlu terus dilakukan dan disempurnakan.
- 3) Untuk menjaga ketahanan bahasa dan sastra daerah, hendaknya kedudukan serta fungsi bahasa dan sastra daerah di tengah-tengah kehidupan bahasa Indonesia dan bahasa asing dimantapkan.
- 4) Pelestarian bahasa daerah, termasuk aksaranya, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diatur dalam peraturan pada tingkat pusat dan daerah.

2.2.3 Bahasa Asing

- 1) Pembelajaran bahasa asing perlu ditingkatkan mutunya dalam kaitannya dengan pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dalam masyarakat global, yang ditandai oleh kemampuan berkomunikasi secara aktif.
- 2) Pembelajaran bahasa asing dapat ditingkatkan melalui jalur formal dan nonformal dengan penyediaan sumber daya manusia yang tersertifikasi.
- 3) Penguasaan bahasa asing diperlukan sebagai salah satu sarana untuk membentuk

insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif yang dapat bersaing dengan masyarakat global.

2.3 KESASTRAAN

Sastra Indonesia adalah bagian penting dalam kebudayaan Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, sastra Indonesia secara alamiah merupakan produk peradaban yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam situasi budaya majemuk. Kemajemukan budaya merupakan bagian dari dunia batin sastra Indonesia. Selanjutnya, dalam konteks kebhinekatunggalikaan sastra Indonesia dan sastra daerah diharapkan memiliki potensi yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena pemahaman yang mendalam terhadap aspirasi, kekuatan, kekurangan, pandangan hidup, dan pandangan dunia dari kelompok-kelompok etnik yang menjadi warga bangsa dapat ditimba dari keduanya.

Pemanfaatan sastra Indonesia dan sastra daerah sebagai salah satu instrumen dalam pendekatan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu digunakan pendekatan kolaborasi yang berfungsi sebagai sarana peningkatan pengelolaan sumber daya dan pengintegrasian batas-batas kepentingan antara pengarang, pemerintah, dan pemilik modal.

Melalui sastra, bahasa dapat lebih mudah memaksimalkan perannya dalam pembentukan karakter bangsa. Dengan kekhasannya, sastra, baik lisan maupun tertulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa daerah dapat lebih menarik ditampilkan karena, antara lain, mengungkapkan berbagai pengetahuan tentang manusia dan kehidupannya secara indah dan menyentuh hati. Dengan fungsi dan perannya masing-masing, sastra Indonesia dan sastra daerah secara bersama-sama mampu mewujudkan “keindonesiaan”, baik dalam arti politis maupun budaya.

Untuk memperlihatkan kekuatan sastra dalam pembentukan karakter bangsa, diperlukan strategi yang dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Keanekaragaman situasi dan kondisi membentuk seseorang dan/atau komunitas masyarakat dalam mewujudkan kebudayaannya. Sebaliknya, keaneragaman budaya dan masyarakat pendukung juga menentukan situasi dan kondisi yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu pada satu sisi merupakan khazanah yang amat berharga yang telah diwariskan dan menjadi identitas pemiliknya, tetapi pada sisi lain merupakan pemicu perpecahan. Oleh karena itu, apa yang diyakini sebagai warisan budaya suatu komunitas, misalnya, perlu dimaknai juga dalam bingkai warisan budaya secara nasional dan internasional.

Strategi yang tepat dan konkret justru dimulai dari peran serta masyarakat pemilik warisan budaya yang bersangkutan. Dalam kaitan itu sangat penting untuk menempatkannya sebagai sinergi antara ilmuwan, masyarakat, dan birokrasi yang secara politis dianggap sebagai penentu kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengoordinasian antarlembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah, perlu ditingkatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan secara kreatif sumber budaya

dan sastra.

- 2) Pemetaan sastra daerah dalam upaya penyelamatan warisan budaya dan sastra untuk mengenali peradaban bangsa Indonesia dan menelusuri kekerabatan antarberbagai jenis dan bentuk sastra daerah.
- 3) Pengkajian sastra daerah sebagai pemer kaya sastra Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya pemahaman lintas budaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Penelaahan sastra Indonesia dilakukan dengan sudut pandang yang berorientasi pada peradaban bangsa Indonesia.
- 5) Penelitian sastra Indonesia dan daerah hendaknya ditujukan pada upaya penyiapan pangkalan data bagi pengembangan bahan pembelajaran.
- 6) Estetika sastra daerah yang semakin tersisihkan perlu direvitalisasi.
- 7) Penyebaran karya sastra Indonesia dan penerjemahannya ke dalam bahasa asing dan karya sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia perlu digiatkan dalam program yang terpadu dan terencana.
- 8) Pembinaan sastra perlu terus ditingkatkan dengan berbagai kegiatan, antara lain kegiatan penulisan karya kreatif, penghargaan sastra, dan festival sastra.

2.4 PENGAJARAN BAHASA DAN SASTRA

Penyempurnaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta daerah perlu dimaksimalkan melalui berbagai inovasi dan dipertimbangkan relevansinya dengan kurikulum yang berlaku.

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sebagai pencetak calon guru bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, perlu menyesuaikan kurikulumnya dengan kurikulum yang berlaku di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA atau yang sederajat.

Selain metode pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi, dibutuhkan metode khusus guna menanamkan sikap positif serta rasa bangga terhadap bahasa dan sastra Indonesia.

A. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia perlu dimaksimalkan melalui inovasi pada dua aspek utama, yaitu materi dan metodologi.

a. Aspek Materi

Pembelajaran bahasa dan sastra menurut ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) harus diawali dengan *wacana (karya sastra)*. Oleh sebab itu, wacana sebagai materi pokok pembelajaran perlu memenuhi kriteria kelayakan, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Materi memenuhi aspek *keluasan materi* yang memenuhi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD), yang disertai dengan materi penunjang lain yang relevan dengan jenjang pendidikan serta tingkat usia peserta didik.

- 2) Materi memenuhi aspek *kedalaman materi* yang diawali dengan materi sederhana ke kompleks, dan dari konkret ke abstrak sesuai dengan jenjang pendidikan serta tingkat usia peserta didik.
- 3) Materi memenuhi prinsip kepentingan lokal (kontekstual), nasional/regional, dan kepentingan global.
- 4) Materi harus memenuhi, paling tidak, empat aspek kecerdasan menurut paradigma pendidikan nasional, yaitu: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan social.
- 5) Materi pembelajaran dalam bentuk **wacana (karya sastra)** perlu memenuhi standar keterbacaan sesuai jenjang pendidikan dan tingkat usia peserta didik.
- 6) Kompetensi kebahasaan guru perlu terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan bahasa dan sastra Indonesia yang berkiblat pada Pusat Bahasa.

b. Aspek Metodologi Pembelajaran Bahasa dan Sastra

- 1) Metodologi pembelajaran bahasa secara tradisonal harus ditinggalkan dan mulai menerapkan metode-metode pembelajaran bahasa baru yang relevan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
- 2) Metode pembelajaran bahasa dan sastra selain berorientasi pada penguasaan materi, juga perlu menerapkan metode khusus yang dipandang mampu menanamkan sikap positif dan bangga terhadap bahasa dan sastra Indonesia;

B. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

Keberadaan bahasa daerah sebagai salah satu bahasa yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dijadikan bahasa ibu menempati posisi yang sangat strategis dalam membangun insan cerdas kompetitif. Dengan bahasa ibu, anak Indonesia tidak hanya dididik bagaimana berpikir runtut, logis melalui pemakain bahasa secara baik dan benar; bermoralitas tinggi melalui pilihan bahasa yang disesuaikan dengan siapa mitra wicaranya, atau melalui keteladanan tokoh-tokoh dalam cerita lokal; juga dididik agar menjadi insan yang menghayati nilai-nilai keindahan melalui penguasaan syair-syair atau lagu-lagu lokal. Mengingat lengkapnya pencapaian tujuan umum pendidikan anak manusia yang dapat dicapai melalui bahasa ibu, perlu dirumuskan kemungkinan pengembangan bahan pembelajaran bahasa dan sastra daerah dengan penekanan pada kompetensi pengembangan logika, etika, dan estetika di samping penekanan pada kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan empat keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Bukti-bukti linguistik yang berupa kesamaan sejarah atau asal bahasa-bahasa di Indonesia dapat dijadikan salah satu bahan ajar dalam rangka menumbuhkan pemahaman kebinekaan dalam ketunggalikaan. Oleh karena itu, perlu dikaji kemungkinan pemanfaatan bukti kebahasaan tersebut sebagai bahan pembelajaran dengan mempertimbangkan:

- a. bahan disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik,
- b. semakin tinggi jenjang pendidikan peserta didik, semakin banyak bahasa daerah lain yang dipahami memiliki sejarah yang sama dengan bahasa daerahnya sehingga

akan semakin luas pemahaman makna kebinekaan dalam ketunggalikaan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut.

1. Penelitian bahasa daerah hendaknya ditujukan pada upaya penyiapan pangkalan data bagi pengembangan bahan pembelajaran, yang dapat berupa penelitian berikut.
 - a. Pemanfaatan penelitian pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia untuk mengetahui secara jelas bahasa-bahasa yang belum terpetakan di Indonesia serta mengetahui bahasabahasa yang berada dalam ancaman kepunahan.
 - b. Penelitian kekerabatan dan pengelompokan bahasa-bahasa dengan tidak hanya memanfaatkan bidang kajian linguistik, tetapi juga dengan memanfaatkan bidang ilmu lain yang terkait, seperti penelitian linguistik dan genotipe.
 - c. Penelitian pengembangan bahasa dengan tujuan standardisasi bahasa serta standardisasi aspek kebahasaan: seperti standardisasi ejaan, tata bahasa, dan perkamusan.
2. Penelitian sastra daerah yang ditujukan untuk mengidentifikasi bentuk sastra dalam komunitas pemakai bahasa-bahasa daerah.
3. Penelitian geosastra yang bertujuan menelusuri relasi kekerabatan antarberbagai jenis dan bentuk sastra daerah yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai kelompok etnik di Indonesia.
4. Pengembangan kurikulum dan silabus, bahan pembelajaran, serta petunjuk pembelajaran bahasa dan sastra daerah.
5. Penyediaan tenaga pembelajaran bahasa dan sastra daerah yang memiliki kompetensi.
6. Mengusahakan payung hukum dalam bentuk Perda sebagai dasar pembelajaran bahasa dan sastra daerah.

C. Pendidikan Bahasa Asing

1. Pendidikan bahasa asing perlu ditingkatkan mutunya dalam kaitannya dengan pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif yang dapat bersaing dalam masyarakat global.
2. Pendidikan bahasa asing dapat ditingkatkan melalui jalur formal dan nonformal dengan penyediaan sumber daya manusia yang tersertifikasi dan berpengalaman.
3. Sarana dan mutu pendidikan bahasa asing perlu ditingkatkan dalam upaya pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif yang dapat bersaing dengan masyarakat global.
4. Pendidikan bahasa asing dimaksudkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif yang dapat dibanggakan tanpa melupakan jati diri dan nilai-nilai keindonesiaan, yang mampu berkomunikasi dalam bahasa asing yang sesuai dengan konteks.

TINDAK LANJUT

- 1) Pengajaran sastra perlu dilakukan dengan wawasan sastra daerah, sastra nasional,

dan sastra dunia.

- 2) Pengajaran sastra Indonesia dan daerah ditujukan untuk menumbuhkan apresiasi sastra, ekspresi sastra, dan kreasi sastra.
- 3) Perlu dilakukan pengembangan kurikulum dan silabus, bahan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, dan pengembangan alat evaluasi bagi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
- 4) Perlu penyediaan tenaga pengajar bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang memiliki kompetensi.

2.5 BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING

Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) memiliki peran yang sangat strategis dalam pencitraan negara dan bangsa Indonesia. Keberhasilan program BIPA yang setakat ini sudah diselenggarakan di berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri, akan berdampak positif terhadap pandangan dan penyikapan negara dan bangsa mancanegara terhadap Indonesia.

Pada kenyataannya, kondisi objektif penyelenggaraan program BIPA masih berjalan menurut versi kelembagaan masing-masing terutama di dalam negeri. Konsekuensinya, berbagai hal yang terkait dengan perangkat penyelenggaraan dan komponen pendukung program juga sangat bergantung dan berorientasi pada versi kelembagaan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja program, diperlukan pengembangan dan pemantapan sistem kelembagaan BIPA yang menjadi acuan penyelenggaraan BIPA secara nasional. Dengan adanya sistem kelembagaan BIPA, penyelenggaraan program BIPA akan menjadi lebih jelas dan terarah. Di samping itu, tata laksana penyelenggaraan program BIPA juga menuntut perhatian dari pemerintah (dalam hal ini Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan sejumlah departemen ataupun institusi pemerintah terkait) sedemikian rupa sehingga kualitas proses dan capaian program BIPA dapat lebih ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal itu, sejumlah upaya nyata perlu dilakukan dengan melibatsertakan semua pihak atau unsur yang terkait. Upaya-upaya dimaksud, di antaranya, sebagai berikut.

- 1) Sistem kelembagaan BIPA yang profesional sebagai acuan institusional penyelenggaraan program BIPA perlu diwujudkan.
- 2) Perlu dilanjutkan kebijakan strategis penyelenggaraan program BIPA, baik di dalam maupun luar negeri, yang menyangkut pemetaan penyelenggaraan program BIPA, kerja sama (kolaborasi) antarinstansi penyelenggara BIPA, penyediaan tenaga pengajar BIPA yang profesional, dan pengembangan paket silabus, media, bahan evaluasi, serta bahan ajar BIPA.
- 3) Perlu dilanjutkan dan dikembangkan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri (selain di Australia) sebagai wahana informasi dan sosialisasi BIPA.

2.6 MEDIA MASSA

Fungsi dan peran media massa (dalam arti luas) sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi,

tetapi juga mengemban misi pendidikan untuk pencerdasan anak bangsa. Dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi, media massa seyogianya ikut berperan aktif menyampaikan berbagai hal kepada khalayak tentang keberadaan bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai kebijakan kebahasaan. Adapun terkait dengan fungsinya sebagai media pendidikan, media massa harus dapat menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, cerdas dan segar. Untuk itu, insan media massa harus menguasai keterampilan berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku serta memiliki komitmen untuk menerapkan keterampilan berbahasanya dalam bidang tugas mereka sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku pengemban misi pencerdasan bangsa.

Pada era kesejagatan seperti sekarang ini disadari bahwa peran media massa semakin penting dalam upaya menjaga dan mengembangkan peradaban bangsa, termasuk pengembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia mengingatkan kembali kepada insan media massa akan tanggung jawabnya tersebut mengingat peran dan fungsi media massa yang bisa memengaruhi pola pandang, pola pikir, dan perilaku khalayak pembaca, penonton dan/atau pendengarnya. Media massa, bahkan, kini disadari menjadi salah satu rujukan penting bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda melalui dunia pendidikan sehingga dalam kadar tertentu media massa ikut menentukan perkembangan bahasa Indonesia. Untuk itu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai anak bangsa yang ikut mengemban dan menjaga peradaban bangsa perlu terus digelorakan di kalangan insan media massa.

Di tengah berbagai tantangan kebahasaan yang dihadapi oleh bahasa Indonesia, sudah sepatutnya apabila media massa ikut mengambil peran kesejarahan dalam pemertabatan bahasa Indonesia sehingga pada gilirannya bisa menjadi sarana pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu tindak lanjut sebagai berikut.

- 1) Peningkatan profesionalisme di kalangan insan media massa perlu terus dilakukan dengan memperkuat basis keterampilan berbahasa Indonesia, baik secara internal maupun melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait.
- 2) Untuk menghindari penggunaan varian bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang cenderung merusak upaya pengembangan bahasa Indonesia, perlu ada kesepahaman di kalangan pengelola media massa untuk melahirkan bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang baku.
- 3) Pengayaan bahasa Indonesia, khususnya menyangkut kosakata baru, oleh media massa tetap diperlukan, baik yang bersumber dari bahasa daerah maupun bahasa asing, tetapi harus menjaga keseimbangan agar tidak saling meminggirkan dan/atau mematikan.
- 4) Pusat Bahasa perlu terus melanjutkan dan meningkatkan kerja sama kebahasaan dengan insan media massa.
- 5) Media massa perlu memberi ruang khusus atau rubrik pembinaan bahasa Indonesia.
- 6) Dunia perfilman perlu meningkatkan pemanfaatan karya sastra Indonesia dan daerah sebagai bahan penulisan skenario serta memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

REKOMENDASI:

- 1) Pusat Bahasa perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait sehubungan dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam upaya membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
- 2) Pusat Bahasa perlu meningkatkan pelayanan dan penyebaran produk-produknya sehingga masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkannya.
- 3) Pusat Bahasa perlu meningkatkan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia serta melakukan konservasi dan promosi bahasa dan sastra daerah secara lebih intensif.
- 4) Dalam menyikapi perkembangan situasi global, Pusat Bahasa perlu melanjutkan penyusunan kamus istilah di berbagai bidang ilmu.
- 5) Istilah Indonesia bidang keilmuan dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) dan Pusat Bahasa perlu menyediakan situs istilah bidang ilmu tersebut.
- 6) Pemerintah perlu menindaklanjuti putusan kongres-kongres sebelumnya, antara lain, peningkatan status kelembagaan Pusat Bahasa dan mengkaji ulang keberadaan Badan Pertimbangan Bahasa.
- 7) Kongres mengamanatkan kepada pemerintah dan DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kebahasaan menjadi Undang-Undang Kebahasaan sesuai dengan amanat UUD 45, Pasal 36c.
- 8) Kongres mengamanatkan kepada Pemerintah agar memiliki komitmen untuk menduniakan bahasa Indonesia, antara lain, melalui BIPA dan mengirimkan pakar-pakar bidang bahasa dan sastra, serta pengajarannya ke pusat-pusat pembelajaran BIPA di luar negeri.
- 9) Kongres mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mendirikan Pusat Terjemahan yang menangani penerjemahan karya-karya bangsa Indonesia ke dalam bahasa asing dan sebaliknya, yang antara lain bertugas melakukan penerjemahan dan pemasaran produk terjemahan tersebut.
- 10) Kongres mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerapkan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) sebagai salah satu persyaratan dalam menduduki jabatan tertentu dan pengangkatan CPNS.

Jakarta, 1 November 2008

Tim Perumus Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia

1. Prof. Dr. Ayu Sutarto
2. Dr. Mahsum
3. Dr. Djunaedi
4. Dr. Suparno
5. Dr. Pudentia
6. Dr. Katherina E. Sukamto
7. Drs. Abdul Rozak Zaidan, M.A.
8. Muh. Rapi Tang
9. Widodo

10. Kenedi Nurhan
11. Dr. Dendy Sugono
12. Dr. Sugiyono
13. Dra. Mu'jizah

Dari seluruh perjalanan KONGRES Bahasa Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka hingga kini telah melahirkan berbagai putusan telah dihasilkan dan dari sekian banyak putusan itu sebagian besar telah direalisasikan. Menurut Djoko Saryono, putusan-putusan KBI IV sampai dengan VIII yang semenjak tahun 1978 dilaksanakan secara rutin lima tahun sekali secara kuat mengekspresikan politik linguistic sebab putusan-putusan tersebut didominasi oleh pertimbangan Linguistik/gramatika sekaligus dirumuskan oleh para ahli bahasa (linguis) dan sastra. Kenyataan-kenyataan ini memperlihatkan bahwa selama ini dilaksanakan suatu politik linguistic Indonesia yang terbatas dan sempit, bukan politik bahasa dalam arti menyeluruh (komprehensif) dan luas.

Di samping itu, politik bahasa yang selama ini dilaksanakan – setidaknya-tidaknya selama masa Orde Baru – merupakan politik uniformasi dan monodimensionalisasi, politik penyeragaman dan penunggalan (penyatuan). Keseragaman dan ketunggalan atau kesatuan dikedepankan, keragaman dan kemajemukan ditinggalkan, dalam menentukan, merumuskan, dan melaksanakan format, agenda, dan kebijakan politik bahasa Indonesia atau politik bahasa di Indonesia. Keragaman dan kemajemukan bahasa yang ada di Indonesia, fungsi-fungsi bahasa yang ada dan dipakai di Indonesia, ragam dan bentuk bahasa Indonesia yang dipakai di Indonesia terkesan diabaikan, kurang diperhatikan. (Djoko Saryono, Bahasa, Seni dan Budaya di Tengah Kelindan Kuasa, Pustaka Kayutangan, Malang, 2005, hal. 38-39)



BŪ . BU . NANANG LIAT JANG BERKA-
BUNG KOK AJEM ADJA.

Karikatur yang dimuat di harian Bintang Timur, 31 Mei 1964 yang ditujukan pada kelompok yang menyelenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPSI), tanggal 1-7 Maret 1964.
(Sumber: Prahara Budaya, DS Muljanto dan Taufiq Ismail)

BAB III

KONGRES BAHASA DAERAH

Sebagaimana disinggung dalam Bab II, masalah keberadaan bahasa daerah diatur dalam Pasal 36 UUD 1945, berada di bawah naungan BAB XV yang berjudul BENDERA DAN BAHASA. Bab itu terdiri atas 2 Pasal, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36. Bunyi Pasal 35: Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, dan Pasal 36 bunyinya singkat saja: *“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.”* Untuk memberikan keterangan tentang makna yang terkandung dalam Pasal 36 yang singkat itu, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyepakati untuk mencantumkan kalimat penjelasan. Bunyi selengkapnya Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 adalah:

“Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dsb.) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara. Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup”.

Berdasarkan risalah hasil rapat BPUPKI tanggal 13 Juli 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, masalah Bahasa termasuk yang diperbincangkan dengan serius. Dalam rancangan UUD 1945, bunyi Pasal 36 semula berbunyi: (1) *Bahasa kebangsaan adalah bahasa Indonesia*; (2) *Bahasa-bahasa daerah dihormati*. Setelah Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil menyampaikan laporannya, anggota Oto Iskandardinata menyampaikan usul agar kata *“Bahasa kebangsaan”* diganti dengan *“Bahasa Negara”*. Selanjutnya pada rapat tanggal 15 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, anggota Soepomo memberikan uraian panjang lebar tentang bahasa. Antara lain Soepomo mengatakan:

“Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia, sama sekali tidak berarti bahwa misalnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda harus dihapuskan. Sama sekali tidak! Saya pernah mendengar dalam sidang ini perkataan: “janganlah memakai nama ‘Soekardjo’, sebab itu ialah nama nama Jawa. Kita harus memakai nama Indonesia. Pendapat ini salah. Bukan itu yang dimaksudkan. Nama Jawa atau nama Sunda itu juga nama Indonesia. Jadi bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa dan bahasa-bahasa

lain harus dihormati. Bahasa Jawa` misalnya yang begitu tinggi tingkatannya dan dipakai oleh berjuta-juta orang, tidak bisa lenyap. Kita harus memelihara dengan sebaik-bainya bahasa daerah yang begitu luas dan tinggi kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu kita harus mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa Negara. Dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara, kita akan mengekalkan persatuan seluruh rakyat Indonesia.”. (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, hal. 279).

Berdasarkan pada uraian penjelasan yang disampaikan Soepomo di atas itu, kalimatnya disempurnakan dan dipersingkat menjadi

“Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dsb.) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara”.

Selanjutnya dalam kaitan dengan kebudayaan, pada ayat (2) posisi bahasa daerah juga diperjelas hubungannya dengan penjelasan: *“Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup”.* Selanjutnya mengingat bahasa itu pada hakikatnya adalah salah satu unsur dari kebudayaan, dipandang perlu untuk ditambahkan satu kalimat penjelasan lagi yang berbunyi: *“Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.”* Dengan ditetapkannya Pasal 36 tentang bahasa maka posisi Bahasa Indonesia yang secara *‘de facto’* pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan sebagai Bahasa Persatuan, sejak diberlakukannya UUD 1945 secara *‘de jure’* Bahasa Indonesia memiliki posisi konstitusional yang sangat kuat. Mulai saat itu Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi termasuk digunakan pada sidang Konstituante yang pertama.

Dengan adanya kalimat penjelasan itu maka kemungkinan akan terjadi multitafsir terhadap makna Pasal 36, khususnya tentang posisi bahasa daerah setelah lahir bahasa Indonesia dapat dihindarkan. Para pendiri bangsa telah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang dapat saja muncul pada generasi berikutnya tentang posisi bahasa daerahnya. Termasuk kemungkinan munculnya “gugatan” dari masyarakat Melayu-Riau yang bahasa daerahnya telah diangkat menjadi bahasa Indonesia dan ternyata setelah diangkat menjadi Bahasa Indonesia dirasakan telah kehilangan bergeser dari aslinya.

Hal lain yang menarik dari sidang penyusunan Rancangan UUD 1945 adalah perhatian yang besar terhadap penggunaan bahasa. Sebagai sebuah produk hukum, bunyi Pasal 36 yang diikuti dengan penjelasannya menjadikan jelas posisi, maksud dan tujuannya karena dituangkan dalam bahasa yang terang dan mudah difahami orang. Keinginan itu dapat dicapai karena ternyata BPUKI membentuk “Panitia Penghalus Bahasa” dan pekerjaan merapikan konsep UUD 1945 itu diserahkan kepada 3 orang yaitu: Hoesein Djajadiningrat, H. Agoes Salim dan Soepomo.

Bagaimana posisi bahasa daerah (Pasal 36) setelah UUD 1945 diamandemen? Seperti telah diutarakan di atas, dalam UUD 1945 hasil Amandemen tidak lagi

menggunakan Penjelasan. Pasal 36 yang semula memiliki 2 kalimat penjelasan sekarang tidak lagi memiliki dua kalimat penjelasan itu. Masalah bahasa tetap ditampung dalam BAB XV tetapi mengalami perubahan/ penambahan sehingga judulnya yang semula berbunyi BENDERA DAN BAHASA berubah menjadi BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANG-SAAN. Bab XV yang semula terdiri atas 2 Pasal, yaitu Pasal 35 (Bendera) dan Pasal 36 (Bahasa) kini berubah menjadi 5 Pasal yang masing-masing bunyinya sbb: (1) Pasal 35: Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih; (2) Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia; (3) Pasal 36A: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika; (4) Pasal 36B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya; (5) Pasal 36C: Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan Undang-undang.

Dalam Pasal 36 yang baru 2 kalimat dalam penjelasan yaitu ayat (1) dan (2) telah dihilangkan dari pasal itu. Yang tidak jelas alasannya, ternyata ayat (2) yang berbunyi: *“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”* dipertahankan hanya saja tempatnya dipindahkan ke Pasal 32, tentang Kebudayaan.

Mengingat betapa pentingnya kalimat pertama penjelasan Pasal 36 itu, maka seharusnya kalimat penjelasan itu dapat diangkat menjadi Ayat, sehingga masyarakat pemilik bahasa Daerah akan dapat memahami di mana posisi bahasa Daerah dalam kaitan dengan bahasa Indonesia. Tampaknya, untuk mengatasi kemungkinan kesalahpahaman pemilik bahasa Daerah diberi peluang yang amat terbuka untuk membuat UU tentang Kebahasaan. Amanat ini dipenuhi dengan lahirnya UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Mengenai bahasa daerah diatur dalam Bab III Bahasa Negara, Pasal 42 yang terdiri atas 3 ayat, yaitu:

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Meskipun keberadaan bahasa daerah memiliki landasan konstitusi yang kuat tetapi kondisi bahasa daerah di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Keberadaan bahasa ibu sekitar 746 bahasa ibu, dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung terus berkurang. Di Papua, dulu ada 273 bahasa daerah, tetapi kini menyusut menjadi 271 bahasa. Di Sumatra, jumlah bahasa daerah berkurang, dari 52 bahasa menjadi 49 bahasa. Di Sulawesi, bahasa daerah berkurang dari 116 bahasa menjadi 114 bahasa. Yang mengkhawatirkan, menurut hasil penelitian UNESCO, kepunahan bahasa ibu dari sekian banyak Negara yang terbanyak terjadi di Indonesia. Pudahnya bahasa ibu bisa menyebabkan punahnya budaya, karena setiap bahasa memiliki istilah yang erat dengan tradisi dan budaya lokal.

Seperti dikatakan oleh Kepala Bidang Peningkatan dan Pengendalian Bahasa Badan Bahasa Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Sugiyono, dari 746 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, hanya sembilan yang memiliki sistem aksara, yakni Aceh, Batak, Lampung, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Sunda dan Sasak. Sisanya, kata Sugiyono, hanya diturunkan melalui tradisi lisan dan inilah yang perlu dikaji lebih jauh dan didokumentasikan agar tidak hilang.

Ada beberapa faktor penyebab. Selain dalam teori kepunahan disebabkan oleh perang atau bencana alam tetapi penyebab yang paling utama sekarang ini saya kira urbanisasi dan perkawinan antaretnis. Kalau dua orang dari daerah kemudian pindah ke Ibukota atau ke kota besar maka mereka akan berinteraksi dengan etnis lain, lalu bahasa etnisnya sendiri akan ditinggalkan. Mereka akan memilih bahasa Indonesia sebagai penghubung antar etnik satu dengan etnik yang lain. Dalam perkawinan antaretnis, bahasa yang diajarkan kepada anak bukan bahasa daerah Ayah atau Ibu atau dua-duanya melainkan bahasa Indonesia. Dengan demikian, dua bahasa daerah tidak lagi dikenal oleh generasi berikutnya. Demikian seterusnya.

Perbincangan mengenai keberadaan bahasa daerah sekarang dan kedepan banyak dibicarakan dalam berbagai forum, seperti: diskusi, dialog, seminar, simposium, konferensi hingga kongres. Perbincangan itu sudah dimulai sejak zaman penjajahan oleh ahli-ahli dari Barat. Berdirinya lembaga penelitian kebudayaan, seni dan ilmu pengetahuan (*Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*) tahun 1778, disusul oleh *Javaansch Taal Instituut* (1832), *Java Instituut* (1919) melakukan penelitian, pendokumentasi berbagai bahasa daerah.

Keberadaan bahasa-bahasa suku bangsa atau disebut sebagai bahasa daerah Pasal 36 UUD 1945 sebelum amandemen masih tetap dijamin kelangsungannya. Sesuai Pasal 36 UUD 45 sebelum diamandemen kedudukan bahasa daerah di wilayah RI yang menetapkan bahasa Melayu Riau sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia tetap dilindungi. Aktivitas kongres di bidang bahasa daerah khususnya bahasa Jawa dan Sunda telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka.

Setelah Indonesia merdeka di antara berbagai suku bangsa yang ada, masyarakat Sunda tergolong paling aktif dalam memperbincangkan bahasanya dalam forum kongres. Sampai sekarang telah berlangsung 9 kali kongres, sementara bahasa Jawa kongres ke-5 diselenggarakan tahun 2011. Gambaran secara sekilas dari perjalanan dari kongres ke kongres yang lain di bidang bahasa daerah adalah sebagai berikut.

A. Kongres Bahasa Sunda (KBS)

Sebagai sebuah lembaga penelitian kebudayaan dan kesenian yang menitikberatkan perhatiannya pada kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali, *Java-Instituut* mengambil inisiatif untuk diselenggarakannya kongres, membahas berbagai masalah di sekitar bahasa Sunda (Jaap Erkelens: 2001: hal. 5). Untuk itu *Java-Instituut* bersama-sama dengan kaum terpelajar Sunda dan masyarakat pemilik bahasa dan sastra Sunda tahun 1924 berkumpul untuk memperbincangkan masalah bahasa Sunda. Penyelenggaraan kongres itu telah mendorong penyelenggaraan kongres-kongres bahasa Sunda berikutnya, terutama sesudah Indonesia merdeka. Di antara bahasa-bahasa daerah yang lain, bahasa Sunda termasuk yang paling banyak menyelenggarakan

kongres. Kongres Bahasa Sunda yang pernah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

A.1 Sebelum Indonesia merdeka

- A.1.1 Kongres Bahasa Sunda I diselenggarakan pada tanggal 7 – 9 Oktober 1924 di Bandung.
- A.1.2 Kongres Bahasa Sunda II diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 Oktober 1927, di Bandung. (Jaap Erkelens, Java Instituut Dalam Foto)

A.2 Sesudah Indonesia merdeka

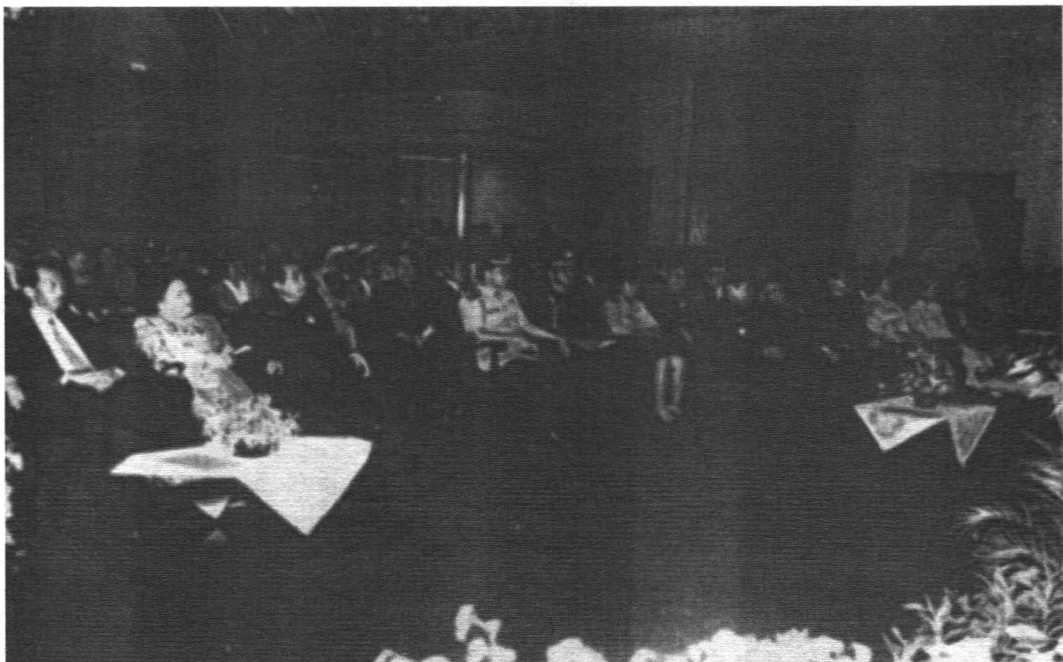
- A.2.1 Konferensi Bahasa Sunda, 1952 di Bandung
- A.2.2 Kongres Bahasa Sunda I, 1954 di Bandung
- A.2.3 Kongres Bahasa Sunda II, 1956 di Bandung
- A.2.4 Kongres Bahasa Sunda III, 1958 di Bandung
- A.2.5 Kongres Bahasa Sunda IV, 1961 di Bandung
- A.2.6 Kongres Bahasa Sunda V, 1988 di Cipayung, Bogor
- A.2.7 Kongres Bahasa Sunda VI, 1993 di Bandung.
- A.2.8 Kongres Bahasa Sunda VII, 2001 di Garut.
- A.2.9 Kongres Bahasa Sunda VIII, 2005 di Subang.
- A.2.10 Kongres Bahasa Sunda IX, 2011 di Cipayung, Bogor.

Sebelum diselenggarakan Kongres Bahasa Sunda tahun 1954, pada tanggal 17-19 Mei 1952 di Bandung diselenggarakan Konferensi Bahasa Sunda. Salah satu keputusan konferensi itu adalah perlu dibentuknya sebuah badan tetap yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, dan mempunyai misi memelihara dan meneliti bahasa dan sastra Sunda. Sebagai realisasi dari keputusan itu berdirilah lembaga yang disebut “LEMBAGA BASA JEUNG SASTRA SUNDA” disingkat LBSS, lengkap dengan logonya. LBSS disahkan sebagai sebuah lembaga berbadan hukum oleh pemerintah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1952 No. J.A. 5/152/17. Sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 3, tujuan lembaga ini adalah memelihara bahasa dan sastra dalam arti seluas-luasnya (*ngamumulé basa jeung sastra Sunda dina harti anu sajembar-jembarna*). Sementara itu dalam Pasal 4 diuraikan tentang misi LBSS, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang lengkap berbagai hal tentang bahasa dan sastra Sunda, pada saat sekarang maupun yang lampau.
2. Memajukan bahasa dan sastra Sunda dengan menyelenggarakan kegiatan karang-mengarang, sayembara sastra dan bahasa, kursus, ceramah, penerangan dan kongres.
3. Membantu siapa pun yang mempunyai keinginan yang sejalan dengan tujuan lembaga.
4. Melakukan berbagai upaya lainnya yang sah serta bermanfaat untuk lembaga. (H. Maman Sumantri, 2002: hal. 9-10)

Keberadaan LBSS sejak tahun 1952 hingga kini masih tetap berjalan. Meskipun berganti-ganti pengurus namun tetap aktif menyelenggarakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan Sunda. Sesuai dengan misi butir b, yakni menyelenggarakan kongres, LBSS telah berhasil menyelenggarakan 8 kali Kongres Bahasa Sunda seperti tersebut di atas. Di samping itu LBSS telah menghasilkan berbagai karya yang sangat penting artinya bagi kemajuan bahasa dan sastra Sunda. Hasil yang dicapai antara lain adalah mendirikan Kursus B I Bahasa Sunda, menyusun buku seri Pelajaran Bahasa Sunda, penataan ejaan, pemberian hadiah sastra, Kamus Umum Basa Sunda (KUBS), Kamus Sunda-Indonesia, Kamus Istilah Populer Basa Sunda, beberapa kali lokakarya, penataran, seminar, penataan kantor LBSS (di Jln. Naripan No. 7 Bandung) dan penataan perpustakaan atau Pabukon LBSS.

Untuk memperkuat peran dan posisi LBSS, sesuai hasil Kongres Bahasa Sunda 1988 dibentuk Panitia Khusus terdiri atas 7 orang, yaitu: Ilen Surianegara, Maman Sumantri, Drs. Wahyu Wibisana, Drs. Ahlan Husen, Drs. Oyon Sofyan Umsari, Drs. Ateng Sopala, dan Uu Rukmana, untuk melakukan renovasi LBSS. Dalam waktu 2 bulan Tim Kecil berhasil mengubah status badan hukum LBSS dari lembaga massa menjadi lembaga berbentuk yayasan, dikukuhkan dengan Akta Notaris Komar Andasasmita No. 22 dan No. 23 tanggal 14 April 1988. Nama LBSS masih tetap dipertahankan, sehingga nama lengkap yayasan menjadi YAYASAN LEMBAGA BASA JEUNG SASTRA SUNDA. Dalam Kongres Bahasa Sunda 2005 di Subang masalah kelembagaan dilakukan pembenahan lagi, terutama dikaitkan dengan lahirnya UU No. 16 tahun 2001 dan UU No. 28 tahun 2004 berkenaan dengan Yayasan (Kumpulan Makalah Kongrés Basa Sunda VIII: 2005).



Pembukaan Kongres Bahasa Sunda VI 1993 di Gedung Merdeka Bandung. Hadir, Wakil Presiden RI Try Sutrisno, Menko Kesra Ir. H. Azwar Anas, Menhankam Jenderal Purn. H. Edi Sudradjat, Mendikbud Pro. Dr. -Ing Wardiman Djojonegoro dan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana.



Sidang di Pendopo Kabupaten Garut, tempat Kongres Bahasa Sunda VII tahun 2001.



*Kiri: Logo Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda (LBSS) sejak berdiri tahun 1952
Kanan: Logo Kongres Bahasa Sunda yang dipakai sejak Kongres Bahasa Sunda tahun 1988, di Cipayung Bogor.*

Kongres Bahasa Sunda tahun 2011 (IX) antara lain menghasilkan 7 sasaran rekomendasi yang diberi judul "Panggeuing Cipayung". Rekomendasi itu ditujukan kepada Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda (LBSS) Pemerintah provinsi Jawa Barat, DPRD provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Madia di Jawa Barat, Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan

Dinas Pariwisata Kebudayaan provinsi Jawa Barat.

1. Pemprov diminta memfasilitasi program "ngamumule" basa, sastra dan aksara Sunda dengan mengalokasikan anggarannya di APBD setiap tahun sesuai pasal 11 Perda Jabar No. 5/2003 yang dikelola oleh LBSS.
2. Pemprov diminta melaksanakan amanat Perda No. 5/2003 tentang pemeliharaan basa, sastra dan aksara daerah, khususnya tentang perlunya basa Sunda dipakai sebagai bahasa pengantar pembelajaran di sekolah mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan sekolah Dasar sampai kelas 3.
3. Pemprov diminta menerjemahkan semua peraturan yang dikeluarkan provinsi Jabar ke bahasa Sunda, memberi beasiswa kepada mahasiswa S1, S2, dan S3 bahasa dan sastra Sunda, serta memfasilitasi semua penelitian tentang kesundaan.
4. Pemprov juga harus mengadakan kerjasama dengan pemerintah luar Jabar untuk mengajarkan basa Sunda di Sekolah yang masyarakatnya menggunakan basa Sunda.
5. LBSS harus mendorong dibuatnya Kamus Basa Sunda lengkap sesuai jaman, mendirikan laboratorium basa Sunda yang menjadi pusat pengembangan bahasa, sastra dan aksara Sunda.
6. LBSS juga harus menerbitkan berita berkala terkait informasi terbaru bahasa, sastra dan aksara Sunda, serta menghidupkan kembali hadiah sastra LBSS setiap tahun.
7. DPRD Jabar diharuskan mendukung dan mengingatkan Pemprov Jabar dalam menjalankan rekomendasi hasil Kongres Basa Sunda IX.

B. Kongres Bahasa Jawa (KBJ)

Seperti halnya Kongres Bahasa Sunda, Java-Instituut juga mendorong diselenggarakannya Kongres Bahasa Jawa. Penyelenggaraan kongres bahasa Jawa dan Sunda selalu bersamaan tahunnya (1924 dan 1927). Tetapi bila dibandingkan dengan bahasa Sunda, perbincangan masalah bahasa dalam forum kongres setelah Indonesia merdeka, bahasa Jawa jauh tertinggal di belakang. Setelah Indonesia merdeka Kongres Bahasa Jawa yang pertama baru diselenggarakan tahun 1991, sementara bahasa Sunda sudah sejak tahun 1954. Hingga kini bahasa Sunda telah menyelenggarakan kongres sebanyak 8 kali sementara bahasa Jawa baru 3 kali saja, padahal masalah yang dihadapi pada dasarnya sama kompleksnya, bahkan mungkin lebih kompleks lagi karena bahasa Jawa memiliki tata bahasa yang khusus, di samping jumlah pemakai dan intensitas terjadinya perubahan akibat pengaruh dari bahasa-bahasa lain lebih banyak.

B.1 Sebelum Indonesia merdeka

B.1.1 Kongres Bahasa Jawa I

Diselenggarakan pada tanggal 11 – 17 Oktober 1924 di Yogyakarta. Salah satu pemrasan pada kongres ini adalah K.P.A. Kusumadiningrat. Ia adalah seorang penulis pada masa pemerintahan Pakoe Boewono X, menghasilkan karya berupa catatan

perjalanan berjudul "Ngideri Buwana" (Mengelilingi Jagat). Buku ini mengisahkan perjalanannya ke Belanda (1917) pulang lewat Amerika Serikat dan Jepang karena jalur biasa terganggu oleh Perang Dunia I. Selain itu, ia juga menulis buku Serat Karya Sararaya, berisi lagu anak-anak bersama D.V. Hinloopen Labberton (1913).

B.1.2 Kongres Bahasa Jawa berikutnya II

Diselenggarakan pada tanggal 25 – 27 Maret 1927 di Yogyakarta.

B.1.3 Kongres Bahasa Jawa III

Diselenggarakan tahun 1929 di Surakarta. Dalam kongres ini disampaikan pemikiran tentang penyederhanaan bahasa Jawa.

B.2 Sesudah Indonesia merdeka

Sampai dengan tahun 2013, Kongres Bahasa Jawa yang telah diselenggarakan setelah Indonesia merdeka adalah:

1. Kongres Bahasa Jawa I, tahun 1991 di Semarang;
2. Kongres Bahasa Jawa II, tahun 1996 di Malang;
3. Kongres Bahasa Jawa III, tahun 2001 di Yogyakarta;
4. Kongres Bahasa Jawa IV, tahun 2006 di Semarang; dan
5. Kongres Bahasa Jawa V tahun 2011 di Surabaya.

Bila dibandingkan dengan bahasa Sunda, perbincangan para ahli bahasa Jawa dalam forum kongres tertinggal jauh dengan para ahli bahasa Sunda. Tahun 1952 bahasa Sunda telah menyelenggarakan konferensi kemudian disusul tahun 1954 menyelenggarakan kongres. Sementara bahasa Jawa baru pada tahun 1991 menyelenggarakan kongres.

Dari 5 kali kongres, di bawah ini ditampilkan hasil Kongres Bahasa Jawa IV (2006) dan V (2011) sebagai berikut.

B.2.1 Kongres Bahasa Jawa IV 2006

Tema KBJ IV adalah "Pemberdayaan Bahasa Jawa melalui Pendidikan dalam Konteks Bhinneka Tunggal Ika". Kongres dihadiri oleh

**PUTUSAN KONGRES BAHASA JAWA (KBJ) IV
SEMARANG, 10 – 14 SEPTEMBER 2006
(aslinya berbahasa Jawa)**

I. PENDAHULUAN

Kongres Basa Jawa (KBJ) dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 September 2006. Kongres ini semula akan diselenggarakan tanggal 5 - 10 Juli 2006. Karena pada tanggal

27 Mei 2006 daerah Jogjakarta dan Jawa Tengah bagian Selatan terjadi bencana alam gempa bumi, maka pelaksanaan kongres lalu diundur menjadi tanggal 10 - 14 September 2006, di Hotel Patra Convention Semarang.

Mekipun dalam suasana prihatin KBJ IV harus tetap berlangsung sebab KBJ IV adalah amanat agar menjadi forum untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Jawa di kemudian hari. Bab-bab yang mendorong harus dilaksanakannya KBJ IV antara lain adalah sebagai berikut:

1. Putusan KBJ III tahun 2001 di Jogjakarta yang mengamantkan agar KBJ IV dilaksanakan di propvinsi Jawa Tengah tahun 2006.
2. Bahasa Jawa sebagai sarana pergaulan (komunikasi) memiliki penutur lebih dari 80 juta yang kebanyakan masih tinggal di pulau Jawa.
3. Bahasa Jawa menunjukkan salah satu bahasa Ibu yang paling besar di dunia. (Urutan ke 11 dari kurang lebih 6.000 bahasa di dunia).
4. Di tengah-tengah era global kondisi dan khidupan bahasa Jawa menghadapi persoalan serius, yaitu makin menyusutnya kualitas dalam pemakainnya.

Putusan kongres ini disusun berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut ini.

- a. Pidato dan makalah-makalah kunci :
- b. Makalah Utama, yang berasal dari:
 - Makalah Sumbangan.
 - Makalah Bupati Banyuwangi, Ponorogo, Bantul, Blora, Wonogiri, Banyumas, Walikota Sirabaya, walikota Tegal.
 - Makalah para Panelis, saran dan usulan para peserta kongres, serta
 - Pendapat dan pemikiran, saran dan kritikan, serta aspirasi masarakat di berbagai media massa.

II. BERDASARKAN PADA PEMIKIRAN

Kehidupan bahasa dan sastra Jawa di zaman global ini terdorong (kadayan) oleh kemajuan budaya yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi, intensitas hubungan antarbangsa, antarbenua yang seperti air mengalir. Dalam suasana seperti itu, keadaan dan kehidupan bahasa dan sastra Jawa menumbuhkan berbagai permasalahan.

Pada bagian lain, bahasa lan sastra Jawa masih memiliki daya lan kekuatan yang semakin berkembang, di antaranya kenyataan seperti terlihat di bawah.

1. Jumlah penutur bahasa Jawa banyak sekali, sekitar 80 juta penutur.
2. Dalam pergaulan (komunikasi) masyarakat Jawa masih mengguna-kan bahasa Jawa.
3. Masyarakat Jawa memiliki keteguhan (komitmen) yang kuat dalam hal memupuk dan mengembangkan bahasa dan sastra Jawa.
4. Bahasa dan sastra Jawa memiliki daya dan kekuatan yang potensial sebagai objek penelitian (studi).

Pada bagian lain, tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah-tengah masyarakat,

khususnya di kalangan kaum muda, penerapan bahasa dan sastra Jawa juga masih memiliki beberapa kekurangan seperti berikut ini.

1. Motivasi kaum muda dalam menggunakan bahasa Jawa semakin menurun.
2. Generasi muda kurang memiliki rasa senang dan bangga menggunakan bahasa Jawa.
3. Pada umumnya, kawula muda memiliki pendapat belajar bahasa dan sastra Jawa itu sulit sekali.
4. Perhatian dan pemberian teladan para pejabat dan tokoh masyarakat dalam hal penggunaan bahasa Jawa cenderung kurang.
5. Belum ada keputusan politik untuk melindungi dan mengukuhkan bahasa, sastra dan budaya Jawa secara serius.

Meskipun demikian, bahasa dan sastra Jawa memiliki kekuatan dan waktu agar tetap hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Jawa sebagai bahasa Jawa memiliki keunggulan-keunggulan seperti berikut.

1. Pitutur luhur yang dimiliki bahasa dan sastra masih menjadi acuan atau rujukan dalam membina dan mendidik kehidupan bermasyarakat serta memberikan kontribusi dalam pembangunan karakter bangsa.
2. Masih ada lapangan pekerjaan yang dapat dilakukan siapa pun yang menguasai bahasa, sastra dan budaya Jawa.
3. Putusan kongres KBJ III Tahun 2001 yang mengamanatkan agar pelajaran bahasa Jawa dimasukkan sebagai muatan lokal dalam kurikulum pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
4. Mulai kurikulum bahasa Jawa diterapkan sejak SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, dan oleh sebab itu kebutuhan guru semakin perlu dan jumlahnya bertambah.

Di alam global, kehidupan bahasa sastra Jawa berada dalam kondisi dilematis, karena keberadaannya menghadapi ancaman seperti berikut.

1. Kekuatan budaya global terhadap budaya lokal termasuk kehidupan bahasa dan sastra Jawa semakin kuat, sehingga bahasa dan sastra Jawa semakin tersisih.
2. Kekuatan kemajuan teknologi informasi terhadap kehidupan masyarakat semakin kuat, sehingga kondisi bahasa dan sastra Jawa semakin dijauhi oleh masyarakat.
3. Surat kabar berbahasa Jawa semakin berkurang, sehingga penyebaran dan pengajaran bahasa Jawa semakin kurang.
4. Karangan yang menggunakan bahasa Jawa tidak laku, membuat para penulis tidak memiliki semangat untuk berkarya.
5. Proses pewarisan ajaran luhur melalui bahasa dan sastra Jawa bagi kawula muda semakin pudar, dan hal ini membuat kawula muda tidak memiliki semangat menghidupkan kembali, melestarikan, dan mengembangkan bahasa dan sastra Jawa.

III. KEBIJAKAN UMUM

Kenyataan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga formal, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Pusat Bahasa dan Bali-

balai Bahasa lebih memperhatikan bahasa nasional Indonesia. Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, bab-bab yang bersifat kedaerahan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah lebih mengutamakan aspek sosial ekonomi dan sosial politik dengan meminggirkan aspek sosial budaya, termasuk bahasa daerah; bab inilah yang membuat bahasa dan sastra Jawa semakin terpinggirkan.

Berdasarkan pada kenyataan ini, bahasa Jawa perlu mendapatkan perhatian. Pada tataran yuridis bahasa Jawa harus memiliki payung hukum, pada tataran sosial harus mendapatkan perhatian masyarakat, dan pada tataran finansial untuk mengembangkan bahasa dan sastra Jawa harus mendapatkan dukungan dana yang cukup.

IV. PUTUSAN KONGRES

A. Pendidikan Formal

1. Menekankan lagi masalah realisasi putusan Kongres Basa Jawa III di Yogyakarta tahun 2001, bahwa pendidikan bahasa dan sastra Jawa wajib diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.
2. Pembelajaran bahasa Jawa harus bersifat kontekstual dan memanfaatkan teknologi informasi, mengutamakan metode baru yang inovatif dan kreatif, serta dimulai dari varian-varian bahasa menuju pada bahasa Jawa baku.
3. Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah harus menerapkan “unggah-ungguh” atau tata berbahasa Jawa sekaligus pelaksanaan pendidikan budi pekerti.
4. Bengkel Sastra perlu dikembangkan sebagai sarana pengembangan apresiasi dan ajang kreativitas.
5. Secara bertahap guru bahasa Jawa harus memiliki pendidikan formal bahasa dan sastra Jawa.
6. Sarjana bahasa dan sastra Jawa nonprodi pendidikan dan mengajar bahasa Jawa setelah menempuh ujian profesi.
7. Kompetensi profesional guru bahasa Jawa yang harus lulusan prodi Pendidikan Bahasa dan sastra Jawa perlu ditingkatkan.
8. Perlu dicukupi buku pelajaran bahasa Jawa yang dinyatakan lulus seleksi oleh suatu tim penilai.
9. Perlu disiapkan fasilitas yang cukup dan khusus bagi proses pembelajaran bahasa Jawa yang mampu mendorong kompetensi dan ketrampilan menggunakan bahasa dan sastra Jawa.
10. Penelitian bahasa dan sastra Jawa perlu mengutamakan topik-topik bahasa dan sastra Jawa yang dapat diterapkan pada pendidikan bahasa dan sastra Jawa.

B. Pendidikan Informal dan Nonformal

1. Mengajak keluarga Jawa supaya menggunakan bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi dalam keluarga.
2. Sanggar bahasa dan sastra Jawa, perkumpulan bahasa dan sastra Jawa perlu

dikembangkan sebagai wadah pendidikan bahasa dan sastra Jawa.

3. Memberdayakan bahasa dan sastra Jawa perlu terus digiatkan melalui berbagai aktivitas seperti lomba, sarasehan, pelatihan, kursus.
4. Lembaga keagamaan, kemasyarakatan dan kebudayaan perlu terus membantu pemberdayaan bahasa dan sastra Jawa.

C. Kearifan Lokal

1. Sumber-sumber kearifan lokal masyarakat Jawa perlu diinventarisasi, dikenali, didokumentasi dan disebarluaskan.
2. Kearifan lokal masyarakat Jawa perlu diterapkan dan diapresiasi oleh masyarakat, bangsa dan negara dengan semangat bhinneka tunggal ika.

D. Memberdayakan Bahasa dan Sastra Jawa

1. Perlu disusun rencana strategis untuk memberdayakan bahasa dan sastra Jawa secara bersama 3 provinsi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur
2. Dinas-dinas yang mengurus pendidikan dan kebudayaan di tiga provinsi tersebut perlu menyusun program untuk memberdayakan bahasa dan sastra Jawa yang sesuai dengan ciri daerah masing-masing dengan berpedoman pada rencana strategis induk.
3. Dalam menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan bahasa dan sastra Jawa, dinas-dinas yang menangani urusan pendidikan dan kebudayaan di tiga provinsi perlu bekerja sama dengan Dewan Bahasa Jawa, instansi, lembaga, sanggar, dan perkumpulan yang ada kaitannya.
4. Menekankan peran Dewan Bahasa Jawa yang dibentuk di tiga provinsi.
5. Untuk memberdayakan bahasa dan sastra Jawa perlu ada sinergis dengan komunitas bahasa dan sastra di Pulau Jawa, provinsi lainnya, dan di berbagai negara, antara lain adalah Suriname, Kaledonia Baru, Australia, Malaysia, dan Belanda.

V. REKOMENDASI

A. Pendidikan Formal

1. Bahasa Jawa dijadikan mata pelajaran muatan lokal wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di tiga/telu provinsi: Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.
2. Pemerintah daerah di tiga provinsi perlu menyiapkan formasi dan mengangkat guru bahasa Jawa di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
3. Secara bertahap menjadikan guru bahasa Jawa keluaran lembaga pendidikan formal bahasa dan sastra Jawa.
4. Perlu menyediakan buku ajar bahasa Jawa yang cukup dan dinyatakan lolos seleksi oleh tim penilai yang independen.

B. Pendidikan Informal dan Nonformal

1. Sanggar bahasa dan sastra Jawa, perkumpulan bahasa dan sastra Jawa perlu dikembangkan sebagai wadah pembejaraan bahasa dan sastra Jawa.
2. Upaya pemberdayaan bahasa dan sastra Jawa melalui lomba, sarasehan, pelatihan, dan kursus di kabupaten/kodya, provinsi, di tiga provinsi perlu dilaksanakan.
3. Lembaga keagamaan, kemasyarakatan, dan kabudayaan ikut membantu dan mendorong semua aktivitas untuk memberdayakan bahasa dan sastra Jawa.

C. Kearifan Lokal

Kearifan lokal sebagai aset budaya Jawa perlu digali, diimplementasikan dan diapresiasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang bedasarkan pada semangat bhinneka tunggal ika.

D. Memberdayakan Bahasa dan Sastra Jawa

1. Perlu disusun rencana strategis untuk memberdayakan bahasa dan sastra Jawa secara bersama antara Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
2. Dinas-dinas yang mengurus pendidikan dan kebudayaan di tiga provinsi perlu menyusun program untuk memberdayakan bahasa dan sastra Jawa yang sesuai dengan kondisi daerah-daerah berda-sarkan rencana strategis.
3. Menekankan perlunya dibentuk Dewan Bahasa Jawa di tiga provinsi.
4. Untuk menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan bahasa dan sastra Jawa, dinas-dinas yang menangani urusan pendidikan dan kabudayaan perlu berkejasama dengan Dewan Bahasa Jawa, perguruan tinggi, badan-badan, sanggar, dan paguyuban lainnya.
5. Pemerintah provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur perlu membangun laman (website) mengenai bahasa, sastra dan budaya Jawa.
6. Penghargaan bagi para pemerhati dan Pembina bahasa, sastra dan budaya Jawa yang sudah ada perlu ditingkatkan.
7. Sebagai payung hukum untuk memberdayakan bahasa dan sastra Jawa, perlu disusun Undang-Undang mengenai bahasa dan Peraturan Daerah mengenai bahasa dan sastra Jawa di tiga provinsi.

VI. KONGRES BASA JAWA DAN KONGRES KABUDAYAN JAWA

1. Kongres Basa Jawa V tahun 2011 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk melaksanakan kongres itu perlu Badan Pekerja Kongres.
2. Kongres Kebudayaan Jawa dilaksanakan sebelum Kongres Bahasa Jawa V tahun 2011. Yang merancang dan melak-sanakan kongres, adalah Pemarintah Provinsi Jawa Tengah, daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Untuk melak-sanakan kongres itu perlu dibentuk Badan Pekerja Kongres.

VII. TINDAK LANJUT KONGRES

1. Semua putusan dan rekomendasi Kongres bahasa Jawa IV tahun 2006 perlu dilaksanakan oleh tiga provinsi, Jawa tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
2. Dewan Bahasa Jawa tiga provinsi perlu melaksanakan sosialisasi dan evaluasi bidang-bidang tugas dan rekomendasi yang diputuskan pada kongres yang perlu dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiga provinsi.

Semarang, 14 September 2006

Panitia Kongres Bahasa Jawa IV Tahun 2006 (Sumber: jonggringsa-loka.net)

B.2.2 Kongres Bahasa Jawa V 2011

Kongres KBJ V diselenggarakan di Surabaya pada pada 27-30 November 2011. Bagian penting yang selalu menjadi perbincangan dari ketiga kongres itu adalah tentang masa depan bahasa Jawa yang makin banyak ditinggalkan oleh pemiliknya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hubungan antarsuku bangsa bahkan antarbangsa semakin intensif. Masyarakat Jawa tidak hanya menerima masuknya suku bangsa atau bangsa lain ke wilayah kehidupannya tetapi juga para pendukung bahasa Jawa berpindah tempat dengan berbagai alasan.

Berkenaan dengan kondisi demikian itu kongres mengajak seluruh masyarakat Jawa memberikan perhatian terhadap kelangsungan hidup bahasa Jawa sebagai kekayaan kebudayaan bangsa. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong anak-anak menggunakan bahasa Jawa. Di samping itu juga diusulkan agar pelajaran bahasa Jawa dapat diberikan kepada para siswa di tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA JAWA V Di Surabaya, 2011

Tema

Bahasa dan Sastra Jawa sebagai Sumber Kearifan dalam Pembentukan Watak dan Pekerti Bangsa.

Subtema

1. Bahasa dan Sastra Jawa sebagai Sumber Kearifan dalam Pembentukan Watak Bangsa
2. Bahasa dan Sastra Jawa sebagai Sumber Kearifan dalam Pembentukan Pekerti Bangsa
3. Bahasa dan Sastra Jawa sebagai Sumber Kearifan dalam Kehidupan Bermasyarakat
4. Bahasa dan Sastra Jawa sebagai Sumber Kearifan dalam Kehidupan Berbangsa
5. Bahasa dan Sastra Jawa sebagai Sumber Kearifan dalam Kehidupan Bernegara

A. KEBIJAKAN

1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Jawa.
2. Penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tentang pengembangan dan pembinaan bahasa, sastra, dan budaya Jawa.
3. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tentang pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Jawa.
4. Pembentukan dewan bahasa Jawa di tingkat provinsi, kabupaten dan kota oleh pemerintah daerah terkait.

B. POLA OPERASIONAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN MELALUI:

1. Jalur formal: pendidikan usia dini (PAUD dan TK), pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB), dan pendidikan menengah (SMA/MA /SMALB dan SMK).
2. Jalur nonformal melalui: sanggar, paguyuban, padepokan, lembaga pendidikan keagamaan, keraton, dan kantong-kantong budaya Jawa.
3. Jalur informal dalam keluarga.

C. PROGRAM

1. Pembinaan:

- a. Penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar pada kelas rendah sekolah dasar (PAUD, TK, SD).
- b. Gerakan membaca dan menulis berbahasa Jawa dan aksara Jawa.
- c. Gerakan cinta bahasa Jawa melalui penggunaan bahasa pada papan nama, iklan, media pembelajaran,
- d. Gerakan sehari dalam seminggu wajib berbahasa Jawa pada instansi pemerintah,.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pendokumentasian tradisi Jawa (lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan).
- f. Penganugerahan penghargaan kepada pembina, pengembang, dan pekerja bahasa dan sastra Jawa atas prestasi dan jasanya.
- g. Peningkatan keprofesionalan guru-guru bahasa Jawa
- h. Pekerja, pembina, dan pengembang bahasa dan sastra Jawa masuk sekolah.

2. Pengembangan

- a. Penyelarasan kurikulum mata pelajaran bahasa Jawa dengan semua perangkat pembelajaran bahasa Jawa.
- b. Penyusunan buku acuan bahasa Jawa: kamus, thesaurus, tata bahasa, dan ejaan.
- c. Pengalihaksaraan dan penerjemahan naskah-naskah Jawa klasik.
- d. Penerjemahan dan pengubahan karya sastra bahasa asing, Indonesia, dan bahasa

Nusantara yang lain ke dalam bahasa Jawa.

- e. Penerbitan buku dan majalah berbahasa Jawa dan berhuruf Jawa untuk generasi muda Jawa.
- f. Penggalian nilai luhur dan kearifan lokal Jawa sebagai sumbangan untuk pembangunan bangsa.

D. REKOMENDASI

1. Pembentukan Dewan Bahasa Jawa dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan walikota di tingkat kota selambat-lambatnya dua tahun setelah Kongres Bahasa Jawa (KBJ) V.
2. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disiapkan oleh Dewan Bahasa Jawa provinsi, kabupaten, dan kota.
3. Kongres Bahasa Jawa VI dilaksanakan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya tahun 2016.
4. Sosialisasi keputusan Kongres Bahasa Jawa V dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012.

Surabaya, 30 November 2011

Tim Perumus: (1) Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.; (2) Drs. Amir Mahmud, M.Pd.; (3) Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan, M.A.; (4) Prof. Dr. Ayu Sutarto, M.A.; (5) Prof. Dr. Marsono, S.U.; (6) Prof. Dr. Rustono, M.Hum.; (7) Prof. Dr. Sumarlam, M.Hum.; (8) Prof. Dr. Suminto A. Sayuti, M.Pd.; (9) Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum.; (10) Drs Sutadi; (11) Drs. Sugeng Adipitoyo, M.Si.; (12) Drs. Bonari Nabononar; (13) Rohmat Djoko Prakosa, M.Sn.

C. Kongres Bahasa Madura (KBM)

Kongres Bahasa Madura pertama diselenggarakan di pamekasan tanggal 15-18 Desember 2008. Kongres yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten di Madura menghasilkan rumusan sebagai berikut.

RUMUSAN KONGRES BAHASA MADURA Pamekasan, 15—18 Desember 2008

I. Pengkajian

1. Pemerintah Kabupaten/kota perlu memfasilitasi pengkajian, penerjemahan, dan penerbitan berbahasa Madura, terutama yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian karya sastra tradisional dan keagamaan;
2. Kongres mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan penelitian tentang laras-laras (register) yang diperlukan masyarakat Madura dalam kaitannya dengan

pemekaran kosakata bahasa Madura.

II. Pengembangan

1. Perlu dibuat Pedoman Pembentukan Istilah bahasa Madura yang memungkinkan kosakata bahasa Madura berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sastra, dan budaya;
2. Kongres mengamanatkan kepada Balai Bahasa Surabaya untuk mengesahkan Ejaan Bahasa Madura yang Disempurnakan sesuai dengan prosedur kaidah bahasa baku;
3. Perlu diupayakan komputerisasi carakan Madura;
4. Kongres mengamanatkan agar tata Bahasa Madura dan Kamus Bahasa Madura segera direvisi oleh Balai Bahasa Surabaya.

III. Pembinaan

1. Perlu adanya pemberian anugerah kepada perorangan atau lembaga yang memajukan bahasa dan sastra Madura;
2. Meningkatkan frekwensi penyelenggaraan kegiatan dan lomba kebahasaan dan kesastraan Madura;
3. Perlu dibentuk lembaga konsultasi kebahasaan dan kesastraan bahasa Madura di tiap kabupaten/kota;
4. Kongres mengamanatkan untuk membuka program studi bahasa Madura sebagai *pilot project* di sebuah perguruan tinggi di Madura;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya mendorong dan memfasilitasi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan yang mengatur pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Madura termasuk penyusunan kurikulum dan perangkatnya;
6. Kongres mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mendorong/ memfasilitasi penulisan buku ajar bahasa Madura yang kontekstual dan sesuai dengan pembakuan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BNSP);
7. Kongres mengamanatkan dibentuknya Dewan Bahasa Madura yang ikut membina dan mengembangkan bahasa Madura di Pulau Madura dan tempat lain yang memiliki komunitas sekaligus berfungsi sebagai tim Pokja Kongres;
8. Kongres mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mempertegas ciri kemaduraan di tempat-tempat umum;
9. Kongres mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk membuka formasi tenaga kependidikan bahasa Madura;
10. Kongres bahasa Madura mengamanatkan kepada Pemerintah provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Kongres Bahasa Madura secara periodik lima tahun sekali;
11. Bahasa Madura wajib diajarkan mulai jenjang pendidikan dasar sampai menengah di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya berbahasa Madura;
12. Pemerintah Kabupaten/ Kota perlu melaksanakan dan memperbanyak frekwensi penyajian bahasa Madura melalui media massa, baik cetak maupun elektronik;

13. Kongres mengamanatkan agar Pemerintah Kabupaten/ Kota memfasilitasi sarana dan prasarana peguyuban/ sanggar kebahasaan dan kesastraan Madura.

IV. Lain-lain

Kongres bahasa Madura menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menyelenggarakan Kongres Kebahasaan Madura sebagai sarana pengembangan sumber daya, pariwisata, dan budaya demi kesejahteraan masyarakat Madura.

Rekomendasi sè kasebbhut èsoston tor ampon èlabheddhi sareng 15 *Tim Perumus*: (1) Prof. Dr. Mien A. Rifai; (2) Prof. Dr. A. Syukur Ghazali, M.Pd; (3) Drs. Amir Mahmud, M.Pd; (4) Drs. H. Kutwa, M.Pd; (5) Rahmad, M.Pd; (6) Drs. Akhmad Sofyan, M.Hum; (7) Drs. Masyhur Abadi, M.Fil.I; (8) H.M. Dradjid, B.A; (9) Moh. Hafid Effendy, M.Pd; (10) Drs. Abrori; (11) Syaf Anton, WR; (12) Drs. Bambang Febriyanto, M.Si; (13) Drs. Azis Sukardi, B.BA; (14) Syafiudin Miftah; (15) Dian Roesmiati, S.S

D. Kongres Bahasa Bali

Dalam hal penyelenggaraan kongres, sebelum Indonesia merdeka Java Instituut belum pernah menyelenggarakan Kongres Bahasa Bali, meskipun dalam hal kongres kebudayaan, budaya Bali pernah dibahas dalam kongres tersendiri tahun 1937. Penyelenggaraan Kongres Bahasa Bali dimulai setelah Indonesia merdeka. Meskipun demikian jumlah penyelenggaraan kongres masih lebih banyak dibandingkan dengan bahasa Jawa. Kongres Bahasa Bali yang telah diselenggarakan 7 kali kongres, sebagai berikut.

- (1) Kongres Bahasa Bali I tahun 1981
- (2) Kongres Bahasa Bali II tahun 1986
- (3) Kongres Bahasa Bali III tahun 1991
- (4) Kongres Bahasa Bali IV tahun 1996
- (5) Kongres Bahasa Bali V tahun 2001
- (6) Kongres Bahasa Bali VI tahun 2006
- (7) Kongres Bahasa Bali VIII tahun 2011

Kongres Bahasa Bali merupakan salah satu upaya untuk melestarikan salah satu warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu cenderung mulai ditinggalkan oleh penggunanya. Jika proses pewarisan itu tidak dilakukan secara serius dan konseptual maka keberadaan bahasa daerah termasuk bahasa Bali sangat mungkin akan terjadi kepunahan.

Kongres VII Bahasa Bali diselenggarakan di Wisma Bumi Asih 12-14 Oktober 2011. Kegiatan ini bertepatan dengan Bulan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Bali yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ini bukan tanpa dasar hukumnya. Kongres yang bertujuan untuk memelihara dan membina bahasa, aksara dan sastra Bali ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No.3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Dengan Perda ini upaya untuk menjaga kelestarian serta mengembangkan bahasa, aksara dan sastra Bali dapat dilakukan secara terarah dan berkesinambungan.

Kongres VII Bahasa Bali ini merupakan peristiwa kebahasaan yang sangat besar serta memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Bali. Kongres VII Bahasa Bali ini diharapkan dapat dijadikan momentum untuk memantapkan pembangunan karakter bangsa dalam menghadapi peradaban global, di samping untuk meningkatkan kegairahan serta kebanggaan pada bahasa, aksara dan sastra Bali sebagai lambang identitas budaya daerah.

Masalah utama yang dihadapi Bahasa Bali dewasa ini adalah semakin tampak adanya gejala dijauhinya bahasa Bali dalam kancah pergaulan keseharian masyarakat Bali. Gejala ini mestilah diantisipasi dengan cepat melalui karya nyata bila tidak ingin bahasa Bali semakin terpinggirkan. Maksud dan tujuan dari Kongres Bahasa Bali adalah untuk menyusun satu rumusan yang komprehensif mengenai kebijakan, strategi, serta penyusunan program pembinaan dan pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali secara berkelanjutan. Kongres juga bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian bahasa Bali dalam kehidupan keseharian masyarakat Bali.

Tema Kongres VII Bahasa Bali tahun 2011 ini adalah 'Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dalam Pembangunan Karakter Bangsa'. Tema ini dirumuskan bersama oleh pakar-pakar budaya, akademisi, tokoh masyarakat, para pemerhati bahasa, budayawan, sastrawan serta tokoh-tokoh media massa dan instansi pemerintah terkait. Kongres dibuka oleh pejabat Pemprov Bali mewakili Gubernur Bali dilanjutkan dengan penampilan musikalisasi musik dan puisi hasil juara lomba musikalisasi musik dan puisi tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yakni dari group 'Senang Bertemu Anda' pimpinan Putu Rastiti.

Selama Kongres VII Bahasa Bali berlangsung tampil para pembicara nasional yakni Drs. Soeroso, M.Hum Ditjen Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Prof. Dr. Cece Sobarna, M.Hum, Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia. Sedangkan para pembicara lokal antara lain I Gde Ardika mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang memaparkan materi 'Potensi Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dalam Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata', Prof. Dr. I Wayan Cika, M.S Dekan Fakultas Sastra Unud yang memaparkan materi 'Dinamika Pembangunan di Era Se-Jagat Dalam Perspektif Pembangunan Karakter Bangsa', Drs. Ida Bagus Anom, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang memaparkan materi 'Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dalam Pendidikan Dasar dan Menengah'. Juga Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, M.S, Rektor Unhi Denpasar dan Drs. Ida Bagus Darmika, MA yang memaparkan materi 'Eksistensi Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dalam kehidupan Agama Hindu' dan Drs. I Wayan Gerya, budayawan, yang memaparkan materi 'Prospek Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali ke Depan'.

Kongres VII Bahasa Bali diikuti oleh 100 orang. Peserta nasional yang diundang secara khusus adalah LPDG seluruh Indonesia melalui Kanwil Agama, beberapa universitas negeri di Indonesia dan MPU seluruh Indonesia. Peserta lokal Bali adalah budayawan, seniman dan instansi terkait, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga listibiya, PHDI Bali, Majelis Desa Pekraman, Widya Sabha, BHT, Badan Pembina Bahasa Aksara dan Sastra Bali, tokoh agama, tokoh adat, pelaku pariwisata, mahasiswa dan pemuda.

Hasil Kongres

Hasil dari Kongres VII Bahasa Bali kemudian dituangkan dalam sebuah rumusan yang dikerjakan oleh para pakar. Mereka adalah Prof. Dr. I Nyoman Suarka, M. Hum (Fakultas Sastra Unud), Prof. Dr. I Made Suastika, SU (Fakultas Sastra Unud), Dr. Ida Bagus Rai Putra, M. Hum (Fakultas Sastra Unud), Drs. I Nengah Medera, M. Hum (Budayawan), Drs. I Gede Nala Antara, M. Hum (Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Provinsi Bali) dan Dr. I Wayan Suardiana, M. Hum juga dari Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Provinsi Bali.

E. Kongres Bahasa Aceh

Setelah empat tahun jeda, kini Kongres Bahasa Daerah kembali digelar di Nanggroe Aceh Darussalam. Kongres bahasa pertama diadakan tahun 2002. Sebanyak 13 jenis bahasa daerah yang hidup di Aceh dibahas mulai 6 hingga 8 November 2011. Dalam kongres ini materi dibagi 2, yaitu (1) pemakalah utama; dan (2) pemakalah pendamping.

Pemakalah utama terdiri atas 3 judul:

1. Penggunaan bahasa daerah sebagai media komunikasi dalam aktivitas adat dan budaya lokal (Syamsuddin A. Jalildan Drs. Yusri Yusuf, M. Pd.).
2. Penggunaan bahasa daerah sebagai media komunikasi dalam seni tradisi modern (Barlian A. W. dan Rafly).
3. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Aceh Besar (Dr. Abdul Gani Asyik, M. A.).

Pemakalah pendamping terdiri Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat

Pemateri Pendamping

Kelompok A

1. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat (Unsur Disbud dan Drs. Teuku Alamsyah, M. Pd.).
2. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Aceh Selatan (Unsur Disbud Drs. Burhan).
3. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Simeulu (Unsur Disbud Drs. Ampuh Devayan).
4. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Singkil (Unsur Disbud Dra. Rostina Thaib, M. Hum.).
5. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Unsur Disbud Drs. Aslam Nur).

Kelompok B

1. Ragam dialek, wilayah sebaran dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Pidie (Unsur Disbud Dr. Mohd. Harun, M.Pd.).
2. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Aceh Utara dan Bireun (Unsur Disbud Drs. Wildan, M.Pd.).
3. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Aceh Tengah dan Gayo Lues (Unsur Disbud Dr. Rajab Bahry, M.Pd.).
4. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Aceh Tenggara (Disbud Drs. Selamat S.).
5. Ragam dialek, wilayah sebaran, dan fungsi pemakaian bahasa di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang (Unsur Disbud Drs. Denni Iskandar, M.Pd.).

F. Kongres Bahasa Makassar

Masyarakat pemakai bahasa Makassar telah dua kali menyelenggarakan kongres bahasa. Dibandingkan dengan bahasa Sunda, Jawa dan Bali kongres bahasa Makassar tergolong jarang meskipun pada 1930 telah berdiri lembaga yang meneliti tentang naskah I Laga Ligo termasuk bahasa di Makassar. Lembaga itu bernama Matthes Sticting (Yayasan Matthes) mengambil nama B.F. Matthes yang pernah tinggal di Makassar untuk mempelajari naskah I Laga Ligo. Gambaran singkat dari kedua kali kongres itu adalah sebagai berikut.

1. Kongres Bahasa Makassar I, 2007

Kongres Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Selatan, dari tanggal 22-25 Juli 2007 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama Balai Bahasa Sulawesi Selatan di Makassar. Tujuannya adalah menyelamatkan bahasa Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan bahasa serumpun dari kepunahan.

Kongres yang pertama kali diselenggarakan itu menghadirkan peneliti bahasa dari mancanegara serta komunitas penutur bahasa terkait di perantauan. Peneliti bahasa dari luar negeri antara lain H Steinhouer dan E Ulrich Kratz, keduanya dari Belanda, Nordhofer (Jerman), Alexander Adelaar (Australia), Masao Yama-guchi (Jepang), Cai Jincheng-Gunawan (China), Kamsiah Abdullah (Singapura), dan Abdul Latiff (Malaysia). Kongres membahas 50 makalah dan mengundang komunitas penutur bahasa Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar di perantauan untuk berpartisipasi sebagai peserta.

Kepala Pusat Bahasa Depdiknas Dendy Sugono hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Dendy kongres merupakan bagian dari upaya memperkaya khazanah kebudayaan nasional. Bagaimanapun, bahasa-bahasa daerah ikut memberi andil dalam pengembangan bahasa Indonesia. Guna memperluas cakupan kongres, panitia memberi kesempatan guru bahasa daerah untuk ikut serta secara gratis. Bahkan, terkait dengan muatan lokal pembelajaran bahasa daerah di sekolah, para guru dipersilakan menyampaikan makalah.

Kongres merekomendasikan agar dapat diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Selain itu juga merekomendasikan agar bahasa daerah diajarkan di beberapa jenjang pendidikan. (*Kompas*, 29 Mei 2007)

2. Kongres Bahasa Makassar II, 2012

Kongres Internasional II Bahasa-bahasa Daerah di Makassar diselenggarakan pada 1-4 Oktober 2012 di Makassar. Kongres kali ini bertema “Mewujudkan jati diri masyarakat melalui revitalisasi bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Selatan”. Kongres tersebut bertema mewujudkan jati diri masyarakat melalui revitalisasi bahasa-bahasa daerah di Sulsel dalam bentuk penguatan, pemantapan dan pelestarian berbagai usaha pemerayaan bahasa nasional. Kongres dihadiri sekitar 350 orang antara lain berasal dari luar negeri (Jepang, Australia, Malaysia, Canada, Amerika Serikat dan Brunei Darusalam) serta perwakilan dari hampir seluruh provinsi dan para ahli bahasa, seniman, cendekiawan, guru, mahasiswa dari Sulawesi Selatan.

Dalam kongres itu dibahas 60 makalah di antaranya makalah Prof Raping Tang (pakar bahasa Bugis), Prof Lukman (pakar bahasa Bugis), Dr Eni Iswari (pakar bahasa Makassar), dan Prof Hamzah Mahmud (pakar bahasa Massenrempulu), ditambah dengan pemakalah dari luar negeri ada Jepang, Cina, Korea, Australia dan Amerika.

Kongres dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof Mahsun didampingi Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, di rumah jabatan gubernur di Jalan Sudirman Makassar. Dalam sambutannya Gubernur menyatakan bahwa untuk menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah di lingkungan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan membuat peraturan daerah (Perda).

Hasil kongres

Setelah melalui penyajian makalah dan tanya-jawab dengan peserta, kongres menyepakati rekomendasi sebagai berikut.

REKOMENDASI KONGRES BAHASA-BAHASA DAERAH SULAWESI SELATAN

Mukaddimah

Kongres Bahasa-bahasa daerah Sulawesi Selatan berlangsung mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2007 bertempat di Hotel Clarion, Makassar. Kongres ini dilaksanakan dalam skala internasional yang dihadiri oleh pakar dari dalam dan luar negeri dan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr (HC). H. M. Yusuf Kalla.

Landasan yuridis kongres ini, adalah: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XV, Pasal 22 dan Pasal 36 beserta penjelasannya; 2) Politik Bahasa Nasional yang menggariskan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai: (a) lambang kebanggaan daerah, (b) lambang nilai sosial budaya, dan (c) wahana untuk pembinaan, pengembangan, dan pelestarian nilai budaya; dan 3) Pola Dasar Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kongres Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Selatan bertujuan menghimpun

gagasan, pemikiran, dan pendapat pakar dan pemerhati bahasa daerah Sulawesi Selatan guna dijadikan landasan perumusan kebijakan untuk revitalisasi, pemertahanan, dan pemerembangan bahasa-bahasa daerah; penyusunan program pembakuan, penyusunan kurikulum muatan lokal, dan penyusunan buku teks bahasa daerah.

Rekomendasi Kongres

Kongres ini dilaksanakan dengan tema “ Memantapkan Jati Diri Masyarakat Sulawesi Selatan melalui Upaya Pelestarian dan Pemertahanan Bahasa dalam Rangka Penguatan Jati Diri Bangsa Indonesia dan Pengayaan Bahasa Nasional”. Kongres ini berlangsung selama tiga hari dalam keadaan lancar dan sukses dengan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Pembuatan dan penetapan Peraturan Daerah tentang revitalisasi, pemertahanan, dan pemerembangan bahasa dan sastra daerah Sulawesi Selatan dengan implementasi, sebagai berikut:
 - a. Menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib untuk muatan lokal pada tingkat pendidikan usai dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - b. Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan pembelajaran bahasa dan sastra daerah untuk guru bahasa dan sastra daerah;
 - c. Mengangkat guru bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas utama menurut kebutuhan.
2. Pemerintah Provinsi bersama pakar bahasa mendorong penelitian dalam upaya memodifikasi aksara Bugis-Makassar menjadi sebuah aksara yang sempurna dan relevan untuk kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan.
3. Pembentukan Dewan Bahasa dan Sastra Daerah pada tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang berkewenangan:
 - a. Mempersiapkan Kongres Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Selatan setiap empat tahun sekali.
 - b. Melaksanakan kegiatan revitalisasi, pemertahanan, dan pemerembangan.
4. Pencanangan Gerakan Bangga Berbahasa Daerah (GBBD).

Penutup

Demikianlah, rekomendasi ini disusun dengan penuh rasa tanggung jawab dan ditetapkan di Makassar pada hari Rabu, tanggal 25 Juli tahun 2007, pukul 03.00 wita.

G. Kongres Bahasa-bahasa Daerah Wilayah Barat di Lampung

Pada tanggal 12-13 November 2007 di Lampung diselenggarakan Kongres Bahasa-bahasa Daerah di Wilayah Barat. Hasil akhir dari kongres tersebut adalah sebagai berikut.

**RUMUSAN HASIL
KONGRES BAHASA-BAHASA DAERAH
WILAYAH BARAT
BANDAR LAMPUNG, 12-13 NOVEMBER 2007**

Setelah menyimak sambutan Kepala Pusat Bahasa dan Gubernur Lampung serta pemaparan makalah tentang “Menggali Potensi Lokal sebagai Penapis Budaya Global” oleh Gubernur Lampung. “Perencanaan Bahasa Daerah dalam Upaya Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah” oleh Kepala Pusat Bahasa, “Kebijakan dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah” oleh Direktur Pengembangan Budaya Politik Depdagri. “Strategi Penanganan Bahasa Daerah yang Terancam Punah” oleh Prof. Dr. Multamia R.M.T Lauder, “Revitalisasi Bahasa Daerah dalam Kehidupan Masyarakat Kini” oleh Asisten Ekbang Pemprov Jambi, “Pelestarian Bahasa Daerah melalui Pendidikan Informal” oleh Prof. Dr. Nadra, “Pelestarian Bahasa Daerah Melalui Pendidikan Formal “Muatan Lokal” oleh Drs. Sarwit Sarwono, M. Hum, “Lokabahasa Sumatera Selatan” oleh Tim Pemetaan Balai Bahasa Sumatera Selatan, “Awalan-Ng dalam Dialek Abung” oleh Dra. Junaiyah, H.M., “Penelitian Potensi Bahasa Daerah/Sastra Daerah Sebagai Pemer kaya Budaya Nasioanl” oleh Asisten I Pemerintah provinsi Lampung, dan “Pesan Rupa dari Daratan Tinggi Basemah” oleh Dimas Pemprov Sumatera Selatan beserta diskusi yang berkembang dalam pemaparan makalah-makalah tersebut, kongres ini merumuskan hal-hal sebagai berikut.

A. Umum

Bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional merupakan lambang kebanggaan dan identitas daerah, sarana komunikasi serta pendukung budaya daerah dan budaya nasional. Sebagai pendukung budaya nasional, bahasa daerah di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali bahasa-bahasa daerah di wilayah barat, kondisinya kini makin memprihatinkan. Bahkan, beberapa di antaranya mulai terancam punah. Lebih-lebih pada era global seperti sekarang ini, keberadaan bahasa dan sastra daerah makin terancam akibat berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat.

Kondisi tersebut harus segera diatasi dengan penanganan secara sungguh-sungguh, terarah, dan terencana, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan melibatkan lembaga sosial dan lembaga adat di daerah. Untuk itu, berbagai potensi yang tersedia harus digali dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar bahasa dan sastra daerah tetap lestari, terpelihara, dan berkembang sehingga kedudukan dan fungsi serta peran bahasa daerah pun makin mantap. Untuk mendukung upaya tersebut, telah dirumuskan hal-hal khusus sebagai berikut.

B. Khusus

1. Potensi bahasa dan sastra daerah serta nilai-nilai dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menapis budaya global yang dapat mengancam keberadaan bahasa dan sastra daerah.
2. Untuk mendukung upaya pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa

serta daerah, termasuk untuk keperluan perumusan bahasa yang standar di setiap daerah, perlu dilakukan penelitian terhadap berbagai aspek kebahasaan dan kesastraan daerah.

3. Perlu dilakukan inventarisasi, dokumentasi, dan kondifikasi terhadap bahasa dan sastra daerah dalam bentuk kamus, tata bahasa, ensiklopedia, dan sejenisnya sebagai acuan bagi masyarakat dalam upaya peningkatan penguasaan bahasa daerah dan peningkatan apresiasi terhadap daerah.
4. Penguasaan terhadap bahasa daerah dan sikap apresiatif terhadap sastra daerah perlu diturunkan kepada generasi penerus bangsa melalui pengajaran, baik di jalur formal (sekolah) maupun jalur informal (keluarga dan masyarakat).
5. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk menanamkan kecintaan dan kebanggaan generasi penerus bangsa terhadap bahasa dan sastra daerah.
6. Agar bahasa daerah tetap lestari dan mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi kedaerahan, peran serta dan kesadaran serta dukungan segenap komponen masyarakat, baik perseorangan, lembaga-lembaga sosial, lembaga adat, maupun pemerintah sangat diperlukan dengan tetap menggunakan bahasa daerah tersebut dalam ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah.
7. Berbagai pihak perlu mendukung dan ikut memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Kebahasaan menjadi Undang-Undang Kebahasaan sebagai landasan dalam upaya melindungi, melestarikan, dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah sebagai manifestasi Pasal 32, 36, dan 36c Undang-Undang Dasar 1945.
8. Lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pemangku adat, media massa lokal, dan komunitas sastra perlu diberdayakan dan dipertahankan dalam upaya penanganan terhadap bahasa dan sastra daerah di setiap provinsi.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah perlu digunakan sebagai acuan dalam penanganan bahasa dan sastra daerah serta dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan daerah di setiap provinsi untuk mendukung upaya pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa serta sastra daerah.
10. Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait di daerah perlu memberikan dukungan dan fasilitas terhadap upaya-upaya pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa serta sastra daerah.

Bandarlampung, 13 November 2007

Tim Perumus

H. Kongres Bahasa Cirebon

Penyelenggaraan Kongres Bahasa Cirebon Bahasa Cirebon didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2003 tentang Pelestarian Bahasa daerah di Jawa Barat. Di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Bahasa Cirebon diakui sebagai bahasa yang mandiri di Jawa Barat selain bahasa Sunda

dan Betawi. Bahasa Cirebon mempunyai keunikan, karena dapat disebut sebagai Bahasa Jawa dialek Cirebon dan Indramayu atau disebut juga dialek Sunda Cirebon dan Indramayu. Melalui kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan Kongres Bahasa Cirebon pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2007 bertempat di Hotel Prima Jl. Siliwangi No. 107 Cirebon.

Kongres Bahasa Cirebon merupakan forum bagi masyarakat wilayah Cirebon umumnya dan khususnya Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu dan komunitas-komunitas yang berada di luar wilayah Cirebon yang secara nyata melestarikan bahasa Cirebon, untuk membahas perkembangan berbagai aspek bahasa Cirebon. Kongres ini merupakan amanat masyarakat wilayah Cirebon yang menghendaki dilakukannya kajian terhadap semua aspek kebahasaan Cirebonan dan merupakan Kongres Bahasa Cirebon yang pertama.

Kongres Bahasa Cirebon I tahun 2007 ini, melibatkan unsur-unsur: Birokrat di bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan Pendidikan Kebahasaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan dari luar Jawa Barat. LSM yang terkait dengan masalah Cirebon di Jawa Barat dan di luar Jawa Barat. Para pakar Bahasa Daerah dan atau Cirebon dari perguruan tinggi di Jawa Barat dan luar Jawa Barat, Sastrawan Cirebon, Guru-guru bahasa Daerah/Cirebon, Tokoh-tokoh masyarakat Cirebon dan di luar masyarakat Cirebon. Pelaksanaan Kongres Bahasa Cirebon dimaksudkan untuk memberi dan menanamkan kesadaran kepada masyarakat pengguna dan pemerhati bahasa Cirebon tentang pentingnya melestarikan, membina dan mengembangkan Bahasa Cirebon sebagai identitas daerah dan kekayaan budaya nasional.

Berikut Rekomendasi Kongres I Bahasa Cirebon yang ditandatangani oleh Ketua Kongres Bahasa Cirebon, Chaerul Salaman, SPd, Mhum dan Sekretaris Kongres Bahasa Cirebon, Made Casta, MPd.

Saben-saben Pemkab/Pemkot teng Cerbon lan Dermayu supados ngedalaken PERDA kangge ngopen-openi ngembangaken, lan mulyaaken basa, sastra, lan aksara Cerbon. Saben-saben Pemkab/Pemkot teng Cerbon lan Dermayu kedah nemtuaken dinten basa Cerbon teng salebeting waktos dines.

Saben-saben Pemkab/Pemkot teng Cerbon lan Dermayu kedah nyata-nyata ningkataken komitmen kangge basa, sastra lan aksara Cerbon.

Saben-saben Pemkab/Pemkot teng Cerbon lan Dermayu kedah mangun Museum Budaya. Kedah wonten lembaga ingkang ngewadahi pinten-pinten kekayaan kangge ngopen-openi, ngembangaken, lan mulyaaken basa, sastra, lan aksara Cerbon. Lembaga ingkang dipun maksad kawontenane independen lan namung sanunggal teng wewengkon Cerbon.

Pamerentah Gubernur lan Kabupaten/Kota Cerbon-Dermayu kedah nyata-nyata ndukung Lembaga Basa lan Sastra Cerbon. Sedaya Pamong Praja Kabupaten/Kota Cerbon lan Dermayu kedah seneng/biten isin wiraosan/geguneman ngangge Basa Cerbon teng kantor waktos dines. Kedah wonten penerbitan kusus ingkang ngangge Basa Cerbon Media massa ingkang wonten teng wewengkon Cerbon kedah, nyediaken ruang ingkang langkung liar kangge basa lan sastra Cerbon.

Kedah wonten malih penataan kurikulum Basa Cerbon standar isi, standar kelulusan,

standar penilaian, standar pendidik, lan standar sarana-prasarana.

Kedah dipun tingkatken pinten-pinten penelitian, pengkajian, panyeratan buku, sayembara-sayembara lan sanes-sanesipun.

Kedah sigra dipun susun kamus umum utawi kamus standar lan selajengipun dipun susun kamus-kamus kusus kados done Kamus Pewayangan, Kamus Bebasan, Kamus Kesenian lari sanes-sanesi. Tim penyusun kamus umum/standar Basa Cerbon bade dipun susun dumateng Lembaga Basa lan Sastra Cerbon.

Pendidikan Basa Cerbon kedah ngopeni bebasan lan basa bagongan/padinan kelawan konteks budaya. Kedah dipun sunsun buku teks Basa Cerbon sarong buku penunjang Basa Cerbon ingkang linuwih Basa Cerbon kedah dipun tingkataken peranipun nganti saged dados piranti komunikasi, basa ilmu pengetahuan, piranti ekspresi budaya, lan piranti pendidikan budi pakerti. Basa Cerbon kedah mbika dirine piyambek kanggo nampi pinten-pinten pangaruh kang bakal ngluhuraken menusa Cerbon.

Pesantren kedah didadosaken salah satunggalipun pusat ngembangaken basa lan sastra Cerbon.

I. Kongres Bahasa Tegal

Kongres bahasa Tegal I digelar oleh pemerintah Kota Tegal pada tanggal 4 April 2006, di hotel Bahari Inn kota Tegal. Acara yang digagas oleh Yono Daryono, tersebut menghadirkan beberapa tokoh antara lain SN Ratmana (cerpenis), Ki Enthus Susmono (dalang Tegal), Eko Tunas (penyair Tegal). Tujuan digelarnya kongres itu adalah mengangkat status dialek Tegal menjadi bahasa Tegal.

Pelopor dan penggiat bahasa Tegal adalah Lanang Setiawan. Selain menciptakan lagu-lagu tegalan, ia juga menerbitkan tabloid tegalan, *TEGAL TEGAL*, menulis novel berjudul *Oreg Tegal*, dan secara rutin menulis kolom tetap Anehdot Tegalan di harian Pagi Nirmala Post. Karena kesetiaannya, pada 19 Oktober 2008 ia menerima anugerah Penghargaan Penggiat Bahasa Tegal dari Walikota Tegal, Adi Winarso.

Sejak masa kepemimpinan H Mardiyanto, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan aturan agar setiap siswa (dari SD sampai SMA) mendapatkan pelajaran Bahasa Jawa. Namun kebijakan ini menemui kendala yakni permasalahan dialek bahasa. Sebagai contoh, anak yang lahir di Tegal otomatis bahasa ibu-nya adalah Bahasa Tegal, bukan Yogyakarta atau Solo. Jika Pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah hanya mengacu pada bahasa standar saja, tentu para siswa akan susah menyesuaikan dengan kultur yang telah mereka terima sejak lahir. Akhirnya muncul anggapan, pelajaran Bahasa Jawa di sekolah merupakan 'paksaan' agar menggunakan bahasanya orang *wetanan*.

J. Kongres Internasional Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara

Kongres ini diselenggarakan di kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Menurut Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof. Dr. Hanna, MPd, Guru Besar bidang bahasa Inggris di Universitas Haluoleo Kendari, dipilihnya Kota Baubau sebagai tempat penyelenggaraan kongres bahasa internasional itu ada beberapa alasan. Pertama, kota Baubau dinilai sudah terkenal di dunia. Kultur masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya tinggalan bahasa dan budaya kerajaan di Baubau dan Buton

hingga kini masih tersimpan dengan baik dan kekayaan budaya itu dapat dipamerkan pada saat kongres berlangsung. Kedua, kota Baubau memiliki bahasa daerah kurang lebih 60 bahasa daerah dan tiap-tiap wilayah memiliki perbedaan dialek.

Melalui kongres ini diupayakan untuk menyatukan persepsi tentang pelestarian bahasa daerah itu harus diadakan pendekatan secara ilmiah. Dari kongres ini disepakati langkah kebijakan pembinaan dan pelestarian bahasa daerah dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian bahasa daerah itu sendiri. Melalui kongres ini dapat dibangkitkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa daerahnya. Dicontohkan, bahasa Cia-Cia di Buton setelah dilakukan penelitian beberapa ahli bahasa di dunia, ternyata ada kesamaan dengan rumpun bahasa di Korea Selatan. Begitu pula dengan Bahasa Muna, berdasarkan penafsiran ahli bahasa di dunia, kini ada kesamaan dengan bahasa yang ada di Belanda.

Kongres diselenggarakan tanggal 18-21 Juli 2010, bersamaan dengan pelaksanaan Festival Perairan Pulau Makassar (FPPM) III, menampilkan 93 pemakalah, sebagian besar bergelar Prof. Doktor, dan hal ini dinilai merupakan kebanggaan Kota Baubau karena tidak semua daerah bisa seperti ini. Ada 6 Negara yang hadir dalam kongres ini, yaitu Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, Jepang dan Brunai. (Sumber: Antara dan Kompas edisi 7 November 2009)

Yang menarik dari kongres itu adalah tentang nama kongres. Meskipun nama kongres ini adalah “Kongres Bahasa Daerah”, yang mengandung makna seluruh bahasa daerah di wilayah Indonesia, tetapi dalam kenyataan yang dibahas dalam kongres hanyalah bahasa daerah yang berkembang di sekitar Baubau atau Sulawesi Tenggara.

K. Kongres Internasional Bahasa dan Adat Gorontalo

Menyambut 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional, Pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Pusat Bahasa mengadakan Kongres Internasional Bahasa dan Adat Gorontalo I.

Kongres berlangsung pada tanggal 13—14 Mei 2008 bertempat di Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Ir. H. Gusnar Ismail, M.M., dalam sambutannya, dinyatakan bahwa pelaksanaan kongres merupakan langkah yang sangat tepat di tengah laju modernisasi dan kemajuan zaman yang kadangkala telah mengaburkan identitas diri kita, karena sebagaimana diketahui bahwa bahasa merupakan identitas diri dari suatu etnik, sehingga dengan penggunaan bahasa daerah dapat diketahui dari mana seseorang berasal.

Menurut ketua panitia, Prof. Dr. Mansoer Pateda, kongres ini diadakan karena berangkat dari keprihatinan akan kelangsungan bahasa dan adat Gorontalo itu yang mempunyai empat tujuan yakni linguistik, sosiologis, pedagogis, serta politis. Dalam keempat tujuan itu tercakup sejumlah ikhtiar yang menginginkan agar bahasa dan adat Gorontalo dapat terjaga kelestariannya melalui sektor pendidikan yang turut disokong kelangsungannya oleh pemerintah daerah setempat. Guru Besar di bidang Linguistik ini juga mengatakan bahwa tiga ragam bahasa Gorontalo nyaris punah yaitu bahasa Atinggola, bahasa Gorontalo, dan bahasa Sumbawa.

Prof. Nelson Pomalingo, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam

sambutannya menyatakan ada beberapa faktor yang mempercepat kepunahan suatu bahasa daerah antara lain adalah banyaknya serapan bahasa asing dalam penggunaan bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia, faktor lainnya adalah pengaruh modernisasi dan pergaulan yang mana generasi sekarang sudah enggan bahkan malu menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian atau pergaulan, sehingga mulai sekarang perlu diambil langkah yang tepat untuk menjaga jangan sampai bahasa gorontalo sebagai identitas dari etnis gorontalo akan punah juga.

Kegiatan ini diikuti lebih kurang 300 peserta, antara lain dari kalangan akademisi, budayawan, mahasiswa, tokoh adat, pemerhati bahasa dan adat Gorontalo serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam kongres ini menghadirkan tiga puluh dua pembicara nasional dan empat pembicara internasional.

L. Kongres Bahasa Kaili, 2011

Bahasa Kaili merupakan salah satu bahasa daerah di Sulawesi Tengah, mempunyai penyebaran yang cukup luas. Di samping sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa Kaili digunakan pula dalam kegiatan ritual (upacara adat) dan kesenian tradisional. Bahasa Kaili menyebar dengan segenap variannya menyebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah; antara lain Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso. Selama dalam perkembangannya itu belum pernah diadakan pertemuan diantara penutur bahasa Kaili, maka untuk menyepakati secara bersama-sama beberapa hal yang berhubungan dengan bahasa Kaili (jumlah penamaan dialek, ejaan bahasa Kaili, sastra Kaili dan sistem pengajaran bahasa Kaili) maka akan berpengaruh pada kelangsungan hidup bahasa Kaili.

Mengikuti jejak bahasa-bahasa daerah yang lain, pemilik bahasa Kaili juga ikut menyelenggarakan kongres. Tujuan kongres adalah mempertemukan penutur bahasa Kaili dari beberapa wilayah untuk menyepakati beberapa hal seperti sistem pengajaran bahasa Kaili, dialek, ejaan dan jenis-jenis sastra Kaili. Tema yang dipilih adalah “Peranan Bahasa Kaili dalam Pembangunan Sulawesi Tengah”.

Kongres diselenggarakan di Taman Budaya Propinsi Sulawesi Tengah, Palu tanggal 28 Oktober 2011. Sebagai pembicara Dr. Mutamiah Lauder (Akademisi Universitas Indonesia (UI), dengan topik: Bahasa Daerah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Pembicara yang lain adalah Kepala Balai Bahasa Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah dengan judul “Pembinaan Bahasa Kaili di Sulawesi Tengah”, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prop. Sulteng, Ketua Dewan Pembina dan Pengembangan Budaya Kaili dengan judul “Sistem Pengajaran Bahasa Kaili”, Drs. Indra B. Wumbu dengan judul “Ejaan Bahasa Kaili”, Drs. Sofyan Ing Huong (Keragaman Dialek Bahasa Kaili), Tjatjo Tuan Saihu (Keragaman Sastra Kaili) dengan Pembahas Utama: Dr. Gazali Lembah.

Peserta Kongres terdiri dari unsur perwakilan pemerintah kota/kabupaten dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Dari unsur masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat serta LSM yang bergerak di bidang kebudayaan.

BAB IV

KONGRES SASTRA INDONESIA DAN DAERAH

Salah satu bentuk karya seni adalah seni sastra. Karya seni yang satu menggunakan bahasa sebagai media, dalam hal ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa lokal atau daerah. Berdasarkan pada pemakaian bahasa itu maka karya sastra dibedakan antara sastra Indonesia dan daerah. Selain disebut Sastra Daerah juga dikenal dengan sebutan sastra rakyat dan sastra lokal. Ajip Rosidi menyebutnya sastra Nusantara, seperti yang dinyatakan bahwa: "... sastra yang ditulis dalam bahasa-bahasa daerah yang terdapat di seluruh wilayah nusantara dinamakan Sastra Nusantara. Sedangkan sastra Indonesia hanyalah sastra yang ditulis dalam bahasa nasional saja". (1986:10).

Dalam hal penyampaian kepada khalayak, karya sastra dibedakan antara sastra lisan dan sastra tulis. Sesuai dengan namanya, karya sastra lisan disampaikan secara dilisankan atau diucapkan. Karena sastra itu dimanifestasikan dengan cara dilisankan maka sastra lisan memiliki banyak ragam dan versi. Sementara itu, disebut sastra tulis karena karya sastra itu dimanifestasikan dengan cara ditulis dengan huruf Latin maupun huruf yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suku bangsa.

Sebagai bangsa yang memiliki banyak suku bangsa, di Indonesia telah berkembang berbagai sastra daerah, di samping sastra Indonesia setelah bahasa itu ditetapkan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Perkembangan sastra Indonesia maupun daerah masa lalu dan kini serta arah perkembangannya ke depan telah banyak dibahas dalam berbagai forum, termasuk forum kongres dan konferensi.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perbincangan masalah sastra Indonesia dan daerah selama ini di bawah ini dipaparkan berbagai kongres dan konferensi yang pernah diselenggarakan.

A. Kongres Komunitas Sastra Indonesia (KKSII)

A.1 KKSII I 2008

Menurut Pemerhati Komunitas Sastra Iwan Gunadi, walaupun sejarah komunitas sastra dapat ditelusuri jauh ke belakang, komunitas sastra tetaplah topik yang relatif baru dalam diskursus kesusastraan Indonesia. Istilah “komunitas” memang sudah sering digunakan dalam kajian atau perbincangan ilmu-ilmu humaniora di negeri ini. Istilah “komunitas sastra” itu sendiri baru muncul pada pertengahan 1990-an dalam diskursus kesusastraan Indonesia. Perbincangannya sendiri mulai marak beberapa tahun terakhir ini, meski kajian yang serius tentang fenomena komunitas sastra di Indonesia tetap langka.

Selama 2007 hingga awal 2008, perbincangan komunitas sastra terasa hangat setelah beberapa forum dan media massa mengangkat isu adanya hegemoni komunitas tertentu di Tanah Air. Kalau kita jelajahi pelbagai situs web atau blog di dunia maya, perdebatan atau perbantahan tentang isu tersebut terasa memanas.

Sebuah forum yang menjadi bagian dari kesemarakkan perbincangan tentang komunitas sastra digelar oleh Komunitas Sastra Indonesia (KSI) di Kudus, Jawa Tengah, selama 19-21 Januari 2008. Forum yang didukung PT Djarum melalui program Djarum Bakti Pendidikan tersebut bertajuk *Kongres Komunitas Sastra Indonesia*, yang di dalam ada seminar nasional dengan tema *Meningkatkan Peran Komunitas Sastra sebagai Basis Perkembangan Sastra Indonesia*.

Sekitar 15 hingga 25 tahun terakhir, di negeri ini memang tumbuh begitu banyak komunitas sastra. Termasuk pelbagai komunitas sastra yang mencoba menghancurkan eksklusivitas sebutan “sastrawan” dan mengangkat karya-karya atau pelaku-pelaku sastra yang dianggap marginal. Kalau kita pakai perumpamaan klise, fenomena tersebut bak cendawan di musim hujan.

Untuk pembuktian secara sederhana suburnya pertumbuhan komunitas sastra selama rentang waktu tersebut, ambillah satu buku antologi puisi atau cerita pendek (cerpen) berskala nasional. Bacalah daftar biografi singkat mereka. Jangan terkejut bila ditemukan fakta bahwa sebagian besar dari mereka merupakan anggota atau pengurus suatu komunitas sastra atau seni. Bahkan, mungkin, mereka terlibat lebih di satu komunitas sastra atau komunitas seni.

Fakta semacam itu, misalnya, dapat ditemukan di dua buku *Antologi Puisi Indonesia 1997* terbitan Komunitas Sastra Indo-nesia (KSI) di Tangerang dan Angkasa di Bandung pada 1997. Tengok pula, misalnya, *Sebuah Antologi Puisi Cyber: Graffiti Gratitude* terbitan Yayasan Multimedia Sastra (Jakarta) dan Angkasa (Bandung) pada 2001 dengan cakupan yang melewati batas geografis Indonesia atau *Bisikan Kata, Teriakan Kota: Antologi Puisi Temu Sastra Jakarta* terbitan Dewan Kesenian Jakarta dan Benteng Budaya (Yogyakarta) pada 2003 dengan jangkauan penulis yang lebih terbatas, yakni Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Hal yang sebaliknya akan sulit ditemukan, misalnya, pada buku antologi puisi empat jilid suntingan Linus Suryadi AG, *Tonggak*, dan *Gema Tanah Air* susunan HB Jassin.

Kondisi tersebut tak lepas dari munculnya kesadaran kolektif yang lebih meluas sejak 1980-an dan lebih-lebih sejak 1990-an untuk tak lagi menempatkan Jakarta

sebagai barometer standar estetika kesusastraan Indonesia. Cara pandang para sastrawan pada kedua periode tersebut terhadap Taman Ismail Marzuki atau Majalah *Horison*, misalnya, berubah. Mereka tidak lagi melihat pusat-pusat semacam itu sebagai penguasa tunggal perkembangan kesusas-traan Indonesia.

Kesadaran tersebut memicu tumbuhnya makin banyak dewan kesenian di daerah-daerah di luar Jakarta yang menyorongkan kesempatan kepada banyak seniman, termasuk sastrawan, di masing-masing daerah untuk bertemu, lalu berkelompok. Bahkan, kesadaran yang sama tak hanya muncul pada para sastrawan yang sering berkumpul di dewan-dewan kesenian, tapi juga meluas ke persona-persona di tempat-tempat lain, seperti di pesantren, sekolah, kampus, stasiun radio, dan bahkan moda transportasi semacam bus kota dan kereta api.

Mereka tak hanya berada di kota-kota besar, tapi juga menyebar ke kota-kota kecil. Mereka menjadi semacam kantong-kantong kesenian yang kecil-kecil yang kemudian dapat menjadi pusat-pusat kecil, yang diperkirakan akan menjadi basis dan karenanya lebih menentukan arah perkembangan kesenian Indo-nesia. Pandangan dengan acuan posmodernisme ini mulai terasa menguat sejak Nirwan Dewanto memaparkannya di Kongres Kebudayaan Indonesia di Jakarta pada 1991.

Pemetaan yang dilakukan KSI saja berhasil mengumpulkan informasi dari 54 komunitas sastra yang tumbuh dan atau masih aktif di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) pada 1997. Dari jumlah tersebut, yang berhasil dipetakan ada 46 komunitas sastra. Jumlah tersebut saja melebihi jumlah 35 orga-nisasi yang mengikuti Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) yang digelar di Jakarta pada awal Maret 1964. Artinya, dalam 33 tahun, jumlah komunitas sastra di wilayah yang lebih sempit sudah melebihi jumlah komunitas di wilayah yang jauh lebih luas, walau mungkin di wilayah yang lebih luas tersebut masih banyak komunitas sastra yang tidak turut konferensi tersebut.

Kalau wilayahnya kita perluas sampai seluruh Indonesia dengan rentang waktu sama (1997), saya yakin, jumlahnya bisa ratusan atau bahkan lebih. Apalagi jika rentang waktunya diperpanjang melebihi tahun tersebut. Melani Budianta, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia, misalnya, pada diskusi *Mencermati Sastra Subkultur Kita* yang diselenggarakan Yayasan Obor Indonesia di Jakarta, 31 Mei 2001, memperkirakan bahwa pada saat itu, jumlah komunitas sastra di Indonesia lebih dari 200 dan 75 di antaranya berada di Jakarta. Jumlah tersebut pun belum termasuk komunitas sastra yang dibentuk di kampus-kampus perguruan tinggi.

Kalau rentang waktu untuk taksiran Melani diperpanjang ke depan, jumlahnya dapat dipastikan akan jauh dari jumlah angka itu. Sejak 1998 setelah Menteri Penerangan Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie, M Yunus Yosfiah, membuka keran kebebasan penerbitan media massa yang merangsang tumbuhnya komunitas-komunitas sastra. Sebagian besar dari media massa itu pun menampung karya-karya sastra, terutama puisi dan cerita pendek, yang tentu membutuhkan respons dari para sastrawan, termasuk yang tumbuh dan bergelut di pelbagai komunitas sastra itu.

Pelaksanaan

Kongres pertama Komunitas Sastra Indonesia (KSI) diadakan di Kudus, Jawa Tengah dari tanggal 19-22 Januari 2008. Meskipun kongres ini tidak seheboh kongres bahasa atau Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) dan hanya diselenggarakan di sebuah kota kecil (Kudus) tetapi kongres ini memiliki nilai sangat penting artinya bagi perjalanan sastra Indonesia. Tema kongres adalah "Meningkatkan Peran Komunitas Sastra sebagai Basis Perkembangan Sastra Indonesia".

Menurut pengamat sastra Parni Hadi, dari hasil observasi dan bacaan yang dilakukan atas liputan beberapa koran menjelang kongres, ia mencatat banyak hal mengenai sastra. Menurut Parni Hadi ada beberapa hal yang dicatat. Pertama, sastra Indonesia masih diidentikkan dengan sastra yang diterbitkan atau ditam-pilkan di kota-kota besar terutama Jakarta. Kedua, publikasi tentang sastra Indonesia masih kurang. Ketiga, perlunya pendid-ikan sastra di sekolah-sekolah. Keempat, kurangnya anggaran untuk pengembangan kebudayaan dengan sastra sebagai rohnya. Dan kelima, nasib sastrawan perlu mendapat perhatian.

Komunitas sastra tentu tidak hanya ada di Jakarta dan kota-kota besar saja, tapi juga di daerah-daerah. Sayangnya, hampir semua cabang kehidupan bangsa ini masih berkiblat ke Jakarta dan kota besar. Jakarta dan kota besar masih dianggap sebagai barometer suksesnya seseorang, perusahaan atau organisasi, termasuk lembaga kebudayaan dengan para seniman dan budaya-wannya. Sebelum tampil di panggung Jakarta dan disiarkan oleh media massa nasional yang ada di Jakarta, seseorang dianggap belum mencapai puncak prestasinya. Kongres KSI yang dapat diadakan di Kudus, tidak di Jakarta atau kota besar lainnya dinilai bagus sekali.

Selain itu, jika ada istilah "komunitas sastra", Parni Hadi menambahkan istilah lain, yaitu "sastra komunitas". Anggota KSI umumnya adalah sastrawan yang telah mengenyam pendidikan, bahkan sampai jenjang tertinggi. Karya-karya anggota KSI juga sering diukur peringkatnya dengan standar yang berbasis ukuran orang-orang yang berpendidikan formal.

KSI sangat memperhatikan sastra lokal, sastra komunitas, yang didukung dan dilestarikan oleh orang-orang desa yang sederhana, yang mungkin tidak tahu dan tidak mau menyebut dirinya sastrawan, melainkan sebagai hanya pelestari ritual, tradisi warisan leluhur, dalam hal ini termasuk sastra lisan. Dalam hal ini KSI sangat peduli dengan melakukan kegiatan musikalisasi puisi, dan mengkoordinasikan seniman-seniman tradisional di desa-desa Jawa melakukan kegiatan dalam bentuk mocapat, seni kentrung, yang melantunkan syair dengan iringan kendang.

Bentuk-bentuk musikalisasi sastra juga ada di desa-desa di seluruh Nusantara. Bahkan, petani sering melantunkan syair, parikan dalam bentuk uro-uro tatkala bekerja di sawah/ladang seperti waktu membajak sawah dan memanen padi, jagung dan kedelai. Yang aktif melestarikan sastra lisan di desa-desa sekarang, justru bukan sekolah, melainkan pesantren tradisional dan majelis-majelis pengajian atau kelompok-kelompok yang mengadakan pertemuan/ sarasehan pada hari-hari tertentu seperti Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon.

Untuk terus mengembangkan minat pada sastra lisan, peran RRI sangat penting. Seluruh 58 stasiun RRI yang tersebar dari Banda Aceh sampai Merauke telah menggalakkan gelar seni budaya sejak dua tahun terakhir. Beberapa bentuk seni

tradisional yang ditampilkan KSI dalam rangka melestarikan dan mengembangkan sastra tersebut, adalah dengan menyelenggarakan acara berbalas pantun daerah antara stasiun RRI. Juga ada acara berbalas pantun antara RRI dengan RTM (Malaysia) dan RTB (Brunei Darussalam). Dan, sekarang KSI sudah mempunyai jadwal tampil di RRI.

Sumber: <http://cabiklunik.blogspot.com/2008/02/wacana-komuni-tas-sastra-dan-sastra.html>

A.2 KCSI II 2012

Kongres Komunitas Sastra Indonesia (KCSI) II digelar di Wisma Argamulya Depdikbud, Cisarua, Puncak, Bogor, pada 23-25 Maret 2012. Kongres mengambil tema "Sastra sebagai Sumber Inspirasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". Kongres dihadiri oleh sejumlah sastrawan dan akademisi sastra akan tampil sebagai pembicara, antara lain Prof. Dr. Abdul Hadi WM, Dr. Nursamad Kamba, Dr. Sudaryono (Dimas Arika Miharja), Dr. Wahyu Wibowo, dan Dr. Mujizah. Sedangkan dari dalam KSI yang akan ikut tampil dalam seminar adalah Wowok Hesti Prabowo, Medy Loekito, dan Micky Hidayat.

Kongres juga ditandai dengan workshop penulisan esai sastra, pentas sastra, dan pertunjukan "api unggun sastra". Pentas sastra akan diisi pertunjukan baca puisi oleh sejumlah penyair, musikalisasi puisi bersama Sanggar Sesaji pimpinan Rudi Karno dari Banjarmasin dan Sarang Matahari Penggiat Sastra pimpinan H. Shobir Pur dari Tangerang Selatan. Dalam acara penutupan KCSI II, penyair yang berkesempatan membaca puisi pada malam penutupan di pelataran wisma yang basah embun itu antara lain Habiburachman el-Shirazy, Sihar Ramses Simatupang, Chavcay Saefullah, Musatafa Ismail, Anwar Putra Bayu, Fakhrunnas MA Jabbar. Tampil juga Rukmi Wisnu Wardhani dan Sosiawan Leak.

Kongres KCSI II diadakan bertepatan dengan usia 15 tahun KSI ini juga ditandai dengan Sayembara Penulisan Puisi KSI Awards 2012 yang pengumpulan naskahnya sudah dimulai sejak Maret 2011. Dewan juri KSI Awards, yang terdiri dari Ahmadun Yosi Herfanda, Bambang Widiatmoko, Diah Hadaning, Endo Senggono, dan Mujizah, akan memilih satu puisi terbaik penerima KSI Awards 2012, empat puisi unggulan yang akan menerima penghargaan khusus, dan 95 puisi pilihan untuk dibukukan bersama sajak-sajak pemenang. Penyerahan penghargaan dan peluncuran antologi puisi KSI Awards 2012 akan dilakukan pada malam pembukaan Kongres. Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan dari Bakti Budaya Djarum Foundation dan Badan Bahasa Depdikbud RI.

Mengenai pemberian KSI Awards menurut ketua umum KSI Pusat periode 2008-2011, Ahmadun Yosi Herfanda, merupakan pelaksanaan KSI Awards yang kedua. Untuk pertama kalinya KSI Awards diberikan pada tahun 2003 untuk manuskrip buku kumpulan puisi terbaik. Ketika itu, KSI Awards diraih oleh penyair Semarang, Heru Mugiarto, dengan manuskrip buku kumpulan puisi berjudul Perjalanan Ziarah. Sedangkan penyair Jakarta, Rukmi Wisnu Wardani, meraih posisi sebagai runner-up, dengan buku manuskrip puisi berjudul Banyak Orang Bilang Aku Sudah Gila.

Dalam perkembangan sastra Indonesia mutakhir, peran komunitas sastra sangat

penting, termasuk KSI. Komunitas sastra tidak hanya menjadi wadah pembinaan calon penulis dan pengembangan apresiasi sastra masyarakat, tapi juga ikut memberi arah perkembangan corak estetika dan tematika kesastraan Indonesia mutakhir. Bahkan, secara ideologis, komunitas-komunitas sastra juga ikut mempengaruhi orientasi penciptaan para sastrawan Indonesia mutakhir. (http://www.indonesiakaya.com/event/kegiatan_dab_detail/54)

B. Kongres Sastra Jawa (KSJ)

Seiring dengan tumbuhnya perhatian terhadap perkembangan bahasa Jawa tumbuh pula perhatian para pengarang sastra Jawa terhadap nasib sastra Jawa. Tetapi karena dirasakan kurang menda-patkan porsi yang cukup maka muncul gagasan untuk menyelenggarakan kongres tersendiri. Tampaknya hubungan antara "Kongres Bahasa Jawa" dan "kongres Sastra Jawa" sempat renggang. Bahkan ketika akan diselenggarakan KSJ II tahun 2006 yang bersamaan waktunya dengan KBJ V sempat muncul istilah sebagai "kongres tandingan". Permintaan Panitia KBJ agar untuk bidang sastra tidak menggunakan kata "kongres" ditolak termasuk bantuan dananya.

Berbeda dengan suasana KSJ II dan KBJ V di Semarang, pada KSJ III di Bojonegoro dan KBJ VI hubungan antara keduanya sudah semakin rapat. Dalam pertemuan antara Panitia KSJ III dan KBJ VI membuahkkan kesepakatan bahwa KSJ III merupakan bagian dari KBJ VI karena tempat penyelenggaraan dan waktunya sangat berdekatan. Dua-buanya berlangsung dengan sukses. Adapun mengenai acara Kongres Sastra Jawa (KSJ) yang pernah diselenggarakan adalah sebagai berikut.

B.1 Kongres Sastra Jawa I 2001

Dengan dimotori oleh para sastrawan muda, seperti Daniel Tito, Keliek SW, Bonari Nabononar, Suwardi Endraswara, Sunarko, Yudeth, dan didukung oleh sastrawan golongan tua seperti JFX Hoery, Suparto Brata, Ruswardyatmo, dll., keinginan untuk menyelenggarakan Kongres Sastra Jawa (KSJ) akhirnya terwujud. KSJ I diselenggarakan di Taman Budaya Surakarta, 6-7 Juli 2001. Tema yang dipilih adalah "Sastra Jawa: Menyikapi Fenomena Kekinian Menyongsong Masa Depan".

Keputusan Kongres Sastra Jawa I

1. Pendahuluan

Kongres Sastra Jawa (KSJ) diselenggarakan di Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta, tanggal 6-7 Juli 2001 dengan tema "Sastra Jawa: Menyikapi Fenomena Kekinian Menyongsong Masa Depan", atas prakarsa para pengarang muda. KSJ didukung oleh Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta dan beberapa pihak, di antaranya Arswendo Atmowiloto, WS Rendra, Bambang Sadono, Murtidjono, dan N. Sdkdani Darmopamudjo.

KSJ diikuti 80 peserta terdiri dari pengarang, pengamat dan pemerhati sastra, akademisi dan peneliti, dalang, serta birokrat lembaga seni budaya dari berbagai daerah di Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Timur.

Secara umum, KSJ mewadahi tiga komisi, yaitu komisi kreativitas kepengarangan, komisi organisasi, dan komisi pemasyarakatan sastra Jawa. Di samping persidangan-persidangan resmi, juga ada dialog nonformal. Setelah mengikuti jalannya persidangan formal maupun dialog nonformal, Panitia berhasil merumuskan dua keputusan, berupa Pola Operasional dan Tindak Lanjut.

2. Pola Operasional

Perlu diupayakan sastra Jawa masuk sekolah dan Perguruan Tinggi dengan melibatkan pengarang. Perlu pemanggungan sastra Jawa secara berkala, misalnya festival sastra Jawa, sebagai ajang komunikasi kreativitas antarpengarang.

Perlu ruang-ruang *performance* sebagai sosialisasi sastra Jawa, misalnya festival dan pertunjukan-pertunjukan lain, secara berkala maupun insidental. Perlu dibentuk networking dengan lembaga seni-budaya dan ranah kebudayaan yang lain, baik antarindividu, antarkomunitas pengarang sastra Jawa maupun dengan komunitas sastra lain. Untuk mewadahi kreativitas sekaligus memperluas ruang ekspresi estetis, perlu diupayakan penerbitan alternatif berupa majalah sastra Jawa secara berkala dan buku-buku yang memuat karya sastra Jawa. Diperlukan upaya untuk merangsang kreativitas pengarang sastra Jawa, terutama kalangan muda, dengan membangun kantong-kantong sastra Jawa. Perlu komunikasi dan pertemuan berkala untuk membahas isu-isu sastra sekaligus menyikapi akselerasi perkembangan sastra Jawa.

3. Tindak Lanjut

Keputusan KBJ akan segera ditindaklanjuti. Adapun KSJ berikutnya dilaksanakan 3 (tiga) tahun mendatang dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian.

Surakarta, 7 Juli 2001

B.2 Kongres Sastra Jawa II 2006

Tema yang dibahas dalam KSJ II adalah “Sahabipraya amrih Kuncara” atau “Membangun kemitraan untuk perkembangan sastra Jawa”. Tentang penyelenggaraan kongres ini muncul pendapat bahwa penyelenggaraan KSJ II di Semarang merupakan “tandingan” dari Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang.

Salah satu rekomendasi Kongres Sastra Jawa II yang amat penting adalah sebuah usulan agar diupayakan kongres itu diperluas menjadi kongres kebudayaan Jawa. Alasannya karena selama ini pendekatan cenderung memanfaatkan pendekatan poli-tik, bahkan pendekatan ekonomis, sehingga masyarakat mengukur kehidupan ini dengan angka, tanpa mengukur dengan rasa yang ada dalam masyarakat di Indonesia.

Kongres itu merupakan sebuah konsekuensi kejujuran untuk mengungkapkan bahwa efek lokalitas Jawa bukan sekadar tersurat di dalam buku, tetapi juga pada

pembicaraan, bahkan ketika bersepakat menghidupkan kembali organisasi pengarang sastra Jawa sebagai manifestasi kehidupan tradisi tulis dalam bahasa Jawa. (Sumber: <http://id.shvoong.com/social-sciences/1690961-menuju-kongres-kebudayaan-jawa/#ixzz1tRruD7qw>)

B.3 Kongres Sastra Jawa III 2011

Kongres diselenggarakan di Bojonegoro tahun 2011. Kongres itu disebut-sebut sebagai tandingan Kongres Bahasa Jawa V (KBJ) yang kebetulan waktu penyelenggaraannya berdekatan. KBJ V diselenggarakan pada 27-30 November 2011, sementara **Kongres Sastra Jawa III** digelar pada 28-30 Oktober 2011. Tempatnya pun sama-sama di Jawa Timur, KBJ V di Surabaya, sementara KSJ II diselenggarakan di kota Bojonegoro.

Tujuan diselenggarakan KSJ III adalah untuk memampangkan reputasi sastra Jawa, setidaknya selama lima tahun terakhir ini sekaligus mencari terobosan untuk mengoptimalkan daya hidup sastra Jawa masa kini. Selain juga untuk menempatkan posisi KSJ agar tetap dipandang sebagai bahwa sastra Jawa tidak "kepaten obor" dan bahkan esungguhnya sastra Jawa terus berdinamika. (sumber: <http://rumahsastraindonesia.wordpress.com/2011/10/16/kongres-sastra-jawa-iii-masih-melawan/>)

C. Kongres Cerita Pendek (Cerpen) Indonesia (KCI)

Mengimbangi derasnya karya cerpen bermutu berikut kreatornya, sejumlah cerpenis dan pengamat sastra kini menerbitkan 'Jurnal Cerita Pendek Indonesia' (JCPI). Peluncuran perdananya telah dilakukan awal Februari lalu di Bali, di tengah pelaksanaan Konggres Cerpen Indonesia II. Kelahirannya dibidani oleh Yayasan Cerita Pendek Indonesia (YCPI), tempat berkumpulnya para seniman sastra seperti Joni Ariadinata, Hudan Hidayat, Maman S Mahayana, Ahmad Tohari, Bakdi Sumanto, dan Raudal Tanjung Banua. Kesemua nama ini tentu tercatat juga sebagai dewan redaksi, kecuali Bakdi Sumanto yang digantikan Satmoko Budi Santoso.

C.1 Kongres Cerpen Indonesia I 2000

Kongres dilaksanakan di Jogjakarta tahun 2000

C.2 Kongres Cerpen Indonesia II 2002

Kongres diselenggarakan di Bali tanggal 18 Juni tahun 2002.

C.3 Kongres Cerpen Indonesia III 2003

Diselenggarakan di Lampung tahun 2003

C.4 Kongres Cerpen Indonesia IV 2005

Diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, tanggal 26-30 November 2005.

Hasil yang dapat dari KCI IV di Riau adalah sebagai berikut.

Prolog.

Mencermati perkembangan cerpen Indonesia, maka dilaksanakan Kongres Cerpen Indonesia (KCI) ini sebagai kelanjutan dari KCI I Yogyakarta, KCI II Bali, dan KCI III Lampung. Memperhatikan berbagai gagasan yang muncul dari semua sesi diskusi selama KCI IV berlangsung, maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

I. KESIMPULAN

1. Lokalitas dalam konsep budaya pada hakikatnya bukan merupakan wilayah yang terikat pada batas ruang tertentu, melainkan berkaitan dengan kesamaan sekaligus keberagaman budaya
2. Konsep estetika lokal sebagai wilayah penciptaan yang dinamis dan terbuka merupakan daya tawar global-lokal yang perlu dipahami dalam bentuk jamak dan cita rasa seni serta kaidahnya dalam proses penerimaan dan pembentukan karya kreatif berdasarkan berbagai interaksi pengaruh dan dinamika budaya lintas batas.
3. Lokalitas cerpen Indonesia bukan sekedar sebagai nasesoris melainkan sebagai bagian yang intergral dari substansi karya yang bersangkutan.
4. Estetika lokal dalam perjalanan panjang cerpen Indonesia sejak awal dipengaruhi oleh budaya tempatan sehingga secara historis berakar pada nilai dan tradisi Indonesia.
5. Identitas cerpen Indonesia sejak awal pertumbuhan hingga perkembangan mutakhir memperlihatkan kecenderungan adanya ikatan dengan latar belakang budaya tempatan dan pengaruh global.
6. Untuk mencapai nilai estetika sebagai esensi karya diperlukan dukungan obsesi dan penguasaan bahasa secara kreatif sebagai dasar penciptaan.
7. Pertumbuhan dan perkembangan cerpen Indonesia bersinergi dengan media massa dan industri penerbitan yang perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

II. REKOMENDASI

Kongres merekomendasikan:

1. Guna menggairahkan kehidupan cerpen Indonesia khususnya, dan penulisan karya kreatif umumnya, maka perlu dibentuk satu organisasi yang bernama Komunitas Cerpen Indonesia.
2. Pembentukan Komunitas Cerpen Indonesia itu perlu disosialisasikan ke berbagai daerah.
3. Komunitas Cerpen Indonesia akan diresmikan pada Kongres Cerpen V, dan kepada Panitia Kongres Cerpen Indonesia V ditugaskan untuk membuat anggaran dasar

- dan rumah tangga, struktur dan kepengurusan.
4. Dewan kesenian, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, pers, dan lembaga penerbitan diharapkan dapat menggairahkan kehidupan cerpen Indonesia.
 5. Kongres Cerpen Indonesia V tahun 2007 diselenggarakan di Kalimantan Selatan.

Pekanbaru, 29 November 2005

TIM PERUMUS

Ahmadun Y Herfanda (Ketua/Anggota)

H.S.S. Sei Gergaji (Sekretaris/Anggota)

Maman S. Mahayana (Anggota)

Isbey Setiawan ZS (Anggota)

Nasrul Azwar (Anggota)

Sumber: <http://id.shvoong.com/social-sciences/1633585-hasil-kongres-cerpen-iv-pekanbaru/#ixzz1tSoo2pmt>

C.5 Kongres Cerpen Indonesia V 2007

Kongres diselenggarakan di Taman Budaya Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan pada kongres inilah terbentuk lembaga Komunitas Cerpen Indonesia dengan ketua Ahmadun Yosi Herfanda (sastrawan, redaktur budaya Republika); Ketua I, Zulfaisal Putra (Banjarmasin); Ketua II, Agus Noor (Jawa Tengah); Ketua III, Maman S. Mahayana (Jakarta); Sekretaris Jenderal Triyanto Triwikromo (redaktur Suara Merdeka, Semarang); Sekretaris I, Mezra (Kupang); Sekretaris II, Saut Situmorang (Yogyakarta); Bendahara I, Raudal Tanjung Banua (Yogya), dan Bendahara II, Wahida Idris (Yogyakarta).

C.6 Kongres Cerpen Indonesia VI 2012

Kongres Cerpen Indonesia VI dan Seminar Nasional Sastra Mutakhir dilaksanakan di SMK Kartini Pinamorong Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada hari Minggu –Kamis, 18-22 November 2012. Tema dari kongres adalah: “Cerpen di tengah perkembangan industri kreatif”. Tujuan dari kongres itu adalah:

1. Mendorong pertumbuhan tradisi penulisan cerpen di Indonesia, khususnya di kawasan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Membuka akses para cerpenis Indonesia ke industri kreatif, khususnya industri sinetron dan film.
3. Mendorong industri sinema untuk dapat mengakomodasi cerpen sebagai bahan penulisan skenario, guna melahirkan sinema-sinema yang menarik dan sastrawi.
4. Memilih pengurus baru Komunitas Cerpen Indonesia.
5. Menentukan tuan rumah Kongres Cerpen Indonesia VII.

Di dalam kongres selain diselenggarakan seminar, juga diadakan penerbitan buku antologi cerpen, pertunjukan baca cerpen, pameran dan bazaar buku bahasa dan sastra Indonesia serta malam pentas seni (tari, kolintang, bintang vokalia “lagu-lagu Minahasa” Paduan suara. Topik seminar dan pembicara adalah sebagai berikut:

Sesi 1: *Masa depan karya sastra dalam era industri kreatif* dengan pembicara: Ahmad Tohari dan Triyanto Triikromo.

Sesi 2: *Peluang pasar cerpen dalam indutri sinema*, dengan pembicara: Ahmadun Yosi Herfanda dan Raudal Tanjung Banua.

Sesi 3: *Antara karya sastra dan sinema yang sastrawi*, dengan pembicara: Korie Layun Rampan dan Mezra Polondau.

(Sumber: <http://kongrescerpenindonesiakevi.blogspot.com/>)

BAB V

KONFERENSI BAHASA DAN SASTRA

Berbagai konferensi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang pernah diselenggarakan merupakan bukti besarnya perhatian masyarakat dan para ahli terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Forum konferensi di bidang ini sudah diawali dengan konferensi sastra di Medan, berlangsung sebelum Indonesia merdeka (1939) setelah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938. Setelah Indonesia merdeka konferensi bahasa dan sastra terus berkembang. Kegiatan konferensi bahasa dan sastra yang dapat dihimpun urut-urutannya adalah sebagai berikut:

A. Konferensi Sastra, 1939

Pada tahun 1939 di Medan diselenggarakan Konferensi Sastra. Konferensi ini khusus membicarakan penerbitan roman yang waktu itu sangat banyak beredar. Banyak terbitan buku yang dinilai bersifat komersial yang cenderung berisi hal-hal yang sensasional, asusila dan cabul, berarti bermutu rendah.¹⁷ Penerbitan-penerbitan itu adalah di luar penerbitan Balai Pustaka, dan kebanyakan penerbit Medan dan Padang. Setelah konferensi ini tidak ada lagi lanjutannya.

B. Konferensi Bahasa dan Kesusasteraan Sunda, 1952

Konferensi itu diselenggarakan pada tanggal 17-19 Mei 1952, di Bandung. Sebelum konferensi dibuka, diadakan acara resepsi di Balaikota dan hadir Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan waktu itu Bahder Djohan. Dalam sambutannya, Bahder Djohan berharap agar dari konferensi itu akan membuat bahasa daerah memperkaya bahasa persatuan.

Menurut berita di Pikiran Rakyat 19 Mei 1952, dalam konferensi itu telah terjadi perdebatan antara tiga golongan, yaitu golongan tua, golongan sedang dan golongan

17 Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Nomor 3 tahun 1970: hal. 39

muda. Mungkin yang dimaksud dengan golongan sedang adalah golongan tengah. Tidak terlalu jelas kriteria apakah yang dipakai. Yang jelas pada konferensi hadir para tokoh bahasa dan sastra Sunda seperti M.A.Salmon, Satjadibrata, Utuy Tatang Sontani, Puradiredja, Bujung Saleh, Achdiat Kartamihardja, Tatang Sastrawira, AS Dharta, dll. Isu utama dalam konferensi itu di sekitar fungsi bahasa halus yang menurut golongan muda tidak selayaknya lagi dipergunakan di zaman demokrasi. Sementara itu, golongan sedang boleh saja bahasa halus dipergunakan untuk semua lapisan masyarakat. Bagi golongan tua pemakaian bahasa halus harus dipertahankan karena semua itu adalah kekayaan Bahasa Sunda yang merupakan warisan nenek moyang.

Golongan pemuda yang turut juga dalam konferensi ini menyokong Bahasa Sunda sepanjang usaha itu tidak membawa bibit perpecahan untuk kesatuan Indonesia. Antara lain kelompok ini menyatakan: *“Kalau usaha pemeliharaan bahasa Sunda itu akan memetjahkan persatuan jang sudah tertjapai sekarang, pemuda tidak akan menjokong dan mungkin akan berkehndak membunuh bahasa Sunda itu”*. Sementara itu, M.A. Salmun Mas Atje mengemukakan bahwa Bahasa Sunda halus sejak masa kolonial hingga masa itu mempunyai fungsi tidak lebih membeda-bedakan kelas oleh kaum menak dengan sengaja diusahakan tersebar ke desa-desa untuk keuntungan kelas sosial itu. Antara Salmon mengatakan: *“Tidak selajaknja di masa segala-gala sesuatu sudah memakai dasar kerakjatan masih tetap ada bahasa jang dipertuan dan bahasa jang diperbudak”*. Salmun tidak bermaksud membuang bahasanya, tetapi ingin supaya bahasa halus itu tidak dijadikan bahasa membedakan kelas. Bahasa halus menurutnya hanya ada dalam kalangan ilmu pengetahuan.

Sastrawan AS. Darta mengemukakan bahwa untuk perkembangan Sastra Sunda selanjutnya, seorang sastrawan harus mengerti kewajibannya dan bertanggungjawab kepada masyarakat, pada rakyat dan kepada demokrasi. Seorang sastrawan harus mencintai dan menyayangi rakyat. Kesusasteraan Sunda seharusnya merebut kebenaran bukan membawa masyarakat ke jalan yang salah. Sementara Bujung Saleh meminta bahwa bahasa kampung atau bahasa dusun tidak boleh dihinakan. (Sumber : *Pikiran Rakjat*, 19 Mei 1952 dan <http://sejarah.kompasiana.com/>)

C. Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) 1964

Munculnya konferensi ini ada hubungannya dengan lahirnya Manifes Kebudayaan yang dicetuskan oleh para budayawan, seniman dan cendekiawan yang oleh kelompok kiri (Lekra) dituduh sebagai kelompok anti Manifesto Politik (Manipol). Manifes Kebudayaan yang merupakan pernyataan dan sikap para budayawan pada saat itu sebagai bentuk penjelasan tentang tuduhan Lekra dan pendukungnya, disusun dan ditandatangani sejumlah pengarang dan pelukis Jakarta. Pananda tangan pernyataan itu, antara lain H.B Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Goenawan Mohamad, Bokor Hutasuhut, Soe Hok Djinn, dan lain-lain, diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1963. Bunyi lengkap dari Manifes Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Manifes Kebudayaan

Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan mengumumkan sebuah

manifes kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami.

Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektoral kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan kebudayaan nasional kami berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengahnya masya-rakat bangsa-bangsa. (Jakarta, 17 Agustus 1963)

PANCASILA adalah falsafah kebudayaan kami.

Jakarta, 17 Agustus 1963

Manifes itu segera mendapatkan sambutan dari pelosok tanah air. Di pihak lain, manifes itu mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh. Namun, pihak manifes pun tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarang yang mereka namakan Konferensi Karyawan Pengarang Se-Indonesia (KKPI). Konferensi ini berlangsung tanggal 1—7 Maret 1964 di Jakarta, menghasilkan berdirinya Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI). Tetapi, sebelum PKPI berjalan, Soekarno (presiden saat itu) menyatakan manifes kebudayaan dilarang. Para budayawan, seniman, dan pengarang penandatanganan manifes kebudayaan dikucilkan dari tiap kegiatan, ditutup kemungkinan mengumumkan karya-karyanya, bahkan yang menjadi pegawai pemerintah dipecat dari pekerjaannya.

Perkataan 'Manikebuis' menjadi istilah populer untuk menuduh seseorang "kontra revolusi, anti-manipol, anti-Usdek, anti-nasakom dan sebagainya. Majalah sastra dituntut dilarang terbit. Demikian juga majalah Indonesia, dan lain-lain.

Konferensi ini diselenggarakan pada permulaan Maret 1964 di Jakarta dengan tema "Sumbangan Pengarang-pengarang Indo-nesia dalam Revolusi". Dalam konferensi itu selain dihadiri oleh sejumlah organisasi kebudayaan, juga dihadiri oleh para pendukung Manifes Kebudayaan yang turut sebagai sponsor. Konferensi itu didukung oleh Majalah Sastra, yang terbit Mei 1961 Majalah Sastra diketua oleh HB. Jassin, dan Redaktur penyelenggara DS. Moeljanto. Isi majalah sastra mengutamakan karya sastra dalam bentuk cerpen, juga sajak, kritik dan esai. Beberapa pengarang esai yang banyak menulis pada masa itu adalah Goenawan Mohamad, Arief Budiman (Soe Hok Djin) D.A Peransi, dan lain-lain. Bebe-rapa penulis esai seperti Iwan Simatupang dan Wiratmo Soekito juga banyak menulis dalam majalah sastra. Boen S. Oemarjati, M.S Hutagalung, Virga Belan, Salim Said juga sering mengumum-kan kritik-kritiknya dalam majalah tersebut.

Pengarang-pengarang cerpen dalam majalah Sastra antara lain B. Soelarto, Bur Rasuanto, A. Bastari Asnin, Satyagraha Hoerip Soeprobo, Kamal Hamzah, Ras Siregar,

Sori Siregar, Gerson Poyk, B. Jass, dan lain-lain. Adapun nama-nama penyair yang sering muncul di majalah Sastra antara lain: Isma Sawitri, Goenawan Mohamad, M. Saribi Afn, Poppy Hutagalung, Budiman S. Hartojo, Arifin C.Noer, Sapardi Djoko Danomo, dan lain-lain.

Menurut DS Mulyanto dan Taufiq Ismail majalah itu tidak dapat dipisahkan dari Manifes Kebudayaan sebagai "penemuan kembali kebudayaan Indonesia yang akan mengejawantah ke dalam semua sektor kebudayaan" yang dalam hal ini sektor kepengarangan. Menurut keduanya melalui konferensi itu terjadi kerja sama antara siapapun yang mempunyai kepentingan dalam mewujudkan penemuan kembali kebudayaan Indonesia karena diyakini majalah ini dengan para pengasuhnya yang tersebar di seluruh Indonesia membuka hati dan mengulurkan tangan dalam membina hari depan kesusastraan Indonesia. (DS Muljanto, Taufiq Ismail dan DS Muljanto: hal. 269).

D. Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) 1964

Lahirnya Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner tidak terlepas dari makin memuncaknya pertikaian ideologi politik antara kelompok kiri dan kanan yang didukung kelompok netral. Setelah lahir Manifes Kebudayaan yang kemudian dilarang oleh Presiden Soekarno, gerak kelompok kiri semakin meningkat. Dari judul konferensi, yakni Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner dan isi amanat Presiden Soekarno, semakin jelas tujuan yang akan dicapai oleh kelompok yang tidak setuju terhadap kelompok penanda tangan Manifes Kebudayaan. Menurut Taufiq Ismail dan DS Mulyanto konferensi ini bertujuan untuk mengambil sikap untuk "Menghimpun kekuatan sebesar-besarnya dan mengalahkan musuh satu demi satu". (ds Moeljanto dan Tauiq Ismail: hal. 58).

Selain DN Aidit Ketua Umum Partai Komunis Indonesia (PKI) menyampaikan sambutan pada Malam Resepsi Pembukaan Konferensi di Istana Negara, Bung Karno juga menyampaikan amanat. Di dalam amanatnya Bung Karno banyak menyitir pandangan Karl Marx tentang kebudayaan bahwa "*kebudayaan dari sesuatu zaman adalah selalu kebudayaannya kelas yang berkuasa*". Selain itu, Bung Karno mengingatkan bahwa kita sebagai kaum revolusioner semuanya berdiri dan berjalan di atas relnya Manipol dan perasannya, yaitu USDEK. Huruf "K" sebagai kepanjangan "Kepribadian" Nasional Indonesia harus menjadi pedoman kita. Salah satu kewajiban kita "*menghidupkan kembali kita punya kepribadian, kita punya kebudayaan di atas dasar kepribadian nasional*". Pada bagian akhir amanatnya Bung Karno mengatakan: "*...marilah kita tidak menjiplak, marilah kita tidak mengoper kebudayaan bangsa lain*". [...] tetapi kita harus memberantas semua penetration pacific a la kebudayaan, ya gondrong-gondrongan kita ganyang, ya sasak-sakan kita ganyang, ya twist-twist kita ganyang, ya rock-and-roll kita ganyang, ya musik ngak-ngik-ngok kita ganyang...". (Sumber: Arsip Nasional).

Konferensi diselenggarakan tanggal 27 Agustus 1963--2 September 1964 membahas tentang pentingnya memberikan semacam garis-garis fundamental bagi penciptaan sastra dan seni yang revolusioner sesuai dengan pelaksanaan amanat Presiden dalam pidato yang diberi judul Tahun Vivere Pericoloso atau TAVIP.

Disebutkan bahwa tujuan konferensi adalah mendorong perkembangan sastra dan seni Indonesia yang berkepribadian nasional dan mengabdikan pada rakyat serta untuk lebih mengintegrasikan sastra dan seni dengan rakyat dan Manifesto Politik (Manipol). (Sumber: Kompasiana, 4 Januari 2012). Kesimpulan yang diambil bahwa kebudayaan reaksioner sedang berada dalam makin bangkrut sebagai bagian dari politik reaksi secara umum, semangat rakyat melawan kebudayaan imperialis dan feodal makin menanjak, sedangkan sastra dan seni revolusioner belum berkedudukan mendominasi, sesuai dengan keadaan perimbangan kekuatan kelas yang nyata.

E. Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI)

Sebelum lahir Kongres Linguistik Indonesia, diawali dengan pendirian lembaga yang menamakan dirinya Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI). Tujuan utama MLI adalah untuk menggalakkan kegiatan penelitian bahasa dan penulisan ilmiah tentang bahasa. Lembaga ini berdiri pada tanggal 15 November 1975 setelah dilaksanakan suatu pertemuan 50 ahli bahasa di Universitas Padjadjaran Bandung, seperti J.S. Badudu, Djoko Kentjono, Gorys Keraf, Harimurti Kridaleksana, Amran Halim, Anton M. Moeliono, Muhadjir, Soepomo Poedjosoedarmo, M. Ramlan, Yus Rusyana, Samsuri, M. Silitonga, Sudaryanto, I. Suharno, dan John W.M. Verhaar, S.J. Ketua pertama MLI adalah Samsuri, Wakil Ketua Anton M. Moeliono, Sekretaris Gorys Keraf, dan Bendahara Soepomo Poedjosoedarmo.

E.1 KIMLI- I 1979

Menurut tulisan Bambang Kaswanti Purwo, pertemuan ilmiah **pertama** diselenggarakan dengan nama "Seminar MLI" di IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, dari tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 1979.

E.2 KIMLI-II 1982

Pertemuan **kedua** diselenggarakan di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta mulai tanggal 1-3 Maret 1982 dengan nama yang sama "Seminar MLI".

E.3 KIMLI-III 1979

Pada pertemuan **ketiga** di Universitas Udayana, Denpasar kegiatan itu diusulkan agar diganti menjadi "Konferensi Nasional MLI". Perubahan dinilai penting karena sifat dari pertemuan ilmiah itu semakin meluas (nasional) dan serius.

E.4 KIMLI-IV 1988

Pada pertemuan **keempat** di Universitas Hasanudin, Makassar dengan nama "Konferensi Nasional MLI" diselenggarakan mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Juli tahun 1988.

E.5 KIMLI-V 1991

Konferensi yang **kelima** diselenggarakan di Universitas Diponegoro, Semarang dari tanggal 7 sampai dengan 12 Juli 1991. Pada konferensi ini disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MLI yang baru yang antara lain menyebutkan bahwa

nama pertemuan itu diganti menjadi “kongres”.

E.6 KLN-VI 1994

Nama baru “Kongres Linguistik Nasional (KLN)” mulai digunakan pada pertemuan ilmiah **keenam** yang diselenggarakan di Universitas Sriwijaya, Palembang dari tanggal 1-4 Juni 1994.

E.7 KLN-VII 1997

KLN berikutnya (**ketujuh**) diselenggarakan mulai tanggal 7-10 November 1997 di IKIP Surabaya. Kongres ini dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. -Ing Wardiman Djojonegoro. Sebelum kongres dilaksanakan diawali dengan pra-KLN di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dalam KLN ini disepakati penyelenggaraan kongres dari tiga tahun sekali dipendek menjadi 2 tahun sekali. Mengenai KLN berikutnya, yakni kongres kedelapan menjadi jelas di mana dan kapan diselenggarakan. Dalam tulisan berjudul Kilas Balik Masyarakat Linguistik Indonesia 1975-1999, yang di situ dijelaskan data diper-oleh melalui wawancara dengan Yus Rusyana dan Sudaryanto, Bambang Kaswanti Purwo menjelaskan bahwa KLN yang diselenggarakan di Padepokan Persilatan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, dari tanggal 27-31 Juli 1999 adalah KLN **kedelapan**. (Bambang Kaswanti Purwo, *Kilas Balik Masyarakat Linguistik Indonesia 1975-1999*: hal. 76).

E.8 KLN-VIII 1988

Data belum ditemukan

E.9 KLN-IX 1999

Tetapi bila kita cermati foto konferensi di TMII menunjukkan kongres yang diselenggarakan tahun 1999 adalah “Kongres Linguistik Nasional IX”. Lalu, KLN ke delapan di mana dan kapan?

E.10 KLN-X 2002

KLN berikutnya, yakni **kesepuluh (X)** diselenggarakan di kota Denpasar, Bali dari tanggal 17 sampai dengan 20 Juli 2002 seperti tampak dalam foto sebelah.

E.11 KLN-XI 2005

Kongres Linguistik Nasional **XI**, di Padang dari tanggal 11-15 Juli 2005. Kongres diselenggarakan di gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) kampus Universitas Negeri Padang. Di samping kongres diberikan kuliah pendek oleh Prof. Dr. Bernard Comrie dengan judul Introduction to Language Typology. Prof. Comrie saat itu menjabat Direktur Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Leipzig dan sekaligus Profesor Peneliti pada University of California di Santa Barbara.

E.12 KLN-XII 2007

Kongres Linguistik Nasional **XII**, tahun 2007 di Surakarta. Kongres memilih “Bahasa sebagai Aset Budaya Bangsa dalam Bingkai NKRI”, diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 3-6 September 2007. Pemakalah berjumlah 80 orang; mereka

datang dari berbagai perguruan tinggi dan insititusi, baik dalam maupun luar negeri. Lima pemakalah utama ikut menyemarakkan KLN XII ini, yaitu: Dr. Dendy Sugono (Pusat Bahasa), Prof. Dr. Asim Gunarwan (UI), Dr. Hammam Riza (BPPT), Prof. Dr. H. Joko Nurkamto (UNS), dan Dr. Patrisius Djiwandono (Ubaya).

E.13 KLN-XIII 2009

Kongres Linguistik Nasional XIII diselenggarakan di Malang dari tanggal 5–7 November 2009 di Hotel Kusuma Agrowisata, Batu, Malang. Penyaji utama pada Kongres tersebut adalah Prof. Gabriel Kasper, Ph.D. (Universitas of Hawaii at Manoa, USA), Prof. David Gil, Ph.D. (Max Planck Institute, Germany), Prof. Datuk Asmah Haji Omar, Ph.D. (University of Malaya, Malaysia), Katharina E. Sukamto, Ph.D. (Unika Atma Jaya, Jakarta) yang akan membacakan makalah dari Alm. Prof. Soenjono Dardjowidjojo, Ph.D., dan Prof. Dr. Suparno (Uniersitas Negeri Malang).

Dari hasil evaluasi perjalanan dari satu KLN ke KLN berikutnya menunjukkan kecenderungan peserta dari dalam dan luar negeri semakin banyak. Pemakalah dari luar juga bertambah. Atas dasar pertimbangan ini pertemuan ilmiah tahun 2009 di Malang mulai digunakan nama baru menjadi “Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia” disingkat “KIMLI”. Dengan perubahan nama itu diharapkan ilmu linguistik di Indonesia dapat mendunia. Dalam KIMLI di Malang disepakati untuk memilih MLI Cabang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung menjadi tuan rumah KIMLI 2011.

E.14 KLN-XIV 2011

Kongres XIV diselenggarakan di ISOLA RESORT, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Jln. Setiabudhi 229, Bandung. Kongres diselenggarakan mulai tanggal 9-12 Oktober 2011 dengan tema “Bahasa dan Pembangunan Karakter Bangsa”. Pembicara antara lain Aminudin Aziz (Guru Besar Linguistik UPI), Effendy Kadarisman (Guru Besar Linguistik UM), James T. Collins (Northern Illionis University), Risa Permanadeli (Pusat Kajian Representasi Sosial, Jakarta), Georgina Heydon (Director, Postgraduate Programs, RMIT University, Australia), dan Frede-rick John Bowden (Max Planx Institute).

Selain Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia, di lingkungan Universitas Atmajaya juga memiliki agenda tetap setiap tahun untuk menyelenggarakan konferensi dengan nama Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya, disingkat KOLITA. Sampai dengan tahun 2013 telah berlangsung 11 kali, dan terakhir, tahun 2013 diselenggarakan tanggal 1-2 Mei 2013. Seperti diberitakan dalam Kompas (2/5/2013) masalah pendokumentasian bahasa daerah di Indonesia dinilai semakin penting. Saat ini pendokumentasian bahasa daerah sangat terbatas. Hal itu terlihat dari terbatasnya sumber referensi tentang bahasa daerah yang dijadikan dasar kajian secara mendalam. Jika ada, referensi itu banyak yang dari luar negeri.

F. Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah

Diselenggarakan di Jakarta tahun 1982 oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Data belum ditemukan.

G. Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK)

Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) yang didirikan di Tugu, Bogor, November tahun 1984. HISKI merupakan sebuah organisasi profesi yang bertujuan menjalin komunikasi ilmiah para sarjana kesusastraan (Indonesia, daerah, dan asing) demi kesemarakan dinamika ilmu sastra di negeri ini. Kedudukan sarjana sastra yang berurusan dengan telaah dan penelitian (tentang) sastra sebenarnya sama atau sejajar dengan posisi sastrawan (pengarang) yang berurusan dengan penciptaan karya sastra. (Yudiono KS: hal. 220) Kegiatan KIK yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut.

- G.1 KIK I, 1989 di Denpasar
- G.2 KIK II, 1990 di Bandung
- G.3 KIK III, 1990 di Malang
- G.4 KIK IV, 1992 di Bogor
- G.5 KIK V, 1993 di Yogyakarta
- G.6 KIK VI, 1995
- G.7 KIK VII, 1996 di Sawangan, Bogor
- G.8 KIK VIII, 1997 di Padang
- G.9 KIK IX, 1998
- G.10. KIK X, 1999 di Bandung
- G.11 KIK XI, 2000
- G.12 KIK XII, 2001
- F.13 KIK XIII, 2002
- G.14 KIK XIV, 2003 di Solo
- G.15 KIK XV tahun 2004 di Manado
- G.16 KIK XVI, 2005 di Palembang
- G.17 KIK XVII, 2006 di Jakarta
- G.18 KIK XVIII, 2007 di UI Depok, Jawa Barat
- G.19 KIK XIX, 2008 di Batu, Jawa Timur
- G.20 KIK XX, 2009, di Bandung
- G.21 KIK XXI, 2010, di Surabaya
- G.22 KIK XXII, 2012 di Yogyakarta

Sekedar contoh, gambaran sekilas dari dari sejumlah kongres KIK yang pernah berlangsung adalah sebagai berikut.

1. Konferensi Internasional Kesusastraan XV 2004

Tema konferensi adalah "Sastra Bandingan: Membuka Dialog Antardisiplin dan Antarbudaya". Pemilihan tema itu didasarkan pada kenyataan bahwa kian lama kian jelas bahwa persilangan antarberbagai bidang ilmu dan disiplin merupakan suatu keniscayaan. Sastra pun bukanlah kekecualian. Perkembangan sastra di dunia, termasuk juga di Indonesia, menunjukkan saling keterkaitan yang erat dengan bidang-bidang lain, seperti teknologi, politik, ekonomi, agama, dll. Sebagai salah satu cabang seni, sastra juga memiliki persinggungan dengan cabang-cabang seni yang lain, seperti seni

pertunjukan, sinema, seni musik, dan seni rupa. Selain itu, sastra juga merupakan arena tempat berbagai budaya saling bertemu dalam tataran lokal maupun global.

Fenomena-fenomena persilangan di atas perlu ditelaah secara lebih komprehensif melalui kajian sastra bandingan. Sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu sastra, sastra bandingan telah lama dikenal. Namun, penerapannya di Indonesia masih terbatas dan belum banyak tulisan atau terbitan yang mengembangkan pendekatan ini. Padahal, Indonesia di abad ke-21 ini banyak diwarnai oleh berbagai fenomena multi-dimensional yang dapat disoroti secara interdisipliner melalui pendekatan bandingan.

Oleh sebab itulah Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI) dalam konferensi itu mengangkat tema sastra bandingan sebagai topik utama. Tambahan lagi, para anggota HISKI, yang berasal dari berbagai wilayah kajian, seperti sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra-sastra asing, merupakan suatu potensi yang sangat subur bagi kajian-kajian yang bersifat komparatif. Masih diperlukan dialog yang lebih intensif di antara para ahli sastra di Indonesia untuk mengembangkan studi-studi lintas batas agar tidak terjadi pengkotak-kotakan yang sempit.

Tujuan Konferensi Internasional Kesusastraan XV HISKI tahun 2004 adalah:

1. memperlihatkan dinamika persilangan antar bidang dan disiplin dalam studi sastra;
2. membuka dialog di antara berbagai bidang kajian sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan antara kajian-kajian sastra lokal, nasional dan global;
3. menggali berbagai kemungkinan pengembangan perspektif-perspektif baru dalam sastra bandingan.
4. menunjukkan kekayaan gagasan dalam studi lintas batas dalam sastra yang relevan dengan kehidupan Indonesia pada milenium ketiga.

Dengan tema seperti tersebut di atas, selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub-subtopik berikut ini:

1. Sastra dan bidang-bidang ilmu lain (politik, sosiologi, sejarah, filsafat, teknologi, agama, ekonomi, media, dll.)
2. Sastra dan bidang-bidang seni lain (seni pertunjukan, sinema, seni rupa, seni musik, seni bangunan, seni-seni tradisional, komik, seni populer, dll.)
3. Teori-teori dan metode-metode mutakhir dalam sastra bandingan;
4. Alternatif-alternatif penerapan sastra bandingan dalam kajian teks sastra;
5. Kajian-kajian sastra antara bangsa dan budaya (sastra Indonesia dan sastra asing, sastra Indonesia dan sastra daerah, kajian antar sastra daerah, kajian antar sastra asing, dll.);
6. Kajian sastra kawasan (sastra Asia tenggara, sastra kepulauan, sastra Asia Timur, sastra Asia Barat, sastra kontemporer Eropa, dll.);
7. Kajian genre-genre baru yang berkembang melalui pasar trans-nasional dan teknologi informasi (sastra 'chicklit', sastra populer, sastra internet, dll.);
8. Pengajaran sastra dengan perspektif sastra bandingan.

Pembicara yang diundang untuk berbicara dalam sidang pleno adalah: (1) Sylvia Tiwon (Univ. of California, Berkeley, AS); (2) Keith Foulcher (University of Sydney, Australia); (3) Teresa Birks Ricouard (International Center for Transitional Justice, New York AS); (4) Dr. Ampuan Hj. Ibrahim Ampuan Hj. Tengah (Dewan Bahasa Brunei); (5) Sapardi

Djoko Damono (Universitas Indonesia, Depok)' (6) Nirwan Dewanto (Komunitas Utan Kayu Jakarta); (7) Bakdi Soemanto (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta); (8) Sumarwati Poli (Universitas Hassanuddin, Makassar).

Di samping itu, masih ada lebih dari 45 pemakalah lain yang akan berbicara dalam sidang-sidang paralel, yang akan diseleksi berdasarkan abstrak yang masuk. Peserta Konferensi Internasional Kesusasteraan XV HISKI adalah para sarjana sastra anggota HISKI, pengajar sastra, penulis, pekerja pers, pemerhati sastra, seni dan budaya, serta para ahli dari disiplin-disiplin ilmu lain yang berminat. Jumlah peserta Konferensi diperkirakan 150 orang.

Konferensi Internasional Kesusasteraan XV diselenggarakan di Hotel Santika, Manado, Sulawesi Utara, 25 – 27 Agustus 2004. Konferensi diselenggarakan oleh Pengurus HISKI Pusat dengan bekerjasama dengan Pengurus Daerah HISKI Manado.

2. Konferensi Internasional Kesusasteraan XVI 2005

Konferensi diselenggarakan tanggal 18-21 Agustus 2005 di Palembang. Sekitar dua ratus peserta yang terdiri atas sarjana sastra dari dalam dan luar negeri, undangan, serta para pejabat Pemerintah Daerah Palembang memeriahkan pembukaan. Konferensi itu secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Wahyuddin N.S., di Hotel Swarna Dwipa, Palembang.

Konferensi yang mengangkat tema “Meninjau Kembali Pedagogi dan Politik Pengajaran dan Penelitian Sastra” menurut Ketua Hiski, Riris Toha K. Sarumpaet, merupakan bukti bahwa Hiski selalu memperhatikan masyarakat dan Hiski berdiri karena dan untuk masyarakat. Peserta konferensi berjumlah 160 berasal dari perguruan tinggi, perseorangan, instansi, dan institusi. Peserta dari luar negeri juga hadir, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Jerman, dan Belanda. Penyaji makalah utama sebanyak 10 orang dan pemakalah panel sebanyak 57 orang.

3. Konferensi Internasional Kesusasteraan XVII 2006

Konferensi Internasional Kesusasteraan XVII Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI), di Jakarta, 7-10 Agustus 2006, dengan tema: “Keindonesiaan dan kemelayuan dalam sastra: menapak masa depan”.

4. Konferensi Internasional Kesusasteraan XVIII 2007

Konferensi Internasional Kesusasteraan XVIII mengambil tema “Sastra dalam konteks perkotaan industrialisasi dan urbanisme”. Konferensi diselenggarakan mulai tanggal 7 - 9 Agustus 2007, di Auditorium Gedung I, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

5. Konferensi Internasional Kesusasteraan 2008

Tema konferensi adalah “Pembelajaran Sastra di Sekolah: Ideologi, Politik Kebudayaan, dan Kanonisasi”. Acara diselenggarakan HISKI Pusat bekerja sama

dengan Pusat Bahasa, Depdik-nas, HISKI Komisariat Malang dan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Acara diselenggarakan pada tanggal 12—14 Agustus 2008 di Hotel Asida, Batu, Malang, Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Ketua Umum HISKI, B. Rahmanto mengajak semua peserta untuk bertanggung jawab dan berperan aktif terhadap pembelajaran sastra yang masih termarjinalkan. Konferensi ini dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Walikota Batu, Edi Rumpoko.

Konferensi ini diikuti oleh 110 peserta dari luar dan dalam negeri baik dari kalangan guru, dosen, peneliti, pemerhati bahasa dan sastra, jurnalis, penulis, serta beberapa anggota perwakilan Komisariat Daerah HISKI. Pemakalah utama dalam Konferensi ini di antaranya adalah Prof. Dr. Yus Rusyana (Universitas Pendi-dikan Bandung), Dr. Dendy Sugono (Kepala Pusat Bahasa, Dep-diknas), Dr. Boen S. Oemarjati (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia), Mohd. Zariat Abdul Rani (Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia), Azhar Ibrahim Alwee dan Kartini Anwar (Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang, Republik Singapura).

6. Konferensi Internasional Kesusastraan 2009

KIK XX memilih tema **"Membaca Ulang Fungsi Sosial Sastra dalam Menumbuhkan Nilai dan Sikap Kebangsaan"**. Konferensi berlangsung di Kampus Universitas Pendidikan Indo-nesia (UPI) Jl. Setiabudhi No. 229 Bandung, Jawa Barat, Telp. (022) 70026628 Bandung, mulai tanggal 5 s.d. 7 Agustus 2009.

Pemilihan tema itu dilatarbelakangi oleh adanya sebuah kesadaran bahwa kesusastraan memiliki hubungan yang unik dengan pembentukan nilai dan sikap kebangsaan. Di satu sisi, sejarah sastra (seni secara umum) menunjukkan bahwa sastra menempati posisi yang cukup penting dalam pembentukan karakteristik kebangsaan, bahkan ikut terlibat langsung dalam pembentukan negara bangsa. Berbagai perdebatan dalam kesusastraan dan kebudayaan pada umumnya hampir selalu berbanding lurus dengan perdebatan soal pembangunan karakter bangsa dan kebangsaan. Singkat kata, sastra bisa dikategorikan sebagai salah satu pilar kebangsaan.

Akan tetapi, di sisi lain, dalam perkembangannya, berbagai pihak—terutama lembaga pemerintahan—yang berkompeten dalam pembangunan karakteristik bangsa jarang sekali atau bahkan tidak pernah melibatkan kesusastraan dalam berbagai penyusunan kebijakannya. Pada titik yang ekstrem, ketika masa pemerintahan represif orde baru, sastra justru lebih sering dicurigai akan menghancurkan nilai dan sikap kebangsaan itu sendiri. Hal itu yang kemudian menjadi salah satu penyebab mengapa hamba-hamba kesusastraan sendiri sangat berhati-hati memasuki wilayah tersebut.

Selepas orde baru berakhir dan orde reformasi dimulai, wacana kesusastraan berkembang ke arah yang "leluasa" dan cair. Karya sastra, lepas dari plus-minus kualitasnya, tumbuh demikian subur. Para penulis muda, juga dari kalangan selebritis, bermunculan. Pertumbuhan kesusastraan pun kian tidak bisa diidentifikasi—sebab tidak ada dan tidak berjalannya fungsi kritik. Kondisi ini tampak menimbulkan berbagai paradoks: di satu sisi karya sastra tumbuh subur, tapi pada sisi lain nyaris tidak ada wacana pemi-kiran tentangnya. Kaitan tematik sastra dengan pembentukan karakteristik bangsa seperti terjadi pada masa awal pembentukan negara-bangsa ini,

bahkan tidak pernah terdengar. Tidak ada lagi hubungan, keduanya seakan berjalan ke arah yang berlainan. Apakah fenomena di lapis permukaan itu terjadi karena fakta sebenarnya (lapis karya, semangat berkarya, aktivitas sastra, dan lain-lain) memang demikian? Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI) berkepentingan untuk mendeteksi lebih dalam ikhwal tersebut.

Dari tema tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa subtema sebagai berikut:

1. Pengajaran Sastra dalam Kaitan dengan Penumbuhan Nilai dan Sikap Kebangsaan. Apakah sistem pengajaran sastra yang ada di seawah pendidikan telah memiliki muatan untuk menumbuhkan nilai dan sikap kebangsaan? Buku ajar seperti apa yang mampu membantu mendukung proses belajar-mengajar sastra yang menumbuhkan nilai dan sikap kebangsaan? Apakah institusi pendidikan telah melahirkan guru kesusas-traan yang mampu memotivasi anak didiknya untuk memiliki kesadaran kebangsaan dalam perilaku sehari-hari melalui pengajaran sastra?
2. Dampak Produksi Sastra Pada Pembentukan Kesadaran Nasional. Sejauh manakah karya sastra populer mampu mendukung munculnya kesadaran nasional terhadap pembacanya? Kesadaran nasional seperti apakah yang diusung oleh karya sastra terjemahan? Bagaimanakah nasionalisme dihadirkan dalam karya sastra anak dan remaja? Bagaimanakah peran media massa—sebagai salah satu wadah produksi sastra—dalam mendukung pembentukan kesadaran nasional?
3. Sastra, Masyarakat Perbatasan atau pesisir, dan Nasionalisme. Sejauh manakah keterwakilan masyarakat perbatasan atau pesisir dalam karya sastra? Bagaimanakah produk sastra dalam menumbuhkan nasionalisme bagi masyarakat perbatasan atau pesisir?
4. Sejarah Sastra, Sejarah Bangsa. Bagaimana sejarah sastra ditempatkan dalam konteks sejarah bangsa? Apakah di antara keduanya terdapat hubungan yang signifikan? Bagaimana para pelaku sastra melihat sejarah bangsa; bagaimana pula para sejarawan melihat fungsi sastra dalam pembentukan sejarah bangsa?

Adapun pembicara utama yang hadir dalam konferensi itu antara lain: (1) Prof. Dr. Melanie Budianta (Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI); (2) Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono (Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI); (3) Prof. Dr. Riris K. Sarumpaet (Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan - UI); (4) Prof. Dr. Ganjar Kurnia (Rektor Unpad dan Budayawan); (5) Prof. Dr. Chaedar Alwasilah (Pembantu Rektor Bidang Akademik UPI); (6) Prof. Dr. Irwan Abdullah (Guru Besar Antropologi UGM); (7) Dr. Haryatmoko, S.J. (Dosen Filsafat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta); (8) Dr. Dicky R. Munap (Sekretaris Dirjen Bakorkanal Depdagri); (9) Acep Zamzam Noor (Sastrawan).

Penyelenggara Konferensi Internasional Kesusastraan XX HISKI adalah Pengurus HISKI Komisariat Bandung bekerja sama dengan Pusat Bahasa—Depdiknas, dan Program Studi Bahasa & Sastra Inggris Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Padjadjaran. Peserta Konferensi dari kalangan pemerhati dan peminat sastra, sarjana sastra, pengajar sastra dari segala tingkatan pendidikan, jurnalis, penulis, kritikus, dan pembelajar sastra yang berasal dari dalam dan luar negeri.

7. Konferensi Internasional Kesusastraan XXI 2010

Sastra sebagai salah satu produk kebudayaan bukanlah sesuatu yang bersifat beku, statis dan kedap dari dinamika perkembangan zaman. Sastra diproduksi, dikonsumsi dan dimaknai dengan cara yang berbeda di era dan generasi yang berbeda. Dengan dinamis, sastra Indonesia kontemporer menjadi bagian dari *lifestyle* masyarakat urban perkotaan yang menjadi konsumen terbesar produk kebudayaan. Migrasi kebudayaan melalui urbanisme ke kota yang berlangsung secara massif pada abad ke-21 ini tidak hanya menandai mobilitas fisik tetapi juga sikap, gaya hidup dan pemikiran. Kota, sebagai arus pusat masyarakat urban menciptakan kebudayaan yang memiliki nuansa yang lebih terbuka dan cair meluruhkan sekat-sekat kebudayaan yang dianggap 'tinggi' dan 'rendah', 'kanon' dan 'pop', dsb.

Dinamika kebudayaan urban - termasuk kehidupan sastra di dalamnya - kini semakin mendapatkan tempat dan menciptakan habitus tersendiri di kalangan masyarakat urban perkotaan. Fenomena adaptasi novel-novel berlabel Islami menjadi film yang laris manis ditonton semua kalangan-mulai dari presiden hingga ibu-ibu kelompok pengajian adalah salah satu contohnya. Dalam hal ini, peran kapitalisme dan teknologi dalam sebuah industri massa tentu saja tidak dapat diabaikan. Kapitalisme dengan cerdas membidik peluang, ruang dan identitas baru yang kemudian menciptakan komunitas baru. Pada saat yang sama, globalisasi, liberalisasi ekonomi, politik dan budaya memudahkan akses pada teknologi dan media audio-visual.

Dalam konteks Indonesia, runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan pembubaran Departemen Penerangan pada tahun 2000 memungkinkan liberalisasi media yang merangsang terciptanya komunitas dan ruang-ruang mengungkapkan karya sastra alternatif. Fenomena ini bukannya tanpa risiko. Adanya kecenderungan menciptakan karya instan yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata dan miskin estetika merupakan eksekusi yang tak terelakkan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas dan pemikiran kita bersama untuk mendiskusikan peran sastra dalam masyarakat urban dalam lalu lintas perkembangan media. Dalam konteks kesusastraan, sejumlah pertanyaan yang dapat diangkat dalam kaitan dengan persoalan-persoalan di atas adalah antara lain: bagaimana sastra mempengaruhi gaya hidup urban dan sebaliknya bagaimana dialektika kehidupan urban menentukan mati hidupnya sastra? bagaimana kontestasi dan negosiasi diantara keduanya? Apakah keduanya justru saling melengkapi dan secara kreatif menciptakan genre dan teori baru? Bagaimana sastra mencoba menawarkan solusi alternatif dari persoalan-persoalan masyarakat urban? Apakah simbiosis keduanya mampu menciptakan metode pengajaran sastra yang lebih menarik, kreatif dan inspirasional?

Dengan tema "Sastra dan Budaya Urban dalam Kajian Lintas Media", di dalam konferensi itu dibahas sejumlah permasalahan di atas. Beberapa sub-topik yang dijadikan materi diskusi para peserta adalah:

- a. Sastra dan masyarakat urban dalam dinamika teknologi audio visual: ruang produksi pengetahuan alternatif. Sub-topik ini mengkaji simbiosis sastra dan budaya urban dalam kajian lintas media seperti film, komik, majalah, novel, drama, puisi dll bagi kemungkinan terciptanya ruang produksi pengetahuan alternatif.
- b. Reproduksi budaya lokal dalam industri budaya global. Pembahasan ini lebih kepada

- upaya mencari titik singgung antara lokalitas dalam arus budaya global. Bagaimana budaya lokal bernegosiasi dan berdialog dengan budaya global.
- c. Kompleksitas suara perempuan urban dalam media. Sub-topik ini membahas posisi perempuan urban dalam media, termasuk sastra. Adakah mereka hanya menjadi komoditas pornografi atau justru lebih berdaya menyuarakan aspirasinya.
 - d. Teori, kritik sastra dan pemikiran yang berpijak pada persoalan masyarakat urban. Sub-topik ini mendiskusikan pendekatan sastra dengan sudut pandang baru seperti sastra dan lingkungan hidup (ecocriticism/green studies), sastra dan gender-seksualitas (queer), cyber culture, cultural studies, multikulturalisme, intertekstualitas dsb.
 - e. Budaya urban dan genre sastra. Sub-topik ini mendiskusikan hubungan antara budaya urban dan munculnya fenomena baru dalam genre sastra seperti chick lit, teen lit, sastra Islami, sastra anak dsb.
 - f. Pengajaran sastra dengan media audio-visual. Sub-topik itu menajaki upaya pengajaran sastra menjadi lebih menarik dan kreatif. Misalnya, apresiasi puisi dan pementasan drama melalui youtube, apresiasi sastra cyber dll.
 - g. Dan sub-topik lain yang relevan dengan tema utama

Pelaksana Konferensi Internasional Kesusastraan XXI HISKI dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 3-5 Agustus 2010.

8. Konferensi Internasional Kesusastraan XXII 2012

Konferensi diselenggarakan atas kerja sama UNY-HISKI berlangsung di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta pada Rabu—Jumat (7—9/11/2012). Konferensi yang diselenggarakan oleh Rumpun Sastra Fakultas Bahasa dan Seni UNY dengan HISKI (Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia) itu mengangkat tema “*The Role of Literature in Enhancing Humanity and National Identity*”. Konferensi diikuti oleh hampir semua pemerhati atau sarjana sastra dari seluruh propinsi di Indonesia dan sejumlah perwakilan negara-negara tetangga seperti Malaysia, India, Filipina, bahkan dari Libanon dan Amerika Serikat. Konferensi dibuka oleh Rektor UNY, Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. di Ruang Seminar Gedung PLA FBS UNY. Sementara penutupannya dilakukan secara simbolis oleh Wakil Rektor IV UNY, Prof. Suwarsih Madya, Ph.D., di Ruang Seminar Gedung Kuliah I FBS UNY.

Secara garis besar, tema utama konferensi dipilah menjadi lima subtema, terdiri atas: (1) “Sastra sebagai Identitas Naratif dan Upaya Sastra dalam Menghadapi Masalah Masyarakat dan Bangsa”, (2) “Sastra dan Masalah Lingkungan serta Masyarakat”, (3) “Peran Sastra dalam Pendidikan Moral dan Karakter”, (4) “Sastra Anak dan Kesadaran Feminis dalam Sastra”, dan (5) “Sastra, Kultur, dan Subkultur”. Artikel-artikel yang mewakili ke-lima subtema tersebut kemudian dijadikan sebagai prosiding sehingga ada lima jilid prosiding. Pemakalah dalam konferensi itu berjumlah sekitar 130 orang.

Pemakalah utama dalam konferensi ini adalah: (1) Dr. Shar-mani Patricia Gabriel (Associate Professor Department of English Faculty of Art and Sciences University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia), (2) Xavier Ricard (direktur Institute Francais

Indonesia Yogyakarta, dari Perancis), (3) Prof. Dr. Suminto A. Sayuti (guru besar Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNY), (4) Dr. Haryatmoko (dosen Filsafat UGM), (5) Rudi Corens (designer curator children's museum Kolong Tangga, dari Perancis), dan (6) Radhar Panca Dahana (budayawan dari Jakarta).

H. Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA)

Kegiatan pengajaran BIPA dirintis oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sejak tahun 1990-an. Kemudian, sejak tahun 1999 telah dibentuk tim khusus yang menangani kegiatan BIPA karena minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia semakin berkembang. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia di dalam percaturan dunia internasional semakin penting dan potensial. Potensi bahasa Indonesia itu didukung oleh posisi geografis Indonesia yang terletak dalam lintas laut yang sangat strategis, sumber daya alam yang potensial, dan keragaman budaya Indonesia yang unik. Dengan demikian, bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan bagi bangsa lain untuk meningkatkan pemahamannya terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Kenyataan itu telah menyebabkan banyak orang asing yang tertarik dan berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan, seperti politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, seni-budaya, dan wisata.

Pelaksanaan

Sampai sekarang telah dilaksanakan 7 kali KIPBIPA. Konferensi pertama diselenggarakan di Universitas Katolik Satya Wacana, Salatiga, dari tanggal 20 - 23 Januari 1994. Data urutan penyelenggaraan KIPBIPA adalah sebagai berikut.

- H.1 KIPBIPA I, diselenggarakan di Universitas Satya Wacana, Salatiga, dari tanggal 20 - 23 Januari 1994
- H.2 KIPBIPA II, diselenggarakan di Universitas Andalas, tanggal 29 Mei - 1 Juni 1996.
- H.3 KIPBIPA III, diselenggarakan di Bandung tahun 1999.
- H.4 KIPBIPA IV, diselenggarakan di Bali tanggal 1-3 Oktober 2001
- H.5 KIPBIPA V, diselenggarakan di Universitas Negeri Makasar tahun 2004.
- H.6 KIPBIPA VI, diselenggarakan di Banten tanggal 11-14 Juli 2006
- H.7 KIPBIPA VII, berlangsung 29-31 Juli 2010 di FIB UI, kampus Depok.

Gambaran singkat dari KIPBIPA 2006, 2010 dan 2012 adalah sebagai berikut.

1. Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing, 2006

Dalam KIPBIPA VI di Banten tidak kurang dari 35 negara di dunia yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada masyarakat internasional. Dari jumlah itu, ada sekitar 130 lembaga yang telah menjadi penyelenggara pengajaran BIPA, baik itu perguruan tinggi,

lembaga kursus, pusat-pusat kebudayaan asing, maupun Kantor KBRI di negara-negara tersebut”. Pernyataan itu merupakan ungkapan rasa bangga yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam kata sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan, Ibu Harina Yuhetti, ketika membuka KIPBIPA VI di Hotel Sol Elite Marbella, Anyer, Banten, Selasa malam, 11 Juli 2006.

Tema yang diangkat adalah, ”Reaktualisasi Peran BIPA dalam Meningkatkan Citra Indonesia di Mata Dunia” (*”Re-actualization of BIPA’s Role in Enhancing Indonesia’s Internasional Standing”*). Konferensi kali ini terlaksana atas kerja sama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Peserta tersebut berasal dari berbagai negara, antara lain, Australia, Rusia, Amerika, Singapura, Azarbaijan, dan tentu saja Indonesia. Peserta Indonesia berasal dari berbagai daerah, antara lain, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya.

Dalam konferensi itu akan tampil 4 pemakalah plenari (Prof. Dr. Habib Zerbaliyev, Dr. Dendy Sugono, Dr. Ismet Fanany, dan Dr. Damon A. Anderson), 7 pemakalah komisi (Prof. Dr. Ulrich Kratz, Prof. Dr. David Tom Hill, Prof. Dr. Chaedar Alwasilah, Dr. Widodo HS, M.Pd., Dr. Veronica Novolseltseva, Drs. Nyoman Riasa, M.Hum., Dra. Felicia Utorodewo, M.Si.), dan 13 pemakalah dari peserta.

Dalam sidang pleno Dr. Ismet Fanany (Deakin University, Melbourne, Australia) menyajikan 2 tantangan yang dihadapi BIPA, yaitu tantangan yang dari dalam Indonesia sendiri dan tantangan di luar Indonesia. Untuk tantangan dari dalam Ismet menyoroti tentang sikap masyarakat Indonesia yang lebih memberikan apresiasi yang baik terhadap bahasa asing daripada bahasanya sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam iklan-iklan yang ditayangkan di televisi. Keadaan ini, kemudian, diperburuk lagi oleh dinas pendidikan di kota-kota besar yang berlomba membuat sekolah internasional berkata pengantar bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajarnya. Dan, sekolah itu adalah sekolah negeri, bukan swasta. Sementara itu mengenai tantangan di luar Indonesia, terletak pada masalah dana, pengadaan dan pelatihan staf pengajar BIPA, bahan ajar, dan merosotnya citra Indonesia di mata internasional. Untuk mengatasi masalah tantangan di Indonesia, Ismet berpendapat bahwa membentuk sebuah pasukan “polisi bahasa”, tentu, bukanlah hal yang bijak karena hal itu tidak mungkin berhasil. Cara yang terbaik adalah dengan memberi teladan, misalnya dengan memberi penghargaan pada tokoh nasional berbahasa Indonesia terbaik dan memberikan semacam Pulitzer Prize kepada kalangan pers yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Untuk mengatasi tantangan di luar Indonesia, Ismet mengusulkan Indonesia mendukung penyelenggaraan BIPA di luar negeri dengan membentuk sebuah wadah semacam British Council atau Goethe Institute.

Sementara itu **David T. Hill (Australia National University, Canberra)**, yang juga pengajar BIPA di Australia, lebih tertarik melakukannya melalui pendekatan sastra. Mengajar bahasa Indonesia melalui karya sastra, menurut Hill, terasa lebih hidup dan lebih cepat dimengerti. Inilah yang diangkatnya menjadi judul makalahnya, “Terjemahan Karya Sastra dalam mengajarkan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing”. Dalam proses pengajarannya, mahasiswa program Australian Consortium for “In-Country” Indonesian Studies (ACICIS) yang sudah tingkat IV diminta membaca karya

sastra Indonesia dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Hasilnya, menurut Hill, lebih bagus daripada sekadar belajar bahasanya saja. Melalui sastra, pengertian dan perbendaharaan kata mereka terhadap bahasa Indonesia lebih kaya.

Pemakalah **Prof. Habib M. Zarbaliyev** pengajar BIPA di universitas di Azerbaijan, mengatakan bahwa setelah Uni Sovyet bubar bahasa Indonesia mulai diajarkan di republik-republik bekas jajaran Uni Sovyet dulu, seperti di Azerbaijan dan Uzbekistan. Zarbaliyev yang tampil di sidang pleno cukup menarik perhatian karena kefasihannya berbahasa Indonesia dan kebolehnya melontarkan berbagai pantun Indonesia ketika menyajikan makalahnya (“Pengaruh Cara Pandangan Masyarakat Dunia dalam Konteks Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing”).

Sebagaimana Hill, Zarbaliyev juga merasakan pentingnya pengajaran sastra Indonesia dalam proses pengajaran BIPA. Apalagi, sastra Indonesia, menurut Zarbaliyev, memiliki banyak persamaan dengan sastra Azerbaijan, terutama folklor. Pantunya pun sangat mirip dengan bayati (pantun Azerbaijan). Di Azerbaijan, berbagai cara telah ditempuh untuk mempropa-gandakan Indonesia, antara lain, dengan mengadakan program tv reguler tentang Indonesia (kebudayaan, etnografi, adat-istiadat, dan tradisi Indonesia). Menerjemahkan serangkaian cerita pendek Indonesia ke dalam bahasa Azerbaijan. Sampai membuka program bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Oleh karena itu, Zaberliyev mengharapkan pemerintah Indonesia ikut berperan aktif untuk mendukung propaganda tersebut. Caranya, bisa dengan menga-dakan tukar-menukar mahasiswa dan pengajar BIPA, misalnya, atau dengan memberikan dukungan dana, yang tentu sangat dibutuhkan.

2. Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing VII, 2010

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing yang ke-7 (KIPBIPA VII) bertemakan “Memperkuat Posisi Bahasa Indonesia Di Era Globalisasi Melalui Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan dan Pengajaran BIPA” (*repositioning the Indonesia Language in the Era of Globalization through the improvement of BIPA management and teaching*), yang berlangsung 29-31 Juli 2010 di FIB UI, kampus Depok.

KIPBIPA VII bertujuan antara lain untuk memperkuat peran Bahasa Indonesia dalam era global, memperkuat strategi pengembangan dan pengajaran BIPA dan mengintegrasikan budaya dalam pengajaran BIPA. Konferensi ini menghadirkan beberapa narasumber dari dalam dan luar negeri antara lain adalah **Karen Bailey, Ph.D.** (Departemen Pendidikan Australia Barat), **Philip Mahnken, Ph.D.** (Sunshine Coast University, Queensland) serta **Dr. Untung Yuwono Alwasiah, Ph.D.** (UI), **Prof. A. Chaedar** (Universitas Pendidikan Indonesia), dan para pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing dari berbagai daerah di Indonesia.

KIPBIPA tahun ini diadakan lokakarya yang dapat menyatukan persepsi di kalangan pengajaran BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing). Konferensi ini diharapkan dapat memperkuat peran Bahasa Indonesia dalam era global serta menjadikan Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi bahasa regional namun juga menjad bahasa internasional.

Konrefensi BIPA VII mengambil tema “Memperkuat Posisi Bahasa Indonesia di

Era Globalisasi Melalui Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan dan Pengajaran BIPA” (*Repositioning of Indonesian in the Era of Globalization through the Improvement of BIPA’s Management and Teaching*). Tema tersebut dijabarkan ke dalam topik-topik: (1) Pengajaran Tutorial BIPA; (2) Pengolahan materi ajar untuk pengajaran BIPA (termasuk berbagai teks dan media); (3) Manajemen kelas BIPA; (4) Penelitian berbasis kelas BIPA.

3. Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing VIII 2012

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing yang ke-8 (KIPBIPA VIII), di Salatiga 01- Oktober - 04- Oktober 2012. Untuk pertama kalinya akan dirangkaikan dengan Seminar Australian Society of Indonesian Language Educators (ASILE) 2012 atas kerjsama LTC UKSW, APBIPA dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan ASILE dan didukung oleh Balai Bahasa Perth, dan Balai Bahasa ACT. Tema: Era Baru, Semangat Baru: Peningkatan intensitas kerja sama program BIPA di dalam dan luar negeri

Subtema:

1. Tantangan Pengajaran BIPA di era globalisasi
2. Pengalaman kerjasama penyelenggaraan program BIPA
3. Kebutuhan program BIPA di era globalisasi
4. Peran APBIPA dalam penyelenggaraan program BIPA
5. Kontribusi perkembangan kebahasaan Bahasa Indonesia terhadap pengajaran BIPA
6. Perkembangan pembelajaran BIPA terkini
7. Hasil-hasil kajian pembelajaran BIPA.

(Sumber: The meeting URL is <http://ltc.uksw.edu/kipbipa-asile/>)

Pembicara Pleno:

- Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Prof. A. Chaedar Alwasilah, M.A., Ph.D. Universitas Pendidikan-an Indonesia, Indonesia
- David Hill, Ph.D. Ketua Konsorsium, Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS), Australia
- George Quinn, Ph.D. Australian National University, Australia
- Prof. Dr. Gusti Astika, M.A. Universitas Kristen Satya Wacana – Indonesia
- Juliana Wijaya, Ph.D. Presiden Consortium for the Teaching of Indonesian (COTI), Amerika Serikat
- Karen Bailey Projects Manager, Balai Bahasa Indonesia Perth, Australia
- M. Bundhowi Indonesian Language and Cross Culture Consul-tant/Specialist”
- Nyoman Riasa Ketua Umum Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APBIPA), Indonesia
- Dr. Peter Suwarno Institute Director and Resident Director of the Critical Language Scholarship (CLS) Malang, Amerika Serikat
- Prof. Toru Nomura Universitas KEIO, Jepang

Menurut penilaian A. Chaidar Alwasilah, perjalanan KIP BIPA selama sepuluh tahun sejak deklarasi berdirinya pada 12 Oktober 1999 di UPI, Bandung, organisasi pengajar BIPA terus berkembang meskipun hasilnya belum memuaskan. Dilihat dari sebaran tema makalah yang digelar dalam KIPBIPA 1999 itu dapatlah disimpulkan bahwa aspek evaluasi pengajaran dan kerjasama BIPA kurang menarik perhatian, sedangkan aspek metodologi paling banyak diminati. Dari pengamatan terhadap makalah-makalah KIPBIPA, kajian kritis berdasarkan penelitian terutama dari perspektif pembelajar BIPA masih sangat langka. Makalah ini mencoba melihat pengajaran BIPA dalam perspektif politik bahasa, yakni hubungan timbal balik antara pengajaran BIPA, pengajaran Bahasa Indonesia, dan pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Makalah ini mengajak pembaca melakukan refleksi atas empat kesimpulan pokok dari KIPBIPA III, 1999 sebagai berikut: (1) Mengajarkan BIPA tidaklah sederhana, karena ia tidak hanya mempersyaratkan berbagai pengetahuan dan keterampilan khusus seperti keakraban dengan sistem linguistik bahasa Indonesia—sintaksis, morfologis dan semantik, dan keakraban dengan karakteristik personal pembelajar dan latar belakang sosial budayanya, melainkan juga mempersyaratkan pengetahuan detail tentang aturan sosial penggunaan bahasa Indonesia dan metodologi pengajarannya; (2) Mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing berarti mempelajari dan menghayati perilaku dan nilai budaya bangsa Indonesia; (3) Agar dapat berkembang menjadi bidang kajian yang mandiri, pengajaran BIPA perlu dikembangkan secara profesional melalui berbagai kegiatan penelitian yang dipandu dengan kaidah-kaidah keilmuan yang baku; dan (4) pengajaran BIPA dicirikan oleh berbagai kekhasan, termasuk keunikan dalam metodologi pembelajaran materi ajar, evaluasi hasil belajar, dan dukungan sistem yang diperlukannya. (Sumber: <http://inggris.upi.edu/research/sepuluh-tahun-kipbipa-refleksi-atas-politik-bahasa/>)

I. Konferensi Internasional Sastra Arab.

Diselenggarakan di Universitas Islam negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) di Malang, tanggal 12-14 Oktober 2010. Tujuannya adalah untuk membahas permasalahan semakin suramnya budaya dan sastra Arab dalam dunia pendidikan Islam, khususnya di Indonesia.

Konferensi dari Asosiasi Dosen Ilmu-ilmu Arab ini dihadiri oleh 200 peserta dari 20 negara Islam di dunia seperti Arab Saudi, Sudan, Mesir, Qatar, Malaysia, Brunei Darussalam, dll. Konferensi menunjuk UIN Maliki Malang sebagai pusat pengembangan bahasa Arab dunia dan Pusat Kajian Islam setelah Universitas Al-Azhar di Kairo. Selain itu konferensi juga menghasilkan pembentukan forum presentasi teori ilmu bahasa Arab terkini dan pengumpulan berbagai makalah dari seluruh dosen bahasa Arab dari sejumlah negara Islam. (Surabaya Post, 15/10/2010).

J. Konferensi Internasional Tradisi Lisan

Indonesia memiliki anekaragam budaya, dan salah satu kekayaan itu dikenal sebagai tradisi dalam bentuk cerita rakyat, permainan rakyat, pakaian tradisional, makanan tradisional, pertanian tradisional dll. Sebagai produk budaya, tradisi lisan

dimaknai sebagai kebiasaan yang di dalamnya mengandung berbagai hal yang menyangkut hidup dan kehidupan masyarakat pemilikinya, yang disampaikan secara lisan, ucapan atau melalui tuturan. Di dalam tradisi lisan itu terkandung berbagai macam sistem nilai dan pengetahuan yang dijadikan acuan dalam menata kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah mengenal tulisan, produk budaya yang dihasilkan melalui pelisanan atau penuturan itu kemudian ditulis, sehingga menjadi naskah atau buku. Meskipun berbagai tradisi itu telah ditulis, tetapi pada dasarnya tidak dapat begitu meninggalkan hakikat dan makna sebagai karya budaya (tradisi lisan), dalam arti yang telah ditulis itupun harus dilisankan. Dalam perkembangan selanjutnya, minat generasi muda untuk melestarikan cenderung semakin memudar. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keberadaan tradisi lisan sebagai kekayaan, kebanggaan dan penanda jati diri bangsa.

Kedudukan tradisi lisan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa ditetapkan dalam Konvensi UNESCO tertanggal 17 September 2003. Sebagai bagian dari *intangible cultural heritage*, disebutkan bahwa "*Oral traditions is important to be transmitted value things: oral traditions is going to be the source of identity for humanity in this millenium*" (Kongres IFLA, Agustus 1999). Tradisi lisan terbukti juga, selain merupakan identitas komunitas dan salah satu sumber penting dalam pembentukan karakter bangsa, tradisi lisan adalah pintu masuk untuk memahami permasalahan masyarakat pemilik tradisi yang bersangkutan.

Salah satu lembaga yang mempunyai perhatian besar terhadap kelestarian tradisi lisan di Indonesia adalah Asosiasi Tradisi Lisan. Berdirinya lembaga ini bermula dari sebuah kerja yang diberi nama Proyek Tradisi Lisan Nusantara (PLTN), tahun 1992. Proyek ini merupakan kerja sama pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dengan bantuan The Ford Foundation. Tujuannya adalah publikasi dan penerbitan naskah hasil transkripsi tradisi lisan. Kegiatan ini berkembang dengan mengadakan tiga jalur pendekatan, yaitu: Ilmu pengetahuan, publikasi, dan pementasan.

Konsep pelestarian itu kemudian diwujudkan dengan mengadakan kegiatan yang lebih luas, yaitu "Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan Nusantara I" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta 9–11 Desember 1993. Pada saat itu pula disepakati berdirinya sebuah lembaga tetap pengganti PLTN yang diberi nama Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), tanggal 11 Desember 1993. Organisasi baru itu segera berbenah diri dengan membentuk pengurus, menyiapkan perangkat pendukung serta mengadakan dialog dengan mitra kerja, bernegosiasi dengan instansi penyantun, dan menyusun program organisasi. Dalam tahapan tersebut, pengurus ATL telah berhasil meyakinkan pihak-pihak terkait bahwa walaupun jaman sudah berorientasi pada serba literasi dan teknologi, tetapi tradisi lisan masih punya kekuatan yang perlu diperhatikan.

Berawal dari konsep pikiran, "kalaupun tradisi lisan menghadapi kematian, tetapi matinya secara alamiah, dan jangan karena hasil pembunuhan", lembaga itu bekerja secara bertahap seiring dengan perkembangan penelitian kebudayaan di Nusantara hingga saat ini. Kini, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan ATL atau Oral Traditions Association Indonesia telah berhasil terakreditasi secara internasional oleh UNESCO untuk menjadi mitra dalam memelihara warisan budaya tak benda. Keputusan UNESCO untuk menggadeng ATL menjadi mitra dalam pelestarian dan

penyelamatan warisan budaya tak benda (*safeguarding of the intangible cultural*) diumumkan dalam pertemuan di Nairobi, Kenya. ATL akan berperan dalam membantu UNESCO di Indonesia dan dunia internasional untuk melestarikan kebudayaan yang ada di belahan bumi ini. Menurut Ketua ATL Dr. Pudentia kepercayaan yang diberikan oleh UNESCO itu menjadi tantangan bagi Indonesia dalam hal mengembangkan kegiatan penelitian terutama di bidang tradisi lisan.

Kegiatan tradisi lisan yang dilaksanakan dalam bentuk seminar dan sekaligus konferensi internasional oleh Asosiasi Tradisi Lisan sampai saat ini telah sebanyak 8 kali, sebagai berikut.

1. Seminar Internasional Lisan I, 1993 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.
2. Seminar Internasional Lisan II di Universitas Indonesia-Depok, pada tahun 1996.
3. Seminar Internasional Lisan III, 1999 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.
4. Seminar Internasional Lisan IV 2003 di Semarang, Jawa Tengah.
5. Seminar Internasional Lisan V, 2006 di Galeri Nasional, Jakarta
6. Konferensi Internasional Lisan VI, 2008 di Kepulauan Tukang Besi, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Konferensi Internasional Lisan VII di Pangkalpinang (Bangka Belitung) bekerja sama dengan Pemprov Bangka Belitung.
8. Konferensi Internasional Lisan VIII, 2012 Lisan VIII diselenggarakan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Gambaran dari masing-masing seminar adalah sbb.

J.1 Seminar Internasional Lisan I, 1993

Diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, tahun 1993. Tema yang dipilih pada seminar pertama ini adalah “Tradisi, Inovasi, dan Tantangan Tradisi Lisan”. Pemakalah terdiri atas para pakar berbagai bidang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta seminar terdiri dari peserta undangan dan peserta biasa.

J.2 Seminar Internasional Lisan II, 1996

Diselenggarakan di Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu. Pengetahuan Budaya) Universitas Indonesia-Depok, pada tahun 1996. Temanya adalah “Kajian Tradisi Lisan Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Mendatang”. Pemakalah berasal dari para ahli dalam dan luar negeri, antara lain dari Malaysia, Brunei Darussalam, Amerika Serikat dll.

J.3 Seminar Internasional Lisan III, 1999

Diselenggarakan pada tanggal 14—16 Oktober 1999 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini Raya 73, Jakarta Pusat. Kegiatan LISAN III dikoordinasikan dengan Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI), Institut Dayakologi (ID) Pontianak, Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya Depdikbud, dan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa).

Tema seminar adalah “Suara-Suara Milenium: Dialog Antarbudaya”, dengan topik-topik seminar sebagai berikut.

1. Keberagaman Budaya dalam Tradisi Lisan.
2. Kajian Tradisi Lisan dan Pembentukan Wacana Kebudayaan.
3. Tradisi dan Negara.
4. Tradisi dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Berbagai Pengalaman Penemuan kembali Peranan Tradisi Lisan dalam Membangun Negara Kebangsaan.

Pemakalah dan Peserta, terdiri atas para pakar berbagai bidang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta seminar terdiri dari 30 orang pemakalah, 50 orang peserta undangan, dan sekitar 150 orang peserta biasa.

J.4 Seminar Internasional Lisan IV, 2003

Seminar ATL IV dilaksanakan pada tanggal 2—5 Oktober 2003 di Hotel Patra Jasa, Jalan Sisingamangaraja, Semarang, Jawa Tengah. Festival yang disertasi dengan bazar, peluncuran buku, diselenggarakan di Taman Budaya Semarang.

Tema seminar adalah “Tradisi Lisan dalam Konteks Budaya Masa Kini”. Adapun yang dijadikan topik seminar adalah sebagai berikut.

1. Transformasi sebagai Sarana Penitisan.
2. Preservasi sebagai Upaya Keberlangsungan Tradisi.
3. Kajian Tradisi Lisan dan Pembentukan Wacana Kebudayaan.
4. Tradisi dan Negara.
5. Tradisi dalam Sistem Pendidikan Nasional.
6. Berbagai Pengalaman Penemuan kembali Peranan Tradisi Lisan dalam Membangun Negara Kebangsaan.

Pemakalah terdiri atas para pakar berbagai bidang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta seminar terdiri dari peserta undangan dan peserta biasa.

J.5 Seminar Internasional Lisan V, 2006

Seminar Lisan V diselenggarakan tahun 2006 di Galeri Nasional, Jakarta. Kegiatan Lisan V sebagai bagian dari Lokakarya Tradisi Lisan program Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Tema Lisan V mengusung tema “Dinamika dan Revitalisasi Tradisi Lisan”.

Pemakalah terdiri atas para pakar berbagai bidang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta seminar terdiri dari peserta undangan dan peserta biasa.

J.6 Konferensi Internasional Lisan VI, 2008

Konferensi diselenggarakan di Kepulauan Tukang Besi, Kabupaten Wakatobi

Provinsi Sulawesi Tenggara. Tema konferensi Lisan VI adalah “Tradisi Lisan sebagai Kekuatan Kultural Membangun Peradaban”.

Dari konferensi tersebut dihasilkan rekomendasi sebagai berikut.

Rekomendasi Konferensi/Seminar Lisan VI 2008
Wakatobi, 3 Oktober 2008

1. Diperlukan kebijakan ketahanan budaya dan ekoturisme di seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal.
2. Diaspora budaya diarahkan sebagai perekat atau perajut untuk mewujudkan wawasan nasionalisme dan Keindonesiaan.
3. Perlu pemaknaan kembali seni tradisi lisan terutama untuk menggali kearifan lokal sebagai bahan pembelajaran budaya di dunia pendidikan.
4. Pengembangan tradisi lisan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk pelestarian, penyebaran, dan nilai tambah ekonomi lewat sentuhan kreativitas.
5. Perlu perumusan kembali sejarah dengan memanfaatkan sumber tradisi lisan
6. Penggalian, pengembangan dan pemaknaan kembali tradisi lisan maritim perlu ditingkatkan sebagai salah satu kekuatan bangsa yang menjadi milik nasional dan internasional.
7. Diperlukan manajemen tradisi lisan yang profesional dan berbasis kemasyarakatan.
8. Pelestarian dan pengembangan tradisi lisan melalui tulisan dan multi-media maupun ekonomi kreatif harus diimbangi dengan penguatan komunitasnya.
9. Perlu pemberdayaan tradisi lisan di Wakatobi berdasarkan azas maknawi, manfaat, dan relevansi terhadap nilai kehidupan masyarakat yang terbuka, arif, dan dinamis.
10. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) bagi pemberdayaan, penguatan, dan pengembangan tradisi lisan.

Pemakalah terdiri atas para pakar berbagai bidang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta seminar terdiri dari peserta undangan dan peserta biasa.

J.7 Konferensi Internasional Lisan VII, 2010

Diselenggarakan di Pangkalpinang (Bangka Belitung) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung selama empat (4) hari mulai tanggal 19—22 November 2010. Temanya, “Potensi Keragaman Tradisi Lisan dalam Menciptakan Kehidupan yang Harmonis”

Topik-topik:

- 1) Potensi Tradisi Lisan Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Tradisi Lisan Maritim sebagai Kekuatan Kebudayaan Nusantara;
- 3) Tradisi Lisan sebagai Khazanah Ekonomi Kreatif;
- 4) Kearifan Lokal sebagai Penguatan Karakter Bangsa;

- 5) Pengelolaan dan Pengembangan Tradisi Lisan; dan
- 6) Keragaman Tradisi Lisan dalam menjaga Keseimbangan Alam.

Penyelenggaraan Lisan VII didukung oleh KITLV-Jakarta, Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Yayasan Lontar, Jurnal Wacana UI, dan Harian Kompas. Jumlah makalah yang dibahas ada 45 judul.

J.8 Konferensi Internasional Tradisi Lisan VIII, 2012

Kegiatan diselenggarakan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau selama empat (4) hari, tanggal 23—27 Mei 2012. Kegiatan seminar dilaksanakan sejak pagi hingga petang hari dan dilanjutkan dengan acara festival pada malam harinya.

Selama acara berlangsung berbagai pihak dan mitra ATL akan menyelenggarakan pameran foto, buku, dan kerajinan kakyat. Temanya adalah “*From Memory to Reality* (Dari Ingatan ke Kenyataan)”. Makalah dihimpun melalui permintaan kepada pemakalah dan makalah hasil seleksi.

BAB VI

KONGRES BAHASA MELAYU

Sebagai telah disebut di bagian pendahuluan, antara budaya Melayu dan budaya Indonesia serta antara bahasa Melayu di Malaysia dengan bahasa Melayu di Indonesia memiliki hubungan yang dekat sehingga sering disebut satu rumpun. Pada masa pemerintahan kerajaan antara kedua wilayah itu berada dalam satu pemerintahan. Kedua budaya dan bahasa itu kemudian dipisahkan setelah masing-masing wilayah membentuk politik pemerintahan negara, dalam hal ini antara Malaysia dan Indonesia.

Kedekatan budaya dan bahasa antara kedua negara dibuktikan dengan pemberian kesempatan Konsulat Muda Republik Indonesia di Kuala Lumpur menyampaikan sambutan pada Kongres Bahasa dan Persuratan tahun 1954. Selain itu juga dinilai Indonesia dapat dijadikan model dalam pengembangan bahasa seperti dalam penataan ejaan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengembangan bahasa Melayu di Malaysia dipaparkan kongres yang membahas bahasa sebagai berikut.

A. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I 1952

Kongres bahasa Melayu pertama diberi nama Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu (KBPM), diselenggarakan di Special Hall, Sea View Hotel Singapura dari tanggal 12 dan 13 April 1952. Ini berarti kongres diselenggarakan sebelum negara Singapura dan Malaysia merdeka. Sebagaimana diketahui, wilayah berkembangnya bahasa Melayu tidak hanya di Indonesia tetapi mencakup ke berbagai Negara. Tidak hanya Indonesia tetapi juga Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam bahkan hingga ke Philipina, Vietnam, Kamboja, Thailand hingga ke Madagaskar. Oleh karena itu kongres bahasa Melayu yang dilaksanakan pertama kali di Singapura patut pula dimasukkan sebagai bagian dari rangkaian sejarah perjalanan kongres kebudayaan di Indonesia.

Kongres pertama dipelopori oleh Angkatan Sasterawan '50, diikuti oleh 58 orang peserta, utusan dari berbagai lembaga yang terdiri atas sastrawan, abdi bahasa, penulis, pelaku seni, pemuda pergerakan, guru dan pelajar dari berbagai daerah di Malaysia dan Singapura. Saat itu kedua negara ini berada pada naungan Persekutuan Malaysia. Kongres dibuka oleh Puan Hajjah Zain dan pidato sambutan dari Tuan Z'aba. Pada sidang hari pertama hanya berlangsung dua kali sidang dan dari salah satu sidang

menghasilkan Piagam Kongres (PIAGAM CONGRESS). Pada sidang hari kedua dibahas mengenai masalah kedudukan Tulisan Rumi dan Jawi. Beberapa keputusan dihasilkan melalui voting

Piagam Kongres (PIAGAM CONGRESS)¹⁸

Anggaran Dasar Kongres Persuratan Melayu Se-Malaya

1. Tujuan Congress

- Menyamakansabarang usaha semua Badan2 Persuratan Melayu di Persekutuan Tanah Melayu dan Borneo Utara.
- Mengambil keputusan mu'tamad yang sama atas sa-barang hal mengenai kemajuan bahasa dan persuratan Melayu. Juga akan membela hak2 pengarang2, sastrawan2 dan ahli2 bahasa Melayu.

2. Chara2 Congress

- Congress boleh diadakan bila2 masa perlu oleh sa-buah perubahan atau beberapa pertubohan persuratan menjadi satu.
- Pertubohan persatuan yang mengusulkan congress itu dengan sendirinya menjadi Panitia Congress dari Congress itu.

2. Persetiaan

- Sa-luruh pertubohan2 persuratan yang termasuk menjadi kerabat congress hendaklah menta'ati keputusan mu'tamad yang diambil oleh congress.
- Pertubohan2 kerabat congress hendaklah berusaha melaksanakan keputusan2 yang di-ambil oleh congress bagi memajukan bahasa dan persuratan Melayu.
- Sa-baran keputusan congress hendaklah dianggap sah oleh kerabat congress.
- Segala keputusan congress akan di-ambil mengikut undi terbanyak.
- Tiap2 pertubohan hanya mempunyai SATU UNDI SAHAJA.

Ketentuan piagam itu diterima oleh persidangan dengan chadangan.

ANGKATAN SASTERAWAN '50, di-sokong oleh LEMBAGA BAHASA MELAYU.

Di-sahkan oleh: A. Rahman Bin Haji Md. Said (Pengerusi Persidangan, 12 April 1952)

B. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu II 1954

KBPM diselenggarakan di Dewan Sekolah King George V, Seremban pada tanggal 1-2 Januari 1954. Kongres dihadiri oleh perwakilan 24 badan bahasa dan persuratan Melayu dari seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Kongres dibuka oleh Yang Amat Berhormat Datok Menteri Besar Negeri Sembilan, Che Shamsudin bin Naim, diikuti oleh Penasihat British untuk Negeri Sembilan Mr. MC. F. Sheppard, yang kemudian disambung dengan sambutan Yang Mulia Tuan Rashid Manan, Konsulat Muda Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

18 Bahasa dan cara penulisan dikutip sama dengan sumbernya.

Sidang hari pertama dipimpin oleh Tuan Abu Kasim bin Yusof terjadi perdebatan yang sengit mengenai penggunaan aksara Latin (Rumi) ataukah menggunakan aksara Jawi. Dalam kongres ini tidak disajikan makalah tetapi tidak mengurangi arti dari kongres. Dalam diskusi peserta meminta pemerintah mengga-lakkan penggunaan bahasa Melayu. Selain itu juga menyerahkan penyusunan kamus kepada Lembaga Bahasa Melayu (LBM) dan memersoalkan penggunaan bahasa Melayu di film2 dan radio. Diusulkan pula penyamaan ejaan antara negara negara2 berpenutur bahasa Melayu.

Hal penting yang dapat dipetik dari kongres ini adalah tempat terhormat bagi Indonesia. Selain diberi kesempatan menyampaikan sambutan oleh Konsulat Muda Republik Indonesia di Kuala Lumpur tetapi juga dinilai Indonesia dapat dijadikan model dalam pengembangan bahasa seperti dalam ejaan dan pendirian Balai Pustaka serta adanya usaha bersama untuk menyeragamkan ejaan di mana Indonesia mendapat tempat yang layak sebagai salah satu negara yang berhak diajak duduk berunding.

Antara keputusan yang berkaitan dengan pelbagai bidang yang telah dipersetujui bersama adalah seperti yang berikut.

- Menganjurkan rapat besar bagi ahli persuratan Melayu dengan Indonesia mendesak penggunaan bahasa Melayu yang seimbang dalam Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Tanah Melayu, Majlis Mesyuarat Negeri, Majlis
- Keputusan yang dihasilkan oleh kongres ini antara lain memutuskan menerima hasil Penyata Jawatankuasa Penyiasat Tulisan Jawi Rumi yang ditugaskan oleh Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu I, menganjurkan sidang bersama antara para pakar sastra Malaysia dan Indonesia untuk menyeragamkan ejaan, memutuskan penyusunan sebuah kamus lengkap dan menyadari pentingnya seorang penyiar radio seorang sarjana bahasa.

(Sumber: <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1905/> kongres-bahasa-dan-persuratan- melayu-ke-i.)

Yang menarik, berdasarkan sumber lain (wikipedia), bunyi keputusan yang berkaitan dengan pelbagai bidang yang dipersetujui dalam kongres adalah sbb:

- Menganjurkan rapat besar bagi ahli persuratan Melayu dengan Indonesia; mendesak penggunaan bahasa Melayu yang seimbang dalam Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Tanah Melayu, Majlis Mesyuarat Negeri, Majlis Mesyuarat Bandaran dan pengutamaan bahasa Melayu oleh ketua-ketua pejabat; menganjurkan hadiah bagi karangan-karangan dan penulisan bahasa Melayu yang terbaik dalam bahagian-bahagiannya setiap tahun, menyusun sebuah kamus yang lengkap dalam tulisan Rumi; pengambilan juruhebah radio mestilah berkelulusan tinggi dalam bahasa Melayu; dan melantik wakil daripada Kongres Persuratan Melayu dalam Jawatan Kuasa Penapis Filem.
- Dua keputusan penting telah dicapai dalam kongres KBPM kedua, iaitu setelah mengkaji penyata tulisan Jawi-Rumi yang dibentangkan oleh Jawatan Kuasa Penyiar Tulisan Jawi-Rumi, kongres telah mengambil keputusan bahawa telah sepatutnya tulisan Rumi dirasmikan bagi persuratan Melayu dengan tidak menghapuskan tulisan Jawi sehingga masa akan menentukannya; dan menurut Kerajaan Persekutuan

Tanah Melayu supaya membesarkan lagi Jabatan Penterjemahan menjadi sebuah Balai Bahasa yang lengkap.

C. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III 1956

Diselenggarakan tanggal 16-21 September tahun 1956 di Johor Bahru dan Singapura dan dihadiri oleh lebih kurang 500 orang perwakil dari pemerhati dan 59 buah badan bahasa dan persuratan Melayu dari seluruh negara. Pada kongres ini hadir pula wakil resmi dari pemerintah RI yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prof. Dr. Prijono. Rumusan yang dipersetujui adalah sebagai berikut:

- Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hendaklah ditubuhkan sebagai pusat bagi menjaga hal-ehwal dan perkembangan bahasa dan persuratan Melayu supaya tidak cacat asal usul bahasa Melayu serta menjadi pendorong kepada perkembangan kebudayaan rakyat Tanah Melayu kelak;
- DBP hendaklah menyiasat, membongkar dan mengumpulkan semula serta menghalus hasil kesusasteraan Melayu semenjak zaman purba selain tujuan penubuhan DBP, butir tentang taraf, pentadbiran, pengelola jabatan dan bahagiannya serta tugas yang seharusnya dijalankan oleh DBP turut diputuskan.

D. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu IV 1984

Kongres diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Desember tahun 1984 di Dewan Bahasa dan Persuratan (DBP), Kuala Lumpur, Malaysia. Tujuan kongres adalah untuk menilai prestasi pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan secara menyeluruh. Kongres ini ditaja secara bersama oleh 14 buah badan dan agensi yang terlibat dalam perjuangan bahasa seperti Angkatan Belia Islam Malaysia, DBP, Gabungan Penulis Nasional (GAPENA) Malaysia, Persatuan Linguistik Malaysia, Perstuan Penterjemah Malaysia, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung dan sebagainya.

Kongres berlangsung selama empat hari dihadiri oleh pelbagai pertubuhan dan orang perseorangan yang terdiri atas para ahli dalam pelbagai bidang keilmuan, Perwakilan dari negara serantau seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand serta beberapa orang perseorangan dari negara asing. Dalam kongres ini dibahas 13 makalah dan dikategorikan di bawah kumpulan: (1) Hasrat dan cita-cita; (2) Dasar dan pelaksanaan; (3) Agensi; (4) Hakikat yang Wujud di Pelbagai Bidang/Sektor; (5) Masa Depan.

Setelah melalui perbincangan kongres menghasilkan beberapa usul penting sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan imej bahasa Melayu sebagai bahasa bagi semua bidang, penulis ilmiah hendaklah mengutamakan dan memperbanyak penulisan dalam bahasa Melayu.
- Kegiatan menghasilkan buku tentang tatabahasa dan bahasa baku hendaklah ditingkatkan supaya masyarakat tidak menghadapi kekeliruan bahasa. Kekurangan kamus istilah, misalnya, hendaklah diisi dengan segera.
- Usaha penterjemahan karya ilmu ke dalam bahasa Melayu hendaklah digiatkan

supaya tradisi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dapat diperkukuh.

- Pindaan dan peruntukan tambahan hendaklah dibuat dalam mana-mana undang-undang, akta dan peraturan bagi melicinkan pelaksanaan bahasa melayu sebagai bahasa resmi.
- DBP hendaklah bertanggung juga mendorong kegiatan intelektual dan pembaharuan kebudayaan dalam bahasa Melayu di samping bertanggung jawab bagi perkembangan dan pembinaan dan sastera Melayu.
- Usaha penyebaran karya sastera antara negara berbahasa Melayu mestilah dengan semangat yang ikhlas dengan memecahkan halangan yang bersifat ekonomi, politik dan sebagainya.
- Sistem dan strategi pengedaran bahan bercetak hendaklah disusun supaya bahan bacaan berbahasa Melayu dapat disebarluaskan seluas-luasnya.
- Supaya bahasa Melayu dapat memenuhi fungsi intelektual, kesenian, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, disarankan pertemuan yang lebih kerap dan kerjasama yang lebih serta antara cendekiawan, ahli bahasa, sasterawan, seniman, budayawan negara-negara berbahasa Melayu.



(Sumber: Wikipedia)

E. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu V 1998

Setelah penyajian makalah dan tanya jawab, kongres melahirkan sumpah untuk memperjuangkan dan menjaga bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Negara dan bangsa Malaysia. Seperti yang diikrarkan pada acara Sumpah Pemuda tahun 1928, ketika sidang kongres V itu berlangsung, dilahirkan suatu Sumpah Setia Bahasa telah

ditandatangani oleh kerabat kongres, yakni 20 Pertubuhan Bangsa dan 24 Pertubuhan Negeri, antara lain Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA)

Persatuan Linguistik Malaysia (PLM), Angkatan Penulis Kreatif Selangor (AKTIF), Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (ASASI), Badan Bahasa Sabah (BAHASA) dll. Bunyi lengkap Sumpah Setia Bahasa itu adalah sebagai berikut:

“Kami, kerabat Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu V 1998, bersumpah akan terus setia memperjuangkan bahasa Melayu sebagai:

- 1. Bahasa yang mencipta kedaulatan bangsa, kesatuan politik, budaya, ekonomi dan pendidikan yang menjamin kelangsungan bangsa Malaysia.*
- 2. Bahasa yang menjaga dan memupuk kebebasan intelektual serta memerdekakan pemikiran bangsa; dan*
- 3. Bahasa membawa, memelihara, mencipta, menyalurkan serta mengembangkan ilmu dan kebudayaan di negara dan di dunia.*

Sesungguhnya, kami bertekad tidak akan berganjak daripada perjuangan ini. Sumpah Setia Bahasa ini telah ditandatangani Sempena Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu V 1998 di Balai Budaya Tun Syed Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka pada hari Sabtu, 2 Mei 1998 oleh Kerabat Kongres sebagai berikut:”

F. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VI 2002

Kongres diselenggarakan tanggal 5 September tahun 2002, di Universiti Perguruan Sutan Idris (UPSI), Kuala Lumpur. Dalam kongres ini peserta sepakat meminta kerajaan supaya tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di sekolah-sekolah. Kongres juga mengusulkan agar pelbagai isu mengenai bahasa Melayu menjadi perhatian serius demi mengembalikan semula martabat bahasa Melayu di Malaysia.

Selain itu, kongres juga meminta kerajaan melalui perbagai jabatan dan agensinya supaya mendidik sikap masyarakat senantiasa (sentiasa?) menghormati setinggi-tingginya bahasa Melayu sebagai bahasa yang dapat mengungkapkan kecanggihan pemikiran, penanggapan dan pengembangan serta pengayaan ilmu, sains dan kesusasteraan karya agung bagi bangsa Malaysia (Sumber: Klik DBP, tanggal 22 November 2002).

G. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VII 2006

Kongres berikutnya yakni KBPM VII berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 November 2006 di Balai Budaya Tun Syed Nasir (dahulunya Balai Budaya,) di DBP Kuala Lumpur. Mengikuti rancangan KBPM kali ke-7 ini dijangkakan berlangsung dua bulan lebih awal iaitu pada 15-17 September 2006 di Johor Baru. Namun beberapa faktor, ianya tidak dapat dijalankan disebabkan:

Pertama, mengikuti laporan dari majalah Siasah dalam edisi 17-30 November 2006, Datuk Dr. Abd. Latif Bakar yang merupakan pengarah KBPM kali ke-7, melahirkan rasa kesalnya dengan karenah dan birokrasi sesetengah kementerian yang berdoloh dalih dalam menjayakan kongres tersebut. “Kongres ini semacam tidak mendapat

dorongan daripada kepimpinan UMNO, parti kebangsaan yang mengaku menjadi pejuang bangsa Melayu. Bukan itu sahaja, agensi kerajaan juga seperti malu-malu atau takut untuk melibatkan diri di dalam kongres berkenaan. Keadaan ini berlaku kerana agensi kerajaan berkenaan yang ditunjangi orang politik bimbang penyertaan mereka akan menjejaskan masa depan politik mereka.

Kedua, menurut salah satu sumber dari DBP yang boleh dipercayai menyifatkan dua tokoh politik sentral yang dikaitkan dengan penyelenggaraan kongres ini ialah Menteri Pendidikan, Dato' Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri besar Johor, Dato' Abd. Ghani Othman. Hal ini dapat difahamkan apabila Ketua Pengarah DBP, Datuk Dr. Firdaus Hj Abdullah sebelum ini telah diminta oleh Menteri Besar Johor, khabarnya melalui Gapena untuk mengeluarkan satu pernyataan atau komitmen bahawa Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ke-7 akan diadakan di Pusat Konvensyen Persada Negeri Johor, bersebelahan Bangunan Kerajaan Bukit Timbalan yang menjadi lokasi pertama pejabat DBP. Menurut ceritanya, pusat konvensyen yang hampir siap itu akan dibuka secara rasmi dengan berlangsungnya kongres berkenaan dan dianggap satu-satunya penghormatan tertinggi kepada DBP, khususnya dalam mendaulatkan bahasa Melayu.

Menurut sumber itu, Johor bersedia memberikan komitmen penuh, terutama yang menyangkut pembiayaan dan kemudahan peserta sepanjang tiga hari kongres. Bagaimanapun, akhirnya komitmen Johor tidak kesampaian kerana DBP telah terpaksa "tunduk" kepada keputusan kementerian yang bertanggungjawab terhadap DBP untuk mengadakan kongres di Kuala Lumpur sahaja. Ada cakap-cakap yang menuduh seorang dua individu di kementerian yang kurang senang dengan komitmen Johor dan kongres patut dan perlu diadakan di Kuala Lumpur, tempat perayaan sentral kegiatan Jubli Emas DBP. Dengan demikian segala usaha promosi DBP dan Gapena dan penglibatan Johor menjadi sia-sia, malah "membazir".

Ketiga, karenah birokrasi yang begitu menebal di DBP tidak terkecuali menjejaskan persiapan kongres. Sebagai sebuah agensi separuh kerajaan dan mempunyai kuasa autonomi, DBP amat jarang atau hampir tidak langsung memanfaatkan fungsinya sebagai institusi yang mempunyai kuasa autonomi. Ini kerana, apa sahaja keputusan yang mahu dilaksanakan di DBP hendaklah merujuk kepada peruntukan dan peraturan yang termaktub dalam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Ketika kongress berlangsung, Prof. Dr Awang Sariyan telah membentangkan kertas kerjanya bertajuk "Bahasa Melayu Setengah Abad Lalu dan Setengah Abad Mendatang: Upaya Pemerkaannya". KBPM kali ke-7 tidak lagi dirasmikan oleh seorang menteri kanan tetapi cukup sekadar dirasmikan seorang ahli Parlimen dari Gua Musang, iaitu Tangku Razaleigh Hamzah. Itu pun sebagai kapasiti Tengku Razaleigh sebagai Pengerusi Sekretariat Kongres Kepentingan Bangsa dan ditutup oleh Ketua I Gapena, Ismail Hussein.

Berikut adalah ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh KBPM ke-7:

- Kongres ini akan diadakan secara berkala, iaitu sekurang-kurangnya dua tahun sekali untuk memberi kesempatan kepada pelbagai pihak dan golongan memperkukuh dan memperbaharui azam dalam pembinaan bahasa, persuratan dan kebudayaan kebangsaan.
- Meminta kerajaan melalui pelbagai jabatan dan agensinya supaya mendidik sikap masyarakat sentiasa menghormati setinggi-tingginya bahasa Melayu sebagai

bahasa yang dapat mengungkapkan kecanggihan pemikiran, penanggapan dan pengembangan serta pengayaan ilmu, sains dan kesusasteraan karya agung bagi bangsa Malaysia. (sumber: Wikipedia)

H. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VIII 2011

Sempana Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) tahun 2011 diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur bermula 28 hingga 30 Oktober ini. Ketua Dua Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA), Prof. Datuk Dr. Abdul Latiff Abu Bakar, menyatakan bahawa kongres itu akan merumuskan resolusi yang menggariskan tindakan bersepadu bagi memartabatkan bahasa melayu, sekaligus menjawab keraguan terhadap fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

Kertas kerja Memperkasakan dan Memartabatkan Mahasa Melayu dalam sistem Pendidikan dibentangkan KSU Kementerian Pelajaran Malaysia, Datuk Rosli Mohamed, manakala Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Abu Bakar Abdullah pula membentangkan Bahasa Melayu dalam Perkhidmatan Awam. Kongres bertujuan menyemarakkan kesedaran rakyat mengenai perlunya ditingkatkan penggunaan bahasa Melayu dan mencadangkan pelbagai pendekatan serta tindakan yang wajar dilaksanakan untuk tujuan itu. (Berita Harian Online: <http://www.bharian.com.my/>)

Resolusi Kongres Bahasa dan persuratan Melayu VIII tanggal 28-30 Oktober 2011

Bahawa, KBPM VIII, anjuran GAPENA dan Majlis Muafakat Melayu Malaysia serta Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, yang bersidang pada 28-30 Oktober 2011, di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur dengan dihadiri oleh seramai 500 peserta mewakili lebih 200 Pertubuhan Bahasa dan Persuratan, mengungkapkan ketetapan-ketetapan berikut:

1. Landasan:

- I. Mengikuti bahawa kongres ini telah berlangsung sebanyak lapan kali dengan membuat pelbagai ketetapan;
- II. Memahami bahawa pada ketika ini bahasa dan persuratan Melayu berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam pemerkasaannya dalam berbagai bidang urusan pentadbiran negara;
- III. Meyakini bahawa bahasa dan persuratan Melayu adalah landasan benar bagi pembinaan peradaban Malaysia modern, maka inilah ditetapkan oleh kongres yang bersidang ini seperti dipeturunkan di bawah ini:

2. Ketetapan-ketetapan:

Bahawa kongres membuat desakan berikut:

I. Sistem Pendidikan:

Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah bertegas, dengan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan pelbagai Akta yang berkaitan, untuk menegakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara dalam semua urusan rasmi dan secara rasmi melarang segala gagasan dan desakan untuk amalan selain daripada peruntukan undang-undang itu. Semua cadangan bertentangan seperti PPSMI (Pembelajaran dan Pemebelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris) adalah merupakan tindakan melanggar undang-undang dan wajar dilarang serta dikenakan hukuman. Maka Kongres menyokong penuh pemansuhan PPSMI itu sebagai dasar pengajaran dan pembelajaran.

II. Kerajaan Tempatan:

- i. Kerajaan-kerajaan Negeri mestilah menyeragamkan semua peruntukan undang-undang berkaitan Pihak Berkuasa Tempatan yang mengenai dasar Bahasa Kebangsaan supaya selaras dengan peruntukan Pelembagaan Persekutuan untuk dapat mengawal semua penamaan jalan raya dan bangunan serta periklanan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai Bahasa kebangsaan terutama bagi pemaparan di khalayak awam termasuk oleh pihak swasta.
- ii. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melaksanakan penyelarasan dengan pelbagai agensi PBT dalam urusan meluluskan permit dan lesen selaras dengan kedudukan Bahasa Kebangsaan.

III. Ekonomi dan Kewenangan:

- i. Kerajaan Malaysia hendaklah, melalui Kementerian Kewangan dan Bank Negara melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dalam semua urusan ekonomi dan perniagaan serta menjadikan Bahasa kebangsaan sebagai penggerak utama sistem ekonomi negara;
- ii. Melalui Kementerian Pelajaran dan Dewan Bahasa dan Pustaka memperkarsakan semula secara berterusan Jawatan Kuasa Istilah supaya dapat membina peristilahan ilmu sejajar dengan perkembangan ekonomi dan kewangan semasa dan supaya dalam rangka 5 tahun seluruh sistem ilmu terutama ekonomi dan kewangan dapat dilaksanakan dalam bahasa kebangsaan.

IV. Pengajian Tinggi:

Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi hendaklah melaksanakan sepenuhnya sistem pendidikan kebangsaan dengan menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua tahap pendidikan; dan berusaha sepenuhnya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam semua bidang keilmuan. Dalam hubungan ini, kongres menegaskan sokongan kuat terhadap pengumuman Menteri Pengajian Tinggi pada 27 Oktober 2011 tentang pembinaan ilmu, penerbitan buku dan kenaikan pangkat tenaga

akademik di Malaysia berlandaskan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

V. Perkhidmatan Awam:

Kerajaan Malaysia melalui jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia hendaklah senantiasanya meperkasakan penggunaan sepenuhnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam semua urusan Perkhidmatan Awam sebagai pelindung kepada Bahasa Kebangsaan itu serta tidak melanggar semua peruntukan undang-undang berkaitan dengannya. Dalam hubungan ini kongres menyokong sekuatnya keputusan JPA untuk melaksanakan Pekeliling penggunaan bahasa Melayu dalam tadbiran Negara dan menegaskan supaya sentiasa memantau atau mengaudit pelaksanaan itu.

VI. Media, Komunikasi dan Penyiaran:

Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perdana Menteri hendaklah sentiasa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam penyiaran berita dan pengucapan para pemimpin negara sebagai kaedah penyampaian maklumat kepada seluruh masyarakat awam Malaysia; dan juga mewujudkan satu garis panduan untuk digunakan oleh semua badan penyiaran dan penerbitan.

VII. Perlembagaan

Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perdana Menteri hendaklah sentiasa memastikan penghakiman dan penulisan penghakiman di semua tahap mahkamah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan demi menegakkan keadilan berasaskan undang-undang;

VIII. Pemasarakatan Persuratan Melayu:

Kerajaan Malaysia melalui pelbagai Kementerian dan Jabatan hendaklah sentiasa berusaha memperbanyak penerbitan dalam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam semua bidang ilmu untuk mencapai matlamat-matlamat berikut:

- i. Memandaikan dan memperluas ilmu ke dalam seluruh lapisan masyarakat sebagai asa ketamadunan Malaysia;
- ii. Menggunakan teknologi penerbitan yang ekonomis untuk mengurangkan berlebihan inventori dan supaya bahasa Melayu berkembang rapat dengan anggota rumpunnya serta tersebar luas ke seluruh dunia;
- iii. Mendesak semua penerbit IPT menerbitkan semua penulisan para pensyarah dalam bahasa Melayu sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran sebagai penegasan nilai ekonomi bahasa Melayu;
- iv. Memastikan warganegara Malaysia mendapati segala jenis ilmu untuk melangsungkan kehidupan mereka melalui bahasa Melayu sebagai Bahasa kebangsaan;
- v. Mengembangkan lagi daya cipta dan kreativiti yang sedia ada pada para penulis dan ilmuwan melalui bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dengan mengangkat darjat mereka.

3. Ikrar Kongres:

Pertama, bahawa kami yang bersidang dalam KBPM VIII ini akan memantau pemertabatan dan pemeraksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam negara melalui sebuah Majlis Pemantauan dan Tindakan Bahasa Kebangsaan demi kemajuan, perpaduan dan keutuhan bangsa dan negara Malaysia di sepanjang zaman.

Kedua, kami mendesak semua Kementerian, Agensi Kerajaan dan Badan swasta supaya menubuhkan jabatan pemantau itu untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita.

Ketiga, kami menyeru semua pihak daripada para pemimpin negara, masyarakat awam dan pihak swasta wajib sentiasa yakin serta menjadi peneraju utama dalam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita.

Keempat, kami menyeru Kerajaan supaya kembali kepada perlembagaan Malaysia dengan menyebut bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan bukan "Bahasa Malaysia".

Maka inilah ketetapan dan ikrar kami. Wallahu Alam.

Termaktub di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, pada 30 Oktober 2011. Atas nama semua pertubuhan dan peserta yang hadir.

(Datuk Wira Profesor Dr. Abdul Latif bin Abu Bakar) Pengerusi Kongres.

Jawatan kuasa Resolusi Kongres.

1. Prof. Datuk Dr. Zainal Kling
2. Prof. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan
3. Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan
4. Tuan Rusli Abdul Ghani. (Sumber: wikipedia)

Demikian gambaran secara keseluruhan mengenai penyelenggaraan kongres dan konferensi bidang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang pernah berlangsung. Dari paparan itu jelas menunjukkan rekam jejak 95 tahun berlangsungnya kongres bahasa dan sastra sebagai unsur kebudayaan. Kongres dan konferensi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah telah menyumbangkan banyak pemikiran tentang konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan, khususnya bidang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.



Prof. Dr. Sri Edi Swasono sebagai sedang menyajikan makalah pada Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 8 Mei 2012

BAGIAN 5

CATATAN REKAM JEJAK

BAB I

HUBUNGAN ANTARKONGRES

Dalam bab ini diuraikan mengenai dua hal. Pertama, mencari hubungan “benang merah” antarkongres kebudayaan yang pernah berlangsung, terutama hubungan antara KK sebelum dan sesudah merdeka. Bagian penting yang perlu disimak tentu yang berkenaan dengan berbagai pemikiran, konsep, kebijakan dan strategi kaum terpelajar bumiputra dalam membangun dan memajukan kebudayaan bangsa apabila cita-cita menjadi bangsa merdeka tercapai. Berbagai pemikiran dan pendapat yang diungkap ketika berada di bawah tekanan budaya penjajah tentu menarik bila dihubungkan dengan pemikiran dan pendapat yang diungkap setelah Indonesia merdeka. Kedua, mengenai hubungan antara KK dengan kongres-kongres lainnya yang merupakan unsur kebudayaan atau bidang yang memiliki kaitan erat dengan kebudayaan, seperti kongres pendidikan, dan kongres Pancasila. Kongres Diaspora Indonesia, Kongres Masyarakat Adat Nusantara dll. yang di dalamnya juga membahas masalah kebudayaan.

Dalam rentang waktu penyelenggaraan KK selama 95 tahun (1918-2013) ternyata telah diselenggarakan berbagai kongres dan konferensi kebudayaan daerah, kongres dan konferensi unsur kebudayaan seperti bahasa, sastra, kesenian, keurbakalaan, antropologi, epigrafi, perpustakaan, perbukuan, ilmu pengetahuan, kebatinan, dll. Bahkan setelah reformasi telah berlangsung kongres bahasa lokal, seperti bahasa Cirebon, Makassar, Kaili, Lampung, Aceh, Tegal, Bali, Madura dll. Bila dihitung dari perjalanan pelaksanaan kongres yang membahas bidang kebudayaan mulai dari 1918 hingga 2013, selama 95 tahun itu tercatat sebanyak 221 kali kongres dan konferensi, seperti terlihat pada tabel 7.

Dalam perjalanan selama 95 tahun itu menunjukkan, mengenai tema dan topik yang dibahas masing-masing kongres atau konferensi sangat bervariasi, tetapi ada hubungan antara kongres yang satu dengan yang lain. Beberapa hal yang dapat dicatat dari keseluruhan kegiatan itu adalah sebagai berikut.

A. Hubungan tema dan pokok bahasan

Mengawali tinjauan mengenai adanya *benang merah* yang menghubungkan KK sebelum dengan sesudah Indonesia merdeka adalah mengenai bentuk pertemuan

yang dipilih oleh kaum terpelajar sebagai ajang untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai masalah kebudayaan. Forum “kongres” dinilai sebagai forum yang paling tepat dan oleh sebab itu Pangeran Prangwadono mengusulkan agar diselenggarakan Kongres Kebudayaan, bukan Kongres Bahasa Jawa sebagaimana yang diminta oleh pemerintah Batavia. Keputusan itu ternyata menjadi kenyataan dengan diselenggarakannya KK pertama tahun 1918. Kongres ini menjadi motor penggerak diselenggarakannya kongres-kongres berikutnya. Sejak kongres pertama hingga Indonesia merdeka telah berlangsung 7 kali kongres.

Sesudah Indonesia merdeka, para budayawan menganggap pilihan forum itu dinilai masih tepat untuk dilanjutkan. Forum “Musyawarat Kebudayaan” yang berlangsung di Sukabumi tanggal 31 Desember 1945, oleh para budayawan dianggap belum memiliki kekuatan yang mengikat semua pihak, dan oleh sebab itu mereka berinisiatif untuk menyelenggaraan KK seperti yang dilakukan oleh kaum terpelajar sebelum Indonesia merdeka. Mereka khawatir sejumlah keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh musyawarah itu akan tidak berpengaruh apa-apa. Atas dasar itu Pusat Kebudayaan Kedu, mengambil inisiatif mengadakan rapat-rapat persiapan penyelenggaraan sebuah kongres. KK pertama setelah Indonesia merdeka di Magelang tahun 1948 berjalan sukses meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi Panitia. Hingga KK terakhir tahun 2008 di Bogor, telah berlangsung sebanyak 8 kali kongres.

Jika 7 kali KK sebelum Indonesia merdeka itu juga diakui sebagai bagian dari sejarah kebudayaan dan bagian dari sejarah KK di Indonesia, berarti selama 95 tahun bangsa Indonesia telah melangsungkan KK sebanyak 15 kali. Pengakuan terhadap penyelenggaraan KK sebelum Indonesia merdeka sebagai bagian sejarah bangsa sangat penting dan beralasan. Selain telah melahirkan sejumlah konsep, kebijakan dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa, juga merupakan titik awal tumbuhnya kesadaran berbangsa dan berbudaya bangsa seperti yang terjadi pada Kongres Pemuda (28 Oktober 1928), Kongres Perempuan (22 Desember 1928) dan Kongres Bahasa yang berlangsung tahun 1938, 7 tahun sebelum Indonesia merdeka, ketiganya diakui dan dicatat dalam sejarah Indonesia. Peristiwa budaya berupa penyelenggaraan KK pertama 1918 dan dilanjutkan dengan kongres-kongres berikutnya yang terjadi sebelum Indonesia merdeka, belum banyak dikenal orang dan belum masuk dalam catatan sejarah.

Sebagaimana diuraikan di bagian depan, lahirnya kesadaran berbangsa dan lahirnya kesadaran tentang masa depan kebudayaan bangsa, mempunyai hubungan yang erat. Lahirnya kesadaran berbangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi BO tahun 1908, tujuan pada awalnya adalah untuk mengembangkan kebudayaan (Jawa). Dalam perjalanan BO selanjutnya tujuan itu berkembang menjadi sebuah gerakan untuk menggalang rasa kebangsaan dengan berlandaskan pada pola budaya tradisional. Tumbuhnya kesadaran berbangsa dan kesadaran tentang masa depan kebudayaan bangsa, dua-duanya diprakarsai oleh kaum terpelajar dan bangsawan bumiputra. Berbagai kegiatan kebudayaan maupun yang terkait erat dengan kebudayaan yang banyak mereka selenggarakan, mencerminkan kuatnya rasa bangga terhadap keanekaragaman dan keunikan kebudayaannya.

Mereka sangat menyadari bahwa budaya masing-masing suku bangsa selain ada kesamaan unsur ada pula perbedaannya. Mengenai adanya kesamaan mereka

tidak berkehendak untuk menyama-nyamakan. Adanya persamaan telah menggugah bersemainya rasa persaudaraan dan solidaritas untuk bersatu. Sebaliknya mereka juga menyadari adanya unsur perbedaan. Adanya perbedaan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Adanya perbedaan (baca keanekaragaman) justru merupakan tantangan untuk menjaganya, karena perbedaan merupakan kekayaan (baca mozaik) yang membanggakan yang pada gilirannya akan menggugah tumbuhnya semangat nasionalisme. Meskipun kebudayaan mereka berbeda-beda tetapi mereka tidak berkehendak untuk membeda-bedakan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari masa pergerakan hingga sekarang peran kebudayaan berbeda-beda. Seperti dikatakan oleh Dr. Soerjanto Poespowardojo, dapat dibedakan menjadi 3 zaman, yaitu peran pada zaman-zaman: “(1) *prarevolusi*; (2) *revolusi*; dan (3) *zaman pembangunan*.” Pada zaman *prarevolusi*, kebudayaan Indonesia mempunyai peran yang cukup besar dalam membentuk kesadaran nasional. Demikian pula halnya dengan zaman *revolusi*, kebudayaan Indonesia telah mampu membangkitkan semangat juang yang luar biasa, sehingga bangsa Indonesia dapat mempertahankan ikatan “satu bangsa” dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda karena ingin menjajah kembali Indonesia.

Memasuki masa pembangunan kebudayaan diletakkan dalam posisi sebagai modal dasar dan sekaligus acuan dalam melaksanakan pembangunan. Konsep pelaksanaan pembangunan nasional adalah pembangunan yang berwawasan budaya. Namun peran itu baru sebatas wacana belum secara kongkrit dijadikan acuan. Menurut Soerjanto sejak tahun 1970-an peranan kebudayaan dalam pembangunan nasional mulai menurun, karena didesak oleh faktor-faktor lain seperti ekonomi, produksi dan teknologi. (Muhadjir/Ed., 1987: hal. 61). Sementara itu Mursal Esten lebih tegas lagi menyatakan bahwa pada zaman ini kebudayaan terpinggirkan dan ekonomi telah menjadi panglima. (Mursal Esten, 2000: hal.2)

Kalau diteruskan pada masa Reformasi, kebudayaan dijadikan komoditi yang dapat mendatangkan devisa. Ada lagi yang menyebut kebudayaan menjadi “daya tarik” untuk menggoda iman wisatawan mancanegara berkunjung membelajakan dollar, yen, yuan atau euro di Indonesia. Dalam perkembangan terakhir peran kebudayaan menjadi lebih penting lagi sebagai basis pengembangan sisten ekonomi liberal yang disebut ekonomi kreatif (*creative economy*), industri kreatif (*creative industry*) atau industri budaya (*culture industry*).

Dengan adanya perbedaan kondisi dan peran-peran itu tentu akan berpengaruh terhadap tema dan pokok bahasan yang diperbincangkan pada setiap kongres. Tema dan pokok bahasan yang dipilih mencerminkan pada saat itu permasalahan itu dipandang penting untuk didiskusikan dalam forum kongres. Sementara menurut WS Rendra, bagian penting yang tidak boleh ditinggalkan ketika menyelenggaraan KK, kita tidak boleh melupakan *setting* kebudayaan. Dalam ceramahnya di Universitas Siliwangi Tasikmalaya Rendra menyatakan:

”Kongres itu bisa-bisa saja, tapi soalnya bagaimana kesemua itu tidak sampai melupakan setting kebudayaan sosial-politik yang tengah terjadi hari ini, sehingga kongres itu tidak membuat kesenian menjadi menara gading”. (Pikiran Rakyat, 24/9/2005)

Tema dan pokok bahasan pada setiap kongres memang berbeda-beda. Akan tetapi bila disimak secara cermat perjalanan KK mulai dari yang pertama tahun 1918 hingga tahun 2003, dari balik perbedaan pokok bahasan itu menunjukkan adanya *benang merah* konsep pikiran yang menghubungkan antara KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Benang merah itu juga muncul antara KK yang satu dengan yang lain. Bahkan benang merah itu juga muncul antara KK dengan kongres-kongres lainnya: bahasa, sastra, kesenian, arkeologi, antropologi, kebatinan, ilmu pengetahuan dll. Oleh karena itu sengaja dalam uraian tentang KK dalam Bagian I, II, III dan IV diupayakan untuk dapat ditampilkan secara lengkap mengenai agenda, pokok bahasan serta kesimpulan dari setiap kongres. Dengan sedikit ilustrasi berupa cuplikan mengenai tema dan pokok bahasan dalam kongres akan memudahkan penyimakan masalah yang diperdebatkan mulai dari KK tahun 1918 hingga 2003. Cuplikan itu dituangkan dalam tabel 6, seperti terlihat di bawah ini.

Tabel 6
CUPLIKAN POKOK BAHASAN
KONGRES KEBUDAYAAN TAHUN 1918- 2008

NO.	TEMPAT KONGRES	NAMA/TEMA	POKOK BAHASAN
1	2	3	4
1.	Surakarta Tahun 1918	Nama: <i>Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling</i> Tema: <i>Pengembangan Kebudayaan Jawa</i> Pemrakarsa: <i>Pangeran Prangwadono</i>	1. Tentang perlunya pelajaran sejarah. 2. Pengembangan kebudayaan Jawa 3. Penguasaan ilmu pengetahuan Barat
2.	Surakarta Tahun 1919	Nama: <i>Congres van het Java-Instituut</i> Tema: <i>Pengajaran Kebudayaan</i> Pemrakarsa: <i>Java Instituut</i>	1. Pengajaran Sejarah Jawa, Sunda, Madura dan Bali 2. Pengajaran Kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali
3.	Bandung Tahun 1921	Nama: <i>Congres van het Java-Instituut</i> Tema: <i>Pendidikan dan Sejarah Seni</i> Pemrakarsa: <i>Java Instituut</i>	1. Pendidikan seni musik dan Sejarah pada pendidikan Bumiputra. 2. Pelestarian dan Pengembangan seni musik 3. Perbandingan seni musik sekarang dengan masa lalu

4	Yogyakarta Tahun 1924	<p>Nama: <i>Congres van het Java-Instituut</i></p> <p>Tema: <i>Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya</i></p> <p>Pemrakarsa: <i>Java Instituut</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah bangunan kuno di Jawa 2. Nilai yang terkandung dalam bangunan kuno untuk Kebudayaan Jawa masa kini dan akan datang? 3. Pelestarian dan Pemanfaatan bangunan kuno
5.	Surabaya Tahun 1926	<p>Nama: <i>Congres van het Java-Instituut</i></p> <p>Tema: <i>Bahasa, Seni, dan Kebudayaan Rakyat Jawa Timur</i></p> <p>Pemrakarsa: <i>Java Instituut</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musik Hindu-Jawa di Jawa Timur 2. Sejarah dan manfaat bangunan Majapahit. 3. Seni musik Madura 4. Seni sastra Madura 5. Sejarah Madura 6. Kebudayaan daerah dalam pendidikan
6.	Surakarta Tahun 1929	<p>Nama: <i>Congres van het Java-Instituut</i></p> <p>Tema: <i>Pengajaran Kebudayaan di Perguruan Tinggi</i></p> <p>Pemrakarsa: <i>Java Instituut</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajaran sastra, filsafat dan budaya Timur di Perguruan Tinggi 2. 10 Tahun Java-Instituut
7.	Bali Tahun 1937	<p>Nama: <i>Congres van het Java-Instituut</i></p> <p>Tema: <i>Kebudayaan dan Kehidupan Masyarakat Bali</i></p> <p>Pemrakarsa: <i>Java Instituut</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan tua di Bali 2. Kehidupan keluarga masyarakat Bali 3. Kehidupan sosial masyarakat Bali 4. Seni kerajinan Bali

8.	Magelang, Jawa Tengah Tahun 1948	Nama: <i>Kongres Kebudayaan Indonesia</i> Tema: <i>Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat</i> Pemrakarsa: <i>Pusat Kebudayaan Kedu</i>	1.Kebudayaan dan pembangunan masyarakat, oleh Ki Mangoensarkoro. 2.Kebudayaan dan Hukum Masyarakat, oleh Prof. Mr. Djokosoetono. 3.Kebudayaan dan Pembangunan Ekonomi, oleh Prof. Mr. Soenarja Kolopaking. 4.Kebudayaan dan Pembangunan Kota-kota, oleh Prof. Ir. Poerbodiningrat. 5.Kebudayaan dan Pembangunan Negara, oleh Mr. Koentjoro Poerbopranoto. 6.Kebudayaan dan Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantoro. 7.Kebatinan sebagai Alat dalam pembangunan Negara, oleh Ki Ageng Soerjomentaram, dr. Radjiman Wedjodiningrat dan Ki Mangoensoedarso.
9.	Bandung Tahun 1951	Nama: <i>Kongres Kebudayaan Indonesia</i> Tema: <i>Kritik Seni dan Hak Cipta</i> Pemrakarsa: <i>Lembaga Kebudayaan Indonesia</i>	1.Mengenai Hak Mengarang 2.Mengenai Perkembangan Kesusasteraan 3.Mengenai Kritik Seni 4.Mengenai Sensor Film 5.Mengenai Organisasi Kebudayaan
10.	Surakarta Tahun 1954	Nama: <i>Kongres Kebudayaan Indonesia</i> Tema: <i>Pendidikan Kebudayaan</i> Pemrakarsa: <i>Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN)</i>	1.Pendidikan Kebudayaan dalam Masyarakat Sekolah 2.Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Kota 3.Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Buruh dan Tani
11.	Denpasar, Bali Tahun 1957	Nama: <i>Kongres Kebudayaan Indonesia</i> Tema: <i>Kebudayaan dan Arsitektur</i> Pemrakarsa: <i>BMKN</i>	4.Hubungan Arsitektur dengan Seni Rupa oleh Syafei Sumardja (ASRI Bandung) 5.Penyelenggaraan Kesenian Semasyarakat oleh Trisno Sumardjo (BMKN) 6.Kebudayaan dan Konstitusi oleh M. Isa (PGRI Jakarta)

12.	Bandung Tahun 1960	<p>Nama: <i>Kongres Kebudayaan Indonesia</i></p> <p>Tema: <i>Kebudayaan dan Ekonomi</i></p> <p>Pemrakarsa: <i>BMKN</i></p>	<p>Pemrasaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Soediman Kartohadiprojo 2. Drs. Sudjoko, dan 3. Sarino Mangunpranoto.
13.	Jakarta Tahun 1991	<p>Nama: <i>Kongres Kebudayaan</i></p> <p>Tema: <i>Kebudayaan Kita: Kemarin, Kini dan Esok</i></p> <p>Pemrakarsa: <i>Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Warisan Budaya: Penyaringan dan Pengembangan, dengan 5 Topik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Budaya. 2. Kebudayaan Daerah dalam Kehidupan Masyarakat Pendukungnya 3. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian serta Kerajinan Tradisional 4. Aturan-aturan Adat Berkenaan dengan Kekuasaan dan Pemilikan 5. Warisan Budaya Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa • Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan, dengan 6 topik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional 2. Arah Perkembangan Kebudayaan Nasional 3. Kesusastraan Indonesia dalam Kebudayaan Nasional 4. Media Massa dan Kebudayaan Nasional 5. Kebudayaan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional 6. Keterkaitan Antara Kebudayaan dan Pembangunan Nasional • Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional, dengan 6 topik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional 2. Peranan Seniman dalam Masyarakat

			<p>3. Daya Cipta Ilmu dan Teknologi dalam pertumbuhan Kebudayaan di Indonesia</p> <p>4. Daya Cipta Budaya dan Media Massa</p> <p>5. Generasi Muda dan daya Cipta Budaya</p> <p>6. Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesusasteraan Daerah dan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat, dengan 7 topik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan dan Ekonomi 2. Kebudayaan dan Ilmu dan Teknologi 3. Kebudayaan dan Sosial, Politik dan Hukum 4. Kebudayaan dan Pertahanan dan Keamanan 5. Kebudayaan dan Wanita 6. Kebudayaan dan Olah Raga 7. Kebudayaan dan Lingkungan Alam • Kebudayaan Nasional dan Dunia (Umat Manusia), dengan 5 topik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan Asing dan Kebudayaan di Indonesia 2. Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri 3. Pariwisata dan Kebudayaan di Indonesia 4. Kerja sama Kebudayaan Antarnegara 5. Penerjemahan Karya-karya Asing di Indonesia.
--	--	--	--

14.	Bukittinggi, Sumatera Barat Tahun 2003	<p>Nama: <i>Kongres Kebudayaan</i></p> <p>Tema: <i>Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia</i></p> <p>Pemrakarsa: <i>Departemen Kebudayaan dan Pariwisata</i></p>	<p>• Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrasi dan Disintegrasi</i> 2. <i>Krisis Otoritas</i> 3. <i>Desentralisasi Politik (Otonomi Daerah)</i> 4. <i>Identitas dan Transisi</i> 5. <i>Konflik dan Kekerasan</i> 6. <i>Warisan Budaya (Cagar, Ilmu, Seni dan Budaya)</i> 7. <i>Kesetaraan Gender</i> 8. <i>Hukum, Produktivitas dan Korupsi</i> 9. <i>Reintepretasi & Reposisi Adat dan Tradisi</i> 10. <i>Pendidikan</i> 11. <i>Ekonomi Kerakyatan</i> 12. <i>Bahasa dan Simbol</i> 13. <i>Budaya Pop dan Seni Hiburan</i> 14. <i>Religi dan Spiritualitas</i> 15. <i>Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i> 16. <i>Lingkungan Hidup</i> <p>Catatan: Pokok Bahasan No. 11 s.d. 16, diusulkan pada Prakongres di Denpasar, Bali</p>
15.	Bogor, Jawa Barat, tahun 2008	<p>Nama: <i>Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI)</i></p> <p>Tema: <i>Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan</i></p> <p>Pemrakarsa: <i>Departemen Kebudayaan dan Pariwisata</i></p>	<p>Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Film/Seni Media</i> 2. <i>Sastra</i> 3. <i>Bahasa dan Aksara</i> 4. <i>Seni Rupa</i> 5. <i>Media Massa</i> 6. <i>Seni Pertunjukan</i> 7. <i>Ekonomi Kreatif/Industri Budaya</i> 8. <i>HaKI</i> 9. <i>Diplomasi Kebudayaan</i> 10. <i>Warisan Budaya</i> 11. <i>Kebijakan dan Strategi Kebudayaan</i> 12. <i>Pendidikan</i> 13. <i>Filantropi Kebudayaan</i> 14. <i>Identitas Budaya</i> 15. <i>Etika</i>

Berdasarkan tabel di atas tercantum pemrakarsa dan pelaksana kongres, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka kebanyakan datang dari lembaga kebudayaan non-pemerintah. Hanya KK tahun 1918 inisiatif untuk menyelenggarakan kongres datang dari seorang terpelajar bumiputra, yaitu Pangeran Prangwadono yang didukung oleh kaum terpelajar dan bangsawan yang tergabung dalam organisasi BO. Ia adalah seorang bangsawan terpelajar yang kemudian dinobatkan menjadi Mangkunegoro VII. Hampir pada setiap penyelenggaraan kongres sebelum

Indonesia merdeka Pangeran Prangwadono selalu aktif berperan. Kongres pertama diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diketuai oleh R. Sastrowidjono. Untuk kongres-kongres berikutnya hingga terakhir KK tahun 1937 di Bali kongres diselenggarakan oleh lembaga penelitian kebudayaan Java-Instituut. Peran itu telah diatur dalam Anggaran Dasar Java Instituut. Dalam pasal 4 butir b disebutkan bahwa misi lembaga ini adalah melakukan kegiatan untuk memajukan pengetahuan dan pengertian kebudayaan Jawa dengan mengadakan kongres-kongres, pameran, ceramah, diskusi, kursus, pertanyaan berhadiah (kuis) dan karang-mengarang. Posisi pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintahan kerajaan hanya terbatas pada bantuan dana dan fasilitas penyelenggaraan seperti tempat, tim kesenian, bahan pameran dan transportasi.

Pada KK sesudah Indonesia merdeka inisiatif datang dari lembaga kebudayaan di masyarakat. Inisiatif itu muncul setelah diselenggarakannya Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi pada bulan Desember 1945. Setelah pertemuan Sukabumi, lembaga kebudayaan Pusat Kebudayaan Kedu mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan lanjutan. Usul yang sangat penting dan strategis itu mendapat dukungan dari kalangan budayawan, seniman, pemangku adat dan cendekiawan yang mempunyai perhatian pada nasib kebudayaan bangsanya. Sebagian dari mereka yang terlibat dalam persiapan KK pertama itu adalah kaum terpelajar yang terlibat dalam kegiatan Kongres Kebudayaan dan Kongres Bahasa sebelum Indonesia merdeka. Nama-nama seperti Prof. Dr. Husein Djajadiningrat, Dr. Radjiman, Ki Hadjar Dewan-tara, Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, Mr. Wongsonegoro, Armijn Pane, telah banyak berperan dalam kongres-kongres sebelum Indonesia merdeka. Setelah Pemerintah mendengar rencana itu, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membantu dana persiapan dengan menyelenggarakan "konferensi persiapan kongres" di Magelang pada tanggal 6 Mei 1948. Dari pertemuan ini kemudian dibentuk Panitia Penyelenggara.

Sesudah KK pertama di Magelang disusul KK kedua di Bandung tahun 1951. Dalam kongres ini segala persiapan hingga pelaksanaannya ditangani oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), yakni sebuah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan salah satu rekomendasi KK di Magelang. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari KK di Bandung, dibentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional Indonesia (BMKN). Status LKI masuk sebagai salah satu organisasi dalam BMKN. Pada KK tahun 1954 di Surakarta, tahun 1957 di Denpasar, dan tahun 1960 di Bandung, kegiatan persiapan dan penyelenggaraan sepenuhnya ditangani oleh BMKN.

Dari sedikit gambaran di atas jelas bahwa dari lima kali penyelenggaraan KK sesudah Indonesia merdeka (1948, 1951, 1954, 1957, dan 1960) posisi Pemerintah hanya pasif dalam arti bersikap sebagai fasilitator saja. Peran aktif lebih banyak dilakukan oleh organisasi kebudayaan non-pemerintah. Seperti dinyatakan oleh Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo pada sambutan pembukaan KK tahun 1948, antara lain mengatakan: "... *tjampur tangan Kementerian itu adalah pasief*". (Majalah Budaya, 1950: hal. 13)

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Menteri PP dan K, Mr. Wongsonegoro yang hadir pada KK kedua tahun 1951 di Bandung, dan oleh Menteri PP dan K, Mr. Moh. Yamin pada pembukaan KK ketiga tahun 1954 di Surakarta. Dalam pidato sambutannya di samping menyatakan terima kasih kepada Panitia, Yamin juga menyatakan terima kasih kepada BMKN karena telah mengambil peran yang besar

dalam mengembangkan kebudayaan. Mr. Moh. Yamin mengatakan bahwa BMKN adalah:

“... yang secara langsung merupakan koordinasi dalam usaha-usaha guna perkembangan kebudayaan dalam arti luas menampakkan kegiatan yang memberi dasar kepada pengharapan umum untuk mencapai hasil yang baik. Berdasarkan keinsyafan itu maka Pemerintah tak segan-segan untuk mencurahkan perhatian kepada Konggres ini dan memberikan bantuan sebaik-baiknya dimana perlu dan dimana mungkin”. (Majalah Budaya, September-Oktober 1954: hal. 2).

Konsep mengenai posisi pemerintah dalam penyelenggaraan kongres seperti itu sama dengan KK sebelum Indonesia merdeka. Pemrakarsa dan penyelenggara KK sesudah Indonesia merdeka adalah lembaga kebudayaan di masyarakat.

Berbeda dengan kongres-kongres tersebut di atas, pada penyelenggaraan KK tahun 1991 inisiatif datang dari pihak pemerintah, dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Langkah ini dilakukan mengingat kondisi organisasi kebudayaan yang ada, terutama BMKN yang biasa menyelenggarakan KK sedang mengalami kemunduran. Setelah KK tahun 1954, perkembangan politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ketika itu posisi politik telah ditempatkan sebagai panglima. Karena politik dinomorsatukan, lembaga kebudayaan pun tak terelakkan menjadi sarat bermuatan politik. KK bukan mencari jalan pemecahan masalah kebudayaan melainkan menjadi ajang pertarungan ideologi dengan memanfaatkan kebudayaan. Mereka menilai melalui pendekatan budaya (*cultural approach*) terbukti menjadi sarana ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan politik. (DS. Moeljanto dan Taufiq Ismail, 1995: hal. 9). Akibatnya tidak hanya terjadi perang ideologi antara komunis dan non komunis, tetapi juga perang budaya dalam arti dua kelompok budayawan, cendekiawan dan wartawan yang menganut faham komunis dengan yang tidak setuju dengan faham komunis. Mencermati situasi pada saat itu DS Muljanto dan Taufiq Ismail sampai pada kesimpulan bahwa telah “terjadi prahara budaya yang menggelegar di tahun 60-an itu.”

Gejala itu sudah mulai tampak dalam KK tahun 1957 di Bali. Selain keberadaan lembaga BMKN, masing-masing partai politik mendirikan lembaga kebudayaan sendiri. Dalam perdebatan di kongres itu masing-masing lembaga lebih mengedepankan kepentingan partainya ketimbang memperjuangkan kemajuan kebudayaan bangsa. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), SOKSI mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (LEKRI), yang bertentangan dengan Lekra, Partai Nasional Indonesia (PNI) mendirikan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) Partai NU mendirikan Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI), Partai Kristen Indonesia mendirikan Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia (LEKRINDO), Partindo mendirikan Lembaga Seni Budaya Indonesia (LESBI), dan Partai Katolik mendirikan Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia (LKKI).

Setelah meletus peristiwa G30S/PKI tahun 1965, keberadaan organisasi kebudayaan yang dibentuk oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan menjadi semakin terpuruk. BMKN sebagai organisasi induk dan bersifat nasional tidak berdaya lagi. Dalam kondisi seperti itu, pelaku kegiatan kebudayaan sesudah tahun 1965 cenderung bergeser, lebih banyak dilakukan oleh pihak lembaga kebudayaan di pemerintahan Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta oleh Pemerintah Daerah. Inisiatif untuk menyelenggarakan KK tahun 1991 datang dari Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Peran pemerintah seperti ini tampaknya masih diperlukan pada penyelenggaraan KK tahun 2003 dan 2008. Sesuai dengan keputusan KK 1991 kongres berikutnya seharusnya sudah diselenggarakan tahun 1996 (setiap 5 tahun sekali), tetapi dalam kenyataan baru terwujud pada tahun 2003 yang berarti mengalami keterlambatan selama 12 tahun. Meskipun penyelenggaraan kongres telah mengalami keterlambatan selama itu, tetapi tidak pernah muncul inisiatif yang datang dari lembaga di masyarakat seperti halnya pada masa Java Instituut, LKI atau BMKN. Malahan sebaliknya, pihak pemerintah yang dikritik tidak cepat mengambil langkah inisiatif untuk menyelenggarakan kongres.

Bagian berikutnya yang perlu disimak adalah mengenai keluasan wilayah budaya yang diperbincangkan dalam kongres. Pada KK pertama sebelum Indonesia merdeka, perbincangan masih terbatas pada kebudayaan yang berkembang di lingkungan masyarakat Jawa saja. Yang menarik, meskipun wilayah budaya masih terbatas pada kebudayaan Jawa, namun dalam perdebatan telah melebar sampai pada masalah pengembangan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia. Pada kongres-kongres berikutnya wilayah budaya yang diperbincangkan meluas, mencakup kebudayaan Sunda, Madura dan Bali. Setelah Indonesia merdeka dengan sendirinya cakupan wilayah meluas ke seluruh wilayah budaya di seluruh Indonesia.

Mengenai “tema” kongres, yang dipilih dalam KK pertama tahun 1918 adalah “pengembangan kebudayaan Jawa.” Untuk dapat menemukan konsep, kebijakan dan strategi *pengembangan kebudayaan Jawa* yang tepat, para pemrasaran memusatkan perhatiannya pada masalah pendidikan bagi anak-anak dan remaja bumiputra. Perbincangan diawali dengan memperdebatkan masalah pendidikan sejarah dan pendidikan bahasa Jawa, serta penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan kebudayaan bangsa. Di samping itu juga masalah pengajaran bahasa asing dalam kaitan dengan penyerapan ilmu pengetahuan Barat (1918).

Pada kongres-kongres berikutnya temanya berganti-ganti dan cenderung tema itu disesuaikan dengan permasalahan di mana kongres itu diselenggarakan. Ketika KK tahun 1921 di Bandung temanya adalah “Pendidikan dan Sejarah Seni.” Pembahasan diutamakan pada tinjauan seni Sunda. Demikian pula halnya dengan KK tahun 1924 di Yogyakarta, pembahasan mengenai “Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya” dititikberatkan pada peninggalan sejarah dan purbakala yang banyak terdapat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ketika kongres diselenggarakan di Surabaya temanya adalah “Bahasa, Seni dan Kebudayaan Rakyat Jawa Timur.” Pembahasan diarahkan pada tinjauan tentang peninggalan purbakala, seni sastra dan kerajinan di Jawa Timur. Pada KK tahun 1937 di Bali temanya adalah “Kebudayaan dan Kehidupan Masyarakat Bali” dan oleh karena itu tinjauan banyak menyoroti masalah kerajinan, berbagai peninggalan budaya, tata hubungan dalam masyarakat Bali. Jika tema-tema kongres itu disarikan, maka tujuan dari tema itu tidak hanya mencari pemecahan masalah konsep, kebijakan dan strategi mengenai *pengembangan kebudayaan* saja, melainkan mengenai *pelestarian kebudayaan* dalam arti luas. Termasuk di dalamnya mencari pemecahan mengenai masalah *pembinaan, perlindungan, dan pemanfaatan kebudayaan*.

Perdebatan mengenai *pembinaan kebudayaan* diarahkan pada upaya

meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pendukung kebudayaan. Adapun cara yang disepakati adalah dengan mengoptimalkan peran pendidikan dalam arti luas sebagai proses pembudayaan. Hal ini tergambar jelas ketika mereka memperbincangkan tentang perlunya mengubah pandangan sebagai 'bangsa kuli' menjadi bangsa yang merdeka dan berkepribadian. Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia mereka membahas tentang masalah pendirian lembaga pendidikan bumiputra, pendidikan sejarah, arsitektur, bahasa, sastra, filsafat, musik, tari, sandiwara (tonil) dan kerajinan (antara lain tentang kerajinan besi, perak, emas, kayu, tenun, bambu, kulit hingga pada pembuatan perahu tradisional).

Sementara itu, perdebatan masalah *pengembangan kebudayaan* diarahkan pada masalah substansial kebudayaan itu sendiri, yaitu tentang perlunya dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan bangsa. Hal ini tergambar dalam perdebatan mereka yang tidak hanya terbatas kebudayaan Jawa tetapi juga memperbincangkan kebudayaan Sunda, Madura dan Bali, kemudian meluas dengan menyelipkan perdebatan tentang kebudayaan Nusantara, kebudayaan nasional dan kebudayaan Indonesia. Mereka telah sampai pada perbincangan masalah pengaruh kebudayaan dari Barat maupun Timur (India), terhadap kebudayaan Jawa. Bahkan mereka telah memperbincangkan tentang hubungan langsung dengan kebudayaan asing (kebudayaan seluruh bangsa di dunia), seperti yang diusulkan oleh Ki Hadjar Dewantara:

"Tidak mungkinkah bangsa kita dengan tendens-tendens nasionalnya membentuk suatu badan yang dapat kita sebut 'Hubungan Internasional' untuk menghubungkan bangsa kita dengan bangsa lain?". (Ki Hadjar Dewantara, 1994:hal. 39).

Upaya mempertemukan kebudayaan Barat dan Timur telah dilakukan sejak zaman kolonial. Pengenalan kebudayaan Indonesia ke luar negeri antara lain dilakukan tahun 1889 ketika komposer Claude Debussy bersama salah satu Grup Musik Gamelan Jawa ikut dalam Pameran Internasional di Paris. Upaya itu diulang lagi tahun 1931, dan untuk kali ini terjadi kecelakaan, tenda pameran terbakar beserta beberapa koleksi hancur. Bersamaan dengan pameran itu untuk pertama kalinya musik gamelan Bali dari Peliatan dikirim ke Paris. Di susul tahun 1952 dengan dikoor-dinasikan oleh John Coast dari Inggris, grup Peliatan membuat terpesona masyarakat London, New York dan Las Vegas.

Perdebatan tentang upaya *perlindungan kebudayaan* diarahkan pada upaya untuk menjaga agar kebudayaan tidak mengalami kerusakan dan kemusnahan. Perlindungan diarahkan pada kebudayaan yang bersifat benda (*tangible*) maupun yang bersifat non-benda (*intangible*). Hal ini tergambar pada perbincangan mereka tentang nilai-nilai (tatakrama), seni musik, keutuhan berbagai bangunan kuno, situs purbakala, arsitektur, alat-alat kesenian, hasil kerajinan, bahasa daerah, hingga pada sistem keluarga dan adat. Mereka telah memikirkan untuk mendirikan lembaga penelitian kebudayaan dan lembaga museum untuk menyimpan dan memamerkan berbagai benda peninggalan sejarah bangsa, dan lembaga pendidikan seni (kerajinan). Banyak pusat kerajinan di Jawa hilang. Oleh karena itu dalam KK 1926 di Surabaya,

Walikota Surabaya Ir. Djikerman mengharapkan agar kejayaan kerajinan Jawa Timur masa lalu dan kini hilang atau terancam akan hilang dapat dipulihkan.

Di samping itu, pemerintah Hindia Belanda juga mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan untuk melindungi keselamatan benda peninggalan sejarah dan purbakala. Atas usul Ir. PAJ. Moojen - yang pernah menjadi anggota Panitia dan sebagai peserta KK tahun 1921 - lahirlah *Monumenten Ordonnantie (MO) Staatblad No. 238* tahun 1931. (Adolf Heuken SJ - Grace Pamungkas ST, 1999: hal 69). Dasar pertimbangan yang mendorong lahirnya MO adalah “...perlunya diambil tindakan-tindakan guna melindungi benda-benda yang harus dianggap memiliki nilai penting bagi prasejarah, sejarah, kesenian atau palaeoanthropologi”. Jika tidak ada upaya perlindungan, warisan budaya bangsa akan rusak, hancur, dan akhirnya punah, karena adanya berbagai gangguan dan ancaman oleh karena faktor alam maupun manusia.

Sementara itu, mengenai pemikiran tentang *pemanfaatan kebudayaan* diarahkan pada upaya penggunaan kebudayaan bagi kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, ekonomi (koperasi, perdagangan, kesejahteraan rakyat) dan bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri. Mereka telah membahas tentang pemanfaatan peninggalan sejarah dan budaya bagi penyelenggaraan pendidikan kesadaran bangsa. Mereka juga sudah memperbincangkan pemanfaatan kebudayaan untuk pariwisata (*tourism*) yaitu sebagai aset budaya yang dapat menjadi daya tarik pariwisata (lihat: KK 1924 di Yogyakarta, 1926 di Surabaya, 1937 di Bali).

Tema kongres seperti diuraikan di atas dilanjutkan dan semakin diperluas pada KK sesudah Indonesia merdeka. Untuk meletakkan dasar-dasar pemajuan kebudayaan bangsa setelah menjadi bangsa merdeka, tema yang dipilih KK tahun 1948 adalah “Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat.” Dari judul tema itu dapat disimpulkan, sebagai bangsa yang masih belia — baru berusia 3 tahun — bahwa para pendiri bangsa telah menempatkan bidang kebudayaan sebagai unsur paling penting untuk dibahas untuk menemukan suatu konsep, kebijakan dan strategi dalam membangun kebangsaan. Kebudayaan sebagai garis acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam sebuah bangsa yang multietnik, multikultur dan multimental perlu diperbincangkan dalam sebuah forum kongres.

Dalam KK 1951 tema yang dipilih adalah “Seni dan Hak Cipta”, sementara KK 1954 memilih tema “Pendidikan Kebudayaan.” Dalam KK 1951 temanya adalah “Seni dan Arsitektur” sedangkan KK 1951 mengenai “Kebudayaan dan Ekonomi.” Dalam KK 1991, tema yang dipilih adalah “Kebudayaan Kita: Kemarin, Kini dan Esok.” Dengan tema ini perhatian diarahkan pada pembahasan masalah kebudayaan bangsa masa lalu, masalah sekarang dan masalah-masalah yang akan dihadapi bangsa Indonesia mendatang. Sementara itu dalam KK 2003, tema kongres ditekankan pada pemecahan masalah “Konsep, Kebijakan dan Strategi” pemajuan kebudayaan bangsa.

Bagaimana halnya dengan “pokok bahasan” antara KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka? Pokok bahasan merupakan penjabaran lebih rinci dari tema untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk dalil-dalil, pernyataan atau butir-butir masalah dan pemecahannya. Dalam KK pertama tahun 1918 pokok bahasan mencakup pelajaran sejarah, pengembangan kebudayaan Jawa dan penguasaan ilmu pengetahuan Barat. Pada kongres-kongres berikutnya pokok bahasan makin bervariasi sesuai dengan tema kongres, yaitu menyangkut masalah-masalah: bangunan kuno/tua atau peninggalan

sejarah dan purbakala, pendidikan sejarah, kesenian (tari, musik), kerajinan, bahasa, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, teknologi, arsitektur, hubungan budaya antarbangsa (Timur dan Barat), kelembagaan yang mengurus kebudayaan serta mengenai hubungan kebudayaan dan pariwisata. Pokok bahasan yang dipilih pada KK sebelum Indo-nesia merdeka dilanjutkan pada KK sesudah Indonesia merdeka seperti terlihat dalam tabel di atas.

Di antara berbagai pokok bahasan di atas, yang paling menonjol dan berulang kali diangkat dalam kongres adalah masalah hubungan antara kebudayaan dan pendidikan. Hampir pada setiap kali ada KK masalah kaitan antara keduanya selalu ditampikan dan menjadi seperti tidak pernah berakhir untuk diperdebatkan. Pendidikan sebagai sebuah proses pembudayaan telah diposisikan sebagai bagian penting dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan manusia beretika, bermoral, beriman dan bertakwa. Pendidikan merupakan media utama untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan.

Pada KK pertama tahun 1918, masalah pendidikan bagi penduduk bumi-putra menjadi pokok bahasan, dengan menekankan pada pentingnya pengajaran sejarah dan bahasa Jawa. Pada kongres tahun 1921, masalah pendidikan seni dalam hal ini seni sastra serta musik (seni nada) dari suku Sunda menjadi fokus perbincangan. Pokok bahasan ini dilanjutkan lagi pada kongres tahun 1926 yaitu mengenai pendidikan seni sastra serta musik Jawa Jawa Timur dan Madura. Di samping itu juga pokok bahasan tentang hubungan dengan seni musik Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Sunda, serta masalah pendidikan seni kerajinan, karena di Jawa Timur seni ini mengalami kemunduran. Pada masa sesudah Indonesia merdeka masalah seperti tersebut di atas masih tetap aktual untuk diangkat kembali sebagai topik kongres. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pokok bahasan mengenai pendidikan kebudayaan (sejarah, seni, sastra, bahasa, etika dll) menjadi perhatian utama KK sebelum Indonesia merdeka. Pengulangan perbincangan pokok bahasan itu di samping menunjukkan antara kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan yang kompleks, juga dimaksudkan untuk lebih memperluas cakupan dan memantapkan konsep pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Perhatian tidak hanya ditujukan pada pendidikan di tingkat rendah tetapi juga pendidikan di Perguruan Tinggi, antara lain dengan memperbincangkan tentang perlunya dibuka jurusan sastra, budaya Timur dan filsafat (KK 1918, KK 1929).

Dalam KK tahun 1948 hingga 2003 masalah kaitan kebudayaan dan pendidikan tetap menjadi pokok bahasan penting. Dalam KK tahun 1948, masalah kebudayaan dan pendidikan dijadikan tema khusus dengan pemrasaran Ki Hadjar Dewantara. Peran Ki Hadjar Dewantara sebagai seorang pendidik dan juga seorang budayawan dalam perdebatan masalah itu sangat menonjol, sejak dari kongres sebelum Indonesia merdeka. Pokok-pokok pikiran Ki Hadjar Dewantara memberikan masukan yang penting bagi perumusan hasil kongres.

Sementara itu dalam KK 1951 meskipun pokok bahasan yang dibahas mengenai kritik seni dan film, tetapi dalam pembahasan tetap menyinggung masalah pendidikan. Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tercapainya tujuan kritik seni perlu diadakan perluasan kesempatan untuk mempertinggi nilai membanding (sikap kritis) dari masyarakat terhadap seni, misalnya dengan mengadakan: akademi

seni, mata pelajaran seni dan estetika pada universitas, serta pendirian museum hasil kesenian. Pokok bahasan mengenai kebudayaan dan pendidikan lebih diperdalam dan diperluas pada KK tahun 1954 dengan mengelompokkan rumusan menjadi 3 bagian, yaitu kebudayaan bagi pendidikan masyarakat sekolah, masyarakat kota dan masyarakat buruh dan tani. Selain itu munculnya usul untuk mendukung pengelolaan bidang pendidikan sebagai bagian penting dari proses pembudayaan.

Usul mengenai perlunya segera ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional muncul pada KK 1954 di Surakarta, di samping hal-hal yang berkenaan dengan kurikulum, sarana pendidikan dan tenaga pengajar kebudayaan. Pada KK tahun 1954 anggaran Kementerian PP dan K diusulkan agar dinaikkan menjadi 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Usul tersebut diterima dan menjadi keputusan kongres. Dalam KK tahun 1991, masalah pendidikan kebudayaan sudah tidak terlalu dominan, hanya menjadi bagian dari topik tentang kaitan kebudayaan dengan sektor-sektor masyarakat. Sementara itu dalam KK 2003, perbincangan masalah pendidikan kembali penting dan menjadi salah satu dari 16 pokok bahasan.

Pokok bahasan lain yang selalu muncul sejak KK sebelum Indonesia merdeka adalah masalah yang berkaitan dengan kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Dalam kongres sebelum Indonesia merdeka, masalah kebudayaan nasional sesekali muncul dalam prasaran, perdebatan dan dalam pidato sambutan. Pada kongres tahun 1948, setelah Indonesia merdeka masalah itu dijadikan pokok bahasan utama, karena saat itu diperlukan suatu konsep strategi dalam memelihara, memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional seperti yang diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia."

Pada KK tahun 1948 pokok pembahasan diarahkan pada: (1) kebudayaan dan pembangunan masyarakat dan Negara; (2) kebatinan dalam hubungan dengan kebudayaan; (3) kebudayaan dan pendidikan; (4) kesenian; dan (5) pembangunan kota. Pada KK 3 tahun kemudian, yaitu tahun 1951, materi menjadi menyempit karena membahas sebagian dari aspek kebudayaan. Topik yang dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut: (1) Hak Pengarang; (2) Perkembangan Kesusastraan; (3) Kritik Seni; dan (4) Sensor Film. Sementara itu, dalam KK 1954 materi yang dipandang amat penting mendesak adalah masalah pendidikan kebudayaan. Dalam KK 1957 materi yang diperbincangkan adalah (1) Hubungan antara Arsitektur dan Seni Rupa; (2) Kesenian di Masyarakat; (3) Kebudayaan dan Konstitusi, sedangkan pada KK tahun 1960 tema yang dibahas adalah Fungsi kebudayaan dalam Pembangunan Ekonomi. Dari kutipan itu tampak jelas bahwa tema yang diperbincangkan dalam KK makin menyempit.

Setelah KK tahun 1960, hampir 31 tahun kemudian baru diselenggarakan Kongres Kebudayaan lagi. Jarak waktu yang cukup panjang bila dibandingkan dengan kongres-kongres kebudayaan sebelumnya. Setelah demikian lamanya tidak ada kegiatan kongres, KK tahun 1991 seperti menjadi ajang 'pelampiasan' keinginan yang tak tersalurkan. Meskipun ada forum-forum perdebatan seperti simposium, seminar, diskusi, dialog dan temu budaya serta sarasehan budaya, tetapi forum itu dianggap belum dapat dijadikan forum penyaluran yang tepat. Di samping jumlah pesertanya cukup banyak, materi yang dibahas juga amat luas cakupannya. Hampir mencakup seluruh permasalahan kebudayaan, baik dilihat dari sisi dalam (*intern*) maupun dari sisi luar (*ekstern*).

Dilihat dari sisi intern, masalah yang diperbincangkan dibagi atas 3 bagian. Bagian pertama memperbincangkan tentang keberadaan warisan budaya bangsa. Di samping ada bagian kebudayaan yang perlu dikembangkan, ada pula bagian yang perlu dikesampingkan, dan untuk itu perlu dilakukan penyaringan (seleksi). Pada bagian kedua memperbincangkan kembali tentang keberadaan (eksistensinya) kebudayaan nasional setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 secara *de facto* dan *de jure* kehadiran kebudayaan bangsa (nasional) Indonesia resmi diakui. Setelah berjalan selama 45 tahun, dipandang perlu untuk mengkaji perkembangannya pada masa kini dan tentang harapan di masa depan. Bagian ketiga, masalah daya cipta dan pertumbuhan kesenian daerah dan nasional dijadikan topik bahasan karena pada saat itu masyarakat dilanda kegelisahan tentang arah perkembangan kesenian daerah dan nasional yang cenderung banyak terpengaruh oleh kesenian asing.

Perbincangan kebudayaan dilihat dari sisi ekstern mencakup 2 bagian. Bagian pertama, tentang kebudayaan dalam kaitannya dengan sektor-sektor kehidupan masyarakat, yaitu mencakup kaitan kebudayaan dengan ekonomi, ilmu dan teknologi, sosial, politik dan hukum, pendidikan, agama, pertahanan dan keamanan, wanita, olah raga, serta kebudayaan dan lingkungan alam. Pada bagian kedua dibahas tentang kebudayaan nasional dalam kaitan dengan dunia luar bahkan dalam hubungan dengan umat manusia yang ada di bumi ini, yaitu mencakup masalah hubungan antara kebudayaan asing dengan kebudayaan di Indonesia, antara pariwisata dengan kebudayaan, dan kerja sama kebudayaan antarnegara. Hal lain yang menarik dari sekian banyak pokok bahasan pada KK 1991 adalah masalah penterjemahan karya-karya asing ke dalam bahasa Indonesia dan daerah. Meskipun masalah ini telah diperdebatkan sejak KK tahun 1951 tetapi karena belum ada langkah yang kongkrit maka masih dipandang perlu untuk diangkat lagi.

Adanya *benang merah* antara KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka juga tampak dalam hal pembentukan lembaga kebudayaan sebagai wadah untuk melakukan aktivitas kebudayaan. Dalam Kongres Kebudayaan tahun 1918 dikeluarkan rekomendasi agar didirikan lembaga penelitian kebudayaan dan kesenian. Realisasi dari rekomendasi tersebut lahir Java-Instituut pada tanggal 4 Agustus 1919. Lembaga inilah yang menyiapkan dan melaksanakan kongres-kongres kebudayaan dan bahasa berikutnya. AD-ART Java Instituut disahkan oleh Gubernur Jenderal melalui surat keputusan No. 75 tanggal 17 Desember 1919 dan memiliki masa hidup 29 tahun. Pendirinya antara lain Pangeran Prangwadono, Dr. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, dan Dr. FDK. Bosch.

Seperti halnya pada KK sebelum Indonesia merdeka, pada kongres-kongres setelah Indonesia merdeka, juga diusulkan berdirinya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengurusan kebudayaan. Lembaga-lembaga itu antara lain: Kementerian Kebudayaan tersendiri, Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI (1948), Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN (1951), Badan Sensor Film atau BSF (1951), Dewan Pengawas Pemasukan Lektur dan Film (1954). Rekomendasi kongres tentang perlu dibentuknya lembaga-lembaga kebudayaan itu diikuti oleh berdirinya lembaga-lembaga kebudayaan di masyarakat terutama lembaga-lembaga yang dibentuk oleh organisasi partai politik atau kemasyarakatan seperti: Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seni Budaya Muslimin

Indonesia (LESBUMI), Lembaga Seni Budaya Indonesia (LESBI), Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia (LKKI), Himpunan Seni Budaya Indonesia (HSBI), dll.

Sebagai tambahan untuk menunjukkan adanya *benang merah* ada baiknya bila kongres itu ditilik dari perspektif pergerakan kesadaran berbangsa. KK yang diselenggarakan pada masa pergerakan menjadi forum untuk menggalang dan memperkuat kesadaran itu. Kesadaran itu tumbuh di samping akibat dari tekanan pemerintah yang berkuasa (penjajah), juga karena adanya kesadaran bahwa semua suku bangsa memiliki unsur budaya yang sama. Oleh karena itu KK saat itu memiliki hubungan timbal balik antara tumbuhnya kesadaran untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan kesadaran berbangsa. Kongres menjadi forum untuk menggalang kekuatan baru yang setahap demi setahap mengristal dalam bentuk tuntutan agar segera terwujud satu bangsa.

Tumbuhnya kesadaran berbangsa dan kepedulian terhadap nasib kebudayaannya, merupakan suatu perwujudan dari sebuah pendapat ahli sejarah, yang menyatakan bahwa kekuatan baru dapat tumbuh akibat dari tekanan kekuatan lama (dalam hal ini penjajah). Akibat dari mendapatkan tekanan yang kuat, justru membangkitkan semangat dan kekuatan yang makin hebat. Seperti yang dikutip oleh HB. Jassin dkk. sebagai berikut:

“Berdasarkan fenomena-fenomena sejarah maka seorang ahli sejarah mengatakan bahwa kebudayaan dari suatu periode adalah senantiasa kebudayaan dari kelas yang berkuasa. Akan tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa justru karena tidak termasuk dalam kelas yang berkuasa maka orang berhasil membentuk kekuatan baru. Dan politik, sebagai kekuatan baru yang terbentuk di tengah-tengah penindasan kekuatan lama, merupakan faktor positif yang menentukan perkembangan kebudayaan dan kesenian”. (E. Ulrich Kratz, 2000: hal. 496).

Sebagai bukti telah lahir kekuatan baru dapat dilihat dari pencetus dan peserta kongres. Dalam kongres-kongres itu banyak terlibat nama-nama kaum terpelajar bumiputra yang di antaranya juga terlibat dalam pergerakan nasional. Telah aktif mengambil peran antara lain: PH. Hadinegoro, Pangeran Prangwadono, Dr. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, Soejono, Ki Hajar Dewantara, Dr. Radjiman, R. Ngabei Poerbatjaraka, dr. Soetomo, RP. Soeroso, Mr. Singgih, Tjipto Mangoenkoesoemo, RA Wira Nata Koesoema, R. Hassan Suma Di Pradja, dan Abdul Azis. Bahkan inisiatif untuk menyelenggarakan kongres pertama tahun 1918 justru datang dari kalangan bumiputra, yaitu Pangeran Prangwadono. Pendapat mereka tentang kesadaran berbangsa dan berkebudayaan sangat jelas dan tegas. Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, R. Sastrowidjono pada saat itu mengatakan:

”... telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi”. (Jaap Erkelens, 2001: hal. 2)

Selanjutnya Sastrowidjono menyatakan bahwa budaya milik suatu bangsa merupakan cerminan paling sempurna dari kesadaran nasional dan jati diri bangsa

yang bersangkutan. Untuk itu ia menyerukan kepada seluruh bangsa di Jawa, tanpa membedakan antara orang Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura ataupun Bali guna membahas bersama jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Masalah 'menjadi bangsa' masih tetap menjadi pokok bahasan pada KK sesudah Indonesia merdeka. Dalam KK 1948 disimpulkan bahwa perlu diperbaharui jiwa manusia Indonesia guna menciptakan manusia, masyarakat dan kebudayaan baru, dengan mewujudkan dan memperkembangkan nilai-nilai kebudayaan seperti yang terkandung dalam Pancasila. Demikian pula pada KK 2003, masalah konflik antarsuku bangsa yang berkembang di beberapa daerah menjadi pokok bahasan.

Bagian lain yang menarik dari serangkaian KK sebelum Indonesia merdeka adalah perhatian para raja dan pejabat pemerintah pada masa sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka terhadap kegiatan kongres. Para raja dan bangsawan yang pernah hadir dalam kongres antara lain: Sultan Hamengkoeboewono VIII, Sri Soesoehoenan Pakoeboewono X, KGPA. Mangkoenegoro VII, Pakoe Alam, Tjokorde Gde Raka Soekawati, Tjokorde Raka (Ubud), dan I Gusti Bagoes Djelantik, dari Karangasem. Pada masa sesudah Indonesia merdeka, Kongres Kebudayaan juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara. Pada KK tahun 1948 hadir Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, dan Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Penerangan Moh. Natsir. Pada pada KK 1948 dan 1951, Bung Hatta menyampaikan prasarannya. Hadir pula Panglima Besar Soedirman dan beberapa orang menteri. Pada KK tahun 1951 Wakil Presiden Moh. Hatta dan Menteri PP dan K. Mr. Wongsonegoro. Sedangkan pada KK tahun 1954 hanya dihadiri oleh Menteri PP dan K, Mr. Muh. Yamin. Pada KK tahun 1991, kongres dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden Soedharmono, SH. Hadir pula pada kongres tersebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Soepardjo Roestam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah. Sementara pada Kongres Kebudayaan 2003 hanya dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. I Gede Ardika dan kongres ditutup oleh Asisten Deputi (Eselon II). Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah KK 2003 mewakili kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membacakan sambutannya.

Bagaimana halnya dengan pendapat kaum terpelajar keturunan Belanda tentang kebudayaan bangsa? Dari sejumlah nama yang terlibat dalam kongres adalah para pemerhati dan peneliti kebudayaan yang penuh dedikasi dan hasil karyanya menjadi dokumen yang penting bagi sejarah kebudayaan kita. Nama-nama seperti: Dr. FDK. Bosch, Samuel Koperberg, A. Muhlenfeld, Z. Stokvis, PAJ. Moojen, Ir. Th. Karsten, J. Kats, Dr. GAJ. Hazeu, Dr. WF. Stutterheim, Ir. H. Maclaine Pont, Dr. R. Goris, Dr. GWJ. Drewes dan JW. Teillers, adalah nama-nama yang pendapat dan karyanya menjadi acuan bagi para peneliti kebudayaan pada masa sekarang.

Salah satu dari sekian banyak cendekiawan Belanda yang memiliki pandangan yang sama dengan jiwa bangsa Indonesia adalah A. Muhlenfeld, yang antara lain pada tahun 1918 menya-takan pendiriannya bahwa perlu diajarkan sejarah abad-abad yang lalu, agar keturunan kita yang sedang tumbuh menyadari betapa buruk akibat yang menyedihkan bagi bangsa yang berselisih dan bercerai-berai. Menurut Muhlenfeld

pada zaman yang akan datang daerah Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara akan mendapatkan kedaulatan penuh. Hanya atas dasar kesatuan nasional bangsa 'Jawa' akan mampu mempertahankan kedaulatan itu, dan untuk hal ini harus ditanamkan melalui pendidikan.

Di samping nama-nama yang memang terlibat dalam penelitian kebudayaan, terdapat nama pejabat Pemerintah Hindia Belanda yang pikirannya telah menuju ke arah kebudayaan bangsa. Dari sekian banyak pejabat warga Belanda yang menarik untuk disimak karena memiliki perhatian besar terhadap kebudayaan Indonesia, adalah Walikota Bandung, Mr. SA. Reitsma, dan Mr. Dijkerman, Walikota Surabaya. Pernyataan mereka disampaikan ketika masing-masing menjadi tuan rumah kongres. Dalam pidato pembukaan KK tahun 1921 di Bandung, SA. Reitsma mengatakan bahwa tujuan diadakannya kongres adalah untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang dalam keadaan tertindas. Di daerah-daerah, kebudayaan itu akan dihidupkan dan dengan demikian akan kembali berkembang. Sementara itu, Walikota Surabaya Mr. Dijkerman menyampaikan pandangannya bahwa seni dapat berkembang apabila didukung oleh semangat dan kegairahan hidup dari bangsa yang sedang berkembang. Seni berkembang kuat pada saat bangsa itu sedang dalam kondisi kuat. Dan menurut Dijkerman sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menyadarkan bangsa Indonesia.

Seorang tokoh lain yang patut dicatat adalah Mr. Samuel Koperberg. Di kalangan rekan-rekannya ia sering dipanggil *Gunung Kuningan* atau *Gunung Tembaga*, karena kata *koper* = kuningan/tembaga, dan *berg* = gunung atau timbunan. Koperberg selain menjabat sebagai Sekretaris Java-Instituut juga Sekretaris Panitia Kongres dari tahun 1919 -1937. Sebagai Sekretaris Java-Instituut ia menerbitkan majalah kebudayaan dan bahasa. Dialah yang mengambil prakarsa untuk mendirikan Museum Sonobudoyo, di Yogyakarta yang koleksinya kebanyakan berasal dari Jawa, Sunda, Madura dan Bali.

Semasa hidupnya di Indonesia ia sangat akrab dengan banyak pemuka gerakan nasional di Indonesia, antara lain Ir. Soekarno, M. Husni Thamrin, dr. Soetomo, dr. Radjiman, H. Agus Salim, R.P. Soroso, Mr. Singgih, Soewardi Soerjaningrat, Muh. Hatta, dan Sjahrir. Setelah Indonesia merdeka ia masih tetap bekerja di Indonesia. Terakhir ia menjadi pegawai Museum Sonobudoyo dengan SK dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dengan SK. No. 5316, tanggal 7 Juni 1946. Tahun 1947 diangkat sebagai pegawai pada Dinas Purbakala dan tahun 1949 menjadi Kepala Dinas Perpustakaan pada Kementerian PP dan K.

Samuel Koperberg sangat serius untuk mengembangkan kebudayaan Jawa sebagai alat untuk memperkuat kepribadian Jawa. Menurut Koperberg kongres kebudayaan merupakan salah media untuk kebangunan kebudayaan dan menjadi unsur penting dalam renaisans orang Jawa. Selain itu, ia juga memiliki pendirian yang jelas tentang hubungan antara kebudayaan Barat dan Timur. Pendirian itu dituangkan dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada Sutan Sjahrir tertanggal 17 Agustus 1946, yang berbunyi sebagai berikut:

“Waktu saya menerbitkan majalah De Taak bersama J.E. Stokvis dan kemudian majalah Timbul bersama Mr. Singgih tujuan utama saya adalah kebangunan kebudayaan sebagai unsur penting dalam renaisans orang Jawa. Inilah pedoman

saya selama bekerja bagi Java-Instituut, majalah Jawa dan Museum Sonobudoyo. Mengenai nilai hasil pekerjaan itu orang dapat berselisih pendapat, namun saya tetap yakin bahwa di antara kebudayaan Indonesia lama dan alam pikiran orang Barat perlu ada kompromi.” (Jaap Erkelens, 2001: hal. 13).

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang disampaikan pada tahun 1937 dengan menyatakan: “...bah-wa untuk kemajuan hidup tumbuhnya kebudayaan diperlukan adanya hubungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain” (Ki Hadjar Dewantara, 1994: hal. 78). Alasan yang digunakan oleh Ki Hajar adalah karena bahan-bahan kebudayaan dari luar itu dapat diambil untuk “memperkembangkan (yakni memajukan) atau memperkaya (yakni menambah) kebudayaan sendiri”. Tetapi dengan syarat bahwa dalam berhubungan dengan kebudayaan asing itu harus “... diusahakan menjadi asimilasi, dalam arti ‘mengolah’ dan ‘memasak’ bahan baru tadi”. Pendapat inilah kemudian menjadi amat penting perannya karena dipilih untuk menjadi sebagian dari kalimat penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi:

“...dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Demikian gambaran sekilas tentang tema, pokok-pokok bahasan dan rumusan hasilnya mulai dari Kongres Kebudayaan tahun 1918 hingga tahun 2008. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara KK sebelum dan sesudah Indonesia ada hubungan yang mengalir sehingga tampak *benang merah* yang sambung menyambung. KK sesudah Indonesia merdeka pada hakikatnya adalah sambungan dari KK sebelum Indonesia merdeka.

B. Hubungan kongres kebudayaan dengan kongres lainnya

Berlangsungnya KK 1918 benar-benar telah menjadi motor penggerak bagi berlangsungnya KK berikutnya, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Selain KK, sebelum Indonesia merdeka pernah berlangsung Kongres Bahasa Jawa 3 kali (1924, 1926 dan 1929) serta Kongres Bahasa Sunda sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1924 dan 1926. Kongres Bahasa Indonesia sebelum Indonesia merdeka dilaksanakan tahun 1938 di Surakarta. Sama seperti KK, kongres kedua bahasa daerah dan Kongres Bahasa Indonesia 1938 itu juga menjadi motor penggerak bagi berlangsungnya Kongres Bahasa Jawa dan Kongres Bahasa Sunda serta bahasa Indonesia sesudah Indonesia merdeka.

Sampai dengan tahun 2013 telah berlangsung 15 kali KK, 142 kali kongres lain-lainnya (bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, sejarah, arkeologi, antropologi, kesenian, perpustakaan, perbukuan, ilmu pengetahuan, kebatinan dll) serta 64 kali konferensi kebudayaan. Jumlah seluruh kegiatan KK, kongres dan konferensi unsur kebudayaan sebanyak 221 kali. Jumlah aktivitas sebanyak itu menunjukkan tingginya semangat para pemangku kebudayaan untuk membicarakan miliknya dalam forum kongres dan konferensi. (lihat tabel 7 di bawah).

Tabel 7

**DAFTAR PENYELENGGARAAN KONGRES KEBUDAYAAN
DAN KONGRES-KONGRES LAINNYA 1918-2013**

Tahun	Nama Kegiatan	Tempat	Penyelenggara
1	2	3	4
1918	Kongres Kebudayaan (Jawa) I (<i>Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling</i>)	Surakarta	Panitia/Boedi Oetomo Cabang Solo
1919	Kongres Kebudayaan II (<i>Congres van het Java Instituut</i>)	Surakarta	Java Instituut
1921	Kongres Kebudayaan III (<i>Congres van het Java Instituut</i>)	Bandung	Java Instituut
1924	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kebudayaan IV (<i>Congres van het Java Instituut</i>) • Kongres Bahasa Jawa I • Kongres Bahasa Sunda I 	Yogyakarta Yogyakarta Bandung	Java Instituut Java Instituut Java Instituut
1926	Kongres Kebudayaan V (<i>Congres van het Java Instituut</i>)	Surabaya	Java Instituut
1927	Kongres Bahasa Jawa II	Yogyakarta	Java Instituut
1929	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kebudayaan VI (<i>Congres van het Java Instituut</i>) • Kongres Bahasa Jawa III 	Yogyakarta Surakarta	Java Instituut Java Instituut
1937	Kongres Kebudayaan VII (<i>Congres van het Java Instituut</i>) (<i>Congres van het Java Instituut</i>)	Bali	Java Instituut
1938	Kongres Bahasa Indonesia I	Surakarta	Panitia
1939	Konferensi Sastra Indonesia	Medan	Panitia
1948	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Kebudayaan • Kongres Kebudayaan Indonesia I 	Magelang Magelang	Pusat Kebudayaan Kedu dan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI); Pusat Kebudayaan Kedua, LKI dan Kemneterian PP dan K
1950	Konferensi Kebudayaan Indonesia I	Jakarta	LKI
1951	Kongres Kebudayaan Indonesia II	Bandung	Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN)

1952	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Bahasa Sunda • Konferensi Kebudayaan Indonesia II 	Bandung Jakarta	Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda (LBSS) Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)
1954	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kebudayaan Indonesia III • Kongres Bahasa Sunda (KBS) I • Kongres Bahasa Indonesia II 	Surakarta Bandung Medan	BMKN Panitia/Sejumlah Ahli Bahasa Sunda Panitia
1955	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kebatinan I • Konferensi Seni Tari 	Semarang Yogyakarta	Panitia/Perkumpulan Kebatinan Panitia
1956	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Bahasa Sunda (KBS) II • Kongres Kebatinan II 	Bandung Surakarta	LBSS Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI)
1957	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kebudayaan Indonesia IV • Kongres Sejarah I 	Bali Yogyakarta	BMKN Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)
1958	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Bahasa Sunda (KBS) III • Kongres Kebatinan III • Kongres Ilmu Pengetahuan I 	Bandung Jakarta Malang	LBSS BKKI Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI)
1959	Kongres Kebudayaan Rakyat I	Solo	Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA)
1960	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kebudayaan Indonesia V • Kongres Kebatinan IV • Kongres Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) II 	Bandung Malang Bandung	BMKN BKKI IKAPI
1961	Kongres Bahasa Sunda (KBS) IV	Bandung	LBSS
1962	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner I • Konferensi Nasional Kebudayaan Rakyat I • Kongres Ilmu Pengetahuan II 	Bali Yogyakarta	Lekra Lekra LIPI
1963	Kongres Kebatinan V	Surakarta	BKKI
1964	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Nasional Kebudayaan Rakyat II • Kongres Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) • Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner II 	Jakarta Jakarta Jakarta	Lekra Pendukung Manifes Kebudayaan Lekra
1965	Kongres Reog Ponorogo se-Indonesia	Ponorogo	Lekra
1970	Kongres Sejarah II	Yogyakarta	MSI

1977	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Arkeologi I • Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IKAPI) I 	Cibulan Jakarta	Sejumlah Ahli Arkeologi Sejumlah Pustakawan
1978	Kongres Bahasa Indonesia III	Jakarta	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (PUSBINBANGSA)
1979	Konferensi Internasional Linguistik Indonesia (KIMLI) I	Yogyakarta	Panitia/Sejumlah Ahli Linguistik
1980	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Arkeologi II • Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IKAPI) II 	? Denpasar	Ikatan Ahli Arkeologi (IAAI) Ikatan Perpustakaan Indonesia (IPI)
1981	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Bahasa Bali I • Kongres Sejarah III • Kongres Ilmu Pengetahuan III 	Denpasar Jakarta Jakarta	Panitia/Sejumlah Ahli Bahasa Bali MSI LIPI
1982	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Internasional Linguistik Indonesia (KIMLI) II • Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah 	Surakarta Jakarta	Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) PUSBINBANGSA
1983	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Bahasa Indonesia VI • Kongres Arkeologi III • Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IKAPI) III 	Jakarta Ciloto Yogyakarta	PUSBINBANGSA IAAI IPI
1985	Kongres Sejarah IV	Yogyakarta	MSI
1986	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Bahasa Bali II • Konferensi Internasional Linguistik Indonesia (KIMLI) III • Kongres Ilmu Pengetahuan IV • Kongres Arkeologi IV • Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia IV 	Bali Denpasar Jakarta ? Ujung Pandang	Panitia/Pemda Bali MLI LIPI IAAI IPI
1988	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Bahasa Indonesia V • Kongres Bahasa Sunda (KBS) V • Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) IV 	Jakarta Cipayung Makassar	PUSBINBANGSA LBSS MLI
1989	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Arkeologi V • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) I • Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IKAPI) (IKAPI) V 	Yogyakarta Denpasar Banjarmasin	IAAI Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) IPI

1990	• Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) II	Bandung	HISKI
	• Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) III ¹⁹	Malang	HISKI
1991	• Kongres Kebudayaan Indonesia VI	Jakarta	PUSBINBANGSA Panitia/Pemda Jateng, DIY dan Jatim
	• Kongres Bahasa Jawa (KBJ) I	Semarang	
	• Kongres Bahasa Bali III	Denpasar	Panitia/Pemda Bali
	• Kongres Sejarah V	Semarang	MSI
1992	• Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) V	Semarang	MLI
	• Kongres Ilmu Pengetahuan V	Jakarta	LIPI
1992	• Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IKAPI) VI	Padang	IPI
	• Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) IV	Bogor	HISKI
1993	• Kongres Bahasa Indonesia VI	Jakarta	PUSBINBANGSA LBSS HISKI
	• Kongres Bahasa Sunda (KBS) VI	Bandung	
	• Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) V	Yogyakarta	
1994	• Kongres Arkeologi VI	?	IAAI MLI
	• Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) VI	Palembang	
1995	• Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA) I	Salatiga	Tim Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (Tim BIPA)
	• Kongres Kesenian Indonesia (KKI) I	Jakarta	Direktorat Jenderal Kebudayaan (DITJENBUD)
	• Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IKAPI) VII	Jakarta	IPI
	• Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) VI	?	HISKI
1996	• Kongres Ilmu Pengetahuan IV	Jakarta	LIPI Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
	• Kongres Perbukuan Indonesia	?	
1996	• Kongres Arkeologi VII	Cipanas	IAAI MSI Panitia/Pemda Bali Panitia/Pemda Jateng, DIY dan Jatim
	• Kongres Sejarah VI	Jakarta	
	• Kongres Bahasa Bali IV	Denpasar	
	• Kongres Bahasa Jawa (KBJ) II	Malang	HISKI
	• Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) VII	?	Tim BIPA
	• Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA) II	Padang	Asosiasi Prehistorisi Indonesia (API)
• Kongres Asosiasi Prehistorisi Indonesia (API)	Yogyakarta		

1997	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) VIII • Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) VII 	Padang Surabaya	HISKI MLI
1998	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Bahasa Indonesia • Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IKAPI) VIII • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) IX 	Jakarta Bandung ?	PUSBINBANGSA IPI HISKI
1999	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) X • Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) VIII • Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA) III • Kongres Ilmu Pengetahuan V • Kongres Arkeologi VIII • Kongres Masyarakat Adat Nusantara (MAN) I 	? Jakarta Bandung Serpong, Tangerang Bali Jakarta	HISKI MLI BIPA LIPI IAAI Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
2000	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Cerita Pendek Indonesia (KCI) I • Konferensi Bahasa Daerah • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XI 	Yogyakarta Jakarta ?	? PUSBINBANGSA HISKI
2001	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Sejarah VII • Kongres Bahasa Bali V • Kongres Bahasa Jawa (KBJ) III • Kongres Bahasa Sunda (KBS) VII • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XII • Kongres Sastra Jawa (KSJ) I • Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA) IV • 8. Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIPBS) • 9. Kongres Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (AAEI) • 10. Kongres Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi (APPT) 	Jakarta Denpasar Yogyakarta Garut ? Surakarta Bali Bandung Malang UNS Surakarta	MSI Panitia/Pemda Bali Panitia/Pemda Jateng, DIY dan Jatim LBSS HISKI Para sastrawan bahasa Jawa BIPA Yayasan Budaya Sunda "RANCAGE" Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (AAEI) Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi (APPT)

2002	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) IX • Kongres Arkeologi IX • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XIII • Kongres Cerita Pendek Indonesia (KCI) II • Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) X • Kongres Bahasa Aceh I 	Batu, Jatim	IPI
		Kediri	IAAI
		?	HISKI
		Bali	?
		Denpasar	MLI
Banda Aceh	Panitia/Pemda Prov. Nangro Aceh Darussalam		
2003	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kebudayaan Indonesia • Kongres Bahasa Indonesia • Kongres Cerita Pendek Indonesia (KCI) III • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XIV • Kongres Ilmu Pengetahuan VIII • Kongres Masyarakat Adat Nusantara (MAN) I 	Bukittinggi	PUSBINBANGSA
		Jakarta	?
		Lampung	HISKI
		Solo	LIPI
		Jakarta	Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Lombok	?		
2004	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XV • Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA) V 	Manado	HISKI
		Makassar	Tim BIPA
2005	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kesenian Indonesia (KKI) II • Kongres Arkeologi X • Kongres Bahasa Sunda (KBS) VIII • Kongres Cerita Pendek Indonesia (KCI) IV • Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) XI • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XVI 	Jakarta	DITJENBUD
		Yogyakarta	IAAI
		Subang	LBSS
		Riau	?
		Padang	MLI
?	HISKI		

2006	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia X • Kongres Sejarah VIII • Kongres Sastra Jawa (KSJ) II • • Kongres Bahasa Bali (KBB) VI • Kongres Bahasa Jawa (KBJ) IV • • Kongres Kebudayaan Minangkabau (KBM) • Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA) VI • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XVII • Kongres Bahasa Tegal • • Kongres Kebudayaan Aceh 	<p>Bali</p> <p>?</p> <p>Semarang</p> <p>Denpasar Semarang</p> <p>Padang</p> <p>Serang/ Banten</p> <p>?</p> <p>Tegal, Jawa Tengah Banda Aceh</p>	<p>IPI</p> <p>MSI</p> <p>Para sastrawan bahasa Jawa Panitia/Pemda Bali Panitia/Pemda Jateng, DIY dan Jatim Panitia/Pemda Prov. Sumatera Barat Tim BIPA</p> <p>HISKI</p> <p>Panitia/Pemda Kabupaten Tegal BPR NAD-NIAS dan Aceh Culture Institute (ACI).</p>
2007	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Budaya Banjar (KBB) I • • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XVIII • Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) XII • Kongres Ilmu Pengetahuan IX • Kongres Kebudayaan Madura (KKM) • Kongres Bahasa Cirebon • • Kongres Bahasa Aceh II • • Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III • Kongres Cerita Pendek Indonesia (KCI) V • Kongres Bahasa Makassar • • Kongres Bahasa-bahasa Daerah Wilayah Barat 	<p>Banjarmasin</p> <p>?</p> <p>Surakarta</p> <p>Jakarta Sumenep, Madura Cirebon</p> <p>Banda Aceh</p> <p>Pontianak</p> <p>Banjarmasin</p> <p>Makassar</p> <p>Lampung</p>	<p>Panitia/Pemda Prov. Kalimantan Selatan</p> <p>HISKI</p> <p>MLI</p> <p>LIPI</p> <p>Panitia/Abdullah Said Institut</p> <p>Panitia/Pemda Kab. Cirebon Panitia/Pemda Prov. Nangro Aceh Darussalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Komunitas Cerpen Indonesia Pemda prov Sulsel dan Balai Bahasa Sulawesi Selatan Pemdaprov Lampung, Kantor Balai Bahasa Lampung dan Badan Pengembangan Bahasa</p>

2008	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kebudayaan Indonesia • • Kongres Bahasa Indonesia • Kongres Bahasa Madura • • Kongres Budaya Kalimantan Barat I • Kongres Kebudayaan Bali • Kongres Perpustakaan Digital Indonesia (KPDl) • Kongres Arkeologi XI • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XIX • Kongres Komunitas Sastra Indonesia (KKSIl) • Kongres Internasional Bahasa dan Adat Gorontalo I • Konferensi Tradisi Lisan 	<p>Bogor</p> <p>Jakarta Pamekasan, Madura Pontianak</p> <p>Denpasar Bali</p> <p>Surakarta HISKI</p> <p>Kudus, Jawa Tengah Gorontalo</p> <p>Wakatobi, Sulawesi Tenggara</p>	<p>Departemen Kebudayaan dan Pariwisata PUSBINBANGSA Panitia/Pemda Kabupaten se-Madura Panitia/Pemda Prov. Kalimantan Barat Panitia/Pemda Prov. Bali Perpustakaan Nasional</p> <p>IAAI HISKI</p> <p>Komunitas Sastra Indonesia (KSI) Pemdaprov Gorontalo dan Badan Pengembangan Bahasa Asosiasi Tradisi Lisan</p>
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) XI • Kongres Perpustakaan Digital Indonesia (KPDl) • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XX • Konferensi Internasional Budaya Bali Utara • Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) XIII • Konferensi Internasional Budaya Jawa (KIBJ) • Konferensi Internasional Budaya Daerah (KIBD) I • Kongres Pancasila I 	<p>Batam</p> <p>Jakarta</p> <p>?</p> <p>Singaraja</p> <p>Batu, Jatim</p> <p>Surakarta</p> <p>Yogyakarta</p> <p>Yogyakarta</p>	<p>IPI</p> <p>Perpustakaan Nasional</p> <p>HISKI</p> <p>Panitia/Pemda Kab. Buleleng MLI</p> <p>Panitia/Pemda Prov. Jawa Tengah Ikatan Dosen Budaya Daerah (IKADBUDI) UGM, Mahkamah Konstitusi</p>

2010	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Budaya Banjar (KBB) II • Kongres Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) XXI • Konferensi Internasional Bahasa Daerah (Sulawesi Tenggara) • Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA) VIII • Konferensi Internasional Budaya Renaissance • Konferensi Internasional Budaya Sunda Kuno • Kongres Pancasila II • Kongres Cerita Pendek Indonesia (KCI) VI • Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat II • Konferensi Tradisi Lisan 	<p>Banjarmasin</p> <p>Bandung</p> <p>?</p> <p>Bau-Bau</p> <p>Universitas Indonesia/ Depok, Bogor</p> <p>UNS Surakarta</p> <p>Bogor</p> <p>Bali</p> <p>Cisarua, Bogor</p> <p>Ketapang</p> <p>Bangka Belitung</p>	<p>Panitia/Pemda Prov. Kalimantan Selatan Perpustakaan Nasional</p> <p>HISKI</p> <p>Panitia/Pemda Prov. Sulawesi Tenggara BIPA</p> <p>Perpustakaan Nasional dan Universitas 11 Maret, Surakarta</p> <p>Panitia/Pemda Prov. Jawa Barat</p> <p>Universitas Udayana, UGM dan Mahkamah Konstitusi</p> <p>Komunitas Cerpen Indonesia</p> <p>Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisional (BPNST) Kalimantan Barat</p> <p>Asosiasi Tradisi Lisan</p>
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Kongres Kebudayaan Betawi • Kongres Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) • Kongres Arkeologi XII • Kongres Sejarah IX • Kongres Sastra Jawa (KSJ) III • Kongres Bahasa Jawa (KBJ) V • Kongres Bahasa Sunda (KBS) IX • Konferensi Internasional Kesusastraan (KIK) • Konferensi Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) XIV • Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIPBS) • Kongres Ilmu Pengetahuan X • Kongres Pancasila II • Kongres Komunitas Sastra Indonesia (KKSII) II. • Kongres Bahasa Kaili 	<p>Jakarta</p> <p>Samarinda</p> <p>Surabaya</p> <p>Jakarta</p> <p>Bojonegoro</p> <p>Surabaya</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>Bandung</p> <p>Bogor</p> <p>Jakarta</p> <p>Surabaya</p> <p>Bogor</p> <p>Palu, Sulawesi Tengah</p>	<p>Panitia/Pemda DKI Jakarta Perpustakaan Nasional</p> <p>IAAI</p> <p>MSI</p> <p>Para sastrawan bahasa Jawa</p> <p>Panitia/Pemda Jateng, DIY dan Jatim</p> <p>LBSS</p> <p>HISKI</p> <p>MLI</p> <p>Yayasan RANCAGE</p> <p>LIPI</p> <p>Unair, UGM, MPR, Mahkamah Konstitusi</p> <p>Komunitas Sastra Indonesia (KSI)</p> <p>Balai Bahasa Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Prov. Sulteng</p>

2012	• Konferensi Internasional Budaya Daerah (KIPBD) II	Bali	Ikatan Dosen Budaya Daerah (IKADBUDI) dan IKIP PGRI Bali.
	• Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV	Ternate	MAN
	• Kongres Diaspora Indonesia ("Congress of Indonesian Diaspora (CID)")	Los Angeles, California, AS	Kementerian Luar Negeri/ Kedubes Indonesia di AS
	• Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Yogyakarta	Pusat Studi Pancasila UGM
	• Kongres Pancasila IV	Yogyakarta	Pusat Studi Pancasila UGM bekerja sama dengan MPR-RI.
	• Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat III	Singkawang.	Balai Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisional.
	• Kongres Kebudayaan Pemuda	Jakarta	Kementerian Dikbud.
	• Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi	Surabaya	Kementerian Dikbud
	• Kongres Kebudayaan Madura	Sumenep/ Madura	Said Abdullah Institut dan Pemda seluruh kabupaten Madura
	• Konferensi Tradisi Lisan • Kongres Bahasa Makassar II	Tanjung Pinang Makassar	Asosiasi Tradisi Lisan Balai Bahasa Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pemda Prov. Sulawesi Selatan
2013	• Kongres Pancasila V	Kampus UGM Yogyakarta	Pusat Studi Pancasila UGM bekerja sama dengan MPR-RI.
	• Kongres Diasporan Indonesia II	Jakarta	Desk Diaspora Indonesia (DDI) Kemlu bekerja sama dengan Indonesian Diaspora Network (IDN)
Jumlah 221 kongres dan konferensi			

Dihimpun dari berbagai sumber:nunussupardi/8/2013

Selain didorong oleh penyelenggaraan KK sebelum Indonesia merdeka, makin berkembangnya kegiatan kongres atau konferensi kebudayaan dari kebudayaan suku bangsa juga didorong oleh perubahan sistem politik dan pemerintahan. Gerakan perubahan (reformasi) yang digulirkan tahun 1998 telah mengubah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Dari data yang terkumpul menunjukkan semangat berkongres dan berkonferensi di era reformasi semakin meningkat. Setelah otonomi daerah bergulir, banyak suku bangsa menyelenggarakan kongres atau konferensi kebudayaan daerah, antara lain: konferensi bahasa Sunda (2001), kebudayaan Jawa (2010), kongres kebudayaan Banjar (2007), kebudayaan

Madura (2007), kebudayaan Bali (2010), Minangkabau (2006), kongres Sastra Jawa (2001), kongres bahasa Aceh (2002), kongres kebudayaan Aceh (2006) bahasa Makassar (2007), bahasa Madura (2008) bahasa Cirebon (2007), bahasa Tegal (2006), bahasa Kaili (2011), dll.

Bila dihitung jumlah kongres dan konferensi kebudayaan sebelum reformasi dibandingkan dengan sesudah reformasi menunjukkan jumlah yang seimbang dan bahkan melampaui. Selama masa reformasi 2000-2013 telah berlangsung sebanyak 111 kali kongres dan konferensi, atau sebanyak 50,2% bila dibandingkan dengan seluruh kongres dan konferensi selama 95 tahun (1918-2013) yang berjumlah 221 kali. Seperti terlihat dalam tabel 8 di bawah ini volume kegiatan kongres dan konferensi selama 13 tahun, rata-rata setiap tahun telah diselenggarakan kongres dan konferensi sebanyak 8 kali. Suatu peningkatan volume yang sangat tajam bila dibandingkan dengan rata-rata setiap tahun sebelum reformasi. Jumlah itu kecenderungannya akan terus bertambah karena masing-masing suku bangsa yang belum menyelenggarakan kongres atau konferensi juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sama.

Tabel 8
**DATA JUMLAH KONGRES DAN KONFERENSI KEBUDAYAAN
MASA REFORMASI 2000-2012**

TAHUN	JUMLAH KONGRES/ KONFERENSI	KETERANGAN
2000	3 kali	
2001	10 kali	
2002	6 kali	
2003	6 kali	
2004	2 kali	
2005	6 kali	
2006	10 kali	
2007	11 kali	
2008	11 kali	
2009	8 kali	
2010	11 kali	
2011	14 kali	
2012	11 kali	
2013	2 kali(sementara)	
Jumlah	111 kali	

Dalam KK masalah kebudayaan daerah atau lokal sebenarnya telah masuk dalam agenda perbincangan. Tetapi sifatnya masih sangat umum masing-masing daerah atau suku bangsa menyelenggarakan forum sendiri dengan tujuan akan ditemukan

suatu formula pemajuan kebudayaan daerah yang lebih kongkret dan operasional. Reformasi telah membangkitkan semangat pada pemangku kebudayaan masing-masing suku bangsa merumuskan kembali konsep, kebijakan dan strategi untuk memajukannya. Seperti ditulis oleh Suara Merdeka, Kongres Kebudayaan tahun 2003 ternyata juga berkaitan erat dengan hasil rumusan Kongres Bahasa. Indikasinya, ada rumusan rekomendasi yang menyangkut kebahasaan. Mereka menganjurkan agar ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap baik pengembangan maupun pembakuan Bahasa Indonesia sebagai perwujudan daya cipta dan disiplin dalam berbahasa. (Suara Merdeka, 23/10/2003)



Pembukaan Kongres Bahasa Jawa V dengan pemukulan gong oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Dr. Soekarwo SH. Tampak Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Prof. Dr. Wiendu Nuryanti dan Ketua Panitia Kongres Bahasa Jawa V, Sekretaris Daerah Dr. Rasio.

BAB II

REALISASI HASIL KONGRES

Sebagaimana disinggung dalam Bab I, bagian yang paling penting untuk disimak dari seluruh perjalanan KK sebelum dan sesudah Indonesia merdeka adalah mengenai realisasi dari rekomendasi, kesepakatan atau keputusan kongres. Berbagai pendapat menyatakan, hasil-hasil kongres yang didapatkan dengan susah payah dan menghabiskan biaya yang tidak kecil itu akhir-akhir ini cenderung tidak memberikan manfaat yang berarti. Di samping dinilai hasil kongres kurang “membumi”, banyak yang berhenti pada keputusan atau rekomendasi saja. Tidak ada langkah realisasi yang kongkrit. Tidak ada evaluasi pelaksanaan keputusan dan tidak ada pula laporan pada kongres berikutnya.

Untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang tentang realisasi hasil kongres ada baiknya disimak beberapa bagian keputusan dan rekomendasi kongres yang telah dan belum direalisasikan mulai dari kongres tahun 1918 hingga 2008. Bila dilihat dari sisi rekomendasi tentang pembentukan lembaga dan realisasinya, hasilnya dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9
DAFTAR REKOMENDASI TENTANG KELEMBAGAAN
DARI KONGRES KEBUDAYAAN 1918-2008 DAN REALISASINYA
 (Tentang Kelembagaan dan Kepanitiaan)

No.	RUMUSAN HASIL/ REKOMENDASI	THN.	TINDAK LANJUT
1	2	3	4
1.	Perlu dibentuk Lembaga penelitian kebudayaan Jawa	1918	Berdiri Java-Instituut, tanggal 4 Agustus 1919
2.	Perlu didirikan Sekolah Kerajinan	1929 dan 1937	Berdiri Sekolah Kerajinan Tangan (Kunst Ambaacht School) tahun 1939

3.	Perlu didirikan Jurusan Sastra, Filsafat dan Budaya Timur	1929	Tahun 1940 dibuka Fakultas Sastra dan Filsafat (Faculteit der Letteren en Wijsbegeerten)
4.	Perlu didirikan Akademi Kesenian	1948	Berdiri antara lain ASRI, ASDRAFI, ATNI, ISI, STSI, IKJ, Konservatori
5.	Perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan sendiri	1948	Belum ada realisasinya
6.	Perlu didirikan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)	1948	Berdiri tahun 1948
7.	Perlu dibentuk Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN)	1951	Tahun 1951 berdiri BMKN, LKI ikut bergabung di dalam BMKN.
8.	Perlu didirikan Balai Penterjemah	1951	Belum ada realisasinya
9.	Perlu didirikan Pendidikan Penterjemah	1951	Di Universitas Nasional Jakarta
10.	Perlu didirikan Badan Penerbit Buku Kebudayaan	1951	Belum ada realisasinya
11.	Perlu didirikan Akademi Kesenian	1951	Berdiri antara lain ASRI, ASDRAFI, ATNI, IKJ, AMI.
12.	Balai Pustaka sebagai Badan Otonom	1951	Th. 1963 menjadi Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, th. 1985 menjadi Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka. Kini berubah menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara.
13.	Perlu didirikan Balai Bahasa	1951	Tahun 1947 telah berdiri Balai Bahasa di Bali, 1952 di Yogyakarta dan 1953 di Makassar, kemudian disusul dengan Balai-balai yang lain
14.	Perlu didirikan Museum Kesenian	1951	Galeri Nasional, tahun 1998 dan banyak Museum Seni Rupa (Pribadi)
15.	Perlu dibentuk Badan Pengarah Film (di daerah-daerah)	1951	Dibentuk Badan Pengarah Film Daerah
16.	Perlu didirikan Kantor Urusan Film (di bawah Kementerian PP dan K)	1951	Tahun 1951 dibentuk Panitia Sensor Film berada di bawah Dep. PP dan K. Tahun 1964 pindah ke Dep. Penerangan.

17.	Perlu dibentuk Badan Sensor Film	1951	Tahun 1965 Panitia Sensor Film berubah menjadi Badan Sensor Film (BSF) dan tahun 1994 berubah lagi menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). Tahun 1999 sekretariat LSF pindah ke Depdiknas, dan mulai 2001 di bawah BP BUDPAR.
18.	Perlu didirikan Gedung-gedung Bioskop	1951	Pihak swasta telah membangun berbagai gedung bioskop di berbagai tempat
19.	Perlu didirikan Balai Budaya/Gedung-gedung Kesenian	1954	Telah berdiri Taman Budaya di seluruh provinsi
20.	Perlu dibentuk Panitia Sejarah Nasional	1954	Telah dibentuk Panitia Nasional dan menghasilkan Buku Sejarah Nasional Indonesia (7 jilid) dan sejumlah Kongres Sejarah.
21.	Perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Lektur dan Film	1954	
22.	Perlu didirikan Biro Penterjemah	1954	Belum direalisasikan
23.	Perlu dibentuk Panitia Penyelidikan Buku-Buku lama tentang Filsafat	1954	
24.	Perlu diselenggarakan Pekan Raya Kebudayaan	1954	Berdiri Dewan Pekan Raya dan Exhibisi Indonesia Pusat (DEXIP). Telah diselenggarakan Pekan Raya Jakarta (kini menjadi Jakarta Fair) dan berbagai festival, pameran, pertunjukan seni, tingkat nasional dan internasional.
25.	Perlu dibentuk Jawatan Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1954	Sebelum berlaku Otonomi Daerah, di setiap Kabupaten/Kotamadia berdiri Seksi Kebudayaan dan di tingkat Kecamatan Penilik Kebudayaan.
26.	Perlu didirikan Lembaga Film dan Perpustakaan Lektur Film	1954	Berdirinya lembaga Sinematek
27.	Perlu dibentuk Panitia Sensor	1954	Dibentuk Badan Sensor Film, sekarang Lembaga Sensor Film
28.	Perlu didirikan Dewan Pertimbangan Siaran Radio	1954	Dibentuk Dewan Pertimbangan Siaran Radio

29.	Perlu didirikan Pendidikan Tinggi Kesenian	1954	Berdiri antara lain ASRI (ISI Yogyakarta), ASDRAFI, ATNI, IKJ, AMI, STSI
30.	Perlu didirikan Konservatori Seni Daerah	1954	Telah berdiri di beberapa daerah (Surakarta, Medan, Padang Panjang, Bali)
31.	Perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Kota	1954	Belum seluruh daerah merealisasikan
32.	Perlu didirikan Sanggar-sanggar, museum, gedung pertunjukan, balai budaya, Taman-taman Kebudayaan (untuk anak-anak dan rekreasi)	1954	Telah berdiri berbagai sanggar sampai ke desa-desa, telah berdiri museum, taman budaya dan tempat-tempat hiburan dan rekreasi serta perpustakaan
33.	Perlu diselenggarakan Pekan Kesenian	1954	Telah diselenggarakan berbagai macam pameran, pertunjukan dan festival seni di berbagai tempat dan tingkat nasional.
34.	Perlu dibentuk Pusat Informasi Budaya	1991	Telah dirintis Sistem Informasi Kebudayaan (SIK)
35.	Perlu dibentuk Unit Misi Kebudayaan/Pertukaran Budaya	1991	Belum direalisasikan.
36.	Perlu didirikan Lembaga Penterjemah	1991	Belum direalisasikan
37.	Perlu dibentuk Departemen Kebudayaan tersendiri	2003	Belum direalisasikan
35.	Perlu dibentuk Pusat Budaya Nasional	2003	Belum direalisasikan.
36.	Perlu dibentuk lembaga antarkongres yang independen	2003	Sudah dibentuk <i>Badan Pekerja Kongres Kebudayaan</i> berdasarkan Kep. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.27/UM.001/MKP/04, tanggal 19 Mei 2004, tetapi belum melakukan kegiatan yang kongkrit.
37.	Perlu dibentuk lembaga pendorongan kedermawanan (philanthropy)	2003	Belum direalisasikan
38.	Perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri	2008	Belum direalisasikan meskipun sudah diusulkan sejak Desember 1945 hingga sekarang

Dari tabel di atas, diperoleh gambaran seberapa besar perhatian untuk merealisasikan hasil-hasil kongres. Untuk sekedar contoh, dalam bidang kelembagaan dan kepanitiaan, beberapa usul sudah mendapatkan tindak lanjut, tetapi juga masih cukup banyak yang belum terwujud. Meskipun jarak waktu penyelenggaraan KK

sebelum Indonesia merdeka relatif pendek (antara 2-3 tahun saja), tetapi hampir semua keputusan itu langsung direalisasikan dan dilaporkan hasilnya pada kongres berikutnya.

Demikian pula halnya dengan KK tahun 1948, 1951, dan 1954, keputusan dari masing-masing tahun langsung ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan pada kongres berikutnya. Sementara mengenai hasil KK 1957 dan 1960 karena perdebatan yang terjadi dilandasi oleh perbedaan ideologi, maka setelah kongres selesai bukan bersama-sama merealisasikan hasil keputusan kongres melainkan menjadikannya sebagai bahan polemik yang berkepanjangan. Perdebatan tentang Manifesto Politik (Manipol) antara kelompok humanis sosialis dengan kelompok humanis universal dan kelompok netral yang mulai muncul tahun KK 1957 dan memanas dalam KK 1960, dilanjutkan dalam berbagai kesempatan. Serangan terhadap kelompok dengan kelompok humanis universal dan kelompok netral mencapai puncaknya ketika Manifes Kebudayaan (Manikebu) tahun 1963 dan penyelenggaraan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia tahun 1964. Serangan habis-habisan itu membuahkan hasil dengan dilarangnya Manikebu.

Kecenderungan menurunnya perhatian terhadap hasil kongres mulai tampak setelah KK tahun 1991, disambung dengan KK 2008. Hasil ketiga kongres itu tidak banyak berpengaruh banyak pada bentuk kebijakan di bidang kebudayaan, meskipun tujuan diselenggarakannya kongres adalah untuk mendapatkan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan. Meskipun Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah membentuk Badan Pekerja Kongres namun badan ini tidak dapat berbuat banyak. Sebagai contoh, hasil kongres 2003 yang seharusnya segera dilaporkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, namun dalam kenyataan rencana aksi itu tidak pernah dilaksanakan. Demikian pula dengan hasil KK 2008, dalam hal *Kelembagaan* kongres merekomendasikan untuk "*Mewujudkan terbentuknya Departemen Kebudayaan*". Rekomendasi itu ditujukan kepada para pengambil keputusan, dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam *Jumpa Pers*, seperti yang dikutip oleh Kompas, ketika ditanya mengenai pembentukan Departemen Kebudayaan tersendiri Menbudpar Jero Wacik mengatakan, pembentukan departemen merupakan hak prerogratif presiden. Perubahan dari kementerian negara menjadi departemen, menurut dia, setidaknya telah menunjukkan komitmen untuk lebih memerhatikan kebudayaan. Dalam kenyataan, meskipun setelah KK 2008 lahir UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan bidang kebudayaan mendapatkan peluang untuk menjadi sebuah departemen tersendiri, peluang itu tidak dapat diwujudkan. Dalam susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II bidang kebudayaan tetap digabungkan dengan pariwisata.

Dari tabel di atas dapat kita simak, dari beberapa rekomendasi kongres yang berkenaan dengan pembentukan lembaga ada yang secara cepat direalisasikan dan ada yang hingga kini belum terwujud. Dalam KK pertama tahun 1918 diusulkan agar dibentuk lembaga penelitian kebudayaan, dan akhirnya usul tersebut diterima dan menjadi salah satu keputusan kongres. Beberapa bulan setelah kongres usul tersebut langsung ditindaklanjuti. Pada tanggal 4 Agustus 1919, berdirilah Java-Instituut. AD-ART Java Instituut disahkan oleh Gubernur Jenderal melalui surat keputusan No. 75 tanggal 17 Desember 1919 dan memiliki masa hidup 29 tahun. Pendirinya antara lain Pangeran Prangwadono, Dr. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, dan Dr. FDK. Bosch.

Lembaga inilah yang selanjutnya melaksanakan keputusan hasil kongres termasuk menyelenggarakan kongres-kongres berikutnya.

Mengenai pendirian sekolah kerajinan dalam KK 1921 dan 1926 telah dijadikan pokok bahasan. Selanjutnya, dalam KK tahun 1929 dan 1937 masalah pengembangan seni kerajinan mendapatkan perhatian peserta kongres kongres. Kongres mengusulkan agar didirikan lembaga pendidikan untuk menampung anak-anak berbakat di bidang seni kerajinan. Pada tahun 1939 berdirilah sekolah kerajinan (*Kunst Ambachtsschool*) di Yogyakarta. Peresmianya baru berlangsung tanggal 1 Maret 1941. Pelindung sekolah ini adalah KGPAA. Praboe Soerjadilaga, yang kemudian menjadi Paku Alam VIII, di samping menjabat sebagai anggota Dewan Pengurus Java Instituut. Gedung sekolah ini terletak di belakang Museum Sonobudoyo. Yang menarik, bahasa pengantar di sekolah ini adalah Bahasa Indonesia.

Masih mengenai pendidikan seni, pada kongres 1948 diusulkan agar didirikan akademi dan lembaga-lembaga pendidikan seni termasuk seni kerajinan. Sebagai realisasi dari keputusan itu lahirlah Sekolah Menengah Kerajinan Indonesia (SMKI), Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI), Konservatori Karawitan (Kokar), Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), Akademi Tari Nasional Indonesia (ATNI), Akademi Seni Drama, dan Film Indonesia (ASDRAFI), hingga berdirinya Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Institut Seni Indonesia (ISI) dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ).



Pelajaran menggambar di Kunst Ambachtsschool (KAS)
Foto: Ir. Soepardi (Java Instituut Dalam Foto)

Pendiri ASRI yakni J Katamsi adalah satu guru yang mengajar di Kunst *Ambachtsschool*. Di samping itu juga banyak berdiri kursus-kursus, padepokan atau sanggar kebudayaan/seni di masyarakat yang banyak membantu peningkatan

kemampuan pendukung kebudayaan. Sementara itu mengenai usul agar didirikan jurusan untuk studi sastra, filsafat dan budaya Timur pada KK sebelum Indonesia merdeka direalisasikan dalam bentuk pendirian dibuka Fakultas Sastra dan Filsafat (*Faculteit der Letteren en Wijsbegeerten*) tahun 1940. Setelah Indonesia merdeka tuntutan agar didirikan jurusan-jurusan bahasa, sastra, filsafat, sejarah, budaya di berbagai perguruan tinggi langsung dipenuhi dan kini telah berdiri jurusan-jurusan tersebut di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.



Pelajaran mengukir perak di Kunst Ambachtsschool (KAS)
Foto: Ir. Soepardi (Java Instituut Dalam Foto)

Di samping usul dibentuknya lembaga-lembaga pendidikan kesenian, juga diusulkan lembaga yang mengurus kebudayaan. Dalam KK 1948 diusulkan agar dibentuk lembaga kebudayaan, yang secara independen mengurus pengembangan kebudayaan bangsa. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya peserta menyepakati untuk dibentuk Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Sebagai Ketua sementara ditunjuk Mr. Wongsonegoro dan sebagai Wakil Ketua dari angkatan muda ditunjuk Dr. Abu Hanifah. Tugas ketua sementara adalah menyelenggarakan rapat khusus untuk menyelesaikan naskah Anggaran Dasar yang belum tuntas dibahas di dalam kongres dan menjangkau tanggapan dan masukan dari peserta serta melengkapi nama-nama pengurus LKI.

Dalam tempo dua bulan, Anggaran Dasar dan susunan pengurus definitif Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) dapat diselesaikan. Yang ditetapkan sebagai Ketua: Dr. Bahder Djohan, dan Penulis Umum: Suratno Sastroamidjojo. Dalam penjelasannya Bahder Djohan selaku ketua LKI definitif menyatakan bahwa peresmian berdirinya organisasi LKI itu pada tanggal 1 Januari 1949 di Yogyakarta. Tetapi karena situasi keamanan kota Yogyakarta sebagai Ibukota Republik pada saat itu sedang dalam pendudukan

Belanda, maka rencana itu gagal. Akhirnya LKI baru dapat berdiri secara resmi setahun kemudian, yakni pada tanggal 9 Maret 1950 di Jakarta.

Setelah organisasi LKI secara resmi berdiri, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan penyelenggaraan KK tahun 1951 di Bandung. Dalam kongres ini diputuskan untuk membentuk *Panitia Kesimpulan* dengan tugas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Kongres selesai, memajukan kesimpulan-kesimpulan kepada semua organisasi Kebudayaan/Kesenian, baik yang turut serta dalam Kongres di Bandung, maupun yang tidak sempat datang untuk dipertimbangkan, melalui Pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima kesimpulan-kesimpulan itu, organisasi tersebut diminta supaya menyatakan pendapatnya terhadap kesimpulan-kesimpulan itu. Kemudian 6 (enam) bulan setelah Kongres selesai, yakni pada tanggal 11 Oktober 1951, Pengurus Lembaga Kebudayaan Indo-nesia diminta mengusahakan *Konferensi* guna membicarakan dan mengambil putusan tentang kesimpulan-kesimpulan itu, dan kemudian membentuk pengurus baru, (dalam konferensi itu hendaknya diundang semua organisasi Kebudayaan/Kesenian ini di seluruh Indonesia, baik yang menyetujuinya).

Berdasarkan rekomendasi kongres di atas, Panitia Kesimpulan segera melaksanakan tugas dan hasilnya segera disampaikan kepada peserta kongres. Enam bulan kemudian, yakni tanggal 12-14 April seharusnya diselenggarakan Konferensi Kebudayaan, namun ternyata baru dapat diselenggarakan pada tanggal 14 April 1952. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kongres di Bandung, peserta Konferensi dengan suara bulat memutuskan berdirinya Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN). Dengan berdirinya badan baru itu, pada tanggal 12 Mei 1952, keberadaan LKI yang dibentuk berdasarkan rekomendasi KK 1948 mengambil keputusan untuk meleburkan diri ke dalam BMKN. Penetapan BMKN sebagai badan hukum berdasarkan pada Ketetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Agustus 1952, No. JA.5/109/10.

Menarik untuk dicatat adalah tentang latar belakang lahirnya BMKN yang memiliki banyak kemiripan dengan berdirinya Java-Instituut. Masalah kelembagaan kebudayaan pada KK tahun 1951 menjadi bahan perdebatan yang cukup serius, karena para peserta sadar untuk mengurus kebudayaan diperlukan wadah organisasi yang tepat. Secara khusus dibentuk sidang untuk membahas hal itu. Dalam makalahnya Mohammad Yamin menyampaikan 6 dalil (pokok pikiran), mengenai lembaga kebudayaan. Menurut Yamin ada 3 bentuk kelembagaan yang mengurus kebudayaan.

Pertama adalah yang diterapkan di negara-negara demokrasi totaliter (komunis) seperti yang berlaku di Rusia. Urusan pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Hasilnya seperti dapat disaksikan, kebudayaan Rusia mengagumkan banyak bangsa.

Bentuk *kedua* adalah yang diterapkan di negara-negara nasional-demokratis (liberal) seperti di Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Urusan pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dipecah menjadi dua bagian, yaitu oleh pemerintah dan sebagian besar ditangani oleh lembaga yang berkembang di masyarakat. Hasilnya, semua bangsa juga mengakui karya budaya mereka sangat mengagumkan.

Bentuk *ketiga* adalah yang berlaku di Indonesia. Menurut Yamin setelah memperhatikan kondisi negara Indonesia yang pluralis, multikultur, beranekaragaman

agama, serta memperhitungkan pengaruh internasional dan taraf kemajuan, maka pemeliharaan kebudayaan dalam negara RI lebih tepat apabila dilaksanakan oleh 3 model atau bentuk kelembagaan, yaitu: (1) dilakukan oleh kelembagaan pemerintah; (2) dilakukan oleh kelembagaan di masyarakat; dan (3) dilakukan oleh lembaga campuran antara masyarakat dan pemerintah. (Majalah Indonesia No. 1-2-3, Tahun III, hal. 414-415).

Bertolak dari pendapat Yamin, kongres mengusulkan agar dibentuk lembaga kebudayaan baru pengganti LKI. Setelah melalui Konferensi Kebudayaan dibentuklah BMKN. Badan baru itu dapat memulai aktivitasnya dengan menggunakan pegawai, kantor sekretariat, perlengkapan dan keuangan yang dimiliki LKI setelah mendapat persetujuan Menteri PP dan K. Sebagai bentuk badan hukum, BMKN memilih bentuk perkumpulan, dengan berazaskan 'kerakyatan dan kebebasan'. Sebagai sebuah perkumpulan, BMKN bersifat sebagai penghubung dan mengkoordinasikan usaha-usaha organisasi-organisasi dan orang-seorang di bidang kebudayaan. Tujuannya ialah untuk membangun dan mengembangkan kebudayaan nasional yang merupakan getaran dan pancaran jiwa rakyat Indonesia, yang hidup, tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya dan organis dalam masyarakat dan sejarah rakyat Indonesia. Menurut catatan BMKN, kondisi sampai dengan tanggal 19 November 1954 jumlah anggota perorangan 181 orang dan organisasi/lembaga sebanyak 257 organisasi.

Sayang, prestasi BMKN tidak secerah Java-Instituut yang berhasil menyelenggarakan Kongres Kebudayaan sebanyak 6 kali, sementara BMKN hanya tiga kali saja, yaitu Kongres Kebudayaan tahun 1954, 1957 dan 1960. Java-Instituut bubar demi hukum pada tanggal 4 Agustus 1948 setelah berusia 29 tahun, sementara BMKN secara pelan-pelan menjadi tak berdaya dan kini hanya tinggal nama.

Selain rekomendasi tentang perlu dibentuknya BMKN, juga diusulkan berdirinya berbagai lembaga kebudayaan yang lain. Dalam KK 1951 diusulkan lembaga-lembaga seperti: Balai Penterjemah, Pendidikan Penterjemah Badan Penerbit Buku Kebudayaan, Akademi Kesenian, Balai Pustaka sebagai Badan Otonom, Balai Bahasa, Museum Kesenian, Badan Sensor Film, dan Gedung-gedung Bioskop. Dalam KK 1954 diusulkan lembaga-lembaga: Balai Budaya/Gedung-gedung Kesenian, Panitia Sejarah Nasional, Biro Penterjemah, dibentuk Panitia Penyelidikan Buku-Buku lama tentang Filsafat, Pekan Raya Kebudayaan, Jawatan Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Dewan Pertimbangan Siaran Radio, Pendidikan Tinggi Kesenian, Konservatori Seni Daerah, Dewan Pertimbangan Kota, Sanggar-sanggar, Museum, Gedung Pertunjukan, Balai Budaya, Taman-taman Kebudayaan, Pekan Kesenian (1954). Sementara itu, dalam KK 1991 diusulkan berdirinya: Pusat Informasi Budaya, Unit Misi Kebudayaan/Pertukaran Budaya, dan Lembaga Penterjemah, sedangkan dalam KK 2003 diusulkan berdirinya: Pusat Budaya Nasional, lembaga antarkongres yang independen lembagaendorongan kedermawanan (*philantrophy*).

Dari sekian banyak rekomendasi seperti tersebut di atas hampir semua telah direalisasikan. Seiring dengan perkembangan organisasi pemerintahan, lembaga-lembaga yang didirikan antara lain: Museum (pemerintah/negeri maupun swasta), Galeri Nasional di Jakarta, Taman Budaya (TB), Perpustakaan Nasional dan Daerah, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Balai Bahasa, Balai Penelitian Arkeologi (BALAR), Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST), Balai Studi dan Konservasi,

Lembaga Sensor Film (LSF), lembaga pendidikan seni di berbagai jejang pendidikan. Di samping itu juga berkembang lembaga kebudayaan dan kesenian di masyarakat. Daftar lembaga kebudayaan di pemerintahan maupun di masyarakat dapat dilihat pada lampiran (Lampiran No. 10 sampai dengan 17).

Di samping itu juga dilampirkan daftar Kerja Sama Kebudayaan (*Cultural Agreement*) dengan Negara-negara sahabat dan pendirian Atase Pendidikan dan Kebudayaan di beberapa Negara. Sayang, pembentukan Atase Kebudayaan sebagai realisasi dari Konferensi Kebudayaan tahun 1952, kini telah dibubarkan. Nama Atase Pendidikan dan Kebudayaan sekarang diganti menjadi Atase Pendidikan saja. (lihat Lampiran Tabel 18).

Satu-satunya rekomendasi kongres yang telah berulang kali diusulkan tetapi belum mendapatkan perhatian adalah mengenai pembentukan Departemen Kebudayaan tersendiri. Usul ini sesungguhnya telah muncul pada KK tahun 1948. Bahkan jauh sebelum KK 1948, dalam Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi tanggal 31 Desember 1945 juga diusulkan agar dibentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri. Dalam KK 2003 di Bukittinggi dan Kongres Kesenian Indonesia II tahun 2005, usul pembentukan Departemen Kebudayaan diangkat lagi. Usul pembentukan lembaga Pemerintah yang menangani kebudayaan setingkat Menteri bagi sebuah negara yang terdiri atas 483 suku bangsa dan masing-masing memiliki budaya yang beranekaragam, dinilai cukup rasional di samping peran kebudayaan yang amat besar dalam memajukan persatuan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945.

Sebagaimana diketahui, kebudayaan bersatu dengan bidang pendidikan dalam waktu yang cukup panjang, selama 55 tahun. Semula bidang kebudayaan bernaung dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian Pengajaran 1945-1948, dan Kementerian PP dan K, 1948-1964) kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kementerian PD dan K, 1964-1966). Ketika diadakan penataan organisasi pada tahun 1966, kebudayaan bernaung dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud, 1966-1999), kemudian Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 1999-2000). Mulai awal tahun 2000 kebudayaan bergabung dengan Pariwisata, menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Departemen ini baru berjalan beberapa bulan diganti menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Meneg Budpar) yang mempunyai misi menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Di samping itu dibentuk satu lembaga yang lain yaitu Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP BUDPAR), yang mempunyai misi melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang digariskan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Tetapi belum berusia 2 tahun berdasarkan Keputusan Presiden No. 29, 30, 31, dan 32 tanggal 26 Mei 2003 BP BUDPAR yang menangani kegiatan operasional kebudayaan dibubarkan.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, status Kementerian Kebudayaan berubah lagi menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan sering terjadinya perubahan bentuk kelembagaan itu telah memberikan pengalaman yang amat berharga bagi para pengelola kebudayaan, sehingga sampai pada pemikiran tentang perlunya penataan kembali posisi (reposisi) kelembagaan kebudayaan. Ketidakstabilan lembaga pastilah akan membawa dampak yang kurang baik bagi kinerja lembaga dan bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri. Oleh karena sudah saatnya kebudayaan dapat berdiri secara

mandiri dalam kelembagaan Pemerintah.

Tetapi mengapa usul tersebut tidak mendapatkan perhatian? Bukankah KK merupakan forum puncak dan terhormat, dihadiri oleh para pemilik kebudayaan, seniman, budayawan, cendekiawan, wartawan, pemangku adat yang patut didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya? Bukankah kongres itu berlangsung atas inisiatif pemerintah dan juga dihadiri oleh para wakil rakyat dan pengambil keputusan?

Bukti lain mengenai kesungguhan dalam merealisasikan hasil KK selain KK 1991 dan 2003 adalah dalam pemenuhan usul agar dibentuk Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (KK 1954). Sebagai realisasi Badan Pekerja BMKN ditambah dengan Achdiat Kartamihardja, M.A. Salmun, Anas Ma'ruf dan S. Dharta untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Masyarakat. Akhirnya, Undang-undang itu menjadi kenyataan setelah ditetapkannya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada masa Reformasi, diusulkan untuk diamandemen, dan telah mendapatkan pengesahan, yaitu menjadi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, mengenai usul kenaikan anggaran mendapatkan tanggapan dari Dewan Perancang Pembangunan Nasional (Depernas). Dalam Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I 1961-1969, dalam Lampiran C anggaran Kementerian PP dan K ditetapkan sebesar 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayang, persetujuan tersebut belum terwujud karena kondisi keuangan pada saat itu belum memungkinkan, di samping kondisi politik pemerintahan sedang mengalami goncangan.

Usul agar anggaran pendidikan dinaikkan muncul lagi pada masa Reformasi, dan kini tersebut telah menjadi kenyataan, yaitu dengan dicantumkannya anggaran sebesar 20% dari APBN dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 hasil Amandemen. Bunyi kalimat penetapan itu adalah sebagai berikut:

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapat dan belanja Negara serta anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Untuk bidang kebudayaan Depernas dalam membuat rancangan pembangunan sangat memperhatikan hasil-hasil kongres atau konferensi kebudayaan sebagai bahan masukan. Besarnya perhatian itu terlihat dalam kebijakan pembangunan di bidang Kebudayaan yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Dalam Bab II KETENTUAN UMUM, Bidang Mental/ Agama/Kerohanian/ Penelitian, dan di dalam butir 6 disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesenian adalah: *“Mengusahakan agar segala bentuk dan perwujudan kesenian menjadi milik seluruh rakyat dan menyiarkan sifat-sifat nasional.”* Sedangkan pada bagian program, dalam pembangunan 1961-1969, khusus untuk bidang kebudayaan sasaran yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

*“Pembangunan semesta di bidang kebudayaan dititikberatkan pada:
(1) Proyek-proyek yang dapat menggerakkan kegiatan-kegiatan kebudayaan secara massal di seluruh Indo-nesia; (2) Melindungi kebudayaan nasional*

terhadap pengaruh kebudayaan asing yang merusak kepribadian Indonesia; (3) Pusat konsentrasi kekuatan kebudayaan nasional, ialah: desa, sekolah, pabrik, angkatan bersenjata dan lain sebagainya; (4) Pembangunan kebudayaan harus diselenggarakan dalam rangka nation and character building; (5) proyek-proyek urgen meliputi: (a) seni suara/musik; (b) senitari; (c) sandi-wara/senidrama; (d) perpustakaan/kesusasteraan; (e) film; (f) taman-kebudayaan (museum/ national artgallery) – rakyat sedikit-sedikitnya sebuah di tiap ibu kota Daswati I; (g) perundang-undangan musik, sastera, dan sebagainya; (h) film: Film bukan semata-mata barang dagangan, melainkan alat pendidikan dan penerangan. Dalam impor film perlu ditentukan keseimbangan, sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Film Indonesia perlu dilindungi dari persiangan dengan luar negeri. Hanya dengan demikian ia terjamin dalam kemajuan dan perkembangannya.”

Selanjutnya mengenai uraian dari seluruh program ke dalam proyek pembangunan tahun 1961-1969, bidang kebudayaan ditempatkan pada Lampiran A, yang berarti menempati urutan pertama, baru disusul bidang lain (bidang Pendidikan Lampiran C). Adapun proyek-proyek bidang kebudayaan yang telah dimasukkan dalam perencanaan beserta jumlah anggarannya adalah: (1) Penggalan kekayaan kebudayaan (Nias, Kalimantan Tengah, Toraja, Flores, Maluku) dengan kode: AA.1, jumlah anggaran Rp. 50.000.000,00; (2) Proyek Museum Nasional, dengan kode: AA.2, jumlah anggaran Rp. 313.000.000,00; (3) Galeri Kesenian Nasional, dengan kode: AA.3, jumlah anggaran Rp. 469.000.000,00; (4) Perpustakaan Nasional, dengan kode: AA.4, jumlah anggaran Rp. 453.000.000,00; (5) Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan, dengan kode: AA.5, jumlah anggaran Rp. 44.000.000,00; (6) Taman Kebudayaan, dengan kode: AA.6, jumlah anggaran Rp. 110.000.000,00; (7) Terjemahan Kitab Suci Al Qur’an, dengan kode: AA.7, jumlah anggaran Rp. 62.000.000,00; (8) Terjemahan Kitab Suci Bybel, dengan kode: AA.8, jumlah anggaran Rp. 33.000.000,00; (10) Terjemahan Kitab Suci Weda dan Dharma Padda, dengan kode: AA.9, jumlah anggaran Rp. 20.000.000,00.

Di samping ada beberapa proyek yang dikategorikan sebagai Proyek Cadangan, yaitu proyek-proyek: (1) Teater Nasional; (2) Konservatorium Nasional; (3) Sirkus Nasional; (4) Cagar Alam dan Taman Margasatwa; (5) Perpustakaan Desa. Pelaksanaan semua rencana itu baru berjalan beberapa tahun dan dari sekian banyak program hanya beberapa program saja yang dapat dilaksanakan karena terbatasnya dana. Program pembangunan kemudian terhenti sama sekali karena meletus peristiwa G30S/PKI, yang mengakibatkan terjadi perubahan pimpinan pemerintahan. Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, dan kebijakan pembangunan nasional mengalami perubahan pula.

Uraian di atas baru menggambarkan sedikit dari realisasi hasil kongres, baik yang sudah maupun yang belum. Uraian baru menyentuh masalah pembentukan kelembagaan saja. Sementara berbagai keputusan atau kesimpulan yang berkaitan dengan upaya kebijakan dan strategi pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan belum diuraikan. Pada bagian ini banyak yang belum direalisasikan terutama hasil kongres 1991, 2003 dan 2008. Dalam KK 2008 ada 2 rekomendasi yang penting untuk ditindaklanjuti. *Pertama*, tentang pembentukan Departemen Kebudayaan tersendiri. Meskipun dalam Jumpa Pers ketika ditanya mengenai pembentukan

Departemen Kebudayaan tersendiri Jero Wacik mengatakan, pembentukan departemen merupakan hak prerogratif presiden. Perubahan dari kementerian negara menjadi departemen, menurut Jero Wacik setidaknya telah menunjukkan komitmen untuk lebih memerhatikan kebudayaan. Hasil rekomendasi itu sendiri akan dibawa ke Presiden. Tetapi ketika pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II hal prerogratif presiden tersebut juga belum dimanfaatkan.

Tahun 2011, pada saat pengumuman susunan kabinet *reshuffle* muncul nomenklatur kementerian baru, yakni dibentuknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu, dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan munculnya nomenklatur baru itu maka bidang kebudayaan yang telah 11 tahun digabungkan dengan bidang pariwisata, disatukan kembali dengan pendidikan. Penyatuan kembali ini menunjukkan “eksperimen penggabungan” itu gagal, dan oleh sebab itu dirujuk kembali dengan bidang pendidikan. Antara kebudayaan dengan pendidikan dan sebaliknya, memang ditakdirkan memiliki hubungan yang amat dekat. Keduanya saling memerlukan. Dengan nomenklatur baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berarti kembali pada konsep awal seperti yang dirancang oleh para pendiri bangsa dengan menempatkan Pasal 31 tentang pendidikan berdampingan dengan Pasal 32 tentang kebudayaan di dalam UUD 1945.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian semua pihak untuk merealisasikan keputusan dan rekomendasi KK mulai tahun KK tahun 1991 perhatian itu cenderung menurun. Berbagai pendapat menyatakan, hasil-hasil kongres yang diselenggarakan akhir-akhir ini yang didapatkan dengan susah payah dan menghabiskan biaya yang tidak kecil itu cenderung tidak memberikan manfaat yang berarti. Banyak yang berhenti pada keputusan atau rekomendasi saja. Tidak ada langkah realisasi yang kongkrit. Tidak ada evaluasi pelaksanaan keputusan dan tidak ada pula laporan pada kongres berikutnya. Seperti yang ditulis oleh Putu Wijaya, “keputusan-keputusan di dalam kongres itu berhenti sebagai keputusan. Tak pernah ada tindakan eksekusi keputusan.” Kenyataan seperti ini membuat Putu dengan setengah berseloroh mengatakan: “Sudah waktunya ada sebuah kongres untuk membicarakan tabiat kongres itu sendiri.” (Putu Wijaya, 1997: hal. 67). Di lain kesempatan Putu juga memberikan catatan mengenai berhentinya hasil dari sekian banyak kongres. Menurut Putu, keputusan kongres amat tergantung pada sensitivitas lembaga yang mendapatkan rekomendasi. Sebagus-bagusnya rekomendasi, jika lembaga atau seseorang bersikap seperti tembok pada rekomendasi yang diberikan, tetap saja hasil kongres tidak akan berpengaruh banyak (Kompas Cyber Media, 20/10/2003).

Kritikan yang lebih tajam disampaikan oleh Hasanuddin W.S, Guru Besar Ilmu Sastra Universitas Negeri Padang (UNP). Ia menyatakan bahwa kongres yang diselenggarakan bukan “kongres kebudayaan” tetapi “kebudayaan kongres.” Maksudnya, jika kongres hanya menghasilkan jargon dan pelaksanaan rekomendasi kongres tergantung pada kemauan pemerintah yang sedang berkuasa, maka kongres itu hanya latah saja mengikuti kongres lain seperti kongres bahasa (Media Indonesia, 17/10/2003).

Mengapa kesungguhan masyarakat, pemerintah dan lembaga legislatif untuk merealisasikan hasil kongres semakin menurun bila dibandingkan dengan KK sebelum

tahun 1960? Dari berbagai kritikan yang dilontarkan terhadap teknis penyelenggaraan kongres, kesimpulan dan realisasi hasil kongres antara lain dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. KK sebelum tahun 60-an (dan juga KK sebelum Indonesia merdeka) diselenggarakan oleh lembaga kebudayaan non-pemerintah yakni oleh LKI dan BMKN. Mulai KK 1991 prakarsa dan penyelenggara adalah pemerintah. Pergeseran peran itu telah menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, terhadap tema dan tujuan kongres hanya untuk kepentingan kekuasaan, dan tidak bertolak dari permasalahan nyata yang berkembang di masyarakat. Hal ini menyebabkan timbulnya sikap skeptis terhadap kongres.
2. Keputusan kongres tahun 1991 dinilai sarat dengan muatan politik, mengekang kebebasan dan hanya untuk mengekalkan kekuasaan. Keputusan kongres yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, sementara dari pihak pemerintah maupun legislatif sendiri kurang serius dalam merealisasikan keputusan kongres.
3. Peserta kongres sebelum tahun 60-an berasal dari anggota LKI atau BMKN perorangan dan wakil-wakil lembaga kebudayaan di bawah BMKN. Peserta hadir dengan biaya transport dan penginapan dari kantong sendiri. Setelah memasuki masa pembangunan, mulai KK 1991 biaya penyelenggaraan ditanggung oleh pemerintah (Pusat dan Daerah). Peserta kongres dibedakan menjadi dua macam: (1) Peserta kongres ditanggung oleh Panitia, berasal dari lembaga-lembaga kebudayaan di pemerintahan (pejabat pemerintah) dan budayawan, seniman, cendekiawan, wartawan, pemangku adat dan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah; dan (2) Peserta kongres yang datang dengan biaya sendiri. Mekanisme penunjukan peserta seperti ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan terhadap peserta yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kongres disebut sebagai “kongres plat merah”, “kongres baju Korpri”, “kongres baju safari” dan lain-lain. Berbagai sebutan itu membawa implikasi terhadap kesungguhan merealisasikan hasil kongres.
4. Kehadiran wakil dari berbagai lembaga kebudayaan sebagai peserta kongres sebelum tahun 1960 sangat membantu dalam merealisasikan keputusan kongres karena lembaga-lembaga itu merupakan agen pelaksana keputusan kongres, sedangkan peserta KK 1991 dan 2003 kebanyakan bersifat perorangan. Peserta dari wakil lembaga kebanyakan berasal dari lembaga pemerintah yang berperan sebagai pelaksana program dan anggaran yang dapat disediakan oleh anggaran pemerintah setiap tahun.
5. Materi kongres pada KK 1991 dan 2003 dinilai terlalu luas dan abstrak. Tidak menitik pada permasalahan aktual yang sedang terjadi di masyarakat.
6. Pada sidang pleno pertama disampaikan laporan perkembangan dari realisasi hasil kongres, dan hal itu tidak dilakukan pada KK 2003 di Bukittinggi maupun dalam Kongres Kesenian Indonesia II tahun 2005 yang lalu.

Ada upaya agar keputusan kongres memiliki “daya ikat” dan “daya dobrak” yang kuat, seperti yang pernah dilakukan pada KK tahun 1951. Pada bagian akhir kesimpulan kongres tahun 1951, ditutup dengan jadwal tindak lanjut yang ketat. Antara lain ditutup dengan kalimat:

“Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima kesimpulan-kesimpulan itu, organisasi tersebut diminta supaya menyatakan pendapatnya terhadap kesimpulan-kesimpulan itu. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Kongres selesai, yakni pada tanggal 11 Oktober 1951, Pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia diminta mengusahakan KONFERENSI guna membicarakan dan mengambil putusan tentang kesimpulan-kesimpulan itu, dan kemudian membentuk pengurus baru.”

Upaya seperti itu diulang pada KK tahun 2003 di Bukittinggi. Pada bagian akhir Keputusan Kongres ditutup dengan kalimat yang secara tegas meminta kepada pihak pengambil keputusan di lingkungan eksekutif dan legislatif untuk mensosialisasikan dan merealisasikan hasil kongres. Dalam rekomendasi juga diminta agar pemerintah membentuk lembaga antarkongres yang independen dan memberikan prioritas perhatian agar lembaga tersebut dapat menelusuri perkembangan realisasi berbagai rekomendasi.

Demikian pula halnya pada bagian akhir Keputusan Kongres Kesenian Indonesia I tahun 1995 ditutup dengan Rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan bahkan secara tegas menunjuk Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk merealisasikan keputusan kongres. Dalam Kongres Kesenian Indonesia II tahun 2005 pada bagian akhir kesimpulan ditambah dengan sejumlah “Tuntutan” dan “Rencana Aksi”. Di dalam “Rencana Aksi” dinyatakan bahwa hasil kongres akan disampaikan langsung kepada Presiden RI, Ketua DPR-RI, Ketua DPD, untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti. Di samping itu juga akan diserahkan kepada MENKO KESRA, MENKOMINFO, MENBUDPAR, MENDIKNAS, MENDAGRI, MENKEU, BAPPENAS, MENBUMN, MENHANKAM, KAPOLRI, Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti. Sementara itu, kepada Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, dituntut untuk membentuk Tim Khusus dan memfasilitasi terlaksananya tuntutan dan rencana aksi di atas.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak pemerintah setelah KK tahun 2003 di Bukittinggi adalah membentuk lembaga antarkongres yang independen. Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.27/UM.001/MKP/04, tanggal 19 Mei 2004, dibentuk *Badan Pekerja Kongres Kebudayaan*. Dalam lampiran disebutkan tugas badan ini adalah mengawal, mengevaluasi, mensosialisasikan dan mengadvokasikan rumusan, usul dan/atau saran sebuah pelaksanaan kongres, serta merencanakan dan turut melaksanakan KK berikutnya. Meskipun pengurus badan ini telah dilantik dan telah bekerja hampir 2 tahun namun belum ada langkah kongkrit sesuai dengan tugasnya, terutama langkah kongkrit dalam merealisasikan hasil kongres. Sementara itu, untuk merealisasikan hasil Kongres Kesenian Indonesia II 2005 hingga kini semua pihak juga belum ada tanda-tanda untuk mengambil langkah-langkah untuk merealisasikannya.

Apakah kenyataan seperti di atas akan berlanjut terus? Perlu ada peninjauan ulang terhadap pengorganisasian penyelenggaraan kongres, agar forum kongres tetap menjadi ajang yang tepat untuk membahas dan mencari kesepakatan tentang langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah kebudayaan.

Mengenai keinginan peserta KK tentang kemandirian pengembangan kebudayaan dengan membentuk Departemen Kebudayaan kemandirian pengembangan

kebudayaan dengan membentuk Departemen Kebudayaan yang sudah muncul sejak Musyawarah Kebudayaan bulan Desember 1945 kemudian juga dimasukkan ke dalam kesimpulan kongre-kongres berikutnya hingga KK 2003 dan 2008, tetapi hingga kini belum juga direalisasikan. Bahkan posisi kebudayaan diuji coba digabungkan dengan bidang pariwisata (2000) dan setelah eksperimen itu dinilai gagal, bidang kebudayaan dikembalikan untuk bersatu dengan bidang pendidikan (2011).

Mungkin karena lelah mengusulkan tetapi tidak mendapatkan persetujuan, dalam KK 2003 muncul wacana sebaiknya dibentuk Lembaga Penelitian Kebudayaan semacam Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ada pula yang mengusulkan agar dibentuk Dewan Pertimbangan Kebudayaan. Ada lagi yang mengusulkan agar dibentuk “Pusat Kebudayaan Indonesia” di luar negeri, seperti halnya dengan keberadaan Erasmus Huis, Japan Foundation, dan Gothe Institut. Anehnya (seperti ditulis oleh Koran Suara Merdeka), lembaga-lembaga “yang sangat diharapkan direkomendasikan”, justru tak dimasukkan dalam rumusan rekomendasi.

Sementara itu, tuntutan kedua tentang Departemen Kebudayaan bukanlah tuntutan baru. Jauh hari sebelumnya, tuntutan ini telah berdentung, antara lain pada Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi pada 31 Desember 1945; Kongres Kebudayaan di Magelang pada 1948; kongres serupa di Solo pada 1954, Denpasar pada 1957, Bandung pada 1990, dan di Bukittinggi pada 2003. Pada akhirnya, para seniman memang harus dekat dengan partai politik untuk mewujudkan tuntutan itu. Pasalnya, selama ini, agenda seperti itu memang tidak tersentuh dalam sidang-sidang mereka. (Koran Tempo, 6/10/2005)

Dari sebelas rekomendasi itu, poin satu hingga empat lebih ditekankan pada penguatan kesenian daerah, termasuk rekomendasi tentang dukungan pendanaan APBN, APBD, dukungan perusahaan BUMN, dan perusahaan swasta. Juga memberikan prioritas perkembangan pendidikan dan penguatan seni di Indonesia Timur. Sementara itu, yang lain lebih menekankan pada persoalan kesenian secara keseluruhan, termasuk pembentukan balai penelitian, kantong budaya, dan persoalan perlindungan hukum. Dua tuntutan hasil kongres ini adalah realisasi Undang-Undang Kesenian dan pembentukan Departemen atau Kementerian Kebudayaan.

Gaung yang kuat dari berbagai kongres kebudayaan daerah (lokal), bahasa dan sastra daerah adalah rekomendasi agar Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah ditetapkan UU tentang Otonomi Daerah. Beberapa kongres mendesak dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) untuk melestarikan (melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan) kebudayaan daerah. Beberapa daerah seperti Jawa Barat, Yogyakarta, Bali dll telah menerbitkan Perda tentang Pelestarian Kebudayaan. Selain itu, juga usulan agar bahasa dan sastra, kesenian daerah dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal. Ada pula yang mengusulkan agar di daerah dibentuk Dewan Pembina Bahasa.

Masih terkait dengan otonomi daerah, khusus mengenai tinggalan purbakala adalah desakan agar pemerintah dan DPR perlu mendorong setiap kabupaten/ kota untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang penelitian, perlindungan, dan pengelolaan Benda Cagar Budaya.

BAB III

RELEVASI KONGRES KEBUDAYAAN DENGAN KESADARAN BERBANGSA

A. Kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa

Membangun kesepakatan (*consensus*) menjadi satu ikatan (*commitment*), satu bangsa yang terdiri atas hampir 500 suku bangsa yang beraneka ragam budaya, bukanlah hal yang gampang. Perjuangan untuk mencapai tujuan itu sangat panjang dan melelahkan. Pergolakan bersenjata untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah yang digelorakan di berbagai tempat belum membuahkan hasil. Di samping rakyat banyak yang menjadi korban meninggal, hidup semakin sengsara, kekuatan untuk melawan juga menjadi semakin melemah. Sebaliknya, penjajah sema-kini kuat yang dapat bertindak leluasa menindas rakyat. Keberhasilan penerapan politik adu domba dan memecah belah kekuatan yang digunakan oleh penjajah telah menyadarkan para pemuda bumiputra untuk menggunakan cara lain. Cara lain itu adalah dengan membangun kebersamaan dalam satu ikatan kebangsaan.

Awal dari bangkitnya kesadaran itu ditandai dengan berdirinya organisasi kemasyarakatan BO. Doktrin perjuangan yang ditanamkan kepada seluruh anggota adalah menumbuhkan semangat kebangsaan. Kesadaran itu tumbuh dengan berbagai alasan, antara lain setelah mereka menyerap berbagai ilmu ketika belajar di Belanda, setelah banyak membaca buku berbagai cabang ilmu, serta bergaul dan berdiskusi dengan pemuda-pemuda dari berbagai bangsa. Kelompok mereka saat itu lebih dikenal dengan sebutan kaum terpelajar atau priyayi terpelajar. (Kuntowijoyo, 2004)

Peristiwa berdirinya BO yang kemudian dikenal sebagai Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 menurut Prof. Dr. Daoed Joesoef (*KOMPAS*, 19/5/12) mempunyai prinsip mengutamakan budi luhur yang lahir sebagai hasil perpaduan antara semangat nasional yang mulai hidup bernyala dalam membasmi sebab pokok kemiskinan, yaitu penjajahan, dan kesadaran - tentang kemajuan nasional demi peningkatan kecerdasan anak pribumi. Caranya melalui pencerahan akal budi yang dimungkinkan oleh

pengembangan pendidikan dan budaya kemajuan. Jelas sekali betapa sepak terjang kaum muda terpelajar pendiri dan penggerak BO itu secara esensial memotori satu gerakan budaya, yang dengan sadar dan sengaja mengarahkan gerakan mereka ke arah (pembentukan) masa depan. Sebuah masa depan yang bermuara pada pembentukan satu negara-bangsa dengan tidak membedakan asal-usul, keturunan, agama, dan antara masyarakat kaya dengan yang masih miskin.

Tumbuhnya kesadaran berbangsa itu makin tampak ke permukaan ketika para pemuda bumiputra yang sedang belajar di Belanda dan menjadi anggota perkumpulan *Indische Vereeniging* tidak mau lagi mengutamakan sifat kedaerahan. (Moh. Hatta, Bahasa dan Sastra No.1/V, 1979). Mereka kemudian mendirikan *Indonesisch Verbond*. Kata *Inlander* sebagai sebutan bagi orang-orang bumiputra yang diberikan oleh penjajah berubah menjadi *Indonesier*. Kata itu diperkenalkan oleh Prof. Mr. Van Vollenhoven sebagai ahli hukum adat melalui bukunya yang berjudul *De Indonesier en Zijn Grond*. Sesudah itu, kata Indonesia banyak digunakan oleh pemuda bumiputra yang belajar di Belanda. Dalam Kongres Internasional yang mereka hadiri secara terbuka dipropagandakan kata Indonesia itu. Pers di tanah air kemudian mengambil alih kata itu dan secara terus menerus kata itu digunakan.

Mengenai tumbuhnya kesadaran berbudaya di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa, berdasarkan pada berbagai bukti artefak masa prasejarah, kesadaran dari masing-masing suku bangsa itu telah ada meskipun masih bentuk yang sangat sederhana. Kesadaran itu ditandai oleh aktivitas semua suku bangsa untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang memiliki ide, konsep, sistem nilai, perilaku dan berbagai macam benda sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menang-gapi lingkungan hidupnya. Dari balik berbagai macam tinggalan itu -- baik yang berwujud benda (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible) -- memberikan indikasi bahwa mereka adalah suku-suku bangsa yang telah memiliki budaya dan peradaban. Masing-masing memiliki kesadaran untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaannya, dan menggunakannya sebagai acuan dalam menata kehidupannya. Dalam kondisi dijajah pun semua suku bangsa telah membuktikan mampu mempertahankan eksistensi budayanya masing-masing.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, selain masing-masing suku telah memiliki kesadaran budaya sukunya, juga mulai tumbuh kesadaran berbudaya bangsa. Yang dimaksud dengan kesadaran berbudaya bangsa, adalah kesadaran dari masing-masing suku bangsa untuk tidak hanya mengenal kebudayaan sukunya, tetapi juga kebudayaan bangsa, bangsa Indonesia. Selama ini pembicaraan tentang kesadaran berbudaya bangsa cenderung kurang mendapatkan perhatian bila dibandingkan dengan kesadaran berbangsa. Mungkin karena masalah bangsa lebih memiliki nilai politis dan strategis dibandingkan dengan kebudayaan bangsa. Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan menjadi penting dan masuk ke dalam perbincangan kesadaran berbangsa, karena dinilai memiliki nilai strategis dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menjadi salah satu butir dalam ikrar Sumpah Pemuda.

Kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa memiliki hubungan yang dekat. Bahkan hubungan itu dalam bentuk timbal balik. Tumbuhnya kesadaran berbudaya bangsa, tidak terlepas dari bangkitnya kesadaran berbangsa. Tetapi tidak salah jika dikatakan bahwa tumbuhnya kesadaran berbangsa karena didorong oleh

kesadaran bahwa antara kebudayaan masing-masing suku memiliki unsur kemiripan atau kesamaan dalam hal ide, konsep dan sistem nilai, serta perilaku dan juga benda yang dihasilkan. Kemiripan atau kesamaan itu menumbuhkan solidaritas di antara suku bangsa, dan dari sana tumbuh kesadaran berbangsa.

Dalam kaitan antara tumbuhnya kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa di kalangan masyarakat suku-suku bangsa, ada 3 makna yang menarik untuk dicatat. *Pertama*, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna tumbuhnya kerelaan dan keikhlasan suku bangsa untuk menjadi bagian dari bangsa. Lahirnya kesadaran untuk menjadi satu ikatan “satu bangsa” itu mencerminkan betapa dalamnya keikhlasan masing-masing suku bangsa untuk mengubah statusnya dari suku bangsa menjadi bangsa. Kenaikan status itu (menjadi bangsa) menurut Slametmulyana membawa perubahan yang sangat mendasar dalam hal kerangka berfikir (paradigma) masyarakat. (Slametmulyana, 1966: hal. 2). Kerangka berfikir kesukubangsaan yang telah berkembang berabad-abad tiba-tiba harus berubah atau lebih tepat bertambah atau meningkat menjadi kerangka berfikir kebangsaan. Peningkatan itu bukan berarti mengabaikan pola pikir kesuku-bangsaan melainkan justru pola pikir itu memperkaya dan memperluas kerangka pikir kebangsaan.

Di dalam proses menjadi bangsa itu di samping banyak elemen kesuku-bangsaan yang harus diselaraskan dengan kehadiran elemen kebangsaan, tidak sedikit elemen kesukubangsaan yang meningkat statusnya menjadi elemen kebangsaan. Singkatnya, sebagai konsekuensi dari perubahan itu masyarakat tidak hanya menggunakan kebudayaan suku bangsa sebagai acuan dalam menata kehidupan kesukubangsaan, tetapi juga menggunakan kebudayaan kebangsaan sebagai garis acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping masyarakat menggunakan sistem budaya suku bangsa, juga akan menggunakan sistem budaya kebangsaan (nasional), dan bahkan ditambah dengan yang berskala internasional .

Pada bagian lain, ikatan kesukubangsaan yang telah terba-ngun berabad-abad tentu tidak seharusnya menjadi renggang karena terjadi perluasan persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Mereka tetap dapat hidup dalam kelompok suku bangsanya, dan masing-masing mempertahankan kebudayaannya. Kebudayaan suku bangsa telah lebih dulu ada, sebelum adanya kebudayaan bangsa. Kebudayaan suku bangsa akan tetap ada, selama bangsa Indonesia ada. Juga, kebudayaan suku bangsa akan tetap ada, meskipun misalnya bangsa Indonesia karena sesuatu hal menjadi tidak ada.

Salah satu peristiwa sejarah yang menunjukkan adanya keikhlasan dari suku-suku bangsa untuk mengubah pola pikir lokal menjadi nasional adalah saat-saat menerima bahasa Melayu menjadi bahasa resmi dalam pergaulan bangsa. Patut dicatat berdasarkan data pemakaian bahasa suku bangsa (tahun 1930) menunjukkan bahwa pemakai bahasa Melayu jauh lebih sedikit dibanding dengan bahasa suku yang lain. Bahasa Jawa dipakai oleh 27.808.623 jiwa atau 47,02%, bahasa Sunda dipakai oleh 8.594.834 jiwa atau 14,53%, dibanding dengan pemakai bahasa Melayu Riau sebanyak 1.988.648 orang atau hanya 4,97% dibandingkan dengan jumlah penduduk Nusantara. (Slametmulyana, 1966: hal. 12)

Kedua, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai bentuk “perlawanan budaya”. Yang dilawan adalah kebudayaan penjajah dalam arti luas. Meskipun kebudayaan penjajah lebih berkembang di daerah perkotaan, tetapi karena didukung

oleh kekuasaan dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam kehidupan sebagai bangsa terjajah, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan kesukubangsaannya, apalagi kebangsaannya secara bebas. Kebudayaan yang pada hakikatnya bersifat dinamis selalu berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan, dimandulkan oleh berbagai tindakan pengekangan oleh bangsa penjajah.

Salah satu contoh adalah soal pemakaian bahasa. Pemerintah Belanda berupaya keras untuk menjauhkan para pelajar dari pemakaian bahasa Melayu dengan alasan demi kelancaran penye-lenggaraan pendidikan. Di samping itu Belanda dengan sengaja memberikan peluang besar bagi orang bumiputra yang pandai berbahasa Belanda untuk maju dan mendapatkan posisi yang baik dalam pemerintahan. Pemaksaan pemakaian bahasa Belanda merupakan bentuk penjajahan budaya yang perlu diimbangi dengan perlawanan budaya, dalam bentuk upaya membangkitkan kesadaran kejayaan budaya suku bangsa atau bangsa yang diwariskan nenek moyangnya.

Salah seorang pendiri bangsa yang menentang pemakaian bahasa Belanda di lembaga pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Dalam sebuah tulisannya yang dimuat dalam majalah Hindia Putra tahun 1916-1917 Ki Hadjar menyatakan:

"....maka tibalah juga waktunya di mana satu bahasa bumiputra terpenting akan menggantikan kedudukan bahasa Belanda dan di semua sekolah Hindia, bahasa Belanda akan dipelajari sebagai bahasa asing yang diperlukan". (Ki Hajar Dewantara, 1994: hal. 111)

Pada akhirnya penjajah menyadari bahwa memaksakan penggunaan bahasa Belanda justru merugikan bagi kepentingan politiknya. Diperlukan bahasa suku bangsa yang dapat menjadi bahasa pergaulan (*lingua franca*) baik dalam hubungan antarsuku maupun dengan pemerintah Hindia Belanda. Belanda lebih sering menggunakan bahasa Melayu Riau sebagai pilihan. Sebagai contoh, dalam buku panduan pariwisata yang terbit 1786 ditulis oleh Johannes Hofhout untuk para pegawai VOC yang baru tiba di Batavia, di samping berisi informasi tentang keindahan daerah Cipanas, dan peringatan (*travel warning*) tentang berbahayanya penyakit tropis dan perdagangan barang-barang terlarang juga memuat daftar kata-kata bahasa Melayu yang berguna dalam percakapan sederhana. (Denys Lombard, 2000: hal.50).

Langkah lain yang dibuat Belanda adalah ketika menyetujui penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kerja Dewan Rakyat. Penetapan itu merupakan keberhasilan dari "perlawanan budaya" kaum terpelajar dalam bentuk pemanfaatan lembaga yang terhormat itu untuk memperkuat kesadaran budaya bangsa. Penetapan itu secara tidak langsung melempangkan jalan menuju terwujudnya bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia.

Ketiga, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai kesadaran akan nasib kebudayaannya - baik kebudayaan bangsa maupun suku bangsa – untuk arah ke depan. Pengakuan terhadap kehadiran kebudayaan bangsa membawa konsekuensi terhadap eksistensi kebudayaan suku bangsa dan sebaliknya. Semangat kehidupan sebagai anggota suku bangsa tidak boleh padam karena pergeseran posisi menjadi anggota bangsa. Pergeseran itu justru harus menjadi pendorong tumbuhnya kesadaran untuk mempertahankan nilai-nilai budaya suku bangsa dalam kerangka kebangsaan. Oleh

karena itu, tumbuhnya kesadaran berbudaya lokal dan nasional dalam bingkai “satu bangsa” yang multietnik, multikultur dan multimental seperti Indonesia, perlu ada pola pengasuhan dan pembimbingan yang terus menerus agar aspirasi untuk tetap menjunjung nilai-nilai budayanya dapat tersalurkan secara positif. Menurut Prof. Dr. Daoed Joesoef

“kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam”. (Munadjat Danusaputro, 1983, hal. 238).

Ini berarti diperlukan adanya suatu konsep, kebijakan dan strategi yang dapat melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keberadaan kebudayaan suku bangsa maupun kebudayaan bangsa.

B. Kongres kebudayaan tonggak sejarah budaya bangsa

Untuk menggenapi dan menyempurnakan kesadaran berkebangsaan Indonesia yang dirintis oleh BO itu ternyata diperlukan waktu cukup lama, 20 tahun. Sebagai kulminasi dari gerakan angkatan 1908 itu pada 28 Oktober 1928 tampil pula satu gerakan budaya di Batavia, lagi-lagi digerakkan oleh sekumpulan kaum muda terpelajar yang menurut naturnya disebut “Soempah Pemoeda”. Melalui ikrar bersama itu mereka menyatakan tekad berupa pilihan kesatuan wilayah (bertumpah darah satu), pilihan kesatuan politik (berbangsa satu), dan pilihan kesatuan budaya (menjunjung tinggi bahasa persatuan) yang semuanya disebut “Indonesia”. (KOMPAS, 19/5/12).

Sekarang peristiwa 1908 dan 1928 itu diakui sebagai tonggak dua dalam sejarah pematangan wawasan kebangsaan dan wawasan budaya bangsa bangsa. Peristiwa yang terjadi tahun 1908 dan 1912 yang dilakukan oleh kaum bumiputra terpelajar itu oleh Daoed Joesoef disebutnya sebagai gerakan kebangkitan bangsa dan „gerakan kebudayaan“ menuju ke arah kemerdekaan nasional. Tetapi selain dua peristiwa itu ada satu peristiwa yang juga patut disebut sebagai “gerakan kebudayaan, yaitu diselenggarakannya Kongres Kebudayaan pada tahun 1918, tepat sepuluh tahun setelah berdirinya BO dan sepuluh tahun sebelum Sumpah pemuda.

Sebagaimana telah dipaparkan pada BAGIAN I, pada tahun 1918 melayang sepucuk surat dari Batavia menuju pimpinan BO cabang Surakarta. Surat itu berisi perintah agar BO menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa. Setelah membaca surat itu Mangkunegoro VII, menolak dan mengusulkan agar diselenggarakan Kongres Kebudayaan saja. Usul itu didukung oleh kaum terpelajar bumiputra yang lain, sementara pemerintah Belanda menyerah dan membiarkan kaum terpelajar itu menentukan pilihannya.

Dari balik keputusan kaum terpelajar untuk mengganti kongres bahasa menjadi kongres kebudayaan menurut hemat saya memiliki arti yang amat penting, mendasar, dan pantas disebut sebagai tonggak kebangkitan kesadaran terhadap nasib kebudayaan (bangsa) di masa depan. Kebulatan tekad itu dapat menjadi kenyataan dengan diselenggarakannya KK ke-1 dengan nama *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* pada tanggal 5 Juli 1918 di Kepatihan Mangkunegara Surakarta.

Munculnya inisiatif itu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya kesadaran berbangsa. Tumbuhnya kesadaran berbangsa berjalan seiring dengan kesadaran masa depan kebudayaan bangsanya.

Selama ini perhatian orang terhadap KK sebelum Indonesia merdeka tidak sebesar perhatian orang terhadap KK sesudah Indonesia merdeka dan kongres-kongres lain yang sama-sama diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka seperti: Kongres Boedi Oetomo (BO) tahun 1908, Kongres Pemuda 1926 dan 1928, Kongres Perempuan tahun 1928 dan Kongres Bahasa tahun 1938. Kongres-kongres itu tercatat sebagai peristiwa sejarah dan menjadi monumental hingga sekarang. Sementara itu, untuk KK sebelum Indonesia merdeka yang hasil-hasilnya terbukti menjadi penentu arah pengembangan kebudayaan bangsa, dalam buku-buku sejarah hampir tidak tercatat sebagai bagian dari sejarah kebudayaan bangsa. Banyak orang termasuk kalangan seniman, budayawan, maupun ahli kebudayaan tidak mengetahui bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka kaum terpelajar bumiputra juga sudah berpikir tentang hari depan kebudayaan bangsanya.

Banyak keputusan kongres yang memiliki makna strategis dan politis, sehingga jejak realisasinya masih membekas hingga seka-rang. Keputusan Pangeran Prangwadono untuk lebih baik memilih menyelenggarakan KK dan menolak instruksi Batavia untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa merupakan langkah yang berani. Langkah bersejarah itu telah menjadi motor peng-gerak diselenggarakannya kongres-kongres kebudayaan berikutnya hingga sekarang yang jumlahnya telah ratusan kali.

Pokok-pokok pikiran yang lahir dari kongres 1918 dan seterusnya banyak yang terbukti telah menjadi landasan dalam membangun solidaritas dan mengembangkan kebudayaan bangsa hingga sekarang. Kenyataan sebagai bangsa majemuk (*multietnik*) dan memiliki budaya beranekaragam (*multikultur*) menjadi sumber inspirasi dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemajemukan telah menumbuhkan hasrat, semangat dan inspirasi untuk mewujudkan kebudayaan bersama, menjadi milik bersama, menuju pada terwujudnya kebudayaan Indonesia "yang timbul dari buah usaha budinya rakyat (suku) Indonesia", yang kemudian dibingkai dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Konsep bangsa dan kebudayaan majemuk dibahas dalam kongres tahun 1918. Kalau perbincangan itu hanya mengenai kebudayaan Jawa saja mereka menilai terlalu sempit. Dalam kongres kedua tahun 1919 masalah diperlebar, mencakup kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Dalam diskusi melebar lagi ke masalah kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia. Mereka sepakat untuk memajukan kebudayaan bangsa, mutu sumber daya manusia sebagai pendukung kebudayaan ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan peran pendidikan dalam proses pembudayaan (KK 1918). Anak-anak bumiputra perlu diberikan pelajaran sejarah bangsa, arsitektur, bahasa, sastra, filsafat, musik tradisional, tari, sandiwara (tonil) dan kerajinan (besi, perak, emas, kayu, tenun, bambu, kulit dll.) Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir (*mindset*) masyarakat suku bangsa terutama pandangan sebagai bangsa kuli (terjajah) menjadi bangsa yang merdeka dan berkepribadian, serta dari pola pikir kehidupan bersuku-suku menuju ke arah kehidupan satu bangsa. Mari kita simak cuplikan dari sekian banyak pandangan pemakalah pada KK sebelum Indonesia mereka.

Dr. Satiman, sebagai salah satu pemakalah pada KK 1918 menyatakan bahwa:

“Pertemuan peradaban Barat dan Timur harus saling membagi keduanya. Perjuangan hanya dapat dicapai melalui “peperangan” antara kemampuan intelektual, dan oleh karena itu kemampuan intelektual kita harus dibuat sama dengan intelektual Eropa”.

Pandangan seperti ini jelas memiliki pengaruh besar terhadap upaya menumbuhkan semangat menjadi sebuah bangsa baru yang maju. Selanjutnya, pemakalah yang lain, yakni RM Sutatmo (KK 1918) menegaskan tentang konsep memajukan kebudayaan bangsa melalui strategi membuka peluang lahirnya perubahan dengan tetap memelihara, menjaga dan mempertahankan kebudayaan yang kita miliki. Sutatmo menyatakan bahwa: *“Perlu mempertahankan keberadaan kita dan memberikan jiwa baru untuk memajukan kebudayaan kita”.*

Bagaimana dengan pendapat Dr. Radjiman? Sebagai orang Jawa, Radjiman berpendapat bahwa *“Jika pribumi dipisahkan sepenuhnya dan secara paksa dari masa lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia tanpa akar, tak berkelas, tersesat di antara dua peradaban”.* Selain itu, Radjiman juga menyinggung masalah penyelenggaraan pendidikan kepada kaum bumiputra. Menurut Radjiman, pendidikan harus berlangsung serasi dalam bentuk penanaman nilai etika dan estetika, dan harus memerhatikan dasar adat istiadat bangsa. Pandangan ini masih tetap aktual hingga kini, dan menjadi dasar dalam penyusunan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan: *“Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.*

Tentang telah tumbuhnya kesadaran berbangsa pada diri para peserta kongres tidak perlu diragukan lagi. Sastrowidjono selaku ketua panitia kongres mengatakan bahwa:

“...telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi”.

Perdebatan juga mengarah pada upaya perlindungan kebudayaan agar kebudayaan tidak mengalami kerusakan dan kemusnahan (KK 1924). Perlindungan diarahkan pada kebudayaan yang bersifat benda (*tangible*) maupun yang bersifat non-benda (*intangible*). Hal ini tergambar pada perbincangan mereka tentang nilai-nilai (tatakrama), seni musik, keutuhan berbagai bangunan kuno, situs purbakala, arsitektur, alat-alat kesenian, hasil kerajinan, bahasa daerah, hingga pada sistem keluarga dan adat. Melalui kongres mereka merintis berdirinya lembaga penelitian kebudayaan *Java Instituut* (KK 1918), berbagai museum, sekolah seni kerajinan tangan (*Kunst Ambachtsschool*), serta membuka jurusan Sastra, Filsafat, dan Budaya Timur (KK.1929) seperti yang ada hingga sekarang.

Untuk melindungi benda peninggalan sejarah dan purbakala, atas inisiatif PAJ Moojen disusun *Monumenten Ordinantie* (MO) stbl. 238 tahun 1931 yang kemudian

disempurnakan menjadi UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya dan direvisi lagi menjadi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sementara itu pemakalah Soejono pada KK 1929 meminta agar:

“...agar Pemerintah mewajibkan para pegawai, insinyur, guru-guru, terutama kepala-kepala sekolah HIS untuk mengenal satu bahasa, bahasa Indonesia”.

Nilai penting dari KK sebelum Indonesia merdeka adalah pendapat Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana menyikapi hubungan antara kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing. Ki Hajar menyatakan pendapatnya bahwa terhadap kebudayaan asing sebaiknya kita: *“...tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing”, asal bahan-bahan itu dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan bangsa, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.* Pendapat Ki Hajar ini akhirnya dipilih sebagai bagian dari penjelasan Pasa 32 UUD 1945.

Bagaimana dengan para pemakalah yang berasal dari Belanda? Untuk ukuran saat itu, pandangan mereka sungguh luar biasa. Selaku pemakalah (KK 1918) Muhlenfeld paling tidak telah menyumbangkan dua pemikiran penting dan mendasar bagi bangsa bangsa Indonesia. Muhlenfeld antara lain mengatakan:

“Untuk membangkitkan kesadaran terhadap kebudayaan sendiri itu ke seluruh wilayah, maka pengajaran dan pengkajian sejarah bangsa merupakan sarana yang terbaik, terkuat dan terpenting”.

Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa

“untuk sebuah “natie” dan individu tuntutan pertama adalah mengenal dirinya sendiri sehingga mereka memiliki perangai, karakter, dan mendapatkan kembali rasa percaya diri setelah 6 kehilangan selama berabad-abad”.

Bukankah pandangan orang Belanda seperti ini sangat patut dijadikan catatan tersendiri bagi lahirnya sebuah bangsa baru, Indonesia?

Pandangan yang lain datang dari kalangan Birokrat peme-rintah Hindia Belanda. Ia adalah Walikota Surabaya dan Bandung selaku tuan rumah kongres. Selaku Walikota Bandung Walikota Bandung SA Reitsma (KK 1921) menyatakan bahwa: *“...perlu langkah pembentukan dan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang dalam keadaan tertindas, akan dihidupkan kem-bali berkembang di darah-daerah...”.* Sementara itu, Dijkerman sebagai Walikota Surabaya (KK 1926) menyatakan bahwa: *“...seni akan berkembang kuat apabila bangsa itu sedang dalam kondisi kuat, dan sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menyadarkan suku bangsa Indonesia...”* untuk menuju menjadi bangsa yang kuat. Ilmuwan Belanda lain yang menyampaikan pandangannya adalah Dr. FDK Bosch, Kepala Oudheidkundige Dienst/Lembaga Purbakala (KK1924), Dr. GWJ Drewes, DR. SJ. Esser, L.van Rijckevorsel (1929), dan Ir. PHW. Sitsen (1937). Dalam kongres itu Bosch menegaskan tentang pentingnya pelestarian peninggalan purbakala untuk masa saat itu dan yang akan datang, Drewes, Esser, L. van Rijckevorsel menekankan tentang perlunya pengajaran Kesusasteraan Timur di Perguruan Tinggi yang kemudian direalisasikan dengan berdirinya Sekolah Kerajinan (Kunst Ambaacht

School), yang mendorong berdiri Akademi Seni Rupa (ASRI), Fakultas Sastra dan Filsafat dengan jurusan-jurusan: Sastra, Sejarah, dan Filsafat yang masih tetap ada hingga sekarang. Sementara itu Sitsen menyampaikan pendapat tentang pentingnya mengembangkan seni kerajinan Bali, perlunya mendirikan museum kerajinan dan Bali Instituut, serta pemanfaatan budaya untuk pengembangan pariwisata di Bali.

Dari petikan sebagian kecil dari pokok-pokok pikiran selama kongres sebelum Indonesia merdeka seperti di atas menunjukkan betapa luasnya pandangan dan jauhnya jangkauan pemikiran para peserta kongres. Mereka pantas disebut sebagai peletak dasar konsep, kebijakan dan strategi dalam berbangsa dan berbudaya bangsa di zaman Indonesia kemerdekaan. KK sebelum Indonesia merdeka terutama KK 1918 tidak hanya membahas masalah kebudayaan Jawa saja, seperti yang dikesankan oleh sebagian orang. Peristiwa itu pantas dijadikan tonggak sejarah kongres kebudayaan di Indonesia dan penggalan penting bagi sejarah kebudayaan Indonesia.

Dari gambaran singkat tentang betapa eratnya hubungan ketiga peristiwa budaya itu mulai dari lahirnya BO (1908), disusul oleh lahirnya KK pertama (1918) dan sebagai klimaksnya dimani-festasikan dalam bentuk ikrar atau Sumpah Pemuda (1928) menunjukkan betapa besarnya perhatian kaum terpelajar bumi-putra terhadap kemajuan kebudayaan bangsa. Peristiwa bersejarah itu tidak hanya digerakkan oleh "orang kuasa" (*man of power*) tetapi lebih banyak digerakkan oleh semangat yang dimiliki oleh "orang budaya" (*man of culture*). Sejumlah "orang budaya" dan sejumlah "orang kuasa" yang mau melibatkan diri pada kegiatan itu pastilah orang-orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap masa depan kebudayaan bangsanya. Oleh karena itu ketiga peristiwa itu tidak hanya merupakan peristiwa sejarah politik bangsa, tetapi juga merupakan peristiwa sejarah budaya bangsa. Bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai lahirnya "manifes kebudayaan" pada zaman kita sedang dijajah.

Tetapi di balik itu ada pandangan lain yang berbeda. Dalam jumpa pers menjelang diselenggarakannya Seminar Kebudayaan bertajuk "Dinamika Kebudayaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", 5 Juli 2007 di Balai Kartini, oleh Ketua Seminar Ir. Luluk Sumiarso (Penasihat Paguyuban Puspo Budhoyo) diinformasikan bahwa ada sebagian orang yang tidak setuju jika Kongres Kebudayaan (KK) tanggal 5 Juli 1918 disebut sebagai awal KK Indonesia dan sebagai tonggak sejarah kebudayaan bangsa. Mereka juga menolak usul tanggal diselenggarakannya KK ke-1 (tanggal 5 Juli) dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk dijadikan **Hari Kebudayaan Bangsa Indonesia**. Mereka menilai KK itu hanya merupakan KK Jawa saja. Konon berita tentang kongres yang "hanya Jawa" itu sampai juga pada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk pendapat yang menyatakan tidak setuju jika tanggal 5 Juli dipilih menjadi Hari Kebudayaan Bangsa dapat difahami, karena masih banyak kemungkinan tanggal peristiwa budaya penting yang lain untuk dijadikan pilihan. Tetapi untuk pandangan yang menyatakan bahwa KK 1918 (sebelum Indonesia merdeka) hanya KK Jawa semata (dalam arti sempit dan bernada anti Jawa) sangat perlu untuk diluruskan, guna mencegah menjalarnya virus kesalahpahaman.

Pandangan seperti itu sebenarnya sudah muncul sejak KK 2003 di Bukittinggi. Setelah penulis menyajikan makalah berjudul "KK Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka: Tinjauan dari segi konsep, kebijakan dan strategi", harian Republika

menurunkan tulisan dengan judul "Kongres Kebudayaan, Sebuah Langkah Patah-patah". Di dalamnya disebutkan bahwa peristiwa KK yang diselenggarakan selama ini sebagai sebuah ironi. Bunyi berita selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Inilah ironi yang terjadi dalam perjalanan Kongres Kebudayaan yang beberapa hari lalu (19-22 Oktober) menggelar kongres di Bukittinggi, Sumatera Barat. Sebelum kemerdekaan, dalam waktu 19 tahun, Indonesia (baca: Jawa) melaksanakan tujuh kali kongres. Setelah merdeka, dalam rentang 55 tahun, hanya lima kali. Selama 85 tahun telah terlaksana 12 kali KK, lebih dari separuh bicara soal kebudayaan Jawa".

Pada bagian lain Republika menulis:

"Telah menjadi kenyataan bahwa KK di Indonesia didominasi Jawa. KK sebelum kemerdekaan adalah KK Jawa dan setelah kemerdekaan setali tiga uang. Jika ingin melabelinya dengan KK Indonesia, maka hal itu hanya bisa dilekatkan pada KK ke IV tahun 1991, meski di sana, dominasi masih dipegang oleh utusan dari Pulau Jawa". (Republika, 26/10/2003).

Sepintas pandangan seperti ini memang tidak salah, karena senyatanya kongres 1918 diberi judul KK Jawa, digagas oleh orang Jawa, dan diselenggarakan oleh kaum terpelajar Jawa, berlokasi di tanah Jawa. Tetapi amatlah dangkal jika pandangan seperti itu hanya didasarkan pada alasan-alasan di atas. Bicara soal Jawa, pendirian BO tanggal 20 Mei 1908 juga memiliki latar belakang sejarah yang sama dengan KK tersebut. Tanggal 20 Mei telah diakui sebagai awal tumbuhnya kesadaran berbangsa dimotori oleh cendekiawan bumiputra (kebanyakan Jawa) dan bersemi di Surakarta (Jawa). Juga tidak tepat apabila pandangan itu hanya didasarkan pada label kongres, yakni KK Jawa. Dalam kenyataan yang memulai untuk menyelenggarakan kongres adalah Jawa. Jika ada KK yang lain yang diselenggarakan oleh non-Jawa seperti misalnya: KK Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Sasak, Ambon atau yang lain, pastilah peristiwa itu akan dicatat dan mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang sama sebagai bagian dari sejarah perjalanan kebudayaan kita.

Tentu amatlah berlebihan jika dituntut adanya suatu kongres itu dapat diakui sebagai KK Indonesia jika tidak menggunakan label KK suku bangsa Jawa. Lebih-lebih jika dituntut harus berlabel KK Indonesia, sebuah persyaratan seperti itu tentu tidak mungkin terpenuhi, karena pada saat itu (1918) kondisi kita sedang menjadi bangsa dijajah dan bangsa Indonesia itu sendiri belum lahir. Pemerintah Belanda pasti akan melarang bila kongres saat itu berlabel "Indonesia". Sebagaimana dipaparkan pada Bagian I Bab II, pada KK 1919 telah terjadi perubahan yang mendasar berupa perluasan bidang budaya yang dibahas. Tidak hanya semata-mata membahas kebudayaan Jawa saja tetapi juga kebudayaan Sunda, Madura dan Bali. Bahkan sejak KK 1918 pokok pembahasa sudah menyebut kebudayaan Indonesia.

Bagian penting yang perlu disimak bukanlah terletak pada masalah label kongres saja, tetapi juga masalah isi dan materi yang diperbincangkan dalam kongres itu. Apakah dari kongres-kongres itu mampu menghasilkan konsep, kebijakan maupun

strategi untuk memajukan kebudayaan suku bangsa dan menumbuhkan kesadaran berbangsa atau sebaliknya, kongres itu malahan menghasilkan konsep, kebijakan dan strategi yang memberi peluang masuknya pengaruh kebudayaan penjajah terhadap kebudayaan bangsa?

Untuk menutup paparan ini ada dikutip lagi pendapat Samuel Koperberg bahwa kongres kebudayaan sebelum Indonesia merdeka bertujuan mengembangkan kebudayaan sebagai alat untuk memperkuat kepribadian bangsa ke depan. Kongres kebudayaan juga merupakan salah media untuk kebangunan kebudayaan dan menjadi unsur penting dalam renaissans orang Jawa. Pendirian itu dituangkan dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada Sutan Sjahrir tertanggal 17 Agustus 1946, yang berbunyi antara lain: "... tujuan utama saya adalah kebangunan kebudayaan sebagai unsur penting dalam renaissans orang Jawa". (Jaap Erkelens, 2001: hal. 13).



Sejumlah aktivis mahasiswa menggelar tari topeng saat berunjukrasa mengkritisi kongres kebudayaan Madura, di Sumenep, Jatim, Jumat (21/12). Mereka menolak Kongres Kebudayaan Madura II, karena ditengarai hanya untuk kepentingan politik kelompok tertentu. FOTO ANTARA/Saiful Bahri/ss/ama/12. Rencana penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Minangkabau Juli 2010 di Balai Sidang Bung Hatta, Bukit Tinggi oleh Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (GEBU MINANG) batal karena tidak mendapatkan dukungan dari kalangan budayawan, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, pers Sumatera Barat, dll. Kongres Kebudayaan Minahasa 2009 yang dipersiapkan di Jakarta konon juga batal diselenggarakan.

BAB IV

PENUTUP

Sembilan puluh lima tahun perjalanan sejarah Kongres Kebudayaan di Indonesia bukanlah perjalanan yang singkat. Perjalanan panjang yang penuh dinamika dan demikian sarat dengan ragam pikiran tentang konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan bangsa itu patut dijadikan bahan renungan dan sumber inspirasi untuk merancang pemajuan kebudayaan, kebangsaan dan peradaban selanjutnya. Sebagaimana diuraikan di bagian awal, untuk membangkitkan rasa kebangsaan (nasionalisme) menuju bangsa merdeka, bebas dari cengkeraman penjajah Belanda, kaum terpelajar bumiputra (priyayi terpelajar) tidak hanya menyelenggarakan Kongres BO, Kongres Pemuda, Kongres Perempuan, Kongres Bahasa, Kongres Sarikat Islam tetapi juga Kongres Kebudayaan (KK). Dimotori oleh kaum terpelajar bumiputra yang bernaung dalam perkumpulan BO, pada tahun 1918 mereka bersepakat untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Jawa dan bukan Kongres Bahasa Jawa seperti yang diusulkan oleh Batavia. Melalui kongres, segala masalah yang berkaitan dengan konsep, kebijakan, strategi, program, kelembagaan, dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kebudayaan diperdebatkan, disimpulkan, disepakati dan dilaksanakan bersama.

Sebagai KK pertama tahun 1918, peristiwa budaya ini amat penting maknanya bagi sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang lahir sebagai bangsa yang multietnik, multikultur dan multimental. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai ragam suku bangsa (kurang-lebih ada 500 suku bangsa), berbeda bahasa (jumlahnya kurang-lebih 750 buah bahasa daerah dan dialek). berbeda-beda budaya dan adat istiadat. Indonesia disebut bangsa mental karena menda-pat pengaruh dari berbagai macam agama (Hindu, Budha, Kristen, Katholik, Islam), dari berbagai bangsa dari segala penjuru benua (India, Arab, China, Jepang, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis dll). Bangsa yang serba "multi" itu membuat kesepakatan (*consensus*) untuk menyatukan diri menjadi satu bangsa, Indonesia.

Lahirnya KK 1918 yang dapat berlangsung pada masa kolo-nial Belanda bukanlah hal yang mudah dan berjalan mulus. bukanlah gagasan untuk menyelenggarakan KK tahun 1918 menurut Takashi Shiraishi, ada 2 sumber. *Pertama*, beberapa bulan sebelum pembukaan *Volksraad*, seorang teosof terkenal bernama D. van Hinloopen Labberton

menyampaikan gagasan pemerintah Batavia kepada BO cabang Surakarta untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa. Dalam rancangan itu telah dilengkapi dengan susunan Panitia terdiri atas Ketua Panitia Pangeran Prangwadono atau Mangkoenegoro VII, serta Dr. Hoesein Djaja-diningrat, Dr. F. D. K. Bosch, dan Dr. B. Schrieke sebagai anggota. Selain itu Dr. Hazeu ditunjuk sebagai Penasihat dan anggota kehormatan. Kedua, BO cabang Surakarta telah mempunyai rencana untuk menyelenggarakan kongres untuk membahas masalah kebudayaan. Menanggapi permintaan Batavia itu Pangeran Prangwadono menolak dan tetap akan menyelenggarakan KK Jawa, bukan Kongres Bahasa Jawa. Ternyata dengan penolakan permintaan itu pemerintah Belanda menyerah dan membiarkan kaum terpelajar bumiputra menentukan pilihannya. (Takashi Shiraishi: Indonesia Volume 23, hal. 97)

Pada saat dilaksanakan pembicaraan awal tentang penyelenggaraan kongres, terjadi perdebatan yang cukup seru tentang kehadiran para intelektual bangsa Eropah dalam kongres. Semula kehadiran mereka dapat diterima sebagai penasihat kongres saja. Tetapi pada rapat kedua sejumlah peserta rapat menolak kehadiran mereka dengan alasan urusan kebudayaan adalah urusan kaum bumiputra dan bukan urusan bangsa Belanda. Setelah menemui jalan buntu, Pangeran Prangwadono tampil memberikan penjelasan dan akhirnya disetujui mereka dapat ikut terlibat dalam kongres hanya sebagai penasihat. Namun dalam perkembangan selanjutnya mereka justru diterima tidak hanya hadir sebagai penasihat tetapi malahan sebagai pemrasaran.

Perdebatan berikutnya terjadi tatkala menentukan tema kongres. Telah terjadi adu argementasi di antara para peserta rapat mengenai kebudayaan dan pendidikan yang mana yang akan dijadikan topik perbincangan dalam kongres. Di satu pihak dr. Radjiman bersikeras menghendaki materi yang dibahas adalah mengenai pendidikan kebudayaan yang menitikberatkan pada pendidikan kebudayaan Jawa asli saja. Sementara R. Sastrowidjono cenderung membahas masalah pendidikan kebudayaan yang berorientasi ke Barat. Di pihak lain Pangeran Prangwadono dan Wurjaningrat memilih jalan tengah, memilih untuk membahas masalah pendidikan kebudayaan Timur maupun Barat. Karena tidak ditemukan kesepakatan Pangeran Prangwadono kembali tampil menegaskan bahwa kondisi kebudayaan Jawa sekarang telah banyak mendapatkan pengaruh kebudayaan dari luar termasuk dari Barat. Selain itu kondisi masyarakat masih terbelakang sangat memerlukan pendidikan, termasuk pendidikan kebudayaan Timur maupun Barat. Akhirnya dicapai kompromi, tema yang dibahas dalam kongres adalah bagaimana mengem-bangkan kebudayaan Jawa (Wasino, 1994: hal. 252-253).

Dari balik perdebatan itu tercermin betapa serius kaum terpelajar menyiapkan acara kongres. Selain itu juga tercermin besarnya kepekaan mereka dalam membaca kondisi bangsa dan kebudayaan saat itu. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran kehidupan dalam ikatan satu bangsa, tumbuh pula kesadaran tentang perlunya menata pola pikir dalam melepaskan krisis kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat terjajah.

KK tahun 1918 berlangsung secara sederhana bila dilihat dari sisi konsep, materi, tujuan, peserta dan penyelenggaraannya. Tetapi peristiwa ini sepatutnya diposisikan sebagai langkah awal yang luar biasa, karena diselenggarakan pada saat dan suasana kehidupan masyarakat yang sedang mendapatkan tekanan baik secara lahir

maupun batin oleh penjajah. Selain itu, posisi KK tahun 1918 menjadi istimewa karena diselenggarakan tepat berada di tengah-tengah dua peristiwa yang sangat bersejarah bagi lahirnya bangsa Indonesia. Peristiwa *pertama* adalah lahirnya kesadaran berbangsa (Indonesia) atau sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia yang ditandai dengan berdirinya perkumpulan BO tanggal 20 Mei 1908. Peristiwa *kedua* adalah ketika para pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 atau lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Kedua peristiwa itu pada hakikatnya bukan hanya merupakan peristiwa sejarah bangsa tetapi juga peristiwa budaya yang bernilai sejarah.

Dalam melakukan penggalangan lahirnya kesadaran untuk menjadi satu bangsa, pendiri BO menggunakan pendekatan budaya sebagai strategi. Dalam memulai langkah penggalangan dr. Radjiman menggunakan filsafat dan budaya sebagai media yang paling halus untuk berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran-pikirannya, melalui ceramah dan tulisan-tulisannya. Dengan menyebarkan isu tentang "kejayaan Jawa" dan dengan "menjabarkan akar filsafat dan sistem nilai budaya Jawa" rasa nasionalisme Jawa makin meningkat. Untuk mengubah pola pikir masyarakat Jawa sebagai bangsa terjajah agar bangkit percaya diri, dalam Kongres BO tahun 1908 Radjiman mengatakan bahwa "orang Jawa tidak mungkin menjadi orang Belanda". Kata-kata itu diulang kembali ketika bertemu dengan khalayak Belanda yang tergabung dalam *Indisch Genootschap*. Di samping itu Radjiman juga menegaskan:

"Jika pribumi dipisahkan sepenuhnya dan secara paksa dari masa lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia tanpa akar, tak berkelas, tersesat di antara dua peradaban." (Denys Lombard: 2000: hal. 236).

Di zaman itu meskipun pendekatan yang digunakan masih tergolong halus (budaya) tetapi dapat dirasakan sebagai pemikiran yang cukup keras dan terbukti gemanya dapat membangkitkan rasa kebangsaan yang tinggi.

Peristiwa ini adalah peristiwa sejarah budaya yang memiliki nilai yang amat penting dan menjadi inspirasi bagi perjuangan di bidang kebudayaan selanjutnya. Di Sumatera, antara lain Sanusi Pane dan Muhammad Yamin tergerak untuk bergabung dalam barisan yang diberi nama "perlawanan budaya". Demikian pula Soekarno secara terus-menerus mendengung-dengungkan konsep "kepribadian nasional", "identitas nasional", dan "berdikari di bidang kebudayaan", dengan maksud melanjutkan dan mewujudkan cita-cita yang telah diletakkan oleh BO. Selain itu, Denys Lombard dengan mengutip pendapat A. Nagazumi mencoba menggambarkan latar belakang kelahiran BO sebagai peristiwa kesadaran budaya. Antara lain Lombard menyebutkan bahwa lahirnya BO diilhami oleh kebanggaan pada tradisi dan warisan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Selanjutnya Lombard mengatakan:

"Perasaan memiliki warisan budaya terungkap lebih jelas lagi di kalangan anggota Boedi Oetomo, yang didirikan tahun 1908 oleh beberapa priyayi yang ingin menjalin kembali hubungan dengan tradisi mereka".

Masih menurut Lombard, di dalam kebudayaan Jawa saat itu telah muncul

sikap anti pada budaya Barat dengan menyebutkan "kejawaan merupakan titik temu reaksi-reaksi anti Barat". (Denys Lombard: 2000: hal. 327). Pendapat Nagazumi yang dikutip oleh Denys Lombard berasal dari bukunya yang berjudul *The Dawn of Indonesia Nationalism: The Early Years of Budi Utomo 1908-1918*. Disamping pendapat yang dikutip di atas, ada pernyataan yang menarik pada bagian akhir buku itu. Nagazumi mencoba menjelaskan posisi organisasi BO dari sisi di luar politik. Ia menyatakan

"...tidak pada tempatnyalah menilai Boedi Oetomo hanya dari aspek politik, berdasarkan penglihatan tiadanya pengikut massal pada organisasi itu seperti halnya Sarekat Islam, misalnya. Tidak dapat diremehkanlah pencapaian-pencapaian lain Boedi Oetomo yang juga pantas dicatat. Ia terbebas dari prasangka keagamaan dan kebakuan tradisionalisme; para anggotanya selalu terpacu untuk mengejar perkembangan intelektual, menolak kesetiaan membuta yang emosional dan tidak terjerumus pada sikap apatis terhadap hal-hal spiritual" (Nagazumi, halaman 155-156).

Mengenai peristiwa kedua, ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 pada hakikatnya bukan hanya merupakan titik kulminasi dari tumbuhnya kesadaran berbangsa, tetapi juga kesadaran tentang masa depan kebudayaan bangsa. Peristiwa pengibaran bendera Merah Putih untuk yang pertama setelah bertahun-tahun tidak pernah dikibarkan diikuti dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya karya WR. Soepratman untuk yang pertama kali pula, kemudian disusul dengan pernyataan bahwa Bahasa Negara adalah bahasa Indonesia, adalah peristiwa budaya yang bersejarah. Setelah lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali di hadapan peserta kongres, pada Kongres PNI tahun 1929 lagu itu oleh Bung Karno untuk pertama kalinya disebut sebagai Lagu Kebangsaan hingga sekarang. Bahkan kemudian kedudukan Lagu Kebangsaan, Bendera Negara dan Bahasa Negara menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadi satu ketentuan pokok dalam pasal UUD 45. Terjadinya peristiwa berdirinya BO 1908, KK tahun 1918 dan Sumpah Pemuda tahun 1928 itu tidak dapat dilepaskan dari tumbuhnya kesadaran budaya bangsa. Peristiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa sejarah budaya bangsa yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi upaya pemajuan kebudayaan bangsa selanjutnya.

Dari gambaran singkat tentang betapa eratnya hubungan ketiga peristiwa budaya itu mulai dari lahirnya BO (1908), disusul oleh lahirnya KK pertama (1918) dan lahirnya Sumpah Pemuda (1928) menunjukkan betapa besarnya perhatian kaum terpelajar bumiputra terhadap kemajuan kebudayaan bangsa. Peristiwa bersejarah itu tidak hanya digerakkan oleh "orang kuasa" (*man of power*) tetapi lebih banyak digerakkan oleh semangat yang dimiliki oleh "orang budaya" (*man of culture*). Sejumlah "orang budaya" dan sejumlah "orang kuasa" yang mau melibatkan diri pada kegiatan itu pastilah orang-orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap masa depan kebudayaan bangsanya. Oleh karena itu ketiga peristiwa itu tidak hanya merupakan peristiwa sejarah politik bangsa, tetapi juga merupakan peristiwa sejarah budaya bangsa. Bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai lahirnya "manifes kebudayaan" pada zaman kita sedang dijajah.

Berlangsungnya KK tahun 1918 patut pula dicatat sebagai awal perjalanan sejarah KK di Indonesia. Peristiwa ini menjadi motor penggerak diselenggarakannya kongres-kongres berikutnya hingga sekarang. Rangkaian kongres yang berlangsung sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka, dilaksanakan oleh berbagai lembaga. Kongres tahun 1918 dimotori oleh Perkumpulan BO, kemudian diikuti oleh KK tahun 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, dan 1937 diselenggarakan oleh lembaga penelitian kebudayaan *Java Instituut*. Sesudah Indonesia merdeka KK berlangsung tahun 1948 digagas oleh Pusat Kebudayaan Kedu kemudian diambilalih oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia. Setelah berdiri Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN), KK tahun 1951, 1954, 1957 dan 1960 diselenggarakan oleh lembaga ini.

Setelah mengalami masa kevakuman selama 30 tahun tidak ada kongres (1960-1991), baru disusul oleh KK tahun 1991 diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya perubahan organisasi pemerintahan tahun 2000, bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Departemen inilah yang melanjutkan penyelenggaraan kongres tahun 2003 di Bukittinggi dan 2008 di Bogor. Sejak pemerintah mengambil prakarsa penyelenggaraan kongres tahun 1991, selalu muncul kritikan dari para seniman dan budayawan KK dengan bermacam-macam sebutan seperti: “rapat dinas” , “kongres KOPRI”, kongres para birokrat” dll.

Sebagai penutup dapat disimpulkan, forum kongres atau konferensi merupakan pilihan yang tepat sebagai ajang pertemuan untuk membahas dan menyepakati konsep, kebijakan dan strategi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Inisiatif untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan I tahun 1918, datang dari kalangan terpelajar bumiputra, dalam hal ini diprakarsai oleh Pangeran Prangwadono dan dilaksanakan bersama dengan kaum terpelajar lainnya. Untuk selanjutnya, penyelenggaraan KK tahun 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, dan 1937 disiapkan dan dilaksanakan oleh lembaga penelitian kebudayaan *Java-Instituut*.

Sementara itu untuk penyelenggaraan KK I setelah Indonesia merdeka tahun 1948, diprakarsai oleh kelompok budayawan, seniman, cendekiawan yang sebagian terlibat dalam dalam KK sebelum Indonesia merdeka. Sebelum kongres itu berlangsung terlebih dahulu diselenggarakan musyawarah kebudayaan di Sukabumi, tahun 1945 dan konferensi kebudayaan di Kedu 6 Mei tahun 1948. KK II tahun 1951, disiapkan dan dilaksanakan, Lembaga Kebudayaan Indonesia, sedangkan KK tahun 1954 disiapkan dan dilaksanakan oleh BMKN. Pada KK tahun 1991, inisiatif penyelenggaraan KK datang dari pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan selanjutnya dalam menyiapkan materi kongres dilakukan bersama-sama dengan unsur budayawan, seniman, cendekiawan dan pemangku adat.

Sebagai awal dari serangkaian kongres-kongres kebudayaan, KK I tahun 1918, cakupan masalah yang dibahas masih terbatas pada kebudayaan Jawa, dan dalam kongres selanjutnya semakin meluas, termasuk kebudayaan Sunda, Madura dan Bali. Aktivitas ini merupakan peristiwa budaya yang amat bersejarah bagi sejarah kebudayaan Indonesia. Kongres ini telah menjadi motor penggerak untuk mendorong diselenggarakannya kongres-kongres kebudayaan berikutnya.

Kongres Kebudayaan tahun 1918 diselenggarakan di pertengahan masabangkitnya

kesadaran nasional (1908) dan masa puncak kesadaran ber-bangsa yang diwujudkan dalam ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Seiring dengan bangkitnya kesadaran berbangsa, bangkit pula kesadaran kaum terpelajar terhadap nasib kebudayaannya. Sebaliknya, dengan bangkitnya kesadaran tentang nasib kebudayaannya, dengan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan makin memperkuat semangat persatuan untuk menjadi satu bangsa. Dengan demikian antara kesadaran berbudaya dan kesadaran berbangsa atau sebaliknya, memiliki hubungan timbal balik yang dekat.

Meskipun jarak waktu antara kongres sebelum dan sesudah Indonesia merdeka amat berjauhan, tetapi bila ditilik dari tujuannya memiliki kesamaan. Sama-sama mencari format yang tepat untuk memajukan kebudayaan bangsa. Pandangan yang dilontarkan dalam Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka merupakan embrio lahirnya pemikiran tentang konsep, kebijakan dan strategi pembinaan kebudayaan Indonesia yang masa kini.

Dari gambaran tentang materi yang telah dibahas dalam kongres ke kongres masih terdapat bagian penting yang perlu diperbincangkan pada Kongres Kebudayaan berikutnya. Demikian pula halnya dengan rumusan dan rekomendasi dari kongres-kongres yang telah dilaksanakan, sebagian telah ditindaklanjuti dengan langkah dan tindakan yang kongkrit, tetapi juga masih terdapat rumusan dan rekomendasi yang perlu mendapatkan pertimbangan untuk realisasinya. Kongres-kongres itu memang telah lama sekali berlalu, tetapi berbagai pemikiran yang dirumuskan apabila digali lebih dalam lagi tidak tertutup kemungkinan ditemukan butir-butir yang berbobot dan bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada masa sekarang.

Sampai dengan 2013 memang sudah banyak kongres dan koferensi kebudayaan yang diselenggarakan (231kali). Meskipun sudah sering diselenggarakan tetapi mengenai masalah kebudayaan tidak akan habis dikupas dalam satu dua kongres kebudayaan. Seperti dikatakan oleh Bung Hatta, seumur hidup soal kebudayaan tidak akan habis dikupas. Kebudayaan itu sesuatu yang hidup dan segala yang hidup, tumbuh dan berkembang senantiasa menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu setiap kali kongres akan muncul pertanyaan: Ke mana arah kebudayaan kita? Pertanyaan serupa juga akan muncul pada Kongres Kebudayaan 2013 di Yogyakarta.

Jakarta, 19 Agustus 2013

Tabel 10
**DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) MUSEUM NEGERI PROVINSI
 SELURUH INDONESIA**

No.	Nama Museum	Kabupaten/ Kota	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Museum Nasional (1778)	Jakarta	Kepmendikbud No. 093/O/1979 tgl. 29 Mei 1979.	Berdiri sejak 1778, beberapa kali mengalami perubahan nama dari Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen menjadi à Lembaga Kebudayaan Indonesia à Museum Pusat à Museum Nasional.
2.	Museum Kebangkitan Nasional (1984)	Jakarta	Kepmendikbud No. 030/O/1984 tgl. 7 Februari 1984	Kepmendikbud No. 058/U/1983 tgl. 12-12-1983 sebagai BCB.
3.	Museum Sumpah Pemuda (1984)	Jakarta	Kepmendikbud No. 029/O/1984 tgl. 7 Februari 1984	Kepmendikbud No. 057/U/1983 tgl. 12-12-1983 sebagai BCB.
4.	Museum Perumusan Naskah Proklamasi (1992)	Jakarta	Kepmendikbud No. 0476/O/1992 tgl. 24 November 1992	Kepdirjenbud No. 05/F1.IV/ R.82, tgl. 12-6-1982, tentang Penggunaan Sementara untuk Kantor Perpustakaan Nasional.
5.	Museum Basuki Abdullah (1999)	Jakarta	Kepmendikbud No. 257/O/ 1999 tgl. 13 Oktober 1999	
6.	Museum Benteng Yogyakarta/ bekas benteng Vredeburg (1992)	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0475/O/1992 tgl. 23 November 1992	
7.	Museum Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh (1979)	Banda Aceh	Kepmendikbud No.093/O/1979 tgl. 29 Mei 1979	Sekarang bernama Provinsi Nangroe Aceh Darussallam
8.	Museum Negeri Provinsi Sumatra Utara (1992)	Medan	Kepmendikbud No. 0134/O/1982 tgl. 17 April 1992	

9.	Museum Negeri Provinsi Riau (1991)	Pakan Baru	Kepmendikbud No.001/1991 tgl. 9 Januari 1991	
10.	Museum Negeri Adityawaran, Provinsi Sumatra Barat (1979)	Padang	Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979.	Diresmikan pada 16 Maret 1977 oleh Mendikbud Prof. Dr. Syarif Thayeb
11.	Museum Negeri Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Kepmendikbud No. 0754/O/1987 tgl. 2 Desember 1987	
12.	Museum Negeri Provinsi Jambi	Jambi	Kepmendikbud tgl. 6 Juni 1988	
13.	Museum Negeri Provinsi Sumatra Selatan Bala Putra Dewa	Palembang	Kepmendikbud tgl. 5 November 1984	
14.	Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai	Tanjung Karang	Kepmendikbud No. 0754/O/1987 tgl. 2 Desember 1987	
15.	Museum Negeri Provinsi Jawa Barat SRI BADUGA	Bandung	Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979	
16.	Museum Negeri Provinsi DI Yogyakarta Sonobudoyo (1935)	Yogyakarta	Diperbarui dengan Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979	
17.	Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah Ronggowarsito	Semarang	Kepmendikbud No. 0754/O/1987 tgl. 2 Desember 1987	
18.	Museum Negeri Provinsi Jawa Timur Mpu Tantular (1933)	Surabaya	Diperbarui dengan Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979	
19.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur MULAWARMAN (1979)	Tenggarong	Kepmendikbud No. 092/O/1979 tgl. 28 Mei 1979	
20.	Museum Negeri Pro-vinsi Kalimantan Tengah BALANGA	Palangkaraya	tgl. 6 April 1973	

21.	Museum Negeri Pro-vinsi Kalimantan Barat	Pontianak	tgl. 2 April 1988	
22.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat (1979)	Banjarmasin	Kepmendikbud No. 092/O/1979	
23.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara Wanua Paksinata (1991)	Manado	Kepmendikbud No. 001/1991 tgl. 9 Januari 1991	
24.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah (1991)	Palu	Kepmendikbud No. 0754/O/1987 tgl. 2 Desember 1987	
25.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan LA GALIGO (1979)	Makassar	Kepmendikbud No. 093/O/1979	
26.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara (1991)	Kendari	Kepmendikbud No.001/1991 tgl. 9 Januari 1991	
27.	Museum Negeri Provinsi Bali (1936)	Denpasar	Kepmendikbud No. 092/O/1979	
28.	Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat (1982)	Mataran	Kepmendikbud No. 022/O/1982 tgl. 21 Januari 1982	
29.	Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur (1991)	Kupang	Kepmendikbud No.001/1991 tgl. 9 Januari 1991	
30.	Museum Negeri Siwa Lima Provinsi Maluku (1979)	Ambon	Kepmendikbud No. 092/O/1979	
31.	Museum Negeri Provinsi Irian Jaya	Jayapura	Kepmendikbud tgl. 23 Oktober 1990	Sekarang bernama Provinsi Papua

Tabel 11

**DAFTAR UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) PENELITIAN ARKEOLOGI
(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2001)**

No.	Nama UPT	Lokasi	Keputusan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1	Balai Arkeologi Yogyakarta	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0207/O/ 1978 tgl. 23 Juni 1978	DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
2.	Balai Arkeologi Bali	Denpasar	Kepmendikbud No. 0207/O/ 1978 tgl. 23 Juni 1978	Bali NTB, NTT, dan Timtim
3.	Balai Arkeologi Jawa Barat	Bandung	Kepmendikbud No. 0290/O/ 1992 tgl. 1 Juli 1992	Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Barat
4.	Balai Arkeologi Sumatra Selatan	Palembang	Kepmendikbud No. 0290/O/ 1992 tgl. 1 Juli 1992	Sumatra Selatan, Jambi, dan Bengkulu
5.	Balai Arkeologi Sulawesi Utara	Manado	Kepmendikbud No. 0290/O/1992 tgl. 1 Juli 1992.	Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
6.	Balai Arkeologi Sumatra Utara	Medan	Kepmendikbud No. 0274/O/1993	Sumatra Utara, DI Aceh, Riau, Sumatra Barat
7.	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kepmendikbud No. 0274/O/1993	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah
8.	Balai Arkeologi Sulawesi Selatan	Makassar	Kepmendikbud No. 0274/O/1993	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
9.	Balai Arkeologi Maluku	Ambon	Kepmendikbud No. 015/1995 tgl. 10 Februari 1995	Maluku
10	Balai Arkeologi Irian Jaya (sekarang bernama Provinsi Papua)	Jayapura	Kepmendikbud No. 015/1995 tgl. 10 Februari 1995	Irian Jaya

Tabel 12

**DAFTAR UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) BIDANG KEPURBAKALAAN
(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012)**

No.	Nama	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala mulai tahun 2003 berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Aceh Nangroe Aceh Darussallam	Banda Aceh	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7 Desember 1989	Wilayah kerja: DI Aceh dan Sumatra Utara
2.	BP3 Sumatra Barat	Batusangkar	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Sumatra Barat dan Riau
3.	BP3 Jambi	Jambi	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu
4.	BP3 Jawa Barat	Serang/Banten	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung

5.	BP3 Jawa Tengah	Prambanan	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No.0200/O/1978, diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0645/O/ 1985, tgl. 26/12/ 1985, diperbarui dgn. Kepmendikbud No. 0767/ O/1989, tgl. 7/12/1989	Wilayah kerja Jawa Tengah
6.	BP3 DI Yogyakarta	Bogem	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbarui Kepmendikbud No. 645/O/ 1985, 26 Desember 1985 dengan Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tgl. 7/12/ 1989	Wilayah kerja DI Yogyakarta
7.	BP3 Jawa Timur	Mojokerto	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No.0200/O/ 1978, diperbarui Kepmendikbud No. 0645/O/ 1985, tgl. 26/12/1985, mejadi Kepmendikbud No. 0767/ O/1989, tgl. 7/12/1989	Wilayah kerja Jawa Timur
8.	BP3 Bali	Gianyar	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002 pengganti Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbarui Kepmendikbud No. 0645/O/ 1985, tgl. 26/12/1985,dan diperbarui dgn. Kepmendikbud No. 0767/ O/1989, tgl. 7/12/1989	Wilayah kerja, Bali, NTB, NTT dan Timim

9.	BP3 Sulawesi Selatan (1989)	Makassar	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbarui Kepmendikbud No. 0645/O/-1985, tgl. 26/12/1985, dan diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0767/-O/1989, tgl. 7/12/1989	Wilayah kerja: Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
10.	Balai Studi dan Konservasi di Borobudur (1991)	Borobudur, Magelang	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003 pengganti SK Kepala Badan Pengembangan Budpar No. KEP-06/BP Budpar /2002 tgl. 21/8/2002, pengganti Kepmendikbud No. 0605/ O/1991, tgl. 30/11/1991	Wilayah kerja, seluruh Indonesia
11.	BP3 Gorontalo	Gorontalo	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003	Wilayah kerja: prov. Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
12.	BP3 Samarinda	Samarinda	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003	Wilayah kerja: seluruh provinsi di pulau Kalimantan.
13.	BP3 Ternate	Ternate	Kepmenbudpar No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tgl. 5/12/2003.	Wilayah kerja: provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
14.	Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran	Sangiran, Jawa Tengah	Peraturan Mendikbud No. 54 tahun 2012, tgl. 20/7/2012, pengganti Kepmenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2007	

Tabel 13

**DAFTAR UPT BIDANG SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
(KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2003)**

No.	Nama	Lokasi	Keputusan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh mulai tahun 2003 berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Nangroe Aceh Darussalam	Kepmendikbud No. 0486/O/1989 tgl. 14-8-1989 diperbarui dengan Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12-2001, diper-barui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permen Budpar No. PM.17/ HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara
2.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Tanjung Pinang, Riau	Kepmendikbud No.0486/O/1989, tgl. 14-8-1989, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12-2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Riau, Jambi, dan Bang Belitung
3.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Sumatra Barat	Kepmendikbud No. 305/O/ 1997 tgl. 27-11-1997, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12-2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar, No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Sumatra Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan

4.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Jawa Barat	Kepmedikbud No.0486/O/1989, tgl. l 4-8-1989, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-200, diperbarui dgn Permenbbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/OT.001/MKP-2006	Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung
5.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	DI Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0208/O/ 1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No.0140/O/1981 tgl. 14 -4- 1981, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003 dan Kepmenbudpar No. KM.52/ OT. 001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003 diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/OT.001/MKP-2006	DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah.
6.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Sulawesi Selatan	Kepmendikbud No. 0208/O/ 1978 dan diperba- rui dgn Kepmendikbud No. 0140/ O/1981 tgl. 14-4- 1981, dipebaharui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/ OT.001/MKP/ 2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar, No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara

7.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Nilai Tradisional	Kalimantan Barat	Kepmendikbud No.0486/O/1989, tgl. l 4-8-1989, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah
8.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Bali	Kepmendikbud No.0140/O/1981, tgl. 14-4- 1981, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmen-budpar No. KM.52/ OT.001/ MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permen Budpar No. PM.17/ HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpa No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
9.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Sulawesi Utara	Kepmendikbud No.0486/O/1989, tgl. l 4-8-1989, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/OT.001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah
10.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Maluku	Kepmendikbud No. 305/O/1997 tgl. 27-11-1997, diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/OT.001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Maluku dan Maluku Utara

11.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Jayapura berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional	Irian Jaya	Kepmendikbud No. 305/O/1997 tgl. 27-11-1997 diperbarui dgn Keputusan Kepala Badan Pengemb. Kepbudpar No. KEP-01/BP.BUDPAR /2001, 13-12- 2001, diperbarui dgn Kepmenbudpar No. KM.52/OT.001/MKP/2003 tgl. 5-12-2003, diperbarui dgn Permenbudpar No. PM.17/ HK.001/MKP-2005, diperbarui dgn Permenbudpar, No. PM.17/ OT.001/MKP-2006	Papua
-----	---	------------	---	-------

Tabel 14
**DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BIDANG KESENIAN
 (KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2003)**

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Galeri Nasional (1998)	Jakarta	Kepmendikbud No. 099a/O/1998 tgl. 8 Mei 1998.	
2.	Taman Budaya DI Aceh (1978) sekarang bernama Provinsi Nangroe Aceh Darussallam	Banda Aceh	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	Diserahkan ke Pemerintah Daerah (Provinsi)
3.	Taman Budaya Sumatra Utara (1978)	Medan	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.
4.	Taman Budaya Sumatra Barat (1978)	Padang	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.
5.	Taman Budaya Kalimantan Barat (1978)	Pontianak	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.
6.	Taman Budaya Kalimantan Timur (1978)	Samarinda	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.

7.	Taman Budaya Sulawesi Utara (1978)	Manado	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978	sda.
8.	Taman Budaya Sulawesi Selatan (1978)	Makassar	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.
9.	Taman Budaya Jawa Tengah (1978)	Surakarta	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.
10.	Taman Budaya DI Yogyakarta (1978)	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.
11.	Taman Budaya Jawa Timur (1978)	Surabaya	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.
12.	Taman Budaya Bali (1978)	Denpasar	Kepmendikbud No. 0276/O/1978 tgl. 16 Agustus 1978.	sda.
13.	Taman Budaya Kalimantan Selatan (1982)	Banjarmasin	Kepmendikbud No. 0249/O/1982 tgl. 3 Agustus 1982	sda.
14.	Taman Budaya Bengkulu (1982)	Bengkulu	Kepmendikbud No. 0249/O/1982 tgl. 3 Agustus 1982.	sda.
15.	Taman Budaya Lampung (1984)	Bandar Lampung	Kepmendikbud No. 0350/O/1984 tgl. 23 Agustus 1984.	sda.
16.	Taman Budaya Jawa Barat (1991)	Bandung	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
17.	Taman Budaya Riau (1991)	Pekan Baru	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
18.	Taman Budaya Nusa Tenggara Barat (1991)	Mataram	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
19.	Taman Budaya Sulawesi Tengah (1991)	Palu	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
20.	Taman Budaya Maluku (1991) sekarang bernama Provinsi Papua Timur	Ambon	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.

21.	Taman Budaya Irian Jaya (1991)	Jayapura	Kepmendikbud No. 0221/O/1991 tgl. 23 Agustus 1991.	sda.
22.	Taman Budaya Jambi (1992)	Jambi	Kepmendikbud No. 061/O/1992 tgl. 23 Januari 1992	sda.
23.	Taman Budaya Kalimantan Tengah (1992)	Palangka- raya	Kepmendikbud No. 061/O/1992 tgl. 23 Januari 1992	sda.
24.	Taman Budaya Sulawesi Tenggara (1992)	Kendari	Kepmendikbud No. 061/O/1992 tgl. 23 Januari 1992	sda.
25.	Taman Budaya Timor Timur (1994)	Dili	Kepmendikbud No. 0197/O/1994 tgl. 11 Agustus 1994	Tahun 1999 merdeka dan pisah dari NKRI
26.	Taman Budaya Nusa Tenggara Timur (1999)	Kupang	Kepmendikbud No. 151/O/1999 tgl. 29 Juni 1999.	sda.
27.	Taman Budaya Sumatra Selatan	Pelembang	-	Belum terealisasikan
28.	Taman Budaya DKI Jakarta	Jakarta	-	Sudah memiliki Taman Ismail Marzuki
29.	Taman Budaya Provinsi Bangka Belitung	Sungailiat	-	Berdiri tahun 2000.
30.	Taman Budaya Banten	Serang	-	Berdiri tahun 2000
31.	Taman Budaya Gorontalo	Gorontalo	-	Berdiri tahun 2001
32.	Taman Budaya Maluku Utara	Sofifi	-	Berdiri tahun 1999
33.	Taman Budaya Papua Barat	Manokwari	-	Berdiri tahun 2003
34.	Taman Budaya Papua Tengah	Timika	-	Berdiri tahun 2003

Tabel 15
**DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BIDANG BAHASA
 (KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2004)**

No.	Nama	Provinsi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Balai Bahasa Yogyakarta	DI Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0272/O/1978 tgl. 12 Agustus 1978	
2.	Balai Bahasa Makassar	Silawesi Selatan	Kepmendikbud No. 0272/O/1978 tgl. 12 Agustus 1978	
3.	Balai Bahasa Denpasar	Bali	Kepmendikbud No. 0272/O/1978 tgl. 12 Agustus 1978	
4.	Balai Bahasa Padang	Sumatra Barat	Kepmendikbud No. 022/O/ 1999 tgl. 28 Januari 1999	
5.	Balai Bahasa Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Kepmendikbud No. 022/O/ 1999 tgl. 28 Januari 1999	
6.	Balai Bahasa Jayapura	Irian Jaya	Kepmendikbud No. 022/O/ 1999 tgl. 28 Januari 1999	
7.	Balai Bahasa Surabaya	Jawa Timur	Kepmendikbud No. 022/O/1999 tgl. 28 Januari 1999	
8.	Balai Bahasa Bandung	Jawa Barat	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
9.	Balai Bahasa Semarang	Jawa Tengah	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
10.	Balai Bahasa Banda Aceh (Nangroe Aceh Darussallam)	DI Aceh	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
11.	Balai Bahasa Medan	Sumatra Utara	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	

12.	Balai Bahasa Pekanbaru	Riau	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
13.	Balai Bahasa Palembang	Sumatra Selatan	Kepmendikbud No. 226/O/1999 tgl. 23 September 1999	
14.	Kantor Bahasa Pontianak	Kalimantan Barat	Kepmendikbud No. 227/O/1999 tgl. 23 September 1999	
15.	Kantor Bahasa Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Kepmendikbud No. 227/O/1999 tgl. 23 September 1999	
16.	Balai /Kantor Bahasa Manado	Sulawesi Utara	Kepmendikbud No. 227/O/1999 tgl. 23 September 1999	
17.	Balai /Kantor Bahasa Palu	Sulawesi Tengah	Kepmendikbud No. 227/O/1999 tgl. 23 September 1999	
18.	Kantor Bahasa Jambi	Jambi		
19.	Kantor Bahasa Kendari	Sulawesi Tenggara		
20.	Kantor Bahasa Bandar Lampung	Lampung		
21.	Kantor Bahasa Mataram	Nusa Tenggara Barat		
22.	Kantor Bahasa Samarinda	Kalimantan Timur		

Tabel 16
 DAFTAR JUMLAH SELURUH MUSEUM DI INDONESIA
 SAMPAI DENGAN 2012

No.	PROVINSI	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Nangro Aceh Darussalam	4	Dari seluruh museum, sbb: <i>Status:</i> Museum pemerintah dan swasta <i>Jenis:</i> Museum umum dan khusus <i>Tingkat:</i> Nasional dan lokal
2	Sumatera Utara	12	
3	Sumatera Barat	9	
4	Riau	5	
5	Jambi	2	
6	Sumatera Selatan	5	
7	Bangka Belitung	1	
8	Bengkulu	2	
9	Lampung	2	
10	DKI Jakarta	54	
11	Jawa Barat	21	
12	Jawa Tengah	35	
13	DI Yogyakarta	26	
14	Jawa Timur	23	
15	Bali	25	
16	Nusa Tenggara Barat	4	
17	Nusa Tenggara Timur	7	
18	Maluku Utara	2	
19	Papua	5	
20	Maluku	3	
21	Sulawesi Utara	2	
22	Sulawesi Tengah	2	
23	Sulawesi Tenggara	2	
24	Sulawesi Selatan	13	
25	Kalimantan Timur	3	
26	Kalimantan Selatan	2	

27	Kalikantan Tengah	2	
28	Kalimantan Barat	4	
JUMLAH		277	

Sumber: Direktori Museum di Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan 2012

Tabel 17
**DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BIDANG PERPUSTAKAAN
 (KEADAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 1999)**

No.	Nama	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Perpustakaan Nasional (gabungan dari Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah dan Politik, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, dan Bidang Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan Perpustakaan)	Jakarta	Kepmendikbud No. 0164/O/ 1980 tgl. 17 Mei 1980, Keppres No. 11	Perpustakaan Nasional statusnya berubah menjadi sebuah LPND, mengkoordinasikan Perpustakaan Wilayah
2.	Perpustakaan Wilayah Aceh (sekarang bernama Provisi Nangroe Aceh Darussalam)	Jakarta	Kepmendikbud No. 0164/O/1980 tgl. 17 Mei 1980	Digabungkan ke dalam Perpustakaan Nasional
3.	Perpustakaan Wilayah DI Jakarta	Banda Aceh	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	Setelah berlakunya UU No. 22 tahun 1999, nama perpustakaan di provinsi mengalami perubahan dan tidak seragam (ada yang namanya badan, dinas dan ada yang kantor)

4.	Perpustakaan Wilayah Sumatera Utara	Medan	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
5.	Perpustakaan Wilayah Riau	Pakanbaru	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
6.	Perpustakaan Wilayah Jambi	Jambi	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
7.	Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat	Medan Padang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
8.	Perpustakaan Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
9.	Perpustakaan Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
10.	Perpustakaan Wilayah Lampung	Tanjungkara	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
11.	Perpustakaan Wilayah Jawa Barat	Bandung	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
12.	Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
13.	Perpustakaan Wilayah DI Yogyakarta	Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
14.	Perpustakaan Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	

15.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
16.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
17.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Tengah	Palang-karaya	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
18.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
19.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
20.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
21.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
22.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
23.	Perpustakaan Wilayah Bali	Denpasar	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
24.	Perpustakaan Wilayah NTB	Mataram	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
25.	Perpustakaan Wilayah NTT	Kupang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	

26.	Perpustakaan Wilayah Timor-Timur	Dilli	Kepmendikbud No. 0379/O/1982 tgl. 2 Desember 1982	
27.	Perpustakaan Wilayah Maluku	Ambon	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
28.	Perpustakaan Wilayah Irian Jaya	Jayapura	Kepmendikbud No. 0199/O/1978 diperbarui dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	Sekarang bernama Provinsi Papua

Tabel 18
**DAFTAR LEMBAGA PERWAKILAN DI LUAR NEGERI
 BIDANG KEBUDAYAAN**

No.	Nama Negara	Nama Lembaga	Alamat	Keter.
1	2	3	4	5
01	Prancis	<ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan Indonesia di UNESCO, Paris • Atase Pendidikan dan Kebudayaan 		
02	Amerika Serikat	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Washington DC	
03	Inggris	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	London	
04	Belanda	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Den Haag	
05	Jerman	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Bonn	
06	Mesir	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Kairo	
07	Saudi Arabia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Riyadh	
08	Thailand	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Bangkok	
09	Malaysia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Kualalumpur	
10	Filipina	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Manila	
11	Jepang	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Tokyo	
12	Australia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Canbera	
13	Papua New Guenia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Port Moresby	
14	China	Atase Pendidikan	Beijing	
15	India	Atasen Pendidikan	New Dehli	

Catatan: Nomenklatur atase pendidikan dan kebudayaan kini semuanya diganti menjadi atase pendidikan saja.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrachman, Paraminta R. 2000. *Bunga Angin Portugis di Nusantara*, Jakarta.
- Adnan Amal M. 2009. *Portugis dan Spanyol di Maluku*. Komunitas Bambu, Jakarta.
- Alwi, Hasan, Dendy Sugono, dan A. Rozak Zaidan, 2000. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional. 1954. *Laporan BMKN*, Jakarta, terbitan BMKN, Jakarta.
- . 1952-1954. *Piagam Pendirian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Terbitan BMKN Jakarta.
- Benedento, Pax (penyunting). 1999. *Kronik Revolusi Indonesia, Bagian I (1945)*. KPG Jakarta.
- Budianta, Eka. 1993. *Dari Kongres ke Kongres*, Jakarta.
- Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, Programma en Tekstboekje Prae-Adviezen. 1918. Stoomdrukkrij CA. MISSET, Semarang.
- Darsiti Soeratman. 2000. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Yayasan untuk Indonesia, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Balai Pustaka Jakarta.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1994. *Kebudayaan Bagian II: Taman Siswa*, Jogjakarta.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan. 1991. *Buku Panduan Kongres Kebudayaan 1991*: Jakarta.
- . 1992. *Kongres Kebudayaan 1991*: Jakarta.
- . 1973. *Pokok-Pokok Kebijakan Kebudayaan*: Jakarta.

- . 1995. *Panduan Kongres Kesenian Indonesia I (1995)*: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dewan PGRI, Pengurus Besar PGRI. 1957. *Kebudayaan dan Konsitusi* : Jakarta.
- Edi Sedyawati, Nunus Supardi, Saini KM (Editor). 2004. *Retrospeksi dan Ancangan Ke Depan: Proceeding Kongres Kesenian Indonesia I 1995*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.
- Endepols, J. 1939. *Verklarend Handwoordenboek Der Nederlandse Taal*, JB. Wolters-Groningen, Batavia.
- Erkelens, Jaap. 2001. *Java-Instituut Dalam Foto*, Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkekunde (KITLV) di Indonesia.
- Gouda, Frances. 2007. *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942*. PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Hasse, Helle S. Hasse (Pengantar). 2006. *Madelon Djajadingrat: Voost tussen twee werelden, Uitgeverij Conserve*: Den Haag.
- Joesoef, Daoed Prof. Dr. 2004. *Borobudur*, Jakarta.
- Kayam, Umar, Prof. Dr. 1995. *Perjalanan Fungsi Seni dalam Masyarakat (Makalah)*, Kongres Kesenian Indonesia I, Jakarta.
- Kraemer, H. 1932. "Het Instituut voor de Javaansche Taal te Soerakarta", Djawa.
- Kratz, Ulrich E. 1970. *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Kuntowijoyo. 2004. *Raja, Priyayi dan Kawula: Surakarta 1900-1915*,
- Lombard, Denys. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Menteri Negara Penyempurnaan dan Pemberdayaan Aparatur Negara RI. 1971. *Almanak Negara RI 1971: Hal Ihwal Organisasi dan Susunan Aparatur Negar*. Jakarta.
- Milone, Pauline D. (1966-67). 1967. *Indische Culture And Its Relationship To Urban Life, dalam Comparative Studies In Society & History*, vol.9, Jul-Oct, 1967.
- Moeljanto DS.dan Taufiq Ismail. 1995. *Prahara Budaya: Kilas Balik Offensif Lekra/PKI Dkk*. Penerbit Mizan dan HU Republika.
- Melalatoa, M. Junus. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995

- Muhadjir (Ed.). 1987. *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.
- Muhono. 1966. *Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara yang Penting Anggauta Angkatan Bersendjata*: Jakarta.
- PaEni, Mukhlis. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Bahasa, Sastra, dan Aksara*: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.
- Peransi, DA. 1985. *Retradisionalisasi dalam Kebudayaan*: Prisma, No. 6 tahun 1985
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Panduan Konferensi Bahasa Daerah*: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- . 1988. *Buku Panduan Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988*: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Rusyana, Yus. 2000. *Penghargaan Bahasa dan sastra Daerah (Makalah):Konferensi Bahasa Daerah*, Bandung.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*: Jakarta.
- Soekiman, Djoko Prof. Dr. 2000. *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*.
- Suwardi MS, Prof. H. 2008. *Dari Melayu ke Indonesia*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Raffles, Thomas Stamford. 2008. *The History of Java* /Terjemahan, Jakarta.
- Sekretariat Lembaga Sensor Film. 2003. *SENSOR*: Lembaga Sensor Film, Jakarta.
- Slametmuljana, Prof. Dr. 1959. *Politik Bahasa Nasional*: Jambatan Jakarta.
- Soebaryo Mangunwidodo. 1994. *Dr. KRT Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa 1879-1952*: Gramedia, Jakarta.
- Sugono, dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supardi, Nunus. 2007. *Kongres Kebudayaan (1918-2003)*: Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Swantara, P. 2002. *"Dari Buku ke Buku, Sambung Menyambung Menjadi Satu"*: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Shiraishi, Takashi. *The Disputes Between Tjipto Mangoenkoesoemo and Soetatmo Soeriokoesoemo: Satria VS. Pandita*, Indonesia Volume 23.

- Universitas Gajah Mada. 1970. *Buletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan*: Yogyakarta.
- Wasino. 1994. *Kebijakan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran: Studi tentang Strategi Pemerintahan Tradisional dalam Menanggapi Perubahan Sosial (Akhir Abad XIX – Pertengahan Abad XX)*: Yogyakarta (Thesis)
- Wijaya, Putu. 1997. *NgEH: Kumpulan Esai*: Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Wojowasito, S., Prof. Drs. 2001. *Kamus Umum Belanda-Indonesia: Ichtiar Baru van Hoeve*, Jakarta.
- Yatim, Rais Dr. 2013. *Menjulung Tamadun Nusantara*. Yayasan Ikatan Rakyat Malaysia-Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Yusa Biran, Misbach. 2000. *Sejarah Film 1900-1950*: Jakarta.
- Zuhdi, Susanto, Prof. Dr. (Ed). 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah*, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

SURAT KABAR/MAJALAH/BROSUR

1. Ambon Ekspres 27 Juli 2010
2. Angkatan Bersenjata, 22/10/1968
3. Bintang Timur, 2/1964
4. De Locomotief, 1918
5. Harian Aceh, 21 Maret 2007
6. Kompas, 23/5/1978
7. Kompas, 2 Juli 201
8. Media Indonesia 19/10/2003
9. Sinar Harapan, 3/4/1968
10. Singgalang, 20/10/2003
11. Suara Merdeka, 23/10/2003
12. Surabaya Post, 15/10/2010
13. Suara Karya, 9 Oktober 2005
14. Padang Media, Sabtu 4/9/2010
15. Pikiran Rakjat, 19 Mei 1952
16. Pikiran Rakyat, 24/9/2005
17. Surat kabar Kebangoenan, 22/6/1938
18. Majalah Arkeologi No. 9, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1990.
19. Majalah Budaja, 1950, 1954.
20. Majalah DJAWA, Java-Instituut, tahun 1921, 1924, 1926, 1927, 1928, 1938.
21. Majalah Indonesia, Nomor Kongres (No. I-II), Tahun I, Lembaga Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1950.
22. Majalah Indonesia, Nomor Konferensi (No. 4-5), Tahun I, Lembaga Kebudayaan Indonesia, 1950.

23. Majalah Indonesia, No. 1-2-3, Tahun II, Lembaga Kebudayaan Indonesia, 1952
24. Majalah SRI POESTAKA, Balai Pustaka, Jakarta 1921.
25. Majalah Panji Masyarakat, No. 5, 1/11/1986
26. Majalah Prisma, No. 6 tahun 1985
27. Majalah Tempo, 2/11/2004
28. Warta Kebudayaan, BMKN 1954, 1956, 1957
29. Majalah Budaya, September-Oktober 1954.

SUMBER INTERNET

1. Sumber: The meeting URL is <http://tc.uksw.edu/kipbipa-asile/>
2. Sumber: <http://inggris.upi.edu/research/sepuluh-tahun-kipbipa-refleksi-atas-politik-bahasa/>
3. Sumber: <http://kongrespancasila.com/>
4. Sumber: <http://alalabang.blogspot.com/2013/02/apa-kabarmu-tocca-toccer.html>
5. Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Lambung_Mangkurat
6. Sumber: [http://www.bpsnt-pontianak.org/index.php?pages= publikasi](http://www.bpsnt-pontianak.org/index.php?pages=publikasi)
7. Sumber: <http://www.cabiklunik.blogspot.com>
8. Sumber: Kompas.com
9. Sumber: [http://budisma.web.id/materi/sma/ sejarah-kelas-x/ perkembangan-penulisan-sejarah-di-indonesia/](http://budisma.web.id/materi/sma/sejarah-kelas-x/perkembangan-penulisan-sejarah-di-indonesia/).
10. Sumber: <http://www.ikapi.org>
11. Sumber: <http://pepadijateng.com/archive/2012/7>, diunduh, tanggal 7/3/2013
12. Sumber: <http://media.kompasiana.com>
13. Sumber: <http://kongrespancasila.com/>,
14. Sumber: <http://m.kompasiana.com>
15. Sumber: Error! Hyperlink reference not valid.
16. Sumber: [http://www.bpsnt-pontianak.org/index.php? pages= publikasi](http://www.bpsnt-pontianak.org/index.php?pages=publikasi)).
17. Sumber: Error! Hyperlink reference not valid.sejarah-kelas-x/perkembangan-penulisan-sejarah-di-indonesia/).
18. Sumber: <http://akubuku.blogspot.com/2011/09/5-ponorogo-bag-1-kongres-reog-lekra.html>
19. <http://sejarah.kompasiana.com/.../bandung-1952-10-isu-dala..>

INDEX

A

- Abdon Nababan, 311, 691
Abdul Aziz, 393, 691
Abu Hanifah, 82-83, 86, 635, 691
Ajip Rosidi, 72, 118-120, 123, 125-126, 170, 181, 408, 545, 691
Akira Nagazumi, 38, 691
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 298-299, 301, 303, 305, 336, 340, 622, 691
Ali Sastroamidjojo, 75, 77-78, 84, 604, 613, 691
Amir Sutaarga, 345-346, 691
A. Muhlenfeld, 20-21, 26, 613, 691
Anas Ma'ruf, 79, 82, 89, 104-105, 114, 401, 639, 691
Arkeologi, xviii, xxi, 258, 319-323, 409, 411, 413-415, 424, 618-621, 623-624, 637, 666, 688, 691-692
Armijn Pane, 79-80, 82, 89, 104-105, 401, 435-436, 604, 691
Asosiasi Tradisi Lisan, 576-577, 623-625, 691
atase kebudayaan, 88-89, 253, 400-401, 638, 691

B

- badan sensor, 95, 611, 631, 637, 691
Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA), 12, 691
Bahder Djohan, 75, 86, 89-91, 95, 99, 105, 401, 557, 635, 691
Bakdi Sumanto 361, 552, 691
Bambang Soemadio, 319, 691
bangsa baru, 17, 20, 35, 84, 207, 651-652, 691
bangsa budaya, 108, 691
Banjar, vii, v, xvii, 4, 55, 258, 278-282, 416, 622, 624-625, 691
Barnabas Suebu, 130, 132, 691
Basuki Resobowo, 120, 691
benang merah, vii, vi, xii, 4, 595, 598, 611-612, 615, 691
Betawi, xvii, 144, 258, 296-297, 541, 624, 691
B.K.P.A. Koesoemojoedo, 59, 691
Boejoeng Saleh, 104, 107, 114, 120, 691

Budi Susilo Soepandji, 339, 691
bumiputra, vi, iv, xiv, 4, 9-10, 12, 15, 17-18, 20, 36-37, 39, 43, 58-59, 65, 257, 325, 435-436,
595-596, 598, 603, 606-607, 612, 645-646, 648-651, 654, 657-658, 660-661, 692

C

Cerpen, xix, 430, 552-554, 622, 624, 692
chauvinisme, 24, 27, 469, 692
Cirebon, v, xix, 4, 11, 42, 430, 540-541, 595, 622, 626, 692
Dai Nippon, 11, 692
Daoed Joesoef, 3, 279, 398, 450, 645, 649, 692
De Locomotif, 21, 692
diaspora, vii, vi, xvii, 209, 239-253, 258, 384, 579, 595, 625, 692
Djokosoetono, 78-79, 600, 692
Djoko Sukiman, 10, 692
Dr. G.W.J. Drewes, 59-60, 692
Dr. R. Goris, 63, 613, 692
Dr. W.F. Stutterheim, 53, 63, 692

E

Edi Sedyawati, 144, 162, 170-171, 176, 187, 189, 193, 197-198, 323, 352, 424-425, 477, 686,
692
Eka Budiarta, 13, 169, 171, 176, 187, 191, 197-198, 363, 692
Endo Suanda, 192, 363, 367, 692
epigrafi, xviii, 258, 313, 324, 595, 620, 692

F

FDK. Bosch, 17, 39, 42, 50-51, 611, 613, 633, 692
Fuad Hassan, 132, 143, 344, 381, 468, 477, 613, 692

G

Gaos Hardjasoemantri, 99, 103-105, 120, 123, 692
Gorontalo, v, xix, 155, 164-166, 543-544, 623, 669, 672, 675, 692

H

Hasan Soemardi, 34, 692
HB Jassin, vii, 118, 120, 127, 546, 692
Heddy Shri Ahimsa Putra, 288, 692
Hoesein Djajadiningrat, 12, 17-18, 42, 52-53, 56, 58, 63, 66, 435, 516, 611-612, 633, 692

I

I Gde Ardika, 142-143, 179, 534, 692
I Goesti Bagoes Djelantik, 53, 692
Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), 258, 319, 692
Ilen Soerjanegara, 120, 692
Indies, 36, 692

Indo, 87, 92, 229, 320-321, 346, 418, 431, 436, 446-447, 469-470, 485, 546-547, 559, 567,
609, 636, 639, 692
Inlander, 646, 693
Ir. G.J. Dijkerman, 54, 693
Ir. J.L. Moens, 59, 693
Ir. Poerbodiningrat, 78, 600, 693
Ir. T. Resink, 63, 693

J

Jaap Erkelens, iv, 13, 17, 20, 56, 518-519, 612, 615, 655, 693
Java-Instituut, 56, 598-599
Jero Wacik, 143, 189, 194, 198, 272-273, 418, 633, 641, 693
John Scholte, 53, 693
J. Rottier, 20, 29-30, 693

K

Kaili, xix, 544, 595, 624, 626, 693
Kebatinan, xviii, 78, 80-81, 332-334, 338, 600, 617, 693
Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, 339, 693
Ki Hadjar Dewantara, ix, x, 62, 65, 84, 88, 227-228, 352, 400, 437, 439, 607, 609, 615,
693
Ki Hageng Soerjomentaram, 81, 84, 693
Ki Mangoensarkoro, 75, 78-79, 81, 84, 95, 600, 693
kongres tandingan, 138, 550, 693
Kunst Ambachtsschool, 42, 634-635, 651, 693

L

Lampung, vii, v, xix, 4, 152, 164-166, 173, 279, 373, 430, 518, 538-539, 552-553, 572, 595,
621-622, 664, 666-667, 671, 674, 677-678, 680, 693
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 345, 693
Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), 86, 89, 100, 402, 604, 616-617, 630, 635, 693
Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia (LKKI), 605, 693
Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia (LEKRINDO), 605, 693
Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), 605, 611, 693
Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), 261, 693
Linguistik, xix, 258, 431, 450, 458, 543, 561-563, 584, 586, 618-624, 693
Literary Society, 10, 693
Loetoeng Kasaroeng, 47-49, 693

M

Maclaine Pont, 51, 53, 613, 693
Mahfud MD, 220, 339, 693
Makassar, v, xix, 4, 55, 100, 105, 114, 147, 239, 401, 430, 439, 536-538, 543, 566, 595,
618, 621-622, 625-626, 630, 665-666, 669, 671, 674, 676, 681, 693
Mangkunegoro VII, iv, x, 4, 13, 16-17, 53, 603, 649, 693

manifes kebudayaan, 37, 122-123, 125-126, 558-560, 617, 633, 653, 660, 693
Manipol, 72, 119-123, 126, 558, 560-561, 633, 693
Mas Marco Martodikromo, 34, 693
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), 258, 316, 617, 694
Melayu, xviii, vii, vi, xx, 27, 29, 34, 38-39, 147, 165, 170, 258, 269, 282, 284, 296, 383-397,
424, 430-431, 433-435, 443, 445, 447-448, 486, 516, 518, 581-591, 647-648, 687,
694
Minang, 258, 262-263, 266, 655, 694
Moerdowo, 95, 694
Moh. Hatta, 72-73, 77, 91, 613, 646, 694
Muh. Yamin, 436-439, 613, 694
Mukhlis Paeni, 171, 187, 694
Multikultur, 168, 284, 289, 292, 694
Museum Sonobudoyo, iv, vii, 15, 43, 614-615, 634, 694

N

nasionalisme, 17, 21, 23-24, 32, 36, 145, 158-159, 211, 234, 241, 293, 318, 325, 362, 419,
469, 568, 579, 597, 650, 657, 659, 694
negara bangsa, 70, 268, 317, 347, 567, 694
Nirwan Dewanto, 130, 547, 566, 694
nonpribumi, 9, 694

O

Op ten Noort, 13, 62-63, 67, 694
orang budaya, 653, 660, 694
osing, xviii, 258, 311, 336, 694

P

PAJ Moojen, 651, 694
Pakoe Boewono VII, 9, 694
Pastoor van Lith, 31-32, 50, 694
Poerbatjaraka, 42, 435, 439, 604, 612, 694
Poesaka Djawi, 43, 694
Poesaka Soenda, 43, 694
Praboe Soeradilaga, 43, 694
prehistorisi, 4, 258, 324, 619, 694
Pribumi, 300, 307, 694
Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, i, 14, 191, 694
Pusat Kebudayaan Kedu, 74, 596, 600, 604, 616, 661, 694

R

Radjiman, iv, x, 12, 17-18, 20-21, 24-25, 30, 37-38, 50, 61, 78, 80-81, 84, 212, 331-332, 515,
600, 604, 612, 614, 651, 658-659, 694
Rais Yatim, vi, 249, 384, 694
R. Darna Koesoema, 44, 694

relevansi, 161, 579, 694
Reog Ponorogo, xviii, 381, 617, 694
Restu Gunawan, 197-198, 319, 694
RP Soejono, 324, 694

S

Said Abdullah, 268-269, 271, 625, 695
Samuel Koperberg, 613-614, 655, 695
Sapardi Djoko Damono, 13, 187, 361, 479, 565, 695
sastra Arab, 575, 695
sastra timur, 28, 30, 60, 695
Sastrowidjono, 18-20, 35, 42, 604, 612, 633, 651, 658, 695
S. Budi Santoso, 132, 418, 695
sensor film, viii, 89, 93-94, 448, 600, 610-611, 630-631, 637-638, 687, 695
Sitor Situmorang, 72, 118-119, 695
Sjafei Sumardja, 114, 695
Societëit Harmonie, 19, 695
Soebaryo Mangoenwidodo, 12, 17, 21, 24, 695
Soedharmono, 131, 613, 695
Soeharto, 131, 141, 234, 254, 344, 350, 374, 468, 613, 640, 695
Soekarno, 78, 84, 123, 126, 233-234, 333, 345, 440, 515, 559-560, 613-614, 640, 659, 695
Soenaria Sanyatavijaya, 88, 400, 695
Soenarjo Kolopaking, 79, 695
Soerjanto Poespowardojo, 597, 695
Sri Sultan Hamengkubuwono IX, 84, 695
St. Takdir Alisjahbana, 88-89, 400-401, 437-439, 695
Sukabumi, 73, 695
Sumpah Pemuda, x, 4, 13, 37, 129, 234, 418, 429, 434, 440, 450, 476, 478, 487, 494, 503, 585, 646, 653, 659-660, 662-663, 695
Sunda, x, vii, v, iv, xix, 4, 11, 15, 18, 20, 24, 27, 29, 32-37, 42, 45, 47, 49-50, 53-54, 58, 64, 257-258, 268, 278, 408-417, 423-424, 429-430, 433, 445, 515-516, 518-523, 536, 540-541, 557-558, 598, 606-607, 609, 613-621, 624-625, 647, 650, 654, 661, 695-696
Susilo Bambang Yudhoyono, 240, 242, 245, 247, 249, 272, 695
Sutan Sjahrir, 614, 655, 695
Sutarjo, 75, 695

T

Taufik Abdullah, 144, 171, 176, 187, 319, 695
Tegal, v, xix, 4, 11, 258, 430, 524, 542, 595, 622, 626, 695
Teguh Asmar, 319, 695
Thomas Karsten, 42, 51, 695
Tjipto Mangoenkoesoemo, 20-21, 23-24, 30, 32, 36, 612, 687, 695
Tjokorde Gde Raka Soekawati, 613, 695
Toeti Heraty, 144, 162, 176, 187, 695

Trisno Sumardjo, 88, 104, 114, 122-123, 400, 558, 600, 695

U

Umar Kayam, 27, 130, 132, 695

UNESCO, 94, 130, 273, 329, 335, 376-377, 379, 420, 424, 498, 517, 576-577, 683, 695

V

Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C), 8, 696

W

Wasino 13, 18, 658, 688, 696

Wiratmo Sukito, 72, 123, 696

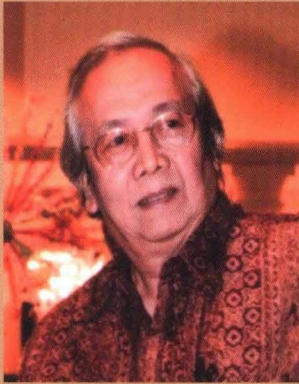
Wongsonegoro, 71, 75-79, 82, 84, 86, 91, 104-105, 333, 342, 352, 604, 613, 635, 696

WS Rendra, 550, 597, 696

Y

Yayasan Bahasa jeung Sastra Sunda (YBSS), 11, 696

Yudi Latief, 14, 696



Nunus Supardi bin Karsodimedjo lahir di Madiun, 19 Agustus 1943.

Setelah lulus sekolah rakyat (SR) 1956, sekolah guru bantu (SGB) 1959, dan sekolah guru atas (SGA) 1962 di kota kelahirannya, ia melanjutkan studinya ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang Cabang Madiun, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lulus S1 tahun 1970. Setelah meraih gelar sarjana muda, Nunus menjadi asisten dosen merangkap Kepala Tata Usaha FKSS (1965—1973). Selama di Madiun, ia pernah menimba pengalaman sebagai guru/staf pengajar di sekolah asisten apoteker, PGSLP, dan IKIP PGRI, baru kemudian pindah ke Jakarta pada 1973 menjadi staf di Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perjalanan kariernya di lembaga kebudayaan ini, antara lain pernah menjabat Kepala Bagian Perencanaan (1985-1993), Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993-1999), dan Direktur Direktorat Purbakala (1999-2001). Setelah itu, ia dipercayai menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5 Februari—14 November 2001). Sebelum memasuki purnabakti pada 2003, Nunus memangku jabatan sebagai Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (LPND).

Sebagai orang yang berperan aktif di bidang kebudayaan, Nunus pernah menjabat Sekretaris Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan 1991, serta anggota Panitia Pengarah Kongres Kesenian Indonesia 1995 dan Kongres Kebudayaan 2003 dan 2008. Pada 2009 hingga sekarang ia masih duduk sebagai anggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia dan Koordinator Penyelenggaraan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (Indonesia-Nihon Yukosai) di Jepang (1996–1997).

Setelah pensiun, Nunus masih aktif, baik sebagai Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Kesenian (BKKI), salah satu pendiri Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), maupun pendiri dan Sekretaris Jenderal Lingkar Budaya Indonesia (LBI). Dalam kurun waktu 2005–2008, ia pernah menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF), kemudian 2009 sebagai Wakil Ketua LSF periode 2009–sekarang. Pengalamannya yang lain, namanya juga tercatat sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi Museum Indonesia (AMI) dan anggota Tim Ahli Panitia Nasional Pengangkatan Benda Isi Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Departemen Kelautan dan Perikanan (2004-2009), juga salah satu anggota Dewan Juri Apresiasi Film Indonesia (AFI) dan anggota Panitia Seleksi Film Edukatif Kultural pada 2012.

Sejumlah karyanya yang sudah diterbitkan, antara lain *Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (1998), *Persahabatan Indonesia-Jepang* (1998), *Pedoman Merehabilitasi Gedung Bersejarah* (terjemahan, 2000), *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka* (2003), *Pendidikan Karakter Bangsa di Lingkungan Birokrasi* (Ketua Tim, 2004), *Kongres Kebudayaan 1918-2003* (Edisi Revisi, 2007), *Sejarah Kelembagaan Kebudayaan di Pemerintahan dan Dinamikanya* (Ketua Tim, 2004), *Lima Tahun Otonomi Bidang Kebudayaan* (Ketua Tim, 2006), *Pendidikan Apresiasi Budaya di Lingkungan Pesantren* (Ketua Tim Peneliti, 2007), *50 Tahun Tugu Nasional/Monumen Nasional* (Ketua Tim, 2011), *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* (2013).

Beberapa artikel dalam media massa (surat kabar dan majalah), termasuk makalah dan tulisannya dalam buku antologi, misalnya “Ranah Ilmu Budaya” (2004), “Archaeology: Indonesian Perspective” (2006). Menjadi salah satu penulis buku “Kapal Karam: Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon” (2008), “Sejarah Museum di Indonesia” (2010), “Indonesia dalam Arus Sejarah” (2011, Sembilan jilid), “Sejarah Sensor Film di Indonesia” (2011), “Arkeologi untuk Publik” (2012), dan “77 Tahun Wardiman Djojonegoro” (2013), dan sebagai Narasumber penulisan buku Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945-2012, sebanyak 12 jilid (2013).

